

EDITOR:

M. Suriansyah Ideham, B.A., Drs. H. Sjarifuddin,
Drs. H.A. Gazali Usman, Drs. M. Zainal Arifin Anis, M.Hum., Drs. Wajidi

Sejarah Banjar



BALITBANGDA
PROVINSI KALSEL

SEJARAH BANJAR

Hak Cipta © pada Penerbit Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

SEJARAH BANJAR

Penerbit:

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Propinsi Kalimantan Selatan

Alamat:

Jalan D.I. Panjaitan No. 34 Banjarmasin 70114
Telepon/Faksimil (0511) 3352982
Cetakan Pertama – Tahun 2003



SEJARAH BANJAR

TIM EDITOR

M. Suriansyah Ideham, B.A.
Drs. H. Sjarifuddin
Drs. H.A. Gazali Usman
Drs. M. Zainal Arifin Anis, M.Hum.
Drs. Wajidi

PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

TIM PENELITIAN/PENULIS

Pengarah : Drs. M. Sam'ani, MRP
Penanggung Jawab : H. Asmoeni A. Rachman, B.Sc.
Peneliti/Penulis : Drs. H. Sjarifuddin
Vida Pervaya Rusianti Kusmartono, S.S.
Dra. Hj. Siti Hadijah
Dr. H. Djantera Kawi
Drs. M. Zainal Arifin Anis, M.Hum.
Drs. Bambang Subiyakto, M.Hum.
Drs. H.A. Gazali Usman
Prof. Dr. H. Zurkani Yahya
M. Suriansyah Ideham, B.A.
Drs. Moh. Yusran
Drs. H. Bakhtiar Sanderta
Drs. Wajidi
H. Arthum Artha
Drs. M. Syafrullah
Drs. Yusliani Noor
H. Ali Hamdi Budhigawis
Drs. Agus Triatno
Drs. H.M. Nasa'i
Drs. H. Syamsiar Seman
H. Hamlan Arpan
Drs. Addi Maswardi
Drs. Hairiyadi, M.Hum.
H.M. Adjim Arijadi
Drs. H. Syarifuddin R.
Hj. Jurliani Djohansjah
Drs. Abdul Muhith

KATA SAMBUTAN
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Sepatutnyalah kita bersyukur dan berbangga hati menyambut kehadiran sebuah adikarya yakni buku Sejarah Banjar hasil dari kerjasama antara Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, Lembaga Budaya Banjar, Sejarawan dan Budayawan.

Inilah untuk pertama kalinya dibukukan hasil penelitian dan penulisan Sejarah Banjar Kalimantan Selatan oleh para ahlinya yang meliputi Zaman Prasejarah sampai dengan Periode “Orde Baru”.

Adanya buku ini selain akan menambah khasanah perbendaharaan buku sejarah lokal, juga diharapkan dapat melengkapi lebih banyak sejarah nasional kita yang akan memperkuat persatuan bangsa dan kesatuan negara kita yang tercinta ini.

Membaca buku sejarah ini seolah kita menyusuri kembali lorong waktu perjalanan sejarah orang Banjar di Kalimantan Selatan dengan segala dinamikanya mengalami pertumbuhan dan perkembangan hingga tampak seperti sekarang ini.

Selain untuk masyarakat Banjar yang berminat mengenal jatidiri banuanya, buku ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian ilmiah, bahan pengolahan cerita dan buku sejarah yang masih sangat sedikit untuk semua tingkatan pendidikan di daerah ini serta sebagai bahan inspirasi dan pelajaran bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Diharapkan pula dengan adanya buku Sejarah Banjar ini dapat mendorong para sejarawan, ilmuwan, cendekiawan, dan budayawan atau siapa saja untuk dapat lebih banyak meneliti atau menggali dan menulis tentang identitas daerah kita.

Kepada tim peneliti, penulis, editor dan Lembaga Budaya Banjar kami menyampaikan penghargaan atas dedikasinya sehingga buku ini dapat diwujudkan.

Kami berharap dengan terbitnya buku Sejarah Banjar ini kita dapat memiliki pemahaman yang sama atas sejarah banua kita.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

H.M. SYAHRIEL DARHAM

PENGANTAR EDITOR

Buku ini dimaksudkan menyajikan bagaimana orang Banjar di Kalimantan Selatan membangun sejarahnya dari Zaman Prasejarah hingga Periode “Orde Baru”. Sebenarnya cukup banyak tulisan tentang Sejarah Banjar dengan tema-tema tertentu yang ditulis oleh orang-orang asing atau orang Banjar sendiri. Masing-masing penulis tentunya mempunyai pandangan dan interpretasi sendiri tentang perjalanan sejarah orang Banjar.

Khusus tentang kedinamisan sejarah Kesultanan Banjarmasin, memang telah ada beberapa buah disertasi tentangnya dan bahkan koleksi berupa manuskrip berbahasa Belanda yang ada di Arsip Nasional Republik Indonesia dan di Negeri Belanda cukup banyak, akan tetapi baru sebagian kecil yang telah dimanfaatkan.

Adanya buku “Sejarah Banjar” yang melingkupi semua babakan, diharapkan dapat memperkuat identitas kesejarahan bahwa orang Banjar juga telah menghiasi lembaran Sejarah Nasional Indonesia. Sebab Sejarah Nasional Indonesia dibangun dari rekonstruksi sejarah lokal/daerah.

Sejarah orang Banjar di Kalimantan Selatan dimulai dari Zaman Prasejarah dengan asumsi, bahwa sejarah dimulai ketika manusia ada. Hal ini diungkapkan untuk menepis anggapan bahwa sejarah dimulai dengan adanya aksara. Pernyataan ini harus disikapi dengan kearifan. Betul kata Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (1995) bahwa pengertian sejarah secara positif adalah ilmu tentang manusia. Ini berarti memberikan peluang bagi masyarakat pra-Banjar yang tidak mengenal aksara untuk ditulis dalam sejarah seperti yang termuat dalam buku ini.

Buku ini dipresentasikan untuk menyajikan potret sejarah orang Banjar, akan tetapi kami menyadari sepenuhnya bahwa buku ini tidak dapat dianggap representatif. Hal ini menyangkut tiga persoalan.

Pertama, persoalan tentang kelangkaan sumber sejarah Kalimantan Selatan, khususnya yang menyangkut Zaman Prasejarah dan Zaman Kuno. Berbicara tentang sejarah berarti berbicara tentang sumber. Sumber sejarah tiada lain adalah peninggalan sejarah, yakni “bekas” yang ditinggalkan oleh peristiwa yang terjadi di masa lampau. Sedikit banyaknya “bekas” yang ditinggalkan oleh peristiwa sejarah akan ikut menentukan kejernihan dari rekonstruksi peristiwa masa lampau. Jadi dapat dipahami bahwa dalam rekonstruksi Sejarah Banjar, tidak semua kejadian dapat digambarkan secara “utuh”, dan tidak semua peristiwa yang sangat beragam yang terjadi di masa lampau layak dimasukkan ke dalam buku ini. Hal ini tentunya juga berkaitan dengan proses seleksi atau pemilihan sumber serta interpretasi dari penulis sejarah.

Kedua, persoalan penulisan sejarah orang Banjar bukan melulu persoalan sumber, akan tetapi fakta sejarahnya juga memunculkan perdebatan. Memang perdebatan tentang fakta sejarah dalam dunia akademis sampai saat ini masih selalu aktual. Perdebatan dimunculkan ketika aliran Historiografi Positivistik menyatakan, bahwa “*biarkan fakta berbicara untuk dirinya sendiri*” sebagaimana ditulis oleh Carl L. Becker, “What are Historical Facts?”, dalam Hans Myerhoff, *The Philosophy of History in Our Time: An Antology* (1959). Sejarawan yang sangat piawai menolak pendapat itu. Hematnya, “*fakta tidak dapat berbicara apapun tentang dirinya, baik dalam sejarah maupun dalam kehidupan yang lain*”. Lebih lanjut lagi, ia menegaskan, bahwa fakta sejarah bukan kejadian masa lampau itu sendiri, melainkan hanya sebuah simbol yang memungkinkan kita untuk melukiskan kembali kejadian masa lampau secara imajinatif. Fakta sejarah muncul ketika seseorang menafsirkan tentang fakta itu. Contoh, polemik tentang Pangeran Hidayatullah. Pada tanggal 31 Januari 1862 Pangeran Hidayatullah telah menandatangani surat himbauan tentang diakhirinya permusuhan antara Rakyat Banjar dengan Belanda. Fakta itu jelas bunyinya, tetapi benarkah Pangeran Hidayatullah langsung menandatangani surat itu untuk mengakhiri

permusuhan? Apakah fakta pemberitahuan untuk diakhirinya permusuhan dimaksudkan bahwa Pangeran Hidayatullah menyerah begitu saja? Apakah ia saat itu sedang mengalami tekanan psikis? Tindakan, umpatan, pikiran apa yang menyertai Pangeran Hidayatullah pada saat itu? Pendek kata, fakta sejarah tentang surat yang ditandatangani Pangeran Hidayatullah dapat ditafsirkan dalam konteks yang luas sekali, banyak nyawa, banyak harta yang menyangkut orang banyak. Dari contoh itu terlihat, bahwa fakta yang sederhana tidak menggambarkan kejadian yang sederhana. Boleh jadi mewakili seribu satu macam fakta ataupun peristiwa.

Ketiga, sifat ambivalensi dari sejarah (sifat serba dua) yakni sejarah sebagaimana kejadian di waktu lampau dan sejarah sebagaimana ia diceritakan. Dalam hal ini posisi seorang sejarawan adalah bagaimana merekonstruksi masa lampau tersebut. Akan tetapi persoalan yang mendasar adalah bahwa sejarah sebagaimana terjadi di masa lampau (*histoire realite*) tidak mungkin sama dengan sejarah sebagaimana ia diceritakan (*histoire-recite*), dan bahkan mustahil manusia sekarang merekonstruksinya secara utuh. Oleh karena itu, seorang sejarawan paling mampu hanya merekonstruksi sedekat mungkin peristiwa yang terjadi di kelampauan tersebut. Hal ini disebabkan *histoire-realite* hanya meninggalkan “bekas” yang terekam dalam apa yang kita sebut peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah itu dapat berupa tulisan, benda, folklore, catatan harian, atau apa saja yang dapat kita jadikan sebagai sumber sejarah.

Memang perbedaan interpretasi terhadap suatu peristiwa di masa lampau adalah hal yang lumrah dalam sejarah, apakah itu antar penulis sejarah, pelaku sejarah atau bahkan antar pembaca buku sejarah. Apalagi jika dikaitkan dengan sejarah kontemporer (sejarah sezaman) dimana sebagian besar para pelaku dan saksi sejarah masih hidup. Mereka tentunya masih mempunyai kadar emosi, kesan pribadi dan interpretasi sendiri terhadap peristiwa yang mereka alami. Boleh jadi interpretasi para pelaku sejarah berbeda dengan interpretasi para sejarawan.

Beberapa pelaku sejarah Zaman Perang Kemerdekaan 1945-1949 dan Periode dari Pengakuan Kedaulatan sampai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang masih hidup, dan terutama para pelaku sejarah pada Periode Orde Lama (1959-1966), dan Periode Orde Baru (1966-1998). Dalam dua periode terakhir itu, perbedaan interpretasi, kontroversi, dan bahkan perdebatan yang kemungkinan mengarah kepada sinisme akan lebih besar, ketimbang periode-periode sebelumnya. Periode-periode dimana para pelaku sejarah masih hidup itulah yang paling sulit “mensejarahkannya”.

Sebagaimana dikatakan oleh sejarawan Nugroho Notosusanto dalam Prakata Sejarah Nasional Indonesia VI, *“Kita selalu berbantah mengenai fakta mana yang cukup penting untuk dimasukkan ke dalam teks dan fakta mana yang terpaksa harus dikesampingkan karena pembatasan tempat yang tersedia (dan juga waktu yang disediakan, editor). Sebab jelas kiranya, bahwa tidak semua fakta sejarah mungkin dimasukkan ke dalam sebuah buku sejarah, karena terbatasnya tempat (dan langkanya sumber sejarah, editor). Memang demikianlah hakikatnya : sejarah-sebagai kisah, pasti jauh lebih sedikit ---hanya sekelumit--- daripada sejarah-sebagai aktualitas”*.

Meski demikian, kami tidak menutup kemungkinan dan akan selalu terbuka terhadap semua masukan, kritikan, fakta dan interpretasi baru. Karena kami pun menyadari bahwa penafsiran tentang fakta Sejarah Banjar belum mencapai idealnya sebagaimana fakta seharusnya. Akan tetapi buku ini adalah langkah awal yang membuka kesempatan untuk yang akan datang agar dapat ditafsirkan dan dijelaskan dalam konteks yang lebih luas melalui pendekatan interdisipliner, sehingga buku tentang Sejarah Banjar lebih komprehensif.

Buku ini sebelumnya adalah Laporan Hasil Penelitian dan Penulisan Sejarah Banjar yang ditulis Lembaga Budaya Banjar Kalimantan Selatan atas dukungan biaya Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 050/260/P/Balitbangda/2002 tanggal 3 Juni 2002. Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Budaya Banjar bekerjasama dengan sejumlah peneliti/penulis sebanyak 26 orang. Dapat dibayangkan banyak ragam atau gaya tulisan

yang dihasilkannya, sehingga banyak pula kendala yang dihadapi tim editor dalam melaksanakan editing sehingga dapat tampil dalam bentuk buku yang ada sekarang ini.

Sebagai suatu karya kolektif, tentunya buku Sejarah Banjar ini dapat terwujud karena adanya bantuan berbagai pihak. Terutama sekali ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan beserta perangkatnya yang telah memberikan dukungan dan biaya pelaksanaan kegiatan penelitian, penulisan dan proses editing sampai kepada purnanya buku ini.

Semoga buku ini memberikan manfaat dan meningkatkan pemahaman kita tentang sejarah orang Banjar di Kalimantan Selatan.

Banjarmasin, Agustus 2003

TIM EDITOR

DAFTAR ISI

SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN — ii

PENGANTAR EDITOR — iii

DAFTAR ISI — vi

SINGKATAN — xiii

BAB I PENDAHULUAN — 1

- A. LATAR BELAKANG — 1
- B. METODE DAN PENDEKATAN — 4

BAB II ZAMAN PRASEJARAH — 6

- A. LINGKUNGAN ALAM, MANUSIA, DAN BUDAYA PRASEJARAH — 6
 - 1. Lingkungan Alam Kalimantan Selatan — 6
 - 2. Keberadaan Manusia di Kalimantan Selatan — 7
 - 3. Budaya Manusia Prasejarah — 8
- B. MASA BERBURU DAN MENGUMPULKAN MAKANAN TINGKAT SEDERHANA — 11
 - 1. Pemenuhan Keperluan Hidup — 11
 - 2. Perlindungan terhadap Alam — 12
 - 3. Kehidupan Masyarakat — 13
- C. MASA BERBURU DAN MENGUMPULKAN MAKANAN TINGKAT LANJUT — 15
 - 1. Pemenuhan Keperluan Hidup — 15
 - 2. Kehidupan Masyarakat — 17
- D. MASA BERCOCOK TANAM — 20
 - 1. Peningkatan Kemampuan Membuat Alat — 20
 - 2. Kehidupan masyarakat — 23
- E. MASA PERUNDAGIAN — 29
 - 1. Kemahiran Membuat Alat — 29
 - 2. Kehidupan Masyarakat — 31

BAB III ZAMAN KUNO — 35

- A. NAN SARUNAI, NEGARA DIPA DAN NEGARA DAHA — 35
 - 1. Nan Sarunai Sebagai Negara Suku — 36
 - 2. Negara Dipa dan Daha Sebagai Negara Awal — 37
- B. PEMBAGIAN WILAYAH NEGARA DAN KEKUASAAN RAJA — 39
 - 1. Wilayah Negara — 39
 - 2. Kedudukan dan Kekuasaan Raja — 41
 - 3. Pembagian Kekuasaan — 44
- C. EKONOMI NEGARA — 46
- D. RUNTUHNYA NEGARA DAHA — 47

BAB IV ZAMAN BARU 1500-1900 — 50

- A. TERSEBARNYA AGAMA ISLAM DAN TERBENTUKNYA KERAJAAN BANJAR — 50
 - 1. Kalimantan Selatan Sebelum Datangnya Islam — 51
 - 2. Tersebarunya Agama Islam — 52
 - 3. Terbentuknya Kerajaan Banjar dan Lahirnya Kota Banjarmasin — 64
 - 4. Sistem Pemerintahan Kerajaan Banjar — 74
- B. PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI PERDAGANGAN — 90

1. Politik Perdagangan Menghadapi Orang Asing — 96
2. Kemelut Politik Abad ke-17 — 108
- C. PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM DAN PENERAPAN HUKUM ISLAM — 122
 1. Perkembangan Agama Islam — 124
 2. Pengaruh Aceh — 124
 3. Tokoh-tokoh Ulama Sufi yang Hidup di Kerajaan Banjar — 127
 4. Faham Ahlussunah Waljamaah di Kerajaan Banjar — 132
 5. Riwayat Hidup Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari — 133
 6. Penerapan Hukum Islam — 145
 7. Undang-Undang Sultan Adam 1835 — 149
- D. PERANG BANJAR (1859-1905) — 167
 1. Situasi Politik Abad ke-19 — 169
 2. Pemberontakan Banua Lima — 178
 3. Pangeran Antasari dan Kerajaan Muning — 182
 4. Perang Banjar Meletus — 188
 5. Penyerbuan Terhadap Benteng Oranje Nassau — 190
 6. Sultan Tamjidillah Turun Tahta — 192
 7. Sultan Kuning di Sekitar Muning — 194
 8. Pertempuran Sekitar Benteng Munggu Thayor — 195
 9. Demang Lehman dan Pangeran Hidayatullah — 196
 10. Pertempuran di Gunung Madang — 199
 11. Pertempuran di Sekitar Martapura dan Gunung Pamaton — 200
 12. Peristiwa Margasari — 201
 13. Tumenggung Jalil Gelar Kiai Adipati Anom Dinding Raja — 202
 14. Penghulu Rasyid dan Gerakan Beratib Baamal — 204
 15. Pertempuran di Banua Lawas — 206
 16. Pertempuran di Teluk Selasih — 207
 17. Pertempuran di Jatoh — 208
 18. Perang Barito Sampai Hancurnya Pagustian — 208
 19. Demang Lehman dan Pangeran Hidayatullah Dalam Proses Penangkapan — 212
 20. Pengangkatan Pangeran Antasari Sebagai Panembahan — 212
 21. Pagustian di Gunung Bondang — 217
 22. Bukhari Dalam Amuk Hantarukung — 218
 23. Pasukan Belanda menyerang kampung Hantarukung — 219
 24. Hancurnya Pagustian dan Manawing dan Berakhirnya Perang Banjar (1905) — 220
- E. AKIBAT-AKIBAT SOSIAL POLITIK PERANG BANJAR — 222

BAB V ZAMAN PERINTIS KEMERDEKAAN 1901-1942 — 227

- A PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA — 227
 1. Tata Pemerintahan — 227
 2. Politik Pertanahan — 229
- B. PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA DI KALIMANTAN SELATAN — 231
 1. Residensi Afdeling Selatan dan Timur Borneo — 231
 2. Desentralisasi Pemerintahan — 237
 3. Ekspansi Modal Swasta — 240
- C. KONDISI KEHIDUPAN MASYARAKAT — 244

	1.	Pengaruh Kebudayaan Eropa — 244
	2.	Pemenuhan Kebutuhan — 246
	3.	Diskriminasi Kependudukan, Pajak dan Erakan — 248
	4.	Kehidupan Seni Budaya — 252
	5.	Penetrasi Seni Budaya Asing — 255
	6.	Perkembangan Agama — 258
	D.	PERKEMBANGAN PENDIDIKAN — 260
	1.	Pendidikan Setelah Masuknya Pengaruh Barat — 260
	2.	Diskriminasi Pendidikan di Sekolah Pemerintah — 261
	3.	Sekolah Kaum Pergerakan — 265
	E.	PERKEMBANGAN PERGERAKAN RAKYAT DI KALIMANTAN SELATAN — 270
	1.	Pelopor Kebangkitan Pergerakan Rakyat — 270
	2.	Pengaruh Pergerakan Rakyat Yang Tumbuh di Jawa — 271
	3.	Pertumbuhan dan Perkembangan Organisasi-organisasi Pergerakan — 272
	F.	KEADAAN ORGANISASI PERGERAKAN TAHUN 1928-1942 — 293
	1.	Politik Keras Pemerintah Kolonial Terhadap Gerakan Nonkoperasi — 293
	2.	Penerapan Ordonansi Sekolah Liar — 295
BAB VI		ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG 1942-1945 — 296
	A.	HINDIA BELANDA SEBELUM INVASI BALATENTARA JEPANG — 296
	1.	Propaganda Kemakmuran Asia Timur Raya — 296
	2.	Seloroh Muhammad Husni Thamrin — 297
	3.	Prediksi Sutan Syahrir — 298
	4.	Perang Dunia ke-2 — 299
	B.	PERSIAPAN PERANG PEMERINTAH HINDIA BELANDA — 300
	C.	AKHIR PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA — 304
	1.	Pemerintah Hindia Belanda Menyerah Kepada Tentara Jepang — 304
	2.	Proclamatie Legercommandant Nederlands-Indie — 304
	D.	PENGUASAAN KALIMANTAN SELATAN OLEH TENTARA JEPANG — 305
	1.	Bumi Hangus dan Penjarahan di Kota Banjarmasin — 307
	2.	Penyerahan-diri Gubernur B.J. Haga dan Pasukan Sekutu — 308
	3.	Pembersihan Komplotan Anti Jepang — 310
	4.	Komplotan di Borneo Barat — 311
	E.	PEMERINTAHAN PENDUDUKAN JEPANG — 311
	1.	Badan-badan Pemerintahan Peralihan — 311
	2.	Borneo Dibawah Pemerintahan Kaigun — 312
	3.	Dari Pemerintahan Militer ke Pemerintahan Sipil — 312
	4.	Wilayah Pemerintahan — 313
	5.	Tuntutan Pakat Dayak — 314
	6.	Struktur Organisasi Pemerintahan Minseibu — 314
	7.	Banjarmasin-Syi — 315
	8.	Lembaga Legislatif Untuk Borneo Selatan — 316
	9.	Pemekaran Wilayah Borneo Selatan — 316

	F.	SIKAP RAKYAT TERHADAP PEMERINTAH PENDUDUKAN JEPANG — 317
	G.	KEADAAN EKONOMI — 318
	H.	BIDANG SOSIAL BUDAYA — 321
	1.	Keadaan Sosial — 321
	2.	Pendidikan — 322
	3.	Seni Budaya — 326
	4.	Media Massa — 327
	I.	ALAM PIKIRAN DAN KEPERCAYAAN — 331
	J.	INTERAKSI RAKYAT KE DALAM KEGIATAN ORGANISASI POLITIK DAN SOSIAL — 333
	K.	PENGARUH POLITIK — 336
	L.	KUNJUNGAN HATTA, JANJI KEMERDEKAAN, DAN SEKITAR PROKLAMASI KEMERDEKAAN DI KALIMANTAN SELATAN — 337
	1.	Kunjungan Hatta ke Banjarmasin — 337
	2.	Janji Kemerdekaan — 338
	3.	Sekitar Proklamasi Kemerdekaan — 338
BAB	VII	ZAMAN PERANG KEMERDEKAAN 1945-1949 — 340
	A.	PERANG KEMERDEKAAN 1945-1949, SEBUAH REVOLUSI FISIK DI KALIMANTAN SELATAN — 340
	B.	REAKSI RAKYAT KALIMANTAN SELATAN TERHADAP PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 — 343
	1.	Berita Proklamasi dan Dukungan Terhadap Republik Indonesia — 343
	2.	Menghadapi Tentara Sekutu dan NICA — 349
	3.	Gerakan Mendirikan Pemerintahan Republik Indonesia — 356
	4.	Andil Pemuda Pelajar Kalimantan Dalam Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan — 361
	C.	TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA BADAN-BADAN KELASKARAN DAN ALRI DIVISI IV PERTAHANAN KALIMANTAN — 363
	1.	Munculnya Organisasi – Organisasi Perlawanan Bersenjata — 363
	2.	Pertempuran 9 November 1945 di Banjarmasin, Awal Revolusi Fisik di Kalimantan Selatan — 381
	3.	Ekspedisi Pasukan dari Jawa ke Kalimantan — 385
	4.	Usaha Perlawanan Terhadap NICA Secara Terpisah — 404
	5.	Pembentukan Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV “A” di Kalimantan Selatan — 404
	D.	PARTISIPASI RAKYAT KALIMANTAN SELATAN DALAM PERJUANGAN SOSIAL POLITIK — 407
	1.	Terbentuknya Organisasi Massa dan Partai-Partai Politik — 407
	2.	Pembentukan Daerah Otonomi — 410
	3.	Aktivitas Partai-Partai Politik Mempertahankan Pemerintah Republik Indonesia — 413
	E.	PERJUANGAN PERS REPUBLIKEN — 419
	1.	Cikal Bakal Pers Perjuangan — 419
	2.	Misi Perjuangan Majalah Republik — 420
	3.	Harian Kalimantan Berjuang Menentang Federalisme — 421
	4.	Harian Terompet Rakyat Mempertahankan Negara Kesatuan Indonesia — 422

		5. Beberapa Pers Perjuangan Lainnya yang Pernah Terbit di Kalimantan Selatan — 424
	F.	PERJUANGAN GERILYA DAN TERBENTUKNYA PEMERINTAHAN GUBERNUR TENTARA ALRI — 427
		1. Pembinaan Wilayah Perjuangan Gerilya — 427
		2. Keadaan Sekitar Aksi Militer I di Kalimantan Selatan — 429
		3. Situasi Menjelang Aksi Militer II — 434
		4. Gerakan Plebisit — 436
		5. MPK ALRI Divisi IV Menghadapi Kontra Republik — 437
		6. Konsolidasi MPK ALRI Divisi IV — 439
		7. Terbentuknya Pemerintah Gubernur Tentara ALRI — 452
		8. Struktur Organisasi Gerilya — 463
		9. Peranan Pelajar Pejuang dan Akademi Militer Kilat — 470
	G.	PERJUANGAN PASUKAN MN 1001/MTKI — 473
	H.	KEDAULATAN DAN PERJUANGAN ALRI DIVISI IV PERTAHANAN KALIMANTAN DIAKUI OLEH PEMERINTAH RI — 483
		1. Pemerintah Republik Indonesia Kembali Berpusat di Yogyakarta dan Dampaknya Bagi Perjuangan Rakyat Kalimantan Selatan — 483
		2. Pemerintah Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Mengepung Kedudukan Belanda — 486
		3. Kedatangan Misi Militer Republik Indonesia dan Komisi Tiga Negara di Kalimantan Selatan — 498
		4. ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan Diresmikan Menjadi Divisi Lambung Mangkurat — 515
BAB	VIII	PERIODE DARI PENGAKUAN KEDAULATAN SAMPAI DENGAN DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 — 520
	A.	PENGATURAN PEMERINTAHAN — 520
		1. Masa Republik Indonesia Serikat sampai Berakhirnya tahun 1950 — 520
		2. Masa Republik Indonesia sampai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 — 523
	B.	KEHIDUPAN MASYARAKAT — 538
		1. Kehidupan Politik — 538
		2. Kehidupan Sosial Ekonomi — 539
		3. Pendidikan dan Seni Budaya — 543
		4. Kehidupan Beragama — 547
		5. Perburuhan dan Sumber Daya Manusia — 548
		6. Perhubungan dan Media Pers — 549
BAB	IX	PERIODE “ORDE LAMA” (DEMOKRASI TERPIMPIN) 1959 – 1966 — 552
	A.	SITUASI DAN KONDISI MENJELANG DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 — 552
		1. Pemerintahan — 552
		2. Politik dan Pergolakan di Daerah — 554
	B.	DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 — 560
		1. Melangkah ke Demokrasi Terpimpin — 560
		2. Negara Dalam Keadaan Perang — 561
		3. Pelarangan Kegiatan PKI dan Ormasnya di Kalimantan Selatan — 564
	C.	KONSTELASI KEKUATAN PARTAI POLITIK DI KALIMANTAN SELATAN — 568

- D. PEMBEBASAN IRIAN BARAT (TRIKORA) — 571
- E. KEMBALI KE KEADAAN TERTIB SIPIL — 574
 - 1. Penyerahan Kewenangan Bidang Pemerintahan Umum kepada Daerah Otonom — 574
 - 2. Pengangkatan Letkol H. Aberanie Sulaiman sebagai Gubernur Kepala Daerah — 574
 - 3. Konspirasi untuk Menyisihkan Tokoh-tokoh Daerah yang Anti Komunis — 575
 - 4. Kasus Pengangkatan Gubernur Kepala Daerah — 576
 - 5. Penyempurnaan Lembaga Catur Tunggal menjadi Panca Tunggal — 577
 - 6. Pembentukan Front Nasional Daerah — 577
- F. KONFRONTASI DENGAN MALAYSIA (DWIKORA) — 578
- G. KEWENANGAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH DALAM SATU TANGAN — 579
- H. PEMBERONTAKAN KAUM KOMUNIS — 580
 - 1. Partai Komunis Mulai Menyusun Kekuatan Secara Terbuka — 580
 - 2. Pemberontakan Bersenjata G 30 S/PKI — 586
- I. TUNTUTAN PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA — 592
 - 1. Reaksi Partai Politik dan Organisasi Massa — 592
 - 2. Tindakan Spontan Massa Terhadap PKI — 592
 - 3. Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA) — 593
 - 4. Gerakan Massa dan Kesatuan Aksi di Kalimantan Selatan — 593
- J. KESATUAN AKSI DAN KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH — 597
- K. PENGAMANAN DAN PENYELESAIAN OKNUM PKI/ ORMASNYA DI DAERAH KALIMANTAN SELATAN — 599
- L. PEMULIHAN DAN PENYEMPURNAAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH — 599
 - 1. Pengangkatan Kepala Daerah Tk. II yang Baru — 602
 - 2. Pengangkatan Wakil Gubernur — 603
 - 3. Kasus Pengangkatan Walikotamadya Banjarmasin — 603
- M. SURAT PERINTAH SEBELAS MARET (SUPERSEMAR) — 604
- N. AKTIVITAS SOSIAL KEMASYARAKATAN — 608
- O. KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN UPAYA MEREHABILITASINYA — 609
- P. MENGGALANG PERSATUAN DAN KESATUAN UMAT ISLAM MELAWAN UMAT TIDAK BERTUHAN — 616

BAB X PERIODE “ORDE BARU” 1966-1998 — 620

- A. KEADAAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN — 620
 - 1. Keadaan Politik di Kalimantan Selatan — 621
 - 2. Pancasila Sebagai Asas Tunggal — 622
 - 3. Dwi Fungsi ABRI — 623
 - 4. Keadaan Pemerintahan di Kalimantan Selatan — 623
 - 5. Pemilihan Umum — 631
 - 6. Pembinaan Sosial Politik — 634
- B. KEHIDUPAN MASYARAKAT — 637
 - 1. Sarana Kehidupan Beragama — 637
 - 2. Pendidikan — 639
 - 3. Kehidupan Ekonomi — 644

4. Olahraga — 651
5. Kehidupan Seni Budaya — 652
- C. PERANAN PERS DALAM DINAMIKA MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN — 656
 1. Keberadaan Pers di Kalimantan Selatan — 656
 2. Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru — 660

DAFTAR SUMBER — 663

PETA KALIMANTAN SELATAN — 680

LAMPIRAN — 681

SINGKATAN

ABCD	:	Australia –British-China-Dutch Indies Front
ABDA	:	America-British- Dutch-Australian Fleet
ADDO	:	Alokasi Daerah Devisa Otomatis
ADO	:	Alokasi Devisa Otomatis
ALRI	:	Angkatan Laut Republik Indonesia
AMGU	:	Allied Military Gouvrenment Unit
AMS	:	Algemene Middelbare School
AMN	:	Akademi Militer Nasional
APRIS	:	Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
AVC	:	Algemene Vernielings Corps
BFO	:	Bijeenkomst voor Federaal Overleg
BINDO	:	Barisan Indonesia
BKR	:	Badan Keamanan Rakyat
BMG	:	Basler Mission Gesellschaft
BPO	:	Borneo Padvinder Organisatie
BPOG	:	Badan Pembantu Oesaha Gubernur
BPM	:	Bataafsche Petroleum Maatschappij
BPPKI	:	Barisan Pelopor Pemberontak Kalimantan Indonesia
BPRIK	:	Barisan Pemberontak Republik Indonesia Kalimantan
BPRI	:	Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia
BORSUMIJ:	:	Borneo-Sumatra Handels Maatschappij
CSI	:	Centraal Sarekat Islam
DPD	:	Dewan Pemerintah Daerah
DPR-GR	:	Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
DWIKORA	:	Dwi Komando Rakyat
ELS	:	Europese Lagere School
FDR	:	Front Demokrasi Rakyat
GAPPIKA	:	Gabungan Pemuda Pemudi Kalimantan
GERMERI	:	Gerakan Rakyat Mempertahankan Republik Indonesia
GERPINDOM	:	Gerakan Rakyat Pengejar Pembela Indonesia Merdeka
GERPINDOM	:	Gerakan Pemuda Indonesia Merdeka
GERWASI	:	Gerakan Wanita Sosialis Indonesia
GG	:	Gouverneur Generaal
GKE	:	Gereja Kristen Evangelis
HCS	:	Hollands Chinese School

HIS	:	Hollands Inlandse School
HIPPINDO	:	Himpunan Pemuda Pemudi Indonesia
HMI	:	Himpunan Mahasiswa Islam
HPB	:	Hoofd van Plaatselijk Bestuur
HSBI	:	Himpunan Seni Budaya Islam
IHS	:	Inheemse Hollandse School
INI	:	Ikatan Nasional Indonesia
IPK	:	Ikatan Pemuda Kalimantan
IP-KI	:	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
IS	:	Indische Staatsregeling
JOC	:	Jeugd Oefen Corps
KABI	:	Kesatuan Aksi Buruh Indonesia
KAGI	:	Kesatuan Aksi Guru Indonesia
KAMI	:	Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
KAPPI	:	Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia
KAPNI	:	Kesatuan Aksi Pengusaha Nasional Indonesia
KAPAK	:	Komando Aksi Pemuda Anti Kontra Revolusioner Indonesia
KAMA-IND	:	Gerakan Karyawan Maritim Indonesia
KASI	:	Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia
KAWI	:	Kesatuan Aksi Wanita Indonesia
KBKI	:	Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia
KDM	:	Komando Distrik Militer
KL	:	Koninklijke Leger
KNIL	:	Koninklijke Nederlands Indische Leger
KNI	:	Komite Nasional Indonesia
KPM	:	Koninklijke Pakketvaart Maatschappij
KRYT	:	Kesatuan Rakyat yang Tertindas
KRIYT	:	Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas
KODIM	:	Komando Distrik Militer
KODIM	:	Komando Onder Distrik Militer
KOTI	:	Komando Operasi Tertinggi
KSAP	:	Kepala Staf Angkatan Perang
LEKRI	:	Lembaga Kebudayaan Rakyat Indonesia
LPKS	:	Latihan Kemiliteran Pegawai Sipil
MANIPOL	:	Manifesto Politik Indonesia
MASYUMI	:	Majelis Syuro Muslimin Indonesia
MP	:	Militaire Politie
MPK	:	Markas Besar Pertahanan Kalimantan
MTD	:	Militaire Transport Dienst
MTKI	:	Mandau Telabang Kalimantan Indonesia

MULO	:	Meer Uitgebreid Lager Onderwijs
NIC	:	Nationaal Indische Congres
NHM	:	Nederlandsche Handels Maatschappij
NIAS	:	Nederlands Indische Artsen School
NMM	:	Nederlands Militaire Missie
NICA	:	Netherlands Indies Civil Administration
NIGIEO	:	Nederlands Indische Gouvernement Import en Export Organisatie
NIRUB	:	Nederlands Indische Rubber Uitvoer Bedrijf
NU	:	Nahdlatul Ulama
NSDAP	:	Nederlands Sosial Democratische Arbeiders Partij
OBM	:	Oost Borneo Maatschappij
OMEGA	:	Oesaha Menambah Gaji
PAIM	:	Partai Anti Indonesia Merdeka
PARAKU	:	Pasukan Rakyat Kalimantan Utara
PARINDRA	:	Partai Indonesia Raya
PARKINDO	:	Partai Kristen Indonesia
PARTINDO	:	Partai Indonesia
PERBUM	:	Persatuan Buruh Minyak
PERMESTA	:	Perjuangan Rakyat Semesta
PERPU	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
PETER	:	Pembantu Tentara Republik
PEPERDA	:	Penguasa Perang Daerah
PEPELRADA	:	Penguasa Pelaksana Komando Dwikora Daerah
PEKUMIL	:	Pelaksana Kuasa Militer
PEPERTI	:	Penguasa Perang Tertinggi
PELMASI	:	Pelopor Mahasiswa Sosialis Indonesia
PERSAMI	:	Persatuan Sarjana Muslimin Indonesia
PERTA	:	Persatuan Rakyat Tani
PESINDO	:	Pemuda Sosialis Indonesia
PBM	:	Pasukan Berani Mati
PBI	:	Persatuan Bangsa Indonesia
PGRI	:	Persatuan Guru Republik Indoensia
PGRS	:	Pasukan Gerilya Rakyat Serawak
PHIS	:	Particuliere Hollands Inlandse School
PID	:	Politieke Inlichtingen Dienst
PKI	:	Partai Komunis Indonesia
PKU	:	Pembina Kesejahteraan Ummat
PMC	:	Penyelidik Militer Khusus

PNI	:	Partai Nasional Indonesia
PNI	:	Pendidikan Nasional Indonesia
P3I	:	Pelopor Pemuda Progresif Indonesia
PPRI	:	Persiapan Pemerintahan Republik Indonesia
PPKKD	:	Panitia Penyaluran Korban Kekacauan Daerah
PMM	:	Pemuda Muslimin MULO
PPM	:	Persatuan Pemuda Marabahan
PPI	:	Persatuan Perguruan Islam
PPPRIB	:	Panitia Pembentukan Pemerintah Republik Indonesia Borneo
PPKI	:	Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PPRIM	:	Panitia Persiapan Republik Indonesia Merdeka
PPRI	:	Persatuan Pemuda Republik Indonesia
PPI	:	Pelajar Islam Indonesia
PRRI	:	Pemerintah Republik Revolusioner Indonesia
PRI	:	Persatuan Rakyat Indonesia
PSSI	:	Partai Syarikat Islam Indonesia
PWI	:	Persatuan Wanita Indonesia
RIS	:	Negara Indonesia Serikat
RMG	:	Rheinische Missions Gesellschaft
RR	:	Regerings Reglement
SERMI	:	Serikat Muslimin Indonesia
SI	:	Sarekat Islam
SKI	:	Serikat Kerakyatan Indonesia
SKDN	:	Serikat Karyawan Dalam Negeri
SRI	:	Serikat Rakyat Islam
SOB	:	Staat Van Oorlog en Beleg
SOPIK	:	Sentral Organisasi Pemberontakan Kalimantan
SOKSI	:	Sentral Organisasi Karyawan Sosialisasi Indonesia
TKR	:	Tentara Keamanan Rakyat
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
TRIKORA	:	Tri Komando Rakyat
TRI	:	Tentara Republik Indonesia
TITUS	:	Tidak Ingin Terlantar Usaha Sendiri
UNTEA	:	United Nations Temporary Executive Authority
UUDS-RI	:	Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
VMF	:	Voedings Middelen Fonds
VOC	:	Vereenigde Oost Indische Compagnie
VOC	:	Vrijwilligers Oefen Corps

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penulisan Sejarah Banjar Kalimantan Selatan merupakan suatu rekonstruksi atau penggambaran bagaimana orang Banjar membentuk sejarahnya. Dimulai pada babakan atau periode Zaman Prasejarah, Zaman Kuno, Zaman Baru 1500-1905, Zaman Perintis Kemerdekaan 1901-1942, Zaman Pendudukan Jepang 1942-1945, Zaman Perang Kemerdekaan 1945-1949, Periode dari Pengakuan Kedaulatan sampai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Periode “Orde Lama” (Demokrasi Terpimpin) 1959 –1966, dan diakhiri dengan Periode “Orde Baru” 1966 – 1998.

Urang Banjar (orang Banjar) adalah nama untuk penduduk yang mendiami daerah yang sekarang menjadi Propinsi Kalimantan Selatan, meskipun penduduk Kalimantan Selatan itu bukan seluruhnya etnik Banjar asli.¹ Urang Banjar itu setidaknya-tidaknya terdiri dari etnik Melayu sebagai etnik yang dominan kemudian ditambah unsur Bukit, Ngaju, dan Maanyan.

Perpaduan etnik lama-kelamaan menimbulkan perpaduan kultural; unsur Melayu sangat dominan dalam Bahasa Banjar. Pada mulanya kata “Banjar” adalah sebutan untuk kampung yang dihuni oleh orang-orang suku Melayu yang sekarang dikenal sebagai kampung tertentu di sekitar Kuin Cerucuk sekarang. Orang-orang Ngaju menyebut orang-orang Melayu yang menghuni kawasan di sepanjang sungai itu sebagai Banjar Masih yang berarti kampung-kampung orang Melayu.²

Sesuai dengan geografi politik tradisional, Banjar adalah juga sebuah nama kerajaan Islam yang pada awalnya terletak di Banjarmasin. Dalam proses pembentukan Kerajaan Banjar maka Banjar Masih dengan pelabuhan perdagangannya yang disebut orang Ngaju sebagai Bandar Masih (Bandarnya orang Melayu) dijadikan sebagai ibukota kerajaan Banjar yang kemudian menjadi kota Banjarmasin.

Dalam Hikayat Banjar ditemui istilah-istilah seperti : Negeri Banjar, Orang Banjar, Raja Banjar, dan Tanah Banjar.³ Istilah-istilah itu mengacu kepada pengertian wilayah Kerajaan ini, yaitu wilayah kerajaan dimana penduduknya disebut orang Banjar dan rajanya disebut Raja Banjar.

Kerajaan Banjar adalah nama lain dari sebutan Kerajaan Banjarmasin atau Kesultanan Banjar. Pengaruh Kesultanan Banjar melebar meliputi gabungan seluruh wilayah yang saat ini dikenal sebagai Propinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan sebagian Kalimantan Timur bahkan ada beberapa daerah yang pada saat ini masuk wilayah Propinsi Kalimantan Barat.

Kerajaan Banjar yang berkembang sampai abad ke-19 merupakan sebuah kerajaan Islam merdeka dengan *nation* atau bangsa Banjar sebagai bangsa dari Kerajaan Banjar. Pada akhir abad ke-19 ekspansi kolonial Belanda berhasil menguasai Kerajaan Banjar dan secara sepihak mengumumkan Proklamasi Penghapusan Kerajaan Banjarmasin pada tanggal 11 Juni 1860. Wilayah kerajaan yang berhasil dikuasainya dijadikan *Karesidenan Afdeling Selatan dan Timur Borneo (Residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo)*. Sejak itulah bangsa Banjar turun derajatnya menjadi bangsa jajahan. Mereka tidak lagi disebut sebagai suatu *nation* akan tetapi hanya sebagai *Urang Banjar*.⁴

¹ A. Gazali Usman, *Urang Banjar Dalam Sejarah*, Lambung Mangkurat University Press, Banjarmasin, 1989, hal. 1.

² Lihat M. Idwar Saleh, *Banjarmasih*, Museum Negeri Lambung Mangkurat Propinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, 1981/1982, hal.16; A. Gazali Usman, *Kerajaan Banjar : Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam*, Lambung Mangkurat University Press, Banjarmasin, 1995, hal. xi.

³ Lihat J.J. Rass, *Hikayat Banjar: A Study in Malay Historiography*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1968.

⁴ A. Gazali Usman 1989, *op.cit.*, hal. 3.

Rekonstruksi Sejarah Banjar adalah suatu upaya untuk melukiskan bagaimana kehidupan orang Banjar yang kita kenal di daerah Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan dan perkembangan hingga tampak seperti sekarang ini. Upaya itu perlu dilakukan, karena hingga kini belum ada penulisan Sejarah Banjar yang melingkupi semua babakan dari zaman prasejarah hingga kontemporer.

Sebagai suatu proses sejarah yang bersifat kontinuitas dan kompleks, dimana terjadi hubungan kausalitas dengan peristiwa-peristiwa yang melatarbelakanginya baik yang terjadi di tingkat lokal, daerah maupun nasional, maka fokus rekonstruksi Sejarah Banjar dilakukan dari zaman Prasejarah hingga periode sejarah Kontemporer.

Bukti awal yang diketahui tentang jejak-jejak keberadaan manusia prasejarah di Kalimantan adalah sebuah tengkorak *homo sapiens* di ambang barat gua Besar di Niah, Serawak. Sedangkan di Kalimantan Selatan, selain adanya temuan tinggalan paleolitik, adanya temuan rangka manusia di gua Tengkorak di kawasan Bukit Batu Buli, Muara Uya pada tahun 1999 memberikan indikasi sangat penting dan signifikan, bahwa ras pendukung budaya di kawasan Bukit Batu Buli Kalimantan Selatan adalah Austromelanesoid.

Di Kalimantan Selatan terutama sejak abad ke-14 sampai awal abad ke-16 yakni sebelum terbentuknya Kerajaan Banjar yang berorientasikan Islam, telah terjadi proses pembentukan negara dalam dua fase. Fase pertama yang disebut Negara Suku (*ethnic state*) yang diwakili oleh Negara Nan Sarunai milik orang Maanyan. Fase kedua adalah negara awal (*early state*) yang diwakili oleh Negara Dipa dan Negara Daha. Terbentuknya Negara Dipa dan Negara Daha menandai zaman klasik di Kalimantan Selatan. Negara Daha akhirnya lenyap seiring dengan terjadinya pergolakan istana, sementara Islam mulai masuk dan berkembang disamping kepercayaan lama. Zaman Baru ditandai dengan lenyapnya Kerajaan Negara Daha, beralih ke periode negara kerajaan (*kingdom state*) dengan lahirnya kerajaan baru, yaitu Kerajaan Banjar pada tahun 1526 yang menjadikan Islam sebagai dasar dan agama resmi kerajaan.

Zaman keemasan Kerajaan Banjar terjadi pada abad ke-17 hingga abad ke-18. Pada masa itu terjadi puncak perkembangan Islam di Kalimantan Selatan sebagaimana ditandai oleh lahirnya Ulama-ulama *Urang* Banjar yang bertaraf internasional dengan pemikiran atau karya tulisnya menjadi bacaan dan rujukan di berbagai negara, antara lain Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (1710-1812) dengan kitabnya yang sangat terkenal: *Sabilal Muhtadin*. Atas prakarsa Syekh Muhammad Arsyad, diberlakukanlah hukum Islam di seluruh kerajaan Banjar dengan segala perangkatnya, diantaranya Mahkamah Syariah dan Undang-undang Sultan Adam (1835).

Penetrasi politik kolonial Belanda ke dalam wilayah dan pemerintahan Kerajaan Banjar menimbulkan konflik yang berkepanjangan yang dikenal sebagai Perang Banjar (1859-1905). Perang ini melahirkan tokoh-tokoh perlawanan.

Zaman Baru berakhir dengan hancurnya *Pemerintahan Pagustian* yakni sebagai kelanjutan Kerajaan Banjar di pedalaman Puruk Cahu pada 1905, dan sejak itu Belanda semakin menancapkan kuku kekuasaannya di seluruh bekas wilayah Kerajaan Banjar.

Kalimantan Selatan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda merupakan bagian dari *Residentie Zuider en Oosterafdeeling van Borneo* dengan ibukotanya Banjarmasin. Ekspansi militer diikuti oleh pembentukan pemerintahan kolonial di Kalimantan Selatan, bersamaan dengan masuknya modal swasta.

Sebagai implementasi dari Undang-undang Desentralisasi 1903, di Banjarmasin dibentuk *Gemeente* dengan *Gemeenteraad* (Dewan Haminte) dengan nama *Gemeenteraad Bandjermasin* yang pada saat pembentukan Propinsi Borneo (*Gewest Borneo*) tahun 1938 meningkat statusnya menjadi *Stadsgemeenteraad*.

Disamping pengaruh faktor-faktor dari luar, tumbuhnya pergerakan rakyat di daerah ini tidak terlepas dari “aspek-aspek positif” seperti dampak dari adanya pendidikan dan pengajaran secara barat yang melahirkan adanya kalangan terpelajar yang memperoleh pekerjaan yang lebih baik, kedudukan dan prestise. Kalangan terpelajar, disamping elite agama yang merasakan ketidakadilan atas penindasan pemerintah kolonial terhadap masyarakat pribumi adalah pelopor atau perintis pergerakan kemerdekaan di daerah ini.

Akhir Pemerintah kolonial Belanda terjadi ketika tentara pendudukan Jepang memasuki Kalimantan Selatan pada tahun 1942. Selama masa pendudukan Jepang, Kalimantan Selatan berada dalam pemerintahan militer. Tentara pendudukan Jepang menindas setiap upaya pergerakan yang membahayakan kedudukannya.

Setelah Jepang menyerah kepada tentara Sekutu, Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Di Kalimantan Selatan rakyat bangkit dengan berbagai cara untuk menegakkan kemerdekaan Indonesia di daerah ini, baik melalui jalur pers, organisasi politik dan terutama melalui perjuangan fisik dengan mengangkat senjata. Berbagai upaya Belanda untuk kembali menguasai Kalimantan Selatan, selain dengan kekuatan militer juga dengan kekuatan diplomasi melalui jalur perundingan, diantaranya melalui Persetujuan Linggajati dan Renville yang memisahkan Kalimantan secara de jure dan de facto dari Republik dan menjadikannya sebagai bagian wilayah kekuasaan Belanda. Namun upaya Belanda itu mengalami kegagalan, karena dengan kekuatan senjata para gerilyawan berhasil melakukan perlawanan sehingga memperoleh kekuasaan teritorial yang semakin luas. Kondisi demikian, mendorong ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan sebagai organisasi gerilya terbesar saat itu, atas nama rakyat Kalimantan Selatan menyatakan kesetiaannya kepada Republik melalui Proklamasi 17 Mei 1949. Proklamasi ini dicetuskan oleh Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Hassan Basry. Periode antara tahun 1945 s.d. 1949 ini dikenal sebagai Periode Perang Kemerdekaan.

Periode sesudahnya adalah periode dari Pengakuan Kedaulatan sampai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (1950-1959). Pada periode ini terjadi proses transisi di berbagai aspek dan bidang kehidupan, seperti tuntutan untuk kembali ke negara kesatuan, sistem multipartai, dan instabilitas keamanan dalam negeri, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Setelah Dekrit Presiden dimulailah periode “Orde Lama” (Demokrasi Terpimpin). Meski kembali ke UUD 1945, seperti halnya di daerah lain, di Kalimantan Selatan muncul instabilitas keamanan yang bermula dari ketidakpuasan dari bekas para pejuang terhadap kompensasi yang diberikan pemerintah pusat kepada mereka, lebih-lebih lagi terhadap pembangunan daerah. Dalam kondisi instabilitas, organisasi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mendapat dukungan dari sistem politik yang ada, mulai menancapkan kukunya di Kalimantan Selatan. Beruntung sekali rakyat Kalimantan Selatan yang religius menyadari bahaya komunisme, sehingga dengan sadar dan tegas menolak kegiatan PKI dan ormas-ormasnya di daerah ini, meski menghadapi risiko kemarahan Presiden/Panglima Tertinggi.

Setelah Supersemar 11 Maret 1966 dimulailah periode “Orde Baru”. Setelah keberhasilan menumpas G 30 S/PKI, pemerintah Orde Baru lahir dan memulainya dengan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen. Di bidang politik, semua partai dan Golongan Karya harus menjadikan Pancasila sebagai landasan ideologi bahkan sebagai asas tunggal. Pemilu secara teratur dilaksanakan setiap lima tahun sekali, dan hasilnya Golongan Karya sebagai pemenang mayoritas tunggal. Konsep Dwi Fungsi ABRI diterapkan, sehingga di kalangan pemerintah baik di pusat maupun daerah terdapat anggota ABRI yang dikaryakan.

Pada masa Orde Baru, Kalimantan Selatan berada dalam kondisi aman dan dinamis, pembangunan terjadi di berbagai aspek kehidupan dan mulai dirasakan oleh masyarakat hingga ke

pedesaan. Peningkatan taraf hidup terjadi, meski diakui masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Kehadiran Orde baru pada mulanya memang memberikan nilai positif terhadap kehidupan bangsa, akan tetapi setelah sekian lama berjalan mulai terungkap adanya kebobrokan para pelaksananya yang lazim disebut KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan bahkan hampir melekat di semua komponen pemerintahan.

Terbentuknya opini yang diciptakan pers yang menyudutkan pemerintah Orde Baru, dan ditambah dengan merebaknya unjuk rasa dan tindakan anarkis di berbagai tempat di tanah air mengakibatkan pemerintah Orde Baru menjadi semakin tersudut. Pada mulanya keruntuhan pemerintahan Orde Baru diawali oleh adanya krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi. Keadaan diperburuk pula ketika terjadi pemilu 1997 terjadi kekacauan. Di Banjarmasin pada putaran terakhir pemilu, pada hari Jumat, 23 Mei 1997 terjadi amuk massa yang menewaskan ratusan jiwa. Huru hara serupa terjadi di berbagai tempat lainnya di Indonesia. Besarnya tekanan para demonstran dan merebaknya kerusuhan, mengakibatkan Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998, dan sejak itu tumbanglah Pemerintahan Orde Baru.

Dari paparan di atas terlihat bahwa sejak zaman prasejarah hingga kontemporer, orang Banjar di Kalimantan Selatan memiliki kontribusi terhadap perkembangan kebudayaan, peradaban manusia dan kehidupan berbangsa. Akan tetapi paparan itu hanya sekelumit atau belum sepenuhnya tergambarkan secara “utuh”. Oleh karena itulah tulisan ini merupakan suatu upaya rekonstruksi “menyeluruh” tentang bagaimana orang Banjar membangun sejarahnya.

Meski penulisan ini lebih memfokuskan kepada “Sejarah Orang Banjar” di Kalimantan Selatan, bukan berarti tulisan ini memunculkan keprimordialan. Tulisan ini justru akan memberikan sumbangan informasi untuk melihat Sejarah Nasional dengan perspektif lokal.

B. METODE DAN PENDEKATAN

Metode dalam penulisan ini menggunakan Metode Sejarah yang meliputi empat tahapan integral yakni *heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi*. Sumber sejarah diambil dari data primer dan sekunder baik berasal dari sumber lisan, tulisan, maupun benda. Sumber tertulis berupa dokumen (manuskrip), benda dan pustaka diperoleh dari Arsip Nasional seperti *Surat-Surat Perjanjian antara Kesultanan Bandjarmasin, dengan Pemerintahan VOC, Bataafse Republik, Inggeris dan Hindia Belanda 1835-1860*, arsip koleksi pribadi maupun koleksi Museum Negeri Propinsi Kalimantan Selatan “Lambung Mangkurat”, catatan harian atau memoar pelaku sejarah, beberapa terbitan surat kabar dan majalah antara lain *Borneo Simboen, Kalimantan Berjuang, Suara Kalimantan, Kalimantan Raya* dan *Terompet Rakyat*.

Sumber kepustakaan diperoleh antara lain dari: laporan-laporan penelitian sejarah dan budaya yang dihasilkan oleh proyek pada Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Selatan, Museum “Lambung Mangkurat” dan laporan hasil penelitian Balai Arkeologi Banjarmasin serta skripsi, tesis dan disertasi tentang sejarah dan budaya Banjar, diantaranya beberapa disertasi antara lain Johannes Willi of Gais, *The Early Relation of England with Borneo to 1805* (1922), A.A. Cence, *De Kroniek van Bandjarmasin* (1928), J.C. Noorlander, *Bandjarmasin en de Compagnie in de tweede helft der 18 de eeuw* (1935), Graham Irwin, *Nineteenth Century Borneo* (1955), J.J. Ras, *Hikayat Bandjar* (1968), Goh Yoon Fong, *Trade and Politics in Bandjarmasin, 1700-1747* (1969), Lindblad, J. Thomas, *Between Dayak and Dutch: The Economic History of Southeast Kalimantan 1880-1942* (1988) dan Helius Syamsuddin, *Fighting Dutch Rule in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries: The Social, Political, Ethnic and Dynastic Roots of Resistance in South and Central Kalimantan, 1859-1906* (1989).

Diakui, permasalahan inti dari metodologi dalam ilmu sejarah adalah masalah pendekatan. Memang, dalam penulisan sejarah, kritis sejarah menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial untuk menganalisa struktur dari suatu fenomena historis, sehingga hasil dari penulisannya sangat ditentukan oleh pendekatan yang digunakannya. Dalam penulisan ini, secara tersurat tidak sepenuhnya menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial lainnya, melainkan melulu menggunakan pendekatan sejarah yang diakronis memanjang dalam waktu.

Dalam tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi historis, sehingga masalah sejarah di Kalimantan Selatan dapat menjadi masalah ilmu sosial lainnya ataupun dapat ditulis kembali dengan model sejarah kritis.

BAB II ZAMAN PRASEJARAH

A. LINGKUNGAN ALAM, MANUSIA, DAN BUDAYA PRASEJARAH

1. Lingkungan Alam Kalimantan Selatan

Sebagian besar Pulau Kalimantan terbangun dari sedimen laut yang berasal dari Laut Jawa dan Cina Selatan. Bagian barat daya pulau ini terdiri dari singkapan batuan berumur 400 juta tahun, yang pada masa lalu merupakan bagian dari Dataran Sunda yang suatu saat pernah menyatu dengan Semenanjung Melayu, Jawa, dan Sumatera.

Periode glasial dan interglasial¹ yang terjadi beberapa kali di Daerah Sedang Utara selama Kala Plestosen dan Holosen,² telah menyebabkan adanya variasi perubahan muka laut di seluruh dunia, termasuk di Kepulauan Indonesia yang terletak di daerah khatulistiwa. Pada periode ini, ketika sebagian besar air laut membeku menjadi es oleh turunnya suhu yang hebat, terjadi regresi (susut laut). Penurunan muka laut kadang mencapai 100 meter di bawah permukaan laut sekarang.³ Wilayah-wilayah luas dari Dangkan Laut Cina Selatan dan Laut Jawa (Paparan Sunda)⁴ secara periodis menjadi daerah kering, sedangkan daerah-daerah jauh di timur, termasuk Sulawesi, tetap menjadi sebuah kepulauan.

Pada kenyataannya, lembah-lembah sungai yang luas masih dapat diamati pada peta-peta *oseanografi* Paparan Sunda. Menurut Molengraaff dan Weber (1921), regresi selama periode glasial Würm mencapai 72 meter dari permukaan air laut sekarang, sedangkan De Terra menghitung penurunan sekitar 120 meter pada periode glasial Mindel, yaitu susut laut paling intensif selama Kala Plestosen, yaitu sekitar 12.000 tahun yang lalu.⁵

Pengaruh glasiasi pada Laut Jawa dan Laut Cina Selatan yang sekaligus diiringi dengan gerakan eustatik lempeng bumi⁶ telah beberapa kali membentuk jembatan-jembatan darat, sehingga menghubungkan Kalimantan dengan Pulau Jawa, Sumatera, dan daratan Asia.⁷

Terakhir kali terpisahnya Kalimantan dengan daratan Asia Tenggara dan pulau-pulau lainnya terjadi pada saat transgresi (genang laut) Kala Holosen sekitar 11.000 tahun yang lalu.⁸ Situasi menyatu-pisahannya Pulau Kalimantan dengan pulau-pulau lain dalam konteks Dataran Sunda di Indonesia bagian barat selama Kala Plestosen merupakan gejala alam yang sangat berpengaruh bagi kehidupan masa lalu daerah ini. Kondisi iklim yang lebih dingin di Asia selama periode glasial mendorong binatang-binatang untuk bergerak ke arah selatan melalui jembatan-jembatan darat selama lebih dari 500 ribu tahun.

Jembatan darat yang terbentuk telah memungkinkan migrasi binatang ke daerah-daerah kepulauan yang paling jauh di selatan, yaitu di Pulau Jawa, dan fauna mamalia Jawa diperkaya dengan adanya spesies baru. Sejak zaman Holosen kondisi alam relatif tidak berubah banyak, dan

¹ Masa terjadinya proses pengesan dan pencairan es

² Disebut masa Kwarter; Kala Plestosen berlangsung sekitar antara 2.000.000 sampai 10.000 tahun yang lalu, dan kala Holosen berlangsung antara 10.000 tahun yang lalu sampai sekarang.

³ A.M. Semah, *Pleistocene and Holocene Environmental Changes, Indonesia Heritage: Ancient History*, Buku Antar Bangsa for Grolier Internasional Inc, Jakarta, 1996.

⁴ Laut Cina Selatan dan Laut Jawa memiliki kedalaman yang cukup dangkal sekitar 40 meter

⁵ MacKinnon et.al, "The Ecology of Kalimantan Indonesia Borneo", dalam *The Ecology of Indonesia Series Volume II*. Periplus Edition, Singapore, 1996; Harry Widiyanto et.al, Ekskavasi Situs Gua Babi Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Berita Penelitian Arkeologi No.1 1997, Balai Arkeologi Banjarmasin.

⁶ Gerakan ini menyebabkan pengangkatan Dataran Sunda secara parsial.

⁷ Jembatan darat ini tidak meluas melampaui daerah timur Garis Wallace, yaitu batas zoografis alamiah yang memisahkan wilayah bagian barat Indonesia yang memiliki pengaruh Asia dengan daerah pengaruh Australia yang berada di bagian timur

⁸ Harry Widiyanto, *op.cit*.

secara biogeografis, flora dan fauna Pulau Kalimantan memperlihatkan relasi yang lebih dekat ke Daratan Asia dan pulau-pulau Sunda lainnya –Daratan Sunda Kuno- daripada ke pulau tetangganya, Sulawesi. Meskipun terpisah hanya oleh Selat Makassar –sekitar 200 kilometer pada bagian yang paling lebar-- Kalimantan dan Sumatera telah terpisah sejak sekitar 10 milenium yang lalu, mungkin paling tidak sejak masa Plestosen.⁹

Distribusi spesies binatang dan tumbuhan di Kalimantan sangat heterogen berdasarkan pembatasan *altitudinal* dan habitat serta pembagian daerah-daerah fitogeografis dan zoogeografis yang berbeda, yang mencerminkan perbedaan sejarah geologis, perhubungan daerah-daerah Plestosen dan batasan-batasan geografis sampai persebaran spesies.

Wilayah Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan merupakan daerah yang terpisah secara khusus dari daerah perbukitan yang lain dan merupakan lahan yang kaya akan tumbuh-tumbuhan spesifik, terutama anggrek. Distribusi fauna tergantung tidak hanya oleh tipe habitat, tetapi juga batasan-batasan geografis antara lain gugusan pegunungan dan sungai-sungai.

Di daerah Kalimantan sekitar selatan dan timur bagian antara Sungai Mahakam dan Barito, adalah daerah nihil akan orangutan dan ras khusus siamang (*Bornean gibbon*). Dataran rendah sebelah utara memiliki fauna dan flora yang lebih kaya spesiesnya, termasuk keberadaan jenis tupai *Petaurillus hosei* dan *Petaurillus emiliae*, tikus *Chiropodomys major*, musang *Herpestes hosei*, dan gajah.¹⁰

Jalur migrasi mamalia pertama dari Asia Tenggara Daratan ke Jawa, terus ke arah timur ke Nusa Tenggara, yang diikuti jalur kedua dari Cina Selatan, Taiwan, Filipina, Kalimantan, dan Sulawesi melewati jembatan darat Sangihe. Kenyataan ini telah memunculkan hipotesis bahwa Kalimantan dan Sulawesi --seperti pulau-pulau lain di Indonesia bagian barat-- juga mempunyai kesempatan yang sama dalam menampung berbagai aktivitas migrasi, baik binatang vertebrata maupun manusia, sehingga terdapat kemungkinan di pulau ini akan ditemukan jejak-jejak kehidupan manusia prasejarah.¹¹

2. Keberadaan Manusia di Kalimantan Selatan

Membicarakan sejarah manusia di daerah Kalimantan Selatan tidak bisa lepas dari awal keberadaannya di Pulau Kalimantan secara umum. Bukti awal yang diketahui tentang keberadaan manusia di Kalimantan adalah sebuah tengkorak *Homo sapiens* yang ditemukan di Ambang Barat Gua Besar di Niah, Sarawak.¹² Tengkorak tersebut memiliki pertanggalan mutlak¹³ lebih dari 35.000 tahun. Meskipun masih terdapat perdebatan tentang usia tengkorak tersebut, Niah tetap merupakan situs yang penting, karena mengandung rekaman data tingkatan okupasi manusia terlama di Asia Tenggara.¹⁴ Gua Niah merupakan sebuah situs dari masa Plestosen Atas yang banyak mengungkapkan gaya hidup manusia Paleolitik pendukung budaya manusia yang sudah menggunakan alat dalam menunjang kehidupan sehari-harinya.

Hasil ekskavasi terbaru di Madai, Sabah, memperlihatkan bukti lebih jauh tentang migrasi awal dan penghunian manusia di seluruh Kepulauan Indonesia¹⁵ dengan pertanggalan mutlak 30.000 tahun.¹⁶ Terjadinya perhubungan darat pada masa Plestosen, gelombang kedatangan manusia masa lampau menyapu daerah-daerah kepulauan di Paparan Sunda dari Asia. Orang-orang

⁹ MacKinnon, *op.cit.*

¹⁰ MacKinnon, *ibid.*

¹¹ Widiyanto, *op.cit.*

¹² Harison 1956 dan Majid 1982 *vide* MacKinnon, *op.cit.*

¹³ Hasil pertanggalan radiocarbon C-14 terhadap matriks tanah tempat tengkorak tersebut terkubur.

¹⁴ Bellwood 1985 *vide* MacKinnon, *op.cit.*

¹⁵ Bellwood 1988 *vide* MacKinnon, *ibid.*

¹⁶ Bellwood 1980 *vide* MacKinnon, *ibid.*

Negrito, nenek moyang bangsa aborigin Australia dan Melanesia, mungkin telah menghuni Gua Niah pada 50.000 tahun yang lalu, lalu digantikan oleh gelombang kedatangan Mongoloid Selatan. Saat gelombang migrasi menyapu daerah kepulauan, mereka bercampur dan melakukan persilangan dengan penduduk asli. Beberapa suku di Asia Tenggara seperti Negrito Malaysia memiliki budaya berburu dan mengumpulkan makanan yang masih primitif. Hal tersebut mengarahkan dugaan bahwa orang-orang Penan (Punan) juga berasal dari penduduk Negrito asli Kalimantan.

Kondisi geografis Kalimantan Selatan, separuh wilayahnya, yaitu bagian selatan dan barat serta sedikit di pesisir timur, didominasi oleh tanah rawa. Jenis tanah seperti ini lebih bersifat asam, yang tidak akan mampu mengkonservasi tulang-belulang binatang dan manusia. Pada bagian tengah daerah ini, terbentang bagian selatan Pegunungan Meratus yang berorientasi utara-selatan. Pegunungan ini terbentuk dari karst --batu gamping-- yaitu jenis batuan yang sangat baik untuk mengkonservasi tulang secara alamiah. Seandainya di daerah Kalimantan Selatan harus dicari jejak-jejak masa lalu manusia prasejarah, maka pegunungan kapur seperti ini adalah salah satu tempat yang paling memberikan harapan.¹⁷ Padang perburuan jejak manusia prasejarah antara lain harus diarahkan pada celah-celah batu gamping di Pegunungan Meratus yang banyak menyimpan gua-gua alamiah, baik berupa ceruk (*rock shelter*) maupun gua (*cave*).

Penelitian intensif-ekskavasi di Gua Babi di Bukit Batu Buli (Tabalong, Kalimantan Selatan) selama 1995-1999 berhasil menemukan komponen manusia yang bersifat fragmentaris dengan kuantitas yang cukup tinggi. Berdasarkan karakter morfologisnya diketahui adanya tidak kurang dari 11 individu yang terdiri dari dewasa dan anak-anak. Ukuran yang sangat fragmentaris tidak dapat memberikan indikasi tentang identifikasi jenis kelamin maupun jenis ras manusianya. Penemuan rangka manusia di Gua Tengkorak pada 1999 memberikan indikasi yang sangat penting dan signifikan tentang ras manusia pendukung budaya kawasan Bukit Batu Buli, yaitu *Austromelanesoid*.¹⁸

3. Budaya Manusia Prasejarah

Kelangsungan hidup manusia awal di Kalimantan didukung oleh kegiatan berburu satwa liar, memancing, dan mengumpulkan hasil hutan. Di antara pecahan tulang yang ditemukan di Gua Niah terdapat beberapa binatang yang sekarang sangat langka di Kalimantan, termasuk jenis tapir *Tapirus indicus*, pangolin raksasa *Manis palaeojavanica*, dan tikus-gigi-putih *Crocidura fuliginosa*. Mereka juga berburu kijang *Tragulus* spp., orangutan, rusa *Cervus unicolor*, sapi, badak Sumatera, dan beruang (*sunbear*). Manusia awal juga memiliki kebiasaan membawa hasil tangkapannya yang berupa ikan, burung, kadal, dan buaya ke dalam gua tempat tinggalnya.¹⁹

Dalam konsepsi dasarnya, manusia prasejarah di Indonesia sejak Kala Pasca Plestosen telah mulai memanfaatkan gua-gua kapur sebagai tempat tinggal sementara. Gua-gua itu suatu waktu akan ditinggalkan, yaitu saat alam sekitarnya sudah tidak dapat menyediakan bahan makanan. Pola seperti ini banyak dijumpai jejaknya di Jawa, Sulawesi Selatan, Flores, dan Timor.²⁰

Hasil penelitian Gua Babi di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa pada masa okupasi manusia prasejarah di gua ini, teras gua telah dimanfaatkan secara intensif untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Hal ini didukung oleh bukti-bukti lapisan budaya berupa *shell-bed* bercampur abu hasil pembakaran yang tebal. Berdasarkan analisis radiokarbon C-14 atas sampel abu bekas pembakaran dapat diketahui bahwa paling tidak budaya Gua Babi telah berusia 6.000 tahun.

¹⁷ Widiyanto, *op.cit*.

¹⁸ Harry Widiyanto dan Handini, *Ekskavasi Situs Gua Babi Tahap III – IV Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan*, Laporan Penelitian Arkeologi Banjarmasin, 1998/1999.

¹⁹ MacKinnon, *op.cit*.

Namun demikian, tradisi kapak perimbas yang bercorak kasar dan sederhana teknik pembuatannya masih dapat ditemukan bukti-buktinya, baik di daerah Awangbangkal²¹ (Banjar) maupun di kawasan Bukit Batu Buli (Tabalong).

Gundukan tanah di Gua Niah menampakkan budaya alat batu yang sangat rumit berasal dari 20.000 tahun yang lalu. Kemungkinan alat-alat batu itu berfungsi, sebagai sarana membunuh satwa dan menyiapkan makanan maupun membentuk artefak lain dari bahan kayu, bambu, dan tulang.²²

Pada masa yang lebih kemudian di Gua Babi, unsur alat batu dan alat tulang menunjukkan keterkaitan dengan kehidupan gua di Sulawesi Selatan. Bahan dasar utama pembuatan alat batu diyakini diambil dari sekitar Sungai Uya yang berada sekitar 2 kilometer dari gua. Komponen tembikar yang ditemukan di sini memperlihatkan pengaruh Bau-Malaya, yaitu tradisi tembikar yang berkembang di Asia Tenggara. Ciri-ciri budaya Gua Babi menunjukkan situs yang bersifat komponen ganda (*multicomponent site*) yang berkaitan dengan budaya periode praneolitik hingga akhir neolitik (awal perundagian).

Dengan alat-alat batu dan tulang²³ pendukung budaya Gua Babi mengeksploitasi sumber daya makanan di sekitar gua. Salah satu makanan utama adalah siput air tawar (*Gastropoda*) yang diperoleh dari areal depan gua dan sekitarnya. Diduga, pada masa lampau, areal ini adalah lingkungan rawa (payau) ataupun sungai.²⁴ Siput-siput ini dipecah bagian ujungnya untuk memudahkan mengeluarkan dagingnya, dan dimasak dalam perapian yang ditemukan di tengah-tengah teras gua. Selain mengeksploitasi siput air, penghuni gua juga melakukan perburuan binatang²⁵ dan meramu makanan, yang dibuktikan dengan temuan akumulasi tulang binatang di tengah himpunan artefak batu yang sangat melimpah.

Orang Penan (Punan) di Kalimantan, diduga memiliki budaya berburu dan pengumpul makanan dari masyarakat pertanian.²⁶ Mereka mengokupasi wilayah hutan Sarawak dan Kalimantan, menempati hunian sementara dengan keluarga-keluarga kecil, berburu dengan sumpit, memanfaatkan batang-batang sagu liar (*Eugeisona utilis*), mengumpulkan buah hutan seperti rambutan, durian, dan mangga, serta mempertukarkan hasil hutan dengan masyarakat pertanian seperti orang-orang Kayan.²⁷ Benar-tidaknya bahwa orang Punan adalah orang Negrito asli atau termasuk imigran Mongoloid seperti orang Dayak, gaya hidupnya mencerminkan kehidupan manusia-manusia awal.

Penghuni kepulauan yang merupakan orang-orang pra-Austronesia kemungkinan telah menggunakan kapak-kapak jenis *edge-ground* seperti yang ditemukan di Niah, tetapi belum memanfaatkan tembikar. Meskipun mereka mengeksploitasi pohon buah, sagu, dan akar umbi, secara sistematis mereka tidak menanam spesies ini. Bentuk paling awal dari budaya pertanian menetap mungkin berasosiasi dengan introduksi palem sagu (*Metroxylon sagu*) dari Indonesia

²⁰ R.P. Soedjono (ed), *Sejarah Nasional Indonesia* Jilid I, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

²¹ Pada 1939 van Heekeren menemukan alat-alat batu menyerupai alat-alat tipe Hoabinh yang monofasial; Toer Soetardjo pada 1958 menemukan sebuah kapak perimbas terbuat dari kerakal kuarsa varian jaspis, yang berbentuk bulat dan berwarna cokelat kemerahan; berukuran panjang 13cm, lebar 11cm, dan tebal 4 cm. Tim Bintarti pada 1976 menemukan alat-alat dari kuarsa yang disiapkan secara monofasial.

²² MacKinnon, *op.cit.*

²³ Alat batu terdiri atas serut ujung, serut samping, serut cekung, serut berpunggung tinggi, gurdi, lancip bertangkai, bilah dipakai, lancip, serpih dipakai, batu inti, perkurator dan batu penumbuk, batu pelandas, kapak perimbas, serpih bilah, dan sepihan; Alat tulang terdiri dari lancip, spatula, ujung munduk dan perhiasan.

²⁴ Harry Widiyanto, *op.cit.*

²⁵ Binatang yang diburu antara lain monyet, bulus, musang, ayam, ikan dan kepiting.

²⁶ Bellwood 1985 dan Hoffman 1981 *vide* MacKinnon, *op.cit.*

²⁷ Hose & McDougall 1912 dan Kredit 1978 *vide* MacKinnon, *ibid.*

Timur. Kemampuan memungut hasil panen sagu secara reguler mengakibatkan terbentuknya permukiman menetap.²⁸

Pengucap Bahasa Austronesia yang pada masa kemudian ekspansi ke Kepulauan Indomalaya dari Asia Daratan, membawa budaya ekonomi pertanian yang mengutamakan produksi biji-bijian, memperkenalkan tembikar, dan pahat batu (*unibvelled stone adze*). Diduga, beras mulai diperkenalkan di Indonesia oleh para imigran Mongoloid Selatan, tetapi tidak ada bukti ditemukannya budaya beras di Kalimantan.

Artefak dari situs penguburan di Gua Niah, yang berangka tahun antara 0-1.400 Masehi, menunjukkan bahwa pada akhir masa Neolitik orang-orang Kalimantan telah memiliki budaya yang cukup maju, yang ditandai dengan pembuatan pahat batu, tembikar, perhiasan tulang dan cangkang moluska, peti bambu, peti kubur kayu, tikar pandan, dan tekstil katun. Masyarakat pendukung budaya ini mempraktikkan penguburan ritual termasuk kremasi dan penguburan sekunder. Tradisi masih dapat dilihat pada masyarakat Ngaju yang sekarang berada di Kalimantan Tengah.

Perubahan signifikan pada gaya hidup terjadi dengan penemuan bijih besi yang ditemukan cukup melimpah di Kalimantan. Bijih besi dibentuk menjadi belati, peralatan pertanian, gurdi untuk melubangi sumpit, dan alat perang seperti parang dan *mandau*. Kemampuan pengerjaan besi dan pembuatan peralatan dari besi kemungkinan muncul lebih awal berasosiasi dengan pengenalan tembaga-perunggu dan artefak besi dan teknologi yang memadai dari Vietnam, Cina, dan India antara abad 5-10 Masehi.²⁹ Salah satu bukti telah adanya pemanfaatan teknologi logam adalah temuan musa (kowi) di Situs Jambu Hilir (Hulu Sungai Selatan).³⁰

Penggunaan peralatan dari besi memudahkan pembersihan hutan untuk penanaman beras dan talas. Tradisi ladang berpindah masih dipraktikkan secara luas di Kalimantan sampai saat ini. Budaya Megalitik Batu yang terdiri atas dolmen, menhir, tempayan kubur, pahatan pada batu, dan lukisan cadas untuk pemenuhan kebutuhan spiritual, baru ditemukan bukti-buktinya di daerah sebelah utara Kalimantan. Di pemukiman Ngorek ditemukan sebanyak 50 situs penguburan yang memperlihatkan monumen-monumen batu dan alat batu. Sampai dengan 1950, Suku Kelabit masih melaksanakan budaya megalitik, yaitu membangun batu-batu besar.³¹

Kegiatan spiritual di daerah Kalimantan Selatan pada masa lampau ditandai dengan temuan rangka manusia yang dikubur di Gua Tengkorak dengan posisi kepala menengadah, kedua kaki terlipat, tangan kiri terbujur lurus dengan telapak tangan memegang pergelangan kaki kiri, sementara tangan kanan menyilang di atas pinggul.³²

B. MASA BERBURU DAN MENGUMPULKAN MAKANAN TINGKAT SEDERHANA

1. Pemenuhan Keperluan Hidup

Di Kalimantan Selatan, aktivitas masyarakat prasejarah pada masa berburu dan meramu tingkat sederhana ditunjukkan dengan adanya bukti beberapa tinggalan budaya paleolit yang ditemukan di Awangbangkal Aranio (Kabupaten Banjar) berupa kapak perimbas oleh seorang geolog bernama Toer Soetardjo pada tahun 1958. Sebelumnya, H. Kupper pada tahun 1939 juga menemukan alat-alat batu di daerah tepi selatan sungai Riam Kanan di Awangbangkal. Alat-alat yang ditemukan digolongkan sebagai unsur budaya kapak perimbas dibuat dari batu kuarsa terdiri

²⁸ Avé dan King 1986 *vide* MacKinnon, *ibid*.

²⁹ Bellwood, *op.cit*.

³⁰ Nasruddin, "Ekskavasi Situs Jambu Hilir Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan", Laporan Penelitian Arkeologi Banjarmasin, 1996/1997.

³¹ MacKinnon, *op.cit*.

³² Harry Widiyanto dan Handini, "Ekskavasi Situs Gua Babi Tahap V Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan", Laporan Penelitian Arkeologi Banjarmasin, 1999/2000.

dari 5 (lima) buah kapak perimbas dan 2 (dua) buah alat serpih.³³ Bukti lain adalah beberapa produk budaya paleolit yang menjadi koleksi Museum Lambung Mangkurat Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

Dari analisis Balai Arkeologi Banjarmasin terhadap koleksi museum dapat diketahui tipologi dan teknologi produk budaya tersebut sehingga dapat dijadikan indikasi untuk mengetahui tingkat kehidupan manusia prasejarah di Kalimantan Selatan. Hasil analisis tersebut adalah :

- a. *Kapak perimbas*, yaitu sejenis alat batu yang dipersiapkan dengan teknik pemangkasan sederhana secara langsung dari batu-batu berakal atau dari pecahan batu yang diperoleh dari pembenturan dengan batu-batu besar. Ciri-cirinya adalah tajaman berbentuk konveks (cembung) atau kadang-kadang lurus yang diperoleh dari teknik pemangkasan pada salah satu pinggiran batu (monofasial), kulit batu (korteks) masih terlihat dominan melekat sebagian besar di permukaan alat.
- b. *Kapak penetak*, merupakan alat batu yang disiapkan dari segumpal batu yang mempunyai tajaman berbentuk liku-liku yang diperoleh melalui teknik pemangkasan selang seling pada kedua pinggiran atau sisi batuan.
- c. *Serpih besar*, merupakan akibat teknik pembenturan batuan yang menghasilkan pecahan batu yang cukup besar, dapat digunakan sebagai alat penggaruk, serut, gurdi, penusuk atau nisan batu. Ciri-ciri utama adalah bentuknya yang sederhana dengan memperlihatkan kerucut pukul yang jelas. Beberapa bentuk serpih besar yang ada, menunjukkan teknik penyiapan alat yang cukup baik. Bentuk alat secara teliti dipersiapkan sebelum dilepaskan dari batu intinya, sehingga tampak jelas bentuk faset-faset pada bagian dataran pukulnya.
- d. *Kapak genggam sederhana*, merupakan alat batu yang disiapkan dari sebuah serpih besar, dengan teknik pemangkasan pada salah satu permukaan batu untuk memperoleh bentuk tajaman yang diinginkan. Bentuk umumnya meruncing dengan kulit batu (*korteks*) masih dominan dilihat pada bagian pangkal alat sebagai tempat pegangannya.

Tinggalan budaya di atas, merupakan budaya paleolitik (batu tua), karena ciri utama alat paleolitik dalam membentuk tajamannya adalah dengan teknik pemangkasan (*chipping*) dan penyerpihan (*flaking*). Teknik pemangkasan dilakukan pada satu muka (*monofasial*) maupun dua muka (*bifasial*) dengan produk alat-alat masif. Teknik penyerpihan pembuatannya lebih cermat dalam pemangkasan dan menghasilkan beberapa serpih dari komponen alat-alat non masif dengan produk berupa alat-serpih (*flake*), bilah (*blade*), dan serut (*scraper*). Budaya ini berkembang pada masa kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana.

Pada ekskavasi situs Batu Babi juga ditemukan kapak perimbas, kayu penetak, kapak bahu dan beberapa serpih. Benda-benda tersebut digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dalam rangka memenuhi keperluan hidup, seperti berburu binatang, baik binatang kecil maupun binatang besar yang ada di sungai atau di daratan. Selain untuk berburu juga digunakan untuk meramu makanan, seperti memotong, memecah atau mencungkil.

2. Perlindungan terhadap Alam

Di daerah Indonesia bagian barat, khususnya Kalimantan dan Sumatera, curah hujan lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah di bagian timur karena terletak dekat dengan garis khatulistiwa. Suhu rata-rata di daerah dataran rendah adalah 26° Celcius dan di daerah dataran tinggi 20° Celcius, makin tinggi lokasi suatu tempat makin berkurang suhunya hingga rata-rata 6°

³³ R.P. Soedjono (ed), *op.cit.*

Celcius tiap seribu meter.³⁴ Hujan lebat yang berlangsung selama masa pluvial menyebabkan tumbuhnya hutan lebat di Malaya, Kalimantan, dan Sulawesi Utara, serta mengakibatkan terjadinya banyak sungai. Sungai-sungai Sampit, Kahayan, dan Barito di Kalimantan Selatan pernah bergabung dengan sungai-sungai di Jawa Utara dan bermuara bersama-sama di sebelah utara Pulau Bali, di sekitar Kangean.³⁵ Perubahan-perubahan pasang-surutnya air laut selama Kala Plestosen menyebabkan pula perubahan naik-turunnya muka air sungai.

Lokasi hunian manusia Kala Plestosen di Kalimantan, yang diduga menempati daerah berhutan rimba yang dibelah-belah oleh beribu-ribu sungai, di antara habitat hewan-hewan liar seperti kijang, rusa, kerbau, gajah, ataupun buaya, memaksa manusia mengembangkan pemikiran dan kemampuan merancang alat untuk dapat memenuhi kebutuhan makanannya sekaligus mempertahankan diri untuk tetap hidup.

Alat-alat yang berkembang kala ini pada awalnya mengutamakan segi praktis sesuai dengan tujuan penggunaan saja, namun pada tahap selanjutnya meningkat ke arah penyempurnaan bentuk perkakas. Penelitian di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, menunjukkan bukti-bukti telah dikenalnya tradisi kapak perimbas (*chopper*) dan tradisi serpih (*flakes*).

Situs-situs yang mengandung banyak temuan kedua tradisi tersebut adalah Awangbangkal (Banjar) dan kawasan Bukit Batu Buli (Tabalong). Kapak perimbas yang ditemukan di Awangbangkal menunjukkan ciri-ciri bahan kuarsa varian jaspis, berbentuk bulat, berwarna coklat kemerahan, berukuran panjang 13cm, lebar 11,7cm, dan tebal 4cm, serta tertutup patina dan tampak terkikis sekali. Perimping³⁶ tampak jelas pada bagian tajaman alat. Pemangkasan pada alat ini telah dilakukan secara kasar pada satu pinggiran bidang untuk memperoleh tajaman yang konveks.³⁷

Temuan di kawasan Bukit Batu Buli, tepatnya Situs Gua Babi, menunjukkan kapak perimbas terbuat dari batuan basalt, berbentuk memanjang dan lonjong menyerupai setrika dengan dasar datar berupa permukaan asli batuan, tertutup kulit batu. Pemangkasan bervariasi 1) terjal pada pangkal, meruncing pada distal lewat pangkasan landai ke arah dorsal; 2) miring pada distal untuk menciptakan tajaman monofasial, dan ada upaya merapikan bidang tajaman. Serpih banyak ditemukan pada ekskavasi Situs Gua Babi dengan bahan rijang dan basalt, berbentuk dan ukuran yang bervariasi, tetapi cenderung tidak beraturan dengan sisi yang tumpul. Serpih dipakai menunjukkan bekas-bekas pemakaian berupa perimping halus dan teratur pada bagian tertentu yang kadang menutupi sebagian besar sisinya.³⁸

Satu penemuan yang sangat penting dalam upaya menunjang kelangsungan hidup manusia pada kala ini adalah api. Kemungkinan api mula-mula dikenal di Kalimantan sebagai gejala alam yang berasal dari kebakaran padang rumput dan hutan kering yang disebabkan halilintar, atau hasil gesekan dahan-dahan kering saat tertiup angin, atau sebagai nyala api hasil semburan gas bumi yang keluar dari tempat-tempat tertentu. Fungsi apa yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan manusia, dari menyiapkan makanan sampai mencegah serangan binatang buas, timbul upaya manusia untuk dapat membuat api sendiri. Secara tidak sengaja manusia berhasil mendapat api sebagai dampak sampingan pembuatan alat-alat batu. Pembenturan batu, terutama yang mengandung anasir besi (*pyrite*), menimbulkan percikan-percikan api.³⁹

Berlainan dengan kondisi Kala Plestosen, keadaan lingkungan hidup pada Kala Pasca Plestosen tidak banyak berbeda dengan kondisi sekarang. Corak kehidupan berburu dan

³⁴ Van Heekeren 1972 *vide* R.P. Soejono (ed), *ibid*.

³⁵ Marks tt. *Vide* R.P. Soejono (ed), *ibid*.

³⁶ Tanda-tanda bekas pemakaian

³⁷ R.P. Soejono (ed), *op.cit*

³⁸ Harry Widiyanto *et.al*, *op.cit*.

³⁹ R.P. Soejono (ed), *op.cit*.

mengumpulkan makanan dari sumber daya alam masih tetap berlanjut. Pada kala ini mulai muncul upaya lebih intensif untuk dapat mempertahankan diri dari gejala-gejala alam dan serangan binatang buas, yaitu bertempat tinggal secara tidak tetap di dalam gua-gua alam. Tipe gua yang dipilih terutama adalah ceruk payung (*rock shelter*), yang pada suatu saat akan ditinggalkan dan berpindah ke lokasi gua yang lain.

Upaya mencari lokasi permukiman yang lebih menguntungkan dan aman, kemampuan membuat perkakas perlindungan diri lebih berkembang, yaitu secara umum dengan berlangsungnya tradisi serpih-bilah, alat tulang, kapak genggam Sumatera. Dari penelitian Situs Gua Babi diketahui bahwa tradisi yang berkembang adalah serpih-bilah dan alat tulang. Teknik pembuatan alat-alatnya masih melanjutkan teknik pada masa sebelumnya, tetapi bentuk dan coraknya lebih bervariasi. Pada serpih, karakter morfologi dan teknologinya sama dengan serpih, kecuali bentuknya yang memiliki sisi lateral relatif sejajar dengan perbandingan panjang dan lebar sekitar 2 : 1. Alat-alat serpih dengan bentuk tertentu dapat digunakan sebagai mata panah atau mata tombak, sedangkan bilah untuk menguliti atau mengiris daging hasil binatang buruan. Alat tulang yang ditemukan di Situs Gua Babi terdiri atas spatula, lancip, dan lancip ganda (ujung muduk).⁴⁰ Adapun fungsi alat-alat ini mungkin digunakan untuk menggali dan membersihkan kulit umbi-umbian. Lancip ganda (ujung muduk) merupakan tipe yang juga ditemukan di Sulawesi dan Australia.⁴¹

3. Kehidupan Masyarakat

Di Kalimantan Selatan alat-alat prasejarah yang seperti tersebut di atas ditemukan oleh beberapa peneliti Museum Propinsi Kalimantan Selatan Lambung Mangkurat yang disimpan sebagai koleksi museum tersebut.

Pada tahun 1939 di sebuah undak sungai di tepi selatan Sungai Riam Kanan di Awangbangkal oleh H. Kupper ditemukan alat-alat dari batu. Pada mulanya Van Heekeren berpendapat bahwa alat-alat ini menyerupai alat-alat tipe Hoa Binh yang monofasial, mengingat antara lain keadaan perkakas tidak menunjukkan patina pada bagian-bagian yang dipangkas, seakan-akan tempat baru dibuat dan masih segar. Tetapi Van Heekeren kemudian mengubah pendapatnya dan menggolongkan alat-alat tersebut dibuat dari kwarsa terdiri dari 5 (lima) buah yang bercorak kapak perimbas dan 2 (dua) buah alat-alat serpih.⁴²

Pada tahun 1958 Toer Soetardjo menemukan sebuah alat paleolitik di Awangbangkal, kecamatan Karang Intan. Alat tersebut ditemukan di dasar sungai Riam Kanan, yang mengalir di sebelah tenggara Martapura. Lokasi yang tepat penemuannya itu belum diketahui. Sungai Riam Kanan terletak di sebelah Barat pegunungan Meratus.⁴³ Daerah aliran sungai yang terbentuk di sebelah tenggara Awangbangkal melintasi susunan lapisan yang berasal dari pra-tercier dan terciar. Penemuan pada tahun 1958 berupa sebuah kapak perimbas dibuat dari krakal kwarsa varian jaspis, yang berbentuk bulat dan berwarna coklat kemerahan. Ukurannya panjang 13 cm; lebar 11,7 cm dan tebal 4 cm. Pada tahun 1976, survai dilaksanakan oleh tim D.D. Bintarti di aliran sungai Riam Kanan di sekitar tempat penemuan yang lama, berhasil menemukan beberapa buah alat batu dalam koleksi Awangbangkal. Alat-alat ini dibuat dari kwarsa dan disiapkan secara monofasial. Bentuknya mirip dengan kapak perimbas temuan 1958, tetapi berukuran lebih kecil. Alat-alat ini ditemukan di dasar sungai Riam Kanan yang sedang pasang pada waktu ditemukan.

⁴⁰ Harry Widiyanto, *op.cit.*

⁴¹ R.P. Soejono (ed), *op.cit.*

⁴² R.P. Soedjono, (ed) *ibid.*, hal. 103.

⁴³ R.P. Soedjono (ed), *ibid.*, hal. 102.

Dibandingkan dengan alat-alat temuan Kupper, kapak-kapak perimbas yang ditemukan pada tahun 1958 berukuran lebih besar.⁴⁴

Di Museum Propinsi Kalimantan Selatan mengoleksikan 143 buah koleksi benda-benda atau alat-alat prasejarah, diantara koleksi tersebut terdapat alat-alat paleolitik yang berupa alat batu seperti : kapak penetak, kapak perimbas, kapak genggam sederhana dan serpih. Koleksi ini diadakan bukan melalui penggalian atau penelitian khusus, tetapi melalui hibah dari penemunya. Di daerah Kalimantan Selatan yang lokasi temuannya ada yang bersamaan dengan temuan-temuan yang terdahulu yaitu daerah Awangbangkal kecamatan Karang Intan kabupaten Banjar.⁴⁵

Ditinjau dari sudut temuan-temuan alat-alat paleolitik tersebut berarti di daerah Kalimantan Selatan juga mengalami masa paleolitik yang berupa masa berburu dan mengumpulkan tingkat awal seperti halnya di Jawa dan daerah-daerah lain di Indonesia. Hanya penelitian yang intensif belum dilakukan, sehingga belum banyak temuan yang diapat, termasuk sisa-sisa manusia pendukung kebudayaan tersebut yang sampai sekarang belum pernah ditemukan di daerah ini.

Kelompok berburu tersusun dari keluarga kecil, yang laki-laki melakukan perburuan dan yang perempuan mengumpulkan makanan berupa tumbuh-tumbuhan dan hewan kecil, yang tidak memerlukan pengeluaran tenaga terlalu besar. Selain itu, perempuan mengurus anak-anak. Peranan perempuan penting sekali dalam memilih tumbuhan yang dapat dimakan dan membimbing anak-anak dalam meramu. Setelah api ditemukan, maka peramu menemukan cara-cara memanasi makanan dan berkewajiban memelihara api. Kewajiban inilah yang menghambat perempuan untuk mengikuti perburuan ke daerah-daerah luas dan sedikit banyak mengurangi gerak pindah kelompok.⁴⁶ Akibat perhatian perempuan ditujukan ke lingkungan yang terbatas, maka ia mampu memperluas pengetahuannya tentang seluk beluk tumbuh-tumbuhan, meningkatkan cara-cara menyiapkan makanan dan mendidik anak-anak dalam mempersiapkan diri mengenal keadaan alam sekelilingnya.⁴⁷

Dalam perkembangan masyarakat perburu ada 2 (dua) hal yang sangat menentukan dalam sistem hidup berburu dan meramu adalah alat-alat dan api. Untuk membantu kegiatan pokok tersebut diperlukan alat-alat yang ampuh. Pembuatan dari batu, kayu, tulang dan tanduk merupakan kegiatan tersendiri yang makin lama makin menuju kepada penyempurnaan bentuk dan fungsi alat-alat itu. Alat-alat atau perkakas manusia plestosen yang ditemukan pada dasarnya merupakan alat-alat untuk kegiatan perburuan dan meramu.

Teknik pembuatan perkakas di Indonesia dan Asia Timur tidak menunjukkan perkembangan ke arah bentuk alat-alat yang lebih maju. Keadaan ini mungkin sekali disebabkan manusia di sini lebih banyak menggunakan kayu sebagai bahan pembuatan alat-alat, sehingga tidak memberikan perhatian sepenuhnya kepada kemajuan pembentukan alat-alat batu. Alat-alat batu yang diciptakan *Pithecanthropus* berupa kapak perimbas dan serpih bilah sepanjang masa kehidupannya tidak mengalami perkembangan lebih lanjut dalam bentuk dan teknik pembuatan.⁴⁸

Penemuan api pada tingkat hidup berburu dan mengumpulkan makanan menjadi landasan yang menentukan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Api mula-mula dikenal sebagai gejala alam sekelilingnya seperti percikan gunung api, halilintar atau saling menggosokkan dahan-dahan kering waktu angin bertiup dan sebagainya. Api bermanfaat bagi kehidupan manusia seperti memanasi makanan, mencegah serangan binatang buas, menerangi lingkungan dan sebagainya maka api mulai dipelihara. Kemudian ditemukan cara membuat api sendiri dalam proses pembuatan alat-alat batu. Pembenturan batu dengan batu menimbulkan percikan api yang percikan ini ditampung

⁴⁴ R.P. Soedjono (ed) , *loc.cit*.

⁴⁵ Laporan Hasil Analisis Koleksi Prasejarah Museum Lambung Mangkurat.

⁴⁶ R.P. Soedjono (ed), *op.cit*, hal. 119

⁴⁷ R.P. Soedjono (ed) , *ibid*, hal. 120.

dengan semacam lumut kering, sehingga terjadilah bara api. Tanda penggunaan api pada masa plestosen ini ditemukan di chou-kou-tien ditemukan sisa-sisa tulang binatang terbakar ditemukan dalam lapisan yang mengandung kapak perimbas. Di Indonesia ditemukan bukti-bukti api di sekitar temuan pithecanthropus berupa kayu yang sudah terbakar yang mungkin bekas kebaran hutan akibat letusan gunung api pada masa plestosen. Penguburan mayat mungkin sekali belum dilakukan oleh pithecanthropus erectus.⁴⁹

Bahasa sebagai alat komunikasi manusia sudah mulai terbentuk pada tingkat hidup berburu. Untuk kegiatan berburu yang dilakukan bersama dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan kelompok telah diciptakan sejenis alat-alat komunikasi melalui kata-kata. Selain dengan tanda-tanda melalui gerakan-gerakan badan. Berkomunikasi dengan bahasa sederhana dapat dibuktikan melalui penelitian indokranial pada pithecanthropus. Pada tingkat homo sapiens telah tercipta bahasa yang menjadi alat komunikasi utama dalam kehidupan manusia.⁵⁰

C. MASA BERBURU DAN MENGUMPULKAN MAKANAN TINGKAT LANJUT

1. Pemenuhan Keperluan Hidup

Corak hidup masyarakat berburu dan meramu tingkat lanjut pada kala pasca plestosen masih dipengaruhi oleh cara hidup masa sebelumnya. Proses adaptasi dengan lingkungan masih berlangsung.

Kesulitan yang ditimbulkan oleh alam seperti hujan, panas, angin dan ganasnya serangan binatang buas menimbulkan inisiatif untuk berlindung, menghindar dan mempertahankan diri. Dari pengalaman dan pengetahuan, gua menjadi salah satu alternatif untuk itu, selanjutnya gua bukan hanya sebagai tempat berlindung, tapi merupakan kawasan hunian yang tepat karena juga dapat memenuhi kebutuhan pangan. Di dalam gua terdapat habitat dari berbagai jenis hewan seperti kelelawar, tikus, musang dan beberapa jenis reptil. Gua hunian ini biasanya tidak begitu jauh dengan aliran sungai. Tinggal dalam gua hunian telah mempengaruhi corak hidup mereka. Dari pengalaman mendapatkan tunas-tunas yang tumbuh dari sisa umbi-umbian muncul gagasan untuk merawat, yang akhirnya menimbulkan kepandaian bercocok tanam secara sederhana. Kegiatan ini dikerjakan oleh kaum wanita yang lebih banyak waktu tinggal di dalam gua.

Di Kalimantan Selatan bekas gua hunian masyarakat prasejarah dengan segala aktivitasnya terungkap secara valid setelah ekskavasi yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Banjarmasin di situs Gua Babi. Ekskavasi dilakukan secara intensif sebanyak 5 (lima) tahap. *Tahap I dan II* dilaksanakan pada tahun 1996 dan 1997, *tahap III dan IV* tahun 1998 dan 1999 dan *tahap V* merupakan ekskavasi terakhir pada tahun 1999.

Produk budaya yang ditemukan pada kotak-kotak ekskavasi menurut analisis Balai Arkeologi Banjarmasin berasal dari kehidupan pada pasca plestosen pada tingkatan preneolitik (mesolitikum) hingga neolitikum akhir (awal perundagian), yaitu sekitar 10.000 hingga 4.000 tahun yang silam. Di lain pihak terdapat unsur budaya lain yaitu di depan teras gua sebagai tempat penguburan dari periode yang lebih muda yakni jaman Perundagian sekitar 2500 tahun yang lalu.⁵¹

Benda yang ditemukan adalah kapak perimbas, kapak genggam, kapak penetak, serpihan (chunk), serpih, serut, bilah, batu inti, batu pelandas, batu giling, batu pukul, batu asah, fragmen beliung persegi, lancipan, bor, tembikar, spatula dan fragmen tulang fauna bercampur dengan sisa-sisa cangkang moluska air tawar dan bekas-bekas pembakaran.

⁴⁸ R.P. Soedjono (ed), *loc.cit.*

⁴⁹ R.P. Soedjono (ed), *ibid.*, hal. 121.

⁵⁰ R.P. Soedjono (ed), *ibid.*, hal. 123.

⁵¹ Harry Widiyanto, Retno Handini, 1988/1999, *op.cit.* hal. 81.

Temuan benda-benda itu secara fungsional merefleksikan intensitas perilaku subsistensi aktivitas berburu dan mengumpulkan makanan dengan kategori artefak berburu terdiri atas kapak (perimbas, kapak genggam, penetak) dan batu pukul untuk memukul, memecah, melempar dan memotong, kemudian artefak serpih bilah, batu inti dan lancipan untuk memotong dan digunakan pula sebagai mata tajam senjata lempar. Sedangkan batu asah untuk mengasah mata tajam senjata lempar. Artefak untuk kategori meramu atau mengumpulkan makanan terdiri atas : beliung persegi untuk menggali umbi-umbian, akar-akaran, artefak serut untuk memotong dan artefak lancipan untuk mencungkil daging cangkang moluska. Artefak batu giling dan batu pelandas untuk memecahkan dan menghancurkan umbi-umbian, biji-bijian, cangkang moluska, kepiting dan lain-lain dan artefak spatula, mangkuk dan periuk digunakan sebagai alat untuk merebus dan mengaduk.⁵²

Beberapa batu giling menunjukkan permukaan bekas pewarna merah yang diduga sebagai warna hematit yang dipakai sebagai pewarna gerabah.

Tinggalan yang paling banyak ditemukan adalah cangkang moluska dan sekitar 55% menampakkan ciri-ciri pemangkasan pada bagian apexnya.⁵³

Moluska yang diidentifikasi sebanyak 11 (sebelas) kelas, ada 2 (dua) kelas yang paling banyak, yaitu kelas *gastropoda* (lebih dominan) dan kelas *pelecypoda*. Dari kelas *gastropoda* yang paling banyak dimanfaatkan adalah jenis *thiaridae* (*Katuyung*; bahasa Banjar) dan (*Sihi lymnaeidae*; bahasa Banjar). Bekas-bekas pembakaran dan tinggalan berupa mangkuk dan periuk gerabah merupakan indikasi adanya pengolahan makanan dengan dimasak.

Selain cangkang moluska ditemukan tulang-tulang berbagai jenis hewan yang selalu ada pada tiap lapisan tanah, yaitu ordo *artidactyla* (jenis *bovidae*, *cervidae* (Rusa), *suidae* dan *tragulidae* (kancil), *carnivora* (*ursidae*, jenis *ursus malarjuensis* = Beruang Madu) dan *viveridae* (Musang), ordo *chiroptera* (jenis *megachiroptera* = Kalong dan *microchiroptera* = Kelelawar), ordo *rodentia* diwakili oleh *hytridae* (Landak), *Primata*, *cercopithecidae* dan *macaca Sp* (monyet), *testudinidae* (Bulus), *varanidae* (Biawak), *ophidae* Ular jenis *Phyton*), *gallus-gallus* (Ayam hutan), *brachyura* (Kepiting), *natania* (Udang), *Pisces* jenis *ophiocephalus Sp* (Ikan Gabus/Haruan; Bahasa Banjar).

Dengan ditemukannya sisa binatang di atas menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat zaman ini adalah perburuan binatang kecil (*small-game hunting*) dan perburuan binatang air (*aquatic hunting*).

Dari banyaknya cangkang moluska yang ditemukan menunjukkan makanan tersebut sangat digemari dan mudah cara mendapatkannya, di samping binatang lainnya. Sampai sekarang pun masyarakat Banjar masih mengkonsumsi moluska yang dikenal dengan *haliling* yang dimasak dengan lemak santan. Bagian puncaknya dipotong untuk memudahkan mengeluarkan isinya dengan cara mengecup bagian permukaan. Variasi makanan lainnya adalah jenis umbi-umbian, buah-buahan dan akar-akaran yang tumbuh di sekitar Gua Babi yang ditawarkan oleh kawasan hutan hujan tropik yang terkenal subur. Binatang buruan selain sebagai sumber energi makanan, bagian tubuhnya juga dimanfaatkan sebagai alat kerja dan perhiasan seperti tulang, tanduk dan kulit (kerang).

Itulah aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat prasejarah di Kalimantan Selatan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Alat pendukung yang diproduksi merupakan hasil budaya yang tercipta dalam rangka menjawab tantangan untuk memenuhi keperluan hidup. Menurut penelitian

⁵² Fadila Arifin Aziz, Berkala Arkeologi Amerta No. 21, Proyek Peningkatan Penelitian Arkeologi Jakarta, 2001, hal. 34.

⁵³ Bambang Sugiyanto, "Temuan Moluska dari Situs Gua Babi, Lubang Payau, dan Gua Kimanis: Studi Perbandingan Pola Subsistensi Makanan, dalam Bulletin Arkeologi *Naditira Widya* No. 04, Balai Arkeologi Banjarmasin, 2000, hal. 4.

di situs Batu Babi, bahan yang digunakan untuk membuat peralatan bukan berasal dari daerah sekitar, tetapi diambil dari sungai Uya yang berjarak sekitar 2 km dari gua hunian.

Selain situs Batu Babi, ekskavasi juga dilakukan di situs Jambu Hilir. Ada beberapa produk budaya mesolitikum yang ditemukan, yaitu batu giling dan serpih dari jenis batu rijang dan batu pukul bersama-sama dengan temuan gerabah. Gerabah adalah benda yang paling banyak ditemukan dan berasal dari masa bercocok tanam.

2. Kehidupan Masyarakat

Cara hidup manusia pada masa berburu tingkat lanjut masih dipengaruhi oleh cara hidup pada masa sebelumnya. Faktor-faktor alam seperti iklim, kesuburan tanah dan keadaan binatang, sangat berpengaruh dan menentukan cara hidup mereka sehari-hari.⁵⁴ Hidup mereka masih sepenuhnya tergantung kepada alam lingkungan.⁵⁵

Mereka hidup berburu binatang di dalam hutan, menangkap ikan, mencari kerang dan siput di laut atau di sungai dan mengumpulkan makanan dari alam sekitarnya, misalnya umbi-umbian seperti keladi, buah-buahan atau biji-bijian dan daun-daunan. Hidup berburu dan mengumpulkan makanan cara hidup yang pokok pada masa itu.

Selama tinggal di dalam gua-gua mereka mengerjakan alat-alat yang diperlukan, melukiskan sesuatu di dinding gua itu, yang menggambarkan pengalaman, perjuangan dan harapan hidup. Lukisan-lukisan itu dibuat dengan cara menggores pada dinding-dinding karang atau gua atau dengan mempergunakan bahan-bahan cat yang berwarna merah, hitam atau putih. Sumber inspirasi lukisan-lukisan ini adalah cara hidup mereka yang serba bergantung kepada alam lingkungannya yaitu hidup berburu dan mengumpulkan makanan. Lukisan ini menggambarkan harapan hidup mereka, agar berhasil membunuh binatang itu. Mereka menangkap ikan mempergunakan mata panah atau ujung tombak, yang berbentuk kecil, mungkin pula disertai racun.⁵⁶ Selain itu, dipakai juga mata pancing dari tulang. Lukisan orang naik perahu merupakan suatu lukisan tentang kehidupan menangkap ikan.

Bercocok tanam dikerjakan mereka dengan sangat sederhana dan dilakukan secara berpindah-pindah. Hutan yang akan dijadikan tanah pertanian dibakar terlebih dahulu, kemudian dibersihkan. Di situ mereka tanami umbi-umbian seperti keladi, karena belum mengenal cara menanam biji-bijian. Mungkin mereka sudah mengenal padi liar di hutan dan mereka tanam, kemudian mereka mengetam dengan mempergunakan pisau-pisau batu yang tajam. Sesudah panen berlalu, tanah pertanian itu mereka tinggalkan, mereka pindah ke tempat yang baru. Di situ mereka hidup seperti di tempat yang lama. Mungkin pada suatu saat mereka akan kembali ke tempat yang mereka tinggalkan. Suatu bentuk pertanian yang sangat sederhana, yang dilakukan dengan berpindah-pindah telah ditemukan di daerah Asia Tenggara.⁵⁷

Di Pegunungan Meratus Kalimantan Selatan, bentuk pertanian seperti ini masih terlihat dilaksanakan oleh penduduk pegunungan seperti Suku Bukit, Maanyan, Lawangan, Dusun Deyah, Dayak Balangan dan sebagainya. Walaupun sudah mengalami kemajuan, jika dibanding dengan bentuk asalnya. Bahan-bahan makanan dikumpulkan dari daerah sekitarnya. Umbi-umbian dikorek, dibersihkan dan dilepas kulitnya dengan memakai golok dari tanduk, sudit tulang, dan penggaruk dari kulit kerang. Mungkin juga untuk keperluan ini dipergunakan alat tusuk dari kayu. Mereka makan kerang, siput dan ikan, terbukti dari penemuan-penemuan kulit kerang, siput dan tulang-tulang ikan di bukit-bukit kerang di Sumatera dan di dalam beberapa buah gua di Jawa

⁵⁴ R.P. Soedjono (ed), *op.cit*, hal. 155.

⁵⁵ R.P. Soedjono (ed), *ibid.*, hal. 156.

⁵⁶ R.P. Soedjono (ed), *loc.cit*.

⁵⁷ R.P. Soedjono (ed), *ibid.*, hal. 158.

Timur dan Sulawesi Selatan serta di gua Babi kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan yang diteliti melalui penggalian yang sistematis oleh Balai Arkeologi Banjarmasin tahun 1996 dan 1997.

Bukti-bukti kehidupan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ini untuk daerah Kalimantan Selatan telah terlihat dari hasil penggalian (ekskavasi Situs Gua Babi, di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan yang dilaksanakan oleh Balai Arkeologi Banjarmasin tahun 1996 dan 1997). Gua babi merupakan gabungan antara gua (*cave*) dan ceruk payung (*rock-shelter*). Artinya, gua ini merupakan cave yang bagian depannya mempunyai shelter. Bentuk shelter di bagian depan atap tinggi dan lantai relatif datar merupakan bentuk geometri ideal sebagai tempat hunian. Bentuk gua tersebut memberikan beberapa keuntungan, antara lain; keleluasaan bagi penghuninya, sirkulasi udara yang baik, bidang pandang luas ke arah luar, hadapan gua ke Timur sehingga banyak menerima sinar matahari dan merupakan perlindungan yang baik terhadap pengaruh cuaca dan binatang buas. Gua-gua yang lain tidak ada yang seideal gua Babi ini sebagai tempat hunian. Pada bagian teras gua terdapat stalaktit yang menjulur ke bawah, terutama di bagian utara dan selatan. Ceruk payung sekaligus pula merupakan teras gua.⁵⁸

Hasil-hasil ekskavasi Gua Babi selama penelitian ini pada tahun 1996 dan 1997 ini, telah banyak memberikan informasi yang bermanfaat bagi interpretasi kehidupan masa lalu di situs ini. Gambaran yang diperoleh tidak saja terbatas pada apa dan bagaimana budaya Gua Babi sesungguhnya, tetapi juga dapat menjangkau aspek-aspek yang menyangkut mekanisme kehidupan manusia pendukungnya, misalnya pola pemanfaatan ruang di Gua Babi dengan budaya di luar Kalimantan Selatan, misalnya dengan budaya dari Sulawesi.⁵⁹

Temuan dari hasil ekskavasi Gua Babi tersebut terdiri atas :

- a. Cangkang Moluska sebanyak 49.377 gram
- b. Artefak batu sebanyak 2.189 buah
- c. Artefak tulang sebanyak 21 buah
- d. Komponen manusia sebanyak 10 buah.⁶⁰

Dalam realita di lapangan, ciri utama dari budaya Gua Babi adalah melimpahnya cangkang-cangkang moluska, yang sebagian besar adalah cangkang Gastropoda atau katuyung menurut istilah lokal yang dapat ditemukan di permukaan tanah karena top-soil yang tererosi. Sebarannya cukup luas, dan dalam kegiatan survai pada saat penemuan situs tahun 1995, cangkang-cangkang tersebut terendapkan di permukaan tanah rendah di sekitar gua, antara lain di bagian utara teras gua. Cangkang-cangkang itu merupakan bagian dari lapisan budaya Gua Babi, yang umumnya ditemukan pada kedalaman 25 cm dari lantai gua aktual.

Penamaan shell-bed untuk menyebut lapisan budaya yang dominan menunjukkan konsentrasi cangkang Gastropoda di situs ini cukup beralasan. Seperti halnya tersebut di atas, selain cangkang fragmen pelapisan lainnya yang ditemukan dalam lapisan budaya ini antara lain adalah akumulasi alat-alat batu (non masif dan masif), gerabah, tulang-tulang binatang (mikro dan makro fauna) dan kadang-kadang ditemukan pula komponen tulang manusia.

Kehidupan yang pernah berlangsung di Gua Babi ini agaknya mengembangkan teknologi litik yang khas. Batuan yang dimanfaatkan dalam pembuatan alat yang cukup beragam, namun hanya dua diantaranya yang paling menonjol, yaitu basalt dan rijang (*chert*). Jenis lainnya seperti obsidian, kalsedon, dan batu gamping juga dimanfaatkan, tetapi sangat jarang kuantitasnya. Produk industri litik basalt unsur yang menonjol dipengaruhi kondisi batuan. Memperoleh suatu basalt berukuran pebble akan jauh lebih mudah dibanding dengan suatu bungkai rijang yang mungkin

⁵⁸ Harry Widiyanto, Retno Handini, 1999/2000, *op.cit*, hal. 4.

⁵⁹ Harry Widiyanto, Retno Handini, *ibid.*, hal, 34.

⁶⁰ Harry Widiyanto, Retno Handini, *ibid.*, tabel 7 s.d. 10.

harus melalui pencarian dan penambangan. Pengerjaan basalt juga lebih mudah karena sifatnya yang mudah terbelah, sehingga dalam segi waktu yang sama, produk yang dihasilkan jenis batuan ini akan jauh lebih banyak dibanding rijang.⁶¹

Jarangnya jenis batuan lain seperti kalsedon dan obsidian dipergunakan sebagai bahan, disebabkan karena kesulitan memperolehnya di sekitar gua tersebut. Jenis batuan ini hanya ditemukan di aliran sungai Uya, dalam kuantitas yang sangat jarang. Keterbatasan batuan ini yang mendorong pemanfaatan setiap jenis batuan yang ada di sekitar gua tersebut. Bahkan batu gamping yang lebih lunak dibanding basalt, rijang, kalsedon atau obsidian dimanfaatkan untuk pembuatan alat karena tersedia tanpa melalui pencarian.⁶²

Dari hasil ekskavasi yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Banjarmasin pada tahun 1996 dan 1997 telah memberikan berbagai interpretasi yang bermanfaat untuk mengungkapkan sisi gelap prasejarah di Kalimantan Selatan.⁶³ Kesamaan budaya Gua Babi dengan budaya Sulawesi mengisyaratkan adanya hubungan migrasi di masa lalu antara kedua wilayah ini.

Sayangnya ekskavasi yang dilakukan belum berhasil menemukan unsur-unsurnya, sehingga belum dapat dilihat kesamaan dan perbedaan ras manusianya dengan yang telah ditemukan di gua-gua di Sulawesi Selatan, untuk memperkirakan jalur migrasi yang pernah terjadi di masa prasejarah. Kesimpulan yang diambil dari laporan ekskavasi, yang diterbitkan melalui Berita Penelitian Arkeologi Banjarmasin antara lain adalah sebagai berikut :

1. Gua Babi merupakan sebuah situs hunian gua prasejarah, yang untuk pertama kali ditemukan dan diteliti secara intensif di Kalimantan Selatan. Data ekskavasi menunjukkan bahwa situs ini telah dihuni sejak tingkatan Mesolitik hingga tingkatan Neolitik, yang dicirikan oleh artefak batu, tulang dan gerabah.
2. Pada masa okupasi manusia prasejarah di gua ini, teras gua telah cukup intensif dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari.
3. Dalam aktivitas sehari-hari, pendukung budaya Gua Babi telah mengeksploitasi sumber daya makanan di sekitar gua. Salah satu makanan utamanya adalah siput air tawar, yang diperoleh dari areal di depan gua dan sekitarnya, yang ditafsirkan sebagai lingkungan rawa/payau atau sungai.
4. Dalam memperoleh bahan dasar untuk pembuatan alat batu, pendukung budaya Gua Babi harus keluar dari lingkungan gua karena bahan-bahan alat tersebut (basalt, rijang, obsidian, jaspis dan batuan kersikan lainnya) tidak terdapat di sekitarnya. Bahan-bahan tersebut diperoleh dari endapan alluvial sungai Uya yang terletak sekitar 1,5 km dari lokasi gua, yang merupakan rombakan batuan penyusun di daerah Gunung Batu Manau dan Gunung Lumut, bagian dari pegunungan Meratus.
5. Unsur-unsur budaya alat batu dan alat tulang dari Gua Babi menunjukkan keterkaitan dengan unsur-unsur budaya kehidupan di Sulawesi Selatan.⁶⁴ Di lain pihak komponen gerabah menunjukkan pengaruh dari tradisi Bau-Malaya, tradisi gerabah ini yang berkembang di Asia Tenggara. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa perkembangan budaya Gua Babi sangat “inheren” terhadap perkembangan budaya di sekitarnya, baik dalam konteks lokal maupun regional.
6. Berdasarkan ciri kulturalnya baik teknologi, tipologi, maupun model hidup mereka ditafsirkan bahwa budaya Gua Babi menempati suatu tahapan budaya prasejarah dalam tingkat mesolitik hingga awal neolitik. Seadanya tingkatan budaya ini merupakan

⁶¹ Harry Widiyanto, Retno Handini, *ibid.*, hal. 35.

⁶² Harry Widiyanto, Retno Handini, *ibid.*, hal. 16.

⁶³ Harry Widiyanto, Retno Handini, *ibid.*, hal. 46.

tingkatan murni dan bukan merupakan tradisi budaya, maka paling tidak budaya Gua Babi telah berusia 6000 tahun.⁶⁵

D. MASA BERCOCOK TANAM

1. Peningkatan Kemampuan Membuat Alat

Di Kalimantan Selatan produk budaya pada masa bercocok tanam ditemukan pada situs arkeologi yang diteliti oleh Balai Arkeologi Banjarmasin, yaitu situ Gua Babi desa Randu kecamatan Muara Uya kabupaten Tabalong dan situs Jambu Hilir kecamatan Kandangan kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selain itu, koleksi Museum Lambung Mangkurat Propinsi Kalimantan Selatan yang berasal dari zaman ini sangat membantu sebagai informasi awal untuk mengetahui tipologi dan teknologi pembuatan produk budaya saat itu. Walaupun keberadaannya merupakan temuan lepas yang belum disertai dengan penggalian arkeologis.

Produk budaya masa bercocok tanam koleksi Museum Lambung Mangkurat adalah :

a. *Beliung persegi*, adalah sejenis alat batu yang berkembang pesat dan dikenal dikalangan penduduk di kepulauan Indonesia. Bentuk dasar beliung persegi adalah memanjang, dengan penampang lintang berbentuk persegi. Seluruh bagian permukaannya diupam halus, kecuali beberapa pada bagian pangkal alatnya sebagai tempat ikatan pada tangkai kayu. Bentuk tajaman alat dibuat dengan mengasah bagian ujung permukaan bawah landai ke arah pinggir ujung permukaan atas, dengan cara demikian akan didapatkan bentuk tajaman yang miring, seperti terlihat pada tajaman pahat logam buatan masa kini. Beliung persegi ini berkembang pesat pada masa bercocok tanam atau pada masa neolitik, yang berlanjut terus pada beberapa kehidupan masyarakat suku di pedalaman Sumatera, Kalimantan dan Irian Jaya (Papua).

b. *Kapak lonjong*, mempunyai bentuk dasar umum; lonjong dengan pangkal alat agak meruncing dan melebar pada bagian tajamannya. Bagian tajaman tersebut diasah/diupam dari dua arah (bifasial), yang menghasilkan bentuk tajaman yang simetris. Penampang lintangnya berbentuk seperti lensa, lonjong atau kebulat-bulatan. Bahan yang seringkali digunakan berupa batu kali (sedimen) yang berwarna kehitaman dan batuan nefrit yang berwarna hijau tua.

c. *Kapak Bahu*, dengan bentuk mengecil pada bagian tajaman, bagian tajaman diupam dari dua arah. Penampang terdapat lekukan untuk menempatkan tangkai. Ditemukan di desa Muhur, kecamatan Anjir Muara kabupaten Barito Kuala.

d. *Manik-manik gerabah*, koleksi yang ada berbentuk bulat dan silinder, dengan ukuran yang bervariasi. Manik-manik ini pada umumnya difungsikan sebagai barang perhiasan, dengan cara merangkainya menjadi satu sebagai suatu bentuk kalung atau gelang tangan. Pada beberapa situs arkeologi, manik-manik tampaknya difungsikan juga sebagai salah satu jenis benda bekal kubur yang cukup banyak dijumpai pada situs-situs penguburan prasejarah, dan masih berlanjut pada beberapa tradisi penguburan suku Dayak di Kalimantan.

Produk budaya pada situs Gua Babi dan Jambu Hilir menurut analisis Balai Arkeologi Banjarmasin adalah :

1) Situs Gua Babi

Tinggalan berupa fragmen gerabah, yang setelah direkonstruksi berbentuk mangkok, periuk, empluk dan pasu. Selain itu juga ditemukan peralatan kerja berupa pelandas dan batu giling. Hasil penelitian dari permukaan pecahan gerabah menunjukkan adanya jejak striasi.⁶⁶

⁶⁴ Harry Widiyanto, Retno Handini, *ibid.*, hal. 44.

⁶⁵ Harry Widiyanto *et al*, *op.cit*, hal.50

Teknik pembentukan menunjukkan kesamaan dengan teknik yang dikembangkan di wilayah Asia Tenggara, yakni tradisi gerabah Bau-Melayu. Teknik pembentukan dibuat dengan teknik tangan yang dipadukan dengan tatap pelandas. Hal ini didasarkan pada adanya lekukan yang terdapat pada dinding bagian dalam sebagai akibat tekanan jari pada saat pembentukan, sedangkan pembuatan tatap pelandas ditandai dengan kondisi dinding gerabah di bagian luar yang rata. Jejak striasi tampak pada garis-garis lingkaran yang tidak terputus yang menggambarkan roda yang digunakan adalah roda putar cepat.

Teknik pembentukan ada yang secara langsung, yaitu tampak pada gerabah yang memiliki tepian tegak dan pembentukan secara tidak langsung tampak pada gerabah yang memiliki tepian dengan orientasi keluar. Penyelesaian permukaan dengan cara diupam, diberi warna dan diberi pola hias. Pengupaman dilakukan untuk memperhalus permukaan dan memperkecil pori-pori untuk mengurangi perembesan air. Pemberian warna dengan cara memoleskan bahan pewarna (pada batu giling terdapat bekas hematit yang kemungkinan digunakan untuk menghaluskan hematit sebagai pewarna gerabah) dipermukaan gerabah. Pola hias yang menonjol adalah hiasan tera tatap (*paddle marked*) yang terdiri dari berbagai macam motif, antara lain tatap tali (*cord mark*) dan jala, dilakukan dengan teknik tekan pada permukaan gerabah setengah kering. Dilihat dari warna bagian luar yang berwarna merah dan merah kecoklatan serta bagian dalam berwarna abu-abu kehitaman diperkirakan pembakaran dilakukan di tempat terbuka.

Selain wadah juga ditemukan perhiasan pada kotak ekskavasi berupa cangkang moluska jenis taksa dari kelas gastropoda famili cypraeidae (genus cypre) dan kelas pelecypoda famili arcaidae (genus Arca). Habitat asal jenis moluska ini adalah air laut. Melihat lokasi Gua Babi cukup jauh dari garis pantai, diduga benda ini diperoleh melalui barter mengingat jumlahnya kecil dan habitatnya bukan dari lingkungan sekitar Gua Babi.⁶⁷

Cangkang moluska ini diberi lubang pada bagian puncaknya digunakan sebagai bandul untuk perhiasan pada kalung.

2) Situs Jambu Hilir

Gerabah adalah temuan yang paling banyak ditemukan. Dari beberapa pecahan, yang agak lengkap, bisa direkonstruksi bentuknya yaitu wadah dan manik-manik untuk perhiasan. Hasil analisis Balai Arkeologi Banjarmasin adalah :

Dari segi tipologi dibedakan menjadi gerabah bulat (periuk bulat, cawan bulat, kowi bulat) dan gerabah berkarinasi (periuk berkarinasi). Ada 2 (dua) buah jenis gerabah yang tidak dapat digolongkan ke dalam gerabah bulat maupun gerabah karinasi, yaitu gerabah dari jenis tutup wadah dan gerabah dari jenis tungku. Hiasan gerabah terlihat dari pecahan-pecahan lapisan tipis dari krim tanah liat (slip) berwarna merah muda. Hiasan pola hias lubang tembus, pinggir kerang, tali, ujung jari dan pola anyaman. Pola-pola tersebut hasil penerapan teknik cap/tera (*impressed*).

Pola hias lain adalah garis gelombang dengan sistem gores dan pola pita dengan teknik tempel (*applied*). Dari segi teknologi adalah dibuat dengan teknik roda putar, teknik tangan/teknik pijat. Ada juga pembuatan dengan alat tatap dan pelandas. Teknik penyambungan juga sudah dikenal, terlihat pada bagian kaki gelang, pegangan tutup dan bagian kuping tungku. Penyambungan dilakukan sewaktu gerabah masih basah.

⁶⁶ Fadhilla Arifin Aziz, *op.cit*, hal. 29

⁶⁷ Nasruddin, *op.cit*, hal. 19.

Bahan baku utama adalah tanah liat dicampur pasir. Secara umum, teknologi pembuatan gerabah situs Jambu Hilir masih sederhana walaupun sudah menggunakan roda putar, tatap dan pelandas. Bahan baku campuran yaitu pasir yang tidak disaring sehingga gerabah yang dihasilkan agak kasar.

Fungsi gerabah tampaknya tidak mengalami perubahan dari dulu sampai sekarang, yaitu sebagai tempat (wadah) air, peralatan untuk memasak dan tungku. Selain itu, juga ditemukan kowi (musa; bahasa Banjar), yaitu wadah dari tanah liat untuk melebur emas dan kuningan.

Situs Jambu Hilir dapat dikatakan sebagai suatu bekas hunian kuno yang berciri prasejarah dengan tingkat perkembangan masyarakat yang lebih maju, tetapi masih mempertahankan tradisi neolitik pada beberapa aspek kehidupan sehari-hari. Hal ini dibuktikan oleh ciri-ciri artefak batu dan gerabah dengan adanya unsur-unsur teknologi kapak persegi, manik-manik tanah liat dan batu giling. Sedangkan unsur yang lebih maju, yaitu adanya suatu tingkat pengetahuan mengolah sumber-sumber mineral. Pengetahuan ini lebih mengacu pada kepandaian membuat perhiasan-perhiasan logam mulia seperti emas dan kuningan.⁶⁸

Teknologi pembuatan gerabah tradisi prasejarah berlanjut dengan bukti-bukti pada situs Candi Agung dan Candi Laras. Sampai sekarang di Kalimantan Selatan tepatnya daerah Nagara kabupaten Hulu Sungai Selatan masih membuat gerabah dengan cara-cara yang dilakukan pada masa prasejarah.

2. Kehidupan masyarakat

Dari bukti-bukti alat yang telah ditemukan, jelas bahwa cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan berangsur-angsur ditinggalkan, masyarakat mulai menunjukkan tanda-tanda menetap di suatu tempat serta mengembangkan kehidupan baru berupa kegiatan bercocok tanam sederhana dan penjinakan hewan-hewan tertentu.

Jika kita ikuti tempat-tempat penemuan alat-alat yang dapat digolongkan ke dalam masa bercocok tanam ini, maka dapat diduga bahwa kepulauan Indonesia telah didiami secara meluas.⁶⁹ Menilik kondisi alam dari beberapa tempat penemuan, terlihat seolah-olah ada kecenderungan untuk mendiami tempat-tempat terbuka yang dekat dengan air, seperti sungai, tepian danau dan daerah pantai.⁷⁰

Jika dihubungkan dengan asal benda atau asal barang koleksi Museum Lambung Mangkurat Propinsi Kalimantan Selatan yang ada hubungannya dengan pra sejarah yang sebagian besar berasal dari Masa Bercocok Tanam atau Neolithicum terlihat sekali ada kesesuaian dengan kondisi alam temuan yang tersebar di seluruh kawasan Kalimantan Selatan berdasarkan data koleksi-koleksi tersebut. Asal tempat benda prasejarah koleksi Museum Lambung Mangkurat Propinsi Kalimantan Selatan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Desa Patih Muhur, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala
2. Desa Tamban Muara Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala
3. Desa Tabunganen, Kecamatan Tabunganen Muara, Kabupaten Barito Kuala
4. Desa Marabahan, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala
5. Desa Madurejo, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar.
6. Desa Lobang Baru, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar
7. Desa Sumenep Madurejo, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar.
8. Desa Simpang Tiga, Kecamatan Matraman, Kabupaten Banjar

⁶⁸ Laporan Hasil Analisis Koleksi Prasejarah Museum Lambung Mangkurat

⁶⁹ R.P. Soedjono (ed), *op.cit.*, hal. 195.

⁷⁰ R.P. Soedjono (ed), *loc.cit.*

9. Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar
10. Desa Pakutik, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar
11. Desa Kahelaan, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar
12. Desa Tambela, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar
13. Desa Awangbangkal, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar
14. Jalan Kemasan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
15. Desa Keramat Manjang, Kecamatan Baranai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
16. Desa Bihara, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
17. Desa Datar Laga, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
18. Desa Birayang, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
19. Gunung Batu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
20. Kampung Margasari, Desa Sebelimbingan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru
21. Desa Sebelimbingan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru
22. Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota baru
23. Rantau Budha Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru
24. Kecamatan Rantau Kabupaten Tapin
25. Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin
26. Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan
27. Desa Jambu Hulu, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan
28. Desa Jambu Hulu Muka, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan
29. Jalan Scorpio, Kecamatan Sungai Besar, Kota Banjarbaru
30. Kotamadya Banjarmasin
31. Kecamatan Rantau Timur, Kota Banjarmasin
32. Desa Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin
33. Desa Durian Bungkok, Kecamatan Tajau Pecah, Kabupaten Tanah Laut
34. Desa Kait-Kait Selatan, Pasar Gula Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut
35. Penggalan Candi Agung, Kecamatan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.⁷¹

Dari tempat asal temuan koleksi prasejarah Museum Lambung Mangkurat Propinsi Kalimantan Selatan ini terlihat sekali persebaran pemukiman itu hampir berada di daerah yang kondisi alamnya sesuai untuk pemukiman tersebut di atas, yaitu tempat terbuka yang dekat dengan air, seperti pinggir sungai, tepian danau dan daerah pantai.

Ada kalanya daerah yang didiami ialah tempat-tempat yang agak tinggi dan bukit-bukit kecil yang dikelilingi sungai atau jurang serta dipagar hutan. Tempat ini mereka pilih atau mereka pakai untuk melindungi diri dari serangan-serangan musuh atau gangguan binatang-binatang buas.⁷² Kadang-kadang untuk tujuan tersebut dibuat tanggul-tanggul dan parit-parit pertahanan di sekeliling tempat tinggal

Penggambaran pola perkampungan (tempat tinggal) pada Masa Bercocok Tanam ini bisa menggunakan teori yang pernah diajukan oleh para ahli. Teori pertama mengatakan, bahwa pola perkampungan (tempat tinggal) dari suatu masyarakat pertanian ditentukan oleh beberapa faktor fisik seperti keadaan topografi, iklim dan potensi pertanian. Teori yang lain bertolak dari sistem ekonomi yang berkembang dalam masyarakat, sedangkan sistem pemilikan tanah adalah faktor yang menentukan sistem ekonomi pada masyarakat pertanian. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat diperlakukan pula terhadap pola pengelompokan sosial dan pengelompokan lokal. Pendapat

⁷¹ Laporan hasil analisis koleksi Prasejarah Museum Lambung Mangkurat

⁷² R.P. Soedjono (ed), *op.cit.*, hal. 195.

yang kedua ini tidak mengabaikan juga faktor-faktor lain, seperti asal-usul historis, perang dan pandangan terhadap nilai-nilai budaya. Berdasarkan atas kedua anggapan tersebut serta dilengkapi dengan sumber-sumber etnografi sebagai bahan perbandingan dapatlah kita peroleh sedikit gambaran tentang pola-pola tempat tinggal pada masa bercocok tanam di Indonesia ini.⁷³

Proses perubahan tata kehidupan yang ditandai oleh perubahan cara memenuhi kebutuhan hidup berlangsung secara perlahan-lahan. Demikian pula bentuk tempat-tempat tinggal, ada kemungkinan, pada masa itu telah terbentuk desa-desa kecil semacam pedukuhan. Pada tiap dukuh terdapat beberapa tempat tinggal yang dibangun secara tidak beraturan.

Bentuk rumah pada tingkat permulaan agak kecil, berbentuk kebulat-bulatan dengan atap yang dibuat dari daun-daunan. Atapnya langsung menempel ke tanah. Rumah semacam ini tidak dapat didiami oleh banyak orang. Bentuk seperti ini merupakan bentuk yang paling tua di Indonesia dan sampai sekarang masih dapat kita jumpai di Timor, Kalimantan Barat, Nikohar dan Andaman. Kemudian berkembang bentuk-bentuk yang lebih besar yang dibangun di atas tiang. Rumah bertiang ini berbentuk persegi panjang dan dapat menampung beberapa keluarga inti. Pembangunan rumah-rumah besar bertiang ini, mungkin karena perkembangannya pengaruh baru yang dibawa oleh pendukung budaya belitung persegi, atau mungkin perkembangan dari rumah-rumah kecil berbentuk kebulat-bulatan yang mengalami perubahan karena meningkatnya jumlah penduduk yang semakin memerlukan tempat-tempat tinggal lebih banyak. Di samping itu, karena pengelompokan sosialpun telah mengalami perubahan yang mengarah ke sistem komunal.

Rumah-rumah itu dibangun berdekatan dengan ladang, bisa juga agak jauh dari ladang akibat situasi bercocok tanam liar yang selalu berpindah-pindah dalam usaha mencari tanah perladangan yang subur. Pembangunan rumah bertiang atau rumah panggung itu bertujuan menghindari atau menghindarkan diri dari bahaya banjir atau gangguan binatang buas.

Rumah besar itu tidak ditempati sepanjang tahun. Menjelang musim panen, seisi rumah dengan beserta hewan-hewan peliharaannya yang juga mendapat tempat di kolong rumah di antara tiang-tiang tadi, mereka bawa berpindah ke dekat ladang dengan mendirikan gubuk-gubuk darurat di ladang itu. Setelah musim panen selesai, mereka kembali ke tempat semula, yaitu rumah besar tadi. Ini terjadi dari masa ke masa.⁷⁴

Di Kalimantan Selatan kehidupan seperti ini masih terlihat pada penduduk asli di pegunungan Meratus sampai sekarang. Di Kalimantan Selatan, rumah besar itu berupa Balai atau Balai Adat yang dihuni oleh kelompok yang berupa satu kampung di pegunungan, di mana di tengah Balai Adat itu atau rumah besar itu merupakan tempat upacara mereka yang rutin dilaksanakan setiap tahun, seperti Aruh Ganal, yang dilakukan oleh Suku Bukit di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin dan ada juga yang menyebutnya Bawanang bagi Suku Bukit di Labuhan Kecamatan Batang Alai Selatan atau Baharin menurut Suku Dayak Balangan di Kecamatan Halong Kabupaten Hulu Sungai Utara. Semuanya ini merupakan upacara sehabis panen.

Kehidupan dengan rumah besar yang cara hidupnya seperti tersebut di atas masih terlihat nyata pada Balai Adat Pantai Mangkiling di Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang didiami oleh Suku Bukit dan juga di Kecamatan Loksado, di mana dalam satu desa mereka mendirikan Balai Adat yang sekaligus menjadi tempat tinggal, dengan kamar atau ruangan mengelilingi rumah tengah tempat upacara tersebut. Satu kamar dihuni oleh satu keluarga.

Pada musim kerja, Balai ini kosong. Perlengkapan hidup mereka adalah perlengkapan hidup masa kini, hanya pemukiman mereka yang masih memakai sistem rumah besar yang berupa Balai

⁷³ R.P. Soedjono (ed), *ibid.*, hal. 76.

⁷⁴ R.P. Soedjono (ed), *ibid.*, hal. 197.

atau Balai Adat yang dihuni oleh sekelompok orang atau keluarga-keluarga petani ladang berpindah yang sekarang. Mereka sudah terjangkau oleh kebudayaan modern, hanya kepercayaan dan pola pemukiman ini yang serupa dengan pemukiman masa lalu. Balai-Balai Adat seperti ini di daerah lain di pegunungan di kawasan Kalimantan Selatan masih banyak Balai Adat yang didiami oleh penduduk asli pegunungan tinggal di Balai Adat seperti itu. Pembuatan rumah itu dikerjakan secara gotong royong disertai upacara-upacara yang bertingkat-tingkat dengan bermacam-macam pantangan.⁷⁵

Hidup menetap di suatu tempat memberikan kemungkinan perkembangan penduduk atau pertambahan penduduk bertambah cepat. Pada masa ini, anak-anak dan para wanita mulai mendapat tempat dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Ras yang menghuni kepulauan Indonesia ini pada masa bercocok tanam memperlihatkan bahwa di bagian Barat unsur Mongoloid lebih dominan, sedangkan ciri-ciri Austromelanesoid masih sangat kuat di bagian Timur.

Koleksi Museum Lambung Mangkurat Propinsi Kalimantan Selatan yang berhubungan dengan masa bercocok tanam yang berupa beliung atau kapak segi empat, yang berasal dari seluruh daerah Kalimantan Selatan dan merupakan koleksi benda prasejarah yang terbanyak. Pada beberapa tempat, kehidupan berburu dan menangkap ikan masih diteruskan.

Sesuai dengan gelombang penyebaran tradisi neolithik di Indonesia, maka pada tingkat permulaan kegiatan bercocok tanam telah dihasilkan keladi (*Taro, Colocasia Escolenta*), uwi (*Yam, Dioscorea Alata*), sukun (*Breadfruit, Artocarpus Communis*), pisang (*Banana, Musa Paradisiaca*) dan jenis buah-buahan seperti durian (*Durio Zimbethinus*), manggis (*Manggosteen, Garcinia Mangostana*), Rambutan (*Nephelium Lappaceum*), duku (*Lansium Domesticum*), salak (*Salacca Edolis*) dan mungkin pula kelapa (*Cocos Musifera*). Tanaman keladi memerlukan air yang cukup. Untuk keperluan tersebut dibuatkan pematang-pematang dan di daerah pegunungan diperlukan sawah-sawah yang berundak yang dilengkapi dengan saluran air.

Untuk daerah Kalimantan Selatan hampir tidak terlihat sawah berundak di pegunungan, yang banyak ini di pulau Jawa. Ada kemungkinan irigasi tingkat permulaan diadakan untuk tanaman keladi yang pada masa itu menjadi makanan pokok. Di Kalimantan Selatan keladi ini dikenal di mana-mana dan menjadi makanan sebagai sayur bagi yang makan nasi sebagai makanan pokok sekarang ini. Sukun juga merupakan bahan makanan yang penting di samping keladi, karena sukun yang telah dikeringkan akan tahan lama dan sangat berguna untuk santapan dalam perjalanan laut. Untuk kawasan Kalimantan Selatan sukun ini sangat sedikit ditanam orang, kecuali di Pagatan dan daerah lain di Kotabaru, yang ditanam oleh suku Mandar dan suku Bugis yang pindah dari Sulawesi. Sekarang sukun tersebut sudah banyak ditanam di daerah ini, yang bibitnya biasanya berasal dari Kotabaru.⁷⁶

Ada juga tumbuh-tumbuhan yang pada umumnya tumbuh liar, yaitu sejenis *Metroxylon* yang menghasilkan sagu setelah tanaman itu berumur 6 sampai 8 tahun. Pohon rumbia umumnya tumbuh di bagian Timur kepulauan Indonesia dan sampai sekarang masih merupakan tanaman penting. Pohon rumbia ini di Kalimantan Selatan juga banyak tumbuh di daerah rawa seperti di Margasari dan sekitarnya di Kecamatan Candi Laras Selatan dan Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. Pohon rumbia ini selain sagunya diambil, juga dimanfaatkan untuk membuat atap rumah dan lampit atau sejenis tikar atau seperti karpet difungsikan masyarakat pada masa lalu. . Sekarang pohon rumbia ini batangnya selain diambil sagunya, tetap dipergunakan seperti dahulu untuk makanan ternak itik atau bebek yang dicampur dengan ikan atau siput (kerang)

⁷⁵ R.P. Soedjono (ed), *ibid.*, hal. 198.

⁷⁶ R.P. Soedjono (ed), *loc.cit.*

seperti *kalambuai*, *haliling* dan sebagainya. Di daerah ini tanaman rumbia umumnya tumbuh liar. Tetapi ada juga yang sengaja ditanam dengan jalan memisahkan tunas-tunasnya atau dengan langsung menanam batang yang telah dipotong-potong.

Pengembangbiakan tumbuh-tumbuhan dengan menggunakan biji-bijian, kemungkinan berkembang kemudian, sebab hal itu memerlukan pengetahuan dan pengalaman. Ada kemungkinan bahwa pengetahuan tersebut melalui dikenal secara perlahan-lahan ketika para pendukung tradisi beliung persegi mulai berpengaruh di kepulauan ini. Tanaman yang mungkin dikenal selanjutnya ialah tanaman rumput-rumputan seperti jewawut dan padi gaga yang ditanam di sawah kering dengan hanya menaburkan biji-bijinya yang selanjutnya tumbuh sendiri. Untuk jenis sayur, mulai dikenal jenis labu air.

Hewanpun semakin banyak jenisnya yang dikenal. Misalnya ayam dan kerbau yang pada umumnya dipergunakan sebagai binatang korban. Hewan yang penting pada masa itu ialah anjing (*Canis familiaris palustris*) dan babi yang diturunkan oleh *sus vitatus*, yaitu spesies babi liar yang hidup di daratan Asia Tenggara. Babi liar yang hidup di hutan rimba Sumatra, Jawa dan Kalimantan purba ialah spesies *cristatus* (*Sus cristatus*) yang hidup di sebelah Timur garis Wallace termasuk sub-spesies *Vittatus*). Anjing dipelihara untuk berburu dan babi dimakan dagingnya dan juga sangat penting sebagai binatang korban pada upacara keagamaan.

Pada umumnya hewan-hewan yang dipelihara dipersiapkan untuk upacara keagamaan bagi masyarakat bercocok tanam.⁷⁷ Pada upacara tradisional yang berhubungan dengan peristiwa alam dan kepercayaan, termasuk upacara kematian yang dilakukan oleh penduduk asli pegunungan yang masih menganut agama asli atau Kaharingan hewan-hewan tersebut masih mereka pergunakan sebagai hewan korban, misalnya pada upacara *Baharin* yang dilakukan oleh suku Dayak Balangan sehabis panen, di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Upacara *Marabia* yang dilakukan oleh suku Maanyan yang merupakan upacara kematian dan upacara-upacara lain yang sejenisnya.

Dikenalnya cara-cara bercocok tanam, ada dua hal penting yang erat hubungannya dengan tumbuhnya suatu masyarakat dan berkembangnya suatu peradaban, yaitu pertama sudah ada masyarakat yang bertempat tinggal agak menetap minimum satu kali atau semusim dan kedua kelebihan waktu atau tenggang waktu antara menanam dan saat-saat memetik hasil. Menetap di suatu tempat dalam tempo yang agak lama memungkinkan terbentuknya atau lahirnya suatu ikatan dengan alam tempat tinggal. Begitu pula akan tumbuh ikatan-ikatan sosial yang berlangsung antar individu dan antar keluarga atau kelompok yang lebih luas lagi.

Alam tidak selamanya menyediakan tanah yang subur, buah-buahan yang selalu ranum atau binatang buruan yang selalu banyak jumlahnya. Pada suatu waktu, semua itu akan berkurang, tanah yang kurang subur itu mereka tinggalkan. Kemudian mereka membuka tanah baru dengan jalan menebang hutan dan membakarnya setelah semak belukar mengering, proses seperti ini berlaku berulang-ulang, baik perpindahan silang menyilang atau paralel ke tempat yang subur. Hutan semakin menyempit, tanah-tanah gundul semakin meluas dan manusia selalu bertambah jumlahnya. Sistem pertanian yang seperti ini masih terdapat di pegunungan yang dihuni oleh penduduk asli pegunungan tersebut dalam bentuk ladang-ladang berpindah di Kalimantan Selatan, seperti pertanian suku Bukit di pegunungan Meratus.

Kelebihan waktu antara waktu tanam dengan memetik buah atau hasilnya dipergunakan atau diisi dengan aktivitas lain yang dapat menghasilkan keperluan rumah tangga, berupa kerajinan anyam-menganyam, membuat gerabah, mengasah alat-alat kerja dan lain-lain yang pada umumnya

⁷⁷ R.P. Soedjono (ed), *ibid.*, hal. 199.

dapat dikerjakan oleh kaum wanita dan anak-anak. Membangun rumah tempat tinggal atau membuat perahu dan rakit dikerjakan oleh kaum lelaki secara gotong royong.

Teknik pembuatan perahu, yaitu awalnya pohon besar ditumbangkan bersama-sama, kemudian pohon itu dipotong-potong dengan kapak batu sesuai dengan ukuran perahu yang dikehendaki. Pekerjaan selanjutnya setelah batang itu kering, dilakukan dengan beliung dan belicung batu, terutama untuk mengupas kulitnya yang hampir mengelupas. Untuk membuat rongga dilakukan dengan pembakaran sedikit demi sedikit dan seterusnya rongga tersebut dihaluskan dengan belicung dan beliung.⁷⁸ Setelah itu disiapkan cadik-cadik di kedua sisi badan perahu, utamanya untuk perahu di laut.

Perahu-perahu bercadik ini merupakan tipe yang mungkin paling umum dikenal pada waktu itu dan merupakan unsur terpenting dalam penyebaran beliung persegi dengan segala aspeknya baik sosial ekonomi maupun kepercayaan. Pada masa bercocok tanam ini diperkirakan perdagangan telah muncul dalam bentuk barter. Barang-barang yang diperlukan itu diangkut dalam jarak yang jauh, melalui sungai, laut dan darat.

Perahu dan rakit-rakit dari bambu memegang peranan penting sebagai sarana lalu-lintas perdagangan dan sekaligus pula sebagai alat penyebar budaya. Rakit-rakit bambu ini sampai sekarang masih dipakai untuk mengangkut hasil bumi di pegunungan oleh penduduk pegunungan ke kota pada waktu musim penghujan, demikian pula perahu di daerah rawa di aliran sungai, utamanya aliran sungai besar dan danau di daerah ini. Rakit bambu yang membawa barang dari daerah pegunungan itu bambunya yang dijadikan rakit itu juga sekaligus menjadi barang yang diperdagangkan di daerah ini. Jadi bambu-bambu dari daerah pedalaman itu dibuat untuk membawa hasil dari pedalaman atau pegunungan dan setelah hasil yang dibawa habis terjual, bambu rakit tersebut juga dijual habis. Untuk membawa barang dikemudian hari membuat rakit bambu yang baru. Demikian proses ini berlanjut dengan berulang seperti itu yang dilakukan penduduk pegunungan di Kalimantan Selatan sampai sekarang ini.

Dalam kehidupan sosial budaya, gotong royong kewajiban yang sama-sama dirasakan keperluannya oleh setiap anggota masyarakat. Walaupun demikian, pembagian kerja antara perempuan dan lelaki pada saat itu sudah tampak. Misalnya pekerjaan berburu yang banyak memakan tenaga dilakukan oleh para lelaki, menangkap ikan di tempat-tempat yang dekat dengan tempat tinggal seperti sungai, rawa, atau tempat-tempat yang dangkal di danau-danau dapat dilakukan oleh kaum wanita dan anak-anak. Sedangkan menangkap ikan di laut lepas dilakukan oleh kaum lelaki. Para lelaki membuka hutan dan menyiapkan lubang-lubang untuk benih, sedangkan kaum wanita secara gotong-royong menabur benih kemudian setelah panen memetik hasilnya.

Demikianlah berlangsung kerjasama yang sehat yang dituntut atas dasar kepentingan bersama. Kepentingan masyarakat berada di atas kepentingan individu. Semua ini berjalan melalui komunikasi murni serta dipimpin oleh seorang kepala yang dipatuhi secara jujur bersama. Kepala dijabat oleh orang yang paling tua dan berwibawa. Kepala ini merupakan tokoh yang disegani dan dihormati. Tradisi menghormati orang tua yang berperan sebagai pemimpin itu, kemudian berkembang lebih lanjut menjadi semacam kultus yang kelak merintis lahirnya konsepsi keagamaan yang dimanifestasikan dalam pendirian bangunan-bangunan megalitik. Konsepsi itu kemudian berkembang menjadi tradisi keagamaan yang kelak lahir dalam bentuk yang lebih kompleks.

⁷⁸ R.P. Soedjono (ed), *ibid.*, hal. 200.

Setiap gerak dalam kehidupan masyarakat, baik hubungan antar individu hingga hubungan komunal yang lebih luas dalam bidang sosial, ekonomi, agama dan sebagainya memerlukan alat komunikasi yang amat penting yaitu bahasa. Menurut penelitian ilmu bahasa, bahasa-bahasa yang digunakan di kepulauan Nusantara (Indonesia) ini termasuk rumpun bahasa Melayu Polinesia atau yang lebih dikenal dengan rumpun bahasa Austronesia.

Dengan menggunakan bukti-bukti keserumpunan bahasa-bahasa di daratan Asia Tenggara dan Polinesia itu, akhirnya beberapa ahli mencoba menemukan asal usul dan arah serta perkembangannya. Yang terkenal dalam hal ini ialah H. Kern yang menerbitkan hasil penelitiannya pada tahun 1889. Menurut pendapatnya, tanah asal orang-orang yang memepergunakan bahasa Austronesia itu harus dicari di Campa, Vietnam, Kamboja dan daratan sepanjang pantai sekitarnya.⁷⁹ Ahli purbakala Von Heine Geldern mempunyai kesimpulan yang tidak jauh berbeda dengan Kern melalui penelitian daerah penemuan beliung-beliung persegi.

Upaya Von Heine Geldern yang melahirkan konsepsi distribusi atau penyebaran beliung persegi agaknya mulai goyah karena temuan-temuan baru di Muang Thai yang secara jujur diakui oleh Von Heine Geldern sebelum ia meninggal. Di Indonesia, beliung-beliung persegi ini memeperlihatkan corak-corak yang beraneka ragam, sehingga perlu ditinjau kembali tentang “unlinear distribution” yang sejak lama dipertahankan oleh Von Heine Geldern.⁸⁰ Ini juga terlihat dari keanekaragaman koleksi Museum Lambung Mangkurat Propkalsel tentang beliung dan kapak persegi yang dihimpun dari temuan di seluruh Kalimantan Selatan dari tahun 1978 sampai sekarang yang dijadikan koleksi museum ini.

E. MASA PERUNDAGIAN

1. Kemahiran Membuat Alat

Teknologi pengerjaan logam ada 2 (dua) cara, yaitu teknik cetak dan tempa.

a. Teknik cetak, terdiri dari :

- 1) *Secara langsung*, dalam cara ini, logam yang sudah mencair dituang ke dalam cetakan. Setelah dingin cetakannya dilepas dan diperoleh artefak yang diinginkan. Cetakan ini dibuat dari tanah liat, batu atau logam. Tipe-tipe cetakan yang dipakai dalam cara ini adalah cetakan tunggal (*single mould*), cetakan setangkup (*bivalve mould*) dan cetakan ganda (*multi mould* atau *piece mould*). Cetakan tunggal ialah alat pencetak benda logam yang sederhana. Biasanya dibuat dari batu yang dilubangi menurut bentuk yang diinginkan. Dengan cetakan ini hanya dihasilkan artefak yang salah satu sisinya datar. Cetakan setangkup terdiri dari dua bagian. Artefak yang dihasilkan berbentuk simetris pada kedua sisinya. Sedangkan cetakan ganda terdiri dari bagian-bagian kecil cetakan yang kemudian disambung-sambung sehingga menjadi satu kesatuan.
- 2) *Secara tidak langsung (a cire perdue atau lost wax)*
Cara mencetak ialah dengan membuat pola terlebih dahulu dari bahan lilin lebah sebetuk benda yang dikehendaki, kemudian seluruh pola dibalut dengan tanah liat. Kalau sudah kering tanah liat dan pola lilin dialamnya dibakar, sebelumnya diberi lubang pada salah satu sudut untuk mengeluarkan lilin yang mencair karena panas. Setelah lilin habis baru dituangi dengan cairan logam ke dalam rongga yang sudah terbentuk oleh pola lilin. Terakhir tanah liat dipecah untuk mengeluarkan benda yang sudah selesai dicetak.

⁷⁹ R.P. Soedjono (ed), *ibid.*, hal. 202.

⁸⁰ R.P. Soedjono (ed), *ibid.*, hal. 203.

b. Teknik Tempa, terdiri dari :

- 1) *Penempaan primer*, yaitu membentuk wadah dengan cara menggunakan pukulan pelandas. Teknik yang dilakukan adalah *teknik singking*, yaitu pelandas diberi lubang cekung, lempengan logam diletakkan di atas pelandas dan dipukul sampai membentuk cekungan. Bekas tempaan terlihat di bagian dalam. Teknik yang lain adalah *teknik raising*, yaitu lempengan logam ditempa sesuai dengan bentuk wadah yang dikehendaki. Bekas tempaan terlihat di bagian luar.
- 2) *Penempaan sekunder*, yaitu penempaan yang dilakukan pada benda-benda yang sudah selesai dicetak guna menambah kekerasan dan kekuatan agar tidak mudah rusak.⁸¹

Adapun fungsi dari benda-benda produk masa perundagian, adalah a) *Fungsi profan*, yaitu digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti : cerek, kual, pisau, cangkul, mata tombak, keris, pedang dan lain-lain; b) *Fungsi sakral*, yaitu untuk keperluan upacara ritual. Benda-benda tersebut adalah patung, genta, cawan, lampu, pedupaan dan lain-lain.

Di Kalimantan Selatan ditemukan benda-benda perunggu produk masa perundagian yang sekarang menjadi koleksi Museum Lambung Mangkurat Propinsi Kalimantan Selatan, yaitu :

- a) Kapak Corong sebanyak 2 (dua) buah berasal dari Desa Tabunganen Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan.
- b) Mata Tombak berbentuk daun sebanyak 3 (tiga) buah dengan teknik cetak dan tempa. Tempat asal sama dengan kapak corong.
- c) Cetakan (acuan) setangkup, untuk mencetak kapak corong sebanyak 1 (satu) tangkup, ditemukan di tempat yang sama dengan kapak corong.

Pada situs Jambu Hilir ditemukan kowi (Musa) tempat (wadah) peleburan emas dan kuningan. Menurut informasi penduduk di sana pernah ditemukan topeng emas dan alat-alat logam besi.⁸²

Dari bukti-bukti produk budaya tersebut di atas ada kemungkinan aktivitas masa perundagian juga terjadi di Kalimantan Selatan, walaupun bahan baku utama tidak terdapat di daerah ini. Mengingat geografi Kalimantan Selatan yang mempunyai sungai-sungai besar dan bermuara di Laut Jawa terjadinya kontak budaya dengan dunia luar sangat memungkinkan, akibat adanya lalu lintas perdagangan yang dapat membawa masuk berbagai jenis bahan baku. Apalagi tradisi pengecoran logam sampai sekarang masih berlanjut di Kalimantan Selatan, yang teknologinya tidak berbeda dengan masa prasejarah yaitu menggunakan teknik a cire perdue.

Benda yang dibuat adalah benda-benda kuningan diproduksi di Desa Panggandengan dengan hasil baling-baling kapal dan salut tajam, Desa Tambak Bitin memproduksi wadah berbentuk sasanggan, keduanya berada di wilayah Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Desa satunya adalah Desa Sungai Pinang Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan produksi setrikaan.

Pada zaman Kerajaan Banjar, benda-benda kuningan ini pernah berjaya, tinggalannya sampai sekarang masih banyak berada di masyarakat sebagai koleksi barang antik. Produk kuningan masa lalu juga sudah dilestarikan di Museum Lambung Mangkurat sebanyak 625 buah terdiri dari bermacam jenis, bentuk dan fungsinya disertai dengan ornamen seni ukir yang sangat indah.

⁸¹ Titi Surti Nastiti, "Analisis Hasil Penelitian Arkeologi IV", dalam *Metalurgi dalam Arkeologi*, Depdikbud, Jakarta, 1991, hal. 272.

⁸² Nasrudin, *op.cit.*

Bahan kuningan yang dibuat di Kalimantan Selatan ada 2 (dua) macam, yaitu dari daur ulang barang bekas kuningan yang sudah rusak dan peleburan dari timah (tutup drum) dan tembaga (uang logam zaman penjajahan Belanda). Produksi yang masih berkembang sekarang tidak seindah produksi masa lalu. Kepandaian seni mengukir sudah ditinggalkan. Hal ini berarti adanya kemunduran segi estetika dalam berproduksi, yang dimungkinkan karena fungsi barang-barang kuningan dahulu dan sekarang berbeda. Dahulu lebih banyak digunakan sebagai wadah-wadah dalam upacara adat, baik bagi suku Banjar maupun Dayak dan Bukit. Sekarang barang-barang yang diproduksi lebih banyak untuk memenuhi permintaan pasar, seperti barang-barang yang sangat menunjang dalam kegiatan ekonomi, misalnya baling-baling kapal, salut tajak dan setrikaan yang tidak memerlukan ornamen apapun. Selain kuningan, produksi yang berkembang pesat di daerah Nagara adalah peralatan rumah tangga dengan bahan baku alumunium, misalnya wajan, panci dan dandang, juga peralatan pertanian dari bahan besi dan perhiasan dari bahan emas

2. Kehidupan Masyarakat

Di Kalimantan Selatan terdapat sisa-sisa benda perunggu, malah dengan cetakannya sama sekali yang berupa cetakan setangkup atau *bivave* dari batu di desa Muhur Kabupaten Barito Kuala, yang sekarang dikoleksikan oleh Museum Lambung Mangkurat di Banjarbaru. Kapak corong dan tombak dari perunggu yang dipakai pada masa ini, juga ditemukan di kawasan Kalimantan Selatan dan juga telah dikoleksikan oleh Museum Lambung Mangkurat.

Melalui ekskavasi-eksavasi di beberapa tempat di Indonesia, telah ditemukan pula sisa-sisa bahan makanan yang berupa kerang, ikan, babi dan sebagainya dan rangka-rangka manusia yang merupakan bukti bahwa penguburan mayat dilakukan di sekitar tempat kediaman. Berdasarkan data dari nekara-nekara perunggu dapatlah disimpulkan bahwa rumah orang-orang mampu berupa rumah besar bertiang dengan atap melengkung. Kolong rumah merupakan tempat ternak. Rumah semacam itu biasanya didiami oleh beberapa keluarga.⁸³ Rumah-rumah yang bentuk dan fungsinya seperti ini masih banyak terlihat di daerah Kalimantan Selatan, utamanya bagi rumah-rumah tradisional yang ada di pedesaan, baik di daerah pegunungan, di dataran rendah, di tepi sungai atau di aliran sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil.

Rumah tradisional Banjar umumnya rumah panggung yang bawah kolongnya cukup tinggi dan besar, lebih-lebih lagi yang dihuni oleh orang kaya yang diisi satu keluarga luas dengan dan menantu serta cucu-cucu. Bawah kolong selain tempat ternak kadang-kadang digunakan untuk keperluan khusus atau kegiatan khusus bagi rumah-rumah yang terletak di dataran tinggi atau pada tempat yang ditinggikan dengan diuruk sebelum rumah dibangun.

Dalam tata kehidupan yang sudah teratur, berburu binatang liar masih tetap dilakukan. Perburuan ini selain untuk menambah penghasilan atau mata pencaharian, juga dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat keberanian dan kegagahan dalam lingkungan masyarakatnya. Perburuan dilakukan dengan menggunakan tombak, panah dan jerat yang dibuat dari bambu atau rotan yang ujungnya dilingkarkan.⁸⁴ Kegiatan ini dilakukan secara perorangan atau bersama-sama dengan naik kuda menangkap binatang buruan. Anjing digunakan untuk mengejar dan membingungkan binatang yang diburu.

Pertanian dalam bentuk perladangan atau persawahan merupakan mata pencaharian tetap. Untuk menyempurnakan dan memudahkan pekerjaan dalam usaha pertanian, diciptakanlah alat-alat dari logam, terutama untuk pengolahan tanah sawah. Pengaturan air untuk sawah diadakan, sehingga pertanian tidak sepenuhnya tergantung dari air hujan. Hasil pertanian ini disimpan untuk masa kering dan mungkin juga untuk diperdagangkan. Untuk menjaga supaya tanah tetap subur,

⁸³ Nasrudin, *ibid.*, hal. 288.

⁸⁴ Nasrudin, *loc.cit.*

pada waktu-waktu tertentu diadakan upacara-upacara yang melambangkan kesuburan tanah dan kesejahteraan masyarakat. Binatang-binatang telah dipelihara untuk persediaan bahan makanan dan untuk keperluan-keperluan seperti dalam pertanian, pengangkutan dan upacara-upacara. Binatang yang dipelihara tersebut seperti babi, kerbau, kuda, anjing dan berjenis-jenis unggas.⁸⁵

Cara berburu dengan tombak dan jerat ini masih terlihat sampai sekarang, utamanya pada penduduk asli yang tinggal di pegunungan, yang dalam bahasa lokal disebut *bagarit* atau *bahandup*. *Bagarit* jika memakai jerat dan *bahandup* jika hanya memakai anjing dan tombak saja dalam melakukan perburuan tersebut.

Penyimpanan padi hasil pertanian mereka untuk masa kering atau masa paceklik dan dijual sebagian atau diperdagangkan, masih terlihat pada masyarakat petani di Kalimantan Selatan, utamanya petani-petani yang hidup di desa dan menggantungkan hidupnya semata-mata dari hasil pertaniannya.

Demikian juga berbagai kerajinan logam masih hidup dan berkembang di daerah-daerah tertentu di Kalimantan Selatan, misalnya pembuatan peralatan kerja dan alat rumah tangga dari kuningan, besi yang kemudian juga memakai bahan baku alumunium atau nikel dengan menggunakan teknik *a cire perdue* dan tuangan setangkup atau *bivalve* masih hidup dan berkembang di daerah Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Demikian juga kerajinan gerabah di Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Mantaas di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Yang dihasilkan atau dibuat melalui kerajinan ini umumnya adalah alat-alat rumah tangga, seperti dapur, kendi, kuantan dan sebagainya.

Perdagangan dilakukan antar pulau di Indonesia dan antara kepulauan Indonesia dengan Daratan Asia Tenggara. Perahu bercadik memegang peranan penting dalam hubungan perdagangan ini. Perdagangan dilakukan dengan cara tukar menukar barang yang diperlukan oleh masing-masing pihak. Benda-benda tukar yang digemari adalah terutama benda yang mengandung arti magis yang bersifat khas, misalnya nekara perunggu, moko dan benda-benda perhiasan seperti manik-manik.

Perdagangan daerah-daerah di Indonesia dengan Daratan Asia Tenggara rupanya sudah berkembang dengan pesat. Barang-barang yang diperdagangkan terutama rempah-rempah, jenis-jenis kayu dan hasil bumi lain. Jalan perdagangan ini dapat diikuti kembali sesuai dengan jalur penyebaran atau tempat-tempat penemuan benda-benda perunggu terutama kapak perunggu atau kapak corong dan nekara perunggu tipe Heger I. Tempat-tempat penemuan ini tersebar di sepanjang jalur perdagangan antara Sumatera Selatan menuju ke Timur sampai di pantai Barat pulau Irian Jaya atau Papua sekarang.

Tersusunnya masyarakat yang teratur dengan terbentuknya golongan undagi mengembangkan daya cipta dalam berbagai bidang teknologi seperti teknik penuangan perunggu.⁸⁶ Teknik penuangan perunggu menghasilkan kapak perunggu, gelang dan mata tombak, serta benda-benda lain berupa patung, moko dan alat-alat upacara yang diperindah dengan berbagai ragam hias.⁸⁷

Manik-manik banyak sekali ditemukan di daerah Kalimantan Selatan, yang biasanya diambil penduduk melalui cara mendulang, termasuk juga perhiasan dan sebagainya pada lokasi pemukiman tua di daerah ini. Kapak perunggu juga ditemukan, demikian juga cetakan tangkup dari batu yang ditemukan di desa Muhur kabupaten Barito Kuala. Semua ini sudah dikoleksikan oleh Museum Lambung Mangkurat Banjarbaru.

⁸⁵ Nasrudin, *ibid.*, hal. 289.

⁸⁶ Nasrudin, *loc.cit.*

⁸⁷ Nasrudin, *ibid.*, hal. 290.

Demikian juga Musa atau tempat peleburan logam-logam tersebut juga ditemukan dan dikoleksikan. Daerah Kalimantan Selatan pada masa perundagian ini, banyak ditemukan bukti, kecuali nekara perunggu dan alat upacara seperti candrasa atau kapak upacara yang belum diketemukan. Ini merupakan suatu bukti bahwa daerah Kalimantan Selatan mengalami masa perundagian seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia.

Dalam kehidupan Seni Budaya pada masa perundagian ini terlihat antara lain seni ukir yang diterapkan pada benda-benda Megalitik dan seni hias pada benda-benda perunggu mengembangkan pola-pola geometris sebagai pola hias utama. Di daerah luar Kalimantan Selatan, ukiran-ukiran sederhana ini ditemukan pada batu karang di Watuweti di pulau Flores yang menggambarkan kapak perunggu, perahu dan manusia serta melukiskan unsur-unsur dalam kehidupan yang dianggap umum dan penting. Berbagai benda diciptakan pada waktu itu guna keperluan religius.⁸⁸

Di Kalimantan Selatan benda-benda seperti nekara, candrasa dan sebagainya yang berhubungan dengan upacara pada masa tersebut belum ditemukan, yang ditemukan baru berupa kapak corong dan tombak serta tuangan tangkup untuk kapak corong. Dalam perkembangan selanjutnya kerajinan kuningan berkembang dengan pesatnya yang menghasilkan berbagai alat rumah tangga dan sebagainya di Nagara kabupaten Hulu Sungai Selatan, termasuk alat-alat upacara, demikian juga ragam hias yang menghiasi benda-benda kuningan tersebut. Benda-benda kuningan ini dari berbagai jenis dan bentuk serta fungsinya telah dikoleksikan oleh Museum Lambung Mangkurat Banjarbaru.

Penguburan tanpa wadah dilakukan secara primer atau sekunder. Peranan kepercayaan kepada arwah nenek moyang dan upacara religius sangat penting dalam masa perundagian ini. Rasa setia kawan dalam masyarakat masa perundagian kuat.⁸⁹ Adat kebiasaan dan kepercayaan merupakan pengikat yang kuat dalam mewujudkan sifat itu. Bentuk rumah yang satu dengan yang lainnya tidak banyak berbeda, maupun bahannya, termasuk isinya.

Penguasaan dan pengambilan sumber penghidupan diatur menurut tata tertib dan kebiasaan dalam masyarakat. Sifat magis dari barang-barang yang diperlukan merupakan dasar pemakaian dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada masa ini sudah ada kultus kepemimpinan dan pemujaan kepada sesuatu yang suci di luar diri manusia yang tidak mungkin disaingi serta berada di luar batas kemampuan manusia. Segala sesuatu yang ada di alam ini ada yang menguasai.

Dalam masyarakat jelas mulai adanya perbedaan golongan-golongan tertentu seperti golongan pengatur upacara-upacara atau yang berhubungan dengan kepercayaan, petani, pedagang dan pembuat benda-benda logam (pandai logam) atau pembuat gerabah. Pembuatan benda-benda pusaka dikuasai oleh ahlinya masing-masing. Untuk merubah derajat dalam masyarakat, orang harus membuat jasa sebanyak-banyaknya, biasanya dengan melakukan perbuatan yang luar biasa beraninya, sehingga kemudian berhak untuk mengikuti atau menyelenggarakan upacara-upacara dan memperoleh kedudukan kepemimpinan dalam masyarakat. Pengetahuan dalam berbagai bidang meningkat. Ilmu tentang perbintangan dan iklim telah dikuasai untuk mengetahui arah angin dalam pelayaran dan mengatur kegiatan pertanian.⁹⁰

⁸⁸ Nasrudin, *loc.cit.*

⁸⁹ Nasrudin, *ibid.*, hal. 294.

⁹⁰ Nasrudin, *ibid.*, hal. 295.

BAB III ZAMAN KUNO

A. NAN SARUNAI, NEGARA DIPa DAN NEGARA DAHA

Menurut Kulke, formasi negara di Asia Tenggara terjadi dalam tiga fase, yaitu negara suku, negara awal, dan negara kerajaan.¹ Negara suku atau negara etnik mengandaikan bahwa rakyat di negara itu melulu dari satu etnik dan tatanannya diatur oleh tradisi yang ditransformasikan dari nenek moyang ke generasi berikutnya. Negara suku dapat menjelaskan keberadaan Negara Nan Sarunai, fase kedua, yaitu negara awal sebagai masa transisi untuk menjelaskan Negara Dipa dan Negara Daha.

Pada umumnya sejarah Indonesia dalam mengungkapkan dan menjelaskan suatu negara tradisional sangat bertumpu kepada historiografi tradisional seperti babad, hikayat, atau cerita rakyat. Historiografi tradisional mempunyai ciri-ciri yang menonjol dan saling berkaitan, yaitu: (1) etnosentrisme, (2) rajasentrisme, (3) antroposentrisme.² Diakui historiografi tradisional penulisannya tidak berlandaskan kepada metode sejarah, tetapi sumber-sumber historiografi tradisional sebagai sumber dapat dipergunakan selama sumber terbaik belum ditemukan.

Begitu pula dalam melacak latar belakang keberadaan Negara Nan Sarunai, Dipa dan Daha masih sangat tergantung kepada cerita rakyat berbentuk nyanyian Orang Maanyan dan Hikayat Banjar.³ Menurut Ras, Hikayat Banjar terbagi dalam dua versi.⁴ Versi pertama merupakan versi yang telah diubah dan disusun pada masa Kerajaan Banjarmasin yang secara definitif telah memeluk agama Islam, sedangkan versi kedua dianggap sebagai versi yang berasal dari Negara Dipa secara definitif beragama Hindu.

Konsep geneologi merupakan unsur yang sangat penting artinya bagi kekuasaan raja. Asal keturunan kepala negara (raja) sering dihubungkan dengan watak seorang yang sangat kuat dan terkenal, atau individu yang memiliki kemampuan adikodrati yang berasal dari buih air ataupun dari matahari. Maksud dari penggambaran ini tentu saja tidak lepas dari keinginan untuk melegitimasi, memperkuat kedudukan dan kedaulatan sang kepala negara (raja). Prinsip seperti itu dikenal juga di Negara Dipa.

Dalam cerita rakyat dan Hikayat Banjar, di area Kalimantan Selatan ini dulunya terdapat sebuah negara bernama Nan Sarunai lalu sirna,⁵ kemudian muncul Negara Dipa, lalu digantikan oleh kerajaan Daha. Disadari informasi dari Hikayat Banjar tentang Negara Dipa dan Daha ditandai oleh sifat-sifat mistis, legendaris, dan tidak ada unsur waktu dalam urutan ceritanya. Mitos dalam pandangan Levi Strauss jangan dipertentangkan dengan sejarah atau kenyataan, karena mitos merupakan sebuah dongeng.⁶ Sebetulnya sejarah tidak pernah mempertentangkan kebenaran mitos. Sebab mitos merupakan bagian dari corak historiografi tradisional. Mitos harus difahami sebagai suatu proses internalisasi spritual dari pengalaman manusia tentang realita, lalu

¹ Lihat Vida Pervaya Rusianti Kusmartono, "Pemerintahan Early State Negara Dipa di Kalimantan bagian Tenggara", Makalah dalam *Pertemuan Ilmiah Arkeologi IX dan Kongres IAAI 2002 di Kediri, 23-27 Juli 2002*, hal. 1.

² Sartono Kartodirdjo, "Historiografi Tradisional, Modern, Fungsi dan Strukturnya", dalam *Makalah Simposium Internasional Ilmu Humaniora I*, Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993, hal. 7.

³ "Hikayat Banjar" adalah sebuah manuskrip tua yang telah lama dikenal di daerah Kalimantan Selatan sejak Zaman Kerajaan Banjar. Nama asli dari manuskrip tersebut beberapa macam, misalnya : Hikayat Lambung Mangkurat, Tutar Candi, Hikayat Raja-raja Banjar dan Kotawaringin, Cerita Lambung Mangkurat dan Turunan Raja-raja Banjar dan Kotawaringin. Tidak diketahui mengenai penulis Hikayat Banjar, tetapi satu hal yang jelas adalah penulis atau penyalinnya bukanlah satu orang Raja, melainkan ditulis dan/atau disalin dari sumber lisan oleh orang banyak. Oleh karena itu dapat dimengerti jika terdapat banyak koleksi naskah Hikayat Banjar yang tidak sama bentuk dan isinya.

⁴ Lihat J.J. Ras, *Hikayat Banjar: A Study in Malay Historiography*, The Martinus Nijhoff, 1968, hal. 238.

⁵ Tentang Sarunai Fridolin Ukur menyebutnya sebagai sebuah kerajaan Orang Dayak Maanyan yang rusak oleh Jawa. Lihat .Fridolin Ukur, *Tanya Jawab Tentang Suku Dayak*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1977, hal. 46.

⁶ Dalam Heddy Shri Ahimsa Putra, *Struktualisme Levi- Strauss*, Galang Press, Yogyakarta, 2001, hal. 77.

diungkapkan ke alam kisah sejarah sebagaimana yang ternukil dalam babad, hikayat dan sejenisnya.. Dalam hubungan ini, disimpulkan bahwa manusia sangat tunduk pada kekuatan adikodrati yang diyakininya.

1. Nan Sarunai Sebagai Negara Suku

Penduduk asli Pulau Kalimantan adalah Orang Dayak. Khusus untuk Orang Dayak yang menghuni sekitar Kalimantan Selatan adalah Orang Dayak Ngaju. Orang Dayak Ngaju terbagi lagi dalam empat suku besar, yaitu: (1) Ngaju; (2) Maanyan; (3) Lawangan; dan (4) Dusun.⁷

Orang Dayak Maanyan dulunya menghuni area bernama Sarunai yang terletak di sekitar aliran Sungai Tabalong. Sarunai secara sederhana berarti yang sangat termasyur. Kemasyurannya mungkin sampai ke Madagaskar. Hal ini didukung oleh para pakar yang menyatakan, bahwa ada persamaan bahasa antara bahasa Orang Madagaskar dengan Orang Maanyan.⁸

Di Sarunai Orang Maanyan merupakan masyarakat homogen. Mereka menata kehidupan organisasinya dengan sangat harmonis sesuai dengan aturan adat yang bukan melulu berisikan hukum tradisional melainkan mencakup larangan-larangan tradisional.

Kehidupan berorganisasi bermasyarakat dikendalikan di rumah *betang* yang kemudian berkembang menjadi penataan bernegara. Ketika penataan organisasi bernegara secara sederhana dioperasionalkan, maka terbangunlah sebuah negara suku yang dikenal dengan nama Negara Nan Sarunai.

Pada Abad XIV, Negara Nan Sarunai diserang oleh Majapahit dan mengalami kekalahan. Dampak dari serangan ini, membuat Orang Maanyan eksodus meninggalkan Sarunai. Peristiwa tragis yang dialami oleh Orang Maanyan kemudian dituangkan kedalam nyanyian atau wadian yang kemudian ditransformasikan kepada generasi berikutnya.

Dalam eksodus itu, Orang Maanyan terpecah dan tersebar menjadi tujuh suku kecil yang masing-masing bernama: (1) Maanyan Siung bermukim di Telang, Paju Epat dan Buntok, (2) Maanyan Patai bermukim di aliran Sungai Patai, (3) Maanyan Paku berdomisili di wilayah Tampa, (4) Maanyan Paju X bermukim di sepanjang aliran Sungai Karau dan Barito, (5) Maanyan Paju Epat bermukim di wilayah aliran sungai yang sama dengan pemukiman Paju X, (6) Maanyan Dayu menghuni aliran Sungai Dayu, dan (7) Maanyan, mereka menghuni di wilayah Bintang Karang, Tumpang Murung, Dusun Timur, Tamiang Layang, Belawa, Tupangan Daka dan Barito.⁹

2. Negara Dipa dan Daha Sebagai Negara Awal

Hikayat Banjar diawali dari cerita tentang saudagar bernama Mpu Jatmika yang berasal dari Keling,¹⁰ bersama dengan dua orang anaknya bernama Lambung Mangkurat dan Mpu Mandastana telah tiba di Hujung Tanah. Tanah di Hujung Tanah ketika dicium oleh Mpu Jatmika berbau harum, sehingga ia yakin bahwa daerah itu cocok untuk membangun negeri. Kemudian Mpu Jatmika mendirikan sebuah kerajaan bernama Dipa dengan ibukotanya bernama Kuripan dan mengangkat dirinya untuk menjadi raja sementara di kerajaan itu di Hujung Tanah.

Adapun alasan Mpu Jatmika mengangkat dirinya untuk menjadi raja sementara di Negara Dipa, sebab yang dianggap sebagai raja pertama adalah patung yang terbuat dari kayu cendana. Dalam Hikayat Banjar dikatakan, Mpu Jatmika memerintahkan anak buahnya membuat patung

⁷ Cilik Riwtut, *Kalimantan Membangun*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1993, hal. 230-23.

⁸ Lihat A.B. Hudson, "The Paju Epat Maanyan Dayak in Historical Perspective", dalam *Indonesia*, 4 Oktober 1967, Cornell University, Ithaca, 1967, hal.17.

⁹ A.B. Hudson, *ibid*.

¹⁰ Menurut Schrieke, Keling identik dengan Kediri Utara lihat B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies Part Two*, N.V. Mijvarking van Hocke, Bandung, 1957, hal. 126.

berhala dari kayu cendana untuk dijadikan raja di Negara Dipa. Muncul pertanyaan mengapa tidak mengakui dirinya sebagai raja, bahkan patung berhala itu dijadikan raja olehnya? Tampaknya Mpu Jatmika sadar akan dirinya bahwa ia bukan keturunan raja dan takut pada kutukan. Ini menggambarkan pula, bahwa Mpu Jatmika sadar akan takdir, bahwa semua kewajiban manusia telah diterapkan oleh takdir dan kedudukan raja telah dikodratkan oleh Tuhan. Ia sadar bahwa takdirnya bukan untuk menjadi raja, kendatipun ia seorang raja, penemu, dan sekaligus pendiri dari Negara Dipa. Apabila Mpu Jatmika memaksakan diri hendak menjadi raja, ini berarti ia mengingkari takdir dan risikonya Negara Dipa dan ia akan mengalami kutukan lalu akan menjadi binasa.

Patung berhala yang dianggap raja oleh Mpu Jatmika adalah visualisasi dirinya untuk mensiasati takdir agar terlepas dari kutukan yang akan menimpanya dan Negara Dipa. Dari sini terlihat bahwa pandangan sejarah tradisional berjalan tanpa dipengaruhi atau ditentukan oleh berhasil atau tidaknya manusia, tetapi keterkaitan manusia terhadap takdir dan kutukan.

Sejak saat itu, Mpu Jatmika mengendalikan Negara Dipa. Kemudian ia memerintahkan Tumenggung Tatah Jiwa untuk memperluas kekuasaannya. Satu persatu wilayah-wilayah seperti Batang Tabalong, Batang Balangan, Batang Petak, Batang Alai, Batang Amandit beserta seluruh bukit-bukit di sekitarnya dapat ditundukkan. Di setiap daerah yang ditundukinya, Tumenggung Tatah Jiwa mengangkut 1000 orang penduduknya untuk dibawa ke ibukota kerajaan. Dari sini tergambar, bahwa peperangan yang dilakukan pada masa lalu bukan untuk menghabiskan nyawa manusia, melainkan untuk meningkatkan jumlah tenaga manusia.

Selama Mpu Jatmika mengoperasionalkan Negara Dipa, maka negara itu banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari Cina, Johor, Aceh, Bugis, Makassar, Sumbawa, Bali, Jawa, Banten, Madura, Tuban, Makau dan Kaling.

Selang beberapa lama Mpu Jatmika mengoperasionalkan Negara Dipa, ia sakit. Sebelum mangkat ia mengeluarkan wasiat agar Lambung Mangkurat dan Mpu Mandastana jangan berniat untuk menjadi raja, sebab mereka bukanlah keturunan raja. Bahkan ia menyuruh Lambung Mangkurat pergi bertapa untuk mencari raja yang sah.

Pasca wafatnya Mpu Jatmika, Lambung Mangkurat melakukan tapa brata (*balampah*) sesuai dengan wasiat dari ayahnya di sebuah sungai, dengan harapan memperoleh petunjuk akan datangnya seorang raja yang mereka nantikan. Ketika Lambung Mangkurat sedang bertapa, tiba-tiba di pusaran air keluar buih yang bersinar, lalu muncul seorang puteri. Puteri itu kemudian oleh Lambung Mangkurat disembah dan diberi nama Putri Junjung Buih, yang berarti putri dari buih yang dimuliakan dan menjadi ratu di Negara Dipa.

Setelah Ratu Junjung Buih diangkat menjadi ratu di Negara Dipa, Lambung Mangkurat merasa berkewajiban untuk mencari calon suami bagi putri yang dijunjungnya. Ketika niat untuk mencari jodoh bagi junjungannya disampaikan maka sang ratu menyetujuinya tetapi dengan suatu syarat, bahwa calon suaminya harus mempunyai kekuatan adikodrati yang hanya didapatkan melalui proses bertapa.

Setelah mendengarkan syarat yang diinginkan oleh Ratu Junjung Buih, lalu Lambung Mangkurat pergi ke suatu tempat untuk bertapa. Dari hasil bertapa Lambung Mangkurat secara gaib memperoleh seorang pemuda bernama Raden Putra, yang diyakininya bukan berasal dari manusia kebanyakan, tetapi seorang Putra Matahari yang diturunkan di pangkuan Raja Majapahit. Kemudian Lambung Mangkurat menikahkan Putri Junjung Buih dengan Raden Putra.

Selesai prosesi pernikahan Putri Junjung Buih dengan Raden Putra, lalu Lambung Mangkurat menobatkan Raden Putra dan Putri Junjung Buih untuk menjadi raja di Negara Dipa dengan gelar Pangeran Suryanata. Kelak mempunyai anak bernama Raden Suryaganggawangsa dan Raden Suryawangsa.

Pada masa Pangeran Suryanata menjadi raja di Negara Dipa, ia berhasil menaklukkan Sukadana, Sambas, Batang Lawai, Kotawaringin, Pasir, Kutai, Karasikan, dan Berau.

Mitos tentang Putri Junjung Buih dan Pangeran Suryanata di atas, mengetengahkan sejumlah data tentang asal usul munculnya Negara Dipa yang harus dipahami dengan pemahaman ideologi, dan religi. Mitos itu mewakili kepentingan penguasa. Dalam arti, bahwa mitos pernikahan itu secara ideologi merupakan pernikahan politik antara Majapahit dan putri penguasa lokal dan pelegitimasi masuknya pengaruh Majapahit ke Kalimantan Selatan dengan jalan yang sangat elok dan mempunyai akar yang sangat dalam. Hal ini dibuktikan dengan diberlakukannya tatacara Jawa di Negara Dipa.

Dalam pandangan religi mitos adalah suatu cara untuk mengungkapkan, menghadirkan raja yang Ilahi dan suci.¹¹ Dalam mitos Orang Dayak Ngaju terdapat kepercayaan mendua tentang alam, yaitu alam atas dan alam bawah. Alam atas oleh Orang Dayak Ngaju disebut *Raja Tontong Matanandau*, *Kanarohan Kambing Kabatenan Bulan* yang artinya Raja Penjurur Matahari, Pangeran Kelengkapan-Bulan, sedangkan alam bawah dikuasai oleh *Basuhun Bulau*, *Saramai Rabia*, yang berarti sungai emas, mengalir segenap kekayaan.¹²

Di dalam keyakinan suku Dayak Ngaju, Tuhan diwujudkan ke dalam Kedwitunggalan yang menciptakan alam atas dan alam bawah, beserta segenap isinya, seakan-akan berwujud kesatuan unsur jantan dan betina, yaitu *Bungai* dan *Jatta*

Dari konsep keyakinan suku Dayak Ngaju, tentang penguasaan alam atas yaitu *Raja Tontong Matanandau* sebagai raja matahari dan alam bawah dengan *Jatta* oleh M. Idwar Saleh diidentikkan dengan pernikahan antara Pangeran Suryanata dan Putri Junjung Buih yang juga menggambarkan bersatunya alam bawah dan alam atas.¹³ Perkawinan Pangeran Suryanata dan Putri Junjung Buih bila dikaitkan dengan konsep mikro dan makrokosmos dapat dikatakan, bahwa kedua tokoh itu merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk menata dunia (mikro) seperti diyakini oleh orang Dayak Ngaju.

Dari paparan di atas, tampak historiografi tradisional mempunyai fungsi sosial psikologis dalam artian memperkuat kedudukan dinasti dari Putri Junjung Buih dan Pangeran Suryanata sebagai pusat kekuatan yang membawahi kelompok suku Dayak, dan Melayu yang menghuni area di Kalimantan Selatan sekarang. Kedudukan sentral Putri Junjung Buih dan Pangeran Suryanata memunculkan pandangan rajasentris, sedangkan aspek khususnya menggambarkan regiosentrisme.

Sampai di sini, Hikayat Banjar tidak lagi memberikan informasi tentang Negara Dipa, terkecuali informasi tentang pengganti Pangeran Suryanata dan Ratu Junjung Buih adalah putranya yang bernama Pangeran Suryaganggawangsa, Maharaja Carang Lalean, Putri Kalungsu, kemudian berakhir periode Negara Dipa.

Lebih lanjut Hikayat Banjar meriwayatkan, bahwa Negara Dipa digantikan oleh negara baru yang bernama Negara Daha. Dalam Hikayat Banjar diwartakan bahwa beralihnya Negara Dipa ke Negara Daha merupakan suatu peristiwa kekeluargaan antara seorang keturunan Pangeran Suryanata bernama Sekarsungsang yang secara tidak sadar telah mengawini ibunya bernama Putri Kalungsu. Perkawinan antara Sekarsungsang dan Putri Kalungsu oleh Hikayat Banjar dijadikan titik pangkal munculnya Negara Daha dengan rajanya yang bernama Sekarsungsang yang bergelar Panji Agung Maharaja Sari Kaburangan.

¹¹ Hans. J. Daeng, *Manusia Kebudayaan dan Lingkungan*, Pustaka Jaya, Yogyakarta, 2000, hal. 80-81.

¹² Fridolin Ukur, *op.cit.*, hal. 27-40.

¹³ M. Idwar Saleh, *Sekilas Mengenai Daerah Banjar dan Kebudayaan Sungainya Sampai Akhir Abad IX*, Proyek Pengembangan Permuseuman Kalimantan Selatan Depdikbud, Banjarmasin, 1983/1984, hal. 9.

Pusat Negara terletak di Muara Hulak dan Muara Bahan sebagai pelabuhannya. Muara Bahan sebagai pelabuhan dikunjungi oleh pedagang-pedagang yang berasal dari Jawa, Melayu, Dayak, Cina, Bugis dan Makassar. Rakyat dari Negara Daha kebanyakan penduduk dari Negara Dipa. Kerajaan Daha sebagai pengganti Negara Dipa kemudian menampakkan kekuasaannya lagi ke wilayah Sewa Agung, Bunyut, Karasikan, Balitung, Lawai, dan Kotawaringin .

Selama pemerintahan Kerajaan Daha, penduduk yang mendiami aliran Sungai Negara dan Sungai Bahan penduduknya telah mengalami kemakmuran.¹⁴

B. PEMBAGIAN WILAYAH NEGARA DAN KEKUASAAN RAJA

1. Wilayah Negara

Secara garis besar keseluruhan wilayah Negara Dipa dan Daha terbagi atas dua bagian, yakni wilayah negara (keraton), dan daerah taklukan. Dari kedua wilayah ini maka wilayah negara merupakan wilayah unit politik terbesar, karena kata negara itu sendiri menunjukkan adanya suatu kawasan pemerintah di bawah seorang penguasa tertinggi yang memakai gelar kehormatan maharaja di depan namanya, dengan pemerintahan yang merdeka. Di wilayah ini atau wilayah inti merupakan pusat dari wilayah negara sekaligus berfungsi sebagai ibukota negara

Pada umumnya kawasan istana raja yang sekaligus berfungsi sebagai kota¹⁵ juga berfungsi sebagai ibukota negara terletak di bagian hilir Sungai Negara. Dengan bandarnya bernama Muara Rempiau, sedangkan Negara Daha di Muara Hulak dengan bandarnya di Muara Bahan. Sungai ini dipergunakan sebagai jalur pelayaran. Dengan demikian pemerintahan ibukota negara dapat langsung mengawasi dan menguasai kegiatan yang terjadi di seputar sungai itu, termasuk menguasai keluar masuknya barang-barang dagangan atau bahkan turut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung .

Secara konseptual istana atau keraton sebagai pusat pemerintahan dan tempat tinggal raja mempunyai peranan yang sangat penting. Kekuasaan raja terpancar dari keraton ke daerah-daerah yang mengakui kekuasaannya. Tentang bagaimana gambaran fisik istana Negara Dipa masih menjadi pertanyaan yang masih belum terjawab. Data lengkap yang dapat menjadi indikasi bangunan istana, kuil, pola pemukiman belum didapat, maka dapat dianalogikan dengan bangunan rumah Dayak yang terbesar di antara rumah penduduk lainnya adalah bangunan istana kerajaan yang jelas tidak semegah dan sebesar bangunan keraton-keraton di Jawa. Adapun bentuk istana kerajaan Banjar pada periode Islam dapat dianalogikan dengan bentuk yang dinamai Rumah Bubungan Tinggi, sedangkan jenis Balai Laki digunakan para bangsawan lainnya. Bagian dari istana itu menurut Amir Hasan Kiai Bondan¹⁶ terdiri dari:

- palatar adalah ruangan bagian muka
- panampik kacil merupakan ruangan bagian dalam
- panampik basar atau ambin sayup adalah ruangan di tengah rumah
- panampik panangah, ruangan rumah bagian dalam
- anjung adalah ruangan untuk peraduan sultan
- panampik bawah adalah ruangan yang berada di belakang
- padapuran merupakan bagian dapur

¹⁴ Sebelum Islam dianut di wilayah Muara Bahan penduduknya telah mengalami kemakmuran. Lihat C.A.L.M. Schwaner, *Borneo, Deel I*, Amsterdam, 1853, hal. 42.

¹⁵ Tentang kota pra industri lihat Gideon Sjoberg, *The Preindustrial City Past and Present*, The Free Press, New York, 1965.

¹⁶ Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sedjarah Kalimantan*, Fajar, Banjarmasin, 1953, hal. 140.

Bangsas untuk menerima tamu terletak di panampik besar. Seluruh bagian istana dibatasi oleh dinding-dinding yang kuat. Bangunan pokok dari istana adalah balairung, tempat duduk raja bila menerima pejabat istana. Bangunan istana terbuat dari kayu besi (ulin), papan dengan diberi hiasan. Panjang bangunan kira-kira 120 kaki, lebar 50 kaki dan tinggi 25 kaki.¹⁷ Bagian timur dari istana diberi batas dinding dari tanah setinggi 20 kaki, sedang sisi lainnya dibatasi oleh pagar kayu besi, tingginya kira-kira 20 kaki.¹⁸

Bentuk dan pembagian dalam ruangan istana secara keseluruhan berkaitan dengan kepercayaan dan pandangan Orang Ngaju yang menganggap, Burung Enggang sebagai lambang alam atas. Bentuk istana (*bubungan tinggi*) dibangun mengikuti bentuk *cacak burung* (jejak tapak burung). Bentuk cacak burung ini dipandang sebagai perpaduan antara garis yang melambangkan keseimbangan kekuatan untuk mempertahankan diri dalam melestarikan kehidupannya. Di bagian puncak atap rumah, yang disebut *bubungan*, diukir bergambarkan burung enggang yang bersifat jantan sebagai bagian dari dwitunggal penguasa alam dari kosmologi Agama Helu. Orang Ngaju menyebutnya Agama *Tempon Telon* atau yang lebih dikenal dengan nama Kaharingan. Di sebelah luar ruang depan yang disebut *panapih anjung* dan *panapih peluaran*, ditopang oleh tiang-tiang yang diukir dengan gambar ular atau *jata*, sebagai sifat kewanitaan dari dwitunggal alam bawah.¹⁹

Bangunan fisik istana di atas, merefleksikan hubungan yang harmonis antara alam atas dan alam bawah. Bangunan fisik istana itu menggambarkan konsep adanya kuasa yang berwujud dalam kedwitunggalan, kekuasaan alam atas dan alam bawah, yaitu merupakan gambaran kesatuan unsur jantan dan betina dalam kehidupan alam semesta.

Di bawah wilayah inti terdapat unit politik yang disebut daerah kekuasaan. Proses penguasaan atas daerah-daerah ini terjadi oleh beberapa faktor, diantaranya melalui penaklukan dan adanya perkawinan antara keluarga istana dengan anggota keluarga dari daerah yang mengakui kekuasaan negara. Daerah-daerah kekuasaan itu meliputi Batang Tabalung, Batang Baritu, Batang Alai, Batang Amandit, Batang Balangan, Batang Petak beserta komunitas-komunitas yang mendiami bukit-bukit di sekitarnya, Biaju Kecil, Biaju Besar, Sabangau, Mandawai, Katingan, Sampit, dan Pambuang.

Pemerintahan di wilayah-wilayah kekuasaan negara berdasarkan kepada istiadat setempat, raja memberikan kepercayaan dan kebebasan sepenuhnya kepada para kepala suku untuk memimpin komunitasnya. Intervensi pemerintah dalam pemerintahan daerah tidak ada. Kepala daerah yang mengakui kekuasaan negara disebut *Tamanggong*. Tamanggong merupakan nama jabatan para kepala suku. Ia diyakini merupakan keturunan langsung dari Kellahian yang tertinggi. Ia juga pewaris dari kekayaan dan pusaka sebagai aksesoris predikat Kellahian, seperti: tombak, gong, bejana, tikar dan lainnya. Penyandang gelar Tamanggong selain faktor geneologi ia dipilih juga berdasarkan kecerdikan, kekayaan, kearifan, jujur, adil, keberanian mengetahui tentang adat dan tradisi. *Pangkalima* bertugas untuk berperang, *Damang* sebagai kepala adat dan *Balian* sebagai kelompok iman yang menyelenggarakan ritual keagamaan.²⁰

2. Kedudukan dan Kekuasaan Raja

¹⁷ Bangunan fisik istana yang dipaparkan di atas bukan istana Negara Dipa atau pun Daha akan tetapi istana Kerajaan Banjarmasin di Martapura yang dibangun pada tahun 1786 lihat A. Van Der Ven, "Aanteekeningen Omtrent het Rijk Banjarmasin", dalam *T.B.G IX*, Lange & Co, Batavia, 1860, hal.105.

¹⁸ A. Van Der Ven, *loc.cit.*

¹⁹ Lihat M. Idwar Saleh, *loc.cit.*

²⁰ Lihat Fridolin Ukur, *op.cit.*, hal. 66.

Weber telah menelorkan karya monumental tentang rasionalisasi, perkembangan birokrasi dan munculnya sistem kekuatan legal yang tentunya menjadi pilar bagi negara modern.²¹ Dalam birokrasi yang ditawarkan oleh Weber dibahas tentang adanya prinsip hierarki jabatan. Hierarki jabatan pada negara tradisional cenderung muncul dari nilai-nilai primordial bersifat sakral sehingga melahirkan apa yang disebut model birokrasi tradisional.

Kepemimpinan dalam masyarakat tradisional berakar kepada struktur sosial yang tertata berdasarkan kelahiran, kekayaan, dan status.²² Menurut Berry status cenderung berkaitan dengan penilaian sosial terhadap kehormatan dan prestise seseorang, sedangkan pembagian atas kelas-kelas sosial bersifat pembagian politik²³.

Dalam struktur politik pemerintahan negara tradisional, raja adalah titik pusat kekuasaan. Raja sebagai pemegang jabatan tertinggi dalam hierarki kerajaan, mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Hal ini terlihat dengan terdapatnya atribut-atribut kerajaan atau *kingship*, seperti benda-benda pusaka, gelar, ataupun mitos-mitos geneologi yang kesemuanya berfungsi untuk mengabsahkan kedudukan raja sebagai penguasa. Raja kemudian mendelegasikan kekuasaannya ke bawah melalui jabatan birokrasi. Jabatan birokrasi ini cenderung dijabat oleh kerabat raja, yang kemudian disebut elit politik. Model birokrasi seperti ini dikenal sebagai model birokrasi patrimonial.

Puncak hierarki pada pemerintahan Negara Dipa dan Daha adalah raja. Jabatan raja diwarisi secara turun temurun sesuai dengan garis geneologi atau kekerabatan, dan bersifat keramat karena dianggap mempunyai kesaktian yang dapat menambah wewenang.²⁴ Wewenang pada dasarnya merupakan salah satu komponen kekuasaan. Kerabat raja berada pada tataran kedudukan tinggi yang juga berhak menguasai rakyat sebagai hambanya. Wewenang yang dimiliki oleh raja, jika dicermati memungkinkan sekali raja bertindak absolut. Akan tetapi wewenang ini, belum berarti dapat menguasai seluruh kekuasaan. Menurut Willi, faktor kekayaan turut menentukan kedudukan raja.²⁵

Dalam pustaka Orang Banjar terdapat kata *tuah*. Tuah diartikan akan mendatangkan kekeramatan, keselamatan dan kebahagiaan. Keyakinan tentang tuah membimbing rakyat untuk mentaati dan mematuhi. Pada akhirnya keyakinan tentang tuah mendukung kedaulatan raja atas rakyatnya.²⁶ Besar kemungkinan kedekatan raja dengan aparatnya melalui hubungan vertikal, yaitu kedudukan dan kekayaan.

Kekudusan tidak melulu melekat pada pribadi raja, tetapi terwujud juga dalam beragam aksesoris tanda keakbaran atau regalia yang terdapat dalam istana. Misalnya, pusaka-pusaka yang terdiri dari beragam jenis dan keseluruhannya dianggap mempunyai kekuatan magis yang dapat menambah ketuhanan raja. Keragaman pusaka milik kerajaan bukan saja dari jenisnya tetapi juga dari asal pusaka itu.

A.A Cense menuliskan, bahwa Negara Dipa dan Daha juga mempunyai pusaka-pusaka yang berasal dari Majapahit, yaitu: mahkota kerajaan, gamelan yang bernama si Larasati, gong yang

²¹ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, Translated by A.M. Henderson and Talcott Parson, The Free Press, New York, 1966, hal. 333-334.

²² Dalam M.Z. Arifin Anis, "Struktur Birokrasi dan Sirkulasi Elite di Kerajaan Banjar pada Abad XIX", Tesis Fakultas Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1994, hal. 31.

²³ M. Z. Arifin Anis, *loc.cit.*

²⁴ Menurut Jan Wissenam, wewenang berasal dari kata *wnang* yang berarti hak-hak istimewa untuk raja. Dalam M.Z. Arifin Anis, *op.cit.*, hal. 76.

²⁵ Dalam M.Z. Arifin Anis, *ibid*, hal. 82.

²⁶ M.Z. Arifin Anis, *ibid*, hal. 76.

bernama si Rambut Peradah, canang bernama si Macan Papatuk, tombak bernama si Panutus, dan keris bernama si Masagirang dan Jokopiturun.²⁷

Rees, juga menyebutkan beberapa pusaka lain yang dimiliki oleh istana, yaitu: singgasana emas, payung kerajaan, beberapa keris bernama Baru Lembah dan Naga Salira dengan sarungnya yang terbalut emas dan gagangnya bertahtakan berlian, sebilah pedang, lima buah tombak, beberapa buah perisai yang terbuat dari emas, perak serta seperangkat gamelan dan kain langgundi.²⁸

Raja diyakini sebagai orang yang dianggap wakil Dewa untuk memimpin dunia microkosmos, maka ia dianggap suci. Sebagai orang kudus, raja memiliki keistimewaan (*privilege*) yang membedakan dan memisahkannya dengan orang lain. Keistimewaan raja itu disimbolkan lewat beragam lambang yang masing-masing mempunyai arti dan makna tertentu. Seperti warna kuning yang mengandung arti keramat, tuah, dan mulia, merupakan salah satu keistimewaan yang hanya digunakan oleh raja. Begitu juga gelar yang disandangnya, seperti Putri Junjung Buih yang berarti putri bunga dari air yang dijadikan raja, dan Maharaja Pangeran Suryanata yang artinya raja dari segala raja matahari, dan Shah Alam yang berarti penguasa alam.

Warna kuning dianggap mempunyai unsur magis dan mulia diawali, ketika Putri Junjung Buih menampakkan dirinya untuk pertama kali.²⁹ Ia memakai kain sutra kuning, baju kuning, berkemben warna kuning, dan bertudung warna kuning. Begitu juga, ketika Raden Putra atau Pangeran Suryanata menampakkan dirinya dengan memakai kain sutra kuning. Kedua tokoh ini merupakan manusia super (*superhuman*) yang diturunkan untuk menjadi raja. Kelak raja-raja Negara Dipa, Negara Daha serta Banjarmasin selalu menarik geneologis ke Putri Junjung Buih dan Pangeran Suryanata. Warna kuning sampai saat ini oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai warna keramat.

Keistimewaan lain yang dimiliki raja tercermin dalam tatanan kata dan tata ucap. Ada beberapa perbendaharaan kata yang diperuntukkan kepada raja, yaitu kata *titah*, *junjunganku*, *sabda*, *tunggul payungku*, *matahariku*, *sida*, *mangkat*, *carmin matak*. Berbicara pada raja juga mempunyai tata berbahasa sendiri dengan maksud memulainya. Setiap bertutur kepada raja selalu dibuka dengan kalimat "*mohon beribu ampun*" diiringi kata *patik*. Begitu juga kalimat untuk mengiyakan sabda raja selalu ditutup dengan kalimat "*hamba junjung sabda tuanku Syah Alam itu atas batu kepala patik*". Keseluruhan kata-kata itu menggambarkan tanda merendahkan diri dari seseorang kepada raja sebagai penguasa alam yang dimuliakannya. Suatu refleksi dari penghormatan kepada orang yang dimuliakannya serta pencerminan terhadap kedudukan sosial, bawahan akan memberikan sifat penghormatan yang layak kepada atasan.

Dari uraian di atas, terlihat geneologi merupakan suatu yang mutlak, tidak saja menentukan seseorang individu berhak atau tidaknya untuk menjadi seorang raja, tetapi juga untuk memuliakan dan mengagungkan raja itu. Ini diperlihatkan, bahwa Putri Junjung Buih dan Pangeran Suryanata yang menjadi raja Negara Dipa, ia digambarkan sebagai manusia keturunan dewa tidak sebagai manusia biasa, melainkan sebagai *superhuman*, masing-masing dimunculkan dari buih air dan matahari.

²⁷ Anton Abraham Cense, *De Kroniek van Bandjarmasin*, Proefschrift C.A. Mees Antpoort, Amsterdam, 1928, hal.147-148.

²⁸ W.A.Van Rees, *De Bandjarmasinsche Krijg van 1859-1863*, Thieme, Arnhem, 1865, hal. 28-29.

²⁹ Putri Junjung Buih di dalam Hikayat Banjar awalnya menampakkan dirinya keluar dari buih air. M. Idwar Saleh menyamakan Putri Junjung Buih dengan Jata atau symbol wanita, sedangkan Pangeran Suryanata adalah Raja Tontong Matanandau atau raja matahari sebagai simbol laki-laki dalam kepercayaan Orang Ngaju.

Persoalan suksesi di Negara Dipa dan Negara Daha menurut Hikayat Banjar ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh kandidat raja, yakni memang harus keturunan raja dari permaisuri (keturunan dari Putri Junjung Buih dan Maharaja Pangeran Suryanata), berbuat adil terhadap rakyat dan keluarga, terbuka dari kritik, jangan dengki, setiap persoalan harus diselesaikan melalui mufakat.³⁰ Apabila putra mahkota belum dewasa untuk menjabat sebagai sultan, maka pemerintahannya dijalankan oleh sistem perwalian yang terdiri dari kerabat raja

Penobatan raja muda sebagai raja melalui suatu upacara. Upacara suci yang dianggap sebagai simbol kekuasaan raja adalah upacara *badudusan*. Upacara ini dimulai ketika seluruh kerabat sudah berkumpul. Raja duduk di sebelah kursi lalu diperciki air suci oleh keluarga sedarah raja, kemudian diusung ke keraton dan ditimbang sebanyak tiga kali. Air suci itu harus diambil dari Kuala Bincai di Amuntai. Jika sudah diketahui beratnya, maka raja diukur dengan benang emas dan perak. Setelah itu baru diadakan pesta selama tujuh hari tujuh malam, hari ke delapan baru ia dinobatkan menjadi raja.³¹ Sebenarnya upacara penobatan raja merupakan salah satu cara untuk mengesahkan kedudukan raja, karena upacara itu sendiri mengandung arti tunduk seluruh bawahan melalui upacara sembah yang diadakan.

3. Pembagian Kekuasaan

Di atas telah disebutkan, bahwa raja mempunyai kedudukan yang dianggap keramat, akan tetapi ia memerlukan aparat sebagai penghubung antara ia dan rakyat. Aparat yang menduduki birokrasi Negara Dipa dan Daha disebut dengan birokrasi patrimonial. Aparat birokrasi terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi atau kerabat dengan raja (*personal links*). Mereka diangkat dan diberhentikan serta diberi gelar yang memiliki tuah (*magis sakral*) yang sesuai dengan kedudukan, tinggi atau rendahnya, besar kecilnya kekuasaan atau jauh dekatnya hubungannya dengan raja. Nama dan gelar para aparat yang menduduki fungsi-fungsi tertentu dalam birokrasi pemerintahan Negara Dipa dan Daha merupakan pengaruh dari Majapahit, sehingga terdapat kesamaan.³²

1. Raja sebagai puncak piramid kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahannya dibantu oleh seorang yang bergelar *Patih Mangkubumi* sebagai kepala pemerintahan. Jabatan Patih Mangkubumi adalah jabatan yang paling strategis, karena jabatan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam segala kebijakan yang dikeluarkan oleh raja seperti yang pernah dijabat oleh Lambung Mangkurat;
2. Hakim tertinggi dijabat oleh orang kepercayaan raja, yang memiliki wewenang sebagai pemberi hukuman mati dan merangkap jabatan militer sebagai Hulubalang Pertama. Jabatan ini dipegang oleh Aria Magatsari. Aria Magatsari diberi daerah kedudukan yang dipimpin oleh *mantri sakai* atau kepala kampung di daerah aliran sungai Tabalung, Balangan, dan Petak. Tiga jaksa tertinggi, dijabat oleh orang kepercayaan raja yang memiliki wewenang menaksir hukuman suatu kasus dan merangkap jabatan militer sebagai Hulubalang Kedua. Jaksa tertinggi membawahi para mantri kerajaan, yaitu *mantri panganan* dan mantri *pangiwa*. Jabatan ini dipegang oleh Tumenggungg Tatah Jiwa. Tumenggungg Tatah Jiwa diberi daerah kedudukan yang dipimpin oleh mantri sakai atau kepala kampung di daerah aliran sungai Alai, Hamandit, dan Labuhan Amas;

³⁰ J.J. Ras, *op.cit.*, hal. 276.

³¹ Lihat M.Z. Arifin Anis, *op.cit.*, hal. 80. Upacara *badudusan* dimulai diperkenalkan ketika Putri Junjung Buih dan Maharaja Suryanata diangkat menjadi raja di Negara Dipa. Lihat J.J. Ras, *op.cit.*, hal.320.

³² Tata cara bernegara di Negara Dipa dan Daha mengikuti apa yang terjadi di Majapahit. Hal ini sesuai dengan amanat dari raja-raja kedua negara itu. Lihat J. J Ras, *loc.cit.* Lihat Juga Vida Pervaya Rusianti Kusmartono, *op.cit.*, hal.3-4.

3. *Mantri Panganan* terdiri atas Patih Baras, Patih Pati, Patih Luhu dan Patih Dulu. Setiap patih memiliki anak buah sejumlah sepuluh orang;
4. *Mantri Pangiwa* terdiri atas Sang Panimba Sagara, Sang Pambalah Batung, Sang Jampang Sasak dan Sang Pangaruntung Manau. Mantri Pangiwa memberikan asistensi kepada Mantri Panganan. Masing-masing mantri bertanggung jawab atas kampung pemberi upeti bagi kerajaan dan menentukan denda yang dipungut. Masing-masing mantri membawahi 10 orang personil, yang disebut mantri kerajaan;
5. *Mantri Karajaan*, terdiri dari 40 opsir yang memiliki tanggung jawab atas pengawasan wilayah dan keamanan kerajaan. Setiap opsir membawahi 100 orang anak buah;
6. *Mantri Pardagang* adalah menteri perdagangan luar negeri yang merangkap jabatan sebagai nakhoda mempunyai tanggung jawab penuh atas pemeliharaan kapal kerajaan *Prabayaksa* dan perahu-perahu lainnya. Mantri Pardagang memiliki 50 orang anak buah. Jabatan dipegang oleh Wiramartas yang fasih berbahasa Arab, Persia, Belanda, Melayu, Cina dan Jawa. Perdagangan dilakukan dengan Cina, Malaya, Johor, Aceh, Malaka, Minangkabau, Patani, Makassar, Bugis, Sumbawa, Bali, Jawa, Bantam, Palembang, Jambi, Tuban, dan Madura;
7. *Sarawisa* berfungsi untuk menjaga keamanan istana beserta isinya. Pengawal istana ini berjumlah 50 orang dengan komandan regunya disebut Mantri Sarabraja;
8. *Mandung* beranggotakan 50 orang anggota dikomandani oleh Mantri Raksayuda merupakan kelompok yang bertugas untuk membersihkan balairung sari dan sitiluhur.
9. Pada saat raja audiensi, ia dijaga oleh 40 orang pengawal yang bernama *mamagarsari* yang dikepalai oleh Mantri Sarayuda;
10. *Saragani* dipimpin oleh Mantri Raksayuda, bertugas untuk memelihara pusaka dan senjata-senjata untuk berperang. Komandan disebut dengan nama *Mantri Saradipa* atau *Wangsanala*;
11. *Tuhaburu* dipimpin oleh Mantri Puspawana, mempunyai 40 anak buah yang bertugas sebagai pendayung perahu kerajaan dalam perjalanan berburu;
12. *Pangadapan* atau *pamarakan* dipimpin Mantri Arsajiwa, memiliki 50 anak buah yang berfungsi antara lain sebagai kurir, penyaji hidangan raja, dan pembawa mangkuk basuhan raja dalam audiensi;
13. *Pariwara* dipimpin oleh Mantri Singantaka dan Singapati masing-masing memiliki 40 anak buah yang bertugas menjaga kerajaan siang dan malam;
14. *Malalangkah* bertugas membawa payung kerajaan yang terdiri dari 20 orang anak laki-laki;
15. *Juru Bandar* dipimpin oleh Mantri Anggamarta, mempunyai 50 anak buah bertugas memungut pembayaran bandar;
16. *Pargamalan* dipimpin oleh Mantri Astrapani, terdiri dari 40 orang musisi;
17. *Bujangga* terdiri dari 40 orang pendeta bertugas memelihara kuil dan arca pemujaan.

Prosesi-prosesi kenegaraan dipercayakan kepada suatu kelompok yang dikepalai oleh *mangumbara*. Ketika prosesi kenegaraan, raja didampingi oleh para rohaniawan yang disebut *mawargu*, sedangkan pembawa alat-alat upacara seperti tombak, payung bawat, tikar, pinangan sirih adalah tanggung jawab kelompok *pangadapan* yang dikepalai oleh pejabat *rasajiwa*. Seniman istana yang bertugas membuat kreasi dan mementaskan seni pertunjukan dikepalai oleh *astaprana*.

Berburu juga merupakan salah satu bagian dari gaya hidup raja. Ketika raja pergi berburu, ia dikawal oleh kelompok yang bernama *tuhaburu* yang dikomandani oleh pejabat *puspawana*.

Keamanan rakyat untuk pergi belanja di pasar itupun diperhatikan oleh negara. Terbukti negara juga membentuk keamanan pasar yang disebut *singabana*, yang dikepalai oleh *singapati*.

Penarikan cukai bandar untuk barang-barang ekspor dan impor serta cukai berlabuh bagi perahu-perahu yang bersandar di Bandar Muara Rampiau diurus oleh *anggamarta* sebagai kepala dari petugas juru bandar. Perdagangan yang diselenggarakan oleh negara pengurusannya dijabat oleh pejabat *wiramartas*.³²

C. EKONOMI NEGARA

Seperti yang diwartakan dalam Hikayat Banjar, pusat Negara Dipa terletak di Amuntai dengan pelabuhannya di Muara Rampiau, sedangkan pusat Negara Daha terletak di daerah pedalaman, yaitu diperkirakan di kota yang sekarang disebut Negara dengan bandarnya bernama Muara Bahan (Marabahan). Pemerintahan ke dua negara itu berpengaruh sampai ke daerah pedalaman di daerah Hulu Sungai sepanjang Sungai Negara, Tabalong, Balangan, Petak, Hamandit, dan Labuhan Amas yang memang termasuk daerah yang subur untuk pertanian, sehingga menghasilkan kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan penduduk kedua negara itu.

Secara turun temurun para penguasa di Negara Dipa, dan kemudian Daha selalu menekankan kepada rakyatnya untuk menanam tanam pangan kebutuhan pokok seperti padi, jagung, keladi, dan pisang. Dapat dikatakan kehidupan ekonomi masyarakat negara itu berbasiskan dari pertanian (*inland agraric hydrolic*). Schwaner memperkirakan, di daerah sepanjang Sungai Negara sebelum Islam masuk jumlah penduduknya lebih banyak daripada awal abad XIX.³³

Dalam memenuhi keperluan akan barang mewah yang sangat diperlukan untuk kelengkapan aksesoris istana, negara melakukan sistem barter dengan bangsa-bangsa lain. Misalnya Negara Dipa dan Daha selain menghasilkan produksi pertanian, wilayah luarnya dikelilingi oleh hutan yang dapat menghasilkan emas, intan, batu-batuan perhiasan, damar, lilin, rotan, gaharu, dan sebagainya. Barang-barang itu sangat diperlukan oleh bangsa-bangsa lain terutama Majapahit untuk ditukar dengan barang produksinya. Misalnya selain perhiasan adalah damar. Damar pada masa itu dapat dikatakan sumber energi yang sangat utama untuk penerangan dalam istana-istana.

Bagi Negara Dipa dan Daha, yang letaknya di tepi sungai besar sangat strategis dalam jalur lalu lintas perdagangan tampaknya tidak terlalu sulit untuk mengadakan hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Banyak pedagang dari beragam penjuru singgah untuk mengambil perbekalan ataupun mengadakan transaksi tukar menukar barang yang sangat diperlukan antar pendatang dengan Negara Dipa dan Daha. Seperti yang diwartakan oleh Hikayat Banjar, bahwa Muara Rampiau ataupun Muara Bahan pelabuhan milik kedua negara itu, karena letaknya yang strategis sering dikunjungi oleh pedagang Cina, Melayu, Bugis, Makassar, Jawa, Bali, Jambi, Madura, Makau dan Kaling. Sebagai contoh, seorang saudagar yang berasal dari Surabaya bernama Dampuawang, sekembalinya dari Negara Dipa pulang ke negerinya membawa beragam jenis barang seperti damar, lilin, tikar dari rotan, buah galem, paikat, tudung, emas, rial, ayam sabungan dan sebagainya.

Untuk mengisi kas negara, kapal-kapal yang singgah di Bandar Muara Rampiau ataupun Muara Bahan dikenakan pajak. Misalnya, Ki Mas Lalana dengan tiga orang pengikutnya telah tiba di Negara Dipa, barang-barang yang dipersembahkan sebagai tanda pajak adalah 2 lembar kain batik, 2 lembar kain limar, 2 lembar tapih cangkring patajin, 4 lembar kakamban limar, 1000 buah gula, 100 butir kelapa, 4 tajau minyak kelapa, 2 tempayan asam, 100 tumpuk bawang merah, 10 kampil

³² Diambil dari Sartono Kartodirdjo, *et.al.*, *Sejarah Nasional Indonesia* Jilid II, Balai Pustaka, Jakarta, 1975, hal. 27. Lihat juga J.J. Ras. *loc.cit*.

³³ C.A.L.M. Schwaner dalam M.Z.Arifin Anis.*op.cit.*, hal. 35.

beras, 4 buah sabuk tali datuk dan kopiah, satabla wayang gadogan, satabla wayang purawa, satabla topeng, dan sekoyan garam.³⁴

Negara Dipa selain berhubungan dengan negara-negara tradisional di Nusantara, ia juga menjalin hubungan dengan negara Cina. Hal ini terwartakan juga dalam Hikayat Banjar, bahwa Mpu Jatmika ketika memerlukan pemahat patung dari tembaga ia mendatangkan dari Negeri Cina. Untuk itu Mpu Jatmika membekali utusannya 10 buah intan, 40 buah mutiara, 40 buah jumantan, 40 buah polam, 40 buah merah, 40 buah biduri, 40 pikul lilin, 1000 gadai damar, 1000 gulung paikat, 100 gantang air madu, 10 ekor kera sebagai persembahan dari Negara Dipa untuk Raja Cina. Sekembalinya utusan Negara Dipa dari Negeri Cina, ia membawa 10 pemahat patung tembaga, sekodi imka merah, kuning, biru, putih, hitam, hijau, 10 gendang air emas, 10 gendang beragam sutra, 1000 buah mangkuk besar, 1000 buah mangkuk kecil, 1000 buah cupu beragam warna dan 10 pikul menyan.

Paparan tentang ekonomi negara, memperlihatkan bahwa Negara Dipa mempunyai dua sistem perekonomian tradisional, *pertama* terdapatnya muara yang membuat negara itu terbuka, sehingga bisa berhubungan dengan bangsa lain, *kedua* latar belakang pertanian dan hasil-hasil alam lainnya mampu mendukung seluruh keperluan mereka.

D. RUNTUHNYA NEGARA DAHA

Ketika Raden Sukarama memerintah Negara Daha, tanpa disadarinya ia telah membangun embrio konflik kekuasaan di dalam istana. Konflik kekuasaan itu dimuarai ketika Raden Sukarama mewasiatkan tahta kekuasaan Negara Daha kepada cucunya bernama Raden Samudera, tetapi wasiat itu ditentang oleh ketiga anaknya, yaitu Mangkubumi, Tumenggung, dan Bagalung. Setelah Raden Sukarama wafat, Pangeran Tumenggung merampas kekuasaan dari pewaris yang sah, yaitu Raden Samudera dan mengangkat dirinya menjadi raja di Negara Daha.

Raden Samudera sebagai pihak yang kalah dalam konflik kekuasaan itu memilih untuk menjadi pelarian politik dan bersembunyi di hilir Sungai Barito, dan ia dilindungi oleh kelompok-kelompok yang bermukim di area itu. Kelompok yang melindungi Raden Samudera adalah kelompok Orang Melayu yang memang bermukim di sekitar area itu. Kampung Orang Melayu itu oleh Orang Dayak Ngaju disebut Banjar Oloh Masih,³⁵ yang berarti kampungnya Orang Melayu yang pemimpinnya bernama Pati Masih.

Kampung dapat berkembang menjadi kota. Salah satu syarat menjadi kota menurut Cooley,³⁶ adalah masalah transportasi. Kampung Banjarmasin pada awalnya tempat pemukiman Orang Melayu yang terletak pada pertemuan antara Sungai Barito dan Sungai Martapura juga berfungsi sebagai area tukar menukar barang-barang kebutuhan komunitas Melayu dan Dayak Ngaju, kemudian berubah menjadi tempat kegiatan perdagangan. Kemudahan transportasi antar daerah hulu sungai dan muara sungai berdampak berkumpulnya para pedagang dari berbagai daerah untuk melakukan transaksi perdagangan. Tahap demi tahap sekitar pasar muncul bangunan-bangunan tempat penyimpanan barang-barang komoditas perdagangan, dan rumah-rumah para pedagang mulai bermunculan, pada akhirnya di kampung Banjarmasin lahirlah masyarakat pedagang.

Pola suku Melayu menjalin hubungan baik dengan suku Dayak Ngaju di Banjarmasin dapat dilihat dari letak pemukiman orang Melayu yang berada di tengah-tengah wilayah yang dihuni oleh suku Dayak Ngaju. Banjarmasin terletak di muara sungai yang merupakan pertemuan antara

³⁴ J. J. Ras, *op.cit.*, hal. 360.

³⁵ A. Van Der Ven, *op.cit.*, hal.93.

³⁶ Dalam M.Z. Arifin Anis, *loc.cit.*

penduduk pedalaman (*hinterland*) dengan orang Melayu. Mata pencarian penduduk Orang Ngaju adalah bercocok tanam dan mengumpulkan hasil-hasil hutan, yang terdiri dari rotan, emas, kulit binatang, dan intan.

Hasil hutan yang dikumpulkan oleh Orang Ngaju kemudian dibawa ke Banjarmasin, lalu oleh mereka dititipkan kepada Orang Melayu untuk dijual kepada pedagang-pedagang yang datang ke tempat itu. Dalam arti kata Orang Melayu berperan sebagai perantara yang dalam bahasa lokalnya disebut *pembalantikan*. Adanya hubungan yang saling menguntungkan antara Orang Melayu dan Orang Ngaju, sehingga masing-masing pihak saling membutuhkan. Pada akhirnya hubungan itu berubah menjadi perpaduan kekuatan yang disegani di sepanjang aliran Sungai Barito, khususnya di Banjarmasin. Suatu kewajaran apabila di daerah itu dijadikan tempat persembunyian oleh Raden Samudera dari kejaran Pangeran Tumenggung. Selama mengungsi di kawasan Banjarmasin, Raden Samudera merasa dilindungi oleh komunitas Melayu.

Dalam pelarian politiknya Raden Samudera melihat bahwa Banjarmasin dengan sumber daya manusianya merupakan suatu kekuatan potensial untuk mengadakan perlawanan terhadap kekuatan pusat, yaitu Negara Daha. Kekuatan potensial yang dimiliki oleh Banjarmasin untuk menentang kekuatan pusat akhirnya mendapat pengakuan formal, ketika Raden Samudera diangkat menjadi kepala negara oleh kelompok Melayu di daerah itu.

Pengangkatan Raden Samudera menjadi kepala negara di Banjarmasin melambangkan terbentuknya kekuatan politik tandingan, perpaduan kultural, dan kelak merupakan embrio bagi kelahiran Orang Banjar. Terbentuknya kekuatan politik baru di Banjarmasin, bagi Raden Samudera merupakan media kekuatan tandingan untuk memperoleh haknya sebagai raja di Negara Daha, sedangkan bagi kelompok Melayu merupakan media mereka untuk tidak membayar pajak kepada Negara Daha.

Setelah menjadi raja di Banjarmasin, Raden Samudera dianjurkan oleh Patih Masih untuk meminta bantuan ke Demak guna persiapan untuk mengambil kembali tahtanya atas Negara Daha. Permintaan bantuan dari Raden Samudera oleh Sultan Demak diterima, tetapi dengan suatu syarat, bahwa Raden Samudera beserta pengikutnya harus memeluk agama Islam. Raden Samudera menyanggapi persyaratan itu, tidak lama kemudian, Sultan Demak mengirimkan kontingennya yang dipimpin oleh Khatib Dayan. Gelar atau nama Khatib Dayan lebih mencerminkan nama seorang penyampai khotbah atau penziar agama ketimbang nama atau gelar seorang panglima perang.³⁷

Setibanya di Banjarmasin, kontingen Demak dan Banjarmasin terus berlayar ke hulu Sungai Barito. Di daerah yang bernama Sanghiang Gantung kontingen Demak dan Banjarmasin bertemu dengan pasukan dari Negara Daha, sehingga terjadilah pertempuran yang diakhiri oleh suatu kemufakatan untuk duel antara Raden Samudera dengan Pangeran Tumenggung. Dalam duel itu, Raden Samudera tampil sebagai pemenang.

Menarik untuk disimak pilihan duel yang dilakukan oleh Raden Samudera dengan Pangeran Tumenggung. Menurut Anthony Reid,³⁸ Orang Asia Tenggara khususnya Orang Indonesia, banyak mempunyai reputasi dalam keberanian individual. Tujuan peperangan bagi orang Indonesia adalah untuk meningkatkan jumlah tenaga manusia, bukan untuk membuang nyawa dalam suatu pertempuran habis-habisan. Lebih jauh lagi, Anthony Reid dalam melihat duel yang banyak dilakukan oleh Orang Indonesia merupakan bagian dari ritus dan persiapan fisik dengan tujuan menghasilkan seorang pemenang melalui kompetisi ritual, yang pada akhirnya si pemenang menjadi pemimpin yang diberkati oleh Tuhan. Jika mengacu kepada pandangan Anthony Reid,

³⁷ M.Z. Arifin Anis, "Banjarmasih Sebagai Bandar Perdagangan Pada Abad XVII". Dalam *Jurnal Vidya Karya* Nomor 2, Oktober 2000, Banjarmasin, hal. 91.

³⁸ Dalam M.Z Arifin Anis, *ibid*, hal. 92.

maka kemenangan Raden Samudera dalam duel itu merupakan kemenangan yang bersifat adikodrati.

Setelah kemenangan dalam duel itu, Raden Samudera memindahkan rakyat Negara Daha ke Banjarmasin. Perpindahan rakyat Negara Daha ke Banjarmasin merupakan manifestasi dari tujuan perang, yaitu merekrut jumlah tenaga manusia, dan pengukuhan Raden Samudera sebagai kepala negara yang mempunyai kharisma. Pembauran penduduk di Banjarmasin, yang terdiri dari rakyat Negara Daha, Melayu, Dayak, dan Orang Jawa (kontingen dari Demak), pada dasarnya menggambarkan bersatunya masyarakat sebagai kesaktian utama.

Pengumpulan penduduk di Banjarmasin menyebabkan daerah itu mempunyai potensi penduduk, ditambah letaknya pada pertemuan Sungai Barito dan Sungai Martapura memudahkan terbentuknya jaringan perhubungan, sehingga terjadi peningkatan arus perdagangan, antara pedalaman, pantai, bahkan dari luar pulau. Di sekeliling wilayah Banjarmasin dibangun benteng dari kayu untuk melindungi penduduknya dari ancaman luar.³⁹ Hal ini mendorong Banjarmasin berkembang menjadi kota.

Perkembangan Banjarmasin bermuasal dari sebuah kampung Orang Melayu, kemudian berubah menjadi ibukota kerajaan yang sekaligus berfungsi sebagai pusat ibadah. Hal itu merupakan suatu fenomena, bahwa kota bukan saja sebagai pusat politik dan kebudayaan bagi masyarakatnya, tetapi juga berfungsi sebagai pusat magis kerajaan itu sendiri.⁴⁰

Kemenangan Raden Samudera atas Pangeran Tumenggung pada abad XVI merupakan suatu perwujudan terjadinya pergeseran politik dari negara yang ekonominya berbasiskan agraris (Daha) kepada negara yang bersifat maritim, dan Islam dijadikan sebagai agama negara. Gelar yang dipergunakan oleh Raden Samudera sejak saat itu berubah menjadi Sultan Suriansyah.

³⁹ Lihat gambar-gambar dalam M.Idwar Saleh, *Sejarah Banjarmasin*, KPPK, Bandung, tanpa tahun.

⁴⁰ Dalam M. Z. Arifin Anis, *op.cit.*, hal. 48.

Perkara 1 Undang-undang Sultan Adam :

"Adapoen perkara jang pertama akoe soeroehkan sekalian ra'jatkoel laki-laki dan bini-bini beratikat dalal al soenat waldjoemaah dan djangan ada seorang beratikat dengan atikat ahal a'bidaah maka siapa-siapa jang tadangar orang jang beratikat lain daripada atikat soenat waldjoemaah koesoeroeh bapadah kapada hakimnja, lamoen benar salah atikatnja itoe koesoeroehkan hakim itoe menobatkan dan mengadjari atikat jang betoel lamoen anggapan inja dari pada toebat bapadah hakim itu kajah diakoe".¹

Wasiat Pangeran Antasari

Haram Manyarah kapada Walanda Waja Sampai Kaputing²

Wasiat Demang Lehman

"Dangar-dangar barataan! Banua Banjar lamun kahada lakas dipalas lawan banyu mata darah, marikit dipingkti Walanda!"³

BAB IV ZAMAN BARU 1500-1900

A. TERSEBARNYA AGAMA ISLAM DAN TERBENTUKNYA KERAJAAN BANJAR

Keadaan geografis Indonesia yang berpulau-pulau dan jumlahnya mencapai ribuan pulau besar kecil menyebabkan daerah pesisir telah memegang peranan yang cukup penting di bidang perdagangan maupun kekuasaan politik dan ekonomi. Melihat kenyataan bahwa sejak permulaan berdirinya kerajaan Islam di Indonesia baik yang terletak di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Maluku, maka daerah pesisirlah yang menjadi pusat kerajaan, hal ini tidak mengenyampingkan peranan kerajaan Mataram Islam yang berpusat di pedalaman. Dengan keadaan geografis semacam ini akan sulit kiranya membayangkan adanya suatu kekuasaan tunggal untuk menguasai seluruh Indonesia pada saat itu. Dalam perkembangan masyarakat Indonesia-Hindu yang berpindah secara perlahan dan lambat ke masyarakat Indonesia Islam dan lenyapnya kekuasaan raja Indonesia-Hindu yang digantikan oleh munculnya kekuasaan kerajaan Indonesia Islam telah membawa akibat pula dalam transformasi politik dan sosial untuk menuju ke sistem masyarakat baru.

1. Kalimantan Selatan Sebelum Datangnya Islam

Apabila daerah Kalimantan khususnya bagian selatan hingga sekarang terkenal sebagai satu-satunya daerah penghasil intan di Indonesia, maka bukanlah suatu kebetulan bahwa sejak tahun 1400 Masehi para pedagang asing Cina sudah mengincar daerah ini. Bagaimanapun juga hingga abad ke- 15 Tanjungpura dan daerah Matan di Kalimantan Selatan merupakan pusat perdagangan intan. Umumnya

¹ Commisie Voor Het Adatrecht, *Adatrechtbundels Deel XIII*, Borneo's Gravenhage Martinus Nijhoff, 1917, dalam Abdurrahman, "Studi Tentang Undang-Undang Sultan Adam 1835: Suatu Tinjauan Tentang Perkembangan Hukum Dalam Masyarakat dan Kerajaan Banjar pada Pertengahan Abad ke-19", Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Banjarmasin, 1989, hal. 63; Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sedjarah Kalimantan*, Fadjar, Banjarmasin, 1953, hal. 151.

² Anggraini Antemas, *Orang-orang Terkemuka Dalam Sejarah Kalimantan*, B.P. Anggraini Features, Banjarmasin, 1971, hal. 41.

³ Diucapkan Demang Lehman menjelang eksekusi di tiang gantungan di tanah lapang Martapura 27 Februari 1864. Lihat Anggraini Antemas, *ibid.*, hal. 54.

perdagangan ini dikuasai oleh pedagang Cina, bahkan ketika Portugis sudah di bidang perdagangan di wilayah ini tidak dapat mengubah posisi seperti telah terjadi pada abad-abad sebelumnya.⁴

Menurut beberapa sumber ada tiga jalur perdagangan intan sampai ke Landak. Dengan melalui Sukadana – Tanjungpura dari abad ke-16 dan abad sebelumnya, dari kota kuno Matan. Pada waktu itu kota Matan merupakan inti dari pusat perekonomian saat itu. Orang-orang Jawa menyebut kota Matan untuk seluruh pulau besar ini, hanya Portugis yang menyebut Borneo suatu lafal keliru dari Brunai. Dua daerah lainnya dari jalur perdagangan intan adalah Lawe dan Sambas. Lawe atau Sukadana sejak abad ke-16 sudah mulai jatuh dibawah kekuasaan Jawa yang mencapai titik jenuh pada masa Mataram di awal abad ke- 17.

Barangkali sumber yang cukup tua menyebutkan bahwa Kalimantan pada periode menjelang masuknya Islam di Kalimantan ialah *Negara Kartagama*, yang ditulis oleh Mpu Prapanca tahun 1365 ini telah menyebut daerah Kalimantan Selatan yang diketahui ialah daerah sepanjang sungai Negara, Batang Tabalong, sungai Barito dan sekitarnya.⁵

Situasi politik di daerah Kalimantan Selatan menjelang Islam banyak diketahui dari sumber historiografi tradisional yakni Hikayat Lambung Mangkurat atau Hikayat Banjar. Sumber tersebut memberitahukan bahwa di daerah Kalimantan Selatan telah berdiri kerajaan yang bercorak Indonesia.-Hindu Negara Dipa yang berlokasi sekitar Amuntai dan kemudian dilanjutkan dengan Negara Daha sekitar kota Negara sekarang. Kalau kita memperhatikan sumber tersebut tentang asal-usul adanya pemukiman baru di Hujung Tanah tempat pemukiman terakhir dari saudagar Mangkubumi sangat menarik perhatian. Hikayat Banjar menjelaskan tentang berdirinya kerajaan Negara Dipa, kerajaan yang bercorak Indonesia-Hindu dan merupakan kerajaan pertama di Kalimantan Selatan.

Negara Dipa pada mulanya terletak di Hujung Tanah. Aria Mangkubumi sebagai cikal bakal raja Banjar bukanlah seorang yang berasal dari keturunan raja. Ia hanya saudagar kaya raya. Menurut konsepsi Hindu tidak mungkin seorang yang berasal dari *kasta Waisya (pedagang)* dapat menobatkan diri sebagai raja. Itulah sebabnya, ketika Mangkubumi meninggal dunia maka penggantinya Ampu Jatmika yang seharusnya Menjadi raja pertama Negara Dipa menata pemerintahan dan negara dengan membuat bangunan-bangunan. Ia segera membuat candi, balairung, keraton, ruang sidang dan menara. Karena Ampu Jatmika bukan keturunan raja maka dibuatlah simbol institusi raja berupa arca laki-laki dan perempuan yang kemudian ditempatkan di Candi dan segenap rakyat diwajibkan menyembah dan menganggapnya sebagai raja. Hal ini dilakukan supaya Ampu Jatmika beserta keturunannya kelak kemudian hari terhindar dari segala macam marabahaya.⁶

Selanjutnya diangkatlah Aria Megatsari menjadi Patih kerajaan yang membawahi beberapa Mantri. Ketika Ampu Jatmika meninggal pengganti tahta kerajaan tetap menjadi persoalan karena Ampu Jatmika berpesan bahwa kedua puteranya Ampu Mandastana dan Lambung Mangkurat atas pesan ayahnya tidak berhak naik tahta karena bukan keturunan raja. Lambung Mangkurat berhasil mencari pengganti raja yaitu Puteri Junjung Buih yang atas jasa Lambung Mangkurat memperoleh jodoh seorang Pangeran Majapahit bernama Raden Putera yang kemudian bergelar Pangeran Suryanata. Lambung Mangkurat memegang jabatan Mangkubumi hingga pada akhir hayatnya.⁷

⁴ B.O. Schrieke, *Indonesian Archipelago*, Part One, The Hague, 1955, hal. 22, dalam Hasan Muarif Ambary, "Catatan Tentang Masuk dan Berkembangnya Islam di Kalimantan Selatan", Prasaran Seminar Sejarah Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1976.

⁵ Th. Pigeaud, *Java in the 14 th Century, a Study in Cultural History*, Volume III, The Hague, 1960, Canto 16, Stanza 14, dalam Hasan Muarif Ambary, "Catatan Tentang Masuk dan Berkembangnya Islam di Kalimantan Selatan", Prasaran Seminar Sejarah Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1976.

⁶ J.J. Ras, *Hikayat Banjar a Study in Malay Historiography*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1968, hal. 234 – 242 ; A.A. Cense, *De Kroniek van Banjarmasin*, Proefschrift, Leiden, 1928, hal. 8-12, dalam Hasan Muarif Ambary, "Catatan Tentang Masuk dan Berkembangnya Islam di Kalimantan Selatan", Prasaran Seminar Sejarah Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1976.

⁷ J.J. Ras, *ibid.*, hal. 52.

Kalau kita memperhatikan legenda ini maka jelas disini adanya suatu kompromi politik antara unsur pribumi, yaitu Puteri Junjung Buih yang dapat dianggap mewakili legenda setempat dengan jodoh seorang Pangeran Majapahit yang berarti dari segi konsepsional ia berhak menduduki kursi kerajaan.⁸

Disini kita dapat melihat jelas adanya suatu ungkapan yang cukup dapat diterima akal dari *Hikayat Lambung Mangkurat* atau *Hikayat Banjar* tentang adanya perkawinan politik antara penduduk pribumi yang diwakili oleh Puteri Junjung Buih dengan seorang pendatang yang berdarah biru.

Menjelang datangnya Islam ke daerah Kalimantan Selatan kerajaan yang bercorak Indonesia Hindu telah berpindah dari Negara Dipa ke Negara Daha diperintah oleh Maharaja Sukarama. Setelah dia meninggal dia digantikan oleh Pangeran Tumenggung yang menimbulkan sengketa dengan Raden Samudera cucu maharaja Sukarama, yang dilihat dari segi institusi kerajaan mempunyai hak mewarisi tahta kerajaan.

Hikayat Banjar telah memberi contoh perlambang hak waris mahkota Kerajaan ini. Salah satu lambang kerajaan yang bernilai magis yang paling tinggi adalah mahkota. Ketika Mangkubumi Pangeran Tumenggung yang berusaha merebut tahta kerajaan dari Pangeran Samudera dan ketika dia menobatkan diri dengan mencoba memakai mahkota ternyata tidak dapat masuk ke kepalanya hingga dia membatalkan memakai mahkota.

Dengan demikian Negeri Daha adalah benteng terakhir dari institusi kerajaan bercorak Indonesia-Hindu dan setelah itu digantikan dengan institusi bercorak Islam.

2. Tersebarannya Agama Islam

Berdasarkan pendapat para orientalis Barat masuknya agama Islam ke Indonesia melalui negeri Persia (Iran). Salah satu bukti yang dikemukakan adalah berdirinya kerajaan Islam yang pertama di Indonesia adalah kerajaan Pase. Nama Pase dihubungkan dengan nama Parsi. Tetapi para ahli sejarah bangsa Indonesia membantahnya. Nama Pase berasal dari kata pasir, menurut logat dan lidah orang Aceh, karena kerajaan Pase itu terletak di pantai pulau Sumatera yang berpasir di daerah Aceh. Orang Aceh pada umumnya tidak dapat mengatakan huruf "r" pada akhir kata seperti kata pasir diucapkan pase, air diucapkan aye, Belanda Kafir diucapkan Belanda Kape.

Teori yang mengatakan bahwa agama Islam datangnya melalui negeri Parsi untuk menguatkan hipotesa bahwa aliran Syiahlah yang pertama kali masuk ke Indonesia. Hipotesa ini dikuatkan dengan adanya perayaan Tabut di Sumatera Barat yang mengingatkan pada peristiwa *Perang Karbala* dengan terbunuhnya *Sayidina Ali ra.*

Pada umumnya para sejarawan tidak sependapat dengan teori masuknya agama Islam melalui negeri Parsi. Pada bulan Maret 1964 telah diadakan Seminar Sejarah masuknya Islam ke Indonesia di kota Medan. Seminar mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a) Bahwa menurut sumber-sumber yang kita ketahui, Islam untuk pertama kalinya telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah atau abad ke- 7-8 Masehi dan langsung dari Arab.
- b) Bahwa daerah pertama yang didatangi Islam ialah pesisir Sumatera; dan bahwa setelah terbentuknya masyarakat Islam, maka raja Islam yang pertama berada di Aceh.
- c) Bahwa dalam proses peng-Islaman selanjutnya, orang-orang Indonesia ikut aktif mengambil bagian.
- d) Bahwa muballigh-muballigh Islam yang pertama itu selain sebagai penyiar agama Islam juga sebagai pedagang.

⁸ Hasan Muarif Ambary, "Catatan Tentang Masuk dan Berkembangnya Islam di Kalimantan Selatan", Prasaran Seminar Sejarah Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1976, hal. 44.

- e) Bahwa penyiaran agama Islam di Indonesia dilakukan secara damai.
- f) Bahwa kedatangan Islam ke Indonesia itu membawa kecerdasan dan peradaban yang tinggi dalam membentuk kepribadian Bangsa Indonesia.⁹

Muballig-muballig Islam yang datang pertama ke Indonesia langsung dari Mekkah atau Madinah. Ada kemungkinan besar bahwa diantara mereka itu terdapat golongan 'Alawiyyin keturunan Sayidina Hasan dan Husein bin 'Ali baik yang berasal dari Mekkah atau Madinah ataupun yang kemudian menetap di Yaman dan sekitarnya. Adalah sangat mungkin pula bahwa para muballig Islam itu menetap di Gujarat sebelum mereka sampai ke Indonesia. Pada abad-abad ke- 7/8 Masehi telah banyak menetap imigran dari Arab di pantai Barat Pakistan sekarang dan di pantai India. Hubungan pelayaran dengan kapal layar sangat ditentukan oleh angin, karena itulah para muballig ini menetap di beberapa daerah Pakistan dan India sebelum melanjutkan pelayaran mereka ke Indonesia. Gujarat mereka jadikan sebagai pangkalan perdagangan dan penyebaran Islam, karena tujuan mereka adalah da'wah Islam sambil berdagang.

Dalam proses penyebaran agama Islam ini, orang Arab yang bertindak sebagai muballig memegang peranan sebagai pimpinan, dan bukanlah orang India sekalipun mereka juga muballig. Muballig bangsa India lebih memusatkan perhatian mereka untuk menyebarkan agama itu kepada bangsa India sendiri yang mayoritas beragama Hindu dan Budha.

Kecintaan orang-orang Islam Indonesia terhadap *Ahlulbait Rasulullah* tidak dapat dijadikan alasan bahwa orang Islam Indonesia menganut aliran Syiah. Mencintai ahlulbait, kerabat dan keluarga Rasulullah bukan hanya pengikut aliran Syiah tetapi semua ummat Islam. Dalam Al-Qur'an Surat Asy Syuura ayat 23 menyebutkan bahwa Allah berfirman yang terjemahannya: *"Katakanlah hai Muhammad, Aku tidak meminta upah apapun kepadamu tentang seruanku ini kecualikasih sayang dalam kekeluargaan"*.

Mencintai Ahlul Bait Rasulullah adalah juga ajaran dalam aqidah Ahlussunnah wal Jamah. Mencintai Sayidina Hasan dan Husein serta cucu-cucunya sudah menjadi darah daging bagi ummat Islam Indonesia, begitu pula terhadap para sahabat Nabi.

Kedatangan Islam ke Indonesia mendatangkan kecerdasan dan kebudayaan bangsa kita adalah jelas tampak dalam karakter dan sejarah bangsa kita pada umumnya hingga mencapai kemerdekaan. Agama Islam mengangkat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berbudaya dan bentuk kebudayaan lahir dan batin. Kebudayaan lahir tampak pada benda-benda budaya Islam seperti bangunan masjid-masjid dan surat yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Mimbar-mimbar masjid serta ukiran-ukiran berupa hiasan pada mimbar, kaligrafi yang sangat disenangi kaum muslimin, serta busana yang dikenal sebagai busana muslim adalah juga merupakan kebudayaan lahir. Kebudayaan batin yang lahir sebagai akibat masuknya agama Islam antara lain berupa adat istiadat budi pekerti yang terbentuk dari ajaran Islam yang membentuk kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa, Pancasila dan butir-butir yang terdapat di dalamnya sebetulnya adalah manifestasi dari ajaran Islam. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa seorang muslim adalah juga seorang Pancasilais sejati. Aqidah Islam yang tertanam dalam dada seorang muslim menimbulkan semangat patriotisme untuk membela bangsa dari cengkeraman penjajah. Sejarah dapat membuktikan semangat yang terpancar dari Aqidah Islam ini. Perang Aceh, Perang Banjar, Perang Diponegoro, Perang Padri, begitu pula patriotisme Patahillah serta pasukan Demak untuk menghalau Portugis tahun 1527 adalah gambaran dari patriotisme bangsa untuk mengusir penjajah. Perang Aceh (1873- 1905) dan Perang Banjar (1859-1905) dapat bertahan sangat lama dan menghabiskan tenaga dan pikiran bangsa Belanda adalah karena dimotivasi oleh Aqidah Islam. Sehubungan dengan inilah Dr. Setia Budi (E.F.E. Douwes Dekker

⁹ Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Al Maarif, Bandung, 1979, hal. 176.

1879-1952) pernah mengatakan dalam salah satu ceramahnya di Yogyakarta menjelang akhir hayatnya antara lain mengatakan : *"Jika tidak karena pengaruh dan didikan agama Islam, maka patriotisme bangsa Indonesia tidak akan sehebat seperti yang diperlihatkan oleh sejarah bangsa Indonesia hingga mencapai kemerdekaan."*

Kembali pada masalah kapan masuknya agama Islam ke Indonesia. Seminar masuknya agama Islam ke Indonesia mengambil kesimpulan bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 dan 8 Masehi.

Pelayaran antara negeri-negeri Islam di Timur Tengah dengan bangsa di tanah air kita sudah berkembang sejak pada masa kebesaran khalifah abad ke- 9. Pada waktu itu tidak ada kapal-kapal lain yang melayari rute tersebut kecuali bangsa-bangsa dari Islam. Sehubungan dengan ini al-Mas'udi seorang pengarang, ahli sejarah, pelaut, dan pengeliling benua yang wafat pada 246 Hijriyah atau 957 Masehi mengatakan dalam bukunya *Murujul Zhahab* atau *Padang Luas Bertaburan Emas* : Sangat luas kerajaan Maharaja Jawa itu, balatentaranya tidak terhitung banyaknya. Dua tahun habis waktu jika hendak menjalani kerajaannya. Sangat pula cukup berbagai hasil tumbuh-tumbuhan dan kayu-kayuan yang wangi dan minyak wangi. Kapur barus, cengkeh dan cendana datang dari negeri itu dan lain-lain lagi. Disebelah sana terbentang jalan luas lautan besar jalan ke negeri Cina".¹⁰

Mas'udi adalah seorang Arab keturunan Abdullah bin Mas'ud salah seorang shahabat Nabi. Pada tahun 309 Hijriyah setelah dia mengelilingi Parsi dan Kirman, ia mengelilingi India dan Srilangka, dan dari sana mengarungi samudra berlayar ke Cina. Dia beberapa kali mengadakan pelayaran antara Cina dan Madagaskar. Mas'ud bukan satu-satunya orang Arab yang melayari rute ini, tetapi yang jelas bahwa abad ke- 3 Hijriyah Mas'udi telah singgah di Nusantara kita ini. Pada abad ke- 2 Hijriyah atau abad 9 Masehi telah terjalin hubungan antara Arab dengan dataran Cina. Adalah hal yang sangat mungkin hubungan dengan Nusantarapun telah ada. Pada abad ke- 2 Hijriyah di pesisir Cina. gudang terletak di Canton. Pada tahun 758 M terjadi keributan di Canton dan menyebabkan gudang perdagangan itu dirampok orang. Pada abad itu telah terbentuk jamaah masjid di Canton dengan imam dan khotibnya serta seorang Qadi bangsa Cina sendiri. Kalau dalam abad kedua Hijriyah telah terbentuk jamaah dan masyarakat Muslim, hal itu berarti bahwa agama Islam itu telah masuk ke Cina sebelum abad itu, sebab melahirkan sebuah masyarakat Muslim memakan waktu yang cukup lama.

Jadi dapatlah dipastikan Islam telah masuk ke Cina pada abad ke-2 Hijriyah atau abd ke 8 M. Pelayaran antara Arab-Cina cukup jauh dengan kapal layar, oleh sebab itu Nusantara adalah satu-satunya tempat persinggahan selama menunggu datangnya angin baik untuk dapat melanjutkan pelayaran ke negeri Cina. Kalau Islam masuk ke negeri Cina pada aabd ke 2 Hijriyah, adalah sangat mungkin sekali Islam masuk ke Nusantara kita ini pada abad pertama Hijriyah atau abad ke- 7-8 Masehi.

Menurut pendapat Ir. Moens dalam bukunya *"De Noord Sumatraanse Rijken der Parfums en Specerjen in voor Moslimse Tijd"*, yang dikutip oleh MD Mansur mengatakan bahwa kerajaan Samudera-Pase telah berdiri sejak lama dan pada abad ke-5 M telah menjadi pusat perdagangan yang resmi antara India dan Cina.

Sir Thomas Arnold dalam bukunya *"Preaching of Islam"* mengatakan bahwa di pantai barat pulau Sumatera telah terdapat satu kelompok perkampungan orang Arab, yaitu pada zaman pemerintahan Yazid dari Bani Umayyah tahun 684 M.

Dari dua pendapat ini dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa Islam telah masuk sekitar abad ke- 7 – 8 Masehi. Hubungan antara pedagang India dan Arab sudah lama terjalin dan tidaklah mustahil apa yang disebutkan Moens pedagang India itu juga termasuk diantaranya pedagang Arab yang telah

¹⁰ Saifuddin Zuhri, *ibid.*, hal. 184.

bermukim di India. Umumnya setiap pedagang Arab adalah juga berfungsi sebagai Muballig, dimana mereka menetap, disitu pula Islam berkembang. Tentang kelompok orang Arab yang menetap di pantai sebelah barat Sumatera, para sejarawan dalam Seminar Sejarah masuknya Islam tersebut berkesimpulan bahwa yang dimaksud pantai barat Sumatera itu adalah *Baros*. Terdapat banyak bukti tentang Baros sebagai tempat pertama disinggahi para pedagang Arab.

Masuknya agama Islam ke Nusantara tidaklah bersamaan dengan berdirinya kerajaan Islam di Nusantara ini. Tidak pernah terjadi dalam sejarah kedatangan agama Islam langsung mendirikan kerajaan Islam. Antara datangnya agama Islam dengan berdirinya sebuah kerajaan Islam melintasi waktu yang cukup lama. Sebelum agama Islam masuk, telah berdiri kerajaan yang mendapat pengaruh agama Hindu dan Budha, karena itulah tentunya agama baru yang masuk melalui proses yang lama baru dapat diterima oleh masyarakat sebagai agama.

Abad ke- 7-8 Masehi adalah zaman keemasan Bani Umayyah dan Abbassiah dan pada masa itu pula pedagang-pedagang Muslim yang terdiri dari orang-orang Arab, India dan Gujarat melakukan kegiatan perniagaan ke daerah Timur jauh dan Asia Tenggara. Kalau kita perhatikan bahwa pada abad itu adalah masa Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya. Selat Malaka merupakan daerah pengawasan Sriwijaya, sudah dilalui oleh pedagang-pedagang Muslim.

Berdasarkan berita Cina dari Dinasti T'ang, disebutkan bahwa masa itu sudah ada pedagang Muslim, baik yang bermukim di Kanfu (Kanton) maupun di daerah Sumatera sendiri.¹¹ Perdagangan yang meningkat pada masa itu dimungkinkan pula oleh kegiatan kerajaan Islam dibawah Bani Umayyah dibagian barat serta kerajaan Cina di bagian timur telah meramaikan jalur perdagangan lewat Asia Tenggara dibawah Sriwijaya.¹²

Penguasaan Selat Malaka oleh Sriwijaya sangat penting karena merupakan kunci bagi pelayaran dan perdagangan internasional masa itu. Kedatangan pedagang-pedagang Muslim tidak terasa akibatnya bagi kerajaan di Asia Tenggara dan Timur Jauh. Tetapi dua abad ke-mudian yaitu abad ke- 9 telah terjadi pemberontakan oleh petani Cina dimana masyarakat Muslim di sana telah turut serta dalam pemberontakan itu dan banyak diantaranya yang terbunuh. Sebagian penduduk Muslim yang selamat melarikan diri dan menetap di Kedah. Kaisar Cina yang diberontak itu adalah Hi-Tsung (878-879) dari Dinasti T'ang. Kaum muslimin yang menetap itu kemudian melakukan kegiatan politik dan ini berakibat terjadinya pertentangan antara Sriwijaya dengan negeri Cina, karena Kedah berada dibawah perlindungan Sriwijaya.

Syed Naguib al-Atas menyatakan bahwa orang-orang Muslim yang sudah ada sejak abad ke- 7 di Kanton dan telah menetap di Kedah abad ke- 9 dan Sumatera telah memiliki derajat yang tinggi dan memelihara baik kelangsungan organisasi kemasyarakatan dan kehidupan beragama.¹³

Kondisi Sriwijaya dalam abad ke- 13 sudah mulai menurun dan perdagangannya sudah lemah. Situasi menguntungkan bagi pedagang Muslim. Pedagang-pedagang Muslim di beberapa daerah memperoleh keuntungan politik, dimana mereka merupakan pendukung politik berdirinya kerajaan yang bercorak Islam. Kerajaan pertama yang terbentuk dengan corak Islam ini adalah kerajaan Samudera-Pase yang berdiri pada abad ke-13.

¹¹ W.P. Groeneveldt, *Notes on Indonesia and Malaya Compiled from Chinese Sources*, Bharatara, 1960, hal. 14, dalam Hasan Muarif Ambary, "Catatan Tentang Masuk dan Berkembangnya Islam di Kalimantan Selatan", Prasaran Seminar Sejarah Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1976.

¹² George Fadlo Hourani, *Arab Seafaring in the Indian Ocean and Early Medieval Times*, New Jersey University Press, Princeton, 1951, hal. 61-62, dalam Hasan Muarif Ambary, "Catatan Tentang Masuk dan Berkembangnya Islam di Kalimantan Selatan", Prasaran Seminar Sejarah Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1976.

¹³ Syed Naguib al-Atas, *Preliminary Statement on a General Theory of The Malay-Indonesia Archipelago*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pengajaran Malaysia, Kuala Lumpur, 1969, hal. 11, dalam Hasan Muarif Ambary, "Catatan Tentang Masuk dan Berkembangnya Islam di Kalimantan Selatan", Prasaran Seminar Sejarah Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1976.

Kalau kita melihat bahwa dalam abad ke-13 sudah ada kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia, ini berarti bahwa proses hubungan kaum Muslim dengan pribumi yang bergaul dalam waktu yang lama telah menghasilkan berdirinya sebuah institusi kerajaan yang bercorak Islam. Hal ini berarti pula bahwa orang pribumi telah berhubungan dan mengenal Islam melalui kegiatan perdagangan. Pedagang-pedagang yang menetap di pelabuhan-pelabuhan mendapat simpati penduduk pribumi lebih-lebih masyarakat golongan bangsawan, karena pedagang Muslim ini memegang peranan pening dalam dunia perdagangan, dimana para kaum bangsawan dan raja-raja memiliki saham. Hal yang mempermudah adalah karena Islam tidak mengenal adanya kasta. Seorang pemeluk agama Hindu dari kasta *Sudra* yaitu kasta yang paling rendah dalam masyarakat Hindu, apabila dia masuk agama Islam, derajatnya akan sama dengan setiap pemeluk Islam lainnya. Hal ini adalah bahwa setiap Muslim mempunyai kewajiban untuk mengajak ummat lain memeluk agama Islam. Hal ini berbeda dengan agama Hindu, dimana kewajiban seperti itu hanya dimiliki kasta Brahmana, kasta tertinggi di kalangan masyarakat Hindu.¹⁴

Seorang musafir Portugis Tome Pires yang berlayar disebagian besar daerah Nusantara pada permulaan abad ke- 16 (1512-1515) telah menyebutkan bahwa hampir seluruh pesisir utara Jawa dan Sumatera sudah menganut agama Islam dan sudah banyak kerajaan yang bercorak Islam, hanya beberapa daerah pedalaman yang belum menganut Islam.¹⁵ Lebih mengherankan lagi ketika kerajaan Majapahit sedang mencapai puncak kejayaannya di jantung ibu kota Majapahit telah terdapat kelompok kaum Muslimin dan hal ini terbukti dengan ditemukannya kelompok makam orang Islam yang bertuliskan angka tahun dari abad ke- 14 dan 15 di sekitar Trowulan – Mojokerto.¹⁶ Kenyataan ini memperkuat dugaan bahwa di daerah pantai utara Jawa Timur khususnya sekitar Gresik adalah daerah pemukiman kaum Muslimin dan tempat kegiatan perdagangan dan sosial. Hal ini dapat dilihat dari bukti ditemukannya sebuah batu nisan berangka tahun 475 Hijriyah atau 1082 Masehi, yaitu makam Fatimah binti Maimun di Loran-Gresik.

Pertumbuhan masyarakat Muslim di pusat ibu kota kerajaan Majapahit dan di daerah-daerah pelabuhan terutama seperti Gresik, Tuban, Jaratan sangat erat hubungannya dengan tumbuhnya kekuasaan politik Samudera-Pase dan Malaka. Hubungan perdagangan yang sudah berlangsung lama dengan kerajaan dan pedagang Muslim, menyebabkan daerah-daerah pelabuhan itu menjadi pusat pertumbuhan masyarakat Muslim. Pada tahap pertama hubungan antara raja-raja Majapahit dengan daerah kekuasaannya di daerah pesisir berjalan seperti biasa, tetapi setelah para Adipati pesisir itu memeluk Islam dan mempunyai posisi perdagangan yang mantap dan kekuatan yang besar, barulah terasa ancaman itu datangnya dari para Adipati Pesisir. Pertikaian dikalangan keluarga Majapahit untuk memperebutkan kedudukan sebagai raja mempercepat proses penghancuran Majapahit. Proses kelemahan pusat pemerintahan Majapahit berkaitan dengan proses pertumbuhan Kerajaan Pantai yang bercorak Islam.¹⁷ Proses kehancuran Majapahit menjadi sempurna, setelah Demak muncul sebagai kekuatan politik sebagai kekuatan dan pusat Islam di pantai utara Jawa. Sejak abad ke- 15 Demak menjadi pusat kegiatan penyebaran Islam di tanah Jawa yang di pelopori oleh para Wali Songo.

¹⁴ C. Snouck Hurgronje, *De Islam in Nederlandsch Indie*, VG IV, hal. 362, dalam Hasan Muarif Ambary, "Catatan Tentang Masuk dan Berkembangnya Islam di Kalimantan Selatan", Prasaran Seminar Sejarah Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1976.

¹⁵ Armando Cortesao, *The Suma Oriental of Tome Pires*, Vo. I London, 1944, hal. 137 dan seterusnya, dalam Hasan Muarif Ambary, "Catatan Tentang Masuk dan Berkembangnya Islam di Kalimantan Selatan", Prasaran Seminar Sejarah Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1976.

¹⁶ L.Ch. Damais, *Studen Javanes, I, Les Tombes Musulman Datoes de Tralaya*, Befeo, XLVIII, 1957, hal. 353, dalam Hasan Muarif Ambary, "Catatan Tentang Masuk dan Berkembangnya Islam di Kalimantan Selatan", Prasaran Seminar Sejarah Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1976.

¹⁷ J.C. van Leur, *Indonesian Trade and Society*, The Hague, Bandung, 1955, hal. 133, dalam Hasan Muarif Ambary, "Catatan Tentang Masuk dan Berkembangnya Islam di Kalimantan Selatan", Prasaran Seminar Sejarah Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1976.

Babad Banten bahkan menyebutkan bahwa ketika ada penyerangan dari Majapahit, maka di Demaklah para wali berkumpul untuk musyawarah menentukan langkah-langkah yang perlu diambil.

Dari berita Tome Pires dan berita-berita Babad setempat diketahui bahwa Demak berdiri sebagai kerajaan dengan Pate Rodim Sr ucapan Portugis untuk Raden Patah, satu demi satu daerah pesisir utara Jawa mulai mengakui kekuasaan Demak. Lebih-lebih lagi ketika benteng kekuasaan Indonesia Hindu di Jawa Barat dapat diduduki dengan jatuhnya Jayakarta oleh Fadillah Khan, sebutan Portugis untuk Falatehan, maka praktis hegemoni sudah tidak dapat dibendung lagi.¹⁸

Kedatangan Islam ke daerah Indonesia bagian timur tidak pula dapat dipisahkan dengan terbentuknya jalur perdagangan internasional saat itu. Pada saat itu Malaka sudah merupakan pelabuhan transit dan beberapa pelabuhan di Indonesia menjadi sangat ramai dikunjungi armada asing. Sebagai pusat perdagangan tersebar di Asia Tenggara, juga merupakan pusat kegiatan penyiaran agama Islam di Asia Tenggara. Selama dua abad, abad ke- 14 dan 15 Malaka sebagai pusat kegiatan ekonomi dan agama dan juga sebagai pusat penyebaran bahasa Melayu ke seluruh Nusantara. Bukanlah hal yang mustahil pedagang-pedagang Malaka, yaitu pedagang bangsa Melayu yang sudah lama menetap di sekitar muara sungai Barito. Di sekitar muara Barito dikenal sekelompok suku Melayu yang oleh suku Dayak Ngaju disebut sebagai Oloh Masih. Pada masa abad ke- 14 dan 15 di daerah Kalimantan Selatan telah berdiri kerajaan Hindu Negara Dipa dan Negara Daha.

Berdasarkan Historiografi tradisional *Hikayat Lambung Mangkurat* pelabuhan Negara Dipa di Muara Bahan sangat ramai didatangi pedagang-pedagang asing. Mantri Perdagangan Negara Dipa Wiramartas dikenal mempunyai keahlian berbagai bahasa, diantaranya pandai berbahasa Cina, Melayu, Arab, sehingga mempermudah terjadinya hubungan perdagangan. Para pedagang terdiri bangsa-bangsa Nusantara seperti dari pantai utara pulau Jawa, Palembang, Johor, Malaka, sedangkan orang asing terdiri dari orang Campa, Cina, Arab, India. Hubungan dagang antara Malaka, Jawa, Kalimantan, dan Maluku telah diberitakan oleh pelaut Portugis Tome Pires dan Antonio Galvao.¹⁹

Berdasarkan catatan H.J de Graaf Islam masuk ke daerah Ternate pada masa pemerintahan raja Molomateya (1350-1357) ia telah bersahabat karib dengan orang-orang Arab karena mereka telah mengajarkan cara membuat kapal-kapal kepada orang Maluku. Raja Ternate Zaial Abidin sebelumnya telah memperoleh pendidikan agama Islam di pesantren Giri.²⁰

Tentang pendapat para orientalis bahwa agama Islam yang pertama kali masuk ke Nusantara beraliran Syiah, teori ini tidak dapat dibuktikan dalam sejarah. Kalau kita berkesimpulan bahwa masuknya Islam ke Nusantara sekitar abad ke- 7-8 Masehi, masa itu adalah masa Bani Umayyah. Kepemimpinan Islam dalam lapangan politik, ekonomi, kebudayaan serta aqidah Islam berada ditangan bangsa Arab. Pusat-pusat kekuatan Islam berada di sekitar Mekkah, Madinah, Damaskus dan Bagdad. Negeri Parsi maupun bangsanya belum menduduki kepemimpinan dunia Islam. Tugas-tugas da'wah ke luar negeri apalagi negeri yang jauh letaknya memerlukan perlindungan orang-orang Bani Umayyah yang menjadi musuh paling besar dari golongan Syiah, maka muballig-muballig Syiah tidaklah mudah melakukan misi yang besar seperti pelayaran ke negeri Nusantara ini. Disamping hubungannya yang tidak baik dengan Bani Umayyah yang sedang berkuasa, orang-orang Syiah juga tidak mesra hubungannya dengan golongan Ahlussunnah wal Jamaah. di kalangan Ahlus sunnah terdapat tidak sedikit keturunan Sayidina Ali tetapi bukan golongan Syiah. Kelompok inilah yang kemungkinan besar ikut melakukan da'wah ke negeri yang jauh ke India dan Nusantara. Pengaruh

¹⁸ Hasan Muarif Ambary, *op.cit.*, 1976, hal. 42.

¹⁹ Hasan Muarif Ambary, *loc.cit.*

²⁰ H.J. de Graaf, *Cambridge History of Islam*, 1970, hal. 135, dalam Hasan Muarif Ambary, "Catatan Tentang Masuk dan Berkembangnya Islam di Kalimantan Selatan", Prasaran Seminar Sejarah Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1976.

mereka sangat lama membekas dalam kalangan ummat Islam. Orang-orang Islam di Nusantara mencintai shahabat-shahabat Nabi Sayidina Abu Bakar, Umar, Usman dan sahabat nabi lainnya, suatu hal yang tidak dapat terjadi di kalangan golongan Syiah.

Umat Islam Indonesia sejak dulu termasuk ummat yang taat pada ajaran Al Qur'an dan As-Sunnah, dan hampir sebagian besar dari mereka, menjadi pengikut Mazhab Syafei, tetapi juga membenarkan mereka yang mengikuti mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Oleh karena itulah mereka disebut golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam bidang Aqidah atau Ushuluddin mengikuti ajaran Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dalam bidang ibadah-muamalah mengikuti salah satu ajaran dari empat Imam Hanafi, Maliki, Syafei dan Hambali. Kenyataan sejarah itu mengakui bahwa, sejak mulanya yang berkembang di Indonesia ialah Mazhab Syafei.²¹

Mengenai pendapat bahwa Islam yang datang pertama kali ke Nusantara dari Parsi, seorang Mahaguru Ilmu Fiqih dan Filsafat Timur pada Fakultas Ilmu Ketuhanan di Universitas Teheran, Prof. Mahmood Shehabi yang dikenal di kalangan Syiah sebagai pakar dan paling berwenang mewakili golongan Syiah mengatakan : *" Sejak Syah Isma'il mendirikan kerajaan dinasti Safawi pada permulaan abad ke-10 Hijriyah atau abad ke- 16 Masehi Syiah menjadi agama resmi Iran. Sekarang undang-undang dasar Iran tetap meneruskan tradisi tersebut dengan mengakui syiah sebagai agama resmi negara".*²²

Hal ini jelas dapat membantah tentang datangnya agama Islam yang pertama dari Parsi. Kekuatan Syiah baru muncul pada abad ke-10 Hijriyah atau abad ke- 16 Masehi suatu waktu yang cukup lama. Saat itu kerajaan Islam di Nusantara mencapai puncak kebesarannya seperti Demak, Aceh, Johor dan munculnya kerajaan Islam Banjar di Kalimantan Selatan.

Masalah yang menyangkut tersebarnya atau masuknya agama Islam ke Kalimantan Selatan banyak menarik perhatian para sejarawan dan pemerhati sejarah di daerah ini. Di Kalimantan Selatan telah dua kali diadakan Seminar yang membicarakan topik ini. Tahun 1973 diadakan Seminar yang disebut *Pra Seminar Sejarah Kalimantan dan Sejarah Kalimantan Selatan khususnya Sejarah Islam*. Para pakar sejarah dan pemerhati sejarah ikut mengambil bagian dalam seminar itu. Terdapat beberapa kesimpulan yang sangat berharga dari hasil seminar itu.

Kapan masuknya agama Islam ke Kalimantan Selatan, tidak ditemukan bukti yang pasti karena tidak ditemukan catatan sejarah tentang itu. Suatu kesimpulan yang berharga dan dapat diterima adalah bahwa masuknya agama Islam tidak bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Banjar. Masuknya agama Islam lebih dahulu terjadi sebelum Kerajaan Banjar terbentuk. Kalau Kerajaan Banjar terbentuk pada awal abad ke-16 maka masuknya agama Islam lebih awal dari itu.

Tersebarnya agama Islam menyelusuri arus lalu lintas perdagangan laut. Karena kota-kota perdagangan umumnya di pinggir atau ditepi sungai yang dapat dilayari, maka agama Islam pun berkembang pertama kali di daerah dimana terjadinya komunikasi antara bangsa dan komunikasi perdagangan. Pesatnya perkembangan agama Islam itu sangat dipengaruhi oleh penguasa setempat. Kalau di daerah itu telah terbentuk sebuah Kerajaan Islam, maka agama Islam pun ikut berkembang dengan pesat.

Berkembangnya agama Islam di Kalimantan Selatan karena kedudukan beberapa kota atau tempat pemukiman yang terletak di sepanjang sungai atau pantai. Kota atau tempat pemukiman itu mendapat kunjungan ramai dari para pedagang dari segala bangsa. Para muballigh yang juga adalah para pedagang menggunakan kesempatan komunikasi transaksi perdagangan sambil menyebarkan agama Islam. Penduduk setempat tertarik memasuki agama Islam, karena budi pekerti dan tutur kata yang menunjukkan moral yang tinggi, akhlak mulia, dan cara berpakaian yang selalu bersih. Proses perkawinan merupakan salah satu cara tersebarnya agama Islam di daerah ini.

²¹ Saifuddin Zuhri, *op.cit.*, hal. 190.

²² Saifuddin Zuhri, *ibid.*, hal. 191.

Dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan agama Islam terutama di Jawa dan di luar Jawa bahkan sampai ke Maluku tidak terpisahkan dengan pengaruh ulama besar Sunan Giri. Sunan Giri mempunyai sebuah padepokan di atas sebuah bukit tidak jauh dari Surabaya termasuk salah seorang Wali Songo yang berpengaruh. Ia semula bernama Raden Paku, putera dari Maulana Ishak. Maulana Ishak ayahnya berasal dari kerajaan Pase. Ibunya seorang putri Raja Balambangan yang masih beragama Hindu yang dikawini Maulana Ishak karena berhasil mengobati sang putri raja. Salah seorang gurunya adalah Raden Rahmat yang dikenal bergelar Sunan Ampel di Surabaya. Maulana Ishak ayahnya kemudian kembali ke Kerajaan Pase dan Raden Paku dipelihara oleh seorang wanita kaya di Gresik Nyi Gede Maloka. Raden Paku bersama Makhdum Ibrahim putera Sunan Ampel kemudian menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Keduanya singgah di Pase dan dia bertemu dengan ayahnya. Keduanya memperdalam pengajiannya di Pase sampai memperoleh "*Ilmu Laduni*". Raden Paku kemudian kembali ke Jawa dan mendirikan keraton dan masjid di bukit Giri dekat Gresik dan kemudian dia dikenal sebagai Sunan Giri. Giri adalah kota pesisir yang kuat dan ramai perdagangannya.

Menurut pendapat Prof. HAMKA cara da'wah Sunan Giri dengan Sunan Bonang berbeda. Kalau Sunan Bonang menda'wahkan Islam di kalangan atas di keraton Majapahit yang masih beragama Hindu, Sunan Giri menda'wahkan Islam di kalangan rakyat kecil. Da'wah Sunan Bonang mendorong kemudian berdirinya Kerajaan Islam Demak sebagai pusat Islam. Tetapi pengaruh Sunan Giri sangat besar terhadap perkembangan kerajaan Islam Demak. Sunan Girilah yang memberikan gelar Sultan kepada raja Demak.

Dalam hal ini sangat menarik perhatian hubungan antara Sunan Giri dengan daerah Kalimantan Selatan. Dalam Hikayat Lambung Mangkurat diceritakan tentang Raden Sekar Sungsang dari Negara Dipa yang lari ke Jawa. Ketika dia masih kecil kelakuannya menjengkelkan ibunya Putri Kaburangan, yang juga dikenal sebagai Putri Kalungsu. Waktu dia kecil karena sering mengganggu ibunya, dia dipukul di kepalanya dan mengeluarkan darah. Sejak itu dia lari dan ikut dengan juragan Petinggi atau Juragan Balaba yang berasal dari Surabaya. Juragan Balaba memeliharanya sebagai anaknya sendiri dan setelah dewasa dia dikawinkan dengan putri Juragan Balaba sendiri. Dia mempunyai dua orang putera Raden Panji Sekar dan Raden Panji Dekar. Keduanya berguru pada Sunan Giri Raden Sekar kemudian diambil menjadi menantu Sunan Giri dan kemudian bergelar Sunan Serabut.

Raden Sekar Sungsang kemudian kembali menjalankan perdagangan sampai ke Negara Dipa. Dengan penampilan yang tampan Raden Sekar Sungsang adalah seorang pedagang dari Jawa, yang banyak mengadakan hubungan perdagangan dengan pihak kerajaan Negara Dipa. Akhirnya dia kawin dengan Putri Kalungsu penguasa Negara Dipa, yang sebetulnya adalah ibunya sendiri. Setelah Putri Kalungsu hamil barulah terungkap bahwa suaminya adalah anaknya yang dulu hilang. Mereka bercerai, Raden Sekar Sungsang memindahkan pemerintahannya menjadi Negara Daha, yang berlokasi sekitar Negara sekarang, sedangkan Ibunya tetap di Negara Dipa sekitar Amuntai sekarang. Raden Sekar Sungsang yang menurunkan Raden Samudera yang menjadi Sultan Suriansyah raja pertama dari Kerajaan Banjar. Raden Sekar Sungsang Menjadi raja pertama dari Negara Daha dengan gelar Raja Seri Kaburangan. Selama dia berkuasa hubungan dengan Giri tetap terjalin dengan pembayaran upeti tiap tahun.²³

Yang menjadi masalah adalah, kalau Raden Sekar Sungsang selama di Jawa kawin dengan melahirkan putera Raden Panji Sekar selanjutnya menjadi menantu Sunan Giri, adalah hal mungkin sekali bahwa Raden Sekar Sungsang juga telah memeluk agama Islam. Raden Panji Sekar menjadi

²³ Ahmad Basuni, "Usaha Menggali Sejarah Masuknya Islam di Kalimantan Selatan", Prasaran Seminar Sejarah Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1976.

seorang ulama yang bergelar Sunan Serabut, adalah hal yang wajar kalau ayahnya sendiri Raden Sekar Sungsang telah memeluk agama Islam meskipun keimanannya belum kuat. Kalau anggapan ini benar maka Raden Sekar Sungsang raja dari Negara Daha dari Kerajaan Hindu yang telah beragama Islam pertama sebelum Sultan Suriansyah.

Kalau benar bahwa Raden Sekar Sungsang yang bergelar Sari Kaburangan telah beragama Islam, mengapa dia tidak menyebarkan Islam itu pada rakyatnya. Hal ini terdapat beberapa kemungkinan. Kemungkinannya antara lain bahwa agama Hindu masih terlalu kuat, sehingga lebih baik menyembunyikan ke Islamannya, atau memang keimanannya belum kuat. Tetapi yang dapat disimpulkan bahwa Islam telah menyusup di daerah Negara Daha Kalimantan Selatan, sekitar abad ke- 13-14 Masehi.

A.A. Cense dalam bukunya *"De Kroniek van Banjarmasin"*, menjelaskan bahwa ketika Pangeran Samudera berperang melawan pamannya Pangeran Tumenggung raja Negara Daha. Pangeran Samudera menghadapi bahaya yang berat yaitu kelaparan di kalangan pengikutnya. Atas usul Patih Masih Pangeran Samudera meminta bantuan pada Kerajaan Islam Demak yang saat itu kerajaan terkuat setelah Majapahit. Patih Balit diutus menghadap Sultan Demak dengan 400 pengiring dan 10 buah kapal. Patih Balit menghadap Sultan Trangguna dengan membawa sepucuk surat dari Pangeran Samudera. F.S.A. De Clereq dalam bukunya. *De Vroegste Geschiedenis van Banjarmasin* (1877) halaman 264 memuat isi surat Pangeran Samudera itu. Surat itu tertulis dalam bahasa Banjar dalam huruf Arab-Melayu. Isi surat itu adalah :

"Salam sembah putera andika Pangeran di Banjarmasin datang kepada Sultan Demak. Putera andika menantu nugraha minta tolong bantuan tandingan lawan sampean kerana putera andika berebut kerajaan lawan parnah mamarina yaitu namanya Pangeran Tumenggung. Tiada dua-dua putera andika yaitu masuk mengula pada andika maka persembahan putera andika intan 10 biji, pekat 1.000 galung, tudung 1.000 buah, damar 1.000 kandi, jeranang 10 pikul dan lilin 10 pikul".

Yang menarik dari surat ini adalah bahwa surat itu tertulis dalam huruf Arab. Kalau huruf Arab sudah dikenal oleh Pangeran Samudera, adalah jelas menunjukkan bukti bahwa masyarakat Islam sudah lama terbentuk di Banjarmasin. Terbentuknya masyarakat Islam dan lahirnya kepandaian membaca dan menulis huruf Arab memerlukan waktu yang cukup lama.²⁴

Kalau Kerajaan Islam Banjar terbentuknya pada permulaan abad ke- 16, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa masyarakat Islam di Banjarmasin sudah terbentuk pada abad ke- 15. Karena itulah masuknya agama Islam ke Kalimantan Selatan setidaknya-tidaknya terjadi pada permulaan abad ke- 15.

Timbul pertanyaan siapakah yang melakukan tablig dan atas inisiatif siapa tablig itu diselenggarakan.

Tablig, artinya menyampaikan perintah-perintah agama Islam atau tuntutan kepada orang Di luar Islam. Tablig yang disebut juga da'wah, mula-mula adalah atas inisiatif Nabi besar Muhammad saw, atas ketentuan Illahi. Inilah kewajiban setiap rasul Allah, menyampaikan perintah-perintah Allah swt kepada orang banyak dengan ajakan dan nasihat yang bijaksana. Tanpa kekerasan dan tanpa paksaan. Cara paksaan kecuali tidak akan menanamkan keyakinan dan kejujuran, juga dilarang Allah.

*"Dan jika Allah Tuhanmu menghendaki, niscaya berimanlah umat manusia di bumi seluruhnya. apakah engkau akan memaksa manusia hingga mereka beriman semuanya."*²⁵

Orang-orang yang telah menerima Islam sebagai agamanya kalangan atas menengah dan rakyat bawah, mereka mempunyai kesadaran sendiri melakukan tugas tablig atau da'wah. Kegiatan tablig atau da'wah atas tanggung jawab mereka sendiri. Setiap pemeluk Islam menampilkan dirinya secara sukarela menjadi muballigh. Islam sebagaimana diajarkan oleh Nabi Besar Muhammad saw dengan

²⁴ A. Basuni, *ibid*.

²⁵ Al Qur'an, Yunus : 90.

sabdanya : *Hendaklah orang-orang yang hadir (yang mendengarkan ajarannya) menyampaikan kepada yang tidak hadir.*²⁶

Setiap orang Islam, sampai sekian jauhnya adalah orang yang berpembawaan sebagai muballig, dan dengan sendirinya menda'wahkan keyakinannya kepada lingkungan tetangganya yang tidak beragama Islam, hingga pekerjaan penyiaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh para pemimpin agama secara tertentu, melainkan juga kebanyakan orang pengembara, pedagang, dan para pekerja pindahan yang sederhana. Dalam pada itu banyak orang yang bersemangat perjuangan dengan penuh keikhlasan menyediakan jiwa raganya melakukan tugas suci tersebut.²⁷

Demikian peranan tablig atau da'wah yang efektif menjadi salah satu sebab mengapa Islam pesat berkembang melebihi agama-agama lain. Jalur penyebaran agama Islam di Indonesia menyusuri jalur perdagangan. Kota-kota perdagangan merupakan tempat terjadinya interaksi budaya dan agama disamping fungsinya sebagai pusat kegiatan transaksi ekonomi. Karena itulah pemeluk agama Islam yang pertama adalah di tempat-tempat kota perdagangan di sepanjang pantai atau disepanjang sungai. Karena agama Islam berkembangnya di sepanjang pantai atau disepanjang jalur perdagangan, maka pembawa agama Islam yang pertama kali adalah golongan pedagang itu sendiri, pedagang yang telah memeluk agama Islam ataupun pedagang yang juga seorang ulama. Kelompok pertama yang memeluk agama Islam adalah kelompok yang sering melakukan interaksi perdagangan yaitu kelompok pedagang pula. Tetapi perlu diingat bahwa sebagian besar dari pelaku perdagangan di kerajaan di Indonesia dipegang oleh kaum bangsawan atau pemilik modalnya adalah kaum bangsawan. Karena itu adalah sangat mungkin sekali bahwa pemeluk agama Islam yang pertama adalah kelompok pedagang yang juga kaum bangsawan.

Daerah Banjarmasin yang letaknya di muara sungai Barito memungkinkan kapal besar dari pantai dapat masuk dan berlabuh di sana. Jika kita melihat peta Kalimantan letak Banjarmasin dan Muara Bahan (Marabahan) hanya sekitar 50 km, namun jarak sejauh itu harus ditempuh dalam waktu yang cukup lama dengan perahu karena sungainya yang berliku-liku sehingga ketika Pangeran Samudera memindahkan bandar dari Muara Bahan ke Banjarmasin telah mendapat sambutan dari saudagar-saudagar. Perdagangan sangat ramai setelah bandar pindah ke Banjarmasin. Disini dapat pula kita lihat perbedaan perekonomian antara Negara Daha dan Banjarmasin. Negara Daha menitik beratkan pada ekonomi pertanian sedangkan Banjarmasin menitik beratkan pada perekonomian perdagangan.²⁸

Kalau kita memperhatikan peta politik perkembangan Islam di Indonesia maka sejak abad ke-7-8 Masehi sudah ada hubungan antara penduduk kerajaan di Indonesia terutama mereka yang tinggal di pelabuhan dengan pedagang muslim. Lima abad ke-mudian yaitu abad ke-13 di Indonesia berdiri satu institusi kerajaan bercorak Islam yaitu kerajaan *Samudera Pase*. Perkembangan agama Islam sebagai institusi kerajaan agak berjalan lambat. Tetapi menjelang abad ke-15 - 16 maka hampir serentak di berbagai daerah di Indonesia telah berdiri kerajaan bercorak Islam.

Salah satu episode penting dalam proses Islamisasi di Kalimantan ini telah terungkap dalam satu fragmen dalam Hikayat Banjar yang telah menyebutkan hubungan Banjar dengan Demak. Disebutkan dalam Hikayat tersebut bahwa Raja Banjar Raden Samudera telah ditasbihkan sebagai Sultan oleh Penghulu Demak dan oleh seorang Arab diberi gelar Sultan Suryanullah.²⁹

Kalau kita melihat kembali sejarah berdirinya Kerajaan Demak, maka Demak telah berdiri sebagai kerajaan bercorak Islam di penghujung abad ke-15 dengan cakal bakalnnya Raden Fatah. Salah satu naskah yang baru-baru ini ditemukan kembali di daerah Indramayu (Cirebon) yang tadinya

²⁶ Saifuddin Zuhri, *op.cit.*, hal. 44.

²⁷ L. Stoddard, *Dunia Baru Islam*, Panitia Penerbitan Menteri Koordinator Kesejahteraan, Jakarta, 1966, hal. 58.

²⁸ J.J. Ras, *op.cit.*, hal. 52.

²⁹ Sartono Kartodirdjo *et al*, *Sejarah Nasional Indonesia III*, Balai Pustaka, Jakarta, 1975, hal. 271.

merupakan naskah berasal dari keraton Kasepuhan-Cirebon dari tahun 1729 telah menyebutkan satu bagian penting tentang asal usul keluarga Raden Fatah. Naskah itu bernama *Purwaka Caruban Negara*.³⁰ Naskah itu menyebutkan bahwa Raden Fatah yang bergelar Senapati Jimbun adalah putera raja Majapahit Raja Kertabumi. Sebelumnya tidak ada satu naskahpun yang menyebutkan tentang siapa sebenarnya Raden Fatah. Dalam Sejarah Demak yang sejak mula berdirinya hingga mencapai zaman keemasannya ada tiga raja yang memerintah ialah Raden Fatah, Pangeran Sabrang Lor dan Pangeran Trenggana.

Tentang siapa penghulu Demak yang ikut melaksanakan peng-Islaman pelantikan Raden Samudera menjadi Sultan Banjar dalam Hikayat Banjar disebutkan bahwa peranan peng-Islaman itu dilakukan oleh Khatib Dayan. Tetapi dalam jabatan kepenghuluan Demak tidak terdapat yang namanya Khatib Dayan itu. Mereka itu adalah :

1. Sunan Bonang atau Pangeran Bonang, 1490 – 1506.
2. Makdum Sampang, 1506 – 1515.
3. Kiai Pambayun, 1515 – 1521.
4. Penghulu Rahmatullah, 1521 – 1524.
5. Sunan Kudus, 1524³¹

Kalau kita memperhatikan nama-nama Penghulu atau Imam masjid Demak tidak ada nama Khatib Dayan. Tetapi dapat juga terjadi Penghulu Demak mengutus seorang ulama yang terpandang untuk mengikuti rombongan pasukan Demak dan bertugas meng-Islamkan Pangeran Samudera beserta Mantri-Mantrinya. Kalau Pangeran Samudera dilantik sebagai Sultan dan bersamaan dengan itu terjadi peng-Islaman Raja, maka penghulu Demak yang berwenang saat itu adalah Penghulu Rahmatullah. Penghulu Rahmatullah mengutus seorang ulama yang dalam Hikayat Banjar disebut Penghulu Khatib Dayan. Dalam proses peng-Islaman selanjutnya Khatib Dayan memegang peranan besar di daerah wilayah kerajaan Banjar sampai dia meninggal. Kubur Khatib Dayan sekarang terletak dalam kompleks makam Sultan Suriansyah di Kuwin Utara.

Hubungan antara daerah Banjar dengan kerajaan Demak sudah terjalin dalam waktu yang lama. Hubungan itu terutama adalah hubungan ekonomi perdagangan dan akhirnya meningkat menjadi hubungan bantuan militer ketika Pangeran Samudera berhadapan dengan Raja Daha Pangeran Tumenggung. Dalam Hikayat Banjar disebutkan bahwa Pangeran Samudera mengirim Duta ke Demak untuk mengadakan hubungan kerja sama militer. Utusan tingkat tinggi sebagai Duta Pangeran Samudera ditunjuk Patih Balit, seorang pembesar Kerajaan Banjar. Utusan datang menghadap Sultan Demak dengan seperangkat hadiah sebagai tanda persahabatan berupa sepikul rotan, sertibu buah tudung saji, sepuluh pikul lilin, seribu bongkah damar, sepuluh biji intan. Pengiring duta kerajaan ini tidak kurang dari 400 orang. Demak menyambut baik utusan ini dan sebagai pemegang syiar agama Islam tentu saja memohon pula kepada utusan Raja Pangeran Samudera, Raja Banjar dan semua pembesar mau memeluk agama Islam.³²

Berdasarkan hasil penelitian Panitia Hari Jadi kota Banjarmasin, Pangeran Samudera Raja Banjar di Islamkan oleh wakil Penghulu Demak Khatib Dayan pada tanggal 24 September 1526, hari Rabu jam sepuluh pagi bertepatan dengan Zulhijjah 932 Hijriyah, tanggal 8. Khatib Dayan bukanlah Penghulu Demak tetapi utusan dari Penghulu Demak Rahmatullah dengan tugas melakukan proses peng-Islaman Raja beserta pembesar kerajaan dan rakyat kerajaan. Khatib Dayan bertugas di Kerajaan Banjar sampai dia meninggal dan dikuburkan di Kuwin Utara, Banjarmasin. Ada yang berpendapat Khatib Dayan itu adalah seorang Arab golongan Ahlul Baid bernama Sayyid Abdurrahman. Orang Jawa lazim menyebutkan Sayyid Ngabdul Rahman. Mungkin pula Khatib Dayan itu orang Jawa keturunan

³⁰ Sartono Kartodirdjo *et al*, *ibid.*, catatan no. 13.

³¹ Hasan Muarif Ambary, *op.cit.*

Arab karena sepanjang pantai utara Jawa, Tuban Gresik, Demak, merupakan tempat pemukiman orang Arab.

3. Terbentuknya Kerajaan Banjar dan Lahirnya Kota Banjarmasin

a. Lahirnya Kerajaan Banjar dan Bandar Patih Masih

2840 Maka tersebut Patih Masih orang besarnya di Banjar itu. Maka bernama Banjarmasin karena nama orang besarnya di Banjar itu nama patih masih itu.

2910 Maka ditarik sekalian kaluwarganya sakalian sahabat yang berhimpun sama minum itu oleh Patih Masih itu, kira-kira orang limaratus itu, sama mufakat handak menjadikan raja itu :

“Dari pada kita masih menjadi desa, senantiasa kena sarah dengan pupuan maantarkan kahulu, hangir kita berbuat raja, kalau ia ini yang saparti kabar orang itu cucu Maharaja Sukarama yang diwasiatkannya Menjadi raja”.

2915 Maka Patih Masih berkata, serta Patih ampat orang itu sama berkata : *“andika Kalua jadikan raja”.*

2930 Kata Patih lainnya itu : *“Sukarela kaula mati mangarjakan kerajaan andika itu”.*

2935 Segala orang itu sama menyambah mewastukan Raden Samudera itu Menjadi raja. Maka disebut orang Pangeran Samudera.

2940 Kata Patih Masih : *“Ini bicara kaula kita kajut mudik ka Marah Bahan, kita rabut bandar itu, maka segala orang dagang itu bawa hilir dan orang yang diam di Muara Bahan itu bawa hilir. sudah itu kita berbuat Bandar pula disini.”³²*

Raden Samudera adalah cikal bakal raja-raja Banjarmasin. Dia adalah cucu Maharaja Sukarama dari Negara Daha. Raden Samudera terpaksa melarikan diri demi keselamatan dirinya dari ancaman pembunuhan pamannya Pangeran Tumenggung raja terakhir dari Negara Daha.

Awal dari kebencian Pangeran Tumenggung pada kemenakannya sendiri itu ialah ketika Maharaja Sukarama masih hidup mewasiatkan bahwa yang kelak akan menjadi raja kalau dia mangkat adalah cucunya Raden Samudera. Umurnya waktu itu baru tujuh tahun, pada saat Maharaja Sukarama mangkat. Oleh Mangkubumi Aria Taranggana dinasihatkan agar Raden Samudera melarikan diri ke daerah menghilir sungai melalui Muara Bahan ke Serapat, Balandian, Banjarmasin atau Kuwin. Aria Tranggana membekali Raden Samudera dengan sebuah perahu, sebuah jala bekal makanan dan pakaian.

“... Aria Taranggana itu maka dicarinya Raden Samudera itu dapatnya maka dilumpunya arah perahu tangkasyu maka diberi jala kecil sebuah, parang sabuting, pisau sabuting, pengayuh sabuting, bakal sabuah, sanduk sabuting, pinggan sabuting, mangkuk sabuah, baju salambar, salawar salambar, kalambu sabuting, tapih salambar, tikar salambar, kata Aria Taranggana Raden Samudera tuan hamba larikan dari sini karena tuan hendak dibunuh oleh Pangeran Tumenggung, tahu-tahu menyamar diri, lamun tuan pigi beroleh menjala ...”³³

Ketika Raden Samudera menyembunyikan diri ke daerah sunyi di daerah Muara Barito, dari Muara Bahan sebagai bandar utama Negara Daha, telah terdapat sejumlah kampung di daerah-daerah muara seperti Balandean, Sarapat, Muhur, Tamban, Kuwin, Balitung dan Banjar. Kampung Banjarmasin atau kampung Melayu merupakan kampung yang khusus karena dibentuk oleh lima buah sungai yakni sungai Pandai, sungai Sigaling, sungai Karamat, Jagabaya dan sungai Pangeran (Pageran) yang kesemuanya anak sungai Kuwin.

Kekhususan kedua dari Banjarmasin ini merupakan kampung dari orang Melayu yang pertama dari kampung atau di tengah-tengah kampung Oloh Ngaju di daerah Barito Hilir. Marabahan atau

³² J.J. Ras, *op.cit.*, hal. 426-440.

³³ J.J. Ras, *op.cit.*, hal. 398-404.

Muara Bahan yang merupakan kampung pemukiman Oloh Ngaju, didirikan oleh Datuk Bahendang Balau, ketua suku Oloh Ngaju yang turun dari Barito.

Seperti yang disebut oleh J.J. Ras yang telah mentranskrip Hikayat Banjar, mengapa kampung orang Melayu disebut Banjarmasin.

"Maka bernama Banjarmasin karena nama orang basarnya itu nama Patih Masih itu".

Patih Masih adalah Kepala dari orang-orang Melayu atau Oloh Masih dalam Bahasa Ngaju.

Sebagai seorang Patih atau kepala suku, tidaklah berlebihan kalau dia sangat memahami situasi politik Negara Daha, apalagi juga dia mengetahui tentang kewajiban sebagai daerah takluk dari Negara Daha, dengan berbagai upeti dan pajak yang harus diserahkan ke Negara Daha.

Patih Masih mengadakan pertemuan dengan Patih Balit, Patih Muhur, Patih Balitung, Patih Kuwin untuk mencari jalan agar jangan terus-menerus desa mereka menjadi desa. Mereka sepakat mencari Raden Samudera cucu Maharaja Sukarama yang menurut sumber berita sedang bersembunyi di daerah Balandean, Sarapat, karena Pangeran Tumenggung yang sekarang menjadi raja di Negara Daha pamannya sendiri ingin membunuh Raden Samudera.

Tindakan yang dilakukan ialah memindahkan bandar atau pelabuhan perdagangan, karena ini sangat penting dari segi ekonomis negara. Patih Masih berkata :

"Kita kajut ke Muara Bahan, kita rabut bandar itu. Sudah itu kita berbuat bandar pula disini".

Pangeran Samudera dirajakan di kerajaan baru Banjar setelah berhasil merebut bandar Muara Bahan, bandar dari Negara Daha dan memindahkan bandar tersebut ke Banjar dengan para pedagang dan penduduknya.

Bagi Pangeran Tumenggung sebagai raja Negara Daha, hal ini berarti suatu pemberontakan yang tidak dapat dimaafkan dan harus dihancurkan, perang tidak dapat dihindarkan lagi. Tentara dan armada sungai dari Pangeran Tumenggung bergerak ke hilir ke sungai Barito dan di hujung Pulau Alalak terjadilah pertempuran sungai besar-besaran yang pertama antara kedua belah pihak dengan kekalahan pihak Pangeran Tumenggung. Sejak itu terjadilah penarikan garis demarkasi dan blokade ekonomis oleh pantai terhadap pedalaman, mulai dari Muara Bahan.

Pengalaman dalam pertempuran pertama ini masing-masing pihak mengatur siasat untuk dapat mengalahkan lawannya. Pangeran Tumenggung mempersiapkan pasukan lebih besar lagi, begitu pula Raden Samudera atau Pangeran Samudera berusaha mencari bantuan dari pelosok wilayah Sambas, Lawai, Sukadana, Kotawaringin, Pambuangan, Sampit, Mendawai Sanggauh, Karasikan, Berau, Kutai, Asam-asam, Kintap, Sawarangan, Takisung dan Tabaniau dan berhasil terkumpul pasukan sebesar 40.000 orang. Bantuan terbesar dan mengandung arti yang lebih penting adalah bantuan dari kerajaan Demak, kerajaan Islam terbesar di pantai utara Jawa.

Bantuan kerajaan Islam Demak mempunyai pengaruh besar bagi Kalimantan Selatan, sebab bantuan Demak hanya diberikan kalau raja dan seluruh penduduk memeluk agama Islam. Sultan Demak mengirim bantuan seribu orang pasukan dan diiringi oleh seorang Penghulu Islam yang akan meng-Islamkan raja dan penduduk.

Dengan kekuatan yang besar tentara berangkat menyongsong air mengalir, sedang gamelan dipalu dengan gembira. Pangeran Samudera turut pula berangkat dengan berkedudukan di dalam sebuah gurap yang diperhiasi dengan tanda-tanda kebesaran diiringi oleh Patih Masih, Patih Balit, Patih Muhur, Patih Balitung dan Patih Kuwin masing-masing dengan lencana kebesaran.

Pertempuran terjadi di dekat Rantau Sangyang Gantung. Pasukan Pangeran Samudera dapat menembus pertahanan musuh dan menimbulkan korban yang sangat besar. Pangeran Tumenggung kalah, mundur dan bertahan di muara sungai Amandit dan Alai. Kemenangan demi kemenangan berada di pihak Pangeran Samudera dan bendera Tatunggul Wulung Wanara Patih, bendera Pangeran

Samudera selalu berkibar. Akhirnya Mangkubumi Negara Daha Aria Taranggana menyarankan kepada rajanya daripada rakyat kedua belah pihak banyak yang mati, lebih baik kemenangan dipercepat dengan mengadakan perang tanding antara kedua raja yang bermusuhan, hal mana kemudian disetujui oleh kedua belah pihak.

"... Lamun masih baadu rakyat satu tahun tiada bartantu yang manjadi raja itu. rakyat juga yang binasa karena orang Negeri Daha ini bassuluk barkaluarga itu sampian jua manjadi raja lamun tiada barbanyak tiada berguna sakalian kula, siapa hidup manjadi raja, sudah itu kula lawan Patih Masih".³⁵

Dengan berperahu ketangkasan, masing-masing dikemudikan Mangkubumi kedua belah pihak, masing-masing berpakaian perang, berpedang, memakai perisai, sumpitambilahan, keris dan talabang, dengan disaksikan rakyat kedua belah pihak, raja-raja berjumpa di atas sungai Parit Basar.

Pangeran Samudera tidak mau melawan, karena melawan Pangeran Tumenggung berarti melawan ayah bundanya sendiri dan mempersilahkan Pangeran Tumenggung membunuhnya tetapi ternyata Pangeran Tumenggung lemah hatinya timbul kasih sayangnya pada kemenakannya sendiri, dan keduanya berpelukan. Pangeran Tumenggung rela menyerahkan kekuasaan dan segala tanda kebesaran kepada kemenakannya sendiri, dan keduanya berpelukan. Terjadilah penyerahan regalita kerajaan terhadap Pangeran Samudera. Pangeran Tumenggung diperintahkan berkuasa di Batang Alai dengan 1.000 orang penduduk. Negara Daha ditinggalkan, menjadi kosong karena semua penduduknya diangkut ke Banjarmasin. Negara Daha lenyap dari sejarah dan tinggal bekas-bekasnya di daerah Pematang Patung di Parit Basar Garis, km 21 sekarang.³⁶

"... Kata Pangeran Samudera merakak andika Tumenggung tombak kula atau pedang kula, karena dahulu sampian kasini, sampian masih handak membunuh kula, sakian ulun tuluskan karsa andika, tapi kula tiada handak durhaka pada andika, karna kula tiada lupa akan andika itu akan ganti ibu bapa kula, sekarang mau andika bunuh kalaf, maka Pangeran Tumenggung mendengar demikian itu maras hatinya serta ia menangis pedang dan perisai dilepaskannya, maka ia lumpat pada perahu Pangeran Samudera itu serta mamaluk mencium Pangeran Samudera".³⁷

Dengan kemenangan Pangeran Samudera atas Pangeran Tumenggung dan diangkutnya rakyat Daha ke Banjarmasin, maka muncullah kota baru di Banjar. Pangeran Samudera yang sebelumnya telah memeluk agama Islam sebagai suatu persyaratan atas bantuan kerajaan Islam Demak, telah mengganti namanya menjadi Sultan Suriansyah, yang makamnya terletak di Kuwin Banjarmasin. Setelah meninggal terkenal namanya sebagai Penambahan Batu Habang.

Timbul pertanyaan kapan Banjarmasin didirikan ?

Beberapa sarjana mencoba menjawab pertanyaan ini. Dr. Eisenberger menyebutkan tahun berdirinya Banjarmasin tahun 1595. *Encyclopaedie van Nederlands-Indie* menyebutnya tahun 1520. Colenbrander dalam bukunya *"Koloniale Geschiedenis"* juga menyebutkan tahun 1520. Sedangkan J.J. Ras menegaskan bahwa Banjarmasin sebagai keraton ke-3 yang didirikan dengan bantuan Demak, terjadi sebelum abad ke- 16.³⁸

Pendapat Dr. Eisenberger bahwa Banjarmasin didirikan dalam tahun 1520, tidak dapat diterima, karena historis tidak mendukung, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Apabila kerajaan Islam Demak dianggap sebagai kerajaan yang membantu berdirinya kerajaan Banjarmasin, maka tak mungkin tahun berdirinya Banjarmasin tahun 1588, tauhn itu kerajaan Demak sudah tak ada lagi.

³⁵ J.J. Ras, *op.cit.*, hal. 430.

³⁶ M. Idwar Saleh, *Banjarmasih*, Museum Negeri Lambung Mangkurat, Banjarbaru, 1981/1982, hal. 24.

³⁷ Depdikbud, *op.cit.*, hal. 96.

³⁸ M. Idwar Saleh, *loc.cit.*

- b. Menurut sumber Belanda, bahwa Belanda menyerang Banjarmasin dalam tahun 1612 dan membakar Banjarmasin, mengakibatkan pusat kerajaan dipindah ke Kuliling Benteng, kemudian ke Batang Mangapan dan ke Batang Banyu hulu sungai Martapura. Peristiwa penyerangan ini menurut Hikayat Banjar terjadi pada saat pemerintahan Sultan Musta'in Billah, sultan ke-4 dari kerajaan Banjarmasin.
- c. Kalau pendapat Dr. Eisenberger itu benar maka antara tahun 1588 sampai tahun 1612, yaitu selama 24 tahun ada empat orang raja yang memerintah Banjarmasin, yaitu : Sultan Suriansyah, Sultan Rahmatullah, Sultan Hidayatullah dan Sultan Musta'in Billah. Jangka hanya 24 tahun tidak mungkin hidup antara datu dengan buyut, dimana buyut sudah dewasa dan sudah menjadi Sultan.³⁹

Ketika tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis, maka muncullah kerajaan Islam Aceh, Demak dan Ternate sebagai lawan baru Portugis. Kerajaan Islam Demak memahami bahaya datangnya Portugis ini, karena itu pada tahun 1524 dikirim pasukan ke Jawa Barat dibawah pimpinan Falatehan dan berhasil menaklukkan Banten Girang dan selat Sunda dikuasai. Pada tahun 1527 Falatehan merebut Sunda Kelapa serta memukul mundur Portugis, dan timbullah kenyataan bahwa Portugis tidak berani berlayar melalui jalur Laut Jawa. Tahun 1527 didirikan kota Jakarta oleh Falatehan. Baru ketika Sultan Trenggana tewas pada tahun 1546 ketika mengepung Pasuruan, Portugis kembali menggunakan jalan lama ke Maluku dan berkedudukan di Gresik.⁴⁰

Apabila tahun 1521 Demak menyerang Majapahit, 1524 menyerang dan menaklukkan Banten Girang, 1527 menyerang dan menaklukkan Sunda Kelapa, maka pengiriman armada bantuan pasukan ke Banjarmasin, harus terjadi pada tahun 1526.⁴¹

Berdirinya Banjarmasin pada tahun 1526 hal itu berarti pula :

- a. Hari kemenangan Sultan Suriansyah, cikal bakal raja-raja kerajaan Banjar.
- b. Hari diserahkannya regalita kerajaan Daha, dan dirajakannya Pangeran Samudera atau Sultan Suriansyah oleh Pangeran Tumenggung.
- c. Hari ketentuan Banjarmasin menjadi ibu kota seluruh kerajaan Banjar, sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat penyiaran agama Islam dan mata rantai baru dalam menghadapi penetrasi Portugis di Laut Jawa.

Seluruh penduduk Negara Daha diangkut ke Banjarmasin, kecuali 1.000 orang yang tinggal menjadi rakyat Pangeran Tumenggung dan berdiam di daerah Alai. Negara Daha kosong dan hilang ditelan masa, dilupakan orang tempat pusatnya yang sebenarnya dan sungaipun mati tertutup lumpur.

Perubahan kebudayaan yang hebat lebih terasa dengan masuknya agama Islam. Kerajaan Banjar sebagai kerajaan yang rakyatnya beragama Islam, berhasil menghancurkan kerajaan Hindu dari Negara Daha. Agama Hindu runtuh dan agama Islam menggantikannya. Candi Agung dan Candi Laras dihancurkan, kebudayaan Hindu lenyap sebagai tak pernah ada kebudayaan itu di Kalimantan Selatan sebelumnya.

Banjarmasin didirikan di daerah suku Ngaju, sebagian pegawai kerajaan adalah orang Ngaju. Amalgamasi kebudayaan Banjar sesudah itu menjadi lebih luas dengan perpaduan inti kebudayaan Ngaju, Melayu, Jawa, Maanyan, Bukit Akulturasi ini berjalan dengan damai dan melahirkan kelompok Banjar yang bercirikan agama Islam bahasa Banjar sebagai pengganti bahasa ibu dengan adat istiadat walaupun masih bersifat tradisional menganggap diri superior dari kebudayaan Kaharingan yang ada.

Banjarmasih atau kampung suku Melayu (banjar = kampung; masih = orang Melayu) sebenarnya terletak diantara sungai-sungai :

- Sungai Barito dengan anak sungai Sigaling, sungai Pandai dan sungai Kuyin, dengan,
- Sungai Kuyin dengan anak-anak sungai Karamat, Jagabaya dan sungai Pangeran (Pageran).

³⁹ M. Idwar Saleh, *ibid.*, hal. 80-81.

⁴⁰ BHM. Vlekke, *Nusantara, A History of Indonesia*, Les Editins A Manteau SA. Bruxelles, 1961, hal. 88.

Sungai-sungai Sigaling, Karamat, Pangeran (Pageran), Jagabaya dan sungai Pandai ini pada hulunya di darat pada bertemu, membuat danau kecil bersimpang lima, daerah inilah yang nanti menjadi ibu kota kerajaan Banjar.⁴² Sebagai tempat pemerintahan yang pertama ialah rumah Patih Masih di daerah perkampungan suku Melayu yang terletak di antara Sungai Keramat dan Jagabaya dengan Sungai Kuyin sebagai induk Daerah ini yang pada mulanya berupa sebuah banjar atau kampung, berubah setelah dijadikan sebuah bandar perdagangan dengan cara mengangkut penduduk Daha dan seluruh rakyat Daha pada tahun 1526. Menurut Hikayat Banjar, rumah Patih Masih kemudian dijadikan keraton. Rumah tersebut diperluas dengan dibuat Pagungan, Sitiluhur dan Paseban.

J.J. Ras berpendapat bahwa Banjarmasin itu berarti "*Banjar on the coast*",⁴³ tetapi M. Idwar Saleh berbeda pendapat, bahwa Banjarmasin itu jelas berarti "*Kampung Oloh Masih*" atau kampung Orang Melayu.⁴⁴

Gambaran tentang kota Banjarmasin sebagai ibu kota Kerajaan Banjar menurut hasil penelitian M. Idwar Saleh adalah sebagai berikut :

Kompleks keraton terletak antara sungai Keramat dengan sungai Jagabaya, daerah itu sampai sekarang masih bernama kampung Keraton. Istana Sultan Suriansyah berupa rumah bubungan tinggi, tetapi kemungkinan besar masih berbentuk betang dengan bahan utama dari pohon ilayung. antar istana dengan sungai terletak jalan, dan dipinggir sungai terdapat tumpukan bangunan di atas air yang dijadikan sebagai kamar mandi dan jamban. Di sebelah sungai Keramat dibuat Paseban, Pagungan dan Sitiluhur. Mendekati sungai Barito dengan Muara Cerucuk terdapat rumah Syahbandar Goja Babouw seorang Gujarat yang bergelar Ratna Diraja. Di seberang sungai Jagabaya dibuat masjid yang pertama, yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Sultan Suriansyah. Pada tempat dekat pertemuan sungai Karamat dengan Sungai Sigaling, terdapat pasar di atas air tebing, di samping pasar yang umum saat itu di atas air. Pasar di atas air merupakan ciri-khas dari perdagangan Orang Banjar saat itu, sebagaimana juga rumah di atas air. Menyeberang sungai Singgaling, searah dengan keraton, terdapat lapangan luas yang berpagar ilayung, merupakan alun-alun besar tempat mengadakan latihan berkuda dan perang-perangan tiap tahun Senin atau Senenan. Di Sungai Pandai dekat muara terdapat benteng kayu dengan lubang-lubang perangkap. Di seluruh Sungai Kuyin, sungai Pangeran, rakyat sebagian besar tinggal di lanting-lanting, dan sebagian lagi tinggal di betang didarat. Daerah sekitar lima sungai ini digarap menjadi kebun dan sawah. Jumlah penduduk mencapai 15.000 orang setelah orang-orang Daha diangkut ke ibu kota kerajaan.⁴⁵

Menurut berita dinasti Ming tahun 1618 menyebutkan bahwa terdapat rumah-rumah di atas air yang dikenal sebagai rumah lanting atau rumah rakit hampir sama dengan apa yang dikatakan Valentijn. Di Banjarmasin banyak sekali rumah dan sebagian besar mempunyai dinding terbuat dari bambu atau pelupuh dan sebagian dari kayu. Rumah-rumah itu besar sekali, dapat memuat 100 orang, yang terbagi atas kamar-kamar Rumah besar ini dihuni oleh satu keluarga dan berdiri di atas tiang yang tinggi.⁴⁶

Kedua macam berita ini menjelaskan kepada kita bahwa, apa yang diberitakan masa dinasti Ming adalah rumah-rumah penduduk di atas rakit yang banyak terdapat di sepanjang sungai. Sedangkan apa yang diberikan oleh Valentijn adalah rumah-rumah betang dari suku Dayak Ngaju.

⁴¹ M. Idwar Saleh, *op.cit.*, hal. 25-26.

⁴² M. Idwar Saleh, *ibid.*, hal. 40.

⁴³ J.J. Ras, *op.cit.*, hal. 533.

⁴⁴ M. Idwar Saleh, *op.cit.*, hal. 2.

⁴⁵ J.J. Ras, *op.cit.*, hal. 438.

⁴⁶ M. Idwar Saleh, *op.cit.*, hal. 42.

Menurut Willy kota Tatas terdiri dari 300 buah rumah. Bentuk rumah hampir bersamaan dan antara rumah satu dengan lainnya dihubungkan dengan titian. Alat angkutan utama adalah jukung atau perahu. Selain rumah-rumah panjang di pinggir sungai terdapat lagi rumah-rumah lanting sepanjang sungai. Rumah lanting itu diikat dengan tali rotan pada sebuah pohon besar di tepi sungai.⁴⁷

Hal-hal ini semua menggambarkan tentang kebudayaan sungai dan rawa di sekitar kota Banjarmasin. Gambaran kebudayaan sungai dan rawa ini dimulai sejak abad ke- 16 dan masih terlihat sampai abad ke- 20.

b. Raja-Raja Kerajaan Banjar

Sejak berdirinya kerajaan Banjar pada 24 September 1526 sampai berakhirnya perang Banjar yang merupakan saat lenyap kerajaan Banjar tahun 1905, terdapat 19 orang raja yang pernah berkuasa. Sultan pertama adalah Sultan Suriansyah (1526-1545), raja pertama yang memeluk agama Islam, dan raja terakhir adalah Sultan Mohammad Seman yang meninggal dalam pertempuran melawan Belanda di Menawing – Puruk Cahu dalam tahun 1905. Kerajaan Banjar runtuh sebagai akibat kalah perang dalam Perang Banjar (1859-1905), yang merupakan perang menghadapi kolonialisme Belanda. Sultan Suriansyah sebagai raja pertama berkeraton di Kuwin Utara sekarang yang dijadikannya sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan, sedangkan raja terakhir Sultan Mohammad Seman berkeraton di Menawing-Puruk Cahu sebagai pusat pemerintahan pelarian dalam rangka menyusun kekuatan untuk melawan kolonialisme Belanda.

Raja-raja Banjar sejak berdirinya kerajaan Banjar sampai lenyapnya secara terperinci adalah sebagai berikut :

1. 1526 – 1545 Pangeran Samudera yang kemudian bergelar Sultan Suriansyah, raja pertama yang memeluk agama Islam.
2. 1545 – 1570 Sultan Rahmatullah.
3. 1570 – 1595 Sultan Hidayatullah.
4. 1595 – 1620 Sultan Mustain Billah, Marhum Panembahan, yang dikenal sebagai Pangeran Kacil. Sultan inilah yang memindahkan keraton ke Kayutangi Martapura, karena keraton di Kuwin hancur di serang Belanda pada tahun 1612.
5. 1620 – 1637 Ratu Agung bin Marhum Penembahan yang bergelar Sultan Inayatullah.
6. 1637 – 1642 Ratu Anum bergelar Sultan Saidullah.
7. 1642 – 1660 Adipati Halid (Pangeran Tapesana) memegang jabatan sebagai Wali Sultan, karena anak Sultan Saidullah, Amirullah Bagus Kesuma belum dewasa.
8. 1660 – 1663 Amirullah Bagus Kesuma memegang kekuasaan, 1663. Pangeran Adipati Anum (Pangeran Suriansyah) merebut kekuasaan dan memindahkan pusat pemerintahan ke Banjarmasin, sekitar Sungai Pangeran sekarang, Pemerintahan Martapura dipegang kembali oleh Adipati Tuha samapi 1666.
9. 1663 – 1679 Pangeran Adipati Anum setelah merebut kekuasaan dari Amirullah Bagus Kesuma dan memindahkan keraton ke Banjarmasin bergelar Sultan Agung.
10. 1680 – 1700 Amirullah Bagus Kesuma merebut kekuasaan dari Amirullah Bagus Kesuma dan memindahkan keraton ke Banjarmasin bergelar Sultan Agung.
11. 1700 – 1734 Sultan Hamidullah gelar Sultan Kuning.
12. 1734 – 1759 Pangeran Tamjid bin Sultan Amirullah Bagus Kesuma bergelar Sultan Tamjidillah menggantikan Pangeran Muhammad Aminullah anak Sultan Kuning yang belum dewasa.

⁴⁷ M. Idwar Saleh, *loc.cit.*

13. 1759 – 1761 Pangeran Muhammad Aliuddin Aminullah bin Sultan Kuning.
14. 1761 – 1801 Pangeran Nata Dilaga sebagai wali putera Sultan Muhammad Aliuddin yang belum dewasa tetapi memegang pemerintahan dan bergelar Sultan Tahmidullah II.
15. 1801 – 1925 Sultan Suleman Almutamidullah bin Sultan Tahmidullah II.
16. 1825 – 1857 Sultan Adam Al Wasik Billah bin Sultan Suleman.
17. 1857 – 1859 Pangeran Tamjidillah.
18. 14-03- 1862 Pangeran Antasari yang bergelar Panembahan Amir Oeddin Khalifatul Mu'mina.
19. 1862 – 1905 Sultan Muhammad Seman.

c. Kerajaan Banjar, Urang dan Bahasa Banjar

Sultan Suriansyah adalah raja pertama dari Kerajaan Banjar dan raja pertama yang memeluk agama Islam. Agama Islam merupakan agama negara dan menempatkan kedudukan para ulama pada tempat yang terhormat dalam negara. Kedudukan agama Islam sebagai agama negara terlihat dengan jelas pada masa pemerintahan Sultan Adam Al Wasik Billah yang mengeluarkan Undang-Undang negara pada tahun 1835 yang kemudian dikenal sebagai *Undang-undang Sultan Adam*. Dalam Undang-undang itu jelas terlihat hampir pada setiap pasal-pasal bahwa sumber hukum yang dipergunakan adalah hukum Islam. Karena itulah kerajaan Banjar disebut sebagai kerajaan Islam, karena itu pulalah urang Banjar dikenal sebagai orang yang beragama Islam.

Kerajaan Banjar adalah kerajaan terakhir yang pernah ada di daerah Kalimantan Selatan. Kerajaan tertua yang pernah ada adalah kerajaan Tanjungpura atau Tanjungpuri, sebuah kerajaan migrasi orang-orang Melayu dengan membawa unsur kebudayaan Melayu dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi. Banyak pendapat yang berbeda tentang dimana lokalisasi kerajaan Tanjung Pura ini. Salah satu diantara pendapat itu adalah bahwa pusat kerajaan Tanjungpura itu adalah kota Tanjung ibu kota Kabupaten Tabalong sekarang.⁴⁸ J.J. Ras menyebutkan bahwa Tanjung merupakan sebuah daerah tempat migrasi melayu yang pertama ke Kalimantan. Mpu Prapanca menyebutkan dalam *Negarakertagama* (1365) dengan nama Nusa Tanjung Negara dan ini identik dengan Pulau Hujung Tanah, dengan kota terpenting adalah Tanjungpuri. Pada bagian lain Mpu Prapanca menyebutkan pula nama Bakulapura adalah nama lain dalam bahasa Sanskerta untuk menyebutkan nama Tanjungpura. Kalau kerajaan Tanjungpura merupakan migrasi Orang Melayu Sriwijaya, hal ini berarti pula bahwa ke daerah ini telah masuk unsur kebudayaan agama Budha sebagai agama dari kerajaan Sriwijaya. Migrasi Melayu ke Kalimantan diperkirakan antara abad ke- 12 – 13 Masehi.

Pada abad ke- 13 muncul pula kerajaan Negara Dipa yang kemudian diganti oleh Negara Daha. Negara Dipa berlokasi di sekitar Amuntai sedangkan Negara Daha berlokasi sekitar Negara sekarang. Kedua kerajaan ini bercorak Hindu dengan peninggalan Candi Agung dan Candi Laras. Negara Dipa merupakan kerajaan migrasi dari Jawa Timur sebagai akibat dari peperangan antara Ken Arok dengan raja Kertajaya yang dikenal dengan Perang Ganter.⁴⁹

Dalam abad ke- 16 muncul perkembangan baru dengan lahirnya kerajaan Banjar yang bercorak Islam di Kalimantan Selatan. Kerajaan Banjar berkembang pesat sampai abad ke- 19 merupakan kerajaan Islam merdeka dengan nation baru bangsa Banjar sebagai sebagai warganegara dari sebuah kerajaan (1859 – 1915) maka bangsa Banjar sebagai warganegara dari sebuah kerajaan merdeka juga ikut lenyap, dan turun derajatnya menjadi bangsa jajahan dan kemudian dikenal sebagai *Urang Banjar* atau *Orang Banjar*.⁵⁰

⁴⁸ J.J. Ras, *op.cit.*, hal. 191.

⁴⁹ A. Gazali Usman, *Urang Banjar Dalam Sejarah*, Lambung Mangkurat University Press, Banjarmasin, 1989, hal. 35.

⁵⁰ A. Gazali Usman, *ibid.*, hal. 3.

Urang Banjar atau Orang Banjar atau etnik Banjar adalah nama untuk penduduk yang mendiami daerah sepanjang pesisir Kalimantan Selatan, Tengah, Timur dan Barat.⁵¹ Memang masih menjadi permasalahan apakah Urang Banjar itu merupakan etnik atau hanya group saja. Urang Banjar itu setidaknya-tidaknya terdiri dari etnik Melayu sebagai etnik yang dominan, kemudian ditambah dengan unsur Bukit, Ngaju dan Maanyan. Perpaduan etnik lama kelamaan menimbulkan perpaduan kultural. Unsur Melayu tampak sangat dominan dalam *bahasa Banjar*, bahasa yang dipakai oleh Urang Banjar. Kata "*Banjarmasin*" sendiri berasal dari unsur bahasa Melayu yaitu banjar berarti kampung dalam bahasa Melayu, dan kata masih, adalah sebutan terhadap Orang Melayu dalam bahasa Ngaju. Jadi "*Banjarmasih*" adalah sebutan perkampungan Orang Melayu dalam ucapan bahasa Ngaju. Kata Banjarmasin inilah yang kemudian menjadi Banjarmasin.

Sekurang-kurangnya ada dua hal yang perlu disimak dari kesejarahan kerajaan Banjar. Pertama, bahwa jauh sebelum abad ke- 16 sebelum kerajaan Banjar berdiri, masyarakat Banjar telah terbentuk bersamaan dengan terbentuknya kerajaan Tanjungpura. Masyarakat Banjar telah melembaga sebagai sebuah kelompok sosial budaya. Kedua, bahwa dalam tata kehidupan masyarakat Banjar telah dikenal sistem kehidupan politik. Urang Banjar sebagai sebuah kelompok sosial budaya menggunakan *bahasa Banjar* sebagai bahasa kelompok. Bahasa Banjar mengambil sebagian besar kosa katanya dari kosa kata bahasa Melayu. Disamping itu dijumpai pula sejumlah kata yang sama atau mirip dengan bahasa Jawa dan bahasa-bahasa Dayak seperti bahasa *Ngaju*, *Maanyan* dan *Deyah* dan hanya sedikit kosa kata yang tidak dapat dikembalikan ke bahasa lain dianggap unsur asli. Oleh karena secara kuantitatif kosa kata Melayu lebih menonjol pada bahasa Banjar maka ia digolongkan dialek Melayu.⁵²

Para peneliti Belanda dan Jerman, istilah Melayu untuk penduduk Kalimantan dioposisikan dengan istilah Dayak, dengan dasar pengelompokan "*Islam*" dan "*Non Islam*". Kelompok Islam diidentifikasi sebagai Melayu. Dengan dasar ini bahwa *Urang Banjar* dengan *bahasa Banjarnya* adalah kelompok campuran unsur Melayu, dan suku-suku Dayak yang ada di daerah ini.

Peranan dan fungsi bahasa Banjar sebagian *lingua franca* bagi para penutur puluhan bahasa daerah di wilayah Kalimantan bagian selatan, tengah, timur dan barat sudah lama dikenal. (Dr. Durdje Durasid, paper). Secara diagenesis bahasa Banjar dan bahasa Dayak Ngaju sudah lama diketahui para linguist sebagai anggota kerabat rumpun Austronesia, sub-sub kelompok Austronesia Barat yang dihipotesiskan berbeda. Sub-sub kelompok yang menurunkan bahwa Banjar dihipotesiskan sebagai proto Bahasa Barito.⁵³ Proto bahasa Melayu menurunkan Bahasa Seloka, Minangkabau, Jakarta dan Serawak. Proto bahasa Barito selain menurunkan bahasa Dayak Ngaju, juga menurunkan bahasa Maanyan, Pasir dan Tunjung.

Penduduk Propinsi Kalimantan Selatan 90% penutur bahasa Banjar. Kebanyakan penutur bahasa Banjar merupakan ekabahasawan. Penutur bahasa Dayak Ngaju merupakan penutur bahasa tersebar dari beberapa bahasa yang ada di Propinsi Kalimantan Tengah diperkirakan 50% dari jumlah penduduk. Bahasa Dayak Ngaju tersebar luas di propinsi itu terjadi karena bahasa Dayak Ngaju merupakan *lingua franca* bagi beragam bahasa Dayak yang ada di Kalimantan Tengah.

Bahasa Banjar tersebar luas di Kalimantan Tengah sebagai bahasa ketiga yang sangat dikenal mengikuti penyebaran Orang Banjar yang hampir dapat dijumpai di semua pelosok Kalimantan Tengah sebagai pedagang ulet dan perantau yang tangguh (budaya madam). Bahasa Banjar menjadi bahasa kedua hampir pada semua ibukota kabupaten termasuk ibukota propinsi Palangkaraya. Bahasa

⁵¹ J. Mallinckrodt, *Het Adatrecht van Borneo*, 2 vols, Dubbeldeman, Leiden, 1928, hal. 48.

⁵² Djantera Kawi, "Kata Kognat Banjar- Jawa Kuno", Makalah pada Diskusi Panel Bahasa Banjar, FKIP Unlam, Banjarmasin, 24 Oktober 1992.

⁵³ Alfred B. Hudson, *Padju Epat, The Ethnography and Social Structure of a Maanyan Dayak Group in South Eastern Borneo*, 1967 ; Durdje Durasit, "Bahasa Banjar dan Bahasa Dayak Ngaju", Makalah pada Diskusi Panel Bahasa Banjar, FKIP Unlam, Banjarmasin, 24 Oktober 1992.

Banjar dipakai sebagai bahasa berkomunikasi di pasar-pasar dan juga dalam pertemuan resmi. Situasi ini menimbulkan kedwibahasaan bagi penutur bahasa Dayak. Sikap penutur bahasa Dayak berbeda dengan sikap penutur bahasa Banjar yang kebanyakan *ekabahasawan* (hanya menguasai bahasa Banjar saja).

Dalam penutur bahasa Bakumpai dan penutur bahasa Baamang (Sampit) terdapat penggunaan bahasa yang bersifat *diglosia*, yaitu masyarakat penutur bahasa itu menggunakan bahasa Banjar dan bahasa daerahnya dalam pilihan situasi tertentu. Bahasa Banjar digunakan dalam hubungan dagang di pasar dan bersifat resmi dan antar suku, sedangkan bahasa daerah, Bakumpai dan Baamang digunakan pada situasi yang bersifat kekeluargaan dan tradisional. Situasi diglosia itu terbentuk karena kemampuan penggunaan Bahasa Banjar dan kedua bahasa itu dalam masyarakat penutur bahasa Bakumpai dan Baamang digunakan pada situasi yang bersifat kekeluargaan dan tradisional. Situasi diglosia itu dalam masyarakat penutur bahasa Bakumpai dan Baamang seimbang bahkan menurut pengamatan Dr. Durdje Durasit penutur bahasa Bakumpai lebih lancar berbahasa Banjar dari pada berbahasa Bakumpai. Kedudukan bahasa Banjar cukup istimewa dalam masyarakat penutur bahasa Dayak di Kalimantan Tengah dan Selatan menjadi sangat penting. Begitu pula pemakaian bahasa Banjar di Propinsi Kalimantan Timur karena bahasa Banjar dikenal luas di Samarinda, Balikpapan, Tenggarong dan sebagian penduduk Kabupaten Kutai.⁵⁴

Dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah, bahasa Banjar seperti bahasa daerah lainnya di Indonesia, berfungsi sebagai :

- a. lambang kebangsaan daerah,
- b. lambang identitas daerah,
- c. alat perhubungan di dalam keluarga, dan
- d. alat berkomunikasi dengan pelbagai masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan, Tengah dan Timur.

Penutur bahasa Banjar pada umumnya juga penutur bahasa Indonesia yang kebetulan struktur dan kosa katanya memiliki banyak persamaan.⁵⁵

4. Sistem Pemerintahan Kerajaan Banjar

a. Sistem politik dan pemerintahan pada masa pertumbuhan kerajaan Banjar.

Masyarakat Banjar sebagaimana masyarakat tradisional lainnya memiliki/ mengenal dua tingkatan kelas dalam masyarakat. Kelas atau golongan mayoritas dalam masyarakat merupakan kelas yang terbawah terdiri dari : petani, nelayan, pedagang dan sebagainya yang disebut : *orang jaba*.

Golongan terkecil adalah merupakan kelas penguasa yang memiliki semua hak, yaitu hak dalam politik, mereka terdiri dari famili kerajaan, keluarga dari raja yang dikenal sebagai *golongan bangsawan*. Golongan ini menempati posisi teratas dalam struktur sosial. Termasuk dalam golongan ini adalah para *bangsawan rendah*.

Pemimpin-pemimpin agama Islam, juga merupakan kelompok penguasa tingkat atas yang mengatur semua kegiatan para pedagang, rakyat umum dan para petani di dalam negeri. Penempatan golongan pemimpin agama pada tempat teratas ini didasarkan pada ketetapan bahwa agama Islam merupakan agama resmi dari negara yang memimpin manusia ke jalan yang benar.

⁵⁴ Durdje Durasit, *loc.cit.*

⁵⁵ Darmansyah, "Bahasa Banjar dan Bahasa Maanyan", Makalah pada Diskusi Panel Bahasa Banjar, FKIP Unlam, Banjarmasin, 24 Oktober 1992.

Ketika Pangeran Samudera pertama kali mengatur organisasi kerajaan/negara, kegiatan pertama yang dilakukannya ialah tidak memilih jabatan mangkubumi dari golongan bangsawan famili kerajaan, tapi dipilih orang biasa yang cakap dan mempunyai kemampuan dan dedikasi yang tinggi terhadap negara. Orang pertama yang dipilih ialah dari rakyat umum ialah Patih Masih. Patih Masih menjabat jabatan yang tertinggi dalam negara sebagai mangkubumi.

Dalam perjalanan sejarah raja-raja di Kalimantan Selatan, bila diteliti dengan seksama nampak bahwa pergantian raja-raja dari negara Daha sampai Banjarmasin dari :

1. Sekar Sungsang
2. Sukarama, mertua Ratu Lemak.
3. Pangeran Mangkubumi/Raden Manteri
4. Pangeran Tumenggung
5. Raden Samudera

Bukan pergantian yang lumrah dari ayah kepada anak tapi dari tangan musuh yang satu ketangan musuh yang lain, melalui revolusi istana. Raden Sekar Sungsang *usurpator* pertama adalah pembangun dinasti Negara Daha, dan Raden Samudera *usurpator* kedua adalah pembangun dinasti Banjarmasin. Dalam hal ini jabatan Mangkubumi yang biasanya dijabat oleh seorang keluarga paling dekat dari raja yang biasanya mendatangkan malapetaka bagi kerajaan. Mangkubumi biasanya adalah saudara raja, mertua, paman dan mertua raja sekaligus juga adalah paman dari raja. karena jabatan mangkubumi merupakan jabatan tertinggi dalam negara dan mempunyai kedudukan dalam struktur keluarga tertinggi, sehingga mangkubumi mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam segala tindak tanduk raja. Dalam hal ini kalau raja lemah, adalah mudah sekali terjadi kup. Inilah suatu pengalaman yang dialami oleh Raden Samudera oleh pamannya sendiri Pangeran Tumenggung, yaitu mulanya menjabat mangkubumi.

Patih sebagai mangkubumi dibantu oleh 4 orang deputi, yaitu :

- a) Pangiwa,
- b) Panganan,
- c) Gampiran atau Gumpiran, dan
- d) Panumping

Dibawah Gampiran, Panumping terdapat 30 wilayah Mantri (*captain*). Keempat deputi ini juga berwenang sebagai hakim.

Dalam usaha untuk mengembangkan pelabuhan dan berusaha menjadikan Banjarmasin menjadi sebuah bandar, raja mengangkat seorang penguasa pelabuhan, sebagai kepala bea cukai dengan jabatan yang disebut *Kiai Palabuhan*. Jabatan ini kemudian berbeda dengan jabatan syahbandar yang mempunyai fungsi yang sangat besar yang dapat bertindak sebagai wakil raja dalam kegiatan perdagangan dengan pedagang-pedagang luar negeri.

Masa-masa Sultan Suriansyah, *Kiai Palabuhan* yang disebut sebagai Mantri Bandar mempunyai anak buah 100 (seratus) orang untuk menjalankan kegiatan pemungutan bea cukai pelabuhan.

Mantri Tuhabun dengan gelar pangkatnya : *andakawan (The Captain of The Tuhabun corps)* mempunyai anggota 40 orang. Tugasnya untuk melayani raja, para famili raja seperti antara lain sebagai regu pengayuh perahu ketangkasan raja.

Untuk menjaga keamanan terdapat dua orang kepala *Singabana* yang terdiri dari :

- a) Singantaka, dan
- b) Singapati.

Pada masa Sultan Suriansyah, jabatan tertinggi adalah Mangkubumi yang dijabat oleh Patih Masih.

Panganan dijabat oleh Patih Balitung

Pangiwa dijabat oleh Patih Balit

Gumpiran atau Gampiran oleh Patih Kuin, dan
Panumping dijabat oleh Patih Muhur

Sesudah lenyapnya Negara Daha raja Banjar mengangkat patih tertua Aria Taranggana dari Negera Daha sebagai Mangkubumi.

Mangkubumi mempunyai wewenang dalam masalah administrasi negara untuk mengurus seluruh wilayah negara, dan mempunyai wewenang untuk menentukan keputusan terakhir terhadap seseorang yang dijatuhi hukuman mati. Disamping itu, Mangkubumi juga mempunyai wewenang dari segala hak penytiaan segala harta benda yang dijatuhi hukuman. Wewenang seperti ini berlaku sampai permulaan abad ke-17.

Keempat deputy yang terdiri dari *Panggiwa*, *Panganan*, *Gampiran* dan *Panumping*, yang masing-masing dijabat oleh : Patih Balit, Patih Balitung, Patih Kuin dan Patih Muhur berwenang juga sebagai jaksa dan hakim, tetapi segala keputusan mereka benar atau salah selalu berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku saat itu yang terhimpun dalam sebuah kodifikasi hukum yang disebut *Kutara*, yang disusun oleh Aria Taranggana ketika dia menjabat Mangkubumi kerajaan.

Disamping jabatan-jabatan di atas terdapat lagi jabatan : *Mantri Besar* yang mempunyai tugas khusus yaitu bertugas sebagai duta kerajaan di daerah ataupun ke luar daerah kerajaan.

Dari periode raja pertama Sultan Suriansyah sampai dengan Sultan Inayatullah atau Ratu Agung (1620-1637), orang-orang yang pernah menjabat sebagai mangkubumi adalah :

1. Patih Aria Taranggana.
2. Kiai Anggadipa
3. Kiai Jayanegara, dan
4. Kiai Tumeggung Raksanegara

Suatu tradisi sejak raja pertama kerajaan Banjar, raja diganti oleh puteranya, sedangkan jabatan mangkubumi, sebagai jabatan tertinggi setelah raja, tidak dari darah bangsawan, tapi dari rakyat umum, yang bertindak sebagai "*King viceregent*". Mangkubumi juga sebagai hakim tertinggi yang keputusan tertinggi dalam seluruh wilayah kerajaan dalam segala hal masalah.

Saudara raja dapat menjadi : adipati dan menyertai raja atau membantu raja, tapi mereka adalah orang kedua setelah Mangkubumi.

Pada mas pemerintahan Marhum Panambahan Kacil (1595-1620) kaum bangsawan mempunyai gelar Raden dan Pangeran dan selalu ikut serta dalam segala sidang negara membicarakan masalah negara. Pada masa itu jabatan-jabatan dalam negara terdapat jabatan :

Mangkubumi
Mantri Pangiwa-Panganan
Mantri Jaksa
Tuan Panghulu
Tuan Khalifah
Khatib
Para Dipati
Para Pryai

Masalah-masalah yang menyangkut bidang agama Islam dibicarakan dalam suatu rapat/musyawarah yang terdiri dari : Mangkubumi, Dipati, Jaksa, Khalifah dan Penghulu yang memimpin pembicaraan adalah Penghulu. Masalah-masalah yang menyangkut hukum sekuler yang disebut *hukum dirgama*, dibicarakan oleh rapat yang terdiri dari Raja, Mangkubumi, Dipati dan Jaksa. Yang memimpin adalah Jaksa. Masalah yang menyangkut tata urusan kerajaan merupakan pembicaraan raja, Mangkubumi dan Dipati.

Jabatan Panghulu mempunyai status yang tinggi dalam negara. Dalam hierarki struktur negara, kedudukan Panghulu adalah dibawah Mangkubumi, dan jabatan Jaksa adalah di bawah Panghulu. Hal

ini berlaku pula dalam tata aturan negara dalam suatu sidang negara. Urutannya adalah Raja, Mangkubumi, kemudian Panghulu dan setelah Panghulu adalah Jaksa. Hal ini berlaku pula kalau Raja berjalan. Dalam suatu urutan kalau Raja berjalan, setelah raja adalah Mangkubumi, dibelakang Mangkubumi adalah Panghulu dan kemudian Jaksa.

Kewenangan Panghulu adalah lebih tinggi dari Jaksa, karena Panghulu mengurus masalah yang menyangkut agama, sedangkan Jaksa mengurus masalah yang menyangkut dunia.

Para Dipati, yang biasanya terdiri dari para saudara raja, menemani dan membantu raja, tetapi mereka adalah kedua setelah Mangkubumi.

Sistem politik dan pemerintahan seperti ini berlangsung sejak pemerintahan pertama dari kerajaan Banjar sampai masa Sultan Musta'in Billah pada permulaan abad ke- 17.

Secara lengkap Sistem Politik dan Pemerintahan kerajaan Banjar itu adalah sebagai berikut :

1. *Raja, bergelar Sultan atau Panambahan.*
2. *Mangkubumi.* Anggota dibawah Mangkubumi : *Panganan, Pangiwa, Mantri Bumi* dan 40 orang *Mantri Sikap*, Seorang Mantri Sikap memiliki 40 orang pengawal.
3. *Lalawangan*, kepala distrik, kedudukannya sama dengan kepala distrik pada masa penjajahan Belanda.
4. a. *Sarawasa*)
 b. *Sarabumi*) Kepala Urusan keraton
 c. *Sarabraja*)
5. a. *Mandung*)
 b. *Raksayuda*) Kepala Balai Longsari dan Bangsal dan Banteng
6. *Mamagarsari* , Pengapit raja duduk di Situluhur
7. a. *Parimala* , Kepala urusan dagang dan pakan (pasar).
 b. *Singataka* , Pembantu
 c. *Singapati* , Pembantu
8. a. *Sarageni* , Kuasa dalam urusan senjata (tombak, ganjur)
 b. *Saradipa* , duhung, tameng, badik, parang, badil, meriam dll.
9. *Puspawana* , Kuasa dalam urusan tanaman, hutan, perikanan, ternak, berburu
10. a. *Pamarakan*) Pengurus umum tentang keperluan pedalaman
 b. *Rasajiwa*) dan pedusunan
11. a. *Kadang Aji*) Ketua Balai petani dan Perumahan
 b. *Nanang* , Pembantu
12. *Wargasari* , Pengurus besar tentang persediaan bahan makanan dan lumbung padi, kesejahteraan
13. *Anggarmarta* , Juru Bandar, Kepala urusan pelabuhan
14. *Astaprana* , Juru tabuh-tabuhan, kesenian dan kesusasteraan.
15. *Kaum Mangkumbara* , Kepala urusan upacara
16. *Wiramartas* , Mantri Dagang, berkuasa mengadakan hubungan dagang dengan luar negeri, dengan persetujuan Sultan.
17. *Bujangga* , Kepala urusan bangunan rumah, agama dan rumah ibadah
18. *Singabana* , Kepala ketenteraman umum.

Sistem pemerintahan ini mengalami perubahan khususnya pada masa pemerintahan Sultan Adam Al Wasik Billah pada permulaan abad ke-19. Perubahan itu meliputi jabatan :

1. *Mufti* , Hakim tertinggi, pengawas Pengadilan umum

2. *Qadi* , Kapaqla urusan hukum agama Islam
3. *Penghulu* , Hakim rendah
4. *Lurah* , Langsung sebagai pembantu Lalawangan dan mengamati pekerjaan beberapa orang Pambakal (Kepala Kampung) dibantu oleh Khalifah, bilal dan Kaum.
5. *Pambakal* , Kapala Kampung yang menguasai beberapa anak kampung.
6. *Mantri* , Pangkat kehormatan untuk orang-orang terkemuka dan berjasa, diantaranya ada yang menjadi kepala desa dalam wilayah yang sama dengan Lalawangan.
7. *Tatulia Kampung* , orang yang terkemuka di kampung.
8. *Panakawan* , orang yang menjadi suruhan raja, dibebas dari segala macam pajak dan kewajiban.⁵⁶

Jabatan Mangkubumi adalah jabatan urutan kedua setelah Sultan. Pada abad ke- 18 jabatan Mangkubumi disebut pula dengan sebutan *Perdana Mantri* yaitu pada masa pemerintahan Sunan Nata-Alam (Sultan Tahmidullah), tetapi disebut pula dengan sebutan *Wazir*. Jadi Mangkubumi, Perdana Mantri dan Wazir adalah jabatan eselon yang sama.

Putera Mahkota yang merupakan calon resmi pengganti Sultan kalau sultan meninggal atau mengundurkan diri, pada masa pemerintahan Sultan Tahmidullah disebut *Ratu Anum*, dan pada masa pemerintahan Sultan Adam Al Wasik Billah disebut *Sultan Muda*. Sebutan Ratu Anum kadang-kadang juga dikacaukan dengan sebutan untuk Mangkubumi, seperti Pangeran Dipati Ratu Anum Ismail, adalah seorang Perdana Mantri pada masa pemerintahan Sultan Tahmidullah.

Sebutan kehormatan untuk Sultan, disebut : *Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan*, sedang untuk sebutan Gubernur Jenderal VOC hanya disebut dengan : *Tuan Yang Maha Bangsawan Gubernur Jenderal*. Sebutan untuk permaisuri hanya disebut *Ratu*. Sebutan Sunan sebagai pengganti sebutan sultan hanya pernah dipakai oleh Sultan Tahmidullah dengan sebutan *Sunan Nata Alam*. Sebutan Ratu tidak selamanya harus permaisuri tetapi juga sebutan untuk sultan, seperti Sultan Inayatullah yang bergelar Ratu Agung (1620-1637). Sebutan Panembahan pernah diberikan kepada :

- a. Sultan Suriansyah dengan gelar Panembahan Batu Habang
- b. Sultan Rahmatullah dengan gelar Panembahan Batu Putih
- c. Sultan Hidayatullah dengan gelar Panembahan Batu Irang
- d. Sultan Musta'in Billah dengan gelar Panembahan Marhum
- e. Sultan Tahlilullah dengan gelar Panembahan Tingi
- f. Sultan Tahmidullah yang bergelar Susuhunan Nata Alam, juga bergelar: Panembahan Batu, Panembahan Ratu, dan Panembahan Anum.

b. Pergeseran Sistem Politik dan Pemerintahan Dalam Abad ke-17

Selama kekuasaan Sultan Musta'in Billah sistem politik dan pemerintahan negara menjadi lebih kompleks. Seperti telah dijelaskan di muka, Mangkubumi bertindak sebagai "*King Viceregent*" mempunyai 4 deputi dan 4 hakim untuk memecahkan masalah hukum.

Dalam kasus masalah sekuler yang mempunyai wewenang pertama adalah : para hakim, raja, para deputi dan terakhir Mangkubumi yang memberikan pendapat.

Dalam kasus masalah negara, termasuk hubungan luar negeri, monopoli perdagangan, serta mengadakan kontrak perdagangan dengan luar negeri, diselesaikan oleh Mangkubumi dan para Dipati, dalam hal ini raja mempunyai kata terakhir.

⁵⁶ Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sedjarah Kalimantan*, Fadjar, Banjarmasin, 1953, hal. 149-150.

Tradisi untuk menyelesaikan masalah negara berkembang menjadi suatu sistem yang kemudian menjadi suatu institusi yang paling berwewenang yang disebut *Dewan Mahkota (The Royal Council)*.

Sesudah kematian Ratu Agung bin Sultan Musta'in Billah (1637), penggantinya adalah Ratu Anum yang bergelar Sultan Saidullah. Selama masa pemerintahannya dia sebetulnya Menjadi raja boneka belaka, sebab wewenang kekuasaan politik negara dan pemerintahan dipegang oleh pamannya Pangeran Di Darat, sebagai orang yang paling berkuasa yang menguasai seluruh pemerintahan, Ketika Pangeran Di Darat meninggal, jabatan itu digantikan oleh Dipati Tapesana yang mengambil gelar : Dipati Mangkubumi yang bertindak sebagai raja (*temporary-King*). Sejak Pangeran Di Darat menjabat Mangkubumi, sejak itu pula jabatan Mangkubumi, jabatan yang tertinggi dalam negara tidak pernah lagi dijabat oleh rakyat umum, tetapi merupakan jabatan monopoli oleh keluarga kerajaan, yaitu paman, saudara tertua, mertua atau paman yang juga menjadi mertua dari raja.

Sejak pertengahan abad ke- 17, kita melihat pertumbuhan dari kekuatan baru dalam konflik dengan elemen-elemen golongan kerajaan yang mendominasi, yang mempunyai monopoli kekuasaan dalam bidang politik dan perdagangan, yang mempengaruhi pada masa selanjutnya. Hal ini pertama kali dimulai pada suatu gerakan yang tidak pernah berakhir pada golongan tingkat atas dari masyarakat Banjar, yaitu perebutan perampasan kekuasaan (*usurpation*), persaingan kekuasaan, tipu daya (*intrik*) dan faham mengutamakan golongan sendiri (*factinalism*) menjadi sangat lemah dan terjadinya kekacauan sebagai suatu akibat selanjutnya.

Abad ke- 17 adalah masa memuncaknya perdagangan lada. Pada masa abad tersebut, perdagangan lada merupakan satu-satunya komoditi ekspor kerajaan Banjar. Perkembangan perdagangan ini menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan politik dan pemerintahan. Para penguasa (*the ruling class*) berusaha dengan cepat untuk memperoleh tanah yang lebih luas dalam bentuk tanah apanase yang dijadikan wilayah penguasaan penanaman lada. Penanaman lada ini dapat berkembang dengan didorong oleh kedatangan para pedagang dari Jawa yang membawa kapal-kapal mereka dengan modal besar. Kedatangan para pedagang ini menjadikan ramainya dunia perdagangan kerajaan Banjar.

Besarnya volume perdagangan lada menyebabkan kekayaan yang melimpah bagi golongan penguasa politik dan perdagangan. Kekuasaan politik dan perdagangan merupakan haknya golongan bangsawan dan bukan hak milik rakyat.

Kekayaan mendominasi karakteristik tingkah laku bagi golongan penguasa, yang merupakan penguasa politik dan perdagangan dan penguasa perkapalan. Kekayaan menyebabkan seseorang memperoleh kekuasaan politik atau mempunyai pengaruh dalam bidang politik yang mempunyai golongan penguasa, dan justru sebagai golongan penguasa akan menghasilkan kekayaan, karena penguasalah yang mempunyai monopoli dalam bidang perdagangan lada dan perkapalan.

Perubahan ini menyebabkan pengaruh yang besar bagi sistem politik dan pemerintahan, karena sejak itu golongan bangsawan yang sangat kaya-kaya lebih berkuasa daripada raja. Para bangsawan atau para Pangeran bertingkah laku terhadap rakyatnya dengan menganggap dirinya sebagai penguasa raja, yang mempunyai kekuasaan absolut dalam wilayahnya. Para pangeran juga mempunyai pengaruh besar dalam perundingan-perundingan perdagangan dan kadang-kadang kepentingan para pangeran ini lebih menonjol daripada kepentingan politik negara.

Bagi pedagang luar negeri terutama bangsa Belanda, kekuasaan absolut dari *golongan aristokrat* ini sangat merugikan mereka. Dan itu pula sebabnya Belanda tidak dapat memperoleh hak monopoli lada dalam kontrak yang di buat saat itu.

Dewan Mahkota (*The Royal Council*) yang terdiri dari keluarga raja, golongan aristokrat, para pejabat tinggi, pegawai rendahan seperti Kiai mempunyai kekuasaan besar untuk menentukan situasi politik, ekonomi dan perdagangan negara. Raja tidak dapat melakukan suatu tindakan atau langkah

tanpa izin atau persetujuan Dewan Mahkota terutama yang menyangkut pembicaraan dengan pedagang-pedagang asing.

Dalam abad ke-17 pedagang asing yang datang dan meramaikan perdagangan kerajaan Banjar; orang Cina, Siam, Johor, Jawa, Palembang, Portugis, Inggeris dan Belanda. Komoditi perdagangan terdiri dari emas, permata, lada, cengkeh, pala camphor, kulit buaya, mutiara, rotan, besi dan lain-lain. Kerajaan Banjar mengimpor; batu akik merah, rantai akik merah, gelang, benda-benda porselen, beras, morphin, garam, gula, tawas, pakaian dan sebagainya.

Aktivitas pelayaran dan perdagangan Banjar dalam abad ke- 17 melintasi sampai Cochin Cina dan Aceh. Aktivitas pelayaran dan perdsagangan ini dibiayai dengan modal para golongan penguasa (*the ruling class*).

Dengan pertumbuhan perdagangan dan adanya kontrak-kontrak dengan perdagangan luar negeri, memerlukan orang asing untuk menduduki jabatan syahbandar. *Syahbandar* adalah orang asing yang mengerti tata cara perdagangan dan memahami bahasa asing. Syahbandar pertama dari kerajaan Banjar adalah seorang Gujarat; Goja Babouw dengan gelar Ratna Diraja.

Sebuah kontrak perdagangan yang diadakan antara kerajaan Banjar dengan Belanda diselesaikan melalui pengaruh tokoh Syahbandar Ratna Diraja Goja Babouw dan ditanda-tangani oleh Sultan (1635).

c. Sistem politik dan Pemerintahan pada masa Sultan Adam Al Wasik Billah (1826-1857)

1) Pembagian Teritorial Kerajaan Banjar

Dalam hal ini terlihat adanya tiga jenis pembagian dalam wilayah kerajaan Banjar, meskipun terminologi ini tidak dipergunakan dalam sistem politik dan pemerintahan dalam kerajaan. Tiga jenis teritorial itu adalah :

- *Negara Agung*
- *Mancanegara* dan
- *Pasisir*

Istilah tanah seberang tidak dipergunakan dalam terminologi kerajaan Banjar, tapi bagaimanapun juga pembagian dengan cara ini juga diterapkan.

Wilayah kerajaan Banjar, meliputi titik pusat, yaitu istana raja di Martapura dan berakhir pada titik luar dari daerah Landak ke Berau.

Daerah Martapura sebagai sebuah wilayah pertama dan pusat pemerinahan di mana Sultan berada. Dalam perjalanan sejarah dapat dipelajari bahwa ketetapan wilayah tidak dapat dilihat dengan jelas dengan batas yang tetap. Ketetapan ini sangat dipengaruhi oleh keadaan yang tidak stabil dan ketetapan batas yang *fleksibel* disebabkan oleh berkembangnya kekuasaan atau menurunnya kekuasaan Sultan dan juga pengaruh dari golongan penguasa (*the ruling class*) saat itu.

Ketika daerah kerajaan Banjar menjadi lebih kecil dalam tahun 1787, yang hilang direbut Belanda, dan daerah ini makin berkurang pada tahun 1826 dibandingkan dengan wilayah kerajaan abad ke-17, hanya tinggal wilayah yang dihuni oleh kelompok etnik suku Banjar di bawah pemerintahan Sultan Adam Al Wasik Billah.

Sejak setelah penyerangan Belanda dalam tahun 1612 yang menyebabkan penghancuran Banjarmasin dan istana Sultan, ibu kota pindah ke Martapura. Daerah pusat kerajaan adalah Karang Intan dan Martapura, sebagai pusat Pemerintahan dan keraton Sultan.

Wilayah teritorial yang kedua terdiri dari :

- 1) Tanah Laut atau tanah rendah, sebelah Barat Meratus, sebelah Selatan Banjarmasin.
- 2) Daerah Banjar Lama dengan Pelabuhan Banjarmasin.
- 3) *Banua Ampat*, yaitu daerah Banua Padang, Banua Halat, Parigi dan Gadung di daerah Rantau.
- 4) Margasari

- 5) Alai
- 6) Daerah Amandit
- 7) *Banua Lima* yang terdiri dari daerah Negara, Alabio, Sungai Banar, Amuntai dan Kalua
- 8) Muarabahan dan
- 9) Dusun, nama umum untuk daerah atas Barito.

Teritorial ketiga terdiri dari : Tanah Bumbu, Pulau Laut, Karasikan, Pasir, Berau dan Kutai dan pantai Timur, Kotawaringin, Landak, Sukadana dan Sambas dan pantai sebelah Barat.

Ketiga teritorial ini dikenal sebagai wilayah kekuasaan Kerajaan Banjar. Semua wilayah tersebut membayar persembahan dan upeti. Semua daerah tersebut tidak pernah tunduk karena ditaklukkan, tetapi daerah-daerah itu mengakui di bawah kerajaan Banjar, kecuali Pasir yang ditaklukkan tahun 1636 dengan bantuan armada kapal Belanda.

Penanaman pengaruh Banjar terhadap daerah-daerah sebagian dilakukan melalui perkawinan politik atau dengan kolonialisasi. Politik terakhir ini dilakukan terhadap daerah Tanah Bumbu dan Kotawaringin.

Dalam wilayah kerajaan Banjar seperti daerah sungai, sungai dengan cabang-cabangnya, danau, sungai di pedalaman, gunung-gunung, pegunungan. pulau di danau, sering di pergunakan sebagai indikator untuk penentuan batas wilayah. Batas alam seperti ini tetap dipergunakan dalam kontrak dengan Belanda dalam tahun 1826 (juga Contract 18 Maret 1845).

2) Struktur Politik dan Sistem Sosial

Sebagai sebuah masyarakat tradisional masyarakat Banjar, mengenal dua golongan besar. *orang Jawa*, yang merupakan golongan terbesar dalam masyarakat, terdiri dari petani, tukang, pedagang, nelayan sungai; golongan teratas adalah *para bangsawan* dan golongan *pejabat birokrasi*.

Sultan Adam yang berkuasa antara tahun 1826-1857 mempunyai hak prerogatif dalam masalah-masalah politik dan agama. Hal ini tertulis dalam hukum yang ditulis tahun 1835 yang dikenal sebagai Undang-undang Sultan Adam.

Dibawah Sultan Adam dan Sultan Muda atau Pangeran Ratu dari anggota kelompok keturunan Sultan, hanya dua orang yang termasuk dalam organisasi administratif, namanya *Sultan Muda* dan *Pangeran Mangkubumi*. Pangeran Mangkubumi adalah kepala dari pusat birokrasi.

Fungsi pengadilan agama dijalankan oleh : Hakim Besar, yang terdiri dari :

Kepala Qadi

Kepala Mufti, dan

Kepala Chalifah.

Dibawah Mangkubumi adalah kelompok kepala yang dikenal sebagai Mantri yang memperoleh titel dalam tingkatan hierarkis seperti :

Adipati

Tumenggung

Kiai

Demang

Aria

Ngabehi

Pembakal dan

Neyarsa

Menurut komisaris Belanda Van der Ven dalam tahun 1857, masyarakat Banjar terdiri dari 6 kelas :

- 1) Raja dan kaum bangsawan

- 2) Golongan ulama
- 3) Pemimpin rakyat
- 4) Rakyat umum
- 5) Orang berhutang
- 6) Budak

Raja merupakan *hierarkis sosial* yang teratas, dan disamping sebagai kepala negara dan golongan bangsawan, juga sebagai kepala golongan famili kerajaan yang disebut : *Tutuha Bubuhan Raja-Raja*. Dia menghadiahkan pada keturunannya gelar-gelar seperti : *Pangeran, Gusti* dan *Ratu*. Dia juga memberi hak kepada mereka ini hadiah tanah dan sebagian besar dari penghasilan yang diperoleh dari tanah apanase, disamping penghasilan dari hak-hak istimewa lainnya dan hak dalam perdagangan.

Bangsawan yang lebih rendah menggunakan gelar seperti : *Raden, Anden* dan *Nanang*. Keturunan Nanang dari Kiai Adipati Danurejo di Banua Lima mempunyai kekuasaan besar selama pemerintahan dua sultan terakhir kerajaan Banjar dan terakhir sebagai Regent Belanda selama permulaan abad ke-20.

Orang-orang pimpinan terkemuka dalam birokrasi yang terendah adalah pimpinan dari rakyat, merupakan *hierarkis politik* yang terbawah adalah Pambakal atau kepala kampung. Dia dibantu oleh Pangerak dan Panakawan.

Beberapa kampung dapat membentuk sebuah sub-distrik, yang dipimpin oleh Lurah dan beberapa sub-distrik membentuk distrik yang dipimpin oleh Lelawangan.

Tiap-tiap penduduk kampung terdiri dari satu atau beberapa kesatuan famili, yang disebut bubuhan. Ikatan adat adalah sangat kuat dan fungsi bubuhan adalah berfungsi sosial ekonomi dan faktor pertahanan. Dalam sistem bubuhan, tetuha-tetuha bubuhan adalah orang-orang pemimpin yang sangat penting dan dia sebagai tetuha memikul tanggung jawab untuk kepentingan dan kelakuan tidak senonoh dari anggota bubuhannya.

Wibawa kerajaan Banjar didasari pada sistem bubuhannya, disamping legitimasi, penguasa warisan kekayaan, kehormatan dan kharisma.

3) Sistem Apanase dalam Kerajaan Banjar

Sultan mempunyai hak umum terhadap tanah, dimana dia menentukan dengan ketetapan hukumnya atas penguasaan pemilikan dan penggunaan atas tanah. Sultan juga mempunyai hak untuk mengatur produksi yang dihasilkan dari penggarapan tanah sesuai dengan adat kerajaan turun temurun. Hak untuk menetapkan produksi tanah oleh raja tersebut, sesuai dengan hukum yang tidak tertulis.

Dalam hal tanah apanase yang diberikan raja, kepada anak-anaknya, atau familinya, bahwa hak atas tanah yang diberikan raja, harus dilihat sebagai pemberian-penggantian gaji dan tidak seperti pengertian pembayaran keuangan atau gaji terhadap tugas mereka.

Raja sebagai Tutuha Bubuhan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk kepentingan keluarga besarnya. Tanah sebagai pembayaran gaji orang Jawa yang diberlakukan di Mataram yang kemudian disebut *tanah bengkok*, tidak dikenal dalam terminologi ini.

Sejak tahun 1826 kerajaan Banjar hanya wilayah tanah tempat tinggal kelompok etnis suku Banjar, yang terdiri dari daerah inti dan bagian dari daerah luar Hulu Sungai dan dusun dengan pengunungan Meratus pada batas sebelah barat dan utara sejauh sumber mata air sungai-sungai Paku, Sihong dan Nappo dan Gunung Luang. Semua daerah ini yaitu daerah inti dan daerah luar dibagi dalam dua (2) daerah teritorial. Sebagian adalah daerah pajak milik Sultan, dan bagian lain dibagi atas daerah apanase kerajaan, diberikan kepada keluarga dekat Sultan.

Daerah Sultan tersebut adalah sebagian dari Banjar, Martapura, Alai, Amandit, Benua Empat dan Banua Lima.

Pajak merupakan penghasilan negara (penghasilan raja pribadi) berupa : pajak pemberian, bea, retribusi padi, pajak tanah, zakat, fitrah, retribusi emas dan tambang intan, pembuatan perahu dan buruh kerja untuk keraton. Pajak ini semua dapat dibayar dengan uang atau dalam bentuk natura.

Pajak pemberian (*poll-tax*) ada dua jenis :

- a) *Baktin*, yaitu pajak berupa buruh-kerja
- b) *Nadar*, yaitu pajak tanpa buruh-kerja

Jumlah uang nadar adalah f 5,60 untuk pembayaran pajak yang sudah kawin, dan f 2,90 untuk yang tidak kawin perorangan.

Jumlah uang baktin f 2,60 untuk yang kawin. Di luar Banua Lima pajak tersebut berjumlah f 2,-, kecuali orang-orang Martapura adalah bebas dari jenis pajak (*poll-tax*) ini. Kampung-kampung Dayak yang dihuni kelompok etnis suku Dayak berkewajiban membayar tiap tahun berupa pembayaran upeti.

Buruh-kerja tidak sama untuk kategori tiap daerah, sebagai contoh : buruh-kerja untuk orang-orang Martapura terdiri hanya tenaga kerja pengayuh "*Perahu ketangkasan*" raja atau famili kerajaan. Banua Lima diperintahkan untuk menyampaikan tiap tahun 200 orang laki-laki untuk kegiatan keraton dan tiap 40 orang laki-laki dari jumlah tersebut akan melakukan kewajiban dua bulan sebagai pengawal kehormatan keraton. Penduduk daerah Kandangan bertanggung jawab untuk memelihara kuda-kuda Sultan, yang dipergunakan pada musim perburuan tiap tahun dari perburuan kerajaan.

Cukai retribusi untuk barang-barang adalah sepersepuluh dari harga barang-barang komoditi, kecuali garam. Retribusi padi tidak pernah dipungut tapi dalam bentuk zakat. Seluruh daerah membayar zakat, kecuali kampung-kampung suku Dayak.

4) Apanase Kerajaan dalam tahun 1826-1860

Sebagian wilayah tanah wilayah kerajaan diberikan sebagai apanase kepada keluarga raja tapi tidak selalu turun temurun. Sipemegang mendapat sebuah surat hadiah dari raja, yang disebut *Cap*, sebab segel raja dibubuhi pada surat tersebut.

Dari sebuah apanase si pemilik dapat mengambil penghasilan resmi berupa : pajak pemberian (*poll-tax*), fitrah, zakat, hasil berbentuk natura seperti : minyak kemiri, madu, ikan basah dan ikan kering, rotan, lilin, daging rusa dan tanduk rusa, telur itik, kura-kura sungai, monopoli rotan dan pajak rotan, sewa sungai ikan (*paiwakan*) dan sewa tanah. Dari tambang intan, pemilik apanase tidak hanya memperoleh pajak yang umum, tapi dia juga mempunyai hak monopoli dalam pembelian intan. Setiap intan yang ditemukan sebesar 4 karat, harus dijual pada raja atau pemilik apanase.

Rakyat dalam tanah apanase harus memberikan pelayanan pada pemilik apanase sebulan dalam tiap tahun sebagai tenaga kerja untuk apanase. Dia dapat menggantikannya dengan uang, jika dia mempunyai uang, besarnya f 7,- perkepala.

Kalau si pemegang apanase tersebut meninggal, keturunannya meminta kepada raja ketetapan baru dan sebagai pemegang dia tidak boleh mengalihkan apanase tersebut kepada pihak ketiga. Kalau raja mangkat semua ketetapan apanase diperbaharui. Dari periode Sultan Adam, Sultan Adam telah memberikan tanah apanase kepada anaknya, cucu, saudara laki dan pada keluarga isterinya yaitu Kiai Adipati Danureja dari Banua Lima.

Jika raja menganggap bahwa penghasilan dari apanase tidak cukup untuk si pemilik, raja dapat menghapuskan beberapa bagian dari kewajiban-kewajiban apanase pada raja, seperti kasus Ratu Dijah anak perempuan dari Sultan Adam.

Jenis baru dari penghasilan apanase adalah tambang batubara. Perusahaan tambang batu bara Belanda memperoleh hadiah konsesi dari raja yang termasuk wilayah tanah apanase Mangkubumi

Kencana. Dari konsesi ini dia memperoleh batu bara seharga f 10.000,- tiap tahun dari perusahaan Belanda.

Berikut adalah tanah apanase yang diberikan oleh Sultan pada keluarga (tabel I), sedangkan Tabel II merupakan daftar penghapusan apanase oleh Belanda tahun 1863, tabel III tanah apanase yang dirampas Belanda tanpa ganti rugi.

Tabel 1

No.	Name	Residence	Grade of kinship with Sultan Adam	Location and income of the apanages annually other privileges
1	2	3	4	5
1.	Ratu Aminah	Banjarmasin	daughter	diamond mines of batu Babi, income sold custom $\pm$ f 5000,-
2.	Ratu Salamah	Martapura	idem	Benua Gadung f 600 diamond mines Gn. Kupang ... ? and Sungai Pamangkih f 900
3.	Ratu Didjah	Martapura	idem	Tabalong, Jambu Alay dan Amandit f 800,- Custom duties f 12.000,- Diamond mines Parupuk f ... ?
4.	Pg. Surya Mataram		son	Tabalong, Pitap, Banua Bamban, Btg. Kulur, Banua Rambau, dan Padang f 10.000,-
5	Pg. Prabu Anom		son	Kelua, Amuntai, Sei Banar, alabio, Negara f 20.000,- income from duties f ... ? diamond mines of Lok Cantang f ?
1	2	3	4	5
6.	Ratu Djantera Kesuma		daughter	Gantang, Amuntai, Sei Banar, Alabio, Negara f 20.000,- income from duties f ... ? diamond mines of Lok Cantang f...?
7.	Sultan Muda Tamjid, crown prince & Mangkubumi	Banjarmasin	Grandson	Paramasan 40 tail gold a f 75 a tail f. 3000,- Salary as Mangkubumi f. 12.000
8.	Pg. Aria Kasuma	Banjarmasin	idem	he had a share from Paramasan Amandit f....?
9.	Pg. Wira Kasuma	Banjarmasin	idem	Sungai Gatal f. 200,-
10.	Hidayat	Martapura	idem	had a share in the income of Alay Paramasan Amandit, Karang Intan, Margasari f. 5000,- diamond mines of

				Basung?
11.	The 10 Children of Mangkubumi	Martapura	idem	had share in the income of Alay Paramasan Amandit, Karang Intan, Margasari f. 5000,-
12.	Pg. Kesuma Wijaya	Krg. Intan	brother	Pamarangan Puaian and Paringin f. 180,-
13.	Pg. Tasin	Martapura	idem	Amawang f. 400,-
14.	Pg. Singosari	idem	idem	Wayau f. 2000,-
15.	Pg. Hamim	idem	idem	Jatuh f. 400,-
16.	Children of Mangkubumi Nata Adam's brother	idem	Nephews	Income of the land Basung f. 3780,- Angkinang Kalahian f. 600,-
17.	Pg. Antasari	idem	dist. nephew	Manguah f. 400,-
18.	Adipati Danuraja	Amuntai	Nephew of Rt. Kumala Sari	Income of Balangan and 12 landscapes in its surrounding f. 8000,-
19.	Kiai Patih Guna Wijaya	Martapura	Adam official	Sei Raya f. 180,-

Tabel II

List of the abolished apanages

**Resolution of the Neth, Indies G.G
Mo. 29. 1863, August, 18th**

No.	Name	Location of the apanage	Sum of Compensation monthly
1	2	3	5
1.	Pg. Kartasari	diamond mines Si Djalun in Karang Intan idem at Sei Rapat f.60,-	Inherited from his father
2.	Pg. Tasin	Landscape Amawang	Sultan Soleiman ceded this land to his son, Pg. Tasin The cap was handed to Lurah Budjal, head of Amawang as his representative
3.	Pg. Nasaruddin	Tabudarat, Sei Gatal f.20,- , Margasari f.50,-	Cap from Sultan Adam
4.	Gt. Idjah	Benua Kandangan, Sei Kudung, f.25	Idem
5.	Pg. Abdullah, Pg. Moh. Seman	Benua Paringin, Benua Pitap, Ratau, Batang Kulur, Tabalong, Bamban, f.150,-	Inherited from their father Pg. Surya Mataram Cap from Sultan Adam

6.	Gt. Sura, Gt.Lalang, Gt. Kasim	Banua Paringin, Pamarangan, Paian, diamond mine Sie Asam (Karang Intan) f.155,-	Sons of Pg. Kasuma Wijaya. Cap from Sultan Sulaiman
7.	Pg. Moeksi, Pg. Jamal, Rd. Daud	Benua Kalahiang diamond mines Saligsing (Gn. Kupang) Tampuang, Alat (Gn. Luwak) f. 45,-	Cap. Sultan Adam
8.	Pg. Suriawansa	Diamond mine Kalabau Bungkuk (sie Rasung) f.20,-	i d e m
9.	Pg. Demang	a. Diamond mine Anangi (Mataram) b. Padang Pulai Babi, hunting field, f.20,-	i d e m
1	2	3	5
10.	Pg. M. Tambak Anyar	Sei Ulu Banua. Balumbu, Djambak Badatu, Hadjar Badatu, Pihanin, Danau Manuk, Batantangan, Soengaloan. Diwata Besar. Sei Lapat, Panyubarangan, Bietin, Sambudjur, Lampur, Tumpang, Awang, Kalumpang, Luang, Hakurung, Danau Panggang, Banyu Irang, Ampang. Barabidja. Boenkoe Nasi, Batara Gangga, Bajayan and the surrounding rice tields, gold-diamond mines of Riam Kiwa, f....?	He leased all the river in his holding to Haji Moh. Taip for f.2.700 a year. Yearly yield f.300 eggs of river lortoise. 700 ducks eggs. 400 dried fish, 300 pipih fish. Got tonnage from the coal mine. Produce as was rice padi rattan.
11.	Ratu Achmad	Sei Pasipatan (Martapura) Binuang a bee tree (Padang Alalak) f....?	Cap from Sultan Adam
12.	Kiai Tumenggung Dipa Nata or Kiai Adipati Danuradja	the villages Pasar Laut po-tase f. 60,- Sirap f.40 Pamarang f. 40,- Baru f. 80,- Panyambaran f. 8, Tanjung f.50, Bukit Damar : income of ½ thail 380 gantang rice	The commission concluded that the sons of the Kiai could get compensation ; a. Kiai Warga Kasuma b. Kiaji Demang Nata Negara

		river/lakes Danau Baganting, Kanta, Bilungka, Bangkal, Poelantan, Panggang, Bakang, Jadjoet, Sampoeng Banua, Sambung Dua, f.15,-	Cap from S. Adam According to the commission these lakes did not produce any thing.
13.	Kiai Puspa Dirdja or Patih Guna Wijaya	Sei Raya incomes yearly f.15,- f.200,- 1000 gantang padi 100 gantang rice	Cap from S. Adam
1	2	3	5
14.	Putri Nor	Sei Taboek, Sei Aboemboen, Sei Pamakuan, f. 15,-	Daughter of. Pg. Marta Kasuma cap from Sultan Adam
15.	Pg. Ibrahim	had a land in Banjarmasin, f. 10,-	
16.	Pg. Djaja Pamenang	Kp. Simpung, Asam, Sirih diamond mines of Oetan Padang, land Taluk Haur, f.500,-	Apanage cap from S. Adam bought, cap from Sultan Adam.
17.	Pg. Mangkubumi Paku Dilaga	Sie Tabu Karsa, f. 16,-	Inherited Apanage
18.	Andin Kalung	Sie Batang Banyu Mati and tributary	Cap from S. Adam.

Tabel III : Confiscated apanages

Confiscated from : 1. Nyai Ratu Kumala Sari
 2. Ratu Syarif Hosein Darma Kasoema
 3. Ratu Kasoema Negara

Resolution of Dutch Commissioner of the Southern and Eastern Departement of Borneo, no. 356 Jan, 1863, 22nd.

1. By the benefaction – act of S. Adam of 13th of Ramadhan, 1270 ceded to Nyai Ratu Kumala Sari :
 1. Benua Tanah Abang
 2. Benua Kusambi
 3. Benua Lampihung
 4. Benua Tabalung
 5. Benua Batang Kulur
 6. Benua Pitap
 7. Benua Tandjoeng
 - 8-10 Benua all the rivers in Alalak from Nyiur Tunggal till Cinta Poeri
 11. Padang Tangkas

12. Danau Pagat
 13. Leepak Basar
 14. Diamond mines Paang Loembah
 15. Diamond mines Galingging
 16. Wawaran (at Alabioe)
 17. Tanah Baloekoen
 18. Tanah Arang-arang
 19. Bukit Labuan Amas
 20. Bukit Amas
 21. Bukit Kiwa
 22. Bukit Kanan
 23. Bukit Pananggahan
 24. Bukit Harugan
2. By the benefaction act of Sultan Adam on 4th Dzoelkaidah 1268 ceded to Ratu Sjarif Koesin Darmakasoema, the apanages :
 1. Paramasan Alay
 2. Benua Gambah
 3. Benua Pisangan
 4. Benua Tanah Abang
 5. Benua Tanah Kosambi
 6. Benua Lampihong
 7. Diamond mines above Mataram, from Batang Badarah till the Sungai Kasi Mahar.
 3. Ceded to Ratu Kasoema Negara by the benefaction of Sultan Adam of the 29th Dzolehyjah 1251 and the 9th of Sawal, 1270, the apanages :
 1. Benua Gadung
 2. Tambaruntung
 3. Tanah Lobak
 4. Benua Sei Paring
 5. Pamangkih
 6. Sei Alalak
 7. Padang Bagenta Pamatang Danau
 8. Diamond mines; Padang Gn. Kupang
Sei. Soerian
Sei. Pinang
Batu Licin
Batu Poetih
 4. Ceded to Ratu Kramat (Or Ratu Syatif Abdullah Nata Kasoema) by; he benefaction act of Sultan Adam of the 20th Rabioel Awal 1263, the apanages :
 1. Desa Ulin
Amparia
Jambu Amandit
Balimau
Kp. Tanah Baru

Sei Jurutulis Idris (Kesarangan)
Sei Kiai Mangoen di Poera
There rivers : Kalumpang (Negara)
Ambahai Basar)
at Pamanggis
Ambahai Kecil)
Kalaan (Mangapar)

2. Rice field areas :
The areas of the extuary of river Babirik both banks of Hanyu Rambya.
3. Diamond mines :
Pinang
Sei Bidu
Tanah Poelantan
Roban Bungkok
Mataram Bawah
Tanah Padang Batang
Poelan Doepea.
This Ratu died childlees before the confiscation.

B. PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI PERDAGANGAN

Gambaran suatu kota atau daerah tertentu, akan mencerminkan pola kemajuan yang telah dicapai, terutama kemajuan di bidang ekonomi. Keadaan kota Banjarmasin pada abad ke-17, menurut dinasti Ming, cukup maju digambarkan :

"Bahwa mereka mempunyai kota dengan dinding kayu, salah satu sisi lain terletak berhadapan dengan sebuah pegunungan. Sebagian besar rakyat membuat rakit dari kayu dan membangun rumah di atasnya, seperti juga yang terdapat di Palembang" ⁵⁷

Di kota Banjarmasin dan sekitarnya, berdiri perumahan-perumahan yang sebagian besar dindingnya terbuat dari bambu, ada juga yang terbuat dari papan. Rumah itu besarnya luar biasa, sehingga ada yang memuat 100 anggota keluarga untuk setiap rumah, disitu tiap keluarga mempunyai kamarnya sendiri. Biasanya didiami oleh keluarga sedarah, dan berdiri di atas tiang.

Gambaran Groeneveld dan diperkuat oleh Valentijn, tentang kota Banjarmasin tersebut, memperjelas kemajuan yang telah dicapai kerajaan Banjarmasin dalam bidang perekonomian. Selain itu, dapat pula dilihat, bahwa yang dimaksud *rumah betang* atau rumah besar berdiri di atas tiang, sebagai rumah betang yang didiami oleh suku Ngaju, yang umum disebut golongan Dayak Biaju.

Suku Ngaju, Maayan dan Bukit diikat berdasarkan kesatuan politis, sebagai rakyat yang mendiami kerajaan dari suku-suku itu memeluk agama Islam sejak abad ke-16 terutama suku Ngaju dan Oloh masih tinggal di pesisir. Mata pencaharian mereka ini adalah dagang. Perdagangan mereka dapat bersifat antara daerah dalam kerajaan Banjarmasin, ataupun dengan luar daerah (luar negeri).

Sebagai kesatuan politis, suku-suku di kerajaan Banjarmasin disebut *orang Banjar*. Walau pun pengertian ini belum baku, namun kenyataan sejarah menunjukkan suatu kajian yang berlainan. Jika dikaji istilah *Banjar* maka Banjar baru berperan setelah Sultan Suriansyah resmi menjadikan Islam

⁵⁷ W.P. Groeneveld, *op.cit.*, hal. 106.

sebagai agama kerajaan. Karena itu sungguh rasional, jika dikatakan *Orang Banjar* identik dengan orang Islam atau orang Melayu. Hal ini berlaku pada suku Bukit di daerah Piani Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Mereka tidak mau lagi disebut sebagai suku Bukit jika sudah memeluk agama Islam, tetapi disebut sebagai orang melayu atau orang Banjar. Orang Melayu adalah penduduk pesisir, yang mendukung pendirian kerajaan Banjarmasin dengan “*mendaulat*” Pangeran Samudera yang kemudian bergelar Sultan Suriansyah. Pada masa itu, dibawah pimpinan Patih Masih. Patih ini Penasihat utama Sultan Suriansyah.

Dalam membahas politik perdagangan kerajaan Banjar pada abad ke-17, harus ditelusuri dari pertumbuhan kerajaan Banjarmasin sejak awal. Supremasi Demak dalam tahun 1526 adalah hal penting, mengingat peran Demak dalam penyebaran Islam. Dibawah Sultan Suriansyah batas kerajaan diperluas meliputi Tabalong, Batang Balangan, Alai dan Amandit, daerah-daerah ini semula dikuasai oleh Pangeran Tumenggung, paman Sultan Suriansyah yang telah menyerah kepadanya, dalam pertempuran di Sanghiang Gantung. Selama dekade pertama abad ke-17, secara praktis barat daya, tenggara dan timur Borneo membayar upeti pada kerajaan Banjarmasin.⁵⁸ Kontak politik dari pantai Jawa terutama meliputi upeti dan kerajaan Banjarmasin terhenti sejak keruntuhan pantai utara Jawa dan tumbuhnya kerajaan Banjarmasin. Awal abad ke-17, kerajaan Pajang sebagai pengganti kerajaan Demak, tidak menerima upeti lagi dari Banjarmasin.

Supremasi Jawa terhadap Banjarmasin, dilakukan lagi oleh Tuban pada tahun 1615. Pada tahun itu, Tuban berusaha menaklukkan Banjarmasin dengan bantuan Madura dan Surabaya, tetapi gagal karena mendapat perlawanan yang sengit. Nafsu untuk *hegemoni* atas Borneo dihilangkan oleh Sultan Agung Mataram (1613 – 1646), yang mengembangkan kekuasaan pemerintahan Jawa sesudah mengalahkan Jepara dan Gresik (1610), Tuban (1619), Madura (1624) dan Surabaya (1625).⁵⁹ Walaupun demikian, ternyata pada tahun 1622 Mataram kembali merencanakan program penjajahannya. Nafsu penjajahan yang dimunculkan Mataram itu, bukan saja atas pelabuhan-pelabuhan pantai utara Jawa, tetapi juga kerajaan sebelah selatan, barat daya dan tenggara Borneo, dan Sultan Agung menegaskan kekuasaannya atas Sukadana tahun 1622.

Seiring dengan hal itu, Panembahan mengklaim Sambas, Lawei, Sukadana, Kotawaringin, Pambuang, Sampit, Mendawai, Kahayan Hilir dan Hulu, Kutai, Pasir, Pulau Laut, Satui, Asam-asam, Kintap dan Sawarangan sebagai vazal dari kerajaan Banjarmasin, hal ini terjadi pada tahun 1636.

Klaim panembahan atas daerah-daerah tersebut, karena merasa telah memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi serbuan dari kerajaan lain, utamanya dari pulau Jawa. Kekuasaan tersebut, terletak pada aspek militer atau angkatan perang yang cukup banyak dan ditunjang aspek ekonomi yang mulai maju di bidang perdagangan. Sejak tahun 1631 Banjarmasin bersiap-siap menghadapi serangan Mataram secara besar-besaran, tetapi karena kekurangan logistik, maka rencana serangan dari Mataram sudah tidak ada lagi. Menurut Goh Yoon Pong⁶⁰ sesudah tahun 1637 terjadi migrasi dari Jawa secara besar-besaran sebagai akibat dari korban agresi politik Sultan Agung. Kedatangan imigran dari Jawa ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dari sebelumnya, dan dapat dikatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan Borneo menjadi pusat difusi kebudayaan Jawa.

Disamping menghadapi rencana serbuan-serbuan dari Mataram, kerajaan Banjarmasin juga harus menghadapi kekuatan Belanda. Perkenalan pertama orang Banjar dengan Belanda terjadi ketika beberapa pedagang Banjar melakukan aktivitas perdagangan di Banten dalam tahun 1596. Akibat sikap Belanda yang sombong menyebabkan mereka tidak memperoleh lada di Banten tersebut. Atau dengan kata lain para pedagang di Banten tidak mau menjual lada kepada para pedagang Belanda. Sementara itu di pelabuhan Banten berlabuh dua buah jung dari kerajaan Banjarmasin yang dibawa

⁵⁸ Goh Yoon Pong, *Trade and Politics in Bandjermasin 1700-1747*, Disertation University of London, 1969, hal. 32.

⁵⁹ Goh Yoon Pong, *ibid.*, hal. 33..

pedagang-pedagang Banjar. Dua jung tersebut memuat lada yang merupakan “*dagangan primadona*” kerajaan Banjarmasin pada abad ke-17. Karena tidak memperoleh lada di Banten, maka Belanda merampok lada dari dua buah jung tersebut. Peristiwa ini, kesan awal orang Banjar terhadap Belanda, sebagai kesan yang buruk. Bagi Belanda sendiri, pertemuan dengan orang Banjar tersebut menambah informasi tentang asal-usul datangnya lada itu, sehingga timbul keinginan untuk mengetahui daerah Banjarmasin. Untuk itu, Belanda mengirim sebuah ekspedisi ke Banjarmasin pada tanggal 17 Juli 1607 dipimpin Koopman Gillis Michielzoon. Utusan dan seluruh anggotanya diajak ke darat, dan kemudian seluruhnya dibunuh, serta harta benda dan kapalnya dirampas.⁶¹

Peristiwa pembantaian terhadap utusan Belanda dengan anggotanya di Banjarmasin itu, menyebabkan orang Belanda hingga tahun 1747, tidak berhasil tinggal lama di Banjarmasin dan dengan demikian terjamlah kemerdekaan kerajaan Banjarmasin tersebut.

Dalam tahun 1612 secara mengejutkan armada Belanda tiba di Banjarmasin rupanya suatu armada yang disiapkan untuk membalas atas terbunuhnya ekspedisi Gillis Michielzoon tahun 1607. Armada ini menyerang Banjarmasin dari arah pulau Kembang, menembaki Kuyin, ibukota kerajaan Banjarmasin. Penyerangan ini menghancurkan Banjar lama atau Kampung Kraton dan sekitarnya, merupakan istana Sultan Banjarmasin, karena itu Sultan Mustain Billah raja Banjarmasin ke-4, bergelar Marhum penembahan, memindahkan ibukota kerajaan Banjarmasin, dari Kuyin yang hancur ke Kayu Tangi atau Telok Selong, Martapura.⁶²

Meskipun ibukota kerajaan pindah ke Kayu Tangi, namun aktivitas perdagangan tetap ramai, di pelabuhan Banjarmasin. Hubungan dagang dengan bangsa asing tetap berjalan terutama dengan bangsa Inggris. Tahun 1615 Casirian David telah mendirikan facktory di Banjarmasin. Hubungan dagang dengan Belanda terputus, tetapi diteruskan dengan perantaraan orang-orang Cina. Selain orang Inggris sebagai pedagang, juga telah menetap di Banjarmasin pedagang Denmark, yang semuanya sangat ditakuti Belanda, karena menghancurkan perdagangannya.

Tahun 1626, produksi lada Banjar sangat meningkat, sehingga VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*)⁶³ berusaha untuk memperoleh monopoli lada, dan berusaha menghilangkan kejadian tahun 1612 penyerbuan Belanda terhadap kerajaan Banjar. Belanda meminta maaf atas perbuatannya merampok kapal kerajaan Banjar yang dalam pelayaran perdagangan ke Brunai 4 Juli tahun 1626. Tetapi meskipun kesalahan dalam pertikaian antara kedua bangsa ini telah hapus, kontrak dagang antara kedua negara belum dapat diwujudkan, karena kapal-kapal Banjar diarahkan menekan harga Belanda, perdagangan kerajaan Banjar diarahkan ke Cochin Cina dan Makassar sehingga Belanda merasa dirugikan akibat perpindahan route dagang kerajaan Banjar itu.

Ketika Demak jatuh ke bawah Pajang dan kemudian ke bawah Mataram, Kerajaan Banjar merasa terganggu karena Mataram berusaha untuk menyerbu Banjar. Lebih-lebih setelah Surabaya jatuh tahun 1625 keinginan Mataram menguasai Banjar pada tahun 1629 bertambah besar. Menguasai Banjarmasin berarti menguasai perdagangan lada, dan cara ini merupakan usaha Mataram tahun 1629 terhadap Batavia karena Mataram tidak memperoleh armada laut yang cukup kuat, sedangkan jung-jung Banjar cukup mampu menguasai, itulah pertimbangan Mataram untuk menguasai Banjarmasin.

Abad ke-17, abad perkembangan kerajaan Banjarmasin sebagai negara Maritim, negara laut, akibat dari perpindahan route perdagangan, melalui Makassar, Banjarmasin, Patani, Cina atau

⁶⁰ Goh Yoon Pong, *ibid.*, hal. 34.

⁶¹ J.C. Noorlander, *Banjarmasin en de Compagnie in de Tweede Helft der 18 de Eeuw*, N. Dubbeldeman, Leiden, 1935, hal. 5.

⁶² Goh Yoon Pong, *op.cit.*, hal. 36.

⁶³ Pada tanggal 20 Maret 1602 didirikan VOC, gabungan semua maskapai-maskapai dagang Belanda. Maskapai dagang disebut juga *compagnie*; dari kata inilah sebutan Kompeni untuk VOC yang populer di Indonesia. Status VOC adalah Badan Perdagangan, bukan pemerintah atau kekuasaan. Namun inilah awal dari kolonisasi (pemerintah) Belanda atas wilayah yang kemudian disebut Indonesia. Kolonisasi di Indonesia dilakukan oleh badan VOC, negara Belanda (Bataafse Republik dan kemudian kerajaan) dan Kerajaan Inggris.

Makassar terus ke Banten dan India.⁶⁴ Selanjutnya B. Schrieke⁶⁵ menjelaskan, Banjarmasin sebagai kerajaan dagang menggantikan kedudukan Gresik, setelah bandar-bandar di pantai utara Jawa dimusnahkan Sultan Agung Mataram. Schrieke sependapat dengan Goh Yoon Pong, bahwa semaraknya pelabuhan atau bandar di Banjarmasin disebabkan bantuan imigran-imigran Jawa yang menjadikan Banjarmasin sebagai pusat modal dan perkapalan mereka. Disamping lada sebagai ekspor andalan saat itu, juga pembuat jung-jung yang amat diperlukan bagi perdagangan dan pelayaran interinsuler.⁶⁶

Dalam perkembangan perdagangan abad ke-17 ini, golongan bangsawan menguasai seluruh perdagangan karena kekuasaan mereka dalam bidang politik dan pengusaha hak apanase yang menghasilkan komoditi ekspor saat itu. Di daerah pedalaman terdapat perkebunan lada yang dikuasai kaum bangsawan seperti di daerah Negara, Alai, Tabalong, sehingga Dijk⁶⁷ menyebut Pangeran Anom atau Pangeran Suryanata sebagai : "*Koning van het pepergebergte*" atau "*raja dari pegunungan lada*".

Kekuasaan para bangsawan ini sangat besar, karena mereka juga mempunyai pasukan sendiri dan budak-budak yang dipersenjatai. Kekuasaan pasar dan perdagangan, terletak pada wewenang syahbandar yang biasanya dijabat oleh orang asing. Dalam tahun 1625, jabatan syahbandar ini dijabat orang Gujarat Goja Babouw dengan gelar Ratna Diraja. Syahbandar memiliki wewenang dalam bidang perdagangan dan monopoli penjualan dan pembelian bangsa asing sangat tergantung padanya.

Kompeni Belanda berusaha untuk memperoleh monopoli dengan Kerajaan Banjar, usaha ini untuk menekan perdagangan Banjar yang sampai ke Cochin-Cina. Tetapi ketika wakil Kompeni Belanda G. Corszoon tiba di Banjarmasin pada bulan Juli 1633, ternyata monopoli itu telah diberikan kepada Orang Makassar. Di sini terlihat siasat Sultan bahwa kedatangan Kompeni Belanda hanya digunakan sebagai tameng dari serbuan Mataram semata. Sultan tetap berprinsip bahwa perdagangan harus bebas. Untuk mengantisipasi sikap Sultan ini, Kompeni Belanda memamerkan armadanya dengan mendatangkan 6 buah kapal dalam bulan Januari 1634 tetapi sungai penuh dengan penghalang berupa batang kayu besar sehingga sulit masuk ke Banjarmasin, dan Sultan telah siap menghadapinya dengan 3.000 orang pasukan. Pertemuan antara Sultan dengan Pool pimpinan armada Belanda, bahwa Belanda akan diberi monopoli asal Belanda bersedia menjamin keamanan pelayaran Orang Banjar terhadap serangan orang Jawa dan Makassar.

Perjanjian selanjutnya baru disepakati pada 4 September 1635. Sultan diwakili oleh Syahbandar Ratna Diraja Goja Babouw dan pertemuan diadakan di Batavia. Inilah kontrak dagang pertama yang diadakan Kerajaan Banjar dengan Kompeni Belanda. Kompeni Belanda diwakili oleh : Hendrik Brouwer, Anthonie van Diemen, Jan van der Burgh, Steven Barentszoon. Dalam perjanjian antara lain disebutkan :

- a. Banjarmasin tak akan menjual atau mengeksport ladanya selama di Banjarmasin masih ada orang-orang VOC ataupun kapal-kapalnya.
- b. Peminjaman uang sejumlah 3.000 real kepada Sultan yang akan dibayar kembali dengan lada seharga 5 real sepikulnya.
- c. Pinjaman ini yang dibelikan kepada picins dan barang-barang lainnya atas nama Sultan boleh diangkut tanpa bea oleh kapal-kapal VOC.

Pada awal abad-17, perdagangan di Banjarmasin dimonopoli orang-orang Cina. Besarnya volume perdagangan lada yang diangkut ke Cina, merupakan dorongan peningkatan penanaman lada. Jung-jung Cina mengangkat ke Banjarmasin barang-barang porselen, yang sangat laku di Banjarmasin sehingga rata-rata 12 buah jung Cina tiap tahun datang ke Banjarmasin. Pengaruh golongan Cina

⁶⁴ B.O. Schrieke, *Indonesian Archipelago*, Part One, The Hague, 1955, hal. 67.

⁶⁵ B.O. Schrieke, *ibid.*, hal. 30.

⁶⁶ Willy, *The Early Relation of England with Borneo to 1805*, Bern, 1922, hal. 100.

⁶⁷ L.C.D van Dijk, *Neerlands Vroegste Betrekkingen met Borneo en Solo Archipel, Cambodja, Siam en Cochin-Cina*, Amsterdam, 1862, hal. 48.

sangat besar dan menentukan perkembangan politik kerajaan Banjar. Bahkan Sultan, sering menggunakan golongan Cina untuk menghadapi lawan politik dalam negeri, maupun menghadapi politik perdagangan luar negeri.⁶⁸

Pesatnya perdagangan di Banjarmasin, mendatangkan dan menghasilkan kekayaan yang berlimpah ruah. John Andreas Paravicini utusan yang dikirim VOC untuk audiensi dengan Sultan Banjarmasin saat itu menulis laporannya tentang kraton Sultan di Kayu Tangi :

".....mula-mula barisan tombak berlapis perak, dibelakangnya barisan tombak berlapis emas. Anggota penyambut mengiringi saya dan tiba dibahagian pertama kraton, dengan diiringi dentuman meriam dan musik yang merdu. Kemudian diiringi lagi oleh pengawal mereah bersenjatakan perisai dan pedang. Setelah tiba dibahagian kedua kraton, disambut musik yang merdu serta diterima oleh pengawal yang lebih besar, dan diantarkan oleh pasukan pengawal biru kebahagian kraton yang merupakan ruang menghadap. Tidaklah dapat dilukiskan keindahan yang dipamerkan dalam upacara ini. Ruang menghadap yang dinding-dinding dan lantai-lantainya ditutup dengan permadani keemasan, juga piring-piring mangkok hingga tempat ludah dari emas. Tempat sirih dan bousette dari emas yang dihiasi yang tak ada bandingnya. Barisan pengawal pribadi Sultan. Selir-selir Sultan berhias emas intan yang mahal sekali, bangku indah yang tak terbanding, tempat pangeran-pangeran yang indah duduk, tempat duduk para pembesar kerajaan. Banyaknya alat kerajaan, pembawa senjata-senjata kerajaan dan lambang kerajaan, semuanya itu ditata, dihias dengan berlian yang mahal dan dihias dengan emas, dan akhirnya mahkota kerajaan Banjar yang terletak di samping Sultan, di atas bantal-bantal beledru kuning yang dihiasi dengan rumbai-rumbai hingga membuat seluruhnya suatu pemandangan yang mengagumkan di dunia."⁶⁹

Dalam abad ke-17, jenis perdagangan adalah lada. Kerajaan Aceh misalnya, menguasai daerah lada di Sumatera Utara dan Sumatera Barat hingga Bengkulu dan sebagian besar pantai barat Semenanjung Malaka. Banten menghasilkan lada sendiri, kesultanan Petani di Pantai Timur Malaka juga berupaya menghasilkan tanaman lada, yang pada saat itu sangat laku di pasaran di kawasan Nusantara, yang dibeli oleh pedagang-pedagang Jawa, Cina dan Eropa.⁷⁰ Demikian halnya dengan kesultanan Banjarmasin, mengandalkan lada sebagai komoditi ekspor. hal ini ditunjang dengan pemakaian dan pemanfaatan lada dunia, yang dalam abad ini sangat luar biasa di Eropa. Karena itu pula, perdagangan lada sangat mempengaruhi perkembangan politik kesultanan Banjar. Pokok pangkal pertikaian antar-keluarga kraton dan perebutan kekuasaan, pertikaian menghadapi Belanda semuanya bersumber dari sengketa penghasilan dari perkembangan perdagangan ini. Karena itu, perdagangan lada, disamping sumber kemakmuran dan kekayaan, juga menjadi sebab-musabab pertikaian dan keruntuhan pula.

Jalur perdagangan kesultanan Banjarmasin sampai ke Cochin Cina, disamping perdagangan di seluruh Nusantara. Para pedagang yang ikut meramaikan perdagangan di kesultanan Banjarmasin terdiri dari : orang-orang Cina, Siam, Johor, Jawa, Palembang, Portugis, Inggris dan Belanda. Jenis-jenis bahan perdagangan yang diperdagangkan selain lada antara lain : emas, intan, cengkeh dan pala, mutiara, kamfer, bezoin, drakendoed, poreo, lilin, barang anyaman. Sedangkan barang-barang impor berupa : batu agiat merah, gelang, cincin, tembaga, batu karang, porselen, beras, candu, garam, gula, asam, kain dan pakaian.

⁶⁸ E.B. Kielstra, *De Ondergang v/h Banjarmasinsche Rijk*, Indisch Gids, 1892, hal. 133-134.

⁶⁹ M.Idwar Saleh, *Banjarmasin, Selayang Pandang Mengenai Bangkitnya Kerajaan Banjarmasin, Posisi, Fungsi dan Artinya Dalam Sejarah Indonesia Dalam Abad ke-17*, Balai Pendidikan Guru, Bandung, 1958, hal. 55.

⁷⁰ Prajudi Atmosudirdjo, *Sejarah Ekonomi Indonesia Dari Segi Sosiologi Sampai Akhir Abad XIX*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 64-65.

Diantara para pedagang tersebut, nampak sekali ketamakan orang-orang Belanda, yang ingin selalu monopoli perdagangan, dengan cara-cara persaingan yang tidak sehat, sehingga persaingan dagang itu selalu diakhiri dengan permusuhan dan pemusnahan loji-loji, kapal-kapal seperti yang terjadi tahun 1638, 1694 dan 1707 terhadap loji-loji dan kapal-kapal yang dimiliki Belanda, Portugis dan Inggris. Persaingan dagang sangat ketat, karena selama abad ke-17 perdagangan bebas merupakan politik kerajaan yang dipegang teguh. Campur tangan kerajaan boleh dibilang tidak terlalu ketat terhadap dunia perdagangan, namun peranan syahbandar, sangat menentukan terhadap maju mundurnya perdagangan di pelabuhan, khususnya di kesultanan Banjarmasin.

Mendekati tahun 1628, hasil lada yang diproduksi kesultanan Banjarmasin terus meningkat, sehingga pada saat itu Banjarmasin penghasil lada terbesar di Indonesia bagian tengah. Selain orang-orang Cina, lada diangkut pula ke Jepara, Makassar dan Batavia, yang merupakan daerah-daerah pemasaran lada.

Ketika VOC menurunkan harga lada, pedagang Banjar memindahkan perdagangannya ke Cochin dan menyebabkan perdagangan kontinental menjadi ramai. Keberanian VOC menurunkan harga lada, seiring pula dengan kekuasaannya di pulau Jawa. Kompeni dagang Belanda ini, berupaya menjalankan taktik-taktik perdagangan, dan sedikit demi sedikit ikut pula mencampuri urusan-urusan istana. Hal ini terbukti pada tahun 1641, Malaka jatuh ke tangan VOC, yang sebelumnya dikuasai Portugis. VOC yang dimiliki oleh pedagang-pedagang Belanda ini, bersaing secara kotor dan berebut kekuasaan dengan sesama bangsa Eropa sendiri.

Jatuhnya Malaka, menyebabkan terjadinya perpindahan pusat perdagangan ke arah Timur dengan pusat perdagangan Makassar, dan Makassar sebagai satu-satunya pusat perdagangan bebas di luar pengaruh VOC. Dan Banjarmasin sebagai penghasil lada terbesar merupakan daerah yang dapat melayani perdagangan lada dunia secara besar. Karena pesatnya dan meningkatnya permintaan lada dunia, maka tanah-tanah apanase umumnya ditanami lada, dan perhatian pemilik apanase memusatkan pada perkebunan lada, dan hal ini mengakibatkan produksi pertanian (padi) menjadi menurun, sehingga tentu saja terjadi ketidakseimbangan antara produksi lada dengan produksi beras. Konsekuensinya, maka kesultanan Banjarmasin kekurangan beras, sehingga rakyat tergantung pada pemasukan beras dari luar, terutama dari Kotawaringin, Jawa dan Makassar. Tahun 1665 beras masuk ke kesultanan Banjarmasin dengan berbagai kualitas. Harga beras yang paling putih dengan kualitas yang tinggi, seharga 9 sampai 10 ringgit sepikul.

Transaksi jual beli menggunakan mata uang. Untuk pembelian lada, emas dan hasil lainnya dipergunakan mata uang real Mexico, tetapi orang Banjar juga menggunakan mata uang real Maluku yang dianggap baik mutunya. Mata uang Cina Picins, dari bahan timah sangat umum dipakai di dalam wilayah kesultanan Banjarmasin. Harga valuta asing pada tahun 1663 di Banjarmasin untuk 1 ringgit, dengan kadar perak lebih banyak dari real berharga 12.500 picins, sedangkan sebelumnya 30.000 picins. Pemakaian mata uang ringgit dipopulerkan oleh Opperkoopman Soop, ketika berada di kesultanan Banjarmasin - Kayu Tangi, Martapura tahun 1636.⁷¹ Pada tahun 1663 harga emas se-tail sama dengan 16 ringgit. Lada berharga 16 ringgit untuk 180 gantang. Selain itu pula, kain-kain dari India dan batik Coromandel, sangat terkenal dan paling laku di Banjarmasin. Perdagangan kain, mula-mula dipegang oleh Portugis, tetapi setelah Malaka jatuh kepada VOC tahun 1641, maka perdagangan kain dipegang VOC dan saat itu dapat dijadikan sebagai alat penukar.

Dengan demikian perdagangan lada pada abad ke-17, sangat mewarnai corak tumbuh dan berkembangnya kesultanan Banjarmasin. Orang Banjar yang sebagian besar pada mulanya bertani dan bercocok tanam padi, mengubah usahanya dengan berkebun lada, terutama yang tinggal di daerah-daerah yang dalamnya potensial untuk tanaman lada, seperti Tabanio, Pleihari, Pengaron, Alai, Buntok

⁷¹ B.O. Schrieke, *op.cit.*, hal. 68..

dan sebagainya. Petani perkebunan ini menjualnya kepada pedagang-pedagang Banjar lainnya, yang bertugas sebagai "*pambalantikan*" atau makelar (agen pembelian). Agen-agen ini, menjualnya ke pelbagai pedagang asing lainnya. Walau demikian, memang ada saja para pedagang asing yang langsung membeli kepada petani perkebunan. Karena itu pula, perdagangan barter, masih berlaku, sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Nilai intrinsik mata uang, lebih dihargai dan diterima, daripada nilai nominalnya. Atau setidaknya, nilai nominal suatu mata uang harus sama dengan nilai intrinsiknya.

Yang harus digarisbawahi adalah pengertian petani perkebunan. Petani perkebunan di kesultanan Banjar, sebagian besar adalah para bangsawan yang memiliki tanah apanase yang cukup luas. Karena itu, profil kefeodalan Banjarmasin diwarnai oleh kepemilikan terhadap tanah apanase, yang menghasilkan kebun-kebun lada, dan pada gilirannya mereka ini juga pedagang-pedagan yang menjual ladanya kepada pedagang asing. Kenyataan ini, merupakan khas feodalisme Melayu, yang sering memiliki darah bangsawan, punya tanah apanase yang luas, dan sebagian pedagang. Justru ini hal yang menyebabkan terjadinya persaingan dan pertikaian antar bangsawan, yang "*seketurunan*" itu. Persaingan tidak hanya masalah tahta tetapi juga harta kekayaan, utamanya masalah-masalah perdagangan lada.

1. Politik Perdagangan Menghadapi Orang Asing

Pada akhir abad ke-17 daerah Banjar mulai dikenal secara umum sebagai pusat perdagangan. Baik pada masa kerajaan maupun setelah diperintah secara langsung oleh pemerintah Hindia Belanda. Bertahannya perdagangan selama berabad-abad itu direncanakan potensi wilayah itu yang sifatnya simbiotis, daerah pedalaman sebagai penghasil yang terus menerus memasok daerah pesisir yang berfungsi sebagai pusat perdagangan. Mula-mula merupakan perdagangan lokal, kemudian menyebar ke bagian pulau-pulau yang lain di wilayah Nusantara, produksi daerah pedalaman dan perdagangan di pesisir menjadi kian besar ketika orang-orang barat yang merupakan konsumen besar mulai mengarahkan pandangannya ke arah Banjar. Pola organisasi, penentuan jenis tanaman senantiasa berubah selama kurun waktu 1700-1900-an. Tetapi semua jenis komoditi perdagangan itu sebagai keseluruhan tetap merupakan dasar utama perekonomian daerah Banjar.

Tulisan tentang daerah Banjar yang mengambil pokok pembicaraan tentang kegiatan ekonominya bukanlah hal yang baru. J.T. Lindblad misalnya secara panjang lebar memaparkannya beserta daerah yang sekarang termasuk Kalimantan Timur. Uraianya terutama membicarakan kondisi perekonomian di daerah Banjar setelah berakhirnya kekuasaan raja-raja Banjar. Sedang mengenai keadaan ekonomi sebelum masa itu dengan panjang lebar pula telah dituliskan oleh Noorlander dan Goh Yoon Pong. Penulis pertama banyak bercerita tentang segala aktivitas orang-orang Belanda selama masa pasang surut antara orang-orang VOC dengan para penguasa di kerajaan Banjar digambarkan dengan cukup jelas. Sedangkan penulis kedua memusatkan perhatiannya pada perdagangan lada di daerah kerajaan Banjar. Diuraikan tentang hubungan perdagangan antar bangsa yang terjadi di pelabuhan-pelabuhan Banjar.

Dengan dasar pada karya-karya yang terdahulu, mengenai aktivitas perdagangan di daerah Banjar, selama kurun waktu dua abad lebih sedikit. Bagaimana bentuk maupun masa sesudahnya. Siapa pelaku-pelaku perdagangan selama kurun waktu itu. Tentu saja dalam hal ini juga menyangkut mengenai jenis komoditi perdagangan apa saja yang mengisi kegiatan perdagangan selama waktu yang cukup lama itu. Persoalan-persoalan itu secara berturut-turut akan disajikan dalam tulisan berikut.

Majunya perdagangan Banjar pada abad ke-17 tentunya membawa perubahan bagi kesultanan Banjarmasin. Perubahan dalam bidang ekonomi, digambarkan dengan kemakmuran kesultanan Banjarmasin dengan kemegahan istana serta perangkat-perangkatnya, dan dikenalnya mata uang kian

meluas telah mendorong iklim usaha dan produksi yang beraneka ragam. Produksi lada, rotan dan damar semakin pesat guna memenuhi permintaan pasar. Akibatnya menggiatkan para pedagang asing, karena itu perlu pula ditelusuri, bagaimana politik perdagangan kesultanan Banjarmasin dalam menghadapi bangsa asing. Mataram yang meluaskan wilayah kekuasaannya dan menaklukkan pantai utara Jawa, tahun 1625 menaklukkan Surabaya. Selain itu juga, menaklukkan Sukadana 1625, sehingga kesultanan Banjarmasin menaruh "*prasangka*" akan diserang oleh Mataram. Untuk itu kesultanan Banjarmasin mengirim utusan ke Batavia, untuk merundingkan bantuan VOC, dalam rangka siap siaga menghadapi serbuan Mataram. Situasi seperti ini yang selalu diinginkan VOC, agar memperoleh kesempatan monopoli lada.

Bulan Juli 1633 G. Corszoon utusan VOC tiba di Banjarmasin, dan berupaya membujuk Sultan agar memberikan hak monopoli kepada VOC, namun Sultan menolak, karena hak monopoli telah diberikan kepada Makassar. Sultan sebetulnya hanya menjalankan taktik, agar kapal VOC menjadi perisai bagi kesultanan Banjarmasin, dengan tujuan Mataram akan gentar dan berfikir dua kali untuk menyerang Banjarmasin. VOC yang berminat terhadap monopoli lada, terus berupaya mencari jalan, agar monopoli lada di Banjarmasin dapat dikuasainya. Dalam usaha memperoleh lada itu, VOC menjalankan taktik demonstrasi kekuatan dengan mengirimkan 6 buah kapalnya, pada bulan Januari 1634 kapal-kapal itu tiba di pelabuhan Banjarmasin. Usaha VOC untuk memasuki sungai kembali menemui kegagalan, karena muara sungai Kuyin penuh dengan cerucuk (penghalan), sehingga kapal-kapal VOC tidak bisa merapat ke pelabuhan. Dan karena itu kampung Muara Kuyin itu disebut Kuyin Cerucuk. Kata Kuyin diambil dari bahasa Oloh Ngaju.

Kontrak dagang pertama baru berhasil dilakukan VOC setelah mendapatkan tuan syahbandar Ratna Diraja Goja Babouw tanggal 4 September 1635. Isi kontrak itu, antara lain, bahwa selain mengenai pembelian lada dan tentang bea cukai, VOC juga akan membantu kesultanan Banjarmasin untuk menaklukkan Pasir, dan melindunginya terhadap serangan Mataram. Namun kedatangan kapal Pearl Inggris di Banjarmasin, Tewseling dan Gregory tanggal 17 Juni 1635 menambah masalah baru, sebab Inggris juga meminta diperbolehkan secara resmi, untuk ikut berdagang dan mendirikan loji, yang bagi VOC tentunya membahayakan eksistensinya di Banjarmasin. Sultan memberi izin pada VOC membangun loji, sedangkan terhadap Inggris Sultan sangat marah. Hal ini disebabkan Inggris telah menghasut orang Makassar, agar menyerang Banjarmasin. Penolakan Sultan atas Inggris tidak seluruhnya disetujui kerabat istana Banjarmasin, sehingga menimbulkan klik-klik istana. Sebagian anggota Dewan Mahkota memihak Inggris seperti Pangeran Marta Saharyu, Raja Kotawaringin dan Raja Sukadana. Klik pro Inggris ini bertambah besar, hasrat perdagangan bebas, yang menyebabkan munculnya *Contract Craemer Opperkoopman* VOC memaksakan agar kontrak tahun 1635 diberlakukan.

Pelayaran perdagangan Banjar ke Batavia diberi VOC surat pas, sedangkan ke Cochin Cina tidak diberikan meskipun Sultan memintanya. Keadaan ini menunjukkan sikap VOC telah memaksakan monopoli perdagangannya, hingga tidak mengizinkan bagi pedagang Jawa, Cina, Melayu, Makassar untuk menjalankan perdagangannya dengan kesultanan Banjarmasin. Ketika *Contract Craemer* menolak permintaan Sultan untuk mengirimkan lada ke Makassar, pecahlah perang anti VOC, pada tahun 1683. Sebanyak 108 orang Belanda, 21 orang Jepang dibunuh, dan loji VOC dibakar serta penghancuran terhadap kapal-kapal VOC. Peristiwa ini sangat merugikan VOC. Kerugian VOC ditaksir sebesar 160.000,41 real. Dalam hal ini hanya 6 orang Belanda di Martapura yang selamat, karena mau di-Islamkan secara paksa.⁷²

Besar kemungkinan, pembantaian terhadap orang-orang VOC dan Jepang tersebut, selain dilatarbelakangi faktor ekonomi (perdagangan) juga faktor perbedaan agama dan adat-istiadat orang-

⁷² M. Idwar Saleh, *op.cit.*, hal. 70.

orang Belanda yang tidak beradaptasi dengan adat-istiadat di Banjarmasin. Apalagi, ditambah dengan perilaku VOC yang selalu ingin monopoli atau “*kuluh*” dalam perdagangan lada.

Taktik yang dilakukan kesultanan Banjarmasin untuk melepaskan diri dari politik VOC, dan menghindari dari pedagang-pedagang Inggris serta Portugis, menyebabkan hubungan Banjarmasin dengan Mataram menjadi normal kembali. Karena taktik tersebut, sehaluan dengan sikap Mataram yang anti terhadap para pedagang asing, khususnya VOC.

Kejadian tahun 1638 sangat merendahkan martabat bangsa Belanda dan Belanda berusaha menghancurkan Kerajaan Banjar sebagai balas dendam terhadap pembantaian orang-orang Belanda tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan Belanda adalah menyebarkan surat kepada Raja-raja Nusantara yang selama ini bersahabat baik dengan Belanda. Surat yang ditujukan kepada Raja-raja Nusantara itu berbunyi, antara lain isinya :

Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia (*Raad van Indie*) dengan ini memberitahukan kepada Raja-Raja Nusantara, terutama di daerah-daerah VOC menjalankan perdagangan, bahwa :

- a. Antara VOC dan Kerajaan Banjar pada tahun 1653 telah diadakan suatu kontrak dagang.
- b. Kontrak itu menyatakan diberikannya monopoli lada kepada VOC dengan penetapan harga 5 real sepikul dan bea cukai 7% untuk Sultan. Di Martapura dibuat sebuah loji yang dengan orang-orang VOC beserta barang dagangannya dibawah perlindungan Sultan. VOC mengerahkan sebuah kapal perang untuk menjaga muara sungai Banjar terhadap serangan Mataram.
- c. Bahwa Sultan telah melakukan tindakan mengingkari kontrak 1635 itu dengan tindakan kekerasan pada tahun 1635 menghancurkan loji di Martapura serta membunuh orang-orang Belanda serta merampas milik VOC 100.000 real.
- d. Karena itu VOC akan membalas dengan segala kekuatannya dan minta bantuan kepada raja-raja Nusantara yang bersahabat dengan dia, bukan menghentikan bantuan senjata saja, melainkan diminta pula agar raja-raja Nusantara ini melarang rakyatnya berdagang ke Martapura, sebelum kota itu menjadi puing-puing dan hancur berantakan dan dinasti raja-raja musnah. Barulah sesudah itu VOC akan berdamai dengan rakyat Kerajaan Banjar.⁷³

Tindakan Kerajaan Banjar dengan cara yang spesifik ini untuk melepaskan diri dari segala ikatan monopoli, dilanjutkan dengan usaha mengajak Sultan Makassar bekerjasama menghancurkan perdagangan Belanda. Sultan mengirim utusan ke Sultan Makassar dipimpin oleh nakhoda Bahong.

Belanda sangat marah atas tindakan Kerajaan Banjar ini, dan membuat maklumat yang ditujukan kepada Raja-Raja Nusantara yang disebut insinuasii mengenai pembunuhan orang-orang Belanda oleh Raja Martapura. Kata-kata yang kasar dan kemarahan mendalam disebutkan dalam surat itu :

“...seperti pembunuh dan manusia binatang tetapi juga sebagai si kikir yang tak berperikemanusiaan dan perampok barang-barang milik orang asing.

Darah mereka terbunuh menangis di muka Tuhan....sehingga mereka tidak mungkin berdamai, kecuali Martapura hanya tinggal tumpukan-tumpukan puing dan Sultan yang terkutuk itu dan turunannya diusir atau dibunuh oleh rakyatnya sendiri.

Kepada pemimpin ekspedisi penghukum Banjarmasin diberikan instruksi cara menyiksa yang seteliti-telitinya dan perintah itu ditutup dengan kalimat : “*Tuhan melindungi perjalanan tuan dan memberikan kemenangan atas penghianat-penghianat jahat itu Amin*” Ekspedisi penghukuman atas Banjarmasin itu berupa blokade yang tak berarti dalam melakukan tugasnya. Mereka hanya menemukan dan menangkap 77 orang Banjar laki-laki dan perempuan yang tak mengerti persoalan politik dari perahu nelayan yang sedang berlayar. Orang-orang yang ditangkap inilah yang menerima

⁷³ M. Idwar Saleh. *ibid.*, hal. 134.

instruksi penyiksaan itu dengan siksaan yang paling keji tak berperikemanusiaan. Mereka disiksa dengan cara memotong kuping, tangan, mengerat-kerat hidung, mencungkil mata, seperti yang diinstruksikan Batavia. Setelah disiksa orang-orang ini dikirim ke darat, sehingga menimbulkan panik penduduk setempat.

Pada tahun 1683 itu pula Belanda mengirim ekspedisi yang kedua dengan tugas yang sama, tetapi juga gagal karena perlawanan Kerajaan Banjarmasin cukup kuat. Tragedi pembantaian terhadap orang-orang Belanda ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Saidullah atau Ratu Anom (1673-1642). Ancaman Belanda terhadap Banjarmasin, Kotawaringin dan Sukadana, hanya tinggal ancaman belaka, Belanda tidak mampu berbuat lebih banyak. Kemudian Belanda mengubah taktik untuk menutupi kealahannya dengan mengajukan tuntutan kepada Sultan sebesar 50.000 real sebagai ganti rugi atas tragedi tahun 1683 itu, namun ditolak Sultan. Karena beberapa cara yang dilakukan tidak berhasil, maka pada tahun 1640 Gubernur Jenderal van Diemen memerintahkan agar permusuhan dengan Kerajaan Banjar dihentikan.

Usaha Belanda mendekati Kerajaan Banjar dengan hanya menuntut 50.000 rela sebagai ganti rugi kejadian tahun 1683 serta akan melupakan apa yang terjadi, sama sekali tidak mendapat layanan dari Kerajaan Banjar, sehingga akhirnya Belanda mengalah agar kontrak dagang yang lebih menitik-beratkan pada keuntungan dagang dari pada lainnya, yang penting bagi Belanda hubungan dengan Kerajaan perlu dipulihkan agar lada kembali diperoleh. Lebih-lebih Belanda merasa khawatir dengan kehadiran Inggris di Banjarmasin, kalau Belanda tetap berpegang pada prinsip semula untuk menghukum Banjarmasin.

Sikap lunak Belanda inilah yang menyebabkan Belanda berhasil membuat kontrak dagang dengan Kerajaan Banjar, pada 18 Desember 1660. Kontrak dibuat dan ditandatangani oleh sultan sendiri yang saat itu dijabat oleh Pangeran Ratu (Penembahan Tapesana) dengan Dirk van Leur yang mewakili VOC Belanda. Dan mengadakan perundingan sehingga menghasilkan persetujuan itu masing-masing dilakukan oleh wakil-wakil dari kedua belah pihak. Kerajaan Banjar diwakili oleh duta Kerajaan Sara Duta Ponbanall Lasmita dan Trasaell, sedangkan pihak VOC diwakili oleh Joan Maetsuycker, Carell Martsinck, A.van Outschoors, Ns. Verburgh, Dirck Jansz, Steur, Pr. Marville dan kontrak ini dibuat di Batavia. Kontrak ini menghapuskan permusuhan antara kedua negara tahun 1638. Demikian pula tuntutan ganti rugi sebanyak 50.000 real terhadap Kerajaan Banjar dihapus. Sejak perjanjian itu VOC diperbolehkan kembali berdagang di Banjarmasin, tetapi bea cukai yang dulunya 7% diturunkan menjadi 5%.

Perjanjian ini kemudian diperbaharui lagi di ibu kota Kerajaan Banjar Martapura dan perundingan untuk mencapai persetujuan tersebut dilakukan pada tanggal 16 mei 1661. Sebagai wakil dari pihak Kerajaan Bnajar adalah Caertasaeta mewakili Pangeran Ratu dengan Koopman Evert Michielszoon sebagai wakil VOC.

Isi perjanjian adalah berikut :

- a. Semua lada Banjar harus dijual kepada VOC, boleh diangkut sendiri ke Batavia atau ke Malaka.
- b. Harga lada ditetapkan yaitu 180 gantang setail emas atau 16 real atau barang lain yang seharga dengan itu.
- c. VOC boleh memperdagangkan barang-barangnya, sehingga Martapura, baik dengan kapal maupun dengan mendirikan loji tak boleh ditempat lain.
- d. Untuk impor dan ekspor VOC harus membayar bea-cukai sebesar 5%.
- e. Bila orang-orang Belanda kedapatan melanggar hukum, raja Banjar tidak menghukumnya, tetapi harus menyerahkan si terdakwa kepada pemimpin loji VOC di Martapura.
- f. Bila pegawai atau budak-budak VOC melarikan diri, harus dipulangkan kembali kepada pemimpin VOC di Martapura.

g. Seluruh loji di Martapura dibawah perlindungan Sultan.⁷⁴

Dengan adanya perjanjian ini VOC kembali memainkan perannya dalam perdagangan lada dan menguasai perdagangan itu. Bahkan untuk penjualan kain bahan pakaian VOC juga telah menetapkan harga. Meskipun secara umum Sultan tidak menyetujui isi perjanjian ini tetapi karena pengaruh Pangeran Mangkubumi atau Pangeran Maes de Patty, Kontrak ini ditandatangani oleh Sultan. Pangeran Mangkubumi sangat besar pengaruhnya dalam Dewan Mahkota masa itu.

Meskipun tahun 1660-an merupakan tahun penuh pertentangan dalam kalangan keluarga istana, namun perdagangan tetap berperan dengan baik. Pada tahun 1661 datang utusan Johor dan Sukadana di Kerajaan Banjar. Utusan Johor menuntut pengembalian harta milik nakhoda Malaka Johor yang mati beberapa tahun sebelumnya, sedangkan utusan Sukadana melaporkan bahwa Sukadana kemudian menjadi daerah pegaruh dari Kerajaan Banjar (1638), begitupula raja-raja Mempawah Kotawaringin.

Perebutan kekuasaan abad ke- 17 menghasilkan kompromi, Pangeran Ratu tetap berkuasa di Martapura, sedangkan Pangeran Suryanata (Sultan Agung) berkuasa di Banjarmasin, tambang emas, hasil kebun lada dari daerah pedalaman dan cara ini mematikan perdagangan Pangeran Ratu saingannya. Sehubungan dengan ini Pangeran Suryanata mengirim dutanya ke Batavia Souta Nella dan Nala. Kepada VOC disampaikan surat Pangeran Suryanata yang isinya :

- a. Supaya VOC memanggil kembali orang-orangnya yang berada di Martapura dan menutup lojinya.
- b. Mengenai lada VOC tidak perlu khawatir, karena akan dikirim Sultan sendiri dengan kapal ke Batavia.
- a. Meminta agar isi kapal Sultan yang dirampas VOC sekembalinya dari Aceh diberikan kembali dengan perantaraan dutanya.
- b. Surat ini menyebutkan pula pemberian Sultan Agung (Pangeran Suryanata) kepada VOC sebanyak 2.000 gantang lada dan dua lembar tikar rotan.

Utusan yang membawa surat Pangeran Suryanata ini terjadi pada tahun 1665, dan hal ini berarti perjanjian yang dibuat tahun 1664 hanya merupakan kertas kosong belaka. Sikap Sultan Agung ini (Pangeran Suryanata) yang meminta VOC keluar dari Banjarmasin, diduga atas motivasi dari Mataram, agar Banjarmasin membuka front terbuka sikap anti VOC. Sikap ini diperlukan sebab kesultanan lainnya terutama Mataram mengalami kemunduran dalam bidang perdagangan akibat sepak terjang Belanda yang selalu memegang monopoli perdagangan.

Pada bulan Juli 1665 menurut laporan Residen Gerret Lemmes, tiba-tiba Pangeran Suryanata pergi ke daerah Negara untuk membeli lada secara monopoli dari rakyat penghasil lada dan menjualnya kepada pedagang Makassar, Inggeris, Portugis dan Cina. Sedangkan utusan VOC sama sekali tidak diberinya kesempatan memperoleh lada. Bahkan pelabuhan Banjarmasin dipenuhi dengan pedagang dari segala bangsa dan perdagangan dilakukan secara bebas. Untuk mempertahankan perdagangan bebas ini dan menghapus keinginan VOC untuk memperoleh monopoli, Pangeran Suryanata mengirim utusan ke Banten, meminta bantuan dan mengakui kekuasaan Banten atas Banjarmasin.

Sekitar tahun 1670-an terjadi perubahan besar di Indonesia Timur yang membahayakan bagi perdagangan bebas Banjarmasin, yaitu jatuhnya bandar internasional Makassar dibawah kontrol sesuai *Perjanjian Bongaya*, ancaman inilah yang menyebabkan Sultan Suryanata mengirimkan utusan utusannya ke Batavia untuk memperoleh monopoli senjata dan mesiu. Kemunduran Perdagangan di Indonesia Timur ini sebagai akibat dari taktik dan strategi Belanda yang selalu berusaha memperoleh monopoli perdagangan dengan menerapkan politik *Divide et impera*-nya. Diduga pula bahwa Sultan Banjarmasin memiliki pandangan, sebagai berikut :

⁷⁴ M. Idwar Saleh, *loc.cit.*

1. Hubungan dagang dengan Belanda, selalu diakhiri dengan peristiwa pembantaian dan permusuhan di kedua belah pihak.
2. Dalam setiap perjanjian kontrak dagang, VOC selalu ingin monopoli, dan tidak memberi peluang terciptanya perdagangan bebas.
3. Adat Istiadat orang-orang Belanda, bertentangan dengan adat istiadat orang Banjar, sehingga lambat laun akan timbul konflik budaya.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut, didasarkan atas kemungkinan dukungan dan kemufakatan Dewan Mahkota, khususnya yang anti VOC. Karena VOC tentu saja tidak berpangku tangan, dan terus menerus mencari peluang dan dukungan untuk bercokol di Banjarmasin.

Meskipun dalam hubungan dengan pedagang-pedagang asing terdapat berbagai konflik, namun perdagangan kesultanan Banjarmasin tidak macet. Pertengahan abad ke-17 Banjarmasin mengalami kemajuan dan kemakmuran yang pesat. Menurut Barra pada tahun 1662 ada 12 jung orang Melayu, Inggris, Portugis mengangkut lada dan emas ke Makassar. Pelabuhan Banjarmasin dipenuhi lebih dari 1000 perahu layar, baik perdagangan *interinsuler* maupun perdagangan *inter-kontinental*, karena kontrak perdagangan dengan VOC hanya merupakan kontrak kosong. Hal ini terjadi karena kesultanan Banjarmasin tidak terikat terhadap bangsa manapun juga. Ia mengacu kepada Perdagangan bebas. Semua bangsa boleh berdagang di Banjarmasin dan orang-orang Banjar akan bebas pula melakukan hubungan dagang dengan bangsa-bangsa lain. Tidak terikat kepada VOC-Belanda, EIC-Inggris atau Portugis. Kesultanan memberikan keleluasaan kepada pedagang (pengusaha) untuk berniaga, dan dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi kesultanan akan meningkat, asalkan sistem-sistem yang berlaku saat itu berfungsi. Karena itu dari hasil perdagangan inilah kesultanan Banjarmasin mengalami kemakmuran yang pesat, dan akibatnya muncul kemelut politik istana, pergeseran dan perebutan kekuasaan, namun walau begitu, dilihat dari luar, Kesultanan Banjarmasin tetap utuh.

a. Pedagang-pedagang Cina

Orang-orang Cina mendatangi daerah Banjar untuk keperluan memperoleh lada pada pertengahan pertama abad ke-tujuhbelas, setelah diusir oleh saingan mereka Belanda dan Inggris. Ketika itu mereka diberitahu tentang kemungkinan melakukan perdagangan lada di Banjar oleh orang-orang Portugis di Macao. Mereka kemudian datang dengan jung-jung mereka, setiap tahun secara teratur datang sebanyak empat sampai tigabelas buah dari pelabuhan Amoy, Kanton, Ningpo, dan Macao. Para nakhoda disambut dengan senang di Kayu Tangi dan Tatas oleh orang-orang Banjar, karena mereka membawa sejumlah barang kesukaan penduduk setempat. Berbagai macam barang terdiri dari sutera kasar dan halus, teh, kamper, garam, perkakas tembaga, barang-barang porselen dan lain sebagainya yang dapat ditukar dengan lada, emas, sarang burung dan lain-lain barang hasil daerah Banjar. Kedatangan mereka yang secara terus menerus membawa negeri Banjar masuk dalam lingkaran persinggahan para pedagang dari berbagai negara seperti Arab, Gujarat, disamping dari daerah-daerah tetangga seperti Jawa, Madura, Sulawesi, Lombok, Bali dan Sumbawa. Mereka berkumpul untuk saling mengadakan transaksi, namun komoditi dari Cina sangat menonjol peranannya. Pada permulaan abad ke-delapanbelas perdagangan jung menjadi begitu penting, bahwa sungai Barito dikenal pula dengan sungai Cina, sebab dipenuhi oleh jung-jung dari Cina.

Demikianlah musim dari penawaran lada di Banjar adalah pada permulaan Oktober sampai Maret pada setiap tahunnya, jung-jung itu tidak seperti umumnya pedagang-pedagang yang lain, mereka tiba pada akhir bulan Februari. Menurut perhitungan bahwa kedatangan mereka yang terlambat berarti hanya akan mendapat sisa-sisa dari lada yang tidak terjual. Namun ternyata pepatah "*yang datang pertama, dilayani pertama*" tidak berlaku di lingkungan orang-orang Banjar. Adalah hal biasa bagi orang-orang Banjar untuk menyimpan sebagian besar persediaan ladanya untuk para

pedagang jung. Mereka tidak hanya tertarik oleh barang dagangan Cina, tetapi juga oleh harga yang lebih tinggi yang ditawarkan. Misalnya pada tahun 1701 lada yang berasal dari Nigeria dijual kepada orang-orang Inggris dengan harga 1 dolar Spanyol untuk setiap 13 gantang, sedang kepada Cina seharga satu dolar Spanyol untuk setiap 9 gantang.

Padang-pedagang Inggris banyak yang menentang harga yang diberikan oleh orang-orang Cina, karena sangat merugikan mereka. Orang-orang Cina dapat menawarkan harga yang lebih tinggi karena mereka akan menaksir terlebih dahulu harga lada berdasarkan harga barang-barang Cina. Sedangkan pedagang-pedagang Inggris hanya dapat membayar lada dengan dolar Spanyol. Para pedagang Inggris akan membayar kontan semua lada yang dibelinya, sedang pedagang-pedagang jung jarang yang dapat membayar dengan kontan. Namun karena barangnya diminati penduduk setempat maka akan lebih mudah dan lebih banyak memperoleh lada.

Sesudah kekalahan orang-orang Banjar dalam perang-perang Inggris-Banjar pada Oktober 1701, orang-orang Cina kehilangan tempat dan hak mereka dalam pasar lada. Karena sebagian besar tindakan raja Banjar diatur oleh Inggris sebagai pemenang perang, maka diperintahkanlah semua rakyatnya untuk menjual ladanya kepada orang-orang di bawah pengawasan Inggris, yang mendirikan tempat penjagaan yang terletak di muara sungai Barito.

Dengan semakin berkurangnya jung yang mengunjungi Banjar membuat khawatir pada penguasa Inggris di sana. Untuk itulah maka kemudian mereka mengadakan perundingan dengan orang-orang Cina, yang pada intinya orang-orang Cina dijamin kemudahannya untuk berdagang dengan Banjar. Maka perdagangan barang dari berbagai negara di pelabuhan di pelabuhan itu kembali ramai. Pada tahun 1702 London mengatakan bahwa lebih mudah untuk mendapatkan barang-barang Cina di Banjar dari pada di Cina. Di pelabuhan ini calon pembeli dapat melihat terlebih dahulu barang yang akan dibeli, baru setelah kecocokan transaksi dilakukan. Hal ini mustahil dilakukan di Cina. Disamping orang-orang Cina menjual barangnya mereka juga banyak membeli barang-barang yang ditawarkan pedagang Inggris, seperti kain India, tembaga dan sebagainya. Sebelum pendirian permukiman Inggris di Banjar, pedagang-pedagang jung memperoleh barang-barang dari wilayah barat itu dari para pedagang Belanda di Batavia.

Hubungan komersial antara Inggris dan pedagang-pedagang jung di Banjar berakhir sesudah pengusiran orang-orang Inggris oleh orang-orang Banjar dalam perang Inggris-Banjar yang kedua tahun 1707. Setelah itu orang-orang Cina membenahi diri. Mereka dapat bebas kembali untuk mengadakan transaksi dengan para pedagang lada Banjar dan Biaju.

Jumlah orang-orang Cina yang berkumpul di daerah kerajaan makin hari makin besar. Mereka terdiri dari 2 golongan yakni pedagang-pedagang jung dan pedagang-pedagang menetap. Pedagang-pedagang jung hanya tinggal sementara di Tatas atau di tempat lain di daerah Banjar. Setelah selesai dengan aktivitas perdagangannya termasuk mengisi perbekalan kapalnya, mereka akan kembali berlayar ke Kanton, Amoy atau pelabuhan lainnya di Cina, baru kembali ke Banjar pada musim berikutnya. Sedang pedagang menetap, mulanya mereka juga seperti pedagang jung yang hanya tinggal sementara di Banjar, namun karena melihat kemungkinan untuk menjadikan Banjar sebagai rumah mereka yang kedua, maka kemudian mereka tinggal dan menetap. Beberapa diantara mereka membuat toko di kota atau pelabuhan, menjadi pedagang perantara antara pedagang jung dan pedagang Banjar. Terdapat sekitar 80 keluarga di Tatas dan Kayu Tangi sebelum Tahun 1708, jumlah mereka terus bertambah menjadi sekitar 200 keluarga sesudah periode itu. Secara berangsur-angsur beberapa diantara mereka dapat berkomunikasi dengan penduduk setempat dalam bahasa setempat. Mereka dengan mudah dapat berintegrasi, sehingga kemudian dapat bergerak bebas dimana mereka suka. Bahkan pimpinan mereka di Banjar, kapten Lim Kom Ko, sering diutus oleh para penguasa kerajaan Banjar untuk ikut mewakili dalam perundingan-perundingan dengan orang-orang Eropa.

b. VOC

Ketika J.van Michelen dan P.der Vesten berlayar ke Banjar untuk mencari lada pada tahun 1678, mendapat hasil yang jauh dari memuaskan. Oleh karena itu beberapa waktu perhatian orang-orang Belanda tidak tertuju ke daerah itu. Hubungan baru terjalin lagi pada tahun 1708 Lim Kim Ko, kapten Cina Banjar, datang ke Batavia sebagai utusan dari Sultan Suria Alam. Maksud kedatangannya itu adalah untuk menyampaikan kepada Pemerintah Pusat di Batavia bahwa mereka ingin kembali menjalin hubungan dagang dengan VOC.

Dalam Perundingan itu penguasa Batavia menghendaki dilaksanakannya perdagangan bebas antara orang-orang Banjar dan penduduk Batavia. Mereka mengizinkan orang-orang Banjar untuk mengirim lada mereka ke Batavia, dan juga memberikan kebebasan kepada orang-orang Cina untuk membawa lada ke Batavia, dengan harga rata-rata 5 dolar Spanyol untuk setiap pikul. Lancarnya perdagangan ini mengakibatkan bahwa Pemerintah Pusat di Batavia lebih senang mempercayakan pembelian lada kepada mereka dari pada kepada pegawai-pegawainya sendiri.

Pada Februari 1711, Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck mencabut kebijaksanaan yang telah dijalankan sebelumnya. Diputuskan bahwa kapal *The Peter and Paul* akan pergi ke Banjar untuk membeli lada dan emas. Beberapa alasan diajukan untuk melakukan perubahan yang besar ini. Pertama jumlah lada yang didapat dari pedagang-pedagang Cina dianggap kurang memuaskan. Pada Tahun 1709, 850,000 pon lada dikirim oleh pedagang-pedagang Cina, namun jumlah ini terus berkurang. Pada tahun berikutnya jumlah lada yang diperoleh oleh para pedagang Cina yang pada bulan Agustus 1710 meninggalkan Banjar dengan 13 buah jung kedua, harga lada tidak lagi 5 dolar setiap pikul, tetapi menjual 7-8 dolar.

Van Riebeeck melihat kenyataan bahwa Sultan Banjar ingin sekali memperbaharui hubungan Belanda-Banjar karena krisis politik yang sedang dialaminya. Untuk itu maka VOC harus mengambil kesempatan untuk memasuki pasar lada di Tatas dan Kayu Tangi, dan menghalangi Cina membeli banyak lada di sana. Selama periode 1700-1725 Pemerintah Pusat VOC di Belanda menambah permintaan ladanya untuk pasar di Eropa. Tetapi selama ini pemerintah di Batavia sukar untuk memenuhinya, maka hubungan baik dengan Banjar adalah merupakan kesempatan untuk menambah ladanya.

Pemerintah Pusat di Batavia menyadari adanya desas-desus bahwa orang-orang Inggris bermaksud untuk kembali berdagang di Banjar. Maka untuk menjaga kepentingannya di Banjar para penguasa VOC bekerja keras untuk menghalangi kehadirannya. Antara lain dengan memerintahkan kepada Gubernurnya di pantai timur Jawa untuk menghalau kapal milik orang-orang Inggris yang bermaksud mengangkut barang-barang seperti batu kapur, beras ke Banjar.

Pelayaran yang pertama dari VOC berhasil membawa sebanyak 826 $\frac{2}{3}$ pikul lada, jumlah itu berkurang menjadi 586 $\frac{1}{2}$ pikul pada tahun 1712. N.V.D. Bosch dan I. Indus, perusahaan yang mengelola *Peter and Paul* mengadakan pendekatan kepada Sultan Suria Alam, agar bersedia memberi mereka muatan lada untuk memenuhi kapalnya dengan harga 4 dolar per pikul. Dalam hal ini karena VOC telah memberikan bantuan kepada para penguasa Banjar untuk menumpas pemberontakan Biaju di Negara tahun 1711. Kurang dari satu bulan *Peter and Paul* telah berangkat dengan muatan lada penuh.

Sangat disayangkan, kunjungan Belanda yang kedua pada Agustus 1712 tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dengan harapan memperoleh lada yang lebih banyak berdasar persetujuan bersama 2 orang wakil Banjar R. Aria dan Tanu Kati, yang datang ke Batavia pada awal 1712, Pemerintah Pusat di Batavia menyediakan 10.000 dolar untuk perusahaan Bosch dan Paul, yang menggantikan Indus, dan dikirim *Luijtpol* dan *Jambl* untuk menyertai *Peter and Paul* dalam mengangkut lada. Namun ternyata perusahaan itu tidak segera dapat membeli lada seperti dilakukan oleh para pedagang Cina yang bisa membeli secara langsung dari orang-orang Banjar, dengan harga 6-7 real setiap pikul.

Akibatnya, hanya *Peter and Paul* yang bisa memperoleh muatan sebanyak 73.312 ½ pon atau 626 1/2 pikul.

Para penguasa Belanda yang kecewa dengan hasil yang tidak memadai itu tiba-tiba memutuskan untuk menghentikan pengiriman kapal-kapalnya ke Banjar. Sedang di Banjar, peperangan antara orang-orang Banjar dan Biaju terus berlangsung yang mengakibatkan turunnya produksi lada. Maka kemudian Sultan Aria Alam mengutus wakilnya untuk menyampaikan kepada Gubernur Jenderal C. van Zwoll, bahwa Sultan akan memberikan monopoli perdagangan lada kepada VOC, jika VOC bersedia untuk membantunya menghadapi orang-orang Biaju dan Bugis.

Pemerintah pusat di Batavia bersedia kembali mengadakan hubungan dagang dengan Banjar karena permintaan Pemerintah Pusat di Belanda semakin tidak dapat dipenuhi oleh Banten dan Jambi yang saat itu produksi ladanya sedang merosot. Demikianlah kemudian pada pertengahan 1727 Batavia kembali mengirim kapalnya dengan mendapatkan sebanyak 3.926 pikul. Ini adalah awal yang baik bagi perusahaan *Landsheer and Bround* dibandingkan perusahaan sebelumnya tahun 1727-1713. Pada tahun 1728 VOC mengirim 6 buah kapal yakni *Miderbeek*, *Wolphardijk*, *Vol*, *Readhuis*, *Olijftak*, dan *Doonink*, semua penuh dengan lada yang berjumlah 19785 pikul. Masih ditambah sebanyak 368.943 pon yang diangkut ke Batavia dengan kapal-kapal pedagang Banjar. Hal ini selain panen lada yang sedang baik, juga karena penguasa Banjar menekan para pedagang lada untuk menjual ladanya kepada orang-orang Belanda.

Untuk selanjutnya hubungan perdagangan lada antara Belanda dan Banjar selalu mengalami masa pasang surut. Tentu saja kondisi politik tidak bisa terlepas mempengaruhi kebijaksanaan dalam bidang ekonomi.

c. Pedagang-pedagang Inggeris

Sejak diusirnya pada 1707, orang-orang Inggeris mencoba datang kemabli ke Banjar pada tahun 1713. Mereka mengharap bahwa kurangnya persediaan lada dari Malabar bisa dipenuhi oleh Banjar. Mereka berusaha meyakinkan Sultan Aria Alam atas kedatangannya untuk mengadakan kembali hubungan perdagangan, dan tidak untuk membicarakan peristiwa tahun 1707.

Dengan muatan perak seharga masing-masing f 4,351 dan 4,313, *Eagle Gallery* dan *Borneo* berlayar ke Banjar tahun 1713. Pada kedatangannya di Tatas, pedagang-pedagang Inggeris menjumpai orang-orang Banjar yang tetap menyembunyikan kemarahan. Sementara para bangsawan Banjar, Raden Tuka dan Kiai Chitra Yuda dengan ragu-ragu menyambut kedatangan kapal itu sampai mereka yakin bahwa yang datang itu adalah kapal-kapal pedagang individu bukan orang-orang EIC.

Pada mulanya kapal-kapal itu tidak bisa memperoleh lada, karena Inggeris tidak menyetujui atas harga 15 dolar Spanyol untuk setiap pikulnya. Demikianlah setelah diadakan perundingan, Inggeris bersedia untuk menyerahkan 20 tahanan dan 2 drum serbuk mesiu kepada Sultan untuk membantunya dalam perang Bugis-Banjar. Para penguasa Banjar kemudian mengirim sebanyak 4.000 pikul lada untuk Inggeris dengan harga 4 ½ dolar per pikul, ditambah sebesar *suku* atau ¼ real untuk pajak.

Dalam transaksi perdagangan mereka, kapal-kapal itu menyewa rumah kayu kecil sebagai gudang untuk menyimpan ladanya yang dikirim oleh perahu-perahu Banjar sebanyak 4-5 pikul sekali angkut. Alasan orang-orang Banjar untuk tidak memberikan lada sekaligus dalam jumlah besar karena ketika itu dipedalaman sedang terjadi perang dengan orang-orang Biaju dan Bugis, selain itu pada musim hujan produksinya agak berkurang.

Disamping itu kapal-kapal Inggeris masih mempunyai kesulitan untuk mendapatkan lada karena persaingannya dengan pedagang jung yang datang setiap bulan Maret dengan harga yang lebih tinggi. Pada September 1714, tak lama sebelum *Eagle Gallery* dan *Borneo* sampai di Tatas, pedagang-

pedagang Inggris hanya dapat mengumpulkan lebih sedikit lada dari pada tahun muatan penuh ketika berangkat dari Banjarmasin pada 10 Desember 1714.

Pada waktu pelabuhan Tatas terancam serangan orang-orang Bugis, para penguasa Banjar menghendaki agar kapal-kapal Inggris tidak meninggalkan pelabuhan, agar bisa membantu mempertahankan pelabuhan itu. Namun Reid salah seorang wakil dari pedagang-pedagang Inggris menyatakan, bahwa mereka bersedia tetap menempatkan kapalnya di pelabuhan Tatas jika mereka bisa membeli lada seharga 4 3/4 dolar per pikul seperti *Eagle* dan *Borneo*. Namun para pangeran Banjar mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai hak kekuasaan untuk mengatur harga lada di pelabuhan bebas seperti Tatas. Disamping itu mereka juga tidak bisa melarang para pedagang lada menjual ladanya kepada pedagang individu maupun kepada perusahaan. Orang-orang Biau memberontak karena para bangsawan mencoba untuk mencampuri pengiriman lada dan melakukan penarikan pajak. Para pedagang Banjar menambahkan bahwa orang-orang Inggris tidak dapat mengatur harga seperti ketika mereka mempunyai kekuatan penuh di Banjar, sekarang mereka hanyalah para pedagang yang harus tunduk kepada kondisi yang ada, yakni membeli lada dengan harga yang ditetapkan oleh pedagang-pedagang Banjar.

Selanjutnya para bangsawan tidak mau lagi membujuk Reid untuk membawa kapal-kapalnya ke Tatas. Disamping itu Reid sendiri juga merasa tidak ada gunanya untuk mengadakan perundingan dengan orang-orang Banjar mengenai pembelian lada, sejak seorang pangeran yang berkuasa disitu memberitahukan bahwa pedagang-pedagang jung telah mendapatkan kontrak untuk mendapatkan lada pada musim tahun itu. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan lada adalah sangat sedikit dan harganya mahal. Reid merasa bahwa jika dia mau membayar harga yang sama dengan orang-orang Cina yakni 9-10 dolar per pikul, dia juga sangsi untuk bisa memperoleh lebih dari 20 pikul karena orang-orang Banjar selalu menukarkan lada dengan barang-barang Cina, bukan dengan uang.

Setelah usahanya yang sia-sia untuk mengadakan perundingan dengan para penguasa Banjar, Reid meninggalkan Banjar tanpa lada. Demikianlah bahwa kepentingan Inggris atas lada di Banjar selalu harus berhadapan dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

d. Pertambangan

Kebijakan yang diambil pemerintah Belanda ialah menyewa tanah apanase milik pangeran Mangkubumi Kencana. Mangkubumi pada masa Pemerintahan Sultan Adam Al Wasik Billah, untuk membuka tambang batu-bara di daerah Pengaron. Sewa tanah itu sebesar 10.000 Gulden setahun. Belanda mengambil inisiatif untuk segera eksploitasi terhadap sumber batu bara tersebut. Batu bara ketika sedang mempunyai banyak peminat di pasar dunia dan sumber batu bara tersebut banyak ditemukan di daerah Kerajaan Banjar. Pada tahun 1849 dibukalah di Pengaron oleh Gubernur Jenderal J.J. Rochassen dengan nama tambang batu bara *Oranje Nassau*. Tambang ini memproduksi 10.000 ton pertahun. Demikianlah optimisnya pembukaan pertambangan itu dan diharapkan sukses seperti tambang yang telah ditutup di Martapura, Julia Hermina dan Delft karena beberapa pegawai Belanda terbunuh selama Perang Banjar (1859-1905).

Risiko seperti yang dihadapi oleh kedua pabrik di Martapura itu tidak mengecilkan semangat para investor untuk menanamkan modalnya pada usaha itu, karena prospeknya yang kelihatan cerah. Kompetisi di pasaran terjadi dengan batu bara yang diproduksi Inggris, karena kemampuan kapal-kapalnya yang mempunyai daya angkut besar sehingga dapat menekan harga angkutan dari Asia ke Eropa.

Perusahaan batu bara *Pulau Laut* didirikan pada 1903, sesudah dilihat adanya kemungkinan untuk mengeksploitasi secara terbuka. Modal yang cukup besar dari rencana 180.000 menjadi 2 juta gulden, untuk membuat laporan tentang situasi geologi daerah itu. Berdasarkan laporan inilah tidak kurang pemilik modal yang berminat menanamkan modalnya di Pulau Laut. Persiapan cukup matang

diperlukan agar para investor dapat bekerja dengan baik di daerah itu, yakni membangun jalan untuk mengangkut batu, penyediaan tenaga buruh dan sebagainya. Sejumlah modal dan beratus-ratus kuli akan membawa perubahan pada kehidupan ekonomi dan sosial di pulau yang sepi itu. Ketika adminisitrator pertama J. Lousdorfer mendarat di Kota Baru pada 1908, dia menjumpai keadaan masyarakat yang sama sekali asing dari pengetahuannya, yakni mereka hidup dengan aturan yang sangat berbeda dengan yang dikenalnya. Produksi dari pabrik di Pulau Laut sebanyak 80.000 ton per tahun 1905. Pada tahun 1908 kemampuan produksi maksimum tercapai. Jumlah pegawai bertambah dari 150.000 orang kuli menjadi 2,300 orang kuli pada tahun 1910. Pulau Laut menjadi kekuatan ekonomi yang besar, menjadi salah satu daerah tambang batu bara terbesar di wilayah jajahan Belanda. Pada tahun 1912 pertambangan itu menghasilkan 165.000 ton. Namun pada tahun-tahun berikutnya hasil senantiasa mengalami pasang surut karena adanya persaingan dari negara-negara produsen yang lain di pasaran dunia.

e. Karet

Dengan tidak menentunya pasaran batu bara, pemerintah Hindia Belanda yang telah memberikan perhatian pada potensi daerah-daerah luar Jawa mencoba untuk mengusahakan jenis komoditi lain. Dengan suksesnya tanaman tembakau di Deli, maka dicoba pula untuk mengembangkannya pula di daerah Banjar, namun ternyata hasilnya jauh dari memuaskan. Bersamaan dengan waktu pasar dunia sedang dibanjiri oleh permintaan komoditi jenis baru yakni karet, yang diperlukan oleh industri mobil, yang baru mulai berkembang saat itu. Untuk itulah para pengusaha swasta yang telah diberi keleluasaan untuk menanamkan modalnya di wilayah tanah jajahan, ada yang mencoba untuk membudidayakan karet di daerah Banjar.

Para pengusaha Eropa mulai membudidayakan karet di daerah Banjar pada tahun 1906. Terdapat tiga daerah perkebunan besar yakni Hayup di Tanjung, Tanah Intan dan Danau Salak di Martapura. Ketiganya menggunakan tenaga kuli kontrak dari Jawa maupun dari daerah sekitarnya. Jenis kuli yang terakhir inilah yang nantinya akan menjadi pengusaha karet pribumi. Setelah masa kontraknya, terutama yang dari Hayup selesai, mereka kembali ke kampungnya dan menanam karet sendiri. Mereka sudah mendapat cukup pengalaman dalam pengolahan karet selama bekerja di Perkebunan Eropa.

Harga karet yang tinggi sebelum Perang Dunia I mengakibatkan perluasan perkebunan karet di sana, terutama di daerah Hulu Sungai. Banyak tanah sawah yang dijadikan perkebunan karet. Tidak kurang dari 40% kepala keluarga di Hulu Sungai mempunyai perkebunan karet.

Usaha budidaya karet di daerah Banjar kemudian dipekuat oleh modal-modal asing di luar orang-orang Belanda. Mulai dengan Hayup dan Tanah Intan yang dikelola oleh para pengusaha Inggris, sedangkan Danau Salak pada 1917 dipegang oleh Jerman. Namun setahun sejak menduduki daerah Banjar perusahaan-perusahaan perkebunan karet itu dijual kepada orang-orang Jepang dan sebagian kepada pemilik-pemilik modal Cina.

Salah satu pusat budi daya karet yaitu Hulu Sungai terus menambah jumlah pohon karetnya. Pada tahun 1924 terdapat sekitar 10 juta pohon yang dimiliki oleh sekitar 3.000 orang (rata-rata setiap pemilik mempunyai 300 pohon). Jumlah itu terus bertambah sehingga pada tahun 1963 terdapat tidak kurang dari 49 juta pohon dengan pemilik sekitar 12.000 orang, dengan luas perkebunan sekitar 50.000 hektar. Kebanyakan pohon itu ditanam pada waktu memuncaknya permintaan karet pada tahun 1920-an.

Salah satu keistimewaan dari budi daya karet di daerah Banjar, bahwa pada mulanya mereka dipelopori oleh pengusaha-pengusaha asing, namun pada masa kemudian justru yang memegang peran adalah para pemilik kebun pribumi. Akibat dari naik turunnya produksi karet dan permintaan

karet pasar dunia, yang dapat mengikuti perkembangan harga hanyalah karet rakyat, karena mereka menggunakan tenaga kerja mereka lebih banyak memakai tenaga anggota keluarganya sendiri.

Demikianlah berkembangnya budi daya karet di daerah Banjar, maka pada sekitar tahun 1930-an kesejahteraan penduduk meningkat dengan pesat. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan banyaknya rumah yang dibangun di daerah Hulu Sungai, disamping itu permintaan daerah Banjar akan barang-barang impor sangat meningkat, misalnya banyaknya permintaan akan sepeda, mobil dan sebagainya.

Demikianlah gambaran secara garis besar tentang perdagangan di daerah Banjar, sejak dikenalnya daerah itu secara luas. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa perkembangan bidang ekonomi daerah Banjar sangat berlainan dengan pembabakan tentang sejarah ekonomi yang dikenal secara umum yakni adanya periode Tanam Paksa, periode Politik Pintu Terbuka dan periode Politik Etis. Ternyata bahwa pembabakan itu lebih sesuai untuk daerah pulau Jawa sedang untuk daerah-daerah luar Jawa, ternyata sangat berlainan. Bahkan dapat diperkirakan bahwa untuk setiap daerah luar Jawa yang satu dengan yang lainnya pun tidak sama. Untuk daerah Banjar atau sekarang dikenal dengan nama Kalimantan Selatan kiranya lebih baik untuk diadakan pembabakan seperti yang telah diuraikan di muka yakni, periode kerajaan dan periode sesudah kerajaaan. Dasar dari pembabakan ini adalah pemegang peranan dalam bidang perekonomian bahwa pada masa kerajaan penduduk setempat lebih banyak memegang peranan, sedang pada masa sesudahnya dipegang oleh orang-orang asing, walaupun pada masa perkebunan karet penduduk juga ikut berperan penting tapi itu hanya karena keadaan yang tidak menguntungkan di pasar dunia, sehingga pengusaha asing enggan untuk melakukannya.

Perekonomian daerah Banjar dalam hal ini dapat diketahui, bahwa komoditi mereka semuanya adalah komoditi pasar dunia. Oleh karena itu pasang surutnya juga sangat tergantung pada permintaan pasar dunia, sehingga terjadi diferensiasi jenis komoditi yang sangat besar, dari lada ke batu bara, kemudian dari batu bara ke karet. Dan tentunya variasi yang lebih beraneka ragam dari masa ke masa.

2. Kemelut Politik Abad ke-17

Panggung sejarah Banjar pada abad ke-17 diwarnai dengan berbagai kemelut. Kemelut bermula pada masa pemerintahan Sultan Hidayatullah, pemegang pucuk pimpinan tertinggi kesultanan Banjarmasin (1570-1595). Konflik politik terjadi antara kelompok etnis Biaju dan Banjar. Saat itu dominasi politik dipegang etnis Biaju, dibawah pimpinan permaisuri seorang Biaju-Islam, puteri Khatib Banun, seorang tokoh Biaju. Ketika Sultan Hidayatullah mangkat, puteranya Mustain Billah dari permaisuri seorang Biaju, yang berhasil berkuasa dengan bantuan kelompok sukunya, melalui penyingkiran dan pembunuhan lawan politiknya. Keadaan inhi seiring dengan mulai berkembangnya perdagangan lada.

Pada abad ke-17, lada meningkat produksinya dan omzet perdagangannya sangat besar, begitu pula tambang emas terus meningkat. Hal ini menggerakkan VOC untuk mencari cara monopoli potensi ekonomi kesultanan Banjarmasin tersebut. Demikian pula dengan Inggris, juga berusaha untuk memperoleh hak monopoli di kesultanan Banjarmasin. Akibatnya kedua bangsa Eropa ini bersaing, untuk merebut posisi di hati aparat kesultanan Banjarmasin. Persaingan ini membawa keuntungan bagi kesultanan Banjarmasin, yang merupakan kesultanan yang berorientasi dagang. Karena dengan persaingan itu, kesultanan Banjarmasin dapat menetapkan harga yang lebih tinggi. Namun demikian, keadaan ini membawa dampak bagi politik kesultanan Banjarmasin, artinya kemajuan ekonomi perdagangan dan beberapa kebijakan Sultan, yang menimbulkan pro dan kontra, terutama dari Dewan Mahkota. Dewan ini terdiri dari keluarga raja, para pangeran, Mantri, Kiai, sangat besar pengaruhnya

terhadap penentuan kebijaksanaan politik kesultanan, bahkan hal inilah yang membatasi kekuasaan Sultan.

Untuk menghadapi masalah perdagangan terhadap pedagang asing terutama Inggris dan Belanda terdapat 4 kelompok yang saling bersaing dan bertentangan, karena bangsawan itu, juga menguasai perdagangan secara pribadi. Ada 4 kelompok yang saling bersaing, antara lain :

1. Kelompok Sultan, Raja Itam, Adipati Anom dan Raja Mempawah adalah anggota Dewan Mahkota, tetapi menginginkan perdagangan bebas dan memanggil VOC hanya sebagai alat untuk menghadapi perluasan kekuasaan Mataram atas wilayah Banjarmasin.
2. VOC sebagai kelompok yang berusaha untuk dapat monopoli lada di Banjarmasin yang pada tahun 1638 mengalami kegagalan.
3. Golongan bangsawan pengusaha, yaitu golongan bangsawan yang mempunyai usaha perdagangan secara pribadi, menyokong Inggris sebagai alat menghadapi VOC.
4. Inggris mengikuti VOC-Belanda, agar memperoleh hak monopoli dalam perdagangan lada di Banjarmasin yang disokong oleh golongan bangsawan pengusaha. Dan berusaha menghasut orang Makassar untuk menyerang Sultan.

Adanya kelompok-kelompok tersebut membawa konflik terutama antara intern kesultanan. Konflik ini memuncak tahun 1638. Raja Itam, anggota Dewan Mahkota, secara terang-terangan tidak mengakui kontrak dagang tahun 1635 yang dibuat Ratna Diraja Gidja Babauw, syahbandar atas nama Sultan dengan VOC, yang diwakili Henrick Bouwer, Anthonio van Diemen, Jan van den Burgh dan Steven Barentz. Karena sikap anti VOC secara terang-terangan, dan sifatnya menentang kebijaksanaan Sultan, maka Raja Itam dipecat sebagai anggota Dewan Mahkota dan hak miliknya disita. Konflik berawal dari sini. Raja Itam tidak tinggal diam, dan berusaha mengembalikan kekuasaannya kembali lewat Pangeran Adipati Anom, yang akan melakukan kudeta, jika loji VOC pindah ke tempat kedudukan Sultan yang baru.

Sultan Inayatullah menyerahkan kekuasaan dan digantikan puteranya Ratu Anom dengan gelar Sultan Saidullah (1637-1642). Ratu Anom adalah gelar Sultan Inayatullah dengan permaisuri dari suku Banjar. Sebagaimana ayahnya, Sultan Saidullah juga seorang yang senang beribadat, dan pemerintahan diserahkan kepada Mangkubumi Pangeran Adipati Halid dengan gelar Pangeran Mangkubumi, yaitu saudara Sultan dan Ibu suku Jawa. Dengan demikian, Sultan ini tidak terlalu berkecimpung dalam menangani kesultanan, sehingga konflik politik makin keras, dan muncul kubu-kubu yang saling bersaing, antara lain:

1. Kubu Pangeran Adipati Anom (Putra Sultan Inayatullah dari permaisuri Biaju). Pangeran Adipati Anom atau Pangeran Suryanata adalah saingan berat Sultan Saidullah. Ia pro Inggris bersama Raja Itam dan benci VOC. Ambisinya untuk berkuasa ini, nanti akan berhasil pada tahun 1663, setelah berhasil merebut kekuasaan kemenakannya Amirullah Bagus Kesuma (Putra Sultan Saidullah) atas bantuan kelompok etnis Biaju.
2. Kubu "*swagers*" (ipar) Sultan Inayatullah, ialah kelompok raja Sukadana, Raja Marta Sahary, Pangeran Antakusumah dan Adipati Halid (Pangeran Tapasena). Adipati Halid mempunyai kekuasaan besar, menjabat Mangkubumi, memiliki prajurit dan sangat menginginkan tahta. Kubu ini pro VOC.
3. Siasat Sultan Inayatullah (sesudah turun tahta) untuk mengimbangi dua kekuatan yang saling bersaing dan untuk menetralsir konflik, sebagai akibat dari pemerintahan Sultan Saidullah yang lemah, yaitu menghidupkan golongan pro Inggris dengan cara merehabilitasi Raja Itam, kliknya Pangeran Adipati Anom (Pangeran Suryanata). Tujuannya untuk mengimbangi Adipati Halid yang pro VOC.

Tahun 1673, adalah tahun yang penting dalam perjalanan sejarah Kesultanan Banjarmasin. Tahun itu titik awal terjadinya revolusi istana, dan ini berlangsung sepanjang abad ke-17, baru

berakhir setelah Amarullah Bagus Kesuma berhasil menghancurkan kekuasaan Sultan Agung (Pangeran Adipati Anom atau Pangeran Suryanata) yang meng kudeta Amarullah Bagus Kesuma tahun 1663. Kekuasaan Sultan Agung direbut kembali oleh Amarullah pada tahun 1679, yang mengakhiri konflik politik pada abad ke-17.

Pada tahun 1624 Sultan Saidullah meninggal, pada waktu itu Adipati Halid selaku Mangkubumi yang otomatis menjadi wali Sultan, dari putera mahkota Amirullah Bagus Kesuma yang belum dewasa. Tahun 1642 atau 1643 Pangeran Adipati Halid mengangkat dirinya menjadi Sultan dengan gelar Sultan Rakyatullah atau Pangeran Ratu, atau Sultan Tahlilullah. Pada tahun 1637, sebetulnya Pangeran Adipati Anom telah berusaha mengadakan kudeta terhadap ayahnya Sultan Inayatullah dengan cara membunuh ayahnya melalui dua orang Jawa sebagai pembunuh bayaran, tetapi gagal. Usaha kedua tahun 1642, juga gagal karena Adipati Halid mendahului mengangkat dirinya sebagai Sultan, pada saat putera mahkota belum dewasa. Kudeta Adipati Halid ini mendapat dukungan dari golongan bangsawan.

Pada tahun 1660 terjadi perkembangan politik baru, putera Mahkota Amirullah Bagus Kesuma telah dewasa dan menuntut haknya sebagai Sultan yang sah. Tuntutan itu didukung Pangeran Adipati Anom dan para bangsawan serta kelompok Biaju yang menginginkan hak pemerintah itu diserahkan kepada turunan yang sah sesuai dengan legitimasi. Amirullah berhasil berkuasa tahun 1660-1663 dengan gelar Amirullah Bagus Kesuma. Kelompok Adipati Halid tetap berusaha memperoleh kekuasaan dan berhasil dengan bantuan para bangsawan mengangkat puteranya Pangeran Aria Wiraraja sebagai Mangkubumi. Dengan demikian Adipati Halid tetap berkuasa.

Pada saat berkuasa, Adipati Halid berhasil menjalin kontak dagang dengan VOC tahun 1660-1661, sebagai kelompok pro Belanda, kontrak ini memberi hak monopoli pada VOC. Dengan sendirinya Amirullah sebagai Sultan hanya boneka dari taktik kelompok Adipati Halid (Pangeran Tapasena) dan Mangkubumi Aria Wiraraja. Perjanjian yang dibuat pada saat Amirullah Kesuma berkuasa ini, menyebabkan golongan bangsawan tidak menyenangkannya. Sebab, hak monopoli VOC, berarti tidak memberikan adanya kebebasan dalam perdagangan, sedangkan golongan bangsawan juga adalah para pedagang, yang memperoleh keuntungan dari perdagangan bebas. Karena itu pula, golongan bangsawan mendukung Adipati Anom (Pangeran Suryanata) mengadakan kudeta, merebut kekuasaan dari Amirullah Bagus Kesuma. Pangeran Adipati Anom didukung juga oleh golongan etnis Biaju. Sedangkan Adipati Halid mendapat dukungan rakyat dan sebagian kaum bangsawan, yang memperoleh keuntungan di bawah kekuasaan Adipati Halid. Dua kubu yang bersaing ini, akhirnya di bawah kekuasaan Adipati Halid. Dua kubu yang bersaing ini, akhirnya mengadakan kompromi :

1. Pangeran Adipati Halid atau Pangeran Tapasena tetap berkuasa di Martapura.
2. Pangeran Adipati Anom atau Pangeran Suryanata berkuasa dan memindahkan kerajaan di sungai Pangeran Banjarmasin dengan gelar Sultan Agung (1663-1679). Pangeran ini mengangkut 10 pucuk meriam dan 600 prajurit dari Kayutangi Martapura. Adiknya, Pangeran Purbanegara menjadi raja Muda.

Bagaimana nasib Amirullah Bagus Kesuma? Sultan yang malang ini sempat lari ke Alai dan mengumpulkan kekuatan di sana. Tahun 1666 Adipati Halid (Pangeran Tapasena) meninggal, menyebabkan golongan legitimasi bertambah kuat, sehingga Amirullah mendapat dukungan yang kuat pula. Pada tahun 1679, Amirullah menyerang Banjarmasin dan berhasil membinasakan Sultan Agung beserta keluarganya, dan sejak itulah Amirullah kembali dapat mengambil haknya sebagai Sultan di Banjarmasin (1680-1700) sampai akhir abad ke-17. Motivasi perebutan tahta, tidak terlepas dari percaturan politik, yang ada di belakang layar, terutama golongan bangsawan. Golongan bangsawan terkadang penentu dari keberhasilan suatu kudeta. Hal ini berkenaan dengan kepentingan-kepentingan golongan bangsawan itu sendiri.

Abad ke-17 ditandai dengan berakhirnya pemerintahan Amirullah Bagus Kesuma, yang berkuasa di kesultanan Banjarmasin untuk kedua kalinya (1680-1700). Sultan ini telah keluar sebagai pemenang perebutan kekuasaan selama abad ke-17, dengan mengalahkan saingannya, pamannya sendiri Pangeran Suryanata atau Pangeran Agung dan anaknya Pangeran Dipati. Keberhasilan Amirullah Bagus Kesuma tidak terlepas dari dukungan Bangsawan, yang diambil alih oleh pamannya sendiri. Selama pemerintahannya, Amirullah telah berhasil mempersatukan kembali kesultanan Banjarmasin yang terbagi dua, yaitu kesultanan Banjarmasin yang beribukota di Martapura dan kesultanan Banjarmasin yang beribukota di Sungai Pangeran Banjarmasin.

Meskipun kesultanan Banjarmasin secara intern mengalami perpecahan dan konflik-konflik, namun secara ekstern tetap dipandang utuh, sehingga tidak ada campur tangan pihak asing, baik dari segi ekonomi maupun politik. Ketika orang-orang Makassar menyerbu Banjarmasin pada tahun 1681 dengan 5000 pasukan dan bahkan membuat pertahanan di tepi sungai Martapura, kesultanan Banjarmasin masih dapat menghancurkan dan mengalahkan pasukan Makassar. Hal ini disebabkan persatuan dapat dipelihara terhadap unsur-unsur yang mencoba menghancurkan kedaulatan kesultanan. Diduga serangan Makassar ini akibat hasutan Inggris yang mencoba melemahkan kesultanan Banjarmasin, agar Inggris dapat lebih berperan dalam perdagangan lada di wilayah Banjarmasin. Kekompakan kesultanan Banjarmasin dapat pula dilihat dari keberhasilannya mengalahkan Portugis yang ingin mencoba menanamkan ekspansi monopoli perdagangan tahun 1694, Inggris tahun 1707 juga berhasil dikalahkan, sedangkan Belanda (VOC) telah mengalami kepahitan pada tahun 1638.

Abad ke-18 dimulai dengan masa pemerintahan Sultan Hamidullah yang bergelar Sultan Kuning (1700-1734). Pemerintahan pada masa Sultan tersebut dikenal dengan pemerintahan yang paling stabil, tidak ada pertentangan dan perebutan kekuasaan, tidak ada campur tangan bangsa asing baik politik maupun ekonomi, sehingga boleh dikatakan kesultanan Banjarmasin mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan ini. Rupanya, kepemimpinan Sultan Kuning yang cukup bijaksana, dan *"kepekaannya"* terhadap segala situasi yang dihadapinya, menyebabkan lawan-lawan politiknya tidak berani dan segan melakukan makar-makar yang merusak jalannya stabilitas pemerintah. Karena situasi ini telah mulai diciptakan oleh Amirullah Bagus Kesuma, ayah Sultan Kuning.

Kemangkatan Sultan Hamidullah tahun 1734, merupakan pertanda awan mendung di kesultanan Banjarmasin. Kembali muncul penyakit lama, pertentangan kepentingan perebutan kekuasaan mulai terjadi lagi. Apalagi putra mahkotanya belum dewasa pada saat Sultan mangkat. Sesuai dengan tradisi, maka wali dipegang oleh pamannya atau adik Sultan Kuning yaitu pangeran Tamjidillah, sehingga kelak jika putra mahkota telah dewasa, barulah tahta kerajaan akan diserahkan. Pangeran Tamjidillah sebagai wali sultan mempunyai siasat yang lebih jauh, yaitu berkeinginan menjadikan hak kekuasaan politik berada dalam tangannya dan keturunannya. Untuk itu, Pangeran Mohammad Aliuddin Aminullah yang telah dewasa menjadi menantunya. Dengan perkawinan tersebut, putra mahkota tentunya tidak sampai hati meminta bahkan merebut kekuasaan dari mertuanya, yang berarti sama dengan ayahnya sendiri. Kenyataan memang demikian, sehingga putra mahkota tidak begitu bernafsu, untuk meminta kembali hak atas tahta kesultanan Banjarmasin. Oleh sebab itu, Pangeran Tamjidillah berhasil berkuasa selama 25 tahun dan mengangkat dirinya menjadi Sultan dengan gelar Sultan Sepuh (1734-1759). Tetapi bagaimanapun juga Pangeran Mohammad Aliuddin Aminullah ingin mengambil kembali hak atas tahta kerajaan sebagai ahli waris yang sah dari Sultan Kuning. Usahnya meminta bantuan VOC merebut tahta dari pamannya, sekaligus juga mertuanya, tidak kunjung tiba, karena itu dengan inisiatif sendiri, Pangeran Mohammad Aliuddin Aminullah berhasil lepas dari kungkungan pamannya dan melarikan diri ke Tabanio, sebuah pelabuhan perdagangan lada yang terpenting dari kesultanan Banjarmasin. Putera mahkota menjadi

bajak laut untuk mengumpulkan kekuatan, dan menanti saat yang baik merebut kembali tahta pamannya.

Sementara itu Sultan Tamjidillah pada tahun 1747 membuat kontrak dagang dengan VOC, yang merupakan dasar bagi VOC, untuk mengadakan hubungan dagang dan politik dengan kesultanan Banjarmasin sampai tahun 1787.

Perjanjian itu tertanggal 18 Mei 1747 tertulis huruf Arab-Melayu dan bahasa Melayu dan huruf Latin bahasa Belanda. Perjanjian yang tertulis dengan huruf Arab-Melayu dan berbahasa Melayu itu antara lain berbunyi:

“Bahwa inilah surat perniagaan dan persahabatan yang telah dimufakatkan oleh Sultan Tamjidillah serta Ratu Anum dan sekalian orang yang besar-besar yang ada memerintahkan dalam negeri Banjar, maka sekalian itu mufakatlah dengan Kompeni Wilandia titah dari pada Gurnadur Jenderal Gustap Wilem Baron pan Imhoff serta dengan Raden pan India yang telah berbuat titah perintah kepada tiga orang Wilandia dan yang menjadi kepala perintah itu yaitu komandur Astipan Markus pan der Hiden dan dua orang pitur besar yang seorang Yan pan Suchtelen dan yang seorang Danil pan der Beruh maka yang tiga orang itu sama juga menanggung titah itu”

“Syahdan tersebutlah perjanjian yang telah lalu itu tatkala pada zaman itu adalah Seri Sultan sangat kasih berkasihan dengan Kompeni Wilandia maka tiba-tiba tiada orang Banjar menurut seperti perjanjian yang telah lalu itu. Syahdan kemudian dari pada itu yang telah tersebut perlu Kompeni Wilandia membuat surat perjanjian tatkala pada zaman Seri Sultan sangat berkasihan dengan Kompeni Wilandia maka sekonyong-konyong tiada orang Banjar mengikuti seperti perjanjian yang dahulu itu adalah seolah-olah tiada surat perjanjian yang tinggal lagi pada sekarang ini. Syahdan maka tersebutlah dalamnya Gurnadur Jenderal dan segala Raden pan India dengan segalanya juga menitahkan tiga orang Wilandia akan membaharui surat perjanjian yang lebih patut antara kedua pihak itu supaya kekal berkekalan selama-lamanya dari pada sahabat bersahabat tiada berubah-ubah dalam kedua pihak itu dan adapun titah Kompeni itu bertanggung atas tiga orang Wilandia yaitu Komandir Astipan Markus pan der Hiden dan dua orang pitur besar yaitu Yan pan Suchtelen dan Danil pan der Beruh ialah yang akan membikin surat perjanjian yang baharu ini”⁷⁵

Dari pendahuluan surat perjanjian ini tidak dapat diketahui bahwa perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, tidak ditaati oleh Orang Banjar, karena Orang Banjar memang di kenal sebagai pedagang bebas tidak mau terikat dengan aturan-aturan yang merugikan perdagangan mereka sendiri. Perjanjian ini dibuat antara Kerajaan Banjar yang dilakukan oleh Sultan Tamjidillah serta Ratu Anum dengan pihak VOC yang diwakili Steven Marcus van der Heijden, Yan van Suchtelen dan Danil van der Burgh atas perintah Gubernur Jenderal Gustaff Willem Baron van Imhoff.

Pasal-pasal dalam perjanjian itu menyangkut perdagangan monopoli lada di dalam Kerajaan Banjar. Dalam perjanjian itu disebutkan tentang harga patokan lada dan larangan bagi bangsa kulit putih selain VOC mengadakan perdagangan lada dengan kerajaan Banjar. Pasal-pasal dari perjanjian itu antara lain adalah :

“Pasal yang kelima adalah Seri Sultan dan Ratu Anum telah berjanji pada hal memberi perniagaan dengan Kompeni Wilandia dan menjual sekalian lada di dalam negeri Banjar maka sekalian lada itu sekali-kali jangan di jual kepada tempat yang lain maka hendaklah Seri Sutan dan Ratu Anum mengerasi atas rakyat sekalian dalam negeri Banjar supaya jangan ada yang menjual pada lainnya selain Kompeni jua yang membeli lada itu.”

⁷⁵ Arsip Nasional, *Surat-Surat Perjanjian antara Kesultanan Bandjarmasin, dengan Pemerintahan VOC, Bataafse Republik, Inggeris dan Hindia Belanda 1835-1860*, Jakarta, 1965, hal. 34.

“Pasal yang keenam adalah Seri Sultan dan Ratu Anum membuat perjanjian dengan Wilandia dari pada melarang jenis orang putih yang datang berniaga ke negeri Banjar dari pada menjual dagangan atau membeli dagangan dan jikalau ada umpamanya melawan dari larangan itu hendak dihukumkan dengan bagaimana patut hukuman atasnya.”

“Pasal yang ketujuh mengikat juga kiranya Kompeni Wilandia seperti bicara Seri Sultan dan Ratu Anum dari pada sebuah wangkang Cina yang supaya boleh ia datang ke Banjar pada tiap-tiap tahun satu wangkang dan akan dagangannya itu mana sekehendak orang memiliki akan tetapi menjual lada itu sekali-sekali tiada ia boleh orang Banjar menjual lada dengan orang Cina dengan putus harga delapan real dalam sepikul.”

“Pasal yang kedelapan Kompeni Wilandia telah memutuskan harga lada dengan Seri Sultan dan Ratu Anum yang dalam sepikul itu enam real putus harganya selama-lama tiada berubah akan tetapi dalam sepikul itu adalah seratus kati atau seratus dua puluh lima pun dacin. Kompeni yang dipakai dan hendaklah lada itu kering dan bersih dalamannya jangan ada seperti ciri seperti pasir atau batu yang kecil-kecil dan jikalau menimbang lada itu hendaklah ada dua orang pihak dari pada seri Sultan dan dua orang pula dari pada pihak Kompeni”.⁷⁶

Perjanjian itu berisi dua belas pasal. Disamping ketentuan tentang harga yang sudah pasti juga meliputi persyaratan tentang kualitas lada, bahwa lada itu harus kering. Ketetapan monopoli tersebut juga menyangkut tentangnya para pedagang ke negeri Banjar. Orang Cina tidak boleh membeli lada kepada orang Banjar, tetapi harus membeli kepada kompeni. Kompeni membeli lada kepada Orang Banjar seharga enam real sepikul sedangkan Kompeni menjualnya kepada Orang Cina delapan real sepikulnya.

Monopoli tersebut juga mengatur bahwa Orang Banjar tidak boleh berlayar ke sebelah timur sampai ke Bali, Sumbawa, Lombok, batas sebelah barat tidak boleh melewati Palembang, Johor, Malaka dan Belitung.

Kata-kata penutup dari perjanjian itu berbunyi :

“Tamat surat ini perjanjian yang telah jadi di dalam istana Seri Sultan dan Ratu Anum di Kayu Tangi yang telahh mufakat dengan Kompeni Wilandia dalam hijrat seribu seratus enam puluh tahun kepada tahun Ba dan kepada bulan Rabi’ulawwal dan pada hari Chamis yaitu dua surat yang telah jadi dan dalam keduanya itu sama serta dengan capnya dan tapak tangan dan satu surat yang tinggal dibawah Seri Sultan dan Ratu Anum dan yang satu surat tinggal dibawah Kompeni”.⁷⁷

Perjanjian itu ditandatangani oleh Sultan Tamjidillah, dengan cap segi delapan di tengahnya tertera huruf Arab dan terbaca Sultan Tamjidillah. Pada bagian yang ditandatangani Kompeni tertulis :

“Terbuat dan tersurat dalam bilik musyawarah kami dalam kota intan Batawiah pada enambelas hari bulan Juni tahun seribu tujuh ratus empat puluh tujuh”.

Secara sepintas bahwa perjanjian itu mendudukkan pihak Kompeni Belanda pada posisi yang lebih dominan, tetapi pada praktiknya kemudian perjanjian itu hanya sekedar siasat bagi pihak kerajaan untuk melindungi terhadap pengaruh pihak lain, karena Orang Banjar selalu mengadakan transaksi perdagangan secara bebas dengan bangsa apa saja yang membeli lada. Kenyataan ini dapat diketahui bahwa setelah sembilan tahun kemudian diadakanlah perjanjian kembali sebagai usaha Kompeni Belanda untuk lebih mengefektifkan perjanjian tahun 1747. Perjanjian baru itu ditandatangani pada 20 Oktober 1756.

⁷⁶ Arsip Nasional, *ibid.*, hal. 36.

⁷⁷ Arsip Nasional, *ibid.*, hal. 37.

Dalam pendahuluan dari surat perjanjian itu sebagai konsideran dari diadakannya perjanjian disebutkan bahwa :

"Bahwa Tuan Yang Maha Mulia Gubernur Jenderal dan tuan-tuan yang maha bangsawan Raden pan India dengan sangat kesusakaran memandang dan beberapa kali telah mengetahui yang Sultan-Sultan Banjar dan dahulu-dahulu selamanya tinggal dalam kekurangan pada memelihara akan bunyi maksud waad perjanjian serta dengan adat yang tiada berpaut-pautan pda orang yang baik..."

Selanjutnya dapat dibaca dalam konsideran perjanjian itu bahwa orang Banjar berdagang secara bebas dengan orang Cina, sehingga bunyi dalam perjanjian tahun 1747 tidak pernah ditepati. Konsideran itu berbunyi :

".....Orang Cina sekarang lima tahun lamanya adalah membawa lada ke negeri Cina daripada yang telah dijanjikan dalam waad perjanjian....."

Larangan berdagang dengan orang Cina lebih dipertegas lagi dalam Pasal yang keenam, begitu pula larangan berdagang dengan orang Inggeris dan Perancis. Perjanjian tersebut juga menyangkut komoditi lainnya seperti sarang burung dan intan.

Pasal yang kedua puluh dua dan yang ke dua puluh tiga menyebutkan bahwa Kompeni Belanda akan membantu Seri Sultan untuk menaklukkan kembali daerah kerajaan Banjar yang telah memisahkan diri seperti : Berau, Kutai, Pasir, Sanggau, Sintang dan Lawai serta daerah taklukannya. Kalau berhasil maka Seri Sultan akan mengangkat Penghulu-Penghulu di daerah tersebut dan selanjutnya Seri Sultan memerintahkan kepada Penghulu-Penghulu tersebut untuk menyerahkan hasil dari daerah tersebut setiap tahun kepada Kompeni Belanda dengan perincian sebagai berikut :

- Berau, dua puluh pikul sarang burung dan 20 pikul lilin.
- Kutai, 20 pikul sarang burung dan 40 pikul lilin.
- Pasir, 40 tahlil emas halus dan 20 pikul sarang burung, serta 20 pikul lilin
- Sanggau, 40 tahlil emas halus dan 40 pikul lilin
- Sintang, 60 tahlil emas halus dan 40 pikul lilin
- Lawai, 200 tahlil emas halus, dan 20 pikul sarang burung

Perjanjian ini ditandatangani oleh Paduka Seri Sultan Tamjidillah di Kayutangi dalam halaman kediaman Seri Sultan pada tahun seribu tujuh ratus lima puluh enam hari Arba dua puluh hari bulan Oktober.

Seminggu kemudian terjadi lagi perjanjian yang dibuat oleh Tuan Almusyarafat Pangeran Ratu Anum adalah gelar dari Pangeran Muhammad Aliuddin Aminullah, menantu Seri Sultan Tamjidillah dan juga keponakan Sultan dengan Kompeni Belanda. Perjanjian itu ditandatangani di benteng Tatas pada 27 Oktober 1756. Perjanjian ini dibuat atas inisiatif sendiri dari Ratu Anum dalam usahanya memperoleh tahta dari mertuanya, sesuai dengan perjanjian bahwa Seri Sultan Tamjidillah sebetulnya hanya berfungsi sebagai wali, sementara Ratu Anum belum dewasa. Pasal yang kedua dari perjanjian yang dibuatnya, menjelaskan usahanya merebut kekuasaan dan juga kekuasaan yang sekarang dipegang oleh Seri Sultan Tamjidillah adalah perbuatan seorang jahil yang hendak melenyapkan asal keturunan Sultan Banjar yang sah.

Pasal yang kedua dari perjanjian itu berbunyi :

"Tuan Yang Maha Mulia yang tersebut sesungguhnya perikutan yang benar dan betul dari tahta kerajaan Banjar dengan sangat kesusakaran dipandang yang kerajaan ini dengan tiada patut adalah memegang mana tahta tahta kerajaan nenek moyangnya sampai bapanya yang telah wafat Paduka Seri Sultan Chamidullah selama beberapa dalam suatu juga asal keturunan yang benar dan diperintahkan maka pada sekarang ini telah diambil tahta kerajaan Tuan Yang Maha Mulia oleh seorang jahil dengan tiada patut serta memecahkan janjinya di atas bilik ketiduran

bapa Tuan Yang Maha Mulia tatkala pulang kerahmatullah, mana kala Tuan Yang Maha Mulia digenapi umur delapan belas tahun akan menyerahkan tahta kerajaan Banjar...”

Kelanjutan dari perjanjian yang dibuat bahwa nanti kalau berhasil Ratu Anum menjadi Sultan dia berjanji akan menyerahkan Kerajaan Banjar kepada Kompeni Belanda dan jabatannya sebagai Sultan merupakan kerajaan pinjaman dari kompeni. Sebagai Kerajaan pinjaman Ratu Anum berjanji akan menyerahkan tiap tahun pada kompeni berupa :

1000 pikul lada hitam,
10 pikul lada putih,
11 karat batu intan, dan
100 real halus.

Usahnya ini kemudian ternyata tidak berhasil karena itulah Ratu Anum mencari jalan lain dengan cara keluar dari ibukota Kerajaan, mengumpulkan kekuatan dan pengikut untuk pada suatu waktu yang tepat akan menyerang Kerajaan dan merebut tahta dari Seri Sultan Tamjidillah. Ratu Anum memilih Tabanio yang pada saat itu merupakan pusat kegiatan perdagangan.

Perdagangan Muhammad Aliuddin Aminullah yang juga bergelar Ratu Anom tetap bermarkas di Tabanio, yang menurut Onderkoopman Ring Holm⁷⁸ merupakan pusat perdagangan gelap yang paling ramai di Kalimantan. Setelah berhasil mengumpulkan kekuatan dan pengikut yang besar, Pangeran Muhammad Aliuddin Aminullah melaksanakan maksudnya semula yaitu merebut kembali tahta kesultanan, dari tugas pamannya yang sekaligus mertuanya, mengambil hak atas tahta sesuai dengan tradisi yang sah dari kesultanan Banjarmasin. Menggunakan sejumlah perahu dengan pengikut yang besar, Pangeran Mohammad Aliuddin Aminullah bertolak dari Tabanio menyusuri Tanjung Silat yang berombak besar dan terkadang angin bertiup kencang, kemudian memasuki sungai Barito, terus berbelok ke sungai Martapura, akhirnya sampai ke Martapura. Berita kedatangan Pangeran Mohammad Aliuddin Aminullah yang akan menyerang Martapura sempat menggemparkan keluarga istana, tetapi Pangeran Tamjidillah tetap tenang atas situasi yang gawat tersebut. Dengan dasar pertimbangan supaya jangan terjadi pertumpahan darah antar keluarga sendiri, apalagi Pangeran Mohammad Aliuddin Aminullah adalah kemenakan dan menantunya sendiri, Pangeran Tamjidillah menyerahkan tahta kesultanan Banjarmasin, sehingga Pangeran Aliuddin berkuasa atas kesultanan Banjarmasin.

Secara lahiriah Pangeran Tamjidillah ikhlas, menyerahkan tahta kepada keponakannya Pangeran Mohammad Aliuddin, tetapi secara sembunyi Pangeran Tamjidillah tidak senang hati atas berpindahnya tahta dari tangannya, apalagi sebetulnya sebagian besar kaum bangsawan mendukungnya sebagai Sultan. Hal inilah yang menyebabkan Pangeran Tamjidillah membuat siasat licik, untuk mengembalikan tahta ke tangannya. Ketika Pangeran Tamjidillah menyerahkan tahta kepada Pangeran Mohammad Aliuddin keponakannya, di hadapan para bangsawan dia mengatakan : *“Biarlah tahta direbut oleh Ratu Anom (gelar Pangeran Mohammad Aliuddin) sebentar lagi juga akan mati”* Ucapan ini lahir dari niat liciknya untuk melenyapkan Pangeran Mohammad Aliuddin sebagai Sultan.

Bagaimana caranya? Kenyataannya Ratu Anom atau Sultan Mohammad Aliuddin Aminullah menderita sakit yang terus menerus dan menyebabkan kesehatannya makin lama makin mundur dan pada tahun 1761 dia meninggal dengan meninggalkan putera mahkota yang masih kecil. Diduga kematian Sultan ini akibat diracun.

Meskipun pemerintahannya hanya berlangsung 3 tahun, dia mempunyai sikap politik yang keras terhadap VOC, sehingga lebih banyak berusaha menguntungkan perdagangan Kerajaan, daripada harus tunduk pada kemauan Belanda. Pemimpin-pemimpin VOC yang pernah berhubungan

⁷⁸ J.C. Noorlander, *op.cit.*, hal. 38.

dengan Sultan Aminullah, harus sangat berhati-hati, sehingga Sultan tidak merasa tersinggung, karena watak Orang Banjar sangat keras kalau dia tersinggung. Hal ini dilaporkan oleh VOC kepada Residen de Lilc⁷⁹ yang berbunyi sebagai berikut :

“Residen jangan mengira bahwa di Banjar ini sama halnya dengan di Banten atau Jawa. Orang Banten atau Orang Jawa walaupun dia dipukul kompeni dengan cambuk di kepalanya, sekali-kali tak berani mengatakan bahwa pukulan itu sakit, tapi orang Banjar mendengar kata-kata yang keras saja sudah marah dan bila sampai terjadi begitu maka seluruh Banjar akan merupakan buah-buahan yang banyak pada satu tangkai”.

Siasat Pengeran Tamjidillah berhasil, karena Sultan Muhammad Aliuddin meninggal, Putera Mahkota masih kecil, karena itulah Mangkubumi kembali berada di tangannya sebagai wali Sultan yang belum dewasa, dan dia menunjuk anaknya Pangeran Nata Alam atau Natadilaga sebagai wali sultan yang kemudian terkenal sebagai Susuhunan Nata Alam, raja dari kesultanan Banjarmasin yang terbesar dalam abad ke- 18.

Cerita lama yang pernah dialami oleh Pangeran Aliuddin Aminullah setelah ayahnya Sultan Kuning meninggal, kembali terulang setelah Sultan Aminullah meninggal. Wali Sultan Nata Alam berusaha agar tahta tetap dipegangnya dan ahli waris berada pada garis keturunannya.

Nata Alam mulai mengatur siasat untuk melaksanakan ambisinya. Pertama-tama dia berusaha memperoleh dukungan kaum bangsawan, dan ternyata dukungan dengan mudah diperolehnya. Selanjutnya dia mengangkat puteranya sebagai penggantinya kelak dengan gelar Sultan Sulaeman Saidullah yang saat itu baru berusia 6 tahun (1767). Limabelas tahun kemudian yaitu pada tahun 1782 kembali diangkatnya cucu yang baru lahir dengan gelar Sultan Adam Al Wasik Billah. Tindakan ini merupakan realisasi dari siasatnya untuk mengekalkan tahta atas garis keturunannya dan mendapat dukungan dari kaum bangsawan yang memang dengan mudah diperolehnya. Siasat selanjutnya ialah Nata Alam mengangkat dirinya sebagai Sultan Kerajaan Banjar (1787 – 1801) dengan gelar-gelar :

- a. Panembahan Kaharuddin Halilullah
- b. Alamuddin Saidillah
- c. Abdullah
- d. Amierilmu'minin Abdullah
- e. Ami Ail Mu'minin Abdullah
- f. Susuhunan Nata Alam
- g. Pangeran Nata Dilaga
- h. Pengeran Wiranata
- i. Pangeran Nata Negara
- j. Panembahan Batuah
- k. Sultan Tahmidullah

Sultan Muhammad Aliuddin meninggalkan putera-putera yang berhak menggantikan kedudukan sebagai Sultan ketika dia wafat, yaitu Pengeran Abdullah, Pangeran Rahmat dan Pangeran Amir.

Anak-anak yang berhak atas tahta ini satu persatu meninggal, Pangeran Abdullah meninggal, kemudian disusul Pangeran Rahmad, keduanya mati dicekik. Sekarang menunggu giliran pangeran Amir menyadari atas kejadian terhadap saudara-saudaranya, karena itu sebelum terlambat dia meminta diizinkan meninggalkan Kesultanan Banjarmasin dengan alasan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Sultan Nata Alam mengizinkan, karena berarti bahwa satu-satunya pewaris tahta sudah tidak berada di tempat lagi. Ternyata Pangeran Amir tidak berangkat menuju Mekkah untuk menunaikan ibadah haji tetapi dia singgah ke Pasir ke tempat pamannya Arung Tarawe. Arung Tarawe

⁷⁹ J.C. Noorlander, *ibid.*, hal. 42, sebagaimana terjemahan M. Idwar Saleh.

menyanggupi memberi bantuan pada Pangeran Amir, untuk menyerang Martapura, untuk merebut tahta dari Pangeran Nata Alam.

Perjanjian ini yang menyebabkan peperangan dan sebagai peristiwa yang terburuk bagi Kesultanan Banjarmasin, sebab dalam peperangan perebutan tahta ini bangsa Belanda dan orang-orang Bugis ikut campur tangan. Dengan demikian peperangan ini melibatkan pertentangan antar suku, yaitu suku Banjar dan suku Bugis, juga melibatkan orang Belanda sebagai bangsa yang "*haus daerah*", untuk dijadikan tanah jajahan.

Pada tahun 1785 Pangeran Amir dengan bantuan Arung Tarawe menyerang Martapura. Pasukannya dengan 3000 orang Bugis dengan kekuatan 60 buah perahu berangkat dari Pasir melalui Tanjung Silat mendarat di Tabanio, pelabuhan lada terbesar dari Kesultanan Banjarmasin. Di Tabanio pasukan Bugis melakukan pembunuhan terhadap rakyat yang tidak berdosa yang tidak mengerti persoalan dan tidak mengerti perebutan tahta, pemusnahan kebun lada, sumber potensial dari perdagangan Kesultanan Banjarmasin dan sumber penghasilan rakyat, menawan rakyat dan selanjutnya dijadikan budak oleh orang Bugis, hal ini menyebabkan terjadinya pertentangan suku, suku Bugis dan suku Banjar. Hal ini pula menyebabkan hilangnya simpati rakyat Banjar terhadap pangeran Amir, sehingga rakyat Banjar tidak ada yang membantu perjuangan Pangeran Amir, suatu siasat yang merugikan Pangeran Amir sendiri. Memang penyerangan Pangeran Amir ini, sebagai realisasi balas dendam akan kematian ayahanda dan saudara-saudaranya.

Penyerangan Pangeran Amir ini menyebabkan Pangeran Nata Alam membuat kontrak baru dengan VOC pada tahun 1787 untuk menjaga stabilitas kekuasaannya agar tetap berada di tangannya dan garis keturunannya.

Hal-hal penting dari perjanjian itu ada 4 point :

1. Sultan menyerahkan daerah kekuasaannya atas Pasir, Laut, Pulo Tabanio, Mendawai, Sampit, Pambuang, Kotawaringin pada VOC.
2. Kerajaan Banjar adalah vazal VOC dan Sultan cukup puas dengan "*uang tahunan*"
3. Pengangkatan Sultan Muda dan Mangkubumi harus mendapat persetujuan VOC.
4. Kerajaan Banjar, hanyalah diperintah oleh keturunan Sultan Nata Alam.

Pangeran Nata Alam menyadari bahwa atas serangan Pangeran Amir dengan pasukan Bugis tersebut, dan hanya VOC yang dapat menyelamatkannya, karena itulah tidak ada pilihan lain bagi Pangeran Nata, bahwa dia harus meminta bantuan VOC untuk mengusir pasukan Bugis tersebut.

Pangeran Nata Alam mengatur siasat bahwa bagaimanapun juga Belanda harus dijadikan tameng untuk melindungi kedaulatannya, tetap terikat daengan Kesultanan Banjarmasin tetapi bukan sebagai penguasa.

Perjanjian yang diadakan oleh Sultan Nata Alam terdiri dari :

Acte van Afstand 13 Agustus 1787,

Tractaat 13 Agustus 1787,

Proclamatie 1 Oktober 1787, dan

Sep. Articul het Tractaat van 13 Agustus 1787, 22 April 1789.

Perjanjian ini tertulis dalam dua bahasa yaitu bahasa Belanda dan bahasa Melayu huruf Arab. Dalam isi perjanjian itu tergambar situasi politik yang penting, yaitu saat serbuan orang-orang Bugis yang dipimpin oleh Pangeran Amir. Nama Pangeran Amir memang tidak ditemukan dalam serbuan yang menggoncangkan kerajaan tersebut tetapi serbuan orang Bugis tersebut adalah bantuan Pangeran Tarawe, paman dari Pangeran Amir. Kehadiran pasukan kompeni Belanda membantu Pangeran Nata, merupakan pasukan juru selamat terhadap kehancuran pemerintahan Pangeran Nata. Karena itulah dalam butir-butir isi perjanjian kedudukan Kompeni Belanda menunjukkan posisi dominan. Lebih tragis lagi adalah posisi Kerajaan Banjar hanya sebagai sebuah kerajaan pinjaman dari milik kompeni Belanda.

Dalam Acte van Aftand tersebut, kedudukan Kerajaan Banjar sebagai kerajaan pinjaman, sebetulnya merupakan hasil dari permusyawaratan seluruh pembesar kerajaan disebutkan bahwa :

".....akan menjadi paedah serta selamat bagi negeri beserta rakyat maka setelah aku bermusyawaratan timbang menimbang perkara-perkara itu bersama-sama dengan anandaku yang sudah terpilih akan ganti kedudukanku Sultan Soleman dan cucuncaku Sultan Adam dan Perdana Mantriku Ratu Anom Ismail beserta sekalian raja-raja dan orang-orang besar dari istana tahta kerajaan negeri Banjar maka kami sekalian kira-kira terbaiklah dan sudah dihitung pada hati kami menyerahkan diriku beserta sekalian rakyat tahta kerajaan negeri Banjar betul kepada perlindungan dan pernaungan kompeni maka dari karena sebab itu juga dengan surat yang terbuka ini aku mengaku dan mengatakan baik bagi diriku sendiri baik bagi zuriat-zuriatku yang akan mengganti kedudukanku dan bagi waris-warisku turun temurun aku menanggalkan sekalian pangkat-pangkat kerajaanku dengan sekalian tanah-tanah dan negeri-negeri beserta pulau-pulau dan teluk rantau dan sungai-sungai."⁸⁰

Para pembesar kerajaan yang ikut menyaksikan semua perjanjian yang dibuat dan ikut menandatangani selain Sunan Nata Alam, Sultan Soleman dan Sultan Adam Al Wasik Billah adalah : Pangeran Mangkudilaga, Pangeran Aria, Pangeran Isa, Pangeran Zainal, Pangeran Marta, Gusti Tasan serta Perdana Mantri Kerajaan Ratu Anom Ismail. Sedangkan para pembesar golongan Kiai, ikut pula menandatangani : Kiai Surengrana, Kiai Tumenggung, Kiai Martadangsa, Kiai Maesa Jaladeri, Kiai Rangga, Kiai Jayengpati, Kiai Durapati, Kiai Surajaya, Kiai Jayadirana dan Kapitan Kartanegara.

Kemenangan diplomasi yang diperoleh Pangeran Nata Alam adalah bahwa kompeni Belanda harus meminjamkan Kerajaan Banjar yang merupakan pinjaman abadi, tidak boleh dibatalkan kepada Pangeran Nata dan keturunannya.

".....wakil Kompeni Kristopel Hopman menyerahkan kepada aku Sultan Soleman Sa'isullah dari pihak mana kompeni Wilanduwi seperti barang yang diberi pinjam yang baka tiada boleh mati agar supaya aku dan aku ampunya zuriat yang mutachirin seperti anakndaku Pangeran Ratu Sultan Soleman dan cucundaku Sultan Adam duduk memerintahkan dan menyelenggarakan kerajaan beserta rakyat...."⁸¹

Kemenangan diplomasi lainnya adalah bahwa kerajaan Banjar sebagai kerajaan pinjaman yang kedudukannya setengah jajahan, tetapi persetujuan itu menghasilkan keputusan bahwa Kerajaan Banjar menempati kedudukan sebagai kerajaan yang kedudukannya setarap dengan Kompeni Belanda, sebagai kerajaan merdeka. Kedudukan sebagaimana sebuah kerajaan merdeka itu dalam hal penghormatan terhadap wakil Kerajaan Banjar yang akan menghadap Gubernur Jenderal di Batavia dengan penghormatan sambutan tembakan meriam, sebagaimana sambutan terhadap negara lainnya. Begitu pula sambutan yang sama diberikan apabila wakil kompeni Belanda yang akan menghadap Sultan di Bumi Kencana Kerajaan Banjar. Persetujuan tentang persamaan kedudukan itu terhadap pada pasal 31 :

"Pasal tiga puluh asa.

Adapun sebagaimana akan dihormati dengan menembak kepada Paduka Seri Sultan ampunya surat-surat yang dibawa datang di Banjar kepada pitor besar atau di Batavia kepada Paduka Gurnadur Jenderal dan Raden van India maka begitu juga surat-surat yang datang dari Batavia oleh Paduka Gurnadur Jenderal dan Raden van India atau yang dibawa dari pitor besar yang dinegeri Banjar kepada Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan itu hendaklah diberi hormat begitu juga sebagaimana harus dan patut yakni surat-surat yang dari oleh Gurnadur Jenderal

⁸⁰ Arsip Nasional, *op.cit.*, hal. 84.

⁸¹ Arsip Nasional, *ibid.*, hal. 85.

dan Raden van India serta dari oleh Yang Maha Mulia paduka Seri Sultan akan dihormati dengan tembak lima belas kali dan surat dari pitor besar dengan tembak tujuh kali adanya....⁸²

Panggilan atau sebutan terhadap Sultan berbeda dengan sebutan terhadap Gubernur Jenderal Belanda. Kalau terhadap Sultan disebut Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan, tetapi sebutan untuk Gubernur Jenderal Belanda hanya disebut paduka Gubernur saja. Kata-kata penghormatan ini menunjukkan bahwa Kerajaan Banjar dipandang Belanda sebagai kerajaan besar yang memperoleh kehormatan sebagai negara merdeka. Hal ini dibuktikan lagi dengan penghormatan 15 kali tembakan meriam untuk wakil Sultan sedang untuk wakil kompeni hanya dengan tujuh kali tembakan meriam.

Acte van Afstand ini diperkuat lagi dalam *Tractaat* 13 Agustus 1787 yang berisi 36 pasal dan ditanda-tangani di ibukota kerajaan, Bumi Kencana. Kemenangan diplomasi Pangeran Nata Alam bahwa yang memerintah Kerajaan adalah keturunan Nata Alam, diperkuat lagi dalam *Proclamatie* 1 Oktober 1787. Proklamasi itu selain menyatakan bahwa Kerajaan Banjar merupakan kerajaan pinjaman dari Kompeni Belanda, juga mempertegas lagi bahwa keturunan Nata Alam lah yang berhak memerintah kerajaan itu.

".....Lagipula tahta kerajaan itu Tuan Yang Maha Bangsawan Gurnadur Jenderal dan Raden van Indie menyerahkan pula dari pihak mana Kompeni Wilanduwi seperti ariyati barang pinjaman yang baka tiada boleh mati kepada Tuan yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Soleman Sa'idallah agar supaya diperintah dan menyelenggarakan tahta kerajaan....⁸³

Dalam perjanjian yang dibuat ini Pangeran Nata Alam menyebut dirinya sebagai Paduka Seri Sultan Soleman Sa'idallah sedangkan cucunya Sultan Adam Alwasikubillah, kesemuanya ikut menandatangani perjanjian yang dibuat. Perdana Mantri yang jabatan Perdana Mantri kadang-kadang disebut pula sebagi Mangkubumi, tetapi dalam *Tractaat* 1 Oktober sebagai penjelasan dari *Proclamatie* 1 Oktober, disebut sebagai *Wazir mu'adlam*.

Dalam *Tractaat* 13 Agustus 1787 yang terdiri atas 36 pasal kedudukan Kerajaan Banjar sebagai kerajaan pinjaman lebih diperinci lagi, sehingga wilayah kerajaan Banjar tidak sebesar wilayah sebelumnya. Dalam *Tractaat* itu dijelaskan bahwa Kerajaan Banjar melepaskan negeri-negeri Pasir dengan daerah takluknya; Pulau Laut beserta sekalian yang berwujud pada dekatnya; Tabaniau beserta dengan pesisirnya, gunung-gunung serta separo dari dusun Tatas dan Dayak-dayaknya dengan Mendawai, Sampit, Pembuang, Kotawaringin.

Orang asing selain orang Eropah adalah orang yang bukan anak Banjar. Orang Cina, Bugis, Makassar, Mandar dan Bali dalam perjanjian itu dikelompokkan sebagai orang asing dan mereka tunduk pada Hukum Kompeni Belanda. Dengan demikian kalau orang asing ini melakukan kejahatan, mereka dihukum berdasarkan hukum Kompeni Belanda, meskipun tindakan mereka itu di dalam negeri Kerajaan Banjar. Khusus untuk orang Cina yang telah melakukan perniagaan dengan berniaga dengan orang Banjar dan dalam negeri Kerajaan Banjar. Sedangkan bangsa asing lainnya harus mendapat persetujuan dari Kompeni Belanda terlebih dahulu.

Belanda mengirimkan bantuan dibawah pimpinan Hoffman, disamping sebagai wakil Belanda dalam masalah kontrak yang baru dibuat juga sebagai pimpinan bantuan untuk mengusir pasukan Bugis dari Kesultanan Banjarmasin. Pasukan Pangeran Nata bersama rakyat Banjar dan dibantu oleh pasukan VOC berhasil mengusir pasukan Bugis, dan menangkap Pangeran Amir dan selanjutnya dibuang ke pulau Ceylon (Srilangka).

Kemenangan perang berarti kemenangan bagi Pangeran Nata untuk memperoleh hak waris atas garis keturunan Sultan Kuning. Berakhirnya perang melawan Pangeran Amir, berarti berakhir

⁸² Arsip Nasional, *ibid.*, hal. 104.

⁸³ Arsip Nasional, *ibid.*, hal. 124.

pula pertentangan selama periode abad ke- 18 antara keturunan Sultan Kuning dalam “*Kesultanan Banjarmasin*”.

Kemenangan perang ini bagi Belanda, juga merupakan keuntungan besar sebab, bantuan Belanda bukanlah sia-sia dan hadiah dari kemenangan itu bagi Belanda sangat besar.

Hak politik berada dalam tangan Belanda atas Kesultanan Banjarmasin bahkan Kesultanan Banjarmasin tak lebih dari sebuah vazal dari Belanda. Tetapi kenyataannya bukanlah demikian, Belanda hanya memperoleh impian dari kemenangan tersebut.

Pangeran Nata sekarang mulai mengatur siasat untuk mengusir kekuatan Belanda dari Kesultanan Banjarmasin. Tidak dengan kekuatan bersenjata tetapi dengan taktik perdagangan.

Sejak perjanjian tahun 1787 sampai dengan 1797 merupakan sandiwara politik Kesultanan Banjar yang terbesar dengan Sultan Nata Alam sebagai pemeran utamanya.

Segala rencana perdagangan VOC disabot, bajak laut diorganisir untuk merampok kapal-kapal Belanda, perdagangan bebas dengan bangsa berjalan dengan lebih ramai sehingga VOC tidak berhasil memperoleh monopoli sebagaimana yang disebutkan dalam kontrak 1787.

Siasat yang paling berhasil yang dilakukan Sultan Nata Alam ialah menghancurkan kebun lada sehingga populasi produksi lada berada dalam batas minimal.

Menjelang tahun 1793 perdagangan lada sangat merosot ditambah dengan bajak laut yang menutup muara sungai Barito sehingga melumpuhkan perdagangan VOC.

Mengenai kegagalan perdagangan Belanda di Banjarmasin disebutkan sebagai berikut :

“Betul-betul licin orang-orang Banjar itu terhadap suatu “Grootmacht” seperti VOC yang telah berpengalaman dua abad lebih mengenai soal-soal Banjar, begitu lamanya mereka dengan diam-diam menyembunyikan sebab-sebab sebenarnya daripada kegagalan perluasan kekuasaan VOC.

*Baru lama kemudian setelah perlawanan diam-diam ini tak perlu dirahaskan lagi, VOC mengerti bahwa dia telah bertahun-tahun ditipu”.*⁸⁴

Bagi Belanda, Banjarmasin merupakan pos pengeluaran belaka dan sama sekali tidak mendatangkan keuntungan, bahkan menimbulkan kerugian, sehingga bagi Belanda mempertahankan melanjutkan hubungan dengan Banjarmasin menjadi beban yang berat.

Setelah melihat keberhasilan politik yang dijalankan maka Pangeran Nata mengirimkan utusan ke pulau Penang, pusat perdagangan Inggris untuk bersama-sama mengusir Belanda dari kerajaan Banjarmasin. Begitu pula dikirim utusan ke Batavia, supaya VOC meninggalkan Banjarmasin. Belanda akhirnya tahun 1797 mengirim komisaris Boekholtz ke Banjarmasin dan membuat kontrak tahun 1797 yang sangat memalukan VOC. Akhirnya VOC meninggalkan Banjarmasin.

Komisaris Francois van Boekholtz mengadakan pembicaraan dengan Sultan, Sultan Adam dan Wazir Tuan Raden Dipati Anum Ismail bertempat di istana Bumi Kencana Martapura mengenai masalah yang menyangkut kontrak yang dibuat tahun 1787. Kedatangan Boekholtz ini menemui Sultan dan pembesar istana kerajaan karena sebelumnya terdapat beberapa isu yang negatif terhadap perjanjian tahun 1787 khususnya pihak Kerajaan Banjar terdapat sikap mengabaikan semua isi perjanjian dan sikap untuk membatalkan semua perjanjian itu. Selama sepuluh tahun perjanjian itu ternyata Kompeni Belanda tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Kegagalan perjanjian itu menurut penilaian Komisaris Francois van Boekholtz terdapat pada dua masalah pokok ialah :

- a) Kegagalan terhadap monopoli perdagangan lada yang sebelumnya diharapkan mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi Kompeni Belanda, dan yang kedua.
- b) Sikap Sultan yang tidak tulus membalas budi Kompeni Belanda yang telah membantu Kerajaan untuk menghancurkan serbuan Pangeran Amir dengan pasukan Bugis Pasir.

⁸⁴ J.C. Noorlander, *op.cit.*, hal. 125, terjemahan M. Idwar Saleh.

Pembicaraan dengan pembesar kerajaan itu menghasilkan kesimpulan bahwa Sultan dan seluruh pembesar kerajaan mengusulkan agar Sultanlah yang memegang seluruh wilayah kerajaan dan memerintah bukan atas dasar pinjaman dari Kompeni.

Dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan perjanjian tahun 1787 mendatangkan kerugian bagi Kompeni Belanda, lagi pula banyak kesukarannya bagi Orang Kulit Putih mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan lada dan lainnya, kesulitan karena berbeda adat istiadat apalagi terhadap Orang Dayak yang suka memotong kepala, disamping perjalanan yang ditempuh sangat jauh, akhirnya Kompeni Belanda mengadakan perjanjian tahun 1789 yang sangat merugikan dan menunjukkan kekalahan diplomasinya.

Perjanjian itu terdiri atas 13 pasal dan ditanda tangani di Bumi Kencana istana Sultan dan di Batavia. Para pembesar istana yang ikut membubuhkan tandatangan mereka terdiri dari : Sultan Soleman, Sultan Adam, Penembahan Batu Ratu Anum Ismail, pangeran Ishak dan Pangeran Hasin. Dari pihak Kompeni Belanda adalah : Van Boekholtz sebagai Komisaris, A.W. Jorissen, Wm. Bloem, A.B. Dietz, S.H. Rose Seer dan P.G. van Overstraten.

Pasal yang ketiga dari perjanjian itu menyebutkan bahwa Kompeni Belanda menetapkan Sultan Suleman Sa'idallah yang berkuasa memerintah di atas sekalipun tanah Kompeni dan Sultan pulalah yang memelihara Kerajaan itu sebagai kepunyaan sendiri. Segala keuntungan dari hasil kerajaan termasuk segala jenis sarang burung dan semua komoditi perdagangan yang sebelumnya menjadi hak Kompeni Belanda, sekarang diserahkan kepada Sultan.

"..... Maka dari itu sekarang Kompeni tetapkan Tuan Sultan Suleman Sa'idallah yang kuasa memerintah di atas sekaliannya tanah Kompeni serta Sultan Suleman pula yang mewakili dari Kompeni menjaganya dan memeliharanya seperti Tuan Suleman punya sendiri. Tambahan lagi Tuan Suleman pula yang menerima hasil-hasil dari sekalian negeri dan desa-desa.

.....Lagi pula Kompeni kasihkan kepada Tuan Suleman keuntungan dari barang yang dapat keluar dari jenis sarang burung...."⁸⁵

Pasal keempat menetapkan bahwa kedaulatan atas daerah Pasir dan Laut Pulau yang telah diambil Kompeni, dikembalikan kepada Sultan.

Inilah bukti kemenangan diplomasi Sultan Nata Alam yang menyebabkan Sultan berkuasa atas kerajaan sebagaimana sebuah kerajaan merdeka tanpa campur tangan kompeni Belanda. Biaya yang dikeluarkan Kompeni Belanda untuk memenuhi isi perjanjian tahun 1787, tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan Belanda sebelumnya, dengan kata lain mempertahankan kedudukannya terhadap Kerajaan Banjar, Kompeni Belanda dihadapkan dengan risiko pengeluaran biaya yang sangat besar.

Kemerosotan ekonomi dan pendapatan Kompeni Belanda itu terlihat dari isi Pasal 10 yang menyatakan bahwa kewajiban Kompeni Belanda untuk membayar tiap-tiap tahun kepada Pangeran Prabu sebanyak 250 real dan kepada Ratu Prabu sebanyak 50 real seperti ditetapkan dalam kontrak yang dibuat oleh Komisaris Cr. Hoffman, Kompeni Belanda menyatakan tidak dapat membayarnya.

Sultan Nata telah memainkan peranan yang sangat penting bagi politik kerajaan Banjarmasin dan berhasil mempertahankan kedaulatan dan keutuhan kerajaan Banjar dari dominasi kolonialisme Belanda. Tetapi kemenangan ini di bayar mahal bagi Kesultanan Banjar. Perdagangan merosot akibat kebun lada dihancurkan, sedangkan komoditi lada merupakan salah satu sumber devisa yang terpenting bagi kesultanan Banjarmasin. Akibat dari perdagangan merosot, maka kekayaan negara juga merosot dan akhirnya lemah, sehingga menjelang abad ke-19 kerajaan Banjarmasin menghadapi Belanda yang sudah cukup kuat, sedangkan kesultanan sudah sangat lemah.

⁸⁵ Arsip Nasional, *op.cit.*, hal. 148.

Abad ke-18 ditutup dengan meninggalnya Sultan Nata Alam, Sultan terbesar dalam kerajaan Banjar yang meninggal pada tahun 1801. Kepemimpinan tradisional memang diwarnai oleh faktor kharismatik, profil seorang pemimpin tradisional, disamping memiliki darah bangsawan, tetapi juga memiliki "*olah batin*" yang memadai. Olah batin Sultan Banjarmasin, dilandasi agama Islam, yang dapat terefleksi lewat kearifannya dalam memimpin pemerintahan. Sultan Hamidullah (Sultan Kuning) dan Nata Alam, profil pemimpin yang dapat menstabilkan pemerintahan, sehingga kesultanan Banjarmasin pada waktu kedua pemerintahan ini, mengalami kemajuan yang pesat *dibidang* ekonomi, pihak-pihak asing tidak dapat merongrong kesultanan.

C. PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM DAN PENERAPAN HUKUM ISLAM

Ada dua pertemuan ilmiah yang pernah diadakan di kota Banjarmasin yang dapat memberi arah bagi kajian sejarah perkembangan Islam di Kalimantan Selatan. Yang pertama adalah Pra Seminar Sejarah Kalimantan Selatan yang berlangsung 23-25 September 1973 dan yang kedua adalah Seminar Sejarah Kalimantan yang berlangsung tanggal 8-10 April 1976.

Kesimpulan yang dapat disimak dari hasil seminar itu adalah :

- a. Tentang masuknya agama Islam
- b. Tentang cara penyebarannya
- c. Tentang pengaruh bahasa Melayu sebagai alat penyebaran Agama Islam.

Masuknya agama Islam ke Kalimantan Selatan sebenarnya terjadi lama sebelum berdirinya Kerajaan Islam Banjar, dan diperkirakan tersebarnya agama Islam itu sekitar abad ke-14 Masehi. Dengan kata lain bahwa berdirinya Kerajaan Islam Banjar dengan raja pertama Sultan Suriansyah, tidak identik dengan masuknya agama Islam itu ke Kalimantan Selatan. Dua abad sebelum Kerajaan Banjar berdiri, disekitar Kuwin sudah terdapat pemukiman penduduk yang memeluk agama Islam. Barangkali kelompok penduduk yang dikenal sebagai *Oloh Masih* atau *Orang Melayu* yang tinggal di sekitar Kuwin telah mengenal agama Islam, atau mungkin sudah beragama Islam.

Islam masuk ke Kalimantan dengan secara damai dan para pembawa atau penyebar agama itu adalah para pedagang/ulama sebagai hasil dari hubungan timbal balik antara Malaka – Johor, kemudian Pasai dan Aceh dengan Negara Daha dengan bandar Muara Bahan yang ramai saat itu dikunjungi para pedagang. Waktu itu yang Menjadi raja di Negara Daha adalah Panji Agung Maharaja Sari Kaburangan sekitar abad ke- 14 Masehi.

Penyebaran Islam itu lebih meluas setelah berdirinya Kerajaan Banjar yang dipimpin oleh Sultan Suriansyah sebagai raja pertama yang memeluk agama Islam. Bantuan dari Kerajaan Islam Demak dan hubungan Islam dengan pantai utara Jawa Timur Gresik, Tuban dan Surabaya mempercepat proses penyebaran agama Islam di Kalimantan Selatan.

Raden Paku yang dikenal sebagai Sunan Giri putera Maulana Iskak pada waktu berumur 23 tahun berlayar ke pulau Kalimantan singgah di pelabuhan Banjar tempat pemukiman *Oloh Masih* atau *Orang Melayu* membawa barang dagangan dengan tiga buah kapal bersama dengan juragan Kamboja yang terkenal dengan nama Abu Hurairah. Sesampai di pelabuhan datanglah penduduk berduyun-duyun membeli barang dagangannya, dan kepada penduduk fakir miskin barang itu diberikannya dengan cuma-cuma.⁸⁶ Sunan Giri juga mengirim para pelajar, saudagar, nelayan ke pulau Madura, Bawean dan Kangean, bahkan sampai ke Ternate, Haruku di Kepulauan Maluku. Bahkan salah seorang keturunan raja Daha yang bernama Raden Sekar Sungsang pergi ke Jawa dan belajar dengan Sunan

⁸⁶ Gusti Abdul Muis, "Masuk dan Tersebarnya Islam di Kalimantan Selatan", Makalah pada Pra Seminar Sejarah Kalimantan, Banjarmasin, 1973, hal. 22.

Giri yang kemudian bergelar Sunan Serabut.⁸⁷ Melalui jalur inilah kelak Raden Samudera dapat memperoleh bantuan dalam peperangan melawan pamannya Pangeran Tumenggung. Melalui jalur perdagangan yang ramai inilah pula Raden Samudera mengenal agama Islam itu, sehingga dengan mudah ketika persyaratan yang diajukan Sultan Demak untuk mendapatkan bantuan, dengan segala senang hati Raden Samudera memeluk agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa da'wah Sunan Giri berhasil memperkenalkan Islam ke daerah Kalimantan Selatan, sebelum berdirinya Kerajaan Banjar.

Kerajaan Banjar berdiri pada 24 September 1526 dan peristiwa ini bersamaan dengan peng-Islaman raja dan para Mantri Kerajaan. Agama Islam menjadi agama resmi dalam Kerajaan Banjar, menggantikan agama Hindu sebelumnya yang juga telah menjadi agama resmi Kerajaan Negara Dipa dan Daha. Agama Islam menempati kedudukan selain sebagai keyakinan yang dipeluk oleh Orang Banjar sebagai warga Kerajaan, juga menjadi satu-satunya sumber hukum yang berlaku di seluruh kawasan Kerajaan. Jabatan Penghulu pada masa-masa awal Kerajaan merupakan jabatan urutan ketiga dalam urutan kepangkatan, setelah Sultan dan Mangkubumi. Urutan itu berlaku pula dalam segala kegiatan resmi yang diadakan oleh Kerajaan.

Tersebar nya agama Islam erat kaitannya dengan memasyarakatnya *bahasa Melayu* sebagai *bahasa pergaulan (lingua franca)* antar suku di Kalimantan Selatan, karena agama Islam disebarkan dengan pengantar bahasa Melayu dengan menggunakan huruf Arab-Melayu. Huruf Arab-Melayu ini ternyata sudah dikenal di sekitar penduduk Melayu yang disebut *Oloh Masih*. Surat yang dikirimkan ke Kerajaan Demak oleh Raden Samudera untuk meminta bantuan dalam memerangi pamannya Pangeran Tumenggung dari negara Daha tertulis dengan huruf Arab-Melayu dan dalam bahasa Melayu padahal saat itu Raden Samudera masih beragama Hindu. Huruf Arab-Melayu itu menjadi huruf yang dipakai dalam Kerajaan Banjar dalam setiap perjanjian dengan belanda. Undang-undang Sultan Adam 1835 juga tertulis dengan huruf Arab-Melayu dan dalam bahasa Melayu-Banjar. Begitu pula selanjutnya para ulama yang menyusun kitab-kitab agama selalu menggunakan bahasa Melayu dengan huruf Arab-Melayu pula, sebagai contoh adalah :

- a. *Kitab Sabilal Muhtadin* oleh Muhammad Arsyad Al Banjari selesai ditulis pada 22 April 1781.
- b. *Kitab Ad Durrun Nafis* oleh Syekh Muhammad Nafis bin Ideris Al Banjari yang ditulis pada tahun 1785.
- c. *Kitab Shirathol Mustaqim* yang oleh Syekh Nuruddin Ar Raniri (Aceh) ditulis sekitar permulaan abad ke- 18.
- d. *Kitab Tuhfat al Raghibin* oleh Syekh Muhammad Al Banjari.
- e. *Kitab Parukunan* oleh Mufti Jamaluddin Ibnu Muhammad Arsyad Al Banjari Mufti Kerajaan Banjar, tanpa tahun.
- f. *Parukunan Basar* oleh Fatimah binti H. Abdul Wahab Bugis, cucu Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, tanpa tahun.
- g. *Kitab Hidayatusalikin* oleh Syekh Abdussamad Palimbani (Palembang), teman Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari sewaktu mengaji di Mekkah.
- h. *Kitab Sairussalikin* oleh Syekh Abdussamad Palimbani 2 Jilid, tanpa tahun.

1. Perkembangan Agama Islam

Perkembangan Islam dalam abad ke- 17 menunjukkan kemajuan yang pesat. Pada waktu itu seorang yang hidup dalam Kerajaan Banjar di Martapura telah menyusun sebuah kitab ilmu tasawuf tentang *Asal Kejadian Nur Muhammad* yang dipengaruhi ajaran Ibnu Arabi yang termasuk aliran *Wahdatul wujud*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam abad ke- 17 dalam wilayah Kerajaan Banjar sudah menunjukkan berkembangnya aliran tasawuf secara dominan sampai melahirkan seorang

⁸⁷ Ahmad Basuni, *op.cit.*, hal. 24.

ulama terkemuka *dibidang* tersebut dan mampu mengarang sebuah kitab yang cukup berat. Kitab tasawuf itu dihadiahkan pengarangnya kepada *Ratu Aceh*.

KH. Zafri Zamzam dalam salah satu tulisannya menyebut bahwa ulama besar itu adalah *Syekh Ahmad Syamsudin Al Banjari*.⁸⁸ Dalam penelitian seorang orientalis R.O Winstedt yang menyebutkan dalam bukunya tentang *Hikayat Nur Muhammad* yang paling tua yang dijumpai di Jakarta ditulis tahun 1688 oleh seorang ulama Banjar yang bernama Sham al Din untuk Sultan Taj al Alam Syafiat al Din yang memerintah di Aceh. Memang dalam masa pemerintahannya Sulthanah Seri Tajul Alam Safiatuddin Johan Berdaulat puteri dari Sultan Iskandar Muda memerintah di Kerajaan Aceh pada tahun 1050-1085 H / 1641-1675, seorang Ratu yang loyal terhadap ajaran-ajaran wahdatul wujud yang berkembang di sana yang semula mendapat tekanan.

Dengan dikirimkannya naskah Kitab tentang Asal Kejadian Nur Muhammad itu ke Kerajaan Aceh khusus untuk Ratu Aceh hal ini menunjukkan hubungan timbal-balik yang baik dengan Kerajaan Aceh. Hal ini mungkin disebabkan oleh kegiatan-kegiatan ulama Aceh seperti Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As Sumatrani pada satu kelompok dan dari pihak penetapannya Nuruddin Ar Raniri pada pihak lainnya. Kedua Faham ini ternyata mempunyai pengaruh yang besar di dalam daerah Kerajaan Banjar. Pengaruh yang pertama dapat kita tunjukkan dengan tokoh Syekh Ahmad Syamsuddin Al Banjari dan nanti masih terlihat pada abad ke- 18 dengan tokoh Syekh Abu Hamid Abulung.⁸⁹ Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa dalam masa satu abad perkembangan Islam di Kerajaan Banjar dipengaruhi ajaran Tasawuf.

2. Pengaruh Aceh

Selama abad ke-17 terlihat bahwa perkembangan agama Islam dalam wilayah Kerajaan Banjar mendapat pengaruh dari ajaran-ajaran yang berkembang di Aceh. Dengan runtuhnya Kerajaan Demak sebagai pusat da'wah Islam semasa Wali Songo, pengaruh perkembangan Kerajaan Aceh. Kegiatan para ulama dan para juru da'wah dari Kerajaan Aceh telah merambah kemana-mana termasuk dalam wilayah Kerajaan Banjar, disamping Sumatera sendiri dan Malaysia. Kedudukan Kerajaan Aceh juga menentukan, karena Aceh merupakan terminal bagi jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci atau bagi mereka yang kembali ke tanah air.

Sebelum munculnya kapal api, para jemaah haji atau para pelajar yang akan belajar ke Tanah Suci, berdiam di Aceh beberapa lama menunggu angin baik untuk melanjutkan pelayaran, begitu pula bagi mereka yang akan pulang ke tanah air khususnya daerah bagian timur dari kepulauan Nusantara ini. Selama mereka berada di Aceh mereka mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan ataupun mengikuti pengajian-pengajian, karena itu maka perkembangan pemikiran yang berkembang di Aceh mempengaruhi mereka. Karena itulah pemikiran dari Hamzah Fansuri yang mengembalikan pada ajaran *tasawuf Sunni*, sampai pengaruhnya ke dalam Kerajaan Banjar.

Berdasarkan perkembangan pemikiran keagamaan yang sudah mendapat pengaruh Aceh, mengalami beberapa tahap perkembangan.

- a) Faham dasar keagamaan yang mewarnai pemikiran keagamaan di dalam Kerajaan Banjar adalah yang berasal dari Jawa yaitu Demak atau Giri yang hanya menyangkut prinsip-prinsip dasar sesuai dengan ajaran *Ahlus Sunah wal Jamaah* dalam akidah dan faham *Syafiiah* dalam bidang hukum disertai dengan *tasawuf akhlaq*. Disini tidak terlihat tanda-tanda bahwa *ajaran Kejawen* turut masuk ke wilayah Kerajaan Banjar.

⁸⁸ Zafri Zamzam, *Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*, Banjarmasin, 1979.

⁸⁹ Abdurrahman, "Studi Tentang Undang-Undang Sultan Adam 1835: Suatu Tinjauan Tentang Perkembangan Hukum Dalam Masyarakat dan Kerajaan Banjar pada Pertengahan Abad ke-19", Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Banjarmasin, 1989.

- b) Faham mistik/sufisme yang berasal dari Hamzah Fansuri sudah memasuki praktik keagamaan di dalam Kerajaan Banjar beberapa saat setelah penduduk memeluk agama Islam dan sudah ada yang berangkat ke Aceh dalam rangka menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Faham ini tampaknya dominan sebagaimana terlihat pada Syekh Ahmad Syamsuddin Al Banjari yang ternyata sudah menggeluti persoalan tentang kejadian Nur Muhammad, salah satu prinsip dasar dari ajaran tasawuf wahdatul wujud.
- c) Sebagai reaksi yang muncul di Aceh yaitu berkembangnya *Faham sufisme* dari Hamzah Fansuri, maka kelompok pemikiran *Nuruddin Ar Raniri* yang menentanginya juga mendapat simpati dari rakyat Kerajaan Banjar. *Nuruddin Ar Raniri* lebih menekan pada *faham Sunni* dengan titik berat pada pengembangan hukum fiqih menurut *mazhab Syafei*. Kepedulian terhadap Faham Sunni dengan mazhab Syafei ini terbukti dengan dipergunakannya secara luas kitab "*Sirathol Mustaqim*" sebagai kitab pegangan di kalangan masyarakat dalam wilayah Kerajaan Banjar.

Mengenai persoalan yang disebutkan terakhir dapat kita lihat dari apa yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari berkenaan dengan keberadaan Kitab *Shirathol Mustaqim* dalam masyarakat Kalimantan Selatan pada masa sebelum beliau.

Disebutkan :

"Bahwa kitab yang dikarang oleh seorang yang alim Syekh Nurrudin Raniri yang bernama As Shirathol Mustaqim yang berbicara tentang ilmu fiqih dalam mazhab Syafii adalah kitab yang terbaik dalam bahasa Melayu. Karena uraiannya terambil dari beberapa buah kitab fiqih yang terkenal dan lagi dicantumkan beberapa buah nas dan dalil. Karena itu, kitab tersebut banyak memberi manfaat kepada kaum muslimin dan dapat pula diterima oleh kaum muslimin dengan baik. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ganjaran pahala kepada penulisnya, pahala yang berlipat ganda dan memberikan tempat yang tinggi di dalam surga Firdaus diakhirat kelak. Kendatipun demikian bahasa yang dibawakan dalam Kitab itu banyak yang kurang jelas, sehingga menyulitkan bagi orang yang ingin mempelajarinya, karena bercampur dengan bahasa Aceh, bahasa yang tidak dimengerti oleh bukan yang bukan Aceh. Disamping itu pula beberapa tempat terdapat perubahan, sehingga berubah dari teks aslinya di ganti dengan kata-kata lain, dan pada tempat lain terdapat pula katakata yang hilang atau kurang. Ini semua mungkin karena ulahnya orang yang menyalin kurang menguasai masalahnya, karena itu tidak heran terdapat adanya perbedaan-perbedaan pada setiap naskah pada segi bahasa sehingga rusaklah susunan kalimatnya. Sedang naskah yang asli yang disandarkan kepada pengarangnya hampir tidak ditemukan lagi, sehingga sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah, melainkan orang yang mengetahui adalah orang yang menguasai ilmu fiqih. Sedang orang yang betul-betul yang menguasai ilmu fiqih tidak ditemukan di negeri ini pada masa ini, karena kurangnya perhatian, merosotnya pengetahuan dan pikiran orang yang bersimpang siur"

Kutipan ini menggambarkan cukup akrabnya rakyat Kalimantan Selatan dengan Kitab karya *Ar Raniri*, hanya saja karena perkembangan masyarakat naskah yang disebarluaskan melalui salin menyalin menjadi cacat sedangkan mereka yang mengkaji masalah tersebut sudah tidak ada lagi.

Uraian yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari tersebut di atas sedikit banyaknya memberikan gambaran kepada kita mengenai perkembangan hukum Islam pada masa awal dan pertengahan abad ke-18 sebagai uraian yang paling otentik dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian tersebut kami menarik lima kesimpulan yaitu :

1. *Kitab Ash Shirathol Mustaqim* karangan Syekh Nurrudin Ar Raniri masih tetap dipakai sebagai referensi dalam bidang hukum Islam walaupun banyak masyarakat Banjar yang masih sulit memahami kitab tersebut mengingat di dalamnya banyak terdapat kata-kata sulit yang diambil dari bahasa Aceh.

2. Penyebaran kitab tersebut dalam masyarakat Banjar dilakukan melalui penyalinan sedangkan naskah asli yang semula berasal dari Syekh Nuruddin Ar Raniri sudah tidak bisa ditemukan lagi, artinya tidak ada lagi orang/ulama yang masih menyimpan naskah dari Kitab tersebut.
3. Naskah kitab *Shirathol Mustaqim* yang beredar dalam masyarakat pada waktu itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya sebagai akibat dari perbedaan dalam penyalinan dimana ada kata-kata yang hilang dan kalimat menjadi rusak, sehingga menimbulkan kesulitan dalam memahaminya.
4. Penyalin-penyalin naskah *Kitab Ash Shirathol Mustaqim* adalah kebanyakan orang yang kurang mengetahui masalah fiqh sehingga penyalinan dilakukan dengan cara semaunya. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan hukum Islam terutama dalam rangka penyebarannya banyak dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya lagi karena orang yang ahli sudah tidak ada lagi. Pada saat ini menurut Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari sulit mencari orang yang betul-betul menguasai ilmu fiqh dalam masyarakat Kerajaan Banjar. Hal ini menunjukkan adanya kemunduran dalam perkembangan hukum Islam dibandingkan dengan masa sebelumnya.
5. Terjadinya kemunduran dalam perkembangan hukum Islam pada masa ini adalah karena kurangnya perhatian orang terhadap bidang tersebut. Hal ini mungkin disebabkan karena semakin meningkatnya perhatian orang terhadap bidang tasawuf yang dalam banyak hal sangat mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum. Selain itu kemunduran ini disebabkan karena memang gejala umum dan adanya pemikiran yang bersimpang siur.⁹⁰

Menghadapi perkembangan hukum Islam di Kalimantan Selatan sebagaimana digambarkan di atas peranan dari Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (Lahir 15 Safar 1122 H/19 Maret 1710 M dan wafat 6 Syawal 1227 H/13 Oktober 1812) sebagai ulama dan ahli hukum Islam di daerah ini. Melalui jasa beliau telah dilakukan pengembangan kembali hukum Islam baik melalui penulisan kitab dan risalah agama, da'wah dan pendidikan agama dan pencetakan kader yang akan mengembangkan pelaksanaan hukum-hukum Islam.

3. Tokoh-tokoh Ulama Sufi yang Hidup di Kerajaan Banjar

Satu hal yang menarik dalam perkembangan agama Islam dalam Kerajaan Banjar adalah menyangkut perkembangan tasawuf sebagai dimensi mistis dari ajaran Islam yang cukup dominan mempengaruhi hidup keagamaan di daerah kerajaan ini. Tokoh-tokoh sufi itu adalah :

a. Syekh Ahmad Syamsuddin Al Banjari

Riwayat tokoh ulama sufi ini tidak banyak diketahui, hanya yang diketahui bahwa ulama ini adalah seorang Banjar yang tinggal di ibu kota kerajaan Martapura. Ulama inilah yang menulis tentang *Asal Kejadian Nur Muhammad* dan menghadihkannya untuk Ratu Aceh Sulthanah Seri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Johan Berdaulat (1641-1675 M). Kalau ulama ini sewaktu menulis naskah itu berumur sekitar 50 tahun, maka dapat diperkirakan, ulama ini lahir sekitar tahun 1618. Ulama ini hidup pada masa pemerintahan Pangeran Tapesana (Adipati Halid) sebagai wali raja, karena putera mahkota Amirullah Bagus Kesuma belum dewasa. Pangeran Tapesana menjabat sebagai Mangkubumi kerajaan. Naskah itu ditulis pada tahun 1668 dan pernah ditemukan oleh seorang orientalis R.O. Winstedt di Jakarta.

b. Syekh Muhammad Nafis Bin Idris Al Banjari

Syekh Muhammad Nafis terkenal karena karya beliau *Ad Durrun Nafis* sebuah kitab tasuf minimal di kawasan Asia Tenggara. Tetapi siapa Syekh Muhammad Nafis ini, sulit diketahui siapa sebenarnya

⁹⁰ Abdurrahman, *ibid.*, hal. 74-75.

tokoh ini. Beberapa penulis sejarah berbeda pendapat tentang tokoh ini. Diantara pendapat itu adalah :

Amir Hasan Kiai Bondan, mengatakan bahwa Syekh Mohammad Nafis itu adalah Pangeran Haji Musa bin Pangeran Muhammad Nafis, cucu dari Ratu Anum Kusumayuda, seorang bangsawan Banjar.⁹¹ H. Gusti Abdul Muis mengatakan bahwa Syekh Muhammad Nafis bin Ideris bin Husein Al Banjari, dilahirkan di salah satu desa di Martapura dari keluarga bangsawan Kerajaan Banjar. Pendapat lain mengatakan bahwa Syekh Muhammad Nafis bin Ideris bin Husein Al Banjari lahir di Martapura dari keluarga Kerajaan Banjar, beliau hidup semasa dengan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dan Syekh Abdul Hamid Abulung. Beliau memperoleh pendidikan di Mekkah, selama di Mekkah itulah beliau menulis kitab *Ad Durrun Nafis*. Syekh Muhammad Nafis dikuburkan di Desa Binturu Kelua, tetapi sebagian mengatakan kuburnya di Lasung, Kecamatan Kusan Hulu. Syekh Muhammad Nafis mengarahkan da'wahnya di daerah Kelua dan sekitarnya pada abad ke- 18 dan 19 dan Kelua saat itu merupakan pusat penyiaran Islam di bagian utara dari Kerajaan Banjar.⁹²

Dalam kitabnya *Ad Durrun Nafis*, beliau tidak banyak menjelaskan tentang siapa beliau sendiri. Hanya dapat diketahui bahwa dalam beberapa penerbitan tentang kitab beliau, tertulis dengan jelas nama beliau ialah Syekh Muhammad Nafis Bin Ideris Bin Husein Al Banjari. Dalam kitab *Ad Durrun Nafis* disebutkan bahwa :

"Dan yang menghimpun risalah ini hamba faqir lagi hina mengaku dengan dosa dan taqahir, lagi yang mengharapkan kepada Tuhannya yang amat kuasa, yaitu yang terlebih faqir dari pada segala hamba Allah Taala yang menjadikan segala makhluk, yaitu Muhammad Nafis bin Ideris bin Husein, dinegeri Banjar tempat jadi, dan dinegeri Mekkah tempat diamnya, Syafei akan mazhabnya yaitu pada fiqih, A'syari i'tiqadnya yaitu pada ushuluddin, Junaid ikutannya, yaitu pada ilmu tasawuf, Qadiriyyah thariqatnya, Syathariyyah pakaianya, Naqsyabandiyah amalannya, Khalwatiyyah pakaianya, Samaniyyah minumannya".

Syekh Muhammad Nafis bin Ideris bin Husein Al Banjari mendapat gelar kehormatan dengan *"Maulana Al Allamah Al Fahamah al Mursyid ila Thariqis Salamah"*. Beliau semasa hidup bersahabat dengan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari pengarang kitab *Sabilal Muhtadin*. Syekh Muhammad Nafis seorang sufi di zamannya namun beliau adalah orang yang tidak suka meninggikan diri; ini ternyata dalam tulisannya yang mengakui diri, *"seorang faqir yang hina, semiskin-miskin hamba Allah"*. Syekh Muhammad Nafis berusaha membersihkan diri lahirnya dan batinnya dengan rajin mengamalkan sekalian *thariqat* yang telah disebutkannya. Pengetahuan kesufian itu dia peroleh dengan berguru kepada banyak tokoh sufi, diantaranya :

- a. Syekh Abdullah bin Hijaz As Syarqawi
- b. Syekh Shiddiq bin Umar Khan
- c. Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman al Madani
- d. Syekh Abdul Rahman bin Abdul Azis al Maghribi
- e. Syekh Muhammad bin Ahmad al Jauhari.

Setelah beliau diakui oleh semua gurunya bahwa dia diperbolehkan mengajar ilmu-ilmu batin dengan beberapa *thariqat* yang telah dianggap beliau *"Syekh Muursyid"*nya maka berusahalah Syekh Muhammad Nafis bin Ideris bin Husein Al Banjari mengajak manusia *mentauhidkan* Allah.⁹³

⁹¹ Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sedjarah Kalimantan*, Fadjar, Banjarmasin, 1953, hal. 175.

⁹² A. Gazali Usman, *Urang Banjar Dalam Sejarah*, Lambung Mangkurat University Press, Banjarmasin, 1989, hal. 60.

⁹³ Hawash Abdullah, *Perkembangan Ilmu Tasawuf dan Tokoh-Tokohnya di Nusantara*, Al Ikhlas, Surabaya, 1980, hal. 109; Abdurrahman, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam Dalam Masyarakat Banjar", dalam Majalah *Kalimantan Scientiae*, Universitas Lambung Mangkurat No. 18 Tahun VIII, 1989, hal. 9.

Syekh Muhammad Nafis diperkirakan lahir pada tahun 1160 H atau 1735 M yaitu hidup pada masa pemerintahan Kerajaan Banjar yang dijabat oleh Sultan Tamjidillah, Sultan Tahmidillah dan Sultan Suleman. Setelah memperoleh pendidikan di daerahnya dia melanjutkan pendidikan di Mekkah al Mukarramah. Pada waktu di Mekkah itulah atas permintaan beberapa sahabatnya ia menulis kitab *Ad Durrun Nafis* pada tahun 1200 H atau 1782 M. Setelah itu beliau kembali ke Martapura dan menyampaikan da'wahnya di tengah-tengah masyarakat warga Kerajaan Banjar. Dalam aktivitas da'wahnya dia banyak menjalankan pengajian ke daerah terpencil yang mempunyai kedudukan strategis dalam perkembangan Islam, tetapi yang terbanyak waktu yang disediakannya adalah di daerah Kelua. Beliau meninggal dan dikuburkan di Haurgading, kampung Takulat, dan sekarang menjadi Desa Binturu Kecamatan Kelua.

Karyanya yang paling monumental dan dikenal luas di Asia Tenggara adalah kitab yang judul lengkapnya berbunyi : *Ad Durrun Nafis Fi Bayani Wahdatil Af'al Wa Asma Wa Sifati Wa Zati Taqidisi*, yang artinya Permata yang Indah yang Menjelaskan tentang Keesaan Af'al, Asma, Sifat dan Zat Yang Maha Suci, yang dikalangan masyarakat luas dikenal dengan kitab *Ad Durrun Nafis*. Kitab ini sampai sekarang banyak dipergunakan sebagai kitab yang dipelajari masyarakat untuk bidang ilmu tasawuf. Menurut Ensiklopedia Islam, naskah asli dari *Ad Durrun Nafis* sampai sekarang belum ditemukan. Yang tertua dari penertiban kitab ini diterbitkan pada tahun 1313 H yang dicetak oleh Mathba'ah al Karim al Islamiyah di Mekkah. Pada terbitan tahun 1323 H termuat pada tepi *Kitab Hidayat al Salikin fi suluki Maslaki al Muttaqien* karangan Syekh Abdussamad al Palimbani. Pada tahun 1343 diterbitkan oleh percetakan Mustafa Babi al Halabi wa Auladihi di Mesir dan pada tahun 1347 H dicetak oleh Dar al Taba'ah al Mishriyah juga di Mesir. Setelah itu terus menerus dicetak di Singapura dan terakhir di Surabaya.

Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa al Fatami yang melakukan pentashihan kitab *Ad Durrun Nafis* untuk diterbitkan tidak pernah mendapatkan naskah aslinya sehingga ia memandang perlu untuk mencantumkan keterangan pada halaman sampul kitab *ad Durrun Nafis* yang berbunyi :

"Ketahui olehmu hal yang waqif atas kitab ini bahwanya segala naskah kitab ini sangatlah bersalahan setengah dengan setengahnya. Dan tiada hamba ketahui mana-mana yang mufakat dengan asal naskah mualifnya. Maka hamba ikutkan pada naskah yang hamba cap ini akan barang yang terlebih elok dan munasabah. Dan tiada kurangkan dari pada salah satu dari pada beberapa naskah itu akan sesuatu karen ihtiaith, wallahualam".⁹⁴

Kitab *Ad Durrun Nafis* ditulis dalam "bahasa Jawi", yaitu bahasa Melayu dengan huruf Arab-Melayu. Maksud utama kitab ini ditulis dalam bahasa Jawi agar dapat berguna bagi mereka yang tidak memahami bahasa Arab. Dalam kitab ini tidak ditemukan kata-kata dalam bahasa Banjar, berbeda dengan kitab *Sabilal Muhtadin* karangan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari yang banyak ditemukan kata-kata dalam bahasa Banjar. Kitab ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh pengarangnya berisi ajaran tasawuf yang tinggi, dan mengandung rahasia yang amat halus dan perkataannyapun amat dalam, tiada mengetahui yang demikian kecuali ulama yang *rasikh*. Kitab ini dikenal sebagai kitab yang amat padat dan kadang-kadang pelik dan sulit dalam ilmu tauhid yang teranyam dengan ilmu tasawuf.

Dalam Ensiklopedia Islam disebutkan bahwa kitab *Ad Durrun Nafis* mengandung ajaran-ajaran *tasawuf sunni*. Muhammad Nafis berusaha memperluas konsep *Wahdat al Syuhud dewahdat al wujud* yang diambil dari Ibnu Arabi dan pengikut-pengikutnya seperti Abdu al Karim al Jilli, Abdu al Ghani al Nablusi dan Abdullah bin Ibrahim Hirghani. Oleh karena itu disatu pihak ia membawakan konsep *tasawuf sunni* dan di pihak lain ia membawakan konsep *tasawuf wahdat al wujud* dalam sikap yang mendua.

⁹⁴ Hawash Abdullah, *ibid.*, hal. 112.

c. Syekh Abdul Hamid Abulung

Tidak banyak diketahui tentang kapan dia lahir, tetapi yang jelas masa hidupnya adalah semasa dengan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dan Syekh Mohammad Nafis. *Syekh Abdul Hamid* membawa ajaran tasawuf yang tidak umum di daerah ini.

Kalau syekh Mohammad Nafis membawa ajaran-ajaran dari aliran *Wahdatul Wujud* yang dipelopori Ibnu Arabi, tetapi ajaran itu disublimasikannya dengan ajaran tauhid, karena itulah bagi orang awam sulit untuk dapat memahaminya.

Ajaran Wahdatul Wujud dibawa ke Kalimantan oleh Syekh Abdul Hamid, seorang ahli tasawuf yang terkenal dengan ajarannya. Syekh Abdul Hamid berkata :

*"Tiada yang maujud melainkan hanyalah Dia,
Tiada aku melainkan Dia,
Dialah Aku,
Dan aku adalah Dia".*

Dalam pelajaran Syekh Abdul Hamid juga diajarkan bahwa syariat yang diajarkan selama ini adalah kulit dan belum sampai kepada hakikat. Ajaran ini pula merupakan hasil pengaruh ajaran Abi Yazid al Bisthomi (874 M), Husein bin Mansur Al Halaj (858-922) yang kemudian masuk ke Indonesia melalui Hamzah Fansyuri dan Syamsuddin dari Sumatera dan Syekh Siti Jenar dari Jawa.⁹⁵

Ajaran Syekh Abdul Hamid ini mendapat tantangan yang keras dari Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari pada masa pemerintahan Sultan Tahmidillah, dimana beliau mengeluarkan fatwa bahwa ajaran tersebut sesat. Dengan dasar fatwa ini Sultan Tahmidillah memerintahkan hukum bunuh atas Syekh Abdul Hamid Abulung.⁹⁶

Untuk mempertahankan Faham *Ahlussunnah* dari ajaran *Wahdani Wujud* yang dinyatakan sebagai faham sesat, Sultan Adam Al Wasik Billah (1825-1857) mengeluarkan Undang-Undang yang dikenal sebagai Undang Undang Sultan Adam (1835).

Pasal 1 dari Undang-Undang itu berbunyi sebagai berikut :

"Adapun perkara yang pertama aku suruhkan sekalian ra'yatku laki-laki dan bini-bini ber'itikat ahlul sunnah wal-jamaat dan jangan seorang juapun yang ber'itikat ahlal-bidaat, maka barangsiapa yang ber'itikat lain dari pada ahlal sunat wal-jama'at kusuruh bapadah kepada Hakimnya, dan Hakim itu menobatkan dan mengajari 'itikat yang betul. Lamun enggan inya dari pada tobat, bapadah Hakim itu lawan diaku".

Dengan demikian di Kerajaan Banjar yang paling banyak pengikutnya adalah *Tasawuf Sunni* (*Tasawuf ahlul sunnah wal Jamaah*) meskipun *Tasawuf Wahdatul Wujud* pernah juga berpengaruh di daerah ini.

Tasawuf Sunni adalah tasawuf yang mengajarkan tentang kebersihan diri rohani dan jasmani dalam rangka *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah. Dasar utama *tasawuf Sunni* adalah *Al Qur'an* dan *al Hadits* dan di dalam amaliyahnya berpedoman kepada amaliyah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in. Salah satu pokok ajarannya ialah bahwa Tuhan sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Asy'ari dan Maturidi, dimana dibedakan secara tegas antara Khaliq dan mahluk. *Tauhid*, *Fiqih* dan *Tasawuf* adalah tiga aspek dari ajaran Islam yang tidak terpisah dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya secara harmonis dan diamalkan secara terpadu.

Faham *Wahdatul Wujud* atau serba Tuhan (*pantheisme*) ialah Faham yang menganggap bahwa manusia dan dunia atau manusia dan Tuhan itu menjadi satu, tidak terpisah dalam kehidupan rohani yang tinggi (*fana*). Banyaklah ucapan-ucapan yang *ekstrem* seperti : '*ainul jama*' (menjadi satu dengan

⁹⁵ M. Laily Mansyur, *Kitab Ad-Durun Nafis: Tinjauan Atas Suatu Ajaran Tasawuf*, Hasanu, Banjarmasin, 1982, hal. 4.

⁹⁶ M. Laily Mansyur, *loc.cit*.

Dia) seperti yang selalu dikhotbahkan oleh Abu Yasid al Bisthomi, dan kata-kaa *hulul* (Tuhan turun ke dalam diri manusia) yang diajarkan dan dipertahankan oleh Husein bin Mansyur Al Hallaj). Prinsip pokok falsafahnya seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi : *“Maha Suci Tuhan Yang Menciptakan segala sesuatu, yang Dia sendiri adalah zat sesuatu itu”*, merupakan prinsip kesatuan wujud. Faham *Wahdatul Wujud* Ibnu Arabi sampai kepada kesimpulan Faham *“Wihdatul Adyan”*. yakni bahwa *“Dia adalah sesuatu yang disembah adalah salah satu dari tempat Tuhan menyingkapkan Dirinya. Inilah yang dimaksudkan Ibnu Arabi dengan agama cinta, agama universal atau jiwa agama besar.”*⁹⁷

Kalau Syekh Ahmad Syamsuddin Al Banjari, riwayat hidupnya dan bahkan makamnya tidak diketahui, sedangkan Syekh Muhammad Nafis makamnya sempat diragukan tempatnya, maka makam Syekh Abdul Hamid Abulung makamnya jelas tempatnya. Beliau dimakamkan di desa Abulung-Sungai Batang Martapura-Kabupaten Banjar.

d. Datu Sanggul

Tokoh sufi yang keempat yang pernah hidup dalam masa Kerajaan Banjar adalah *Datu Sanggul*. Datu Sanggul adalah nama panggilan sedangkan nama sebenarnya tidak diketahui dengan jelas. Menurut penuturan beberapa tetua dari desa Tatakan (Kecamatan Tapin Selatan-Kabupaten Tapin), bahwa Datu Sanggul itu adalah seorang pendatang dari Palembang dan nama sebenarnya adalah Abdussamad. Beliau datang ke Tatakan yang waktu itu dalam wilayah Kerajaan Banjar untuk berguru kepada seorang tokoh yang berilmu tinggi Datu Suban di Muning. Menurut pengetahuan orang kampung saat itu bahwa Datu Sanggul itu adalah orang biasa, tidak diketahui mempunyai ilmu pengetahuan. Pada masa itu yaitu masa Kerajaan Banjar, agama Islam adalah agama resmi kerajaan dan karena itu pula bagi mereka yang ketahuan tidak menjalankan Shalat dijatuhi hukuman, khususnya pada Shalat Jum'at. Menurut kesaksian masyarakat yang dapat dipercaya bahwa setiap hari Jumat, Abdussamad tidak pernah berShalat ke masjid. Karena terlalu sering tidak ke masjid Shalat Jumat, sampai akhirnya benda berharga yang dapat dijadikan hukuman denda hanya tinggal satu-satunya yang sangat disayangi ialah kapak.

Masyarakat setempat baru mengetahui bahwa Abdussamad seorang tokoh yang berilmu tinggi ialah ketika Abdussamad meninggal, yang saat itu dikunjungi oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Pada waktu Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari menuntut ilmu di Mekkah al Mukarramah, setiap hari Jumat beliau berjumpa dengan Abdussamad ini dan bersama-sama menjalankan Shalat Jumat di sisi Baitullah. Setelah selesai Shalat Jumat, beliau kembali ke Tatakan. Untuk kebenaran Abdussamad yang berasal dari Tatakan ini, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari meminta agar pada hari Jumat yang akan datang dibawa buah mangga yang ada di halaman istana kerajaan yang memang dahulu ditanam oleh beliau. Pada hari Jumat berikutnya, buah mangga yang masih kelihatan getahnya karena baru dipetik, dibawa oleh Abdussamad, dan pada hari itu pula orang di istana ribut karena buah mangga yang paling besar sudah dipetik orang dan bahkan getahnya masih menetes.

Demikian salah satu cerita yang berkembang luas di daerah Kabupaten Banjar tentang tokoh Datu Sanggul ini.

Cerita yang juga menarik tentang tokoh ini adalah dialog beliau tentang ilmu tinggi tersebut dengan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari yang ditulis dalam sebuah kitab. Dialog itu diakhiri dengan dibaginya kitab itu dan dipotong miring itu. Kitab itu dikenal sebagai Kitab Barencong.⁹⁸

⁹⁷ Gusti Abdul Muis, “Tasawuf Sunni”, Makalah Seminar Pengajian Tasawuf di Kalimantan, Banjarmasin, 1985.

⁹⁸ Abdurrahman, *Sejarah...*, op. cit.

Sebagai sumber sejarah cerita seperti ini besar sekali artinya dan harus dikaji lebih mendalam dengan memperbandingkan dengan sumber-sumber lain dan dengan multi analisa untuk dapat memahami apa sebenarnya yang terjadi dibalik cerita itu. Tetapi yang jelas Datu Sanggul adalah tokoh seorang sufi yang pernah hidup dalam Kerajaan Banjar sezaman dengan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari.

4. Faham Ahlussunah Waljamaah di Kerajaan Banjar

Secara umum yang dimaksud dengan Faham *ahlussunnah Wal Jama'ah* adalah orang-orang yang mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Orang-orang yang mengamalkan segala ajaran Nabi Besar Muhammad saw disebut *ahlussunah* karena mereka berpegang teguh dan mengikuti sunnah Nabi saw. Mereka juga disebut *al Jama'ah* karena bersatu di atas *alhaq* atau kebenarannya. Mereka tidak berselisih dalam agama. Mereka berkumpul pada *imam al haq* dan mereka juga mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan *para salaf*. *Para salaf* adalah generasi pertama dari umat Islam, yaitu para sahabat, tabi'in, dan para imam kebenaran. Mereka adalah tiga generasi yang mendapat kemuliaan.

Karena mereka mengikuti sunnah Rasullullah saw dan jejak para salaf (*atsar*) maka mereka disebut *ahlul hadist*, *ahlul atsar*, dan *ahlul ittiba'* (orang yang mengikuti sunah. Mereka juga disebut *Al Tha'fah Al Manshurah* (Kelompok yang dimenangkan Allah dan *Al Firqah An Najiyah* (golongan yang selamat)).⁹⁹

Kaum *Ahlussunah wal Jamaah* ialah kaum yang menganut i'tiqad sebagai i'tiqad yang dianut oleh Nabi Muhammad saw dan sahabat-sahabat beliau. I'tiqad yang dianut oleh Nabi Muhammad saw dan sahabat-sahabat beliau. I'tiqad Nabi dan Sahabat-sahabat itu telah termaktub dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul secara terpencar-pencar, belum tersusun secara rapi dan teratur, tetapi kemudian dikumpulkan dan dirumuskan dengan rapi oleh seorang ulama Ushuluddin yang besar, yaitu Syekh Abu Hasan Ali al Asy'ari yang lahir di Basrah tahun 260 H dan wafat di Basrah pula tahun 324 H dalam usia 64 tahun. Rumusan yang hampir sama adalah rumusan yang dilakukan oleh Abu Mansur al Maturidi yang wafatnya di Maturidi Samarkand, Asia Tengah dalam tahun 33 H, 9 tahun setelah Imam Abu Hasan Asy'ari wafat. Karena itulah apabila disebut kaum *Ahlussunah wal Jamaah*, maka maksudnya ialah orang-orang yang mengikuti faham Asy'ari dan faham Abu Manshur al Maturidi.¹⁰⁰ Dalam bidang *fiqih* pendekatannya adalah mengikuti salah satu dari Imam yang empat, yaitu *Imam Syafei*, *Maliki*, *Hambali* dan *Imam Hanafi*. Seangkan dalam bidang *Tasawuf* sesuai dengan ajaran *Imam al Junaidi al Bagdadi* dan *Imam Al Ghazali*. Secara umum disebut sebagai *Kaum Sunni*, kependekan dari *Ahlussunah wal Jamaah*, orang-orangnya di sebut *Sunniyan*.

Pada masa Kerajaan Banjar *i'tiqad Ahlussunah wal Jamaah* merupakan i'tiqad yang dipegang teguh dan dikukuhkan kemudian dalam Undang-undang Sultan Adam, seperti yang tertera dalam Perkara pertama dari undang-undang itu :

"Adapun perkara yang pertama aku suruhkan sekalian ra'yatku laki-laki dan bini-bini beratikat ahlal sunat waljamaat dan jangan ada seorang ber'itiquad lain dari i'tiquad ahlal sunat waljamaah kusuruh bapadah kapada hakimnya dan hakim itu mamariksa lamun banar salah i'tiquad yang betul lamun anggan inya dari pada tobat bapadah hakim itu kayah diaku".

Pasal ini jelas sekali ketetapanannya bahwa bagi setiap penduduk dalam wilayah Kerajaan Banjar laki-laki atau perempuan untuk berpegang pada *i'tiqad Ahlussunah wal Jammah*. I'tiqad ini adalah ajaran atau faham yang dirumuskan oleh Imam Abu Hasan al Asy'ari dan Imam Abu Mansur al Maturidi.

⁹⁹ Nashir Abdul Karim Al-Aql, *Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlussunah wal Jamaah*, Gema Insani Press, Jakarta, 1992, hal.9.

¹⁰⁰ Siradjuddin Abbas, *I'tiqad Ahlussunah Wal Jamaah*, Pustaka Tarbiyah, Jakarta, 1984, hal. 17.

Dalam bidang *syariat* jelas Kerajaan Banjar berpegang pada *Mazhab Imam Syafei*. Jadi *Ahlussunah wal Jamaah* yang menjadi pegangan dalam masa Kerajaan Banjar adalah i'tiqadnya menurut rumusan Hasan al Asy'ari dan Abu Musa al Maturidi, sedangkan dalam bidang *fiqh* atau *bidang syariat* berpegang pada mazhab Imam Syafei. Hal ini terlihat dalam ketegaran hukum yang diberlakukan bagi rakyat dalam wilayah Kerajaan, dalam perkara lima dari Undang-undang Sultan Adam :

"Tiada kuberikan sekalian orang menikahkan perempuan dengan taklik kepada majahab yang lain daripada yang majahab Syafei maka siapa yang sangat bahajatkan bataklid pada menikahkan perempuan itu bapadah kayah diaku dahulu".

Undang-undang ini sangat tegas melarang menikahkan perempuan bermazhab lain selain mazhab Syafei. Mazhab Syafei merupakan mazhab kerajaan, dan semua ketetapan hukum harus berdasarkan mazhab Syafei tersebut.

5. Riwayat Hidup Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari

Dari kurun waktu masa hidup beliau sebagaimana tercatat pada berbagai riwayat hidup kita dapat membaginya dalam tiga babakan :

- a. Masa kecil dan menuntut ilmu di kampung halaman selama kurang lebih 30 tahun. Pada masa ini masih belum ada karya beliau yang dapat ditonjolkan baik bagi perkembangan agama Islam pada umumnya dan perkembangan hukum Islam pada khususnya. Sebagian besar hidup beliau dilakukan di lingkungan istana.
- b. Masa menuntut ilmu di tanah suci (Mekkah dan Madinah) kurang lebih 35 tahun lebih banyak berupa usaha pendalaman dan pengkajian berbagai bidang ilmu termasuk ilmu hukum Islam. Sekalipun beliau berada di tanah suci hubungan dengan daerah rupanya tidak pernah putus seperti umpunya terbukti dengan diskusi beliau kepada guru-gurunya mengenai masalah sembahyang Jumat dan pungutan pajak yang dilakukan oleh Sultan. Namun sayangnya data mengenai hal tersebut tidak pernah diketemukan lagi.
- c. Masa penerapan ilmu yang mencakup tidak kurang dari 40 tahun (perhitungan tahun umumnya dilakukan orang menurut tahun hijrah) sebagai masa yang mempunyai pengaruh besar bagi perkembangan hukum Islam di daerah ini.¹⁰¹

Beliau dilahirkan dari seorang ayah Abdullah dan ibu Siti Aminah di desa Lok Gabang, sebuah desa dalam wilayah kerajaan Banjar, 12 km dari Martapura pada tahun 1710 M, atau 15 Safar 1122 H., pada masa pemerintahan Sultan Hamidullah (1700-1734) yang bergelar Sultan Kuning. Karena budi pekertinya yang baik dan menunjukkan tanda-tanda kecerdasannya, beliau dipelihara oleh Sultan sebagai anak angkat. Oleh Sultan, Mohammad Arsyad dikirim ke Mekkah untuk memperdalam pengetahuan agama, dan belajar di sana selama 35 tahun lamanya.¹⁰²

Menurut Shaghir Abdullah bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah keturunan dari Sultan Sulu-Mindanao di Philipina Abu Bakar Balewa yang melarikan diri karena berperang dengan Portugis. Informasi ini diperoleh Shaghir Abdullah dari salah seorang keturunan Syekh Muhammad Arsyad sendiri. Dalam buku Saqhir Abdullah pula dapat kita peroleh informasi yang berbeda yang dikutipnya dari Kitab *Al Iqdul Farid min Jawahirul Asanid* karya Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al Fadani al Makki yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad Arsyad mempunyai ayah yang bernama Abdus Shamad Al Banjari.¹⁰³

¹⁰¹ Abdurrahman, *Sejarah...*, *op.cit.*

¹⁰² A. Gazali Usman, *op.cit.*, hal. 56.

¹⁰³ Muhammad Shaghir Abdullah, *Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary Matahari Islam*, Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islamiyah, Al Fatanah, Kuala Mempawah, 1983, hal. 8.

Riwayat hidup Syekh Muhammad Arsyad berkembang dari mulut kemulut yang kemudian oleh keturunan beliau ditulis beberapa manakib yang pada mulanya tidak dipublikasikan. Manakib seperti ini pernah ditulis oleh Al'alimul Fadhil H. Muhammad As'ad Khatib bin Alimul Alamah Pangeran H. Ahmad Mufti bin Syekh Muhammad Arsyad. Biografi pertama yang pernah diterbitkan adalah karya yang ditulis oleh buyut beliau sendiri : Syekh H. Abdurrahman Shiddiq (1857-1939) yang pernah menjabat sebagai Mufti Kerajaan Indragiri yang berjudul "*Risalah Sajaratul Arsyadiyah*". Dalam buku Shaghir Abdullah yang memperoleh informasi dari tuan Guru Mufti H. Abdurrahman Shiddiq bahwa ayah Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari bernama Abdullah berasal dari keturunan Syayid Abu Bakar yang berasal dari Palembang yang kemudian pindah ke Johor. Syayid Abu Bakar ini kemudian menyebarkan agama Islam di Brunei Darussalam, Sabah dan Kepulauan Sulu Philipinan Selatan. Adapun Abdullah orang tua Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari sebelum pindah ke Kerajaan Banjar pernah terlibat dalam beberapa kali peperangan yang disifatkan sebagai *Jihad fisabilillah* melawan pihak penjajah Belanda dan Spanyol pada kejadian di banyak tempat.¹⁰⁴

Risalah Sajaratul Arsyadiyah ini ditulis pada tahun 1349 H (1930 M) dan baru selesai pada tahun 1350 H (1931) tetapi baru diterbitkan di Singapura pada tahun 1937. Dalam buku yang terdiri atas 103 halaman ini diceritakan tentang kapan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dilahirkan, masa kanak-kanaknya, kemudian dikirim Sultan ke Mekkah al Mukarramah untuk belajar, kembali ke tanah air dan mengajar sampai meninggal dunia. Kitab ini sekarang dianggap sebagai satu-satunya sumber sekunder dari riwayat Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari yang dapat dipegangi, meskipun mengenai perhitungan tahun perlu dikaji lebih lanjut.

Syekh Muhammad Arsyad berada di tanah suci selama 35 tahun, yaitu 30 tahun di Mekkah al Mukarramah dan 5 tahun di Madinah. Selama di tanah suci beliau berteman dengan beberapa orang yang kemudian menjadi ulama besar antara lain Syekh Abdus Samad Palembani, Abdurrahman Masri dan Abdul Wahab Bugis. Diantara guru-guru beliau selama mengaji di Mekkah dan Madinah ialah Syekh Athoullah ulama lulusan Al Azhar Mesir, Syekh Muhammad Abdul Karim Saman al Madani seorang ahli tasawuf dan Syekh Suleman Kurdi. Selama di Mekkah beliau sempat pula mengajar di Masjidil Haram Mekkah, suatu hal yang jarang terjadi bagi seorang ulama Indonesia.

Diantara guru-guru beliau selama di Mekkah adalah : "Alimul 'Alamah Syekh 'Athailah, yang memberi izin untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjid al Haram. Selama beliau mengajar di Masjidil Haram, terdapat seorang muridnya dari mahluk golongan jin Islam yang namanya Al Badakut al Ina. Karena setianya Al Badakut al Mina mengikuti Syekh Muhammad Arsyad ketika beliau kembali ke Martapura, Kerajaan Banjar. Masyarakat Martapura menyebutnya Datuk Badok.¹⁰⁵

Guru beliau dalam bidang tasawuf adalah Saidil'arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As Saman al Madani yang mengajar di Madinah, sehingga beliau mendapat ijazah dari guru besar tersebut dengan kedudukan sebagai Khalifah.

Ketika Mohammad Arsyad pulang, kembali ke tanah air kerajaan Banjar, pemerintahan sudah berganti. Sultan yang memungut beliau menjadi anak angkat dan mengirim ke Mekkah untuk belajar, yaitu Sultan Hamidullah sudah meninggal, begitu pula penggantinya yang membiayai selama menuntut pada saat pemerintahan dipegang oleh Pangeran Natadilaga atau Sultan Tahmidullah, putera dari Sultan Tamjidillah.

Dalam perjalanan pulang ke tanah air, beliau sempat singgah ke Jakarta dan melakukan pembetulan arah kiblat beberapa masjid dan ini terjadi pada masjid Jembatan Lima menurut memori yang dibuat pada tanggal 4 Safar 1186 H bersamaan dengan 7 Mei 1772.¹⁰⁶ Beliau baru sampai ke

¹⁰⁴ Muhammad Shaghir Abdullah, *op.cit.*, hal.6.

¹⁰⁵ Yusuf Khalidi, *Ulama Besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad al Banjari*, Al Ihsan, Surabaya, 1972.

¹⁰⁶ Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al Banjari (Tuan Guru Besar)*, Sekretariat Madrasah Sullamul Ulum, Dalam Pagar Martapura, 1980, hal. 31.

Kerajaan Banjar, tanah air beliau Martapura pada bulan Ramadhan 1186 H atau Desember 1772. Sehingga ada sekitar tujuh bulan berkeliling baru sampai di kota Martapura.

Ketika sampai di Martapura, Kerajaan Banjar diperintah oleh Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidillah yang bergelar Susuhun Nata Alam (1761-1801). Jadi selama beliau mengaji di Makkah al Mukarramah mengalami tiga orang sultan yang memerintah Kerajaan Banjar. Beliau berangkat pada masa pemerintahan Sultan Kuning atau Sultan Hamidullah, kemudian diganti oleh Sultan Tamjidillah atau Sultan Sepuh dan kemudian waktu kembali kerajaan dijabat oleh Sultan Nata Alam ini yang disebutkan Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidillah yang diabadikannya dalam kitab *Sabilal Muhtadin*, “*seorang raja yang amat besar Fahamnya dan memiliki kecerdikan dan memperbaiki segala pekerjaan agama dan pekerjaan dunia*”. Sedangkan Sultan sendiri ketika akan meninggal dunia berwasiat kepada keturunannya bahwa : “*Syekh Muhammad Arsyad adalah seorang sahabatku dan dia pula seorang guruku, maka aku wasiatkan kepada anak cucuku turun temurun janganlah durhaka kepadanya dan anak cucu serta zuriatnya, jika durhaka tidaklah ia selamat*”.¹⁰⁷ Hubungan sultan ini diperkuat lagi dengan ikatan perkawinan, ketika Sultan mengawinkan Syekh Muhammad Arsyad dengan cucunya Ratu Aminah binti Pangeran Thoha bin Sultan Tahmidillah.

Kedatangan Syekh Muhammad Arsyad, membawa perbaikan dalam bidang pengadilan, karena usul beliau untuk membentuk Mahkamah Syariah disetujui Sultan dengan jabatan Mufti sebagai Ketua Hakim Tertinggi, yang berfungsi pula untuk mengawasi pengadilan umum. Mufti didampingi oleh seorang Qadi ialah pelaksana hukum dan mengatur jalannya pengadilan, agar hukum Islam berlaku dengan wajar. Hukum Islam dijadikan hukum pemerintahan sebagai sumber pokok dalam membuat undang-undang dan peraturan yang berdasarkan Qur'an dan Hadist. Hukum yang berlaku berdasarkan *Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Syafei*. Jabatan Qadi pertama yang diangkat Sultan ialah cucu Syekh Muhammad Arsyad, Muhammad As'ad.

Disamping mengajar pada lembaga pesantren di dalam Pagar Martapura untuk mendidik para da'i, beliau juga banyak mengarang bermacam kitab sebagai penuntun bagi umat Islam.

Karangan itu antara lain ialah :

- (1) *Ushuluddin*, yang berisi sifat-sifat Tuhan semacam pelajaran Sifat Dua Puluh yang umum sekarang.
- (2) *Luqthatul 'Ajlan*, berkenaan dengan sifat perempuan yang mengalami masa haid yang bertalian dengan masalah ibadah.
- (3) *Kitab Faraidh*, yang berhubungan dengan masalah warisan dan cara pembagiannya.
- (4) *Kitabunnikah*, berisi tentang pengertian tentang wali dan bagaimana cara akad-nikah.
- (5) *Kitab Tuhfaturraghibien*, berisi penjelasan menurut para Ahlussunah wal Jamaah untuk menghapus kebiasaan yang menyebabkan orang tergelincir kearah syirik dan murtad.
- (6) *Qaulul Mukhtashar*, berisi tentang penjelasan tanda-tanda akhir zaman dan tanda-tanda datangnya Imam Mahdi.
- (7) *Kitab Kanzul Ma'rifah* kitab yang membahas masalah Tasawuf.
- (8) *Sabilul Muhtadin Lit-Tafaqquh Fi Amriedien*, Kitab Fiqih dalam bahasa Melayu, huruf Arab yang sangat mendalam disertai berbagai masalah-masalah sulit.

Kitab *Sabilal Muhtadin*, ditulis atas permintaan Sultan Tahmidullah (Pangeran Nata Dilaga, Nata Alam) bin Sultan Tamjidillah. Kitab tersebut ditulis pada tahun 1193 H dan selesai pada tahun 1195 H (1779-1780), baru dicetak untuk pertama kali dengan serempak pada tahun 1300 H (1882 M) di Makkah, Istanbul dan Kairo. Kitab ini sangat terkenal di seluruh Asia Tenggara seperti Philipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei Darussalam, Kampuchea, Vietnam dan Laos, karena kaum Muslimin di daerah-daerah tersebut masih menggunakan bahasa Melayu.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Abu Daudi, *ibid.*, hal. 45.

¹⁰⁸ M. Asywardie Syukur, *Kitab Sabilal Muhtadin*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1985.

Menurut Pengetua Pusat Sejarah Negara Brunei Darussalam YDM Pehin Orang Kaya Amar Diraja Dato Seri Utama Dr. Awang H.M. Jamil Al Sufri, yang disertai oleh stafnya Dayyangu Hajjah Rosnah binti Pengiran Bakar dan Dayyang Jamaliah binti H. Abdul Latif, menjelaskan bahwa *Kitab Sabilal Muhtadin* sampai sekarang dipakai di Negara Brunei Darussalam untuk orang belajar Fiqih dan penyebar agama Islam di Brunei adalah cucu dari Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, dan buyut beliau menjadi penyebar Islam di Philipina.¹⁰⁹

Cucu Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, Ustadzah Fatimah telah menyusun *Kitab Perukunan Besar*, yang berisi cara-cara ibadah, rukun sembahyang, puasa. Kitab ini tersebar sampai sekarang di seluruh Indonesia karena bekal-kali cetak ulang.

Keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari menjadi ulama-ulama besar yang tersebar di seluruh Kalimantan Selatan, Tengah dan Timur, bahkan juga di Indragiri, Brunei dan Philipina.

Selain itu dari penelitian yang dilakukan oleh IAIN Antasari Banjarmasin menyebutkan masih ada lagi karya tulis Syekh Arsyad yang berjudul "*Fathul Rahman bin Syarh Risalat al Ruslan*" sebagai komentar tulisan Syekh Zakaria al Anshari.¹¹⁰ Di samping tulisan langsung masih ada lagi tulisan yang dibuat oleh keturunan beliau, Abdurrahman Shidiq dalam tulisan beliau¹¹¹ menyebutkan bahwa salah seorang cucu beliau Fatimah binti Syarifah binti H. Abdul Wahab Bugis binti Maulana Syekh Muhammad Arsyad lebih tepat saudara sepupu dari Mufti H. Muhammad Arsyad yang kemudian menjadi guru perempuan dan menterjemahkan suatu kitab Melayu tentang fiqh yang dinamakan "*Perukunan Besar*" yang dicetak penerbit Mekkah Nursyarafah dan dinamakan *Parukunan Jamaluddin*. Ada yang mengatakan bahwa kitab *Parukunan Jamaluddin* adalah hasil dikte pelajaran Syekh Arsyad yang diedit oleh Fatimah. Sedangkan menurut Ahmad Basuni yang menulis ini bukan Fatimah tetapi ibunya yang bernama Syarifah.¹¹² Selain *Parukunan Jamaluddin* masih ada *perukunan* lain yang disusun oleh H. Abdurrasyid (1885-1934) yang disusun berdasarkan tulisan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari yang oleh seorang pedagang dari Negara dicetak di Singapura pada tahun 1907.¹¹³

Dilihat dari tulisan-tulisan beliau tersebut maka karya tulisnya diarahkan pada empat sasaran, yaitu :

- (1) Karya yang ditujukan kepada orang awam yaitu semacam pelajaran praktis. Hal ini tampak seperti ditulisnya ajaran-ajaran beliau oleh Fatimah binti Abdul Wahab Bugis dengan nama "*Parukunan Basar*" yang kemudian disebut sebagai "*Parukunan Jamaluddin*" sebagai pelajaran ibadah orang awam.
- (2) Karya-karya yang ditujukan untuk orang yang terpelajar dan karenanya disusun dengan menggunakan dalil-dalil yang terperinci dan pendapat para ulama. Sebagai contoh dalam hukum ialah kitab "*Sabilal Muhtadin*" dan kitab "*Luqthatul Ajlam*" walaupun antara dua kitab tersebut terlihat adanya beberapa duplikasi.
- (3) Karya-karya yang diajukan kepada orang alim yang menguasai bahasa Arab. Kitab ini ditulis dalam bahasa Arab misalnya "*Hasyiah Fathil Jawaad*" yang merupakan komentar dari kitab "*Fathul Jawaad*" yang ditulis oleh Syekh ibn Hajar al Haitami. Adanya tulisan seperti ini menunjukkan keterlibatan beliau seperti lazimnya ulama masa itu untuk meringkas, memperluas, memberi komentar atau catatan pinggir terhadap kitab-kitab ulama pendahulunya.
- (4) Karya-karya yang ditujukan kepada para pejabat petugas agama sebagai petunjuk pelaksanaan secara teknis, seperti misalnya "*Kitabun Nikah*" dan "*Kitabul Faraidh*" yang merupakan petunjuk

¹⁰⁹ Banjarmasin Post, 31 April 1987.

¹¹⁰ IAIN Antasari, "Laporan Hasil Seminar Sehari Pemikiran-Pemikiran Keagamaan Syekh Muhammad Arsyad al Banjari", Banjarmasin, 1989, hal. 29.

¹¹¹ Abdurrahman Shiddiq, *Risalah Sajaratul Arsyadiyah*, Singapura, 1937, hal. 29.

¹¹² Ahmad Basuni, *op.cit.*, hal. 27.

¹¹³ M. Laily Mansyur, *op.cit.*, hal. 34.

teknis menyelenggarakan pernikahan dan pembagian waris di kalangan umat Islam. Ciri khas dari karya ini adalah pendek, tegas dan tidak mencantumkan dalil-dalil atau pendapat ulama yang dijadikan referensi.¹¹⁴

Tidak semua karya tulis beliau dapat diketemukan lagi pada masa sekarang dan masih ada pula yang diperdebatkan lain seperti kitab *Tahfatur Raghibin*. Diantara karya-karya beliau tersebut alah Kitab Hukum Islam/Fiqih yang berjudul *Sabilal Muhtadin fi afaqquhi fi amri din* yang menurut pengantarnya ditulis atas permintaan Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidillah. Kitab ini mulai ditulis pada tahun 1193 H (1779 M) yang berisi uraian mengenai masalah fiqih bidang ibadat. Diperkirakan menurut rencana semula sebagaimana dapat kita tangkap pada bagian pendahuluannya kitab ini paling tidak akan terdiri atas 4 bagian sebagaimana lazimnya kitab-kitab fiqih yang beredar pada masa lampau yaitu bagian *ibadah, muamalah, munakahat* dan *jinayat*. tetapi sampai akhir hayat beliau yang rampung dan beredar terdiri atas 2 jilid besar dan hanya membicarakan tentang ibadah semata. Mungkin beliau hanya mencukupkan uraiannya sampai di sana dan ada pula kemungkinan lain beliau tidak punya kesempatan untuk menyelesaikan seluruhnya. Satu hal yang menarik dari kitab *Sabilil Muhtadin* ini sekalipun ada beberapa ahli yang mengeritikanya sebagai kitab yang tidak mengandung hal-hal baru¹¹⁵ ialah bahwa kitab ini membicarakan hal-hal yang kontekstual dalam masalah hukum dikaitkan dengan kondisi daerah Kalimantan Selatan.

Hasil-hasil diskusinya mengenai berbagai masalah hukum seperti hasil diskusi dengan gurunya Syekh Sulaiman Kurdi ketika ia berada di Madinah antara lain misalnya tentang pemungutan pajak yang dilakukan oleh Sultan Banjar dan mengenai sistem denda bagi orang yang tidak pergi ke Jumat, sebagaimana kemudian dijadikan buku oleh Syekh Sulaiman Kurdi dengan judul "*Al Fatwa*". Hanya saja sayangnya kitab tersebut tidak beredar dikalangan ummat Islam di daerah Kalimantan Selatan sehingga tidak diketahui secara persis duduk persoalannya dan bagaimana fatwa dari Syekh Sulaiman Kurdi tentang hal yang ditanyakan tersebut.

Fatwa-fatwa lepas/bebas yang pernah dikemukakan dalam berbagai pengajaran/ pengajian untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya atau memberi keputusan terhadap kasus tertentu atau dalam bentuk *action* tertentu untuk hal yang bersifat luar biasa, sehingga untuk persoalan ini dapat dikemukakan dua permasalahan.

- (1) Untuk isi pengajarannya yang disampaikan secara lisan fatwa dan penyelesaian kasus yang beliau berikan umumnya diingat dan atau dicatat oleh para murid atau orang yang meminta fatwa/pendapat tersebut. Mungkin dalam persoalan semacam inilah yang kemudian dicatat/ditulis dalam kitab *Parukunan Jamaludin* dan *Parukunan Abdurrasyid*. Sedang selebihnya hidup sebagai pendapat umum di kalangan masyarakat Banjar.
- (2) Untuk hal-hal yang bersifat luar biasa umumnya sudah tercatat dalam sejarah Islam di Kalimantan Selatan sebagai sesuatu yang sudah populer seperti misalnya tindakan beliau membetulkan arah kiblat Masjid Luar Batang dan Masjid Jembatan Lima Jakarta, tindakan beliau untuk memfasakh perkawinan anak beliau Syarifah dengan Usman karena beliau sudah mengawinkannya dengan Abdul Wahab Bugis di Tanah Suci, fatwa hukuman mati yang diberikannya terhadap H. Abdul Hamid Abulung yang menganut tasawuf aliran *wahdatul wujud*, dan lain sebagainya.

Pembentukan Pusat pendidikan dan pengembangan agama Islam yang dimaksudkan sebagai penyiapan kader-kader ulama terutama dikalangan keturunan beliau sendiri. Setelah perkawinan beliau dengan Ratu Aminah, cucu Sultan Tamjidillah bin Sultan Tahmidillah oleh Sultan kepada beliau diberi sebidang tanah yang kemudian dibuka sebagai pusat kegiatan pendidikan yang kemudian dikenal sebagai daerah "*Dalam Pagar*". Disinilah untuk pertama kali dikenal suatu pusat pendidikan

¹¹⁴ Abdurrahman, "Studi...", *op.cit.*, hal. 77; M. Asywadie Syukur, *loc.cit.*

¹¹⁵ Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984.

Islam yang mirip sebagai pesantren pada masa sekarang walaupun pada masa itu kita belum mengenal adanya istilah *Pesantren*. Dari sinilah kemudian lahir sejumlah ulama besar dan terkenal yang kemudian menyebar keseluruh penjuru Kalimantan bahkan juga sampai ke luar Kalimantan seperti Riau, Malaysia, Fatani dan sebagainya. Umumnya mereka muncul sebagai *Mufti* atau *Qadhi*.

Sebagai konseptor dan sekaligus mempelopori pembentukan Lembaga "*Mufti*" dan "*Qadhi*" sebagai suatu bentuk lembaga peradilan menurut ketentuan hukum Islam dalam struktur Pemerintahan Kerajaan Banjar pada masa pemerintah Sultan Nata alam atau Penambahan Nata yang memerintah pada tahun 1761-1801¹¹⁶ atau 1785-1808.¹¹⁷ Pembentukan lembaga ini adalah dimaksudkan sebagai usaha melaksanakan ketentuan hukum Islam dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa baru atas inisiatif dari Syekh Muhammad Arsyad lah lembaga peradilan yang mandiri dalam kerajaan Banjar diadakan yang berarti pada masa sebelumnya kita belum mengenal adanya lembaga peradilan agama yang berdiri sendiri. Lembaga inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bagi pemerintah Belanda untuk membentuk suatu lembaga peradilan agama secara khusus untuk daerah Kalimantan Selatan pada tahun 1937 dengan nama "*Kerapatan Kadhi*" dan Kerapatan Kadhi Besar, yang berlaku terus sampai sekarang.

Pengaruh lebih jauh dari pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam bidang *hukum* muncul secara konkrit ketika *Sultan Adam Al Wasik Billah* yang memerintah di Kerajaan Banjar (1825-1857) yang diperkirakan pada masa mudanya pernah menjadi murid dari Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari menetapkan suatu ketentuan hukum yang sampai sekarang dikenal dengan nama "*Undang-undang Sultan Adam*" pada tanggal 15 Muharram 1251 (1835). Dalam penyusunan Undang-undang ini peranan dari kelompok ulama sangat besar sekali. Bahkan dalam salah satu pasal dari Undang-undang ini Sultan dengan tegas menyatakan sekalian Kepala *jangan ada yang menyalahi fatwa Haji Jamaluddin* (pasal 31) . Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah Mufti Kerajaan pada saat itu dan beliau lah yang namanya dipergunakan dalam penulisan kitab "*Parukunan Besar*" yang juga dikenal sebagai "*Perukunan Haji Jamaluddin*". Hanya saja tidak diketahui apa sebenarnya fatwa Haji Jamaluddin yang tidak boleh disimpangi itu. Hal ini masih harus diteliti lebih jauh.¹¹⁸

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari wafat pada 6 Syawal 1227 H dalam usia 105 tahun bertepatan dengan 13 Oktober 1812. Dimakamkan di desa Kalampayan, hingga terkenal dengan sebutan *Datu Kalampayan*.

a. Pemikiran-Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari di Bidang Akidah Islam

Dalam kajian yang merupakan hasil Seminar Sehari tentang Pemikiran-Pemikiran Keagamaan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari di IAIN Antasari Banjarmasin tanggal 17 November 1988 dirumuskan bahwa Pemikiran-Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari itu meliputi :

- Pemikiran dalam bidang aqidah Islam,
- Pemikiran dalam bidang syari'at, dan
- Pemikiran dalam bidang da'wah

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam bidang Akidah Islam terlihat dengan jelas dalam usaha beliau untuk memurnikan akidah Islam dari kepercayaan lama yang dalam ajaran agama Islam termasuk *bid'ah dhalalah*. Disamping itu beliau berusaha untuk menegakkan *Ahlus sunah wal Jamaah* dalam bidang akidah dengan melarang ajaran wujudiyah dan berhasil meyakinkan Sultan Nata lam bahwa aliran *Wahdatul Wujud* itu bertentangan dengan faham *Ahlussunah wal Jamaah*.

¹¹⁶ Menurut pendapat J.C. Noorlander, *op.cit.*, hal. 189.

¹¹⁷ Menurut J. Eisenberger, *Kroniek der Euider en Oosterafdeeling van Borneo*, Lim Hwat Sing, Banjarmasin, 1936, hal. 16.

¹¹⁸ Abdurrahman, "*Studi...*, *loc.cit.*

Ada beberapa karya tulis yang dianggap sebagai sumber dalam menggali dan memformulasikan pemikiran-pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari di bidang akidah Islam, antara lain adalah :

1) Tuhfat al-Ragibin fi Bayani Haqiqat Iman al Mu'min Wama Yufsiduh min Riddat al Murtaddin

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari hidup dalam abad ke- 18 dan awal ke-19 dalam wilayah Kerajaan Banjar yang sekarang menjadi wilayah Kalimantan Selatan. Meskipun agama Islam telah tersebar luas di kalangan masyarakat Kerajaan Banjar sejak abad ke- 16, tetapi sisa-sisa kepercayaan lama masih melekat dan hidup di kalangan masyarakat sampai abad ke-18 pada masa Syekh Muhammad Arsyad hidup. Bahkan sampai sekarangpun sisa-sisa kepercayaan lama itu masih ada di beberapa tempat tertentu.

Kepercayaan itu bukan berasal dari agama Islam bahkan bukan membahayakan iman kaum muslimin yang mengerjakannya. Justru itu Syekh Muhammad Arsyad berusaha keras memberantasnya, demi memurnikan akidah Islam dari faham-faham bid'ah.

Diantara upacara tradisional yang mendapat perhatian khusus dari Al Banjari dalam kitab *Tuhfat al Ragribin* adalah *Upacara Menyanggar* dan *Membuang Pasilih*. Upacara itu dilakukan dengan cara memberi sesajen atau ancah yang berisi bermacam wadai dan dipersembahkan untuk ruh-ruh gaib, hantu-hantu itu dapat memberikan pertolongan seperti menyembuhkan penyakit, membuang sial dan mengabulkan segala macam permintaan mereka. Komunikasi dengan ruh-ruh itu dilakukan oleh seorang dukun atau balian dengan cara kesurupan, dimana jasadnya dimasuki ruh halus yang telah menerima sesajen tersebut.

Menurut Al Banjari kedua upacara itu, *Menyanggar* dan *Membuang Pasilih* hukumnya *bid'ah dhalalah*, bid'ah yang menyesatkan. Pelakunya harus segera bertobat. Ada tiga kemungkaran menurut Al Banjari yang terdapat dalam kedua upacara itu. *Pertama*, membuang-buang harta pada jalan yang diharamkan. Orang mubazir adalah teman syaitan dan Al Banjari merujuk kepada Al Qur'an surat Al Isra : 27. *Kedua*, mengikuti syaitan dalam memenuhi segala permintaannya. Larangan mengikuti syaitan itu banyak sekali ditemukan di dalam Al Qur'an. Al Banjari merujuk beberapa ayat antara lain Al Baqarah : 208 ; Al-Nisa : 119 ; Fathir : 6, Yasin : 60. *Ketiga*, mengandung syirik dan bid'ah.

Sehubungan dengan ini Al Banjari memperinci hukum yang dikenakan kepada pelakunya sebagai berikut :

- a. Bila diyakini bahwa tidak tertolak bahaya kecuali melalui kedua upacara itu yaitu dengan kekuatan yang ada pada upacara itu, maka hukumnya kafir.
- b. Bila diyakini bahwa tertolaknya bahaya adalah karena kekuatan yang diciptakan Allah pada kedua upacara itu maka hukumnya bid'ah lagi fasik, tetapi tetap kafir menurut para ulama.
- c. Bila diyakini bahwa kedua upacara itu tidak memberi bekas baik dengan kekuatan yang ada padanya atau kekuatan yang dijadikan Tuhan padanya, tetapi Allah jua yang menolak bahaya itu dengan memberlakukan hukum kebiasaan dengan kedua upacara tersebut, maka hukumnya tidak kafir, tetapi bid'ah saja. Namun bila diyakini kedua upacara itu halal atau tidak terlarang maka hukumnya kafir.

Penjelasan yang menarik dalam *Tuhfat al Ragribin* itu tentang Upacara Menyanggar dan Membuang Pasilih itu yang berbentuk dialog. Untuk membenarkan perbuatan mereka itu, mereka mengatakan bahwa yang diberi makan itu adalah manusia-manusia yang gaib (tidak mati) pada zaman dahulu dari halnya raja-raja Banjar. Mereka diberi makan dengan bermacam makanan yang disajikan, sehingga tidak mubazir. Dengan ini kami minta ditolong supaya dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi. Hal itu sama dengan memberi makanan kepada manusia yang hidup untuk minta bantuannya dalam kehidupan ini. Al Banjari menjawab bahwa alasan mereka itu sebagai berikut : Alasan seperti itu tidak berdasarkan keterangan Al Qur'an, Hadits atau pendapat para ulama, tetapi

hanya berdasarkan mitos saja yang tidak bisa dipegang oleh umat Islam dalam keyakinannya. Justru karena itu tidak boleh dikerjakan meskipun sajen yang diberikan atau diletakkan dalam ancak di makan oleh manusia atau binatang, maka tetap hukumnya haram dan bid'ah karena mubazir dan bid'ahnya.

Jika mereka beralasan bahwa dasarnya berasal dari mitos atau dari orang yang berhubungan dengan manusia gaib itu, maka kedua dasar itupun tidak beralasan dan tidak dapat diterima. Mitos tidak bisa disajikan dalil-dalil keyakinan, sedangkan yang menyarung atau menyusupi dukun tersebut adalah syaitan yang selalu membisikkan hal-hal yang negatif bagi agama. Sebab hanya malaikat dan syaitan yang menyarungi manusia. Malaikat selalu membisikkan yang baik-baik menurut agama, kebalikannya syaitan selalu membisikkan yang jahat atau bertentangan agama.

Jika mereka mengatakan bahwa yang mereka beri makan itu syaitan juga, tetapi memberi makan kepada syaitan itu seperti memberi makan anjing, jadi suatu perbuatan yang mubah. Dijawab oleh Al Banjari bahwa alasan itu pun tidak logis, karena yang dikatakan itu tidak sesuai dengan yang ada dalam hati dimana mereka sangat menghendaki kepada syaitan-syaitan itu dengan bukti memberikan sesajen tersebut yang penuh dengan keindahan dan makanan-makanan istimewa.

Upacara Manyanggar dan Membuang Pasilih hanyalah sebagai contoh yang disebutkan oleh Al Banjari dari sekian banyak upacara yang sifatnya tidak berbeda. Al Banjari menyerukan kepada pihak raja-raja dan para pembesar kerajaan agar menghilangkan upacara-upacara tersebut dari masyarakat Islam di dalam wilayah Kerajaan Banjar.

2) Al Qaw al-Mukhtasar fi'Alamat alMahd al'Muntashar

Risalah ini ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari pada tahun 1196 H sampai kini berbentuk manuskrip dalam pemeliharaan Ahmad Nawawi ibn al Haj Ibrahim al Qadhi Al Banjari al Kayutangi, sebagaimana tertera dikulitnya.

3) Kitab Parukunan

Dalam edisi yang diterbitkan oleh Dar Ihya al Kutub al Arabiyyah Mekkah-Mesir tahun 1912 tertulis bahwa kitab ini disusun oleh Mufti Jamaluddin ibnu Muhammad Arsyad Mufti Banjar, dan ditashih oleh Syekh Abdullah ibnu Ibrahim Langgar al Qadhi dan Syekh Abdurasyid ibnu Isram Panangkalaan Amuntai Al Banjari, bahwa kitab ini ditulis oleh Fatimah binti Abdul Wahab Bugis, cucu Al Banjari. Tetapi karena tawadhunya, ditulis bahwa yang menyusun kitab ini adalah pamannya Syekh Jamaluddin ibn Al Banjari.

4) Parukunan Basar

Kitab ini merupakan versi lain dari Kitab Parukunan. Kitab inipun menurut beberapa penulis, juga ditulis oleh Fatimah binti Abdul Wahab Bugis.

Semua kitab ini tertulis dalam bahasa Melayu-Banjar dan dengan huruf Arab Melayu, yang saat itu merupakan huruf yang dipakai dalam kalangan sangat luas diseluruh Kerajaan Islam di Asia Tenggara.

Ketiga kitab terakhir ini berisi tentang konsep tentang iman, konsep tentang memfungsionalisasikan iman dalam kehidupan, pemurnian akidah, menegakkan ahlussunah wal Jamaah, konsep Faham ahlussunnah wal Jamaah secara luas.

Kesimpulan yang dikemukakan oleh Tim Pengkajian Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari antara lain bahwa, pemurnian akidah dengan memberantas upacara-upacara tradisional yang membahayakan iman, sangat relevan untuk dikemukakan dan diusahakan dalam masyarakat Islam. Sebab sampai sekarang pelbagai praktik kehidupan semacam itu masih banyak berlangsung di tengah-tengah masyarakat Islam, yang kadang-kadang yang berlangsung dibawah pemahaman tertentu

terhadap ajaran agama dan kepentingan pariwisata. Sebenarnya praktik irrasional semacam itu tidak hanya berdampak negatif terhadap pembangunan, sebab hal itu bisa melemahkan rasionalitas dan perilaku orang dalam menghadapi kehidupan.

b. Pemikiran-Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Bidang Syari'at

Dalam bidang Syari'at sumber primer yang ditemukan adalah berupa hasil karya Al Banjari yang terdiri dari kitab :

- *Kitab Sabil al Muhtadin Li al Tafaquh Fi Amr al Din*. Isinya menguraikan masalah fiqh berdasarkan aliran mazhab Syafei. Al Banjari menyebutkan beberapa sumber kitab yang disajikan sumber pengambilan antara lain *Kitab Nihayah*, *Kitab Tuhfah* dan lain-lain. Kitab ini diterbitkan oleh penerbit Darul Ihya al Kutub al Arabiyah, terdiri dari dua juz.
- *Kitab al Nikah*. Isinya membahas masalah perkawinan. Kitab ini diterbitkan oleh Maktabah al Haj Muharram Afandi pada tahun 1304 H, sesudah dicetak pertama kali oleh percetakan al Asitanah al Aliyah di Istanbul.

Sumber di atas semuanya berdasarkan Mazhab Syafei, masalah dan menjabarkannya banyak dikutip dari sumber-sumber ulama Syafiiyah yang mutakhirin seperti *Sarah Minhaj* oleh Syaihu Islam Zakaria Anshari dan *Nihayah* oleh Syekh Jamal Ramli, Mugni oleh Khatib Syarbaini, *Tuhfah* oleh Ibn Hajar haitami. Kelebihan Al banri adalah dalam hal ketepatan memilih masalah yang penting untuk dijelaskan secara terurai, lengkap dan ditulis, yang selanjutnya disempurnakan dengan pemberian misal yang bersifat terapan dalam praktik kehidupan masyarakat umum. Bahkan kadang-kadang penjelasan seperti itu tidak ditemukan dalam kitab-kitab literatur berbahasa Arab. Masalah-masalah itu seperti :

- Najis dan mensucikan.
- Cara mensucikan tempat/kain yang kena najis dengan air yang sedikit.
- Macam-macam hadas yang dibagi kepada tiga tingkatan.
- Pengertian air *musta'mal*.
- *Kaifiat* dan bentuk-bentuk larangan sewaktu *qadha hajat*.
- Anjuran membuat tempat *qadha hajat*.
- Mengeluarkan zakat buah-buahan, terutama mengenai hasil pertanian campuran beririgasi dan tadah hujan.
- Tentang wajib tidaknya zakat hewan ternak.
- Cara penyampaian zakat kepada fakir miskin.
- Tuntutan dan hukum menanam mayat.
- Penyelenggaraan mayat anak-anak keguguran.
- *Ijab* dan *kabul* dalam pernikahan.

Banyak diantara hasil temuan dari kajian pemikiran Al Banjari yang mempunyai relevansi aktual dan penting dalam masyarakat sampai sekarang, seperti:

- Di bidang *thaharah*, seperti pengertian air *musta'mal* dan *kaifiat* mencuci *muntanajis*, tempat ataupun pakaian dengan air yang sedikit.
- Di bidang zakat, seperti zakat hasil pertanian yang digarap dengan teknis campuran antara sistem irigasi dengan tadah hujan, dan konsepsi tentang teknis pengeluaran zakat kepada fakir miskin.

Menarik pula temuan pemikiran Al Banjari yang bersifat kontradiktif dengan praktik nyata yang masih berlaku sampai dewasa ini di kalangan masyarakat umum. Pemikiran tersebut adalah mengenai hukum kenduri yang disebutkan beliau *makruh lagi bid'ah*. Makruh lagi bid'ah itu berlaku baik bagi yang menyelenggarakan maupun orang yang datang memenuhi undangan kenduri tersebut.

c. Pemikiran-Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari di Bidang Da'wah Islamiyah

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari memiliki kemampuan dan kelebihan dalam segala hal, mempunyai pemikiran-pemikiran yang gemilang sehingga adalah wajar kalau beliau mendapat penghargaan dan pengakuan dari seluruh kalangan masyarakat Kerajaan Banjar waktu itu lebih-lebih lagi pengakuan itu oleh masyarakat masa kini. Dalam bidang da'wah beliau dapat mengaplikasikan sebagai manifestasi dari pemikirannya mampu menjangkau kemasa depan, serta menyentuh berbagai aspek kehidupan secara mendasar. Hal ini memang relevan sekali dengan karakteristik da'wah yang memang luwes, elastis atau fleksibel. Secara global ada tiga klasifikasi da'wah yang dikembangkan beliau, yaitu *da'wah bil hal*, *da'wah dengan lisan* dan *da'wah dengan tulisan*.

1) Da'wah Bil hal

Da'wah Bil hal iadalah aktivitas da'wah yang dilakukan melalui perbuatan nyata dengan berbagai macam bentuk kegiatan dan dampak positifnya dapat segera dirasakan, atau paling tidak hasil yang akan dicapai sudah tergambar dengan jelas. Ada beberapa bentuk da'wah bil hal yang dapat dimasukkan yang telah dipraktikkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, yaitu :

- Kaderisasi ulama,
- Memurnikan ajaran agama,
- Melalui perkawinan, dan
- Integritas dengan penguasa dan masyarakat.

Dalam rangka kaderisasi ulama ini Al Banjari membangun sebuah perkampungan yang disebut *Dalam Pagar*. Perkampungan ini diperuntukkan khusus pengajian dan pengembangan Islam dengan membentuk kader ulama yang mampu menjalankan tugas da'wah ke seluruh pelosok wilayah Kerajaan dan bahkan ke luar daerah Kerajaan Banjar. Pengajian dilakukan secara terpimpin, dengan pengawasan yang ketat. Dalam dua dasawarsa, pertama Al Banjari bekerja keras melakukan kaderisasi ulama yang dapat diandalkan dan siap pakai. Mereka yang dipandang sudah mampu dan cukup ilmunya, disuruh pulang ke kampung halaman mereka masing-masing untuk mengajarkan agama atau berda'wah di sana. Proses kaderisasi dilakukan Al Banjari sampai beliau berusia 80 tahun.

Memurnikan ajaran agama Islam dilakukan oleh beliau dengan cara yang bijaksana sehingga tidak terjadi keresahan di kalangan masyarakat. Pada waktu beliau kembali ke tanah air setelah 30 tahun menimba ilmu di kota suci Mekkah al Mukarramah, masyarakat Banjar masih kuat menganut kepercayaan lama berupa kepercayaan kepada animisme dengan melakukan beberapa upacara antara lain *Upacara Menyanggar* dan *Membuang Pasilih*. Upacara itu disertai dengan meletakkan sesajen atau ancak yang dipersembahkan kepada ruh-ruh halus, agar ruh halus tersebut mengabulkan keinginan mereka. Usaha ini berhasil dengan menyadarkan pelakunya, kembali kepada ajaran agama yang sebenarnya.

Selain memurnikan ajaran agama dari pengaruh dan praktik kepercayaan animisme, juga dilakukan beliau membersihkan ajaran agama dari Faham aliran *Wahdatul Wujud* yang diajarkan oleh Syekh Abdul Hamid Abulung. Ajaran Wahdatul Wujud ini bertentangan dengan Faham *Ahlussunah Wal Jamaah* dan bertentangan dengan hukum Kerajaan. Al Banjari berhasil menghapuskan ajaran ini dengan cara bijaksana dengan melakukan perundingan dengan Syekh Abdul Hamid Abulung. Dengan secara arif dan penuh saling pengertian akhirnya Syekh Abdul Hamid Abulung menerima hukuman mati yang dijatuhkan kerajaan kepada beliau. Tindakan penuh kearifan yang dilakukan Al Banjari, akhirnya dapat menyelamatkan ajaran agama Islam dari Faham Wahdatul Wujud yang bertentangan dengan Ahlussunah wal Jamaah dan menyelamatkan kerajaan dari pertentangan umat karena adanya aliran yang berbeda itu.

Pendekatan da'wah melalui perkawinan, ternyata kemudian sangat efektif penyebaran Islam, karena hasil keturunan beliau kemudian tersebar ke seluruh wilayah Kerajaan dan bahkan ke luar

kerajaan dalam mengemban tugas da'wah Islam. Sebagian besar dari keturunan beliau dari sebelas orang isteri dan satu dari keturunan Cina, adalah ulama-ulama besar yang terpendang dan dihormati masyarakat luas.

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari berhasil menyatukan penguasa, golongan raja-raja dan masyarakat golongan jaba atas dasar ikatan agama Islam, sehingga tidak ada jurang pemisah antara ulama, bangsawan dan golongan jaba. Keberhasilan mendekati golongan bangsawan ini, menjadikan Sultan Tahmidullah atau Nata Alam menjadi sahabat dan murid beliau dan bahkan mendukung dan mendorong segala macam kegiatan da'wah yang dilakukan Al Banjari. atas perintah Sultan Hamidullah, Muhammad Arsyad menuntut ilmu agama ke kota suci Mekkah selama 30 tahun. Penggantinya Sultan Tamjidillah yang ikut membiayai Muhammad Arsyad selama menuntut ilmu pengetahuan di Mekkah, dan akhirnya Sultan Tahmidullah atau Nata Alam yang berkuasa ketika Al Banjari kembali ke tanah air, akhirnya menjadi murid dan temannya. Sultan Tahmidullah pulalah yang memerintahkan agar Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari menyusun kitab yang kemudian diberi nama *Kitab Sabilal Muhtadin*, yang merupakan pegangan bagi seluruh rakyat kerajaan dalam melakukan ibadah.

Integrasi beliau dengan masyarakat terwujud dalam bentuk kepeloporan beliau untuk mengolah tanah yang mati sehingga dapat berfungsi untuk dijadikan lahan pertanian yang subur. Salah satu cara yang dilakukan beliau adalah penggalian sungai untuk kepentingan irigasi persawahan yang dikemudian dikenal sebagai *sungai Tuan*.

2) Da'wah dengan Lisan

Pada da'wah dengan lisan adalah pola umum yang dilakukan para muballiqliq sebab paling mudah dan praktis, begitu pula teknis pelaksanaannya dan secara sekaligus dapat mencakup orang banyak. Pola ini pula yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam kegiatan pembinaan kader ulama dalam Majelis Ta'lim beliau di Dalam Pagar dalam wilayah Kerajaan Banjar. Bahkan sebelum pulang ke tanah air beliau telah dipercaya memberi pelajaran di Masjidil Haram di bidang hukum *Syafiiyah*. Salah seorang muridnya adalah seorang golongan jin yang bernama Al Badakut al Mina, ikut bersama beliau ke tanah Kerajaan Banjar.

3) Da'wah dengan Tulisan

Kemampuan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari yang sangat istimewa adalah kemampuan dalam bidang mengarang, menyusun kitab-kitab agama, meliputi bidang *syariat*, *tauhid* atau *ilmu ushuluddin* dan bidang *tasawwuf* sebagaimana besar dari kitab-kitab itu ditulis dalam bahasa Melayu. Beberapa dari kitab-kitab beliau itu masih dijadikan bahan pegangan untuk diajarkan kepada masyarakat luas, bahkan kitab *Sabilal Muhtadin* masih dijadikan kitab rujukan di Brunei Darussalam dan di seluruh kawasan Asia Tenggara.

Hasil karya tulis inilah yang menjadi peninggalan Al Banjari yang paling berharga bagi seluruh masyarakat sampai kini.

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari telah menanamkan enam kerangka dasar yang berfungsi sebagai modal utama keberhasilan da'wah beliau. Enam kerangka ini berperan sebagai strategi da'wah yang dijalankan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari yaitu :

- Da'wah harus diikuti dengan kealiman yang mantap dan penuh ketekunan menuntut ilmu.
- Da'wah harus mempunyai orientasi yang jelas dengan memprioritaskan pembinaan kader ulama sesuai dengan hajat tuntutan masyarakat.
- Da'wah harus mempunyai landasan wawasan yang luas di pelbagai segi kehidupan masyarakat yang dimanifestasikan dalam strategi da'wah bil hal.

- Da'wah harus mampu mengayomi semua lapisan masyarakat sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial antara golongan bangsawan dan golongan jaba dalam masyarakat Kerajaan Banjar.
- Da'wah harus diwujudkan dengan penuh kearifan dan bijaksana sehingga mampu menyentuh peradaban manusia dengan melalui lidah, tulisan dan perbuatan.
- Da'wah harus dijiwai dengan keikhlasan, penuh dedikasi yang tinggi tanpa pamrih sesuai dengan ajaran agama Islam.

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sosok figur ulama yang sukar dicari tandingannya. Corak pemikiran beliau sarat dengan pelbagai bidang kehidupan beragama, terutama yang bertemakan da'wah Islam, apalagi karya-karya tulis beliau yang bersifat monumental sangat berpengaruh di seluruh kawasan Asia Tenggara sampai kini.

6. Penerapan Hukum Islam

Hukum Islam memang merupakan hukum yang bersifat universal akan tetapi juga sebagai hukum yang sangat kontekstual sifatnya. Sebagai hukum yang universal hukum Islam sebagai hukum Allah yang berdasarkan *Al Qur'an* dan *Sunnah* adalah tidak terikat pada tempat dan waktu. Hukum Islam adalah hukum yang berlaku di seluruh dunia. Islam pada berbagai kawasan tempat dan berlaku pada setiap kurun waktu dari masa ke masa. Tetapi berlakunya hukum Islam selalu mempertimbangkan kondisi dan situasi. Kondisi menyangkut keadaan tempat dimana hukum itu berlaku. Sedangkan situasi memacu kepada suasana dalam mana hukum itu berlaku.

Pemikiran tradisional dari suatu masyarakat tertentu sangat mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Dimana hukum syariat tidak dapat menyelesaikan suatu masalah, maka hukum adat muncul menggantikannya dan pada gilirannya pengadilan non syariah akan semakin meluas kewenangannya. Perkembangan sejarah dari suatu tempat akan banyak sekali menentukan penerimaan Hukum Islam dalam masyarakat yang bersangkutan.

Penerapan hukum Islam di daerah Kerajaan Banjar adalah sejalan dengan terbentuknya Kerajaan Islam Banjar dan dinobatkannya Sultan Suriansyah sebagai raja pertama yang beragama Islam pada hari Rabu 24 September 1526. Terbentuknya Kerajaan Islam Banjar menggantikan Negara Daha yang beragama Hindu, dan merubah hukum yang berlaku dari hukum Hindu dengan hukum Islam. Disini terjadi transformasi secara mendadak dari kepercayaan Hindu/Budha berubah menjadi penganut ajaran Islam. Dari penelusuran sejarah kita menemukan adanya suatu data berupa keputusan penting yang pernah diambil oleh Sultan berkenaan dengan masalah agama, yaitu keputusan berpindah agama menjadi penganut ajaran Islam. Keputusan direalisasikan dalam bentuk nyata dengan didirikannya masjid yang dikenal sebagai Masjid Sultan Suriansyah yang sekarang terletak di Kuwin.

Sebelum kerajaan Banjar terbentuk, Islam sudah lama masuk ke daerah ini, sehingga telah terbentuk sebuah masyarakat Islam di sekitar Kerajaan. Dengan dasar ini pula dapat diperkirakan bahwa penerapan hukum Islam dikalangan masyarakat berjalan dengan tenang tanpa ada ketegangan atau keresahan sosial, sehingga dengan mudah masjid dapat didirikan. Demikianlah gambaran tentang pertumbuhan Islam dan penerapan hukum Islam di kalangan masyarakat dalam Kerajaan Banjar sekitar abad ke-16. Yang menjadi dasar bagi perkembangan Islam selanjutnya. Pada abad 17 kita mencatat beberapa kejadian penting dalam perkembangan penerapan hukum Islam ini. Dalam abad itu seorang ulama Banjar yang bernama Syekh Ahmad Syamsuddiin Al Banjari menulis tentang *Asal Kejadian Nur Muhammad* dan menghadihkannya tulisan itu kepada *Ratu Aceh Sulthanah Seri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Johan Berdaulat* (1641-1675). Kitab itu ditulis pada masa pemerintahan Pangeran Tapasena (Adipati Halid). Kitab itu tentang masalah tasawuf yang dipengaruhi ajaran Ibnu Arabi. Dengan demikian dalam abad ke- 17 dalam Kerajaan Banjar terdapat kecenderungan pesatnya perkembangan tasawuf sehingga melahirkan seorang ulama besar dalam bidang itu. Dari sisi lain

dapat dilihat adanya hubungan timbal balik antara Kerajaan Aceh dengan Kerajaan Banjar terutama penyebaran faham dan ajaran tasawuf. Hubungan antar dua kerajaan Islam ini dilanjutkan dengan dikirimkannya Kitab Fiqih *Shirathol Mustaqim* karya ulama besar Aceh *Nurruddin ar Raniri* yang ditulis pada tahun 1055 H. Kitab ini tersebar luas dalam wilayah Kerajaan Banjar sebelum Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari menyusun kitab *Sabilal Muhtadin* sebagai kitab Fiqih penggantinya *Kitab Shirathol Mustaqim* adalah kitab Fiqih berdasarkan mazhab Sya'fi.

Menurut penilaian Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, kitab *Sirothol Mustaqin* itu adalah kitab Fiqih dalam mazhab Sya'fi yang terbaik dalam bahasa Melayu, karena uraiannya terambil dari beberapa buah kitab Fiqih yang terkenal lagi pula dicantumkan beberapa nash dan dalil. Karena itu kitab tersebut banyak memberi manfaat bagi kaum muslimin dalam Kerajaan Banjar.

Dengan demikian sejak abad ke-16 dan 17 dan selanjutnya penerapan hukum Islam yang dianut berdasarkan Mazhab Sya'fi dan kitab *Shirathol Mustaqim* sebagai rujukan dalam menerapkan hukum Islam di kalangan masyarakat luas.

Kendatipun demikian dalam Kitab *Shirathol Mustaqin* itu banyak yang kurang jelas, terdapat kata-kata dalam bahasa Aceh yang tidak dimengerti oleh orang Banjar. Disamping itu dalam beberapa bagian terdapat perubahan, berubah dari teks aslinya. dan pada tempat lain terdapat kata-kata yang hilang atau rusak hal ini disebabkan oleh para penyalin yang kurang menguasai masalahnya, sehingga sukar membedakan mana yang benar, sedangkan teks aslinya sudah sulit menemukannya.

Menghadapi perkembangan hukum Islam seperti ini jelas sekali peranan yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari yang berhasil menulis *Sabilal Muhtadin* sebagai kitab Fiqih terbesar dan lebih lengkap untuk menggantikan Kitab *Shirathol Mustaqin*, sebagai rujukan dalam penetapan hukum Islam dalam wilayah Kerajaan Banjar.

Perkembangan hukum Islam dalam abad ke- 18 dan 19 berkembang sangat pesat setelah Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari berhasil mengintensifkan da'wah melalui pembinaan kader ulama dalam perkampungan khusus. Dalam Pagar-Martapura. Selain pembinaan ulama yang tangguh dan tersebar luas di seluruh wilayah Kerajaan dan bahkan sampai ke luar kerajaan, juga keberhasilan beliau dalam menyusun beberapa kitab dalam usaha beliau untuk menerapkan hukum Islam dikalangan masyarakat luas. Kitab-kitab itu meliputi masalah *syariat*, *ushuluddin* dan *tasawuf* yang semuanya berhaluan *Ahlussunah wal jamaah*.

Dalam bidang Fiqih, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari telah menulis beberapa buah karya tulis diantaranya (1) *Parukunan Basar*, (2) *Fathul Jawad*, (3) *Luqtatul Ajlan*, (4) *Kitabun Nikah*, (5) *Kitabul Faraid*, dan yang terbesar (6) *Kitab Sabilah Muhtadin*.

Parukunan Basar ditulisnya untuk menjadi bahan pelajaran orang yang baru mempelajari agama Islam. Uraiannya singkat dan materi yang dibicarakan hanya yang menjadi kewajiban dalam agama seperti Shalat dan janji, sedang zakat dan puasa hanya dibicarakan dengan singkat. *Parukunan Basar* telah di cetak ulang beberapa kali, baik di dalam negeri maupun di luar negeri

Fathul Jawad sebuah kitab Fiqih dalam mazab sya'fi yang merupakan terjemahan dari tulisan Syekh Ibnu Hajar yang menguraikan dengan ringkas (matan) yang mencakup seluruh materi Fiqih, baik ibadah maupun muamalah. Namun sangat disayangkan sampai saat ini naskah asli maupun yang sudah dicetak belum ditemukan.

Kitabun Nikah yang khusus menguraikan tentang Fiqih muamalah dalam bidang hukum perkawinan berdasarkan mazhab Sya'fi. Kitab ini telah dicetak di Turki, yang isinya menerangkan pandangan Fiqih mazhab Sya'fi dalam hukum perkawinan. Uraiannya singkat karena kitab ini yang dijadikan pegangan dalam bidang perkawinan untuk seluruh wilayah Kerajaan dan sampai sekarang tetap dipergunakan, sebelum adanya Surat Edaran dari Pengadilan Agama R.I. tentang keseragaman ijab dari calon mempelai lelaki berbunyi : "*Kuterima menikahi si pulan binti si pulan dengan mahar*

.....” Sedangkan dalam Surat Edaran Pengadilan agama itu ijab itu harus berbunyi : “*Kuterima nikahnya.....*”.

Dalam Kitabun Nikah pula ditentukan Istilah *cina buta*, yang dipergunakan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari untuk menggantikan kata “*muhali*”, Orang yang telah melakukan talak tiga kali, mereka tidak boleh lagi kembali kecuali si bekas isteri kawin dengan orang lain. Setelah kawin dengan orang lain dan cerai, barulah diperbolehkan nikah kembali dengan bekas isterinya setelah genap masa idah. Supaya kawin dengan orang lain ini tidak lama, bekas suaminya mencari calon suami upahan. Inilah suatu tradisi yang berkembang dalam masyarakat yang dikenal dengan *bacina buta*.

Kitabul Faraid yang memuat hukum perwarisan berdasarkan mazhab Syafei dan ditambah dengan hasil ijtihad beliau sendiri seperti hukum *harta perpantangan*, dan kebolehan membagi harta warisan sama antara lelaki dan perempuan. Istilah harta perpantangan ini bukanlah merupakan penyimpangan dari hukum *faraid* yang ditetapkan dalam kitab-kitab fiqh. Istilah ini timbul karena adanya perbedaan cara hidup masyarakat Arab dan masyarakat Banjar. Dalam hukum perkawinan bahwa isteri tidak bekerja, segala keperluan rumah tangga menjadi kewajiban suami. Sedangkan dalam masyarakat Banjar, isteri selalu membantu suami dalam mencari harta, bahkan kadang-kadang justru isteri yang bekerja, isteri sebagai kawan sekongsi dengan suami yang dikenal dalam hukum muamalah “*Syirkatul Abdan*”. Menurut ketentuan yang berlaku dalam Syirkatul Abdan kalau ada yang meninggal atau perkongsian itu dibubarkan (cerai) jumlah harta perkongsian itu dibagi dua, suami memperoleh separo dan isteri memperoleh separo pula. Kemudian yang separo yang dimiliki oleh yang meninggal dibagi lagi sesuai dengan ketentuan hukum faraid. Jadi ketentuan yang berlaku dalam masyarakat Banjar mengenai harta perpantangan adalah berdasarkan hukum dalam Syirkatul Abdan yang separo lagi dibagi kepada ahli waris yang meninggal sesuai dengan faraid.¹¹⁹

Pembagian harta warisan yang sama antara saudara perempuan dengan saudara lelaki atas persetujuan bersama, yang seperti ini dikenal dengan istilah “*takharuj*”, ialah pelepasan hak dari salah sorang atau beberapa orang ahli waris baik terhadap sebagian barang yang diwarisi atau terhadap seluruhnya. Contohnya : barang yang tidak dapat dibagi tiga, seperti tiga bersaudara mewarisi dari orang tuanya sebuah rumah, dua orang melepaskan haknya pada rumah itu dengan menerima gantian dengan sejumlah uang. Atau beberapa orang ahli waris menyerahkan seluruhnya haknya.

Kitab Risalah Laqtatul Ajlan adalah kitab yang khusus membicarakan tentang hukum yang menyangkut wanita seperti haid, hukum nifas dan istighad. Risalah ini belum pernah diterbitkan masih berupa naskah.

Kitab Sabilah Muhtadin merupakan karya yang terbesar dan monumental yang terdiri dari dua jilid. Kitab ini baru menguraikan masalah ibadah sedangkan muamalah belum sempat dibicarakan, namun demikian kitab ini sangat besar andilnya dalam usaha beliau untuk menerapkan hukum Islam dalam wilayah Kerajaan Banjar sesuai dengan anjuran Sultan Tahmidullah yang memerintah saat itu.

Dalam rangka menerapkan hukum Islam Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah konseptor dan sekaligus mempelopori pembentukan lembaga *Mufti* dan *Qadhi* sebagai suatu bentuk lembaga peradilan menurut ketentuan hukum Islam dalam struktur Pemerintahan Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidillah yang bergelar Sunan Nata alam atau Panembahan Nata (1561-1801). Pembentukan lembaga ini dimaksudkan sebagai usaha melaksanakan ketentuan hukum Islam dalam masyarakat. Lembaga inilah kemudian yang menjadi cikal bakal bagi Pemerintah Belanda untuk daerah Kalimantan Selatan pada tahun 1937 dengan nama *Kerapatan Kadhi* dan *Kerapatan Kadhi Besar*, yang berlaku sampai sekarang.

¹¹⁹ M. Asywadie Syukur, “Perkembangan Hukum Islam di Kalimantan Selatan”, Makalah pada Seminar Perkembangan Hukum Islam di Kalimantan Selatan, Fakultas Hukum Unlam, Banjarmasin, 1988.

Pengaruh lebih jauh dari pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam hal penerapan hukum Islam ini secara konkret ketika Sultan Adam Al Wasik Billah (1825-1857) yang pada masa mudanya adalah murid Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari menetapkan suatu ketetapan hukum yang dikenal sebagai *Undang-undang Sultan Adam*. Dalam penyusunan Undang-Undang ini peranan dari kelompok alim ulama sangat besar sekali. Bahkan dari salah satu pasal dari undang-Undang itu dengan tegas menyatakan sekalian kepala jangan ada yang menyalahi fatwa Haji Jamaluddin (pasal 31). Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah Mufti Kerajaan, dan beliaulah yang namanya dipergunakan dalam penulisan kitab *Parukunan Besar* yang dikenal sebagai *Parukunan Haji Jamaluddin*. Dapatlah dikatakan bahwa Undang-undang Sultan Adam merupakan hukum tertulis yang jelas untuk menerapkan Hukum Islam di kalangan warga dalam Kerajaan Banjar.

Tentang hak pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah (*land tenure*) Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari telah menjelaskan ketentuannya dalam *Kitab Fathul Jawad*, yang isinya memuat ketentuan fiqih yang diantaranya "*ahyaul mawat*". Ketentuan ini sudah berkembang dalam masyarakat Kerajaan, sehingga ketika Sultan Adam menetapkan Undang-undang Sultan Adam, ketentuan yang berkembang dalam masyarakat itu dimuat dalam undang-undang.

Dalam pasal 28 dari Undang-undang Sultan Adam dijelaskan bahwa tanah pertanian yang subur di daerah Halabiu dan Negara adalah dibawah kekuasaan Kerajaan, karena itu tidak boleh seorangpun melarang orang lain menggarap tanah tersebut kecuali memang di atas tanah itu ada tanaman atau bukti lainnya bahwa tanah itu sudah menjadi milik penggarap yang terdahulu. Ketentuan ini memang sesuai dengan ketentuan fiqih Islam yang menyatakan bahwa tanah liar atau tanah yang belum digarap adalah dibawah kekuasaan Kerajaan dan siapa saja yang menggarap ialah yang memilikinya.

Pasal 29 diterangkan bahwa tanah yang sudah pernah digarap apabila ditinggalkan oleh penggarapnya dianggap hanya memiliki prioritas terhadap tanah itu selama dua musim atau 2 tahun, dan kalau tanah itu ditelantarkan siapa saja boleh menggarapnya dan memiliki tanah itu. Dalam fiqih ketentuan ini disebut "*hakuttahjir*".

Pasal 17 diterangkan bahwa setiap penjualan, penyewaan, peminjaman dan penggadaian terhadap tanah hendaknya secara tertulis. Serangkap ditangan yang berkepentingan dan satu rangkap lagi ditangan hakim dan hakim berkewajiban mencatat peristiwa itu. Ketentuan ini tampaknya bersumber dari ayat 282 Surah al-Baqarah.

Pasal 23 diterangkan bahwa gugatan terhadap tanah yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-undang Sultan Adam, gugatan itu bisa diajukan sebelum sampai dua puluh tahun dan kalau lebih dua puluh tahun, hilanglah hak untuk menggugat.

Pasal 26 diterangkan bahwa tanah atau kebun yang sudah dijual atau dibagi oleh ahli waris, masih bisa digugat sebelum berlaku penjualan atau pembagian itu sepuluh tahun.

Pasal 27 diterangkan bahwa orang yang menang dalam perkara tidak boleh menuntut sewa tanah selama tanah itu berada di tangan yang tergugat.

Ketiga pasal yang terakhir ini meskipun tidak bersumber dari Kitab fiqih, namun agama Islam memberikan wewenang kepada setiap penguasa atau raja untuk menentukan yang mana yang baik demi terjaminnya keadilan dan ketertiban.¹²⁰

7. Undang-Undang Sultan Adam 1835

Undang-undang ini dikeluarkan oleh Sultan Adam Al Wasik Billah (1825-1857) setelah dia memerintah selama 10 tahun dari tahun penobatannya. Undang-Undang Islam dalam bidang politik sebagai proses perkembangan hukum Islam dalam Kerajaan Banjar. Sebagai seorang Sultan, dia

¹²⁰M. Asywardie Syukur, *ibid*.

dikenal sebagai Sultan yang keras dalam menjalankan ibadah dan dihormati oleh rakyat. Dia pula salah seorang sultan yang sangat memperhatikan perkembangan agama Islam.

Sultan Adam adalah putera dari Sultan Sulaiman Saidullah yang memerintah sebelumnya dan cucu dari Sultan Tahmidullah yang dikenal pula dengan gelarnya Susuhunan Nata alam. Ibunya Nyai Intan Sari. Dalam Managib Sultan Adam Al Wasik Billah disebutkan bahwa dia dilahirkan pada tahun 1785. Sultan Adam mempunyai 5 orang saudara sekandung yaitu :

- Sultan Adam
- Pangeran Mangkubumi Nata
- Ratu Haji Musa
- Pangeran Perbatasasi
- Pangeran Hasir, dan
- Pangeran Sungging Anum.

disamping itu dia masih mempunyai 13 orang saudara sebapa sehingga dia bersaudara sebanyak 19 orang.

Pendidikan awal yang diperoleh Sultan waktu mudanya adalah pendidikan agama yang kemudian sangat mempengaruhinya kemudian. Diperkirakan bahwa dia banyak belajar agama dari ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (1710-1812) mengingat Syekh ini bersahabat dengan kakeknya Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidillah. Selain itu Syekh Muhammad Arsyad kawin dengan saudara sepupu dari Sultan Adam Ratu Aminah binti Pangeran Thaha bin Sultan Tahmidullah. Setelah Syekh Muhammad Arsyad meninggal dia berguru dengan Mufti H. Jamaluddin putera dari Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Pada umur 25 tahun Sultan Adam dikawinkan dengan Nyai Ratu Kumala Sari dan dari perkawinan ini dia memperoleh 7 orang anak :

- Ratu Serip Husin Darmakesuma
- Ratu Serip Kesuma Negara
- Ratu Serip Abdullah Nata Kesuma
- Pangeran Asmail
- Pangeran Nuh Ratu Anum Mangkubumi
- Pangeran Prabu Anum.

Selain permaisuri Nyai Ratu Kumala Sari, Sultan Adam juga pernah mempunyai isteri-isteri, sesuai dengan hukum Islam boleh beristri sampai empat orang yaitu :

- a. Nyai Endah yang melahirkan Pangeran Mataram
- b. Nyai Peah yang melahirkan Ratu Jantera Kesuma
- c. Nyai Peles yang melahirkan Pangeran Nasruddin
- d. Nyai Salamah yang melahirkan Ratu Ijah.

Dengan demikian Sultan Adam mempunyai 11 orang putera. Pada masa pemerintahan Sultan Adam Kerajaan Banjar mengalami proses perubahan dalam tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat sebagai akibat dari masuknya pengaruh kolonialisme Belanda dan masuknya kebudayaan asing, khususnya agama Kristen. Untuk menggalang pengaruh budaya Barat dan memperkokoh kesatuan kerajaan dan kesatuan serta keutuhan rakyat Banjar, Sultan mengeluarkan Undang-Undang pada 15 hari bulan Muharram 1251 H atau tahun 1835.

a. Beberapa Versi dan Latar Belakang dari Undang-undang Sultan Adam

Naskah asli yang ditulis dengan tulisan tangan dengan huruf Arab-Melayu menurut penelitian Eissenberger yang pernah menjabat sebagai *Controleur van Banjarmasin en Marabahan* pada tahun 1936, tidak pernah ditemukan lagi. Eisenberger pernah menemukan sebuah naskah tulisan tangan di Martapura yang diperkirakan ditulis tahun 1880 tetapi itu pun kemudian tidak dapat ditemukan lagi. Pada tahun 1885 Eisenberger menemukan naskah yang disimpan dalam arsip Kantor Residen

Banjarmasin yang ditulis oleh Tumenggung Soeri Ronggo tahun 1885. Publikasi pertama dari naskah *Undang-undang Sultan Adam* ini dilakukan oleh A.M. Joeques yang pernah menjabat sebagai Gubernur Borneo (1891-1894) di dalam *Majalah Indische Gids* tahun 1891. Naskah itu ditulis dengan huruf Latin bahasa Melayu Banjar disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Belanda. Naskah ini kemudian diolah kembali oleh Komisi untuk *Hukum Adat Koninklijke Instituut Voor de Taal, Land en Volkenkunde van Nederlands Indie* di Negeri Belanda yang kemudian dipublikasikan di dalam *Adatrecht Bundels*, jilid XIII tahun 1917.¹²¹

Selain naskah yang telah dipublikasikan sebagai hasil penelitian dari Eisenberger dan Komisi Hukum Adat, terdapat lagi versi Amuntai yang ditulis oleh Asisten residen Amuntai Helderman pada tanggal 16 April 1910. Perbedaan kedua macam versi ini ialah setelah pasal 30. Pasal 1 sampai 30 sama bunyinya, tetapi Pasal 31 berbeda sekali sampai Pasal 38 dan ditutup dengan kata-kata penutup.

Untuk mengetahui bagaimana latar belakang dan tujuan dikeluarkannya Undang-Undang ini dapat kita baca pada bagian Mukaddimah dari Undang-Undang itu yang secara pendek tertulis sebagai berikut :

*"Pada hejrat sanat 1251 pada hari Chamis yang kalima belas hari bulan Almuhammad jam pukul sembilan pada ketika itulah aku Sultan Adam memboeat Undang-undang pada sekalian ra'jatku supaya djadi sempurna agama rakjatku dan atikat mereka itu supaya djangan djadi banyak perbantahan mereka itoe dan soepaja djadi kamudahan segala hakim menghukumkan mereka itu aku harap djuga bahwa djadi baik sekalian hal mereka itu dengan sebab undang-undang ini maka adalah undang-undang ini maka undang-undangku beberapa perkara"*¹²²

Undang-undang ini ditetapkan pada Kamis 15 Muharram 1251 Hijriah pukul 09.00 pagi oleh Sultan Adam. Undang-undang ini dibuat oleh sebuah Tim dengan pimpinan oleh Sultan sendiri dan dibantu oleh anggota antara lain menantu Sultan sendiri Pangeran Syarif Hussein. Mufti H. Jamaluddin dan lain-lain. Maksud dan tujuan dari Undang-Undang ini dikeluarkan jelas tertulis dalam konsiderannya yaitu :

- untuk menyempurnakan agama dan kepercayaan rakyat
- untuk mencegah jangan sampai terjadi pertentangan rakyat, dan
- untuk memudahkan bagi para hakim dalam menetapkan hukum agar rakyatnya menjadi baik.

b. Sistematika Undang-undang Sultan Adam

Perkataan undang-undang memang sudah lama dikenal oleh masyarakat dalam bahasa Banjar dan dengan demikian Sultan menggunakan istilah itu dalam undang-undang yang dikeluarkannya. Sedang pengertian hukum dalam Undang-undang ini lebih mengacu kepada dalam pengertian hukum agama dengan kata lain apa yang disebut dengan istilah hukum dalam artian kewajiban agama Islam

Undang-undang ini mempunyai sistematika tersendiri sesuai dengan pola pikir pada saat itu, dengan sebutan Perkara untuk menyebut pengertian Pasal.

Materi Undang-undang ini dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Masalah-masalah *agama* dan *peribadatan*, mencakup :
 - Pasal 1 - Masalah kepercayaan
 - Pasal 2 - Mendirikan tempat ibadah dan sembahyang berjemaah
 - Pasal 20 - Kewajiban melihat awal bulan Ramadhan puasa
2. Masalah *Hukum Tata Pemerintahan*, mencakup :
 - Pasal 3 - Kewajiban tetuha kampung
 - Pasal 21 - Kewajiban tetuha kampung

¹²¹ Abdurrahman, "Studi..., *op.cit.*, hal. 44.

¹²² Amir Hasan Kiai Bondan, *op.cit.*, hal. 151.

- Pasal 31 - Kewajiban lurah dan Mantri-Mantri
3. *Hukum Perkawinan*, mencakup :
- Pasal 5 - Syarat nikah
 - Pasal 4 - Syarat nikah
 - Pasal 6 - Perceraian
 - Pasal 18 - Barambangan
 - Pasal 25 - Mendakwa isteri berzina
 - Pasal 30 - Perzinaan
4. *Hukum Acara Peradilan*, mencakup :
- Pasal 7 - Tugas mufti
 - Pasal 8 - Tugas mufti
 - Pasal 9 - Larangan pihak yang berperkara datang pada pejabat
 - Pasal 10 - Tugas hakim
 - Pasal 11 - Pelaksanaan putusan
 - Pasal 12 - Pengukuhan keputusan
 - Pasal 13 - Kewajiban bilal dan kaum
 - Pasal 14 - Surat dakwaan
 - Pasal 15 - Tenggang waktu gugat menggugat
 - Pasal 19 - Larangan raja-raja atau mantri-mantri campur tangan urusan perdata, kecuali ada surat dari hakim
 - Pasal 24 - Kewajiban hakim memeriksa perkara
5. *Hukum Tanah*, mencakup :
- Pasal 17 - Gadai tanah
 - Pasal 23 - masalah daluarsa
 - Pasal 26 - Masalah daluarsa
 - Pasal 27 - Sewa tanah
 - Pasal 28 - Pengolahan tanah
 - Pasal 29 - Menterlantar tanah
6. *Peraturan Peralihan*, mencakup pasal 16.

1) Masalah Agama dan Peribadatan

Tiga pasal yang disebutkan adalah yang paling penting dan menonjol menyangkut masalah agama. Suatu kewajiban bagi setiap penduduk untuk berpegang pada *itiqad ahlus sunnah wal jamaah*. Pasal ini sebagai reaksi dari adanya berbagai aliran dari sufi yang mengajarkan berbagai ajaran yang sementara pihak dinilai bertentangan dengan *ahlus sunnah wal jamaah*.

Selanjutnya memuat kewajiban bagi Tetuha kampung untuk membuat masjid/langgar dan ajakan untuk melaksanakan sembahyang berjamaah, sedang pada hari Jum'at diperintahkan untuk sembahyang Jum'at.

Selain itu juga suatu perintah untuk menjaga melihat bulan pada tiap awal bulan Ramadhan dan akhir Ramadhan awal bulan Haji dan awal bulan Ramadhan.

2) Hukum Tata Pemerintahan

Tetuha kampung diwajibkan selalu mengadakan musyawarah untuk menghindarkan terjadinya perselisihan dan perbantahan. Disini prinsip musyawarah sangat ditekankan.

Selanjutnya menyebutkan beberapa jabatan dalam struktur pemerintahan jaman Sultan Adam seperti : *Lalawangan, Lurah, Pambakal* dan *Mantri*. Mantri merupakan pangkat kehormatan untuk orang-orang terkemuka dan berjasa diantaranya ada yang mempunyai daerah kekuasaan sama dengan Lalawangan.

Suatu tata cara pelaksanaan pemerintahan yang diwajibkan pada Lelawangan, Lurah dan Mantri selalu selalu mengadakan musyawarah dan mencari kemupakatan dalam setiap persoalan.

Akhirnya pada bagian ini terdapat adanya pembagian wewenang antara pejabat-pejabat pemerintah dan tugas peradilan, bahkan harus menguatkan putusan pengadilan tersebut. Jadi ada semacam koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

3) Hukum Perkawinan

Para pejabat yang berwenang untuk masalah yang menyangkut perkawinan agama, yaitu :

Mufti : Hakim tertinggi pengawas pengadilan umum, dan

Penghulu : Hakim yang lebih rendah yang mendapat piagam atau cap dari Sultan.

Disamping hakim ada lagi jabatan yang disebut *Qadi*, yang bertugas sebagai pelaksana hukum dan pengatur jalannya pengadilan agar hukum berlaku dengan wajar.

Perbedaan *Qadhi* dengan *Penghulu* adalah, bahwa *Qadi*, menetapkan hukum bila terjadi sengketa yang kemudian berkembang menjadi pelaksana peradilan Islam.

Pasal-pasal pada bagian ini menyangkut tata cara nikah, larangan nikah bagi yang tidak bermadzhab Syafei, mengenai pembatalan perkawinan, masalah orang yang "*barambangan*", masalah suami yang menuduh isterinya berzina, dan kewajiban melapor kalau ada orang berzina.

4) Hukum Acara/Peradilan

Pasal-pasal pada bagian ini menjelaskan tentang larangan bagi seorang Mufti untuk memberi fatwa kepada seseorang yang sedang berperkara, begitu pula sebaliknya larangan bagi orang tersebut untuk meminta fatwa dari Mufti.

Pasal ini menjamin kebebasan peradilan, dimana hakim tertinggipun tidak diperkenankan turut campur tangan dalam penyelesaian suatu perkara.

Juga larangan bagi pejabat pemerintah, seperti : Raja, Mantri, Pambakal ataupun Panakawan untuk mencampuri urusan orang yang berperkara.

Suatu kewajiban hakim apabila telah selesai melakukan pemeriksaan perkara dan bersoal jawab dengan saksi-saksi, diperintahkan untuk mufakat terlebih dahulu dengan *Khalifah* dan *Lurah* sebelum putusan dijatuhkan.

Segala putusan yang dijatuhkan harus diserahkan pada Mangkubumi untuk memperoleh cap kerajaan.

Pasal 11

"Lamoen soedah djadi papoetoesan itoe, bawa kajah ading-ading dahoeloe mantjatjak tjap didalam papoetoesan itoe"

Pasal 12

"Siapa-siapa yang kalah bahoekoem maka anggan ia daripada kalahnya itoe, serahkan kajah ading papoetoesannya itoe jang mengoeroeskannya"

Para Bilal dan Kaum merupakan bagian dari aparat pelaksana hukum, karena kedua jabatan ini dapat diminta oleh hakim untuk membantu melaksanakan keputusan pengadilan yang bertindak atas nama Sultan.

Surat gugatan yang harus diserahkan dulu kepada tergugat dan tergugat harus menjawabnya. Kalau dalam tempo 15 hari dia tidak menjawabnya, maka hakim berhak memutuskan perkaranya.

5) Hukum Tanah

Pasal-pasal dalam bagian ini adalah :

Setiap transaksi tanah diharuskan untuk didaftar atau setidaknya diketahui oleh hakim dan ada suatu tanda pendaftaran tertulis yang dibuat oleh hakim.

Setiap orang menjual sawah kebun sudah lebih dari 20 tahun, kemudian terjadi gugatan dengan alasan seperti bahwa sawah itu harta warisan yang belum dibagi, gugatan itu tidak berlaku. Disini digariskan adanya tenggang waktu daluwarsa dalam berbagai transaksi tanah yaitu selama 20 tahun, baik pemilik asal maupun pihak ketiga tidak dapat menuntut kembali tanah yang dijualnya.

Tidak ada larangan bagi setiap golongan untuk menggarap tanah. Disini tidak dikenal semacam *hak ulayat* menurut ciri-ciri umum.

Tanah bekas ladang yang ditinggalkan orang kira-kira dua musim atau lebih akan kembali jadi padang tidak ada pemiliknya, kalau di tanah tersebut tidak ada tanda-tanda hak milik berupa tanaman atau galangan. Biasanya tanah yang berasal dari "*tanah wawaran*".

6) Ketentuan Peralihan

Sebagaimana peraturan-peraturan jaman sekarang, *Undang-undang Sultan Adam* ini mengenal semacam peraturan peralihan, meskipun tempatnya tidak pada bagian akhir, yang dalam UU ini dalam pasal 16, yang berbunyi :

"Mana-mana segala perkara yang dahulu dari zamanku tiada kubariakan dibabak lagi dan mana-mana segala perkara pada zamanku nyata salahnya boleh aja dibabak dibujurkan oleh Hakim"

7) Penjelasan Undang-Undang Sultan Adam

Pasal demi Pasal

Perkara 1 :

"Adapoen perkara jang pertama akoe soeroehkan sekalian ra'jatkoe laki-laki dan bini-bini beratikat dalal al soenat waldjoemaah dan djangan ada seorang baratikat dengan atikat ahal a'bidaah maka siapa-siapa jang tadangar orang jang beratikat lain daripada atikat soenat waldjoemaah koesoeroeh bapadah kapada hakimnja, lamoen benar salah atikatnja itoe koesoeroehkan hakim itoe menobatan dan mengadjari atikat jang betoel lamoen angganinja dari pada toebat bapadah hakim itu kajah diakoe".

Pasal ini menetapkan kepada sekalian penduduk seluruh Kerajaan Banjar agar berpegang pada itiqad Ahlussunah wal Jamaah, berdasarkan mazhab Syafei seperti yang diajarkan oleh Syekh Abu Hasan al Asy'ari dan al Maturidi. Pasal ini sebagai reaksi dari adanya berbagai aliran sufi yang mengajarkan berbagai ajaran yang bertentangan atau menyimpang dari Faham *Ahlussunah wal Jamaah*, seperti ajaran *Wahdatul Wujud* yang pernah menghebohkan Kerajaan Banjar yang dibawa oleh Syekh Abdul Hamid Abulung. Kalau ada orang yang menganut Faham yang bertentangan dengan Faham Ahlussunah wal Jamaah supaya segera dilaporkan kepada Hakim dan Hakim wajib membetulkan itiqadnya dan seandainya orang tersebut tidak mau bertobat, supaya dilaporkan kepada Sultan.

Perkara 2 :

"Tiap-tiap Tatoeha kampoeng baealah langgar soepaja didirikan mereka itoe sembahjang bardjoemaah pada tiap-tiap waktoe dengan sekalian anak boeahnja dan koesoeroeh meraka itoe

membawai anak-anak boeahnja sembahjang berjoemaah dan sembahjang djoemaat pada tiap djoemaat lamoen ada njang anggan padahkan kajah diakoe”.

Pasal ini memuat kewajiban bagi tetuha kampung untuk membuat langgar atau surau tempat Shalat berjamaah dan diwajibkan bagi setiap warga kampung untuk melaksanakan Shalat Jumat berjamaah. Dan bagi mereka yang ingkar dilaporkan pada Sultan.

Pasal ini menunjukkan bagaimana pelaksanaan hukum Islam itu dijalankan, sebab Sultan juga campur tangan dalam hal masalah warga kampung yang ingkar Shalat berjamaah dan ingkar Shalat hari Jumat. Perintah kerajaan untuk menjalankan shalat Jumat ini memang sejak zaman Sultan Tahmidillah bin Sultan Tanjidillah. Sanksi bagi mereka yang tidak Shalat itu adalah denda. Masalah denda ini cukup berat hingga pernah dipermasalahkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dengan guru beliau Syekh Muhammad Sulaiman al Kurdi di Madinah sewaktu beliau menuntut ilmu agama di sana. Hasil pembicaraan itu melahirkan sebuah kitab yang bernama *“Fatawa”*.

Perkara 3 :

“Tiap-tiap Tetoeha kampoeng koesoeroehkan memadahi anah boeahnja dengan bermoe fakat, astamiwah lagi antara berkarabat soepaja djangan djadi banjak bitjara dan pembantahan”

Suatu kewajiban pula bagi Tetuha kampung untuk saling menasihati khususnya keluarganya dan anak buahnya agar selalu bermufakat dan bermusyawarah supaya jangan terjadi perselisihan dan percekocan. Sangat jelas disini Sultan menekankan prinsip musyawarah sebagai salah satu prinsip untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Perkara 4 :

“Siapa-siapa jang hendak nikah kepada hakim koesoeroeh orang jang terlebih adil didalam kampoeng itoe membawanja kepada hakim sekoerangnja doea orang lamoen kadada seperti itoe djangan dinikahkan”

Pasal ini mengatur masalah perkawinan. Barangsiapa yang ingin nikah harus datang kepada hakim dengan membawa dua orang dari warga kampungnya yang dianggap adil. Kalau tidak ditemukan persyaratan itu maka tidak dapat dinikahkan. Kedua orang yang adil itu fungsinya menjadi saksi sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

Dalam kerajaan Banjar terdapat jabatan yang mengatur masalah perkawinan dan juga berwenang dalam masalah pengadilan. Pada masa pemerintahan Sultan Adam Jabatan :

<i>Mufti</i>	:	Hakim tertinggi, pengawas pengadilan umum
<i>Qadhi</i>	:	Pelaksana hukuman dan pengatur jalannya pengadilan agar hukum berjalan dengan wajar.
<i>Penghulu</i>	:	Hakim yang kebanyakan, mendapat cap atau piagam dari Sultan. Penghulu adalah petugas yang menjalankan pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam. Pada waktu itu Penghulu juga merupakan hakim pada tingkat rendah.

Perkara 5 :

“Tiada koebarikan sekalian orang menikahkan perempoean dengan taklik kepada moejahab jang lain dari pada jang moejahab Sjafei maka siap jang sangat berhadjatkan batakliid pada menikahkan perempoean itoe bapadah kajah diakoe dahoeloe”.

Pasal ini juga mengatur tentang masalah perkawinan. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh berlainan mazhab kecuali hanya mazhab Syafei. Kalau juga terjadi sebelumnya harus dilaporkan kepada Sultan. Dalam hal ini jelas bahwa mazhab Syafei adalah mazhab kerajaan dan penyimpangan dari mazhab Syafei, berarti tidak sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan.

Perkara 6 :

“Mana-mana perempoean jang hendak minta pasahkan nikahnja lawan lakinja maka hakim koesoeroeh mamariksa apa-apa ekral bini-bini itoe padahkan kajah diakoe”.

Pasal itu masih mengatur tentang perkawinan. Pasal ini menyebutkan bahwa bagi setiap perempuan yang ingin membatalkan nikahnya dengan suaminya, maka diperintahkan agar hakim memeriksa apa ekral perempuan itu dan melaporkannya kepada Sultan.

Perkara 7 :

“Tiada koeberikan moefi membari pidatoe hendak berhoekoem atau orang jang dalam tangan berhoekoem dan tiada koebariakan orang itoe maminta pitoea hakim hanya djoea mamintakan pitoeanja”.

Mufti adalah hakim tertinggi selaku pengawas peradilan umum. Meskipun demikian dia dilarang untuk memberikan fatwa perkara atau orang yang sedang berperkara begitu pula bagi orang yang sedang berperkara dilarang meminta fatwa kepada mufti dan hanya hakim yang dibolehkan untuk meminta fatwa kepada mufti. Jadi mufti hanya bisa memberikan fatwa kalau diminta oleh hakim yang sedang memeriksa dan mengadili suatu perkara.

Perkara 8 :

“Siapa-siapa jang datang kepada mufti memadahkan soeroehankoe meminta pitoea, tiada koebariakan moefi memberi pitoea lamoen tiada lawan tjapkoe”.

Sebagai kelanjutan dari pasal sebelumnya, pasal ini memperingatkan kepada mufti, bahwa mufti dilarang membawa kepada seseorang dengan meminta fatwa Sultan, kecuali dia membawa tanda-tangan Sultan dengan cap kerajaan.

Perkara 9 :

“Siapa-siapa jang berhoekoem tiada koebariakan masoek pada radja-radja atau mantri atau pambakal atau panakawan”

Pasal memuat larangan bagi pejabat pemerintah Kerajaan seperti para raja, mantri, pambakal atau panakawan untuk mencampuri urusan orang-orang yang saling berperkara. Tentang jabatan panakawan disini adalah orang-orang yang menjadi suruhan raja atau kepala-kepala dibebaskan dari segala pekerjaan negeri dan dari segala pembayaran pajak.

Perkara 10 :

“Sekalian hakim lamoen soedah habis periksanya kedoea pihak perkara da’wa dan djawab dan saksi djaerah koesoeroehkan moefakat mamotoeskan itoe lawan chalifahnja dan toean loerahnja”.

Pasal ini memuat kewajiban bagi para hakim setelah selesai melaksanakan pemeriksaan perkara dakwaan dan jawaban serta saksi-saksi diperintahkan untuk mufakat dengan khalifah dan lurah. Sistem pengadilan seperti ini memberi gambaran bahwa sistem peradilan pada masa Sultan Adam mirip dengan Peradilan di negeri Anglo Saxon yang mengenal sistem Yuris.¹²³

Perkara 11 :

“Lamoen soedah djadi papoetoesan itoe bawa kajah ading-ading dahoele mantjatjak tiap didalam papoetoesan itoe”.

¹²³ Abdurrahman, “Studi..., *ibid.*, hal. 89.

Menurut pasal ini bilamana keputusan sudah selesai harus dibawa lebih dahulu kepada ading-ading. Ading disini yaitu adik, maksudnya adik Sultan yang saat itu menjabat sebagai Mangkubumi, karena semua putusan harus dicap oleh Mangkubumi. Mangkubumi memegang wewenang sebagai pelaksana administrasi tertinggi.

Perkara 12 :

“Siapa-siapa jang kalah bahoekoem maka enggan ia dari pada kalahnja itoe sarahkan kajah ading papoetoessannja itoe ading jang mengaraskannja”

Pasal ini menyebutkan bahwa barangsiapa yang kalah dalam berperkara dan tidak mau menerima atas kealahannya itu, putusannya itu diserahkan pada Mangkubumi untuk mengatakannya.

Perkara 13 :

“Sekalian bilal-bilal dan kaoem-kaoem ada hakim mengoeroes bitjara pahakoemen djangan ada jang enggan karena itoe perintah joea”.

Pasal ini menjelaskan bahwa para bilal, kaum diberi tugas oleh hakim untuk menyelesaikan masalah suatu perkara mereka tidak boleh menolak. Para bilal, kaum pada waktu Kerajaan Banjar merupakan bagian dari aparat pelaksanaan hukum karena kedua jabatan itu dapat diminta oleh hakim untuk membantu melaksanakan keputusan Pengadilan yang bertindak atas nama Sultan.¹²⁴

Perkara 14 :

“Kalau ada orang jang naik hoekoeman kajah hakim endada lawan soerat da’wah dan djawab tiada koebariakan hakim membitjarakannja.

Menurut pasal ini bilamana ada orang yang hendak berperkara kepada hakim harus dengan surat gugatan dan jawaban tertulis bila tidak demikian hakim tidak dibolehkan untuk memeriksanya. Ini merupakan ketentuan yang lebih maju didalam hukum acara bilamana dibandingkan dengan perkara di muka hakim Gubernemen Belanda yang waktu itu dibolehkan gugatan secara lisan, sedangkan disini disyaratkan dengan tertulis.¹²⁵

Perkara 15 :

“Lamoen ada menda’wi mandjoeloeng soerat da’wi kajah hakim koesoeroeh djoeloeng menda’wi alaihi maka lamoen soerat anggan menda’wi alahi daripada mendjawab da’wi itoe pada hal sampai lima belas hari anggannja itoe koesoeroehkan hakim memoetoeskan hoekoemnya dengan woekoelnja”.

Pasal ini menjelaskan bahwa suatu gugatan yang masuk harus diserahkan dulu kepada tergugat dan tergugat harus menjawabnya. Apabila dalam waktu 15 hari ia belum mengajukan jawaban maka Hakim diperintahkan untuk memutuskan perkaranya.

Perkara 16 :

“Mana-mana segala perkara jang dahoeloe daripada zamankoe tiada koebariakan dibabak dan mana-mana segala perkara zamankoe lamoen njata salahnja adja dibabak diboejoerakan oleh hakim”.

Pasal ini menjelaskan bahwa segala peraturan dan perundangan yang berlaku sejak dahulu sebelum Sultan Adam tetap diberlakukan sampai saat itu tidak dibenarkan untuk diubah, dan sebaliknya segala peraturan sejak zaman Sultan yang ternyata salah, bertentangan terutama dengan hukum syariat Islam hakim boleh memperbaikinya.

¹²⁴ A. Gazali Usman, *op.cit.*, hal. 102.

¹²⁵ Abdurrahman, *op.cit.*, hal. 89.

Perkara 17 :

“Siapa-siapa jang baisi tanah pahoemaan atau doekoeh atau djenis milik lain daripada itoe jang bersanda pada waktoe ini atau handak mendjandakan jang terdjoeal atau handak mandjoeal atau tersewakan atau handak menjewakan atau jang terkadoeakan atau handak mengadoeakan atau jang terindjamkan atau handak maindjamkan datang kepada hakim bersaksi dan hakim itoe koesoeroeh baelah soerah besar milik dan hakim soerah besar tempat segala tarich itoe soepadja digadoeh oleh Hakim-Hakim ganti berganti dan apabila taboes manaboes datang djoea kepada hakim boleh memboeang kadoeanja tarich itoe maka ampoenja milik dan orang saorang orangnja memberi kepada hakim lima doeit.”

Pasal ini mengatur tentang masalah tanah yang selengkapnya berbunyi : siapa-siapa yang mempunyai sawah atau tanah kering atau jenis hak milik lainnya yang digadaikan atau hendak menjual disewakan atau hendak menyewakan, meminjam dengan syarat bagi hasil (mangdoeakan) harus melapor kepada Hakim dengan membawa saksi-saksi, dan hakim membuat surat pengesahannya dua rangkap, satu rangkap bagi pemilik asal dan satu rangkap untuk pihak kedua. Hakim harus membuat buku besar yang berisi tentang masalah-masalah seperti itu supaya dapat diketahui bagi hakim selanjutnya ganti berganti. Biaya untuk pembuatan surat menyuratnya sebesar lima duit.

Disini terlihat adanya aturan yang jelas karena semua harus didaftar pada Hakim atau ada tanda pendaftaran dari hakim.

Perkara 18 :

“Mana-mana orang jang barambangan laki-laki sebab perbantahan ataoe lainnja tiada koebariakan itoe lakinja memegang bininja hanja koesoeroeh segala berkebaikan maka hakim serta kerabat kedoea pihak koesoeroeh memadahi dan membaikkan dan apa-apa kesalahan kedoea pihak dan apabila anggan menoeroet hoekoem dan adat serta hadjat minta baikan pada hal perempoean itoe keras tiada maoe berkebaikan lagi maka padahkan kaja diakoe.”

Pasal ini mengatur masalah perkawinan dan secara lengkapnya berbunyi : Siapa-siapa suami isteri sedang dalam pertengkaran dan pisah tidur (berambangan), suaminya jangan-jangan mempersulit posisi isterinya dengan cara tidak berkumpul tetapi juga tidak dicerai, dan pihak keluarganya dan hakim berkewajiban merukunkan kembali suami isteri tersebut, dan apabila keduanya tidak mau, maka masalahnya harus dilaporkan kepada Sultan untuk menyelesaikan tingkat akhir.

Perkara 19 :

“Tiada koebariakan orang menjarahkan batagihan kepada radja-radja atau mantri-mantri atawa lamoen tiada soerat hakim.”

Pasal ini mengatur hukum peradilan dan hukum acara, seseorang dilarang untuk menyerahkan penagihan piutang kepada pejabat-pejabat kerajaan tanpa ada surat perintah dari hakim. Dalam hal ini terlihat dengan jelas bahwa kerajaan Banjar tidak membenarkan perlakuan sewenang-wenang kalau tidak ada kerajaan tertulis tentang perintah dari hakim, hal ini berlaku untuk semua orang termasuk anak-anak raja atau para bangsawan.

Perkara 20 :

“Sekalian banoea tiap-tiap tatoeha kampoeng koesoeroehkan mendjaga boelan pada tia-tiap awal boelan Ramadhan dan achirnja dan tiap-tiap boelan hadji dan awal boelan Moeloed maka siapa-

siapa jang melihat boelan lekas-lekas bapadah kapada hakimnja soepaja hakimnja lekas-lekas bapadah kajah diakoe maka mana banoca jang dilaloeinja ilir itoe ikam kabari samoeanja”.

Pasal ini diwajibkan setiap kampung untuk menjaga dan melihat bulan pada tiap-tiap awal bulan Ramadhan, akhir Ramadhan, pada tiap-tiap awal bulan Zulhijah (bulan Haji). Pada tiap-tiap awal bulan Rabiul Awwal (bulan Maulud Nabi) dan bilamana melihat sesegeralah melapor pada Hakim dan Hakim melapor pada Sultan agar dapat diumumkan keseluruh kerajaan.

Pasal ini mengatur masalah yang bersangkutan dengan peribadatan khususnya ibadah puasa pada bulan Ramadhan. Dalam hal ini kerajaan Banjar memegang teguh prinsip *ru'yatul hilal* dalam penetapan awwal Ramadhan, Idhul Fitri dan Idhul Adha adalah dasar yang diamalkan Rasulullah saw dan khulafaur Rasyidin dan yang dipegangi oleh seluruh ulama *Madzahibil Arba'ah*. Sedangkan dasar hisap falak untuk menetapkan tiga hal tersebut adalah dasar yang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah saw dan Khulafaur Rasyidin serta diperselisihkan keabsahannya dikalangan para ulama.

Perkara 21 :

“Tiap-tiap kampoeng kaloe ada perbantahan isi kampoengnja koesoeroehkan membitjarakan dan mamatoetkan moefakat lawan jang toeha-toeha kampoengnja lamoen tiada djoea dapat membicarakan ikam bawa kepada hakim”

Menurut pasal ini bilamana terjadi di sengketa didalam kampungnya maka diperintahkan untuk mendamaikan (mamatut) dengan tetuha kampung, bilaman tidak berhasil barullah dibawa kepada Hakim. Dalam masyarakat Banjar sampai sekarang masih menjadi suatu tradisi ‘*mematut*’ yaitu mendamaikan antara kedua belah pihak yang bersengketa, seperti kasus pelanggaran hukum seperti perkelahian. Jadi terdapat lembaga hukum secara tradisi dalam menyelesaikan persengketaan untuk dirukunkan kembali, sehingga tidak terjadi timbulnya perasaan dendam antara kedua belah pihak ‘*Lembaga Bapatut*’ ini dihadiri oleh kedua belah pihak dan seluruh kerabat keluarga terdekat yang bersengketa yang dipimpin oleh tetuha kampung. Kalau tidak terdapat penyelesaian, barulah dibawa kepada hakim. Kalau ini yang terjadi maka kerukunan bermasyarakat membahayakan sebab perasaan dendam tidak terhapuskan.

Pasal ini menunjukkan bahwa kerajaan Banjar menerapkan hukum Islam sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat al Hujarat ayat 10, yang berbunyi:

“Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat selamat”.

Perkara 22:

“Sekalian orang jang berhoeboengan jang telah dihoekoemkan oleh hakim-hakim tiada koebariakan lari kepada siapa-siapa dan tiada koebariakan siapa-siapa jang mengeia-i orang jang dihoekoemkan hakim itoe mana-mana orang jang enggan dari pada perintahan ini maka lari djoea ija kepada siapa-siapa akoe hoekoemkan”.

Pasal ini melarang bagi orang yang telah divonis oleh hakim untuk meminta bantuan hukum kepada orang lain atau menggunakan kenalan atau kerabat dekat dengan kerajaan untuk meringankan atau membebaskan.

Perkara 23 :

“Sekalian orang jang telah berdjoeal tanah pahoemaan ataoe doekoeh ataoe lain-lainja pada zaman dahoeleoe sama ada soedah tardjoealnja kalain lain benda itoe ataoe tatap adja didalam tangannja maka manoentoet karabatnja nang mandjoeel itoe menda'wi berserikat lawan diija lagi baloem dibagi banda itoe dan djikalaoe moefakat jang manda'wo berserikat dengan jang mandjoeal itoe sekalipoen apdahal lawannya banda jang didalam tangan jang manoeakar itoe doea poeloeh tahoen

ataoe lebih maka anjar menda'wi pada hal hidoep kadoeanja lagi hadir kadoeanja didalam masanja jang tersebut itoe didalam tangan jang manoeakar maka tiada koebariakan jang mandjoeal itoe ataoe jang manda'wa berserikat itoe manaoetoet kepada hakim-hakim dan segala hakim-hakim tiada djoea koebariakan membitjarakan djoea sebab karena lawas”.

Menurut ketentuan pasal ini bahwa setiap yang menjual sawah atau kebun dan lainnya pada masa lampau, baik barang yang dijual itu tetap berada ditangan sipembeli maupun sudah berpindah tangan, timbul tuntutan dari salah seorang keluarga bahwa barang yang dijual itu adalah miliknya bersama atau harta warisan yang belum dibagi paraid, pada terjualnya sudah lebih 20 tahun, pada masa hidupnya ia bersama-sama tetapi baru saja dia menggugat maka tuntutan itu tidak berlaku dan para hakim dilarang memeriksa perkara itu.

Perkara 24 :

“Ikam sekalian hakim-hakim kaloe ada orang jang mandjoeloeng da'wa dan djawabnja ikam oelahkan tarieh tatkala ia mandjoeloeng da'wa dan djawanja itoe maka mana-mana jang berkahandak kepada saksi ikam pinta saksinja itoe didalam sakali hadja inja jang boleh maadakan saksi itoe didalam masa saboelan adja inja maingat-ingatan saksinya maka kalaoe soedah habis segala bitjaranja jang masoek kepada hakim ikam poetoeskan adja djikalaoe maadakan poelang saksi jang lain daripada jang diseboetnya dahoeloe djangan ikam tarima lagi”.

Ada dua hal yang diatur dalam pasal ini. Yang pertama adalah kewajiban para hakim untuk menerima gugatan dan jawaban, sedangkan yang kedua adalah mengenai saksi dalam suatu perkara. Barangsiapa dalam satu perkara mengajukan saksi, maka ia diberi waktu satu bulan untuk mengingat-ingat siapa saksi, yang akan diajukannya, tetapi kalau lewat maka hakim dapat memutuskan perkaranya. Bilamana yang bersangkutan akan mengajukan saksi berbeda dengan saksi terdahulu, maka saksi tersebut harus ditolak oleh hakim.

Perkara 25 :

“Mana-mana laki-laki jang berbini boedjang kamudian maka manda'walakinja itoe akan bininja tiada berdara serta diwantar-wantarkanja kepada setengah manoesia jang djadi aib perempuan itoe jaitoe bapadah kajah diakoe karena inja menda'wa dengan tiada saksi”.

Pasal ini mengatur tentang masalah seorang laki-laki yang kawin dengan perawan akan tetapi menuduh istrinya tidak perawan lagi dan menyebar luaskannya (mewantar-wantarkan) kepada orang lain sehingga isteri menjadi malu atau aib, supaya dilaporkan kepada Sultan karena ia menuduh tanpa saksi. Sultan akan menetapkan hukuman apa yang dijatuhkan padanya.

Perkara 26 :

“Mana-mana pahoemaan dan doekoeh jang soedah dijoeal ataoe soedah dibagi oleh orang toenja ataoe oleh hakim pada hal masyhoer wantar didjoeal toekarnja ataoe bahagianja itoe apalagi djika ada saksi kerabat ataoe pasah sekalipoen maka soedah sepoeloeh tahoen atawa lebih maka tiada boeleh anak tjoetjoenja dan karabatnja membabak manooentoet kepada hakim kamoedian daripada soedah mati jang mendjocal ataoe jang manarima bahagi”.

Dalam pasal ini disebutkan bahwa apabila sawah atau kebun yang sudah dijual atau sudah dibagi oleh orang tuanya dan umumnya mengetahuinya apalagi ada saksi dari kerabatnya sendiri, anak cucunya tidak diperkenankan membatalkan sawah atau kebun yang telah dijual atau telah dibagi itu.

Perkara 27 :

“Siapa-siapa jang menang bahoekoem tiada boleh orang jang menang itoe menoetoet sewa tanahnja itoe pada jang kalah bahoekoem selama perhoemaan didalam tangannja itoe adanja”.

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa barang siapa yang menang dalam perkara sengketa tanah, yang menang tidak boleh menuntut sewa tanah kepada yang kalah. Jadi maksudnya meskipun tanah itu beberapa tahun berada ditangan pengusaha yang tidak berhak, tetapi apabila tanah itu kembali kepada yang berhak sebagai akibat menang perkara, si pemenang tidak boleh menuntut sewa tanah kepada yang kalah selama tanah itu dikuasai oleh yang kalah.

Pasal-pasal 23, 26 dan 27 meskipun tidak dicantumkan hukumnya dalam kitab fiqih, namun Agama Islam memberikan wewenang kepada setiap penguasa atau kerajaan untuk menentukan yang mana yang baik demi terjaminnya keadilan dan ketertiban.¹²⁶

Perkara 28 :

“Siapa-siapa jang handak bahoema didalam watas Halabioe ataoe Negara ataoe lainnja maka jaitoe boeleh orang mangakoei watas jang tiada dionesahanja dan perhoemaannja dan tiada boleh orang maharoe biroe”.

Pasal ini menjelaskan tentang kebebasan bagi setiap warga dalam wilayah kerajaan untuk mengerjakan sawah khususnya di daerah Alabio, Negara lainnya, tidak diperbolehkan penduduk lainnya untuk melarangnya dan tidak boleh seseorang mengakui batas sebidang tanah yang tidak dikerjakan. Dari pasal ini dapat dilihat bahwa pada waktu dahulu khususnya pada masa kerajaan tidak ada keutamaan penduduk disuatu daerah tertentu atas tanah yang didalam wilayahnya sehingga ia dapat melarang orang dari daerah lain yang akan mengerjakan tanah itu, hal ini juga menunjukkan bahwa didaerah ini khususnya wilayah kerajaan Banjar tidak dikenal semacam hak ulayat menurut ciri-ciri umum.¹²⁷

Perkara 29 :

“Mana-mana padang jang ditinggalkan orang kira-kira doea moesim ataoe lebih maka kembali mendjadi padang poelang dan tiada tanda milik djadi tattamanja atawa galangan ataoe sungai jang menghidoepi tanahnja itoe maka diganai poela oleh jang lannja itoe serta ditetapinja maka tiada koebarikan orang jang dahoeloe itoe menghendaki lagi atas menoentoet kepada hakim-hakim.”

Pasal ini mengatur tentang tanah bekas ladang yang ditinggalkan olehenggarapnya selama dua tahun atau lebih, kembali menjadi padang atau tanah yang tidak ada yang memilikinya dengan syarat tidak ada bekas-bekas tanda yang memilikinya seperti *“galangan”* atau tanggul, sungai yang digali untuk mengairi sawah itu. Pasal ini mengatur kebiasaan penduduk yang mengerjakan tanah secara berpindah (*shifting cultivation*) dan kemungkinan membuka tanah yang belum pernah dibuka yang lebih subur. Bekas tanah garapan ini apabila ditinggalkan selama dua tahun tidak ada yang memiliki dan tidak boleh menuntut kalau orang lain yang mengerjakannya.

Pasal-pasal 28 dan 29 tentang pengolahan tanah dan mentelantarkan tanah diatur sesuai dengan hukum Islam yang dalam ilmu Fiqih disebut *“hakut tahjir”*¹²⁸ tetapi menurut Adijani Al Alabi disebut *“Ithyanul Mawat”*, yaitu menghidupkan tanah yang sudah mati.¹²⁹

Pasal-pasal yang menyangkut tentang masalah pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah tertuang dalam pasal 17, 23, 26, 27, 28 dan pasal 29 dari Undang-undang Sultan Adam. Meskipun Undang-undang Sultan Adam tersebut sudah dihapus sejak Belanda menguasai Kerajaan Banjar tahun 1860, tetapi sampai sekarang pola penguasaan, pemilikan dan pola penggunaan tanah

¹²⁶ M. Asywadie Syukur, “Perkembangan..., *op.cit.*, hal. 7.

¹²⁷ A. Gazali Usman, *op.cit.*, hal. 102.

¹²⁸ M. Asywadie Syukur, “Perkembangan..., *op.cit.*, hal. 7.

¹²⁹ Adijani Al Alabij, “Interaksi Antara Hukum Islam dengan Hukum Adat di Kalimantan Selatan”, Makalah pada Seminar Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Kalimantan Selatan, Fakultas Hukum UNLAM, Banjarmasin, 1989, hal.10.

seperti tercantum dalam pasal-pasal itu tetap berlaku secara tradisional dikalangan masyarakat Banjar. Segala permasalahan yang timbul dari akibat penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah ini selalu hukum atau undang-undang adalah merupakan jalan terakhir yang ditempuh.

Dalam hal ini peranan Kepala Desa atau Pembakal sangat besar. Pembakal yang menandatangani segel tanah yang sampai sekarang merupakan bukti yang dipercaya dalam masalah pemilikan tanah.

Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-undang no. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa hampir tidak menimbulkan permasalahan dengan adat yang menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah (*Land Tenure*) di desa.

Segel tanah yang merupakan bukti pemilikan tanah secara adat, disamping ditandatangani Pembakal juga dikuatkan oleh Camat sebagai Kepala Pemerintahan Kecamatan. Sebagai bukti hak milik secara adat sudah sah. Untuk hal-hal yang bersifat resmi bukti hak milik secara adat sudah tidak berlaku, karena berdasarkan UUPA tersebut harus berbentuk sertifikat tanah yang dibuat oleh Kepala Pertanahan Kabupaten.¹³⁰

Setelah Kerajaan Banjar kalah dalam Perang-Banjar (1859-1905) melawan kolonialisme Belanda, Belanda menghapuskan Kerajaan Banjar. Dengan hapusnya Kerajaan Banjar tersebut maka Undang-undang Sultan Adam juga tidak berlaku lagi, tetapi sampai sekarang Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan tanah (*Land Tenure*) masih hidup dikalangan masyarakat dan dihormati secara tradisi.

Perkara 30 :

"Mana-mana orang kababaran jang tiada mengakoe jaitoe padahkan kajah diakoe".

Pasal ini mengatur tentang wanita yang melahirkan tanpa suami dan tidak mengaku bahwa dia berzina, harus dilaporkan pada Sultan untuk menetapkan jenis hukumannya. Melahirkan kababaran juga diartikan dengan melahirkan secara paksa atau digugurkan sebagai akibat hubungan tanpa nikah atau akibat kumpul kebo.

Perkara 31 :

"Mana-mana Loerah dan Mantri-Mantri Oeloe Soengai dan lainnja tiada koebariakan masoek bitjara dan menggangoe kepada segala perintah jang koetentoekan kepada sekalian Hakim-hakim dan Khalifahnja dan toean Loeranja tida koebariakan loempat dan ganggoe kepada sekalian perintah jang koebariakan loempat dan ganggoe kepada sekalian perinat jang koetentoekan kepada segala Lalawangan dan Loerah dan Mantrinja maka adalah perintah jang koetentoekan kepada sekalian Hakim itoe mana-mana sekalian bitjara Hakim menghoekoem perbantahannja sekalian ra'jatkoe dan perintah jang koetentoekan kepada sekalian ra'jatkoe moefakat dan misiwarat Hakim-Hakim dan Lalawangan dan Loerah Mantrinja Koesoeroeh mengeraskan hoekoem Allah Taala jang dihoekoemkan oleh Hakim jaitoe sekalian Lalawangan dan Loerahnja dan Mantrinja Koesoeroeh mengeraskan hoekoem itoe djikalaoe berkata seorang kepada saoempama Lalawangan oeloen redha bernadzar adja adja doea real setali tiba-tiba orang sampai batagih nadzar dan batin maka taloempat orang itoe ditagih wang panahoernja itoe tiada halal karena nadzar itoe pasid tiada sah karena ketiadaan aldzaam jang mewajibkan membayar dia dan djika diperoleh sjaratnja sekalipoen jaitoe tiada dikanai segala gawi dan poepoe pinta dan tiada dikanai gawi dan poepoe pinta dan tiada hiaroe biroe hak milik oeloen wadjib atas oeloen maatoeri kepada tiap-tiap moesim doea rial setali maka apabila diperoleh syaratnya itoe

¹³⁰ A. Gazali Usman, "The Influence of Sultan Adam's 1835 Act on the Traditional Land Tenure in Banjarese Region South Kalimantan", a Paper Presented at Borneo Research Biennial International Conference, Kinibalu Sabah Malaysia, 13-17 July 1992, hal. 18.

wadjiblah atas mambajar dan tiada halal pembajarannja. Sekalian kepada kepala djangan ada jang menjalahi apabila ikam tiada kawa manangat lekas-lekas bapadah kajah diakoe”.

Pasal ini merupakan pasal terakhir dari versi Martapura, sedangkan versi Amuntai bersambung beberapa pasal lagi sampai pasal 38.

Pada pasal ini dapat dipelajari beberapa hal tentang Kerajaan Banjar ialah tentang nama-nama pejabat kerajaan, petunjuk pelaksanaan menjalankan perintah kerajaan, tentang kewajiban pembayaran nadzar dan baktin, tentang kewajiban mamatuhi fatwa Mufti H. Jamaluddin.

Nama-nama pejabat kerajaan yang disebutkan dalam Undang-Undang ini ialah : *Pembakal, Lurah, Lalawangan dan Mantri* yang masing-masing menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. *Pembakal* adalah kepala dari sebuah kampung yang meliputi beberapa buah anak kampung. *Lurah* adalah pembantu *Lalawangan* yang mengamati pekerjaan beberapa pembakal dan dalam melaksanakan tugasnya *Lurah* dibantu oleh *Khalifah, bilal dan kaum*. *Lalawangan* adalah kepala distrik yang membawahi beberapa *Lurah*. *Mantri* adalah pangkat kehormatan untuk orang-orang yang berjasa kepada kerajaan. Beberapa diantara *Mantri* itu juga menjabat sebagai *Lalawangan*.

Petunjuk pelaksanaan untuk menjalankan tugas perintah dari kerajaan, dalam Pasal ini disebutkan bahwa :

- a. Pejabat-pejabat kerajaan tidak boleh mencampuri urusan peradilan. Tugas peradilan adalah menetapkan hukum dalam beberapa perkara. Dalam hal ini terlihat adanya semacam jaminan kebebasan peradilan seperti pada masa sekarang.
- b. Pejabat-pejabat kerajaan harus mendukung dan menguatkan apa-apa yang telah menjadi keputusan Hakim. Tugas tersebut didasarkan atas permusyawaratan, (*moefakat dan misiwarat*). Dalam hal ini terlihat adanya semacam koordinasi pelaksanaan tugas seperti pada masa sekarang.

Dalam hal pelaksanaan tugas kerajaan ini terlihat adanya pembagian tugas dan wewenang antara pejabat-pejabat kerajaan dan tugas peradilan yang dilakukan oleh para Hakim. Pejabat kerajaan tidak boleh mencampuri Urusan peradilan bahkan harus menguatkan putusan pengadilan itu.¹³¹

Pasal itu mengatur pula tentang kewajiban seorang warga kerajaan. Kewajiban itu ada tiga jenias berdasarkan pasal ini yaitu *kewajiban membayar nadzar dan baktin* dan *kewajiban berbakti* untuk kerajaan melalui tenaga yang disebut “*gawi*” dan “*pupuan pinta*”. Kewajiban “*gawi*” dan “*pupuan pinta*” ini merupakan kewajiban bagi setiap warga sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Bagi warga penduduk kerajaan yang dikenakan uang baktin yaitu dibayar dengan tenaga yaitu bekerja untuk kepentingan kerajaan tetapi dapat juga diganti dengan sejumlah uang yang besarnya sudah ditetapkan. *Uang nadzar* adalah kewajiban membayar dengan uang tanpa dapat diganti dengan bekerja untuk kerajaan. Kewajiban “*gawi*” dan “*pupuan pinta*” semacam pekerjaan gotong royong yang diwajibkan bagi setiap warga kerajaan.

Masalah selanjutnya dari Pasal ini adalah kewajiban bagi semua warga kerajaan untuk tunduk pada fatwa Haji Jamaluddin yang menjadi Mufti Kerajaan, cucu dari Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Fatwa yang bersifat dan menyangkut masalah agama terhimpun dalam Perukunan yang merupakan petunjuk praktis untuk menjalankan ibadah. Tetapi dalam pasal ini adalah kewajiban taat pada fatwa Haji Jamaluddin Mufti Kerajaan tentang uang nadzar yang sah dan yang tidak sah. *Nadzar yang sah* adalah yang dinyatakan secara tegas dengan berbagai persyaratannya, sedangkan nadzar yang tidak mencukupi persyaratannya adalah tidak sah Kalau ada yang tidak taat pada fatwa itu, penyelesaiannya diserahkan pada Sultan.

Pasal 32 menurut catatan Biro Hukum adalah teks dari Pasal 33 menurut versi Amuntai. Undang-undang Sultan Adam menurut versi Amuntai tersebut Pasal 1 sampai pasal 30 isinya sama.

¹³¹ A. Gazali Usman, *op.cit.*, hal. 100.

Pasal 31 agak berbeda isinya, selanjutnya Undang-undang Sultan Adam versi Amuntai dilanjutkan dengan Pasal 33 sampai Pasal 38.

Perkara 33 :

“Sekalian orang yang handak bahoekoem kepada Kadhi di Boemi Selamat jaitoe naik dahoeloe kepada si Boetoeh atawa kepada Mangkoebumi, maka ia berdoea itoe koesoeroeh mamariksa serta memoetoeskan mesjawaratnya, kemoedian bawa poetoessannja kepada diakoe dan barang jang berkehandak kepada Kadhi, maka si Boetoeh koesoeroeh memberi tjap soepaja diterima oleh Kadhi”.

Pada Pasal ada dua istilah yang perlu diketahui terlebih dahulu yaitu “Boemi Selamat” dan “Si Boetoeh”. Bumi Selamat adalah untuk keraton Sultan di Martapura. Nama Keraton Bumi Selamat baru dipergunakan sejak tahun 1806, sedangkan sebelumnya disebut Keraton Bumi Kencana. Tentang nama Keraton Bumi Selamat dapat dibaca pada perjanjian antara Kerajaan Banjar dengan Belanda tahun 1806 tanggal 11 Agustus.

“Ini hormat sudah kita sempurnakan serta kita patrikan tiap-tiap dimana tempat paseban dalam negeri Bumi kintjana jang sekarang ganti nama Bumi Selamat . Sebelas hari dari bulan Agustus tahun seribu delapan ratus enam”.

Sebutan “si Butuh” adalah sebutan untuk putera mahkota yaitu anak dari Sultan sendiri yang saat itu adalah Sultan Muda Abdurrahman. Sedang sebutan “ading-ading” dalam Pasal 11 maksudnya adalah Mangkubumi atau Perdana Mantri yang saat itu dijabat oleh adik Sultan sendiri, yaitu Mangkubumi Kencana.

Dalam pasal ini disebutkan bahwa barangsiapa yang hendak berperkara kepada Kadhi di Bumi Selamat terlebih dahulu harus datang kepada putera Mahkota Sultan Muda dan Mangkubumi dan kedua pejabat kerajaan itu harus diberi cap kerajaan dan selanjutnya dibawa kepada Sultan. Barangsiapa yang ingin meneruskannya kepada Kadhi maka putera mahkota Sultan Muda harus memberi cap kerajaan agar perkaranya diterima oleh Kadhi.

Perkara 34 :

“Akan Kadhi Bumi Selamat telah moefakat sama diakoe, jang ia tiada manarima chal-chal orang melainkan jang ada tjap si Boetoeh dan tjap Mangkoeboemi, dan lagi apabila ada jang anggan daripada poetoesan Hakim jang soedah tjadi tjap Mufti, Mangkoeboemi jang koesoeroeh mengarasi dengan mengikat atawa marantai”.

Menurut pasal ini bahwa Kadhi telah bermufakat dengan Sultan bahwa ia tidak menerima persoalan-persoalan melainkan yang ada cap dari Sultan Muda dan Mangkubumi. Kalau orang tetap enggan atau menolak putusan itu, maka Mangkubumi diperintahkan menghukumnya dengan hukuman mengikat atau dirantai.

Perkara 35 :

“Apabila Kadhi Boemi Selamat mendapat kenjataan orang jang melanggar oendang-oendang atawa orang jang mendjoeal namakoe atawa nama di Boetoeh atawa nama Mangkoeboemi atawa jang mentjampoeri pekerdjaan si Boetoeh atawa pekerdjaan Mangkoeboemi. Kadhi Boemi Selamat, koe-idzinkan mahoekoem orang itoe sekoerang-koerangnja setahoen”.

Pasal ini menegaskan sanksi hukuman bagi orang yang melanggar Undang-Undang menjual nama Sultan, Sultan Muda atau menjual nama Mangkoeboemi, Kadhi Bumi Selamat diperintahkan untuk menghukum orang tersebut dengan hukuman setahun. Pasal ini merupakan satu-satunya pasal yang memuat sanksi hukuman kurungan sekurang-kurangnya setahun. Di dalam pasal ini diatur adanya beberapa tindak pidana yang diancam dengan hukuman kurungan sekurang-kurangnya setahun, yaitu :

- a. Melanggar Undang-undang Sultan Adam. Memang tidak jelas jenis melanggar Undang-Undang Pasal berapa yang kena sanksi hukuman kurungan setahun itu. Dalam pasal-pasal sebelumnya, hanya disebutkan *"bapadah kajah diakoe"*, artinya laporkan kepada Sultan. Dalam hal ini jenis hukumannya terserah pada Sultan.
- b. Menipu atau perbuatan tertentu dengan menggunakan nama Sultan untuk kepentingan keuntungan pribadi.
- c. Menipu atau melakukan perbuatan tertentu dengan menggunakan nama Sultan Muda, untuk kepentingan pribadi.
- d. Menipu atau perbuatan tertentu dengan menggunakan Mangkubumi, untuk kepentingan pribadi.
- e. Mencampuri pemerintahan Sultan Muda, Mangkubumi, maksudnya mengganggu dengan perbuatan, tindakan atau ucapan kelancaran tugas dari pejabat kerajaan tersebut.

Perkara 36 :

"Barangsiapa ada kedapatan moefakat pekerdjaan kadhi dahoeleoe dari pada menjampaikan kepada si Boetoe atawa kepada Mangkoeboemi maka orang itoe koehoekoem dengan hoekoeman jang telah koeizinkan kepada Kadhi itoe jaitoe jang diseboet dalam perkara jang ketiga poeloeh lima".

Pasal ini merupakan kelanjutan dari pasal 35, bahwa seseorang yang berperkara itu harus terlebih dahulu mengajukan kepada si Butuh dan Mangkubumi jangan langsung kepada Kadhi. Kalau diketahui menyalahi prosedur maka dikenakan hukuman seperti pasal 35.

Perkara 37 :

"Hendaklah sekalian ra'jatkoe ingat-ingat akan sekalian oendang-oendangkoe ini".

Pasal ini mempertegas bahwa semua rakyat kerajaan harus memperhatikan apa yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, dengan kata lain harus mematuhi.

Perkara 38 :

"Ini oendang-oendang kepada sekalian kepala-kepala baik radja-radja atawa mantri, pambakal lainnja apabila ia koesoeroeh maka didjalkannja apa-apa jang terseboet di dalam tjapkoe itoe, maka ada jang melawan, jaitoe djikalaoe ia memboenoeh, maka tiadalah koebarikan hoekoem boenoeh kepada orang jang mendjalankan perintahkoe itoe".

Pasal ini merupakan ketentuan kepada pejabat-pejabat kerajaan seperti Raja-Raja, Mantri, Pambakal atau lainnya yang menjalankan tugas kerajaan atas perintah Sultan, maka ada yang melawan dan si Pejabat itu terpaksa membunuh orang yang melawan itu, maka si Pejabat tersebut tidak dikenakan sanksi hukuman.

Undang-undang Sultan Adam versi Amuntai ini ditutup dengan kata-kata yang berbunyi :

"Maka ini oendang-oendang telah moefakat akoe dengan Mangkoeboemi dan sekalian radja-radja dan Mantri-Mantri Pembakal dan Toe-an-Toe-an Haji dan sekalian Kepala-Kepala adatnja".

Pasal penutup ini, menjelaskan bahwa Undang-undang Sultan Adam ini telah mendapat persetujuan dari segala lapisan pejabat Mangkubumi, Raja-Raja, Mantri-Mantri, Pambakal dan Tuan Haji itu maksudnya adalah para alim ulama.¹³²

D. PERANG BANJAR (1859-1905)

¹³² Abdurrahman, "Studi..., *op.cit.*, hal. 109.

Perang Banjar adalah merupakan satu cetusan di dalam rangkaian perjuangan bangsa Indonesia menolak penjajahan dari bumi Indonesia. Perang ini merupakan salah satu mata rantai sejarah perang kemerdekaan utamanya pada abad ke-19, seperti peristiwa – peristiwa yang hampir bersamaan kasusnya di daerah – daerah lain di Indonesia, misalnya di Minangkabau dengan perang *Paderinya*, di Jawa dengan perang *Diponegoro-nya*, perang *Bali*, perang *Aceh* dan sebagainya.

Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah telah terjadi sejak kedatangan bangsa asing yang ingin menjajah Indonesia dengan berbagai dalih yang dilakukannya demi untuk mengeruk keuntungan dari tanah jajahannya.

Pertentangan pertama antara Belanda dengan kerajaan Banjar, dalam hal ini Penambahan Marhum di satu pihak dan Belanda di lain pihak telah terjadi pada tanggal 14 Februari tahun 1606 dengan terbunuhnya nakhoda kapal Belanda Gillis Michielzoon beserta anak buahnya di Banjarmasin. Dalam rangka pembalasan dan memamerkan kekuatan beberapa kapal Belanda pada tahun 1612 secara mendadak telah menyerang dengan melakukan penembakan dan pembakaran di daerah Kuin. Dengan demikian pusat pemerintahan kerajaan Banjar terpaksa dipindahkan ke Martapura, ke kraton baru yang terkenal dengan sebutan *Kayu Tangi*.

Pertikaian bersenjata menghangat lagi pada tahun 1638, dimana di Banjar Anyar telah terbunuh 64 orang bangsa Belanda di dalam satu penyergapan. Untuk pembalasan terhadap ini Belanda mengirim 2 buah kapal menuju Banjarmasin dan Kotawaringin. Mereka menahan perahu-perahu rakyat dan mengadakan penganiayaan kejam sesuai dengan instruksi dari Batavia, membunuh dan menyiksa tanpa pandang bulu, baik laki-laki maupun wanita atau anak-anak suku Banjar, tanpa perikemanusiaan. Kekejaman ini tidak mudah dilupakan oleh rakyat di Kerajaan Banjar, dan sejak tahun 1600 sampai abad ke-18, walaupun telah ada perjanjian, selalu terjadi pertempuran-pertempuran antara orang-orang Banjar melawan Portugis, Belanda dan Inggeris.

Ketika Sultan Muhammad meninggal dunia pada tahun 1761, ia meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang belum dewasa, yaitu Pangeran Rahmat, Pangeran Abdullah dan Pangeran Amir. Karena ketiga orang anak Sultan Muhammad itu belum dewasa, maka tahta kerajaan kembali ke tangan Mangkubumi, yaitu Sultan Tamjidillah, atau Pangeran Sepuh, dan pelaksanaan pemerintahan dikuasakan kepada anaknya Pangeran Nata. Dengan jalan menyuruh membunuh kedua kemenakannya, yaitu Pangeran Rahmat dan Pangeran Abdullah, Pangeran Nata berhasil memindahkan kekuasaan pemerintahan kepada dinastinya dan menetapkan Pangeran Nata sebagai Sultan yang pertama sebagai Penambahan Kaharudin.

Pangeran Nata Dilaga yang Menjadi raja pertama dinasti Tamjidillah dalam masa kejayaan kekuasaannya, menyebutkan dirinya Susuhunan Nata Alam pada tahun 1772.

Anak Sultan Muhammad (almarhum) yang bernama Pangeran Amir, atau cucu Sultan Tahmidillah melarikan diri ke Pasir, dan meminta bantuan pada pamannya yang bernama Arung Tarawe. Pangeran Amir kemudian kembali dan menyerbu Kerajaan Banjar dengan pasukan Bugis yang besar, dan berusaha merebut kembali tahtanya dari Susuhunan Nata Alam. Karena takut kehilangan tahta dan kekuatiran jatuhnya kerajaan di bawah kekuasaan orang Bugis, Susuhunan Nata Alam meminta bantuan kepada VOC. VOC menerima permintaan tersebut dan mengirimkan Kapten Hoffman dengan pasukannya dan berhasil mengalahkan pasukan Bugis itu. Sedangkan Pangeran Amir terpaksa melarikan diri kembali ke Pasir. Beberapa waktu kemudian Pangeran Amir mencoba pula untuk meminta bantuan kepada para bangsawan Banjar di daerah Barito yang tidak senang kepada Belanda, karena di daerah Bakumpai/Barito diserahkan Pangeran Nata kepada VOC. Dalam pertempuran yang kedua ini Pangeran Amir tertangkap dan dibuang ke Sailan. Sesudah itu diadakan perjanjian antara kerajaan Banjar dengan VOC, dimana raja-raja Banjar memerintah kerajaan sebagai peminjam tanah VOC.

Dalam tahun 1826 diadakan perjanjian kembali antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Sultan Adam, berdasarkan perjanjian dengan VOC yang terdahulu, berdasarkan perjanjian ini, maka Belanda dapat mencampuri pengaturan permasalahan mengenai pengangkatan Putera Mahkota dan Mangkubumi, yang mengakibatkan rusaknya adat Kerajaan dalam bidang ini, yang kemudian menjadikan salah satu penyebab pecahnya Perang Banjar.

Perjanjian itu terdiri atas 28 pasal dan ditandatangani dalam loji Belanda di Banjarmasin pada tanggal 4 Mei 1826 atau 26 Ramadhan 1241 H. Selain Sultan Adam Al Wasik Billah, perjanjian itu juga ditandatangani oleh Paduka Pangeran Ratu, Pangeran Mangkubumi, Pangeran Dipati, Pangeran Ahmad dan disaksikan oleh para Pangeran lainnya. Perjanjian inilah yang menjadi dasar hubungan politik dan ekonomi antara Kerajaan Banjar dengan pemerintah Belanda di Batavia. Dalam perjanjian tersebut Kerajaan Banjar mengakui *suzerinitas* atau pertuanan Pemerintah Hindia Belanda dan menjadi sebuah *Leenstaat*, atau negeri pinjaman. Berdasarkan perjanjian ini maka kedaulatan kerajaan keluar negeri hilang sama sekali, Kekuasaan ke dalam tetap berkuasa dengan beberapa pembatasan dan Residen berperan sebagai agen politik Belanda.

Isi perjanjian 1826 itu antara lain adalah :

- a. Kerajaan Banjar tidak boleh mengadakan hubungan dengan lain kecuali hanya dengan Belanda.
- b. Wilayah Kerajaan Banjar menjadi lebih kecil, karena beberapa wilayah menjadi bagian dibawah pemerintahan langsung Belanda. Wilayah-wilayah itu seperti tersebut dalam Pasal 4 :
 - Pulau Tatas dan Kuwin sampai di seberang kiri Antasan Kecil.
 - Pulau Burung mulai Kuala Banjar seberang kanan sampai di Pantuil,
 - Mantuil seberang Pulau Tatas sampai ke Timur Rantau Keliling dengan sungai-sungainya Kelayan Kecil, Kelayan Besar dan kampung di seberang Pulau Tatas.
 - Sungai Mesa di hulu kampung Cina sampai ke darat Sungai Baru sampai Sungai Lumbah,
 - Pulau Bakumpai mulai dari Kuala Banjar seberang kiri mudik sampai di Kuala Anjaman di kiri ke hilir sampai Kuala Lupak,
 - Segala Tanah Dusun semuanya desa-desa kiri kanan mudik ke hulu mulai Mangkatip sampai terus negeri Siang dan hilir sampai di Kuala Marabahan,
 - Tanah Dayak Besar Kecil dengan semua desa-desanya kiri kanan mulai dari Kuala Dayak mudik ke hulu sampai terus di daratan yang takluk padanya,
 - Tanah Mandawai,
 - Sampit,
 - Pambuang semuanya desa-desa dengan segala tanah yang takluk padanya,
 - Tanah Kotawaringin, Sintang, Lawai, Jelai dengan desa-desanya.
 - Desa Tabanio dan segala Tanah Laut sampai di Tanjung Selatan dan Timur sampai batas dengan Pagatan, ke utara sampai ke Kuala Maluku, mudik sungai Maluku, Selingsing, Liang Anggang, Banyu Irang sampai ke timur Gunung Pamaton sampai perbatasan dengan Tanah Pagatan,
 - Negeri-negeri di pesisir timur Pagatan, Pulau Laut, Batu Licin, Pasir, Kutai, Berau semuanya dengan yang takluk padanya.
- c. Penggantian Pangeran Mangkubumi harus mendapat persetujuan pemerintah Belanda.
- d. Belanda menolong Sultan terhadap musuh dari luar kerajaan, dan terhadap musuh dari dalam negeri.
- e. Beberapa daerah padang perburuan Sultan yang sudah menjadi tradisi, diserahkan pada Belanda. Padang perburuan itu, meliputi :
 - Padang pulau Lampi sampai ke Batang Banyu Maluka,
 - Padang Bajingah,
 - Padang Penggantian,

- Padang Munggu Basung,
- Padang Taluk Batangang,
- Padang Atirak,
- Padang Pacakan,
- Padang Simupuran,
- Padang Ujung Karangan.

Semua padang perburuan itu dilarang bagi penduduk sekitarnya berburu manjangan.

- f. Belanda juga memperoleh pajak penjualan intan sepersepuluh dari harga intan dan sepersepuluhnya untuk Sultan. Kalau ditemukan intan yang lebih dari 4 karat harus dijual pada Sultan. Harga pembelian intan itu, sepersepuluhnya diserahkan pada Belanda.

Gambaran umum abad ke-19 bagi kerajaan Banjar, bahwa hubungan kerajaan keluar sebagaimana yang pernah dijalankan sebelumnya, terputus khususnya dalam masalah hubungan perdagangan internasional. Tetapi kekuasaan Sultan ke dalam tetap utuh, tetap berdaulat menjalani kekuasaan sebagai seorang Sultan.

1. Situasi Politik Abad ke-19

Abad ke-18 diakhiri dengan pemerintahan Sultan Tahmidullah II yang dikenal dengan gelar Susuhunan Nata Alam. Sultan ini meninggal tahun 1801, dan diganti oleh puteranya Sultan Suleman al Mutamidullah (1801-1825). Sultan Nata dikenal sangat licik menghadapi Belanda, Sultan ini berhasil mengelabui Belanda, sehingga tidak memperoleh keuntungan dari perjanjian yang dibuatnya, bahkan mengalami kerugian. Selama Sultan Nata, Kerajaan Banjar dapat mempertahankan kedaulatan ke dalam dan keluar. Akhirnya Belanda meninggalkan Banjarmasin tahun 1809.

Abad ke-19 dimulai dengan pemerintahan Sultan Suleman al Mutamidullah. Setelah Sultan dilantik, Belanda mengadakan perjanjian dengan Sultan pada 19 April 1802. Perjanjian hanya mengingatkan kembali bahwa Kerajaan Banjar telah diserahkan kepada pemerintah Belanda seperti Perjanjian 1787. Dalam perjanjian itu ditambahkan bahwa Sultan berusaha menangkap dan menghukum potong kepala orang-orang Dayak yang telah melakukan pemotongan kepala. Hukuman potong kepala terhadap orang Dayak itu harus dilakukan dimuka loji Belanda. Selebihnya dalam perjanjian itu pemerintahan Belanda mengharapkan agar Sultan dapat memelihara kebun-kebun lada agar hasil lada menjadi lebih baik. Sebelum Belanda meninggalkan Banjarmasin tahun 1809, Belanda kembali membuat perjanjian dengan Sultan. Perjanjian ini hanya lebih menitikberatkan pada usaha pemeliharaan kebun lada, agar lada dapat berproduksi sebagaimana diharapkan oleh Belanda. Dalam perjanjian itu Belanda tetap mengakui kedaulatan Sultan dan tidak menyinggung tentang masalah pemerintahan termasuk hubungan dagang ke luar negeri. Dengan demikian selama Sultan Suleman al Mutamidullah kerajaan Banjar tetap mempunyai kedaulatan secara utuh ke dalam dan luar. Belanda meninggalkan Banjarmasin sebelum Belanda menyerahkan Batavia kepada Inggeris. Dalam perebutan kekuasaan dan perebutan jalan perdagangan di Laut, Belanda kalah menghadapi Inggeris dan pada tahun 1811 Belanda menyerahkan Batavia kepada *East India Company* (EIC) kompeni perdagangan Inggeris.

East India Company (EIC) mengadakan perjanjian persahabatan dengan kerajaan Banjar. Dalam perjanjian itu EIC Inggeris tidak menyinggung masalah kedaulatan pemerintahan Sultan tetapi lebih banyak masalah perdagangan. EIC Inggeris, menduduki beberapa daerah yang dulu pernah diduduki Belanda seperti pulau Tatas, Kuin, Pasir, Pulau Laut, Pagatan, Bakumpai. Selanjutnya EIC Inggeris mempertahankan dan melindungi hak-hak Sultan dan kekuasaan Sultan begitu pula hak milik Sultan terhadap serangan orang Eropah lainnya dan terhadap musuh bangsa Asia. Perjanjian itu selain Sultan juga ditanda tangani oleh para bangsawan kerajaan lainnya yaitu : Pangeran Panambahan

Adam. Pangeran Aria Mangku Negara, Pangeran Kasuma Wijaya dan Pangeran Achmad, sedangkan dari pihak EIC Inggeris diwakili oleh Commissioner D. Wahl.

Kalau Sultan Tahmidullah atau Panambahan Adam menjadikan Martapura sebagai ibu kota kerajaan dengan keratonnya yang diberi nama Bumi Kencana, maka Sultan Suleman memindahkan keraton kerajaan ke Karang Intan. Kubur Sultan Suleman juga terletak di Karang Intan.

Perjanjian antara Belanda dan Inggeris memutuskan bahwa Belanda diperbolehkan kembali menduduki bekas kekusaannya dan dengan perjanjian ini EIC (Inggeris) terpaksa melepaskan kembali Batavia pada tahun 1816. Kerajaan Banjarpun ditinggalkan EIC Inggeris pada tahun tersebut dan kembali Belanda menanamkan kuku penjajahannya dengan cara kembali membuat perjanjian dengan Sultan.

Untuk menanam pengaruh Pemerintah Belanda membuat perjanjian dengan Sultan Suleman al Mutamidullah pada tahun 1818 dan tahun 1823. Perjanjian-perjanjian itu dibuat oleh Belanda untuk lebih mengingatkan pada Sultan tentang keberadaan Belanda dalam wilayah Kerajaan Banjar. Ada beberapa hal yang menarik dari perjanjian itu.

- a. Kerajaan Banjar itu dahulu yaitu selama abad ke-17 dan pertengahan abad ke-18 mempunyai wilayah pengaruh yang cukup luas meliputi Kerajaan Berau, Kutai, Pasir, Dayak Besar, Sampit, Kotawarigin, Lawai. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa daerah-daerah itu berada dalam wilayah pendudukan Belanda.
- b. Orang bukan bangsa Banjar adalah orang asing, seperti : Bugis, Makassar, Bali, Mandar, Jawa, begitu pula Cina Eropah dan Arab. Semua orang asing diperlakukan hukum Eropah oleh Belanda kalau mereka membuat tindak pidana.
- c. Atas permintaan Belanda, Sultan berusaha menggalakkan tanaman kopi, dan lada. Kopi dan lada merupakan jenis komoditi ekspor yang andalan saat itu.

Sultan Adam Al Wasik Billah menggantikan Sultan Suleman al Mutamidullah pada tahun 1825 setelah Sultan Suleman meninggal dunia. Setelah sultan dilantik Belanda memperbaharui perjanjian dengan sultan yang baru. Perjanjian itu ditandatangani kedua belah pihak pada tahun 1826. perjanjian ini menjadi dasar bagi Belanda untuk berpijak ke langkar pengaruh yang lebih dalam untuk mencampuri urusan pemerintahan Sultan.

Pada abad ke- 18 Eropah mengalami Revolusi Industri. Dengan dimulai Inggeris sebagai negeri yang mengalami revolusi akhirnya menjalar ke Benua Eropah lainnya. Kapal uap ditemukan dan Belanda pada pertengahan abad ke- 19 sudah menggunakan kapal uap sebagai pengganti kapal layar. Mula-mula kapal uap yang memakai roda berputar di bagian sisi kiri kananya, dan paling akhir memakai baling-baling biasa. Kapal-kapal uap ini memakai batu bara sebagai sumber energi yang di impor dari Eropah. Semakin banyak kapal uap yang menggunakan batu bara ini maka impor batu bara bertambah besar.

Belanda memperoleh informasi bahwa di daerah Riam Kiwa ditemukan lapisan batu bara. Informasi ini menakutkan Belanda dan sejak itu perhatian terhadap Kerajaan Banjar lebih intensif. Belanda menjalankan segala taktik dan strategi untuk memperoleh konsesi tambang batu bara di daerah Kerajaan Banjar ini. Sebagai langkah awal dari taktik memperoleh konsesi ini Belanda berhasil mengadakan perjanjian tahun 1845 itu menetapkan batas-batas wilayahnya Kerajaan Banjar. Wilayah ini dibanding dengan sebelumnya adalah lebih kecil tetapi seluruhnya meliputi daerah inti dari Kerajaan Banjar yang asli. Meskipun daerah ini paling kecil tetapi penduduknya paling padat.

Daerah Kerajaan Banjar ini terbagi sebagai berikut :

- a. Daerah Banjarmasin terletak di sebelah kanan Sungai Martapura sampai dengan Sungai Kalayan, kemudian pinggir sebelah kanan Sungai Kuwin dan sepanjang Sungai Barito. Di daerah ini terletak keraton kerajaan Banjar yang mula-mula yang telah hancur karena serangan Belanda tahun 1612.

- b. Daerah Martapura meliputi daerah Sungai Riam Kanan dan daerah Sungai Riam Kiwa.
- c. Daerah Banua Ampat yang meliputi daerah Banua Halat, Banua Gadung, Parigi dan Lawahan-Tambaruntung. Di daerah Lawahan ini mengalir Sungai Muning.
- d. Daerah Banua Lima yang meliputi daerah-daerah Negara, Amuntai, Alabio, Kalua dan Sungai Banar.¹³³

Berdasarkan perjanjian tahun 1826 dan 1845 maka daerah Kerajaan Banjar tidak mempunyai jalan ke laut, karena semua daerah pesisir dikuasai oleh Belanda. Hal ini mempunyai dampak yang nyata bagi pola hidup Orang Banjar. Kalau dalam abad-abad sebelumnya Orang Banjar adalah bangsa pelaut yang secara rutin pelayarannya sampai ke Cochin Cina dan Brunai, dalam abad ke- 19 ketrampilan sebagai pelaut sudah banyak berkurang.

Pada tanggal 28 September 1849 Gubernur Jenderal Rochussen datang ke Pengaron di dalam wilayah kerajaan Banjar untuk meresmikan pembukaan tambang batu bara Hindia Belanda pertama untuk meresmikan pembukaan tambang batu bara Hindia Belanda pertama di Indonesia, yang dinamakan Tambang Batu Bara *Oranje Nassau*. Melihat kenyataan bahwa tambang batu bara ini mendatangkan keuntungan yang banyak bagi Belanda, Belanda mempertajam permainan politiknya. Residen yang berkedudukan di Banjarmasin ditugaskan untuk memperoleh tenaga kerja dicari orang yang mempunyai hutang dan ini dilakukan dengan muslihat agar orang berhutang. Memang dalam hukum yang dianut dalam Kerajaan Banjar orang yang terhutang itu adalah setengah budak.

Demikian pula untuk mendapatkan pajak-pajak dan uang cukai serta memindahkan ke tangan Belanda. Belanda merasa cukup dengan uang ganti yang dibayar oleh Belanda. Bagi golongan bangsawan dan para raja-raja yang besar jumlahnya perjanjian ini mengecilkan tanah apanase, hal ini berarti berkurangnya penghasilan, dan bertambahnya pajak yang mengikat rakyat. Bagi golongan menengah dan para saudagar besar dan para pedagang perjanjian ini tidak mengurangi kemakmuran mereka.

Pada tahun 1860 sedikit sekali daerah-daerah di Nusantara yang tingkat kemakmurannya sangat tinggi dan merata seperti di Banjarmasin, dan diseluruh Nusantara jumlah orang yang naik haji ke Mekkah tidak ada yang sebanyak dari Banjarmasin.

Pada waktu Sultan Adam Al Wasik Billah menjadi Sultan, dia memerintah didampingi oleh Sultan Muda Abdurrahman, yaitu putera mahkota calon pengganti Sultan kalau Sultan mangkat. Untuk merukunkan keluarga diantara keturunan Tamjidillah dengan keturunan Sultan Kuning (Sultan Tahmidullah), maka Sultan Suleman al Mutamidullah sewaktu Sultan ini masih hidup, mengawinkan cucunya Sultan Muda Abdurrahman dengan Ratu Antasari, adik dari Pangeran Antasari. Sayangnya isterinya ini meninggal sebelum melahirkan seorang putera. Dalam tahun 1817 lahirlah seorang putera Sultan Muda Abdurrahman dari seorang selir keturunan Cina Pacinan, Nyai Besar Aminah yang diberi nama Pangeran Tamjidillah. Sultan Muda Abdurrahman menghendaki agar Pangeran Tamjidillah diterima sebagai raja penerus keturunan kerajaan. Sultan Suleman dan Sultan Adam menolak usul ini sebab bertentangan dengan tradisi yang berlaku di dalam kerajaan. Untuk mencari keturunan yang sah, Sultan Muda Abdurrahman dikawinkan lagi dengan seorang bangsawan Ratu Siti, puteri Mangkubumi Nata. Tahun 1822 lahirlah putera yang dinanti-nantikan, diberi nama Pangeran Hidayatullah, 5 tahun lebih muda dari Pangeran Tamjidillah. Kedua putera Sultan Muda ini berlainan watak dan tingkah lakunya dan akan menimbulkan bibit pertentangan diantara keduanya. Pangeran Tamjidillah sangat menyenangi pergaulan dengan orang-orang Belanda, minum-minuman keras menjadi kebiasaannya. Pangeran Hidayat, seorang yang taat menjalankan ibadah agama dan sangat disenangi oleh kaum ulama.

¹³³ M. Idwar Saleh, "Pepper Trade and The Rulling Class of Banjarmasin in the Seventeenth Century", Makalah pada Seminar Dutch – Indonesian Historical Conference, Leiden, 1978, hal. 18.

Malapetaka Kerajaan Banjar diawali dengan matinya secara mendadak Sultan Muda Abdurrahman pada tahun 1852. Sejak meninggalnya Sultan Muda Abdurrahman ini timbullah benih-benih pertentangan antara keluarga bangsawan dan merupakan salah satu faktor hancurnya Kerajaan Banjar. Sejak itu ada tiga golongan yang berebut kuasa dalam kerajaan, yaitu :

- a. Pangeran Tamjidillah, putera Sultan Muda Abdurrahman dengan Nyai Besar Aminah, seorang Cina Pacinan. Tingkah lakunya tidak disenangi para ulama dan bangsawan, karena senang bergaul dengan Belanda dan senang bermabuk-mabukan. Karena terbiasa membantu Pangeran Mangkubumi Nata berurusan dengan Residen, karena itu ia dikenal dikalangan orang-orang Belanda dan disenangi oleh kalangan tersebut.
- b. Pangeran Hidayatullah, putera Sultan Muda Abdurrahman dengan seorang bangsawan Ratu Siti, puteri Pangeran Mangkubumi. Dia seorang yang taat beribadat, berakhlak terpuji dan disenangi kalangan luas kaum ulama dan masyarakat Banjar.
- c. Pangeran Prabu Anom, putera Sultan Adam Al Wasik Billah adik Sultan Muda Abdurrahman. Ibunya Ratu Komala Sari yang sangat besar pengaruhnya di kalangan Dewan Mahkota dan Sultan Adam. Ibunya sangat berambisi untuk menjadikan Pangeran Prabu Anom menjadi Putera Mahkota. Prabu Anom dikenal sebagai seorang yang bertindak sewenang-wenang dan tindakannya sering menyakitkan hati masyarakat.

Selain Sultan Muda Abdurrahman yang meninggal tahun 1852 juga Pangeran Mangkubumi meninggal lebih dahulu. Kehilangan kedua pejabat teras kerajaan ini merumitkan urusan politik kerajaan, disamping itu ada 3 kelompok yang bersaing memperebutkan kedudukan sebagai Sultan Muda dan Mangkubumi.

Baik Sultan Suleman al Mutamidillah, maupun Sultan Adam Al Wasik Billah telah melihat pertentangan keluarganya yang terjadi semenjak Susuhunan Nata Alam (1761-1801) yang kemudian dengan perkawinan. Usaha ini juga dijalankan untuk menghadapi bahaya dari pihak luar khususnya Belanda yang senantiasa mendesak kekuasaan dan mempersempit ruang gerak Sultan. Belanda berusaha untuk selalu menghidupkan pertentangan keluarga sesuai dengan politik dan strategi penjajah *divide et empera*, pecah belah dan kuasai. Dari pertentangan dan perebutan kekuasaan ini Belanda akan memperoleh keuntungan. Pihak Belanda telah memperhitungkan bahwa dari ketiga kelompok yang bersaing ini, hanya dari Pangeran Tamjidillah-lah yang dapat diharapkan keuntungan itu, dan dari dialah diharapkan akan memperoleh konsesi tambang batu bara "*Oranje Nassau*". Oleh karena itu, Residen van Hengst di Banjarmasin (1851-1953), Residen Belanda yang berkedudukan di Banjarmasin mengusulkan pada Pemerintah Belanda di Batavia agar Pangeran Tamjidillah diangkat sebagai Sultan Muda.

Dalam bulan April 1853, Sultan Adam telah mengirim utusan ke Batavia untuk minta diberikan keadilan terhadap permintaannya menjadikan Pangeran Hidayat sebagai Sultan Muda dan Pangran Prabu Anom sebagai Mangkubumi dan menolak pengangkatan Pangeran Tamjidillah. Permintaan ini ditolak oleh Belanda, bahkan utusannyapun tidak diterima secara resmi. Yang dilakukan Belanda hanya mengganti Residen van Hengst dengan Residen A. van der Ven. Tidak ada pilihan lain dari Sultan Adam, selain membuat "Surat Wasiat" yang hanya dibuka dan dibaca bila Sultan meninggal.

Isi surat wasiat (*testamen*) itu antara lain :

- a. Sultan Adam Al Wasik Billah memberi gelar kepada Pangeran Hidayatullah dengan gelar Sultan Hidayatullah.
 - b. Sultan Adam Al Wasik Billah mengangkat Pangeran Hidayatullah menjadi penguasa agama, mewariskan semua tanah ke sultan dan semua padang perburuan.
-

- c. Sultan Adam Al Wasik Billah memerintahkan kepada seluruh rakyat untuk mentaati hal ini, dan jika perlu mempertahankannya dengan kekerasan.

Surat wasiat ini ditambah lagi dengan tiga ayat tambahan yang berbunyi :

- a. Pangeran Hidayatullah menggantikan Sultan Adam Al Wasik Billah bila ia meninggal dunia, dan memerintahkan rakyat dengan penuh keadilan, dan benar-benar mengikuti perintah agama Islam.
- b. Sultan Adam Al Wasik Billah memerintahkan kepada semua Pangeran lainnya untuk mengikuti Pangeran Hidayatullah sebagai sultan, dan mengutuknya sampai anak cucunya bila hal ini dilanggar.
- c. Perintah yang sama kepada para haji, ulama dan tetuha kampung.

Pada tanggal 8 Agustus 1852 Pangeran Tamjidillah diangkat menjadi Sultan Muda oleh Pemerintah Belanda, disamping tugasnya sebagai Mangkubumi, dan ia bertempat tinggal di Banjarmasin. Terhadap pengangkatan ini Sultan Adam telah melaporkan kepada Pemerintah Belanda di Batavia tentang tindakan ketidakadilan ini, tetapi tidak diperhatikan oleh Belanda. Ratu Komala Sari, permaisuri mengajukan puteranya Pangeran Prabu Anom sebagai Mangkubumi, yang juga ditolak oleh Belanda. W.A. van Rees dalam *De Bandjermasinsche Krijg* melukiskan sebagai berikut :

"Menurut adat yakni menurut norma-norma hukum yang umum dimana-mana pengganti raja berdasarkan garis keturunan yang lurus, tidak ada orang lain yang berhak dapat menjadi pengganti raja selain Hidayat. Tamjidillah walaupun anak yang lebih tua dari Hidayat, tetapi ia adalah darah campuran tidak "tutus" yang tidak akan mungkin memangku sebagai sultan selama masih ada turunan yang berhak menurut undang-undang. Selain dari hak turun temurun yang tidak dapat diganggu gugat, tampaknya Hidayat mendapat anugerah untuk menduduki kedudukan yang paling tinggi itu dari sifatnya yang wajar. Sejalan dengan kesetiaan taat bertakwa menjalankan ibadah agama, Hidayat adalah pencinta tanah air (patriot) yang beryalannya, suka memberikan pertolongan dan seorang budiman, sehingga dihormati oleh tiap-tiap orang, juga oleh Sultan Adam" ¹³⁴

Situasi makin bertambah buruk sehingga menyulitkan pemerintah Belanda sendiri, akhirnya Belanda merubah sikapnya dengan mengangkat Pangeran Hidayat sebagai Mangkubumi pada 9 Oktober 1856. Dalam surat pengangkatannya tertulis sebagai berikut :

"Hadjrat Annabi Salallahu alaihi wassalam seribu dua ratus tudjuh poeloeh tiga pada kesembilan hari boelan Sjafar kepada hari Chamis djam poekoel sepoeloeh pagi-pagi."

Mendjadi hadjrat Almasih kesembilan hari boelan Oktober tahoen seriboe delapan ratoes lima poeloeh enam maka desawa itoelah sahaja Pangeran Hidayat Allah jang dengan permintaan Sri Padoeka Toean Sultan Adam Al Wasik Billah yang mempoenyai tahta keradjaan Bandjarmasin beserta moefakatan dengan Sri Padoeka Toean van de Graaf Residen Bandjarmasin jang memegang koesa atas tanah sebelah selatan dan timoer poelaoe Borneo soedah terima oleh Sri Paduka Jang Dipertoen Besar Gurnadoer Djenderal dari tanah Hindia Niderland jang bersemajang di Betawi.

Mendjadi Mangkoeboemi di Keradjaan Bandjarmasin bepersembahan soerat persoempahan ini dichadirat Goebermin Hindia Niderland pada menjatakan:

Ha Mim Allah wal Rasael"

Surat pengangkatan itu dilanjutkan dengan sumpah kesetiaan kepada Sultan, Sri Paduka Tuan Sultan Banjarmasin, dan kesetiaan kepada Goebernemin Hindia Niderland.

Pengangkatan Pangeran Hidayatullah sebagai Mangkubumi dilakukan oleh Belanda setelah sebelumnya Belanda dengan licin menekan Sultan menandatangani persetujuan pemberian konsesi tambang batu bara kepada Belanda 30 April 1856. Pangeran Hidayat menyadari bahaya pemberian

¹³⁴ Gusti Mayur, *Perang Banjar*, CV. Rapi, Banjarmasin, 1979, hal. 10.

konsesi tambang batu bara ini, tetapi dia tak berdaya menghadapinya apalagi setelah Belanda menempatkan serdadunya di pusat-pusat tambang batu bara mereka.

Selain menetapkan Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Muda, pengangkatan Pangeran Hidayat sebagai Mangkubumi, Belanda juga menahan Pangeran Prabu Anom di Banjarmasin bertempat tinggal di rumah menantunya Pangeran Syarif Hussein. Daerah itu sekarang menjadi Kampung Melayu.

Oleh karena tindakan Belanda ini, Sultan Adam yang sudah tua dan hampir putus asa oleh hal-hal tersebut di atas telah membuat testamen yang diberikan kepada Mangkubumi Pangeran Hidayat, Kadhi di Martapura dan Kadhi di Amuntai. Situasi ini menyebabkan dia sakit. Sebelum dia meninggal dia minta dibawa kembali ke Martapura dan minta dikuburkan di sana. Pada tanggal 30 Oktober 1857 Sultan Adam sakit keras, maka dia dibawa ke Martapura dan meninggal tanggal 1 November 1857.

Sebelum Sultan Adam Al Wasik Billah mangkat, Pangeran Tamjidillah mengirim surat rahasia kepada Gubernur Jenderal Rochussen, melalui Residen di Banjarmasin. Isi surat itu bahwa ia akan mengusahakan segala kemungkinan supaya kelak tanah konsesi tambang batu bara *Oranje Nassau* menjadi milik Pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya dikatakannya bahwa dia akan melaksanakan segala keinginan yang dikehendaki oleh Pemerintah Hindia Belanda di Betawi asal ia akan mengganti ayahnya sebagai sultan di Kerajaan Banjar, apabila Sultan Adam wafat. Pemerintah di Betawi menyetujui usul itu.

Ketika Sultan Adam Al Wasik Billah meninggal pada tanggal 1 November 1857 karena sakit, tanpa sepengetahuan Dewan Mahkota, yaitu sesudah dua hari pemakaman almarhum Sultan, pemerintah Belanda menobatkan Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan. Prabu Anom putera Sultan Adam dengan Ratu Komala Sari ditangkap oleh Belanda, karena menurut pertimbangan Belanda kalau Pangeran Prabu Anom berada di Banjarmasin akan membahayakan, dan dia dibuang ke Jawa.¹³⁵

Pengangkatan Sultan Tamjidillah itu membuat kalangan kaum bangsawan merasa tidak puas, karena pengangkatan ini sangat melanggar tradisi Istana, melanggar surat wasiat Sultan Adam Al Wasik Billah, disamping, tingkah laku Sultan Tamjidillah yang sejak semula tidak disenangi oleh kaum bangsawan dan rakyat Banjar. Sultan lebih mendahulukan kepentingan pemerintah Belanda dari kepentingan dan nasib rakyat. Kebiasaan minum-minuman keras sangat menjengkelkan kalangan agama dan kaum ulama. Antara Sultan dengan Mangkubumi Pangeran Hidayatullah yang berkedudukan di Martapura tidak terdapat kerjasama dan saling curiga mencurigai. Dalam situasi demikian Sultan Tamjidillah mencoba memikat Mangkubumi Pangeran Hidayatullah dengan cara mengawinkan puterinya putri Bulan dengan putera Mangkubumi, Pangeran Amir. Perkawinan politik ini dimaksudkan agar terjadi keakraban dan dapat menghasilkan kerjasama dalam pemerintahan kerajaan. Namun usaha ini tidak menghasilkan apa-apa, bahkan kecurigaan makin menjadi lebih tebal, sebab sejak kecil sudah dipupuk dengan rasa benci satu sama lain. Apalagi siasat dari Sultan Tamjidillah untuk menjatuhkan Mangkubumi dengan cara tipu muslihat makin mengeruhkan suasana.

Tindakan pertama yang menyakitkan hati rakyat setelah pengangkatan Pangeran Tamjidillah menjadi Sultan tanggal 3 November 1857, ialah (4 November 1857) Residen mengizinkan dengan bantuan serdadu yang ada di Martapura untuk menangkap Pangeran Prabu Anom, pamannya sendiri. Pangeran Prabu Anom pergi ke Martapura lari dari tahananannya di Banjarmasin karena mengurus pemakaman ayahnya Sultan Adam al Wasik Billah. Alasannya dan tuduhan yang dikenakan pada dirinya ialah bahwa Pangeran Prabu Anom membahayakan tahta, tetapi penangkapan itu tidak berhasil. Rakyat menjadi saksi atas tindakan Sultan baru ini dalam usahanya menangkap pamannya

¹³⁵ A.Gazali Usman, "Pangeran Hidayatullah", dalam *Kalimantan Scientie*, No. 17, Tahun VII, Banjarmasin, 1988, hal. 4.

Pangeran Prabu Anom. Lima hari setelah pemakaman Sultan Adam Al Wasik Billah yang sangat dicintai rakyat, keraton Martapura ditembaki serdadu Belanda untuk menangkap anak raja. Prabu Anom akhirnya ditangkap dengan tipu muslihat pada permulaan tahun 1858 dan di buang ke Jawa.

Rakyat umum berpendapat, seperti kata Residen J.J. Meijer kemudian, bahwa dengan pengangkatan Pangeran Tamjidillah menjadi Sultan yang ke-13 akan timbul bermacam bala bencana karena kelahirannya dan perbuatannya sama sekali bertentangan dengan adat tradisi yang berlaku dan bertentangan dengan agama Islam. Dia lahir dari tindakan di luar nikah menurut agama Islam. Pengangkatan Pangeran Tamjidillah itu diteruskan walaupun bertentangan pula dengan kehendak kaum ulama, para kaum bangsawan serta harapan-harapan rakyat kecil.

Dalam tahun 1858 perasaan tidak puas rakyat ini menjadi lebih besar, karena pemerintahan makin lama makin kacau dan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintahan penuh dengan fitnah dan banyak yang suka mengambil muka menjilat raja.

Ketidak puasan terhadap Sultan Tamjidillah dan campur tangan Belanda terhadap pemerintahan kerajaan Banjar menimbulkan keresahan dan ketegangan dalam masyarakat, dan hal inilah yang ikut melahirkan gerakan-gerakan *Muning*, yakni sebuah gerakan sosial masyarakat tani yang kemudian menjadi motor dalam *Perang Banjar* (1859-1905).

Residen Belanda tidak menginsafi dan menyadari perasaan kebanyakan para bangsawan dan rakyat, perasaan yang membara laksana api didalam sekam terhadap penjajah Belanda.¹³⁶ Tindakan-tindakan kebijaksanaan sehingga yang telah diambil pada tanggal 28 Oktober 1858 yaitu perkawinan antara putera Mangkubumi dengan puteri Sultan adalah salah satu usaha yang telah dijalankan untuk menentramkan suasana. Pada tanggal itu pula telah diumumkan pernyataan pemberian kekuasaan pelaksanaan (*uitvoerende macht*) kepada Mangkubumi Pangeran Hidayatullah sesuai dengan pasal 13 perjanjian 4 Mei 1828. Begitu pula pada Pengeran Aria Kasuma, saudara Sultan Tamjidillah atau usul Mangkubumi Pangeran Hidayatullah telah diangkat menjadi Pangeran Adipati yang memerintah di Banua Lima.

Residen Belanda menduga dengan perkawinan dan pengumuman pemberian kekuasaan tersebut suasana hangat menjadi lebih dingin. Namun hakekatnya pemberian kekuasaan kepada Mangkubumi Pangeran Hidayatullah dan pengangkatan Pangeran Adipati Aria Kasuma hanya pengumuman kosong belaka, sebab Belanda tetap berdaya upaya memegang sendiri tampuk pemerintahan sedang adipati Pangeran Aria Kasuma walaupun dijadikan adipati di Banua Lima, tetapi tidak pernah datang di Amuntai sebagai tempat memegang kekuasaan. Banua Lima adalah dalam kerajaan Banjar yang meliputi : Negara, Alabio, Sungai Banar, Amuntai, dan Kalua.

Kedudukan Pangeran Hidayatullah menjadi lebih kuat karena mendapat dukungan dari segala lapisan, terutama kalangan bangsawan yaitu ketika Nyai Ratu Komala Sari, isteri almarhum Sultan Adam Al Wasik Billah dan tiga orang puteri beliau, Ratu Kasuma Negara, Ratu, Ratu Aminah dan Ratu Keramat memberi surat kuasa dan penyerahan Kerajaan Banjar kepada Pangeran Hidayatullah, dengan alasan bahwa keluarga istana tidak dapat membenarkan pengangkatan Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan sebab bertentangan dengan tradisi dan surat wasiat Sultan Adam Al Wasik Billah. Dengan dasar surat itu Pangeran Hidayatullah telah mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh kaum bangsawan dan pemuka rakyat di Martapura, diantaranya Pangeran Surya Mataram, Pangeran Wijaya Kusuma, dan Kiai Patih Guna Wijaya. Dua hari setelah rapat ini diadakan lagi rapat yang merundingkan rencana penyusunan kekuatan di Banua Lima.

Disamping itu Pangeran Hidayatullah nampak diminta rakyat sebagai pemimpin yang sah dan sesuai dengan Sultan Adam Al Wasik Billah, bahwa dia sebagai orang yang berhak mendapat tahta

¹³⁶ Gusti Mayur, *op.cit.*, hal. 13.

kerajaan. Karena itu Pangeran Antasari berusaha keras membantu Pangeran Hidayat untuk menggerakkan rakyat melawan Belanda.¹³⁷

Pangeran Hidayatullah sebagai Mangkubumi telah memberi kepercayaan kepada Pangeran Antasari untuk menjalin kerjasama dengan Panembahan Muda Datu Aling pemimpin *Gerakan Muning* di daerah Muning. Untuk daerah Banua Lima yang dipimpin oleh Jalil, Mangkubumi Pangeran Hidayatullah sendiri langsung menanganinya.

Jalil, tokoh Balangan yang memimpin rakyat di daerah Banua Lima dalam bulan September 1958 dengan terang-terangan memberontak tidak mau membayar pajak kepada Adipati Danu Raja, kepala daerah di Banua Lima.

Pangeran Hidayatullah sebagai Mangkubumi diperintahkan menangkap Jalil, tetapi Mangkubumi Pangeran Hidayatullah setelah tiba di Amuntai bukan menangkap Jalil, tetapi justru menyusun kekuatan dan memperkuat kedudukan Jalil. Jalil diberi gelar Kiai Adipati Anom Dinding Raja. Sebagai tindak lanjut dari pemberian gelar ini, Mangkubumi mengukuhkan jabatan tersebut dengan memberikan tanda kebesaran kerajaan berupa bendera kuning, payung kuning, sebuah tombak balilit dan sebuah pedang.¹³⁸

Dengan demikian Jalil telah menjadi pengikut Mangkubumi Pangeran Hidayatullah. Setelah kejadian itu Pangeran Hidayatullah sering pula mengadakan rapat rahasia bersama-sama pemimpin gerakan yang menentang Belanda. Ia juga sering pergi ke daerah pertambangan batubara Belanda di Mangkau dan Kalangan.

Kegiatan Pangeran Hidayatullah telah diketahui oleh Belanda berdasarkan laporan dari Akhmad bahkan *Gerakan Muning* sebenarnya bersumber dari Mangkubumi Pangeran Hidayatullah, dan Sultan Kuning sebagai raja di Muning adalah atas perintah Pangeran Hidayatullah.

Pangeran Hidayatullah sebagai pewaris tahta yang sah dan terikat dengan surat wasiat Sultan Adam al Billah telah diikuti Belanda. Sebab taktik itu disamping bersifat tertulis dan rahasia, juga dilakukan secara lisan yang bagi rakyat Banjar keduanya sama kuatnya. Di Masjid Batang Balangan Amuntai ditempatkan pengumuman yang menyebutkan bahwa rakyat Kesultanan Banjar sebagai domba-domba dan sultan sebagai harimau pemeras. Dinyatakan pula hanyalah di Banua Lima sajalah hukum Islam yang berjalan dengan sempurna, sedangkan di lain tempat sudah kabur. Pangeran Hidayatullah dan Surya Mataram dinyatakan sebagai pelindung hukum dan agama, dan agar rakyat mengadu kepada mereka apabila mendapat kesulitan. Pengumuman ini dibubuhi cap Pangeran Singasari, saudara almarhum Sultan Adam Al Wasik Billah dan dibacakan pula oleh Penghulu Abdul Gani di hadapan khalayak ramai yang berkumpul di masjid Amuntai.¹³⁹

Bulan April 1859 adalah bulan yang paling panas suhu politiknya dalam seluruh wilayah kerajaan Banjar. Sultan Tamjidillah bersama pihak Belanda; Pangeran Hidayat, Pangeran Antasari dan rakyat saling beradu siasat untuk memperoleh kemenangan. Hal ini terlihat dari fakta dibawah ini :

- a) Tanggal 2 April 1859 Sultan Tamjidillah melaporkan situasi kerajaan kepada Residen, bahwa Gerakan Muning bersumber dari Pangeran Hidayatullah yang menjabat sebagai Mangkubumi.
- b) Tanggal 4 April 1859 atas desakan Sultan Tamjidillah Pangeran Hidayatullah sebagai Mangkubumi pergi ke Banjarmasin menemui Residen dikatakan sehubungan dengan tugasnya ke Banua Lima.

¹³⁷ Tamny Ruslan, "Gerakan Muning: Gerakan Sosial di Dalam Perang Banjar", Tesis pada Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1981, hal. 76.

¹³⁸ A.Gazali Usman, "Pangeran..., *op.cit.*, hal. 6.

¹³⁹ A.Gazali Usman, *ibid.*, hal. 7.

- c) Tanggal 6 April 1859 Mangkubumi Pangeran Hidayatullah pulang ke Martapura dan menolak usul Residen untuk pergi ke Banua Lima dengan alasan karena saat itu bulan suci Ramadhan, bulan puasa.
- d) Minggu kedua bulan April 1859 terjadi banyak surat menyurat antara Sultan Tamjidillah dengan Mangkubumi Pangeran Hidayatullah, antara lain tentang penangkapan Pangeran Antasari, Jalil, Datuk Aling, Sultan Kuning dengan anak buahnya : Pangeran Mangku Kesuma Wijaya, Bayan Sampit, Garuntung Manau, Khalifah Rasul, Panglima Juntai di Langit, Garuntung Waluh, Panimba Sagara, Pembelah Batung, Kindue Mui, Kindue Aji dan lain-lain.
- e) Pada 11 April 1859 sebagai Mangkubumi Pangeran Hidayatullah bersama Pangeran Jaya Pemenang, Pangeran Antasari dan sejumlah anak raja pergi ke Pengaron . Perjalanan ini sangat mencurigakan pihak Belanda.
- f) Karena kegagalan pihak Belanda untuk memaksa Mangkubumi Pangeran Hidayatullah ke Banua Lima, Residen meminta Qadhi Pangeran Penghulu Mohammad Seman ke Banua Lima. Residen heran ketika mendapat laporan bahwa dalam rombongan itu ikut pula Ratu Syarif Husin bersama Ratu Komala Sari permaisuri Sultan Adam almarhum, Ibu dari Pangeran Prabu Anom yang telah dibuang ke Jawa.
- g) Belanda dengan Sultan Tamjidillah sudah merencanakan penangkapan terhadap Pangeran Hidayatullah tetapi pembicaraan itu bocor dan diberitahukan oleh Pangeran Akhmid adik Sultan Adam (17 April 1859).
- h) Pada tanggal 20 April 1859 , dua orang cucu Kiai Adipati Anom Dinding Raja menjumpai Pangeran Hidayatullah dirumahnya di Antalangu (Martapura). Mereka kemudian membawa perintah Pangeran Hidayatullah untuk Jalil gelar Kiai Adipati Anom Dinding Raja, yaitu agar penduduk Batang Balangan dan Tabalong segera turun ke Martapura sejumlah kira-kira 2.000 orang. Tetapi mereka tertangkap oleh Belanda.

Pangeran Hidayatullah telah menyusun kesatuan kekuatan rakyat untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda secara menyeluruh. Pada bulan April 1859 Pangeran Hidayatullah mengunjungi kembali Muning tempat Gerakan Muning dibawah pimpinan Panembahan Muda Datuk Aling dan Sultan Kuning. Persiapan penyerangan hanya tinggal menunggu perintah saja menunggu waktu yang tepat. Pangeran Hidayatullah melarang mengadakan penyerbuan pada bulan April. Selain itu pangeran Hidayat memperhitungkan kekuatan Belanda dan kekuatan rakyat. Untuk itu perlu diimbangi dengan taktik perang secara menyeluruh.

Pada pertengahan bulan April 1859, Sultan Kuning mengutus 4 orang utusan menghadap Pangeran Hidayatullah untuk meminta izin menyerang tambang batu bara Oranje Nassau di Pengaron. Kali ini Pangeran Hidayatullah telah mengizinkan apapun yang akan terjadi.

Pihak Belanda telah mendapat informasi bahwa gerakan rakyat akan menyerang tempat-tempat strategis, karena itu Belanda menyiapkan dan memperkuat pos-pos pertahanannya dan minta bantuan dari Jawa.

2. Pemberontakan Banua Lima

Banua Lima merupakan sebuah propinsi dari Kerajaan Banjar yang meliputi daerah Amuntai, Alabio, Sungai Banar, Kelua dan Negara yang diperintah oleh seorang yang berpangkat Adipati saat itu dijabat Kiai Adipati Danuraja. Ayah Danuraja adalah seorang kelahiran dan penduduk asli Amuntai, bernama Karim. Karena jasa-jasanya pada kerajaan Karim diberi jabatan sebagai Pembakal dan dikenal sebagai Pembakal Karim. Kemudian Pembakal Karim kawin dengan salah seorang saudara perempuan Nyai Komala Sari, permaisuri Sultan Adam. Nyai Ratu Komala Sari juga penduduk asli Amuntai dan dari kalangan rakyat biasa, karena itulah setelah menjadi permaisuri diberi gelar Nyai di muka namanya.

Kedudukan Pembakal Karim menjadi lebih terhormat setelah menjadi ipar Sultan dan sebagai ipar Sultan, pembakal Karim diberi gelar Kiai Ngabehi Jaya Negara. Puteranya yang bernama Jenal hasil perkawinan Kiai Ngabehi Jaya Negara dengan ipar Sultan kemudian diberi gelar Kiai Tumenggung. Kemudian oleh Sultan kepada Kiai Tumenggung diberi jabatan Adipati untuk daerah Banua Lima yang kemudian bergelar Kiai Adipati Danuraja. Kiai Adipati Danuraja dan Kiai Ngabehi Jaya Negara-lah orang yang paling berkuasa dan memerintah di Banua Lima. Dalam menjalankan pemerintahan kedua orang anak beranak ini berbuat sewenang-wenang dan melampaui kewenangannya seperti menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang yang bersalah yang semestinya adalah kewenangan Sultan. Tindakan lain yang menyakitkan hati rakyat Banua Lima adalah perbuatannya mengorganisir perampokan di daerah kebun lada penduduk dan mengorganisir penjualan budak ke kerajaan Pasir dan perampokan di sungai oleh keluarganya. Tindakan sewenang-wenang inilah yang menyebabkan pemerintahan tidak disenangi rakyat Banua Lima, tetapi rakyat tidak berani melawan karena mereka keluarga Sultan. Yang berani melawan adalah iparnya sendiri yang bernama Jalil.

Dalam bulan Agustus 1854 Jalil melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh Kiai Adipati Danuraja kepada Sultan tetapi laporannya tidak mendapat perhatian dari pihak kerajaan. Kebencian Jalil kepada Kiai Adipati Danuraja bukan saja karena Kiai Adipati ini melakukan tindakan yang sewenang-wenang, tetapi juga karena ayah Jalil dihukum mati oleh Kiai Adipati Danuraja. Pangeran Hidayat juga bermusuhan dengan Kiai Adipati Danuraja karena Pangeran Hidayatullah menuduh Kiai Adipati Danurajalah sebagai penyebab kematian ayahnya Sultan Muda Abdurrahman. Dalam usaha Mangkubumi Pangeran Hidayatullah untuk melemahkan kekuasaan Sultan Tamjidillah di Banua Lima, maka kekuasaan Kiai Adipati Danuraja harus dikeluarkan dari percaturan politik di Banua Lima.

Jalil yang pada mulanya diberi gelar oleh Sultan Tamjidillah Tumenggung Macan Negara akhirnya berpihak pada Mangkubumi Pangeran Hidayatullah untuk menyingkirkan Kiai Adipati Danuraja. Jalil bertindak sebagai pelaksana dari kekuasaan Mangkubumi di Banua Lima dan menyusun kekuatan sebagai usaha menyingkirkan Kiai Adipati Danuraja.

Dalam bulan September 1858 Kiai Adipati Danuraja melakukan penarikan pajak atau uang kepala kepada penduduk Batang Balangan. Dengan dipimpin oleh Jalil yang bergelar Tumenggung Macan Negara, rakyat menolak membayar uang kepala tersebut. Kiai Adipati melaporkannya kepada Sultan dan Sultan memerintahkan agar Jalil menghadap Sultan di Banjarmasin. Jalil tidak datang meskipun dua kali dipanggil Sultan. Wakil Kiai Adipati adalah Tumenggung Ngebehi Jaya Negara mengancam akan mengambil tindakan kekerasan kalau Jalil tetap menolak. Ancaman itu pun gagal.

Salah seorang penduduk Banua Lima yang bernama Kuncir melaporkan kepada Sultan untuk menyanggupkan diri untuk melakukan tindakan membantu kerajaan menangkap Jalil. Kuncir beserta enam orang kawannya berangkat ke Batang Balangan untuk menangkap Jalil. Kiai Adipati berangkat dengan 2000 orang pasukannya untuk menghukum perbuatan Jalil yang melawan dan memberontak pada Kerajaan. Tindakan Kiai Adipati ini dicegah oleh Residen di Banjarmasin karena menyalahi Perjanjian tahun 1828. Dalam Perjanjian itu disebutkan bahwa pemberontakan dalam negeri adalah kewenangan Belanda untuk menumpasnya. Perintah residen untuk menghentikan ekspedisi menumpas Jalil ini diterima saat dia akan menyerang Batang Balangan. Kiai Adipati tunduk pada perintah Residen dengan penuh kejengkelan dan dia kembali ke Banjarmasin.

Dalam masalah ini terlihat bahwa rakyat berpihak pada Jalil Tumenggung Macan Negara. Seluruh rakyat mengakui Mangkubumi Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Surya Mataram sebagai pelindung mereka dan sebagai pelindung hukum dan agama. Pengakuan ini diumumkan oleh Penghulu Amuntai Abdul Gani, di muka masjid Amuntai.

Situasi politik di Banua Lima sangat mengkhawatirkan apalagi setelah Kiai Adipati Danuraja pergi ke Banjarmasin. Terjadi kekosongan pemerintahan, tetapi situasi tetap tenang karena Jalil

Tumenggung Macan Negara dengan pasukannya bertindak memelihara keamanan sebagai pelaksana Mangkubumi Pangeran Hidayatullah. Melihat situasi yang buruk ini. Mangkubumi Pangeran Hidayatullah melaksanakan perintah Sultan dan pergi ke Amuntai. Sesampainya di Amuntai Mangkubumi bermalam di rumah Jalil dan menerima pengaduan rakyat khususnya tindakan dan perbuatan Kiai Adipati Danuraja.

Kebencian rakyat terhadap Kiai Adipati yang pro Sultan mempermudah Mangkubumi untuk memperkuat pengaruh dan memperoleh pengikut. Tindakan yang dilakukan Mangkubumi sesuai dengan perintah Sultan untuk mengamankan situasi yang buruk ialah dengan memberi kepercayaan kepada Jalil Tumenggung Macan Negara dengan gelar dan pangkat Kiai Adipati Anom Dinding Raja, diberi atribut Mantri berupa sebuah pedang dan tombak "balilit". Selanjutnya diperkuat dengan surat perintah agar ia bertindak atas nama Mangkubumi serta diberi sebuah cap Mangkubumi. Setelah selesai melantik Kiai Adipati yang baru, Mangkubumi kembali ke Martapura serta melaporkannya kepada Sultan.

Situasi yang sudah berjalan aman tenteram dan tertib menjadi terganggu karena sikap dan keputusan Sultan yang bertentangan dengan keinginan dan aspirasi rakyat. Pada tanggal 28 Oktober 1858 Sultan mengangkat saudaranya Pangeran Aria Kesuma sebagai Kepala Banua Lima yang baru untuk menjalankan kekuasaan eksekutif dibawah Mangkubumi. Pengangkatan ini tidak sepengetahuan Mangkubumi, dan sikap ini dilakukan Sultan agar adiknya dapat mengawasi tindak tanduk Mangkubumi. Untuk mendiskreditkan peranan dan kekuasaan Jalil Kiai Adipati Anom Dinding Raja, pada tanggal 26 Januari 1859 Sultan mengangkat Danuraja sebagai Kepala Sungai Banar, dan anaknya Tumenggung Jaya Negara sebagai Kepala Sungai Tabalong Kanan dan Kiri. Semua pengangkatan ini tidak setahu dan seizin Mangkubumi. Pengangkatan ini bertentangan dengan ketentuan hak eksekutif Mangkubumi serta bertentangan dengan aspirasi rakyat yang menginginkan hilangnya pengaruh Danuraja dan di Banua Lima. Akibatnya Kiai Adipati yang baru, diangkat Sultan serta Danuraja tidak dapat menjalankan tugasnya dan tidak berani menduduki posnya yang baru, maka untuk daerah Banua Lima tidak terdapat penguasa eksekutif yang definitif sebab Kiai Adipati Anom Dinding Raja (Jalil) hanya pejabat yang mendapat restu Mangkubumi dan menjalankan kekuasaan atas nama Mangkubumi pula.

Pada pertengahan bulan Maret 1859, penduduk daerah Para sampai Belimbing, Balangan dan Tabalong mengakui kekuasaan Jalil Kiai Adipati Anom Dinding Raja yang bertindak atas nama Mangkubumi. Situasi ini menunjukkan bahwa pengaruh Mangkubumi Pangeran Hidayat sangat besar, sedangkan pengaruh Sultan Tamjidillah tidak ada sama sekali. Sultan kehilangan kewibawaannya dan hal ini berarti suatu sikap rakyat menentang atau anti Sultan yang diangkat Belanda. Suasana ini akan segera berubah menjadi sikap anti Belanda, tetapi Belanda tidak menginsafinya.

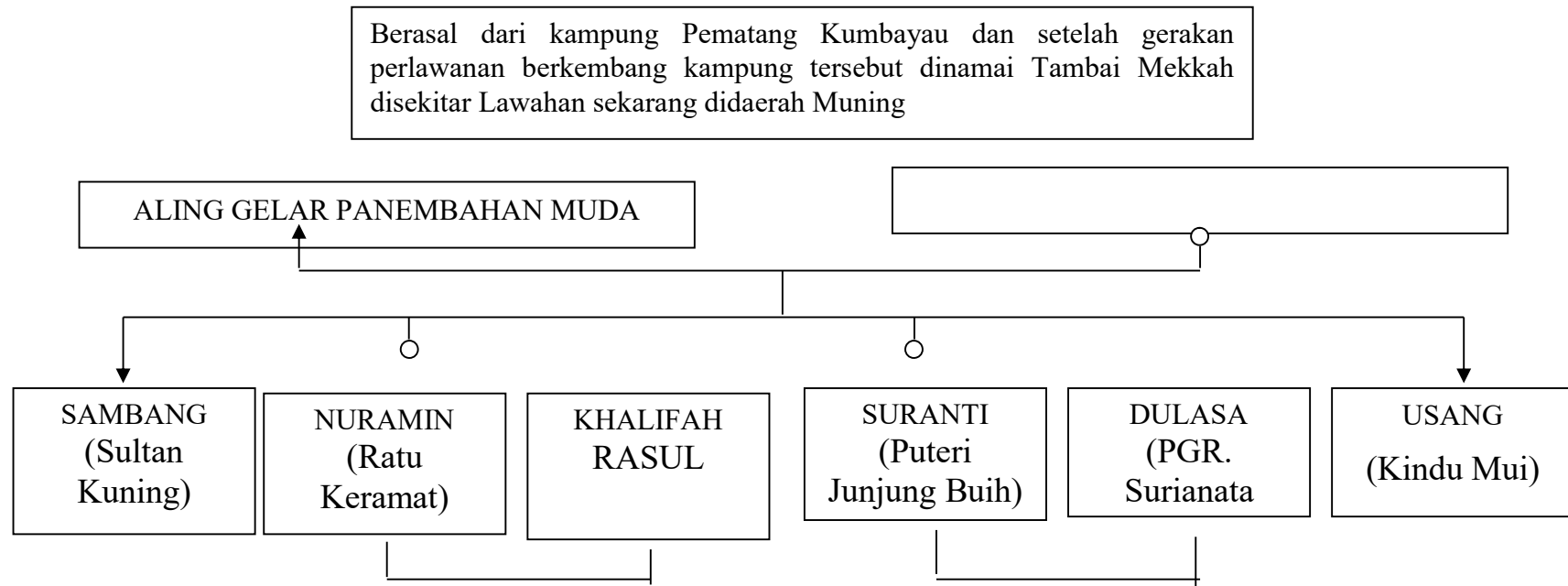
Ketika kapal perang Arjuna pada tanggal 3 Februari 1859 dari Batavia tiba di Banjarmasin dengan membawa pasukan tambahan, residen berpendapat bahwa tambahan kekuatan ini belum diperlukan sebab tidak ada gejala yang menunjukkan keresahan rakyat apalagi sikap pemberontakan.

Seorang kaki tangan Sultan dari daerah Muning, yaitu Kiai Gangga Suta memberi informasi kepada Sultan bahwa perkembangan politik lebih hangat dan situasi lebih buruk pada bulan Februari 1859. Dari dua orang cucunya Kiai Gangga Suta memperoleh informasi bahwa Ratu Komala Sari dan anak-anaknya telah menyerahkan kekuasaan kepada pewarisnya Mangkubumi Pangeran Hidayat, sesuai dengan Surat wasiat Sultan Adam Al Wasik Billah. Setelah penyerahan seluruh Kerajaan itu, Mangkubumi Pangeran Hidayatullah mengadakan rapat-rapat kerajaan yang dihadiri oleh pejabat-pejabat kerajaan antara lain Pengeran Suria Mataram dan Pangeran Wiria Kesuma. Rapat ini bersifat rahasia. Rapat rahasia itu menghasilkan keputusan untuk menentukan sikap bersama untuk menghadapi kedatangan kapal perang Arjuna. Untuk menambah kekuatan dalam menghadapi situasi yang memburuk itu Mangkubumi Pangeran Hidayatullah menugaskan kepada Pangeran Suria

Mataram untuk membantu Jalil dan mempersenjatainya dan mengirimkan sejumlah senapan dan meriam ke Amuntai.

Untuk membuktikan situasi ini Sultan pergi ke Martapura ibukota Kerajaan. Sultan memperhatikan sikap rakyat terhadap Sultan, bahwa kedatangan Sultan tidak mendapat sambutan sebagaimana layaknya dan tidak ada ucapan salam untuk Sultan. Pasukan perahu penyambut Sultan pun tidak tampak. Begitulah situasi politik yang makin panas mulai pertengahan bulan Februari 1859.

KELUARGA PANEMBAHAN ALING
(DATU ALING)



- Catatan : 1. Saranti (Puteri Junjung Buih) dikawinkan dengan Gusti Muhammad Said (in absensia) anak Pangeran Antasari setelah cerai dengan Dulasa.
2. Kumbayau dinamai *Tambai Mekkah* atau *Serambi Mekkah*.

3. Pangeran Antasari dan Kerajaan Muning

Pangeran Antasari adalah seorang putera hasil perkawinan antara Pangeran Masohut dengan Gusti Hadijah puteri Sultan Suleman. Kakeknya adalah Pangeran Amir yang dibuang ke Srilangka akibat dari pertentangan antara Pangeran Amir yang ingin mengambil hak atas tahta yang sah dengan pihak Sultan Nata Alam. Dengan bantuan Belanda, Pangeran Amir dikalahkan dan mengalami nasib dalam pembuangan ke Srilangka (1787).

Kematian Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah yang bergelar Ratu Anom (1759-1761) pada saat Pangeran Amir salah seorang puteranya masih belum dewasa. Pangeran Amir berserta saudara-saudaranya Pangeran Abdullah dan Pangeran Rahmat ditinggalkan orang tuanya dalam status belum dewasa. Sesuai dengan tata aturan kerajaan saat itu pemerintahan dipegang oleh Wali Sultan oleh pamannya Pangeran Nata Alam. Ambisi untuk merebut kekuasaan dari keturunan yang sah menyebabkan ketiga bersaudara putera-putera Sultan Muhammad Aliuddin tersingkir. Untuk merukunkan kedua pihak keluarga ini dilakukan oleh Sultan Suleman dengan cara mengawinkan puterinya dengan Pangeran Masohut anak dari Pangeran Amir. Pangeran Masohut juga dijadikan anggota dari Dewan Mahkota yang berfungsi sebagai Dewan Penasihat terhadap Sultan. Disamping itu juga Pangeran Masohut diikut sertakan dalam berbagai kegiatan politik seperti ikut menanda tangani beberapa perjanjian politik dengan pihak Belanda. Selanjutnya Sultan Suleman mengawinkan cucunya Sultan Muda Abdurrahman dengan Ratu Antasari adik dari Pangeran Antasari. Sultan Muda Abdurrahman adalah putera mahkota, calon sultan kalau nanti Sultan Adam meninggal. Seandainya Ratu Antasari ini panjang umurnya, maka generasi yang sah dari keturunan Sultan Kuning atau Sultan Hamidullah akan berlanjut kembali, tetapi kenyataannya berbeda karena Ratu Antasari lebih dahulu meninggal sebelum memberi keturunan.

Pangeran Antasari tinggal di kampung Antasan Senior Martapura. Dia adalah seorang sederhana yang tidak terpandang sebagai layaknya seorang bangsawan. Sebagai bangsawan yang tidak dikenal dia hanya memiliki tanah lungguh (*apanage*) di daerah Mangkauk sampai daerah Wilah dekat Rantau yang berpenghasilan hanya f.400 setahun. Penghasilan ini tidak mencukupi keluarganya sebagaimana seorang bangsawan saat itu. Ia dianggap sebagai orang yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa tanpa penonjolan sifat-sifat yang menunjukkan ia seorang pemimpin, hidup terlupakan ditengah-tengah rakyat biasa dan saat itu telah berumur sekitar 50 tahun. Tetapi pada saat yang paling menentukan, saat situasi sewenang-wenang, campur tangan Belanda yang menodai tradisi, serta masuknya budaya barat yang merusak norma-norma agama Islam, ternyata Pangeran Antasari adalah seorang tokoh yang paling diharapkan. Dia ternyata seorang ahli siasat dan strategi, kecerdasan otak yang tinggi dan memiliki keberanian yang tinggi dan memiliki keberanian yang mengagumkan. Gerakan Muning yang muncul kemudian erat sekali dengan kepemimpinannya dan Pangeran Antasari pula yang memberi semangat

patriotisme untuk mengusir penjajah Belanda yang mencampuri urusan dalam Kerajaan Banjar.

Gerakan Muning muncul di daerah Banua Ampat di kampung Kumbayau dekat Lawahan sekarang. Daerah Muning terdapat sepanjang Sungai Muning dan induk sungainya bermuara di Sungai Negara atau Sungai Bahan. Sungai Tapin yang ada sekarang saat itu belum dikenal. Selain Banua Lima, maka daerah Banua Ampat ini merupakan gudang padi Kerajaan Banjar. Daerah ini, merupakan daerah rawa daerah aliran pasang surut. Rakyatnya hidup dari hasil sawah disamping mencari ikan air tawar. Daerah Muning pada mulanya adalah tanah *lungguh apanase* yang dimiliki Pangeran Prabu Anom putera Sultan Adam tetapi setelah Pangeran ini dibuang ke Jawa, daerah Muning dirampas oleh Sultan Tamjidillah.

Di daerah yang berawa-rawa inilah terletak kampung Kumbayau yang saat itu hanya terdiri kurang lebih 23 buah rumah. Disalah sebuah rumah tersebut tinggalah seorang tua yang bernama Aling. Pada masa mudanya Aling merupakan perampok sungai yang paling ditakuti. Namun sekarang dia telah tobat, menjalankan amal kebaikan dan menjadi seorang yang saleh dan taat pada ajaran agama Islam. Akhirnya dia dikenal karena kesalehannya.

Ketika Belanda melantik Pangeran Tamjidillah menjadi Sultan kerajaan, Pangeran Antasari meminta kepada Aling yang saleh itu untuk melakukan tapa dan mohon kepada Allah SWT agar diberi petunjuk apa yang akan terjadi dan bagaimana harus berbuat menghadapi Kerajaan yang tidak menentu itu. Sejak itu Aling melakukan tapa dengan berpuasa, berzikir, dan shalat terus menerus agar diberi petunjuk oleh Allah Yang Maha Kuasa, selama 9 bulan, 9 hari. Khalwat atau tapa ini dimulai sejak akhir bulan April 1858 dan berakhir pada awal Februari 1859. Aling dalam melakukan shalat dan zikir tersebut dengan menggunakan 5 buah mata uang yang sama besarnya dan nilainya dan dipindah-pindahkannya antara kedua tangannya berganti-ganti. Pada 10 Rajab 1275 Hijriah atau 2 Februari 1859 Aling menerima petunjuk dengan mendengar suara yang tidak diketahui dari mana datangnya. Ceritera tentang Aling diinformasikan oleh anaknya Sambang kepada Residen J.J. Meijer yang waktu itu menjadi Residen di Banjarmasin.

Suara itu berbunyi dalam bahasa Banjar sebagai berikut :

"Ikam nang baamal dengan kesukaan aku, akan parmintaan ikam mandapat nagri dan pagustianikam batatap, kardjaakan, barbunyian, mau raja-raja gaib manolong ikam, sakira-kira jadi selamat nagri dan rajapun tatap. Tatapi Pangeran Antasari ikam aturi ka Muning".¹⁴⁰

Dalam bahasa Indonesia berarti :

"Engkau yang melakukan amalan zikir, Shalat serta puasa dengan kesukaan atau izinku, akan segala permintaan engkau untuk mendapat negeri dan raja-raja yang bertahta, bunyikanlah bunyi-bunyian. Anakmu yang bisa menari

gandut, suruh menarik gandut dilaksanakan, maka raja-raja gaib akan menolong kamu, sehingga menjadi selamatlah negeri, dan rajapun akan duduk di atas tahta. Tetapi Pangeran Antasari kamu mohon datang ke Muning".¹⁴¹

Perintah dari suara halus itupun segera dilaksanakan. Bunyi-bunyian dengan tarian gandut dilaksanakan pula. Pada tanggal 13 Rajab 1275 atau 17 Pebruari 1859, anak Aling yang perempuan bernama Saranti kesurupan. Dalam keadaan kesurupan itu Saranti mengaku sebagai Puteri Junjung Buih, yaitu Ratu Mitos dalam periode Negara Dipa. Dia mengeluarkan suara :

"Apakah ayahnya ingin anaknya selamat atau mati. Kalau ayahnya ingin supaya anaknya selamat, kawinkanlah dia dengan Dulasa, sebab dia akan dijadikan Ratu Junjung Buih dan suaminya akan menjadi Pangeran Suryanata".

Puteri Junjung Buih dan Pangeran Suryanata adalah pasangan Raja dan Ratu pada periode Negara Dipa, cikal bakal dari raja-raja Banjar. Perintah ini segera dilaksanakan. Saranti dikawinkan dengan Dulasa dan dijadikanlah sebagai Puteri Junjung Buih dan suaminya menjadi Pangeran Suryanata. Maka terbentuklah "*Kerajaan Muning*". Selanjutnya Ratu mengorganisir pemerintahan "*Kerajaan Muning*". Ayahnya Aling diangkat dengan Gelar Panambahan Muda, kakaknya yang paling tua yang bernama Sambang mendapat gelar Sultan Kuning. Sultan Kuning adalah gelar dari Sultan Hamidullah. Raja Banjar abad ke- 17 dan periode Sultan ini dikenal sebagai masa yang paling aman, dan kemakmuran meningkat, disamping itu Sultan Kuning adalah nenek moyang garis keturunan yang sah dalam tradisi raja-raja Banjar, dan Muning dari Pangeran Antasari. Saudara perempuan Saranti yang tertua bernama Nuriman diberi gelar Ratu Keramat sedangkan suami Nuriman diberi gelar Khalifah Rasul. Anak laki-laki Aling yang kedua bernama Usang diberi gelar Kindu Mui, yaitu nama salah seorang Mantri yang terkenal dalam pemerintahan Ratu Anum dalam Keraton Negara Daha. Saudara sepupunya yang laki-laki diberi gelar Pangeran Mangkubumi Kesuma Wijaya, sedangkan sepupunya yang perempuan diberi gelar Siti Fatimah. Ratu Puteri Junjung Buih juga mengangkat empat orang Mantri baru dengan gelar-gelar yang dikenal pada masa Keraton Negara Daha, Pangaruntun Manau, Pangaruntun Waluh, Panimba Sagara dan Pambalah Batung. Selain itu ada lagi Mantri yang bergelar : Mindu Aji, Kindu Sara dan Bayan Sampit. Sebagai Panglima ditunjuk Panglima Sijuntai Langit dan wakilnya Siti Fatimah. Kemudian desa Kumbayau diganti menjadi *Tambai Mekkah* atau *Serambi Mekkah*.

¹⁴⁰ J.J. Meijer, *Voor Beratib Jaren te Bandjermasin, Iets Over Panembahan Moeda, Sultan Kuning en Goesti Kasran, Figuren Uit Den Bandjermasinschen Opstand 1859*, I.G. Tijrib I, 1899, hal. 66-67.

¹⁴¹ M. Idwar Saleh, *Pangeran Antasari dan Gerakan Muning*, dalam *Kalimantan Scientiae*, No. 17 Th. VII, Januari 1988, hal. 29.

Setelah aparat kerajaan terbentuk dan semua Mantri sudah lengkap dari "*Kerajaan Muning*", maka Panambahan Datu Aling mengibarkan dua buah bendera kuning dan memakai sebuah payung kuning kebesaran. Panambahan Muda Datu Aling dikenal sebagai orang yang seringkali dimasuki *muakal* dan pengikutnya menyebutnya sebagai "*Raja Keramat*". Datu Aling telah dikirim Tuhan untuk menyelamatkan Kerajaan Banjar dari ketidakadilan dan kemungkaran, dan akan menyerahkan tahta kerajaan Banjar kepada yang berhak. Tugas ini harus dilaksanakan dalam waktu tiga bulan. Setelah tugas itu selesai maka semua unsur pejabat kerajaan yang telah dibentuk tidak berfungsi lagi dan mereka kembali menjadi orang Kumbayau seperti semula. Dalam proses penyerahan tahta ini menurut Datu Aling, Orang Belanda tidak perlu dibunuh sebab mereka nantinya akan keluar dari Kerajaan Banjar dengan sendirinya.

Keluarga "*kerajaan*" ini memang memperlihatkan kesaktiannya, sehingga dengan cepat dikenal oleh seluruh desa dan bahkan desa-desa yang jauh pun ikut mengatur sembah ke Kumbayau. Ratu Keramat mengancam kepada mereka yang tidak mau tunduk kepada perintah "*Kerajaan*" akan ditimpa penyakit kuning dan marabahaya, terutama penyakit kena wisa. Tuhan telah memberi kekuatan pada Datu Aling, sehingga dapat menguasai hidup dan mati orang, dan bagi mereka yang menjadi pengikutnya akan menjadi kebal tubuhnya. Begitu pula Tuhan memberikan tenaga gaib kepada Puteri Junjung Buih yang dapat menghidupkan kembali orang yang mati dengan menyentuh jakunnya. Orang yang telah dihidupkan kembali ini adalah Muna, Andin, Lanting, dan Belakup.

Untuk melengkapi sarana ibadah, Datu Aling yang juga bergelar Raja Keramat memerintahkan mencari sebidang tanah untuk mendirikan sebuah masjid. Tanah yang telah dipilih untuk dijadikan lokasi masjid itu adalah sangat suci dan dapat dijadikan untuk keperluan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, umpama dijadikan jimat. Pembukaan masjid akan dilakukan pada tanggal 1 Ramadhan atau 04 April 1859 dan akan diresmikan oleh Raja Keramat sendiri.

Berita tentang Kerajaan Muning ini tersebar luas dalam waktu yang singkat dan hampir semua desa dalam daerah Banua Ampat bahkan Di luar Banua Ampat juga mengakui kekuasaan Kerajaan Muning, antara lain : Banua Gadung, Banua Atas, Rantau, Banua Padang, Batang Hulu, Kandangan, Jambu, Amandit, Bamban dan Pangambau. Daerah-daerah ini memberi upeti kepada Kerajaan Muning dan mengatur sembah kepada Raja Keramat. Raja Keramat melarang kepada semua rakyat membayar pajak kepada Sultan Tamjid.

Dalam tahun 1858 hasil padi dari pertanian rakyat sangat baik, sehingga rakyat merasa kehidupannya tenteram tidak terganggu dengan masalah makan. Saat itu harga beras juga murah hanya f.4 untuk 100 gantang dan satu gantang garam bisa ditukar dengan lima gantang beras. Dengan demikian tentang masalah kehidupan rakyat tidak terganggu khususnya di daerah Muning dan sekitarnya, akan tetapi rasa tidak puas terhadap pemerintahan Sultan Tamjid semakin meningkat dan dalam diri rakyat timbul gejala untuk memberontak.

Situasi seperti ini diketahui oleh Residen dan Residen pada 2 April 1859 mengutus jaksa kepala Pangeran Suryawinata dan Penghulu Kepala Pangeran Muhammad Seman pergi ke Muning untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Utusan ini diikuti oleh 120 orang pengikut dan beberapa diantaranya orang Haji.

Sultan Kuning menunggu tamunya 700 orang pengikut sebagian besar dengan senjata terhunus. Kedua Pangeran utusan Residen Belanda itu harus merelakan kedua pengawalnya yang membawa tombak untuk menyembah kepada Sultan Kuning. Kemudian terjadi dialog antara Sultan Kuning dengan Pangeran Suryawinata, Sultan Kuning berkata : *"Apakah kalian orang Eropah (Orang kafir) dan apa tujuan kesini, tujuan baik atau tujuan jahat?"* Kedua utusan Residen itu menjawab bahwa mereka Orang Islam dan tujuan kesini untuk menemui Panambahan Muda Datu Aling. Sultan Kuning mengantarkan utusan ke tempat tinggal Panambahan Muda Datu Aling. di tengah perjalanan terjadilah insiden kecil. Wakil Panglima pasukan Kerajaan Muning Siti Fatimah mencoba merampas senapan pengawal utusan, terjadilah pergumulan perebutan senjata itu. Pangeran Suryawinata sudah mencabut keris, untung akhirnya dapat diselesaikan secara damai.

Pengikut Panambahan Datu Aling makin bertambah besar dan bertambah kuat karena semua rakyat datang mengatur sembah kepadanya. Dulasa yang bergelar Pangeran Suryanata setiap hari menerima sembah dari seluruh rakyat yang datang. Dulasa suami Saranti atau suami Puteri Junjung Buih, merasa dirinya tidak pantas mendapat penghormatan tinggi dari semua orang, dia adalah orang desa yang terbiasa sebagai orang kecil. Perasaan ini pada suatu hari mencapai puncaknya dan akhirnya dia lari dari lingkungan yang penuh penghormatan lari ke daerah tambang batu bara Oranje Nassau di Pengaron.

Kalau kita memperhatikan unsur-unsur yang mendominasi gerakan Muning ini maka jelas bahwa Gerakan Muning ini termasuk Gerakan Nativistis. Unsur-unsur nativisme ini dapat diketahui dari hal-hal berikut :

- a. Gerakan ini berusaha untuk memperbaiki adat lama kerajaan dan segala kebiasaan sebagai kebudayaan kerajaan asal Banjar.
- b. Menghapuskan segala dominasi Barat yang masuk, baik politis, ekonomis, dan kultural.
- c. Pemerintahan harus dipegang oleh dinasti lama, dan diberikan kepada keturunan yang berhak.
- d. Pemerintahan yang sekarang dipandang sebagai pemerintah dominasi Belanda.

Gerakan ini sangat diwarnai oleh unsur-unsur magis, pemujaan nenek moyang, kultus kekebalan dan sebagainya. Gerakan ini juga bersifat *messianistis*, karena Datu Aling sebagai orang yang diutus Tuhan bertugas untuk memperbaiki ketidakadilan. Akan tetapi Datu Aling bukanlah *messias* yang ditunggu atau sebagai Ratu Adil yang dinanti-nantikan. Keinginan seperti suasana dinasti lama rupanya berhubungan langsung dengan harapan, keadilan, keamanan, dan kemakmuran seperti terdapat dalam periode Sultan Kuning dalam abad ke- 17.

Unsur-unsur agama Islam juga mendominasi dalam Fahaman yang timbul dari gerakan ini, seperti pergantian nama Kumbayau dengan *Tambai Mekkah* atau *Serambi Mekkah*. Nama *Serambi Mekkah* mengandung anggapan bahwa desa ini adalah desa yang suci. Pimpinan gerakan ini adalah Datu Aling yang dikenal sebagai orang saleh, melakukan ibadah Shalat, puasa, dan berzikir dan memimpin kegiatan di masjid yang dibangunnya. Ajaran Islam yang mempengaruhinya adalah ajaran bahwa perang menghadapi Orang Belanda adalah perang melawan Orang kafir dan mati dalam perang itu adalah mati syahid. Mati syahid adalah sorga balasannya dan perangnya adalah perang sabil. Jadi Gerakan Muning ini ada dua faktor yang mempengaruhinya yaitu :

- a. Faktor Mitos yang bersifat historis-legendaris dan
- b. Faktor agama Islam yang keduanya saling mengisi.

Suatu petunjuk dari suara gaib memberitahu kepada Datu Aling bahwa Datu Aling harus memohon kepada Pangeran Antasari untuk datang ke Muning. Berita ini disampaikan Lurah Kitting kepada Pangeran Antasari pada sekitar bulan Maret 1859, meskipun tidak jelas apakah Lurah Kitting utusan dari Datu Aling.

Situasi yang menghangat ini akhirnya Residen memerintahkan kepada Sultan dan Mangkubumi Nata Pangeran Hidayat untuk memeriksa soal Muning. Mangkubumi Nata Pangeran Hidayat mengutus Pangeran Antasari, Pangeran Jantera Kusuma, Pangeran Syarif Umar beserta 10 orang pengikutnya ke Muning. Ketika rombongan sampai di Tambai Mekkah terjadilah pembicaraan empat mata antara Pangeran Antasari dengan Panambahan Muda Datu Aling. Dalam pembicaraan itu Pangeran Antasari akan mengawinkan anaknya Gusti Muhammad Said dengan Saranti putri Datu Aling, inkarnasi Putri Junjung Buih dengan mahar 4 ringgit.

Perkawinan itu terjadi tanpa kehadiran Gusti Muhammad Said. Dengan terjadinya perkawinan ini, resmilah Datuk Aling dan keluarganya masuk keluarga raja-raja Banjar dan tak seorangpun petugas Sultan berani untuk menangkapnya. Pengaruh dari hak legitimasi kerajaan ini sangat besar dan sangat ditakuti oleh rakyat biasa. Dengan Muning sebagai pusat kegiatan dan pengumpulan kekuatan, Pangeran Antasari bekerjasama dengan Tumenggung Jalil Kiai Adipati Anom Dinding Raja yang merupakan wakil Mangkubumi Pangeran Hidayat di Banua Lima pengaruhnya sangat luas. Penduduk Tanah Laut dan Tumenggung Surapati dari Dusun Atas, serta kepala-kepala dusun yang berpengaruh memperkuat kesatuan dan persiapan untuk suatu perang besar.

Anak buah Pangeran Antasari dan Tumenggung Jalil mengusir semua pegawai Sultan yang menduduki posisi tempat penerimaan pajak dan cukai di Martapura, serta menahan pengiriman beras dan makanan lainnya ke Banjarmasin, Pangeran Antasari kemudian memaklumkan kepada semua rakyat bahwa pajak dipungut atas nama Mangkubumi Nata Pangeran Hidayat. Pangeran Hidayat memerintah atas wasiat Sultan Adam dan sebagai Kepala Agama.

Ketika Pangeran Antasari dan Panambahan Muda Datu Aling bertemu kembali di Tambarangan 30 hari kemudian, Pangeran Antasari berkeyakinan bahwa tanpa perkawinan politikpun sebetulnya rencana perang besar sudah matang dan

akan segera meletus. Pangeran Antasari telah menjadikan Gerakan Muning yang mulanya sebagai gerakan lokal di Banua Ampat menjadi sebuah gerakan regional di daerah kekuasaan Sultan dan daerah yang dikuasai Belanda.

Gerakan Muning ternyata dapat mengobarkan nyala pemberontakan di seluruh daerah Kerajaan dengan Pangeran Antasari sebagai pimpinan tertinggi dari semua kegiatan menghadapi Belanda yang mendukung pemerintahan Sultan.

Pada tanggal 6 April 1859 Mangkubumi mendapat surat dari Sultan dengan cap dan tandatangan Sultan Tamjid. Surat itu bersifat perintah kepada Kiai Bagus dan Kiai Kartawinata agar pengikutnya lebih banyak membuat kekacauan di Muning seperti yang ia lakukan beserta Kiai Dipati melakukan sebelumnya. Segala kekacauan yang timbul sebagai rekayasa Sultan itu, seakan-akan Mangkubumi sebagai penyebabnya. Dalam bulan Maret 1859 sebetulnya Sultan sudah panik dengan siasatnya. Atas nasihat Residen Sultan disarankan untuk menempati istananya di Keraton Bumi Selamat di Martapura, agar dia berada di tengah-tengah rakyatnya dan mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sebelum berangkat ke Martapura Sultan meminta kepada Residen bantuan persenjataan sesuai dengan perjanjian tahun 1826 berupa : 2 pucuk meriam, peluru selengkapya, 40 senapan, 4 tong mesiu serta sebuah kapal jaga di muka keraton di Martapura. Semua permintaan itu ditolak Residen, karena dianggap belum perlu, dan juga tidak dengan cara demonstratif memusuhi rakyatnya sendiri. Selama sepuluh hari di Martapura, Sultan kelihatan bertambah panik. Di muka istana diperkuatnya dengan 500 pasukan bersenjata dan dipasangnya sebuah meriam. Untuk menenangkan pikirannya dia menghabiskan beberapa peti cognac sehingga raja peminum itu makin dibenci rakyatnya yang taat pada ajaran agama Islam. Selama di Martapura Sultan memanggil Pangeran Antasari dan mempertanggungjawabkan missinya ke Muning, dengan ancaman hukuman berat kalau tidak diindahkan. Perintah itu tidak dihiraukan Pangeran Antasari. Selanjutnya Sultan memerintahkan agar Mangkubumi berangkat ke Muning dan menentramkan keadaan.

Pada tanggal 4 April 1859 Mangkubumi berangkat ke Banjarmasin dan melaporkan pada Residen bahwa tugas ke Muning tidak dapat dilaksanakan, berhubung bulan puasa. Dalam bulan suci Ramadhan ini orang hanya mengkhususkan beribadah menjalankan puasa dan menghindarkan diri dari pekerjaan dunia yang tidak berguna. Akibatnya usaha untuk mengamankan Banua Lima dan Banua Ampat gagal. Sementara itu di Banua Lima dan Banua Ampat terjadi pengumpulan kekuatan dan kebencian terhadap Belanda sudah mencapai puncaknya.

Sementara Mangkubumi di Banjarmasin, pada tanggal 4 April 1859 itu, adik Sultan Pangeran Adipati Aria Kasuma datang membawa surat Sultan memohon bantuan dengan dasar Pasal 13 Kontrak 1826. Ini adalah permintaan yang kedua kalinya. Permintaan yang kedua ini diajukan Sultan dengan dasar laporan dari Kiai Gangga Suta tentang rencana penyerbuan terhadap tambang batu bara Oranje Nassau oleh Pangeran Antasari dengan kekuatan 3.000 orang prajurit. Bila Pengaron jatuh serbuan diarahkan ke Martapura. Permintaan inipun tidak disetujui Residen.

Residen hanya memberi nasihat pada Sultan agar kembali ke Banjarmasin, sebab di Martapura bagi Sultan tidak aman, Permintaan bantuan ini tetap tidak dikabulkan Belanda, hanya Residen meminta nasihat pada Mangkubumi bagaimana mengatasi keadaan yang gawat ini.

Pada tanggal 6 April 1859 Mangkubumi memberi jawaban pada Residen tentang usaha yang harus ditempuh untuk mengatasi keadaan yaitu, jika :

- a. Mangkubumi diperintah dari Residen untuk menyelidiki kekacauan,
- b. Mangkubumi dapat memberi jaminan kepada rakyat Martapura dan seluruh kerajaan, bahwa segala keluhan dan keberatan-keberatan mereka akan didengarkan serta keinginan-keinginan mereka dipertimbangkan dengan adil dan bijaksana.
- c. Dari Sultan ia mendapat pernyataan yang tuntas bahwa hanya Mangkubumi semata yang bertanggung jawab atas kekuasaan eksekutif, diperkuat dengan persetujuan dan tanda tangan Residen.¹⁴²

Situasi dalam bulan April 1859 merupakan kondisi politik yang makin memanas, gambaran suasana perang sudah diambang pintu, hanya menunggu saat yang tepat. Keadaan wilayah sangat kritis. Tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin rakyat menunjukkan gejala kewaspadaannya yang cukup tinggi. Tumenggung Surapati tokoh pimpinan Dusun Atas dari kelompok Dayak, Pangeran Kasuma yang diangkat menjadi Sultan Kerajaan Pasir, rakyat Marabahan memihak pada gerakan pemberontakan yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Pengikut Pangeran Antasari semakin hari semakin bertambah besar dan menjadi 6.000 orang banyaknya. Pangeran Ahmid saudara Sultan Adam dan kakek dari Pangeran Hidayatullah juga merupakan tokoh yang sangat menentang Sultan Tamjidillah. Pangeran ini dengan tergesa-gesa pergi dari Banjarmasin ke Martapura memberi kabar bahwa Belanda akan menangkap Mangkubumi bila dia ke Banjarmasin. Dengan berita ini Mangkubumi tidak pergi ke Banjarmasin hanya menulis surat pada Residen bahwa dia keberatan pergi ke Banua Lima untuk menyelesaikan kekacauan di sana. Surat itu ditulisnya pada tanggal 18 April 1859.

Pada tanggal 18 April 1859 Pangeran Aminullah bertemu dengan Residen dan Pangeran ini berhasil meyakinkan Residen bahwa situasi dapat diselesaikan asal Residen mengirim dia ke Martapura untuk menyelesaikannya. Salah satu cara yang akan dilakukan Pangeran Aminullah, membujuk para pimpinan-pimpinan dan tetuha-tetuha rakyat dengan hadiah-hadiah asal Residen bersedia memberinya uang sebesar F.5.000,- Uang sebesar itu akan digunakan untuk menyenangkan hati para tetuha masyarakat itu, agar mereka dapat ditarik berpihak pada Sultan. Residen juga menugaskan pada Pangeran Aminullah agar Pangeran ini berusaha menangkap Jalil Kiai Adipati Anom Dinding Raja. Tugas ini disampaikan oleh Commies van Volden. Selanjutnya Pangeran Aminullah memberi nasihat pada Commies van Volden sebagai berikut :

¹⁴² M. Idwar Saleh, "Papper...", *op.cit.*, hal. 43.

- a. Bahwa seluruh lapisan rakyat membenci pada Sultan yang peminum dan pemabuk itu.
- b. Ia menginginkan dikirimkannya utusan ke Muning untuk menghalangi usaha Datu Aling memperbesar pengikutnya.
- c. Ia sangat tidak setuju kalau jaksa sebagai pegawai Belanda dikirim kesana, karena hal itu berarti campur tangan Belanda terhadap urusan Kerajaan.
- d. Pangeran juga menasihatkan agar Residen meminta bantuan serdadu ke Jawa sebab dalam bulan Mei atau April mungkin akan terjadi pemberontakan besar untuk menurunkan Sultan Tamjidillah, serta mengangkat Pangeran Hidayat sebagai penggantinya.¹⁴³

Pada tanggal 20 April 1859 Pangeran Aminullah ke Martapura melaksanakan tugas yang dibebankan Residen kepadanya. Tetapi setelah sampai di Martapura Pangeran ini bukan menjalankan tugas yang dibebankan Residen, melainkan menyelesaikan rencana terakhir rencana pemberontakan besar dan pemusnahan tambang batu bara Kalangan. Pada tanggal yang sama di Banjar tertangkap dua orang cucu Kiai Adipati Anom Dinding Raja. Kedua orang ini telah menjumpai Mangkubumi di rumahnya di Antalunggu. Mereka menerima surat dari Mangkubumi yang ditujukan kepada Kiai Adipati Anom Dinding Raja, menugaskan pada Kiai Adipati untuk membawa turun 2.000 orang prajurit dari Batang Balangan dan Tabalong ke Martapura. Di samping itu Pangeran Antasari dengan pasukan dari Muning telah berkumpul dan siap siaga di sekitar Gunung Pamaton.

Tanggal 28 April 1859 tambang batu bara "*Oranje Nassau*" dikepung, maka dengan demikian pecahlah *Perang Banjar*.

4. Perang Banjar Meletus

Pada bulan September 1858 Pangeran Aminullah telah mengirim utusan dan surat menyurat dengan tokoh-tokoh suku di Banjar di daerah kerajaan Kalimantan Barat. Salah satu diantara surat itu jatuh ke tangan Belanda. Surat berbunyi, memanggil orang-orang Banjar yang berada di luar Kerajaan Banjar untuk pulang ke negeri Banjar untuk ikut membantu perang sabil menentang pemerintahan Belanda dan Sultan Tamjidillah. Pada awal tahun 1859 berita itu tersebar luas dan diketahui oleh pemerintah Belanda di Batavia. Untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan Pemerintah Belanda mengirim Kapal perang "*Arjuna*" lengkap dengan persenjataannya ke Banjarmasin, dan tiba di Banjarmasin pada tanggal 2 Februari 1859.

Residen E.P. Graaf van Bentheim Teeklenburg Rhede berpendapat bahwa situasi tidak ada yang mengkhawatirkan, karena itu tiga hari kemudian kapal perang Arjuna di kembalikan ke Batavia. Residen berpendapat bahwa pertentangan yang ada semata-mata pertentangan dalam keluarga Sultan. Residen telah berusaha mengatasi masalah ini dan telah berhasil merukunkan kedua keluarga itu dengan cara mengawinkan putera Pangeran Hidayat dengan Puteri Bulan. Residen

¹⁴³ M. Idwar Saleh, *ibid.*, hal. 47.

menganggap pertentangan telah selesai dan situasi telah normal kembali, itulah sebabnya kapal perang Arjuna dikembalikan.

Setelah beberapa hari kemudian. Residen menerima laporan dari Administrator tambang batu bara Oranje Nassau, bahwa telah berkumpul 4.000 orang untuk mengangkat Sultan yang baru di Muning atau di Gunung Pamaton. Pengangkatan Sultan baru itu akan dilaksanakan pada ke 14 hari puasa atau 17 April 1859. Residen juga memperoleh laporan dari Kiai Gangga, bahwa Pangeran Hidayat telah menerima pernyataan Nyai Ratu Komala Sari, isteri Sultan Adam, yang bunyinya mempercayakan sepenuhnya Kerajaan Banjar pada Pangeran Hidayat, karena pengangkatan Sultan Tamjid bertentangan dengan keinginan keluarga.

Pangeran Hidayat beberapa kali mengadakan rapat keluarga. Dalam rapat itu dijelaskan bahwa Gerakan Muning perlu dihubungi, dan Pangeran Antasari ditugaskan untuk melaksanakannya. Pangeran Antasari diberi kepercayaan oleh Mangkubumi Pangeran Hidayat untuk menjalin kerjasama dengan Sultan Kuning dan Gerakan Muningnya, sedangkan Jalil Kiai Adipati Anom Dinding Raja diberi kepercayaan atas pemerintahan Banua Lima. Pangeran Hidayat juga telah melakukan kegiatan mengumpulkan para tetua masyarakat di Mangkauk dan Kalangan agar rakyat mengerti perjuangan yang dihadapi. Pangeran Hidayat telah berhasil mengumpulkan kekuatan dari tiga komponen pimpinan masyarakat. Sultan Kuning seorang tokoh elite kultural, Pangeran Antasari seorang tokoh elite aristokratis sedangkan Tumenggung Jalil, Kiai Adipati Anom Dinding Raja adalah elite birokratis.¹⁴⁴

Dalam perkembangannya masing-masing gerakan itu berdiri sendiri-sendiri, sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah masing-masing. Tetapi gerakan sosial itu dapat digerakkan secara bersama dengan membangkitkan sentimen yang paling sensitif dan mengarahkan pada tujuan yang sama. Sentimen yang paling sensitif itu ialah sentimen agama, bahwa perang menghadapi orang kafir adalah perang sabil, perang suci, dan berjihad di jalan Allah berperang melawan orang kafir (Belanda) adalah berjuang di jalan Allah. Mati dalam membela agama melawan orang kafir (Belanda) adalah mati syahid. Mati syahid balasannya hanya sorga. Tujuan perang mengusir Belanda dan menggantikan pemerintahan yang ada (Sultan Tamjid) dengan pemerintahan yang berhak.

Disamping itu kerjasama ketiga pimpinan ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Pangeran Antasari sebagai seorang bangsawan yang dilupakan, hidup sederhana di tengah-tengah masyarakat kaum jaba. Berkepribadian luhur muncul sebagai pimpinan yang ditakuti Belanda dan ditaati perintahnya oleh suku Banjar dan Dayak. Sultan Kuning pimpinan Gerakan Muning yang sedang termasyhur dengan pengikut yang banyak mempunyai semangat juang yang tidak kenal menyerah, merasa beruntung dapat bekerjasama dengan Pangeran Antasari. Kerjasama ini dapat mengangkat wibawa dan kharismanya sebagai pimpinan

¹⁴⁴ Tamny Ruslan, *op.cit.*, hal. 84.

tradisional yang baru. Pangeran Antasari juga merasa beruntung dapat bekerjasama dengan Pangeran Kuning, karena pengikut Gerakan Muning dapat digerakkan untuk mencapai tujuan bersama, mengusir Belanda dan mengganti pemerintahan Sultan Tamjidillah. Bergabungnya Tumenggung Jalil Kiai Adipati Anom Dinding Raja karena Jalil berada di pihak Mangkubumi Pangeran Hidayat, untuk bersama-sama melancarkan serangan terhadap Belanda dan menggantikan Sultan Tamjidillah.

Dengan meningkatnya pergolakan rakyat Banjar, akhirnya Belanda menyadari akan bahaya yang akan menimpa. Usaha Belanda dengan melalui Mangkubumi Pangeran Hidayat, ternyata juga gagal, karena Pangeran Hidayat sebetulnya berpihak pada rakyat. Salah satu usaha Belanda untuk menyelesaikan masalah adalah dengan mendatangkan bantuan dari Jawa. Kolonel Andresen memimpin bantuan dan langsung mengambil alih pemerintahan Residen Beinthein yang dianggap terlalu lemah dalam menjalankan tugasnya.

Pengaruh golongan ulama sangat besar dalam membangkitkan semangat berjuang menghadapi Belanda sebagai berjihad di jalan Allah. Seluruh rakyat taat pada petuah kaum ulama, bahwa perang menghadapi Belanda adalah perang suci. Kefanatikan terhadap agama Islam ini menjadikan orang tidak takut mati. Para ulama memberikan doa-doa untuk keselamatan, jimat-jimat pelindung dari bahaya, dan para ulama bersatu menghadapi orang kafir (Belanda). Kemana pun para ulama ini pergi mereka diterima oleh rakyat, dan mereka mengerjakan shalat berjamaah. Selanjutnya para ulama ini memberikan doa-doa, syair memuji Allah dan ungkapan-ungkapan yang memberi semangat juang. Mereka selalu mengadakan shalat berjamaah, berzikir, berdoa yang akhirnya menimbulkan semangat juang dan keberanian yang mengagumkan. Mereka para pengikut yang akan *berjihad fisabilillah* ini berpakaian kuning dan putih, memakai jimat ditutup kepala, dengan parang bungkul dan tombak yang tajam. Disamping melakukan, shalat, berpuasa, berzikir dan berdoa, mereka juga melakukan latihan perang-perangan. Dengan mata tajam, mereka berdiri di depan bayonet dan di medan pertempuran dengan tombak yang panjang. Hanyalah kematian yang dapat menahan semangat juang mereka.¹⁴⁵

Inilah gambaran Gerakan Muning dalam membangkitkan semangat juang menghadapi orang kafir (Belanda) menjelang penyerbuan terhadap benteng tambang batu bara Oranje Nassau.

5. Penyerbuan Terhadap Benteng Oranje Nassau

Pangeran Hidayat telah menyusun kekuatan rakyat untuk menghadapi Belanda secara menyeluruh. Pada bulan April 1859 ia menghubungi lagi Gerakan Muning. Gerakan Muning ini merupakan gerakan yang terbesar jumlah pengikutnya karena itu menjadi perhatiannya. Sementara Mangkubumi Pangeran Hidayat memperhitungkan kekuatan Belanda yang dalam bidang teknik dan persenjataan lebih unggul, Gerakan Muning mempersiapkan latihan perang-perangan dan

¹⁴⁵ Gids, *De Bandjarmasinsche: Oorlog tot de Indische Kijgeschedenis*, 1866, hal. 278, terjemahan Tunjung, "Perang Banjarmasin".

kekuatan mental spiritual untuk menghadapi kekuatan Belanda yang dalam segi teknik lebih unggul tersebut. Siasat lain yang dipergunakan Pangeran Hidayat untuk mengimbangnya ialah dengan menggunakan teknik perang secara menyeluruh.

Sekitar bulan April 1859 yaitu pada minggu pertama, Sultan Kuning mengirim 4 orang utusan menghadap kepada Mangkubumi Pangeran Hidayat untuk meminta izin menyerang benteng tambang batu bara Oranje Nassau di Pengaron. Pangeran Hidayat mengizinkannya, apa pun yang akan terjadi. Residen memperoleh informasi ini dari Ahmad yang melaporkan pada Residen tentang kegiatan Sultan Kuning yang merencanakan menyerang Oranje Nassau, berdasarkan informasi dari Lurah Dadang di Marampiau.¹⁴⁶

Untuk mengantisipasi situasi ini Residen merasa kurang mampu. Residen hanya memiliki sebuah garnizun dibawah pimpinan Kapten L.Uhalan. Residen Andresen berusaha untuk memperoleh bantuan dari Jawa. Bantuan itu datang secara bergelombang dan diantaranya ditempatkan di Pengaron serta pos-pos yang diperkirakan dapat memperkuat pertahanan. Langkah lain yang dilakukan Belanda ialah menangkap tokoh-tokoh yang mencurigakan gerak geriknya khususnya yang tinggal di Banjarmasin.

Mengalirnya bantuan fihak Belanda, mempercepat meletusnya pertempuran. Pangeran Hidayat memerintahkan pada Sultan Kuning dan Pangeran Antasari mempercepat serangan terhadap benteng batu bara Oranje Nassau Pengaron. Serangan ini diikuti oleh gerakan-gerakan sosial lainnya yang tersebar di seluruh Kerajaan Banjar.

Pada hari Kamis 24 Ramadhan 1215 H bertepatan dengan tanggal 18 April 1859 *Perang Banjar*, meletus. Pada pagi hari itu sejumlah 50 orang Muning yang datang terlebih dahulu sangat bernaflu menyerbu benteng tersebut. Serangan itu semacam serangan pancingan dan kemudian mundur. Pada malam harinya yaitu malam Jumat 19 April 1859, pasukan Muning yang datang kemudian telah tiba, jumlah ribuan banyaknya. Pasukan ini bertambah besar setelah pasukan Riam Kiwa, pimpinan Pangeran Antasari tiba. Pasukan ini sebagian dikirim ke Martapura untuk memperkuat pertahanan di Martapura, sebagian lagi menyerbu benteng Belanda di Kalangan dan Tabanio.

Pasukan Muning dan Riam Kiwa yang bertahan menyerbu benteng Oranje Nassau berjumlah 500 orang pasukan. Pasukan ini bertambah dengan bergabungnya 165 buruh tambang batu bara. Pasukan Belanda yang kecil jumlahnya bertahan dalam benteng.

Di dalam pertempuran yang berlangsung beberapa hari jumlah korban berjatuhan diantara kedua belah pihak. Usaha menyerbu benteng itu tidak berhasil, karena itu pasukan Muning dan Riam Kiwa berusaha mengurung benteng itu dari luar, sampai persediaan bahan makanan mereka habis. Salah seorang Belanda yang berusaha keluar untuk pergi mencari bantuan ke Banjarmasin, dibunuh di desa Sungai Raya. Perhitungan ternyata meleset, sebab Belanda mampu bertahan dalam

¹⁴⁶ Tamny Ruslan, *op.cit.*, hal. 88.

benteng sementara menunggu bantuan datang. Sementara itu pasukan Muning yang menyerbu benteng Belanda di Kalangan, Gunung Jabok, Sungai Durian dan Tabanio sebagian berhasil menghancurkan kekuatan Belanda. Semua orang Belanda di benteng Kalangan dan Tabanio dibunuh, begitu pula seorang opsir kesehatan Diepenbroek dibunuh.¹⁴⁷

Untuk menghadapi serangan ini Pemerintah Belanda mengadakan konsolidasi. Pada tanggal 1 Mei 1859 pemerintah sipil diganti dengan pemerintahan militer dan dipegang oleh Kolonel Andresen. Kolonel Andresen memerintahkan Kapten Uhalan menyerbu Martapura, sedangkan Letnan Beekman bertugas mempertahankan pos-pos yang ada. Pangeran Antasari.¹⁴⁸ Setelah 6 minggu bertahan dalam benteng Oranje Nassau, bala bantuan Belanda tiba. Pada tanggal 15 Juni datang 250 pasukan Belanda, pasukan artileri, pasukan zeni dengan beberapa pucuk meriam untuk menolong Oranje Nassau. Kemudian dalam bulan Juni itu pula datang 9 batalyon infantri, 43 artileri dengan 4 pucuk meriam, 2 pucuk meriam kecil dan 2 montir. Selanjutnya Kolonel Andresen diangkat menjadi Panglima.

Mangkubumi Pangeran Hidayat masih tinggal di Martapura dan Kolonel Andresen telah berusaha memulihkan keadaan. Siasat yang dilakukan Andresen ialah dengan menempatkan Pangeran Hidayat pada kedudukan yang sewajarnya sebagai Sultan dan menurunkan Pangeran Tamjidillah. Meskipun Andresen yakin bahwa penyerbuan terhadap kalangan dan pembunuhan terhadap 20 orang Belanda termasuk anak-anak dan wanita adalah kesalahan dan atas perintah Pangeran Hidayat, tetapi kesalahan itu dimaafkan demi terciptanya ketenteraman negeri. Andresen yakin suasana akan tenteram kembali kalau Pangeran Hidayat dijadikan Sultan, meskipun Andresen telah memperoleh 2 lembar surat perintah yang ditandatangani Pangeran Hidayat dan ditujukan kepada kaum ulama untuk bangkit melawan Belanda.

Andresen selanjutnya mengadakan rapat-rapat dengan pimpinan-pimpinan rakyat agar mereka tidak memihak Pangeran Antasari yang oleh Belanda dianggap sebagai pemberontak. Andresen selanjutnya akan melaksanakan taktik dan strateginya dengan melantik Pangeran Hidayat sebagai Sultan pada tanggal 25 Juni 1859.

Penyerangan terhadap Oranje Nassau dipimpin langsung oleh Pangeran Antasari dibantu oleh Pembekal Ali Akbar, Mantri Temeng Yuda Panakawan Sultan Kuning. Pada tanggal 30 April 1859 kekuatan rakyat telah berkumpul di sekitar Sungai Durian dekat Kalangan. Penyerbuan Kalangan, Banyu Irang dan Bangkal dilaksanakan pada 1 Mei 1859 dibawah pimpinan Pangeran Ardhi Kasuma, paman Pangeran Hidayat. Benteng Kalangan dihancurkan dan 20 orang Belanda yang menjadi korban diantaranya Wijnmalen direktur tanbang batu bara Kalangan, Ir. Motley, Opzichter School Boodt dan lain-lain.

¹⁴⁷ Gids, *op.cit.*, hal. 279.

¹⁴⁸ Gids, *loc.cit.*

Sepasukan dari Muning yang menyerbu tambang batu bara Hermina di Sungai Durian, dan tambang batu bara di Gunung Jabok berhasil menewaskan pegawai Belanda yang bekerja di tambang itu. Sementara itu pasukan yang menyerbu benteng Tabanio bersama rakyat dibawah pimpinan Haji Buyasin telah menewaskan pejabat Gezaghebber Maurits dengan anak buahnya. Mereka menduduki benteng Belanda yang dibangun pada tahun 1790 itu.

6. Sultan Tamjidillah Turun Tahta

Rakyat mengangkat senjata secara serempak di seluruh Kerajaan Banjar. Pertempuran terjadi di Martapura, Tanah Laut, Margasari, Bakumpai dan Banua Lima. Begitu pula rakyat di Pulau Telu di sepanjang Sungai Kapuas dibawah pimpinan Pambakal Sulil. Di Pulau Petak dalam pertempuran yang sengit menewaskan 9 orang Belanda, 4 orang diantaranya pendeta Belanda.

Sebagai akibat dari serangan serentak ini, maka hampir seluruh kekuatan Belanda di daerah Banjar dapat dilumpuhkan. Kaki tangan Belanda di Banua Lima, yaitu di Negara, Alabio, Sungai Banar, Amuntai dan Kalua dibersihkan oleh Tumenggung Jalil bersama Pambakal Gapur, Duwahap, Dulahat, dan Panghulu Abdul Gani, sehingga Belanda kehilangan jalur komunikasi dan sulit mengetahui kekuatan rakyat.

Kolonel Andresen berusaha untuk memikat hati Pangeran Hidayat. Andresen mengutus Haji Isa dan Pangeran Syarif Husein menemui Pangeran Hidayat. Usaha ini gagal. Ratu Siti Ibu Pangeran Hidayat, Pangeran Citra paman Pangeran Hidayat dan Pangeran Ardhi Kesuma, tidak setuju kalau Pangeran Hidayat memenuhi panggilan Kolonel Andresen ke Banjarmasin. Sementara itu Kolonel Andresen berusaha agar Pangeran Hidayat tidak melakukan kegiatan memimpin rakyat melawan pemerintah Belanda.

Untuk menekan perjuangan rakyat Pemerintah Belanda memaklumkan keadaan perang (*in Staat van Oorlog en Verzet*). Pengumuman ini diperkuat dengan datangnya kapal perang Arjuna, Celebes, Montrado, Bone dan Van Os. Meskipun demikian semangat juang rakyat malah bertambah tinggi dan tidak takut menghadapi musuh yang memiliki persenjataan yang lebih baik dari mereka.

Sebagai jawaban atas tekanan Belanda ini Pangeran Antasari menempatkan 500 orang prajurit di sekitar Masjid, 250 orang di sekitar rumah Residen dan sekitar 3000 orang di sekitar Keraton Bumi Selamat. Para pejuang ini didatangkan dari Banua Lima, Tanah Laut atas permintaan Pangeran Hidayat pada Tumenggung Jalil dan Demang Lehman.

Usaha terakhir Kolonel Andresen dengan mengutus Penghulu Mohammad Seman untuk mengundang Pangeran Hidayat dan Pangeran Aminullah berunding di kapal perang Celebes sebagai usaha untuk mengatasi kemelut yang telah terjadi. Menyadari akan hal yang mungkin akan terjadi Pangeran Hidayat tidak bersedia datang dan dia bersama isteri, Pangeran Antasari dan isteri, Pangeran Aminullah, Pangeran Wijaya Kesuma serta pimpinan rakyat lainnya pergi ke Pengaron.

Kolonel Andresen sangat marah sebab siasatnya untuk menangkap Pangeran Hidayat beserta Pangeran Aminullah telah bocor. Pada hari itu pula Andresen mengundang 80 orang bangsawan yang ada di ibukota kerajaan Martapura. Kepada para bangsawan dijelaskannya keinginannya agar Pangeran Hidayat bersedia kembali ke Martapura. Berdasarkan informasi yang diperolehnya di Martapura, bahwa rakyat tidak menyenangi pengangkatan Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan. Pengangkatan itu selain bertentangan dengan tradisi dan ahli waris tahta yang sebenarnya, tetapi juga melanggar wasiat Sultan Adam Al Wasik Billah yang dianggap rakyat keramat. Karena itu Andresen berkesimpulan bahwa sumber kekacauan itu berasal pada pengangkatan Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan.

Dengan dasar inilah Sultan Tamjidillah dengan secara paksa diturunkan dari tahta Kerajaan Banjar dan untuk sementara dipegang oleh Komisi Pemerintah Kerajaan (25 Juni 1859).

Proklamasi turunnya tahta dari Kerajaan Banjar, raja terakhir, Sultan Tamjidillah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Kerajaan Banjar amat menderita akibat pemberontakan terhadap mahkota dan Pemerintah Belanda.
2. Agar rakyat kembali tunduk dan patuh kepada pemerintah yang sah, dengan ini Sultan menyatakan berhenti memerintah dan menyerahkan kekuasaan ke tangan Kolonel Andresen, Komisaris Gubernemen dan komandan tentara afdeling Selatan dan Timur Borneo, atas kemauan sendiri tanpa paksaan apa-apa.
3. Atas jaminan Gubernemen Hindia Belanda, bahwa bila keamanan telah kembali, mahkota akan diberikan kepada dia yang menurut hukum sebenarnya berhak atas itu dan dianggap Pemerintah Belanda sesuai pula untuk jabatan itu.
4. Sebagai hadiah kepada raja disebutkan dua helai tikar rotan, untuk patuh dan menurut kepada kekuasaan yang sah agar tenteram, aman, dan kemakmuran datang kembali.

Sementara Sultan baru belum dilantik, pemerintah kerajaan dipegang oleh sebuah Komisi Pemerintah Kerajaan yang dipimpin oleh Pangeran Surya Mataram, anak Sultan Adam, paman dari Pangeran Hidayat, dan Pangeran Muhammad Tambak Anyar, putera dari Ratu Anom Mangkubumi Kencana, sepupu Pangeran Hidayat. Anggota Komisi Pemerintah Kerajaan itu terdiri dari : Pangeran Hamim, Pangeran Ahmid, Pangeran Dulah, Raden Ardi Kesuma, Pangeran Jaya Sumitra, Kiai Patih Guna Wijaya, Kiai Wira Yuda, Kiai Rana Manggala, Kiai Mangun Rasmi.

Meskipun Sultan Tamjidillah sudah diturunkan dari tahta, namun Pangeran Hidayat tidak mau kembali ke Martapura. Hal itu berarti siasat dan strategi Kolonel Andresen keliru. Suasana bukan bertambah tenang, tetapi sebaliknya serangan rakyat bertambah berani. Perang meluas ke seluruh pelosok Kerajaan Banjar. Karena itulah Kolonel Andresen digantikan oleh Mayor G.M. Verspyck yang diangkat menjadi Panglima dan Residen. Rakyat bukan saja tidak menyukai Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan, tetapi kebencian rakyat ditujukan terhadap Belanda

yang mencampuri urusan pemerintahan Kerajaan. Orang Banjar lebih mencintai kemerdekaan dan kebebasan, karena itu mereka berjuang mengusir penjajah dengan semboyan "*Waja Sampai Kaputing*".

7. Sultan Kuning di Sekitar Muning

Sejak pecahnya perang Banjar, tokoh pimpinan perang yang disebut-sebut dan dikenal oleh Belanda adalah Sultan Kuning dan Pangeran Antasari. Pangeran Hidayat sebagai pucuk pimpinan yang menggerakkan rakyat untuk bangkit melawan Belanda belum diketahui pihak Belanda aktivitasnya, sehingga pihak Belanda belum menaruh curiga terhadap Pangeran Hidayat. Apa yang dilakukan oleh Tumenggung Jalil di daerah Balangan adalah atas perintah Pangeran Hidayat. Pembersihan terhadap kaki tangan Sultan Tamjidillah di daerah Balangan adalah atas perintahnya pula tetapi Belanda belum merasa curiga terhadap loyalitas Pangeran ini. Pada awal perang Banjar kekuatan yang diperhitungkan oleh pihak Belanda adalah kekuatan Sultan Kuning dan Pangeran Antasari.

Setelah Sultan Kuning dan Pangeran Antasari secara berurutan menghancurkan kekuatan Belanda di daerah Kalangan, Tanah Laut, Gunung Jabok, Sungai Durian dan Martapura. Belanda melakukan aksi serangan balasan. Untuk menghindarkan korban yang lebih besar, Pangeran Antasari dengan pasukannya mundur ke daerah Muara Tewe dan mengumpulkan kekuatan di daerah itu untuk kembali menyerang kekuatan Belanda. Sultan Kuning dan pasukannya tetap bertahan di daerah Muning, yaitu di daerah Tambarangan. Munggu Thayor, Margasari, Beras Kuning, Sungkai dan Banua Padang. Daerah-daerah ini adalah pusat pertahanan Sultan Kuning yang sukar ditembus Belanda.

Pasukan Muning pada mulanya berkumpul di Sungkai tetapi kemudian mundur sampai di Muning. Pada akhir tahun 1859 Pasukan Belanda dipimpin oleh Kapten Benschop dan Kapten Grass menuju Muning. Daerah Muning yang terletak ditepi rawa, penuh parit terlindung hutan yang lebat menyebabkan pasukan Belanda sulit menuju sasaran. Sebaliknya bagi pasukan Sultan Kuning, kondisi alam seperti ini menguntungkan mereka sebab mereka telah menguasai medan dan mudah menyusun kekuatan untuk menghadapi Belanda. Pasukan Sultan Kuning berpakaian serba putih dan mereka berkeyakinan bahwa perang melawan Belanda adalah perang sabil dan berjihad di jalan Allah. Anggota pasukan ini juga memakai azimat dan minyak untuk memperoleh kekebalan dan agar terhindar dari peluru Belanda. Ketika pasukan Belanda pada tanggal 16 November 1859 tiba-tiba memasuki benteng pertahanan Sultan Kuning, pasukan Belanda kucar-kacir karena serangan yang mendadak dari pasukan Sultan Kuning. Dengan teriakan yang dahsyat dengan sebutan *Allahu Akbar* yang bergema di daerah hutan itu, pasukan Belanda kehilangan komando. Mula-mula muncul 20 orang berpakaian putih-putih di sela-sela semak belukar kemudian muncul 100 orang dengan teriakan *Allahu Akbar* menyerang pasukan Belanda. Perkelahian ini berlangsung berhadap-hadapan sehingga senjata senapan yang bawa Belanda tidak berperan. Komando pasukan Belanda Kapten Benschop tewas tertusuk tombak dalam perang berhadap-hadapan

ini. Bantuan pasukan Belanda yang datang menyusul satu peleton, menyebabkan pasukan Sultan Kuning mundur dari medan pertempuran untuk menyusun pertempuran untuk menyusun kekuatan baru bersembunyi di balik pepohonan yang lebat. Pada waktu itulah kampung Muning pusat pertahanan Sultan Kuning dibakar Belanda. Meskipun demikian Belanda menghadapi perlawanan yang gigih dari Panembahan Muda Datu Aling bersama pengikutnya. Banyak rakyat yang tidak berdosa menjadi korban dari keganasan pasukan Belanda, termasuk diantaranya Panembahan Muda Datu Aling, anaknya Nuramin dan adiknya Mangkubumi Kesuma Wijaya menjadi korban terbakar. Belanda kecewa karena Sultan Kuning dan Pasukannya lolos dari pengepungan Belanda. Sultan Kuning beserta pasukannya lari ke utara dan membuat benteng pertahanan di kampung Cambooi dekat Tambarangan. Pertahanan ini diketahui Belanda dan akhirnya diserang Belanda dari tiga penjuru, dibawah pimpinan Kapten Schiff, Cochen, dan Blondeu.

Serbuan pertama dilakukan oleh kapten Blondeu, tetapi pasukan Muning berhasil memukul Mundur pasukan Blondeu, bahkan Kapten Blondeu tewas kena dua buah tusukan tombak di dadanya. Serbuan kedua juga gagal begitu pula serbuan Belanda yang ketiga kalinya. Baru serbuan yang keempat yang dilakukan dari segala penjuru, berhasil menerobos pertahanan pasukan Muning. Dalam pertempuran yang cukup sengit ini dikabarkan bahwa Sultan Kuning Tewas, sebetulnya tidak.

Residen G.M. Verspyck menginstruksikan pada pasukannya agar Sultan Kuning ditangkap hidup-hidup, tetapi dengan berita bahwa Sultan Kuning sudah tewas, G.M. Verspyck meminta bukti dengan membawa mayatnya ke Banjarmasin.

Terbunuhnya Controleur Fuijck pada 16 Desember 1861 juga dilakukan oleh pengikut Sultan Kuning, sehingga Belanda berusaha keras untuk menangkap Sultan Kuning hidup-hidup. Melalui pejabat-pejabat agama Tuan Guru dan alim ulama yang memihak Belanda disebarkan kontra propaganda bahwa bagi mereka yang melindungi, membantu dalam bentuk apapun terhadap pasukan Muning dan Sultan Kuning akan mendapat hukuman yang keras. Selanjutnya Belanda mewajibkan pada Lurah, Pembakal, Pangeran dan seluruh penduduk untuk membantu agar dapat menangkap Sultan Kuning. Dengan cara ini Belanda berhasil menangkap Sultan Kuning pada tanggal 19 Oktober 1863 di kampung Kulur daerah Tambarangan. Sultan Kuning setelah di bawa ke Rantau, terus dibawa ke Banjarmasin. Sultan Kuning diadili dan mendapat hukuman kerja paksa selama 10 tahun.

8. Pertempuran Sekitar Benteng Munggu Thayor

Munggu Thayor (Munggu Dayor) adalah sebuah benteng yang dibangun oleh rakyat dibawah pimpinan Demang Lehman, Mohammad Aminullah dan Antaluddin serta pasukan Sultan Kuning. Benteng cukup kuat dan sangat sulit ditempuh, terletak antara Tambarangan dan Sungkai.

Di dalam benteng hanya dipertahankan oleh pasukan Antaluddin, sedangkan pasukan lainnya berada di luar benteng. Demang Lehman dengan pasukannya mengintai dan memancing ketika pasukan Belanda memulai mengadakan serangan ke benteng ini. Mengetahui bahwa benteng sulit ditempuh pasukan Belanda

memulai serangan ke Sungkai. Pada tanggal 28 Desember 1859, pasukan Belanda dengan 200 orang personil infantri, prajurit pendukung dengan 2 buah meriam, 2 mortir menyerang pertahanan rakyat di Sungkai. Setelah Sungkai di serang Belanda, Belanda bergerak mendekati benteng Munggu Thayor. Benteng itu mempunyai tempat pengintaian terletak di atas bukit Thayor, melalui kaki bukit itu mengalir sebuah sungai.¹⁴⁹

Demang Lehman memancing dengan lemparan api, dan segera terjadi pertempuran yang sengit. Tiang bendera patah kena tembakan pasukan Belanda, dan kemudian disusul dengan tembakan meriam. Tembakan meriam dijawab dengan tembakan senapan yang terus menerus. Serang menyerang terhenti, karena pasukan Belanda mendapat bantuan dibawah pimpinan Kapten Grass. Pasukan lainnya dibawah pimpinan Letnan Verstege dan Epke mengitari sekitar benteng. Ternyata hanya sekitar 200 orang yang bertahan dalam benteng sedangkan pasukan yang lebih besar berada di luar. Benteng Munggu Thayor berhasil diduduki Belanda selanjutnya dijadikan Belanda sebagai benteng pertahanannya. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 1859, pasukan Belanda dengan 80 orang personil serdadunya menyerbu Banua Padang. Serbuan pertama gagal karena hujan turun dan penuh lumpur menyebabkan pasukan Belanda bergerak sangat lambat, disamping harus bertahan terhadap serangan rakyat. Besok harinya ketika langit cerah Kapten Schiff mengerahkan 300 orang personil serdadu dengan 3 pucuk meriam mengulangi penyerbuannya terhadap Banua Padang, Teluk Pagat, dan Banua Halat. Dalam pertempuran yang terjadi di tiga buah tempat ini pasukan Belanda mendapat serangan yang gencar dari rakyat menyebabkan Kapten Schiff harus mengambil siasat mundur dan bersembunyi diantara pepohonan yang rimbun. Hujan yang deras membantu kemenangan rakyat dimana pasukan Belanda dalam keadaan yang sangat lemah dan kekurangan bahan makanan. Kekalahan pada pertempuran di tiga buah tempat menyebabkan Kapten Schiff yang telah menduduki Munggu Thayor juga mengundurkan diri.¹⁵⁰

9. Demang Lehman dan Pangeran Hidayatullah

Demang Lehman adalah seorang panakawan Pangeran Hidayat sejak tahun 1857. dia lahir di Martapura pada tahun sekitar 1837, mula-mula bernama Idis. Oleh karena kesetiaan dan kecakapannya dan besarnya jasa sebagai Panakawan Pangeran Hidayat, dia diangkat menjadi Kiai sebagai Kepala Distrik Riam Kanan.

Pada awal tahun 1859 Nyai Ratu Komala Sari, permaisuri Sultan Adam, telah menyerahkan surat kepada Pangeran Hidayat, bahwa kerajaan Banjar diserahkan kepadanya, sesuai dengan surat wasiat Sultan Adam. Selanjutnya Pangeran Hidayat mengadakan rapat-rapat untuk menyusun kekuatan dan memberi bantuan kepada Tumenggung Kiai Adipati Anom Dinding Raja berupa 20 pucuk senapan. Sementara itu Pangeran Antasari dan Demang Lehman mendapat tugas yang lebih berat yaitu

¹⁴⁹ Gids, *op.cit.*, hal. 284.

¹⁵⁰ Gids, *loc.cit.*

mengerahkan kekuatan dengan menghubungi Tumenggung Surapati dan Pembakal Sulil di daerah Barito, Kiai Langlang dan Haji Buyasin di daerah Tanah Laut.

Pada awal Perang Banjar yaitu sekitar akhir bulan April 1859 Belanda memimpin kekuatan dan pengempuran di sekitar Martapura dan Tanah Laut, bersama-sama Kiai Langlang dan Penghulu Haji Buyasin. selanjutnya Demang Lehman diperintahkan mempertahankan kota Martapura, karena pusat pemerintahan Kerajaan oleh Pangeran Hidayat dipindahkan ke kota Karang Intan. Bersama-sama Pangeran Antasari, Demang Lehman menempatkan pasukan disekitar Masjid Martapura dengan kekuatan 500 orang dan sekitar 300 orang disekitar Keraton Bumi Selamat. Pada akhir tahun 1859 pasukan rakyat yang dipimpin oleh Demang Lehman, Pangeran Antasari, Tumenggung Antaluddin, Pambakal Ali Akbar berkumpul dibenteng Munggu Thayor. Demang Lehman terlibat dalam pertempuran sengit di sekitar Munggu Thayor.

Belanda menilai tentang Demang Lehman sebagai musuh yang paling ditakuti dan paling berbahaya dan menggerakkan kekuatan rakyat sebagai tangan kanan dari Pangeran Hidayat. Demang Lehman menyerbu Martapura dan melakukan pembunuhan terhadap pimpinan militer Belanda di Martapura. Pada tanggal 30 Agustus 1859 Demang Lehman berangkat menuju Keraton dengan 3000 kekuatan dan secara tiba-tiba mengejutkan Belanda karena melakukan serangan secara tiba-tiba, menyebabkan Belanda kebingungan menghadapinya, hingga hampir menewaskan Letnan Kolonel Boon Ostade.¹⁵¹

Dalam serangan tiba-tiba ini Demang Lehman menunggang kuda dengan gagah berani mengejar Letnan Kolonel Boon Ostade. Serbuan ke Keraton Bumi Selamat ini gagal karena berhadapan dengan pasukan Belanda yang sedang berkumpul melakukan inspeksi senjata. Pertempuran sengit terjadi, sehingga anggota Demang Lehman kehilangan 10 orang yang menjadi korban, begitu pula pihak Belanda berpuluh-puluh yang jatuh korban.

Sementara itu kapal perang Bone dikirim Belanda ke Tanah Laut untuk merebut kembali benteng Tabanio yang telah dikuasai Demang Lehman dalam sebuah pertempuran yang mengerikan Belanda. Ketika pasukan Letnan Laut Cronental menyerbu benteng Tabanio, 9 orang serdadu Belanda tewas, dan terpaksa pasukan Belanda sisanya mengundurkan diri dengan menderita kekalahan. Serangan kedua oleh Belanda dilakukan, tetapi benteng itu dipertahankan dengan gagah berani oleh Demang Lehman, Kiai Langlang, dan Panghulu Haji Buyasin. Karena serangan serdadu Belanda didukung oleh angkatan laut yang menembakkan meriam dari kapal perang, sedangkan pasukan darat menyerbu benteng Tabanio, Demang Lehman berserta pasukannya lolos dengan tidak meninggalkan korban. Belanda menilai bahwa kemenangan terhadap benteng Tabanio ini tidak ada artinya, kalau diperhitungkan dengan jumlah sarana yang dikerahkan. 15 buah meriam, dan sejumlah senjata yang mengkilap, ternyata tidak berhasil melumpuhkan kekuatan Demang Lehman.

¹⁵¹ Gids, *ibid.*, hal. 281.

Selanjutnya Demang Lehman memusatkan kekuatannya di benteng pertahanan Gunung Lawak (Tanah Laut). Benteng itu terletak di atas bukit, di setiap sudut benteng dipersenjatai dengan meriam. Pertempuran memperebutkan benteng ini terjadi pada tanggal 27 September 1859. Dalam pertempuran yang sengit dan pasukan Demang Lehman mempertahankan benteng Gubung Lawak dengan gagah berani, akhirnya mengorbankan lebih dari 100 tewas dalam pertempuran ini. Belanda sangat bangga dengan kemenangannya ini sehingga dilukiskannya sebagai *“salah satu pertempuran yang indah di tahun 1859”*.

Kekalahan ini tidak melemahkan semangat pasukan Demang Lehman, sebab mereka yakin bahwa berperang melawan Belanda adalah perang sabil, dan mati dalam perang adalah mati syahid. Bahkan pasukan Kolonel Andresen banyak korban dalam perjalanan naik perahu ketika menuju ke Banjarmasin, bahkan Kolonel Andresen sendiri hampir tewas dalam serangan mendadak ini.

Pangeran Antasari dan Demang Lehman mencoba mendatangkan senjata dengan cara mengirim utusan ke Kerajaan Kutai, Pasir dan Pagatan. Tetapi rupanya sudah diketahui oleh Belanda, sehingga Belanda menekan semua raja-raja yang membantu Pangeran Antasari dan Demang Lehman. Meskipun demikian Demang Lehman memperoleh sebanyak 142 pucuk senapan dan beberapa buah meriam kecil (lila), tetapi sayang ketika senjata ini dalam perjalanan diangkut dengan perahu dirampas oleh Belanda di tengah laut.

Pada akhir tahun 1859 medan pertempuran terpecah dalam 3 lokasi, yaitu di sekitar Banua Lima, sekitar Martapura dan Tanah Laut dan di sepanjang Sungai Barito. Medan pertempuran di sekitar Banua Lima dibawah pimpinan Tumenggung Jalil Kiai Adipati Anom Dinding Raja, medan yang kedua dibawah pimpinan Demang Lehman, sedangkan medan ketiga dibawah pimpinan Pangeran Antasari.

Pada bulan September 1859 Demang Lehman, bersama pimpinan lainnya seperti Pangeran Muhammad Aminullah, Tumenggung Jalil berangkat menuju Kandangan untuk merundingkan bentuk perlawanan terhadap Belanda dan sikap serta siasat yang ditempuh selanjutnya. Pertemuan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh pejuang dari segala pelosok. Dari pertemuan itu menghasilkan kesepakatan, bahwa pimpinan-pimpinan perang menolak tawaran Belanda untuk berunding. Pertemuan menghasilkan pula bentuk perlawanan yang terarah dan meluas dengan cara :

- a. Pemusatan kekuatan di daerah Amuntai.
- b. Membuat dan memperkuat pertahanan di daerah Tanah laut, Martapura, Rantau dan Kandangan.
- c. Pangeran Antasari memperkuat pertahanan di Dusun Atas.
- d. Mengusahakan tambahan senjata.

Suatu sikap yang keras telah diambil bahwa para pejuang tersebut bersumpah mengusir penjajah Belanda dari bumi Banjar. Mereka akan berjuang tanpa kompromi *“Haram Manyarah Waja Sampai Kaputing”*, berjuang sampai titik darah yang penghabisan.

Untuk melumpuhkan perjuangan rakyat Belanda mendirikan benteng-benteng. Di daerah Tapin, diperkuat Belanda benteng Munggu Thayor yang telah

direbutnya dari pasukan Demang Lehman. Di daerah Kandangan, didirikan pula benteng dikenal sebagai benteng Amawang. Demang Lehman dan pasukannya merencanakan untuk menyerang benteng Belanda di Amawang ini. Demang Lehman berhasil menyelundupkan dua orang kepercayaannya ke dalam benteng sebagai pekerja Belanda. Informasi dari kedua pekerja ini Demang Lehman bertekad akan menyerbu benteng Belanda tersebut.

Pihak Belanda memperoleh informasi bahwa rakyat telah berkumpul di Sungai Paring hendak menyerbu benteng Amawang. Dengan dasar informasi ini, pasukan Belanda dibawah pimpinan Munters membawa 60 orang serdadu dan sebuah meriam menuju Sungai Paring. Saat pasukan tersebut keluar dan diperkirakan sudah mencapai Sungai Paring, Demang Lehman menyerbu benteng Amawang pada sekitar jam 02.00 siang hari tanggal 31 Maret 1860. dengan 300 orang pasukannya Demang Lehman menyerbu benteng tersebut. Ketika pasukan Demang Lehman menyerbu, kedua orang kepercayaan yang menjadi buruh dalam benteng tersebut mengamuk dan menjadikan serdadu Belanda menjadi kacau dibuatnya. Kedua orang yang mengamuk tersebut tewas dalam benteng dan sementara itu pertempuran sengit terjadi. Pasukan Munters ternyata kembali ke benteng sebelum sampai di Sungai Paring. Datangnya bantuan kekuatan ini, menyebabkan Demang Lahman dan pasukannya mundur.

Demang Lehman mundur di sekitar Sungai Kupang dan Tabihi bersama Pangeran Muhammad Aminullah dan Tuan Said. Pasukan Belanda menyusul ke Tabihi dan terjadi pertempuran. dalam pertempuran itu komandan pasukan Belanda Van Dam van Isselt tewas dan beberapa orang serdadu menjadi korban keganasan perang. Demang Lehman meneruskan ke daerah Barabai membantu pertahanan Pangeran Hidayat dan pengiringnya.

G.M. Verspyck berusaha keras untuk menghancurkan kekuatan Pangeran Hidayat dan Demang Lehman yang berkedudukan di sekitar Barabai. G.M. Verspyck mengerahkan serdadu dari infantri batalyon ke 7, batalyon ke 9 dan batalyon ke 13. Batalyon ke 13 berjumlah 210 orang serdadu dibawah pimpinan Kapten Bode dan Rhode. Pasukan ini diikutkan pula 100 orang perantain yang bertugas membawa perlengkapan perang dan makanan. Pengepungan terhadap kedudukan Pangeran Hidayat ini disertai pula kapal-kapal perang Suriname, Bone, Bennet dan beberapa kapal kecil. Kapal-kapal perang ini pada tanggal 18 April 1850 telah memasuki Sungai Ilir Pemangkih. Karena banyak rintangan yang dibuat, maka kapal-kapal perang tidak dapat memasukinya, serdadu Belanda terpaksa menggunakan perahu-perahu. Irian perahu ini mendapat serangan dari kelompok Haji Sarodin yang menggunakan Lila dan senapan lantakan. Dalam pertempuran ini Haji Sarodin tewas, tetapi dia berhasil menewaskan beberapa serdadu Belanda.

Pertempuran terjadi pula di Walangku dan Kasarangan dan Pantai Hambawang. Dengan teriakan "*Allahu Akbar*", rakyat menyerbu serdadu Belanda yang bersenjata lengkap. Mereka tidak takut mati, karena mereka yakin mati dalam perang melawan Belanda adalah mati syahid. Demang Lehman dan Pangeran Hidayat berusaha keras dan penuh keberanian menahan serangan serdadu Belanda.

Tetapi karena jumlah personil Belanda lebih besar dan perlengkapan perang lebih unggul, maka diambil suatu siasat mundur. Pangeran Hidayat mengundurkan diri ke Aluwan, sedangkan Demang Lehman bertahan di Pajukungan. Akhirnya Belanda berhasil menduduki Barabai setelah meninggalkan banyak korban.¹⁵²

Belanda berusaha keras untuk memutuskan hubungan Pangeran Hidayat yang berada di Aluwan dengan pasukan Demang Lehman yang berada di sekitar Amawang. Usaha Belanda untuk melemahkan kekuatan rakyat ternyata tidak berhasil, karena rakyat menggunakan taktik gerilya dalam serangannya.

10. Pertempuran di Gunung Madang

Pangeran Hidayat dan Demang Lehman meminta pada Tumenggung Antaluddin untuk membuat benteng pertahanan di Gunung Madang. Pasukan Pangeran Hidayat, Demang Lehman dan pasukan Tumenggung Antaluddin terkumpul di sekitar benteng ini. Persiapan benteng ini diketahui oleh Belanda sehingga datanglah serangan Belanda secara mendadak pada 3 September 1860, sementara benteng belum selesai dibangun. Serdadu Belanda menyusuri Karang Jawa dan Ambarai dan langsung menuju Gunung Madang. Serdadu Belanda terkejut, ketika baru mendekati bukit itu serangan mendadak menyebabkan beberapa serdadu Belanda tewas. Sekali lagi serdadu Belanda mendekati bukit tetapi sebelum sampai serangan gencar menyambutnya, sehingga tentara Belanda mundur kembali ke benteng Amawang.

Keesokan harinya tanggal 4 September 1860 pasukan infantri dari batalyon ke 13 mengadakan serangan kedua kalinya. Serdadu Belanda ini dilengkapi dengan mortir dan berpuluh-puluh orang perantain untuk membawa perlengkapan perang dan dijadikannya umpan dalam pertempuran. Serdadu Belanda melemparkan 3 biji granat tetapi tidak berbunyi, dan disambut dengan tembakan dari dalam benteng. Di dalam benteng itu terdapat pula beberapa orang perantain yang lari memihak pasukan Pangeran Hidayat ketika terjadi pertempuran di Pantai Hambawang. Ketika Letnan de Brauw dan Sersan de Vries menaiki kaki Gunung Madang, dia hanya diikuti serdadu bangsa Eropah sedangkan serdadu bangsa bumi putera membangkang tidak ikut bertempur Letnan de Brauw kena tembak di pahanya, dan 9 orang serdadu Eropah terkapar kena tembak dari dalam benteng. Setelah Letnan de Brauw kena tembak, serdadu Belanda mundur dan kembali ke benteng di Amawang.

Serangan ketiga dilakukan beberapa hari kemudian setelah Belanda memperoleh bantuan dari Banjarmasin dan Amuntai. Pada tanggal 13 September 1860 Belanda melakukan kembali serangannya terhadap benteng Gunung Madang. Serangan ini dipimpin oleh Kapten Koch dengan perlengkapan meriam dan mortir. Demang Lehman dan Tumenggung Antaluddin mempersiapkan menunggu serangan Belanda sedangkan Pangeran Hidayat mengatur strategi untuk menghadapinya. Pertempuran ini terjadi dalam jarak dekat, tetapi Demang Lehman dan Tumenggung

¹⁵² Gusti Mayur, *op.cit.*, hal. 54.

Antaluddin dengan gagah berani menghadapinya. Ketika bunyi senapan dan meriam bergema, tiba-tiba roda meriamnya hancur kena tembakan. Kapten Koch mempertimbangkan untuk mundur kembali ke benteng Amawang.

Kegagalan serangan Kapten Koch ini tersebar sampai ke Banjarmasin, sehingga G.M. Verspyck memerintahkan Mayor Schuak menyiapkan pasukan infantri dari batalyon ke 13 yang terdiri dari 91 opsir bangsa Eropah. Tanggal 18 September 1860 Mayor Schuak membawa pasukan dengan dibantu Kapten Koch menyerang Gunung Madang. Belanda membawa sebuah howitser, sebuah meriam berat dan mortir.

Menjelang pukul 11.00 siang hari Demang Lehman memulai menyambut serdadu Belanda dengan tembakan. G.M. Verspyck yang berani mendekati benteng dengan pasukannya, kena tembak oleh anak buah Tumenggung Antaluddin, akhirnya mengundurkan diri membawa korban. Selanjutnya Kapten Koch memerintahkan memajukan meriam. Dengan jitu peluru mengenai serdadu pembawa meriam itu, dan jatuh terguling. Setelah pasukan meriam gagal, dilanjutkan dengan pasukan infantri mendapat giliran maju. Kapten Koch yang memimpin pasukan infantri maju, kena tembak di dadanya dan jatuh tersungkur.

Dengan jatuhnya Kapten Koch tersebut serdadu Belanda menjadi bingung dan kehilangan komando. Mereka dengan bergegas menggotong mayat Koch dan berlari meninggalkan medan pertempuran, langsung mengundurkan diri kembali ke benteng Amawang. Setelah serangan keempat ini gagal, Belanda mempersiapkan kembali untuk penyerangan yang kelima Demang Lehman dan Tumenggung Antaluddin juga mempersiapkan siasat apa yang diambil untuk menghadapi serangan secara besar-besaran keluar dan tidak terpusat bertahan dalam benteng saja. Demang Lehman mendapat bantuan dari Kiai Cakra Wati pahlawan wanita yang selalu menunggang kuda yang berasal dari daerah Gunung Pamaton.

Serangan kelima terjadi pada 22 September 1860. Belanda mempersiapkan dengan teliti, belajar dari kegagalan empat kali penyerangannya. Belanda mempersiapkan mendirikan bivak-bivak dan perlindungan pasukan penembak meriam dengan sistem pengepungan benteng Gunung Madang. Pertempuran baru terjadi keesokan harinya dengan tembakan meriam dan lemparan granat. Pada pagi hari itu pertempuran tidak begitu seru, tetapi menjelang pukul 11.00 malam hari, tiba-tiba Demang Lehman dan Tumenggung Antaluddin mengadakan serangan besar-besaran dengan meriam dan senapan. Tembakan itu terus menerus bersahutan sampai menjelang subuh. Karena serangan yang gencar itu Belanda kehilangan komando apalagi malam hari yang gelap gulita. Pasukan Belanda kucar kacir. Situasi yang tegang ini dipergunakan Demang Lehman dan Tumenggung Antaluddin beserta pasukannya keluar benteng dan menyebar keluar meninggalkan benteng, dan selanjutnya berpencar. Kiai Cakrawati meneruskan perjalanan ke Gunung Pamaton yang kemudian terlibat pula dalam pertempuran disini.

Alangkah kecewanya Belanda ketika dengan hati-hati memasuki benteng untuk menghancurkan kekuatan Demang Lehman dan pasukannya ternyata benteng sudah kosong, hanya ditemukan satu orang mayat yang ditinggalkan.

11. Pertempuran di Sekitar Martapura dan Gunung Pamaton

Dalam bulan Juni 1861 Pangeran Hidayat berada di Gunung Pamaton. Rakyat Gunung Pamaton menyambut kedatangan Pangeran Hidayat dan rakyat membuat benteng pertahanan sebagai usaha mencegah serangan Belanda yang akan menangkap Pangeran Hidayat. Sementara itu Pangeran Hidayat berunding dengan Mufti di Martapura. Perundingan pertama diadakan di Kalampayan dan yang kedua di dalam Pagar. Dalam perundingan itu disepakati rencana akan melakukan serangan umum terhadap kota Martapura. Para penghulu dan alim ulama akan mengerahkan seluruh rakyat melakukan jihad perang sambil mengusir Belanda dari bumi Banjar. Serangan umum ini direncanakan dilakukan pada tanggal 20 Juni 1861, tetapi rencana itu bocor ke tangan Belanda. Oleh karena itu sebelum tanggal 20 Juni Belanda secara tiba-tiba menyerang benteng Gunung Pamaton tempat pertahanan Pangeran Hidayat. Serangan Belanda itu dapat digagalkan dengan banyak membawa korban di pihak Belanda. Sementara itu di kampung Kiram, tidak jauh dari Gunung Pamaton dan di daerah Banyu Irang Pambakal Intal dan pasukan Tumenggung Gumar telah berhasil menghancurkan kekuatan Kopral Neyeelie. Mayat-mayat pasukan Belanda ini dihanyutkan di sungai Pasiraman. Pambakal Intal berhasil menguasai senjata serdadu Belanda ini.

Untuk menghadapi serangan umum terhadap Martapura ini Assisten Residen Mayor Koch yang merangkap menjadi Panglima di daerah Martapura meminta bantuan kepada Residen G.M. Verspyck di Banjarmasin. Residen segera mengirimkan bantuan dengan mengirimkan kapal perang van Os yang mengangkut meriam dan perlengkapan perang lainnya.

Serangan selanjutnya dilakukan oleh Mayor Koch secara besar-besaran terhadap benteng Gunung Pamaton, mendahului rencana serangan umum terhadap Martapura oleh rakyat yang bocor ke pihak Belanda. Rakyat seluruh daerah Martapura dan sekitarnya bangkit melakukan serangan sehingga hampir di seluruh pelosok terjadi pertempuran. Pertempuran terjadi pula di Kuala Tambangan. Tumenggung Gamar yang akan membawa pasukannya memasuki kota Martapura ternyata tidak berhasil, karena Belanda telah mempersiapkan pertahanan yang lebih kuat. Pambakal Mail terlibat perang menghadapi serdadu Belanda di sekitar Mataraman, sementara di Gunung Pamaton pertempuran terus berkobar. Pasukan Belanda bukan saja menyerang benteng Gunung Pamaton yang belum berhasil dikuasainya, tetapi juga membakar rumah-rumah penduduk yang tidak berdosa. Membinasakan kebun-kebun dan menangkap penduduk, sehingga penjara Martapura penuh sesak. Dalam pertempuran di Gunung Pamaton tersebut banyak sekali jatuh korban di kedua belah pihak. Letnan Ter Dwerde dan Kopral Grimm tewas kena tombak dan tusukan keris di perutnya. Serangan bulan Juni terhadap benteng Gunung Pamaton berhasil digagalkan oleh rakyat yang hanya memiliki

persenjataan sederhana. Memang benteng Gunung Pamaton saat itu dipertahankan oleh pimpinan perang yang gagah berani, selain Pangeran Hidayat terdapat pula Demang Lehman, Tumenggung Gamar, Raksapati, Kiai Puspa Yuda Negara. Selain itu terdapat pula pahlawan wanita Kiai Cakrawati yang selalu menunggang kuda yang sebelumnya ikut mempertahankan benteng Gunung Madang, dan saat itu ikut mempertahankan benteng Gunung Pamaton.

Dalam bulan Agustus 1861 Mayor Koch sekali lagi mengerahkan pasukannya menyerbu Gunung Pamaton. Sebelum serangan dilakukan. Mayor Koch menghancurkan semua ladang, lumbung padi rakyat, hutan-hutan, dengan harapan menghancurkan persediaan bahan makanan, dan menghancurkan hutan-hutan yang dapat dijadikan benteng pertahanan. Mayor Koch gagal dalam usahanya untuk menangkap Pangeran Hidayat dan pimpinan perang lainnya, karena sebelumnya benteng ini telah ditinggalkan, karena rakyat menggunakan siasat gerilya dalam usaha melawan Belanda yang memiliki persenjataan yang lebih baik. Perang gerilya adalah salah satu siasat untuk mengantisipasi musuh yang memiliki persenjataan yang lebih unggul.

12. Peristiwa Margasari

Pada saat sedang memuncak dan seluruh wilayah Kerajaan Banjar bergolak melawan Belanda, Belanda melakukan tindakan mengesahkan apa yang telah dilakukannya. Tindakan itu adalah mengeluarkan pengumuman penghapusan Kerajaan Banjar tertanggal 11 Juni 1860 yang ditanda tangani oleh Residen Surakarta F.N. Nieuwenhuijzen yang merangkap Komisaris Pemerintahan Belanda untuk afdeling Selatan dan Timur Kalimantan. Sejak itu Belanda seolah-olah menyelesaikan persoalan dalam negerinya sendiri bukan berhadapan dengan suatu bangsa yang berperang mengembalikan kemerdekaan bangsanya.

Sejak itu Belanda mengatur aparat pemerintahannya di daerah Kerajaan Banjar. Daerah-daerah yang telah dikuasanya ditetapkan Kepala-Kepala Distrik baru. Salah satu distrik baru itu adalah di Margasari. Kepala Distriknya ialah Kiai Jaya Di Pura. Kiai ini banyak membantu perjuangan rakyat dengan cara membantu bahan makanan dan juga informasi tentang aktivitas serdadu Belanda. Akhirnya sikapnya pro perjuangan rakyat ini diketahui Belanda dan dia diganti sebagai Kiai oleh Kiai yang mempunyai loyalitas tinggi terhadap Belanda.

Tanggal 14 Desember 1861 dilakukan timbang terima jabatan Kiai Margasari dengan Kiai baru Kiai Sri Kedaton. Pada tanggal 14 Desember 1861 Controleur Fuijck datang ke Margasari dikawal 5 orang serdadu. Malam hari tanggal 16 Desember Controleur Fuijck dan pengawalnya dibunuh dan rumahnya dibakar. Mendengar berita yang menyedihkan ini Residen G.M. Verspyck mengirim Letnan Croes dengan 20 orang serdadu ke Margasari. Letnan Croes mengejar pembunuh dengan menggunakan 5 buah jukung (perahu) ke Sungai Jaya anak Sungai Negara. Mereka berangkat pukul 11.00 siang. Para pejuang dibawah pimpinan Tagah Obang sudah menunggu di sungai sempit itu. Letnan Croes disergap para pejuang dengan

cara tiba-tiba dan terjadilah pergumulan di dalam perahu dan disekitar sungai sempit itu.

Tiga jam kemudian perahu itu kembali dengan membawa mayat Letnan Croes dan 14 orang serdadunya yang telah menjadi mayat, 8 orang diantaranya orang Eropah. Letnan Croes terkulai tangannya kena parang bungkul dan kemudian ditombak dengan serapang. Berita duka ini sampai ketelinga Residen G.M. Verspyck pada saat ia sedang bergembira karena kemenangannya menghancurkan perjuangan rakyat di rumah Asisten Residen di Martapura. Residen G.M. Verspyck segera kembali ke Banjarmasin dan memerintahkan kapal perang Boni dan Celebes mengejar para pembunuh.

13. Tumenggung Jalil Gelar Kiai Adipati Anom Dinding Raja

Sejak kecil dia diberi nama Jalil, penduduk kelahiran Pelimbangan Amuntai sekitar tahun 1840. dia seorang jaba bukan berdarah bangsawan. Sejak kecil dia dikenal pemberani dan pendekar dalam ilmu silat. Pada waktu berusia 20 tahun dia terlibat dalam perlawanan terhadap Belanda di Tanah Habang dan Lok Bangkai. Karena kepahlawanannya dia dikenal sebagai "*Kaminting Pidakan*".

Pada tahun 1859, Jalil yang diberi gelar oleh Pangeran Hidayat, Kiai Adipati Anom Dinding Raja telah menyusun kekuatan di Banua Lima. Jalil membuat pos-pos penjagaan di sekitar Babirik, Alabio dan Sungai Banar. Di sekitar Masjid Amuntai didirikan benteng. Di sungai dibuat rintangan-rintangan sehingga mempersulit bagi kapal yang akan lewat.

Pada awal Februari 1860, Belanda mengerahkan kapal-kapal perang Admiral van Kingsbergen dan kapal Bernet dengan beberapa ratus serdadu dan pasukan meriam dipimpin oleh Mayor G.M. Verspyck. Kapal perang itu akhirnya sampai di Alabio, dan seterusnya terpaksa menggunakan kapal atau perahu yang lebih kecil karena rintangan yang banyak di sungai. Pertempuran terjadi disekitar Masjid Amuntai. Dari masjid inilah keluar prajurit-prajurit rakyat yang tidak mengenal lelah menyerbu dengan hanya bersenjatakan tombak, parang bungkul dan mandau dengan meneriakkan "Allahu Akbar" menyerbu Belanda. Korban berjatuhan dan perang berhadapanpun terjadi. Semangat membela agama dan berjuang melawan Orang kafir dan mati dalam perang itu adalah semangat patriotisme yang tinggi yang mengisi dada setiap rakyat yang bertempur melawan penjajah Belanda. Benteng di sekitar masjid dipertahankan dengan kuat dibawah pimpinan Matia atau Mathiyassin pembantu utama Tumenggung Jalil dengan gagah berani mengamok menyerbu serdadu Belanda. Beratus-ratus yang menjadi suhada dalam pertempuran itu, 44 orang diantaranya dimakamkan di Kaludan. Rumah-rumah penduduk ikut menjadi korban terbakar serta kampung di sekitarnya menjadi saksi kepahlawanan rakyat Amuntai mempertahankan agama. Diantara kampung yang musnah adalah Kampung Karias, dan diantara rumah penduduk yang musnah terdapat rumah Tumenggung Jalil. Di bekas benteng yang hancur, dijadikan Belanda bivak, benteng baru terletak di pertemuan Batang Balangan dan sungai Tabalong. Pertempuran ini terjadi pada 9 Februari 1860.

Pasukan-pasukan Pangeran Hidayat yang tersebar di sekitar Barabai bergabung dengan pasukan Tumenggung Jalil dan dapat menahan gerakan serdadu Belanda di sekitar Pantai Hambawang. Dalam pertempuran yang terjadi di Lampihong diantara serdadu Belanda yang menjadi korban adalah Kapten de Jong. Pertempuran ini menyebabkan serdadu Belanda mundur.

Bantuan serdadu Belanda kemudian diangkut dengan kapal perang Boni pada tanggal 15 Mei 1860 menuju dan memudiki sungai Tabalong. Sebelum mencapai daerah Tabalong, serdadu Belanda menghadapi serbuan rakyat di sepanjang sungai yang dilewati. Sesampai di daerah Tabalong, terjadi pertempuran dengan Pasukan Tumenggung Jalil. Perlawanan rakyat cukup sengit menyebabkan serdadu Belanda terpaksa mundur ke daerah Kalua dan Amuntai. Baru bulan Juni 1860 Belanda berhasil menduduki daerah Tabalong. Serdadu Belanda menghadapi perlawanan dari pasukan Hidayat, pasukan Jalil dan pasukan Pangeran Antasari, Tumenggung Surapati yang berpusat di Tanah Dusun.

Tumenggung Jalil kemudian membuat benteng di Batu Mandi dan dari benteng ini dapat memutuskan hubungan serdadu Belanda antara Barabai dan Lampihong. Benteng ini terletak di atas sebuah bukit dan di sekitarnya diberi rintangan-rintangan, seperti parit-parit, lubang perangkap, tali jerat dan potongan pohon kayu besar yang sewaktu-waktu dapat digulingkan dari atas bukit. Benteng ini dipercayakan kepada Penghulu Mudin.

Ketika serdadu Belanda menyerbu dan menaiki bukit yang dijadikan benteng ini, banyak sekali korban dari pihak Belanda, karena jebak yang dibuat. Diantara yang jatuh korban adalah pimpinan penyerbuan ini Sersan van de Bosch. Karena gagal menaiki benteng tersebut, serdadu Belanda menembaki benteng ini dengan meriam dari bawah. Sementara itu Pangeran Antasari memperkuat benteng Tabalong. Pangeran Antasari menaikkan bendera di atas benteng itu, yaitu bendera merah dengan dua buah keris bersilang.

Benteng Batu Mandi dipersiapkan dengan sungguh-sungguh oleh Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayat. Disamping itu terdapat pula Pangeran Syarif Umar, ipar Pangeran Hidayat, Pangeran Usman kemenakan Pangeran Hidayat. Sedangkan Tumenggung Jalil mempersiapkan pertahanan di sepanjang sungai Balangan. Sebelum sampai ke benteng ini, terdapat kubu-kubu pertahanan di Batang Balangan. Di daerah Batang Alai terdapat kekuatan dibawah pimpinan Demang Jaya Negara Seman dan Kiai Jayapati. Pusat kekuatan telah dibagi dan dipencar-pencar Pangeran Antasari tetap bertahan di sekitar Amuntai, Kalua dan Tabalong, sedangkan Jalil berada di pusat kekuatan di Pasimbi, yang berusaha menghambat gerakan serdadu Belanda menuju Batu Mandi. Kubu-kubu pertahanan Jalil selain di Pasimbi, juga terdapat di Lampihong, Layap, Muara Petap dan lain-lain.

Ketika serdadu Belanda sampai ke benteng Batu Mandi pada tanggal 13 Oktober 1860 ternyata benteng itu telah dikosongi. Belanda sangat kecewa karena sebelum mencapai benteng Batu Mandi, serdadu Belanda menghadapi perlawanan yang gencar dari segala pelosok, ternyata benteng itu telah kosong.

Garis pertahanan Pangeran Antasari antara benteng Pengaron, benteng Tundakan dan Gunung Tongka (di daerah Barito) merupakan basis perjuangan yang tak mudah ditaklukkan Belanda. Tumenggung Jalil setelah terpukul di Banua Lima, kemudian menggabungkan diri ke benteng Tundakan bersama-sama Tumenggung Baro dan Pangeran Maradipa. Ketika terjadi pertempuran menghadapi pasukan serdadu Belanda yang menyerbu benteng Tundakan, banyak korban berjatuhan kedua belah pihak. Benteng di dipertahankan dengan sekuat tenaga oleh para pejuang tak kenal menyerah. Mati syahid adalah idaman mereka dalam setiap pertempuran menghadapi Orang kafir Belanda. Pertempuran itu terjadi pada 24 September 1861. Tumenggung Jalil mempertahankan benteng itu bersama-sama Pangeran Antasari dan tokoh pejuang lainnya. Benteng Tundakan hanya dipertahankan dengan 30 pucuk meriam dan senapan jatuh lebih kecil dibanding dengan persenjataan Belanda. Meskipun dengan persenjataan yang kecil, tetapi dengan semangat juang tak kenal menyerah, akhirnya Belanda terpaksa mundur dan dapat dihalau dari tempat pertempuran. Dengan demikian benteng Tundakan dapat dipertahankan dan diselamatkan. Setelah usai ternyata Tumenggung Jalil tewas sebagai kesuma bangsa. Mayatnya ditemukan dalam tumpukan tumpukan bangkai-bangkai serdadu Belanda, jauh di luar benteng. Barulah diketahui bahwa ketika perang sedang berkecamuk, Tumenggung Jalil mengamok ke tengah-tengah musuh, dan dia korban bersama-sama serdadu Belanda yang dibunuhnya. Tumenggung Jalil menjadi Syahid, seorang putera bangsa terbaik telah hilang, namun semangat juang tidak pernah punah.

Kebencian Belanda kepada Tumenggung Jalil sebagai musuhnya yang paling ditakutinya, berusaha mencari dimana kubur Tumenggung ini. Akhirnya penghianat perjuangan memberi tahu letak kubur tersebut. Kubur itu dibongkar kembali oleh kaki tangan Belanda, tengkoraknya diambil dan disimpan di Negeri Belanda, sisa mayatnya dihancurkan dan dia pejuang bangsa yang tidak mempunyai kubur.

14. Penghulu Rasyid dan Gerakan Beratib Baamal

Rasyid dilahirkan dikampung Telaga Itar, Kecamatan Kelua sekarang. Ayahnya bernama Ma'ali penduduk kampung Telaga Itar. Kapan Rasyid dilahirkan tidak diketahui, hanya dapat diperkirakan sekitar tahun 1815. Perkiraan ini didasarkan pada perkiraan bahwa pada waktu terjadi Perang Banjar dan perjuangan yang menghangat di seluruh Banua Lima tahun 1860 sampai tahun 1865, Rasyid berumur 50 tahun, sejak kecil ia mempunyai ciri-ciri kepemimpinan dan mempunyai kepribadian yang tinggi. Pengetahuan agama Islam yang dimilikinya disertai dengan alamiah yang kuat, maka Rasyid dijadikan sebagai pemimpin agama dengan sebutan Penghulu, maka selanjutnya ia dikenal sebagai Penghulu Rasyid.

Penghulu Rasyid adalah salah seorang diantara sejumlah ulama yang bangkit bergerak berjuang mengangkat senjata melawan penjajah Belanda. Sebagai seorang pimpinan agama Penghulu Rasyid tergerak hatinya untuk patriotismenya untuk membela negara Kerajaan Banjar yang dijajah Belanda. Penghulu Rasyid dan para ulama lainnya mengorbankan semangat juang, sebagai gerakan *Baratib Baamal*.

Gerakan Baratib Baamal ini meliputi hampir seluruh Banua Lima dan wilayah yang sekarang menjadi daerah Hulu Sungai Tengah dan Utara dengan pusat kegiatan di masjid dan langgar. Pimpinan dari gerakan ini para ulama yang dikenal dengan sebutan *Tuan Guru*.

Secara etimologis kata *Baratib Baamal* terdiri dari dua kata, yaitu *baratib* yang berarti *berdzikir* dan *Baamal* yaitu melakukan perbuatan atau *berdoa* untuk memohon *kebaikan*. Berdasarkan kenyataan aksi Baratib Baamal lebih cenderung dianggap sebagai khalwat dalam usaha memohon keselamatan untuk memerangi Orang kafir.¹⁵³

Praktik Baratib Baamal dilakukan sebagai berikut : Pengikut yang terdiri dari kaum muslimin berkumpul di masjid atau langgar dengan dipimpin oleh seorang ulama, yang disebut Tuan Guru. Jamaah ini bersama-sama membaca dzikir '*La ilaha illa Allah*' disertai kalimat puji-pujian dan seterusnya diucapkan sebagai berikut : *La ilaha illa Allah, La ilaha illa Allah, dengan menadah tangan keatas, rizki minta dimurahkan, bahaya minta dijauhkan, umur minta dipanjangkan serta iman.*

La ilaha illa Allah, dengan menadah tangan keatas, rezeki minta dimurahkan, bahaya minta dijauhkan, umur minta panjangkan serta iman.

La ilaha illa Allah, tumat di Mekkah ke madinah, di situ tempat rasulullah.

La ilaha illa Allah, tumat di Mekkah ke Madinah, di situ tempat Siti Fatimah.

La ilaha illa Allah, hati yang siddiq, ya maulana, ya Muhammad Rasul Allah.

La ilaha illa Allah, hati yang mu'min bait Allah.

La ilaha illa Allah, Nabi Muhammad hamba Allah.

La ilaha illa Allah, Muhammad sifat Allah.

La ilaha illa Allah, Muhammad aulia Allah.

La ilaha illa Allah, Muhammad Rasul Allah.

La ilaha illa Allah, Muhammad Rasul Allah.

La ilaha illa Allah, maujud Allah.¹⁵⁴

Pratek berzikir itu berlangsung lama, sehari-hari. Dalam kehusyuan mereka tenggelam dalam keasyikan mengingat Allah. Puji-pujian itu diucapkan berirama, mula-mula bernada rendah, makin lama makin tinggi, dan keras berupa jeritan yang histeris. Dalam situasi yang demikian mental perjuangan berhasil ditingkatkan sehingga mereka siap untuk menyerbu musuh tanpa menghiraukan risiko maut yang dihadapi.

Jamaah dzikir ini memakai seragam jubah putih kecuali pimpinanya Tuan Guru yang memakai jubah kuning. Pengaruh amaliah dzikir ini sangat mendalam dan mempengaruhi jiwa raga manusia yang melakukannya.

Sangat mungkin sekali jamaah Baratib Baamal ini adalah salah satu jenis Tarikat yang memang sudah lama berkembang didalam daerah Kerajaan Banjar.

¹⁵³ P.J. Veth, *et al*, *Het Baratib Baamal in Bandjermasin*, TNI Tweede Deel (Zalt-Bommel Bijjoh Noman en Zoon), 1869, hal. 200. Lihat pula A. Gazali Usman, "Pengaruh Pengajaran Tasawuf dan Dzikir terhadap Rakyat Banjar dalam Usaha Menghadapi Kolonialisme Belanda", Makalah pada Seminar Sejarah Nasional ke III di Yogyakarta, 1985, hal. 98.

¹⁵⁴ A. Gazali Usman, *loc.cit*.

Tarikat ini adalah *Tarikat Naqsabandiyah*. Pelaksanaan khalwat tarikat ini dengan cara : (1) menyendiri atau berkelompok ditempat yang sunyi dan sepi, (2) mengurangi nafsu makan / minum, (3) membaca dzikir, (4) meninggalkan nafsu birahi, (5) menjaga kesucian badan, (6) pakaian serba putih, (7) memotong rambut, (8) mengurangi tidur, (9) memperbanyak ibadah dan (10) taat terhadap petunjuk pimpinan/Tuan Guru. Dengan cara praktik khalwat ini membawa orang senantiasa mengingat Allah, lidah, hati, perasaan, pandangan, penglihatan dan seluruh tubuhnya tidak yang lain kecuali Allah. Dalam perasaan itu dirinya sudah tidak ada lagi, dia sudah fana. Hal ini berarti bahwa telah mampu menyatukan dirinya dengan Allah, dalam bentuk *tauhidul af'al, sifat dan zat*. Penaruh ajaran Syekh Abdul Hamid Abulung dengan aliran *wahdatul wujud*¹⁵⁵ bukanlah yang tidak mungkin juga mempengaruhi gerakan Baratib Baamal ini karena ajaran ini membawa pikiran manusia dan dunia atau manusia dan Tuhan itu tidak terpisahkan menjadi satu, dalam kehidupan ruhani yang tinggi fana. Aliran Wahdatul wujud memang sudah berkembang dalam wilayah kerajaan Banjar sejak abad ke- 18.

15. Pertempuran di Banua Lawas

Pimpinan Baratib Baamal pimpinan Penghulu Abdul Rasyid dan Haji Bador di Banua Lawas pertama kali terlibat dalam pertempuran menghadapi serdadu Belanda di Habang pada tanggal 8 Oktober 1861, pertempuran kedua di Krimiang dan yang ketiga pada tanggal 18 Oktober 1861 di Banua Lawas. Anak buah Haji Bador di Banua Lawas memusatkan kekuatannya di Masjid, jumlah ratusan orang. Sambil mengucapkan dzikir dan parang di tangan mereka maju menyerang serdadu Belanda tanpa ragu dan penuh keberanian. Setelah terjadi perang bergumul dan berhasil menewaskan 3 orang serdadu Belanda, Kapten Thelen mundur ke Kalua dan minta bantuan serdadu Belanda di Amuntai. Serdadu dari Amuntai datang menyerbu, tetapi setelah sampai di masjid Kalua, serdadu Belanda mendapat serangan gencar dengan tembakan senapan dan lila dari pengikut Haji Bador. Besok harinya terjadi lagi pertempuran di Banua Lawas. Pertempuran sengit ini mengakibatkan banyak jatuh korban. Tidak kurang dari 160 orang pengikut Haji Bador diantaranya tewas sebagai suhada.

Pertempuran terakhir di Banua Lawas terjadi pada 15 Desember 1865. Belanda mengepung Pasar Arba Banua Lawas dengan menggunakan kapal perang Van Os melalui Sungai Anyar. Serdadu dari Amuntai mengepung dari segala penjuru. Belanda menggunakan segala cara untuk menaklukkan dan melumpuhkan perjuangan Penghulu Abdul Rasyid. Diantara cara itu adalah dengan mendatangkan pasukan Dayak Maanyan dari Tamiang Layang dibawah pimpinan Tumenggung Jailan yang bergelar Tumenggung Jaya Kanti. Tumenggung Jailan ini terkenal berani seperti juga Suta Ono yang berjasa membantu Belanda untuk melumpuhkan perjuangan Pangeran Antasari. Taktik lain adalah dengan memberi pengumuman

¹⁵⁵ A. Gazali Usman, *ibid.*, hal. 97.

kepada barang siapa yang berhasil memotong kepala Penghulu Abdul Rasyid dengan imbalan hadiah f 1.000,- disamping pembebasan pajak 7 turunan.

Kubu pertahanan Penghulu Abdul Rasyid dibumi hanguskan oleh Belanda. Banyak sekali korban berjatuh gugur sebagai kesuma bangsa menjadi suhada. Penghulu Abdul Rasyid tumitnya kena tembak sehingga dia terpaksa menghindarkan diri dari medan pertempuran. Dalam persembunyiannya dia masih sempat membunuh beberapa orang serdadu Belanda dan pengikutnya yang tersesat.

Tergiur hadiah f 1.000,- dan pembebasan pajak semalam 7 turunan, teman seperjuangan dan keluarganya sendiri Teja Kusuma mengkhianati perjuangan bangsanya dan memenggal kepala Penghulu Abdul Rasyid yang sudah tidak berdaya lagi.

Menurut penuturan orang-orang setempat yang mengetahui dari cerita sebelumnya menjelaskan bahwa puteri Penghulu Abdul Rasyid sendiri membela kematian ayahnya dan berhasil menembak mati Teja Kusuma sehingga berhasil merebut kepala ayahnya yang hanya kepalanya saja. Tetapi setelah kepala tersebut diambilnya dia pingsan melihat ayahnya yang hanya kepalanya saja. Akhirnya Kepala Penghulu Abdul Rasyid tersebut berhasil direbut oleh orang-orang yang menginginkan hadiah f 1.000,- dan menyerahkannya kepada Belanda.

Jenazah Penghulu Abdul Rasyid dimakamkan tanpa kepala di dekat Masjid Pasar Arba. Masjid ini termasuk yang tertua dan didirikan oleh Penghulu Abdul Rasyid semasa hidupnya bersama 4 orang tokoh masyarakat saat itu masing-masing bernama Datuk Seri Panji, Datuk Langlang Buana dan Datuk Sari Negara.¹⁵⁶

16. Pertempuran di Teluk Selasih

Kalau di Banua Lawas Gerakan Baratib Baamal dipimpin oleh Penghulu Abdul Rasyid dan Haji Bador, maka di Kampung Teluk Selasih tidak jauh dari Amuntai gerakan itu dipimpin oleh Penghulu Buyasin dan Abdul Gani. Sebagaimana Gerakan Baratib Baamal pimpinan Penghulu Abdul Rasyid, maka di Kampung Teluk Selasih pun mempunyai tujuan yang sama, membangkitkan semangat juang fi sabilillah, perang sabil dan cita-cita mati syahid. Pakaian mereka berjubah putih kecuali pimpinannya berjubah kuning.

Setelah Belanda mencium adanya gerakan ini, Belanda merundingkan dengan Regent Amuntai Danuraja. Regent Amuntai Danuraja menyanggupi akan menyelesaikannya. Regent membawa 300 anak buah bersenjatakan senapan dan lila dan akan berusaha menangkap Penghulu Suhasin.

Pada tanggal 9 November 1861 jam 02.00 petang Regent mendekati Teluk Selasih dan sambut dengan tembakan oleh pengikut Penghulu Suhasin. Diantara pengikut Abdul Gani ada yang menyusup dari belakang sehingga terjadi pergumulan. Salah seorang diantaranya melompat menombak Regent Danuraja. Regent tewas di tempat kejadian, begitu pula anak buah Regent juga kena

¹⁵⁶ Anggraini Antemas, *Orang-Orang Terkemuka dalam Sejarah Kalimantan*, B.P. Anggraini Features, Banjarmasin, 1971, hal. 51.

tombak. Dengan kematian Regent Danuraja yang sudah tua ini maka pertempuranpun usai. Belanda kemudian mengangkat Tumenggung Jaya Negara sebagai Regent yang baru.

17. Pertempuran Jatoh

Gerakan Baratib Baamal di daerah Jatoh dipimpin oleh Penghulu Muda yang selalu berbaju jubah kuning sedangkan anak buahnya yang menjadi jamaah dzikir memakai jubah putih. Ketika Belanda memperoleh informasi tentang Gerakan Baratib Baamal di Jatoh, pada tanggal 5 Desember 1861 Belanda menyerbu Jatoh dibawah pimpinan Van der Heyden, Koch dan opsir lainnya. Ketika serdadu Belanda sampai di Jatoh, mereka disambut dengan serangan secara tiba-tiba dari pasukan Penghulu Muda. Dengan pekik dan dzikir "*Allahu Akbar*" mereka menyerbu dengan parang terhunus. Serbuan pertama ini yang keluar secara tiba-tiba dari semak-semak kebun lada, jatuh menjadi syahid ketika Belanda memuntahkan meriamnya. Tetapi sangat mengejutkan serangan selanjutnya berdatangan juga secara tiba-tiba seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan teman mereka sebelumnya yang telah menjadi syahid. Pergumulan terjadi. Penembak meriam kena tombak begitu pula Van Haldren luka parah dan beberapa serdadu Belanda bergelimpangan kena tombak dan parang. Penghulu Muda yang berjubah kuning dan memakai serban putih mengayunkan tombak ke arah Van der Heyden, dapat diselamatkan oleh Koch. Tetapi justeru Koch yang kena tombak dan keris dari Penghulu Muda, Koch tewas. Pertempuran usai setelah kedua belah pihak berjatuhan korban. Pertempuran selanjutnya terjadi pada 26 Desember 1861, dan dalam pertempuran ini Van Haldren tewas.

Gerakan Baratib Baamal berkembang dengan pesat di daerah Amuntai – Balangan – Tabalong dan menjadi pusat perlawanan yang sangat ditakuti Belanda. Untuk mengantisipasi gerakan ini Belanda mengirim para ulama dan mufti yang memihak kepada Belanda untuk mencegah agar rakyat jangan ikut melawan terhadap pemerintah Belanda. Tetapi justeru sebaliknya karena ulama-ulama yang dikirim oleh Belanda ini justeru memberi restu dan doa terhadap mereka yang berjuang melawan Belanda.

18. Perang Barito Sampai Hancurnya Pagustian

Hasil pertemuan bulan September 1859 antara Pangeran Hidayat, Pangeran Antasari, Kiai Demang Lehman dan tokoh perjuangan lainnya di daerah Kandungan menetapkan bahwa Pangeran Antasari memperkuat pertahanan di daerah Dusun Atas, sedangkan Tumenggung Jalil memperkuat pertahanan di Banua Lima, bersama Pangeran Hidayat. Di daerah Martapura dibawah pimpinan Demang Lehman dan tokoh-tokoh pimpinan masyarakat lainnya.

Pangeran Antasari bermukim di daerah suku Dayak Siung Dusun Atas mendampingi Pimpinan suku Dayak Siung Tumenggung Surapati.

Komandan kapal "*Onrust*" Van del Velde mengantarkan Surapati melihat-lihat meriam, begitu pula anak buah Surapati diajak melihat-lihat kapal perang itu.

Menurut kesaksian Haji Muhammad Talib yang selamat dengan melarikan diri bersembunyi menceritakan bahwa kejadian terjadi pada siang hari 26 Desember 1859. Serdadu Belanda tidak merasa curiga dan mereka tidak mempunyai senjata, kecuali Van del Velde yang memiliki pedang tetap dipinggangnya. Letnan Bangert juga tidak bersenjata.

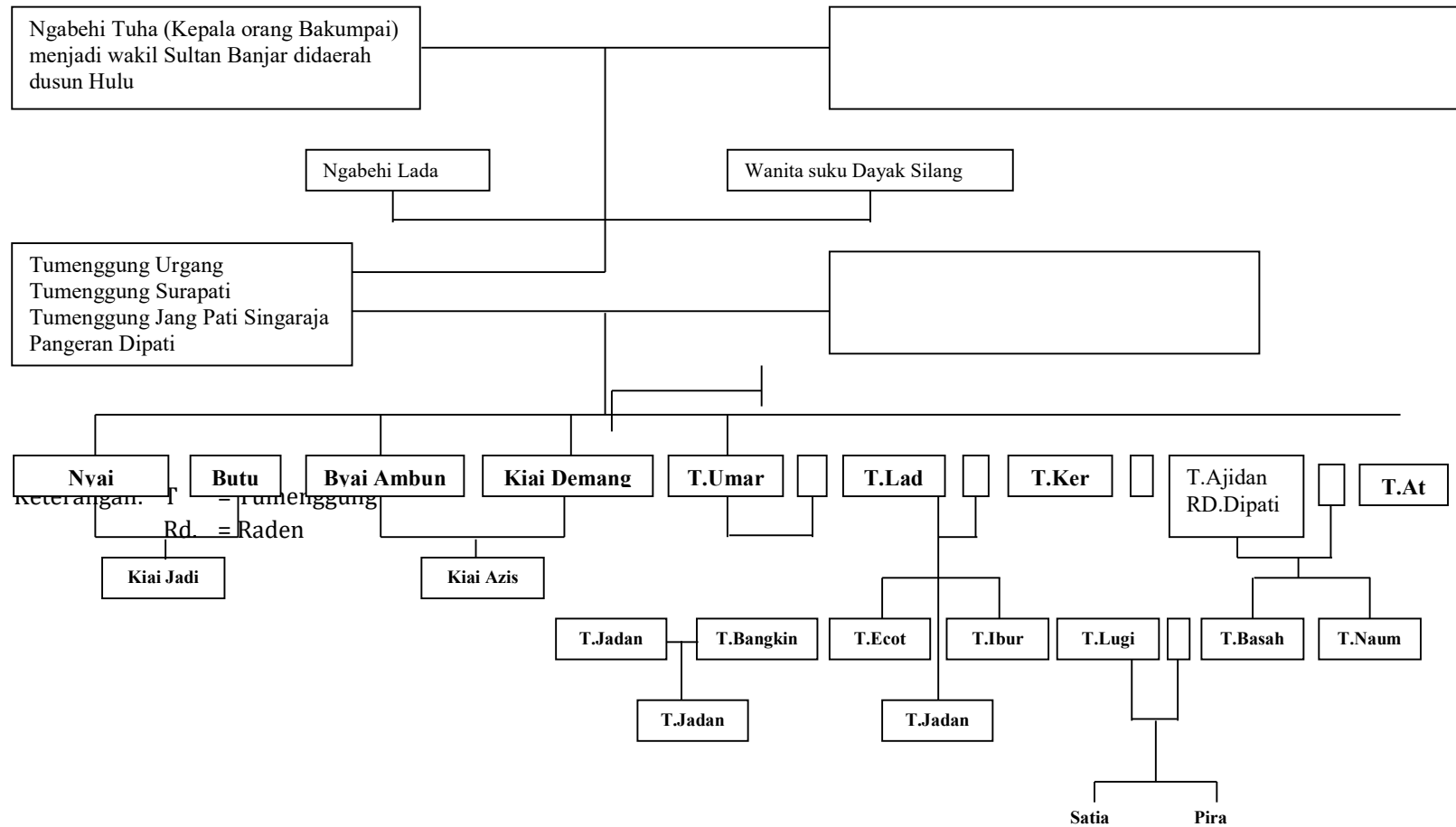
Anak buah Surapati sudah tidak sabar lagi dan ketika Gusti Lias dengan perahu berada disisi kapal, Ibon putera Surapati menghunus mandaunya sambil berteriak teriakan perang dan ini berarti perang '*amok*' dimulai. Mandau Ibon mengenai Letnan Bangert dan jatuh tersungkur. Surapati menghunus mandaunya terhadap Van der Velde dan pertarungan pun terjadi dan berakhir dengan menjadi mayat Van der Velde. Selanjutnya kesaksian Haji Muhammad Thalib mengatakan bahwa teriakan perang itu menyebabkan anak buah Surapati berdatangan dengan perahunya mendekati kapal "*Onrust*". Dalam waktu sekejap sekitar 400-500 orang anak buah Surapati telah berada di atas kapal dan pergumulan perkelahian terjadi. Dalam hal ini meriam dan senapan tidak berbunyi karena perkelahian terjadi dalam jarak dekat.

Para pemimpin perang lainnya seperti Tumenggung Aripati, Tumenggung Maas Anom, Tumenggung Kertapati ikut mengamok di atas kapal *Onrust* tersebut. Perkelahian itu berlangsung hampir satu jam. Semua opsir dan serdadu Belanda yang berjumlah 90 orang berhasil ditewaskan dan kapal perang "*Onrust*" berhasil ditenggelamkan. Yang kemudian diketahui selamat adalah penghubung perundingan Haji Muhammad Thalib yang kemudian menceritakan apa yang terjadi atas kapal "*Onrust*" dan baru 31 Desember 1859 sampai Banjarmasin. Semua isi kapal perang itu sebelum ditenggelamkan diangkut, senapan, lila, meriam dan mesiu yang kemudian digunakan Tumenggung Surapati dan Pangeran Antasari untuk menembaki kapal-kapal Belanda yang lewat.

Menurut catatan perang Belanda, bahwa kerugian yang paling besar diderita Belanda adalah dalam *Perang Banjar*, karena kapal perang berisi senjata beserta serdadunya terkubur bersama-sama ke dasar sungai Barito. Tenggelamnya kapal perang "*Onrust*" sangat mengejutkan dan menggemparkan pihak Belanda, sebaliknya menimbulkan semangat juang yang tinggi. Tumenggung Surapati adalah seorang putera suku Dayak Siung dilahirkan dilembah Sungai Kahayan, sekarang termasuk wilayah Kalimantan Tengah. Sebagai seorang kepala suku, dia terkenal dengan gelar Kiai Tumenggung Pati Jaya Raji. Tumenggung Surapati berjuang bersama-sama Pangeran Antasari dan dibantu oleh tokoh-tokoh pejuang lainnya seperti Tumenggung Singapati, Tumenggung Kartapata, Tumenggung Mangkusari dalam perang Barito untuk menghancurkan kekuasaan kolonialisme Belanda di daerah itu. Merekalah tokoh-tokoh pejuang yang menggerakkan rakyat Barito melawan Belanda dalam Perang Barito (1865-1905).¹⁵⁷

¹⁵⁷ Anggraini Antemas, *ibid.*, hal. 61.

SILSILAH TUMENGGUNG SURAPATI



Tumenggung Surapati dengan anak buahnya suku Dayak Siung telah memeluk agama Islam. Kedua tokoh pimpinan perjuangan ini diikat dalam hubungan kekeluargaan dengan mengawinkan putera Tumenggung Surapati yang bernama Tumenggung Jidan dengan cucu Pangeran Antasari. Tumenggung Surapati dengan anak buahnya bersama Pangeran Antasari telah mengangkat sumpah bersama-sama berjuang menghalau penjajah Belanda. Mereka akan berjuang tanpa pamrih dan tanpa kompromi dengan tekad : *Haram Manyarah Waja Sampai Kaputing*.

Belanda berusaha dengan segala taktik liciknya untuk memikat hati Tumenggung Surapati agar Tumenggung ini tidak melakukan perlawanan terhadap Belanda dan bersedia membantu Belanda untuk menangkap Pangeran Antasari. Tumenggung Surapati sebagaimana suku Dayak lainnya sangat setia pada sumpah yang telah diucapkannya dan apapun yang akan terjadi mereka tidak akan mengkhianati sumpah tersebut. Siasat licik Belanda akan dibalas dengan siasat licik pula, dimikian tekad Tumenggung Surapati dengan anak buahnya.

Belanda mempunyai keyakinan bahwa siasatnya berhasil apalagi Tumenggung Surapati telah bersahabat dengan Belanda sebelumnya. Tumenggung Surapati pernah menjamu dengan segala kebesaran dan penuh keramahan terhadap rombongan Civiel Gezaghebber dan Komandan Serdadu Marabahan Letnan I Bangert dan stuurman kapal Cipanas J.J Meyer pada tahun 1857 dua tahun sebelum terjadinya Perang Banjar. Persahabatan dengan Belanda ini menimbulkan kebencian yang mendalam di hati Tumenggung Surapati setelah serdadu Belanda membakar rumah dan kebun rakyat yang tidak berdosa setelah terjadi Perang Banjar. Kebaikan hati Belanda hanya tipu muslihat untuk memikat rakyat agar berpihak pada penjajah.

Perang Barito terjadi di sepanjang Sungai Barito dan sekitarnya. Perang ini merupakan bukti kebencian seluruh rakyat dalam wilayah Kerajaan Banjar terhadap penjajah Belanda. Perang ini adalah Perang Banjar yang terjadi di sepanjang Sungai Barito, dan diawali dengan penyerbuan gudang garam Belanda di Pulau Petak, sebelah Hulu dari Kuala Kapuas. Gudang Pulau Petak terletak di tepi sungai sedikit lebih tinggi dari kampung di sekitarnya. Gudang garam ini dijaga oleh Letnan Bichon dengan 60 orang serdadu Belanda. Kapal perang "*Monterado*" ikut berjaga-jaga di sungai. Pada malam tanggal 24 ke 24 Agustus 1859 Pulau Petak diserbu oleh Tumenggung Surapati dan Pembakal Sulil. Letnan Bichon tewas kena tobak dalam penyerangan ini.

Belanda berusaha membujuk Tumenggung Surapati agar membantu Belanda menangkap Pangeran Antasari. Setelah usaha pertama gagal, pada bulan Desember 1859 kembali kapal "*Onrust*" menuju Muara Teweh. Kapal Onrust berhenti di Lontotour sekitar 3 km sebelum sampai Muara Teweh, dan dari sini Belanda mengirim utusan agar Tumenggung Surapati berkenan datang di kapal "*Onrust*".

Pada tanggal 26 Desember 1859 dengan sebuah perahu besar dan diiringi dengan beberapa perahu kecil, Perahu-perahu tersebut tidak beratap. Surapati dengan 15 orang pengiring yang terdiri dari keluarga dan panakawan. Perahu-perahu lainnya berlabuh di sebelah hulu dari kapal Onrust. Surapati disambut oleh Letnan Bangert yang sudah lama kenal karena pernah menjadi tamu Surapati pada tahun 1857. Surapati masuk ke dalam kamar untuk berunding disertai 4 orang anak dan

menantunya. Sepuluh panakawan lainnya beramah tamah bersama para opsir di atas dek kapal. Dalam perundingan itu Belanda menjanjikan hadiah-hadiah antara lain memperlihatkan surat pengangkatan sebagai Pangeran. Keramah-tamahan yang diperlihatkan dan sikap yang meyakinkan menyebabkan Letnan Bangert merasa puas akan keberhasilan misinya. Dalam perundingan itu Letnan Bangert didampingi oleh Haji Muhammad Thalib sebagai juru runding dan perantara yang menghubungkan pihak Belanda dengan Tumenggung Surapati. Haji Muhammad Thalib sebelumnya sudah curiga dengan perahu-perahu yang ditumpangi Surapati dengan pengikutnya. Perahu-perahu tersebut tidak memakai atap, sedangkan kebiasaannya perahu mempunyai atap. Tetapi pihak Belanda tidak mengerti dengan kebiasaan orang-orang Dayak dengan perahu tanpa atap tersebut, karena Surapati dengan pengikutnya memperlihatkan keramah tamahannya. Perahu tanpa atap suatu pertanda sikap permusuhan dan sangat menggembirakan bagi seluruh rakyat yang berjuang melawan Belanda.

Akibat kekalahan yang sangat memalukan ini pihak Belanda mengirim serdadu sebagai ekspedisi dengan perintah bunuh semua Orang Dayak dan Melayu (Banjar) yang membantu menenggelamkan kapal perang "*Onrust*". Untuk keperluan ini G.M. Verspyck memberangkatkan kapal perang "*Suriname*", "*Boni*" dan beberapa kapal pembantu pada tanggal 27 Januari 1860. Kapal ini membawa 300 serdadu bersenjata lengkap, diantaranya 10 serdadu Eropah, beberapa pucuk meriam dan mortir. Pimpinan ekspedisi Letnan Laut de Haes melaksanakan perintah dengan membabi buta, membakar semua kampung yang dilewati dan membunuh rakyat yang ditemukan. Ketika sampai di Lontotour ternyata kampung itu telah dikosongkan penduduk. Kapal terus berlayar ke arah hulu sambil menembaki tempat-tempat yang dicurigai. Kapal *Suriname* dan *Boni* melewati kampung Leogong yang letaknya agak rendah. Dengan tidak diduga Belanda, meriam yang beratnya 30 pond menembak ke arah lambung kapal *Suriname*. Korbanpun berjatuhan. Kapal itupun miring karena tembakan itu mengenai kedua ketel (boiler) sehingga mesin kapalnya pun mati. Baru menjelang tengah malam barulah kapal itu dihanyutkan dan ekspedisi itu pulang tanpa membawa hasil apa-apa. Pertempuran di Leogong ini terjadi pada 11 Februari 1860.

Pada 22 Februari 1860, kembali kapal perang *Celebes* dan *Monterado* dikirim menyerang benteng Leogong. Benteng ini dikepung dengan dua buah kapal perang di hulu dan disebelah hilir serta 200 serdadu didaratkan. Pertempuran sengit pun terjadi sepanjang sungai Barito. Menyadari terhadap pengepungan ini Pangeran Antasari dan Tumenggung Surapati melakukan siasat mundur untuk menghindarkan banyaknya jatuh korban. Perang ini berakhir tanpa hasil yang memuaskan bagi Belanda.

Untuk mengantisipasi kapal-kapal perang Belanda, Tumenggung Surapati dan Pangeran Antasari mengerahkan beratus-ratus perahu dengan sebuah perahu komando yang besar. Pada perahu besar ini dipancarkan bendera kuning. Armada perahu ini disertai pula dengan beberapa buah lanting *kotta-mara* (*katamaran*) semacam panser terapung. Bentuk *kotta-mara* ini sangat unik karena dibuat dari susunan bambu yang membentuk sebuah benteng terapung. *Kotta-mara* dilengkapi dengan beberapa pucuk meriam dan lila.

Selain kapal perang “Onrust” yang berhasil ditenggelamkan pada 26 Desember 1859, sebelumnya yaitu pada bulan Juli 1859 juga ditenggelamkan kapal perang Cipanas dalam pertempuran di sepanjang Barito di sekitar pulau Kanamit.

19. Demang Lehman Dan Pangeran Hidayat Dalam Proses Penangkapan

Segala siasat dan cara telah dilakukan Belanda untuk memikat Pangeran Hidayat dan Demang Lehman agar menghentikan perlawanannya terhadap pemerintah Belanda, tetapi semua siasat itu tidak berhasil. Cara lain yang dilakukan Belanda adalah berusaha untuk menangkap kedua tokoh pejuang itu hidup atau mati, dan mengeluarkan pengumuman kepada seluruh rakyat agar dapat membantu Belanda menangkap kedua tokoh itu dengan imbalan yang menggiurkan. Imbalan yang dijanjikan adalah dengan mengeluarkan pengumuman harga kepala terhadap tokoh pejuang yang melawan Belanda. Harga kepala Pangeran Hidayat adalah sebesar f 10.000,- dan Demang Lehman sebesar f 2.000,- Nilai uang sebesar itu sangat tinggi dan dapat memikat hati setiap orang yang menginginkan kekayaan. Bagi pejuang yang memegang sumpah “Haram manyarah, waja sampai kaputing”, tidak tergoyah hatinya mendengar janji-janji seperti itu, kecuali bagi mereka yang mengingkari sumpah, mengkhianati perjuangan bangsa dan yang lemah imannya terhadap prinsip “perang sabil”.

Meskipun segala usaha telah gagal, Belanda tetap berusaha untuk menangkapnya dengan cara apapun. Pemerintah Belanda mengutus Haji Isa seorang yang dekat dengan dan tahu Pangeran ini berada. Tugas Haji Isa adalah menyampaikan keinginan pemerintah Belanda terhadap Pangeran ini. Haji Isa tidak berhasil menemukan Pangeran Hidayat, tetapi dia bertemu dengan Demang Lehman. Ketika Haji Isa menyampaikan tugas misinya terhadap Demang Lehman. Demang Lehman langsung menjawab menolak segala macam perundingan dan akan terus berjuang sampai akhirnya memperoleh kemenangan.

Laporan Haji Isa ini menimbulkan semangat Belanda untuk mengatur siasat baru. Mayor Koch Asisten Residen di Martapura mengatur dan mengadakan hubungan dengan Demang Lehman atas perintah Residen G.M. Verspyck. Pertemuan dengan Demang Lehman menghasilkan kesepakatan bahwa Demang Lehman bersedia menemui Pangeran Hidayat asal Belanda berjanji mendudukkan Pangeran Hidayat sebagai Raja di Martapura. Demang Lehman selalu merasa curiga dengan keinginan Belanda untuk mendudukkan Pangeran Hidayat sebagai raja di Martapura, karena itu Demang Lehman mengkonsolidasi pasukannya. Setelah terjadi hubungan surat menyurat antara Demang Lehman dengan Regent Martapura Pangeran Jaya Pemenang, Demang Lehman bersedia turun ke Martapura.

Pada tanggal 2 Oktober 1861 Demang Lehman turun ke Martapura bersama tokoh-tokoh pejuang disertai 250 orang pasukannya. Anggota pasukannya ini akan menyusup ke seluruh pelosok Martapura dan akan mengamuk kalau Belanda menipu dan menangkap Demang Lehman. Tokoh-tokoh pejuang yang mengiringi Demang Lehman adalah : Kiai Darma Wijaya, Kiai Raksa Pati, Kiai Mas Cokro Yudo, Kiai Puspa Yuda Negara, Gusti Pelanduk, Pembakal Awang, Kiai Jaya Surya, Kiai Setro Wijaya, Kiai

Muda Kencana, Kiai Surung Rana, Pembekal Noto, Pembekal Unus, Tumenggung Gamar dan lain-lain. Tanggal 6 Oktober 1861 Demang Lehman memasuki kota Martapura disertai 15 orang pemimpin lainnya. Haji Isa menyambut rombongan ini dan langsung ke rumah Regent Martapura Pangeran Jaya Pemenang.

Dalam pertemuan empat mata dengan Demang Lehman, Residen berusaha memikat Demang Lehman dengan janji akan memberikan jaminan hidup setiap bulan kepadanya asal Demang Lehman berjanji menentang di Martapura, di Banjarmasin atau Pelaihari dan mengajak kepada seluruh rakyat kembali ke kampung mereka masing-masing dan bekerjasama seperti semula. Janji Residen itu tidak menarik perhatiannya, tetapi kesetiannya kepada perjuangan dan sumpah perjuangan lebih tinggi nilainya dari pada kepentingan diri sendiri. Disamping itu Demang Lehman tegas mengatakan bahwa mereka akan berjuang terus sampai Pangeran Hidayat dapat duduk kembali di Martapura memangku Kerajaan Banjar. Semboyan mereka huruf "Mim" (huruf Arab mim) yang berarti Martapura atau mati karenanya.

Hasil pertemuan dengan Residen memaksa Demang Lehman mencari tempat persembunyian Pangeran Hidayat dan akan merundingkannya dengan lebih teliti dan segala akibatnya nanti. Tanggal 9 Oktober 1861 Demang Lehman berangkat ke Karang Intan dan kepergiannya ini memakan waktu hampir sebulan. Kepergian Demang Lehman ini mengkhawatirkan Belanda dan meminta agar Demang Lehman kembali ke Martapura. Tanggal 30 Desember 1861 Residen G.M. Verspyck tiba di Martapura dan perundingan dengan Demang Lehman dilangsungkan. Residen berjanji bahwa Pangeran Hidayat boleh tinggal dengan keluarganya di Martapura selama perundingan berlangsung dan jika perundingan gagal Pangeran Hidayat boleh kembali ke pusat pertahanannya dalam tempo sepuluh hari dengan aman.

Tanggal 3 Januari 1862 Demang Lehman kembali berangkat mencari Pangeran Hidayat menuju Muara Pahu di daerah antara Riam Kanan dan Riam Kiwa. Pada tanggal 14 Januari 1862 Demang Lehman bertemu dengan Pangeran Hidayat di Muara Pahu. Demang Lehman menyampaikan surat Residen dan surat Regent Martapura Pangeran Jaya Pemenang. Dalam perjanjian itu Ratu Siti ibu Pangeran Hidayat dijemput dari tempatnya di Pa-auw Sungai Pinang, begitu pula keluarga Pangeran yang masih menetap di Tamanih.

Pada 22 Januari 1862, rombongan Pangeran Hidayat berangkat dari Muara Pahu dengan rakit dan perahu, melewati Mangappan dan 3 hari kemudian sampai di Awang Bangkal dan baru tanggal 28 Januari tiba di Martapura. Rombongan ini disambut rakyat dengan suka hati di Martapura. Rombongan langsung menuju tempat Regent Martapura Pangeran Jaya Pemenang yang masih hubungan paman dari Pangeran Hidayat.

Perundingan dilangsungkan pada tanggal 30 Januari 1862, dimulai pada jam 10.30 pagi.

Pihak Belanda terdiri dari :

1. Letkol Residen G.M. Verspyck
2. Mayor C.F. Koch, Assisten Residen di Martapura
3. Lettu J.J.W.E. Verstege, Controleur afdeling Kuin

4. Lettu A.H. Schadevan, ajudan Koch
5. Pangeran Jaya Pemanang, Regent Martapura
6. Kiai Jamidin, Kepala Distrik Martapura
7. Kiai Patih Jamidin, Kepala Distrik Riam Kanan
8. Haji Isa
9. Tumenggung Jaya Leksana

Pihak Pangeran Hidayat terdiri dari 23 orang diantaranya adalah :

1. Pangeran Hidayat
2. Kiai Demang Lehman
3. Pangeran Sasra Kasuma, anak Pangeran Hidayat
4. Pangeran Sahel, anak Pangeran Hidayat
5. Pangeran Abdul Rahman, anak.
6. Pangeran Kasuma Indra, menantu
7. Gusti Ali Basah, menantu
8. Raden Jaya Kasuma, ipar
9. Gusti Muhammad Tarip

Dalam perundingan itu Belanda mengatur siasat yang licik berpura berbaik hati dengan tujuan untuk menangkap dan mengasingkan Pangeran Hidayat keluar dari Bumi Selamat. Tujuan menghalalkan cara itulah yang dilakukan Belanda. Dalam situasi yang terjepit dan kondisi yang tidak memungkinkan Pangeran Hidayat terpaksa menandatangani Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada rakyat Banjar, yang sudah disiapkan Belanda sebelumnya. Surat Pemberitahuan itu ditandatangani Pangeran Hidayat dengan cap Pangeran tertanggal 31 Januari 1862.

Surat Pemberitahuan itu selengkapya berbunyi :

- 1) Surat ini tidak berisikan perintah, karena saya telah meletakkan dengan sukarela hak itu. (hak sebagai Mangkubumi).
- 2) Karena mendengarkan nasihat yang salah, saudara-saudara memberontak terhadap pemerintah Belanda, saudara menempuh jalan yang salah.
- 3) Saudara telah melihat bahwa Pemerintah Belanda lebih kuat dari kita, bahwa ia tidak hanya mementingkan kemakmuran rakyat yang baik, tapi juga bersikap lembut dan satria terhadap musuh-musuhnya.
- 4) Kepada rakyat Banjar saya mohon supaya menghentikan segala permusuhan, saudara-saudara yang masih melawan kembalilah ke rumah saudara-saudara dan carilah mata pencaharian yang damai dan jujur, sehingga drama pembunuhan dan permusuhan dapat dihentikan.
- 5) Letakkan senjata saudara, mohonkan ampun dengan sungguh-sungguh dan saya yakin bahwa Pemerintah Belanda akan memberinya dengan jiwa besar.
- 6) Jangan sekali-kali mendengarkan perintah pemimpin-pemimpin yang terus berkeras meneruskan peperangan, baik perintah dari Pangeran Antasari, Pangeran Aminullah dan orang jahat lainnya.
- 7) Saya mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak mengerti kepentingan saudara-saudara, dan kepentingan mereka sendiri dan saudara-saudara untuk keselamatan saudara-saudara sendiri dan demi kecintaan kepada saya, berkewajiban untuk

menangkapi dan menyerahkan pemimpin rakyat yang jahat itu kepada Gubernurmen.

- 8) Saya sendiri memberi saudara contoh penyerahan diri itu, saudara-saudara melihat bagaimana yang saya dapatkan.
- 9) Saya sudah mencoba supaya mereka yang masih melawan mau menyerah.
- 10) Semakin cepat bekas-bekas perang yang mencelakakan ini dapat dihilangkan, semakin cepat saudara-saudara mendapatkan pengampunan dari Allah Yang Maha Tinggi untuk bencana yang selama lebih dua tahun melanda penduduk Banjar.
- 11) Allah Yang Maha Tinggi dan arwah-arwah nenek moyang (raja-raja) dan kuburnya akan mengutuk kalian, terutama pemimpin-pemimpin rakyat yang masih melawan, apabila permintaan saya yang terakhir ini tidak dipenuhi.¹⁵⁸

Pangeran sangat terperanjat dengan ucapan Residen G.M. Verspyck yang bertindak sebagai Wakil Tertinggi dari Pemerintah Belanda di daerah Selatan dan Timur Borneo dan dia berwenang memberi pengampunan dan melupakan apa yang terjadi pada masa lampau dengan syarat bahwa Pangeran Hidayat harus berangkas ke Batavia dalam tempo 8 hari. Kepada Pangeran diperkenankan membawa keluarga yang disukainya dan sebelum berangkat harus menyebarluaskan Surat Pemberitahuan yang sudah dibubuhi cap dan tanda tangan Pangeran. Ketika Pangeran mengajukan keberatan atas kepergian ke Jawa tersebut, Residen menjawab bahwa bagi Pangeran perlu *"menikmati istirahat"*.

Demang Lehman yang merasa tertipu, sangat kecewa terhadap sikap Belanda untuk memberangkatkan Pangeran Hidayat ke Jawa. Demang Lehman berusaha mengajak Mufti dan Pangeran Penghulu untuk memohon kepada Residen agar keputusan pemberangkatan Pangeran Hidayat dibatalkan. Demang Lehman berusaha untuk menggagalkan keberangkatan ini dan ketika rombongan Pangeran berangkat pada pagi hari tanggal 3 Februari 1862, Demang Lehman telah siap dengan pasukannya untuk menggagalkannya. Perahu yang membawa Pangeran dibelokkan ke batang rumah yang dulu pernah dijadikan tempat tinggal Demang Lehman, dan disambut dengan gegap gempita oleh rakyat. Pangeran terus dilarikan.

Belanda tidak dapat bertindak apa-apa, dan baru setelah Pangeran dilarikan ke luar kampung Pasayangan, Residen mengerahkan kekuatannya untuk menangkap Pangeran. Seluruh kampung Pasayangan sampai kampung Hastak Baru dibakar Belanda. Masjid Martapura yang indah yang dibangun lebih dari 140 tahun yang lalu digempur dan dibakar Belanda. Ini terjadi pada 4 Februari 1862 merupakan saksi kebengisan dan kebrutalan penjajah Belanda terhadap rakyat Banjar yang tidak berdosa. Baru tanggal 2 Maret 1862 Pangeran Hidayat setelah menyerahkan diri diangkut dengan kapal Van OS berangkat dari Martapura dan terus merapat ke kapal Bali untuk selanjutnya diangkut ke Batavia. Pangeran Hidayat di buang ke kota Cianjur disertai sejumlah keluarga besar kerajaan yang terdiri dari : seorang permaisuri Ratu Mas Bandara, sejumlah anak kandung dari permaisuri, menantu-menantu, saudara-

¹⁵⁸ W.A. Van Rees, *De Bandjarmasinsche Krijg van 1859-1863*, Thieme, Arnhem, 1865, hal. 242-244, (terjemahan M. Idwar Saleh).

saudara seapak, ipar-ipar, ibu Pangeran sendiri, panakawan-panakawan beserta isteri dan anak buahnya, budak laki-laki dan perempuan, semua berjumlah 64 orang. Sebagai seorang buangan, Pangeran mendapat rumah besar dan lebih bagus dari pada istana di Martapura, mendapat tunjangan tiap bulan yang cukup untuk hidup sebagai Mangkubumi dan keluarganya.

Demang Lehman yang merasa kecewa dengan tipu muslihat Belanda berusaha mengatur kekuatan kembali di daerah Gunung Pangkal, Batulicin. Dia tidak mengetahui bahwa Belanda sedang mengatur perangkap terhadapnya. Oleh orang yang menginginkan hadiah dan tanda jasa sehabis dia melakukan Shalat subuh dan dalam keadaan tidak bersenjata, dia ditangkap. Kemudian diangkut ke Martapura. Pemerintah Belanda menetapkan hukuman gantung terhadap pejuang yang tidak kenal kompromi ini. Dia menjalani hukuman gantung sampai mati di Martapura, sebagai pelaksanaan keputusan Pengadilan Militer Belanda tanggal 27 Februari 1862. Pejabat-pejabat militer Belanda yang menyaksikan hukuman gantung ini merasa kagum dengan ketabahnya menaiki tiang gantungan tanpa mata ditutup. Urat mukanya tidak berubah menunjukkan ketabahan yang luar biasa. Tiada ada satu keluarganya pun yang menyaksikannya dan tidak ada keluarga yang menyambut mayatnya.

Setelah selesai digantung dan mati, kepalanya dipotong oleh Belanda dan dibawa oleh Konservator Rijksmuseum van Volkenkunde Leiden. Kepala Demang Lehman disimpan di Museum Leiden di Negeri Belanda, sehingga mayatnya dimakamkan tanpa kepala.

20. Pengangkatan Pangeran Antasari Sebagai Panembahan

Pada tanggal 14 Maret 1862, yaitu setelah 11 hari Pangeran Hidayat diasingkan ke Cianjur – Jawa Barat diproklamasikanlah pengangkatan Pangeran Antasari sebagai pimpinan tertinggi dalam kerajaan Banjar dengan gelar *Panembahan Khalifatul Mu'minin*. Proklamasi pengangkatan ini ditanda tangani oleh Tumenggung Surapati yang bergelar Kiai Tumenggung Yang Pati Jaya Raja sebagai wakil daerah Barito, Raden Mas Warga Natawijaya sebagai wakil daerah Teweh dan Tumenggung Mangkusari sebagai wakil daerah Kapuas-Kahayan. Gelar ini menunjukkan bahwa Pangeran Antasari mempunyai tiga macam tugas berat yaitu sebagai panglima tertinggi dalam pertahanan/perang sebagai kepala negara dan sebagai kepala tertinggi agama.

Pangeran Antasari adalah satu-satunya pimpinan yang dapat diharapkan berjuang menghadapi Belanda dan memegang teguh terhadap sumpah perjuangan yang telah diikrarkan bahwa :*Haram manyarah, waja sampai kaputing*, betul-betul perjuangan yang tidak mengenal kompromi dengan musuh. Memang Belanda telah berulang kali berusaha untuk mengadakan kompromi dengan Pangeran Antasari, namun tawaran itu dianggap beliau sebagai najis. Bujukan kompromi Belanda ini pernah dibalas Pangeran Antasari dengan surat yang berbunyi :*"Kami akan terus berjuang menuntut hak pusaka kami. Kami bahkan merasa jijik berdekatan dengan Belanda yang telah menawan saudara sepupu kami ke Jawa. Hadiah f.10.000,- Gulden pernah diumumkan kepada siapa yang dapat menangkap hidup atau mati Pangeran Antasari. Tetapi semua usaha Belanda dengan segala macam tipu muslihat tidak*

berhasil. Pangeran Antasari telah mengambil pilihan, lebih baik mati di medan pertempuran dari pada mati sebagai tawanan musuh.

Dari segi ahli waris kerajaan, Pangeran Antasari adalah pewaris yang sah, sebab dia adalah buyut Pangeran Tahmidillah I, karena itulah dia sangat berwibawa di daerah yang belum dikuasai Belanda termasuk seluruh suku Dayak dari daerah Barito. Pada saat beliau dilantik sebagai Panembahan atau Sultan Banjar, diperkirakan umurnya sudah mencapai 72 tahun, karena itulah beliau dalam keadaan sakit-sakitan. Sakit karena usia lanjut dan pada tanggal 11 Oktober 1862 beliau meninggal dunia. Pangeran Antasari dimakamkan di kampung Sampirang, Bayan Bengok daerah Puruk Cahu. Setelah Kemerdekaan mayat beliau dipindahkan ke Makam Pahlawan Banjar di kompleks pemakaman dekat Masjid Jami' Banjarmasin pada tanggal 11 November 1958.

Putera Pangeran Antasari, Gusti Muhammad Seman dilantik menjadi Sultan Banjar terakhir, sebab setelah Sultan Muhammad Seman tewas dalam pertempuran hapuslah Kerajaan Banjar dari bumi Kalimantan.

21. Pagustian di Gunung Bondang

Setelah Pangeran Antasari meninggal, perjuangan dilanjutkan dengan pimpinan Sultan Muhammad Seman dibantu Tumenggung Surapati dan pimpinan lainnya. Tumenggung Surapati membangun sebuah Pagustian (Dewan Pertahanan) yang terletak di Gunung Bondang, sebelah udik sungai Lawung, Puruk Cahu. Pagustian ini dibantu oleh Gusti Mas Said, Raden Mas Natawijaya, Muhammad Nasir dan lainnya.

Dua tahun berturut-turut yaitu tahun 1864 dan 1865 Tumenggung Surapati menyerang benteng Belanda di Muara Teweh sehingga seluruh isi benteng itu musnah. Begitu pula Benteng Belanda di Muara Montalat dihancurkan oleh suatu serangan Tumenggung Surapati. Untuk menghadapi serangan Tumenggung Surapati ini Belanda memperlak saku Dayak Sihong yang selama ini membantu Belanda dibawah pimpinan kepala sukunya Suta Ono. Karena jasa-jasanya terhadap Belanda Suta Ono diberi pangkat Overste atau Letnan Kolonel. Suku Dayak Sihong ini terkenal pemberani, tetapi apabila mereka berhadapan dengan Tumenggung Surapati, Suta Ono selalu mengundurkan diri.

Tumenggung Surapati dalam perlawanannya selalu berpindah-pindah dan selama bertahun-tahun dia bertempur melawan Belanda di sepanjang Sungai Barito. Kadang-kadang dia muncul di hilir di sekitar Bakumpai, tetapi sebentar lagi ada di hulu di sekitar Manawing, sehingga sangat membingungkan pihak Belanda. Berbagai muslihat dilakukan pihak Belanda untuk menangkapnya hidup atau mati, tetapi selalu gagal. Pertempuran dan perjuangan yang bertahun-tahun melawan Belanda melemahkan fisiknya yang memang sudah tua dan akhirnya jatuh sakit, meskipun semangat juangnya tidak pernah mundur. Setelah menderita sakit yang agak lama pada tahun 1875 Tumenggung Surapati meninggal dunia sebagai pahlawan, meninggal karena sakit. Pangeran Jidan meneruskan perjuangan ayahnya bersama-sama Sultan Muhammad Seman. Kalau keluarga Sultan yang tertangkap dibuang ke Bogor, maka keluarga Tumenggung Surapati yang tertangkap dibuang ke Bengkulu.

22. Bukhari Dalam Amuk Hantarukung

Bukhari seorang anak dari orang tua bernama Manggir dan ibu bernama Bariah kelahiran desa Hantarukung, dalam wilayah Kecamatan Simpur sekarang 7 Km dari Kandangan, menjadi pimpinan yang dikenal dengan '*Amuk Hantarukung*'. Dia dilahirkan sekitar tahun 1850 dan semasa mudanya mengembara ke Puruk Cahu mengikuti pamannya Kasim yang menjadi Panakawan Sultan Muhammad Seman. Sejak itu Sultan menjadikan Bukhari sebagai Panakawan Sultan, ikut berjuang di daerah Puruk Cahu, Bukhari seorang yang setia mengabdikan dirinya. Ia orang yang dipercaya sebagai '*Pemayang Sultan*'. Ia dikenal di kalangan istana sebagai seorang yang mempunyai ilmu kesaktian dan kekebalan. Bahkan tersiar berita bahwa dengan ilmunya itu kalau ia tewas dapat hidup kembali. Ilmu ini diajarkan kepada siapa yang menjadi pendukungnya.

Adanya kelebihan-kelebihan Bukhari tersebut, menyebabkan dia dan adiknya bernama Santar mendapat '*tugas*' untuk menyusun dan memperkuat barisan perlawanan rakyat terhadap Belanda di daerah Banua Lima.

Dengan membawa surat resmi dari Sultan Muhammad Seman. Bukhari dan adiknya Santar datang ke Hantarukung untuk menyusun suatu pemberontakan rakyat terhadap pemerintah Belanda. Kedatangan Bukhari diterima hangat oleh penduduk Hantarukung.

Dengan bantuan Pengerak Yuya, Bukhari berhasil mengorganisir kekuatan rakyat untuk melawan Belanda. Sebanyak 25 orang penduduk telah menyatakan diri sebagai pengikutnya, dan di bawah pimpinan Bukhari dan Santar siap untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Belanda.

Gerakan Bukhari ini bahkan kemudian mendapat dukungan selain penduduk Hantarukung, juga penduduk kampung Hamparaya dan Ulin. Sehubungan dengan itu alasan perlawanan yang dikemukakan bahwa penduduk dari tiga kampung itu tidak bersedia lagi melakukan kerja rodi .

Sikap penduduk dan tindakan Pengerak Yuya yang tidak mau menurunkan kuli (penduduk) untuk menggali '*garis*' antara Amadit-Negara tersebut, kemudian dilaporkan oleh Pembekal Imat kepada Kiai, karena yang bersangkutan sedang tidak ada di tempat, Pembekal melaporkan kepada Controleur Belanda di Kandangan.

Penguasa di Kandangan sangat marah mendengar berita itu pada tanggal 18 September 1899 berangkatlah rombongan penguasa Belanda yang terdiri dari Controleur Adsenarpont Domes dan Adspirant K. Wehonleschen beserta 5 orang Indonesia (opas dan pembakal) yang setia kepada Belanda.

Dengan menaiki kereta kuda dan diikuti yang lainnya Controleur Adsenerpont Domes ke Hantarukung menemui Pengerak Yuya. Pengerak yang telah bekerja sama dengan Bukhari untuk melawan pemerintah Belanda ini ketika dipanggil oleh Controleur keluar dari rumahnya dengan tombak dan parang tanpa sarung.

Setelah terjadi tanya jawab mengenai mengapa penduduk tidak mengerjakan lagi gerakan menggali '*garis*' Amandit-Negara, tiba-tiba muncul ratusan penduduk di

bawah pimpinan Bukhari dan Santar sambil mengucapkan “*selawat nabi*” maju ke arah Controleur dengan senjata tombak, serampang dan lain-lainnya.

Dalam peristiwa itu telah terbunuh tuan Controleur Domes dan Adspirant Wehonleschen serta seorang anak emasnya. Sementara 4 orang lainnya dapat melarikan diri. Mereka itu antara lain opas Dalau dan Kiai Negara.

Peristiwa tanggal 18 September 1899 ini terkenal dengan Pemberontakan Amuk Hantarukung yang dipelopori oleh Bukhari, seorang yang secara resmi diperintahkan oleh Sultan Muhammad Seman dengan mengirimkan ke desa asal kelahirannya Hantarukung.

23. Pasukan Belanda menyerang kampung Hantarukung

Kejadian terbunuhnya Controleur dan Adspirant Belanda tersebut segera sampai kepada pejabat-pejabat Belanda di Kandangan. Kemarahan pihak Belanda tidak dapat terbendung lagi.

Besok harinya pada hari Senin tanggal 19 September 1899 sekitar jam 1.00 siang pasukan Belanda datang untuk mengadakan pembalasan terhadap penduduk. Serangan pembalasan tersebut dipimpin oleh *Kiai Jamjam* putera daerah sendiri, dengan diperkuat oleh 2 Kompi serdadu Belanda bersenjata lengkap.

Penduduk Hantarukung telah menyadari pula peristiwa yang akan terjadi. Beratus-ratus penduduk di bawah pimpinan Bukhari, Santar dan Pengerak Yuya siap dengan senjata mereka dipinggiran hutan dan keliling danau menanti kedatangan pasukan Belanda.

Ketika sampai di desa Hantarukung di suatu awang persawahan, melihat keadaan sepi Kapten Belanda melepaskan tembakan peringatan agar penduduk menyerah.

Pada waktu itulah Bukhari bersama-sama H. Matamin dan Landuk tampil dengan senjata terhunus maju menyerbu musuh sambil mengucapkan “*Allahu Akbar*” berulang-ulang. Tindakan Bukhari tersebut diikuti para pengikutnya yang sudah siap untuk berperang, pertempuran sengit terjadi. Bukhari, H. Matamin dan Landuk dan Pengerak Yuya gugur di tembus peluru Belanda.

Melihat pemimpin-pemimpin mereka terbunuh penduduk lari menyelamatkan diri.

Demikianlah dalam peristiwa 2 hari di Hantarukung tersebut telah terbunuh masing-masing di pihak Belanda adalah Controleur Domes, Adspirant Wehonleschen dan seorang pembantunya. Sementara dari pihak penduduk telah gugur : Bukhari, Haji Matamin, Landuk, Pengerak Yuya.

Peristiwa ini berlanjut dengan terjadinya pembersihan secara kejam oleh Belanda terhadap penduduk yang terlibat terutama penduduk di desa Hantarukung, Hamparaya Ulin, Wasah Hilir dan Simpur.

Penangkapan segera dijalankan oleh militer Belanda. Mereka yang ditangkap tersebut berjumlah 23 orang yakni : Hala, Hair, Bain, Idir, Sahintul, H. Sanadin, Fakhir, Unin, Mayasin, Atma, Alas, Tanang, Tasin, Bulat, Sudin, Matasin, Yasin, Usin, Sahinin, Unan, Saal, Lasan dan Atmin.

Selanjutnya yang mati didalam penjara adalah : Hala, Hair, Bain, dan Idir. Sedangkan yang mati digantung adalah : Sahitul, H. Sananddin, Fakihi, Unin, Mayasin, Atma, Alas, Tanang dan Tasin. Mereka yang dibuang keluar daerah adalah: Bulat, Suddin, Matasin, Yasin, Sahinin, Unan, Saal, Lasan, Atnin, dan Santar.

Jenazah Bukhari, Landuk dan Matamin dimakamkan di Kampung Perincihan, Kecamatan Kandangan (Kabupaten Hulu Sungai Selatan) yang dikenal dengan makam Tumpang Talu. Sedangkan sembilan orang dihukum gantung oleh Belanda tersebut dimakamkan di kuburan "*Bawah Tandui*" di Kampung Hantarukung di Kecamatan Simpur (Hulu Sungai Selatan).

24. Hancurnya Pagustian dan Manawing dan Berakhirnya Perang Banjar (1905)

Pagustian atau Dewan Pertahanan adalah benteng pertahanan yang dibangun Tumenggung Surapati pada tahun 1865, yaitu 3 tahun setelah Pangeran Antasari meninggal karena sakit. Pagustian ini terletak di Gunung Bondang, diudik Sungai Lawung, daerah Puruk Cahu. Pertahanan yang kedua terletak di Manawing, yaitu kampung Bomban, Kalang Barat diudik Baras Kuning, Barito.

Berbagai suku Dayak dapat disatukan oleh Sultan Muhammad Seman seperti suku Dayak Dusun, Nagaju, Kayan, Siang, Bakumpai dan suku Banjar Hulu, baik yang beragama Islam maupun yang masih menganut kepercayaan Kaharingan. Panglima Batur adalah salah seorang Panglima yang setia pada Sultan Muhammad Seman. Panglima Batur seorang Panglima dari suku Dayak yang telah beragama Islam berasal dari daerah Buntok-Kecil, 40 Km di udik Muara Teweh.

Gelar *Panglima* khusus untuk daerah suku-suku Dayak pada masa itu menunjukkan pangkat dengan tugas sebagai kepala yang mengatur keamanan dan mempunyai pasukan sebagai anak buahnya. Seorang panglima adalah orang yang paling pemberani, cerdas, berpengaruh dan biasanya kebal. Gelar *Tumenggung* adalah gelar untuk jabatan sebagai kepala suku, sedangkan gelar Panghulu adalah gelar untuk jabatan sebagai Kepala Adat/kepala agama.

Panglima dan para Tumenggung yang membantu perjuangan Sultan Muhammad Seman untuk melawan Belanda adalah Panglima Umbung dari Mangkatib, Mat Narung dari Putu Sibau, Batu Putih dari Kapuas, Tumenggung Lawas, Tumenggung Nado, Tumenggung Tawilen, Panglima Amit, Panglima Bahe dan lainnya.

Panglima Batur yang bersama Sultan mempertahankan benteng terakhir di Sungai Manawing dalam perjuangan mereka melawan Belanda. Pada saat Panglima Batur mendapat perintah untuk pergi ke Kerajaan Pasir untuk memperoleh mesiu, saat itulah benteng Manawing mendapat serangan Belanda. Pasukan Belanda dibawah pimpinan Letnan Christofel yang berpengalaman dalam perang Aceh, dengan sejumlah besar pasukan marsose¹⁵⁹ yang terkenal ganas dan bengis, menyerbu benteng Manawing pada Januari 1905. Dalam pertempuran yang tidak seimbang ini Sultan

¹⁵⁹ Korps bukan militer yang didirikan Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1890 untuk menangani tugas kepolisian dan jika perlu membantu dalam tugas kemiliteran. Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga*, Depdiknas, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 717.

Muhammad Seman tidak dapat bertahan. Sultan tertembak dan dia gugur sebagai kesuma bangsa. Ia adalah sultan terakhir dari Kerajaan Banjar dalam pemerintahan pelarian di daerah Barito. Sultan Muhammad Seman benar-benar konsekwen terhadap sumpah melaksanakan amanah ayahandanya Pangeran Antasari yang tidak kenal kompromi dengan Belanda, "*Haram manyarah waja sampai kaputing*".

Tertegun dan dengan rasa sedih yang mendalam ketika Panglima Batur kembali ke benteng Manawing yang musnah, dan Sultan Muhammad Seman, pimpinannya telah tewas. Panglima Batur dan teman seperjuangannya Panglima Umbung pulau ke kampung halaman mereka masing-masing. Panglima Umbung kembali ke Buntok-Kecil. Sultan Muhammad di Seman di makamkan di puncak gunung di Puruk Cahu.

Kini Panglima Baturlah satu-satunya pimpinan perjuangan yang masih bertahan. Ia terkenal sangat teguh dengan pendiriannya dan sangat patuh dengan sumpah yang telah diucapkannya, tetapi ia mudah terharu dan sedih jika melihat anak buahnya atau keluarganya yang jatuh menderita. Hal itu diketahui oleh Belanda kelemahan yang menjadi sifat Panglima Batur, dan kelemahan inilah yang dijadikan alat untuk menjebaknya.

Ketika terjadi upacara adat perkawinan kemenakannya di kampung Lemo, dimana seluruh anggota keluarga Panglima Batur terkumpul, saat itulah serdadu Belanda mengadakan penangkapan. Pasangan mempelai yang sedang bertanding juga ditangkap dimasukkan ke dalam tahanan, dipukuli dan disiksa tanpa perikemanusiaan. Cara inilah yang dipakai Belanda untuk menjebak Panglima Batur.

Dengan perantaraan Haji Kuwit salah seorang saudara sepupu Panglima Batur Belanda berusaha menangkapnya. Atas suruhan Belanda Haji Kuwit mengatakan bahwa apabila Panglima Batur bersedia keluar dari persembunyian dan bersedia berunding dengan Belanda, barulah tahanan yang terdiri dari keluarganya dikeluarkan dan dibebaskan, dan sebaliknya apabila Panglima tetap berkeras kepala, tahanan tersebut akan ditembak mati. Hati Panglima Batur menjadi gundah dan dia sadar bahwa apabila dia bertekad lebih baik dia yang menjadi korban sendirian dari pada keluarganya yang tidak berdosa ikut menanggungnya.

Dengan diiringi orang-orang tua dan orang sekampungnya Panglima Batur turun ke Muara Teweh. Benar apa yang menjadi kata hatinya, bukan perundingan tetapi ia ditangkap sebagai tawanan dan selanjutnya dihadapkan di meja pengadilan. Ini terjadi pada tanggal 24 Agustus 1905. Setelah dua minggu di tawan di Muara Teweh, Panglima Batur diangkut dengan kapal ke Banjarmasin. Di kota Banjarmasin dia diarak keliling kota dengan pemberitahuan bahwa inilah pemberontak yang keras kepala dan akan dijatuhkan hukuman mati.

Pada tanggal 15 September 1905 Panglima Batur dinaikkan ketiang gantungan. Permintaan terakhir yang diucapkannya dia minta dibacakan "*Dua Kalimah Syahadat*" untuknya. Dia dimakamkan di belakang masjid Jami' Banjarmasin, tetapi sejak 21 April 1958 jenazahnya dipindahkan ke kompleks "*Makam Pahlawan Banjar*".

Gugurnya Sultan Muhammad Seman dan jatuhnya benteng pertahanan Manawing, tertangkapnya Panglima Batur pada tahun 1905, maka Perang Banjar yang

dimulai dengan penyerangan terhadap benteng dan tambang batu bara Oranje Nassau di Pengaron tahun 1859, dinyatakan berakhir pada tahun 1905.¹⁶⁰ Tokoh-tokoh pejuang yang tetap bertahan tidak mau menyerah akhirnya terpaksa menyerah, mereka dibuang keluar dari bumi bekas Kerajaan Banjar sebagai tawanan perang hidup dalam pengasingan sampai hayat mereka berakhir. Salah satu diantaranya adalah Gusti Muhammad Arsyad menantu Sultan Muhammad Seman. Gusti Muhammad Arsyad dibuang ke Bogor pada 1 Agustus 1904.

Gusti Muhammad Arsyad dan isterinya Ratu Zaleha, puteri Sultan Muhammad Seman berjuang bersama ayahnya dengan penuh keberanian. Setelah benteng Manawing jatuh ia bersembunyi ke Lahai dan selanjutnya ke Mia di tepi sungai Teweh yang dianggap mereka aman dari pengejaran Belanda. Suaminya Gusti Muhammad Arsyad setahun sebelum benteng Manawing jatuh telah menyerah kepada Belanda karena pengepungan yang menyebabkan ia tidak dapat melarikan diri lagi. Karena selalu dikejar-kejar oleh serdadu Belanda. Gusti atau Ratu Zaleha merasa sangat letih disamping pisiknya juga tidak mengizinkannya lagi, akhirnya dia pada awal tahun 1906 menyerahkan diri kepada Belanda. Atas permintaannya Ratu Zaleha mengikuti suaminya dalam pengasingan di Bogor menghabiskan sisa-sisa usianya. Ratu Zaleha diikuti oleh ibunya Nyai Salamah. Keluarga Ratu Zaleha sebagai kelompok Pagustian dianggap berbahaya untuk daerah Kalimantan Selatan dan Timur. Sebagai orang tawanan Gusti Muhammad Arsyad mendapat tunjangan sebesar f 300, perbulan terhitung sejak 1 Mei 1906 sedangkan isterinya Ratu Zaleha mendapat f 125, sebagai tambahan untuk memelihara 7 orang anggota keluarganya.

Tunjangan ini berdasarkan surat Sekretaris Goebnememen 25 Juli 1906 no. 1198 yang ditujukan kepada Ekslensi Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dan Assisten Residen Bogor.

E. AKIBAT-AKIBAT SOSIAL POLITIK PERANG BANJAR

Perang Banjar diawali dengan timbulnya perasaan tidak puas dengan situasi dan kondisi saat itu. Perasaan tidak puas itu disebabkan karena terlalu banyaknya campur tangan bangsa Belanda, bangsa asing yang oleh Orang Banjar saat itu dikenal sebagai "*Orang kafir*". Bangsa Belanda sebagai pedagang yang saat pertama kali memasuki daerah Kerajaan Banjar memperhatikan potensi perdagangan yang mendatangkan keuntungan bagi bangsa Belanda. Untuk memperoleh keuntungan itu bangsa Belanda menggunakan segala cara dari mulai cara lemah lembut dan bentuk persahabatan, akhirnya dalam bentuk tindakan tekanan dan kekerasan demi memperoleh keuntungan. Sebagai pedagang maka bangsa Belanda berhadapan dengan bangsa Banjar yang juga bangsa pedagang. Persainganpun terjadi dan persaingan yang menggunakan pengaruh kekuatan dan menimbulkan konflik antar dua bangsa.

¹⁶⁰ Dengan runtuhnya kekuasaan Pagustian di Baras Kuning, maka sesungguhnya Perang Banjar berlangsung kurang lebih 40 tahun, bukan 4 tahun sebagaimana dikatakan W.A. Van Rees dalam bukunya *De Bandjermasinsche Krijg van 1859-1863*, Thieme, Arnhem, 1865.

Disamping membahayakan bagi kerajaan Banjar secara politik dan ekonomis, juga kedatangan bangsa Belanda melahirkan pertentangan antara agama Islam dan Kristen konflik ini akan melahirkan bentuk perang membela agama, perang sabil, perang suci yang menyebabkan rakyat Banjar tidak takut mati karenanya.

Perasaan tidak puas terhadap campur tangan bangsa asing ini melahirkan gerakan dengan aspek nativisme seperti yang dilancarkan oleh Panambahan Muda Datu Aling. Gerakan ini menginginkan situasi dan kondisi Kerajaan Banjar yang diidealkan seperti dulu semasa pemerintah Sultan Kuning, bebas dari pengaruh bangsa asing, dikemukakannya tradisi nenek moyang yang berlaku turun temurun dengan rakyat yang hidup makmur bahagia. Golongan bangsawan mempergunakan gerakan ini beserta gerakan Balangan yang dipimpin Jalil melahirkan dan meningkatkan perang menjadi Perang sabil, perang suci membela agama dan melibatkan seluruh rakyat Banjar dari Kerajaan Banjar.

Hasrat kembali kepada pra-penetrasi Belanda, berarti pula kembali kepada penyempurnaan hak-hak feodal dan sistem tradisional dimana kelompok *ruling class*, kelompok penguasa yang ideal duduk memerintah untuk mengembalikan harmoni kebudayaan suku Banjar beserta kemakmuran rakyatnya.

Perang Banjar dipercepat dengan timbulnya konflik antar kelompok yang berhak dengan kelompok yang mendapat dukungan Belanda, antara kelompok Pangeran Hidayat dengan kelompok Pangeran Tamjidillah. Dengan dasar inilah Belanda mengirakan bahwa Perang Banjar itu disebabkan oleh konflik antar keluarga yang tidak terpecahkan, maka Belanda dalam hal ini Comissaris Kolonel Andressen, memaksa dengan cara halus menurunkan Sultan Tamjidillah al Wasik Billah dari kedudukannya sebagai Sultan Banjar pada tanggal 25 Juni 1859. Dengan kosongnya tahta ini diharapkan dapat ditempuh langkah politik selanjutnya, dan kesalahan dengan pelantikan terhadap raja yang lalu dengan segala akibatnya secara berangsur dapat dihapuskan. Ternyata analisa Kolonel Andresen ini keliru, sebab perang bukannya makin mereda bahkan makin bertambah besar dan meluas. Tindakan Andresen ini dianggap keliru karena itu dia diganti dengan politik kekerasan dari Gouvernement-Comissaris yang baru F.N.Niewenhuyzen dengan mengambil tindakan memecat Mangkubumi dalam suatu publikasi pada 5 Februari 1860. Sebetulnya pemecatan Mangkubumi Pangeran Hidayat dan kemudian dilanjutkan dengan penghapusan Kerajaan Banjar oleh Belanda pada 11 Juni 1860, adalah sebagai realisasi dari Gouvernements Besluit 17 Desember 1859 dimana dicantumkan bahwa kerajaan tak lagi diberi pimpinan, demi keselamatan operasional tambang batu bara termasuk daerah-daerah yang potensial mengandung lapisan batu bara untuk ditambang.

Pangeran Hidayat sebagai bangsawan dan Mangkubumi Kerajaan yang memimpin rakyat melawan penjajah Belanda pada tahun 1862 menyerahkan diri dan akhirnya dibuang ke Cianjur. Pangeran Antasari seorang bangsawan yang dapat menghimpun kekuatan Orang Banjar dengan Dayak berjuang tanpa kompromi melawan Belanda, dilantik dengan gelar Panambahan Amiruddin Khalifatul Mu'minin akhirnya meninggal karena sakit pada tahun 1862. Kiai Demang Lehman sebagai patriot sejati akhirnya tertangkap dan dihukum gantung sampai mati pada tahun 1864, sedangkan Kiai

Adipati Tumenggung Jalil tewas dalam pertempuran mempertahankan benteng Tundakan tahun 1861. Dengan gugurnya atau tertangkapnya tokoh-tokoh pejuang maka pada tahun 1865 perlawanan secara frontal sudah berkurang, tetapi perang Banjar itu belum berakhir. Sultan Banjar terakhir yang gugur dalam pertempuran mempertahankan benteng Manawing 1905 adalah Sultan Muhammad Seman.

Sejak runtuhnya kekuasaan Pagustian di Baras Kuning dan Manawing upaya-upaya terorganisir membangkitkan kembali pemerintahan Kerajaan Banjar hampir tidak ada lagi. Peristiwa yang ada hanyalah pemberontakan-pemberontakan sporadis yang digolongkan sebagai gerakan sosial seperti Pemberontakan Guru Sanusi di Amuntai tahun 1914-1918 dan Pemberontakan Gusti Darmawi¹⁶¹ di Kelua, tahun 1927 dan yang paling akhir adalah perlawanan di Hariyang tahun 1937.

Perang Banjar yang berlangsung mulai tahun 1859 dan berakhir pada tahun 1905 membawa akibat-akibat sosial politik bagi daerah Banjar dan rakyat Banjar itu sendiri. Akibat-akibat itu antara lain adalah :

- a) Dihapuskan Kerajaan Banjar dan seluruh bekas daerah kerajaan itu dimasukkan ke dalam tatanan baru Residentie Zuider en Ooster Afdeeling van Borneo.
- b) Kota Martapura sebagai bekas ibu kota kerajaan sejak tahun 1864, tanggal 19 Juni, susunan pemerintahannya sebagai berikut :

Kapten C.J.Meyer	Kepala militer / sipil
B.J.Suringa	Pembantu bagian sipil
Pangeran Jaya Pemenang	Regent
Raden Rastan	Jaksa
Haji Muhammad Khalid	Mufti
Kiai Suta Marta	Kepala Distrik
Haji Makhmud	Penghulu
- c) Disisihkannya satu lapisan super elite dan satu lapisan aristokrat fungsional dari birokrasi lama.
- d) Perang Banjar diartikan sebagai suatu "*religious expression of secular conflict*" yang bersifat politik ekonomis dan sosial kultural, dalam arti khusus mempertahankan kedudukan dan sistem Kerajaan dibawah Pangeran Hidayat sebagai raja yang menurut tradisi dan wasiat Sultan Adam adalah sah.
Dalam arti umum Perang Banjar itu berwujud sebagai "*a religio-political attack*" atas penjajah kafir. *Perang Banjar* adalah perang suci, perang sabil, perang sebagai *jihad fi sabilillah*.
- e) Golongan yang paling terpukul sebagai akibat dari perang ini adalah golongan bangsawan sebagai *interest group*. Pangeran Hidayat adalah "*Tatuha Bubuhan Raja-Raja*" yang kedudukannya diakui sesuai dengan wasiat Sultan Adam tulang punggung dan pusat harapan golongan bangsawan. Hilangnya Pangeran Hidayat

¹⁶¹ Dalam M. Idwar Saleh *et al*, *Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional (1900-1942) di Kalimantan Selatan*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Banjarmasin, 1978/1979, hal. 48-49, tertulis Gusti Barmawi. Seharusnya Gusti Darmawi dan harus dibedakan dengan H. Ahmad Barmawi Thaib, tokoh Parindra cabang Kandangan.

berarti harapan-harapan ke arah kemungkinan restorasi kerajaan tertutup sama sekali, yang berarti pula tersisihnya mereka sebagai *ruling-class* dan lenyapnya segala kebesaran-kebesaran tradisional, lenyapnya kekuasaan dimasa lampau.

f) Penghapusan tanah apanase

Dalam Gouvernements Indisch Besluit 17 Desember 1859 telah diputuskan bahwa Kerajaan Banjar tidak lagi diberikan sebagai pinjaman (*vazal*) kepada salah satu calon sultan yang akan datang. Sebagai realisasi putusan ini Komisaris Gubernemen F.N.Nieuwenhuyzen telah mengeluarkan Besluit 11 Juni 1860 No.24 berupa proklamasi penghapusan kerajaan Banjar. Pada akhir proklamasi itu disinggung pula masalah pemungutan hasil dan pemilikan tanah apanase. Tanah apanase akan dihapuskan dan kepada mereka akan diberi diganti rugi, tetapi bagi pemilik tanah apanase yang ikut dalam Perang Banjar, hak memperoleh ganti rugi itu dibatalkan. Tanah apanase merupakan sumber penghasilan sultan dan seluruh golongan raja-raja. Tanpa tanah apanase kedudukan sosial, pengaruh dan wibawa golongan bangsawan akan surut.

Mereka yang terlibat langsung dalam Perang Banjar yang oleh Belanda disebut "*pemberontak*" tidak memiliki hak ganti rugi tanah apanase yang dihapus. Dalam kategori ini termasuk Pangeran Hidayat dengan seluruh keluarga, pangeran Antasari, Pangeran Aminullah dan mertuanya Pangeran Prabu Anom. Disamping itu termasuk golongan aristokrat fungsional yang membantu "*pemberontakan*".

Mengenai tanah apanase yang dikuasai Nyai Ratu Komala Sari, Ratu Syarif Husein Darmakasuma, Ratu Kasuma Negara, dinyatakan disita untuk Gubernement dengan alasan mereka tidak mau menyerahkannya dan menahan perhiasan-perhiasan mahkota yang menjadi milik kerajaan. Keputusan penghapusan tanah apanase ini dikeluarkan oleh Gouverneur General Hindia Belanda tertanggal 18 Agustus 1863 no.29.

Penaksiran *toelage* ganti rugi tanah apanase yang dihapus disesuaikan dengan penghasilan tanah itu. Dari hasil penaksiran *toelage* ganti rugi yang dilaporkan ke Betawi sebesar f.84.777,34 setiap tahun. Jumlah ini dianggap Betawi terlalu besar, dan selanjutnya menetapkan bahwa Residen hanya boleh mengeluarkan f.20.000,- setahun sebagai taksiran maksimum.

Untuk menetapkan besar kecilnya *toelage* ganti rugi yang ditetapkan kepada para bangsawan yang berhak menerimanya dibentuk sebuah komisi yang diketuai oleh Regent Martapura Pangeran Jaya Pemenang dibantu Kiai Patih Goena Wijaya. Mereka dianggap paling mengetahui tentang tanah apanase ini. Hasil kerja komisi yang kemudian disetujui oleh Residen besarnya *toelage* ganti rugi yang dibayar pemerintah Belanda hanya sebesar f.14.556,- setiap tahun. Dari jumlah penghasilan tanah apanase yang diperoleh para bangsawan ditaksir sebesar f.84.777,34 tetapi yang dapat disetujui untuk dibayar hanya sebesar f.14.556,- Betapa merosotnya sumber ekonomi rumah tangga para bangsawan yang tidak ikut dalam Perang atau yang ikut membantu Belanda dalam perang itu. Para bangsawan yang memperoleh *toelage* ganti rugi sebanyak 29 orang dan dari jumlah ini 6 orang dari golongan aristokrat fungsional dan 23 orang dari golongan bangsawan biasa. Diantara 23

orang bangsawan yang memperoleh ganti rugi paling banyak adalah Pangeran Jaya Pamenang, jabatannya dalam struktur baru pemerintahan Belanda adalah Regent Martapura yang dijabatnya sejak tahun 1861 dan kemudian sebagai Ketua Komisi penetapan toelage ganti rugi tanah apanase. Besarnya f.6.000,- setahun. Merosotnya penghasilan kaum bangsawan itu sebagai contoh dapat dilihat pada anak-anak dan keluarga almarhum Pangeran Soeria Mataram yang diberi toelage sebesar f.100,- sebulan atau f.1.200,- setahun, padahal penghasilan tanah apanase ini pada masa kerajaan adalah sebesar f.10.000,- setahun, disamping pemasukan lainnya. Contoh golongan aristokrat fungsional adalah tiga bersaudara anak-anak Kiai Adipati Danuraja. Mereka mendapatkan f.15,- per-orang atau sebesar f.450,- bertiga setahunnya, pada hal penghasilan pada masa kerajaan adalah sebesar f.8.000,-setahunnya.

Bagi golongan bangsawan tindakan ini merupakan pukulan terakhir dalam bidang ekonomi, suatu tindakan pemerintah Belanda yang paling menentukan bagi kelangsungan mereka mempertahankan status sosial dalam *hierarki* sistem status yang baru. Disamping itu golongan ini menghadapi perubahan sosial yang amat cepat dan sistem nilai yang baru dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda.

- g) Perubahan status sosial ekonomi sesudah tahun 1863 Setelah Perang Banjar selesai pada tahun 1905 daerah dan masyarakat Banjar mengalami perubahan. *Orang Banjar* sebagai warganegara dari sebuah kerajaan merdeka adalah sebuah bangsa atau nation yaitu bangsa *Banjar* yang mempunyai kedudukan sederajat dengan bangsa-bangsa merdeka lainnya. Tetapi setelah perang usai, bangsa Banjar yang sebelumnya adalah bangsa merdeka, turun derajatnya menjadi bangsa jajahan dan hanya dikenal sebagai *Orang Banjar*, sebagai inlander dari penduduk Hindia Belanda.

Daerah Kerajaan Banjar yang telah dihapuskan dimasukan dalam suatu bentuk tatanan ketatanegaraan baru menjadi sebuah Residensi dari Pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengkonsolidasi pemerintahan dibentuk organisasi baru yang modern dan sentralistis. Golongan bangsawan fungsional yang merupakan elite *ruling class* lenyap dan kedudukannya digantikan golongan birokrasi Hindia Belanda. Mula-mula golongan bangsawan fungsional yang sebelumnya membantu Belanda dalam Perang Banjar, mendapat tempat dalam birokrasi baru ini. Dengan dasar kriteria turunan dan otoritas kharisma, golongan bangsawan memperoleh kepercayaan menjabat sebagai Regent sebagai jabatan tertinggi, kemudian sebagai Kiai menjadi Kepala Distrik, sebagai jaksa, sebagai kepala polisi dan jabatan lainnya. Kriteria pemilihan pegawai untuk menduduki jabatan tertentu kemudian berubah sesuai dengan perkembangan masa itu. Untuk jabatan sebagai Kiai yang mengepalai sebuah distrik diperlukan lulusan pendidikan MOSVIA dan Sekolah Raja. Keperluan untuk pegawai rendahan memaksa Belanda untuk mendirikan Sekolah Kelas Dua dan Sekolah Kelas Satu, sedangkan untuk anak-anak Eropah khusus didirikan *Europese Lagere School* (ELS).

Kecuali daerah Barito, seluruh daerah Hulu Sungai terbuka bagi lalu lintas perdagangan. Sistem talian yang amat mencekik para pedagang dihapus; ketertiban

dan keamanan memungkinkan timbulnya usaha-usaha baru. Hubungan perdagangan langsung dengan Surabaya dan Singapore membuka perspektif bagi pengusaha perkebunan untuk menanam tanaman yang menghasilkan untuk di ekspor, selain mengeksport hasil-hasil hutan seperti rotan, damar, lilin. Dengan perdagangan dari kalangan rakyat biasa. Naik haji menjadi lebih mudah dengan beroperasinya kapal Belanda KPM. Persentase jumlah orang naik haji untuk daerah ini cukup tinggi, begitu pula jumlah para ulama hasil pendidikan Perguruan Tinggi Al Azhar Kairo-Mesir makin bertambah besar, sebagai usaha kaum ulama untuk menandingi pendidikan Barat yang dibangun Belanda.

Pertumbuhan kampung dan kota mengalami perubahan. Dari Banjarmasin melalui Martapura Belanda membangun jalan raya besar ke Hulu Sungai sampai dengan Ampah, Muara Uya. Untuk menjaga keamanan dan mudah mengadakan kontrol, Belanda memaksa memindahkan kampung-kampung yang pada mulanya disepanjang sungai, dipindah disepanjang jalan raya yang dibangun Belanda. Muncullah desa-desa baru yang rumah-rumahnya berbaris menghadapi jalan raya. Disetiap persimpangan sungai yang strategis dibuat benteng pengawasan wilayah. Dengan demikian muncul kota-kota baru seperti Rantau, Kandangan, Barabai, Tanjung, Pelaihari dan sebagainya. Pembuatan jalan raya ini membuka daerah yang terisolasi, penting bagi pengawasan militer Belanda, tetapi juga membawa pengaruh bagi perkembangan ekonomi perdagangan.

Perubahan ini sangat mempengaruhi kelompok kaum bangsawan dan sesudah tahun 1863 yaitu setelah tanah apanase sumber penghasilan kaum bangsawan dihapus oleh Belanda, kaum bangsawan menghadapi *krisis prestise*. Dengan dihapusnya kerajaan, kekuasaan politik pemerintahan pindah ketangan *super elite baru*, pemerintah Hindia Belanda. Kedudukan politis kaum bangsawan sama dihadapan penjahan Belanda, sebagai "*inlander*" mempunyai kewajiban yang sama membayar pajak dan lain sebagainya. Kaum bangsawan tidak memperoleh hak sebagai pelaksana politik kecuali bagi mereka yang memperoleh pendidikan tertentu. Gelar kebangsawanan lama kelamaan tidak membawa pengaruh apa-apa di kalangan rakyat Orang Banjar. Orang Banjar berjiwa dagang dengan semangat Islam yang tinggi dan menghargai seseorang bukan dengan dasar gelar kebangsawanan atau harta benda, tetapi dengan dasar ketaqwaan terhadap Allah, karena itulah golongan ulama mendapat kehormatan sepanjang masa sejak dulu sampai sekarang.

Pedagang Banjar muncul sebagai pedagang kelas menengah dan menguasai perdagangan hasil hutan daerah Barito. Perdagangan mereka cukup kuat dan perdagangan Orang Banjar menggunakan kapal-kapal layar sendiri sampai menjalani rute Banjarmasin-Singapore-Madras India. Perdagangan Sungai Barito dikuasai oleh golongan pedagang Banjar dan ketika Borsumy membuka kantor cabangnya di Banjarmasin, Borsumy terlebih dahulu mengadakan perundingan dengan kelompok pedagang Banjar agar operasional mereka tidak terganggu.

Akibat perubahan situasi ekonomi perdagangan ini, maka golongan bangsawan kedudukannya merosot sama sekali, mereka sekarang merupakan golongan yang

diatur tata ekonominya dan sekarang menjadi golongan konsumtif dan posisi mereka menurun. Hal ini membawa akibat pula dalam bidang kebudayaan daerah. Hilangnya keraton, menyebabkan sarana untuk perkembangan kesenian klasik ikut berkurang dan disamping itu sikap golongan ulama yang tidak menyenangkan budaya keraton. Kesenian kelasik mengalami proses *disintegrasi* dan akhirnya hampir tidak dikenal lagi di kalangan luas masyarakat Banjar. Dalam masyarakat tradisional, golongan bangsawan merupakan golongan yang memberi identitas kepada kebudayaan masyarakat Banjar disamping Islam. Sesudah tahun 1863 golongan ini berada dalam keadaan kritis nilai, sehingga kedudukan mereka sebagai kekuatan sosial menjadi lemah dan secara berangsur-angsur hilang beralih ke dalam lapisan sosial yang lain dan akhirnya mengalami krisis identitas. Identitas bangsawan yang sekarang masih ada hanya berupa gelar-gelar didepan nama yang tak berfungsi lagi ditinjau dari segi status bangsawan seperti semula.

Karakter perjuangan rakyat dalam sejarah perjuangan nasional mencapai kemerdekaan, digolongkan dalam beberapa "Angkatan".

Angkatan Perintis, awal abad ke-20. Tumbuh penentangan terhadap kolonialisme yang dijawab oleh pemerintah kolonial Belanda dengan Politik Pintu Terbuka (1887) kemudian Politik Etis (sejak 1900) yang memberikan kesempatan kepada intelektual muda bumiputera untuk ikut serta dalam birokrat kolonial. Kaum muda inilah yang bercita-cita kemajuan dan kebebasan bagi bangsa dan rakyatnya.

Angkatan Penegas, sejak 1928. Gerakan *Los van Nederland* (Bebas dari Belanda). Angkatan ini dihadapi oleh pemerintah kolonial dengan kekerasan, dan kemudian diperlunak dengan "Indonesia Berparlemen"; belum terwujud karena Jepang menduduki Hindia Belanda.

Angkatan Pendobrak sejak 1945. Tokoh-tokoh Angkatan Perintis dan Angkatan Penegas didukung oleh para pemuda yang tergabung dalam *Seinendan*, *Peta*, *Heiho* dan satuan-satuan kelaskaran lainnya, berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Bab V **ZAMAN PERINTIS KEMERDEKAAN** **1901-1942**

A. PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA

1. Tata Pemerintahan

Tata pemerintahan Hindia Belanda berpangkal pada ketentuan-ketentuan dalam pasal 62 Undang-Undang Dasar Nederland (*Nederlandse Grondwet*) tahun 1814 yang mengatur tentang "*opperbestuur*" (pemerintahan tertinggi) atas Hindia Belanda dan pasal-pasal 63 dan 64 UUD tersebut yang mengatur tentang "*opperwetgeving*" (kewenangan legislatif tertinggi) atas Hindia Belanda.¹

Berdasar ketentuan pasal 62 ayat 2 Undang-Undang Dasar Nederland, pemerintahan umum di Hindia Belanda dilakukan oleh Gubernur Jenderal (*Gouverneur Generaal*) atau disebut dengan singkatan GG. Pemerintahan itu diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam *Indische Staatsregeling* dengan memperhatikan petunjuk raja.

Gubernur Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh dan terhadap pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Raja melalui Menteri Urusan Daerah Jajahan (*Minister van Kolonien*). Artinya kepada Menteri Urusan Jajahan, ia memberikan segala keterangan yang diminta tentang pemerintahan tersebut. Gubernur Jenderal harus seorang warga negara Belanda dan berusia sekurang-kurangnya tiga puluh tahun.

Disamping itu, Gubernur Jenderal menjabat Panglima Tertinggi Angkatan Darat dan Laut. Ia mengangkat dan memberhentikan opsir angkatan darat, kecuali pengangkatan komandannya, pemberian pangkat dan pemberhentian opsir-opsir tinggi yang dilakukan oleh raja. Atas persetujuan *Raad van Indie* ia juga dapat menyatakan keadaan darurat perang di Hindia Belanda.

Gubernur Jenderal dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh sebuah Dewan Hindia Belanda yang memberikan nasihat kepadanya, sebuah sekretariat (*Algemeene Secretarie*) yang bertugas seperti kabinet dan sejumlah departemen.

Pimpinan departemen terdiri dari seorang Direktur, seorang Wakil Direktur, dan seorang Sekretaris. Susunan departemen itu dengan sendirinya akan selalu mengalami perubahan, manakala perkembangan keadaan menghendakinya.

Departemen-departemen yang membantu Gubernur Jenderal terdiri dari: Departemen Dalam Negeri; Departemen Pekerjaan Umum; Departemen Keuangan; Departemen Perusahaan-perusahaan Pemerintah; Departemen Kehakiman; Departemen Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan; Departemen Pengajaran dan Kebaktian; Departemen Kelautan; dan Departemen Peperangan.²

Salah satu departemen terpenting yakni Departemen Dalam Negeri mempunyai tugas dalam hal: administrasi dalam negeri, *swapraja*-*swapraja* dan *kotapraja*-*kotapraja*; pelaksanaan

¹ Irawan Soejito, "Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia", Jilid I, Yayasan Karya Dharma Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta, 1979, hal. 14.

² M. Suriansyah Ideham, "Tata Pemerintahan Hindia Belanda", Banjarmasin, tt., hal. 2.

desentralisasi; pengawasan wilayah-wilayah yang termasuk wewenang Gubernur Jenderal; pengawasan pada pencabutan hak untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh daerah-daerah; urusan warga negara Cina dan Jepang; pengelolaan kepolisian; urusan-urusan pertanahan; pemberian izin perkebunan tebu dan nila; kredit untuk rakyat; dan penerapan ketentuan-ketentuan tentang mendirikan pabrik dan niaga kecil.

Wilayah pemerintahan Hindia Belanda terdiri dari Pulau Jawa dan daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Pulau Jawa dibagi dalam Propinsi, Karesidenan, dan Keregenan. Sedangkan daerah luar Jawa terdiri dari Afdeling, Onderafdeling, District, dan Onderdistrict.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Dasar Negeri Belanda yang pertama dalam tahun 1814, banyak sekali terjadi perubahan yang berpengaruh terhadap Pemerintahan Hindia Belanda, antara lain karena bersatunya Perserikatan Negara-negara Belanda, menjadi Kerajaan 'kesatuan' *Koninkrijk der Nederlanden*, kemudian karena pemisahan dengan Belgia. Namun, perubahan yang signifikan terjadi di tahun 1848. Pergolakan-pergolakan di Eropa sekitar tahun tersebut terimbas pula pada perubahan Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda. Parlemen merasa lebih kuat terhadap raja. Kalau sebelumnya urusan jajahan mutlak atau "semata-mata" (*bij uitsluitend*) ditangani oleh Raja dan Menteri Jajahan, maka Parlemen juga berkeinginan untuk mempunyai hak turut mengatur jajahan-jajahan Belanda.

Gejolak-gejolak di Eropa sekitar tahun 1848 itu membawa perubahan drastis pada politik kolonial di Hindia Belanda. Oleh pembuat undang-undang di Nederland telah ditetapkan suatu Undang-undang Ketatanegaraan untuk Hindia-Belanda, yakni *Reglement op het beleid der Regering in Nederlands Indie* tanggal 2 September 1854, yang biasa disebut *Regerings Reglement* atau disingkat R.R. Dalam perkembangannya R.R. mengalami beberapa kali perubahan, sehingga berubah menjadi *Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie* atau dikenal dengan sebutan I.S. singkatan dari *Indische Staatsregeling*.³

Sebelum tahun 1848 kekuasaan membuat undang-undang serta peraturan perundangan lainnya mutlak berada di tangan Raja atau wakilnya di daerah jajahan. Hal tersebut tercermin dari tugas dan kewajiban Gubernur Jenderal yang meliputi tiga bidang yakni legislatif atau perundang-undangan (*wetgeving*), bidang pemerintahan atau eksekutif (*uitvoering*) dan bidang yudikatif atau pengadilan (*rechtspraak*).

Setelah 1848, pembuat undang-undang dan peraturan untuk Hindia Belanda terbagi dalam tiga lembaga, yakni : Ratu bersama Parlemen sebagai pembuat Undang-undang; Ratu sebagai pembuat Keputusan-keputusan Raja; dan Gubernur Jenderal sebagai pembuat Ordonansi atau Peraturan.

Sebelum tahun 1905 Hindia Belanda diperintah oleh otokrasi penuh. Gubernur Jenderal dan aparatnyalah yang mengurus semua masalah. Warga tidak dapat menyuarakan kepentingan-kepentingannya, dengan kata lain tidak ada keterbukaan. Desentralisasi mulai banyak dilakukan; sejumlah kota-kota besar membentuk dewan-dewan haminta (*gementeraad*). Kemudian keinginan-keinginan masyarakat untuk turut bicara dalam urusan-urusan pemerintahan makin nyaring, antara lain dalam menentukan anggaran tahunan.

Dalam tahun 1916 disahkan lembaga *Volksraad* atau Dewan Rakyat yang mengadakan sidang pertamanya pada 8 Mei 1918. Di tahun 1927 kepada Dewan Rakyat Hindia Belanda diberikan pula kekuasaan legislatif. Anggota *Volksraad* berasal dari orang-orang pilihan dari daerah kekuasaan Belanda di Pulau Jawa dan daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Dari Kalimantan yang pernah menjadi anggota *Volksraad* adalah G.F.H. Gonggrijp yakni Asisten Residen yang berkedudukan di Pontianak.⁴

Sampai Mei 1927 anggota dewan ini hanya pria, kemudian ---setelah sembilan tahun--- kaum perempuan memperoleh emansipasinya dengan juga diberikan hak untuk duduk dalam dewan ini. Empat puluh delapan anggotanya ---termasuk seorang Ketua--- separo ditunjuk oleh Gubernur Jenderal dan separo lainnya dipilih oleh dewan-dewan daerah di haminta/kota (*gemeente*) Para anggotanya yang terdiri dari dua puluh orang bumiputera dan dua puluh delapan orang Eropa dan Timur Asing berasal dari berbagai profesi ini, seperti pejabat pemerintah,

³ Irawan Soejito, *op.cit.*, hal. 17.

⁴ Lihat J.J. De Vries, *Jaarboek Van Batavia*, G.Kolff & Co, Batavia, 1927, hal. 89.

tentara, wartawan, penguasa, guru, pemilik tanah, mewakili sejumlah partai, akan tetapi ada pula yang non-partai.

Anggota Dewan Rakyat ini mempunyai hak-hak sebagai berikut : (1) Hak memberikan nasihat; (2) Hak petisi, mengajukan masalah-masalah kepada Raja/Ratu, Parlemen, dan Gubernur Jenderal; (3) Hak bebas mengeluarkan pendapat, sehingga tidak dapat dituntut secara hukum atas apa yang dikemukakannya dalam sidang-sidang dewan, atau tertulis kepada dewan; (4) Hak interpellasi atau hak bertanya (sejak 1 Januari 1926).⁵

Dewan ini tidak mempunyai hak angket atau penyelidikan. Dari hak-hak yang dipunyai dan tidak dipunyai dewan tersebut di atas, maka Dewan Rakyat atau Volksraad ini hanya merupakan suatu lembaga penasihat, belum berfungsi sebagai suatu parlemen.

2. Politik Pertanahan

Sebagai dampak lain dari Undang-undang I.S. adalah berangsur-angsur Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) yang diterapkan Gubernur Jenderal Van den Bosch dihapus antara lain gula pada tahun 1890 dan kopi pada tahun 1916.

Perubahan pada politik pertanahan kolonial pun juga tampak. Pada tahun 1879 Menteri Jajahan E. De Waal mengajukan undang-undang pokok tentang tanah (*Agrarische Wet*), yang seterusnya menjadi Pasal 51 dari *Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie* atau Undang-undang I.S.

Pasal 51 dari I.S. itu berbunyi : (1) Gubernur Jenderal dilarang menjual tanah; (2) Larangan itu mengecualikan tanah-tanah ukuran kecil, untuk perluasan kota dan kampung, dan untuk mendirikan usaha kerajinan; (3) Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah, yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan, terkecuali yang digarap oleh orang-orang Bumi putera, atau padang-padang rumput untuk penggembalaan bersama, atau yang termasuk wilayah dusun atau desa; (4) Tanah yang dapat diberikan dengan hak '*erfpacht*' – sewa yang turun-temurun – untuk paling lama tujuh puluh lima tahun, diatur oleh peraturan tersendiri; (5) Gubernur Jenderal harus mencegah agar penyerahan tanah tidak melanggar hak-hak dari penduduk bumiputera; (6) Tanah-tanah yang digarap untuk keperluan sendiri oleh orang-orang bumiputera, atau yang dipergunakan sebagai padang penggembalaan umum, atau termasuk wilayah dusun atau kampung, oleh Gubernur Jenderal dapat dikuasai untuk kepentingan umum, atau tanaman-tanaman yang diharuskan oleh penguasa, dengan ganti-rugi yang layak; (7) Atas tanah-tanah milik orang-orang bumiputera dapat diberikan hak milik '*eigendom*' kepada pemiliknya, menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kewajibannya kepada negara dan desa, dan haknya untuk menjual kepada orang bukan bumiputera; (8) Persewaan atau pemakaian tanah milik orang bumiputera kepada orang bukan bumiputera harus memenuhi ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku.⁶

Pasal 51 I.S. ini sama dengan pasal 62 R.R. dahulu dan mula-mulanya hanya terdiri dari tiga ayat, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dalam tahun 1870 pasal ini ditambah dengan ayat 4 sampai dengan ayat 8, yaitu yang dinamakan "*Wet Agraria*". Setelah mengalami beberapa perubahan dan tambahan, maka nama R.R. itu diganti dengan I.S. dan diundangkan lagi seluruhnya dalam Staatsblad 1925 No. 447.⁷

Setelah pemberlakuan Undang-undang Tanah Agraria 1870, ketentuan-ketentuan di atas bertambah, karena Undang-undang Agraria ini berisi ketentuan yang mengatur tentang : (1) Pemberian hak '*erfpacht*' kepada usaha-usaha swasta; (2) Persewaan tanah bumiputera kepada bukan bumiputera; (3) Perlindungan hak-hak tanah penduduk dengan memberikan hak yang kuat yakni yang disebut hak milik-agraris; (4) Persewaan tanah milik orang bumiputera yang ekonomi lemah kepada bukan bumiputera yang bermodal kuat.

⁵ M. Suriansyah Ideham, *op.cit.*, hal. 2-3.

⁶ Lihat bahasa aslinya dan terjemahan yang sedikit berbeda dalam Singgih Praptodihardjo, *Sendi-Sendi Hukum Tanah di Indonesia*, Jajasan Pembangunan, Jakarta, 1953, hal. 40-41 dan 146-147; H.W.J. Sonius, "De Achtergrond van de Agrarische Wet", dalam *Bestuursvraagstukken*, Ie Jaargang No. 4 October 1949, Departement van Binnenlandse Zaken, Batavia, hal. 447-448 dan terjemahannya hal. 517-518; Dirman, *Perundang-Undangan Agraria Di Seluruh Indonesia*, J.B. Wolter, Djakarta, 1958, hal. 18-19; M. Suriansyah Ideham, "Politik Pertanahan Kolonial", Banjarmasin, tt, hal.2-3.

⁷ Dirman, *ibid.*, hal. 19.

Undang-undang Agraria 1870 itu dibuat dengan tujuan untuk memberikan kesempatan yang luas bagi perkembangan modal asing, terutama modal Belanda; dan untuk melindungi dan memperkuat hak-tanah bagi orang-orang bumiputera.

Selain Undang-undang I.S. dan Undang-undang Agraria 1870, sebagai landasan hukum politik pertanahan kolonial, perlu pula dicatat adanya: *Domeinverklaring* dan *Vervreemdingsverbod*. Keputusan *Domeinverklaring* menyatakan, bahwa “semua tanah yang tidak terbukti pemilikannya, ditetapkan sebagai Tanah Negara”. Ketentuan ini tidak berlaku bagi tanah-tanah milik orang bumiputera.

Yang dimaksud “tanah negara” dalam *Domeinverklaring* terdiri dari dua golongan (1) Tanah Negara Bebas, yakni mutlak dikuasai oleh Negara; dan (2) Tanah Negara yang Tidak-Bebas, atau di atasnya masih dibebani suatu hak utama (*voor-recht*) yang lebih rendah dari hak-eigendom (orang Barat) atau hak-milik (agraris) bumiputera.

Sedangkan *Vervreemdingsverbod* melarang pemindahan hak atas tanah dari pemilik bumiputera kepada bukan bumiputera atau asing. Perlindungan atas tanah penduduk ini harus sangat diperhatikan oleh pejabat-pejabat pemerintah. Jika pemindahan hak dimaksud pun terjadi, maka sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, tanah ini menjadi tanah Negara yang tidak bebas, yang dibebani oleh yang telah memberi ganti rugi yang layak. Kepada pengoper hak ini biasanya oleh pemerintah diberikan hak yang lebih rendah, umpamanya hak pakai atau hak sewa dengan masa pakai atau sewa yang terbatas.

Terdapat beberapa macam hak atas tanah, seperti atas Tanah Negara ---bebas atau tidak bebas--- dapat diberikan apa yang disebut “*burgerlijke wetboek-rechten*”, yakni : 1) *Eigendom*, suatu hak benda yang paling kuat; 2) *Erfpacht*, hak sewa yang turun-temurun untuk tidak lebih dari tujuh puluh lima tahun, untuk pertanian atau perkebunan yang luas ataupun kecil; 3) *Landexploratie*, atas perjanjian, untuk penelitian lahan umpamanya untuk pertambangan; 4) *Opstal*, untuk mendirikan bangunan, biasanya untuk tigapuluh tahun, dapat diperpanjang; 5) *Gebruik*, hak pakai berdasarkan perjanjian; 6) *Huur*, haksewa atas perjanjian, diberikan umpamanya untuk mendirikan bangunan dengan izin bersyarat karena rencana tata pembangunan suatu lingkungan; 7) *Bruikleen*, pinjam pakai atas perjanjian.⁸

Untuk penduduk bumiputera selain yang dimiliki atau dipergunakannya karena Hukum Adat yang ada tetap diakui, maka bumiputera mempunyai pula hak-hak seperti : hak milik bumiputera (*Inlands beitsrecht*) yang diakui sebagai hak benda, hak penggarapan tanah, dan hak pemilikan bersama (*communaal bezit*).

B. PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA DI KALIMANTAN SELATAN

1. Residensi Afdeling Selatan dan Timur Borneo

Sistem Pemerintahan Hindia Belanda mulai diberlakukan di Kalimantan Selatan ketika F.N. Nieuwenhuyzen mengumumkan Proklamasi Penghapusan Kerajaan Banjarmasin pada tanggal 11 Juni 1860. Dalam proklamasi tersebut antara lain dinyatakan Kerajaan Banjar dihapuskan dan tidak lagi diperintah oleh raja (sultan) dan seluruh pemerintahan di lingkungan bekas Kerajaan Banjar langsung di bawah kekuasaan Gubernemen Hindia Belanda di bagian Selatan dan Timur pulau Borneo.⁹

Setelah Proklamasi Penghapusan Kerajaan Banjar, maka pangkat Komisaris Gubernemen di Selatan dan Timur Borneo yang saat itu dijabat oleh F.N. Nieuwenhuyzen selain jabatannya sebagai Residen Surakarta, dengan sendirinya dinyatakan dihapus, dan sebagai gantinya ditempatkan seorang komandan tentara. Pada mulanya ditempatkan Letnan Kolonel G.M. Verspyck yang memerintah pada tahun 1861-1863, saat dimana pemberontakan meletus dengan hebatnya.

Sejalan dengan perkembangan keadaan keamanan yang semakin membaik, G.M. Verspyck kemudian diganti oleh Kolonel E.C.F Happe yang selain bertugas sebagai komandan tentara juga merangkap jabatan sipil sebagai seorang Residen dalam daerah Karesidenan Afdeling Selatan dan

⁸ M. Suriansyah Ideham, “Politik...”, *op.cit.*, hal. 4-5; Lebih jauh tentang pengertian istilah-istilah tersebut lihat Dirman, *ibid.*, hal. 77-109.

⁹ Lebih jauh tentang isi Proklamasi 11 Juni 1860, lihat Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sedjarah Kalimantan*, Fadjar, Banjarmasin, 1953, hal. 51-53 dan H.G. Gusti Mayur, *Perang Banjar*, CV. Rapi, Banjarmasin, 1979, hal. 60-61.

Timur Borneo (*Residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo*). Karena jabatan rangkap itulah, maka E.C.F Happe yang memerintah tahun 1863-1866 sering disebut sebagai Kolonel Residen.¹⁰

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan Karesidenan Afdeling Selatan dan Timur Borneo, maka pada tahun 1865 Belanda membentuk sejumlah afdeling di wilayah-wilayah bekas kesultanan Banjar yang telah dikuasai, sebagai berikut :

- a. Afdeling Banjarmasin termasuk Onderafdeling Kween (Kuin)
- b. Afdeling Martapura yang terbagi atas lima district.
 1. District Martapura
 2. District Riam Kiwa
 3. District Riam Kanan
 4. District Banua Ampat
 5. District Margasari
- c. Afdeling Tanah Laut, terbagi atas empat district.
 1. District Pleihari
 2. District Tabanio
 3. District Maluka
 4. District Satui
- d. Afdeling Amuntai yang terbagi atas tujuh district.
 1. District Amuntai
 2. District Nagara
 3. District Balangan
 4. District Alai
 5. District Amandit
 6. District Tabalong
 7. District Kalua¹¹

Afdeling-afdeling yang dibentuk itu berada di bawah kepemimpinan militer yang merangkap kekuasaan sipil sebagai kepala pemerintahan di ibukota residensi sekaligus afdeling Banjarmasin. Kolonel Residen E.C.F. Happe dibantu oleh Auditeur Militer W. de Gelder, Controleur Pangeran Syarif Husin bin Mohammad Baharun dan seorang Ronggo : Kiai Ronggo Tumenggung Tanu Karsa. Residensi ini juga memiliki Dewan Pengadilan yang juga diketuai oleh Kolonel E.C.F. Happe dan mempunyai anggota 8 orang terdiri dari penduduk pribumi, Arab dan Cina.

Di Onderafdeling Banjarmasin memerintah Assistent Resident J. Faes berkedudukan di kampung Kuin-Sungai Miai, ia dibantu oleh Controleur O.M. de Munnick, Ronggo Temenggung Tanu Karsa, Mufti Haji Muhammad Amin, Penghulu Haji Muhammad Abu Sohot, Posthouder M. Rozenboom, Wakil Posthouder F. Serquet di Schans van Thuyll (Mantuil).¹²

Di bawah Kolonel Residen, tiap afdeling dipimpin oleh seorang komandan militer yang merangkap jabatan sebagai Assistent Resident. Dalam menjalankan tugasnya, komandan militer ini dibantu oleh para pejabat sipil bumi putera. Para pejabat sipil ini disesuaikan dengan kondisi afdeling masing-masing, sehingga nama dan jumlah jabatan di afdeling Martapura, Tanah Laut dan Afdeling Amuntai tidak seragam. Di Afdeling Tanah Laut, karena terdapat penduduk Cina, maka ditempatkan pula seorang pejabat Cina dalam pemerintahannya.¹³ Pada umumnya dipimpin oleh assistent resident dibantu antara lain oleh seorang regent, jaksa, mufti, kepala district dan penghulu.¹⁴

Berhubung keadaan sudah dianggap aman, maka di Karesidenan Afdeling Selatan dan Timur Borneo dibentuk pemerintahan sipil dipimpin oleh seorang resident berkedudukan di Banjarmasin.

¹⁰ Soenarto *et al.*, "*Pemerintahan Hindia Belanda di Kalimantan Selatan*", Laporan Penelitian FKIP Unlam, Banjarmasin, 1996, hal. 34.

¹¹ Soenarto *et al.*, *ibid.*, hal. 32-33. Lihat pula Depdikbud, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Banjarmasin, 1977/1978, hal. 64-65 yang terdiri dari 3 afdeling yaitu Afdeling Banjarmasin, Afdeling Martapura dan Afdeling Amuntai. Bandingkan dengan Amir Hasan Kiai Bondan, *op.cit.*, hal. 192-194.

¹² Amir Hasan Kiai Bondan, *op.cit.*, hal. 192.

¹³ Soenarto *et al.*, *op.cit.*, hal. 34.

¹⁴ Lihat Amir Hasan Kiai Bondan, *op.cit.*, hal 192-193 dan Depdikbud, *op.cit.* hal. 65.

Tercatat sebagai resident pertama setelah usai Perang Banjar (versi Belanda tahun 1866) adalah K.W.Tiedske yang memulai menduduki jabatan pada bulan Maret 1866 sampai dengan 1870.

Keorganisasian pemerintahan Hindia Belanda selalu mengalami perubahan, begitupula dengan jumlah afdeling dan distriknya. Berdasarkan Staatsblad tahun 1898 nomor 178, di daerah Borneo bagian Selatan dibagi ke dalam beberapa wilayah administratif, yakni Afdeling Banjarmasin dan daerah sekitarnya (*ommelanden*) Afdeling Martapura; Afdeling Kandangan; Afdeling Amuntai; Afdeling Tanah-tanah Dusun (*Doesoenlanden*); Afdeling Tanah-tanah Dayak (*Dajaklanden*); Afdeling Sampit; Afdeling Pasir dan Tanah Bumbu.

Masing-masing afdeling terbagi atas beberapa onderafdeling dan district, yaitu:

- a. Afdeling Banjarmasin, terdiri dari:
 1. Onderafdeling Banjarmasin dan daerah sekitarnya meliputi wilayah ibukota Banjarmasin dan daerah sekitarnya.
 2. Onderafdeling Bakumpai dengan ibukota Marabahan terdiri dari District Bakumpai.
- b. Afdeling Martapura dengan ibukota Martapura, terdiri dari:
 1. Onderafdeling Martapura terdiri atas District Martapura
 2. Onderafdeling Riam Kiwa dan Riam Kanan terdiri dari District Riam Riam Kiwa dan Riam Kanan.
 3. Onderafdeling Tanah Laut terdiri dari District Pleihari, Maluka dan District Satui.
- c. Afdeling Kandangan dengan Ibukota Kandangan, terdiri dari:
 1. Onderafdeling Amandit dan Negara terdiri dari District Amandit dan District Negara.
 2. Onderafdeling Banua Ampat dan Margasari, terdiri dari District Banua Ampat dan District Margasari.
 3. Onderafdeling Batang Alai dan Labuan Amas, terdiri dari District Batang Alai dan Labuan Amas.
- d. Afdeling Amuntai dengan ibukota Amuntai, terdiri dari:
 1. Onderafdeling Amuntai, terdiri dari District Amuntai, Tabalong, dan District Kelua.
 2. Onderafdeling Alabio dan Balangan, terdiri dari District Alabio dan Balangan.
- e. Afdeling Tanah-tanah Dusun (*Doesoenlanden*), dengan ibukota Muara Tewe terdiri dari:
 1. Onderafdeling Dusun Atas (*Boven Doesoen*) terdiri dari
 - a. District Dusun Atas (*Boven Doesoen*) yang meliputi Onderdistrict Laung dan Siang Murung,
 - b. District Dusun Tengah (*Midden Doesoen*) yang meliputi Onderdistrict Montallat dan Onderdistrict Kwala Benangin.
 2. Onderafdeling Dusun Bawah (*Beneden*) dan Dusun Timur (*Oost Doesoen*) dan Mengkatip, dengan ibukota Buntok.
- f. Afdeling Tanah-tanah Dayak (*Dajaklanden*), dengan ibukota Kuala Kapuas terdiri dari:
 1. District Dayak Besar (*Groote Dajak*) yang terbagi lagi dalam onderdistrict–onderdistrict :
 - a. Kahayan Muara (*Beneden Kahajan*)
Kahayan Tengah (*Midden Kahajan*)
Kahayan Hulu (*Boven Kahayan*)
 - b. Rungan
 - c. Manuhing
 2. District Dayak Kecil (*Kleine Dajak*) terbagi atas onderdistrict:
 - a. Kapuas Muara (*Beneden Kapoeas*)
 - b. Kapuas Tengah (*Midden Kapoeas*)
 - c. Kapuas Hulu (*Boven Kapoeas*)
- g. Afdeling Sampit, dengan ibukota Sampit terdiri dari:
 1. District Sampit dengan Onderdistrict Sampaga, Mentaya dan Kuayan
 2. District Mendawai dengan Onderdistrict Katingan Atas dan Samba
 3. Distrik Pembuang dengan Onderdistrict Sembulu dan Serayan
 4. Kerajaan Kota Waringin (*leenplichtig*), landschap Kumai, dan sebagian landschap Jelei.
- h. Afdeling Pasir dan Tanah Bumbu, dengan ibukota Kota Baru, terdiri dari daerah "*leenplichtige landschappen*" Pasir, Pagatan, Kusan dan daerah landschap yang langsung diperintah kepala

bumi puteranya: Cengal, Manunggul, Bangkalan, Sampanahan, Cantung, Batu Licin, Sabamban dan Pulau Laut dengan pulau Sebu.¹⁵

Dalam struktur Karesidenan Afdeling Selatan dan Timur Borneo, setiap afdeling dipimpin oleh seorang *assistent resident* dan *onderafdeling* oleh seorang *controleur*. Kepala distrik selalu seorang bumi putera dengan pangkat *kiai*¹⁶ yang menjabat semacam *wedana* di Jawa.

Pada awal abad ke-20 terjadi perubahan struktur kepemimpinan yang mana Karesidenan Afdeling Selatan dan Timur Borneo dibagi Belanda atas dua residensi yang masing-masing residensi dipimpin oleh seorang *resident*. Berdasarkan pembagian organik dari *Indische Staatsblad* tahun 1913 nas 199 dan 279, daerah Karesidenan Borneo Selatan yang beribukota Banjarmasin dibagi atas dua *afdeling*, yaitu:

1. *Afdeling* Banjarmasin, terbagi atas empat *onderafdeling*:
 - a. *Onderafdeling* Banjarmasin diperintah seorang asisten residen, dibantu seorang *controleur*, ibukotanya Banjarmasin.
 - b. *Onderafdeling* Marabahan, diperintah seorang *civiel gezaghebber* bertempat di Marabahan.
 - c. *Onderafdeling* Martapura, diperintah seorang *controleur* dengan ibukotanya Martapura.
 - d. *Onderafdeling* Pleihari dengan ibukota Pleihari, diperintah oleh seorang *civiel gezaghebber*.
2. *Afdeling* Hulu Sungai terbagi atas lima *onderafdeling*:
 - a. *Onderafdeling* Kandangan dengan ibukota Kandangan, diperintah oleh asisten residen sebagai kepala afdeeling dengan dibantu oleh seorang *civiel gezaghebber*.
 - b. *Onderafdeling* Rantau di bawah seorang *civiel gezaghebber*.
 - a. *Onderafdeling* Barabai, di bawah seorang *civiel gezaghebber*.
 - b. *Onderafdeling* Amuntai, dibawah seorang *controleur*.
 - c. *Onderafdeling* Tanjung, dibawah seorang *controleur*.¹⁷

Afdeling Banjarmasin meliputi wilayah Martapura, Banyu Irang, Tabanio, bagian kanan daerah Sungai Barito, Pulau Petak sampai dengan Laut Jawa. Sedangkan daerah *Afdeling* Hulu Sungai meliputi daerah aliran Sungai Bahan. Dalam struktur pemerintahan tersebut, setiap *onderafdeling* dibagi atas *district* dan setiap *district* juga terdiri dari *onderdistrict*-*onderdistrict*.

Karesidenan Afdeling Selatan dan Timur Borneo sebagian besar dijalankan oleh pegawai-pegawai pamong praja bumi putera, hanya pimpinan puncak dari struktur pemerintahan seperti *resident*, *assistent resident* dan sebagian *controleur* dipegang oleh pegawai Belanda. Sedangkan jabatan selebihnya seperti *hoofdkiai*, *kiai*, dan *assistent kiai* dipegang oleh pamongpraja bumi putera.

Di posisi puncak, terdapat jabatan-jabatan dengan nama *resident* yang mengepalai *residentie*, *assistent resident* untuk *afdeling*, *controleur* dan *adspirant controleur* untuk sebuah *onderafdeling*. Dalam pelaksanaan tugasnya, seorang *assistent resident* membuat laporan pertanggungjawaban kepada *resident* di Banjarmasin. Laporan itu diolah dan disusun berdasarkan data-data yang diberikan oleh pegawai-pegawai bawahannya di wilayah *onderafdeling* dan distrik yang dipimpinnya.

Tidak semua afdeling mempunyai tugas yang sama, hal tersebut bisa dilihat dari perjalanan karir *assistent resident* ketika berkuasa, terlebih lagi bagi yang dipilih lebih dari satu kali di wilayah yang tersebut. Hanya satu dari empat orang *assistent resident* yang diangkat untuk kedua kalinya di daerah yang sama, dan biasanya yang diangkat itu adalah yang disenangi karena pengalaman dan keberhasilan mereka dalam menjalankan kekuasaan. Rata-rata *assistent resident* memimpin selama dua setengah tahun, tetapi peraturan karesidenan memberikan kesempatan sampai empat tahun.

Penempatan pegawai-pegawai pamongpraja bumiputera dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda dilatarbelakangi oleh adanya kendala bahwa penempatan pegawai orang Eropa di tingkat lokal tidak mungkin dilakukan, karena harus berhadapan dengan penduduk pribumi

¹⁵ M. Idwar Saleh et al, *Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional (1900-1942) di Kalimantan Selatan*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Banjarmasin, 1978/1979, hal. 6-9.

¹⁶ Yang dimaksud dengan "kiai" di sini bukanlah ulama agama Islam, melainkan gelar pangkat di masa Kerajaan Banjar yang dipakai Belanda sebagai gelar jabatan dalam struktur pemerintahannya.

¹⁷ Depdikbud, *op.cit.*, hal. 65-66. Lihat pula Pemda Tk.I Kalsel, *Sejarah Perjuangan Rakyat Menegakkan Kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan (Periode 1945-1949)*, Banjarmasin, 1994, hal.26-27.

dengan segala risikonya. Oleh karena itu, di setiap distrik ditempatkan seorang pimpinan yang berasal dari masyarakat setempat yang menjabat sebagai kiai yang mempunyai kedudukan sama dengan wedana di Jawa dan untuk mengepalai kiai-kiai itu diangkat seorang Kepala Kiai (*Hoofdkiai*), mereka memperoleh gaji dari pemerintah kolonial. Pada tahun 1918, jabatan kiai diperluas dengan menempatkan seorang asisten kiai yang memimpin *onderdistrict*. Para pamong praja bumiputera itu mempunyai tugas sebagai perantara penduduk pribumi dengan penguasa kolonial.

Pada tahun 1922 Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Undang-undang Perubahan (*Bestuurshervormingswet*). Berdasarkan undang-undang tersebut, maka wilayah Hindia Belanda dibagi-bagi atas *gouvernementen* atau kesatuan-kesatuan daerah yang kemudian disebut propinsi. Mula-mula dibentuk Propinsi Jawa Barat (1926), Jawa Timur (1929) Jawa Tengah (1930). Selain itu, pada tahun 1926 juga dibentuk Propinsi Maluku, tetapi kemudian mengalami kegagalan. Baru kemudian melalui Besluit Gubernur Jenderal (Staatsblad 1938 Nomor 264) terhitung 1 Juli 1938 diadakan lagi tiga propinsi atau *eilandgewest*, ialah Sumatera, Borneo (Kalimantan), dan Timur Besar (*Groote Oost*) dengan berturut-turut ibukotanya ibukotanya Medan, Banjarmasin, Makassar.¹⁸

Pada tahun 1938 itu pula keluar Besluit Gubernur Jenderal (Staatsblad 1938 Nomor 352) yang mengatur lebih lanjut ketiga propinsi tersebut. Mengenai Gewest Borneo ditentukan bahwa ibukotanya Banjarmasin, dan dibagi dalam dua bagian yakni Residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo ibukotanya Banjarmasin, dan Residentie Westerafdeling van Borneo ibukotanya Pontianak. Khusus mengenai Zuider en Oosterafdeling van Borneo terbagi dalam lima afdeling, yaitu :

1. Afdeling Banjarmasin, terdiri atas empat onderafdeling
 - a. Onderafdeling Banjarmasin-Marabahan
 - b. Onderafdeling Martapura
 - c. Onderafdeling Pleihari
 - d. Onderafdeling Pulau Laut-Tanah Bumbu
2. Afdeling Hulu Sungai, terdiri atas lima onderafdeling
 - a. Onderafdeling Tanjung
 - b. Onderafdeling Amuntai
 - c. Onderafdeling Barabai
 - d. Onderafdeling Kandungan-Rantau
3. Afdeling Kapuas Barito, terdiri atas enam onderafdeling
 - a. Onderafdeling Kotawaringin
 - b. Onderafdeling Sampit
 - c. Onderafdeling Dayak Bawah (*Beneden Dayak*)
 - d. Onderafdeling Dayak Atas (*Boven Dayak*)
 - e. Onderafdeling Puruk Cahu
 - f. Onderafdeling Muara Tewe
4. Afdeling Samarinda, terdiri atas lima onderafdeling
 - a. Onderafdeling Pasir
 - b. Onderafdeling Balikpapan
 - c. Onderafdeling Kutai Timur (*Oost Kutei*)
 - d. Onderafdeling Kutai Barat (*West Kutei*)
 - e. Onderafdeling Mahakam Hulu (*Boven Mahakam*)
5. Afdeling Bulungan dan Berau, terdiri atas lima onderafdeling
 - a. Onderafdeling Berau
 - b. Onderafdeling Apo Kayan
 - c. Onderafdeling Bulungan
 - d. Onderafdeling Tanah-tanah Tidung (*Tidungsche Landen*)

¹⁸ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia V*, Balai Pustaka, Jakarta 1993, hal 55.

e. Onderafdeling Tarakan¹⁹

Propinsi Borneo (*Gewest Borneo*) dikepalai oleh seorang gubernur, sedangkan tiap-tiap residentie dikepalai oleh seorang residen. Di tingkat Propinsi terdapat satu “masyarakat kelompok” (*groepsgemeenschap*) lengkap dengan dewan perwakilan dan dewan hariannya di bawah pimpinan residen sebagai ketuanya. Di setiap karesidenan, terdapat berbagai dinas khusus, antara lain pekerjaan umum, kesehatan rakyat, kehewanan, pertanian dan lain-lain, yang masing-masing dipimpin oleh inspektur daerah.

Berhubung wilayah Kalimantan telah menjadi Propinsi tersendiri maka kepala pemerintahannya bukan lagi seorang residen melainkan seorang gubernur. *Gouverneur* pertama dan sekaligus terakhir bagi Propinsi Borneo adalah Dr. B.J. Haga yang memegang kekuasaan tanggal 28 Juni 1937 sampai dengan 1942.

2. Desentralisasi Pemerintahan

Setelah tahun 1900 pembagian Residensi Afdeling Selatan dan Timur Borneo diatur dengan lebih teliti, karena sebelum tahun 1900 pemerintahan sangat sentralistik. Seluruh jalannya pemerintahan diatur oleh menteri jajahan, dan pusat pemerintahan di negeri Belanda. Ketika pemerintah pusat tidak mempunyai ketegasan dalam mengambil keputusan, maka Gubernur Jenderal dan aparatnya yang mengurus semua masalah. Warga tidak dapat menyuarakan kepentingan-kepentingannya. Oleh karena itu administrasi pemerintahan kemudian diubah berdasarkan prinsip persamaan dan ekonomi.²⁰

Reorganisasi bertujuan untuk mempertinggi efisiensi dan memperbesar otonomi. Desentralisasi atau otonomi yang dimaksudkan itu mencakup tiga hal :

1. Delegasi kekuasaan dari pusat pemerintahan ke pemerintahan Hindia Belanda, dari pemerintah ke departemen, pejabat lokal, dan dari pejabat Belanda ke pejabat pribumi;
2. Menciptakan lembaga-lembaga otonom yang mengatur urusan sendiri.
3. Pemisahan keuangan negeri dari keuangan pribadi.²¹

Perubahan pemerintahan juga mencakup rencana memperbesar kekuasaan kepada pejabat pribumi. Sesuai dengan prinsip efisiensi, direncanakan untuk mengganti pejabat Belanda dengan pejabat pribumi. Dengan demikian, pejabat pribumi tidak lagi berfungsi sebagai simbol, tetapi mereka merupakan alat administrasi. Akan tetapi di daerah luar Jawa perkembangan pemerintahan menunjukkan perbedaan karena jarang penduduknya, adanya perbedaan dalam struktur masyarakat serta lembaga-lembaganya. Di luar Jawa terdapat masyarakat adat yang hidup dengan tatacaranya sendiri dan juga terdapat banyak daerah dengan pemerintahan sendiri (*Zelfbesturende landschappen*).

Perkembangan pemerintahan kolonial di ibukota afdeling, ekspansi modal swasta yang diikuti dengan bertambahnya tenaga intelek Eropa menimbulkan bagian-bagian kota yang hanya ditempati oleh orang-orang kulit putih dengan budaya Baratnya. Secara politis dan ekonomis mereka berkuasa atas suatu kota, sehingga timbul suatu keinginan kelompok ini untuk mengatur urusan atau kepentingannya sendiri, lebih bebas dari ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh pemerintah kolonial.

Dari sinilah kemudian muncul Undang-undang desentralisasi dari tahun 1903 yang menciptakan dewan-dewan lokal, baik dewan karesidenan maupun dewan kota sebagai lembaga hukum yang mempunyai wewenang membuat peraturan-peraturan tentang pajak, urusan bangunan-bangunan umum, dan sebagainya. Melalui undang-undang tersebut, kota-kota kemudian menjadi sejenis daerah otonom dengan penyerahan dan penyelenggaraan kekuasaan yang terbatas, dimana masyarakat kulit putih diberi keleluasaan mengatur soal kehidupan kelompok mereka melalui sebuah gemeente.

¹⁹ J. Thomas Lindblad, *Between Dayak and Dutch: The Economic History of Southeast Kalimantan 1880-1942*, Foris Publications, KITLV Leiden, 1988, hal.130 dan Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun*, PT. Jayakarta Agung Offset, Jakarta, 1979, hal. 32-33. Menurut pembagian administratif yang terakhir (1942), Afdeling Hulu Sungai memiliki enam Onderafdeling, karena Rantau yang sebelumnya berada dalam Onderafdeling Kandangan-Rantau, berdiri sendiri menjadi sebuah Onderafdeling, lihat Irawan Soejito, *op.cit.*, hal. 60.

²⁰ Soenarto *et al*, *op.cit.*, hal. 38-40.

²¹ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hal 47.

Jika di pusat pemerintahan, dibentuk *Volksraad* atau Dewan Rakyat yang jika dilihat dari hak-haknya lebih berfungsi sebagai lembaga penasihat Gubernur Jenderal, maka di daerah dibentuk *Gemeente* yang pertamakali didirikan di Batavia pada tahun 1905. Untuk wilayah Afdeling Selatan dan Timur Borneo, *Gemeente* pertama kali didirikan di Banjarmasin berdasarkan *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* (Lembaran Negara Hindia Belanda) tahun 1919 nomor 252 tanggal 28 Mei 1919 yang berlaku mulai 1 Juli 1919.²² Berdasarkan Surat keputusan tersebut, dinyatakan beberapa hal antara lain :

1. Ibukota karesidenan “Zuider en Oosterafdeling van Borneo” yakni Banjarmasin dijadikan *Gemeente* Banjarmasin.
2. Bahwa *Gemeente* Banjarmasin diberi bantuan khusus uang 43.500 gulden tiap tahun.
3. *Gemeente* melakukan tugas pemeliharaan, perbaikan, pembuatan jalan, penerangan jalan, pemadaman kebakaran, kuburan dan sebagainya.
4. Dalam *Gemeente* Banjarmasin dibentuk *Gemeenteraad* (*Dewan Haminte*) dengan nama *Gemeenteraad Bandjermasin*.

Personalia atau keanggotaan *Gemeenteraad* Bandjermasin ada dua kemungkinan yakni ada yang diangkat dan ada pula yang dipilih. Ketika pertama kali dibentuk, personalia *Gemeenteraad* Bandjermasin diangkat (*benoemd*) berdasarkan *Staatsblad* 252 tanggal 1 Juli 1919. Sebagai ketua dan anggota-anggotanya sebagai berikut.

Ketua sekaligus Assistent Resident Afdeling Banjarmasin : E. Parelaer²³

Anggota-anggota

- a. Golongan Warga Belanda
 1. B.J.W.E. Broers
 2. A.H. Dewald
 3. Dr. H.M.G. Dikshoorn
 4. Mr. L.C.A. Eldik Thieme
 5. C.L. Gosen
 6. J. Stofkooper
 7. J.C. Vergouwen
- b. Golongan Warga Bumiputera, bukan Belanda
 1. Pangeran Mohamad Ali
 2. Amir Hassan
 3. Hairul Ali
 4. Mohamad Lelang
- c. Golongan Warga bukan Bumiputera/Bukan Belanda
 1. Lie Jauw Phek
 2. Chie San Cong

Berdasarkan *Gouvernements Besluit* tanggal 29 Maret 1930 No. 7 untuk pertama kali diadakan pemilihan anggota-anggota *Gemeenteraad*. Pelantikan anggota-anggota terpilih (*verkozen leden*) yang pertama dilakukan pada 18 November 1930, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut.

Ketua sekaligus Assistent Resident Afdeling Banjarmasin : C.L. Dankmeijer

Anggota-anggota:

- a. Golongan Warga Belanda
 1. J.A. van Beuge
 2. B.J.W.E. Broers

²² M. Idwar Saleh, *Banjarmasih*, Museum Negeri Lambung Mangkurat, Banjarbaru, 1981-1982, hal. 36.

²³ P.M. Hooykaas, *Gedenkboek ter Gelegenheid van het 15-Jarig Bestaan van de Gemeente Bandjermasin 1919-1934*. P.M. Hooykaas ketika itu menjabat Assistent Resident Bandjermasin dan Voorzitter (Ketua) *Gemeenteraad* Bandjermasin sejak 1 Juni 1931. M. Idwar Saleh, *ibid.*, hal. 36 dan 103 menyebutkan ketuanya adalah P.J.F.D. van de Riviera yang datanya diambil dari *Regeeringsalmanak* 1920 di pag. 792 *Gemeenteraad* Bandjermasin.

3. F.A.L. Calbo
 4. C.L. Gosen
 5. J.Th. W. Meijling
 6. A.D. Meister
 7. C. Spitsbergen
- b. Golongan Warga Bumiputera, bukan Warga Belanda
1. Pangeran Mohamad Ali
 2. Amir Hassan
 3. R.M. Mr. Gondowinoto
 4. F. Runtuwene
- c. Golongan bukan Bumiputera, bukan Warga Belanda
- d. Kho Ek Lin
 - e. J. Tan²⁴

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Gementeraad Bandjermasin diminta untuk membuat rencana anggaran belanja tahunan. Ketika dewan ini pertama kali dibentuk, mereka telah disediakan anggaran belanja sebesar 62.751 gulden, namun pada tahun-tahun berikutnya mereka harus mengajukan rencana anggaran. Tercatat pada tahun 1930 Gementeraad Bandjermasin mengajukan anggaran belanja tahunan sebesar 400.000 gulden, meningkat dari anggaran sebelumnya yang hanya sebesar 250.000 gulden.²⁵

Selain Gementeraad Bandjermasin, pada awal 1921 dibentuk pula Dewan Distrik Barabai dengan nama *Plaatselijke Raad Barabai* berdasarkan Staatsblad No.368.²⁶ Perbedaan mendasar antara Gementeraad Bandjermasin dengan mitranya di Barabai adalah kenyataan yang ada dalam lembaga terakhir bahwa wakil-wakilnya adalah orang-orang pribumi. *Plaatselijke Raad Barabai* memiliki suasana demokratis karena jasa kepala distrik, R.J.W. Reys. Sistem demokratis tersebut terbentuk pada tahun 1921 dan diterapkan untuk mengontrol keuangan dan kekayaan masyarakat di wilayah tersebut. *Plaatselijke Raad Barabai* mengawasi dua belas pasar dan bertanggung jawab untuk mengurus rumah sakit, perusahaan listrik dan telepon. Pada tahun 1920-an anggaran tahunan *Plaatselijke Raad Barabai* naik dua kali lipat, dari 140.000 gulden sampai 280.000 gulden.²⁷

Seiring dengan pembentukan Propinsi Borneo (*Gewest Borneo*) tahun 1938 maka terjadi pula pembaharuan dewan kota, dimana status *Gementeraad Bandjermasin* ditingkatkan menjadi *Stadsgemeenteraad* sesuai dengan Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 17 Juni 1938 (Staatsblad 1938 Nomor 359). Anggota dewan tetap berjumlah 13 orang dengan susunan sebagai berikut.

Ketua : Assistent Resident A.R. Mulder
 Anggota : 1. Amir Hasan

2. Merah Johansyah
3. A.J. van der Heijden
4. W.A. van Joost
5. Kho Ek Lin
6. D.A. Pieren
7. dr. R. Sosodoro Jatikusumo
8. Mr. Tajuddin Noor
9. Teng Siau Kok
10. L. Miagrove
11. F.H.M. Verbeek

Sekretaris merangkap Rooimeester : H.G. Smies

Direktur Pekerjaan Umum (Directeur Gemeente Werken) : E.H. Patiwaal

Pelaksana Pembukuan (Boekhouder) : H.R. de Heer

²⁴ P.M. Hooykaas, *ibid.*, hal. 20.

²⁵ J. Thomas Lindblad, *op.cit.*, hal. 132.

²⁶ Irawan Soejito, *op.cit.*, hal. 86.

²⁷ J. Thomas Linblad, *op.cit.*, hal. 132.

Adanya Gementeraad dan kemudian Stadsgemeenteraad tidak memberikan pengaruh terhadap perbaikan kehidupan masyarakat bumiputera, karena hak otonomi yang diberikan penguasa kolonial melalui lembaga itu hanya ditujukan untuk kepentingan masyarakat kulit putih sebagai golongan penguasa baik di bidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan.

3. Ekspansi Modal Swasta

Pemerintahan Hindia Belanda di Kalimantan Selatan berjalan paralel dengan kepentingannya di bidang perdagangan dan perekonomian. Apalagi setelah mengeluarkan Undang-Undang Tanah Agraria pada tahun 1870, maka Belanda telah mengikuti arus imperialisme modern dengan membuka diri terhadap masuknya modal swasta.²⁹

Undang-undang Agraria 1870 dibuat dengan tujuan untuk memberikan kesempatan yang luas bagi perkembangan modal asing, terutama modal Belanda, dan melindungi serta memperkuat hak-hak tanah bagi orang-orang bumiputera, meski tujuan yang terakhir ini sama sekali tidak teraih.

Dalam hal hak atas tanah ini, pemerintah kolonial mengatur apa yang disebut dengan *erfpacht* yakni hak sewa yang turun temurun untuk tidak lebih dari tujuh puluh lima tahun, untuk pertanian atau perkebunan yang luas ataupun kecil.

Perkembangan modal swasta ke luar Jawa dapat berlangsung karena didukung oleh ekspansi teritorial, termasuk ke Kalimantan yang antara lain dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan campur tangan (intervensi) Inggris yang ketika itu telah berkuasa di Sabah Borneo Utara, serta dalam rangka politik pembulatan wilayah (*afroindings-politiek*) sehingga terbentuk *Pax Neerlandica*.

Meski terbuka terhadap ekspansi modal swasta, namun yang dilakukan Belanda tidak jauh berbeda dengan sistem sebelumnya ---VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) dan Sistem Tanam Paksa--- yakni hanya mencari produk pertanian Indonesia, khususnya Jawa, untuk dijual di pasaran dunia tanpa mengubah struktur ekonomi pribumi. Negeri Belanda memang tidak pernah berhasil mengembangkan ekonomi ekspor barang pabrik. Oleh karena itu kepentingan Belanda di Indonesia tetap hampir sepenuhnya bersifat perniagaan sampai pada akhir kekuasaannya.³⁰

Perbedaan antara Jawa dengan Kalimantan, antara lain terlihat bahwa selain Sistem Tanam Paksa tidak pernah sepenuhnya diterapkan di sini, juga fokus pengembangan produk tidak lagi ditujukan kepada rempah-rempah, manis-manisan dan bahan perangsang seperti di Jawa, melainkan dipusatkan pada produksi bahan mentah untuk industri. Ini merupakan refleksi dari perubahan dalam kondisi pasaran dunia sebagai pertumbuhan manufaktur besar-besaran yang luar biasa di Eropa, sesudah pertengahan abad ke sembilan belas. Pada tahun 1900, karet, timah dan minyak bumi yang merupakan 17 persen dari total ekspor Hindia Belanda, hampir seluruhnya hasil luar Jawa.

Dari Kalimantan Selatan, primadona ekspor Hindia Belanda berupa karet, batu bara dan minyak bumi, perintisannya telah dilakukan baik oleh VOC maupun pemerintah Hindia Belanda sendiri. Untuk menghadapi perdagangan yang sebelumnya dikuasai Bugis maupun Cina, pada tahun 1840 Belanda membuka kantor *Nederlandsche Handels Maatschappij* (NHM) di Banjarmasin yang kemudian diikuti oleh *Borneo-Sumatra Handels Maatschappij* (BORSUMIJ).³¹

Borsumij melakukan hubungan antar kota pantai di Jawa dengan Kalimantan Selatan setiap sepuluh hari, dan dalam musim timur dua kapal layarnya mengangkut kajang, tikar, tembakau, kayu ke Panarukan dan kota-kota lain di Jawa. Selain Borsumij, beroperasi pula *Koninklijke Pakketvaart Maatschappij* (KPM) yang melayari sungai Barito hingga ke Puruk Cahu.³²

²⁸ M. Idwar Saleh, , *op.cit.* hal. 38.

²⁹ Clifford Geertz, *Involusi Pertanian Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, Bharatara Karya Aksara, Jakarta, 1983, hal. 87-88.

³⁰ Clifford Geertz, *ibid.*, hal. 48-49.

³¹ J. Thomas Lindblad, *op.cit.*, hal. 11-13.

³² M. Idwar Saleh *et al*, *op.cit.*, hal.90

Dengan meningkatnya pemakaian kapal uap yang memudahkan hubungan dengan kota-kota pantai di Jawa dan untuk kepentingan ekspor dan impor, telah mendorong Belanda untuk mengeksploitasi batu bara. Berdasarkan kontrak tahun 1826 dengan Kesultanan Banjar, Belanda memperoleh konsesi dengan paksa untuk membuka tambang batu bara di Pengaron dengan nama Oranje Nassau yang pembukaannya dilakukan Gubernur Jenderal J.J. Rochussen pada tahun 1849. Tambang ini beroperasi sebagai perusahaan kecil milik negara yang menghasilkan 10.000 ton per tahun.

Setelah Oranje Nassau didirikan pula dua buah perusahaan tambang dekat Martapura yakni Julia Hermina dan Delft, namun dalam perkembangannya banyak pekerja tambang ini tewas saat awal pertama kali meletusnya Perang Banjar pada tahun 1859. Upaya menghidupkan kembali tambang tersebut tidak berhasil ketika pemerintah menganggapnya tidak lagi penting dengan menolak memberikan investasi yang banyak sementara usaha menghimpun modal swasta juga mengalami kegagalan.

Untuk mengelola pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan, maka pada tahun 1888 berdiri sebuah perusahaan *Oost Borneo Maatschappij* (OBM) berpusat di Batu Panggal. Perusahaan ini mengeksploitasi tambang batubara di Palaran, Kutai.

Pada tahun 1904 aktivitas OBM merambah ke Pulau Laut, menyusul keberhasilan Maskapai Tambang Pulau Laut (*De Steenkolen-Maatschappij 'Poeloe Laoet'*) mengeksploitasi batu bara di Semblimbing sejak 1903. Pada mulanya OBM kesulitan mengangkut hasil tambang dari Semblimbing ke Pelabuhan Stagen yang berjarak 5 kilometer. Namun OBM kemudian berhasil mengatasinya, sehingga produksi melebihi target yakni sekitar 80.000 ton di tahun 1905 yang kemudian meningkat tajam karena adanya pemasangan alat angkut mekanis.

Antara tahun 1905 –1910, jumlah tenaga kerja pertambangan di Pulau Laut meningkat dari 1500 hingga 2300 orang.. Diantaranya terdapat 1.100 orang *perantain*, 491 kuli kontrak dan 425 buruh bebas. Pulau Laut cepat menjadi tambang swasta terbesar di Hindia Belanda dan yang kedua terbesar saat itu adalah Ombilin di Sumatera Barat. Pada tahun 1912 Pulau Laut mampu menghasilkan batu bara 165.000 ton atau memiliki saham sekitar 27 persen dari hasil produk batu bara Hindia Belanda. Pada tahun 1913 pemerintah kolonial mengambil alih perusahaan Maskapai Pulau Laut dengan harga f 3.200.000 dan berusaha meningkatkan produksi menjadi 300.000 ton pertahun.

Keberhasilan Pulau Laut sebagai eksportir batu bara didukung oleh lokasi pelabuhannya yakni Stagen yang terletak dalam jalur pengapalan besar yang mudah ditempuh berbagai macam kapal dari Makassar karena tidak ada lagi tempat pengapalan batu bara yang dekat tempat tersebut. Sebelum tahun 1909 paling tidak 3/5 dari hasil tambang diekspor ke luar negeri antara ke Jerman, dimana batu bara Pulau Laut banyak dipakai oleh Norddeutscher Lloyd, Bremen.

Di Pulau Kalimantan, pasca Perang Dunia I ada tiga perusahaan tambang besar milik Eropa yang beroperasi yakni Maskapai Tambang Pulau Laut, OBM dan Parapattan Baru di Sambaliung. Ketiga perusahaan itu saling bersaing baik dalam hal kapasitas produksi, jumlah buruh yang digunakan maupun keuntungan yang diperoleh perusahaan. Kecenderungan produksi menunjukkan bentuk-bentuk unik dari ketiga perusahaan ini. Pada tahun 1919-1922 Maskapai Pulau Laut memperoleh keuntungan melebihi perolehan OBM dan Parapattan. Namun pada tahun-tahun berikutnya keuntungan Pulau Laut semakin menurun hingga sampai memperoleh kerugian sebesar 260.000 gulden. Sementara di tahun 1923-1929 adalah tahun-tahun yang menguntungkan bagi OBM dan Parapattan, keduanya bisa menyaingi Maskapai Pulau Laut, yang saat itu mengalami penurunan sehingga dibubarkan pada tahun 1930. Pada mulanya OBM yang berjalan pesat, tetapi sesudah tahun 1927 Parapattan berhasil sebagai ranking pertama sebagai perusahaan tambang batu bara terbesar di Kalimantan Selatan.³³

Primadona ekspor Hindia Belanda adalah karet. Tanaman ini mulai dikenal dunia sekitar tahun 1900 dan masuk ke Kalimantan Selatan melalui dua jalan yang lokasinya terpisah yakni daerah Pagat (dekat Barabai) dan tempat perkebunan tembakau di wilayah utara Hulu Sungai. Pada mulanya karet jenis *Ficus Elastica* dan *Hevea Brasiliensis* dicoba di tanam di Perkebunan Hayup

³³ J. Thomas Lindblad, *op.cit.* hal. 89-90.

dekat Tanjung oleh dua orang pengusaha bernama C. Bohmer dan W.M. Ernst tetapi kemudian mengalami hambatan. Perkebunan karet kemudian bisa dikembangkan dengan bantuan dana dari bank-bank di Berlin dan pengawasan dari Perusahaan Karet Borneo yang berbasis di Banjarmasin. Seorang pengusaha bernama E.A. Hilkes mencoba menanam karet dengan mendatangkan bibit karet Hevea dari Semenanjung Malaya. Ia membuat perkebunan di daerah Martapura; Tanah Intan (Karang Intan) dan Danau Salak yang jumlah pohonnya lebih dari 100.000 pohon di tahun 1907.

Penorehan karet dilakukan setelah usia pohon 5-6 tahun. Untuk melakukan penorehan karet di Hayup, Tanah Intan dan Danau Salak dipekerjakan 1.250 orang pada tahun 1910 dan kebanyakan dari mereka berasal dari Jawa. Mereka ditempatkan di bidak-bidak kecil. Bagi buruh yang tidak terampil, ia hanya menerima upah 35 cents perhari, sangat jauh bedanya dengan upah yang diberikan pengusaha tambang di Pulau Laut.

Pada awal 1910 terjadi perubahan kepemilikan perkebunan karet di Kalimantan Selatan, dimana Hilkes menjual Tanah Intan kepada *Southeast Borneo Plantations Ltd* yang berkedudukan di London, dan setelah itu didirikanlah anak perusahaannya *Tanah Intan Estate Ltd* di Banjarmasin. Setelah itu menyusul C. Bohmer yang menjual Perkebunan Hayup kepada *Hayup Rubber Estates Ltd* dimana ia tetap menjabat sebagai direktur. Kemudian pada tahun 1917 tatkala Danau Salak dipimpin oleh H.G. Oeder, yakni manajer Hilkes yang mempunyai banyak relasi dengan bank-bank di Dusseldorf, ia menjual perkebunan tersebut kepada *Japanese Dutch Borneo Rubber Industry Company*. Ketiga pendiri perkebunan karet tersebut memperoleh keuntungan besar, karena menjual aset-aset mereka pada saat harga karet dunia menguat.

Selain perkebunan yang dikelola oleh pengusaha-pengusaha Eropa, karet Hevea juga dibudidayakan oleh pengusaha-pengusaha kecil pribumi di Hulu Sungai, terutama ditanam di kebun-kebun atau lahan dekat penanaman padi. Tanah yang cocok ditanami adalah daerah Hulu Sungai di bagian timur laut: yaitu mulai dari Rantau ke arah Sungai Balangan, dan barat laut: dari Birayang ke arah Tanjung.

Tanjung menjadi lahan pertama penanaman karet bagi orang Banjar, karena di sana banyak penduduk yang bekerja sebagai buruh di Hayup dimana mereka belajar menanam, menoreh getah dan mengolah lateks. Ketika ada waktu mereka kembali ke kampung dan mencoba menanam sendiri sesuai dengan pengetahuan yang mereka dapatkan. Hingga tahun 1910 perkebunan karet semakin banyak di Tanjung, dan tahun 1911 muncul di Barabai dan tahun 1912 ada di Amuntai dan Kandangan. Haji Mohamad Salah dari Longawang, dekat Kandangan ketika sepulang dari Johor membawa bibit dari Penang dan menanamnya sebagai pohon karet pertama di tempat kelahirannya.

Pengusaha-pengusaha kecil pribumi memperoleh keuntungan semenjak karet diekspor ke luar negeri. Dan tatkala harga karet tetap melambung selama Perang Dunia I dan mencapai harga tertinggi antara tahun 1919-1920, maka penduduk pribumi beramai-ramai menanam pohon karet secara besar-besaran. Aset masyarakat Hulu Sungai akan pohon karet berlipat ganda. Menurut hasil penelitian tahun 1923, ada 4,3 juta pohon yang ditanam masyarakat dan meningkat pada tahun 1929 menjadi sekitar 8,9 juta pohon yang berasal dari 33.000 ladang milik perorangan, yang menurut hasil penelitian tahun 1936 meningkat menjadi sekitar 49 juta pohon yang ditanam tahun 1930-an.³⁴

Dalam hal pertumbuhan, antara tahun 1924-1936 Tanjung memiliki lahan karet lebih sedikit dari Barabai. sedang Amuntai merupakan daerah pertumbuhan paling cepat, yakni tidak kurang dari 467 persen sejak 1924. Di Kandangan, karena kebiasaan masyarakat menanam karet sampai berhimpitan membuat produktivitasnya menurun. Dalam hal lainnya, Tanjung menempati peringkat pertama di Hulu Sungai yang 1/3 wilayahnya ditumbuhi pohon karet, disusul Barabai dan Amuntai yang areal perkebunan karetnya ¼ bagian dari wilayah tempat tinggal.

C. KONDISI KEHIDUPAN MASYARAKAT

1. Pengaruh Kebudayaan Eropa

³⁴ Lihat J. Thomas Linblad, *ibid.*, hal. 58-65.

Kebudayaan Eropah yang berpengaruh besar di Kalimantan Selatan adalah kebudayaan Belanda. Pengaruhnya terhadap perkembangan masyarakat sangat terlihat pada bidang pendidikan. Dalam mengkonsolidasi dan mengeksploitasi lingkungan daerah pemerintah kolonial Belanda memerlukan pegawai-pegawai pemerintah dan swasta yang terdidik. Untuk itu didirikan sekolah-sekolah untuk mendapatkan remaja yang terdidik. Diantaranya Sekolah Guru, Sekolah Dasar kelas I dan kelas II yang berbahasa Melayu. HIS (*Hollands Inlandse School*) dan MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) yang berbahasa Belanda, dan sebagainya.

Kebudayaan baca melalui sekolah, surat kabar dan perpustakaan Balai Pustaka termasuk berkembangnya pemakaian huruf latin cukup memberi modal untuk perkembangan-perkembangan kebudayaan selanjutnya. Pendidikan barat ini membentuk teras-teras pejabat di daerah Kalimantan Selatan yang cukup berperan di bidang politik ekonomi pada zaman revolusi 1945.

Dalam bidang sosial-politik, pertumbuhan dan cara berpikir masyarakat banyak dipengaruhi oleh modernisasi yang ditampilkan Belanda seperti bentuk organisasi Sosial Politik, demokrasi modern dari pemerintah kolonial dengan segala kekuatannya.

Ide-ide tentang kemerdekaan, tentang liberalisme, tentang parlementarisme dan sebagainya merupakan bagian dari Pergerakan Nasional di daerah, masyarakat mendapatkannya melalui organisasi, surat kabar mempunyai sekolah-sekolah. Pengaruh kebudayaan Belanda dalam arti luas nampak dalam bentuk komunikasi seperti jalan raya, penggunaan kapal-kapal api modern, telegraf dan telepon, surat kabar dan radio. Kota-kota baru berkembang menjadi pusat-pusat pemerintahan, perkembangan ekonomi maupun pusat kekuatan militer. Banjarmasin menjelma menjadi kota yang juga memiliki wajah-wajah Barat pada pusat-pusat kediaman orang Barat walaupun jumlahnya kecil, ikut berperan sebagai kekuatan pembaharu, baik yang bersifat positif maupun negatif. Perubahan cara berpakaian ala Barat, cara pengaturan rumah, cara pengaturan kota lambat laun ikut mempengaruhi sikap hidup. Bahasa Belanda menjadi bahasa lapisan atas yang dianggap menjadi bahasa pergaulan orang-orang terpelajar dan status orang yang menggunakannya.

Pengaruh kebudayaan asing (Belanda) ini nampaknya berpengaruh pula pada kelompok Islam, hal ini terlihat pada usaha-usaha memodernisasi organisasi, kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan dan sebagainya. Demikian pula pengaruh kebudayaan kolonial ini terlihat pada golongan Timur Asing, yaitu golongan Cina dan Arab. Dalam hal ini yang sangat terpengaruh sekali adalah golongan peranakan yang mengikuti Pendidikan Barat melalui sekolah-sekolah yang berbahasa Belanda dan menyumbangkan "*Way of Life*" masyarakat Belanda dalam kelompoknya. Bahkan mereka ada yang meninggalkan agama lamanya yaitu Konfusius (*Khong Hu Cu*) atau Budha dan masuk agama Kristen. Lebih jauh lagi mereka mengusahakan meningkatkan statusnya agar secara hukum disamakan dengan orang Eropah. Mereka menjadi golongan yang disebut "*Gelijkgesteld*" atau "*Belanda Tiga Suku*".³⁵

Agama Kristen yang dianut oleh orang Belanda dengan kekuatannya sangat berperan mempengaruhi kebudayaan daerah ini. Banjarmasin sebagai pusatnya didirikan zending-zending Kristen dan misi-misi Katholik. Apalagi mereka mendapat bantuan dari pemerintah kolonial, mereka memiliki rumah-rumah sakit dan gereja-gereja. Sasaran mereka adalah golongan Suku Dayak.

Kelompok suku Dayak yang telah memeluk agama Kristen lebih cepat mendapatkan Pendidikan Dasar, untuk bisa membaca dan menulis serta untuk membaca Injil. Mereka lebih banyak bergaul langsung dengan para pendeta kulit putih. Hal ini dapat memberikan kesempatan untuk mendapatkan kemajuan.

Pengaruh kekuatan Eropah-Belanda di daerah ini berjalan paralel dengan kepentingan perdagangan dan perekonomian. Dengan makin terbukanya daerah ini dengan dunia luar pada permulaan abad ke-20, yang disebabkan hasil buminya, mula-mula hasil hutan seperti rotan, hasil-hasil kerajinan, karet dan kemudian minyak tanah dari daerah Tabalong, menyebabkan pengaruh

³⁵ Depdikbud, *op.cit.* hal 83. Lebih jauh tentang "*Belanda Tiga Suku*", lihat Subbab "Diskriminasi Kependudukan, Pajak dan Erakan."

itu kemudian makin hari makin intensif. Terutama karet rakyat yang mendapat pasaran yang baik di dunia, menimbulkan tingkat penghidupan rakyat makin baik. Hal ini menyebabkan masuknya pengaruh kebudayaan Barat sampai jauh ke pedalaman.

Permulaan abad ke-20 oleh Pemerintah Hindia Belanda dibuka sekolah-sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah kejuruan, menyebabkan munculnya golongan terpelajar yang mempunyai persepsi tersendiri tentang lingkungannya. Melalui golongan ini pengaruh kekuatan Eropah akan bertambah besar khususnya yang berhubungan dengan gaya hidup di bidang material.

Sekolah-sekolah yang dibuka di daerah Kalimantan Selatan pada permulaan abad ke-20 adalah antara lain: HIS di Banjarmasin tahun 1913 dan MULO di Banjarmasin tahun 1928.

Di bidang perekonomian pengaruh kekuatan Eropah-Belanda masuk melalui perdagangan hasil-hasil bumi. Dan pada tahun 1914 mereka mendirikan *Bandjermasinsche Crediet Bank* yang kemudian menjadi *Algemene Volkscredietbank*, melalui jalur ini pengaruh kekuatan Eropah-Belanda makin bertambah besar.

Di bidang pemerintahan, dibawah Residensi Afdeling Selatan dan Timur Borneo dibentuk sejumlah afdeling, onderafdeling, distrik dan onderdistrik dan desentralisasi pemerintahan yang antara lain diwujudkan dalam bentuk *Gemeenteraad* dan *Stadsgemeenteraad*. Melalui institusi-institusi pemerintahan ini, pengawasan pemerintah Hindia Belanda terhadap kepentingannya di Kalimantan Selatan semakin meningkat.

Pada tahun 1936 pemerintah Hindia Belanda membuka landasan pelabuhan udara Ulin, yang berakibat terbukanya hubungan udara antara daerah Kalimantan Selatan dengan dunia luar dan makin memperbesar pengaruh Barat di daerah ini. Pesawat terbang pertama yang mendarat di lapangan terbang Ulin (berseberangan dengan lapangan terbang yang sekarang) ialah jenis Fokker yang badannya sebagian besar terbuat dari kayu.

Pengaruh kekuatan Eropah ini terlihat pula pada usaha-usaha perdagangan rakyat daerah ini dengan memakai cara-cara modern, umpamanya dengan munculnya Sarekat Dagang Borneo (SDB). Jadi pengaruh kekuatan Eropah di daerah Kalimantan Selatan masuk melalui alat-alat komunikasi yang diciptakan Belanda seperti : Perhubungan Laut *Koninklijke Pakketvaart Maatschappij* (KPM), hubungan Pos, telepon, telegraf, pembukaan jalan-jalan raja, maupun institusi-institusi lainnya yang diciptakan pemerintah Belanda di daerah Kalimantan Selatan.

2. Pemenuhan Kebutuhan

Pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah ini dipengaruhi oleh keadaan alam dan bakat orang Banjar. Keadaan alam Kalimantan Selatan ikut menentukan pertumbuhan masyarakatnya. Alam wilayah Kalimantan Selatan terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, rawa atau baruh, danau dan sungai, serta daerah pantai laut yang sedikit luasnya.

Untuk menghubungkan daerah-daerah yang tersebar di Kalimantan Selatan, maka dari abad ke abad sungai memegang peranan penting untuk menghubungkan pedalaman dengan pantai di samping hubungan laut dengan pulau-pulau kecil dan kota-kota yang terletak di pantai seperti Kotabaru, Pagatan dan lain-lain.³⁶

Kebutuhan primer berupa makanan diperoleh dari mata pencaharian penduduk yang mengandalkan pertanian, perkebunan; pakaian diperoleh dari perdagangan, dan tempat tinggal diperoleh dari ramuan kayu hasil hutan.

Bahan makanan utama penduduk adalah beras yang diperoleh melalui usaha bercocok tanam padi. Lahan-lahan pertanian yang digarap terdiri dari: *Sawah*, *Ladang* atau *Tegalan*, dan *Perkebunan*.

Sawah berdasarkan berdasarkan letaknya terdiri dari dua jenis yaitu (1) Sawah Pasang Surut ialah sawah yang terdapat di daerah rawa di tepi sungai seperti di daerah Marabahan dan Negara; (2) Sawah yang terletak di dataran tinggi, seperti di daerah Kandangan, Rantau dan Barabai.

³⁶ Sjarifuddin, *Sikap Pergerakan Rakyat Menghadapi Pendudukan Belanda di Kalimantan Selatan Periode 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950*, Skripsi Sarjana Pendidikan Jurusan Sejarah Fkg Unlam, Banjarmasin, 1974, hal. 17.

Berdasarkan cara mengerjakannya dan jenis padi yang ditanam, sawah-sawah di daerah ini terdiri atas: (1) Sawah (huma) tahun. Dinamakan demikian, karena lamanya dari dari di tanam bibitnya sampai dengan selesai panen mendekati satu tahun; (2) Sawah Puduk, karena padi yang ditanam di sawah tersebut yaitu padi puduk yang umurnya sekitar enam bulan.

Sawah jenis ini berdasarkan cara menanamnya terdiri dari dua jenis yaitu Sawah Surung dan Sawah Rintak. Sawah Surung dikerjakan kalau musim kemarau agak lama, dimana rawa menjadi kering, hutan dan semak serta padang rumput (alang-alang) habis terbakar. Pada rawa yang terbakar inilah yang dijadikan sawah tempat menanam padi tersebut, dan usaha ini sifatnya insidental yang merupakan mata pencaharian tambahan bagi petani pasang surut. Panennya biasanya di saat air mulai surung atau datang. Sawah Rintak, saat menanam padi air mulai kering (rintak). Baik Sawah Surung maupun Sawah Rintak dikerjakan di daerah rawa Margasari, Negara dan sekitarnya.

Ladang dikerjakan di gunung yang pengolahannya hampir sama dengan Sawah Surung, yaitu ditanami bibit pada akhir musim kemarau menjelang musim hujan.

Perkebunan yang terdapat di Kalimantan Selatan, antara lain ialah: (1) perkebunan karet yang terdapat di dataran tinggi seperti daerah Martapura, Pleihari, Rantau, Kandangan, Barabai, Amuntai dan Tanjung. Perkebunan karet ini mulai ditanam tahun 1911 dan 1912; (2) Perkebunan kelapa terdapat di dataran tinggi dan di tepi pantai; (3) Perkebunan lada terdapat di daerah Kotabaru; (4) Perkebunan yang merupakan usaha secara kecil-kecilan, bertitik berat untuk keperluan keluarga dalam kehidupan sehari-hari, misalnya rumbia, enau, pisang, ketela pohon dan sebagainya. Di Margasari, pada tahun 1917 terjadi penanaman besar-besaran pohon rumbia dan produksi sagu.

Pada tahun 1919, Orang Banjar mulai mengenal pupuk buatan atas jasa Insinyur Lanbouw, Ph. Van Driest dan Ir. Schophuys yang mengajarkan pencangkakan mangga, rambutan, jeruk dan sebagainya.³⁷ Kemudian disusul pembinaan tani oleh Raden Noto dan Idak; (5) Kebun Penyela, yakni rawa ketika musim kemarau menjelang musim hujan ditanami semangka, mentimun, ubi jalar, waluh (labu), jagung, kacang dan sebagainya, terutama di sekitar Negara dan Amuntai.

Masyarakat sejak lama melakukan peternakan untuk memenuhi kebutuhan akan daging, ikan dan telur seperti (1) Peternakan itik di Alabio dan Aluh-aluh; (2) Kerbau di Pleihari dan kerbau kalang di Babirik dan Negara; (3) Kuda, sapi dan kambing di Pleihari, Riam Kanan an Riam Kiwa; (4) Ikan diambil dari rawa, danau, sungai-sungai terutama di daerah Bangkau Kandangan, Sungai Buluh Amuntai, Babirik, Danau Panggang, Negara, Sungai-sungai Barito, Sungai Tabalong, dan sebagainya.

Berkenaan dengan kebutuhan akan sandang, seperti pakaian, pada mulanya dapat ditenun sendiri, tetapi kalah bersaing dengan tekstil impor. Dahulu, kebanyakan orang memakai celana sarung, baju dan laung dari kain tenunan sendiri. Nama corak kain tenunan Banjar itu ialah: Corak Poleng, Sarigading, Ramaksahang dan Tampuk Gandang.

Kebutuhan akan sandang, telah dapat di atasi oleh banyaknya ragam kain yang diperdagangkan di kota-kota besar. Hal ini juga diakibatkan peranan pelabuhan Banjarmasin dalam perdagangan internasional. Tahun 1895 ketika kapal KPM mulai beroperasi antara Banjarmasin dan Surabaya rutin setiap tujuh hari sekali, barang-barang dari luar semakin meningkat masuknya ke Kalimantan lewat Banjarmasin. Para pedagang Banjar memanfaatkan KPM sebagai alat transportasi perdagangan ekspor impor lewat Surabaya. Sejak itu rute perdagangan Banjar adalah Banjarmasin – Surabaya – Singapura.

Sejak itu bahan pakaian dan pakaian jadi diperdagangkan di Banjarmasin. Dan orang-orang Banjar, Cina dan Arab memperdagangkannya ke kota-kota lain di Kalimantan Selatan, seperti kain cita, kain lina, batik dari Surabaya.³⁸ Disamping batik, kain gaya lokal berupa sasirangan masih diproduksi untuk keperluan sendiri.

Setelah karet sudah diperdagangkan, pemilik kebun karet pun mulai melibatkan diri dengan perdagangan ekspor impor. Aktivitas perdagangan tahun 1930 berimbang antara sungai dan darat.

³⁷ Amir Hasan Kiai Bondan, *op.cit.*, hal. 96.

³⁸ Kodam X/LM, *Kodam X/LM Membangun*, Banjarmasin, 1962, hal. 586.

Ketika itu karet menjadi andalan perdagangan yang menimbulkan kekayaan bagi segelintir orang Banjar dan menimbulkan kemakmuran petani karet. Bahan pakaianpun masuk secara berlimpah.

Perkembangan perumahan sangat dipengaruhi oleh perkembangan infrastruktur transportasi darat dan sungai. Kalau sebelumnya membangun di tepi sungai dengan sederhana yakni bertiang kayu balangiran, berdinding pelupuh dari bambu, beratap rumbia, sejak 1930 sampai dengan tahun-tahun berikutnya mulai membangun rumah di pinggir jalan raya dengan keadaan yang lebih baik yakni bertiang kayu ulin, berdinding papan, beratap sirap. Bahan bangunan seperti seperti kayu lanan, meranti, balangiran, ulin (kayu besi), ramin dan balau terdapat di hutan Kalimantan.

Di pinggir sungai Martapura, Marabahan dan Banjarmasin, sejak 1925 dan tahun-tahun berikutnya telah tampak bangunan rumah bergaya Eropa. Umumnya pemiliknya adalah pedagang-pedagang yang sukses yang berdagang ke Surabaya bahkan sampai ke Singapura. Yang terkenal gigih dalam usaha dagang tersebut adalah orang-orang Bakumpai dan Alabio di samping orang Arab dan Cina.

Bagi masyarakat Banjar di desa-desa baik pesisir maupun dataran tinggi, dan apalagi pegunungan, kebutuhan sekunder seperti perhiasan, perabot rumah tangga, alat hiburan informasi dan komunikasi tidak begitu penting, kecuali di rumah pembakal atau *Ehner* (asal kata *eigenaar* yang berarti pemilik) karet, tampak gramofon dan radio.

Berbeda dengan masyarakat Banjar yang hidup di perkotaan, seperti golongan atas yakni pegawai pangreh praja, mereka membutuhkan radio, gramofon, telepon di rumahnya. Golongan menengah ini banyak terpengaruh oleh penetrasi kebudayaan Barat melalui pendidikan yang mereka peroleh, sehingga kebutuhan sekundernya dipenuhi melalui gaya hidup secara Barat.

3. Diskriminasi Kependudukan, Pajak dan *Erakan*

Setelah pemerintah kolonial Belanda menghapuskan Kerajaan Banjar 11 Juni 1860, maka status bekas kerajaan ini turun sangat drastis, dari sebuah negara dengan bangsa Banjar menjadi tanah dan bangsa jajahan yang dalam status sosial adalah bangsa kelas tiga atau terbawah.

Status sosial itu muncul karena adanya Politik Garis Warna (*Color Line*) yang memisahkan antara penguasa dengan yang dikuasai. Kebijakan itu lahir setelah adanya *Nederlands Indische Onderdaanschap* tahun 1911 yang membedakan masyarakat Hindia Belanda kepada tiga golongan,³⁹ yakni:

- a. Orang Eropa, termasuk Belanda dan orang Jepang yang dipersamakan dengan status orang Eropa;
- b. Timur Asing, yakni yang bukan Eropa. Kelompok ini termasuk orang Cina, India, dan sebagainya yang bukan Bumiputera dan Eropa.
- c. Bumiputera, masyarakat Banjar termasuk dalam kelompok ini.

Selain termasuk dalam kelompok bumiputera, masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan juga terdiri atas : 1) Golongan atas yang terdiri dari dari: pegawai pangreh praja (*ambtenaren*) yang secara khusus bagi daerah ini disebut kiai, dan kaum bangsawan yang bagi daerah ini kehilangan statusnya sehingga hanya tinggal gelar saja; 2) Golongan menengah, yang terdiri atas: pegawai Pemerintah Hindia Belanda selain pegawai pangreh praja yang tersebut di atas ulama, kaum cendekiawan, pedagang; 3) Golongan bawah, yang terdiri atas: pedagang kecil; petani; nelayan yang pada umumnya nelayan sungai, tukang dan pengrajin serta buruh kecil.⁴⁰ Dengan demikian, selain adanya sistem status yang diberikan pemerintah kolonial, pada kenyataannya masyarakat bumiputera juga terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat yang lahir dari adanya status sosial yang beragam.

Selain golongan tersebut di atas, ada suatu golongan khusus yang disebut '*gelijkgesteld*' terutama di kalangan pribumi, yakni orang-orang yang dipersamakan status dengan orang Eropa,

³⁹ Lihat J. Riphagen, *Aturan Pemerintahan-Pemerintahan Hindia Belanda*, Balai Pustaka, Weltepreden, 1927, hal. 13-17.

⁴⁰ Pemda Tk.I Kalsel, *op.cit.*, hal.35-36 dan Sjarifuddin *et al*, *Pola Penguasaan, Pemilikan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Kalimantan Selatan*, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Depdikbud, Banjarmasin, 1989-1990, hal. 40.

sehingga hak dan kewajibannya juga sederajat dengan golongan orang Eropa. Status itu bermula dari adanya permohonan 'rekes' (dari kata "*request*") dari pribumi bersangkutan, maka Gubernur Jenderal dengan persetujuan Dewan Hindia mengabulkan rekes tersebut. Kerap kali perilaku 'gelijkgesteld' ini ke-be-belanda-an. Golongan ini oleh masyarakat Banjar diberi julukan "Belanda Tiga Suku". Surat keputusan atau Besluit Gubernur Jenderal, dipetik untuk yang bersangkutan di atas kertas segel berharga 1,50 gulden (satu setengah gulden atau tiga suku; satu suku ialah uang logam coin perak senilai setengah gulden atau lima puluh sen).⁴¹

Sebagai bentuk dari politik garis warna adalah eksklusivisme, dimana tiap golongan disengaja hidup terpisah sendiri-sendiri dan merasa golongannya lebih istimewa dibanding golongan lainnya, seperti golongan Eropa merasa lebih unggul dari orang Timur Asing dan Inlander (bumiputera) atau golongan Cina merasa lebih dari bumiputera.

Untuk kepentingan kolonial, politik garis warna itu senantiasa dinampakkan dalam bentuk diskriminasi dimana perlakuan yang diberikan oleh Pemerintah Kolonial terhadap Orang Eropa, maupun Timur Asing berbeda jauh dengan perlakuan yang diberikan terhadap golongan bumiputera.

Tentunya dalam bidang-bidang pembangunan yang diutamakan adalah kepentingan-kepentingan Pemerintah Hindia Belanda, seperti pendidikan, tempat rekreasi, perumahan, bioskop, dan fasilitas penting lainnya hanya diperuntukkan untuk orang kulit putih. Bumiputera adakalanya dilarang masuk karena ada tanda-tanda tertentu bertulisan "*Verboden toegang voor Inlanders en Honden*" (dilarang masuk untuk orang bumiputera dan anjing).⁴²

Selain adanya politik garis warna yang diwujudkan dalam bentuk diskriminasi terhadap golongan bumiputera, Pemerintah Kolonial Belanda juga menerapkan politik penindasan berupa kerja rodi (kerja erakan), uang erakan dan pajak yang memberatkan rakyat.

Hasil dari kerja rodi, uang erakan dan pajak digunakan pemerintah kolonial sebagai sumber pemasukan bagi pemerintahan daerah. Kerja rodi dapat dikenakan kepada setiap orang, kecuali golongan pangreh praja, yang berumur antara 18 s.d. 45 tahun. Rodi bisa terjadi dalam kampung sendiri maupun di luar kampung. Mereka dipaksa membersihkan jalanan, saluran air atau got, jembatan, *tabat* dan *antasan* dan sebagainya. Di luar kampung ia mungkin bekerja sejauh 15 s.d. 30 km dari kampungnya, membuat jalan, memecah batu pengeras jalan dan sebagainya. Bagi yang berada, ia dapat menebus kewajiban kerja rodi ini dengan membayar uang erakan yang diserahkan kepada pangerak-pangerak.

Dalam hal ini pemerintah kolonial langsung menguasai tata laksana desa dengan Kiai di atasnya sebagai penguasa didampingi Controleur. Kepala kampung biasa disebut *Pembakal*, didampingi oleh beberapa pangerak, kepala padang, kepala sungai, kepala hutan dan panakawan-panakawan. Pembakal biasanya dibantu pula oleh seorang wakil dan seorang juru tulis.

Pangerak-pangerak diangkat sesuai luas wilayahnya anak-anak kampung yang dikuasai pembakal. Pangerak adalah pembantu dan tangan kanan pembakal untuk :

- a. Mengenal wilayah-wilayah kampung;
- b. Maerak (merodi) orang-orang kampung;
- c. Mengumpulkan orang-orang;
- d. Menagih pajak tanah;
- e. Menagih pajak kepala;
- f. Menagih pajak erakan.⁴³

Untuk memberi tahu penduduk kampung, pangerak menugaskan tukang bendi (dokar) yang dengan membawa sebuah gong kecil berkeliling kampung memberitahukan agar halaman dan selokan dibersihkan, *tabat* air diperbaiki bersama, pajak-pajak segera dibayar, penduduk kampung segera berkumpul dan sebagainya.

Administrasi umum dan keuangan dikelola oleh Juru Tulis. Persyaratan untuk menjadi kepala kampung amat sederhana, tidak selamanya berasal dari orang baik-baik. Paling tidak ia

⁴¹ M. Suriansyah Ideham, "Tata Pemerintahan....", *op.cit.*, hal. 4. Lihat pula M. Idwar Saleh, *op.cit.*, hal. 37.

⁴² M. Idwar Saleh, *loc.cit.*

⁴³ M. Idwar Saleh et al, *Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional (1900-1942) di Kalimantan Selatan*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depdikbud, Banjarmasin, 1978/1979, hal. 47.

harus berani, jagoan, taat kepada atasan, boleh buta huruf asal kepemimpinannya jalan. Atasannya mungkin seorang asisten kiai, kiai maupun hoofdkiai (kiai kepala).

Kepala Padang bertugas membagi tanah hutan yang akan dibuka oleh peminat baru atau mengklasifikasikan tanah untuk menilai iuran pajak tanah yang harus dibayarkan. Kepala hutan lain lagi, tiap kepala hutan mengepalai sebuah hutan. Ia bertugas mengukur batas-batas hutan yang masuk hutan garapan, mengawasi hutan, rimba, kebun dan sebagainya.

Kepala Sungai tugasnya mengawasi kebersihan sungai supaya dapat dilalui, membuat tabat-tabat baru untuk menaikkan air ke sawah, memungut hasil pedalaman yang keluar melalui sungai tersebut.

Pangerak dan para Kepala Padang, Kepala Hutan, dan Kepala Sungai adalah pembantu dan tangan kanan pembekal, dan pembekal adalah pimpinan unit terkecil sebagai perpanjangan penguasa kolonial. Tugas mereka lebih dititikberatkan kepada kepentingan pemerintah kolonial. Mereka hanyalah pembantu pemerintah dalam memungut pajak, menyediakan tenaga kerja untuk rodi atau erakan, disamping menjaga ketertiban daerah masing-masing.

Sistem pemungutan pajak pada waktu itu dikenal dengan nama *Collecteloon*⁴⁴ yakni pembakal melaksanakan pemungutan pajak yang besar kecilnya sudah ditentukan oleh pemerintah. Setiap orang yang wajib pajak, harus menyerahkan uang pajaknya kepada pembakal dengan ditambah 0,75 gulden sebagai penghasilan kepada pembekal. Pajak yang terkumpul ini kemudian oleh kepala desa diserahkan kepada kiai, dan selanjutnya oleh kiai diserahkan ke kas negara.

Dari kenyataan tersebut, kiranya tidak begitu aneh apabila pembakal berusaha dengan tekun untuk memungut pajak kepada rakyat, karena semakin banyak pajak terkumpul semakin besar pula penghasilan yang akan diperoleh. Kadangkala tidak terpikir oleh mereka, apakah rakyat mampu membayar pajak yang dibebankan itu.

Bagi rakyat sendiri yang umumnya golongan petani yang tidak mempunyai penghasilan tetap, selalu diliputi oleh rasa ketakutan akan denda dan hukuman yang dikenakan kepada mereka apabila terlambat membayar pajak atau melalaikan kerja erakan. Sebab bagi rakyat yang melalaikan membayar pajak, sehingga terlambat, maka dikenakan hukuman denda 5 gulden atau hukuman badan selama dua hari.

Akibat beban pajak, rodi atau erakan dan ditambah dengan keadaan depresi ekonomi saat itu, mengakibatkan keresahan yang bermuara kepada munculnya pemberontakan Guru Sanusi 1914-1918 dan pemberontakan Gusti Darmawi tahun 1927. Guru Sanusi selain sebagai guru tasawuf juga merupakan keturunan “Anak Cucu Urang Sepuluh” yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda menuntut pembebasan dari erakan dan pajak, sebagaimana hak istimewa yang telah diterima orang tua mereka pada masa Kerajaan Banjar. Pemberontakan Guru Sanusi bersumber pada persoalan erakan ini, empat tahun ia diburu Belanda, lari dari Amuntai ke Margasari, Bakumpai dan bersembunyi di daerah Tangkas di Sungai Batang Martapura. Belanda mendatangkan pasukan marsose yang akhirnya berhasil menembak mati Guru Sanusi.⁴⁵

Sesungguhnya keadaan sosial berkaitan dengan rodi dan erakan ditambah dengan pendidikan yang kurang maju menjadi dominan sifatnya antara tahun 1900 –1928 di Kalimantan Selatan. Keadaan itu pula yang mengakibatkan banyak penduduk khususnya dari Hulu Sungai yang melakukan eksodus ke pesisir Timur Sumatera seperti Jambi, Sapat, Tembilahan. Sampai tahun 1950 jumlah penduduk suku Banjar di daerah Sapat dan Tembilahan mencapai 250.000 orang.⁴⁶ Selain ke pesisir Sumatera, mereka juga menuju Semenanjung Tanah Melayu untuk mencari penghidupan yang lebih baik.⁴⁷

⁴⁴ Sjamsudin, “Sejarah Pertumbuhan dan Perjuangan Sarekat Islam di Kalimantan Selatan Sampai Tahun 1942”, Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah Fkg Unlam, Banjarmasin, 1970, hal. 11-12.

⁴⁵ M. Idwar Saleh *et al*, *op.cit.*, hal. 48-49.

⁴⁶ M. Idwar Saleh *et al*, *ibid.*, hal. 51.

⁴⁷ Pada tahun 1920-an, kakek penulis, yakni Itit, isteri dan anaknya Suri, serta Kumbih pergi *madam* dari desa Awang Barabai ke Batu Pahat Johor di Semenanjung Tanah Melayu untuk mencari penghidupan yang lebih baik sebagai buruh perkebunan. Lihat pula Syamsudin, *op.cit.*, hal. 9 yang menyebutkan awal abad ke-20 puluhan ribu penduduk Hulu Sungai pergi untuk menetap di Malaka.

4. Kehidupan Seni Budaya

Pada akhir abad ke-19 kondisi masyarakat Banjar hidup tertekan oleh kolonial Belanda sehingga mematikan kreativitas berkesenian. Sementara pendidikan baru saja dirintis dan terbatas pada kalangan bangsawan dan orang sederhana sehingga belum menjadi pendorong. Dengan demikian seni budaya Banjar saat itu, adalah seni yang sebelumnya berkembang di istana Kerajaan Banjar.

Umumnya keraton merupakan pusat pembinaan, pemeliharaan dan pengembangan kesenian dalam arti luas. Dengan runtuhnya kerajaan Banjar, kesenian klasik keraton dan golongan atas berdiri di ambang proses disintegrasi pula. Kesenian klasik itu didukung oleh sejumlah golongan atas dari generasi tua dengan sarana yang ada dan kondisi ekonomi yang rapuh.

Setelah proklamasi penghapusan kerajaan Banjar, Pangeran Hidayatullah telah berupaya menyebarkan seni klasik ke masyarakat Banjar, yakni Hulu Sungai Utara dan Banjarmasin. Namun ketika beliau dibuang oleh Belanda ke Cianjur tahun 1862, maka para bekas abdi kerajaan yang kembali ke desa-desa membina dan mengembangkan seni klasik tersebut di kalangan mereka.

Kalau di istana seni klasik keraton berfungsi sebagai tata artistik upacara-upacara seperti penobatan, menyambut tamu dan upacara daur hidup lainnya, maka pada kelompok pendukung selanjutnya berfungsi sebagai pusaka yang magis, yang harus diadakan upacara tahunan membersihkan dan menggelar untuk kalangan sendiri.

Di kalangan rakyat jelata, kesenian yang berfungsi sebagai sarana upacara, tetap lestari dan berfungsi sebagai alat komunikasi vertikal dengan Yang Maha Kuasa. Karena itu pemujaan arwah nenek moyang sebagai perantara vertikal, berwujud pemujaan Maharaja Suryanata dan Puteri Junjung Buih, tak lain dari simbol persatuan alam atas dan alam bawah kosmogoni Kaharingan atau Suryanata, Dewa Matahari Alam Kaharingan menjadi Civa Budhanya Kalacakra. Sedangkan Puteri Junjung Buih berupa lambang air, lambang kesuburan tanah, mungkin sekali berfungsi sebagai Dewi Sri di Jawa. Inilah sebab-sebabnya mengapa di akhir abad ke-19, wayang, topeng, gamelan, menyampir dan menyanggar banua dan lain-lain tetap hidup, karena kesenian ini berkaitan erat dengan alam pikiran dan kepercayaan Suku Banjar dewasa itu yang merupakan sisa-sisa kepercayaan lama.⁴⁸

a. Keadaan Seni Budaya

Dalam kurun waktu permulaan abad ke-20 perkembangan seni budaya tradisional masih berjalan dengan baik. Elite tradisional pendukung kebudayaan keraton yang sudah terpencar masih memelihara sebagaimana mestinya. Kesenian klasik hidup terpisah dengan kesenian rakyat tradisional, tetapi gamelan Banjar sebagai elemen seni rakyat yang lain berdampingan dengan tetabuhan lainnya. Pada masa itu kesenian yang hidup pada akhir abad ke-19, tetap pada fungsinya di pedesaan yang agraris yaitu cabang seni sastra, teater, tari, musik dan seni rupa.

b. Kehidupan Seni Sastra

Kebanyakan dari rakyat biasa, masih belum mendapatkan pendidikan umum. Namun huruf Arab Melayu masih mendapatkan tempat yang sangat penting untuk baca tulis. Hal ini berkat pelajaran sekolah duduk dalam belajar agama Islam di desa-desa. Masyarakat mempercayakan kepada guru-guru agama untuk memberikan pelajaran mengaji Al Quran pada malam hari, dan siang hari belajar baca tulis huruf Arab.

Selain membaca Al Quran, juga harus membaca Barjanji, Diba'i serta pandai berkasidah. Para pemuda dan pemudi yang telah pandai membaca Al Quran, kebanyakan pandai juga membaca huruf Melayu Arab. Maka dengan banyak membaca hikayat syair yang ditulis dengan huruf Melayu Arab dapatlah mereka serba sedikit mempelajari ilmu keduniaan di samping pengetahuan agama.⁴⁹

⁴⁸ M. Idwar Saleh *et al*, *op.cit*, hal. 16-17.

⁴⁹ Amir Hasan Kiai Bondan, *op.cit*, hal. 109.

Salah satu bentuk seni sastra yakni Sastra lisan Dundam hidup dipinggiran Martapura. Lamut hidup di Hulu Sungai Utara, menyebar ke seluruh Banua Lima. Andi-andi yakni bercerita di tengah sawah ketika panen bergotong royong, hidup di daerah Barabai dan sekitarnya, menyebar ke Banua Lima dan Gambut. Madihin makin berkembang di daerah Tabalong, dan menyebar ke seluruh Banua Lima, dan di Hulu Sungai Selatan berpusat di Tawia. Di daerah Amuntai dan sekitarnya berkembang kisah Tuter Candi dan Andi-andi untuk anak-anak.

Sedangkan sastra tertulis yakni berupa buku-buku syair berbahasa Melayu tersebar ke seluruh pelosok kota dan desa di Kalimantan Selatan dan yang terkenal adalah syair Carang Kulina, Syair Siti Zubaidah, Syair Abdul Muluk, Brahma Syahdan, dan sebagainya. Membaca syair-syair dengan kelompok dan terkenal dengan lagu-lagu Hujan Panas, Tingkalung Sangkut, Raja Mamuja, Kasidah Umi Kalsum dan sebagainya. Pembacaan syair dilakukan ketika malam pengantin, malam bapangit, dan malam sesudah yasinan/arisan.

c. Kehidupan Seni Teater

Teater merupakan cerita, dimainkan dan ditonton. Teater Tuter Lamut yang mempunyai episode tujuh bagian cerita, sangat digemari oleh rakyat pada zaman ini. Palamutan duduk di cacamp (sebuah meja dihias), dengan sebuah rebana disebut Tarbang Lamut, bercerita dengan intonasi nada-nada (berlagu), diselingi pantun-pantun yang memikat. Penonton berada di depan dengan melingkar. Pertunjukan Lamut diadakan sampai semalam suntuk di halaman. Lamut tetap hidup karena terikat oleh adanya hajat bagi suatu keluarga.

Teater Tuter Bapandung bermula di desa Pariuk Margasari, Tapin. Bapandung adalah semacam monolog berbahasa Banjar. Pamandangan bermain meniru manusia berstatus : raja, saudagar, jin dan bahkan seorang puteri atau permaisuri. Ceritanya dimainkan hanya oleh seorang pemain. Kisah dongeng atau ciptaan pamandangan diselesaikan dalam satu jam atau dua jam di saat terang bulan.

Teater Badal Muluk adalah perkembangan dari Bapandung, dimana pemain bertambah dengan permaisuri, raja, puteri dan khada,, serta anak raja-raja membujuk puteri (*babujukan*). Cerita dalam syair Abdul Muluk hanya dimainkan oleh beberapa orang.

Wayang kulit tetap digemari dan dihargai masyarakat Banjar. Walaupun peniruan dari Jawa Tengah, tetapi Wayang Banjar mempunyai ciri yang khas sebagai *local genius*, dan dipelihara turun temurun.⁵⁰ Erat kaitannya dengan wayang kulit, pemelihara seperangkat topeng membangun teater yang disebut Teater Topeng Dalang. Teater ini muncul dalam keluarga Kitut di Barikin, Hulu Sungai Tengah. Cerita yang dimainkan adalah episode Panji.

d. Kehidupan Seni Tari

Seni tari pada tiga dasawarsa pertama abad ke-20, hidup melekat pada upacara perkawinan, upacara manyanggar banua, upacara memberi makan tahunan sebagai adat tradisi masyarakat.

Pada upacara perkawinan, pengantin wanita mengadakan tarian Kuda Gipang. Kuda Gipang pada saat itu berbusana kemeja atau kaos putih, bercelana bandring seperti celana Napoleon, memakai selendang hiasan (*sulindang*), dan elemen musiknya adalah serunai, kurung-kurung, gendang (*babun*) dan gong. Pengantin pria diantar ke rumah pengantin wanita dengan iringan Rebana Haderah dengan nyanyian Barjanji atau Sarafal Annam.

Tarian pada upacara Manyanggar Banua adalah Tarian Topeng Kelana, Topeng Panji, Topeng Temenggung, serta tari Baksa Panah, Baksa Kambang, Baksa Lilin, merupakan sikap pelestarian pusaka seni budaya klasik.⁵¹

e. Kehidupan Seni Musik

⁵⁰ Bachtiar Sanderta, "Kesenian Daerah Kalimantan Selatan: Pembinaan dan Pengembangannya", Makalah Taman Budaya Propinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin., 1990, hal. 8.

⁵¹ M. Idwar Saleh *et al*, *op.cit*, hal. 65.

Musik gamelan Banjar yang semula hidup di keraton secara lengkap, sama seperti gamelan di Jawa Tengah, namun pada gamelan Hulu Sungai yang merupakan elemen tari-tarian klasik sudah berkurang. Kondisi minimal ini sama sekali tidak mengurangi nuansa bunyi, walaupun alat-alatnya cuma: babun, sarun, sarantam, dawu, kanung, agung dua dan kangsi.

Musik sarunai yang berfungsi pengiring Silat-Kuntaw, serta Kuda Gipang Basulindang, masih sederhana. Alat-alatnya adalah babun besar, babun kecil, sarunai dan gong serta ditingkah kurung-kurung talu. Alat-alat musik seperti gambus panting, suling, salung, kuriding, kalangkupak dan lain-lain, masih musik individual. Mausik Hadrah yang mengiring kasidah tradisional Barjanji, Diba'i, Sarafal Annam, masih berkembang bersama kelompok Tarbang Lima pengiring Burdah.

f. Seni Rupa

Dalam bidang arsitektur, macam-macam bangunan rumah Adat Banjar dengan macam-macam gerbang masih menonjol dan dibangun sesuai status manusia anggota masyarakat yang membangunnya. Ulama masih tinggal di Palimasan, dan para pedagang besar, kecil, juga orang Cina yang kaya raya mendirikan rumah tipe Palimbangan. Rumah tipe Bubungan Tinggi, Gajah Baliku dan Gajah Manyusu masih menunjukkan status golongan pemiliknya, walaupun kemudian terdesak oleh ukuran kekayaan.⁵²

Pakaian Banjar seperti Taluk Balanga, Palimbangan, Baju Poko, kebaya panjang bersulam, tapih sasirangan masih nampak pada perhelatan perkawinan. Pola hiasan tata ruang persandingan tetap memakai dinding arguci seperti masa abad ke-19. Kain adat seperti tenunan pamintan, sarigading hanya dipergunakan oleh keturunan Anang, Gusti dan Andin dalam acara mandi-mandi, sunatan dan acara selamatan keluarga tertentu.

Ornamen Banjar makin berkembang pada ukiran-ukiran pilis rumah, tangga dan pagar, serta hiasan perkakas kuningan. Demikian juga motif anyaman dari rotan. Kebudayaan Banjar sampai dengan 1928 masih merupakan Banjar tradisional yang masih melekat erat dalam jiwa rakyatnya.

Tingkah laku dan sikap pergaulan di masyarakat sebagai pola budaya yang disepakati masih utuh, misalnya kegotongroyongan mendirikan rumah, di *huma tugal*, sawah dan perhelatan perkawinan dan kematian.

5. Penetrasi Seni Budaya Asing

Pengaruh budaya asing terhadap seni budaya tidak terlepas dari langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda di daerah ini dalam berbagai segi kehidupan seperti sistem pemerintahan, sistem perkotaan, sistem pendidikan, sistem teknologi transportasi dan komunikasi, sistem ekonomi keuangan dan lain-lain. Semua langkah-langkah itu, pada gilirannya telah memungkinkan daerah ini menyerap dan mengadopsi nilai-nilai dan budaya modern versi permulaan abad ke 20.

Seperti munculnya kelompok penguasa dan pengusaha swasta di perkotaan, menyebabkan timbulnya keinginan untuk memenuhi fasilitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, dibangunlah berbagai sarana fisik, sosial, ekonomi, agama, sarana hiburan seperti *Societeit de Kapel* tempat dansa orang Eropa, dan budaya-budaya Barat lainnya yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Secara tidak langsung kondisi demikian turut mempengaruhi munculnya seni budaya yang dipengaruhi oleh budaya Barat, di samping kesenian tradisi yang tetap kuat berakar di masyarakat.

Pada tahun 1930, sebuah kesenian bercorak budaya asing yakni Group Dardanella datang ke Banjarmasin. Dardanella ini adalah perkembangan dari Komedi Stambul tahun 1891 di Surabaya oleh Agust Meheiu dengan nama samaran Pedro. Konon Komedi Stambul muncul karena pertunjukan "Abdul Muluk" yang datang dari kebudayaan Melayu dari Malaka dan Johor kurang diminati oleh kaum elite. Dardanella tetap menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa *lingua franca*, seperti Komedi Stambul.⁵³ Dardanella, sebuah Group Sandiwara pertama di Indonesia. Para

⁵² M. Idwar Saleh *et al*, *loc.cit*.

⁵³ Dardanella, *Sebuah Group Sandiwara Pertama di Indonesia*, dalam Majalah Warnasari No.102 Tahun 1983.

pendukung Dardanella antara lain Tan Tjeng Bok, Wolly Sutinah (Ma'Wo), Ferry Kock, Fifi Young, Anjar Asmara dan primadona Miss Ribut dan Dewi Dja (isteri Pedro).

Di tahun 1935-1940 dikenal tokoh H. Aruman yang mendirikan Grup Tonil (Sandiwara) "Bunga Mawar" di Banjarmasin. Tokoh pemainnya yang sangat populer waktu itu adalah Martiman dan Bahir. Selain itu ada pula Grup Tonil di Banjarmasin dengan nama *Blibanborn* singkatan dari Belitung Bandjarmasin Borneo yang dipimpin oleh A.A. Rivai. Pertunjukannya sering diadakan di gedung PARINDRA di Pasar Lama.

Dardanella ditonton oleh orang Eropa, Cina, India dan golongan menengah bumiputera, terutama pegawai dan pedagang. Para pedagang yang berjualan pulang pergi Banjarmasin – Banua Lima, telah membawa pengaruh tidak langsung Dardanella ke Margasari, sebuah desa yang terletak di pinggiran sungai Negara.

Ketika itu di desa Pariuk (anak desa Margasari) telah ada kesenian yang bernama Bapandung, yakni seorang tukang cerita bergaya monolog, sambil meniru peran binatang, raja, puteri, jin dan sebagainya. Perkembangan Bapandung telah memasuki teater kolektif yaitu Bajapin "basulindang", dimana pemain memerankan kisah seribu satu malam dengan gaya japin. Pemain utama memegang sebilah pedang panjang yang dinamakan "Syamsir". Dengan pedang itulah kekuasaan dijalankan dengan stilisasi tari.⁵⁴

Semula sinoman kesusastaan di Margasari yang secara berkala mengadakan "basyasyairan", dan sangat mengenal syair populer Abdul Muluk, mengalihkan kisah seribu satu malam ke kisah Abdul Muluk di dalam "Bajapin Basulindang". Peran-peran di dalam Abdul Muluk seperti raja-raja meminang Puteri Raja Barbari menjadi unsur plot yang dominan.

Demikianlah kesenian baru itu bermain mendapat pengaruh atau petunjuk sedikit tentang gaya Dardanella, tetapi tidak meraih budaya Barat yang ada di Dardanella. Kesenian baru itu, mereka sebut "Ba Abdul Muluk" atau "Badalmuluk". Tokoh waktu itu bernama Tukijan, Sarman dan Basyirun. Karena seringnya pemain Raja Barbari menyebut Mamanda Mangkubumi, maka masyarakat menyebut Badalmuluk dengan Mamanda. Demikianlah Mamanda lahir dengan proses dipengaruhi oleh seni budaya asing yang positif.

Di desa Tubau, dekat pantai Hambawang, pada tahun 1935 masyarakat membangun Mamanda dengan gaya dan cerita perjuangan pahlawan rakyat. Terkenal mamanda ini dengan Mamanda Tubau. Mamanda ini lahir dengan tendensi pergerakan rakyat, dengan berselubung kesenian rakyat Mamanda. Mamanda Tubau cepat menyebar ke Banua Lima (Tabalong, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan dan Pleihari). Mamanda Pariuk dengan nama lain Badalmuluk, tetap terisolasi di daerah Barikin.

Walaupun tahun-tahun sulit bagi masyarakat karena Perang Dunia I dan tekanan Pemerintah Hindia Belanda di bidang kehidupan ekonomi rakyat, namun di pedesaan tidak banyak pengaruhnya, karena di desa melekat adat istiadat. Adat istiadat sebelumnya adalah sebagai gambaran warisan kepercayaan lama sedikit demi sedikit berubah di sana sini dan disesuaikan dengan aqidah agama Islam. Adat istiadat masyarakat Banjar tetap berjalan, sepanjang tidak bertentangan atau dipertentangkan dengan agama Islam, bahkan adat istiadat itu pada akhirnya adalah adat yang bernafaskan Islam yang tercermin dalam berbagai tradisi masyarakat seperti adat perkawinan, adat sebelum dan sesudah acara pernikahan, adat khitanan sampai kepada adat dan tradisi dalam kaitannya dengan kegiatan pertanian, perdagangan, membangun rumah dan sebagainya.

Pengaruh kesenian Barat seperti seni sastra, seni lukis, seni tari dan seni musik, tidak begitu nampak pengaruhnya. Pengaruh yang nampak hanya di kota Banjarmasin yakni terhadap masyarakat elite kolonial. Pemakaian huruf latin di samping huruf Arab di masyarakat pribumi mulai berkembang. Di bidang musik, biola lambat laun mendesak penggunaan rebab.

Seni tradisi tidak berubah. Kesenian yang melekat pada upacara-upacara seperti upacara Maarak Pengantin dengan kesenian yang digelar pada Malam Bajajagaan serta kesenian yang digelar ketika pengantin bersanding, tetap saja dilaksanakan. Di Barikin, masyarakat tetap saja

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Adjim Arijadi dan Purlansyah, Banjarmasin.

menyelenggarakan Manyanggar Banua, menggelar Wayang Kulit, Wayang Gung, Tarian Topeng dan Teater Pantul dan Bagungan.

Dalam hal pengaruh tata busana, para ulama dan santri tetap memakai baju Palembang, baju Taluk Balanga dan berkopiah hitam atau bagi wanitanya tetap berkebaya dan kain panjang. Tetapi para pedagang kecil yang mondar mandir ke Banjarmasin, mereka telah mentransformasi busana ala Barat seperti kemeja, pantalon dan bersepatu kulit. Mereka pun sudah memakai dasi ketika berada dalam pertemuan pedagang. Gaya celana Napoleon pun cepat melanda masyarakat pedagang.

Sejak tahun 1926, film bisu dan gramofon telah menjadi sarana budaya masyarakat kota, barulah tahun 1935 itu memasuki desa, itupun baru dapat dinikmati orang berada di desa. Mobil Ford pun telah dimiliki oleh para *Eigenaar* di desa. Perilaku para *eigenaar* yang kebelanda-belandaan mengakibatkan mereka diberi julukan *His Master's Voice* yang artinya *suara majikan*. Kehidupan mereka jauh berbeda dengan petani yang cuma memiliki transportasi tradisional berupa gerobak sapi.

Banjarmasin sebagai kota besar merupakan kota yang terbuka bagi kontak budaya asing. Pengaruh budaya asing terlihat dengan adanya *Societeit de Kapel* tempat dansa orang Eropa, perayaan tahun baru dan bahasa Belanda dipakai sebagai bahasa pesta dan keseharian bagi kaum terpelajar dan golongan atas, juga nampak dari adanya gereja katolik, gereja protestan, bank-bank, perusahaan dagang orang-orang Barat.

Kampung Arab sering menggelar Japin Arab dengan ciri khas jubah warna warni dan kopiah tarbus, yang penontonnya dengan berbaur dengan budaya Banjar. Di Pacinan, setiap hari raya Cap-Go-Me dirayakan oleh orang-orang Cina dengan arakan liong dan barongsai, dan orang-orang Banjar menyaksikannya dengan membawa anak-anak mereka. Setiap ada hajatan tertentu, orang Cina juga memakai kesenian orang Banjar seperti gamelan perunggu, kesenian lamut semalam suntuk dengan sesajen kue-kue tradisional Banjar.

Dengan adanya Perguruan Taman Siswa yang berdiri pada tahun 1931 dan membuka cabang-cabangnya di Marabahan, Banjarmasin, Kandangan, Barabai, Kelua dan Negara, kesenian tradisional seperti tarian wayang kulit, wayang gung, tari topeng, tarian Gandut, Japin Tirik semakin berkembang di kalangan rakyat Hulu Sungai, karena misi Taman Siswa yang juga membina dan mengembangkan kebudayaan Nusantara dengan cara menghidupkan seni budaya daerah-daerah sebagai puncak-puncak kebudayaan nasional.

Pemerintah Hindia Belanda dengan taktik dan strateginya, kemudian memakai tarian Gandut pada pesta individu, dan berupaya agar rakyat banyak membenci penari Gandut. Mereka mendengungkan bahwa penari Gandut adalah perempuan yang berpihak pada adat Belanda dan penguasa di daerah. Golongan pemelihara kesenian pusaka seperti wayang kulit, topeng dan baksa diisukan sebagai golongan yang tidak mengindahkan syariat agama Islam.

6. Perkembangan Agama

Perkembangan agama Islam di Kalimantan Selatan di permulaan abad ke-20 masih melalui garis-garis tradisional. Sekalipun sepanjang abad ke-19 Syekh Muhammad Arsyad al Banjari dengan anak cucu dan murid-muridnya telah banyak berperan dalam pengembangan usaha memurnikan ajaran-ajaran agama Islam sesuai aliran *Ahlusunnah wal jamaah*, namun adat dan kepercayaan yang sumber dasarnya dari kebudayaan nenek moyang masih kuat sekali.⁵⁵

Dengan masuknya organisasi Sarekat Islam ke Banjarmasin pada tahun 1912, sedikit banyak telah memberikan perubahan kepada kehidupan keagamaan, karena selain bergerak dalam kegiatan sosial, ekonomi, juga bergerak dalam pendidikan dan keagamaan. Dalam aspek agama, perkembangan Sarekat Islam didukung oleh kekuatiran masyarakat terhadap perkembangan agama kristen yang dibawa kaum zending dan missionaris yang dipandang membahayakan agama Islam.

⁵⁵ Depdikbud, *op.cit.*, hal. 87.

Sesuai anggaran dasarnya yang menentang pendapat-pendapat yang keliru tentang agama Islam serta melakukan kegiatan rehabilitasi masjid-masjid dan langgar, sekolah-sekolah Islam, maka Sarekat Islam telah memberikan sumbangan pembaharuan dalam pemahaman dan pengamalan agama, meski unsur pembaharuan keagamaan itu tidak semenonjol apa yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah. Fanatisme keagamaan yang tebal namun masih dibalut dengan unsur-unsur kepercayaan lama masih dapat berjalan seiring dengan perkembangan Sarekat Islam, karena tekanan kegiatan lebih berat kepada sosial ekonomi dan politik, dan sedikit pembaharuan agama yaitu melalui pendidikan.

Tidak demikian halnya dengan organisasi Muhammadiyah, organisasi ini sangat kental dalam gerakan pembaharuan pemurnian ajaran agama untuk kembali kepada Quran dan Sunnah Rasul (Hadist), sehingga gerakan Muhammadiyah dikecam oleh masyarakat tradisional sebagai pembawa aliran Wahabi. Muhammadiyah mencoba merubah fungsi masjid bukan sekedar tempat shalat melainkan juga sebagai pusat penggemblengan manusia muslim dan syiar agama serta memelopori penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap khotbah Jum'at. Pandangan pembaharuan agama bukan hanya lewat organisasi tetapi juga lewat buku-buku atau majalah yang menyiarkan dakwah Islam, umumnya terbitan Jawa. Untuk kepentingan pendidikan dan memudahkan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama, organisasi Muhammadiyah juga menerbitkan buku pelajaran agama dan Al Quran dengan terjemahan bahasa Melayu atau Indonesia.

Penegakan ajaran Islam untuk kembali kepada Quran dan Hadist dengan memberantas tahyul, khurafat dan bid'ah mengakibatkan muncul sejumlah konflik dikalangan umat yakni antara yang masih bersikukuh pengaruh adat adat dengan kelompok yang berpihak dengan pembaharuan. Sejak itu muncullah istilah "Kaum Muda" yang diidentifikasi kepada Muhammadiyah dan istilah "Kaum Tua" yang memegang teguh aliran lama.⁵⁶ Pada proses perkembangannya kelompok Kaum Tua banyak menjadi anggota Nahdlatul Ulama.

Perselisihan antara Kaum Muda dengan Kaum Tua diantaranya adalah menyangkut soal tahyul, khurafat dan bid'ah juga menyangkut masalah yang berkenaan dengan soal ushali, qunut, talkin, haul kematian, azan jumat dan sebagainya. Ketika perselisihan memuncak, dimana masing-masing pihak memegang teguh pendapatnya masing-masing maka Kaum Muda membikin masjid atau langgar sendiri.

Pertentangan masalah khilafiyah antar penganut Islam semakin meluas karena didukung oleh dakwah-dakwah kaum tua yang dijawab dengan dakwah pula oleh kaum muda. Situasi ini tidak mendukung ke arah pertumbuhan dan persatuan umat muslim yang kuat, bahkan dimanfaatkan penjajah Belanda sebaik mungkin untuk menggoyahkan kedudukan organisasi-organisasi Islam dan mengokohkan penjajahan.

Untuk mempertahankan kebenaran ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang menurut pendapat sebagian ulama difitnah dalam dakwah oleh Kaum Muda, maka pada tahun 1926 didirikan Nahdlatul Ulama di Surabaya dengan tujuan memajukan paham aliran tradisional, memelihara hubungan dengan para ulama dan pengikut keempat mazhab, memajukan pendidikan, masjid, dan kegiatan Lailatul Ijtima serta tahlilan.⁵⁷

Nahdlatul Ulama masuk ke Kalimantan selatan melalui sekolah Darussalam Martapura. Masyarakat Martapura yang fanatik agama dan menjunjung kedudukan ulama tradisional segera mengikutinya dan dari sinilah Nahdlatul Ulama berkembang dengan basis utama di daerah-daerah pedesaan.

Perkembangan syiar agama Islam melalui pendidikan turut dipengaruhi oleh perkembangan sekolah-sekolah umum yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda disamping adanya kekuatiran akan pertumbuhan gerakan missi dan zending di daerah. Oleh sebab itu, perkembangan agama melalui pendidikan tradisional langgar kemudian diikuti oleh sistem pendidikan klasikal khususnya dilakukan oleh organisasi-organisasi keagamaan, diantaranya

⁵⁶ Istilah Kaum Muda dan Kaum Tua (Kaum Tuha) muncul di Alabio pada saat terjadi perdebatan antara ulama pembaharu dengan ulama berfaham lama di *Hoofd van Plaatselijke Bestuur* Amuntai tahun 1926. Lihat Achmad Fedyani Saifuddin, *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham dalam agama Islam*, CV.Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 51

⁵⁷ Lihat M. Idwar Saleh *et al*, *op.cit.*, hal. 55-58.

Madrasah Persatuan Perguruan Islam (PPI), Madrasah Syarikat Islam seperti *Particuliere Hollands Inlandse School* (PHIS) di Marabahan, Madrasah Musyawaratutthalibin, Sekolah-sekolah Muhammadiyah, Madrasah Darussalam di Martapura, Arabische School dan Normal Islam di Amuntai.

Kekuatiran umat Islam akan adanya rencana *krestening politiek* (politik pengkristenan) yang dilakukan kaum zending atau missionaris bukan tanpa alasan, mengingat di daerah Kapuas dan Barito Dusun para missionaris dari Jerman yang tergabung dalam *Zending Barmen* atau *Rheinische Missions Gesellschaft* (RMG) telah bekerja sejak tahun 1835 dimulai oleh Banstein kemudian disusul Becker, Hupperts dan Kruismann pada tahun 1836.

Di Banjarmasin sendiri pada tahun 1868 telah memiliki pemimpin gereja yang pertama dan pada tahun 1899 Gereja Wilhelmina diresmikan untuk kepentingan peribadatan orang-orang Eropa (Belanda). Setelah Perang Dunia I RMG mengalami kebangkrutan sehingga tugasnya diserahkan kepada *Bazelsche Zending* atau *Basler Mission Gesellschaft* yang bercirikan Calvinisme pada tahun 1921. Pendetanya selain berasal dari Jerman juga dari Swis, mereka tetap melanjutkan program-program RMG. Oleh misi-misi ini sebelum abad ke-20 telah disalin Kitab Injil baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru ke dalam Bahasa Ngaju.⁵⁸

Para missionaris katolik tiba di Banjarmasin pada tahun 1907 dan pada tahun 1909 berhasil mendirikan Seminari Pendidikan Guru di Banjarmasin dipimpin oleh Branches. Guru-guru yang dihasilkan dari seminari ini sangat berperan dalam pemberantasan buta huruf khususnya dalam penyebaran ajaran injil kepada masyarakat. Kemudian pada tahun 1924, zending mendirikan *Sekolah Standaard* 8 buah yang mempunyai waktu pengajaran 5 tahun di Banjarmasin, Kualakapuas, Pangkoh, Kuala Kurun, Kasongan, Mengkatip dan Tamiyang Layang.

Selain itu, didirikan pula Gereja Dayak Evangelis pada tanggal 5 April 1935 dan diakui berbadan hukum menurut keputusan Nomor 33 staatsblad Tahun 1935 Nomor 217 berkedudukan di Banjarmasin. Sebagai dampak dari terbentuknya masyarakat melek huruf melalui pengajaran injil dan kitab ABC serta hubungan missionaris Calvinis dan Luther dalam gereja, mungkin menyebabkan timbulnya benih-benih nasionalisme pada orang-orang kristen Dayak. Berdirinya Pakat Dayak pada tahun 1922 untuk menyatukan putera-putera Dayak demi untuk mempertebal rasa kesadaran akan persatuan dan mempertinggi tarap hidup bangsa di bidang sosial ekonomi, mengakibatkan pemerintah kolonial berulang kali menuduh organisasi ini menyebarkan paham Bolchevisme. Kecurigaan yang sama juga ditujukan kepada Pakat Guru Kristen yang berjuang dalam bidang pendidikan.

Agama Katolik dan Prostetan dapat berkembang di daerah ini karena adanya dukungan pemerintah kolonial, yang mana pemerintah memerlukan legitimasi dengan menempatkan unsur-unsur budaya asing di masyarakat. Legitimasi disertai percampuran antara budaya Barat dengan nilai-nilai etika yang akhirnya dapat diwujudkan dalam bentuk kekristenan. Walaupun tugas misionaris bukan wewenang para penguasa, tetapi hal tersebut dianjurkan oleh pemerintah, apalagi kristenisasi dianggap sebagai cara yang efektif untuk melawan gerakan-gerakan Islam yang dapat dengan mudah memicu perasaan anti Belanda.

D. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN

1. Pendidikan Setelah Masuknya Pengaruh Barat

Sebelum masuknya pengaruh Barat, di Kalimantan Selatan telah berkembang pendidikan tradisional, utamanya pendidikan agama yang dikenal sebagai “pengajian” yakni sistem pengajaran untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam, pada mulanya dilaksanakan di tempat tinggal Tuan Guru, tetapi kemudian banyak yang berlangsung di langgar-langgar.

Pelajaran yang diberikan oleh para tuan guru dalam pengajian adalah ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Selain itu ada pula yang mempelajari bahasa Arab secara pasif, di samping pelajaran membaca Alquran. Kitab yang digunakan pada umumnya adalah kitab berbahasa Arab

⁵⁸ Lebih jauh lihat : Tjilik Riwud, *op.cit.*, hal 170; J. Thomas Lindblad, *op.cit.*, hal. 133; dan M. Idwar Saleh *et al*, *op.cit.*, hal. 59.

dan dibawakan oleh tuan guru yang pernah belajar di Mekkah. Kitab itu dikenal sebagai Kitab Kuning. Dalam perkembangannya digunakan pula kitab beraksara Arab berbahasa Banjar atau Melayu, sehingga disebut kitab berbahasa Arab Melayu, sebagaimana kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari.

Pengajian yang umum berlangsung adalah pengajian *Bandongan* atau *Balangan*. Guru membacakan dan menguraikan isi kitab, sedangkan murid-muridnya memegang kitab yang sama dan diberi kesempatan menanyakan hal-hal yang belum dimengerti. Ada pula yang disebut pengajian *Sorongan* seperti yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad kepada anak cucunya, agar sampai kelak mewarisi kealiman bapaknya. Di samping itu, adapula pengajian *maahad* karena dilaksanakan pada hari Minggu (ahad), atau *manyanyan*, *manyalasa*, *maarba*, *mangamis*, *manjumahat*, dan *manyabtu* sesuai dengan nama hari pelaksanaan pengajian, yang mana murid hanya mendengarkan saja dan tidak menggunakan kitab, sedangkan guru menguraikan isi kitab yang dibacanya.⁵⁹

Untuk menjadi ulama, ahli Qur'an, hadist, dan sebagainya diperlukan beberapa guru yang waktu mengajinya memakan waktu puluhan tahun, bahkan kadang-kadang dilanjutkan di Mekkah. Mereka yang kembali, kemudian menjadi tuan guru yang memberikan pengajian di rumah atau di langgar-langgar.

Masuknya pemerintahan Hindia Belanda dengan kebijakan di bidang pendidikan, kemudian melahirkan elite baru yang semakin memudahkan peranan elite tradisional. Tetapi elite baru ini tidak semuanya diterima oleh masyarakat.

Demikian pula dengan masuknya agama kristen yang penyebarannya mendapat dukungan dari pemerintah Hindia Belanda, telah menimbulkan reaksi para ulama tentang adanya bahaya kristenisasi sehingga mereka berupaya menyempurnakan metode syiar agama dan pendidikan Islam di masyarakat.

Kristenisasi dianggap sebagai cara yang efektif untuk melawan gerakan-gerakan Islam dan gerakan Islam sendiri sangat mudah memicu perasaan anti Belanda.⁶⁰ Ketika Pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah umum, para ulama menilainya sebagai suatu usaha untuk mengasingkan anak-anak mereka dari agama Islam dan kemudian menasranikannya. Akibat dari itu, di beberapa daerah timbul gagasan mendirikan sekolah agama bukan sekedar untuk menyaingi sekolah-sekolah umum yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, tetapi juga untuk melawan Belanda melalui jalur pendidikan.

Sekolah-sekolah agama yang didirikan itu antara lain Sekolah Islam Darussalam Martapura tahun 1914, Arabische School yang kemudian menjadi Ma'ahad Rasyidiyah Amuntai tahun 1930, dan Diniyah Islamiyah di Barabai tahun 1932.⁶¹ Sekolah-sekolah itu telah diatur sesuai metode pengajaran modern dengan menggunakan sistem klasik. Alumni sekolah-sekolah ini banyak menghasilkan pemimpin-pemimpin muda Islam, baik yang bergiat di bidang politik, sosial maupun keagamaan.

Dengan demikian, kedatangan budaya Barat, terutama Belanda ke Kalimantan Selatan, sekali-kali tidak mengendurkan pengembangan syiar Islam di daerah ini.

2. Diskriminasi Pendidikan di Sekolah Pemerintah

Sebagai dampak dari keuntungan luar biasa yang diperoleh Belanda melalui penerapan Sistem Tanam Paksa dan eksploitasi kaum kapitalis Eropa, maka di penghujung abad ke-19 telah timbul pandangan baru bahwa pemerintah Belanda sebetulnya berutang budi kepada tanah jajahan. Hutang budi diantaranya harus dibayar dengan memberikan pendidikan kepada bangsa bumiputera. Terkenal slogan trilogi dari Politik Etis, "Irigasi, Edukasi dan Emigrasi" yang dimaksudkan untuk memajukan bumi putera.

⁵⁹ Ramli Nawawi ed., *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*, Bagian Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai Budaya Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1992, hal. 14.

⁶⁰ J. Thomas Linblad, *op.cit.*, hal. 133.

⁶¹ Ramli Nawawi ed., *op.cit.*, hal. 25.

Semboyan memajukan irigasi, edukasi dan emigrasi didukung oleh para penanam modal di Hindia Belanda. Karena perkebunan-perkebunan memerlukan irigasi yang intensif, tenaga kerja murah sehingga emigrasi ke luar Jawa sangat di harapkan. Persekolahan dibuka namun pada dasarnya bukan bertujuan untuk mencerdaskan rakyat, tetapi untuk kepentingan mencetak pegawai-pegawai rendahan yang berpendidikan Barat, yang diperlukan pemerintah Hindia Belanda maupun kaum pengusaha partikelir.⁶²

Bagi beberapa kalangan Belanda, mengembangkan pendidikan gaya Barat, bukan saja untuk keperluan perluasan birokrasi dan jaringan administrasi pemerintah kolonial, tetapi juga seperti dikatakan oleh van der Priejs – untuk membentengi Belanda dari “volcano Islam”.⁶³

Tetapi sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda yang membagi status masyarakat ke dalam tiga golongan, maka sekolahpun juga berjenis-jenis sesuai dengan golongan masyarakatnya, meski lembaga pendidikannya setingkat. Misalnya sekolah yang setingkat dengan sekolah dasar adalah ELS (*Europese Lagere School*) untuk orang Belanda atau orang yang haknya dipersamakan, HCS (*Hollands Chinese School*) untuk orang Cina, dan HIS (*Hollands Inlandse School*) untuk masyarakat bumiputera. Oleh pemerintah Hindia Belanda, status HCS disamakan dengan ELS, namun dibedakan dengan HIS dalam hak melanjutkan ke ke jenjang lebih tinggi.

Bukan hanya itu, untuk kalangan bumiputera Belanda juga melakukan diskriminasi, karena status masyarakat “inlander” terbagi atas tiga kategori, yaitu kategori A adalah kaum bangsawan, pejabat tinggi serta pengusaha kaya yang berpenghasilan bersih diatas 75 gulden sebulan. Kategori B adalah orang tua yang memperoleh pendidikan MULU (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) dan *Kweekschool* ke atas, sedangkan kategori C adalah pegawai kecil, pengusaha kecil, militer atau orang tua yang memperoleh pendidikan HIS. Oleh karena itu seorang bumi putera dapat mengikuti pendidikan setelah melewati seleksi yang ketat, bukan seleksi kecerdasan melainkan seleksi ras dan status bahkan pangkat kepegawaian.⁶⁴

Sekolah yang mula-mula diperuntukkan untuk bumiputera adalah Sekolah Kelas Dua, yang akan mendidik calon-calon pegawai rendah dan Sekolah Kelas Satu, yang diperuntukkan bagi anak-anak dari golongan masyarakat atasan. Sekolah-sekolah ini berbahasa pengantar Melayu.

Sebenarnya Sekolah Kelas I dan Sekolah Kelas II, di Kalimantan Selatan antara 1875-1889 telah ada sekolah untuk mengadakan tenaga guru dan pamong yang disebut sekolah Raja atau *Kweekschool voor Inlandse Onderwijzers*, yang bertempat di Banjarmasin. Setelah sekolah ini ditutup putra-putra daerah Kalimantan Selatan baru bisa belajar di sekolah guru lagi pada tahun 1919 ke Makassar. Yang diterima adalah lulusan Sekolah Kelas II, yang dikenal dengan sebutan Sekolah Melayu.

Sekolah Melayu ini ada dua jenis, yang pertama adalah Sekolah Kelas I yang kemudian menjadi *Hollands Inlandse School* pada tahun 1913. Ini merupakan sekolah dasar bumiputra yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Belanda. Yang kedua adalah Sekolah Kelas II, yang pertama kali didirikan di Banjarmasin pada tahun 1906 dengan lama pendidikan lima tahun. Pada tahun 1934 sekolah Kelas II dipecah menjadi *Volksschool (sekolah desa)* tiga tahun dan setelah menyelesaikannya dapat melanjutkan ke *Vervolgschool* (sekolah sambungan) yang lamanya dua tahun. Murid-murid lulusan Sekolah Kelas II ini meneruskan pelajarannya sejak 1910 ke Makassar memasuki *Kweekschool* untuk jadi guru, dan sesudah 1919 beralih ke *Normaalschool* Makassar karena *Kweekschool*nya tutup.⁶⁵

Sampai dengan 1942 di Kalimantan Selatan terdapat dua buah ELS yakni di Banjarmasin, dan di Sebelimbingan Kotabaru. Sedangkan HCS selain terdapat di Pacinan dan Jalan Kolonel Sugiono sekarang, juga terdapat di Kotabaru yang kemudian tutup. Selain itu terdapat pula dua buah HIS di Banjarmasin, sebuah *Neutrale Hollands Inlandse School*, sebuah HIS di Kandangan dan sebuah HIS di Amuntai.

Hollands Inlandse School atau HIS adalah sekolah untuk pribumi yang berbahasa pengantar bahasa Belanda dengan lama pendidikan tujuh tahun. Yang berhak mendapat pendidikan HIS ini

⁶² Darsiti Soeratman, *Ki Hajar Dewantara*, Depdikbud, Jakarta, 1985, hal. 29.

⁶³ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hal 122.

⁶⁴ Ramli Nawawi ed, *op.cit.*, hal. 30-31.

⁶⁵ Depdikbud, *op.cit.*, hal. 85.

adalah masyarakat kategori A dan B serta pegawai pemerintah yang berpangkat minimal Asisten Wedana.⁶⁶ Setelah menyelesaikan pendidikan di HIS, murid yang pintar dan mempunyai orang tua mampu dapat melanjutkan sekolahnya ke MULO, sekolah lanjutan pertama, dan dari sini terus ke AMS (*Algemene Middelbare School*). Jika nasibnya sedemikian baik, ia dapat melanjutkan ke sekolah tinggi, di Pulau Jawa atau Eropa.

Untuk jadi guru bantu, tamatan Sekolah Kelas II ini bisa memasuki *Normaal Cursus* guru bantu di Banjarmasin dan Kandangan yang dibuka antara 1911-1914 selama dua tahun mengajar. Untuk guru-guru wanita pada *Meisjes Cursus* (Sekolah putri), di buka kesempatan pada *Normaalschool* Blitar dengan lama pendidikan 4 tahun. Pada tahun 1930 putri-putri Banjar diberi kesempatan untuk memasuki sekolah itu. Mereka yang berangkat menuju Blitar untuk bersekolah di *Meisjes Normaalschool* berjumlah 15 orang berumur rata-rata 14-15 tahun, dari Kandangan delapan orang yaitu: Malati, Atung, Nursehan, Itai, Jawiah, Aluh, Nursiah, dan Maserah. Dari Rantau, Barlian dan Masriah. Dari Barabai Siti Aisyah. Dari Amuntai Syamsyah. Dari Alabio, Johar Manikam. Dari Kotabaru, Nursaniah dan dari Muaratewew Aisyah.⁶⁷

Murid-murid sekolah desa (*Volksschool*) dan sambungannya (*Vervolgschool*) yang tak bisa melanjutkan ke HIS bisa mengecap pendidikan setingkat atau menyeberang ke lingkungan sekolah "Belanda", dengan memasuki *Schakelschool* yang pertama didirikan di Barabai tahun 1933.

Belanda mendirikan bukan hanya *Vervolgsschool* (dua tahun) dengan murid campuran, tapi ada pula yang melulu untuk putri disebut *Meisjes Vervolgschool*, didirikan pada tahun 1935 di Banjarmasin dan Barabai. Untuk guru-guru desa dibuka *Leergang voor Volksonderwijzers* (dua tahun), kursus untuk memajukan pertanian, *Landbouw Cursus* tahun 1937, dan Sekolah Dagang Rendah di Banjarmasin.

Untuk kelanjutan HIS, di Banjarmasin terdapat MULO yang pertamakali dibuka tahun 1928 dan merupakan satu-satunya sekolah 'tertinggi' untuk seluruh Kalimantan berlokasi di Jalan Loji.⁶⁸ Karena satu-satunya inilah, maka tamatan sekolah rendah (ELS, HCS dan HIS) terkumpul di MULO Banjarmasin, dan tidak terlakukan diskriminasi. Anak-anak Bumiputera, anak-anak Cina totok dan peranakan, serta anak-anak Belandan totok dan indo, belajar bersama di satu kelas dan bergaul dengan baik.

Untuk dapat masuk MULO di Banjarmasin, siswa kelas tujuh sekolah rendah, oleh kepala sekolahnya diberi surat rekomendasi untuk langsung ---tanpa ujian--- diterima di kelas persiapan (*voorklas*) atau di kelas satu. Rekomendasi diberikan hanya untuk "voorklas" dan siswa yang berkeinginan dapat mengikuti ujian masuk ke kelas satu.

Di kelas dua siswa diarahkan ke jurusan yang oleh rapat guru-guru dianggap tepat dan sesuai dengan kemampuan si siswa. Ada tiga jurusan atau '*afdeling*' yang disediakan oleh MULO Banjarmasin, yakni jurusan Bahasa dan Sastra, jurusan Ilmu Pasti dan Alam dan jurusan Niaga yang masing-masing disebut afdeling A, B dan C.

Bahasa Belanda adalah bahasa pengantar disamping itu bahasa Inggeris dan Jerman yang wajib diajarkan di semua kelas dan jurusan. Pelajaran bahasa Melayu bersifat fakultatif antara lain diajarkan oleh Ki Agus Muhi dan Fajar Siddik gelar Sutan Endar Bongsu. Pelajaran agama Islam berhasil dimasukkan di sekitar penghujung 1939 berkat usulan Pemuda Muslimin MULO (PMM). Pembimbing yang pertama adalah Marwan Ali, BA.⁶⁹

Sejak MULO yang didirikan untuk sekolah golongan atas, di tahun 1939 didirikan pula Inheemse MULO atau MULO bumiputera sebagai sambungan dari *Vervolgsschool*, tujuannya hanya untuk mendidik tenaga administrasi atau bukan untuk mempersiapkannya bagi sekolah selanjutnya.

Pandangan hidup Barat dan pengetahuan Barat relatif berkembang pada kelompok tamatan *Hollands Inlandse School* (HIS) dan MULO. Sebagai kelompok semi intelek mereka (disamping

⁶⁶ Ramli Nawawi ed., *op.cit.*, hal. 33.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Hamlan Arpan, Banjarmasin.

⁶⁸ Sekarang Jalan Loji dikenal dengan nama Jalan Mayjen R. Soeprapto. Di bekas lokasi sekolahnya ditempati bangunan rumah dinas Gubernur Kalimantan Selatan.

⁶⁹ M. Suriansyah Ideham, "Sistem Pendidikan di Zaman Hindia Belanda", Banjarmasin, tt, hal. 4.; M. Suriansyah Ideham adalah salah seorang pendiri/pengurus Pemuda Muslimin MULO bersama-sama antara lain dengan Huzaimah, Yusuf Jaya, Mas Ripaie, Sri Mulyani dan Ishak Effendi.

lulusan-lulusan *Kweekschool* dan HIK dan *Normaalschool*), merupakan mayoritas kehidupan intelektual di Kalimantan Selatan yang dipengaruhi oleh perkembangan dan pusat pendidikan yang terdapat di Jawa.⁷⁰ Lulusan HIS dan MULO ini menjadi teras-teras pamong dan pegawai segala macam perkantoran pemerintah sebelum Perang Dunia II, ditambah dari mereka yang lulusan Osvia Makassar, yang jadi pemegang jabatan pucuk pamong dari kiai kepala ke bawah.

Sampai dengan tahun 1942, putra-putra Kalimantan Selatan yang lulus Perguruan Tinggi sangat terbatas jumlahnya. Sebagian besar sudah selesai ada yang kembali dan ada yang tidak kembali ke daerah, umpama dr. Sanusi Galib, Ir. Pangeran Mohamad Noor, Mr. Gusti Mayur, Mr. Burhanuddin dan Mr. Tajudin Noor. Di samping itu, ada pula yang pernah belajar di perguruan tinggi, walaupun belum selesai seperti M. Darmansyah (*Rechts Hoge School*), A.A. Rivai (*Nederlands Indische Artsen School*), Cirilus dan M. Pasi.

Golongan intelektual di daerah ini yang tergolong elite politik perannya sangat besar dalam menggiring masyarakat untuk bergerak menuju cita-cita sebagai suatu bangsa yang terhormat. Peran golongan ini, apalagi dari golongan agama seperti "Tuan Guru" sangat dominan dalam mengembangkan kelompok atau masyarakat yang dipimpinnya, karena selain sebagai panutan, Tuan Guru juga mempunyai massa yang fanatik. Jumlah Tuan Guru tidaklah banyak, akan tetapi pemikiran dan fatwanya sangat berpengaruh di masyarakat.

Kegiatan-kegiatan pendidikan sekuler pihak pemerintah kolonial ini diikuti oleh perkembangan sekolah-sekolah swasta yang berasaskan kebangsaan maupun berasaskan keagamaan dengan pendidikan klasikalnya.

3. Sekolah Kaum Pergerakan

Sekolah kaum pergerakan adalah sekolah yang dilihat dari segi motivasinya ada sekolah yang didirikan dengan motivasi nasionalisme yakni selain bertujuan agar anak didik memiliki rasa kebebasan dan tanggung jawab juga agar menjadi putra tanah air yang setia dan bersemangat, dan dengan patriotisme memiliki rasa pengabdian tinggi bagi nusa dan bangsa.⁷¹

Sekolah ini pada umumnya adalah sekolah swasta yang nasionalistis dan anti kolonial, didirikan oleh perkumpulan dan tokoh pergerakan yang mengutamakan jalan pendidikan dalam pergerakan mereka dan sebagian tidak bersubsidi. Sebab itu banyak pula didirikan kursus bebas seperti kursus memberantas buta huruf, mengetik sampai dengan kursus politik. Sekolah dimaksud, di Kalimantan Selatan antara lain sekolah-sekolah Perguruan Taman Siswa dan sekolah Perguruan Rakyat PARINDRA.

Disamping itu, ada pula sekolah swasta yang bercorak Islam yang selain mengajarkan mata pelajaran dan pendidikan agama untuk anak didik juga memberikan pelajaran agama Islam seperti yang dilaksanakan oleh Madrasah Persatuan Perguruan Islam, Madrasah Sarekat Islam, Sekolah Muhammadiyah, dan Madrasah Musyawaratutthalibin.

a. Madrasah Persatuan Perguruan Islam

Pada tahun-tahun pertama abad ke-20, di Kalimantan Selatan telah tumbuh dan berkembang madrasah dengan sistem klasikal, dan merupakan peningkatan dari sistem pengajian yang telah berkembang sebelumnya. Madrasah-madrasah yang berkembang tersebut tidak memiliki gubungan antar yang satu dengan lainnya, baik dari seri administratif maupun pengelolaannya. Tidak hanya itu, meski sama-sama sekolah agama, madrasah-madrasah tersebut tidak memiliki keseragaman bentuk dan isi kurikulum.

Mengingat kondisi demikian, maka para pemuka agama antara lain H. As'ad, H. Mukhtar dan H. Mansur membentuk Madrasah *Persatuan Perguruan Islam* (PPI) dengan tujuan untuk mengkoordinasikan madrasah-madrasah Islam dan menyeragamkan bentuk serta isi kurikulum seluruh madrasah yang ada.

⁷⁰ Depdikbud, *op.cit.*, hal. 89.

⁷¹ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hal. 251.

Pusat PPI ialah Barabai, karena kota inilah yang mempelopori berdirinya PPI. Dari Barabai madrasah PPI berkembang di Pantai Hambawang, Jatuh, Birayang, Kandangan, Amuntai, Banjarmasin dan lain-lain.

Madrasah PPI mempunyai tingkatan pendidikan, yaitu tingkat Awaliyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan tingkat Aliyah. Mata pelajaran yang diajarkan selain pengetahuan agama juga ilmu pengetahuan umum. Cara mengajar yang dipergunakan adalah sistem guru vak (guru pemegang pelajaran). Untuk itu, PPI banyak melibatkan tokoh agama untuk bersama-sama membina madrasah PPI, dan setiap guru diberi wewenang untuk memegang mata pelajaran yang disenangi.⁷²

b. Madrasah Sarekat Islam

Pada tahun 1914 Sarekat Islam⁷³ disingkat SI berdiri Banjarmasin dan mendapat pengakuan badan hukum (*rechtspersoon*) dengan Besluit Gubernur Jenderal No.33 tanggal 30 September 1914. Organisasi ini dibawa oleh H.M. Arif, seorang pedagang asal Marabahan yang berdagang pulang pergi antara Jawa dengan Kalimantan.

Dari Banjarmasin, SI berkembang di beberapa kota di Kalimantan Selatan. Di kota-kota yang ada cabang SI terdapat gedung kegiatannya yang dikenal dengan sebutan gedung *kalap* (club). Biasanya gedung ini dimanfaatkan pula sebagai tempat kegiatan madrasah yang dikelola oleh SI. Di Banjarmasin terdapat Gedung Club yakni di Seberang Masjid, dan di gedung inilah SI mendirikan sekolah Islam lima tahun yang diberi nama "Hadhihil Al-Madrastul Wathoniah". Mata pelajaran yang diberikan meliputi pengetahuan agama dan sedikit pengetahuan umum. Guru-guru yang mengajar di sini adalah Haji Mohammad Said (Kepala Sekolah), Said Idrus (Wakil Kepala Sekolah), dengan guru-guru pembantu Syekh Mohammad bin Amir, Haji Makhmud, M. Ideham, M. Pasi, Haji, Anang Akhmad, Haji Abdul Syukur dan Haji Hamsyah.

Sekolah Islam yang sama tuanya dengan Sekolah Islam SI adalah Arabische School yang kemudian menjadi Islamsche School (berlokasi di Jalan Sulawesi sekarang; sekolah MAN) yang didirikan oleh orang-orang Arab, khususnya untuk anak-anak mereka. Salah seorang pemimpin sekolah ini adalah Saleh Bal'ala. Ia sangat dikenal waktu itu, karena selain suka bergaul dengan pemuka masyarakat bumiputera, ia juga anggota SI yang kemudian menjabat ketua Fathal Islam yakni suatu organisasi dakwah Islamiah, dan juga ketua PKU yakni organisasi filial dari Muhammadiyah.

Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, pada tahun 1922 di saat SI diketuai oleh M. Horman, didirikanlah *Particuliere Hollands Inlandse School* atau HIS Swasta bertempat di Pasar Lama Banjarmasin dipimpin oleh Abdul Gais, dibantu oleh Mansyur Ali Hasan.⁷⁴

Di Marabahan, atas dorongan H.M. Arif telah berdiri pula HIS Swasta yang dikelola oleh Sarekat Islam dan dikemudian hari nantinya menjadi Perguruan Taman Siswa.. Sedangkan di Kandangan, madrasah Sarekat Islam didirikan di Luklua yang kemudian menjadi Madrasah Islam Pandai.⁷⁵

c. Madrasah Musyawaratutthalibin

Organisasi berdiri sekitar tahun 1930 di Banjarmasin dan mempunyai banyak cabang di Kalimantan Selatan hingga ke pesisir Timur Sumatera, Kegiatannya di bidang pendidikan yang terkenal adalah madrasah syafiahnya

Untuk melaksanakan ayat empat pasal tiga Statuten Musyawaratutthalibin yaitu mendirikan sekolah-sekolah yang diberi pengajaran agama Islam dan ilmu pengetahuan Umum, maka di hampir semua cabang Musyawaratutthalibin didirikan Sekolah Musyawarah.⁷⁶

⁷² Ramli Nawawi ed., *op.cit.*, hal. 50-52.

⁷³ Sesuai dengan arsip-arsip yang ada organisasi ini ditulis *Sarekat Islam*, bukan *Syarikat Islam* atau *Sarikat Islam*.

⁷⁴ Sjamsuddin, *op.cit.*, hal. 31-33.

⁷⁵ Ramli Nawawi ed., *op.cit.*, hal. 54.

⁷⁶ Mohammad Yusran, "Sejarah Singkat Bangkit dan Berkembangnya Musyawaratutthalibin di Kalimantan Selatan Sampai Tahun 1942", Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, Banjarmasin, 1972, hal. 48.

Madrasah yang terkenal adalah Normal Islam di jalan Keraton Rantau, yakni madrasah Musyawaratutthalibin yang tertinggi yakni setingkat Tsanawiyah diasuh oleh H. Mahyudin dan tokoh-tokoh agama lainnya di Rantau. Sebagai pengajar, selain guru lokal juga didatangkan guru-guru dari terutama dari Gontor Ponorogo, seperti Maisyir Thaib, Bey Arifin dan Khatib Syarbaini.⁷⁷

Bahasa pengantar yang dipakai adalah Bahasa Arab, disamping itupula diajarkan bahasa Belanda dan Inggris. Untuk mata pelajaran umum dipakai kurikulum yang mengacu kepada pesantren Gontor dengan sistem guru vak.

d. Sekolah Muhammadiyah

Perkembangan sekolah Muhammadiyah sejalan dengan perkembangan organisasi Muhammadiyah di Kalimantan Selatan. Faham Muhammadiyah sudah masuk ke Kalimantan Selatan pada tahun 1920-an. Namun organisasi Muhammadiyah baru pertama kali berdiri di Alabio pada tahun 1925.⁷⁸

Usaha pertama dari Muhammadiyah cabang Alabio di bidang pendidikan adalah mendirikan sekolah Islam dengan nama *Standaard School* dengan mata pelajaran agama sebagai dasar dan ditambah dengan ilmu pengetahuan umum. Dalam perkembangannya, sekolah ini menjadi *Vervolgschool met den Qor'an*, dimana pelajaran agama menjadi dasar pendidikan.

Pada tahun 1928 di Alabio berdiri sekolah lanjutan yaitu *Wostha School* dengan lama pendidikan tiga tahun dan merupakan sekolah guru dari perguruan Muhammadiyah. Mereka yang lulus ditetapkan menjadi guru-guru di sekolah-sekolah cabang atau ranting Muhammadiyah lainnya.

Karena sekolah Muhammadiyah tidak meninggalkan pengetahuan umum, maka sekolah ini mendapat subsidi dari pemerintah Hindia Belanda, berupa bantuan tenaga guru yang dibeslutkan oleh Muhammadiyah namun gajinya dibayar melalui dana subsidi pemerintah.⁷⁹

Selain sekolah-sekolah tersebut terdapat pula sekolah lainnya yang didirikan Muhammadiyah, seperti SD Muhammadiyah Teluk Tiram (didirikan tahun 1929), SD Muhammadiyah Kelayan (1932), HIS Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1935 di Jalan Kalimantan,⁸⁰ dan HIS Muhammadiyah di Jalan Pasar Lama yang berlokasi di "KOS".

HIS Muhammadiyah di Jalan Kalimantan didirikan atas inisiatif Haji Masykur dan kawan-kawan. Oleh Pemerintah Hindia Belanda, sekolah ini dianggap sekolah liar. Pemerintah mengatakan syarat-syaratnya tidak memenuhi apa yang diharapkannya. Tetapi nyatanya, meski dianggap sekolah liar HIS Muhammadiyah dapat berkembang pesat seperti halnya sekolah Muhammadiyah lainnya.

Sesuai dengan cita-cita pembaharuan pemikiran, Muhammadiyah mempelopori organisasi pendidikan dan kurikulum yang teratur. Sistem pendidikan menanamkan kepada pengertian, bukan semata hapalan. Oleh karena itu, sumbangan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan cukup besar, khususnya dalam pendidikan Islam di Kalimantan Selatan.

e. Sekolah Taman Siswa

Perguruan Taman Siswa didirikan oleh R.M. Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922. Pada waktu itu nama yang dipakai adalah *National Onderwijs Instituut Taman Siswa* (Lembaga Pendidikan Nasional Taman Siswa).⁸¹ Karena Taman Siswa berusaha selalu bersatu dengan rakyat maka dalam waktu yang singkat di beberapa di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Ambon berdiri cabang-cabangnya.

Di Kalimantan Selatan, Taman Siswa mendapat dorongan dari H.M. Arif, tokoh Sarekat Islam Kalimantan Selatan. Mula-mula berdiri di Marabahan dan kemudian di Banjarmasin. Cikal bakal lahirnya Taman Siswa bermula dari *Particuliere Hollands Inlandse School (PHIS)* atau HIS Swasta pada tahun 1929 yang didirikan pemuda Marabahan dan dikelola oleh Sarekat Islam. Mula-mula

⁷⁷ Ramli Nawawi ed., *op.cit.*, hal. 560.

⁷⁸ M. Syahrani, "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Muhammadiyah di Kalimantan Selatan (1914-1942)", Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, Banjarmasin, 1972, hal. 17.

⁷⁹ Ramli Nawawi ed., *op.cit.*, hal. 58-59.

⁸⁰ M. Syahrani, *op.cit.*, hal. 48.

⁸¹ Darsiti Soeratman, *op.cit.*, hal. ix.

dipimpin dan diajar oleh Marjono (pegawai Borneo Post). Mengingat pesatnya perkembangan sekolah tersebut, Marjono mendatangkan teman-temannya yakni Sutomo dan Sunaryo anggota Sarikat Buruh di Surabaya untuk menjadi guru di PHIS.

Pusat kegiatan PHIS bertempat di "Rumah Bulat" bergabung dengan Sarekat Kalimantan (sebelum menjadi BINDO). Sekolah PHIS ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat Marabahan, sehingga jumlah muridnya semakin banyak. Guru-guru PHIS menggembeleng semangat kebangsaan pemuda-pemuda Marabahan melalui pengajaran dan juga kepanduan yang waktu itu bernama *Borneo Padvinder Organisatie* (BPO).

Setelah berlangsung enam bulan kegiatan PHIS mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kolonial Belanda. Marjono, Sutomo dan Sunaryo dicurigai sebagai anggota partai terlarang. Keterkaitan mereka dengan PARI diketahui Belanda menyusul ditemukannya dokumen-dokumen PARI di Singapura. Diantara dokumen tersebut terdapat surat-surat dari Marjono, Sutomo dan Sunaryo dari Marabahan. Belanda mengambil tindakan tegas dengan menggrebek Rumah Bulat, dan menahan Marjono dan Sunaryo dan selanjutnya dibuang ke Boven Digul (Irian Barat). Atas anjuran Marjono sewaktu akan ditahan agar kegiatan PHIS tetap dilanjutkan dengan bantuan Taman Siswa, maka tokoh-tokoh Marabahan bersama Sutomo yang muncul kemudian berangkat ke Yogyakarta menemui tokoh-tokoh Perguruan Taman Siswa. Sebagai hasil hubungan itulah pada tahun 1931 Ki Hajar Dewantara mengirimkan guru-guru Taman Siswa yaitu M. Yusak, Sundoro dan Yusyadi.⁸²

Sejak PHIS dibantu pengelolaannya oleh ketiga guru tersebut, maka pada tanggal 1 Januari 1931 atas persetujuan bersama ditetapkan bahwa PHIS dijadikan Perguruan Taman Siswa cabang Marabahan dengan kegiatan bertempat di Rumah Bulat. Dari Marabahan, Taman Siswa berkembang di daerah lainnya seperti di Banjarmasin Kandangan, Barabai, Kelua dan Kuala Kapuas.

Sekolah Taman Siswa ini hanya menyelenggarakan pendidikan setingkat Taman Muda atau tingkat pendidikan kelas 4-6 untuk anak-anak berumur 10 s.d. 13 tahun. Meski demikian, orang dewasa juga dapat mengikuti pendidikan yang dikelola Perguruan Taman Siswa pada sore hari.

Jumlah murid yang terdaftar dalam Perguruan Taman Siswa saat itu mencapai 200 orang. Selain menyelenggarakan kelas belajar, penanaman rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa juga dilakukan melalui *Borneo Padvinder Organisatie* yang kemudian berubah menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia.⁸³

Pengelolaan Perguruan Taman Siswa di Marabahan dapat berlangsung berkat kesadaran masyarakat dan orang tua murid akan pentingnya pendidikan dan semangat kebangsaan.

f. Perguruan Rakyat PARINDRA

Cabang Partai Indonesia Raya (PARINDRA) berdiri pada tahun 1935 di bawah pimpinan Merah Djohansyah. PARINDRA sebagai partai rakyat bukan saja berusaha dalam perekonomian, tetapi juga dalam pendidikan. Hasil karya PARINDRA dalam pendidikan antara lain membentuk Perguruan Rakyat PARINDRA di Kandangan, Banjarmasin, Barabai, Birayang, dan Amuntai.

Pentingnya pendidikan bagi PARINDRA tercermin dari pendapat J.J. Baker seorang guru "Taman Medan Antara" PARINDRA Kandangan pada saat peresmian berdirinya sekolah "Perguruan Rakyat PARINDRA" di Amuntai tanggal 1 Agustus 1935 bahwa : "perguruan adalah satu soal yang sangat penting dan satu alat yang utama. Anak-anak tidak dapat maju, kalau tidak dapat didikan".⁸⁴

Di Kandangan, Sekolah Perguruan Rakyat PARINDRA berdiri pada tahun 1937 di Jalan Kubur Wih (kemudian di sebut Jalan Merdeka). Guru-gurunya yakni Raden Imam Subekti (Kepala Sekolah) dan Johanes Baker (Pembantu) berasal PARINDRA Surabaya. Mata pelajaran yang diajarkan adalah Bahasa Belanda dan Bahasa Inggeris, serta pelajaran lainnya yang berhubungan dengan kegiatan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan. Sebagai pemegang vak Bahasa Belanda

⁸² Ramli Nawawi ed., *op.cit.*, hal. 63.

⁸³ Hasil wawancara dengan Mawardi, Marabahan.

⁸⁴ Soepardi, "Sejarah Singkat Pertumbuhan dan Perjuangan Dari: Partai Nasional Indonesia, Pendidikan Nasional Indonesia, Gerakan Rakyat Indonesia, di Kalimantan Selatan", Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, Banjarmasin, 1972, hal. 20.

adalah Imam Subekti, sedangkan Johanes Baker memegang vak Bahasa Inggris yang setelah ditangkap Belanda diganti oleh Adi Martono. Karena sekolah berkembang menjadi dua kelas, maka pengajarnya ditambah yakni Iberamsyah dan Rosita dan kemudian dibantu Abdul Sani, beberapa saat setelah Imam Subekti dan Adi Martono pulang ke Jawa.

Pada akhir tahun 1939 sekolah ini kemudian dilebur menjadi IHS (*Inheemse Hollandse School*). Sesudah peleburan tersebut maka pengertian tentang Sekolah Perguruan PARINDRA sudah hilang, dan kembali ke sekolah sejenis *Inlandse School* (Sekolah Gubernemen Kelas Dua). Kalau dahulu untuk memasuki sekolah Perguruan Rakyat PARINDRA harus tamat *Inlandse School* atau sederajat, maka kemudian sekolah ini setingkat dengan sekolah dasar.

Selain telah didirikannya Sekolah Perguruan Rakyat PARINDRA yang oleh masyarakat Kandungan lebih dikenal dengan “Taman Medan Antara”, juga telah mendirikan sekolah-sekolah sejenis *Volkschool* 3 tahun. Di Kandungan sekolah-sekolah tersebut terdapat di Karang Jawa, Gambah, Bekarung, dan Tinggiran. Guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut dari anggota PARINDRA sendiri. Diantara pengajar yang merupakan alumni Taman Medan Antara adalah Artum Artha yang diangkat menjadi guru bantu pada Sekolah/Perguruan Rakyat PARINDRA di Kandungan.⁸⁵ Mereka digaji oleh POC PARINDRA. Seorang guru sekolah pada *Volkschool* PARINDRA ini mendapat gaji f.7.50 dan bagi guru bantu diberi gaji f.5.00.

Sekolah-sekolah PARINDRA setingkat *Volkschool* tersebut juga terdapat di Banjarmasin, Barabai, Birayang, dan persiapan di Amuntai. Sedangkan sekolah Perguruan Rakyat yang setingkat dengan MULO hanya ada di Kandungan, di mana berkedudukan Komisaris Daerah PARINDRA Kalimantan Selatan.⁸⁶

E. PERKEMBANGAN PERGERAKAN RAKYAT DI KALIMANTAN SELATAN

1. Pelopor Kebangkitan Pergerakan Rakyat

Tumbuh kembangnya pergerakan rakyat di Kalimantan Selatan tidak terlepas dari “aspek-aspek positif” yang telah dipersiapkan oleh kolonialisme sejak akhir abad ke-19 dan terutama pada dasawarsa permulaan abad ke-20. Tata pemerintahan modern yang diwujudkan dalam pemerintahan daerah, *Residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo*, kemudian *Gewest Borneo*, *Gemeente Bandjermasin*, sistem pendidikan model Barat, penetrasi sistem ekonomi dan keuangan modern, sarana komunikasi dan transportasi telah menarik daerah ini ke ke jenjang globalisasi versi permulaan abad ke-20. Walaupun di banding di Jawa, perkembangannya jauh terbelakang, namun kebijakan pemerintah kolonial itu berperan pada satu segi sebagai *agent of modernization*.⁸⁷

Di sisi lain muncul kecenderungan baru sebagai antithesa terhadap kolonialisme itu, yakni dampak dari adanya pendidikan dan pengajaran secara barat yang melahirkan adanya kalangan terpelajar yang memperoleh pekerjaan yang lebih baik, kedudukan dan prestasi. Mereka adalah kelompok elit baru, yakni kelompok terpelajar yang memegang jabatan dalam pemerintahan (pangreh praja), kantor-kantor dagang maupun cabang-cabang perusahaan lainnya. Elit baru ini mempunyai kedudukan atau jabatan karena prestasi, bukan karena pewaris yang berlaku pada elit tradisional.

Dalam keadaan mengecewakan, dimana rakyat terjajah menderita karena ketidakadilan, maka tampil kaum elit baru yang memiliki kesadaran nasional⁸⁸ memegang pimpinan untuk menuntut perbaikan-perbaikan. Mereka berjuang untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsanya. Mereka berpendapat bahwa perjuangan akan lebih efisien jika menurut contoh-contoh Barat.

⁸⁵ Arthum Artha, “Mencapai Usia Lanjut 75 Tahun”, Otobiografi, Banjarmasin, 1995, hal. 1.

⁸⁶ Ramli Nawawi ed., *op.cit.*, hal. 64-66.

⁸⁷ Alex A. Koroh *et al.*, “Mengenal Pertumbuhan dan Perkembangan Nasionalisme di Kalimantan Selatan Selama Tiga Dasawarsa 1912 – 1942”, Laporan Penelitian FKIP Unlam, Banjarmasin, 1994, hal. 6.

⁸⁸ Kesadaran dan kebangkitan nasional di Indonesia juga dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di Asia, antara lain kemenangan Jepang dalam perang melawan Rusia; Gerakan Turki Muda dibawah pimpinan Mustapa Kemal Pasha; Pemberontakan di Cina dibawah pimpinan dr. Sun Yat Sen; gerakan cita-cita kemerdekaan di India yang dipelopori Mahatma Gandhi

Mereka tidak lagi mengadakan perlawanan bersenjata seperti yang dilakukan oleh penguasa tradisional pada masa-masa atau abad sebelumnya. Maka dengan demikian Pemerintah Hindia Belanda berhadapan dengan “senjata” mereka sendiri.⁸⁹

Di samping elit baru yang merupakan elit kolonial Belanda, terdapat pula elit agama (ulama), yakni orang-orang pintar, terkemuka atau orang yang terpandang dalam kalangan umat Islam. Mereka dikenal dengan sebutan *Tuan Guru*. Dalam masa pemerintahan Hindia Belanda, para ulama ini tetap pada posnya “yang lama” yakni mendampingi rakyat, baik dalam fungsinya sebagai penyebar dan pembina keagamaan.⁹⁰

Dalam konteks setempat (*in loco*) tumbuh kembangnya pergerakan rakyat di daerah ini sangat dipengaruhi oleh kebangkitan Islam dalam segala manifestasinya. Sehingga tidak salah jika dikatakan pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan pada dekade pertama abad ke-20 sebenarnya dimulai dengan nasionalisme Islam. Hal itu terlihat dengan munculnya organisasi massa pertama yang mengarah kepada kebangsaan, seperti Sarekat Islam, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah.

Jika diklasifikasikan, maka pelopor pergerakan rakyat di daerah ini muncul dari atau berasal dari golongan menengah, yang terdiri dari :

- a. Ulama atau Guru Agama yang bukan pegawai negeri, yaitu :
 - (1) Elite religius yang berjiwa santri yang dihasilkan akibat diaktifikannya pendidikan klasik agama yang kemudian kebanyakan menjadi pelopor dan penggerak organisasi pergerakan rakyat seperti Sarekat Islam, Nahdlatul Ulama, dan Musyawaratutthalibin. Kelompok inilah yang dahulu disebut sebagai Kaum Tuha.
 - (2) Elite religius yang berjiwa agresif dan dinamis yang kemudian berjuang dalam wadah organisasi Muhammadiyah. Kelompok ini yang menurut istilah di daerah ini pada saat itu disebut sebagai Kaum Muda.
- b. Kaum Cendekiawan yang tumbuh akibat penerimaan penetrasi Barat secara terbuka dan aktif, baik dengan memasuki sekolah-sekolah negeri atau yang dihasilkan oleh sekolah-sekolah partikelir (sekolah pergerakan atau sekolah kebangsaan) yang mengajarkan pengetahuan dan pendidikan Barat. Kelompok inilah yang dinamakan elite sekuler. Mereka memilih Partai Nasional Indonesia (PNI), PBI atau PARINDRA, PNI Baru (Pendidikan Nasional Indonesia) dan Taman Siswa, sebagai wadah perjuangan mereka.
- c. Pedagang yang melakukan perdagangan ekspor dan impor, pedagang antar pulau (interensuler) yang memperoleh banyak pengalaman, pengetahuan dan hubungan dengan dunia luar dan melihat kemajuan pergerakan di daerah lain, sehingga ketika kembali ke kampung halaman turut menjadi pelopor atau penggerak organisasi pergerakan di daerah ini.⁹¹

2. Pengaruh Pergerakan Rakyat Yang Tumbuh di Jawa

Lancarnya hubungan kapal laut antara Banjarmasin dengan kota-kota di pantai utara Pulau Jawa, berdampak kepada lancarnya hubungan komunikasi dan informasi antara penduduk Kalimantan Selatan dengan Jawa. Termasuk dalam hal ini adalah masuknya pergerakan rakyat yang tumbuh di Jawa ke Kalimantan Selatan.

Masuknya organisasi pergerakan rakyat yang tumbuh di Jawa ke Kalimantan Selatan melalui dua macam cara :

- a. Diterima langsung oleh pelopor pergerakan rakyat atau pergerakan kebangsaan di daerah ini dari tempat asal organisasi tersebut di Jawa, yang selanjutnya dibawa dan dikembangkan di daerah ini. Hal ini antara lain dapat dihubungkan dengan masuknya Sarekat Islam atau SI ke daerah ini yang dibawa oleh H.M. Arif, seorang pedagang yang pulang pergi Banjarmasin-Surabaya.

⁸⁹ Lihat Darsiti Soeratman, *op.cit.*, hal. 21-22.

⁹⁰ Ahmad Gafuri, *Sejarah Perjuangan Gerilya Menegakkan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan (1945-1949)*, Departemen Penerangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kandangan, 1984, hal. 24.

⁹¹ Sjarifuddin, *op.cit.*, hal. 33-34 dan Pemda Tk.I Kalsel, *op.cit.*, hal.36.

- b. Diterima melalui kaum pergerakan yang datang dari Jawa dan Sumatera ke daerah ini. Kelompok ini datang dari dua arus atau asal yaitu dari Jawa dan Sumatera. Arus kaum pergerakan yang datang dari Jawa berlangsung sejak tumbuh dan berkembangnya SI di daerah ini pada tahun 1912. Organisasi pergerakan yang masuk dari Jawa, sebagian besar adalah pergerakan yang bersifat sekuler seperti PNI, PBI/PARINDRA, PNI Pendidikan dan Perguruan Taman Siswa yang bergerak dibidang pendidikan kebangsaan.

Arus pergerakan dari Sumatera, datang ke daerah ini bersamaan dengan perkembangan Musyawaratutthalibin dan PARINDRA di Kalimantan Selatan. Kaum pergerakan yang datang ke daerah ini bekerja sebagai guru yang mengajar ilmu pengetahuan umum di sekolah-sekolah yang didirikan oleh Musyawaratutthalibin dan Normal Islam di Rantau. Di samping sebagai anggota Musyawaratutthalibin, mereka juga telah matang dalam PARINDRA di daerah asalnya (Sumatera).

Kaum pergerakan yang datang dari Jawa dan Sumatera, kemudian bergabung dengan pelopor pergerakan rakyat di daerah ini. Mereka bersama-sama berjuang dalam wadah pergerakan rakyat yang mereka bina bersama, baik berupa partai politik, maupun organisasi kemasyarakatan.⁹²

3. Pertumbuhan dan Perkembangan Organisasi Pergerakan

Organisasi pergerakan rakyat di Kalimantan Selatan mempunyai karakteristik yang beragam. Ada yang jika dilihat dari ruang lingkup atau daerah perjuangannya, bergerak dalam lingkup lokal, regional maupun lingkup nasional. Sedangkan jika dilihat dari tujuan yang akan dicapai dan dasar-dasar dari organisasi pergerakannya, maka dapat dikelompokkan ke dalam kelompok besar, yakni organisasi yang bergerak di bidang sosial, dan organisasi pergerakan yang bergerak di bidang politik.⁹³

a. Pergerakan Lokal

Sebagaimana yang lazim terjadi di daerah-daerah lain bahwa pelopor tumbuhnya organisasi pergerakan adalah kaum terpelajar, yakni golongan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat pengaruh pendidikan Barat.

Pemakaian huruf latin, kebiasaan membaca melalui sekolah rendah atau Taman Bacaan (*Het Leesgezelschap*), dan penetrasi pemerintah kolonial di berbagai aspek kehidupan lambat laun turut memberikan pengaruh kepada berkembangnya wawasan dan pola pikir masyarakat Banjar khususnya dan Kalimantan Selatan pada umumnya.

Selain kaum terpelajar, kaum pedagang yang sering pulang pergi Banjarmasin Pulau Jawa juga turut aktif sebagai pelopor tumbuhnya pergerakan di daerah ini, khususnya organisasi pergerakan modern yang berinduk di Jawa dan bernaftaskan Islam.

Islam sebagai agama yang dianut sebagian besar masyarakat Kalimantan Selatan sangat berperan sebagai pendorong tumbuhnya pergerakan nasional di daerah ini, karena berbagai aliran atau organisasi-organisasi yang bernaftaskan Islam dapat dengan mudah tumbuh dan berkembang karena banyaknya pengikut atau anggotanya.

Sampai akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 sebagian bentuk himpunan lama dari jaman kerajaan masih hidup, berupa gerakan persatuan berdasarkan bubuhan dengan asas agama, sosial atau religi seperti sinoman kematian, sinoman perkawinan, sinoman kesenian dan sebagainya. Kelompok-kelompok sinoman umumnya masih merupakan gerakan dalam ikatan bubuhan, atau kelompok masyarakat desa, terikat kepada adat kebiasaan, tradisi orang tua terdahulu atau tradisi keagamaan. Dalam hal ini yang berperan adalah *tetuha* masyarakat dan pemuka agama yang disebut dengan sebutan tuan guru, mualim, ustadz, atau kepala-kepala bubuhan. Dengan demikian, bentuk perhimpunan seperti sinoman atau bubuhan itu merupakan gerakan yang masih bersifat tradisional, dan belum dapat dikatakan sebagai embrio dari proses zaman pergerakan nasional di daerah Kalimantan Selatan.

⁹² Sjarifuddin, *ibid.*, hal. 35-36 dan Pemda Tk.I Kalsel, *ibid.*, hal.37.

⁹³ Lebih jauh tentang pengelompokan ini, lihat Pemda Tk.I Kalsel, *ibid.*, hal.38.

Tanda-tanda permulaan pertumbuhan pergerakan nasional di daerah ini baru dimulai dengan lahirnya sebuah perkumpulan yang bernama *Seri Budiman* di Banjarmasin pada tahun 1901 yang didirikan atas inisiatif Kiai Bondan. Anggota-anggotanya berasal dari golongan pangreh praja dan golongan pedagang, yaitu golongan masyarakat bumi putera yang menjadi elite kolonial atau telah mendapatkan pengaruh pendidikan secara Barat.

Walaupun perkumpulan ini lebih nampak sifat sosialnya daripada aspek politiknya, namun organisasi ini dapat dipandang sebagai organisasi perintis di daerah ini yang membuka jalan bagi timbulnya organisasi modern di kemudian hari. Organisasi *Seri Budiman* ini sendiri dibentuk dengan memakai cara dan metode modern seperti memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan tujuan tertentu yang hendak dicapai serta kelengkapan organisasi seperti kesekretariatan dan taman bacaan.

Perkumpulan *Seri Budiman*lah yang mula-mula sebagai pelopor mempergunakan podium sebagai sarana para pembicara di sidang-sidang rapat, sehingga kebebasan berbicara di atas mimbar menjadi suatu kebiasaan dalam dunia perhimpunan di Kalimantan Selatan.

Sesuai dengan penonjolan watak sosialnya daripada watak politisnya, maka perkumpulan *Seri Budiman* bertujuan untuk mempererat hubungan silaturahmi sesama anggotanya, mempropagandakan pentingnya pengajaran dari Barat, persatuan kaum pedagang dan pertanian. Perkumpulan ini tidak dapat hidup lama, karena pada tahun 1903 dibubarkan secara resmi yang disebabkan antara lain anggota-anggotanya yang penting dan yang menjadi motor pendorong organisasi pindah tempat tugas, berhubung dengan jabatannya maupun usaha perdagangannya.

Setahun kemudian setelah bubaranya *Seri Budiman*, maka pada tahun 1904 timbul pula organisasi lain yang mempunyai tujuan dan anggota yang sama dengan perkumpulan yang mendahuluinya. Perkumpulan tersebut diberi nama *Budi Sempurna* dengan pendirinya adalah Kiai Muhammad Zamzam. Setelah dua tahun perkumpulan ini berjalan, atas persetujuan pengurus dan anggota-anggotanya perkumpulan ini berganti nama menjadi *Indra Buana* dengan tujuan, keanggotaan dan struktur organisasi yang sama dengan perkumpulan-perkumpulan sebelumnya. Perubahan nama ini ternyata tidak banyak memberikan manfaat terhadap kelangsungan organisasi karena timbul perselisihan-perselisihan diantara anggota-anggotanya. Sebagai akibatnya maka pada tahun 1907 *Indra Buana* dibubarkan secara resmi oleh pengurusnya.

Perkumpulan-perkumpulan ini berupa perkumpulan sosial, meniru perkumpulan orang Belanda (*Sociteit de Kapel*), yang membedakannya adalah selain digerakkan oleh golongan bumi putera yang terpelajar juga adanya perasaan dan pertimbangan zaman bahwa pendidikan (Barat) itu penting sekali sebagai indikator dalam perubahan zaman. Dan untuk mempropagandakannya diperlukan adanya perkumpulan dengan beranggaran dasar dan beranggaran rumah tangga serta membentuk taman bacaan.

Pendirian Taman Bacaan (*Het Leesgezelschap*) antara lain juga dilakukan pada tahun 1923 oleh segolongan muda terpelajar dalam sebuah organisasi bernama *Srie*. Pendirinya Dr. Rusma, Gusti Citra, Kumala Ajaib, Amir Hasan, Mas Abi dan Abdullah. Taman Bacaan yang dibentuk bukan hanya memberikan sekedar untuk bersilaturahmi kepada anggota-anggotanya tetapi juga sebagai *study club* untuk bersama mempelajari politik dan warna tipu muslihat penjajahan Belanda. Dalam majalah mingguan *Malam Jumat* yang dipimpin oleh Amir Hasan dan Saleh Bal'ala, mereka mengadakan rubrik tulisan tersendiri bagi anggota-anggotanya. Haluan dan isi tulisan mereka mula-mula nya bertemakan keagamaan, lambat laun isinya mengarah kepada kebangsaan. Perkumpulan *Srie* hanya bisa bertahan selama empat tahun. Ketika para pimpinannya sebagian besar pindah karena pindah tugas jabatan atau karena kegiatan usaha perdagangannya, maka *Srie* akhirnya bubar.⁹⁴

Satu gejala seperti yang nampak di Pulau Jawa dengan *yong-yongnya* maka di Kalimantan Selatan timbul pula perhimpunan-perhimpunan yang bersifat lokal diantaranya *Persatuan Pemuda Marabahan*, *Persatuan Putra Barabai* dengan pendirinya H. Hasan Basri, *Persatuan Sopir Barabai*, dan *Persatuan Putra Borneo*.⁹⁵

⁹⁴ Lihat Amir Hasan Kiai Bondan, *op.cit.*, hal. 82-84.

⁹⁵ Depdikbud, *op.cit.*, hal. 73.

Persatuan Pemuda Marabahan (PPM) dibentuk pada tanggal 1 Maret 1929.⁹⁶ dengan ketuanya M. Ruslan, dibantu oleh Suriadi sebagai Sekretaris I dan Mawardi sebagai sekretaris II dengan pelindungnya H.M. Arif.⁹⁷ bermaksud di sebuah rumah yang disebut dengan nama Rumah Bulat, yakni sebuah rumah bertipe Joglo atau Limasan di Jalan Panglima Wangkang sekarang.

Pada mulanya para pemuda menjadikan Rumah Bulat sebagai tempat perkumpulan musik untuk menampung bakat seni pemuda Marabahan, namun seringkali para pemuda berkumpul di Rumah Bulat ditambah dengan pengaruh berita-berita munculnya perkumpulan-perkumpulan kepemudaan di Banjarmasin dan aktivitas pergerakan di Jawa, mendorong mereka mendirikan sebuah wadah kegiatan berbentuk organisasi Persatuan Pemuda Marabahan.

Dalam organisasi PPM mereka mendirikan Taman Bacaan dengan nama *Family Bond* bertempat di Rumah Bulat bergabung dengan perkumpulan musik yang telah ada. Diadakannya taman bacaan berkaitan erat dengan keinginan tokoh masyarakat setempat agar kegiatan dapat mengurangi jumlah penduduk yang buta huruf. Sebagai bahan bacaan mereka berlangganan surat kabar dan majalah diantaranya *Hindia Baroe*, *Bintang Baroe*, *Bintang Islam*, dan *Kemajoean Hindia*. Biaya berlangganan dipungut dari iuran para anggota, meskipun demikian anggota masyarakat yang bukan anggota taman bacaan juga diperkenankan membaca surat kabar atau majalah yang ada.⁹⁸

Dari surat kabar dan majalah tersebut, para pemuda Marabahan dapat mengikuti berita dan membaca tulisan yang mempropagandakan cita-cita kebangsaan yang saat itu telah tumbuh di Jawa maupun ditempat lainnya. Selain itu datangnya tokoh-tokoh pergerakan dari Jawa juga turut mewarnai tumbuhnya benih-benih kebangsaan dan semangat pergerakan di daerah ini.

Pada tahun 1930 Persatuan Pemuda Marabahan memperluas tujuan dan ruang geraknya dengan mensponsori berdirinya Sarekat Kalimantan dengan Ketua Pedoman Besarnya H.M. Arif.⁹⁹ Perubahan nama menjadi Sarekat Kalimantan antara lain dalam rangka memenuhi syarat untuk menjadi anggota Indonesia Muda yang dibentuk setelah Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928.

Susunan pengurus Sarekat Kalimantan terdiri dari M. Ruslan (Ketua), A. Gani (Wakil Ketua), A. Sunhaji (Penulis I), Sabran (Penulis II), Tambi (Bendahara I), Matran (Bendahara II), dan H. Basirun, Sabran B, Muhiddin serta Imbran (Pembantu-pembantu) dengan Ketua Pedoman Besarnya adalah H.M. Arif. Dalam anggaran dasarnya disebutkan, Sarekat Kalimantan bertujuan ke arah keekonomian dan kesosialan.¹⁰⁰

Tidak lama setelah terbentuknya cabang-cabang Sarekat Kalimantan di daerah lainnya di Kalimantan, maka Sarekat Kalimantan melangsungkan kongresnya yang pertama pada tahun 1930 di Bakumpai (Marabahan). Kongres ini dilaksanakan di Rumah Bulat selama tiga hari diantaranya diikuti oleh perwakilan Sarekat Kalimantan cabang Barabai, Amuntai, Kandangan dan Banjarmasin. Berita kegiatan kongres dikirim Mawardi anggota Sarekat Kalimantan Marabahan ke surat kabar Bintang Borneo yang terbit di Banjarmasin.

Sejalan dengan perkembangan pergerakan kebangsaan yang terjadi, Sarekat Kalimantan kemudian melakukan kongresnya yang kedua pada tahun 1931 berlangsung di markas Sarikat Kalimantan cabang Barabai. Kongres II melahirkan suatu tekad bulat untuk menjadikan Sarekat Kalimantan berasaskan kebangsaan dengan merubah nama organisasi menjadi Barisan Indonesia (BINDO) dengan ketuanya H.M. Arif. Kata "Indonesia" di sini menunjukkan adanya sifat kenasionalan, meski perbuatan-perbuatan nyata tidak banyak.

Dalam tahun 1932 Kongres BINDO ke-3 yang direncanakan berlangsung di Banjarmasin mengalami kegagalan, karena organisasi ini dituduh sebagai *onderbouw* Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Pendidikan) lantaran ada sebagian anggotanya juga anggota PNI Pendidikan. Dalam

⁹⁶ Kepastian tanggal dan tahun dibentuknya PPM ini dapat dilihat dalam foto yang memuat tulisan "*Leesgezelschap Persatoean Pemoeda Marabahan PPM 1 Maret 1929*" dan foto satu tahun berdirinya sebagaimana ditulis pemilik foto sekaligus pelaku sejarah, Mawardi, di dalam figura dengan tulisan "*Een jarig bestaan PPM Persatoean Pemoeda Marabahan 1 Maret 1930*". *Een jarig bestaan* diartikan sebagai satu tahun berdirinya..

⁹⁷ Soepardi, *op.cit.*, hal. 5 dan hasil wawancara dengan Mawardi, Marabahan.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Mawardi, Marabahan.

⁹⁹ Amir Hasan Kiai Bondan, *op.cit.*, hal. 85.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Mawardi, Marabahan.

perkembangan selanjutnya, organisasi mengalami kemunduran sebagai dampak dari adanya pengawasan ketat pemerintah Hindia Belanda.¹⁰¹

Persatuan Putra Borneo dibentuk pada tahun 1929 di Banjarmasin dengan promotornya Abdul Kadir. Lahirnya Persatuan Putra Borneo mendapat respons yang positif dari rakyat terutama golongan terpelajar karena tujuannya di bidang ekonomi dan sosial yang didasarkan kepada kebangsaan Indonesia. Persatuan Putra Borneo sebenarnya telah berdiri lama di Surabaya di bawah pimpinan Abdul Kadir. Maksud promotornya dengan membentuk Persatuan Putra Borneo di Banjarmasin agar dapat melakukan kontak langsung dengan Persatuan Putra Borneo di Surabaya.¹⁰²

Selain organisasi lokal yang disebut di atas, juga dapat disebutkan organisasi-organisasi lainnya yang berperan di daerah yakni *Musyawaratutthalibin* dan *Persatuan Perguruan Islam*. Kedua organisasi tersebut bersifat moderat yang lahir ketika muncul perselisihan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Perkumpulan-perkumpulan yang timbul mulanya memang bersifat lokal, berasaskan kesosialan dan kultural serta usianya tidak lama, namun cara-cara modern yang dipakai oleh organisasi tersebut kemudian ditiru dan dikembangkan oleh perkumpulan-perkumpulan yang lahir kemudian.

c. Organisasi Pergerakan Regional dan Nasional

1) Sarekat Islam

Untuk waktu-waktu selanjutnya setelah bubarnya atau bersamaan dengan saat merosotnya perkumpulan-perkumpulan kepemudaan yang bersifat lokal dan regional, maka timbullah pergerakan dengan corak baru dalam semangat dan cita-cita yang akan dicapai yaitu perkumpulan yang lahir sebagai cabang dari induknya di Pulau Jawa. Organisasi dimaksud diantaranya adalah Sarekat Islam disingkat SI,¹⁰³ berdiri di Banjarmasin pada tahun 1912 oleh H.M. Arif seorang pedagang kelahiran Marabahan yang pulang pergi Banjarmasin – Surabaya.¹⁰⁴ Ketika berada di Surabaya, H.M. Arif turut aktif dalam pergerakan dengan menjabat sebagai Komisaris SI di Surabaya. Atas saran ketua SI H.O.S Cokroaminoto aktivitas pergerakannya pindah ke Banjarmasin sebagai Komisaris SI untuk daerah Kalimantan Selatan. Bersama-sama rekan-rekannya seperti Sosrokardono, maka berdirilah SI di Banjarmasin dan beberapa kota di Kalimantan Selatan.

Selain faktor kedekatan dalam aspek geografi dan ekonomi dengan Pulau Jawa, maka aspek agama juga sangat mendukung berkembangnya SI di Kalimantan Selatan. Mayoritas dari penduduk Kalimantan Selatan adalah penganut Agama Islam yang sangat tertarik oleh cita-cita dan perjuangan SI. Sebagaimana ditinjau dari anggaran dasarnya yakni mengembangkan jiwa berdagang; memberi bantuan kepada anggota-anggota yang menderita kesukaran; memajukan pengajaran dan semua yang mempercepat derajat bumiputera; menentang pendapat-pendapat yang keliru tentang agama Islam, maka aktivitas SI benar-benar mampu mengambil hati rakyat banyak yang beragama Islam, mulai dari golongan tani, buruh, pedagang, sampai kepada golongan intelektual dengan berbagai motif atau kepentingan.

Meski SI telah didirikan, tidak mudah bagi pegurusnya untuk merealisasikan program kerjanya. Karena pengakuan berbadan hukum (*rechtspersoon*) oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai SI lokal baru diberikan pada tanggal 30 september 1914 melalui Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 33 kepada SI cabang Banjarmasin. Sejak itu, mulailah Sarekat Islam dapat bergerak lebih leluasa dalam mengambil langkah-langkah perjuangan di bidang perekonomian, sosial dan pendidikan dan keagamaan.¹⁰⁵

Berbeda dengan perjuangan di bidang sosial, pendidikan dan keagamaan yang relatif berhasil, maka perjuangan SI di bidang perekonomian di awal-awal pergerakannya kurang

¹⁰¹ Soepardi, *op.cit.*, hal.6.

¹⁰² Amir Hasan Kiai Bondan, *op.cit.*, hal.85.

¹⁰³ Pada mulanya bernama SDI yang didirikan H. Samanhudi di Solo tahun 1911 yang berdasarkan akte notaris tanggal 10 September 1912 berubah menjadi SI.

¹⁰⁴ Sjamsuddin, *op.cit.*, hal. 22.

¹⁰⁵ Sjamsuddin, *ibid.*, hal. 25.

menunjukkan hasil yang berarti. Setelah didirikan pada tahun 1912 SI telah mendirikan Sarekat Dagang dan Sarekat Pelayaran sebagai upaya untuk memperlancar transportasi antara sungai yang merupakan jalur perdagangan penting di Kalimantan Selatan, namun agaknya usaha-usaha itu tidak mampu melawan monopoli perdagangan yang telah lama dikuasai orang-orang Cina yang telah lama mendapat perlakuan istimewa yang diterimanya dari pemerintah, disamping eksploitasi pemerintah kolonial sendiri di bidang ekonomi.

Kegagalan SI di bidang ekonomi membawa pengaruh buruk terhadap organisasi, dimana pengurusnya tidak lagi mempunyai kekompakan kerja dan dengan sendirinya inisiatif organisasi sangat menurun, sehingga tahun 1920 organisasi SI Banjarmasin beku tanpa kegiatan.

Kedatangan HOS Cokroaminoto ke Banjarmasin tahun 1919 kemungkinan sekali erat hubungannya dengan kemunduran SI di daerah ini. Dimana setelah itu, pengurus Centraal Sarekat Islam (CSI) mengirim seorang propagandis muda yang terpelajar, cakap, berani dan dinamis bernama Maraja Sayuthi Lubis. Dalam melaksanakan tugasnya di daerah ini, Sayuthi Lubis telah memahami bahwa satu-satunya kemungkinan untuk menyelamatkan SI dari kehancuran adalah dengan melakukan reorganisasi diantaranya mengganti pengurus lama dengan pengurus baru. Maka dibantu oleh Anjung M. Horman –kelahiran Marabahan--- Maraja Sayuthi Lubis pada tahun 1922 berhasil menyusun pengurus baru SI Banjarmasin sebagai berikut :

1. Presiden	: Mohammad Horman, bekas Jaksa
2. Wakil Presiden	: H. Abdul Karim Corong, Tukang Mas
3. Sekretaris I	: M. Zamzam, bekas Guru HIS
4. Sekretaris II	: M.Pasi, Guru Sekolah Islam
5. Bendahara	: H. Abdul Gani, Pedagang
6. Pembantu-pembantu	: a. M. Nunci, Pedagang b. H.M. Arif, Pedagang kemudian menjadi Petani bekas Presiden SI pertama. c. H. Jailani, Pedagang d. M. Thaib, bekas Manteri Cacar.
7. Penasehat	: a. Maraja Sayuthi Lubis, Wartawan “Harian Warta Deli” b. H.Akhmad Dasuki, Guru Agama Madrasah Wathoniah.

Sebagai bagian dari reorganisasi, maka dibentuklah beberapa departemen seperti Departemen Perburuhan, Pertanian, Urusan Nelayan, dan sebagainya. SI juga menerbitkan surat kabar dengan nama “Keadaan Zaman” yang dicetak sendiri maupun “Borneo Bergerak” yang dicetak di Surabaya. Pada tahun 1923 SI mendirikan organisasi kewanitaan dengan nama “ SI Dunia Isteri” dengan ketuanya Siti Masinah.

Untuk menghimpun potensi SI lokal dan organisasi-organisasi di luar SI lainnya maka pada tahun 1923 dan 1924 dilaksanakan *Nationaal Borneo Congres I dan II* yang diikuti oleh semua wakil-wakil SI Lokal yang ada di Karesidenan Afdeling Selatan dan Timur Borneo serta wakil-wakil perserikatan Dayak, karena saat itu hanya ada dua golongan pergerakan yang dianggap mewakili rakyat Borneo. Meski pemimpin terkemuka SI dari Jawa yaitu H.O.S Cokroaminoto dan H. Agus Salim dilarang Belanda hadir, namun kongres ini berhasil menyusun mosi berisikan segala macam keberatan-keberatan dan permohonan rakyat Borneo kepada Pemerintah Hindia Belanda dalam bidang-bidang politik, ekonomi, pajak, rodi, pendidikan dan sebagainya.

Pemakaian kata “nasional” dalam *Nationaal Borneo Congres* merupakan cerminan dari upaya dari pemimpin-pemimpin SI di Kalimantan untuk menyebarkan dan menegakkan cita-cita sebagai satu bangsa, dan cita-cita itu juga dimanifestasikan melalui keikutsertaan cabang-cabang SI Islam di Kalimantan Selatan dalam *Nationaal Indische Congres (NIC)*. Sejak kongres NIC yang pertama tahun 1916 SI telah mengemukakan perasaan kebangsaan *Indische* yang mengikat seluruh suku bangsa yang ada di kepulauan Hindia (Indonesia).

Setelah reorganisasi, SI dapat bergerak lebih dinamis dalam berjuang di berbagai bidang, seperti bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan agama Islam. Di bidang sosial, SI tetap melanjutkan kegiatan gotong royong dengan membentuk sinoman kematian, sinoman perkawinan, sinoman

perayaan dan sebagainya, memberi bantuan kepada anggotanya yang ditimpa kemalangan dan membantu fakir miskin, merehabilitasi masjid-masjid dan langgar, mendirikan sekolah-sekolah Islam. SI juga menuntut perlakuan yang sama sebagaimana diberikan Pemerintah Hindia Belanda terhadap golongan Eropa, Timur Asing. Tuntutan itu antara lain meliputi :

a. Menuntut pemerintah supaya tidak membedakan dalam memperbaiki jalanan maupun jembatan antara kampung Eropa dengan kampung Bumiputera, sebab selama ini yang mendapat perbaikan hanyalah jalanan kampung-kampung Eropa saja;

b. Menuntut pemerintah supaya memberikan perlakuan yang sama terhadap macam hukuman atau status ter hukum dari penganjur-penganjur pergerakan rakyat, dengan macam hukuman dan status ter hukum yang dikenakan kepada kaum bangsawan atau kepada bangsa-bangsa Eropa lainnya;

c. Menuntut pemerintah supaya guru-guru agama, guru-guru sekolah islam, khatib , bilal dan kaum dibebaskan dari kewajiban menjalankan *Ordonnantie Heerendienst* yang menyangkut erakan atau kerja rodi, seperti kebebasan yang diberikan kepada guru-guru agama Kristen, Penyebar Injil, dan Kepala Jemaat, dan Guru-guru Sekolah Zending.¹⁰⁶

Antara tahun 1922 sampai 1930 usaha SI di bidang ekonomi semakin meningkat dan diperluas bukan hanya untuk kepentingan anggota tetapi juga untuk kepentingan seluruh rakyat yang banyak menanggung beban penjajahan. Ini erat kaitannya dengan cita-cita nasionalisme sebagai nama dan keputusan Nasional Borneo Kongres. Usaha SI terlihat dalam upayanya memperbaiki ekonomi rakyat dengan melawan adanya "*economische uitbuiting*" (pengurasan ekonomi) antara lain dalam bentuk pungutan pajak yang besarnya tidak sebanding dengan penghasilan rakyat. Taksiran pajak dikenakan berlapis-lapis dan dipungut antara lain oleh Gemeenteraad Bandjermasin, oleh Desaraad di bagian Afdeling Hulu Sungai serta pajak-pajak yang dipungut oleh Kas Negeri di Pasar. Dalam urusan "*economische uitbuiting*" itu, tuntutan SI berkaitan dengan perubahan sistem pajak, sebagai berikut:

a. *Inkomstenbelasting* (pajak penghasilan): dalam hal ini SI meminta kepada pemerintah untuk menghapuskan atau meringankan pungutan 30% Opcenten yang terasa berat bagi rakyat, juga terhadap 10% Opcenten Gemeenteraad. Selain itu juga memperjuangkannya adanya "*Lid Commissie Aanslag*" yang dipilih dari orang-orang kampung yang lebih mengetahui perikehidupan di kampung, sehingga besarnya pajak dapat ditentukan sesuai dengan kemampuan rakyat.

d. *Bea Invoerrecht* (bea impor) dan *Slachtbelasting* (pajak jagal/penyembelihan): SI mengharapkan kepada pemerintah agar *Bea Invoerrecht* 8 % dari tanaman rotan dihapuskan karena tanaman ini sudah dikenakan pajak pendapatan. SI juga menuntut dikembalikannya uang *slachtbelasting* yang telah dipungut pemerintah secara tidak sah. Permohonan ini terutama datang dari Tanah Dayak dan Kuala Kapuas.

e. *Landrente* : untuk hal ini SI memperjuangkan agar ladang-ladang yang memberi hasil saja yang dipungut pajaknya, sedang ladang yang rusak atau tidak memberi hasil tidak usah dipungut.

f. Pungutan uang yang dibawa pergi haji. SI menyampaikan aspirasi rakyat Hulu Sungai yang menentang adanya pungutan sebesar 2% dari uang yang dibawa pergi haji. Pungutan itu dianggap tidak syah, sebab tidak jelas digolongkan ke dalam pajak apa.¹⁰⁷

Selain itu, SI Marabahan melalui kongres mengharapkan bantuan pemerintah untuk ikut serta memajukan pertanian rakyat, selain itu rakyat Muara Teweh dan Dusun Tengah merasa keberatan dengan dibukanya tambang batu bara di daerah itu oleh perusahaan asing, karena dikuatirkan mematikan usaha pertambangan rakyat, disamping pembukaan tambang tersebut akan merusak tanaman rakyat.

Dalam bidang pendidikan sikap SI Islam jelas sekali yakni memajukan pengajaran untuk meningkatkan derajat bumi putera. Selain mendirikan sekolah agama, SI juga mendirikan sekolah swasta yakni *Particuliere Hollands Inlandse School* (PHIS) atau HIS Swasta diantaranya di Pasar Lama Banjarmasin dan di Marabahan yang kemudian berkembang menjadi Perguruan Taman

¹⁰⁶ Sjamsuddin, *ibid.*, hal 67.

¹⁰⁷ Sjamsuddin, *ibid.*, hal. 63-64.

Siswa. SI juga memperjuangkan kepada pemerintah agar mendirikan sekolah-sekolah bagi anak perempuan dan kepada sekolah-sekolah Islam agar diberikan subsidi.

Keberhasilan perjuangan SI di berbagai bidang menjadikan SI ditambah oleh faktor bahwa SI adalah organisasi berdasarkan agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Kalimantan Selatan, maka organisasi ini dapat dengan mudah mendapatkan dukungan masyarakat dan tempat berpijak. Melalui ulama dan guru-guru agama yang merupakan pemimpin informal dan memahami suasana kebatinan masyarakat saat itu, tidaklah sulit untuk menarik massa untuk berpartisipasi dalam perjuangan SI.

Itulah sebabnya, maka SI seperti halnya di Jawa juga tumbuh pesat di Kalimantan Selatan, sehingga sampai 1930 SI telah memiliki cabang-cabang hampir di seluruh kota di Kalimantan Selatan, antara lain Martapura, Pleihari, Kotabaru, Kandangan, Rantau, Margasari, Negara, Amuntai, Marabahan, dan Barabai. Dibeberapa kota yang ada cabang SI-nya terdapat gedung yang biasanya juga digunakan untuk sekolah atau madrasah yang diorganisir oleh Sarekat Islam. Masyarakat menyebutnya "kalap" (*club*) yang menunjukkan besarnya dukungan rakyat pada masa itu.¹⁰⁸

Sebagai organisasi massa yang berinduk di Jawa, berbagai perubahan yang terjadi pada SI pusat sedikit banyak turut mempengaruhi Sarekat Islam di Kalimantan Selatan. Namun ketika terjadi pergulatan antara pendukung paham Islam dan pendukung paham Marx sebagai alternatif dalam perjuangan, ternyata golongan kiri yang dipengaruhi sosialis/marxisme (SI Merah) yang dimotori Sarekat Rakyat tidak memperolehnya di Kalimantan Selatan.

Meskipun dari anggaran dasarnya SI tidak berisikan politik, tetapi dari seluruh aksi perkumpulan itu dapat dilihat bahwa SI selalu dengan gigih berjuang menegakkan kebenaran, keadilan melawan penindasan dan segala macam diskriminasi dari pihak-pihak *ambtenar-ambtenar* bumi putera dan Eropa. Apalagi dasar, tujuan dan ide-ide yang dibawa SI Islam sesuai dengan keyakinan dan hati nurani rakyat yang dijajah. Semboyan mereka "berani karena benar, takut karena salah" selalu didengung-dengungkan oleh para anggotanya.¹⁰⁹

Melihat kegiatan-kegiatan dan besarnya pengaruh SI di kalangan masyarakat menyebabkan Pemerintah Hindia Belanda menaruh kecurigaan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan SI. Selain melarang kehadiran HOS. Cokroaminoto dan H. Agus Salim dalam *Nationaal Borneo Congres* juga melakukan penangkapan terhadap Haji Hasan Basuni seorang eksponen penting dari SI cabang Amuntai karena didakwa melakukan aksi-aksi politik, sehingga terpaksa meringkuk delapan setengah bulan dalam penjara Amuntai. Kejadian semacam ini yang juga dialami oleh SI cabang lainnya di Kalimantan Selatan, menyebabkan kegiatan SI mengalami kemunduran.

Selain itu, kemunduran SI di bidang politik lebih disebabkan oleh ketidakmampuannya bersaing dengan organisasi-organisasi yang baru muncul yang secara progresif dan tegas memperjuangkan cita-cita politiknya. Diantaranya sebagai akibat dari pengaruh masuk dan berkembangnya organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kalimantan Selatan yang turut berkiprah dalam bidang politik, disamping banyaknya anggota-anggota SI yang merangkap jabatan dengan organisasi lain bahkan keluar dari keanggotaan SI dan menjadi pendukung organisasi-organisasi muda yang lebih maju.¹¹⁰

2) Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah sebuah gerakan pembaharuan Islam dan gerakan pembaharuan kalangan nasionalis di Indonesia. Sebagai gerakan pembaharuan, Muhammadiyah mencerminkan sebuah hasrat untuk mengikuti jejak kemajuan Eropa dalam bentuk ekspresi yang sesuai dengan aspirasi mereka sendiri.¹¹¹ Muhammadiyah pertamakali didirikan di Jogjakarta pada 18 November 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan (1868-1923). Dari segi bahasa Muhammadiyah berarti ummat pengikut Nabi Muhammad, nabi pembawa risalah terakhir. Tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat yang

¹⁰⁸ Depdikbud, *op.cit.*, hal.70.

¹⁰⁹ Amir Hasan Kiai Bondan, *op.cit.*, hal. 83.

¹¹⁰ M. Idwar Saleh *et al*, *op.cit.*, hal. 42.

¹¹¹ Cyril Blasse, *Ensiklopedi Islam Ringkas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 284.

sebenarnya.¹¹² Dinamakan Muhammadiyah “agar anggota-anggotanya merasa bangga dengan agamanya dan tidak perlu merasa malu sebagai orang Islam yang taat dengan tuntunan Nabinya.”¹¹³

Susunan organisasi ini terdiri dari Pimpinan Pusat, Wilayah, Cabang dan Ranting. Kegiatannya meliputi 11 bidang, masing-masing berupa sebuah majelis yakni Majelis Tarjih, Majelis Hikmah, Majelis Aisyiyah, Majelis Hizbul Wathan, Majelis Pengajaran, Majelis Taman Pustaka, Majelis Tabligh, Majelis PKU (Pembina Kesejahteraan Ummat), Majelis Pemuda, Majelis Ekonomi dan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan.¹¹⁴

Sebagai organisasi pembaharuan Islam, Muhammadiyah lebih condong kepada faham pembaharuan yang dibawa Syekh Muhammad Abduh maupun Sayid Jamaluddin al Aghani yang saat itu berkembang luas di Mesir. Gerakan pembaharuan yang dikibarkan kedua tokoh ini, diilhami oleh pandangan pembaharuan sebelumnya yakni pemikiran Ibnu Taymiah (1263-1328) dan Faham Wahabbi yang dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1787)

Ide Ibnu Taimiyah kembali kepada Al Quran dan Sunnah diterima dan dipraktikkan Muhammad bin Abdul Wahhab secara keras dengan titik berat pada pemurnian akidah dan mulai disebarluaskan pada tahun 1760. Pengikut faham ini dikenal dengan nama golongan Muwahiddin atau pendukung tauhid. Namun nama yang lebih terkenal kemudian berasal dari penentangannya dan bersifat ejekan, yaitu Kaum Wahabbi.

Diilhami oleh Wahabbisme, Syekh Muhammad Abduh menyusun pemikiran yang lebih luas, yakni selain kembali menghidupkan roh dan semangat kemurnian beragama juga mengumandangkan pula persatuan Islam (Pan Islamisme) untuk menghadapi imperialisme. Pola pemikiran yang dikemukakan antara lain: untuk menghadapi penetrasi Barat ini umat Islam harus dibangkitkan kekuatannya. Kekuatan akan terwujud apabila umat Islam kembali kepada pokok-pokok ajaran Islam yang murni yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad dan ulama-ulama Salaf.¹¹⁵

Salah seorang pengikut dan murid Abduh yang kelak pergi ke Indonesia adalah Ahmad Surkati yang mendirikan *Al Irsjad* pada tahun 1914 di Jakarta. Ahmad Surkati inilah pula yang banyak memberikan inspirasi kepada H. Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah.

Dimana pertama kali Muhammadiyah tumbuh di Kalimantan Selatan belum dapat diketahui dengan jelas. Bila bertolak dari masuknya paham pembaharuan, maka proses ini telah berkembang sejak 1914 di Banjarmasin dengan didirikannya sekolah bernama *Arabische School* sebagai tempat penanaman faham pembaharuan oleh perkumpulan orang-orang Arab yang dipelopori oleh Muhammad bin Thalib, Syekh Ali Baraisy dan Umar bin Seff, berlokasi di Kampung Bugis.¹¹⁶

Sekolah ini merupakan sekolah yang pertama kali menggunakan bangku-bangku belajar dengan lama belajar 6 tahun. Para guru terdiri dari orang-orang Arab yang didatangkan dari Mesir dipimpin oleh Syekh Iberahim Al Mulla, seorang murid dan pengikut Muhammad Abduh. Lambat laun guru-guru sekolah itu, digantikan oleh guru-guru yang merupakan alumni sekolah itu sendiri. Guru-guru yang pernah mengajar pada sekolah tersebut antara lain seperti Sayid Ahmad Al Habsyi, Sayid Idrus Al Masykur, H. Ahmad Amin, Saleh Bal’ala, Abdullah Thaib, Maraja Sayuti Lubis, Zamzam Aidit, Awadh Yamani, Khudri Thaib dan Mamur Idris.¹¹⁷

Melalui Arabische School inilah gerakan pembaharuan pemikiran Islam, yang dimulai dengan faham Abduh, masuk ke daerah ini. Masyarakat luas mulai mengenal faham ini, setelah ia tidak berdiri pada saat pembacaan “asrakal” dalam perayaan Maulid Nabi.

Sesudah Iberahim Al Mulla kembali ke Mesir, pimpinan sekolah ini dipegang berganti-ganti oleh : Syekh Mahmud dari Madinah, K.H. Muhammad Yasin, K.H. Ahmad Amin dan Saleh Bal’ala. Pada waktu Saleh Bal’ala inilah nama Arabische School diganti namanya menjadi *Islamsche School*. Peranan sekolah ini sebagai peletak pertama pembaharuan Islam di daerah ini, karena alumninya

¹¹² *Ensiklopedi Indonesia*, 4 Kom- Ozo, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1983, hal.2306.

¹¹³ M. Syahrhan, *op.cit.*, hal. 2 dan Syarkawi Ruslan, “Perkembangan Reformisme Islam di Kalimantan Selatan serta Pengaruhnya Dalam Lapangan Agama, Sosial dan Pendidikan Dari Tahun 1914-1942”, Skripsi Sarjana Muda Jurusan Sejarah FKg Unlam, Banjarmasin, 1975, hal. 46.

¹¹⁴ *Ensiklopedi Indonesia*, *op.cit.* hal. 2306.

¹¹⁵ M. Syarkawi Ruslan, *op.cit.*, hal 20-27.

¹¹⁶ Syarkawi Ruslan, *ibid.*, hal. 65 dan M. Syahrhan, *op.cit.*, hal. 11.

¹¹⁷ M. Syahrhan, *ibid.*, hal. 11.

kemudian menjadi ulama dan pemimpin Muhammadiyah. Atau kalau tidak menjadi anggota Muhammadiyah, sekurang-kurangnya menjadi ulama yang berpikiran maju, diantaranya Makmur Ideris, Muzennah Assegaf, Zamzam Aidid, Zamzam Jakfar dan H.M. Hanafie Gobet.¹¹⁸

Sesudah *Islamsche School*, pada tahun 1916 didirikan lagi *Al Madrasatul Arabiah al Walaniah* di Seberang Masjid, dan *Diniyah School* di Sungai Kindaung pada tahun 1921. Sekolah-sekolah ini merupakan tempat persemaian pembaharuan Islam dan kebanyakan lulusannya menjadi simpatisan atau langsung menjadi anggota organisasi Muhammadiyah.¹¹⁹

Pada tahun 1921 tiba di Banjarmasin Syekh Ahmad Surkati bersama-sama dengan utusan Kerajaan Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Al Aticy. Mereka menjadi pendorong pengikut pembaharuan di Banjarmasin seperti Muhammad bin Thalib, H. Ahmad Amin (Alumni Al Irsyad), H. Masykur, dan Yasin Amin. Bahkan H. Ahmad Amin dan H. Masykur akhirnya mendaftarkan diri menjadi anggota Muhammadiyah ke Pusat Pimpinan di Jogjakarta.

Pendorong pembaharuan di Banjarmasin bertambah ketika Maraja Sayuthi Lubis, utusan Centraal Sarekat Islam (CSI) datang ke Banjarmasin pada tahun 1921 yang dengan semangat dan keberaniannya terang-terangan menyatakan dirinya sebagai pengikut faham Abduh. Akibatnya jumlah tokoh pembaharuan semakin besar diantaranya H. Abdul Karim Corong, bahkan Mohammad Horman, Presiden SI cenderung kepada faham pembaharuan ini.

Meskipun faham Muhammadiyah telah masuk ke Banjarmasin sekitar tahun 1920, namun untuk tegaknya organisasi Muhammadiyah di kota ini perlu waktu beberapa tahun lagi. Memang disamping kemampuan pemimpin-pemimpinnya, juga diperlukan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jogjakarta. Akibat kondisi masyarakatnya dan kurangnya kemampuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Muhammadiyah lebih dahulu berdiri di Alabio dan Kuala Kapuas daripada Banjarmasin.

Untuk daerah Martapura ajaran pembaharuan ini disampaikan oleh H. Muhammad Yusuf. Beliau sewaktu belajar di Mekkah tinggal di Jabal Qubis, sehingga masyarakat menyebutnya Ustadz Haji Yusuf Jabal. Fatwa-fatwanya seirama dengan faham-faham pembaharuan yang kemudian selaras dengan Muhammadiyah. Haji Yusuf Jabal tidak mendirikan organisasi apa-apa, kecuali ajaran pembaharuan ini mungkin didapatkannya dari hasil penelaahan kitab-kitab yang beliau miliki yang berasal dari tokoh pembaharu seperti Ibnu Taimiyah.¹²⁰

Muhammadiyah kemudian dapat berdiri pada tahun 1932 di Martapura berkat peranan H.M. Hasan Corong, seorang *Ajunct Jaks*a bersama dengan dua orang tokoh Arab, Abdullah bin Shif dan Ali Mubarak.¹²¹ Berdirinya Muhammadiyah cabang Martapura ini menimbulkan reaksi yang hebat dari masyarakat Martapura sebagai dampak dari pemahaman yang keliru tentang faham Wahabbi yang mereka pandang sebagai pegangan Muhammadiyah.

Di Alabio, organisasi Muhammadiyah berdiri berkat peranan seorang pedagang bernama Haji Usman Amin yang ketika berada di Surabaya dan Yogyakarta sangat terkesan dengan perkembangan Muhammadiyah. Ketika pulang ke Alabio, ia kemudian mengusulkan kepada Haji Jaferi, seorang tokoh ulama yang berpandangan maju dan berpengaruh di Alabio untuk mendirikan Muhammadiyah. Usulan Haji Usman Amin diterima baik, dan tidak lama setelah Haji Jaferi datang berkunjung ke Jogjakarta untuk keperluan memasukkan anaknya ke *HIS met de Qur'an* dan menyatakan diri sebagai anggota Muhammadiyah di sana, maka tahun 1925 didirikanlah cabang Muhammadiyah Alabio sebagai ketuanya Haji Jaferi, dibantu anggota pengurus lainnya seperti Haji Hanafiah, Haji Basthami, Haji Mansur, Haji Saman, Haji Asmail dan Haji Birhasani.¹²² Mereka mendirikan sekolah Muhammadiyah di Teluk Betung pada tahun 1926 dengan mendatangkan gurunya Ridwan Hajir beserta isteri dari Jogjakarta dan As'ad al Kalali seorang ulama keturunan Arab dari Aceh.

Tahun 1929 Muhammadiyah Alabio mengadakan Konperensi I yang dihadiri Pimpinan Pusat Muhammadiyah: A.R. Sutan Mansyur. Selesai konperensi beliau juga mengunjungi

¹¹⁸ Syarkawi Ruslan, *op.cit.*, hal.67.

¹¹⁹ M. Syahrhan, *op.cit.*, hal. 12.

¹²⁰ M. Idwar Saleh *et al*, *op.cit.*, hal. 43.

¹²¹ Syarkawi Ruslan, *op.cit.*, hal 84.

¹²² Syarkawi Ruslan, *ibid.*, hal. 92. Jika dalam Syarkawi Ruslan tahun kelahiran Muhammadiyah Cabang Alabio adalah 1925, maka M. Syahrhan menyebutnya tahun 1927, lihat M. Syahrhan, *op.cit.*, hal. 18.

Muhammadiyah Kuala Kapuas dan Banjarmasin. Kepribadian A.R. Sutan Mansyur, sikap dan kemantapan ilmu serta cara berbicara yang menggugah hati, sangat memikat para ulama dan orang-orang Muhammadiyah, sehingga dengan kedatangan beliau menyebabkan semakin mengakarnya faham Muhammadiyah di tempat-tempat yang beliau kunjungi.

Seperti halnya di daerah-daerah lain, berdirinya Muhammadiyah di Alabio tentulah menggemparkan masyarakat di Hulu Sungai. Tuduhan Wahabbi bahkan tuduhan faham yang sesat mulai dilontarkan orang. Rasa kebencian itu semua karena salah pengertian belaka. Banyak penderitaan yang dialami oleh pelopor dan anggota Muhammadiyah, karena memasuki organisasi ini merupakan pengorbanan yang besar sekali pada waktu itu, karena bisa saja bercerai dengan isteri, berpisah sanak keluarga dan malah berpisah dengan masyarakat kampung.¹²⁰

Meski secara organisatoris telah berdiri, pengurus pusat Muhammadiyah tidak begitu saja dengan mudahnya mengakui cabangnya yang baru berdiri, kecuali ada amal usaha nyata. Maka berdasarkan surat ketetapan, Muhammadiyah cabang Alabio baru mendapat pengakuan dari pengurus besar berdasarkan Surat Ketetapan Nomor 253 tanggal 5 Maret 1930. Sedangkan Muhammadiyah cabang Kuala Kapuas meski berdiri setelah Alabio, ternyata mendapat surat penetapan lebih dahulu yakni Surat Ketetapan No.128 bertanggal 1 Juli 1928. Dan Surat Ketetapan Muhammadiyah Banjarmasin Nomor 254 tertanggal 5 Maret 1930¹²³ Bermula dari Alabio inilah kemudian Muhammadiyah menyebar ke daerah-daerah lain di Kalimantan Selatan, seperti Sungai Tabukan, Jarang Kuantan, Hambuku Hulu, Kelua, Haruyan, Kandangan, Rantau dan Barabai.¹²⁴

Seperti halnya SI, Muhammadiyah adalah organisasi yang berdasarkan Islam, hanya saja tujuan terpenting dari Muhammadiyah ialah memurnikan paham-paham agama Islam yang dianggapnya telah banyak menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW dengan semboyan yang terkenal "kembali kepada Quran dan Hadits". Karena tujuan memurnikan itulah yang menyebabkan Muhammadiyah pada mulanya mendapat tantangan hebat di kalangan penduduk, meski kemudian akhirnya mendapatkan posisi penting di daerah ini karena kesungguhan para penganjurnya terutama berkat peranan eksponen intelektual muda Muhammadiyah yang dengan metode-metode dakwah tertentu telah berhasil menarik masyarakat Islam di kampung-kampung untuk menjadi pengikutnya.

Satu hal yang cukup menggembirakan bagi Muhammadiyah ialah mereka diperbolehkan melebarkan sayapnya ke segenap daerah karena pihak pemerintah Hindia Belanda menganggap organisasi ini non politik dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban pemerintahan.

Berkat prestasi yang dicapai Muhammadiyah di daerah ini, maka berdasarkan keputusan Kongres ke-23 di Jogjakarta tanggal 19-25 Juli 1934 menetapkan Kongres ke -24 bertempat di Banjarmasin. Kongres Muhammadiyah ke-24 di Banjarmasin yang berlangsung dari tanggal 15 s.d. 22 Juli 1935 dihadiri oleh sekitar 400 orang peserta, dari seluruh perwakilan Muhammadiyah dan Aisyiyah. Hasil penting dari kongres ini terutama terutama ditujukan kepada tuntutan cara memperbaiki perkawinan yakni menganjurkan agar merendahkan mas kawin, menyederhanakan walimah perkawinan, dan supaya mendirikan Badan Penolong Perbaikan di setiap cabang dan ranting. Kongres juga memutuskan perlunya perbaikan perjalanan haji, dengan mempropagandakan membeli atau menyewa kapal buat naik haji, sehingga tidak terus tergantung kepada maskapai Eropa yang tarif ongkosnya sangat tinggi.¹²⁵

Kehadiran organisasi Muhammadiyah memberikan pengaruh dalam lapangan pendidikan, keagamaan, maupun sosial. Selain dalam lapangan pendidikan sebagaimana telah dijelaskan dimuka, maka dalam lapangan keagamaan, sumbangan yang positif yang diberikan Muhammadiyah di Kalimantan Selatan adalah gerakan pemurnian ajaran Islam dari takhyul, bid'ah dan khurafat dalam segala bentuk baik menyangkut aqidah maupun syariah. Muhammadiyah melakukan penelitian terhadap soal-soal ibadah. Segala amal perbuatan yang dipandang ibadah oleh masyarakat diteliti dan dicari sumber hukum dan dasarnya, mengingat pada saat itu dalam

¹²⁰ M. Syahrani, *ibid.*, hal. 28.

¹²³ M. Syahrani, *ibid.*, hal. 17-18.

¹²⁴ Syarkawi Ruslan, *op.cit.*, 94.

¹²⁵ M. Syahrani, *op.cit.*, hal. 33.

masyarakat Islam di daerah ini terdapat beberapa perbuatan yang dianggap ibadah, seperti pembacaan syair maulid, manakib Syekh Abdul Kadir Jailani dan sebagainya. Muhammadiyah juga memelopori khotbah Jumat berbahasa Melayu, menterjemahkan Al Quran, menyalin ayat Al Quran dan Hadits dalam ejaan latin, serta menerbitkan buku-buku pelajaran agama beraksara latin. Selain itu, dilaksanakan pula sembahyang Hari Raya di tanah lapang dan menganjurkan kaum wanitanya untuk ikut ke tanah lapang, dan melaksanakan takbiran sebagai upaya peningkatan syiar Islam.

Dalam lapangan sosial Muhammadiyah sangat menekankan amal-amal saleh, tidak hanya menyangkut kewajiban seperti sholat, puasa dan haji, tetapi juga ibadah sosial seperti mengintensifkan fungsi zakat, pendirian Panti Asuhan Anak Yatim seperti yang didirikan di Alabio pada tanggal 1 Mei 1938 yang diketuai oleh Haji Usman Amin. Lahirnya gerakan Muhammadiyah di bidang sosial, disisi lain juga didorong oleh kegiatan missi dan zending Kristen yang mendirikan rumah sakit dan poliklinik Kristen di tengah orang-orang Islam. Oleh karena itu, pada tahun 1933 hari Jumat dengan dipelopori oleh PKU Muhammadiyah didirikanlah sebuah poliklinik di Banjarmasin dengan pelopornya Saleh Bal'ala dengan dr. Susudoro Jatikusomo sebagai dokternya.¹²⁶ Poliklinik ini meningkatkan pelayanan dengan membuka klinik bersalin (1940) dengan bidan Saufiah sebagai kepalanya.

3) Nahdlatul Ulama

Lahirnya organisasi Nahdlatul Ulama tidak terlepas dari adanya perselisihan antara Kaum Tua dan Kaum Muda yang kaum yang disebut terakhir merupakan kaum pembaharuan pemahaman ajaran Islam yang berhimpun dalam organisasi Muhammadiyah. Perselisihan antara Kaum Muda dengan Kaum Tua diantaranya adalah menyangkut soal tahyul, khurafat dan praktik peribadatan seperti menyangkut masalah ushali, qunut, talkin, hilah, aruah (*ma-aruwah*), azan Jumat dua kali dan sebagainya yang dianggap Muhammadiyah sebagai bi'dah yaitu sesuatu yang menurut hukum Islam tidak berasal dalam ibadah dan merupakan embel-embel tak berdasar Perbedaan pemahaman atau masalah khilafiyah terutama menyangkut *furu* antar umat Islam semakin meluas karena masing-masing didukung oleh dakwah-dakwah kaum muda yang dijawab dengan dakwah pula oleh kaum tua. Situasi ini tidak mendukung ke arah pertumbuhan dan persatuan umat muslim yang kuat, bahkan dimanfaatkan penjajah Belanda sebaik mungkin untuk menggoyahkan kedudukan organisasi-organisasi Islam dan mengokohkan penjajahan.

Untuk mempertahankan kebenaran ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang menurut pendapat sebagian ulama difitnah dalam dakwah oleh Kaum Muda, maka pada tanggal 31 Januari 1926 didirikan Nahdlatul Ulama di Surabaya dengan tujuan memajukan paham aliran tradisional, memelihara hubungan dengan para ulama dan pengikut keempat mazhab, memajukan pendidikan, masjid, dan kegiatan Lailatul Ijtima serta Tahlilan.¹²⁷

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam berhaluan *Ahlu Al Sunnah Wa Al-Jamaah* dengan berpegang teguh pada salah satu dari empat mazhab: Imam Syafie, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibnu Hambali. Secara harfiah Nahdlatul Ulama berarti "kebangunan para ulama". Susunan organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari dua badan: Syuriyyah dan Tanfidziyyah. Susunan organisasi terdiri dari Pengurus Besar, Majelis Konsul Wilayah, Cabang, Majelis Wakil Cabang dan Ranting. Sampai akhir pemerintahan kolonial, Nahdlatul Ulama tidak mencampuri politik.

Di Kalimantan Selatan, Nahdlatul Ulama berdiri di Martapura pada tahun 1927 di prakarsai oleh Haji Abdul Kadir yang kemudian dikenal dengan panggilan Tuan Guru Tuha. Ketika Nahdlatul Ulama berdiri di tahun 1926 di Surabaya, beliau masih belajar pada pesantren di Jombang dan sangat terpengaruh oleh kegiatan *Laitatul Ijtima* dan *Tahlilan*.¹²⁸ Di Martapura, Nahdlatul Ulama masuk melalui sekolah Darussalam Martapura. Masyarakat Martapura yang fanatik agama dan menjunjung kedudukan ulama tradisional segera mengikutinya dan dari sinilah Nahdlatul Ulama berkembang dengan basis utama di daerah-daerah pedesaan.

¹²⁶ M. Syarkawi Ruslan, *op.cit.*, hal.16.

¹²⁷ M. Idwar Saleh *et al*, *op.cit.*, hal.58.

¹²⁸ M. Idwar Saleh *et al*, *ibid.*, hal. 44.

Nahdlatul Ulama dapat berkembang dengan pesat berkat dukungan tokoh-tokoh ulama yang mengajar di sekolah Darussalam Martapura khususnya alumni pesantren-pesantren di Jawa Timur. Mengingat pengaruh ulama yang cukup besar dalam masyarakat, maka dalam waktu yang singkat Nahdlatul Ulama tersebar luas di Martapura, bahkan cabangnya berdiri pada tahun 1931 di Banjarmasin dengan tokoh-tokohnya antara lain Said Ali Alkaf, H. Akhmad Nawawi dan H. Hasyim.¹²⁹

Dalam perkembangannya setelah berdiri Nahdlatul Ulama, maka perbedaan pendapat atau khilafiyah, konflik dan persaingan di kalangan umat Islam bukan hanya antara Kaum Tua dengan Kaum Muda, tetapi juga antara organisasi ikutannya yakni Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah.

Sesuai dengan cita-cita yang diembannya maka Nahdlatul Ulama bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Walaupun bukan suatu organisasi yang berdasarkan politik, namun Nahdlatul Ulama menjalankan politik *non cooperatie* terhadap setiap bantuan maupun ajakan pemerintah Hindia Belanda untuk membangun masjid-masjid dan sekolah-sekolah maupun untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Bahkan melalui melalui sekolah atau madrasah yang diasuh oleh ulama Nahdlatul Ulama ditanamkan rasa cinta tanah air dan kebencian terhadap penjajah Belanda.

4) Musyawaratutthalibin

Terbentuknya Musyawaratutthalibin di Kalimantan Selatan, berkaitan erat dengan organisasi Islam yang mendahuluinya. Sampai tahun 1930-an, organisasi Islam yang mendapat tempat di hati rakyat sehingga mempunyai pengaruh luas di masyarakat adalah Sarekat Islam, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Sarekat Islam di daerah yang berdiri tahun 1912, dengan cepat mendapat dukungan dari masyarakat karena kemampuannya memikat dan menampung aspirasi masyarakat daerah ini. Namun pada sisi lain, organisasi ini memiliki kelemahan-kelemahan, sehingga sejak tahun 1930-an organisasi ini tidak dapat menghindarkan diri dari kemerosotannya. Masa jayanya telah lenyap digantikan oleh masa suram. Satu persatu pendukungnya melepaskan diri dari keanggotaan Sarekat Islam untuk kemudian masuk menjadi anggota partai atau organisasi berbasis Islam lainnya yang baru datang di daerah ini seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Pada mulanya anggota Sarekat Islam merangkap menjadi anggota organisasi lain, sementara Sarekat Islam sendiri tidak berdaya untuk mencegah keanggotaan rangkap atau menegakkan disiplin partai, sehingga banyak anggotanya yang akhirnya meninggalkan organisasi atau menghentikan kegiatannya. Hal ini diperparah lagi dengan sikap Sarekat Islam yang bekerjasama dengan Muhammadiyah dan dipihak lain mendukung Nahdlatul Ulama. Dan ironisnya antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terjadi persaingan sangat ketat dan menjurus kepada saling menghujat dalam berebut pengaruh untuk menarik simpati masyarakat. Sementara itu, pada bagian lain tidak sedikit anggota Sarekat Islam yang bersimpati kepada Nahdlatul Ulama dan berusaha menjauhkan Sarekat Islam dari pengaruh Muhammadiyah, dan yang bersimpati kepada Muhammadiyah berusaha menjauhkan Sarekat Islam dari pengaruh Nahdlatul Ulama.

Pertentangan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah disebut juga pertentangan antara Kaum Tua dan Kaum Muda. Pada dasarnya pertentangan itu muncul oleh persoalan-persoalan perbedaan pendapat mengenai “furu” agama Islam. Perbedaan pendapat ini sangat besar pengaruhnya di masyarakat, sebagai contoh dalam masalah kematian yaitu persoalan “talkin”, kedua kelompok ini mempunyai pendapat yang berbeda dan menimbulkan pertentangan sehingga tidak jarang sampai terjadinya pertumpahan darah dan bahkan berakibat pula putusannya hubungan silaturahmi antara keluarga.

Pertentangan antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah atau Kaum Tua dengan Kaum Muda yang nota bene adalah umat Islam dan sangat berdampak luas di masyarakat sehingga umat Islam menjadi terpecah belah. Ketika situasi ini berkembang mencapai akumulasinya, peran Sarekat Islam sebagai organisasi tertua dan terbesar seharusnya ia dapat melakukan suatu tindakan untuk memecahkan persoalan tetapi itu tidak mampu dilakukannya. Dalam

¹²⁹ Depdikbud, *op.cit.*, hal. 74

ketidakberdayaan Sarekat Islam memimpin umat, ironinya di masyarakat muncul dan beredar aliran keagamaan yang menyebut dirinya “Ahmadiyah” suatu aliran yang sangat berbeda dengan tradisi keagamaan daerah ini yang beraliran (mazhab) Syafiiyah.

Ketika umat Islam daerah ini mencapai akumulasi kebingungan, maka pada momen itu pula muncul pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh Islam independen untuk menemukan solusi agar umat tidak terperangkap lebih lama lagi dalam perpecahan. Salah solusi yang sangat brilian dari hasil pemikiran itu adalah mereka sepakat untuk memunculkan suatu organisasi Islam baru dengan tujuan persatuan umat Islam. Organisasi itu bernama Musyawaratutthalibin, berdiri di Banjarmasin pada tanggal 2 Januari 1931. Tokoh-tokoh pendirinya adalah Haji Ridwan Syahrani, Haji Majedi Effendi, Haji Amin dan mendapat dukungan dari para alim ulama, guru-guru agama, penuntut-penuntut ilmu di Banjarmasin.. Secara harfiah, “Musyawaratutthalibin” diartikan sebagai organisasi para pelajar atau kaum terpelajar yang menginginkan adanya permusyawaratan. Keinginan itu lahir karena meluasnya perpecahan dalam masyarakat, terutama menyangkut soal-soal agama.¹³⁰

Organisasi ini berfaham keagamaan yang berdasarkan Islam, dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam statuten-nya pasal dua antara lain bekerja untuk kesempurnaan umat Islam dengan jalan membangunkan persatuan Islam terutama guru-guru, ulama-ulama, penuntut-penuntut ilmu khususnya dan kaum muslimin umumnya, dan memajukan dan menggembirakan cara hidup dengan mengamalkan segala perintah Islam. Seperti kata Haji Ridwan Syahrani pada saat pembentukan organisasi ini bahwa dibentuknya Musyawaratutthalibin ini adalah untuk membentengi faham ahlussunnah wal jamaah dengan mewujudkan dan menggembirakan cara hidup dan kehidupan dengan mengamalkan segala perintah Allah yang sudah umum dikerjakan oleh umat Islam di Indonesia dengan mazhab Imam Syafii berdasar Quran, Hadis, Idjma dan Qiasy.¹³¹

Karena organisasi ini bermaksud membangun persatuan Islam jelaslah adanya keinginan akan kerukunan dalam beragama oleh masyarakat, maka mulai dari golongan pemuda dan pelajar beramai-ramai memasuki Musyawaratutthalibin. Dalam perkembangannya organisasi mempunyai cabang yang sangat banyak di Kalimantan Selatan, bahkan sampai ke pesisir Sumatera seperti Tembilahan, Enok dan Kuala Tungkal, di tempat mana terdapat permukiman orang-orang Banjar perantauan.

Adapun cabang-cabang yang sudah berdiri sampai tahun 1936 adalah cabang-cabang Banjarmasin, Kuin, Kandangan, Barabai, Amuntai, Kalua, Samarinda, Balikpapan, Sanga-Sanga Dalam, Kotabaru, Samuda, Senakin, Alabio dan cabang Tembilahan.

Sampai tahun 1942 organisasi Musyawaratutthalibin melaksanakan beberap kali kongres yakni Kongres I tahun 1934 di Banjarmasin, Kongres II tahun 1936 di Kandangan, Kongres III tahun 1937 di Amuntai dan Kongres IV tahun 1938 di Balikpapan. Hasil Kongres ke empat di Balikpapan, selain memperbaharui pengurus baru juga berhasil memantapkan struktur organisasi yang terdiri dari :Pengurus Besar yang membawahi Pengurus Harian dan Pengurus Bagian (Departemen) yang terdiri dari badan-badan yakni Badan Majelis Syar’iy, Badan Majelis Pengajaran dan Pendidikan, Badan Propaganda, Badan Komisi Mengumpul Rancangan-Rancangan Aturan Nasrul Umum, Badan Pengurus *Stapeldrukkerij*, Badan Pendirian Drukkerij M.Th (Musyawaratutthalibin), Badan Pers Commisie dan Badan Perpustakaan.¹³²

Melalui badan-badan itu, selain bergerak dalam bidang keagamaan juga bergerak di bidang sosial antara lain dengan mengadakan kursus-kursus kerajinan, pemberantasan buta huruf. Bagian terkenal dari organisasi ini adalah Badan Majelis Pengajaran dan Pendidikan yang program kerjanya menggiatkan berdirinya sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah yang dibina oleh Musyawaratutthalibin seperti sekolah-sekolah Safiiyah, Kepanduan Nasrul Umum untuk bidang kepemudaan dan Dawatutthalibin untuk kelompok laki-laki serta Jami’iyyatunnisa untuk kelompok wanitanya yang bergerak di bidang propaganda agama melakukan melalui Badan Majelis Proganda

¹³⁰ Lihat lebih jauh , Mohammad Yusran, *op.cit.*

¹³¹ Moh. Yusran, *ibid.*, hal 18-19.

¹³² Moh. Yusran, *ibid.*, hal. 38-40.

yang dipimpin oleh Haji Abdullah Sidiq, melakukan propaganda-propaganda agama dalam rangka menjunjung tinggi Al Quran, Hadist, Idjma dan Qiasy serta menolak keras serangan ahlul bid'ah waddhalalah baik di tempat terbuka, di masjid maupun langgar. Usahanya di bidang agama ditemui pula pada pembentukan kader-kadernya di setiap sekolah "musyawarah" yang terdapat pada setiap cabang-cabangnya di daerah.

Di bidang sosial kegiatan Musyawaratthalibin selain dilaksanakan melalui badan-badan juga melalui organisasi seperti Kepanduan Nasrul Umum, Dawatutthalibin, dan Jami'iyatunnisa. Mereka melaksanakan kursus-kursus buta huruf, kerajinan tangan, dan mengumpulkan biaya pendidikan bagi anak yang cerdas yang kesulitan biaya, bahkan mengadakan percetakan dan menerbitkan surat kabar yakni "Suara MTh atau Suara Musyawarah" meski tidak lama umurnya.

Terhadap Pemerintah Hindia Belanda, Musyawaratutthalibin juga mengeluarkan mosi tahun 1938 yang isinya agar bea pemotongan hewan buat aqiqah dan qurban dibebaskan. Mosi itu disampaikan kepada pemerintah, kantor voor Mohammadaanzaken, Volksraad dan pers Indonesia.

Di bidang pendidikan, perjuangan Musyawaratutthalibin terlihat dari adanya "Sekolah Musyawarah" yang didirikan di hampir semua cabang organisasi ini. Disamping itu, organisasi ini juga mendirikan sekolah agama yang lain seperti "Qismul-Mudarisien" di Kandangan dan "Normal Islam" di Rantau.

Selain itu, Musyawaratutthalibin berhasil menyatukan dua perguruan yakni "Persatuan Perguruan Islam di Birayang" dengan "Sekolah Musyawarah", sehingga kerjasama itu dapat meningkatkan mutu kerja guru-guru dan murid di samping hubungan organisasi ini dengan perhimpunan lainnya menjadi lebih erat.

5) Partai Nasional Indonesia

Partai Nasional Indonesia (PNI) untuk pertamakalinya dibentuk oleh Ir. Soekarno dan kawan-kawan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Kemajuan-kemajuan setelah kongresnya yang pertama di Surabaya pada bulan Mei 1928 berupa propaganda, aksi massa, dan cara kerja yang teratur mengakibatkan organisasi ini menyebarluas hingga ke daerah-daerah lainnya di Pulau Jawa, bahkan ke Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Melihat pesatnya perkembangan PNI di kalangan rakyat, maka tidaklah heran jika putera-putera Kalimantan di Surabaya yang telah mendirikan Persatuan Pemuda Borneo (PBB) dibawah pimpinan Abdul Kadir ada yang tertarik kepada PNI. Dan besar kemungkinan Partai Nasional Indonesia di Kalimantan Selatan pada awalnya dapat tumbuh dan berkembang berkat dukungan pemuda-pemuda yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Borneo yang dipimpin oleh Abdul Kadir sehingga atas dasar tuduhan terlibat pengaruh PNI Soekarno, maka Persatuan Pemuda Borneo dibubarkan pada tahun 1929.¹³³

Meski kelangsungan PBB tidak bertahan lama, namun atas usaha-usaha pemuda PBB, maka cabang PNI dapat dibentuk pada tahun 1929 dengan ketuanya Nunci Malyani dibantu Sekretaris Khoderi Thaib dan Pembantu Umum Kiai Luis Kamis¹³⁴ dan merupakan cabang dari pusatnya di Jawa. Sesuai anggaran dasarnya, tujuan PNI adalah bekerja untuk kemerdekaan Indonesia. Tujuan ini hendak dicapai dengan azas "percaya pada diri sendiri". Artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi dan sosial dengan kekuatan dan kebiasaan sendiri serta tidak mau ikut dalam dewan-dewan yang diadakan oleh pemerintah Hindia Belanda (*non cooperatie*).¹

Beberapa hari setelah Partai Nasional Indonesia cabang Banjarmasin terbentuk, mulailah diadakan kegiatan-kegiatan seperti pertemuan-pertemuan, sehingga PNI berkembang ke daerah-daerah lainnya di Kalimantan Selatan, namun tidak subur perkembangan PNI di daerah lain seperti di Jawa dan Sumatera. Penyebabnya masyarakat merasa takut dengan tekanan-tekanan pemerintah Hindia Belanda terhadap anggota PNI, disamping kepercayaan masyarakat yang begitu tebal terhadap agamanya, sehingga PNI yang bersifat nasionalis dan bersikap netral terhadap agama menjadi kurang mendapatkan perhatian masyarakat di daerah ini.

¹³³ Lihat Amir Hasan Kiai Bondan, *op.cit.*, hal, hal 85 dan M. Idwar Saleh *et al*, *op.cit.*, hal.46.

¹³⁴ Soepardi, *op.cit.*, hal. 10-11.

Seperti halnya di Jawa, pemerintah Hindia Belanda yang semakin hari kian bertambah cemas terhadap perkembangan dan propaganda PNI di Kalimantan Selatan mulai menunjukkan tangan besinya. Menyusul penggeledahan dan penangkapan tokoh-tokoh PNI di Jawa, maka pada akhir Desember 1929 terjadi pula penggeledahan markas PNI cabang Banjarmasin yang mengakibatkan matinya perjuangan organisasi ini di Banjarmasin.

Penangkapan atas tokoh-tokoh PNI terutama Ir. Sukarno yang merupakan jiwa penggerak PNI ternyata memberi pukulan yang sangat keras terhadap PNI. Pada Kongres Luar Biasa II di Jakarta, diambillah keputusan untuk membubarkan PNI karena keadaan memaksa. Pembubaran ini menimbulkan perpecahan di kalangan pendukungnya, yang masing-masing pihak mendirikan Partai Indonesia (Partindo) oleh Mr. Sartono cs, dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) oleh Moh. Hatta dan Sutan Syahrir.

Partai baru ini mempunyai tujuan dan aksi perjuangan yang hampir sama dengan PNI, hanya namanya dirubah. Seperti simbol tetap sama yaitu kalau PNI merah putih dengan kepala banteng, sedangkan Partindo merah putih dengan banteng hitam.

Tiga tahun setelah peristiwa penggeledahan PNI cabang Banjarmasin, maka pada tahun 1932 atas inisiatif M. Yusak dibentuklah PNI Baru yakni Pendidikan Nasional Indonesia di Marabahan. Perkumpulan ini lebih dikenal masyarakat dengan nama PNI Pendidikan¹³⁵ dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua	: Musyaffa
Penulis	: Sunhaji
Bendahara	: -----
Pembantu Umum	: M. Yusak
Pelindung	: H.M. Arif ¹³⁶

Partai ini berdiri atas asas menolong diri sendiri dan bersikap nonkoperasi dengan tujuan untuk mencapai Indonesia merdeka. Untuk mencapai tujuan itu, PNI Pendidikan menggunakan Perguruan Taman Siswa dan Kepanduan Bangsa Indonesia sebagai wadah pelaksanaannya untuk menanamkan rasa kebangsaan dan membebaskan mereka dari perasaan takut dan kebodohan. PNI Pendidikan merekrut murid-murid Perguruan Taman Siswa yang dianggap mampu dan dewasa dalam kegiatan “Debatingclub” yang diasuh oleh M. Yusak dengan jumlah anggotanya maksimum 40 orang. Dari mereka itulah diharapkan lahir kader yang sanggup menyebarluaskan cita-cita PNI Pendidikan.

PNI Pendidikan juga menganjurkan agar lagu Indonesia Raya selalu dikumandangkan, dan disetiap perhelatan perkawinan atau perayaan hari besar Islam dianjurkan pula untuk memasang warna merah putih, meski hanya dalam bentuk hiasan.

Supaya cita-cita politik PNI Pendidikan tersebar luas, maka organisasi ini melakukan kontak dan bekerjasama dengan organisasi yang sudah ada diantaranya dengan Barisan Indonesia (BINDO) yang sebelumnya telah berkembang di Marabahan. Sehingga sebagian pengurus BINDO juga sebagai pengurus PNI Pendidikan.

Keberhasilan usaha PNI Pendidikan dalam meningkatkan kecerdasan rakyat yang masih terkebelakang melalui pendidikan dan pengajaran, berakibat organisasi dapat tumbuh dan berkembang di masyarakat, sedangkan Partindo tidak demikian. Kegiatan Partindo hampir tidak terdengar di daerah ini, seandainya pernah ada, besar kemungkinan hanya bersifat perorangan.¹³⁷

Sebagaimana halnya dengan Partai Nasional Indonesia, maka kegiatan PNI Pendidikan di Marabahan juga mendapat tekanan dari pemerintah kolonial, apalagi setelah ranting persiapan Banjarmasin terbentuk lengkap dengan pengurusnya. Adapun susunan pengurus PNI Pendidikan Banjarmasin adalah sebagai berikut :

Ketua	: Jumadi
Wakil Ketua	: Subagio
Sekretaris I	: Sutomo
Sekretaris II	: Sudibyo

¹³⁵ Soepardi, *ibid.*, hal 25.

¹³⁶ Soepardi, *ibid.*, hal. 18.

¹³⁷ Soepardi, *ibid.*, hal 14.

Bendahara : Ny. Subagio
Pembantu Umum : Hasian Harahap, Suwito dan Sumarno.¹³⁸

Perkembangan PNI Pendidikan akhirnya juga tidak dapat berlangsung lama karena tindakan keras pemerintah kolonial Belanda yang melemahkan pergerakan kebangsaan yang bersikap nonkooperasi, seperti dalam bentuk pengawasan ketat, ancaman, bahkan pengusiran bahkan penangkapan terhadap tokoh-tokoh yang disegani. Demikianlah, akibat tangan besi yang dilakukan pemerintah, maka organisasi PNI Pendidikan akhirnya tidak dapat bergerak lagi.

6) Partai Indonesia Raya (PARINDRA)

Pada waktu Pendidikan Nasional Indonesia dalam keadaan tidak dapat bergerak lagi setelah terjadi penangkapan terhadap tokoh-tokohnya seperti M. Haidar dan Hasian Harahap, maka pada tahun 1935 berdirilah Cabang Partai Indonesia Raya (PARINDRA) di bawah pimpinan Merah Johansyah.¹³⁹

Pada mulanya PARINDRA bernama Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) yang lahir pada tanggal 14 Mei 1932 dan memiliki cabang seperti di Kandangan, Barabai dan Amuntai. Organisasi ini dipelopori oleh kaum intelektual, seperti para pegawai pemerintah dan guru-guru. Dalam gerakannya di Kalimantan Selatan sesudah mengadakan fusi dan berganti nama menjadi PARINDRA pada tahun 1935, maka organisasi boleh dikatakan satu-satunya partai politik yang ada saat itu di daerah ini.

PARINDRA berusaha memperbaiki kehidupan rakyat dengan memberikan pertolongan dan pimpinan yang nyata, dengan mendirikan badan-badan koperasi, rukun tani, bank rakyat, pelajaran dan perdagangan. Karena usahanya itulah, maka jumlah anggotanya cepat bertambah dengan cabang-cabang dan ranting-ranting baru yang bermunculan di desa-desa seperti Kotabaru, Alabio dan Birayang. Untuk kepentingan pendidikan, organisasi ini membentuk Perguruan Rakyat PARINDRA di Kandangan, Banjarmasin, Barabai, Birayang, dan Amuntai.¹⁴⁰

Nama PARINDRA sedemikian populer waktu itu, karena juga mempunyai organisasi bawahannya seperti Rukun Tani, Surya Wirawan, maupun Perguruan Rakyat PARINDRA itu sendiri. Salah satu kejadian yang turut mempopulerkan PBI-PARINDRA adalah di kalangan masyarakat luas adalah ketika terjadi peristiwa "Ong Keng Lie" dimana PBI bersama dengan Musyawaratutthalibin, Sarekat Islam dan Muhammadiyah turut membela orang Banjar yang dihina oleh Ong Keng Lie yang dibela oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Berlainan dengan organisasi sebelumnya, PARINDRA melaksanakan prinsip *cooperatie* terhadap pemerintah Hindia Belanda. Karena prinsip itulah, maka wakil-wakilnya dapat duduk dalam dewan propinsi, kabupaten maupun pemerintahan kota. Akan tetapi, perasaan cemas dan takut pemerintah kemudian muncul setelah melihat aktivitas PARINDRA yang cenderung melawan pemerintah kolonial. Oleh karena itu, Pemerintah Hindia Belanda selalu menempatkan orang-orang PID (*Politieke Inlichtingen Dienst*) di setiap rapat partai, baik rapat terbuka maupun rapat tertutup. Tidak jarang PID ini mencari-cari alasan atau perkara untuk membubarkan rapat PARINDRA.

Seperti rapat PARINDRA tahun 1939. Rapat ini dibubarkan dan pembicaranya yakni H. Ali Baderun, Ketua PARINDRA cabang Barabai ditangkap dan oleh Landraad (pengadilan) Kandangan yang bersidang di Barabai, yang bersangkutan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, meski terhakum kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Perlakuan PID juga terjadi pada saat Konperensi Daerah PARINDRA se Kalimantan Selatan tahun 1939 di Banjarmasin yang dihadiri cabang-cabang PARINDRA di Kalimantan Selatan. Utusan

¹³⁸ Soepardi, *ibid.*, hal, 28.

¹³⁹ Soepardi, *ibid.*, hal.20.

¹⁴⁰ Tentang Sekolah PARINDRA, baca sebelumnya "Sekolah Kaum Pergerakan".

PARINDRA cabang Amuntai dengan beraninya mengibarkan bendera merah putih meski berdampingan dengan bendera Belanda pada saat arak-arakan, begitupula A. Zakaria, salah seorang tokoh PARINDRA Banjarmasin, dengan bersemangat berbicara mengobarkan semangat kemerdekaan itu. Komisaris Berer dari PID akhir bertindak tegas dengan membubarkan rapat tersebut. Oleh Pemerintah Hindia Belanda A. Zakaria dipersonanongratakan di Kalimantan Selatan dan akhirnya dipindahkan ke Malang.

Ketika dilaksanakan Kongres PARINDRA III di Banjarmasin tanggal 10-12 Mei 1940, anggota Suryawirawan dalam hal ini Arthum Artha ditangkap Resersi PID meski kemudian dibebaskan, karena menaikkan bendera Suryawirawan seiring dengan lagu Indonesia Raya. Akhirnya Kongres PARINDRA di gedung El Dorado dibubarkan oleh pemerintah Belanda (atas perintah Assistent Resident dan Kontroleur). Alasan dan masalahnya Ketua Panitia Kongres PARINDRA berpidato di podium dan meninggalkan meja pimpinan (tidak ada yang menjabatnya) dianggap melanggar peraturan *Wetboek van Straftrecht Nederlandsche Indie*.¹⁴¹

PARINDRA cabang Amuntai juga mendapat cobaan hebat setelah empat orang pimpinannya ditangkap dan dipenjarakan karena mereka membuat mosi menentang peraturan kerja erakan (rodi). Mereka adalah yakni H. Murhan dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 6 bulan, Abdul Hamidhan 1 tahun, sedangkan H. Amir dan E. Sandan masing-masing dikenakan penjara 2 tahun.

Tindakan keras juga dikenakan terhadap tokoh PARINDRA cabang Kandangan, H. Ahmad Barmawi Thaib, lantaran sering menulis artikel yang bersifat politik melalui mingguan Pembangunan Semangat. Beliau dituduh *persdelict* dan dijatuhi hukuman penjara 3 tahun oleh Landraad Kandangan. Upaya Mr. Rusbandi, yakni Komisaris Daerah PARINDRA Kalimantan Selatan yang sekaligus sebagai pembela tidak berhasil meyakinkan hakim kolonial, sehingga H. Ahmad Barmawi dikirim ke penjara Sukamiskin di Jawa Barat.

Nasib serupa juga dialami oleh tokoh PARINDRA Banjarmasin, Hadhariyah M juga dituduh *persdelict*, karena tulisannya berupa cerpen berjudul "*Tersungkur Di Bawah Kaki Ibu*" (judul aslinya "*Suasana Kalimantan*") yang diterbitkan di Medan, dianggap pemerintah bertendensi politik sehingga penulisnya bersama penanggung jawabnya ,Matu Mona (nama aslinya Hasbullah Parinduri), diajukan ke pengadilan Banjarmasin pada tahun 1941. Hakim kolonial J.B. Kan menyatakan bahwa terdakwa dianggap melanggar artikel 156 dan 157 serta 151 bis dan ter dari KUHP, sehingga dijatuhi vonis 4 tahun penjara kepada Hadhariyah M dan 1,5 tahunpenjara kepada Matu Mona.

Adapula semacam rintangan walaupun nampak kecil, akan tetapi sangat menghalangi dan merugikan kegiatan PARINDRA. Rintangan itu disebut orang PARINDRA dengan istilah "Spionase Konyol" yang dikenakan kepada Kepala Kampung atau salah seorang tokoh pemuka masyarakat yang dapat dipengaruhi pemerintah menjadi spion (mata-mata) untuk memata-matai gerak-gerik PARINDRA. Spion yang tak tahu apa-apa, karena kadangkala orangnya buta huruf, sering mengintip rapat rapat atau kursus-kursus PARINDRA. Hal-hal yang didengar samar-samar, dilaporkan kepada tuannya. Seorang pembicara dalam rapat Parinda yang berucap, "perkumpulan kita bukan perkumpulan pemberontakan", didengar oleh spion konyol dari balik dinding hanya kata "berontak" saja dan terus dilaporkan. Atas dasar laporan itu, maka besoknya si pembicara sudah berhadapan dengan polisi atau HPB (*Hoofd van Plaatselijk Bestuur*). Peristiwa semacam itu, karena sering terjadi sangat mengganggu langkah-langkah PARINDRA untuk bergerak maju, karena adanya informasi yang sesat menyebabkan pemerintah telah menaruh curiga bahkan menghalangi kegiatan PARINDRA.¹⁴²

Partai kebangsaan lainnya yang timbul adalah Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) yang dibentuk Dr. Adnan Kapau Gani pada bulan Mei 1937 di Jakarta. Sedangkan di Kalimantan Selatan partai ini disponsori oleh Haji Busri dan M. Nawawi yang pada tanggal 12 September 1937 berhasil membentuk Pengurus Persiapan Gerindo cabang Birayang dan Barabai. Panitia pengurus persiapan itu dibentuk pada tanggal 12 September 1937 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Haji Busri

¹⁴¹ Arthum Artha, *op.cit.*, 1-2.

¹⁴² Lihat M. Idwar Saleh, *et al*, *op.cit.*, hal.109-112.

Sekretaris I : M. Nawawi
Sekretaris II : Sasra
Bendahara : M. Nawawi
Pembantu Umum : Haji Abdul Manap

Panitia pengurus persiapan ini aktif membentuk ranting-ranting persiapan antara lain : Rangas, Abung, Cukan Lipai, Wawai, Luk Besar, Kaparkias, Batutangga dan Barabai.

Setelah semuanya dipersiapkan, maka pada permulaan 1938 Gerindo Kalimantan Selatan disahkan berdirinya oleh Dr. Adnan Kapau Gani yang datang ke Birayang. Sesuai anggaran dasarnya, Gerindo melaksanakan prinsip koperasi dengan Pemerintah Hindia Belanda.¹⁴³

F. KEADAAN ORGANISASI PERGERAKAN TAHUN 1928-1942

1. Politik Keras Pemerintah Kolonial Terhadap Gerakan Nonkoperasi

Pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada bulan November, Desember 1926 dan bulan Januari 1927 oleh Pemerintahan Hindia Belanda dijadikan alasan untuk melumpuhkan Pergerakan Nasional Indonesia. Siapa saja yang aktif dalam pergerakan itu dicurigai dan ditangkap. Untuk mencegah terulangnya kejadian semacam itu menurut pendapat pemerintahan tidak ada jalan lain kecuali bertindak tegas terhadap pergerakan yang bersifat nonkoperasi.

Pendapat serta sikap demikian juga dipengaruhi oleh perkembangan situasi ekonomi internasional saat itu yakni zaman malaise (depresi besar tahun 1929) dan keinginan Jepang untuk menguasai perekonomian Hindia Belanda dengan politik dumpingnya, sehingga pemerintah Hindia Belanda semakin tegas menindak kaum pergerakan, khususnya di daerah ini. Akibat merosotnya perekonomian, para pegawai negeri dan guru-guru dengan cemas menunggu keputusan di-*"rumah"*-kan dengan *wacht-geld* (uang tunggu).¹⁴⁴

Bentuk-bentuk tindakan politik keras pemerintah tersebut pada umumnya sama dengan yang dilakukan di Jawa. Pada akhir tahun 1929 sebagai bagian dari penggeledahan umum di seluruh daerah Hindia Belanda, maka di Banjarmasin pun diadakan penggeledahan di kediaman pemimpin-pemimpin PNI cabang di daerah ini seperti rumah Nunci Malyani, Khoderi Thalib dan Kiai Luis Kamis.

Resident Kalimantan, R. Koppenol yang berkedudukan di Banjarmasin (1929-1931) yang telah memerintahkan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum dan mengeluarkan larangan untuk rapat atau berkumpul bagi partai-partai politik. Tindakan tegas berikutnya dari residen ini ialah larangan mengajar bagi guru-guru HIS Swasta (PHIS) di Marabahan dan malahan mengusir guru-guru sekolah tersebut seperti : Marjono, Sunaryo, Kusdiman, Suwito, Sumarno, M. Yusak dan lain-lain.

Tindakan pemerintah ini tidak hanya menimbulkan kemunduran atau macetnya aktivitas-aktivitas partai-partai politik yang ada di daerah ini tetapi juga membawa pukulan keras bagi dunia pendidikan swasta di daerah ini. Dengan munculnya PNI Pendidikan (Pendidikan Nasional Indonesia) dengan politik non koperasi juga mengundang Residen Kalimantan waktu itu yakni W.G. Mogenstorm (1933-1937) untuk meneruskan bentuk kebijaksanaan dari residen pendahulunya dengan menggunakan tangan besinya.

Macam-macam tindakan mulai dijalankan antara lain larangan mengadakan rapat, larangan hak mengajar dan pengusiran guru-guru Taman Siswa. Dalam pada itu pada tahun 1932 pemerintah juga melarang diadakannya Kongres Barisan Indonesia (BINDO), suatu perkumpulan lokal yang tadinya berasal dari Persatuan Pemuda Marabahan (PPM) yang dalam perkembangan selanjutnya berubah menjadi Sarekat Kalimantan. Larangan pemerintah itu didasarkan pandangan bahwa BINDO adalah *onderbouw* PNI Pendidikan, dan alasan lain yang menguatkan tuduhan itu

¹⁴³ Lebih jauh lihat Soepardi, *ibid.*, hal. 21-23; Ramli Nawawi ed, *op.cit.*, hal. 66 dan Depdikbud, *op.cit.*, hal. 76-77.

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan M. Suriansyah Ideham, Banjarmasin.

ialah adanya sebagian dari pengurus dan anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang PNI Pendidikan. Keadaan yang demikian bagi pemerintah Hindia Belanda merupakan alasan yang kuat untuk melarang berlangsungnya kongres tersebut. Akhirnya akibat sikap pemerintah yang demikian itu aktivitas BINDO mengalami kemunduran.

Akibat politik keras Pemerintah Hindia Belanda terutama dirasakan oleh kaum pergerakan khususnya oleh partai politik yang menjalankan azas nonkooperasi seperti PNI dan PNI Pendidikan seperti yang dikenakan pemerintah terhadap PNI pimpinan Nunci Malyani maupun PNI Pendidikan pimpinan M. Yusak. Politik keras itu berakibat masyarakat banyak yang belum memahami cita-cita PNI berusaha menjauhi perkumpulan itu, sedangkan orang-orang yang telah menjadi anggota PNI dan PNI pendidikan banyak yang menyatakan diri melepaskan keanggotaannya. Bahkan ada pula yang berpindah keanggotaan dan memasuki partai politik yang sifatnya kooperasi seperti PBI, PARINDRA dan Gerindo.

Bagi masyarakat pendukung sekolah swasta, tindakan keras dari Resident R. Koppenol dan W.G. Mogenstorm seperti yang dikenakan terhadap guru-guru HIS swasta di Marabahan, sedikit atau banyak menyebabkan kemacetan pada sekolah tersebut. Keadaan itu pada gilirannya jelas membawa kerugian bagi masyarakat yang sangat memerlukan pendidikan dan pengajaran di daerah Marabahan.¹⁴⁵

2. Penerapan Ordonansi Sekolah Liar

Undang-undang Sekolah Swasta yang diterapkan di daerah ini khususnya digunakan untuk menghadapi sekolah Perguruan Taman Siswa, terutama tingkat SD-nya yang disebut Taman Muda atau tingkat pendidikan kelas 4-6 untuk anak-anak berumur 10 s.d. 13 tahun, disamping Taman Rakyat yang diperuntukkan untuk orang dewasa dan dikelola Perguruan Taman Siswa pada sore hari.

Sekolah ini dikenakan Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde Scholen Ordonnantie*) dengan alasan kualitas guru-gurunya tidak memenuhi persyaratan pemerintah yaitu harus berijazah Kweekschool. Guru-guru di Taman Muda dan Taman Rakyat banyak yang berijazah Taman Dewasa yang diberi wewenang untuk mengajar. Keadaan ini mengakibatkan pengurus sekolah tersebut diharuskan mencari penggantinya berupa guru-guru lulusan Kweekschool terutama dari tenaga-tenaga setempat untuk mengisi kekosongan. Sebenarnya dibalik alasan tidak memenuhi persyaratan ini terselip alasan politisnya yakni selain karena keanggotaan guru-guru tersebut merangkap sebagai anggota PNI Pendidikan juga adanya kekuatiran aktivitas Perguruan Taman Siswa yang menyebarkan benih-benih kebangsaan.

Di bawah asuhan guru-guru yang merangkap sebagai anggota PNI Pendidikan, Perguruan Taman Siswa memang mengalami kemajuan yang pesat. Cabang-cabang Taman Siswa selain Marabahan dan Banjarmasin terdapat juga di Kandangan, Barabai, Kelua dan Negara. Kemajuan Taman Siswa ini dengan dasar kebangsaannya berarti pula kemajuan bagi PNI Pendidikan.

Untuk menahan arus maju PNI Pendidikan dan Taman Siswa maka pemerintah dibawah Resident W.G. Mogenstorm mengambil tindakan-tindakan keras antara lain melarang guru-guru untuk mengajar bahkan pengusiran partai politik. Adapun guru-guru yang terkena peraturan itu antara lain M.Yusak, Suwito, Sumarto, Sujarmadi dan Sabran. Sebenarnya kalau diteliti lebih mendalam di daerah Marabahanlah berpusat gerakan nonkooperasi di daerah ini, sehingga tidaklah mengherankan kalau pengawasan pemerintah juga lebih ketat terasa di sini daripada di bagian lain daerah ini.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Soepardi, *op.cit.*, hal. 40-43 dan M. Idwar Saleh *et al*, *op.cit.*, hal. 104-106.

¹⁴⁶ M. Idwar Saleh *et al*, *ibid.*, hal. 106-107.

BAB VI
ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG
1942-1945

A. HINDIA BELANDA SEBELUM INVASI BALATENTARA JEPANG

1. Propaganda Kemakmuran Asia Timur Raya

Sebenarnya pendudukan Jepang terhadap wilayah Hindia Belanda telah direncanakan jauh sebelumnya. Ini direncanakan, diatur dan dikaji terlebih dahulu secara matang oleh Perdana Menteri yang merangkap Menteri Luar Negeri Jepang Jenderal Guchi Tanaka. Pada pertengahan tahun 1927 Tanaka mengajukan sebuah konsep resmi kepada Kaisar Jepang Tenno Heika, yang berisi garis-garis besar rencana untuk menduduki atau menaklukkan bukan saja Asia, tetapi juga Eropah. Memorandum Jenderal ini kemudian terkenal dengan nama “Tanaka Memorial”.

Realisasi dari cita-cita Tanaka tersebut, semakin nyata terlihat sejak tahun 1930, ketika kaum militer Jepang berhasil mempengaruhi kehidupan politik kerajaan Jepang. Pada tahun 1933 di Jepang telah dibentuk “Perkumpulan Asia Raya” dengan sebuah majalahnya yang bernama “Dai Asia Shugi” yang isinya terus-menerus melancarkan kampanye “Pan Asia” untuk menarik perhatian rakyat Jepang terhadap rakyat bangsa-bangsa Asia yang sedang dijajah oleh bangsa Barat. Oleh mereka dikumandangkan semboyan “Asia Untuk Orang Asia”. Di samping itu Jepang juga melancarkan gerakan anti Barat melalui pers dan media massa lainnya. Ajaran tersebut di Jepang terkenal dengan nama “Nansyiron” atau ajaran “Untuk Maju ke Selatan” ketika tahun 1938 Kabinet Konoye secara resmi telah menjadikan gerakan ini sebagai suatu garis politik kerajaan Jepang yang harus ditaati.

Ditekankan pula bahwa tujuan politik kerajaan Jepang ialah untuk menjamin perdamaian abadi di Asia Timur. Politik ini pada dasarnya menganut keinginan berekspansi ke dan merampas daerah orang lain untuk kepentingan perluasan kawasan tersendiri. Ini menjadi lebih ditingkatkan lagi menjadi proklamasi “Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya” yang dicetuskan pada tahun 1940.¹

Untuk mewujudkan rencana tersebut, Jepang mencoba mendekati rakyat dan pemimpin-pemimpin Indonesia yang bergerak dalam kepartaian. Tetapi itikad busuk itu telah diketahui oleh para tokoh pergerakan yang selalu mengikuti isi propaganda mereka melalui “Pan Asia”. Bahkan tokoh terkemuka pada saat itu Drs. Mohammad Hatta menganggap sikap Jepang yang jahat itu telah terlihat dengan keserakahannya ketika mencaplok daratan Cina dan Manchuria. “Perbuatan ekspansi itu adalah fascistis”, kata Hatta. Oleh karena itu Jepang harus diwaspadai. Sampai berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia pada tahun 1945, sikap kewaspadaan nasional itu tetap dipertahankan oleh para pemimpin pergerakan Indonesia.

Gerakan ekspansi tentara Jepang ke Hindia Belanda tidak langsung merebut pulau Jawa, dengan Jakarta sebagai ibukota dan pusat pemerintahan Hindia Belanda, tetapi mereka lebih dahulu merebut pulau Kalimantan untuk mendapatkan sumber-sumber minyak tanah yang terdapat di Tarakan, Tanjung dan pabriknya di Balikpapan. Kesatuan-kesatuan yang diturunkan

¹ Amat Asnawi et al., *Sejarah Perjuangan Rakyat Menegakkan Kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan (Periode 1945-1949)*, Pemda Tk. I Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1994, hal. 56.

atau diterjunkan ke Kalimantan adalah Rikugun atau Angkatan Darat dan Kaigun atau Angkatan Laut yang diberangkatkan dari Davao Philipina Selatan.

Penguasaan medan di Kalimantan telah dilakukan oleh para mata-mata Jepang yang sejak puluhan tahun berada di daerah ini sebagai dokter gigi, tukang potret, pengusaha perkebunan karet, pengusaha toko, nelayan dan lain-lain, yang semuanya melakukan tugas mata-mata atau spionase bagi negerinya, sehingga sangat membantu dan mempermudah operasi militernya ke daerah ini.

Propaganda Jepang sebagai penolong bangsa-bangsa Asia, dengan politik dumping sehingga barang-barang Made in Japan atau buatan Jepang lebih disukai daripada barang-barang produksi negara-negara Barat karena murah harganya. Siaran-siaran propaganda Jepang melalui radio diawali dengan lagu "Indonesia Raya" untuk lebih memikat perhatian rakyat di Kalimantan Selatan. Siasat Jepang itu cukup berpengaruh dan dapat memperlancar jalannya penguasaan terhadap pulau atau daerah ini.²

Pada April 1940, jauh sebelum Perang Pasifik pecah, orang-orang Jepang yang tinggal di Kalimantan Selatan telah dipanggil pulang ke tanah airnya. Bertahun-tahun mereka tinggal di daerah ini sebagai perintis dan pelaksana kolonne ke V pemerintahannya. Jumlah mereka tidak banyak, terdiri dari pengusaha perkebunan Danau Salak dan Pelaihari, pimpinan pabrik perkaretan Nomura, pengusaha toko Toserba N. Abe dan Takara Yoko, dokter Kojin Kan, dokter gigi Shogenji, tukang cukur dan tukang potret (*photografer*) Hashimoto, dan lain-lain. Usaha-usaha yang mereka tinggalkan dipercayakan kepada karyawan-karyawan bumiputera.

Memburuknya hubungan Jepang-Hindia Belanda dipicu oleh gagalnya perundingan ekonomi. Awal tahun 1939, kemudian dilanjutkan awal tahun 1940, delegasi Jepang yang dipimpin oleh Kobajasi berhadapan dengan Gubernur Jenderal Jhr mr A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer yang didampingi para Directeur Departemen-departemen *van Binnenlandse Zaken* (Dalam negeri), *Economische Zaken* (Ekonomi), *Sociale Zaken* (Sosial), dan *van Justitie* (Kehakiman) membicarakan keinginan Jepang untuk turut dalam jual beli minyak bumi untuk keperluan industrinya. Jepang membandingkan Amerika Serikat yang belum mempunyai kegiatan perdagangan di Hindia Belanda tetapi memperoleh hak pembelian dan pemasaran minyak bumi. Sebaliknya Jepang yang telah lama membanjiri Hindia Belanda dengan barang-barang (murah)nya ternyata tidak mendapat kesempatan di minyak bumi ini. Delegasi Kobajasi ini pulang dengan tangan hampa.

2. Seloroh Muhammad Husni Thamrin.

Politikus kooperatif yang menjadi Anggota/Wakil Ketua Volksraad (Dewan Rakyat) dikala pemerintah Hindia Belanda ini dalam akhir pidato pemandangan umumnya di Dewan yang terhormat itu berseloroh, bahwa di kalangan rakyat bawah mengartikan kata-kata : DJINTAN, yang merek obat keluaran Jepang ini, sebagai "**Djenderal Jepang Ini Nanti Tolong Anak Negeri**", dan KOBASI, yang memimpin delegasi Jepang dalam perundingan ekonomi dan perdagangan dengan pihak pemerintah Hindia Belanda dalam tahun 1939, sebagai "**Koloni Orang Belanda Akan Japan Ambil Seantero Indonesia**".³

Pandangan umum tersebut diucapkan M.H. Thamrin pada sidang Dewan Rakyat 9 November 1941. Beberapa waktu kemudian rumahnya digeledah oleh yang berwajib. Disita antara lain

² Amat Asnawi *et al.*, *ibid.*, hal. 57.

³ Harian *Kalimantan Raya* Banjarmasin No.29 tanggal 9 April 1942, dan M.Natsir 'Capita Selecta'/N.V.Penerbitan W. van Hoeve - Bandung. 's Granvenhage.

laporan ekonomi yang dibuat Douwes Dekker, yang bersama M.H.Thamrin menjadi anggota *Curatorium Handelscollegium* "Kesatrian".

Douwes Dekker, karena lisensi mengajarnya dibekukan oleh yang berwajib ---karena sikapnya yang pro nasionalis Indonesia--- terpaksa bekerja pada perusahaan Jepang pimpinan tuan Sato, bahkan dengan gaji yang lebih besar dibanding jika dia bekerja pada pemerintah. M.H.Thamrin-lah yang menghubungkan Douwes Dekker dengan Sato.

Tindakan pengeledahan itu membuat heboh di *Volksraad* (Dewan Rakyat) yang terhormat itu, kritikan tertuju pada *Raad van Justitie* (Dewan Kehakiman), *Departement van Binnelands Bestuur* (Departemen Dalam Negeri) dan *Hoofdparket* (Kejaksaan Agung), serta polemik dalam pers. Tidak lama setelah pengeledahan itu, M.H.Thamrin meninggal.

3. Prediksi Sutan Syahrir

Politikus yang non-kooperatif ini menilai bahwa simpati rakyat Indonesia terhadap Jepang sudah terlalu mendalam; maka ia dalam buku hariannya tanggal 19 Agustus 1937 menulis dan memprediksikan sebagai berikut :

"Sepanjang penyelidikanku, seluruh penduduk Islam di negeri ini, sekarang ini pro-Jepang. Jepang makin lama makin populer, seperti dulu demikian halnya dengan Jerman. Kepada orang-orang di pulau ini selalu kukatakan, bahwa orang-orang Jepang itu sungguh bukan dewa-dewa yang baik, bahwa yang dilakukannya sekarang ini tidak lain dari perampokan besar-besaran. Tapi aku tidak ragu-ragu, bahwa sekali waktu Jepang akan mencari untung dari simpati bangsa kami yang besar ini kepadanya. Bukan saja di pulau Banda ini, tapi juga di seluruh Indonesia, sampai-sampai ke kampung-kampung yang paling terpencil, orang yakin benar tentang kekuasaan Jepang, dan bahwa Belanda sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya...."

Orang-orang Jepang itu lebih disukai dari orang kulit putih; simpati rakyat itu tidak bisa dihilangkan dengan propaganda, sebab simpati itu bukan diperoleh oleh Jepang dengan jalan propaganda pula, tapi semata-mata oleh karena orang Jepang itu telah menaklukkan perasaan bangsa kami dengan menunjukkan adat istiadatnya dan sikapnya yang baik. Orang-orang Jepang itu tahu aturan, sangat hormat dan mukanya selalu tersenyum. Bukan tidak ada maksud mereka memperkenalkan dirinya kepada bangsa kami terutama dari sudut ini. Orang Indonesia menganggap orang-orang Jepang itu orang-orang yang lemah lembut. Halus, kata mereka itu, dan orang Tionghoa dan orang kulit putih dikatakannya kasar. Orang-orang kulit putih tidak disukai, oleh karena penjajahannya yang tiga ratus tahun di sini dan orang Tionghoa oleh karena kedudukannya dalam ekonomi sebagai golongan pertengahan (kira-kira sebagai kedudukan orang Yahudi di Eropah)...."

*Nasionalis-nasionalis di Jawapun demikian pula, meskipun mereka itu sekarang tidak berani lagi terang-terangan mengatakannya. Meskipun orang-orang Tionghoa mestinya mendapat simpati dari bangsa kami oleh karena mereka itu di dalam perang Jepang-Tiongkok (yang katanya bukan perang), termasuk pihak yang diserang dan pihak yang lebih lemah, akan tetapi bangsa kami merasa simpati kepada Jepang juga, biarpun gerakan rakyat Indonesia di tahun-tahun belakangan ini menjalankan propaganda melawan imperialisme, juga imperialisme kuning. Simpati orang kepada Jepang sudah terlalu mendalam."*⁴

⁴ Dikutip dari Sjahrazad, *Renungan Indonesia*, Tjetakan kedua, Penerbit Kebangsaan Pustaka Rakjat N.V.Djakarta, 1951, hal. 131-132. Buku ini kumpulan catatan-catatan dari Sutan Syahrir yang ditulisnya di waktu pengasingannya (oleh pemerintah Belanda) ke Boven Digul/Bandaneira 1934-1938. Ditulis dalam Bahasa Belanda dengan judul *Indonesische Overpeinzingen* diterbitkan di akhir tahun 1945 di Negeri Belanda oleh penerbit De Bezige Bij. H.B.Yassin menerjemahkannya menjadi *Renungan Indonesia*.

4. Perang Dunia Ke-2

a. Medan Perang Eropah/Samudera Atlantik

Perang Dunia yang ke-2 yang berlangsung dari tahun 1939 hingga tahun 1945, dipicu oleh Jerman di bawah pimpinan Sang 'Fuhrer' Adolf Hitler dengan menyerbu, memasuki, dan menduduki Polandia pada 1 September 1939, yang kemudian dibagi wilayah pendudukan dengan Rusia yang ketika itu masih menjadi sekutu Jerman.

Hitler yang dielu-elukan oleh rakyat Jerman dengan Salam "*Heil Hitler!*" (Sejahtera, Wahai Hitler!), menganggap bangsa Jerman tergolong ras Aria yang terunggul di dunia. Slogannya yang berbunyi "*Deutschland uber Alles!*" berarti Jerman di atas segala-galanya.

Hitler sangat membenci orang Yahudi, kendati ibunya berdarah Yahudi juga. Jutaan orang Yahudi ditangkap, dikurung dalam kamar-kamar tertutup, kemudian digas hingga mati, dalam percobaan-percobaan senjata kimianya. Genocide ini tidak pernah akan terlupakan oleh kaum Yahudi, sehingga sampai sekarangpun. Dengan *Blitzkrieg* atau Perang Kilatnya dalam bulan April-Mei 1940 didudukinya Denmark, Norwegia, Belanda, Belgia, dan Perancis.

Wilhelmina, Ratu Belanda lari ke London Inggris dan mendirikan pemerintahan pelarian di sini. Keluarga Kerajaan Belanda lainnya : Puteri Yuliana dan suaminya Pangeran Bernhard yang keturunan bangsawan Jerman ini, mengungsi ke Kanada.

b. Medan Perang di Asia dan Pasifik

Sekutu Jerman di Asia Timur, yakni Jepang memperluas daerah perang ini. Tanpa ultimatum, Jepang menyerang Pearl Harbour, pangkalan Angkatan Laut Amerika di Hawaii pada 7 Desember 1941 yang menjadi awal pertempuran Pasifik. Serangan mendadak pada Pearl Harbour ini dirancang oleh Laksamana Yamamoto, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Jepang.

Persiapan dilakukan dengan sangat rahasia. Pada 22 November 1941 berlabuhlah di Kepulauan Kuril enam buah kapal induk, yang ditunjang oleh sejumlah kapal-kapal perang dan penjelajah. Tanggal penyerangan telah ditetapkan hari Ahad 7 Desember 1941, dengan sandi "Tora! Tora!" (Harimau! Harimau!). Pelaksanaannya di pimpin oleh Laksamana Nagumo. Sebanyak 360 buah pesawat terbang ambil bagian, terdiri dari pembom berbagai tipe, sebagian dipersenjatai dengan terpedo, yang dilindungi oleh pesawat-pesawat tempur.

Pukul 07:55 a.m. pagi bom yang pertama dijatuhkan. Ketika itu 94 buah kapal Amerika dan Sekutu sedang berlabuh, diantaranya 8 buah kapal perang tempur yang menjadi sasaran utama, beruntung kapal-kapal induk sedang berada di perairan lain.

Pukul 08:25 a.m. gelombang pertama pembom dan tempur menyerang dengan penuh ketelitian dan efisiensi, hingga pukul 10:00 a.m. serangan berhenti. Para penyerang kembali ke pangkalan dengan meninggalkan suatu armada yang porak poranda dalam lautan api dan kepulan asap, meninggalkan kepingan-kepingan baja dan kepingan-kepingan manusia, dan meninggalkan pula ...dendam Amerika. Lebih dari 20.000 ribu prajurit dan warga Amerika tewas dan hampir 20.000 ribu orang terluka dan cedera.

Penguasaan Samudera Pasifik telah berpindah tangan, dan keseimbangan strategis dunia untuk sementara berubah. Sementara itu pendaratan-pendaratan tentara Jepang terjadi di Utara Luzon, Teluk Lengayen mengarah ke Manila, dan di beberapa tempat di Semenanjung Malaya.

Dalam usaha memperkuat armada sekutu di Pasifik, kapal-kapal perang Inggris 'Repulse' dan 'Prince of Wales' dan sejumlah kapal perusak telah sejak awal Desember tiba di Singapura. Kedua buah kapal induk itu ditenggelamkan di selatan Singapura oleh pemboman Jepang.

Di bawah ini dapat kita lihat urutan serangan dan pendaratan menurut waktu GMT :

- Pendaratan pertama di Malaya pukul 4:55 a.m. Des.7
- Serangan atas Pearl Harbour pukul 6:30 a.m. Des.7
- Serangan udara pertama di Philipina pukul 9:00 a.m. Des.7
- Serangan udara pertama Hong Kong pukul 11:30 a.m. Des.7

Adolf Hitler terpana mendengar kehebatan Jepang itu, dan seketika itu juga ia memerintahkan Angkatan Lautnya untuk menyerang kapal-kapal Amerika di mana pun ditemukan.⁵

Jepang mempropagandakan bahwa perang Asia Pasific ini bertujuan membebaskan bangsa Asia dari penindasan Barat dan untuk membentuk Asia Timur Raya DAI TOA ---yang di dalamnya termasuk Indonesia (yang dijanjikan) merdeka--- di bawah Cahaya, Lindungan, dan Pimpinan DAI NIPPON.

B. PERSIAPAN PERANG PEMERINTAH HINDIA BELANDA

Ketika Perang Dunia ke-2 pecah di Eropah, Negeri Belanda diduduki Jerman pada tanggal 10 Mei 1940, yang menyebabkan hubungan komunikasi antara Negeri Belanda dengan negeri jajahannya termasuk Hindia Belanda menjadi putus. Kondisi itu mengakibatkan Pemerintah Hindia Belanda berusaha sendiri untuk mengadakan perbaikan persenjataan perang guna menghadapi meluasnya perang hingga ke kawasan Asia Pasifik.

Dalam pertahanan di kawasan Asia Pasifik, Pemerintah Hindia Belanda selain memasuki ABDA fleet (America-British-Dutch-Australia) juga memasuki Front ABCD (Australia –British-China-Dutch Indies)⁶ dan melakukan penyempurnaan persenjataan dan peralatan untuk angkatan darat, angkatan udara dan angkatan laut. Dari Amerika Serikat, Pemerintah Hindia Belanda masih bisa mendapatkan pesawat-pesawat pembom Glenn Martin yang sudah kuno. Kekuatiran membayangi mereka, bahwa mungkin sekali Jepang akan menyerang dan menguasai Hindia Belanda, karena daerah ini memiliki bahan-bahan untuk peperangan yang mereka perlukan.

Hindia Belanda mempersiapkan lebih kurang 40.000 orang tentara bayaran dan sekitar 50.000 orang tentara cadangan, yang sebagian besar dipusatkan di Pulau Jawa. Untuk pasukan itu diperlukan perwira-perwira yang terdidik. Karena tidak mungkin lagi didatangkan dari negeri Belanda, maka didirikanlah di Bandung ---Markas Besar Angkatan Bersenjata dan Panglimanya (*Legercommandant*) Hindia Belanda berkedudukan di kota Bandung--- *Koninklijke Militaire Academie* (KMA). Perwira-perwira lulusan KMA itu antara lain : A.H. Nasution, Zulkifli Lubis sebagai kadet.⁷ Di tengah-tengah kesibukan persiapan perang itu, suatu tragedi terjadi, yakni tewasnya *Legercommandant* Berenschot dalam kecelakaan pesawat terbang. Berenschot seorang prajurit karir yang memulai dari pangkat sersan. Ia digantikan oleh Luitenant Generaal H. Ter Poorten.

Alat-alat perang yang dimiliki oleh Hindia Belanda terdiri dari 3 kapal perang penjelajah, 7 kapal pemburu, dan 15 kapal selam, sedang memesan 97 buah pesawat pembom Glenn Martin, sejumlah pesawat terbang tempur, dan beberapa pesawat pengintai Catalina

Gerakan Jepang ke selatan ini jelas tercantum dalam rencana perluasan wilayah sesuai dengan cita-cita pembentukan “Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”. Kedudukan Pemerintah

⁵ Winston S. Churchill, *The Second World War*, Cassel & Co.Ltd. London . Toronto . Melbourne . Sydney . Wellington , 1949.

⁶ Hasil wawancara dengan Arthum Artha dan M. Suriansyah Ideham.

⁷ Urip Sumodihardja, Martadinata, Didi Kartasasmita, A. Hamid Algadri (Sultan Hamid II/Pontianak) adalah lulusan *Koninklijke Militaire Academie* di Breda dan *Instituut voor Marine* di Den Helder. Suryadarma mengikuti pendidikan di *Royal Air Force* (RAF) di Inggris dan turut dalam serangan-serangan pemboman di Eropah.

Kolonial Belanda tidak siap dengan perkembangan situasi dunia, sehingga sampai menjelang akhir pemerintahannya, tak sedikitpun ada kesediaan memberikan konsesi politik kepada partai-partai untuk perubahan ketata negaraan. Akibatnya ketika perang dengan Jepang pecah, di samping jumlah tentara yang kecil, ia juga menghadapi massa rakyat yang bersikap dingin dan partai-partai yang kehilangan kepercayaan pada pemerintah.

Di Kalimantan Selatan, pemerintahan daerah berlanjut sebagaimana biasa. Setelah status residensi ditingkatkan menjadi setingkat propinsi pada tahun 1938, maka diangkatlah Gubernur Dr. B.J. Haga. Selain seorang kolonialis, ia juga seorang penggemar hukum adat dan peraturan-peraturan desentralisasi. Sebagai seorang gubernur, ia amat kaku dan formalistis dalam menghadapi perubahan dan rencana invasi Jepang ke Hindia Belanda. Akibatnya ketika pecah Perang Asia Timur Raya, ia belum banyak membawa perubahan dalam kehidupan politik di Kalimantan Selatan.

Sesudah Negeri Belanda diduduki Jerman tanggal 10 Mei 1940, maka negara dalam keadaan perang diumumkan pemerintah Hindia Belanda. Di Banjarmasin sebagai pusat pemerintahan dan militer, mulai terlihat kesibukan-kesibukan menghadapi perang. Di sini terdapat pusat perusahaan-perusahaan besar Belanda, bank-bank, sejumlah orang Belanda yang berkerja pada pemerintah dan perusahaan yang harus dilindungi, juga sebuah Rumah Sakit Tentara dan Zending.

Guna memenuhi tambahan tenaga militer, Belanda sibuk dengan mobilisasi. Pemerintah mengaktifkan dan melatih milisi-milisi seperti *Koninklijke Nederlands Indische Leger* (KNIL), *Landswacht*, *Stadswacht* (Pengawal Kota), *Jeugd Oefen Corps* (JOC), *Algemene Vernielings Corps* (AVC), *Lucht Beschermings Dienst* (LBD), VOC (*Vrijwillingers Oefen Corps*=Barisan Sukarela). Mobilisasi ini terjadi di tiap-tiap kota seluruh Hulu Sungai dan sebagai pusatnya di Banjarmasin. Mereka mengadakan latihan perang-perangan sehingga Belanda betul-betul sudah siap menghadapi kedatangan Jepang.⁸

JOC (*Jeugd Oefen Corps*) merupakan bagian dari *Stadswacht* yang beranggotakan siswa-siswa dari sekolah MULO Banjarmasin. *Stadswacht* dipimpin oleh J.A.T. Van Walsem, guru sejarah pada sekolah MULO yang dalam milisi berpangkat *kapiten*.⁹

Belanda juga memperbaiki Lapangan Terbang Ulin yang telah dibangun pada tahun 1936. Lapangan ini diperbaiki dan dipersenjatai dengan senapan mesin Lewis 3 buah, sebagai alat penangkis serangan udara. Selain itu terdapat pula Lapangan Terbang Dayu dekat Buntok, Kandris dekat Ampah dan Lapangan Terbang Kotawaringin.

Dalam tahun 1941, Banjarmasin mendapat kiriman 2 buah mobil panzer untuk keperluan *Stadswacht* tanpa persenjataan. Seluruh penduduk diwajibkan menyerahkan semua senapan berburu, baik yang modern atau buatan. Pasukan Belanda berkeliling mengumpulkan senjata api dan membayar ganti rugi jika diperlukan. Semua senjata ini kemudian dikumpulkan di Banjarmasin dan menjelang perang dibagikan sebagai senjata api, diantaranya termasuk senapan buatan Italia yang dirampas dari Afrika, namun senapan ini kurang baik untuk dipergunakan. Selain itu, pemerintah juga membentuk sebuah pasukan dari suku Dayak yang disebut 'Barito-Rangers' dan dipersenjatai dengan senapan kembar yang telah dikumpulkan.

Untuk mempertahankan wilayah Kalimantan yang terbentang antara Jelai dan Pasir di sebelah timur, Komandan Territorial Halkema hanya memiliki pasukan yang berjumlah berjumlah kurang lebih 250 orang, disamping para milisi, *stadswacht* dan *landswacht* serta polisi agen yang dimiliterisasi. Pemerintah tidak memiliki rencana pertahanan yang tegas dan satu-satunya politik yang akan ditempuh adalah politik bumi-hangus, kemudian masuk ke pedalaman mengadakan

⁸ Ramli Nawawi *et al.*, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Kalimantan Selatan*, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, Banjarmasin, 1991, hal. 11.

perang gerilya. Untuk itu pusat pemerintahan sipil akan dipindahkan ke pedalaman. Mula-mula direncanakan di Kandungan, kemudian diubah menjadi Muara Teweh dan Puruk Cahu.

Menjelang bulan November 1941, berangsur-angsur orang Jepang di Banjarmasin pulang ke negaranya dan sebelum pulang mereka selalu berpesan akan kembali dalam waktu tiga bulan lagi. Ketika Perancis jatuh dan menyerah kepada Jerman, di Asia tentara Jepang berhasil menguasai Indochina. Rencana invasi ke Hindia Belanda tinggal dalam hitungan hari, namun sengaja diulur-ulur waktunya atau disesuaikan dengan terlebih dahulu melihat hasil pengiriman delegasi ekonomi Jepang ke Hindia Belanda dengan sejumlah permintaan bahan strategis yang ternyata tidak dapat diterima Belanda. Ketika perundingan terakhir antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Jepang yang dipimpin Kobajasi gagal, maka kemungkinan perang tak bisa dielakkan.

Untuk menghadapi invasi Jepang ke Kalimantan Selatan, ketiga tokoh pemerintah yang berperan yakni Gubernur, Komandan Territorial dan Komisaris Polisi terkesan tidak memiliki keseragaman politik dan strategi, sehingga membuat keadaan kacau dalam menghadapi keadaan yang semakin genting.

Perbedaan pendapat bukan hanya antara Gubernur dengan Komandan Territorial dan staf-staf mereka tetapi juga antara Gubernur dengan Komisaris Polisi Groen, sehingga yang bersangkutan dicopot dari jabatannya dan hanya diberi tugas membentuk LBD (*Lucht Bescherming Dienst*) atau Dinas Perlindungan Bahaya Udara. Tugas Kepolisian kemudian diserahkan kepada Raden Said Sukanto Cokroadmojo.

Gubernur segera menjalankan wajib sipil bagi wanita-wanita untuk menjadi perawat dan menyiapkan Rumah Sakit Darurat yang sanggup menampung 100 buah ranjang. Lebih dari 100 orang dilatih, termasuk beberapa orang Cina dan sekelompok wanita pribumi. Namun semua ini tidak terlaksana dengan baik, karena semakin meningkat dan mendekatnya serangan Jepang. Di sisi lain hubungan pemerintah dengan induknya di Jawa hanya bisa ditempuh dengan pesawat udara sedangkan hubungan dengan kapal laut nyaris berhenti karena ketakutan akan blokade kapal perang Jepang di Laut Jawa. Keadaan ini mengakibatkan, pemerintah mulai merasakan kekurangan pasokan pangan dan lain-lain.

Pemerintah masih beranggapan, bahwa kekurangan pangan akan dapat diatasi apabila diadakan distribusi pangan di Kalimantan Selatan, namun pada kenyataannya tindakan itu lebih merupakan suatu usaha pencegahan, di tengah-tengah kenyataan kurangnya bahan pangan. Perintah Gubernur pada tanggal 22 Desember 1941 agar dilakukan pemeriksaan persediaan beras dan lain-lain tidak membuahkan hasil, karena pedagang Cina dan Bumiputera dalam minggu-minggu sebelumnya telah memanfaatkan situasi itu untuk menyimpan dan menunggu harga yang lebih tinggi, sehingga beras yang ada pada pedagang maupun di pabrik seolah-olah menghilang. Pemerintah mendatangkan Controleur Quik dengan tugas untuk menyiapkan dan menjalankan stelsel distribusi di Kalimantan Selatan. Karena tak mungkin lagi mendapatkan beras dari Jawa, Quik mencoba mendapatkan beras dari pedalaman.

Dengan mobil dan pengawalan polisi, Quik mengeluarkan uang sebesar f.250.000.- untuk membeli dan mengumpulkan beras di tiap distrik di Hulu Sungai. Selain itu, Ir. Donicie juga ditugaskan pula ke Hulu Sungai dengan uang sejumlah f.100.000.- untuk mengumpulkan beras, namun semua upaya itu sia-sia.

Dalam rangka politik bumi-hangus, Pemerintah Hindia Belanda juga membentuk pasukan AVC (*Algemene Vernielings Corps*) atau Korp Untuk Penghancuran. Tugas mereka adalah merusak dan menghancurkan segala jalan yang kemungkinan dilalui tentara Jepang menuju ke Banjarmasin, seperti lapangan terbang, jembatan-jembatan, jalanan yang dikelilingi rawa. Di Banjarmasin,

⁹ Hasil wawancara dengan M. Suriansyah Ideham.

mereka berencana menghancurkan jembatan Coen, pelabuhan kapal-kapal KPM, gudang-gudang dan lain-lain. Untuk tugas ini diberikan dua buah truk dan sebuah mobil penumpang. Agar dapat merusak lapangan terbang, dibuatlah bom-bom yang berupa silinder seng sepanjang 1 meter dan garis tengah 20 cm serta diisi dinamit sebesar 100 kg.

Perkembangan yang terjadi menjelang serangan tentara Jepang menggambarkan kepanikan dalam Pemerintahan Hindia Belanda di Kalimantan Selatan. Pertentangan antara pemerintah sipil dan militer terus terjadi, sehingga komandan militer terpaksa diganti pada menit-menit terakhir tanpa ada penggantinya.

Di sisi lain, masyarakat Kalimantan Selatan yang telah menderita selama penjajahan Belanda, masih mengingat betul kejadian-kejadian yang lampau, sehingga mereka tidak begitu mendukung persiapan-persiapan yang dilakukan Pemerintah Hindia Belanda untuk menghadapi invasi Jepang, bahkan diantara mereka malah menaruh harapan besar kepada tentara Jepang yang dianggap sebagai saudara tua sebagai pembebas mereka dari dominasi kolonial Belanda.

C. AKHIR PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA

1. Pemerintah Hindia Belanda Menyerah Kepada Tentara Jepang

Setelah kesatuan armada Jepang menggempur Pearl Harbour pada tanggal 8 Desember 1941, maka beberapa jam kemudian Pemerintah Belanda sudah menyatakan perang dengan resmi kepada Jepang dan dengan demikian Belandalah yang paling pertama di antara negara Sekutu yang menyatakan perang kepada Jepang. Selama enam bulan yang pertama Angkatan Perang Dai Nippon maju dengan cepat menuju Nanyo, seakan-akan tidak ada lagi satu kekuatanpun yang dapat membendungnya. Pada tanggal 11 Januari 1942, mereka mulai mendarat di Nusantara, setelah sehari sebelumnya yaitu 10 Januari 1942 Tarakan diduduki dan pada awal Februari 1942 pulau Jawa tempat pemusatan kekuatan Angkatan Perang Pemerintah Kolonial Belanda sudah terkurung.

Secara kronologis dapat dilihat serangan dan pendudukan Jepang di Indonesia sebagai berikut: mula-mula yang di duduki ialah Tarakan pada tanggal 10 Januari 1942, kemudian menyusul Minahasa, Sulawesi, Timor, Balikpapan dan Ambon.¹⁰ Pada bulan Februari 1942, diduduki : Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang dan Bali. Didudukinya Palembang lebih dulu oleh Jepang, mengandung arti strategis yaitu untuk memisahkan Batavia atau Jakarta, sebagai pusat pemerintahan Belanda dan Singapura sebagai pusat pemerintahan Inggris. Singapura jatuh pada tanggal 15 Februari 1942. Dua minggu kemudian yaitu pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang mulai menyerang Jawa, dengan mendarat di Batavia, Indramayu, Juana, Kragen. Kemudian jantung kekuasaan Belanda yaitu Batavia jatuh pada tanggal 5 Maret 1942, Bandung 8 Maret 1942 dan akhirnya Belanda dengan Ter Poorten sebagai panglima tertinggi angkatan darat Sekutu di Jawa bersama Gubernur Jenderal Jhr. A.W.L. Tjarda van Starkenborg Stachower menyerah kepada Panglima Balatentara Jepang Imamura tanggal 9 Maret 1942 di Kalijati Bandung.

2. Proclamatie Legercommandant Nederlands-Indie

Opracht tot Capitulatie atau perintah untuk menyerah dikeluarkan oleh Souchef Generale Staf atas nama Legercommandant/Panglima Angkatan Perang pada tanggal 8 Maret 1942 dan berlaku sejak 9 Maret 1942 pukul 08:00 pagi melalui sebuah proklamasi. Proklamasi ini yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu berbunyi sebagai berikut :

¹⁰ Sjarifuddin, "Sikap Pergerakan Rakyat Menghadapi Pendudukan Belanda di Kalimantan Selatan Periode 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950", Skripsi Sarjana Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, Banjarmasin, 1974, hal. 72.

**PROCLAMATIE LEGERCOMMANDANT
HINDIA BELANDA**

Tentera Nippon soedah dapat memasoeki tanah datar tinggi Bandoeng. Karena kekoeatan Nippon di oedara, segala perlawanan di Bandoeng tidak moengkin diteroeskan, sehingga permoesjawaratan akan memperhentikan peperangan haroes diadakan.

Hoeloebalang Nippon menoentoet akan mengadakan pemitjaraan dengan Toean Goebornoer Djenderal Hindia Belanda dengan selekas moengkin. Permoesjawaratan ini telah dilangsoengkan pada tanggal 8 Maart 1942 dengan mengambil tempat di Villa Isola Lembang Bandoeng.

Hoeloebalang tentera Nippon jang djoega ikoet hadlir dalam permoesjawaratan itoe telah mengadakan permintaan sebagai terseboet di bawah ini dan haroes dikaboelkan semoeanja :

- 1. Menjerah dengan segera,*
- 2. Memperhentikan perlawanan dengan lekas,*
- 3. Menaikkan bendera poetih sebagai tanda telah menjerah,*
- 4. Mengambil segala persendjataan serdadoe-serdadoe dan mengoempoelkan mereka oentoek diserahkan kepada tentera Nippon; serdadoe2 jang mendjaga benteng2 haroes dikoempoelkan sesoedah diambil sendjatanja pada tempat2 jang tentoe dan jg lain ditangsi. Sedang segala alat perang haroes di simpan pada tempatnja dan didjaga.*
- 5. Fatsal2 dari 1 sampai 4 diatas haroes berachir sebelom 9 Maart 1942 djam 12 tengah hari.*
- 6. Djenazah serdadoe2 Nippon dan bangsa Nippon jang mendjadi tawanan serta barang2nja dan bangsa Nippon lainnja haroes dengan lekas diserahkan.*
- 7. Segala peroesahaan, baik dari alat peperangan, sendjata d.s.b. maoepoen dari tanah, perhoeboengan dari keseboeah negeri ketempat lain, gedoeng2 d.s.b haroes dilarang.*
- 8. Perhoeboengan dengan negeri loear haroes dilarang.*
- 9. Gerakan tentera Nippon akan diteroeskan.*
- 10. Djika sjarat2 ini tiada ditoeroet, maka dengan lekas serangan akan dimoelai poela. Soepaja sjarat2 jang terseboet diatas dapat dilakoekan dan keamanan djangan terganggoe, haroeslah dibentoek satoe badan dari pendjaga2 jang diberi persendjataan sebagaimana perloe.*

Pengawal ini haroes dikepalai oleh seorang opsir dan haroes memakai band poetih jang dililitkan pada lengannja dan bendera poetih.

Sesoedah saja memikirkan dalam2 sjarat2 diatas, maka oentoek mendjaga soepaja kesentosaan dan kesedjahteraan ra'jat tiada akan terganggoe terpaksa saja toendoek kepada sjarat2 tadi, dan sekarang djoega saja memberikan perintah kepada Toean akan memperhentikan peperangan dan toendoek kepada sjarat2 tadi beserta mentjari perhoeboengan dengan Hoeloebalang Nippon jang tertinggi dalam ressort ataoe dekat ressort Toean.

Kami minta kepada Toean2 soepaja moelai djam 9 pagi dan selandjoetnja setiap djam dan setengah djam hingga djam 12 tengah hari menjoeroeh siarkan perintah ini dengan radio, telegraaf atau siaran lain jang ada dalam tiap-tiap ressort. Begitoe djoega perhoeboengan dengan hoeloebalang Nippon sesoedah diperoleh, hal ini haroes djoega disiarkan.

Perintah ini berlakoe djoega bagi angkatan laoet Hindia Belanda dan segala Sjahbandar.

*Atas nama Hoeloebalang
Hindia Belanda
Souchef dari Generalenstaf*

D. PENGUASAAN KALIMANTAN SELATAN OLEH TENTARA JEPANG

Balatentara Jepang ini tiba di daerah Kalimantan Selatan melalui dua jalan, yakni bala tentara yang berjalan kaki dari utara, dan yang tiba dengan kapal laut mendarat di Jorong. Pasukan yang berjalan kaki adalah pasukan Angkatan Darat yang berasal dari Balikpapan. Sedangkan pasukan yang melalui jalan laut adalah yang berasal dari kesatuan Angkatan Laut yang tiba di Banjarmasin melalui Pelaihari sekitar 11 dan 12 Februari 1942.¹¹

Tanpa mendapat perlawanan berarti dari pasukan pertahanan Belanda, Jepang telah mendaratkan tentaranya di Balikpapan pada tanggal 24 Januari 1942 dan kota minyak tersebut diduduki oleh tentara Jepang.¹² Setelah Balikpapan jatuh, terbukalah pintu penjelajahannya ke selatan.

Jepang bergerak memasuki Kalimantan Selatan melalui pegunungan Meratus yang kemudian muncul di Muara Uya, bagian paling utara dari Kalimantan Selatan dan berbatasan dengan Kalimantan Timur. Tentara Jepang tiba di Tanjung dengan berjalan kaki dan ada juga bersepeda yang dirampas dari penduduk waktu dalam perjalanan. Jumlah tentara Jepang tersebut banyak dan segar-segar semuanya. Ketika sampai di Tanjung tentara Jepang tersebut mencari Idar, ini disebabkan sejak zaman penjajahan Belanda Idar menjabat sebagai Pambakal atau Kepala Desa. Oleh pimpinan tentara Jepang yang datang itu, Idar diharuskan membantu setiap tentara Jepang melewati kota ini nanti dengan diberi tanda merah dengan tulisan huruf Jepang dalam bahasa Jepang. Tentara Jepang ini hanya berhenti selama tiga hari, pasukan Jepang tersebut meneruskan perjalanan ke Amuntai. Kurang lebih dua minggu kemudian datang lagi rombongan atau pasukan tentara Jepang yang lain menyusul rombongan yang terdahulu. Mereka datang dengan naik kuda, jadi tidak berjalan kaki seperti kedatangan yang pertama. Seperti tentara atau pasukan Jepang yang terdahulu, tentara inipun menemui Idar. Hubungan Idar dengan tentara Jepang inipun berjalan dengan lancar, karena ada ban merah di lengan Idar.

Tentara Jepang tiba di Amuntai secara mendadak, tidak melewati jalan raya, tetapi jalan sungai memakai perahu. Sehari sebelum tentara Jepang ini memasuki kota Amuntai, pemerintah kolonial Belanda membumihanguskan beberapa gudang karet, gudang beras dan hal-hal yang bersifat vital lainnya. Belanda memperkirakan, tentara Jepang yang datang tidak berdaya akibat tindakan pembumihangusan tersebut. Ternyata ketika pasukan Jepang memasuki kota, tentara Belanda, Polisi, Stadswacht dan sebagainya, tidak berdaya sama sekali dan masing-masing melarikan diri dengan membuang senjata ke sungai, sehingga Jepang masuk langsung bisa menyatukan diri dengan masyarakat. Masyarakat pinggiran kota diajak ke kota dan diajak mengangkut barang-barang dan membongkar toko segala bahan makanan, toko pakaian. Dalam hal ini yang menjadi sasaran pembongkaran adalah toko Cina.

Pada waktu itu yang menjadi pimpinan pemerintahan kota Amuntai adalah seorang Adspirant Controleur Belanda. Adspirant ini ditangkap Jepang dan ditembak mati, begitu pula dua orang polisi di muka jembatan Paliwara dan dilemparkan ke sungai.¹³ Pasukan Jepang menggunakan rumah Controleur tersebut sebagai asrama tentara Jepang. Tentara Jepang yang datang ke Amuntai ini mula-mula hanya tiga orang yang menduduki kota Amuntai. Kemudian datang lagi lima orang dan yang terdahulu datang berangkat lagi meneruskan perjalanan ke arah selatan, yaitu Barabai, begitu seterusnya silih berganti hingga sampai ke Banjarmasin.

¹¹ M. Idwar Saleh *et al.*, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, Proyek Penelitian Pencatatan Kebudayaan Daerah (P3KD) Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1978/1979, hal. 142.

¹² Amat Asnawi *et al.*, *op.cit.*, hal. 57.

¹³ Ramli Nawawi *et al.*, *op.cit.*, hal. 12.

Terjadilah kekosongan pemerintahan, karena pemerintah kolonial Belanda tidak ada lagi, sedangkan Jepang belum mengatur pemerintahan, yang ada hanya beberapa orang tentara Jepang saja. Kesempatan tersebut digunakan oleh beberapa orang pencuri, yang terutama menjadi sasaran orang Cina. Orang-orang Cina ada yang lari ke kampung menyelamatkan diri dan di antara mereka ada yang masuk agama Islam.

Berita tentang kedatangan tentara Jepang ini yang didesas-desuskan dalam jumlah yang besar, menimbulkan hati kecut atau takut bagi Belanda yang berada di daerah sebelah selatan. Berita pendudukan kota Amuntai ini menyebabkan kota berikutnya yang lain seperti : Barabai, Kandangan, Rantau, Martapura, membuka pintu seluas-luasnya terhadap kedatangan tentara Jepang. Tidak ada satupun perlawanan yang terjadi.

Pasukan Jepang yang berjalan kaki adalah pasukan Angkatan Darat yang berasal dari Balikpapan dan tiba di Banjarmasin dengan diantar oleh seorang penunjuk jalan dari Banjarmasin yaitu M. Yus'a. Pasukan ini melalui route : Balikpapan – Muara Uya – Tanjung – Kelua – Pasar Arba – Haur Gading – Palimbangan – Amuntai – Kandangan dan sambil merampas kendaraan dari masyarakat, seperti sepeda.¹⁴ Mereka sampai di Banjarmasin pada tanggal 13 Februari 1942.¹⁵ Sedangkan pasukan yang melalui laut adalah pasukan yang berasal dari Angkatan Laut yang tiba di Banjarmasin melalui Pelaihari, sekitar tanggal 11 dan 12 Februari 1942.¹⁶

Baru saja terdengar bahwa kota Amuntai telah jatuh ke tangan pasukan Jepang, maka KNIL dan pemerintah sipil Belanda segera melarikan diri ke daerah Dayak Besar, dan membiarkan seluruh wilayah Kalimantan Selatan jatuh ke tangan Jepang tanpa mendapat perlawanan apa-apa.

Sebagian besar orang-orang sipil Belanda dan Cina mengungsi bersama KNIL dengan kapal ke pulau Jawa. Pada tanggal 8 Februari 1942 berangkatlah rombongan pengungsi terakhir dengan kapal Toba yang diperlengkapi dengan pelampung dan rakit-rakit tambahan untuk dipergunakan apabila ditenggelamkan oleh musuh. Untuk pertama kali rakyat menyaksikan serangan Jepang terhadap Catalina Belanda di atas sungai Barito.

1. Bumi Hangus dan Penjarahan di Kota Banjarmasin

Penerobosan ke Kalimantan Selatan oleh balatentara Jepang lewat darat dan laut yang sangat cepat menuju ke Banjarmasin, menciutkan nyali dan menghapus harapan pemerintah Hindia Belanda.

Jika Walikota Banjarmasin Van der Meulen dan Kepala Javasche Bank Konig berencana menyerahkan kota Banjarmasin kepada Jepang, sebaliknya AVC melakukan pembumihangusan terhadap kota agar tidak dimanfaatkan oleh Jepang.

Pada malam Minggu tanggal 9 dan 10 Februari 1942 kota Banjarmasin menjadi lautan api. Seluruh kendaraan militer rusak dan dijejer di jalan Simpang Sungai Bilu. Jembatan Coen satu-satunya penghubung Jalan Ulin¹⁷ ke pusat kota Banjarmasin, didinamit yang menyebabkan bunyi ledakan dahsyat yang menggetarkan dan terdengar di seluruh kota.

Sebelum kota Banjarmasin diserahkan, terlebih dahulu dibumihanguskan total oleh AVC. Seluruh persediaan bensin dekat masjid Jami, avtuur di Banua Anyar, bensin di Bagau, karet di gudang-gudang Mac Laine dan Watson di Ujung Murung, bangunan Fort Tatas dibakar habis. Sentral Listrik ANIEM dan pabrik karet Hok Tong dihancurkan sampai tinggal pondasinya saja lagi.

Dalam pemusnahan sarana vital di Banjarmasin untuk mencegah pemakaiannya oleh Jepang ternyata ada diskriminasi, seperti: percetakan *Suara Kalimantan* yang mencetak dan menerbitkan

¹⁴ M. Idwar Saleh *et al., op.cit.*, hal. 142.

¹⁵ Ramli Nawawi *et al., loc.cit.*

¹⁶ M. Idwar Saleh *et al., loc.cit.*

¹⁷ Sekarang Jalan A. Yani

harian yang sangat kritis terhadap pemerintahan Hindia Belanda, hancur berantakan tak bersisa; mesin-mesin cetak dihancurkan total dan bagian-bagiannya dibuang ke sungai. Tetapi *Drukkerij Eendracht* yang mencetak dan menerbitkan koran-koran pro-pemerintah *Borneo Post* yang berbahasa Belanda dan *Bintang Borneo* yang berbahasa Indonesia tidak dirusak, namun turut terbakar dengan toko-toko di sekitarnya yang dibakar oleh AVC.¹⁸

Gudang-gudang Borsumij dan perusahaan-perusahaan Belanda lainnya dibukakan untuk penduduk. Persediaan beras, tepung, dan keperluan hidup sehari-hari pun tidak bersisa, habis dijarah.

Penjarahan meluas pada toko-toko Cina, rumah-rumah Belanda yang telah ditinggalkan. Rumah-rumah Cina ada yang diklaim oleh orang-orang dengan mengecat di dinding muka sebagai pemberitahuan, seperti *Tabri Punya*, *Si Polan Punya*, dan lain-lain.

Bangunan Borneo Museum¹⁹ dimusnahkan, setelah benda-benda arkeolog, dan benda-benda budaya dijarah habis-habisan. Sedangkan di daerah-daerah distrik yang menjadi sasaran penjarahan ialah Gudang-gudang Garam (*Zoutregie*).

Sementara itu Gubernur (Dr. B.J. Haga), sejumlah pejabat-pejabat Belanda, pasukan KNIL, dan keluarga, lari mengungsi dan menunggu di Puruk Cahu, melihat perkembangan selanjutnya. Begitupula ratusan anggota pasukan sekutu dari Belanda dan Inggris mundur ke Pangkalan Bun, menunggu perintah pusat komando.

Amarah pasukan ujung tombak balatentara Jepang dilampiaskan pada *panitia penyambutan*; Burgemeester Van der Meulen, pemimpin redaksi Borneo Post Smits dan seorang Cina, dipancung di atas sisa-sisa reruntuhan Jembatan Coen ketika kedatangan tentara Rikugun Jepang (Angkatan Darat) dari Hulu Sungai pada tanggal 13 Februari 1942. Dokter Gigi Shogenji sangat menyesal dan meratapi tewasnya Smits, karena ia tidak sempat mencegahnya. Smits pernah mengasuh dan membimbing putera-putera Shogenji ketika masih bermukim puluhan tahun di Banjarmasin, sebelum dipanggil pulang oleh Tokyo.²⁰

2. Penyerahan diri Gubernur B.J. Haga dan Pasukan Sekutu.

Gubernur Borneo Dr. B.J. Haga yang saat itu berada di pengungsian di Puruk Cahu telah mengirim utusannya (Kapitein van Epen) ke pimpinan militer Jepang di Banjarmasin pada tanggal 31 Maret 1942 untuk menyerahkan diri. Proses penyerahan diri dan penawanan ini ditulis lengkap dalam reportase di harian Kalimantan Raya No.22 tanggal 1 April 1942, sebagai berikut :

TAWANAN BELANDA DARI POEROEK TJAHOE

Kemaren dalam harian ini telah kita kabarkan, bahwa pada malam Minggoe tadi orang2 tawanan Belanda dari Poeroek Tjahoe dan Moeara Teweh telah tiba disini.

Mereka ini dijemput oleh toean letnan 1 bersama kl. 30 orang soldadoe Nippon, toean Matsuoka sebagai joeroe bahasa dan toean Adji Bagian, kandidat boeat Kiai Moeara Teweh, jg menoempang kapal Ellen bersama dengan kapten Van Epen dari Balatentera Hindia Belanda, jg datang kemari bersama doea orang tawanannja sebagai oetoesan dari militer dan pemerintahan sipil di Poeroek Tjahoe boeat menjerah.

Dari sini kapal Ellen berangkat pada tg. 17 Mrt.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Arthum Artha dan M. Suriansyah Ideham. Lihat pula Harian *Kalimantan Raya* No.1 Tanggal 5 Maret 1942 – Editorial A.A.H dan Podjok Boeng Djenggol.

¹⁹ Lokasi sekarang : Wisma Bhayangkara.

²⁰ Hasil wawancara dengan M. Suriansyah Ideham. Lihat pula Sjarifuddin, *op.cit.*, hal. 77.

Ditengah djalan sepandjang Berito, kapal Ellen jg membawa tentera Nippon itoe mendapat samboetan jg gembira dari rakjat sepandjang soengai itoe, malah tidak loepa2 rakjat membawakan boeah tangan, djika kebetoelan kapal itoe mampir dikampoeng2, serta dimana2 diadakan sedikit keramaian oleh rakjat, jalah sebagai menyoendjoekkan kepada wakil Pembesar Militair Nippon itoe, bahwa rakjat amat bersoekea ria dengan kedatangan Nippon dinegeri ini.

Segala pernjataan dari rakjat itoe oleh toean letnan disamboet dengan manis, malah segala boeah tangan rakjat itoe dibalas dengan hadiah wang.

Sementara itoe dalam perdjalanannja, sebagai Boentoek diperiksai djoega tentang kekaloetan negeri, teroetama berhoehoeng dengan perampokan terhadap kas negeri.

Pada tg. 21 Mrt kapal Ellen sampai di Moeara Teweh, dimana telah menjerahkan diri sebagai tawanan, kontelir van der Kooij, Philipsen bekas sekretaris Dewan Bandjar, ten Over dan de Jong.

Kemoedian kapal meneroeskan perdjalanannja ke Poeroek Tjahoe, sebab disanalah bertempatkan pertahanan Belanda jg paling achir di negeri ini, dan dimana djoega terdapat pemerintahan sipil jg dikepalai oleh goebernoer dr. B.J. Haga.

Tiba di Poeroek Tjahoe tg. 24 Mrt, dimana disamboet oleh bekas sekretaris Mr. den Hartogh dan bekas kontelir van der Linden, jg kemoedian membawa toean letnan bersama tenteranja keroemahnja kontelir.

Disana soedah menantikan beberapa orang Belanda dari fihak sipil dan militer, jg masing2 membawa kartoenna, dimana dinjatakan apakah fihak militer ataoe fihak sipil. Poen bekas goebernoer Haga dioendang datang.

Selesai pemitjaraan disini, maka toean Letnan bersama stafnja pergi kebenteng militer, jalah oentoek memeriksai keadaan tangsi, sendjata bersama pelornja dan soldadoe2 dari Hindia Belanda, jang berbaris dengan hormatnja.

Sesoedah habis pemitjaraan disini maka kembalilah kekantor kontelir, dimana lantas dipanggil fihak pemerintahan sipil, jang di kepalai oleh goebernoer sendiri.

Pandjang lebar pemitjaraan disini, diantaranya tentang tawanan jg ada di Pangkalan Boen, jang djoega soedah menjerah, akan tetapi ingin mengetahoei bagaimana djalan oentoek ke Bandjermasin.

Achirnja dengan 9 boeah kapal dan kapal motor bersama gandengannja telah bertolak dari Poeroek Tjahoe, dengan memoeat 103 orang militer Belanda dan Indonesia, dan 25 orang dari pemerintahan sipil, berikoet djoega njonjah2 dan anak2, bersama perbekalannja baik makanan, minoeman dan rokok2 jg mendjadi barang rampasan.

Sementara kapal "Ellen" sendiri penoeh memoeat berbagai sendjata peperangan dengan mesioenja.

Goebernoer bersama njonjahnja mendapat tempat jang teristimewa, hingga tidak bertjampoer baoer dengan lain2 tawanan, dimana mengoendjoekkan bagaimana penghargaan dari fihak Nippon pada tawanannja.

Sesampai disini pada malam 28/29 tadi keesokan harinja lantas segala tawanan itoe dioendjoekkan tempatnja masing2, jaitoe tawanan militer dibahagian militair hospitaal, jaitoe sisanja dari benteng Fort Tatas, dan fihak pemerintahan sipil di roemah2 dari opsir di bahagian belakang, diantaranya djoega terdapat goebernoer bersama njonjahnja.

Sekian verslag ringkas dari tawanan di Poeroek Tjahoe, jg berarti habisnja perlawanan dinegeri ini.²¹

²¹ Kalimantan Raya No.22 tanggal 1 April 1942.

Begitu pula seorang perwira Belanda dan dua orang perwira Inggris dari Pangkalan Bun datang menghadap pembesar militer Jepang di Banjarmasin, untuk melaporkan dan menyatakan takluk dari 756 orang tentara Sekutu terdiri dari tentara Belanda dan Inggris.

Dari Sampit tiba pula di Banjarmasin dalam dua gelombang 150 (seratus lima puluh) dari pasukan Inggris dari Serawak yang sebagian besar bangsa India. Seorang bintara dari KNIL --- sersan Matolisi--- termasuk pula dalam rombongan tawanan yang diangkut dengan kapal Borsumij tanpa kawalan tentara Nippon. Dengan demikian, tamatlah sudah sejarah pemerintahan Hindia Belanda di wilayah Borneo ini.²²

3. Pembersihan Komplotan Anti Jepang

“Seluruh Kepala Komplotan Dihukum Tembak Mati”, demikianlah headline di halaman muka harian Borneo Simboen No.324 Tanggal 21 Desember 2603 (1943). Dengan terinci pembesar militer Angkatan Laut yang menguasai Borneo menjelaskan dan ditulis di satu-satunya media cetak ketika itu.

Komplotan itu ialah konspirasi antara tawanan sipil, tawanan militer, dengan pihak luar yang anti Jepang dan mengharapkan segera kembalinya pemerintahan Belanda-Hindia Belanda. Gerakan ini dipimpin oleh B.J. Haga ---Gubernur Gewest Borneo dalam tawanan. Duapuluhlima (25) pembantu utamanya, di antaranya satu (1) orang eks-Assistent Resident, dan sembilan (9) orang eks-Controleur dalam tawanan, isteri Gubernur dan isteri salah satu controleur mengatur di *dalam*. Anggota-anggota komplotan yang bergerak di *luar* terdiri dari sejumlah pegawai aktif, antara lain orang Manado Ir. Makaliwy dan Dokter Soesilo, seorang ahli malaria dan adik dari Dokter Soetomo pendiri Boedi Oetomo, dan sejumlah orang-orang partikelir : Tionghoa dan Arab.

C.M. Vischer, seorang warga Swiss, yang memimpin rumah sakit Bazelsche Zending dan Dokter Soesilo memimpin bagian spionase dari komplotan ini. Z.C. Reischert, seorang jururawat wanita warga Belanda yang diberi kebebasan untuk merawat tawanan sipil dan militer menjadi penghubung meneruskan informasi yang diperoleh oleh anggota di *luar* melalui hubungan radio dengan sekutu.

Di *luar* dipersiapkan beberapa satuan pasukan: pasukan Belanda-Indo, pasukan Manado, dan pasukan Tionghoa, masing-masing mempunyai komandan. Kesatuan-kesatuan ini mempunyai persenjataan yang cukup, yang disembunyikan di rumah-rumah orang Tionghoa. Kesatuan-kesatuan ini direncanakan bersama-sama tawanan sipil di bawah Haga, dan tawanan militer di bawah Kapitein J.A.T van Walsem, menyambut dan membantu pasukan sekutu yang akan merebut kembali Borneo Selatan.

Adanya komplotan ini sudah lama tercium oleh pimpinan balatentara Jepang. Pada subuh 10 Gogatsu 1603 (10 Mei 1943) anggota-anggota komplotan di *luar* dididuk, kemudian pada pertengahan Hachigatsu (Agustus), B.J. Haga dan kawan-kawan ditangkap pula. Dalam empat (4) kali pencidukan lebih dari (200) dua ratus orang ditahan.

Penguasa militer Jepang menyesalkan tindakan B.J. Haga dan para tawanan itu, walaupun sebagai tawanan mereka telah diperlakukan dengan baik sesuai peraturan internasional. Haga tertipu oleh propagandanya Amerika dan Inggris. Eksekusi dilakukan pada 20 Desember 2603 (1943) setelah menjalani proses peradilan Angkatan Laut.²³

4. Komplotan di Borneo Barat

²² Harian Kalimantan Raya No.22 tanggal 1 April 1942.

²³ Borneo Simboen No.324 Tanggal 21 Desember 2603 (1943).

Maklumat Angkatan Laut tanggal 1 bulan 7 Syowa 19, antara lain berbunyi dan terkutip sebagai berikut :

“ Salah satu pasukan Angkatan Laut di Pontianak yang sejak dahulu mengetahui tentang komplotan melawan Nippon yang sangat besar ukurannya di daerah Borneo Barat, Pontianak Singkawang dan sekitarnya sebagai pusatnya, senantiasa meneruskan pengintipan dengan saksama, hingga pada Subuh tanggal 23 Jugatsu tahun yang lampau (23 Oktober 1943) melangsungkan penangkapan-penangkapan besar yang pertama, dan pada Subuh tanggal 24 Ichigatsu tahun ini (24 Januari 1944) diulangi penangkapan-besar sekali lagi.....”

“ Oleh karena itu baru-baru ini dalam sidang Majelis Pengadilan Hukum Ketentaraan Angkatan Laut, Kepala-kepala komplotan serta lainnya telah dijatuhkan hukuman mati, maka pada tanggal 28 Rokugatsu (28 Juni 1944) mereka pun ditembak mati.”

Berbeda dengan komplotan Haga, maka komplotan Pattiasina/Syarif-Muhammad-Alkadri memiliki:

1. Ambisi kaum pergerakan untuk mendirikan Negara Rakyat Borneo Barat yang mengemuka setelah balatentara Jepang menduduki Borneo Barat ini.
2. Tidak melibatkan tawanan.
3. Para Dokoh-lah²⁴ yang ikut serta ke dalam komplotan karena khawatir akan dihapus, jikalau terbentuk Negara Rakyat Borneo Barat.

Dari 47 (empatpuluh tujuh) pimpinan komplotan, 12 (duabelas) yang utama terdiri dari 5 orang pegawai pemerintah (a.l. J.E.Pattiasina, Guncho Raden Nalaprana), 2 orang dari Dokoh (a.l.Syarif Muhammad Algadri, Pangeran Adipati), 3 orang pengusaha bangsa Tionghoa (a.l. Oei Siap Soen), 1 orang mantan pegawai orang Tionghoa (Oen Tjioe Kie), dan seorang isteri pegawai (Ny.Amalia Roebini).

Ir.Makaliwy dan Dokter Soesilo dari komplotan Haga, selalu menghubungi tokoh-tokoh komplotan Borneo Barat ini pada saat tugas dinas mereka ke Pontianak.

E. PEMERINTAHAN PENDUDUKAN JEPANG

1. Badan-badan Pemerintahan Peralihan.

Balatentara Jepang pada saat memasuki Borneo Selatan, yakni Rikugun atau Angkatan Darat lewat Muara Uya-Tanjung, dan Kaigun atau Angkatan Laut lewat Jorong Pelaihari, selalu menemui Districthoofd (Kiai) dan memerintahkan pejabat pemerintah ini agar melanjutkan pemerintahan seperti biasa di distriknya.

Akan tetapi perintah Jepang tidak sepenuhnya ditaati, karena sebagian controleur dan pejabat-pejabat bangsa Belanda/Indo Belanda, ada juga pejabat-pejabat/pegawai-pegawai negeri Bumiputera ada yang meninggalkan posnya. Untuk mengisi vakumnya kekuasaan pemerintahan di daerah-daerah yang ditinggalkan pejabat-pejabat Hindia Belanda, maka oleh tentara Jepang dibentuklah pemerintah-pemerintah *peralihan*.

Di Banjarmasin dibentuk Central Pimpinan Pemerintah Sipil (PPC) yang dipimpin oleh tokoh-tokoh pemerintahan dan masyarakat: Pangeran Musa Ardikesuma, Mr.Roesbandi, dan Dokter Sosodoro Djatikusumo, yang diberi pangkat Ridzie, setingkat Residen, dilengkapi dengan sebuah Badan Penyiaran dan Propaganda di bawah pimpinan S.Hardjosoemartojo dan Hadharijah M.

Di distrik-distrik terbentuk juga badan-badan seperti PPC : dengan berbagai macam nama, seperti Komite Keselamatan Rakyat Indonesia, Pemeliharaan Keamanan Oemoem, Komite Penjaga

²⁴ Dokoh = eks-kerajaan-kerajaan kecil yang telah dilandschapkan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Keamanan Oemoem, Dewan Perwakilan Rakyat, dengan beragam susunan dan personalia. Ada pegawai-pegawai pemerintahan, ada perkumpulan-perkumpulan, dari bermacam-macam profesi, sebagian ada yang berambisi kedudukan di pemerintahan.

PPC Barabai, umpamanya, menyambut kunjungan W.Okamoto pimpinan pemerintahan militer, yang didampingi oleh Shogenji dan Jus'a, dengan unjuk rasa dari ribuan penduduk, yang menuntut supaya Kiai Raden tidak ditugaskan kembali di Barabai. Demikian pula dengan PPC Kandungan yang menolak kembalinya Kiai Merah Nadalsyah.²⁵

Badan-badan pemerintahan *peralihan* ini dengan sendirinya hapus setelah tersusun suatu Pemerintahan pendudukan Jepang lengkap dengan perangkatnya.

2. Borneo Dibawah Pemerintahan Kaigun

Pada masa pendudukan Jepang, bekas wilayah Hindia Belanda diperintah oleh Pemerintah Militer, yang menurut istilah resminya disebut Balatentara Nippon. Menurut Undang-Undang No. 1, tanggal 7 Maret 1942, kekuasaan militer dan segala kekuasaan yang dulu dipegang oleh Gubernur Jenderal, pada masa pendudukan Jepang dipegang oleh dua Angkatan Perang Jepang, yaitu : Angkatan Darat atau Rikugun dan Angkatan Laut atau Kaigun, dengan wilayah,²⁶ yaitu : Jawa dan Madura, dengan pusat Batavia, di bawah kekuasaan Rikugun. Sumatra, dengan pusat Bukittinggi, tetapi kemudian digabungkan dengan Singapura, di bawah kekuasaan Rikugun. Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian dengan pusatnya Makassar, dibawah pimpinan Kaigun.

Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan menyebut Angkatan Darat atau Rikugun "Cap Bintang" dan Angkatan Laut atau Kaigun "Cap Jangkar". Kedua angkatan perang ini yaitu Rikugun dan Kaigun, selalu kelihatan ada persaingan, dalam arti mengambil hati rakyat yang diduduki atau dijajah, lebih-lebih waktu perang hampir berakhir. Semua ini berada di bawah komando Panglima Besar, yang berkedudukan di Saigon.²⁷

3. Dari Pemerintahan Militer ke Pemerintahan Sipil.

Pada 12 Februari 1942 Kota Banjarmasin diduduki oleh Balatentara Jepang dan sejak waktu itulah keadaan perang atau *Staat van Oorlog* yang ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda berlanjut dengan Keadaan Perang dan Pendudukan atau S.O.B (*Staat van Oorlog en Beleg*) oleh Jepang. Dalam bahasanya, Jepang disebut Dai Nippon atau Nippon Raya.

W.Okamoto, seorang perwira balatentara Nippon yang tugas utamanya memimpin segala urusan kemiliteran di daerah ini, yang untuk sementara merangkap mengelola urusan-urusan sipil, harus melanjutkan tugasnya ke medan perang di lain kawasan dalam perang Asia Timur Raya "Dai Toa Senso".

Maka dikirimlah dari Tanah Air, Omori yang ahli dalam pemerintahan. Sejak awal Maret 1942 pejabat ini mulai memulihkan pemerintahan sipil. Dia dibantu oleh Shogenji yang sebelum pecah perang Pasifik telah puluhan tahun bermukim di Banjarmasin sebagai dokter gigi.²⁸

Dalam keadaan perang dan pendudukan, harus dipahami bahwa pemerintahan sipil tetap dibawah kendali militer.

Sebelum ada aturan-aturan baru, maka Badan-badan Pemerintahan Sipil dalam daerah Borneo Selatan harus masih menjalankan dan mematuhi segala peraturan dan larangan yang berlaku dalam Pemerintahan Hindia Belanda, yakni :

²⁵ Harian *Kalimantan Raya* Nomor-nomor: 9 Tanggal 14 Maret 1942, 10 Tanggal 16 Maret 1942, 13 Tanggal 20 Maret 1942, 24 Tanggal 3 April 1942.

²⁶ Sjarifuddin, *ibid.*, hal. 73.

²⁷ Sjarifuddin, *ibid.*, hal. 74.

²⁸ Harian *Kalimantan Raya* Nomor 21 Tanggal 31 Maret 1942, Editorial.

- a. Semua undang-undang dan aturan-aturan atau larangan-larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Belanda dahulu tetap berlaku dan dijalankan dalam daerah Borneo Selatan, terkecuali urusan-urusan itu masih dipegang oleh pimpinan tentara Nippon ataupun telah diubah atau diganti oleh Kepala dari Pemerintahan Sipil dalam daerah Borneo Selatan;
- b. Yang dimaksud dengan undang-undang dan aturan-aturan atau larangan-larangan yang dimaksud pada butir a di atas, yaitu yang telah dimuatkan dalam *Staatsblad*, *Bijblad* serta *Verordeningen en Keuren van Politie* dari Resident Borneo Selatan dan Timur, *Banjar Raad* dan *Gemeenteraad Banjarmasin* terkecuali yang bersangkutan dengan keadaan perang.²⁹

4. Wilayah Pemerintahan

Borneo Selatan (*Minami Borneo*) ditetapkan sebagai Syu³⁰ terbagi dalam 3 (tiga) Bun³¹ yaitu Hulu Sungai, Banjarmasin, dan Kapuas Barito Bun terbagi dalam Fuku Bun³² yang terbagi lagi dalam Gun.³³ Gun terbagi dalam Fuku Gun.³⁴

Yang dikenal oleh rakyat, karena berurusan langsung ialah Gun yang dikepalai oleh seorang Gun-cho yang masih disebut Kiai atau Kiai Kepala, pula Fuku Gun yang dikepalai oleh seorang Fuku Gun-Cho atau Asisten Kiai. Kalau waktu Hindia Belanda seorang Kiai Kepala atau Kiai diawasi oleh seorang Controleur/Kontelir dan Adspirantnya, maka Jepang pun menempatkan seorang Bunken Kanrikan serta seorang Bunken Kanrikan Dairi. Sebuah Fuku Gun meliputi sejumlah Son atau Kampung dipimpin oleh Son-Cho atau Kepala Kampung/Pembakal.³⁵

Dalam perkembangan selanjutnya Kumi atau Rukun Tetangga menjadi bagian struktural pula dalam pemerintahan; lembaga ini dipimpin oleh Kumi-Cho.

5. Tuntutan Pakat Dayak.

Pakat Dayak bercita-cita agar urusan pemerintahan di daerah Dayak dipimpin oleh Putera Dayak pula. Sebelum Jepang menaklukkan Hindia-Belanda, permasalahan ini telah diajukan kepada Commissie Visman.³⁶ Cita-cita ini diteruskan kepada pemerintah Nippon, dengan memohon, dalam pengisian pemerintahan sipil cita-cita itu dapat terwujud. Menurut sejarahnya, Kepala Distrik Dusun Timur sejak lama dipegang oleh Putera-putera Dayak, seperti Temanggung Jaya Karti, Temanggung Raden Suta Ono, Raden Suta Negara, Kiai Guntik, Demang Gaman hingga kira-kira tahun 1921.

Kepala Balatentara Nippon menjawab keinginan Pakat Dayak itu dengan :

*" Permohonan Pakat Dayak itu kita akui memang baik, tetapi kita amat menyesal, sebab tidak dapat mengabulkannya dengan segera, karena menurut aturan Nippon, segala Guncho dan Kho Guncho yang telah diangkat itu, tak boleh diubah dengan segera. Dari sebab itu permohonan Pakat Dayak tersebut, pada waktu yang akan datang saja, akan diperhatikan dan diatur, sehingga cocok dengan kemauan dan keinginan rakyat Dayak..."*³⁷

²⁹ Harian *Kalimantan Raya* Nomor 21 Tanggal 31 Maret 1942, Berita Kota.

³⁰ Pada masa Hindia Belanda serupa dengan Residentie

³¹ Pada masa Hindia Belanda serupa dengan Afdeling

³² Pada masa Hindia Belanda serupa dengan Onderafdeling.

³³ Pada masa Hindia Belanda serupa dengan District (Kabupaten).

³⁴ Pada masa Hindia Belanda serupa dengan Onderdistrict (Kecamatan).

³⁵ Harian *Kalimantan Raya* No.56 Tanggal 12 Mei 1942

³⁶ Komisi Visman. Dr.F.H.Visman anggota Dewan Hindia (*Indische Raad*) mengetuai *Commissie tot Bestudeering van Staatsrechterlijke Hervormingen* (Panitia Penyelidikan Perubahan-perubahan Ketatanegaraan) di Indonesia, yang dibentuk tanggal 14 September 1940. Panitia ini telah pula mengunjungi Banjarmasin pada tahun 1941 untuk mengumpulkan pendapat dan masukan tokoh-tokoh masyarakat.

³⁷ Harian *Kalimantan Raya* No.40 Tanggal 22 April 1942.

6. Struktur Organisasi Pemerintahan Minseibu.

Borneo Selatan, yang dalam istilah pemerintahan disebut Minseibu Banjarmasin Syuchosho dikepalai oleh Syuchosho-Cho, yang langsung membawahi: Saibansho (Pengadilan) termasuk Tengoku (Penjara) dan Keisatsusho (Kepolisian). Syuchosho-Cho dibantu oleh Kepala-kepala 'Dinas', antara lain :

1. Doboku/Pekerjaan Umum
2. Norinbu/Pertanian
3. Shokobu/Perdagangan dan Perusahaan
4. Komubu/Pelayaran dan Pabeau
5. Zeminko/Pajak
6. Eiseibu/Kesehatan
7. Suitobu/Kas Negara
8. Kaikeibu/Komptabilitait
9. Gakumubu/Pengajaran
10. Somubu/Sekretariat

"dinas-dinas" tersebut yang terbagi pula dalam bagian-bagian/urusan-urusan yang disebut Kakari.³⁸

Dalam suatu Konferensi Besar (sekarang disebut Rapat Kerja atau Rapat Dinas) yang terutama dihadiri oleh para Gun-Cho yang berjumlah 17 orang (Kelua, Tabalong, Alabio, Amuntai, Barabai, Negara, Amandit, Rantau, Tanah Bumbu, Pulau Laut, Pelaihari, Martapura, Banjarmasin, Pangkalan Bun, Dusun Tengah, Sampit, dan Kapuas). Sejumlah Instruksi dari Minseibu Banjarmasin Syuchoso-Cho dibahas, dijelaskan, dan diterima untuk dilaksanakan.

Lembaga Banjar Raad yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda dibubarkan dan urusan-urusan yang dahulu dikerjakan oleh lembaga ini menjadi urusan dalam Fuku-Bunsho-Fuku-Bunsho lain-lain di luar daerah Banjar Raad, dan diambil alih oleh Kantor Besar (Minseibu) dan kantor-kantor/dinas lain.³⁹

7. Banjarmasin-Syi

Sejak 1 Januari 2604 (1944) Banjarmasin-Syi (Pemerintah Kota Banjarmasin) dibagi menjadi 3 (tiga) Ku, masing-masing dikepalai oleh seorang Ku-Cho ; menurut letaknya, ketiga Ku itu diberi nama :

- a. Higashi-Ku di sebelah Timur
- b. Nisi-Ku di sebelah Barat
- c. Kita-ku di sebelah Utara.

Kampung-kampung Anjir Serapat dan Tabunganen, tidak termasuk dalam wilayah Banjarmasin-Syi, sedangkan Kampung Pangambangan dan sebagian dari Kampung Berangas dimasukkan ke dalam wilayah Banjarmasin-Syi. Dengan perubahan ini penduduk Banjarmasin menjadi 110.000 (seratus sepuluh ribu) jiwa yang bermukim dalam 19 (sembilan belas) Son/Kampung.⁴⁰

Awal tahun 2604 (1944) menjelang pembentukan Banjarmasin Syi-Kai⁴¹ telah ditetapkan cara-cara pemilihan anggota/Gi-In Banjarmasin Syi-Kai "Zintai Syi-Kai Gi-in Senkyo-Rei".

Kutipan dari beberapa Pasal dari Senkyo-Rei tersebut :

Pasal 54 :

³⁸ *Harian Kalimantan Raya* Nomor 53 Tanggal 8 Mei 1942.

³⁹ *Harian Kalimantan Raya* Nomor 53 Tanggal 8 Mei 1942, Nomor 56 Tanggal 12 Mei 1942.

⁴⁰ *Harian Kalimantan Raya* Nomor 342 Tanggal 11 Januari 1944.

⁴¹ Dalam pemerintahan Hindia Belanda disebut Gemeenteraad/Dewan Haminta.

Mereka yang membuat kejahatan-kejahatan seperti tersebut pada satu diantara kalimat-kalimat dibawah ini berhubung dengan pemilihan, terancam dengan hukuman setinggi-tingginya 6 (enam) bulan lamanya atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya f200.- (duaratus rupiah) :

1. Mereka yang telah memberi suap atau telah berjanjinya
2. Mereka yang telah menerima suap atau telah dijanjinya
3. Mereka yang memberikan perantaraannya atau ajakannya berhubung dengan kejahatan-kejahatan pada kalimat-kalimat dimuka “

Pasal 55 :

“Keuntungan-keuntungan yang diperolehkan orang pada pasal dimuka, dirampas. Jikalau semuanya atau sebahagiannya tidak dapat dirampas, maka jumlah uang yang sama banyaknya dengan keuntungan-keuntungan yang tidak dapat dirampas, harus ditagih”.⁴²

Pada Jum'at 14 Maret 2604 resmi dibuka persidangan perdana dari Banjarmasin Syi-Kai. Disamping pidato sambutan dari Banjarmasin Shi-Cho (Walikota) juga berbicara beberapa Anggota atau Gi-In, seperti Dokter Sosodoro Djatikusumo. Persidangan Syi-kai itu menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain :

1. Pemerintah akan dapat menyampaikan kehendaknya kepada rakyat
2. Sebaliknya rakyat dapat menyampaikan kesanggupannya dan soal tentang keadaannya kepada Pemerintah
3. Selain daripada itu Syi-Kai mempunyai kewajiban menjadi pendorong untuk menggerakkan, mempersatukan dan menyusun tenaga dari segenap lapisan penduduk Banjarmasin.

Di dalam masa peperangan ini kami harus menyesuaikan pembangunan Banjarmasin ini dengan keadaan dimasa peperangan dan juga menurut garis besarnya pembentukan Asia Timur Raya.⁴³

8. Lembaga Legislatif untuk Borneo Selatan.

Pada 27 Maret 2604 dibuka sidang-perdana dari Borneo Minseibu Chokatsu Kuiki Syu-Kai yaitu Dewan Borneo Selatan, yang oleh pers ketika itu dinilai sebagai *“Peristiwa Tjemerlang dalam Pembentukan Borneo Baroe”*. Dewan ini diketuai oleh Gi-Cho pembesar Nippon, Tuan Yamaji Taisya, dengan anggota-anggota Gi-In, antara lain: Merah Nadalsyah, H.Amin, Moesaffa, Thio Thiauww Hong, Asj'ari, Mr.Roesbandi, Edoeard Kamis, Anang Imran, H.M.Sjukri, H.Oesman Amin, M.H.Tjorong, Andi Djoepri, H.M.Arip, H.Nawawi, Arbain.

Sidang perdana Borneo Minseibu Chokatsu Kuiki Syu-Kai mengeluarkan dan menetapkan :

- a. Pernyataan syukur kepada Bala tentara Dai Nippon dan bekerjasama
- b. Memperlipatgandakan bahan-bahan keperluan penghidupan dengan usaha sendiri
- c. Meneguhkan susunan bekerja rajin
- d. Mendidik dan melatih penduduk dengan bersungguh-sungguh.⁴⁴

9. Pemekaran Wilayah Borneo Selatan

Mulai Juni 2604 (1944) Susunan Pemerintahan Borneo Selatan diperluas dan diperkuat. Borneo Minseibu⁴⁵ Chokatsu Kuiki dikembangkan menjadi beberapa wilayah, yakni:

⁴² Harian *Kalimantan Raya* Nomor 342 Tanggal 11 Januari 1944.

⁴³ Harian *Kalimantan Raya* No.397 Tanggal 15 Maret 1944.

⁴⁴ Harian *Kalimantan Raya* Nomor 408 Tanggal 28 Maret 1944 ,409 Tanggal 29 Maret 1944, Maret 2604, 410 Tanggal 30 Maret 1944, 411 Tanggal 31 Maret 1944.

⁴⁵ Borneo Minseibu serupa dengan propinsi yang pada masa Hindia Belanda dikenal dengan nama Gewest Borneo.

a. Chokatsuiki yang baru dibagi dalam 7 buah Ken, yaitu :

1. Banjarmasin
2. Hulu Sungai
3. Kotabaru
4. Barito
5. Dayak
6. Sampit
7. Kotawaringin

b. Pontianak Syu dibagi dalam 4 Ken, yaitu :

1. Pontianak
2. Singkawang
3. Sintang
4. Ketapang

c. Balikpapan Syu dibagi dalam 2 Ken, yaitu :

1. Balikpapan
2. Samarinda

d. Tarakan Syu dibagi dalam 2 Ken, yaitu :

1. Tarakan
2. Berau.⁴⁶

F. SIKAP RAKYAT TERHADAP PEMERINTAH PENDUDUKAN JEPANG

Pada mulanya rakyat di Kalimantan Selatan mengharap-harap kedatangan tentara Jepang adalah untuk mengusir Belanda sebagai penjajah dari Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan antara lain karena propaganda-propaganda dari radio Jepang baik berupa digunakannya lagu Indonesia Raya, maupun semboyan-semboyan yang dikumandangkan Jepang lainnya, seperti: Asia untuk bangsa Asia, Jepang pemimpin Asia, sehingga ketika balatentara Jepang tiba di Banjarmasin, rakyat Banjarmasin menyambutnya dengan suatu upacara.

Yang memelopori upacara penyambutan tersebut adalah tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh pergerakan yang tergabung dalam Partai Indonesia Raya atau Parindra pada saat itu. Penyambutan atau upacara penyambutan tersebut dipimpin oleh Mr. Rusbandi, Hadhariyah M. dan Anang Acil. Ada beberapa tokoh yang tidak ikut mengadakan penyambutan seperti A.A. Hamidhan yang beranggapan politik militerisme Jepang hanya kedok yang bersifat sementara bersikap baik terhadap jajahan baru ini. Ia masih menunggu sikap apa yang akan diambil.

Setelah melihat tindakan-tindakan Jepang, apalagi setelah mereka dapat mengkonsolidasikan kekuatan mereka dan mengambil kegiatan pemerintah dari Panitia Pemerintahan Sipil (PPC) yang dipimpin oleh Mr. Rusbandi, sikap yang tadinya mendukung⁴⁷ lambat laun berubah menjadi sikap acuh tak acuh atau masa bodoh dan pura-pura tidak mengetahui segala sesuatu.

Perubahan rakyat ini berbarengan pula dengan perubahan sikap dari tentara pendudukan Jepang yang menteror mental rakyat dengan penangkapan-penangkapan dan membunuh orang-orang yang hanya dicurigai tanpa suatu proses pengadilan atau peradilan. Akibat takut kepada kekejaman Jepang, rakyat kemudian bersikap masa bodoh dan acuh terhadap situasi yang terjadi di lingkungannya. Demikian juga dengan sikap para pemimpin dan tokoh masyarakat serta golongan terpelajar. Mereka ini bersikap menerima saja keadaan yang terjadi dan mau tidak mau

⁴⁶ *Harian Kalimantan Raya* Nomor 465 Tanggal 2 Juni 1944.

⁴⁷ M. Idwar Saleh, *op.cit.*, hal. 146.

mereka terpaksa menerima tawaran Jepang untuk bekerjasama dengan mereka. Ini disebabkan apabila mereka menolak tawaran dari pemerintah Jepang yang berkuasa pada saat itu, berarti mereka akan berurusan dengan Kempeitai. Mereka ini kebanyakan menjadi pegawai pemerintah Jepang dan dijadikan alat oleh Jepang untuk meningkatkan usaha-usaha pertahanan Jepang. Di Jawa yang padat penduduk orang-orang ini lebih tersembunyi.

Ada sebagian pemimpin yang bersikap ekstrim dan tidak mau dijadikan alat oleh Jepang. Mereka ini meninggalkan daerah Kalimantan Selatan pergi ke pedalaman dan menjadi pedagang di Muara Teweh, Barito, Buntok dan ada pula yang pergi ke pulau Jawa, dimana sikap pemerintah pendudukan Jepang yang dipegang oleh Angkatan Darat atau Rikugun lebih lunak sikapnya dibandingkan dengan Angkatan Laut atau Kaigun yang berkuasa di daerah Kalimantan Selatan.

Karena Jepang mengambil setiap kebutuhannya tanpa memperhatikan kepentingan rakyat yang menjadi pemiliknya, tindakan ini menyebabkan keadaan rakyat di daerah Kalimantan Selatan makin menderita,⁴⁸ dan hal ini terus berlangsung sampai jatuhnya atau kalahnya Jepang ditahun 1945.⁴⁹

G. KEADAAN EKONOMI

Menjelang pendudukan Jepang di Kalimantan Selatan, Pemerintah Hindia Belanda mempunyai persediaan bahan sandang dan pangan yang bertumpuk di gudang-gudang di Banjarmasin. Barang tersebut sebagian kepunyaan Borsumij.

Setelah terdengar bahwa tentara Jepang sudah sampai di Hulu Sungai, gudang-gudang tersebut dibukakan oleh pihak Belanda dan membiarkan rakyat untuk mengangkut dan mengambilnya. Hal ini mengakibatkan ketika tentara Jepang tiba, sebagian besar sudah tidak ada lagi sedang sisanya dikuasai oleh Jepang dari pasar bebas seperti barang-barang kelontongan juga diambil.

Keadaan ekonomi hancur akibat peperangan. Dengan susah payah pemerintah pendudukan Jepang berusaha untuk memperbaikinya. Jepang segera mendatangkan keperluan sehari-hari dari luar daerah Kalimantan Selatan seperti garam, rokok, tembakau dan lain-lain. Barang tersebut didatangkan dari Jawa dan Sulawesi. Keadaan ini tidak berlangsung lama, karena tentara Sekutu mulai mengganggu daerah perairan Laut Jawa. Dengan demikian pengiriman barang tersebut ke daerah Kalimantan Selatan dengan sendirinya terhenti.⁵⁰

Sesuai dengan strategi perangnya, maka pelaksanaan ekonomi daerah pendudukan juga diatur sesuai dengan tuntutan atau keperluan perang. Daerah diharuskan swasembada dan memenuhi kebutuhannya dengan tidak mengharapkan bantuan dari Jepang atau dari pulau-pulau lainnya. Demikian pula dengan kebutuhan perang, Jepang mengusahakan agar dapat dipenuhi setempat.

Dalam bidang ekonomi, Jepang memaksakan monopoli terhadap seluruh produksi, rakyat diharuskan menyerahkan hasil tersebut kepada Jepang dengan istilah pengabdian pada tanah air. Akibatnya banyak barang-barang kebutuhan sehari-hari yang tidak ada. Hal ini memaksa rakyat untuk menemukan bahan pengganti untuk keperluan sehari-hari : minyak tanah dan bensin dibuat dari karet, ban sepeda seluruhnya dari karet tanpa ada ban dalam yang biasa disebut "ban buta", celana dibuat dari goni, makanan pokok diganti dengan ubi kayu dan sagu, kelambu dari tikar dan sebagainya.⁵¹

⁴⁸ M. Idwar Saleh *et al.*, *ibid.*, hal. 147.

⁴⁹ M. Idwar Saleh *et al.*, *ibid.*, hal. 148.

⁵⁰ M. Idwar Saleh *et al.*, *ibid.*, hal. 150.

⁵¹ M. Idwar Saleh *et al.*, *ibid.*, hal. 151.

Peperangan modern memerlukan ekonomi yang kuat. Untuk keperluan tersebut Angkatan Laut Jepang atau Kaigun membangun ekonomi perang agar sama sekali kebutuhan perang dan rakyat tidak tergantung dari impor Jepang. Pimpinan pelaksanaan ekonomi perang ini ditugaskan kepada cabang-cabang perusahaan negara atau kepada lembaga-lembaga ekonomi yang berpusat di Jepang. Perusahaan setempat berbentuk perusahaan terbatas untuk kegiatan ekonomi dan perdagangan dengan fasilitas penuh. Pegawai-pegawainya sebagian besar orang Jepang dengan orang-orang Indonesia sebagai pembantunya.

Pada tahun 1943 telah beroperasi di Kalimantan Selatan sejumlah perseroan terbatas, antara lain :

1. Mitsui Bussan Kaisha untuk urusan gula dan lain-lain.
2. Mitsubishi Kabushiki Kaisha untuk urusan kayu.
3. Toyo Menka Kaisha untuk urusan tekstil
4. Nomura Teindo Kabushiki Kaisha untuk urusan karet dan kayu
5. Borneo Suisan Kabushiki Kaisha untuk urusan ikan
6. Oji Seizi Kabushiki Kaisha untuk urusan pembuatan kertas
7. Borneo Shosensho Kabushiki Kaisha untuk pembuatan kapal
8. Toyota Kabushiki Kaisha untuk pembuatan kendaraan angkutan
9. Kasen Ongkookai untuk urusan pengangkutan sungai
10. Koonan Kaiyoon untuk urusan pengangkutan laut.⁵²

Untuk memenuhi kebutuhan industri perang dan keperluan perdagangan, pemerintah pendudukan Jepang kemudian mendirikan pabrik-pabrik seperti :

1. Pabrik peleburan besi di Gunung Bajuin Ketapang Pelaihari
2. Tambang mangan di Tarini
3. Tambang intan di Rancah Sirang Cempaka
4. Pabrik kertas di Sungai Bilu Banjarmasin
5. Pabrik tekstil di Muara Kelayan Banjarmasin
6. Pabrik keramik di Rantau
7. Pabrik minyak getah di Kandangan.⁵³

Selain itu didirikan pula perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan seperti Makassar Kenkyodjo, Nitetsu dan Ishihara. Perusahaan-perusahaan kecil bergerak di bidang obat-obatan, barang pecah belah. Eigasha bergerak di bidang urusan film, sedangkan Borneo Shimbunsha menerbitkan harian Borneo Simboen. Untuk tenaga khusus, Jepang menggunakan tenaga-tenaga Cina yang telah berpengalaman dalam perusahaan Big Five atau perusahaan mereka sendiri.

Kumiai merupakan suatu gerakan koperasi dipimpin ketat, baik untuk penyebaran barang distribusi, maupun untuk pembelian bahan dari rakyat terutama padi. Tugas pokoknya adalah untuk pengumpulan produksi rakyat yang dikuasai Jepang.

Pembiayaan usaha-usaha ini ditulangkupungungi atau dimodal-utamai oleh Bank-bank Pemerintah. Seperti Taiwan Ginko yang merupakan pengganti Javasche Bank dan Shoomin Ginko pengganti Bank Rakyat. Uang yang diedarkan di daerah ini adalah uang kertas Jepang yang memakai teks bahasa Indonesia, terdiri dari uang kertas pecahan 1 sen sampai dengan 10 rupiah.

Uang logam ditarik dari peredaran. Uang kertas Javasche Bank tetap beredar, tetapi lambat laun hilang sama sekali. Ketika produksi membanjir, barulah dikeluarkan uang kertas ratusan dengan teks Bahasa Indonesia. Sebagian uang ini disedot lagi melalui lottery pemerintah dan

⁵² Ramli Nawawi *et al.*, *op.cit.*, hal. 18.

⁵³ M. Idwar Saleh *et al.*, *op.cit.*, hal. 152.

Asuransi Jiwa Bumiputera. Seluruh perdagangan dikuasai oleh perusahaan pemerintah dan Kumiai, rakyat bergerak di bidang produksi. Semua kegiatan ekonomi ini dijalankan oleh tenaga Jepang, penduduk setempat, orang hukuman, romusha daerah atau romusha yang didatangkan dari Jawa. Penebangan kayu dilakukan secara besar-besaran dengan tenaga manusia. Di pinggir sungai Barito dari pulau Alalak ke hulu atau ke udik sepanjang 10 km segera ditutupi ribuan batang-batang kayu yang dibuat balok atau papan. Pembelian sisa kayu bangunan oleh penduduk hanya mungkin dengan izin Nomura.

Persawahan pasang surut arealnya diperluas dengan tenaga manusia yang amat murah. Di daerah Rantau Kabupaten Tapin ada sungai yang namanya Sungai Jepang atau Sungai Jepang, karena sungai tersebut digali atas perintah Jepang untuk memperbaiki pengairan.⁵⁴

Di Barabai juga penduduk diperintah melakukan kerja gotong royong atau kinrohosi untuk membuat sungai guna mengalirkan air sungai ke daerah persawahan, begitu pula di daerah lainnya di Kalimantan Selatan.

Di Pelaihari yaitu di Tarini dibuka tambang dan pengecoran besi. Dengan cara ini desa-desa segera menghasilkan produksi bahan keperluan pemerintah pendudukan dan sisanya untuk rakyat.

Karet yang merupakan hasil terbesar dari Kalimantan Selatan, selain sebagai bahan perdagangan yang dimonopoli oleh pemerintah pendudukan Jepang, juga digunakan sebagai produksi bahan keperluan sehari-hari. Penggunaan karet untuk keperluan sehari-hari ini hampir merata di seluruh Kalimantan Selatan pada saat itu.

Untuk menjalankan mobil diperlukan bensin, sedangkan bensin pada saat itu tidak ada. Untuk keperluan tersebut digunakan minyak getah atau minyak gatah yang diperoleh setelah di suling, dan dengan minyak getah dari karet ini mobil dapat dijalankan. Keperluan ban sepeda ditanggulangi dengan ban buta yang dibuat di daerah Barabai, yang terbesar di Kayu Bawang.

Di Amuntai karet digunakan untuk membuat sepatu yang biasa disebut sepatu gatah atau sepatu karet. Seluruh bahan sepatu karet ini dari karet atau getah para yang diasap. Sebelum perang pecah kota Amuntai terkenal sebagai kota pembuat sepatu kulit yang terbaik dan sandal kulit. Tetapi ketika pendudukan Jepang kulit sulit dicari, oleh karena itu diproduksi sepatu dari karet, bahkan dengan berwarna yang cukup menarik. Disamping itu dibuat sepatu kulit dari kulit yang disamak sendiri. Tetapi karena cara penyamakannya kurang masak, sehingga setelah dipakai satu bulan sepatunya membesar, karena kulitnya mengembang. Karet juga dibuat pakaian atau bahan pakaian, yaitu dibuat celana dan baju dengan warna yang menarik.

Pada waktu perlombaan baris berbaris Seinendan di Barabai, salah satu regu yang diikuti oleh Kare, seorang pensiunan Patih Barabai, seluruh pasukan beliau berpakaian karet atau berpakaian dengan bahan baku seluruhnya dari karet. Pada masa pendudukan Jepang diproduksi pula sejumlah besar kondom dari karet sebesar 3.000 sehari untuk keperluan orang Jepang. Pembuatannya dilakukan oleh Lamberi Bustani di bawah pengawasan dari Jepang, yaitu pimpinan perusahaan Nomura Hitaki di Pabrik Nomura, Teluk Tiram Banjarmasin.⁵⁵

Perusahaan sabun juga terdapat hampir di setiap kota di kawasan Kalimantan Selatan, umumnya merupakan perusahaan swasta. Di Banjarmasin perusahaan sabun Antara Sukei kepunyaan H.M. Yakub Amin termasuk perusahaan sabun yang berkualitas tinggi. Perusahaan sabun lainnya kepunyaan orang Cina, tetapi kualitasnya agak rendah. Bahan baku sabun dibuat dari bahan yang ada di daerah ini, yaitu abu sabut kelapa dengan minyak kelapa. Garam dibuat

⁵⁴ Ramli Nawawi *et al.*, *op.cit.*, hal. 19.

⁵⁵ Ramli Nawawi *et al.*, *ibid.*, hal. 20.

dari abu pelepah nipah yang banyak terdapat di rawa-rawa di kawasan Kalimantan Selatan, terutama di Banjarmasin.

Pertenunan tradisional digalakkan dalam rangka menanggulangi kekurangan bahan pakaian. Di Alabio terkenal dengan produksi bahan pakaian dari benang yang ditenun. Untuk memperoleh benang ini, memang Jepang telah memerintahkan menanam kapas, juga pernah dikumpulkan benang jala atau benang untuk membuat jala atau luntang, kemudian dilepaskan pitalan benangnya seterusnya ditenun dijadikan kain. Pabrik keramik di Bitahan Rantau, yang buruhnya lebih dari 200 orang dengan pimpinannya orang Jepang. Bahan bangunan, besi cor juga diproduksi.

Perahu sungai, kapal sungai dan kapal laut ukuran samapai 200 ton hasil produksi galangan kapal Koonan Kayoon, di Telaga Biru Banjarmasin. Gerobak-gerobak kayu Made in Toyota dibuat untuk angkutan darat.

Pengangkutan umumnya menggunakan perahu. Dari Banjarmasin diangkut barang-barang ke Hulu Sungai dengan menggunakan kapal sungai dan sampai mencapai Tanjung daerah yang paling utara dari Hulu Sungai. Perdagangan antar kota harus dengan izin. Seorang pedagang kopiah di Barabai, harus meminta izin untuk membawa beledu bahan baku kopiah yang didatangkan dari Amuntai. Yang sangat terlarang adalah perdangan beras, meskipun membawa untuk sekedar keperluan makan saja. Pelarangan membawa beras dari daerah satu ke daerah lain ini yang dalam bahasa daerah utamanya Banjar Batang Banyu disebut dengan istilah “baras bapapat” yang populer pada zaman pendudukan Jepang saat itu. Dari daerah satu ke daerah yang atau dari kota yang satu ke kota yang lain sama sekali dilarang membawa beras dan dijaga serta dirampas oleh petugas Jepang jika ditemukan.

Panen padi tahun 1943/1944 gagal total. Kalau tidak mendapat kiriman dari daerah lain, persediaan hanya cukup untuk 6 (enam) bulan saja. Pemerintah pendudukan Jepang merahasiakan kegagalan panen ini, sambil mengarahkan penduduk untuk menanam singkong, ubi-ubian lainnya untuk menutupi kekurangan tersebut dengan hasil yang baik.⁵⁶ Sayuran harus ditanam, pada halaman yang lapang harus ditanami dengan ubi, sayuran atau singkong atau kacang. Semua hasil tersebut harus dijual pada Kumiai, padahal rakyat sendiri kekurangan bahan makanan. Sejak masa pendudukan Jepang bahan pangan berubah dari beras ke segala macam ubi, sagu atau makanan lain yang mengenyangkan.

Kesulitan korek api, memaksa penduduk membuat api bahan serbuk enau atau lumuh yang dibakar dengan memantikkan atau menggesekkan lempengan baja atau memukulnya pada batu keras yang sudah dipangkas, sehingga menimbulkan bara atau sebuk api yang jatuh ke lumuh sampai lumuh tersebut terbakar.⁵⁷

H. BIDANG SOSIAL BUDAYA

1. Keadaan Sosial

Setelah menduduki seluruh daerah Kalimantan Selatan, Jepang segera mengambil alih seluruh kegiatan di bidang kemasyarakatan. Walau masa pendudukannya relatif singkat, tampak juga ada beberapa perubahan sosial yang telah terjadi selama masa pendudukannya itu. Perubahan ini baik yang bersifat untuk kepentingan yang menunjang pemerintahan dan perang maupun untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Selatan.

Urusan-urusan sosial yang ditangani oleh orang-orang Indonesia yang memegang pemerintahan sipil tidaklah selalu memberikan hasil yang baik kepada rakyat, karena keadaan sosial ekonomi rakyat yang sangat parah. Sejak awal kedatangannya, Jepang membentuk lembaga-

⁵⁶ Ramli Nawawi *et al.*, *ibid.*, hal. 21.

⁵⁷ Ramli Nawawi *et al.*, *ibid.*, hal. 22.

lembaga sosial desa dan kenyataannya lembaga-lembaga ini tidak berfungsi bagi rakyat, hanya menjadi alat pemerintah pendudukan Jepang, seperti rukun kampung atau Tonari Gumi, koperasi-koperasi atau Kumiai.

Usaha pemerintah pendudukan Jepang yang dapat dirasakan masyarakat manfaatnya antara lain di bidang kesehatan. Pemerintah pendudukan Jepang telah membuka rumah sakit di jalan Ulin yang diperuntukkan bagi masyarakat dengan memungut bayaran. Sebagai pimpinan rumah sakit tersebut ditunjuk Dokter Sutan Diapari Siregar.

Untuk mencukupi keperluan obat-obatan digunakan juga obat-obatan tradisional dan dilakukan juga penelitian oleh perusahaan obat-obatan Jepang yang bernama Ken Kyoso Kabushiki Kaisha.⁵⁸ Tempat penelitian di jalan Kalimantan Banjarmasin dan ahli-ahlinya atau tenaga ahlinya kebanyakan orang-orang Jepang.

Jepang memerlukan hasil pertanian dan mereka melihat bahwa di daerah Kalimantan Selatan banyak sekali tanah yang belum digarap, dan Jepang mendatangkan tenaga kerja paksa atau romusha dari Jawa untuk membuka hutan menjadi tanah persawahan, serta untuk mendapatkan kayu yang diperlukan untuk membuat kapal-kapal kayu dan sebagainya. Banyak sekali romusha yang didatangkan dari luar Kalimantan Selatan ini mati ketika membabat hutan, membuat jalan lapangan terbang dan sebagainya, atau mati karena penganiayaan, penyakit, kurang makan, kecelakaan dan karena pemboman Sekutu.

Untuk mengkoordinir penggunaan tenaga, pemerintah pendudukan Jepang di Kalimantan Selatan ini membentuk organisasi-organisasi yang bersifat sosial untuk membantu pihak Jepang dan melalui organisasi-organisasi seperti Seinendan, Konan Hokoku Dan, Boei Teisin Tai, Fujinkai dan sebagainya, Jepang menanamkan semangat nasionalisme dan perasaan anti Inggris-Amerika.

Untuk menyebarluaskan keperluan tersebut serta mempropagandaan kepentingannya, pemerintah Pendudukan Jepang menerbitkan surat kabar harian Borneo Simboen di bawah pimpinan umumnya E. Kato dan pimpinan redaksinya adalah A.A. Hamidhan yang sebelumnya telah menerbitkan harian Kalimantan Raya. Borneo Simboen ini merupakan bagian dari Asahi Simboen. Surat kabar Borneo Simboen ini menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, selain terbit di Banjarmasin, juga diterbitkan di Kandangan.⁵⁹

Pesawat-pesawat radio penduduk disegel untuk hanya dapat mendengarkan siaran dari Banjarmasin Hosokyoku.

Kumiai mengumpulkan padi dari rakyat dan di setiap desa disediakan lumbung padi, tetapi rakyat tidak diperkenankan untuk menggunakan padi tersebut. Karena keadaan yang demikian ini ikatan sosial menjadi lemah. Rakyat berusaha sendiri-sendiri untuk menyelamatkan dirinya masing-masing.⁶⁰

2. Pendidikan

Penduduk Kalimantan Selatan dikenal sebagai orang Banjar yang beragama Islam. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Banjar sebuah *lingua franca* yang luas dipakai. Orang Banjar berjiwa dagang, mempunyai kecakapan sebagai pedagang antar pulau. Dengan menggunakan perahu Banjar yang dikenal sebagai penes atau penisi Banjar, mereka mempunyai kemampuan berlayar mengarungi lautan Indonesia bahkan sampai ke Muangthai (Thailand). Sebagai suatu suku yang berjiwa bisnis, pada masa penjajahan yang lalu, orang Banjar memperhitungkan benar-benar dahulu untung ruginya memasukkan anak mereka ke sekolah. Hal ini sangat menguntungkan bagi politik pendidikan pemerintah kolonial Belanda yang berusaha agar rakyat

⁵⁸ M. Idwar Saleh *et al.*, *op.cit.*, hal. 148.

⁵⁹ M. Idwar Saleh *et al.*, *ibid.*, hal. 149.

jajahan tetap bodoh. Oleh karena itu di seluruh Kalimantan Selatan hanya terdapat sebuah MULO di Banjarmasin yang didirikan tahun 1927.

Berbeda pendapat mereka tentang sekolah agama. Sebagai suatu bangsa yang beragama Islam, mereka lebih mencurahkan perhatian mereka kepada pendidikan agama, dalam hal ini agama Islam. Madrasah-madrasah berkembang dengan pesatnya. Yang terkenal adalah Madrasah Darussalam Martapura yang mempunyai santri lebih dari 1000 orang. Santrinya berasal dari seluruh Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, bahkan ada juga yang berasal dari Tembilahan Sumatera Timur. Sekolah Normal Islam Rantau termasuk di antara madrasah yang berhasil. Gurunya dari Sumatera Barat antara lain Khatib Syarbaini dan Bey Arifin dan lain-lain.⁶¹ Sekolah Normal Islam Amuntai sampai sekarang merupakan madrasah agama yang berhasil.

Pandangan mereka terhadap sekolah yang didirikan Belanda sebagai sekolah “kapir”, menyebabkan mereka memusatkan perhatian mereka pada pendidikan agama. Mereka tidak segan-segan mengirim anak mereka ke sekolah agama di Jawa antara lain ke madrasah contoh di Ponorogo yang paling terkenal bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Selebihnya Sumatera Barat pada sekolah Thawalib dan Perguruan Tinggi Al Azhar di Mesir dan Mekah di Saudi Arabia.

Sikap orang Banjar yang kurang tertarik pada sekolah-sekolah kolonial itu diterima penjajah dengan senang hati dan membiarkan daerah ini dalam keadaan terkebelakang.

Sejak MULO didirikan tahun 1927 di Banjarmasin, baru tahun 1939 didirikan di Banjarmasin sebuah sekolah yang bernama Inheemse MULO atau MULO Bumiputera, tujuannya hanya sekedar untuk memperoleh atau mendidik tenaga administrasi yang diperlukan mereka bukan untuk mempersiapkan bagi siswanya untuk melanjutkan ke sekolah selanjutnya atau ke sekolah yang lebih tinggi. Orang Indonesia yang memperoleh kesempatan untuk sekolah ke MULO tersebut hanya kurang dari 5 % dari jumlah penduduk masa itu.

Sekolah-sekolah negeri yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda di Kalimantan Selatan dalam rangka mencetak tenaga-tenaga pembantu, baik dalam bidang pemerintahan, maupun untuk keperluan perusahaan-perusahaan Belanda adalah sebagai berikut :

- a. Sekolah Rendah 196 buah
- b. HIS (Hollands Inlandse School) 3 buah
- c. HCS (Hollands Chinese School) 1 buah
- d. Schakel School 1 buah
- e. ELS (Europese Lagere School) 1 buah
- f. CVO (Cursus Volks Onderwijs) 8 buah
- g. Klein Handel School 3 buah
- h. MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) 1 buah
- i. Inheemse MULO 1 buah⁶²

Kesempatan belajar untuk menuntut pengetahuan dari tingkatan rendah sampai yang lebih tinggi dalam sekolah pemerintah bagi rakyat biasa sangat dibatasi. Yang diberi kesempatan untuk menuntut pelajaran secara luas di sekolah-sekolah negeri ialah : anak pegawai negeri, orang kaya, keluarga bangsawan, orang asing terutama Cina, sedang rakyat biasa hanya diizinkan setelah melalui School Commissie yang terdiri dari Tuan Controleur (Wedana) dan School Opziener.⁶³

⁶⁰ M. Idwar Saleh *et al.*, *ibid.*, hal. 150.

⁶¹ Ramli Nawawi *et al.*, *op.cit.*, hal. 22.

⁶² Ramli Nawawi *et al.*, *ibid.*, hal. 23.

⁶³ Ramli Nawawi *et al.*, *ibid.*, hal. 24.

Ketika Jepang menduduki Kalimantan Selatan, mereka menemukan sistem pendidikan kolonial Belanda yang mendidik rakyat sesuai dengan sistem status atau status sistem yang berlaku dalam masyarakat kolonial serta disesuaikan untuk kebutuhan masyarakat jajahan.

Sistem pendidikan kolonial yang ada tidak menguntungkan bagi pemerintah pendudukan Jepang untuk kepentingan perangnya dan hasil pendidikan dari sistem yang ada tidak dapat diharapkan untuk dapat menunjang perang kolonial mereka untuk membentuk lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya sesuai dengan cita-cita Hakko I Chiu.

Setelah dalam waktu yang singkat pemerintah pendudukan Jepang mengkonsolidasikan kekuatan, maka sistem pendidikan kolonial Belanda segera dirubah dan disesuaikan dengan keperluan tersebut di atas.

Penekanan dari cara pendidikan yang diberikan diutamakan pada disiplin dan rasa patriotisme (kedaerahan) dan Nipponisasi kebudayaan.⁶⁴

Bahasa pengantar di sekolah-sekolah memakai bahasa Indonesia, sedang bahasa Jepang diajarkan sebagai bahasa utama.

Pada masa pendudukan Jepang ini, rakyat diberikan kesempatan untuk sekolah dan diskriminasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu dihapuskan. Dengan demikian murid-murid sekolah bertambah banyak.

Penyelenggaraan sekolah ditangani langsung oleh Jepang, sedangkan kurikulumnya banyak berubah dan lebih ditekankan pada hal-hal yang berhubungan dengan usaha Nipponisasi generasi muda seperti disiplin cara militer, lagu-lagu Jepang, gerak badan dan upacara bendera Hinomaru, penghormatan pada Tenno Heika serta penggunaan bahasa Jepang.

Pemerintah pendudukan Jepang berusaha menambah jumlah sekolah, walaupun dalam keadaan yang sederhana, baik gedung maupun peralatannya, bahkan karena sukarnya untuk mendapatkan kapur tulis misalnya, dipergunakan bahan tepung ubi kayu untuk penggantinya.

Pertambahan sekolah rakyat selama masa pendudukan Jepang adalah sebagai berikut :

- a. Tahun 1942 jumlah sekolah 196 buah, jumlah murid 15.250 dan jumlah guru 502 orang.
- b. Tahun 1943 jumlah sekolah 225 buah, jumlah murid 28.500 orang dan jumlah guru 1.108 orang.⁶⁵
- c. Tahun 1944 jumlah sekolah 525 buah, jumlah murid 52.520 orang dan jumlah guru 2.155 orang.
- d. Tahun 1945 jumlah sekolah 525 buah, jumlah murid 53.471 orang dan jumlah guru 2.214 orang.

Sedangkan jumlah sekolah lanjutan di daerah Kalimantan Selatan juga meningkat jumlahnya.⁶⁶ Sekolah-sekolah pada masa pendudukan Jepang menggunakan nama dalam bahasa Jepang seperti :

- a. Sekolah Rakyat (SR) 3 tahun dinamakan Hutsu Kogakko
- b. Sekolah Rakyat (SR) 6 tahun dinamakan Hutsu Djikyu Kogakko
- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dinamakan Hutsu Tju Gakko
- d. Sekolah Menengah Pertanian dinamakan Nogyo Tju Gakko
- e. Sekolah Guru setingkat SGB dinamakan Sihan Gakko
- f. Sekolah Teknik 2 tahun dinamakan Kogyo Djitsumo Gakko
- g. Sekolah Dagang pengganti Klein Handel School dinamakan Syogyo Djitsumo Gakko.
- h. Sekolah Pelayaran dinamakan Kaiin Yoseijo

⁶⁴ M. Idwar Saleh *et al.*, *op.cit.*, hal. 153.

⁶⁵ M. Idwar Saleh *et al.*, *ibid.*, hal. 154.

i. Sekolah Guru Pengganti CVO 2 tahun, dinamakan Kyoin Joseijo.⁶⁷

Sekolah-sekolah ini umumnya terdapat di Banjarmasin, kecuali Nogyo Tju Gakko sekolah pertanian yang hanya ada di Kandangan, sedangkan Sekolah Rakyat berada di seluruh kawasan Kalimantan Selatan. Yang berada di Banjarmasin semua, kecuali sekolah pertanian adalah sekolah lanjutan.

Hutsu Tjo Gakko yaitu pengganti MULO, lama pendidikan sama dengan MULO, terdapat di Banjarmasin dan di Barabai. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda sekolah ini tidak terdapat di Barabai, dan hanya satu-satunya di Banjarmasin. Jumlah muridnya yang terdaftar 412 orang dengan jumlah guru 15 orang.

Nogyo Tju Gakko, yaitu Sekolah Pertanian, lama pendidikan 3 tahun dan hanya terdapat di Kandangan, sebagai pengganti Landbouw School, jumlah murid yang terdaftar 73 orang dengan guru 5 orang.

Sekolah Guru ada 2 jenis, yaitu Sihan Gakko sederajat dengan SGB kemudian, lama pendidikan 4 tahun sesudah SR, hanya terdapat di Banjarmasin, murid yang terdaftar 102 orang dengan jumlah guru 6 orang. Jenis Sekolah Guru yang kedua adalah Kyoin Yoseijo sebagai pengganti CVO, lama pendidikan 2 tahun sesudah SR. Sekolah Guru jenis ini terdapat di Banjarmasin, Kandangan, Barabai, Amuntai dan Tanjung. Jumlah muridnya 200 orang dan jumlah guru 10 orang.

Kogyo Djitsumo Gakko, yaitu Sekolah Dagang sebagai pengganti Klein Handel School, lama pendidikan 2 tahun sesudah SR, hanya terdapat di Banjarmasin, jumlah murid yang terdaftar 42 orang dengan jumlah guru 3 orang.

Kaiin Yosejo, yaitu Sekolah Pelayaran, lama pendidikan 2 tahun sesudah SR, hanya terdapat di Banjarmasin, jumlah murid 35 orang dengan jumlah guru 3 orang.

Diskriminasi pendidikan dihapuskan, semua rakyat berhak mendapat dasar pendidikan yang sama yaitu Sekolah Rakyat 6 tahun, sedang sekolah nomor satu atau/dan HIS dihapuskan.

Pelajaran menulis membaca dan berhitung tidak dipentingkan yang diutamakan hanya menyanyi, taiko atau olah raga, kinrohosi, atau gotong royong.⁶⁸ Begitu pula mata pelajaran seperti : sejarah, ilmu bumi waktu itu dilarang diajarkan, kurikulum tidak ada, tetapi tujuannya hendak men-Nipponisasi bangsa Indonesia, dengan mempergiat pelajaran bahasa Jepang. Menyanyi yang lebih diutamakan yang berirama mars dan lagu kemenangan perang. Begitu pula lagu-lagu yang mengutuk Inggris dan Amerika sangat populer bagi anak sekolah, seperti yang tercantum dalam kata-kata lagu atau syairnya "Inggris dilinggis Amerika disetrika". Jadi pendidikan pada zaman Jepang itu diarahkan kepada kemenangan perang Jepang.

Pelajaran huruf Arab disemua sekolah dihapuskan, diganti dengan huruf Jepang yaitu huruf Katakana, Hiragana, dan Kanji. Guru-guru sekolah agama atau sekolah Islam, dianjurkan untuk membantu pembangunan Borneo Baru dan mengakibatkan sekolah-sekolah agama menjadi lumpuh dan tidak terbina lagi. Sekedar untuk gantinya di Banjarmasin didirikan sebuah Sekolah Menengah Islam yang pelajarannya mengutamakan taiko dan semangat bahasa Jepang.⁶⁹

Di Kandangan dibuka sebuah tempat latihan untuk pemuda-pemuda Islam yang bernama Pondok Kebangunan Asia. Para guru dan ulama Islam dilatih dan dididik dengan bahasa dan semangat Nippon. Meskipun dengan menekan perasaan hati, mereka dipaksa harus ikut ber-Sai Keirei ke Tokyo. Ratusan bahkan ribuan umat Islam di Kalimantan yang gugur dibunuh oleh Jepang terutama dalam pembunuhan besar-besaran di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Jepang

⁶⁶ M. Idwar Saleh *et al.*, *ibid.*, hal. 155.

⁶⁷ Ramli Nawawi *et al.*, *op.cit.*, hal. 24.

⁶⁸ Ramli Nawawi *et al.*, *ibid.*, hal. 25.

⁶⁹ Ramli Nawawi *et al.*, *ibid.*, hal. 26.

pernah menuduh bahwa Perkumpulan Muhammadiyah di Kalimantan Barat sarang dari komplotan anti Nippon.⁷⁰

Sekolah-sekolah partikelir atau sekolah-sekolah swasta dengan sendirinya ikut bubar bersama Pergerakan Rakyat yang membinanya, karena pergerakan rakyat dilarang oleh pemerintah pendudukan Jepang dan diganti dengan Pergerakan Rakyat Indonesia Jepang.

Dengan tekanan senjata tiap-tiap pagi diadakan penghormatan-penghormatan besar kepada Istana Kaisar Jepang, dengan Sai Keirei ke arah Tokyo, oleh guru-guru dan murid-murid sekolah.⁷¹

3. Seni Budaya

Bidang seni-budaya di Kalimantan Selatan pada masa pendudukan Jepang digunakan pemerintah pendudukan Jepang sebagai :

- a. Alat untuk mempropagandakan program perjuangannya
- b. Alat untuk menghibur serdadu-serdadu atau tentara-tentara Jepang.
- c. Alat untuk menarik simpati dan menghibur rakyat.⁷²

Untuk keperluan tersebut pemerintah pendudukan Jepang segera mengadakan gedung bioskop Osaka Gekijo di Banjarmasin serta dua buah gedung sandiwara masing-masing Sinar Surya dan Pancar Surya di bawah pimpinan M. Arifin. Sedang di Pleihari didirikan juga gedung sandiwara yang bernama Sakura. Di Amuntai, Kandangan, Barabai, dan Tanjung juga didirikan cabang-cabang dari Osaka Gekijo. Film-film yang dipertunjukkan selalu berkisar pada masalah kepahlawanan dan berasal dari Jepang. Bioskop Eldorado di Pasar Lama juga diaktifkan kembali dengan nama Minami Borneo Gekidjo.

Bidang seni lukis menjadi bahan utama propaganda atau alat utama propaganda perang dan pembangunan Jepang. Melalui gambar-gambar, lukisan-lukisan bagian penerangan Jepang giat membuat propaganda perang di desa-desa. Pelukis-pelukis daerah untuk keperluan ini adalah Gusti Sholihin, Noor Brand dan Lamberi Bustani.⁷³

Demikian pula seni tradisional daerah seperti madihin, mamanda, lamut digunakan pemerintah pendudukan Jepang sebagai alat untuk mempropagandakan kehebatan mesin perangnya dan alat untuk menanamkan kepercayaan akan kemenangan akhir yang mutlak bagi Jepang dan Sekutunya.

Di Kandangan pemerintah pendudukan Jepang menerbitkan majalah hiburan yang bernama Purnama Raya yang dipimpin oleh Haspan Adna dan A. Jabar. Melalui majalah ini pemerintah pendudukan Jepang juga mengusahakan penyebaran bahasa Jepang.

Dengan keadaan tersebut maka selama pendudukan yang sangat singkat itu, keadaan kesenian tidak mengalami perkembangan dan perubahan, dan walaupun di sana-sini terdapat tekanan-tekanan, namun tidak pula membawa kemunduran bagi kesenian di daerah Kalimantan Selatan. Hal ini sesuai dengan ada tidaknya manfaat aspek tersebut bagi perjuangan Jepang. Sedang bagi rakyat pemanfaatan bidang seni untuk kepentingan perjuangan Jepang itu tidaklah menjadi soal, sebab bagi rakyat kegiatan seni tersebut hanyalah sebagai suatu hiburan saja.

Pengaruh seni budaya Jepang yang umum secara nyata dan dapat dirasakan serta berurat berakar pada kebudayaan rakyat di daerah Kalimantan Selatan tidaklah tampak. Pada beberapa aspek seni budaya memang ada terlihat pengaruh sementara, seperti pada bidang seni suara dan cara hidup sehari-hari antara lain : kalau bertemu memberi hormat dengan menundukkan kepala,

⁷⁰ Sjarifuddin, *op.cit.*, hal. 83.

⁷¹ Ramli Nawawi *et al.*, *op.cit.*, hal. 26.

⁷² M. Idwar Saleh *et al.*, *op.cit.*, hal. 156.

⁷³ M. Idwar Saleh *et al.*, *ibid.*, hal. 157.

tetapi karena bersipat paksaan, maka begitu Jepang jatuh dan meninggalkan daerah Kalimantan Selatan, pengaruh tersebut hilang dengan sendirinya.⁷⁴

Demikian pula dengan penggunaan bahasa Jepang dan lagu-lagu dalam bahasa Jepang yang diwajibkan kepada murid-murid dan pegawai pemerintah pendudukan Jepang, hilang dengan sendirinya begitu Jepang meninggalkan daerah Kalimantan Selatan.

Dengan demikian jelaslah bahwa pengaruh seni dan budaya Jepang tersebut tidaklah berurat berakar dan tidak dapat berasimilasi serta berakulturasi dengan budaya setempat, karena selalu berwujud paksaan dan asing, juga waktu masa pendudukan Jepang di daerah ini terlalu singkat untuk merubah budaya daerah yang ada sejak dulu di daerah ini.⁷⁵

Pemerintahan Kaigun atau Angkatan Laut di Kalimantan Selatan tidak mempunyai jawatan yang namanya Keiming Bunka Syodosyo atau Badan Pusat Kebudayaan, yang khusus untuk menangani masalah kebudayaan dalam proses Nipponisasi melalui kebudayaan pada masa pendudukan Jepang di daerah ini. Yang ada hanya Keiming Syidobo atau Kantor Penerangan yang dalam tugasnya menggunakan media kebudayaan, yang meliputi media seni lukis, seni drama, seni sastra, dan segala jenis kesenian lainnya.

Pada kantor Keiming Syidobo atau Kantor Penerangan Jepang yang berkedudukan di Banjarmasin, terdapat tokoh-tokoh yang menjalankan program penerangan Jepang tersebut, antara lain : Lamberi Bustani, Arsyad Manan, Noor Brand, Sholihin, Abd. Manan dan lain-lain.⁷⁶

Ada jenis hasil lukisan yang digunakan untuk penerangan dalam bentuk kamisibai yaitu ceritera dalam bentuk gambar, seperti slide sekarang dan diceriterakan. Salah satu judul ceritera adalah ceritera "Amat Heiho" karangan Lamberi Bustani. Ceritera ini sangat terkenal di seluruh Kalimantan Selatan, yang menggambarkan keberanian Amat sebagai seorang Heiho yang diharapkan Jepang. Seksi Seni Lukis atau gambar, termasuk juga poster, yang dipimpin seorang Jepang yang bernama Tanaka.

Salah satu ceritera sandiwara yang mendapat hadiah dari Jepang adalah ceritera Fajar Minami karangan Lamberi Bustani yang berisi tentang pembangunan desa dengan bekerjasama dengan pemuda Jepang yang ditulis pada tahun 1944. Ini adalah salah satu ceritera yang dimainkan oleh group sandiwara Pancar Surya yang telah mendapat sensor yang keras dari kantor penerangan Jepang atau Keiming Syidobo.⁷⁷

Pada Kantor Penerangan Jepang ini selain bekerja tokoh-tokoh kesenian, juga terdapat ahli pidato sebagai agitator dan juga banyak terdapat mubalig, seperti Zafri Zamzam, Ideham Chalid dan H. Maksid.⁷⁸

4. Media massa

Persuratkabaran di Kalimantan Selatan, sebelum kedatangan bala tentara Jepang memasuki dan menduduki ibu kota Banjarmasin, yang menjadi ibukota Propinsi Borneo, di Banjarmasin terbit surat kabar atau harian seperti :

- d. Suara Kalimantan
- e. Borneo Post, yang terbit dua kali seminggu
- f. Bintang Borneo.

Di Barabai terbit mingguan Suara Hulu Sungai yang merupakan penerbitan Suara Kalimantan dan Borneo Courant terbit dua kali sebulan sebagai *advertentieblad* atau Lembaran

⁷⁴ M. Idwar Saleh *et al.*, *ibid.*, hal. 158.

⁷⁵ M. Idwar Saleh *et al.*, *ibid.*, hal. 159.

⁷⁶ Ramli Nawawi *et al.*, *op.cit.*, hal. 27.

⁷⁷ Ramli Nawawi *et al.*, *ibid.*, hal. 28.

⁷⁸ Ramli Nawawi *et al.*, *ibid.*, hal. 30.

Iklan disiarkan gratis yang dihentikan penerbitannya ketika Jerman dalam Perang Dunia ke-2 menduduki negeri Belanda, sebab percetakan Banjarmasinse Drukkerij yang mencetak dan menerbitkan *advertentieblad* adalah kepunyaan orang Jerman.

Dua hari sebelum tentara Jepang memasuki kota Banjarmasin oleh pihak AVC Belanda dilakukan pembumihangusan terhadap instalasi, bangunan pasar-pasar, jembatan dan lain-lain. Tindakan ini dilakukan dengan harapan agar alat-alat tersebut tidak dapat dipergunakan lagi oleh Jepang. Dalam hal ini termasuk juga percetakan, yang dipergunakan untuk mencetak selebaran atau penerbitan koran atau surat kabar.⁷⁹

Untuk mengembalikan kondisi kehidupan rakyat atau penghidupan rakyat di daerah pendudukan Jepang, pemerintah pendudukan Jepang segera mengusahakan penerbitan surat kabar. Terutama maksudnya supaya rakyat segera dapat mengetahui tentang maksud kedatangan Jepang atau kedatangan tentara Jepang di Indonesia, yaitu untuk melepaskan belenggu penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Jepang datang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Demikian janji Jepang mula-mula ketika mereka datang. Dengan demikian sudah tentu mendapat sambutan yang hangat dari seluruh bangsa .

A.A. Hamidhan yang sebelum Jepang masuk menjadi penerbit dan pemimpin redaksi harian Suara Kalimantan di Banjarmasin, disertai tugas untuk menerbitkan surat kabar. Oleh karena percetakan yang tadinya mencetak Suara Kalimantan di Banjarmasin dan Mingguan Suara di Hulu Sungai kena bumi hangus Belanda, maka disediakan sebuah percetakan yang bernama Bandjarmasinse Drukkerij, semula kepunyaan orang Jerman yang kemudian disita karena Jerman dalam keadaan perang dengan Belanda. Akhirnya jatuh ke tangan orang Cina, yang berhasil membelinya diwaktu dilelang sebagai barang sitaan.

Setelah diadakan perbaikan pada mesin-mesin cetak dan penyusunan huruf lainnya, sehingga pada awal bulan Maret 1942 dapatlah diterbitkan nomor pertama harian bernama Kalimantan Raya. Nama ini adalah pilihan A.A. Hamidhan sendiri, karena tidak menginginkan nama Suara Kalimantan untuk nama harian yang baru terbit itu. Yang menjadi sebab utama A.A. Hamidhan tidak ingin Suara Kalimantan dijadikan nama yang baru diterbitkan itu, karena harian ini adalah kepunyaan pemerintah pendudukan Jepang dan segala sesuatunya dibawah kekuasaan pemerintah pendudukan Jepang, yang isinya dan tujuannya sudah tentu sangat bertentangan dengan harian Suara Kalimantan.⁸⁰ Tidak mengherankan ketika harian Kalimantan Raya itu mulai terbit A.A. Hamidhan sudah mendapat pertanyaan dari pihak penguasa Jepang mengenai nama harian ini. Untuk ini A.A. Hamidhan menerangkan, bahwa sekarang Pemerintah Jepang bukan hanya menduduki daerah Kalimantan yang tadinya dikuasai oleh Belanda, tetapi juga meliputi daerah Serawak, Brunai dan Sandakan yang dulunya dikuasai Inggris. Penjelasan atau keterangan di atas dapat diterima oleh pemerintah Jepang. Sebelumnya penerbitan itu, Jepang telah menyerahkan segala sesuatunya kepada A.A. Hamidhan yang penting surat kabar itu terbit.

Untuk memperlengkapi isi harian itu, agar sesuai dengan situasi perang, maka atas bantuan Syamsul Arifin, dengan mempergunakan radio accu atau radio aki diambil berita-berita dari siaran radio Tokyo, kemudian pekerjaan ini diteruskan oleh Thalib Abadi.

Setelah dua minggu Kalimantan Raya terbit, muncullah harian Borneo Baru yang dipimpin oleh Andin Boer'ie, yang sebelum Jepang masuk memimpin harian Bintang Borneo. Harian ini tidak berumur lama penerbitannya karena kekurangan persediaan kertas.

Suatu pengalaman pahit yang pernah dirasakan oleh Pimpinan harian Kalimantan Raya, adalah suatu panggilan mendadak dari Komandan Tentara Jepang di Banjarmasin, mengenai

⁷⁹ Ramli Nawawi *et al.*, *loc.cit.*

⁸⁰ Ramli Nawawi *et al.*, *ibid.*, hal. 31.

pemberitaan yang dimuat dalam harian Kalimantan Raya yaitu mengenai sebuah berita dari Kotabaru mengenai gerakan atau perpindahan militer Jepang dalam harian tersebut. Berita tersebut diberi tanda dengan pensil merah yang tebal, disodorkan kepada A.A. Hamidhan, dengan kata-kata keras dalam bahasa Jepang yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang maksudnya “kenapa dimuat berita gerakan atau perpindahan militer Jepang dalam koran! Ini tidak betul! Bisa dihukum potong leher!”.

Sudah tentu ini mengejutkan A.A. Hamidhan sebagai penanggung jawab penuh atas segala isi Kalimantan Raya. Berita yang menjadi persoalan ini adalah berita perpisahan penduduk dengan sekelompok tentara Jepang yang terpaksa meninggalkan Kotabaru dan akan ditempatkan ke lain daerah yang tidak disebutkan. Bagi kita berita ini wajar, tetapi bagi Jepang ini merupakan strategi perang. Kali ini mendapat pengampunan, tetapi bila pada kemudian hari ada berita yang menjurus strategi militer dimuat, tidak ada ampun lagi.⁸¹

Pada sekitar permulaan bulan April 1942, tentara pendudukan Angkatan Darat Jepang (Rikugun) meninggalkan Kalimantan untuk bergerak meneruskan penyerangannya ke daerah-daerah lain yang belum ditaklukkan seperti Birma. Sebagai penggantinya datang tentara Angkatan Laut (Kaigun), lengkap dengan pemerintahan sipilnya. Sejak saat itu penerbitan harian Kalimantan Raya tidak sebebaskan seperti permulaan diterbitkan.

Jika pada mula-mula terbit hampir setiap hari atau setiap terbit selalu ditanamkan kepada rakyat Indonesia, bahwa tanah air dan bangsa kita telah bebas dari penjajahan Belanda berkat bantuan tentara Jepang dan selalu menganjurkan supaya bangsa Indonesia memperteguh persatuan demi untuk nusa dan bangsa. Kemudian kata-kata yang sesungguhnya menjadi cita-cita kita itu berangsur-angsur dihapuskan atas perintah penguasa Jepang, hingga akhirnya dikehendaki Jepang hilang sama sekali dari alam pikiran rakyat Indonesia. Malah dikehendaki oleh Pemerintah Jepang agar nama-nama Bung Karno dan Bung Hatta tidak ada lagi menghiasi harian Kalimantan Raya.

Pimpinan harian Kalimantan Raya pernah menerima seorang utusan Pemerintah Pusat Angkatan Laut Jepang (Minseifu) di Makassar, yang maksudnya menjajaki mengenai pemisahan pemerintahan Jepang di Indonesia. Angkatan Laut atau Kaigun yang menguasai Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan New Guinea sedangkan Angkatan Darat (Rikugun) menguasai Jawa, Bali, Sumatera sampai ke Malaka..

Bagi bangsa Indonesia gagasan atau rencana ini merupakan suatu persoalan yang amat menyimpang dari cita-cita bangsa karena penduduk yang berada dalam wilayah Angkatan Laut (Kaigun) tidak diperbolehkan berhubungan dengan penduduk yang berada dalam wilayah Angkatan Darat Jepang. Lebih tegas lagi agar ikatan kebangsaan Indonesia yang sudah kuat itu, diputuskan begitu saja oleh Jepang. Berbarengan dengan itu berkumandanglah kata-kata yang hebat, yakni Asia Timur Raya. Negara-negara yang telah ditaklukkan Jepang dimasukkan ke dalam Asia Timur Raya, dengan penduduk lebih dari 1000 juta jiwa.⁸²

Pada akhir April atau awal Mei 1942 dari Tokyo harian Asahi Simboen mengirim rombongan karyawan yang terdiri dari pimpinan umum, pimpinan redaksi dengan stafnya termasuk yang khusus mengambil berita langsung dari Domei Tokyo, serta penyusun letter dan pencetaknya. Dalam suatu pertemuan antara pemerintahan sipil Jepang, pihak Asahi Simboen dan Kalimantan Raya, diambil suatu keputusan untuk melebur harian Kalimantan Raya menjadi Borneo Simboen. Semula Borneo Simboen diterbitkan dengan bersama, yaitu dari 4 halaman, dijadikan 2 halaman huruf Latin bahasa Indonesia, sedang sisanya huruf kanji atau huruf Jepang berbahasa Jepang.

⁸¹ Ramli Nawawi *et al.*, *ibid.*, hal. 32.

⁸² Ramli Nawawi *et al.*, *ibid.*, hal. 33.

Kantor dan percetakan Kalimantan Raya yang menjadi Borneo Simboen berada disebelah kantor Borsumij dahulu kemudian menjadi Aduma Niaga kemudian pindah ke gedung bertingkat kepunyaan Geo Wehry di sebelah BIM.

Kemudian mesin-mesin cetak ditambah, yang didatangkan dari Surabaya yang pada mulanya mesin kepunyaan Sin Po di Surabaya. Dengan demikian penerbitan Borneo Simboen berbahasa Indonesia dapat dipisahkan dari Borneo Simboen berbahasa Jepang.

Meskipun kedua jenis Borneo Simboen itu diterbitkan dengan ukuran kecil, disesuaikan dengan persediaan kertas yang khusus didatangkan dari Tokyo, tetapi jumlah wartawannya, baik untuk edisi Indonesia, maupun edisi Jepang atau edisi berbahasa Jepang dengan huruf Jepang cukup besar. Jumlah wartawannya tidak sesuai dengan ukuran halaman koran yang akan diisi. Untuk Borneo Simboen edisi Indonesia, jumlah wartawannya 12 orang terdiri dari : A.A. Hamidhan sebagai pengurus dan pimpinan redaksi, A.A. Rivai pengganti pimpinan redaksi, Gt. Sugian Noor, F. Mohani, Marwan Ali, Zaglulsyah, Ahmad Basuni, Syaharansyah, Abdul Wahab, Rosita Gani, Golek Kencana dan Yanti Tajana.

Sensor dari pihak pemerintah pendudukan Jepang, yang dilakukan oleh bagian Seimuka dari kantor Minseifu di Banjarmasin diperketat sedemikian rupa, sehingga kalau semua karangan atau pemberitaan belum mendapat izin, koran tidak boleh dicetak dan diedarkan.⁸³ Untuk mempermudah teknik kerja dan kerjasama yang baik, urusan sensor tersebut diatur sebagai berikut : setiap karangan atau artikel atau pemberitaan, ditik atau dibuat dengan mesin tulis memakai karbon, dengan demikian selemba diturunkan ke bagian percetakan untuk disusun atau dizet dan yang selembarnya dikirim ke kantor sensor. Jika nanti ternyata ada perubahan pada artikel atau pemberitaan itu, maka segera diadakan koreksi, sedangkan jika dilarang untuk dimuat, maka zetsel itu, yang biasa sudah diopmaak atau disusun untuk dicetak akan diangkat dan diganti dengan zetsel yang baru yang sudah lepas dari sensor.

Beberapa bulan kemudian Borneo Simboen juga diterbitkan di Balikpapan, edisi untuk Kalimantan Timur. Edisi Bahasa Indonesia dipimpin oleh Andin Boer'ie, edisi bahasa Jepang dipimpin oleh salah seorang wartawan Jepang, yang sebelumnya sebagai staf redaksi Borneo Simboen di pusat yaitu Banjarmasin. Kemudian menyusul pula edisi Pontianak, edisi bahasa Indonesia dipimpin oleh Ahmad Kasim. Disamping edisi bahasa Indonesia juga diterbitkan Borneo Simboen edisi bahasa Tionghoa dengan huruf Tionghoa yang juga dapat dibaca oleh orang Jepang dipimpin oleh seorang Jepang yang pasih berbahasa Tionghoa.

Pada awal tahun 1943 baru ada hubungan kapal laut antara Banjarmasin-Surabaya pulang pergi dengan menggunakan bekas kapal Belanda yang diberi nama Nitei Maru. Selain itu menggunakan perahu layar atau penes-penes atau penisi-penisi Banjarmasin. Ini dipergunakan A.A. Hamidhan untuk berkunjung ke pulau Jawa. Dalam peninjauannya dia bertemu dengan wartawan yang tergabung dalam PERDI atau Persatuan Djurnalistik Indonesia seperti Mas Toekoel, Dermawan Lubis dan Imam Supardi yang bekerja sebagai Wartawan Suara Asia di Surabaya. Di Semarang bertemu dengan Parada Harahap yang memimpin surat kabar Sinar Asia. Dari hasil penelitian A.A. Hamidhan ternyata wartawan di Jawa diawasi lebih ketat oleh Pemerintah Jepang daripada di Banjarmasin.

Pada awal Desember 1943 A.A. Hamidhan dipilih sebagai wartawan yang mewakili Kalimantan dalam Permusyawaratan Besar Persuratkabaran seluruh Asia Timur Raya di Tokyo. Untuk daerah pemerintahan Angkatan Laut atau Kaigun lainnya dikirim empat orang wartawan termasuk A.A. Hamidhan, Manai Sophian dan Pantouw untuk Sulawesi dan Pattinaipow dari

⁸³ Ramli Nawawi *et al.*, *ibid.*, hal. 34.

Ambon mewakili Maluku.⁸⁴ Dari daerah Angkatan Darat Jepang (Rikugun) dikirim Mas Toekoel untuk Jawa, Adi Negro untuk Sumatera dan wartawan dari utusan Melayu – Singapura. Selain ini juga hadir dua orang wartawan dari Birma atau Myanmar sekarang, dua orang dari Thailand, dua orang dari Hongkong dan juga dari utusan wartawan dari Tiongkok dan Korea. Sedangkan yang menjadi tuan rumah adalah wartawan Jepang. Yang menjadi keputusan dari Permusyawaratan Besar itu, terutama mengenai seluruh persurat kabaran di Asia Timur Raya, bersatu padu untuk memenangkan peperangan menghadapi pihak Sekutu.

Pada saat serangan Sekutu terhadap Jepang semakin menghebat dan pertahanan Jepang sudah mulai runtuh, beberapa kota di Kalimantan mendapat serangan pesawat-pesawat pembom B-26, demikian juga kota Banjarmasin beberapa kali mendapat serangan udara. Pihak penerbitan surat kabar diperintahkan untuk mempersiapkan penerbitan darurat jika terpaksa. Karena itu sebagian percetakan dengan beberapa staf redaksi dipindahkan ke Kandangan dan kemudian diterbitkanlah Borneo Simboen edisi Hulu Sungai. Sebagian besar berita dikirim dari Banjarmasin atau pusat. Sebagian lagi dipindahkan ke Martapura untuk maksud yang sama. Setelah pasukan sekutu datang, penerbitan Borneo Simboen dihentikan.⁸⁵

I. ALAM PIKIRAN DAN KEPERCAYAAN

Masyarakat Kalimantan Selatan adalah masyarakat yang fanatik dalam beragama, hal ini disadari oleh pemerintah pendudukan Jepang jauh sebelum mereka menduduki daerah ini, melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh orang-orang Jepang yang bermukim di Kalimantan Selatan sebelum pecah Perang Dunia ke-2.

Begitu pemerintah pendudukan Jepang dapat mengonsolidasikan diri di daerah Kalimantan Selatan, mereka segera mengadakan pendekatan dengan tokoh-tokoh agama agar mau bekerja sama dan memberikan bantuan kepada mereka. Pemerintah pendudukan Jepang segera memberikan bantuan kepada para ulama tersebut.⁸⁶

Untuk lebih meningkatkan kepercayaan para ulama bahwa Jepang memperhatikan perkembangan agama Islam, pemerintah pendudukan Jepang di Kalimantan Selatan mendatangkan pegawai-pegawainya untuk orang Jepang yang beragama Islam dan berpengetahuan tentang agama Islam.⁸⁷

Ulama Islam Jepang yang didatangkan ke daerah ini ialah : Umar Faisal, Said Waqas, Tahir Zaki, Usman Yusuf dan Sarik Imaizumi.⁸⁸ Meskipun Jepang mendatangkan ulama Jepang ke Kalimantan Selatan, yang menurut mereka seorang ulama Islam, tetapi rakyat umumnya kurang percaya atau kurang begitu yakin terhadap keislaman Ulama Jepang tersebut. Ini disebabkan rakyat mendengar berita yang santer, bahwa pada waktu ulama Islam ini berada di Negara ada diantara mereka yang kencing berdiri tanpa dibasuh.⁸⁹

Ulama Islam Jepang ini bersama dengan ulama daerah membentuk semacam majelis ulama yang dipimpin oleh Haji Abdurrahman Siddik dan melalui wadah ini mereka mengendalikan umat Islam untuk bantuan kepada usaha-usaha perang Jepang.⁹⁰

Semua perkumpulan-perkumpulan agama, politik atau sosial tidak diperbolehkan berdiri atau didirikan. Bagi umat Islam seperti tersebut di atas disediakan gantinya sebuah perkumpulan yang diberi nama Jami'ah Islamiyah Borneo atau Borneo Kaikyū Kyokai yang diketuai oleh Haji

⁸⁴ Ramli Nawawi *et al.*, *ibid.*, hal. 35.

⁸⁵ Ramli Nawawi *et al.*, *ibid.*, hal. 36.

⁸⁶ M. Idwar Saleh *et al.*, *op.cit.*, hal. 159.

⁸⁷ M. Idwar Saleh *et al.*, *ibid.*, hal. 160.

⁸⁸ Ramli Nawawi *et al.*, *op.cit.*, hal. 26.

⁸⁹ Ramli Nawawi *et al.*, *ibid.*, hal. 27.

⁹⁰ M. Idwar Saleh *et al.*, *op.cit.*, hal. 160.

Abdurrahman Siddik, di bawah pengawasan ulama-ulama Islam Jepang yang didatangkan ke daerah Kalimantan Selatan itu.⁹¹

Pada dasarnya tidak ada larangan dalam kegiatan beragama namun orang selalu diburu oleh rasa ketakutan. Kenyataan-kenyataan yang nampak adalah kehidupan beragama lebih mantap, mungkin dalam situasi yang kritis seperti ini, orang lebih dekat dengan Tuhan dan merasa lebih aman jika berada di langgar atau masjid daripada berada di dalam rumah sendiri.

Perintah Sai Keirei pada setiap pagi ke arah Tokyo, memang sangat bertentangan dengan jiwa Islam atau ajaran Islam, tetapi karena takut terpaksa melaksanakan, walaupun badan mereka Sai Keirei, tetapi jiwa mereka tetap menolak.⁹²

Kepada para ulama diberikan kebebasan untuk memberikan pelajaran agama kepada masyarakat di langgar-langgar, surau-surau dan masjid-masjid, dengan catatan harus memberikan pelajaran sambil mempropagandakan kepentingan Jepang tersebut di atas.

Akibat Perang Dunia ini dan putusnya hubungan laut kewajiban agama seperti menjalankan ibadah haji atau naik ke Mekkah tidak mungkin dilaksanakan atau dijalankan.

Madrasah atau pesantren di Amuntai yaitu Nurul Islam dan di Martapura yakni Darussalam ditutup oleh pemerintah Jepang. Para ulama harus mencari jalan sendiri untuk mengajarkan agama, mereka kemudian mengusahakan pelajaran agama di rumah-rumah. Tepai kegiatan ini juga tidak berjalan lama karena banyak pemuda yang mengikuti pelajaran tersebut, harus meninggalkan desa mereka untuk dijadikan tenaga sukarela bekerja di tempat-tempat lain yaitu baik sebagai romusha maupun melaksanakan kinrohoshi.⁹³

Pada waktu itu khotbah Jum'at mulai menggunakan Bahasa Indonesia, yang mula-mula dimulai oleh golongan Muhammadiyah. Di beberapa daerah seperti di Barabai, pemerintah pendudukan Jepang memerintahkan kepada semua orang supaya pergi sembahyang ke masjid atau ke langgar atau surau, karena itu maka saat itu langgar atau masjid hampir tidak dapat menampung orang-orang yang mau sembahyang atau shalat.⁹⁴

Walaupun di beberapa daerah pemerintah pendudukan Jepang memerintahkan kepada semua orang untuk sembahyang di langgar atau di masjid-masjid, tetapi dengan penutupan pesantren dan tidak bisa berlanjutnya pengajaran agama di rumah-rumah oleh para ulama, dan tekanan di sana-sini maka selama pendudukan Jepang di daerah ini perkembangan agama Islam bahkan mengalami kemunduran.⁹⁵

J. INTERAKSI RAKYAT DI KALIMANTAN SELATAN KEDALAM KEGIATAN ORGANISASI POLITIK DAN SOSIAL

Borneo Selatan yang merupakan bagian dari pemerintahan sipil Borneo Minseibu, termasuk dalam daerah Indonesia Bagian Timur dibawah kekuasaan Angkatan Laut atau Kaigun yang disebut Minseifu dan berpusat di Makassar. Untuk membantu (Borneo) Minseibu Chokan dibentuk Rensei Seimo Tyosa In, suatu badan yang bertugas sebagai penasihat rahasia di bidang pemerintahan.

Sejak tahun 1943 Pemerintahan Pendudukan Jepang mulai mengadakan konsolidasi dalam bidang pemerintahan dengan intensif. Semua jawatan dan organisasi pemerintahan di Nipponisasi. Sasaran-sasaran yang baik adalah pemuda pelajar.⁹⁶

⁹¹ Ramli Nawawi *et al.*, *op.cit.*, hal. 26

⁹² Ramli Nawawi *et al.*, *ibid.*, hal. 27.

⁹³ M. Idwar Saleh *et al.*, *op.cit.*, hal. 160.

⁹⁴ Ramli Nawawi *et al.*, *op.cit.*, hal. 27.

⁹⁵ M. Idwar Saleh *et al.*, *op.cit.*, hal. 161.

⁹⁶ Ramli Nawawi *et al.*, *op.cit.*, hal. 38.

Setelah berunding dengan Rensei Seimo Tyosa In dan dengan mempertimbangkan gerakan-gerakan yang ada di Jawa seperti Tiga A, Putera atau Pusat Tenaga Rakyat, maka Minseibu Chokan memutuskan membentuk, gerakan pemuda, secara bertingkat.

Gerakan Tiga A, Putera atau Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, Cuo Sangi In, gerakan seperti ini tidak ada di Kalimantan, Keimin Bunka Syidosya atau Badan Pusat Kebudayaan termasuk Seksi dalam Kantor Penerangan Jepang atau Keimin Syidobo.

Gerakan-gerakan pemuda yang di masa pendudukan Jepang di daerah ini ialah:

a. Seinendan

Bagi pemuda yang berumur 15 sampai 29 tahun, dari tiap son satu desa atau Buntai atau regu di pusatkan pada Fuku Gun atau Kecamatan dan Gun atau Kewedanaan. Tugasnya bersifat lokal.⁹⁷

b. Konan Hokoku Dan

Bagi mereka yang berumur 20 tahun sampai 35 tahun, dari tiap Fuku Gun atau Sotai atau Seksi dan dipusatkan pada Gun atau Bandjermasin Syi.

c. Boei Teisin Tai

merupakan pembaruan dan perluasan dari Konan Hokoku Dan sejak Mei 1945. Yang terakhir ini dihapus. Kesatuan terakhir ini selain tugas lokal, juga sebagai tenaga cadangan untuk pembangunan, dipersiapkan untuk pasukan gerilya Jepang di daerah yang akan diduduki musuh. Boei Teisin Tai mendapat latihan militer dan pengetahuan senjata ringan. Mereka tidak dikumpul dalam asrama, tetapi mereka sewaktu-waktu berkumpul ketika ada latihan yang diberikan oleh anggota Kaigun dan diawasi oleh Bunken Kanrikan atau wakilnya yang berkedudukan sebagai pengawas setempat, kecuali untuk daerah Banjarmasin yang dipusatkan di Rensei Doojo atau Pusat latihan di Banjarmasin dengan acara latihan yang berlangsung kurang lebih dua bulan untuk tiap angkatan yang berupa penggemblengan seisin atau semangat, anti Amerika dan Inggris, kesetiaan kepada Tenno Heika, bahasa Jepang dan Kyoren atau latihan kemiliteran termasuk taiso atau senam, pelatihnya semua orang Jepang.

d. Heiho Angkatan Laut atau Kaigun Heiho

Dibentuk untuk bertempur menghadapi musuh dalam beberapa angkatan. Sebagian besar mereka tewas dalam pertempuran Balikpapan. Heiho adalah pembantu prajurit yang dilatih secara militer dan mempunyai hirarki kemiliteran sendiri.⁹⁸ Di Kalimantan Selatan ada tiga angkatan, angkatan pertama merupakan Heiho kelas satu.

e. Tokubetsu Toku Tai

Dibentuk Kaigun untuk menghadapi pendaratan sekutu, yang terdiri dari Heiho-Heiho pilihan dan prajurit Kaigun. Semangat anti Barat atau anti Belanda kemudian menjadi anti Amerika dan Inggris di tanamkan benar-benar ke dalam dada pemuda di Kalimantan Selatan. "Amat Heiho" sangat digemborkan Jepang dan merupakan cita-cita yang diharapkan benar oleh Jepang sebagai simbol pejuang menentang Amerika dan Inggris. Markas Tokubetsu Toku Tai ini berada di Bati-bati di Kabupaten Tanah Laut, sekarang. Tokubetsu Toku Tai ini dibentuk pada awal

⁹⁷ Oleh Asano Sensei kepada para siswanya di Bandjermasin-Hutsu-Tyugakko (SMP) yang berlokasi di eks MULO, diperkenalkan tepuk tangan "mitsu-mitsu-nanatsu" atau 3-3-7 untuk menggembirakan pertandingan antar kelas atau antar sekolah; sepertinya kini menjadi "Tepuk Pramuka".

⁹⁸ Ramli Nawawi *et al.*, *ibid.*, hal. 39.

tahun 1945, pada saat Jepang hampir jatuh atau kalah, yang merupakan pasukan tempur khusus yang terdiri dari satu kompi Angkatan Laut Jepang ditambah satu kompi Heiho kelas satu atau Heiho pilihan yang jumlahnya kurang lebih 200 orang.

f. Peta atau Pembela Tanah Air

Juga dibentuk Peta atau Pembela Tanah Air dari unsur-unsur Boei Teisin Tai, sebanyak satu kompi pada bulan Juni 1945. Seminggu sesudah dibentuk mereka dimasukkan dalam kapal yang dikirim ke tujuan yang tidak diketahui dan tak ada satu pun yang kembali. Yang hidup hanya satu orang yaitu Sachrul karena kejatuhan peti di kapal, jari kaki pecah, hingga ia ditinggal.

g. Fujin-Kai

Dalam usaha Nipponisasi, kaum wanita dihimpun dalam wadah yang namanya Fujin-Kai. Tujuannya sebagai bagian pengerahan tenaga wanita untuk ikut membantu memenangkan Perang Asia Timur Raya. Fujin-Kai ini didirikan pada bulan Agustus 1945.

Dengan adanya atau dibentuknya Fujin-Kai ini, sesuai dengan kebijakan pemerintah pendudukan Jepang yang dipegang oleh Kaigun, seluruh perkumpulan wanita yang telah berkembang sejak zaman Belanda, baik yang berdasarkan agama maupun sosial dibekukan.⁹⁹

Struktur organisasi Fujin-Kai ini oleh pemerintah pendudukan Jepang telah digariskan dan pimpinannya sudah ditentukan, yaitu setiap isteri pimpinan pemerintahan daerah otomatis menjadi Ketua Fujin-Kai daerah. Tugas Fujin-Kai adalah ikut serta dalam usaha yang ditetapkan oleh pemerintah pendudukan Jepang terutama diarahkan kepada mobilitas tenaga wanita dalam usaha untuk mengumpulkan dana bagi keperluan Jepang.

Kegiatan-kegiatan dana Fujin-Kai tersebut adalah :

- 1) Melakukan kegiatan mengikutsertakan wanita di dalam usaha perang, baris berbaris, bela diri, kegiatan palang merah, perlindungan terhadap serangan udara dan sebagainya.
- 2) Membantu meningkatkan produksi pangan
- 3) Menyelenggarakan dapur umum dan mobil untuk pasukan tentara dan pekerja paksa dan mengumpulkan intan cukilan.

Fujin-Kai sengaja dilibatkan terhadap kegiatan peperangan, terutama untuk garis-garis pertahanan di belakang. Semua tugas ini bagi wanita di Jawa dapat dilaksanakan dan ternyata pengalaman Fujin-Kai ini sangat bermanfaat karena kecakapan ini banyak membantu wanita di Jawa dalam Perang Kemerdeaan 1945-1949.

Tugas-tugas seperti yang tersebut di atas tidak ditemukan pada Fujin-Kai di Kalimantan Selatan. Kegiatan Fujin-Kai yang telah dilaksanakan ialah usaha pencarian dana lewat pengumpulan harta benda rakyat berupa permata intan berlian dan mengadakan pasar malam amal lewat pertunjukan kesenian, juga dikerahkan dalam pengerahan tenaga kerja bakti, menanam jarak, padi dan menetam padi serta kerja bakti di rumah-rumah sakit.

Tokoh-tokoh Fujin-Kai di Kalimantan Selatan sebagian besar wanita aktif dalam pergerakan sebelum perang pecah.

Fujin-Kai ini bersifat pengerahan massa yang diorganisir yang mengakibatkan banyak wanita dari kalangan masyarakat biasa ikut terlibat di dalamnya . Fujin-kai tidak hanya terdapat di Banjarmasin, tetapi terdapat diseluruh Kalimantan Selatan seperti : Kandangan, Rantau, Tanjung, Haruai, Barabai.¹⁰⁰

⁹⁹ Ramli Nawawi *et al.*, *ibid.*, hal. 40.

¹⁰⁰ Ramli Nawawi *et al.*, *ibid.*, hal. 41.

Beberapa tokoh-tokoh dari Fujin-kai ini antara lain : Ny. Mastifah Hamdi, Ny. Norsehan Johansyah, Ny. Norjihan, Ny. Norhanafiah, Ny. Syarifah Muzenah Assegaf, Ny. Asnah Hasan Basri.

Organisasi Fujin-Kai tidak bersifat vertikal maupun horizontal dari pusat ke daerah. Strukturnya hanya bersifat lokal saja, setiap daerah Fujin-Kai berada langsung di bawah pengawasan dan perintah Jepang setempat.

Fujin-Kai tidak mempunyai struktur yang jelas. Sebagai contoh Fujin-Kai daerah dipimpin oleh isteri kepala daerah setempat, tetapi tanpa ada formasi dan personalia kepengurusan lebih lanjut. Hal ini menurut dugaan atau perkiraan disebabkan karena Fujin-Kai sesungguhnya suatu gerakan pengerahan massa bukan suatu organisasi sosial.

Para wanita Banjar yang aktif dalam Fujin-Kai umumnya selalu berusaha menjaga jarak yang cukup jauh dalam pergaulan dengan orang-orang Jepang, sehingga Jepang tidak dapat berbuat hal-hal diluar tugas Fujin-Kai yang telah digariskan.

h. Kinrohosi yaitu pengerahan massa untuk kerja bakti

Pengerahan massa untuk kerja bakti ini merupakan kewajiban bagi setiap pemuda di tiap desa. Setiap desa diwajibkan oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk mengumpulkan pemuda guna dipekerjakan pada pekerjaan yang sudah ditentukan Jepang. Biasanya para pemuda ini dikerahkan untuk waktu satu bulan, sesuai dengan pekerjaan yang akan dikerjakan. Kadangkadang bisa juga terjadi Kinrohosi ini perlakuannya seperti kerja paksa seperti pengerahan massa yang didatangkan dari Jawa, biasanya diperoleh dengan tipu muslihat Jepang dan bekerja pada tempat-tempat tertentu dengan tidak bisa kembali lagi.

Pekerjaan yang dikerjakan oleh tenaga Kinrohosi ini ialah : memperbaiki lapangan terbang Ulin, lapangan terbang Maluka di Pelaihari, lapangan terbang di Kandris daerah Dayu Ampah, membuat perlindungan di daerah lapangan terbang Ulin, Pelaihari, membuat bendungan untuk pengairan menggali sungai untuk pengairan sawah atau untuk sawah pasang surut, membuat bangunan bagi tukang.¹⁰¹

Perlakuan Jepang terhadap tenaga Kinrohosi inipun sama dengan perlakuan terhadap romusha, yaitu dengan cara perintah yang tidak bisa dibantah, pukulan bagi yang malas atau sakit. Makanan yang disuguhkan Jepang adalah nasi yang penuh dengan antah atau padi dan apabila ketahuan makan memilih-milih antah tersebut, akan dipukul oleh Jepang. Barak-barak tempat tinggal sangat darurat, lantainya dari batang galam yang disusun, tanpa tikar dan tanpa kelambu dan tanpa obat-obatan. Yang penting bagi Jepang harus bekerja dengan tidak mempedulikan kondisi kesehatan tenaga yang bekerja, demikian juga kemampuan mereka.

Pada bagian akhir pemerintah pendudukan Jepang di Kalimantan Selatan yaitu sekitar bulan Februari sampai dengan Agustus 1945 wilayah ini berada dalam garis perang aktif. Pemboman oleh Sekutu hampir setiap hari terjadi. Kesengsaraan meningkat, kehidupan rakyat mengalami kegoncangan hebat. Rakyat bertambah gelisah, tidak ada ketenteraman.

Setelah Balikpapan jatuh pada awal Februari 1945, mulailah serangan Sekutu secara besar-besaran atas wilayah Kalimantan Selatan. Sasaran serangan sekutu adalah lapangan terbang Ulin, kapal-kapal sungai, galangan kapal Koonan Kaiyoon, antena radio, pabrik karet Hok Tong dan lain-lain. Menjelang awal Agustus 1945, serangan sekutu semakin kuat yang dilancarkan oleh pesawat terbang B 17, B 25, B 26, P 38 dan P 51.

Angkatan Udara Jepang yang kecil itu musnah. Pada serangan terakhir sekutu, lebih dari 80 buah pesawat terbang yang menyerang Banjarmasin. Semua tentara Jepang pada saat itu menyingkir ke pegunungan Meratus.

¹⁰¹ Ramli Nawawi *et al.*, *ibid.*, hal. 42.

K. PENGARUH POLITIK

Usaha pemerintah pendudukan Jepang untuk me-Nipponisasikan atau penjepangan terhadap Bangsa Indonesia dilakukan dengan intensif sekali, melalui segala bidang dan tingkatan dari anak-anak sampai kepada orang dewasa. Pergerakan rakyatpun mengalami proses Nipponisasi juga, yaitu menjadi Pergerakan Indonesia-Jepang dan meluas sampai ke desa-desa, dengan segala organisasi ala Jepang. Dengan demikian rakyat di desa sudah mengenal organisasi pergerakan ala Jepang tersebut, tidak seperti keadaan sebelum Perang Dunia ke-2 Pergerakan rakyat hanya terbatas pada golongan terpelajar di kota saja dan belum meluas sampai ke desa.

Semua perkumpulan politik dan agama dilarang. Sebagai gantinya terhadap umat Islam, Jepang membentuk perkumpulan diberi nama Jami'yah Islamiyah Borneo atau Borneo Kaikyo Kyokai, yang diketuai oleh H. Abdurrahman Siddik di bawah pengawasan ulama-ulama Jepang.

Nipponisasi terhadap pelajar dilakukan lebih mendalam oleh pemerintah pendudukan Jepang. Setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, diadakan upacara penaikan bendera Hino Maru dan menghadap ke utara menuju Tokyo untuk ber-Sai Keirei yaitu hormat membungkuk sembilan puluh derajat kepada Tenno Heika. Pada tiap tanggal 8 pada upacara itu ditambah dengan pembacaan Shosho ialah sabda Tenno Heika yang dibacakan oleh Koco-Sensei atau Kepala Sekolah. Upacara ini diakhiri dengan pekik : Tenno Heika, Banzai atau Hidup Tenno Heika dan Dai Nippon Teikoku, Banzai atau artinya Hidup Kekaisaran Nippon Raya. Ketika masuk kelas pagi hari dengan pimpinan Hanchō atau Ketua Kelas diucapkan bersama-sama dengan bersemangat sambil berdiri sebelum duduk dikursi untuk belajar sebuah semboyan : *Warera no kotoba, Nippon go* (Bahasa kami, bahasa Jepang), *Asia no kotoba, Nippon go* (Bahasa Asia, bahasa Jepang), *Nobioko Kotoba, Nippon go* (Bahasa pemersatu bahasa Jepang).

Para pelajar dikerahkan juga dalam kesatuan-kesatuan Gakkoto-Tai. Kepala Sekolah dan sebagian Guru sekolah Lanjutan di Banjarmasin adalah orang Jepang. Tujuan pendidikan diutamakan pada penanaman semangat Jepang, semangat Bushido yaitu sifat kesatria Kaum Samurai dan cita-cita Hakko Ichiu yang maksudnya cita-cita kepemimpinan Jepang di seluruh dunia terjamin kemurniannya.

Dalam rangka pelaksanaan politik Nipponisasi ini, pemerintah pendudukan Jepang tidak segan-segan melakukan tindakan penyiksaan, pembunuhan terhadap orang-orang Indonesia yang dicurigainya dan beratus rakyat Indonesia yang terbunuh tanpa bersalah. Berita yang paling mengejutkan ialah berita yang dimuat dalam harian Borneo Simboen nomor 324, tanggal 21 Desember 2603 atau 21 Desember 1943 dimana diberitakan hukuman mati lebih dari 200 orang yang ditangkap antara lain orang Belanda, Indonesia dan Tionghoa, diantaranya mantan Gubernur B.J. Haga, C.M. Vischer seorang yang berkebangsaan Swiss, Raden Susilo yang telah berumur 50 tahun saudara kandung almarhum Dokter Soetomo; pendiri Budi Utomo, Housman Babu; mantan Gunco Sampit seorang pelopor suku Dayak dan pendiri Pakat Dayak. Berita tentang hukuman mati ini dilanjutkan lagi dengan berita Borneo Simboen tanggal 2 Juli 2604 atau 2 Juli 1944, dimana diberitakan ditembak mati tokoh-tokoh masyarakat antara lain: J.F.Fattiasina, Syarif Mohammad Alkadri; Sultan Pontianak dengan keluarganya, 12 orang Sultan di Kalimantan Barat, Dokter Roebini beserta istrinya dan beratus-ratus rakyat yang tidak berdosa dibunuh.¹⁰²

Akibat politik Nipponisasi ini dalam masyarakat Kalimantan Selatan terlihat atau tertanam hal-hal yang antara lain adalah sebagai berikut :

¹⁰² Baca sebelumnya "Komplotan di Borneo Barat".

1. Hilangnya permusuhan bagi sesama umat Islam, terutama antara golongan kaum tua atau kaum tua dengan golongan kaum muda, sejak itu pula dimulai khotbah Jum'at dalam bahasa Indonesia, yang sebelumnya hanya dalam bahasa Arab seluruhnya.
2. Pergerakan Rakyat yang sebelumnya hanya bergerak atau dikenal di tingkat kota saja, sekarang dengan melalui Pergerakan Rakyat Indonesia Jepang sudah dikenal sampai ke desa-desa.
3. Latihan militer yang diadakan bagi pemuda dari berbagai kelompok umur, merupakan bekal yang berguna dalam Perang Kemerdekaan menghadapi NICA kemudian.
4. Pimpinan Pergerakan Rakyat mendapat latihan dan pengalaman dalam mengatur pemerintahan, karena sebagian dari mereka diangkat Jepang sebagai penasihat Jepang.

Politik Nipponisasi dalam segala bidang atau lapangan ini dan propaganda Jepang dengan dalih pembangunan Borneo Baru, menimbulkan semangat nasionalisme dan rasa sadar akan harga diri.

L. KUNJUNGAN HATTA KE BANJARMASIN, JANJI KEMERDEKAAN UNTUK INDONESIA, DAN SEKITAR PROKLAMASI DI KALIMANTAN SELATAN

1. Kunjungan Hatta ke Banjarmasin

Dalam bulan Juli 1945 Dr Muhammad Hatta datang di Banjarmasin untuk mengadakan pertemuan dengan rakyat Kalimantan Selatan. Pertemuan yang semula akan diadakan di gedung Osaka Gekijo eks bioskop Rex¹⁰³ gagal, dan baru dapat diadakan pada pukul 24.00 bertempat di halaman rumah besar.¹⁰⁴ Pidato Bung Hatta berintikan ajakan peningkatan perjuangan untuk menuju Indonesia Merdeka.

2. Janji Kemerdekaan untuk Indonesia

Dalam rangka memperbaiki politik pertahanannya, perdana Menteri Koiso Kunisiki, yang menggantikan Perdana Menteri Tojo yang tersingkir karena jatuhnya pulau Saipan ke tangan Sekutu pada 4 Juli 1944, dan sidang Diet (Parlemen) Jepang ke-85 tanggal 5 September 1944, menjelaskan pemberian kemerdekaan kepada Indonesia.

Majalah resmi pemerintah Jepang Kan Bo Nomor 51 tanggal 8 September 1944 mengumumkan izin pemasangan bendera Merah-Putih di samping Hi no Maru, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesudah Kimigayo di dalam upacara-upacara.

Tanggal 9 Agustus 1945 di Dalat, 200 km dari Saigon Vietnam, Markas Besar Jenderal Terauchi, Panglima Perang Asia Timur Raya untuk daerah Selatan, menyampaikan kepada Soekarno-Hatta-Rajiman, bahwa Indonesia sudah boleh merdeka.

Namun dengan kekalahan Jepang, penguasa Jepang di Jakarta melarang proklamasi karena perintah Sekutu untuk mempertahankan *status quo*. Dengan dorongan, dukungan, dan keberanian rakyat Indonesia, kemerdekaan Indonesia diumumkan kepada Dunia Internasional pada 17 Agustus 1945.

3. Sekitar Proklamasi di Kalimantan Selatan

H.A.Hamidhan yang pada awal Agustus 1945 diangkat sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) berangkat ke Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945 lewat Surabaya. Hampir tengah malam 16 Agustus 1945 Hamidhan bersama anggota-anggota PPKI dari daerah lainnya, dijemput dan dibawa kerumah kediaman Laksamana Maeda; Kepala Kantor

¹⁰³ Atau eks bioskop Ria, sekarang menjadi toserba Barata.

¹⁰⁴ Kini kantor Sekretariat Nahdlatul Ulama.

Penghubung Angkatan Laut yang terletak pada Oranje Boulevard.¹⁰⁵ Malam itu Hamidhan hadir pada pembacaan konsep proklamasi, esoknya hadir pada peristiwa penting pembacaan Proklamasi Kemerdekaan di halaman rumah kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur.

Setelah menghadiri sidang-sidang pleno PPKI pada tanggal 18 dan 19 Agustus 1945, Hamidhan kembali ke Banjarmasin pada tanggal 20 Agustus 1945. Keesokan harinya pagi-pagi sekali dijemput menghadap Minseibu Chokan untuk memberikan laporan. Laporan singkat tetapi padat dari Hamidhan, dijawab oleh Minseibu Chokan dengan perintah melarang disiarkannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu. Apabila tersiar, maka Hamidhanlah yang bertanggung jawab. Minseibu Chokan menawarkan untuk bersama keluarganya mengungsi ke Jakarta. Karena Hamidhan menolak meninggalkan Kalimantan Selatan, Minseibu Chokan menyarankan agar untuk sementara Hamidhan mengisolasi diri dan tidak berhubungan dengan siapa pun. Ia memutuskan untuk berkumpul keluarganya di Rantau. Sebelumnya iaizinkan untuk menemui Pangeran Musa Ardi Kesuma, Mr. Roesbandi, dan Dokter Sosodoro Djatikusumo, untuk menyerahkan surat-surat pengangkatan Mr. Roesbandi sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah, dan Dokter Sosodoro sebagai Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) Daerah. Pada kesempatan itu pula Hamidhan menyerahkan lembaran-lembaran harian Asia Raya dari Jakarta.

Setelah beberapa hari di Rantau ia dipanggil oleh Tuan Watanabe Pemimpin Umum Borneo Simboen. Yang dibicarakan bukanlah masalah persuratkabaran, tetapi memperingatkan Hamidhan akan bahaya yang dihadapinya.

Ancaman-ancaman halus dari Minseibu Chokan dan Watanabe ini memaksa Hamidhan dan keluarga, begitu pula Mr. Roesbandi dan Dokter Sosodoro untuk menyingkir ke Jawa dengan kapal laut.¹⁰⁶

Namun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia cepat diketahui oleh rakyat Kalimantan Selatan melalui Borneo Simboen yang terbit di Kandangan, dan bocoran dari pegawai-pegawai orang Indonesia yang bekerja di Siaran Radio Banjarmasin Hosokyoku khususnya kepada para pelajar Tyugakko.

Sementara itu, di Eropah pada tanggal 7 Mei 1945 di kota Reims Perancis ditanda-tangani penyerahan tanpa syarat dari seluruh angkatan perang Jerman, yang menandakan berakhirnya Perang Dunia ke-2. Sedangkan di Asia Pasifik, setelah bom atom dijatuhkan pada 6 Agustus 1945 di Hiroshima dan 8 Agustus 1945 di Nagasaki, akhirnya Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Upacara penyerahan secara resmi dilaksanakan di kapal perang Missouri di Teluk Tokyo pada 2 September 1945.

Bagi Indonesia berakhirlah pendudukan Jepang yang "seumur jagung" tetapi terasa lama itu. Gerbang Kemerdekaan Indonesia pun telah terbuka.

¹⁰⁵ Sekarang Jalan Imam Bonjol.

¹⁰⁶ Depdikbud, H.A.A. *Hamidhan: Pejuang dan Perintis Pers di Kalimantan Selatan*, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Jakarta, 1986.

DALAS HANGIT AMUN MANYARAH KADA¹

MERDEKA !

SEKALI MERDEKA TETAP MERDEKA !

MERDEKA ATAU MATI !²

BAB VII ZAMAN PERANG KEMERDEKAAN 1945-1949

A. PERANG KEMERDEKAAN 1945-1949, SEBUAH REVOLUSI FISIK DI KALIMANTAN SELATAN

Ketika Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, lahirlah sebuah Republik yang merdeka, berdaulat, sebagai sebuah bangsa. Karenanya, manakala kemerdekaan itu ingin diambil alih lagi oleh Sekutu dan antek-anteknya, tidak ada jalan lain, bagi bangsa Indonesia, kecuali “perang”. Hampir di seluruh pelosok tanah air Indonesia, muncul perlawanan fisik sejak di perempatan akhir tahun 1945 hingga tahun 1949. Peristiwa ini disebut Perang Kemerdekaan. Artinya, perang membela dan mempertahankan kemerdekaan RI. Periode peperangan ini melibatkan hampir seluruh unsur potensi bangsa, dengan titik tolak bertumpu pada aktivitas fisik, yang bersemangatkan gelora pembaharuan dan perubahan hidup untuk menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Wajah revolusi Indonesia telah dituangkan antara lain oleh *Anderson*,³ *W.H. Frederick*,⁴ *G. Mc Turnan Kahin*,⁵ *Lucas*,⁶ *Cribb*,⁷ *Audrey R. Kahin*,⁸ dalam bentuknya masing-masing, baik lokal maupun nasional. Dari sini dapat dicermati pendapat Onghokham yang menyatakan bahwa tindakan revolusioner dalam revolusi Indonesia yang tidak disponsori oleh orang-orang militer resmi, tetapi dimulai oleh berbagai kelompok masyarakat yang masing-masing mempunyai pimpinan, anak buah, senjata, dan kepentingan sendiri-sendiri.⁹ Agaknya, pendapat ini sangat relevan dengan revolusi fisik di Kalimantan Selatan 1945-1949. Dalam periode ini bangsa Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan juga mengalami bentuk perlakuan ketidakadilan serta dalam kondisi yang merugikan dalam bentuk eksploitasi ekonomi, ketergantungan dan ketidakbebasan berpolitik, diskriminasi sosial dan rasial, fragmentasi sosial, *superiority-compleks* di pihak penjajah dan seterusnya.¹⁰ Di sini akan tercermin mentalitas yang sangat kuat untuk berubah, sehingga muncullah semboyan-semboyan seperti; merdeka atau mati, esa hilang dua terbilang, mati satu tumbuh seribu, dan sebagainya. Namun demikian patut kita pahami mentalitas seperti ini

¹ Tekad heroik para pejuang kemerdekaan di Kalimantan Selatan yang ditulis dengan sepotong arang di dinding Gua Liang Bawah; persembunyian mereka selepas pertempuran di Janggar tahun 1947. Gua tersebut sekarang berada di wilayah desa Gadang Kecamatan Malangkayan Kabupaten Tanah Bumbu. Tim Napak Tilas tahun 1992 menemukan tulisan tersebut meski agak kabur karena ditelan masa selama 45 tahun.

² Pekik perjuangan MERDEKA ditetapkan dengan Maklumat Pemerintah tanggal 31 Agustus 1945; mulai berlaku pada 1 September 1945.

³ B. Anderson, *Revolusi Pemoeda*, (Penerjemah Jiman Rumboy), Sinar Harapan, Jakarta, 1988.

⁴ W.H. Frederick, *Pandangan dan Gejolak : Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946)*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989.

⁵ George Mc Turnan Kahin. *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca, 1952.

⁶ Anton E. Lucas. *Peristiwa Tiga Daerah Revolusi Dalam Revolusi* (Terjemahan Pustaka Utama Grafiti). Grafiti Pers, Jakarta, 1989.

⁷ Robert Brison Cribb, *Gejolak Revolusi di Jakarta*, (Penerjemah Hasan Basri), Grafiti Pers, Jakarta, 1990.

⁸ Audrey R. Kahin, *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*, Grafiti Pers, Jakarta, 1990.

⁹ Lihat Onghokham, “Revolusi Indonesia : Mitos dan Realitas”, dalam *Prisma* No. 8, 1985, hal. 5.

¹⁰ Lihat A.M. Djulianti Suroyo, “Revolusi dan Mentalitas : Cebu Sekitar Masa Revolusi Kemerdekaan 1945 – 1949”, Makalah Diskusi Jakarta 1995, hal. 38.

sebenarnya memiliki mata rantai historis dari tipologis masyarakat Kalimantan Selatan, seperti yang telah tergambar dalam Perang Banjar 1859-1905. Karena itu, pendapat *Michel Vovelle* dapat diterima, seperti yang dikemukakan bahwa nilai-nilai baru sebagai mentalitas baru yang diperjuangkan suatu revolusi bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sesuatu yang telah lama ada di masyarakat. Revolusi merupakan titik kulminasi dari harapan, cita-cita dan nilai lama tersebut.¹¹

Rakyat Kalimantan Selatan mengalami pelbagai pelajaran yang sangat berharga, tentang sebuah etos perjuangan dan pengorbanan bagi tanah airnya. Betapa tidak. Revolusi fisik 1945-1949 ini menggambarkan performansi yang paling unik dari sebuah historis lokal. Mulai dari munculnya organisasi-organisasi perjuangan lokal yang dikombinasi pelbagai ekspedisi dari Jawa, hingga terbentuknya ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan Selatan. Di sini muncul tanda pangkat lokal, aturan-aturan lokal, sampai kepada terbentuknya Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan dan lahirnya Proklamasi 17 Mei 1949. Taktik dan strategi gerilya yang diperoleh dari inspirasi perjuangan, tidaklah keliru kalau semuanya ini disebut "*local genius*"nya rakyat Kalimantan Selatan. Mengapa semua ini dapat terjadi ? Itulah jawaban dari tantangan keadaan yang sangat memaksa para pejuang Kalimantan Selatan untuk mengangkat eksistensinya sebagai bangsa. Bukankah Persetujuan Linggajati telah menggariskan, bahwa Kalimantan Selatan khususnya, dilepas oleh Pemerintah pusat dan diserahkan kepada Belanda. Kesepakatan ini tidak diterima rakyat Kalimantan Selatan, karena itu mereka berjuang sendiri sampai terampil membuat senjata rakitan sendiri, disamping menggunakan senjata tradisional, seperti : parang, tombak, mandau dan bambu runcing.

Dalam perang kemerdekaan, mentalitas perjuangan tidak terlepas dari peranan kaum ulama, yang memiliki posisi penting dalam masyarakat Kalimantan Selatan. Para ulama sebagian ada yang terjun langsung dalam perjuangan, sebagian lagi membantu dari garis belakang. Mufakat para ulama Banjar, bahwa berjuang melawan NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) sifatnya jihad fi sabilillah, dan gugur di medan pertempuran hukumnya syahid. Spirit religiusitas yang memang didominasi spirit Islam menyebabkan seluruh komponen masyarakat tergerak untuk berjuang dalam segala kapasitasnya. Di sinilah, peran masyarakat desa atau kampung menjadi dominan. Kampung-kampung menjadi markas-markas dan pangkalan-pangkalan. Menyediakan keamanan, dan logistik bagi para pejuang. *Kindai-kindai banih* (lumbung padi) dikuras dan diserahkan bagi keperluan perjuangan yang tidak diketahui kapan berakhirnya. Nuansa kerjasama "*gawi sabumi*" telah terjalin karena kondisi dan keadaan. Inilah salah satu fenomena revolusi yang sangat anti kolonialisme yang telah lama dirasakan rakyat Kalimantan Selatan.

Dalam mewujudkan "*power mentality*" rakyat Kalimantan Selatan juga menggunakan berbagai aspek keyakinan, antara lain; mandi taguh, baju barajah, wasi bawafak, rantai babi, untalan dan lain-lain. Keadaan ini sangat wajar, karena situasi saat itu mengharuskan adanya keberanian yang luar biasa. Keberanian untuk menghadang musuh, maupun menyerang pos-pos militer musuh yang memiliki persenjataan yang lebih modern. Faktor keyakinan dan kepercayaan muncul sebagai alternatif jalan tengah, guna mengatasi kebuntuan keadaan, sebagai akibat tirani kolonialisme yang menghancurkan harkat martabat kemanusiaan. Di sinilah kearifan masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, menunjukkan ciri dari karakteristik masyarakat yang menjunjung tinggi keberanian demi tegaknya rasa keadilan dan kemanusiaan. Ketika rasionalitas tidak bisa lagi diandalkan, maka manusia tentunya akan kembali kepada irrasionalitas yang justru memberikan ide-ide spirit yang tidak bisa dilawan dengan persenjataan otomatis. Pengalaman ini nyata bagi pejuang yang secara subjektif merasakan pahit getirnya perjuangan. Dan pengalamanlah yang mempertebal keyakinan.

¹¹ Michel Vovelle memberikan analisis intinya : Revolusi hanyalah wujud atau "baju" baru pada struktur dan nilai lama. Lihat Michel Vovelle, *Ideologies and Mentalities*, Policy Press, London, 1990, hal. 204 – 245.

Tipologis wilayah Kalimantan Selatan, juga menjadi corak yang menarik dari area berbagai Pertempuran. Tipologis wilayah sungai, memunculkan pejuang dengan latar belakang kehidupan nelayan sungai, yang sangat terampil mengetahui lokasi-lokasi yang tepat untuk menghadang, berlandung dan menyerang kapal-kapal patroli NICA. Nuansa ini sangat nampak pada masyarakat Sungai Tabuk, Marabahan, Margasari dan Negara. Tipologis wilayah daratan, memunculkan pejuang dengan latar kehidupan sebagai petani. Mereka ini sangat menguasai medan pertempuran di daratan, bukit dan semak-belukar. Karena itu, wilayah pegunungan Meratus merupakan salah satu area lalu lintas para pejuang gerilya. Kawasan Mandiangin, Pengaron, Miawa, Gunung Bulanang, Danau Darah, Hantakan, Haratai dan sisi-sisi pegunungan Meratus adalah medan medan juang gerilya ALRI Divisi IV.

Sebuah revolusi tidak saja menuntut pengorbanan, tetapi juga kerelaan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan, termasuk di antaranya menyatukan visi dalam wadah perjuangan. Oleh sebab itu, leburnya berbagai organisasi kelaskaran ke dalam ALRI Divisi IV merupakan wujud akselerasi kesefahaman yang sangat dalam maknanya, bagi kesatupaduan perjuangan. Di sini, kebesaran jiwa para ketua organisasi perjuangan sangat kita hargai, termasuk di antaranya komponen MTKI (Mandau Telabang Kalimantan Indonesia) yang meskipun baru lebur dalam tahun 1949 ke dalam ALRI Divisi IV namun itikad kesatuan sangat jelas terlihat. Semua ini, tentu juga tidak terlepas dari figur kepemimpinan Hassan Basry yang sangat familiar, akomodatif dan lebih menekankan aspek kebersamaan. Semua pemimpin yang ada pada organisasi perjuangan pra peleburan dengan ALRI Divisi IV dimasukkan dalam jajaran teras pimpinan ALRI Divisi IV. Implikasi logisnya adalah terakumulasinya kekuatan perjuangan, sehingga NICA sangat sukar mengalahkan gerilya di Kalimantan Selatan.

Dengan demikian revolusi fisik di Kalimantan Selatan merupakan rangkaian bersatu-padunya elemen kekuatan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Refleksi dari tekad ini adalah lahirnya proklamasi 17 Mei 1949, yang mengedepankan integrasi Kalimantan Selatan dengan negara Republik Indonesia. Nilai terdalam dari proklamasi 17 Mei 1949 ini adalah suatu keinginan integrasi nasional atau integrasi bangsa. Di sini tidak diragukan lagi jiwa nasionalis para pejuang ALRI Divisi IV. Itulah *sense of integrity* dalam negara nasional, yang dibuktikan melalui perjuangan dan pengorbanan. Fakta historis ini, bukan sekedar reklame tentang revolusi yang dilakukan dan dialami rakyat Kalimantan Selatan, namun merupakan sebuah potret naturalistik yang realistik historis, yang menjadi kebanggaan rakyat Banjar Kalimantan Selatan. Hampir di seluruh pelosok bumi Lambung Mangkurat, merasakan zaman revolusi fisik 1945 –1949.

B. REAKSI RAKYAT KALIMATAN SELATAN TERHADAP PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945

1. Berita Proklamasi dan Dukungan Terhadap Republik Indonesia

Kekejaman Jepang sangat dirasakan penduduk Kalimantan Selatan, sehingga mereka merasa lebih aman dengan bersikap masa bodoh. Perasaan takut itu lebih terasa lagi saat penduduk mendapatkan secara tidak sengaja selebaran dari Jakarta yang ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta dan ditujukan khusus kepada rakyat Borneo. Selebaran itu berisi ajakan untuk berjuang bersama-sama mewujudkan Negara Merdeka. Selebaran itu bertanggal 7 Juli 1945.

Semua informasi situasi Perang Pasifik dapat dikatakan tertutup, karena radio di “lak” oleh pemerintah Jepang. Rakyat hanya mungkin mendengarkan berita dari radio Domei saja. Surat kabar pun hanya surat kabar Jepang saja. Sejak tanggal 13 malam bulan Agustus 1945 tidak ada berita dari Tokyo. Kejadian ini merupakan hal yang luar biasa bagi petugas-petugas berita “Domei” dan hal ini menimbulkan tanda tanya besar. Ada apa gerangan?

Beberapa tokoh pergerakan di kota Kandangan di antaranya, H. Mohammad Arsyad, Zafry Zamzam, dan Hamli Tjarang menghubungi pejabat Jepang untuk menanyakan tentang perkembangan perang Pasifik. Mereka memperoleh informasi dari Tuan Kanda, Pejabat tertinggi di Kandangan, bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Berita itu disampaikannya sambil menangis.

Menyusul kekalahan Jepang terhadap Sekutu, Kepala Kantor Kasen Ongkookai Kabushiki Kaisha di Kandangan- Karang Jawa yakni Shumano pada tanggal 18 ke 19 Agustus 1945, pukul 7 – 8 malam (jam 19.00 – 20.00) waktu Tokyo telah melakukan perpisahan. Kepada semua karyawan oleh Shumano yang juga seorang Letnan Kolonel AL, diberikan sumbangan sebagai tanda mata. Pada saat itulah, Arthum Artha yang saat itu bekerja pada surat kabar Borneo Simboen cabang Kandangan dan juga hadir pada saat perpisahan itu diberitahukan kepadanya supaya tinggal sebentar “ada yang akan di bicarakan”, ujar Shumano. Kepada Arthum Artha, tuan Shumano berkata :

*“Tuan Arthum, ucapnya mula-mula. “Sekarang saya panggil tuan Arthum, karena Indonesia Merdeka. Tuan Soekarno – Hatta bikin “Proklamasi Kemerdekaan Indonesia”. Berita Domei dari Jakarta bahwa di Jakarta amat riuh tapi amat menakutkan. Sebab bangsa Indonesia bersiap menghadapi segala kemungkinan kekeruhan suasana politik pemerintahan antara Indonesia dan Jepang. Tuan Arthum tidak boleh omong kepada orang-orang, siapa saja, kalau bocor rahasia ini, Kem Pei Tai akan potong lehernya. Maka tuan Arthum, pulanglah dengan sabar. Saya kasih surat agar agar dalam perjalanan selamat. Saya hanya ucapkan selamat pisah dan terima kasih- gozaimasu, Arthum sang”.*¹²

Di Banjarmasin pada tanggal 15 Agustus 1945 Tuan Hayakawa, Borneo Minseibu Cokan memanggil tokoh-tokoh pergerakan di kota ini yaitu Hadhariyah M, Mr. Rusbandi dan Pangeran Musa Ardikesuma. Dalam pertemuan itu penguasa pemerintah Jepang menjelaskan bahwa Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, dan dalam waktu dekat tentara Sekutu akan tiba di Banjarmasin. Pemerintah Jepang juga menyarankan agar di Banjarmasin didirikan sebuah partai politik.

Atas saran Hayakawa Cokan tersebut, maka pada tanggal 16 Agustus 1945 didirikanlah sebuah partai politik yang bernama Persatuan Rakyat Indonesia (PRI) yang kepengurusannya terdiri atas :

Ketua	: Pangeran Musa Ardikesuma
Wakil Ketua	: A. Ruslan
Sekretaris I	: Hadhariyah M
Sekretaris II	: Abubakar
Bendahara	: H. Abdul Latif
Pembantu	: Amir Hasan Bondan ¹³

Peresmian kepengurusan tersebut diadakan di Osaka Gekijo¹⁴ Bertindak sebagai protokol adalah Aidan Sinaga dan dihadiri oleh ratusan rakyat.

Selanjutnya pengurus PRI membentuk cabang-cabangnya di Martapura, Rantau, Kandangan dan Amuntai. Ketuanya masing-masing dijabat oleh Gunco (Kiai) setempat dan dibantu oleh tokoh-tokoh pergerakan. Di Banjarmasin Ketua Cabang PRI dijabat oleh Dokter Soeranto dan E.S. Handoeran sebagai Sekretaris.

¹² Arthum Artha, “Mencapai Usia Lanjut 75 Tahun”, Otobiografi, Banjarmasin, 1995, hal. 3.

¹³ Depdikbud, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1949) Daerah Kalimantan Selatan*, Depdikbud, Jakarta, 1980, hal. 59.

¹⁴ Eks bioskop Rex/Ria, sekarang toserba Barata.

PRI juga membentuk organisasi pemuda dan organisasi wanita sebagai organisasi penunjang. Anggota organisasi pemuda PRI umumnya pernah tergabung dalam Seinendan dan Boei Teisin Tai, sedangkan organisasi wanita PRI umumnya dari Fu Jin Kai pada masa pemerintahan Jepang.

Sebelumnya partai politik PRI berdiri sebagai realisasi dari anjuran pemerintahan Jepang di Banjarmasin telah berlangsung rapat-rapat rahasia untuk mengadakan perlawanan terhadap pemerintah Jepang. Pada tanggal 9 Juli 19445 berlangsung rapat rahasia yang dihadiri oleh M. Amin Effendi, Dokter Sosodoro, Mr. Rusbandi, Achmad Ruslan dan Pangeran Musa Ardikesuma. Rapat itu berhasil membentuk sebuah badan atau gerakan yang diberi nama Badan Pertahanan Perlawanan Jepang.

Organisasi rahasia itu diketuai oleh M. Amin Effendi. Usaha dari gerakan ini adalah mengumpulkan sebanyak mungkin anggota dari Boei Teisin Tai dan Kaigun Heiho untuk melawan Jepang. Dalam bulan Agustus M. Amin Effendi pergi ke Pelaihari untuk mengunjungi bekas karyawan Nomura Mining Kogyo Company, dimana dia pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Eksplorasi Pertambangan Mangan. Dia berhasil mengumpulkan sebanyak 15 (lima belas) orang yang bersedia.¹⁵

Di Barabai pada pertengahan bulan Agustus juga diadakan rapat rahasia dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan. Di Kampung Kadi Barabai rapat tersebut dihadiri oleh H. Abdulhamid Karim, Abubakar dan Mas'ud.¹⁶

Di Amuntai juga diadakan rapat rahasia di rumah M. Adenan (Sigaku-Penilik Sekolah) dihadiri oleh H. Amir, Djermani Husin, Norman Umar, dan lain-lain.

Hal-hal tersebut di atas merupakan bukti bahwa di daerah Kalimantan terdapat kesadaran yang tinggi akan pentingnya kemerdekaan. Sebagai realisasi dari kesadaran itu kemudian terbentuklah organisasi-organisasi sebagai langkah awal dari kegiatan yang akan datang.

Berita menyerahnya Jepang kepada Sekutu tanpa syarat hanya diketahui oleh mereka yang bekerja pada kantor berita Jepang "Domei", sedangkan bagi rakyat umumnya tidak mudah mengetahuinya. Begitu pula tentang berita Proklamasi Kemerdekaan yang diucapkan di Jakarta tidak begitu saja dapat diterima oleh rakyat.

Sebelumnya telah diberangkatkan oleh penguasa Jepang ke Jakarta A.A. Hamidhan yang pada saat itu memegang jabatan sebagai pimpinan redaksi surat kabar "Borneo Simboen", untuk menghadiri sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 dan 19 Agustus 1945 A.A. Hamidhan mengikuti sidang-sidang PPKI termasuk sidang yang membicarakan UUD 1945, tentang pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden dan juga tentang pengangkatan Gubernur Kalimantan Ir. Pangeran Muhammad Noor. Selain pengangkatan Gubernur Kalimantan juga ditetapkan pengangkatan Mr. Rusbandi sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia Daerah dan Dokter Sosodoro sebagai Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI).¹⁷ Ketika pulang kembali ke Banjarmasin A.A. Hamidhan sempat pula membawa surat kabar "Asia Raya" pimpinan B.M. Diah yang memuat berita Proklamasi dan teks Proklamasi 17 Agustus 1945.

Berita proklamasi tersebut disiarkan juga oleh surat kabar "Borneo Simboen" edisi Kandungan dan Banjarmasin. Sumbernya adalah dari kantor berita "Domei" Jakarta. Berita gembira itu disiarkan lagi pada Pasar malam di Kandungan antara tanggal 20-30 Agustus 1945, yang waktu itu diadakan oleh Jepang.¹⁸ Pada saat itu teks Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar dibacakan selengkapnya oleh Ahmad Basuni. Berita kemerdekaan yang diterima dan dijadikan

¹⁵ Catatan M. Hammy A.M, tanpa judul, Banjarmasin, 1974. hal 63.

¹⁶ Catatan M. Hammy A.M, *ibid.*, hal. 164.

¹⁷ Depdikbud, *op.cit.*, hal. 62.

¹⁸ Ahmad Gafuri, *Sejarah Perjuangan Gerilya Menegakkan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan (1945-1949)*, Departemen Penerangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kandungan, 1984, hal. 36.

sebagai sumber berita yang diterima oleh beberapa tokoh pergerakan radio gelap, yang diterima secara sembunyi-sembunyi.

Kegiatan para pemuda dan tokoh pergerakan di Kandangan ternyata tidak banyak mendapat halangan. Bendera Merah Putih dikibarkan dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan. Bahkan untuk kenang-kenangan sebagai bukti telah menyalanya api kemerdekaan, Hamli Tjarang mendirikan sebuah tugu berbentuk “lilin menyala” di muka gedung kantor kepala Pemerintahan di kota Kandangan. Tetapi kemudian tugu api kemerdekaan itu dihancurkan oleh tentara NICA ketika mereka berkuasa kembali di daerah ini.

Di Banjarmasin juga terdapat radio gelap milik Sunaryo dan Sahrul yang dapat juga mengetahui bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Tetapi berita itu hanya dapat disebarluaskan secara sembunyi-sembunyi.¹⁹

Terlambatnya berita proklamasi itu disebabkan oleh sikap pemerintah Jepang yang menghambat penyiarannya. Bahkan Minseibu Cokan melarang ketat terhadap tamu yang akan menemui A.A. Hamidhan yang baru kembali dari Jakarta menghadiri sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

A.A. Hamidhan sebenarnya sudah kembali ke Banjarmasin pada tanggal 20 Agustus 1945, tetapi karena sikap pemerintah Jepang tersebut, maka tugas-tugas yang dibebankan kepadanya tidak mungkin dapat dijalankan.

Penyebaran berita tentang proklamasi kemerdekaan baru diizinkan pemerintah Jepang pada tanggal 26 Agustus 1945 melalui surat kabar “Borneo Simboen” edisi Banjarmasin. Borneo Simboen yang terbit tanggal 26 Agustus 1945 atau 26 Hatji-Gatsoe 2605 terbitan hari Minggu yang secara lengkap menyiarkan teks proklamasi dan berita tentang proklamasi itu.²⁰

Tugas yang dibebankan kepada A.A. Hamidhan setelah kembali dari Jakarta adalah

Pertama : Mendirikan Komite Nasional Indonesia Daerah Kalimantan (KNI)

Daerah

Kedua : Mendirikan Partai Nasional Indonesia

Ketiga : Mendirikan Badan Keamanan Rakyat (BKR)²¹

Semua tugas-tugas itu tidak mungkin dapat dilaksanakan karena sikap keras pemerintah Jepang. Bahkan A.A. Hamidhan kemudian disembunyikan pemerintah Jepang di kota Rantau, tempat kelahirannya, untuk menghindari tamu-tamu yang akan menyadap berita tentang Proklamasi.

Setelah pemberitaan dalam “Borneo Simboen” tanggal 26 Agustus 1945 A.A. Hamidhan harus meninggalkan Banjarmasin. Pada tanggal 7 September 1945, A.A. Hamidhan beserta keluarga, bersama-sama dengan Mr. Rusbandi dan Dokter Sosodoro diberangkatkan Jepang ke Jawa dan tidak kembali lagi. Hadhariyah M turut mengantar mereka ke pelabuhan.²²

Di daerah Kalimantan Tenggara yang sekarang menjadi Kabupaten Kotabaru mempunyai jalur hubungan komunikasi yang lebih mudah ke pulau Jawa, Sulawesi dan Balikpapan dibandingkan dengan hubungan ke Banjarmasin. Hubungan Kotabaru dengan Banjarmasin, hanya mungkin dilalui dengan kapal laut saja, karena itu berita tentang proklamasi lebih cepat diperoleh dari pelaut-pelaut Jawa maupun Sulawesi dari pada berita datang dari Banjarmasin.²³

Pertengahan bulan Agustus 1945 tentara Jepang dan pasukan Boei Teisin Tai yang sebelumnya menjaga pertahanan di “Batu Kemudi” pedalaman Kalimantan, memasuki kota dan

¹⁹ Depdikbud, *op.cit.*, hal. 63.

²⁰ Depdikbud, *loc.cit.*

²¹ Depdikbud, *ibid.*, hal. 65.

²² Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hal. 37.

²³ LVRI Cabang Kotabaru, “Rakyat Kabupaten Kotabaru Mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945”, Kotabaru, 1982.

menempati sisa bangunan yang kena bom Sekutu. Kejadian ini disertai dengan desas desus, bahwa perang Pasifik telah selesai. Mereka mengumpulkan semua harta benda dan senjata, berkemas untuk meninggalkan kota. Sementara itu penguasa Jepang mengumpulkan semua aparat pemerintah bangsa Indonesia di kantor pusat pemerintahan di tepi laut dan menjelaskan bahwa Jepang sekarang damai dan pemerintahan diserahkan pada bangsa Indonesia. Dalam kesempatan itu Sugei penguasa Jepang di Kotabaru menyerahkan kekuasaan kepada Gunco (Kiai/Districthoofd) Maskuni dan semua orang Jepang meninggalkan Kotabaru.

Pada pertengahan bulan September 1945 masuklah di pelabuhan Kotabaru tiga orang pemuda pelaut terdiri dari suku Bugis, Jawa dan Batak dengan menggunakan perahu layar dari Surabaya yang karena angin buruk, singgah di Kotabaru. Ketiga orang pemuda itu segera menghubungi pemuda bekas Boei Teisin Tai dan Kaigun Heiho yang diwakili oleh Peran Kamar, Mastari Misin, Ahmad Kawi dan Mursyid Saberani. Selanjutnya diadakan pertemuan dengan ketiga pelaut yang mengaku pejuang yang bertugas secara rahasia dengan tujuan Sulawesi. Dari pertemuan tersebut diketahui dengan jelas tentang Proklamasi Kemerdekaan, susunan pemerintahan dan situasi terakhir di Jawa, khususnya di Surabaya.²⁴

Sebagai tindak lanjut dari pertemuannya itu, maka oleh tokoh masyarakat diadakan pertemuan yang lebih besar yang terdiri dari : Guru Alwi, Yusuf Janal, Golam Ahmad, Wahel dan dari kepengurusan pemuda antara lain Peran Kamar, untuk menentukan langkah selanjutnya sehubungan dengan situasi tersebut.

Di Pagatan berita Proklamasi itu agak terlambat diketahui. Berita itu baru diketahui setelah datang utusan dari Gubernur Kalimantan Ir. Pangeran Muhammad Noor, yang mengutus Andi Sekencuang dan Andi Maksum ke Pagatan.²⁵

Sementara itu tokoh-tokoh masyarakat Pagatan mengirim utusan ke Balikpapan yang terdiri dari : A. Syukur Rahim, dan Minhaj untuk memperoleh informasi terakhir situasi di Balikpapan. Utusan tersebut setelah kembali menceritakan tentang kegiatan rapat-rapat umum yang diadakan oleh I.N.I (Ikatan Nasional Indonesia).

Selain itu dikirim utusan yang terdiri dari : H. Baderi, Gusti Ibrahim, M. Yasin dan M. Hasan Dahul ke Banjarmasin dengan berjalan kaki pulang pergi untuk memperoleh informasi tentang situasi terakhir.²⁶ Sikap dan tindakan pemerintah Jepang terhadap kegiatan masyarakat ialah berusaha agar kegiatan dalam keadaan tenteram jangan terjadi hal-hal yang mengganggu sementara menunggu Sekutu tiba.

Pada mulanya memang Jepang menaruh simpati terhadap perjuangan kemerdekaan. Namun sikap simpati itu dimaksudkan agar rakyat di daerah ini bersedia bersama-sama membantu Jepang untuk mempertahankan diri dari serangan Sekutu. Sikap ini juga mengandung maksud agar orang Indonesia jangan memusuhi Jepang pada saat-saat Jepang menghadapi Sekutu.

Tindakan-tindakan pemerintah Jepang yang menghambat itu antara lain adalah :

- a. Tindakan penguasa Jepang melarang A.A Hamidhan yang baru kembali dari menghadiri sidang-sidang PPKI di Jakarta untuk mengambil langkah-langkah sehubungan dengan tugasnya sebagai anggota PPKI dari daerah Kalimantan Selatan. Karena sikap pemerintah Jepang itulah A.A Hamidhan tidak berhasil membentuk Komite Nasional Daerah Kalimantan, tidak berhasil membentuk PNI dan terlambatnya memuat berita tentang Proklamasi Kemerdekaan pada surat kabar "Borneo Simboen".

²⁴ LVRI Cabang Kotabaru, *ibid.*, hal. 6.

²⁵ LVRI Cabang Kotabaru, *ibid.*, hal. 13

²⁶ LVRI Cabang Pagatan, "Riwayat Ringkas Perjuangan Rakyat Pagatan dan Sekitarnya Dalam Mempertahankan Proklamasi RI (1945 – 1949)", Pagatan , 1987.

- b. Penguasa Jepang memindahkan orang-orang yang dianggapnya dapat mempengaruhi situasi daerah Kalimantan Selatan ke Pulau Jawa, dengan maksud status quo di daerah ini tetap utuh. Akibatnya orang-orang yang sangat diharapkan di daerah ini sebagai pelopor dan penggerak tidak ada lagi.
- c. Kekejaman dan kebiadaban orang-orang Jepang terhadap rakyat Indonesia, Kalimantan Selatan khususnya, menyebabkan orang merasa takut untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang di Banjarmasin mengumumkan ancaman hukuman berat terhadap segala perampokan dan lain-lain yang berupa pelanggaran yang mengganggu keamanan. Pengumuman dikeluarkan pada tanggal 3 September 1945. pengumuman ini ada hubungannya dengan kedatangan A.A Hamidhan dari Jakarta.
- d. Media massa yang ada di Kalimantan Selatan hanyalah surat kabar "Borneo Simboen" yang menyuarakan Jepang, sedangkan surat kabar yang berbeda tidak mungkin dapat diterbitkan. "Borneo Simboen" edisi Kandungan pimpinan Ahmad Basuni yang memberitakan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 20 Agustus 1945 merupakan suatu keberanian yang hebat, sementara Borneo Simboen edisi Banjarmasin diizinkan pemerintah Jepang memuat berita tersebut pada penerbitan tanggal 26 Agustus 1945.²⁷

Berita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 20 Agustus 1945 di Kandungan dan tanggal 26 Agustus 1945 di Banjarmasin mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat. Dalam waktu singkat berita itu tersebar luas ke seluruh daerah Hulu Sungai. Di Banjarmasin masyarakat menyambutnya dengan mengibarkan bendera Merah Putih. Pemerintah Jepang tidak melarang terhadap pengibaran bendera Merah Putih ini.²⁸

Di Amuntai, beberapa pemuda dipelopori Abdul Hamidhan, Ruslan Husin, dan kawan-kawan telah naik mobil Chevrolet DA-216 dengan kibaran bendera Merah Putih, secara maraton pergi berkeliling kota sampai ke Alabio, Lampihong, Paringin dan Kelua, menyebarkan berita Proklamasi Kemerdekaan tersebut kepada masyarakat umum. Di tiap tempat yang disinggahi mendapat sambutan hangat dan penuh kegembiraan.

Di Martapura atas inisiatif Dokter Suprpto Kepala Rumah Sakit Martapura pada tanggal 27 Agustus 1945 dengan mengambil tempat di kampung Jawa, mengadakan pertemuan rahasia dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam jumlah yang terbatas. Tujuan dari rapat itu adalah :

1. Menyatukan pikiran dan pendapat, dalam usaha menyongsong persiapan Pemerintahan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan.
2. Menyatukan kekuatan di kalangan pemuda khususnya bekas Kaigun Heiho dan Polisi Jepang untuk persiapan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat Borneo (TKRB).
3. Mengumpulkan alat senjata dan mesiu untuk mempertahankan Wilayah Borneo.

Pertemuan itu mengundang sejumlah tokoh yang undangannya disampaikan secara lisan untuk menjaga kerahasiaannya. Yang dihadiri oleh :

1. Kiai H. Hasan Tjorong, Konsul Muhammadiyah Kalimantan.
2. Opzichter Soeradi dari VW (PU) Martapura.
3. R. Wijono eks pimpinan Romusha (eks PETA Semarang).
4. D. Giman anggota Polisi Jepang Martapura.
5. R. Sastrodiatmojo, Polisi Jepang.
6. M. Hammy A.M., Polisi Jepang.
7. R. Sudarmin, eks pegawai Nomura Kabushiki Kelayan.

²⁷ Depdikbud, *op.cit.*, hal. 67 - 96.

²⁸ Depdikbud, *ibid.*, hal. 70

Dalam rapat itu baru sempat hadir empat orang di antaranya yaitu Dokter Suprpto, Kiai Hasan Tjorong, Opzichter Soeradi dan M. Hammy A.M. kemudian terpaksa bubar karena Polisi Jepang datang ke rumah sakit untuk membubarkannya.

Pertemuan kedua berlangsung pada tanggal 21 September 1945 bertempat di kantor VW (PU) dihadiri oleh : Dokter Suprpto, Kiai Hasan Tjorong, Soeradi, R Sudirman, M. Hammy A.M. Dalam rapat itu Dokter Suprpto menjelaskan tentang Proklamasi Kemerdekaan, namun ia masih ragu-ragu apakah kemerdekaan itu juga meliputi Kalimantan, karena A.A. Hamidhan yang pernah menghadiri sidang PPKI belum sempat menjelaskannya. Walaupun demikian rapat telah berhasil membentuk Panitia Pembentukan Pemerintah Republik Indonesia Borneo (PPPRIB). Susunan Panitia itu diketuai oleh Dokter Suprpto, Wakil ketua I dan II masing-masing Kiai Hasan Tjorong dan Soeradi dengan Pembantu Umum dijabat oleh M. Hammy A.M. Panitia ini dilengkapi dengan Seksi Pemerintahan, Hubungan Urusan Militer dan Persenjataan serta Urusan Sosial dan Ekonomi.²⁹

PPRI itu terdiri dari Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Badan Perjuangan, Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan pembentukan Polisi Tentara untuk mengimbangi NICA. Pemerintahan Umum yang merupakan pucuk pimpinan dijabat oleh Alwie beserta stafnya, Badan Perjuangan juga dijabat oleh Alwie dengan wakilnya Yusuf Jamal dengan seperangkat staf yang membantunya, BKR dijabat oleh Peran Kamar sebagai pimpinan dengan anak buahnya bekas Kaigun Heiho, Boei Teisin Tai yang merupakan inti pasukan, sedangkan Polisi Tentara dijabat oleh Yusuf Jamal sebagai Komandan. PRRI ini dilengkapi lagi dengan sejumlah pemerintahan sipil di daerah kecamatan-kecamatan.³⁰

Realisasi dari kedatangan Andi Sekencuang dan Andi Maksum sebagai utusan dari Gubernur Kalimantan ke Pagatan, maka pada tanggal 25 September 1945 merupakan hari sejarah bagi rakyat Pagatan, karena pada hari itu pertama kali dikibarkan bendera merah putih, dilangsungkannya rapat umum dan pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah Pagatan yang terdiri dari : Andi Ancong, Andi Jufri, Gusti Ibrahim. Selain itu dibentuk pula Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang pimpinan umumnya dijabat oleh M. Baderi dengan diwakili oleh Andi Faisal dan Andi A. Karim yang dilengkapi dengan 9 orang pasukan.³¹

2. Menghadapi Tentara Sekutu dan NICA

a. Kedatangan Tentara Sekutu dan NICA

Taklaknya Jepang kepada Sekutu, maka sebuah daerah yang sebelumnya di bawah kekuasaan Jepang, dimasuki tentara Sekutu. Tugasnya untuk melucuti senjata dan mengembalikan orang-orang Jepang ke negerinya. Amerika akan mengambil alih kekuasaan Jepang di Philipina, sedangkan Inggris akan mengambil alih kekuasaan Jepang di daerah Asia Tenggara, kecuali Vietnam Utara dan Taiwan yang diambil alih oleh Cina.

Inggris melakukan pendaratan ke wilayah Sumatra, Jawa dan Bali sedangkan wilayah lainnya termasuk Kalimantan diserahkan kepada Australia. Pendaratan tentara Inggris di Jawa dilakukan sekitar bulan September 1945. di Jawa, Inggris tidak lagi menghadapi Jepang tetapi menghadapi bangsa Indonesia yang telah menyusun pemerintahan. Selain itu Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan karena sebagian dari senjata mereka telah dilucuti oleh bangsa Indonesia untuk melawan Sekutu.³²

²⁹ M. Hammy A.M, *op.cit.*, hal. 168 – 170.

³⁰ LVRI Cabang Kotabaru, *op.cit.*, hal. 52 – 54.

³¹ LVRI Cabang Pagatan, *op.cit.*, hal. 2 – 4.

³² M. Hammy A.M, *op.cit.*, hal. 174.

Di Kalimantan tugas Sekutu dalam hal ini adalah Australia lebih mudah, karena di Kalimantan belum terbentuk pemerintahan sebagaimana halnya di Jawa. Di Kalimantan Timur tentara Sekutu telah mendarat sebelum Jepang menyerah yaitu pada bulan Juli. Di Kalimantan Barat sekitar bulan Agustus sedangkan di Kalimantan Selatan pada tanggal 17 September 1945.

Tugas tentara Sekutu adalah

1. Menerima penyerahan satuan-satuan Jepang dan pengembalian ke negerinya.
2. Mengamankan dan membebaskan kaum interniran dan tawanan perang.
3. Mempertahankan keamanan di daerah-daerah kekuasaan Sekutu untuk diserahkan kepada pemerintahan sebelumnya.

Kedatangan tentara Sekutu di Banjarmasin di bawah pimpinan Kolonel Rabson dengan kekuatan militer 250 orang dengan secara berangsur-angsur dan menyebar di seluruh kota di Kalimantan Selatan. Dalam waktu yang relatif singkat seluruh daerah Kalimantan Selatan telah diduduki tentara Sekutu.³³ Bekas tawanan yang terdiri dari bangsa Belanda yang kurus kering segera dibebaskan, bekas tentara yang tidak ikut ditawan, segera dipanggil kembali dan dipersenjatai. Tiap warga Belanda baik berkulit putih maupun sawo matang diberikan makanan, pakaian serta gaji selama pendudukan Jepang dan diberikan senjata untuk melindungi diri.

Di samping tentara Australia, berkeliaran pula tentara NICA sebanyak kurang lebih 100 orang yang dipimpin oleh Mayor AL Van Assenderp, yang kedatangannya membonceng tentara Australia. Kekuatan tentara NICA ini kemudian ditambah dengan bekas KNIL (*Koninklijke Nederlands Indische Leger*), dan bekas Heiho. Beberapa bekas pegawai negeri sipil Belanda yang mau membantu NICA diajak untuk tetap menjadi pegawai NICA meskipun mereka juga bekerja sebagai pegawai Jepang. Dengan demikian pemerintahan sipil Belanda segera terbentuk dengan merekrut bekas pegawai negeri sipil Jepang, begitu pula bekas kepolisian Jepang menjadi polisi NICA.

Bidang ekonomi perdagangan disusun kembali dengan mengajak orang-orang Cina sesuai dengan bidangnya masing-masing, antara lain :

1. Voedings Middelen Fonds (VMF) untuk urusan bahan makanan.
2. Nederlands Indische Rubber Uitvoer Bedrijf (NIRUB) untuk urusan karet.
3. Petroleum Board untuk urusan minyak.
4. Militaire Transport Dienst (MTD) untuk urusan angkutan darat.
5. Nederlands Indische Gouvernement Import en Export Organisatie (NIGIEO) untuk urusan impor-ekspor.
6. NICA Betaal Kantoor yang kemudian ditingkatkan menjadi Javasche Bank, untuk urusan pembiayaan.
7. Bevoorradingkantoor untuk urusan pembekalan logistik.
8. Distributie Dienst untuk urusan distribusi pegawai.

Sementara itu uang kertas Jepang masih berlaku disamping uang kertas NICA dengan perbandingan 100 : 3 kemudian uang kertas Jepang tersebut segera ditarik dari peredaran. Akhirnya jelaslah maksud NICA yang sebenarnya setelah keluar pengumuman Jenderal Sir Thomas Albert Blamey, Panglima tentara Australia yang disiarkan pada tanggal 24 Oktober 1945, isinya adalah penyerahan kekuasaan Sekutu kepada NICA. Sebenarnya pengumuman itu tertanggal 1 Oktober 1945, namun NICA memperhitungkan bahwa saat itu belum tepat. Setelah NICA merasa bahwa dia akan diterima kembali oleh masyarakat Kalimantan dengan kembalinya bekerja pegawai-pegawai yang dahulu pernah bekerja dengan Belanda, barulah pengumuman itu disiarkan.

Pengumuman itu berbunyi :

PROCLAMATION

³³ A. Hamdi Budhigawis, "Menelusuri Jejak-Jejak Revolusi di Kalimantan Selatan", Banjarmasin, 1989. hal. 21.

General Sir Thomas Albert Blamey GBE, KCG, CMG, DSC, ED Commander in Chief Australia Military Force.

Kepada :

Penduduk dari Timor, Selebes, Menado, Borneo, Residensi Ternate, Afdeeling Amboina, Pulau Kei, Aru dan Tanimbar, Nieuw Guinea.

Tentara Serikat telah membinasakan segala kekuatan Jepang baik di darat, di laut dan di udara, serta kerajaan bangsa Jepang seluruhnya telah menyerah dengan tidak bersyarat kepada kaum Serikat. Angkatan-angkatan perang yang berada di bawah komando Jenderal Sir Thomas Albert Blamey telah tiba di negeri ini dan telah menerima penyerahan antara Jepang atas nama kaum Serikat. Tentara Serikat akan melindungi penduduk dan menjaga keamanannya sampai waktunya kembali Pemerintah Hindia Belanda yang sah.

Atas perintah Jenderal Sir Thomas Albert Blamey, pimpinan tertinggi kekuatan Serikat dibagian ini, maka Undang-Undang Hindia Belanda yang telah diketahui oleh segenap penduduk di sini, akan dipakai dan dijalankan oleh tentara NICA yang sekarang berada di daerah ini. Demikian juga segala peraturan yang dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi tentara Serikat untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Sabtu, 1 Oktober 1945

Thomas Blamey

Pemimpin Tertinggi Tentara Australia³⁴

Khusus tentang apa sebenarnya NICA kedudukan serta perannya dijelaskan oleh Mayor A.L. Van Assenderp sebagai berikut :

Sewaktu Sekutu memasuki daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai oleh Jerman, Italia dan Jepang, selalu diiringi oleh bagian yang mengurus wilayah daerah yang telah dikuasai itu. Hal ini merupakan bagian dari Tentara Sekutu yang disebut "Civil Affairs" atau disebut juga sebagai "Civil Administration". Mereka yang tergabung dalam Civil Administration ini terdiri dari orang-orang yang benar-benar mengetahui tentang daerah itu. Di benua Eropah bagian ini disebut AMGU (*Allied Military Government Unit*), di Philipina tentara Sekutu memasuki Indonesia, mereka membawa bagian yang disebut NICA. NICA dari unit-unit dengan staf masing-masing yang terdiri dari orang yang berpengalaman dalam urusan pemerintahan, kesehatan, keuangan, ekonomi dan lain-lain.

Selanjutnya A.L. Van Assenderp menjelaskan tentang tugas dari NICA dan hubungannya dengan tentara Sekutu sebagai berikut :

1. Memberi advis kepada komandan tertinggi dari tentara Sekutu, tentang keadaan dalam negeri yang diduduki.
2. Melakukan pemerintahan bala tentara dalam daerah itu atas nama komandan tersebut.
3. Memberikan pertolongan dan keringanan kehidupan kepada penduduk dalam soal ekonomi, memberikan bantuan kesehatan dan perlindungan terhadap mereka.
4. Memberikan pertolongan dan mengusahakan kepada mereka yang meninggalkan tempat kediamannya dengan terpaksa untuk kembali ke tempat asalnya agar mereka dapat melakukan pekerjaan untuk penghidupan mereka.³⁵

³⁴ Hassan Basry, *Kisah Gerilya Kalimantan (Dalam Revolusi Indonesia) 1945-1949, Jilid Pertama*, Yayasan Lektur Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 1961, hal. 12 -13.

Dengan adanya pengumuman dan penjelasan pemerintah NICA rakyat sadar, bahwa Belanda berusaha kembali berkuasa dengan menyebut dirinya NICA. Rakyat Kalimantan menganggap bahwa penanaman kekuasaan NICA adalah perampasan hak asasi bangsa Indonesia. Wajarlah jika muncul perlawanan di Kalimantan.

Dari Balikpapan didatangkan tentara NICA yang dikenal dengan Kompi X, dan berangsur-angsur tentara Australia ditarik kembali. Kompi X ini terdiri dari orang-orang Indonesia bekas serdadu Belanda, bekas Romusha waktu Jepang dan orang politik yang dibawa ke Australia waktu Jepang berkuasa di Indonesia.³⁶

Langkah selanjutnya NICA membentuk komisi untuk menyita barang-barang milik Jepang seperti gudang-gudang Kaisha yang berisikan bahan pakaian dan makanan. Tindakan ini dilakukan NICA sangat berhati-hati. Anggota komisi ini terdiri dari orang Indonesia, seperti : M.D. Sa'ad, M. Imansyah dan Gusti Mastur.

Semua gudang-gudang milik Jepang dan begitu pula kantor-kantor ditempel plakat besar bertulisan "NICA" atau "NIGIEO".

Atas instruksi Mayor A.L. Van Assenderp mereka melakukan inventarisasi dan pencatatan pegawai pemerintah Kepolisian dan instansi lainnya termasuk badan-badan semi pemerintah.

Mayor A.L. Van Assenderp juga memanggil tokoh-tokoh masyarakat ke kantornya, terdiri dari : Pangeran Musa Ardikesuma, A. Ruslan dan Hadhariyah M, untuk menjelaskan tentang pemerintahan NICA di daerah ini, dan mengharapkan agar mereka dapat membantu pemerintahan NICA.

Pemerintahan di tiap daerah onderafdeling dan tingkat afdeling dipercayakan pada bangsa Indonesia di bawah Kiai-kiai Kepala. Dengan demikian NICA telah mengatur pemerintahan untuk berkuasa kembali di daerah Kalimantan Selatan.³⁷

b. Reaksi Masyarakat Terhadap NICA

Meskipun berusaha menanamkan kekuasaannya namun NICA tetap bersikap hati-hati. Terbukti dengan pengumuman Jenderal Sir Thomas Blamey tertunda disiarkan selama 24 hari, untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki NICA. Kesadaran masyarakat timbul setelah dua orang tentara Australia, Charles Foster dan Victor Little yang mengaku dari Partai Komunis Australia menyerahkan 5 lembar pamflet yang telah dikeluarkan oleh kaum politisi Indonesia yang berada di Australia beralamat Metropole Hotel Melbourne. Isi pamflet itu ialah menerangkan bahwa Indonesia telah merdeka, mengajak semua lapisan masyarakat dan golongan pegawai, polisi, buruh dan rakyat umumnya untuk bersatu dan supaya menolak kedatangan NICA.³⁸

Pamflet kemudian diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia oleh M. Afiat, dicetak dengan huruf arab dan latin, kemudian diperbanyak ± 400 lembar.

Penyebaran pamflet itu dilakukan pada tanggal 1 Oktober 1945 di seluruh Kalimantan Selatan. Di Banjarmasin penyebaran dipelopori oleh Hadhariyah M, F. Mohani, Hamli Tjarang dan Abdurrahman Noor. Di Rantau dan Kandangan dipelopori oleh H. M. Rusli dan Hasnan Basuki, sedangkan di Barabai oleh H. Baderun. Daerah lainnya seperti Pelaihari, Martapura, Marabahan dan Puruk Cahu penyebarannya dilakukan oleh tentara Australia yang bertugas melucuti senjata Jepang di daerah tersebut.³⁹ Pamflet tersebut juga disebar di Amuntai melalui sopir dan pedagang Amuntai yang kembali dari Banjarmasin.

³⁵ Hassan Basry, *ibid.*, hal. 14.

³⁶ M. Hammy A.M, *op.cit.*, hal. 179.

³⁷ A. Hamdi Budhingawis, *op.cit.*, hal. 26 – 29.

³⁸ Hassan Basry, *op.cit.*, hal. 15-16; lihat pula Depdikbud, *op.cit.*, hal. 76.

³⁹ Depdikbud, *ibid.*, hal. 76.

Bersamaan dengan penyebaran pamflet-pamflet itu diadakan pula rapat-rapat dan aksi pencoretan di rumah-rumah Belanda dan kantor-kantor pemerintah dengan tulisan “Milik Republik”. Penyebaran pamflet itu sangat berpengaruh di kalangan rakyat, sebab pamflet itu menyadarkan rakyat bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan dengan demikian bangsa Belanda dengan pemerintah NICA-nya harus ditolak.

Akibat dari penyebaran pamflet itu Hadhariyah M, dkk ditangkap NICA, barulah kemudian dikeluarkan setelah Pengurus Besar Persatuan Rakyat Indonesia (PBPRI) melakukan aksi protes. PBPRI ini lahir pada tanggal 19 Agustus 1945 sebagai ganti *Kenkoku Dosi Kai* pada masa Jepang merupakan organisasi yang menginginkan sesegeranya terbentuk pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintahan NICA bertindak sangat hati-hati dan selalu waspada, karena itu NICA membebaskan Hadhariyah M, dengan persyaratan tertentu. Sebelum dibebaskan mereka disodori sebuah perjanjian yang sangat mengikat dan mempersulit langkah perjuangan selanjutnya.⁴⁰

PBPRI segera menanggapi sikap dari pemerintah NICA dengan mengadakan rapat kilat. Rapat kilat itu memutuskan dengan suara bulat untuk mengangkat Pangeran Musa Ardikesuma sebagai Residen Republik Indonesia di Kalimantan berkedudukan di Banjarmasin. Selanjutnya PBPRI memutuskan untuk membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNI Daerah) berkedudukan di Banjarmasin dengan ketua KNI Daerah A. Ruslan serta Hadhariyah M, sebagai penulis I dan F. Mohani sebagai penulis II.

Dari proses verbal yang dilakukan terhadap Hadhariyah M, jelaslah bagi pimpinan PRI bahwa NICA adalah alat untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di daerah ini. Hal ini semakin jelas ketika Mayor A.L. Van Assenderp mengundang para Kiai untuk membentuk pemerintahan Belanda pada tanggal 10 Oktober 1945. Pengurus besar PRI para pemuda yang tergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat (TKR) berusaha mencegahnya. Itulah sebabnya pengurus besar PRI mengadakan rapat kilat pada tanggal 9 Oktober 1945. Rapat tersebut diadakan di jalan Andalas yang akhirnya selain menetapkan Pangeran Musa Ardikesuma sebagai Residen dan pembentukan KNI Daerah, juga memutuskan bahwa pada tanggal 10 Oktober 1945 akan diadakan upacara penaikan bendera Merah Putih dan penurunan bendera Belanda. Acara tersebut diikuti semua lapisan masyarakat serta mengadakan arak-arakan atau pawai bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, disamping itu rumah-rumah diwajibkan memasang bendera Merah Putih.⁴¹

Pada pagi tanggal 10 Oktober 1945 keluarlah surat-surat edaran yang berisi pengumuman tentang Pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia di Kalimantan. Persiapan telah dilaksanakan untuk merayakan kemerdekaan dan pengangkatan Residen dan KNI tersebut. Pelopor persiapan dan keamanan diletakkan di atas pundak PBPRI dengan barisan pemudanya di bawah pimpinan Fachruddin Mohani, Abdurrahman Noor, Abdul Mutalib Syukur, Hamli Tjarang, Hanafiah, Abdul Kadir Uwan, M. Amin Effendi, M. Aminuddin dan M. Afiat.

Ribuan rakyat dari pelosok kota Banjarmasin berkumpul di muka Gubernuran dengan membawa bendera Merah Putih dan lencana Merah Putih. Pelajar-pelajar sekolah menengah berbaris dengan membawa poster-poster yang bertulisan “Kami Rakyat Indonesia”. Anggota kepolisian dan pegawai telah membuang mahkota kerajaan Belanda dan menggantikannya dengan lencana Merah Putih.⁴²

Ternyata bendera Belanda yang akan diturunkan hari itu dijaga ketat oleh sepasukan tentara NICA dengan dibantu oleh tentara Australia. Karena itu pihak panitia mengadakan perundingan dengan Kolonel Rabson, dan akhirnya didapat suatu kesimpulan :

⁴⁰ Hassan Basry, *op.cit.*, hal. 17.

⁴¹ Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hal. 38 – 39.

1. Bendera Merah Putih boleh dikibarkan di hari itu saja, begitu pula lagu kebangsaan dan perarakan Merah Putih.
2. Bendera Belanda tidak boleh diturunkan, bahwa siapa yang menurunkan akan ditembak.⁴³

Rencana yang telah dipersiapkan untuk melantik Pangeran Musa Ardikesuma sebagai Residen Republik Indonesia, penaikan bendera Merah Putih telah gagal dan NICA berusaha untuk memaksakan kekuasaannya dengan bantuan tentara Australia.

Hal yang sama terjadi pula di Amuntai dan Barabai. Bahkan di Kandangan pasukan Australia telah membubarkan rakyat yang sedang berkumpul, namun kemudian untuk menurunkan emosi rakyat, penaikan bendera Merah Putih akhirnya diizinkan. Penaikan bendera dilakukan oleh Zafry Zamzam, H. M. Roesli, A.W. Syachrani dan H. A. Kusasi.

Di kota-kota lain juga diadakan arak-arakan Merah Putih seperti di Rantau dan Martapura. Tetapi karena persiapannya terlalu sempit acara tersebut tidak berlangsung dengan memuaskan.⁴⁴

Pawai besar yang diadakan di Amuntai oleh pemuda PRI, wanita PRI, para pemuda dan masyarakat umum dilakukan dengan membawa bendera Merah Putih, gambar presiden Soekarno, serta slogan “Hidup Republik Indonesia”, “Ichlas Jiwa Perjuangan” dan lain-lain. Pawai ini diramaikan dengan musik tiup dan sambutan rakyat sangat meriah.

Sejak peristiwa tanggal 10 Oktober 1945 yakinlah para pemuda bahwa terhadap Belanda harus diambil jalan kekerasan. Karena itulah kemudian terjadi insiden dimana-mana, seperti perobekan pengumuman NICA oleh para pemuda dan peristiwa berdarah sebagai akibat kesombongan tentara Belanda.

Kekecewaan rakyat bertambah besar ketika mendengar bahwa para pimpinan yang sekarang didambakan mereka berubah haluan. Pengangkatan Comisie Kepala Iberahim Sedar bawahan dari Pangeran Musa Ardikesuma menjadi Kiai Besar, menyebabkan goyangnya pendirian Pangeran Muda Ardikesuma. Hampir sebagian besar Kiai atau pegawai Belanda sebelumnya tidak berdaya menghadapi tekanan Belanda (NICA), yang menyebabkan mereka kembali bekerja untuk kepentingan NICA. Dalam hal ini A. Ruslan yang tetap menolak.⁴⁵

Kekecewaan rakyat terhadap sikap NICA dan kaki tangannya, menimbulkan rasa benci yang mendalam terhadap NICA yang memaksakan kekuatannya untuk berkuasa kembali di Kalimantan Selatan. Kebencian terhadap NICA ini menimbulkan insiden berdarah di antaranya berupa perlawanan bersenjata dan menimbulkan banyak korban sebagai pahlawan bangsa.

Insiden-insiden berdarah itu antara lain adalah :

1. Di Banjarmasin terjadi penganiayaan terhadap seorang. Ketika orang-orang sedang berkerumun memperhatikan sebuah pamflet yang terpasang di pertokoan Min Seng Pasar Baru Banjarmasin, datanglah dua orang tentara Australia dan seorang NICA. Yang memasang pamflet adalah Achmad Katoeng, yang diberikan oleh Suandi. Kedua orang tentara Australia itu hanya memperhatikan sedangkan tentara NICA tersebut langsung merobek pamflet yang terpasang di situ. Melihat kejadian itu rakyat yang sudah lama benci terhadap Belanda langsung mengeroyoknya, sedangkan dua orang Australia itu menghindarkan diri dari kejadian itu. Orang Belanda tersebut berusaha lari ke arah pasar Sudimampir, tetapi baru sampai di sekitar jembatan A. Yani rakyat mencegatnya dan memukulinya beramai-ramai hingga pingsan. Pengeroyokan dipelopori oleh Achmad Katoeng, dan orang-orang yang terlibat dalam pengeroyokan itu antara lain : H. Bachroedin Noor, M. Saleh, Asnawi, Warian Mawardi, H.M. Tanda dan lain-lain.

⁴² Hassan Basry, *op.cit.*, hal. 18.

⁴³ Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hal. 39.

⁴⁴ A. Hamdi Budhigawis, *op.cit.*, hal. 51.

⁴⁵ Hassan Basry, *op.cit.*, hal. 22-23.

2. Di pasar ikan Barabai seorang polisi NICA tewas ditikam seorang yang tidak dikenal. Penikaman tersebut diawali dengan peristiwa sikap kasar dari polisi NICA yang menunjukkan keangkuhan sebagai aparat.
3. Pembunuhan resersi Belanda di kampung Qadi Barabai (sekarang bernama jalan Tri Kesuma). Pembunuhan itu dilakukan pada malam hari oleh tiga bersaudara yang digerakkan oleh Nawawi Arif. Peristiwa ini menyebabkan dua orang korban di pihak resersi Belanda dan seorang korban dari adik Nawawi Arif sendiri.⁴⁶
4. Sewaktu seorang pejabat Belanda sedang berpidato pada suatu pertemuan bertempat di bekas gudang garam pasar Rantau, seorang pemuda bernama Tasan bersama kawan-kawannya nekad untuk membunuh Belanda tersebut. Untuk itu dia lebih dahulu keluar dari gedung pertemuan. Peristiwa itu gagal karena Hasbullah pimpinan SERMI tidak memberi isyarat. Disamping keraguan terjadi, karena mobil yang ditumpangi pejabat tersebut memakai bendera Australia.

Perasaan benci terhadap Belanda tersebut kembali meluas ketika pada tanggal 9 November 1945 selesai sholat Jum'at berhenti sebuah mobil jeep Belanda di kampung Banua Padang Rantau. Orang-orang yang keluar dari masjid tersebut bersama-sama dengan para pemuda menyerang mobil Belanda tersebut.

Beberapa orang Belanda di mobil tersebut kemudian melarikan diri dan menumpang mobil lain menuju ke arah Rantau. Mobil yang ditinggal mereka itu kemudian oleh para pemuda diceburkan ke sungai. Orang-orang Belanda yang melarikan diri tersebut setelah tiba di Rantau meminta bantuan kepada tentara Belanda di Kandangan. Akibatnya tentara Belanda yang tiba di Banua Padang, melakukan penembakan secara membabi buta. Peristiwa itu mengejutkan penduduk sekitarnya.

Rakyat sekitar Rantau seperti Mandarahan, Walang dan Kupang berbondong-bondong ke Rantau untuk bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan. Masing-masing mereka membawa senjata seperti parang, tombak, keris, sedangkan di jalanan di pasang rintangan-rintangan, bahkan di depan jembatan kota Rantau dipasang rintangan dari batang pohon kayu dan pohon kelapa dan sebagainya. Seluruh rakyat dalam siap tempur dengan semangat yang tinggi.

Dipelopori oleh seorang yang bernama Tasan bersama Abul Hasan Gaffar sambil meneriakan "Allahu Akbar" dan ucapan "Fi Sabilillah" mereka bersiap menunggu kembali tentara Belanda dari kampung Banua Padang pulang ke Kandangan. Tepat waktu menunjukkan pukul 16.03 militer Belanda tiba di kota Rantau.

Mobil Belanda berhenti melihat tumpukan batang pohon kelapa yang merintang jalan, dan bersamaan dengan itu terdengar suara teriakan Tasan untuk menyerbu. Belanda langsung menembakkan tembakan otomatis dengan membabi buta.

Gugurlah saat itu Tasan dan Ahmad Panyi, tepat di muka jalan yang sekarang bernama Tasan - Panyi. Bunyi tembakan itu yang menyebabkan rakyat mundur. Tembakan baru berhenti setelah Kiai Kepala Muhammad Said datang dan mengadakan pembicaraan dengan militer Belanda.

Besok harinya tanggal 10 November 1945 bertempat di Masjid kota Rantau diadakan musyawarah Alim Ulama yang ada di seluruh daerah Rantau, dengan tujuan untuk memutuskan secara hukum Islam terhadap kedua mayat pejuang yang gugur. Rapat dipimpin oleh H. Gazali Qadhi Rantau. Berdasarkan hasil mufakat para Alim Ulama tersebut, diputuskan bahwa kedua

⁴⁶ Depdikbud, *op.cit.*, hal. 79 - 81.

mayat tersebut dinyatakan sebagai syuhada, karena pelaksanaan terhadap mayat tersebut diberlakukan seperti terhadap orang yang mati syahid.⁴⁷

Keputusan pada alim ulama itu sangat mengejutkan pemerintahan NICA/Belanda, karena dampak dari keputusan itu akan meluas di kalangan rakyat. Bagi rakyat keputusan tersebut menjadi pegangan mereka untuk ikut berjuang melawan NICA tanpa ragu dan penuh keyakinan bahwa mati karenanya adalah mati syahid.⁴⁸

Lebih kurang seminggu sesudah peristiwa 9 November 1945 di gedung Norma Islam (Kulliyatul Mu'alimiin) jalan Keraton Rantau dipimpin oleh H. Marjuki Amin dengan H. Abdulwahab Art, telah bentuk gerakan rahasia diberi nama "BPI" (Barisan Perjuangan Indonesia), pimpinan H. Marjuki Amin sendiri. Karena sangat rahasianya, dalam menghimpun kekuatan jumlah anggota dengan perumusan : "SATU MENCARI DUA" dengan sumpah Al Qur'an. Tujuannya mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan segala jalan dan upaya apapun.

Kelanjutan BPI ini pada tahun 1946, sehubungan lahirnya SKI, maka gerakan rahasia pimpinan H. Marjuki Amin ini mengintegrasikan diri dalam BPPKI yang diselubungi oleh SKI pimpinan M. Yusi.

3. Gerakan Mendirikan Pemerintahan Republik Indonesia

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dimulailah pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan baik ditingkat pusat maupun di daerah.

Pada tanggal 18 ke 19 Agustus 1945 Presiden terpilih Ir. Soekarno memanggil wakil-wakil daerah yang saat itu sedang mengikuti sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Sebagai Wakil Kalimantan yang diberangkatkan Jepang untuk menghadiri sidang PPKI adalah A.A. Hamidhan yang saat itu menjabat sebagai wakil pimpinan redaksi surat kabar "Borneo Simboen" Banjarmasin, yakni satu-satunya surat kabar yang menyuarakan/menyiarkan pemerintahan Kaigun di Kalimantan.

Dalam dialog antara A.A. Hamidhan dengan Presiden Soekarno, Presiden meminta kesediaan A.A. Hamidhan menjadi Gubernur Kalimantan. A.A. Hamidhan menolak, dengan alasan dirinya bukanlah orang politik tetapi orang pers. Selanjutnya A.A Hamidhan mengusulkan Ir Pangeran Muhammad Noor, satu-satunya tokoh Kalimantan yang berkerja sebagai tenaga ahli pada Depertemen Pekerjaan Umum sejak pemerintahan Belanda dan Jepang. Usul tersebut mendapat persetujuan presiden dan ditetapkanlah Ir. Pangeran Muhammad Noor sebagai Gubernur Kalimantan yang pertama, meliputi seluruh wilayah Kalimantan. Ditetapkan pula Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) daerah Kalimantan yakni Mr. Rusbandi dan Dokter Sosodoro sebagai ketua PNI. Inilah tugas yang dibebankan kepada A.A Hamidhan untuk diwujudkan sekembalinya dari mengikuti sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia di Jakarta.

Di Banjarmasin kegiatan mendirikan Pemerintah Republik Indonesia dimulai ketika A.A. Hamidhan kembali dari Jakarta tanggal 20 Agustus dengan membawa Surat Keputusan Presiden tentang pengangkatan Mr. Rusbandi sebagai ketua KNI daerah dan Dokter Sosodoro sebagai ketua PNI Daerah Kalimantan. Tetapi sekembalinya A.A Hamidhan di Banjarmasin dia menghadapi tekanan Jepang, sehingga dia tidak mungkin dapat bergerak leluasa sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya.

Satu-satunya izin yang diberikan pemerintah Jepang adalah pemuatan berita tentang Kemerdekaan pada surat kabar "Borneo Simboen" terbitan no. 851 Minggu 26 Hachi-Gatsu 2605.

⁴⁷ LVRI Cabang Tapin "Catatan Revolusi Fisik di Tapin", Rantau, tt, th.

⁴⁸ Yusliani Noor, "Peranan Sektor 0 ½ 17 MD Perjuangan ALRI Divisi IV (A) Pertahan Kalimantan Dalam Perjuangan Gerilya di Tapin Kalimantan Selatan, Skripsi Sarjana Pendidikan Sejarah FKIP Unlam, Banjarmasin, 1989. hal. 78.

Berita yang diizinkan dimuat itu tentang pengangkatan Kepala Negara Republik Indonesia dan tentang bentuk Negara Indonesia.⁴⁹

Berita selengkapnya adalah sebagai berikut :

"Pengangkatan Kepala Negara Indonesia Merdeka Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta"

MAKLUMAT

Kepada seluruh rakyat Indonesia.

Dengan ini dimaklumkan, bahwa pembangunan Negara Indonesia Merdeka yang dikehendaki oleh rakyat sekalian waktu ini sedang dijalankan dengan seksama. Beberapa tenaga yang berani bertanggung jawab terhadap rakyat ikut serta dalam pembangunan ini.

Segala hal-hal yang perlu untuk pembangunan Negara Republik Indonesia sedang diselenggarakan dan akan selesai diwaktu yang pendek.

Diharap sekalian rakyat Indonesia dari segala lapisan tinggal tenteram, tenang siap sedia dan memegang teguh disiplin.

JAKARTA, 18 AGUSTUS 2605

SOEKARNO-HATTA⁵⁰

Bentuk Indonesia merdeka

Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 18 bulan 2605 di Jakarta :

- I. Telah menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- II. Telah memilih sebagai presiden Republik Indonesia Paduka Tuan Ir. Soekarno dan sebagai Wakil Paduka Tuan Drs. Mohammad Hatta.
- III. Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional.⁵¹

Risiko dari pemberitaan ini, A.A. Hamidhan harus meninggalkan Kalimantan dan pergi ke Pulau Jawa. Sehubungan dengan itu tanggal 7 September 1945 A.A. Hamidhan beserta keluarga dan diikuti oleh Mr. Rusbandi serta Dokter Sosodoro diberangkatkan Jepang ke pulau Jawa. Turut mengantarkan Hadharyah M.⁵²

Gerakan mendirikan Pemerintah Republik Indonesia di Kotabaru daerah Kalimantan Tenggara yang lebih mudah mengadakan hubungan dengan Surabaya, Makassar dan Balikpapan dibanding dengan Banjarmasin, memperoleh berita Proklamasi Kemerdekaan baru tanggal 17 September 1945 dari 3 orang pemuda yang singgah dari pelayaran mereka ke Sulawesi dari Surabaya.

Sebagai kelanjutan dari adanya berita Proklamasi tersebut para tokoh-tokoh politik mengambil inisiatif untuk mengadakan rapat umum. Rapat umum yang dihadiri oleh segala lapisan masyarakat dengan sambutan yang meluap-luap berhasil mencetuskan kebulatan tekad yaitu: "Menolak kembalinya pemerintahan NICA dan menyatakan wilayah Kalimantan Tenggara di bawah kekuasaan Republik Indonesia".⁵³

Selanjutnya tokoh-tokoh politik berhasil membentuk Persiapan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) sebagai keputusan dari hasil rapat yang diadakan pada tanggal 1 Oktober 1945 bertempat di Sekolah Rakyat (*Vervolgschool*) Kampung Baharu Kotabaru.

⁴⁹ Depdikbud, *op.cit.*, hal. 81 – 82.

⁵⁰ Pemda Tk. I Kalsel, *Sejarah Perjuangan Rakyat Menegakkan Kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan (Periode 1945 – 1949)*, Pemda Tk. I Kalsel, Banjarmasin, 1990, hal. 100.

⁵¹ Borneo Simboen, No. 851, 26 Oktober 2605.

⁵² Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hal. 37.

⁵³ LVRI Cabang Kotabaru, *op.cit.*, hal. 51.

Persiapan Pemerintahan Republik Indonesia (PPRI) itu secara lengkap terdiri dari : Pemerintahan Umum, Badan Perjuangan, Badan Keamanan Rakyat (BKR), Polisi Tentara dan Pembentukan pemerintahan sipil di daerah kecamatan.

Pemerintahan Umum dan Badan Perjuangan dijabat oleh Alwie, dibantu oleh seorang Sekretaris Umum yang dijabat oleh Wahel, serta dilengkapi dengan bagian Pemerintah Harian yang terdiri dari Kiai M. Seman dibantu oleh M. Kasim dan Gusti Hakim.

Badan perjuangan merupakan organisasi yang membantu Pemerintahan Umum, dilengkapi dengan bagian-bagian : yakni bagian politik, pemuda, penerangan, agitasi, palang merah dan keamanan.

Sebagai realisasi dibidang keamanan dan pertahanan dibentuklah Badan Keamanan Rakyat (BKR) dengan markas besarnya di Kotabaru. Pimpinan Umum dari BKR tersebut dipegang oleh Peran Kamar dan dibantu oleh Mukthar Arsyad sebagai wakilnya. Anggota dari BKR Ini adalah para pemuda dan bekas Kaigun Heiho dan Boei Teisin Tai dalam November 1945 bagian keamanan ini masih dilengkapi dengan pasukan Polisi Tentara untuk mengimbangi Polisi Kilat yang dibentuk NICA di Balikpapan. Polisi Tentara ini selain tugasnya sebagai polisi tentara juga mempunyai tugas khusus dibidang penyelidikan atau contra mata-mata musuh untuk menandingi kegiatan mata-mata musuh NEFIS dan M.I.D.

Polisi Tentara disusun dengan struktur organisasi Pimpinan sebagai penanggung jawab yang dijabat oleh Yusuf Jamal, kemudian dibantu oleh staf. Staf ini juga merangkap sebagai bagian penyelidikan yang dijabat oleh Ali Arsyad. Selanjutnya komandan pasukan dijabat oleh M. Daman sebagai Komandan dan dilengkapi dengan anggota pasukan.

Di seluruh kecamatan dalam wilayah Kotabaru disusun pula pemerintahan sipil tingkat onderdistrik atau kecamatan dan dilengkapi dengan BKR pula. Daerah-daerah itu adalah : Sebelimbingan dan Stagen, Sigam, Sarang Tiung, Berangas, Sungai Bali, Pantai Senakin, Bungukuran.

Tindakan dari Badan Perjuangan adalah mengirim utusan kebeberapa daerah untuk mengadakan hubungan dan memperoleh informasi di daerah lainnya. Peran Kamar, Akhmad Rawi, Mursyid Sabarani dan Jayadi Rais, diutus ke Banjarmasin dengan berjalan kaki, lewat Pagatan, Jorong, Pelaihari, sepanjang 460 km pulang pergi. Sahran Gani dan Soni Muha diutus ke Sulawesi dengan menggunakan perahu layar. Utusan yang ke Banjarmasin berhasil menyampaikan surat kepada Hadharyah M, sedangkan utusan yang ke Sulawesi berhasil bertemu dengan Bapak Dokter Sam Ratulangi dan Mr. Zainal Abidin.

Utusan ke Surabaya dipercayakan pada Achmad Effendi dan Maulana, berangkat dengan kapal layar lewat Pagatan dan berangkat bersama-sama pimpinan perjuangan Pagatan. Perjalanan ini tidak sampai ke tujuan karena kapal layar mereka mendapat kerusakan dipukul gelombang. Untuk mengumpulkan senjata dikirim utusan ke Balikpapan yang terdiri dari R. Rahmat dan Dome dengan perahu layar kecil atau sopet. Mereka berhasil memperoleh beberapa pucuk karabijn dan pelurunya.

Belanda berusaha menguasai kembali daerah Kalimantan Tenggara dengan mengadakan serbuan dari dua jurusan yaitu dari utara dan selatan. Penyerbuan Kotabaru terjadi pada 8 Februari 1946 setelah melumpuhkan perlawanan di Pagatan tanggal 7 Februari 1946.

Serbuan dari arah utara berasal dari Balikpapan, yang kemudian mendarat di Senakin, Sungai Kupang dan seterusnya menguasai pantai (Tanah Bumbu Utara) dan setelah menguasai daerah itu terus menyeberang selat laut untuk menyerang Kotabaru. Serbuan dari selatan menggunakan kapal berasal dari Banjarmasin yaitu kapal Rinjani, Hap Gwan dan kapal Sydney membawa pimpinan pemerintahan NICA terdiri dari: Residen Mayor L.B. Menses, Mayor Pereira, Kapten Versluys dan Kapten Rannese merupakan induk pasukan.

Pasukan induk Belanda ini setelah berhasil melumpuhkan perlawanan rakyat Pagatan, kemudian meneruskan ke Kotabaru dan mendarat di Stagen. Dari Stagen Belanda menyerbu Kotabaru dengan dilindungi pesawat terbang amfibi Catalina. Penyerbuan Belanda dilakukan pada pagi buta dengan kekuatan yang besar sehingga Badan Perjuangan Kotabaru tidak mampu menghadapinya. Perlawanan dilakukan oleh sepasukan kecil BKR yang dipimpin oleh M. Japeri K, yang bertugas menjaga pertahanan kota. Dalam pertempuran itu yang kekuatannya tidak seimbang, komandan BKR M. Japeri K menderita luka parah dan sejumlah pasukan BKR tertawan. Akhirnya menjelang siang hari Jum'at 8 Februari 1946 setelah mengepung Kotabaru dari dua jurusan, tentara NICA berhasil menguasai Kotabaru. Sebagaimana anggota BKR lainnya melarikan diri, menggabungkan diri dengan perjuangan di daerah lainnya dan sebagian lagi tertawan, antara lain Guru Alwi pimpinan BKR Kotabaru, Peran Kamar dan lainnya yang kesemuanya berjumlah 17 orang.

Anggota BKR yang menggabungkan diri dengan gerakan kemerdekaan Balikpapan antara lain Mashdu, Ali, Gumbai, dan M. Noor Effendi, sedangkan yang melarikan diri ke pulau Jawa terdiri dari M. Arsyad Ali, Darmawi dan Ali. Setelah situasi aman, Kotabaru menjadi daerah NICA dengan seorang Districtshoofd Kiai Sahdan yang datang bersama-sama rombongan NICA dari Stagen, sedangkan yang menjadi Controleur untuk wilayah Kalimantan Tenggara adalah Winderpank.

Gerakan mendirikan Pemerintah Republik Indonesia lainnya terjadi juga di daerah Pagatan, bekas Kerajaan Kusan dan Pagatan, yang raja-rajanya dan penduduknya Suku Bugis.

Meskipun Pagatan terletak di daerah Pulau Kalimantan tetapi saat itu lebih mudah mengadakan hubungan dengan Balikpapan, Makassar dan Surabaya lewat laut, daripada dengan Banjarmasin. Karena itulah A. Syukur Rahim dan Minhaj yang merupakan tokoh masyarakat Pagatan berangkat ke Balikpapan untuk memperoleh informasi tentang situasi setelah Proklamasi Kemerdekaan. Informasi yang diperoleh A. Syukur Rahim dan Minhaj tersebut dapat menanamkan semangat perjuangan rakyat Pagatan untuk menolak kedatangan NICA untuk berkuasa kembali di daerah Pagatan.

Kedatangan Andi Sekencuang dan Andi Maksom sebagai utusan dari Gubernur Kalimantan Ir. Pangeran Mohammad Noor ke Pagatan berhasil membulatkan tekad rakyat Pagatan, yaitu menolak pemerintahan NICA dengan segala konsekwensinya dan berusaha membentuk pemerintahan defacto Republik di Pagatan Tanah Bumbu Selatan.

Luapan kegembiraan atas kemerdekaan ini dibuktikan dengan rapat umum yang dihadiri oleh ratusan penduduk dengan pengibaran Merah Putih. Rapat umum dibanjiri oleh slogan-slogan yang antara lain berbunyi "Pagatan anti NICA", "Sekali Merdeka Tetap Merdeka", "Siapa yang Pro NICA Penghianat" dan sebagainya yang semua isinya menolak kedatangan NICA untuk berkuasa kembali dan wilayah Pagatan adalah wilayah Republik Indonesia.

Kalau di Kotabaru terbentuk Persiapan Pemerintahan Republik Indonesia, maka di Pagatan berdiri sebuah Komite Nasional Indonesia Daerah Pagatan (KNI Daerah).

Komite Nasional tersebut strukturnya terdiri dari Penasihat Umum dalam Pemerintahan Daerah yang dijabat oleh Andi Ancong, seterusnya wakil rakyat dalam pemerintahan daerah yang diwakili oleh Andi Jufri, wakil pamongpraja ialah Kiai Gustri Iberahim, wakil TKR diwakili oleh M. Baderi Komandan TKR dan Andi Abdurrahim sebagai wakil Kepolisian.

Sebagai kelengkapan dari Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Pagatan ini, dibentuk pula Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada tanggal 5 Oktober 1945, sedangkan sebelumnya telah terbentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) yaitu tanggal 30 Agustus 1945. TKR ini dilengkapi dengan 8 pasukan. Disamping TKR dibentuk pula Polisi Militer, yang komandannya dijabat oleh Andi Chairul.

TKR dan pasukan Polisi Militer beserta rakyat Pagatan inilah yang secara heroik mempertahankan Pagatan ketika NICA dengan 4 buah kapal perangnya pada tanggal 7 Februari 1946 melakukan penyerangan terhadap daerah ini.

Ketika itu Pimpinan Umum TKR memperoleh laporan dari pos penjagaan pantai pada tanggal 7 Februari 1946, sekitar pukul 02.00 pagi, bahwa terlihat sorotan lampu kapal dari jurusan Banjarmasin menuju Pagatan, di sekitar Tanjung Petang. Berita itu segera sambung menyambung ke pelosok Pagatan, melalui bedug-bedug yang dibunyikan, dan dalam waktu segera puluhan ribu penduduk terkumpul sepanjang muara Pagatan dan Tanjung Petang. Kampung Baru - Pasar Lama - Tanjung Keramat dan Kota Pagatan. Pasukan TKR segera disiapkan masing-masing dengan komandan TKR M. Baderi bergerak menuju Tanjung Petang dengan persenjataan 1 pucuk senjata mesin, beberapa pucuk Karabijn, beberapa pistol dan granat tangan. Mereka menempati posisi penting di sekitar semak-semak sepanjang Tanjung Petang.

Kira-kita pukul 07.00 pagi terlihatlah 4 buah kapal BPM 180, Hap Gwan, M/S Sidney dan M/S Rinjani tetapi anehnya mereka mengibarkan bendera Merah Putih. Hal ini sangat mengherankan pasukan TKR sehingga M. Baderi sebagai pimpinan umum TKR berkesimpulan bahwa pasukan yang datang adalah bantuan dari Jawa seperti berita yang ditunggu-tunggu. Keyakinan lebih bertambah ketika pasukan yang mendarat memakai lencana bendera Merah Putih di dada mereka. Segera perintah dari persembunyian dikeluarkan untuk menyambut dengan gembira pasukan yang datang. Tetapi setelah pasukan TKR datang dan berkumpul dengan mengucapkan "Merdeka" yang dijawab dengan ucapan "Merdeka" pula ternyata hal ini merupakan tipu muslihat belaka. Pasukan Belanda melucuti anggota TKR dan menawan mereka, sehingga pasukan M. Baderi semuanya ditawan oleh Belanda, kecuali dua orang sempat meloloskan diri untuk memberitahukan pasukan lainnya tentang tipu muslihat Belanda tersebut.

Tentara Belanda meneruskan ke arah Pagatan dan segera terjadi perlawanan dari pasukan lainnya. Penyerangan ini terjadi melalui pasukan yang mendarat, dibantu oleh kapal Rinjani menembaki dari Pantai dan pesawat terbang Catalina meraung-raung di udara sambil menembak dari udara.

Meskipun kekuatan tidak berimbang, tetapi pasukan yang bertugas untuk menjaga masuknya Belanda ke dalam kota terus melawan dengan kekuatan seadanya dan dengan semangat yang tinggi. Setelah melalui perlawanan yang gigih, tentara Belanda maju menuju kota Pagatan pada sekitar pukul 15.00 sore, hal itu berarti jarak antara Tanjung Petang – Kampung Baru – Pasar Lama – Tanjung Keramat – Pagatan yang berjarak hanya 5 Km, ditempuh dalam waktu 8 jam. Sepanjang jalan 5 km inilah mayat bergelimpangan, darah berceceran dimana-mana. Jumlah korban yang terbesar dalam perjuangan menghadapi Belanda sepanjang periode revolusi fisik di Kalimantan Selatan. Ke-37 orang pahlawan pertempuran Pagatan tersebut sekarang dimakamkan di Makam Pahlawan "MATSTONE" (Tunas Abadi) di dekat benteng lama, suatu tempat pertempuran yang paling hebat pada pertempuran 7 Februari 1946. Yang tertawan dan mendapat siksaan yang hebat di luar perikemanusiaan sebanyak 62 orang, dan sebagian di antaranya menjadi cacat tubuh akibat siksaan Belanda dalam tahanan di antaranya yang cacat seumur hidup yaitu H. Daeng Halida dan M. Baderi Komandan TKR.

Sejarah mencatat tentang keberanian rakyat Pagatan dalam menghadapi Belanda dalam pertempuran 7 Februari 1946 tersebut di antaranya adalah keberanian H. Mohammad Nurung yang maju ke medan pertempuran dengan teriakan "Allahu Akbar" dan berhasil maju ke tengah-tengah musuh sebelum terjatuh menjadi korban. Pua Tengah yang berangkat maju mengambil air wudhu dan sembahyang subuh dan maju bertempur dengan keberanian luar biasa. Begitu pula keberanian pahlawan La Kamila dan anaknya La Semang serta La Pattirai merupakan contoh keberanian yang

diperlihatkan rakyat Pagatan dalam usaha mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan menolak kedatangan Belanda di Tanah Bumbu Selatan, Kalimantan Selatan.⁵⁴

4. Andil Pemuda Pelajar Kalimantan Dalam Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan

Di antara tanggal 20 – 25 Agustus 1945, Hutsu Tjugakko Banjarmasin dikunjungi seorang pegawai Banjarmasin Hosokyoku – Penyiaran Radio – bernama Witono. Setelah mendapat izin engku F. Soepardjo, guru yang mengajar ketika itu, tamu tersebut memasuki kelas. Terbiasa dengan disiplin sekolah Nippon, para pelajar dikomando oleh kepala kelas supaya ‘kiritsu’ (berdiri) yang akan disusul oleh ‘keirei’ (tunduk hormat), namun dicegah oleh tamu dari Banjarmasin ‘Hosokyoku’ itu dengan ucapan “Tidak perlu adik-adik menghormat seperti (Jepang) itu, kita sudah merdeka”, kemudian dengan bersemangat “Salam Merdeka” yang di kelas balas dengan bersemangat pula oleh para pelajar. Dalam bulan Agustus itu para guru bangsa Jepang berangsur-angsur tidak hadir lagi, terakhir ialah Asano Sensei, seorang guru yang pandai menanamkan semangat. Ketika itu pelajar di lapangan sekolah ; bendera ‘Hi no Maru’ diturunkan dengan upacara dengan inspektur upacara Asano Sensei itu. Kemudian dalam bahasa Jepang yang mudah dimengerti meminta pelajar untuk menyanyikan lagu INDONESIA RAYA, yang terakhir kali untuknya. Para pelajar menyanyikannya dengan khidmat, Asano Sensei mendengarkan dengan haru, dan pelajar pun menyudahi lagu kebangsaan itu dengan terisak tangis.

Tanggal 20 – 30 September 1945, tentara sekutu – Australia – telah mendarat, NICA membonceng, telah mulai menyusun administrasinya di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Kepala Sekolah MULO met Maleis als Voertaal – atas instruksi dari kantor Departement van Onderwijs en Eeredienst untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Timur, mengerahkan pelajarnya untuk berbanjar di tepi jalan yang menuju Hotel Banjar⁵⁵ untuk menyambut komando pasukan Australia dan NICA. Didahului korps musik ‘bagpipe’ dari pasukan Australia, rombongan pun tiba, menolehpun tidak kepada para pelajar yang telah menunggu lama itu.

Peristiwa kedua ialah bahwa dengan mengatakan “kita harus loyal (kepada Belanda)”, pelajar disuruh berlatih lagu-lagu ‘God save the King’, Wilhemus dan lagu-lagu kerakyatan Belanda lainnya, yang akan dikumandangkan melalui siaran radio Banjarmasin. Pelajar MULO itu berlatih, tetapi pada dekat saatnya, mereka mogok, membangkang acara itu ; acara itu tidak pernah terlaksana.

Dalam tahun 1946 – 1947 Sekolah Menengah Tinggi (SMT) yang didirikan oleh Balai Pendidikan Kalimantan yang dibentuk oleh ‘orang-orang Republik’, di antaranya bapak-bapak A.A. Rivai, A. Sinaga, M. Rasyid, Dokter Soeranto, Dokter St.T. Diapari, Ir. Soetojo, Amir Hamzah Yusuf, BA (Direktur), Abdullah Arief, dan lain-lain. Di sinilah pelajar mulai disadarkan politik oleh para engku itu.

Selanjutnya pelajar membentuk Ikatan Pelajar Indonesia (IPI). IPI didirikan dan diasuh oleh para pelajar yang sebagian besar bertempat tinggal di daerah Pasar Lama – Belitung, di antaranya : Abdurrahman Noor, Hasani Mahjuri, Bahteramsyah, Bachtiar, Ibramsyah, Zaen Zaelani, M. Suriansyah, dan lain-lain. Sejak 1946 hingga 1949 aktivitas-aktivitasnya, antara lain : mengadakan rapat umum di Masjid Jami, mengadakan rapat umum di gedung bioskop Juliana, yang dihadiri pula oleh Ibu Herawati Diah, yang datang ke Banjarmasin dalam rangka pembentukan organisasi wanita. Turut serta dalam kongres GAPPIKA ke I (Kandangan) dan II (Barabai), dan juga mengadakan pameran lukisan dan majalah serta kerajinan tangan di gedung Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI), dipanggilnya Hasani dan Bahteramsah, kemudian M. Suriansyah menghadap HPB (*Hoofd van Plaatselijk Bestuur*) yang memberikan nasihat agar pada pelajar jangan ikut politik dan lebih baik

⁵⁴ LVRI Cabang Kotabaru, *ibid.*, hal. 51 – 52.

memperhatikan sekolah saja. Dalam pertemuan ini timbul debat yang tentunya tidak mencapai titik temu. Dengan disiarannya berita majalah-majalah Jakarta di pameran itu, M. Suriansyah dipanggil oleh dinas Reserse untuk interograsi yang cukup lama dan dibuat proses verbal. Namun akhirnya verbalist, seorang Inspektur Polisi bangsa Indonesia, menyerahkan kepada M. Suriansyah untuk menyusun dan mengetik proses verbal itu sendiri untuk kemudian ditanda tangani. Tentunya isi proses verbal yang menguntungkan M. Suriansyah, ada juga alat Belanda yang mengerti aspirasi dan penuh bijaksana.

Pertempuran 9 November 1945, sebenarnya didahului oleh suatu percobaan serangan yakni Kamis (1 November) malam Jum'at. Para pelajar (antaranya Abdurrahman Noor, Idzuldin, M. Suriansyah, Marhamzah Syukur, dll) serta dua atau tiga orang eks-Heiho, berkumpul di rumah Abdurrahman Noor.⁵⁵ Inti kekuatan adalah para eks-Heiho yang tinggal di gedung Musyawaratutthalibin (sekarang Musholla Musyoraffa di jalan Perintis Kemerdekaan. Malam itu cukup terang, dan setelah disela oleh hujan lebat, malam terang pula. Agaknya serangan itu belum berhasil ; sampai subuh berkelieran jeep dari KNIL (*Koninklijke Nederlands Indische Leger*). Beberapa hari kemudian, Abdurrahman Noor lari ke Jawa dan gugur di daerah Jawa Barat.

Menyadari bahwa tanpa cukup senjata suatu serangan tidak akan cukup berhasil, Abdurrahman Abbas dan M. Suriansyah merencanakan untuk mencari senjata eks-Rikugun Jepang di pedalaman Ambungan Pelaihari ± 15 Km ke bukit-bukit. Di sinilah pada sekitar bulan Juli 1945 sejumlah pelajar Tjugakko Banjarmasin, antara lain : Abdurrahman Abbas, M. Suriansyah, Idzuldin, Achmadsyah, Hanafiah Amin, Soegito, dan lain-lain bekerja bakti 'kinrōshosi' yang terakhir. Tugas ketika itu ialah memindah howitzer rampasan dari sekutu, dari Ambungan ke bukit-bukit yang dijadikan terugval basis oleh tentara 'Rikugun' (Angkatan Darat) yang dalam perjalanan mundur dari Kalimantan Timur membawa beberapa unit howitzer dan senapan mesin ak-ak, suplai makanan ; tugas pikul ini berjalan kaki turun naik bukit, melalui hutan belukar. Guru Indonesia yang membimbing ialah engku Kamarudin dan engku Sukiman. Rencana pencarian ini didukung oleh/diberikan petunjuk oleh engku Kamarudin. Rencana ini tidak terlaksana karena diterima informasi bahwa lokasi itu sudah kosong terkecuali beberapa kerangka manusia.

Eksodus pemuda/pelajar ke Jawa. Didahului oleh Abdurrahman Noor, dalam bulan September dan Oktober 1946, mempergunakan perahu Bugis/Madura maupun kapal 'Tosari', rombongan Tosari yang pertama : Usman Gidak, Imbrani, Udu Handuran, Mardiansyah Syukur, Kadir, Berahim, Yusri Rasyid, Anang Masrip, dan lain-lain; Usman Gidak bergabung dengan Laskar Kalimantan di Solo di bawah pimpinan Barmawi Taib. Rombongan Tosari kedua terdiri dari antara lain dari : Baderun Gidak, Yusran Effendi, Mas Juaini, Waldus Sandy, Kasnariansyah. Kelima pelajar ini memasuki Akademi Militer Malang. Kasnariansyah gugur di Sumatera Selatan, namanya diabadikan pada nama sebuah jalan.

Dengan pemilihan yang demokratis, pengurus IPI berubah pada pertengahan 1947. Amberi Pane menjadi ketua dan M. Suriansyah wakik ketua. Kepengurusan ini tidak pernah lengkap, dan kegiatan-kegiatan tetap diasuh oleh Hasani, Bachteramsyah, M. Suriansyah.

M. Suriansyah mewakili IPI di Badan Koordinasi Kemerdekaan yang selalu ber-rapat di gedung SKI (semula gedung ini dipergunakan untuk kegiatan Dokuritsu Junbi Inkai/Panitia Persiapan Kemerdekaan, sesuai janji Jepang. Yang berkesan bagi M. Suriansyah ialah pertemuan yang seru di antara Badan Koordinasi Kemerdekaan (pembicara-pembicara antara lain : A.A. Rivai, A. Sinaga) berhadapan dengan NICA yang diwakili oleh Asisten Residen Breekland, Asisten Residen

⁵⁵ Kini bundaran Hasanuddin.

⁵⁶ Sekarang Masjid Al Mujahidin.

Holman (keduanya fasih berbahasa Indonesia) dan Kiai Kota Gusti Hidayat.⁵⁷ Jelaslah tidak ada titik temu.

Dengan demikian, banyak pelajar ikut pula dalam berpolitik dan bertempur melawan NICA.

B. TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA BADAN-BADAN KELASKARAN DAN ALRI DIVISI IV PERTAHANAN KALIMANTAN

1. Munculnya Organisasi – Organisasi Perlawanan Bersenjata

NICA yang membonceng tentara Sekutu Australia ke Kalimantan Selatan, ternyata melakukan kegiatan-kegiatan kolonisasi di daerah ini. Sebagai tentara Sekutu yang menang perang, NICA berusaha menyusun kembali pemerintahan sipil dengan cara menghubungi bekas pegawai *Binnenlands Bestuur* untuk kembali bekerja bersama mereka. Akibat tindakan NICA ini menimbulkan beberapa pilihan sekaligus kategori bagi pemimpin-pemimpin rakyat di Kalimantan Selatan, yaitu :

- a. Menolak kedatangan NICA dan meninggalkan daerah Kalimantan Selatan, pergi ke Jawa.
- b. Menerima kedatangan NICA dan bersedia bekerja sama sebagai pegawai NICA.
- c. Menentang kembalinya NICA berkuasa dan berjuang secara parlementer melalui bidang politik.
- d. Menentang dengan tegas kembalinya NICA berkuasa dan berjuang dengan senjata untuk mengusir mereka.⁵⁸

Kelompok pertama umumnya terdiri dari tokoh-tokoh pergerakan, tokoh-tokoh politik dan kelompok cerdik pandai. Mereka meninggalkan Kalimantan Selatan dan mengungsi ke Jawa dengan alasan bahwa untuk melawan kekuatan NICA saat itu belum mempunyai kekuatan yang cukup. Mereka akan kembali kalau sudah mempunyai kekuatan yang cukup. Kepergian mereka ke Jawa tersebut setelah mengetahui sikap NICA tersebut antara lain adalah meralat berita yang pernah disiarkan dalam surat kabar "Borneo Simboen" Banjarmasin.

Kelompok kedua adalah kelompok yang bersedia untuk kembali bekerja sebagai pegawai NICA, umumnya adalah orang-orang yang sebelumnya pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah Belanda sebelum perang. Kelompok ini memang terdiri dari para pegawai yang terbiasa menerima gaji dan tidak mau mempersulit diri dan menderita berjuang, karena menurut anggapan mereka tidak mungkin berhasil mengalahkan Belanda. Mereka terdiri dari anggota *Binnenland Bestuur* sebagai Kiai, Asisten Kiai, Kiai Kepala, bekas pegawai ataupun bekas polisi Belanda.

Kelompok ketiga terdiri dari orang-orang politik. Mereka mengikuti perkembangan politik dan berjuang secara legal parlementer yang menuangkan aspirasi politiknya melalui partai-partai politik, seperti Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI) dan Serikat Muslim Indonesia (SERMI).

Kelompok keempat adalah kelompok yang memilih perjuangan bersenjata, bergerilya, lari ke gunung-gunung, menyusun kekuatan dan berusaha untuk mengusir NICA. Kelompok ini dimotori ulama dan rakyat biasa.

Kehadiran NICA disambut dengan rasa kebencian oleh rakyat Kalimantan Selatan dan kebencian ini mengakibatkan terjadinya bentrokan-bentrokan dimana-mana. Penganiayaan seorang serdadu NICA di pasar Min Seng Banjarmasin, penikaman polisi NICA di Barabai,

⁵⁷ M. Suriansyah, "Beberapa Fragmen Keikutsertaan Pemuda dan Pelajar Kalimantan Selatan Dalam Perjuangan Merebut Kemerdekaan", Banjarmasin, tt, th.

⁵⁸ Kodam X / Lam, *Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Selatan Menegakkan Kemerdekaan RI 1945 – 1949*, Kodam X / Lam, Banjarmasin, 1982, hal. 40.

penghancuran mobil NICA di Banua Padang Rantau dan insiden-insiden di beberapa kota lainnya merupakan luapan-luapan kemarahan dan pelahiran rasa kebencian pada penjajah NICA.⁵⁹

Peristiwa 10 Oktober 1945, yaitu kegagalan pawai akbar atau pawai Merah Putih sebagai pawai yang direncanakan untuk menyambut kemerdekaan dalam rangka pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah Kalimantan Selatan. Hal yang sama terjadi pula di Amuntai, Barabai, Kandangan, Rantau dan beberapa kota lainnya.

Peristiwa 10 Oktober 1945 ini merangsang para pemuda untuk menyusun kekuatan tanding. Sebuah gerakan di Kandangan yang tumbuh sebagai sambutan atas kemerdekaan tanah air dalam bulan Agustus 1945, tampak dalam usaha mengumpulkan para pemuda sebagai kelompok latihan militer.⁶⁰

Badan-badan pemberontakan adalah organisasi yang unsur-unsurnya personil, material (senjata dan perbekalan), nilai-nilai atau norma-norma dan kepemimpinan. Badan-badan itu harus mempunyai kekuatan (*power*) yang berfungsi dalam perjuangan. Pendukung kekuatan daripada badan-badan itu adalah daya tempur (*force*), daya pengaruh rakyat (*authority*). Nilai-nilai dan norma sebagai sumber semangat juang yang sangat penting antara lain, cinta tanah air dan bangsa, tidak kenal menyerah, rela berkorban, jujur, adil dan mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional.⁶¹

Organisasi-organisasi perlawanan bersenjata tersebut adalah :

a. Badan Pemberontakan Rakyat Kalimantan (BPRK)

Di Banjarmasin yang merupakan pusat konsolidasi kekuatan Belanda, bagian pemuda dari Persatuan Rakyat Indonesia (PRI) atau dikenal sebagai pemuda PRI dalam perundingan-perundingan antara tanggal 16 – 19 Oktober 1945 telah membentuk Badan Pemberontakan Rakyat Kalimantan (BPRK), di luar TKR yang ada, diketuai oleh A. Ruslan. Program pokok dari BPRK agar dalam waktu singkat merealisasikan pemerintah Republik Indonesia di Banjarmasin seperti pernyataan yang telah diumumkan dalam suatu Kongres Pemuda Rakyat (Pemuda PRI).

Hal penting lainnya adalah penggantian Residen RI Pangeran Musa Ardikesuma yang dipilih menjadi Kiai Besar NICA dengan A. Ruslan. Tugas lain dari BPRK adalah mencari dan mengusahakan alat-alat perang terutama senjata peninggalan Jepang, menyebarkan pamflet-pamflet yang isinya menentang kehadiran NICA dan mendukung proklamasi kemerdekaan RI, serta membangkitkan rasa permusuhan di kalangan rakyat terhadap NICA dan pendukung-pendukungnya.⁶²

Anggota-anggota BPRK sebagian besar adalah para pemuda dan di antaranya beberapa orang bekas Heiho. Untuk dapat berfungsi organisasi ini yang terdiri dari : Dewan Penasihat. Markas Besar, Bagian Pertahanan dan Tenaga Pimpinan Kelaskaran, Badan Kontak dan Perlengkapan. Markas Besar BPRK di tempatkan di kampung Pengambangan.

Personil yang di tempatkan pada setiap bagian dapat disebutkan sebagai berikut : Dewan Penasihat adalah Pangeran Musa Ardikesuma, A. Ruslan, R. Suranto, Hadhariyah M, Dokter St.T. Diapari, Abdurrahman Sidik, A. Sinaga, Irmansah dan Amir Hasan Bondan. Markas Besar oleh Abdul Kadir Uwan, Mohammad Amin Effendi, M. Afiat, Abdurrahman Noor, M. Hamli, M. Hanafiah, Abdul Muthalib, F. Mohani. Badan Pertahanan dan Tenaga Pimpinan Kelaskaran oleh M.

⁵⁹ Kodam X/Lam, *ibid.*, hal. 42 ; Yusliani Noor , *op.cit.*, hal. 48.

⁶⁰ Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hal. 41.

⁶¹ Kodam X/Lam, *op.cit.* , hal. 48.

⁶² MBAD RI, *Perjuangan Rakyat Kalimantan Selatan Dalam Perang Kemerdekaan (1945 – 1949)*, Jakarta, 1982, hal. 49.

Amin Effendi, Abdul Kadir Uwan dan Mas Untung Sabri. Badan Kontak oleh M. Afiat, M. Hamli, Abdul Kadir Uwan. Perlengkapan oleh Husin Razak, Hasbullah Arpi.⁶³

NICA dan kaki tangannya telah mencium kegiatan yang dilakukan oleh BPRK, sehingga dengan tindakan-tindakan keras dan kejam sejumlah pemuda dan pemuka masyarakat ditangkap.

H. Hasbullah Yasin ditembak di muka pekarangan rumahnya di Alabio pada tanggal 26 Oktober 1945. Sikap keras NICA ini bukan menjadikan BPRK takut malah menjadikan lebih berani. Tanggal 1 ke 2 November 1946 BPRK menyerang pos polisi dan berhasil merampas beberapa karabijn. Aksi perlawanan lainnya yang pernah dilakukan BPRK ialah penyerangan pada tanggal 9 November 1945 Banjarmasin, dan menghancurkan mobil NICA di Banua Padang Rantau.

b. BPPKI (Barisan Pelopor Pemberontak Kalimantan Indonesia)

Pembentukan organisasi Barisan Pelopor Pemberontak Kalimantan Indonesia (BPPKI) adalah atas instruksi Gubernur Kalimantan Ir. Pangeran Mohammad Noor yang berkedudukan di Yogyakarta. Instruksi itu menyebutkan agar dibentuk badan perjuangan sebagai wadah yang akan memelopori perjuangan rakyat Kalimantan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan RI. Sehubungan dengan instruksi itu M. Jusi beserta pemuda-pemuda pejuang seperti Djantera, Hamsi, M. Sujitno, M. Bajuri, M. Sibli Imansyah, Bihman Villa kemudian berhasil membentuk organisasi perjuangan yang diberi nama Barisan Pelopor Pemberontak Kalimantan Indonesia (BPPKI).

Pusat gerakan BPPKI ditetapkan di Martapura dan sebagai pimpinan ditunjuk Gusti Saleh.⁶⁴ BPPKI yang dipimpin oleh Gusti Saleh yang berkedudukan di Martapura, merupakan penyalur dana perjuangan yang dikirim oleh Gubernur Kalimantan dari Yogyakarta berupa gula, sehingga waktu itu dikenal sebagai gula perjuangan. Dalam karung-karung gula itu sering diikut sertakan surat kabar dari daerah Republik. Hanya saja badan penyalur ini kurang lancar jalannya.⁶⁵ Sedangkan BPPKI di daerah Hulu Sungai ini lebih banyak mengarah kepada sabotase terhadap hubungan telepon dan pengangkutan Belanda. Untuk menggerakkan kegiatan rakyat kearah itu diadakan pertemuan-pertemuan rahasia di kampung-kampung.

Pada tahap permulaan kegiatan-kegiatan BPPKI baru terbatas pada rapat-rapat rahasia untuk menentukan langkah-langkah yang perlu segera diambil. Kegiatan fisik berupa perlawanan terhadap NICA belum memungkinkan untuk dilaksanakan, mengingat belum adanya senjata, disamping itu pula orang-orang NICA sedang giat melancarkan tekanan terhadap gerakan-gerakan perjuangan rakyat. BPPKI di bawah pimpinan M. Jusi adalah yang tergiat dalam peranan sabotase dan pembakaran-pembakaran milik NICA.⁶⁶

Menurut M. Jusi hampir setiap kota dan wilayah di Kalimantan Selatan memiliki sedikitnya tiga orang komisariss yang berada di bawah satu koordinasi untuk melakukan gerakan bawah tanah. Misalnya di kota Barabai ia memimpin dan mengkoordinir BPPKI dan membawahi lima wilayah Banua Lima. Sekretarisnya waktu itu H. M. Sibli Imansyah, sedangkan di kota Rantau, Basuni Taufik.

BPPKI diangkat dan disahkan berdirinya oleh Ir. Pangeran Mohammad Noor, Gubernur Kalimantan yang berkedudukan di Yogyakarta. Melengkapi komisariss-komisaris maka di tiap kewedanan terdapat seorang wakil ketua dan tiga orang pembantu ditambah kepala kelaskaran.

Di kota Tanjung, Amuntai, Barabai, Kandangan dan Rantau. Para wakil ketuanya ialah H. Jantera, M. Norman, Abdul Galib, H. M. Rafai dan H. A. Maki. Ketua-ketuanya laskarnya : Pembekal

⁶³ MBAD RI, *loc.cit.*

⁶⁴ MBAD RI, *loc.cit.*

⁶⁵ Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hal. 43.

⁶⁶ Hassan Basry, 1961 :80.

Idar (Tanjung), Bihman Villa (Amuntai), Utuh Kalang (Barabai), Bidin Setiabudi (Kandangan) dan Djedar (Rantau).

Di kawedanaan Banjar (Martapura) wakil ketuanya M. Maksum, sedangkan di kota besar Banjarmasin Hasan Ami dengan ketua laskar H. Anang Mashur.

Gerakan bawah tanah BPPKI mengemban misi atau tugas-tugas sabotase, infiltrasi ke daerah musuh (NICA), *psywar/deception* dan pembunuh terhadap antek-antek NICA.

Misi atau pelaksanaan tugas yang amat berkesan bagi M. Jusi ialah ketika dilakukan pembabatan / pemutusan alat-alat (kawat-kawat) telekomunikasi (telepon) di seluruh Benua Lima pada tanggal dan jam yang sama.

Aksi sabotase lainnya adalah usaha melakukan pembakaran gedung-gedung BPM Murung Pudak oleh seorang Mantri Verpleger rumah sakit BPM Murung Pudak yang juga anggota BPPKI, namun gagal. Melakukan infiltrasi kerumah penjara Tanjung oleh dua anggota BPPKI dan perembesan ke perusahaan BPM Murung Pudak. Perang psikologis yang dilakukan berupa penyebaran pamflet, informasi palsu lewat telepon kepada Kiai kepala di Paringin, Kiai kepala Tanjung yang mengatakan seolah-olah tentara RI sedang bergerak menuju perbatasan di Batu Babi sebanyak 150 orang termasuk beberapa orang wanita. Info palsu ini membuat repot kedua Kiai kepala tersebut sehingga sempat meminta bantuan tentara KNIL di Amuntai.

Demikian juga misi dan tugas-tugas BPPKI di kota-kota Amuntai, Barabai, Kandangan dan Rantau berjalan sukses.

Beberapa peristiwa penting akibat aksi sabotase BPPKI tersebut antara lain di kota Amuntai terjadi pembakaran gudang karet *rubberfonds*, di Barabai pembakaran pesanggrahan Hantakan dengan maksud memancing tentara NICA agar menyerbu yang bakal disambut dengan suatu penghadangan dan pembakaran sekolah Inheemse MULO Barabai sampai rata dengan tanah, karena diketahui sekolah tersebut akan dijadikan asrama serdadu KNIL.

Di kota Kandangan juga terjadi aksi-aksi sabotase, seperti pembakaran Freubelschool oleh H. Baderi, usaha pembunuhan terhadap Kiai Besar⁶⁷ Hulu Sungai dengan pelemparan granat tangan oleh Djedar dan Tarman yang mengalami kegagalan, pembakaran Pasar malam perayaan Hari Ulang Tahun Ratu Belanda oleh Hairul dan terakhir pembakaran terhadap sebuah tongkang (Perahu) besi yang berisi 40 ton karet di sungai Negara oleh Abdulhamid Rizal, namun gagal.

Dalam rangka merealisasi misi BPPKI terjadap kekuasaan NICA di daerah Tapin, di Tungkap dilakukan penembakan terhadap kendaraan yang ditumpangi Residen Der Zuider en Ooster Afdeling van Borneo (Alby), di dalam kendaraan itu turut juga Chef Inspectie van Financien, Kiai Besar Asikin dan Kiai Besar Raden. Tembakan yang dilaksanakan oleh Hassan Basry penduduk Pematang Karangan (Tapin), tidak tepat mengenai sasaran, hanya berupa goresan pada jari tangan kanan Kiai Besar Raden. Senjata api yang di pakai berasal dari Muhidin, anggota polisi NICA yang menjadi anggota BPPKI. Kemudian menyusul penggranatan terhadap Inspektur polisi NICA Wuwung di pesanggrahan Rantau oleh Ali Banua Padang yang kemudian disembunyikan oleh Ulama Besar H. Mahjudin di puncak menara Masjid Jami (tempat adzan) Rantau. Dua hari kemudian baru dia dilarikan ke hutan. Sasaran aksi lainnya adalah pembakaran gedung NIRUB/Rubberfonds Pasar Rantau yang menyimpan lebih kurang 15 ton karet RSS yang hendak diekspor oleh NICA ke luar negeri bersama pengirimnya dengan pemberangkatan jamaah haji. Hanya disayangkan karena gudang Nirub tersebut terletak dalam kompleks pasar Rantau, maka bangunan-bangunan atau los-los di dalam pasar Rantau tersebut juga turut terbakar. Aksi lainnya berupa usaha pembunuhan dengan lemparan granat tersebut kearah Inspektur Polisi Gusti Miskat yang sedang dalam

⁶⁷ Pangkat "Kiai Besar" yang sejajar dengan Assisten Resident, diadakan oleh NICA dan dihadiahkan kepada pejabat-pejabat pemerintahan yang loyal pada Belanda, a.l.: Raden, Merah Nadalsyah, Asikin Noor.

perjalanan dari Kandungan menuju Banjarmasin, namun juga gagal, karena kurangnya pengalaman mempergunakan granat.

Di kota besar Banjarmasin sendiri, psywar dengan pamflet gelap semakin gencar dilakukan oleh pemuda-pemuda pejuang seperti Hanafiah, F. Mohani, Hamli Tjarang, Andi Burhan serta H. Arsyad Manan.

Pelabuhan Banjarmasin juga kena sasaran pembakaran pada jam 24.00 malam oleh Ibrahim Tikil, Utuh Padang dan Anang Mashur. Dalam Peristiwa tersebut tidak tanggung-tanggung turut terbakar lebih kurang 100 ton karet yang bakal dikirim kenegeri Belanda, termasuk tiga buah gudang. Pembakaran ini menggunakan panah api buatan H. Hasyim, H. Ahmad dan H. Utuh dari Haruyan, atas petunjuk dari Gusti Rusli, sebelum pembakaran pasar Kajang Banjarmasin.

Dengan adanya koordinasi antara M. Jusi dengan I.A. tokoh pejuang dari Balikpapan, dilakukan sabotase pembakaran *Raffinaderij* BPM, namun sempat dipadamkan oleh pasukan *Brandweer* dari BPM.

c. Gerakan Rakyat Pengejar Pembela Indonesia Merdeka (GERPINDOM) di Amuntai, dan Gerakan Pemuda Indonesia Merdeka (GERPINDOM) di Birayang

Pada tanggal 20 November 1945 di Amuntai atas inisiatif beberapa pemuda, berhasil membentuk suatu gerakan yang diberi nama: Gerakan Rakyat Pengejar Pembela Indonesia Merdeka yang disingkat dengan GERPINDOM. Pimpinan dari organisasi ini adalah : Abdul Hamidan, Jusni Antemas, M. Idris Tuhumar, Leweh, Arjan Tasan, Ruslan Husin, Abdul Adjis, Abdul Kadir, Hamran Amberi dan Lain-lain.

Di Birayang pada tanggal 10 Oktober 1945 sudah terbentuk juga organisasi yang namanya GERPINDOM. Tetapi GERPINDOM di sini singkatan dari Gerakan Pemuda Indonesia Merdeka yang dipimpin oleh Abdurrahman Karim (A.R. Haka) sebagai Komandan Umum, Anwaruddin sebagai wakil I dan H. Aberanie Sulaiman sebagai wakil II, serta dibantu oleh beberapa orang staf, antara lain Japeri, H. Ruslan, Ruli Rantawan dan lain-lainnya.

Organisasi GERPINDOM Birayang ini adalah Kesatuan Kelaskaran dengan Struktur Organisasi terdiri dari 2 orang wakil dan dibantu oleh beberapa orang tersebut di atas, ditambah dengan satu regu anak-anak di bawah umur yang bertugas sebagai penyelidik, serta beberapa orang penghubung seperti : R.A. Rajimansyah yang bertugas Urusan Hubungan GERPINDOM Birayang dengan GERPINDOM Amuntai, M. Damanhuri untuk urusan Hubungan dengan Kalimantan Timur. Organisasi ini didukung oleh beberapa pasukan yang sejak lahirnya pada tanggal 10 Oktober 1945 sampai Desember 1945 sudah mempunyai kekuatan anggota 1000 orang tersebar di 21 kampung yang setiap kampung mempunyai satu pasukan berkekuatan 46 orang dan tiap pasukan terdiri dari 1 orang Kepala Pasukan, 1 orang Wakil Kepala Pasukan serta 4 regu yang masing-masing regu terdiri dari 1 orang.

Pasukan-pasukan GERPINDOM Birayang tersebut adalah :

- (1) Simpang Tiga Birayang dengan kepala pasukannya Bunyamin Karim ;
- (2) Ipil Birayang dengan kepala pasukannya Asnawi ;
- (3) Jati Jangkung Birayang dengan kepala pasukannya Rusly Panangah ;
- (4) Rantawan Birayang dengan kepala pasukannya Ahmad Rasyidi ;
- (5) Rangas Luar Birayang dengan kepala pasukannya Sahrul Rangas ;
- (6) Rangas Dalam Birayang dengan kepala pasukannya H. Abdullah ;
- (7) Hawang Abung Ilung dengan kepala pasukannya H. Rasyidi ;
- (8) Ilung Birayang dengan kepala pasukannya H. Kamal ;
- (9) Dangu Birayang dengan kepala pasukannya Berahim ;
- (10) Limbar Birayang dengan kepala pasukannya Abulhasan ;

- (11) Labuhan Sari Birayang dengan kepala pasukannya Guru Ideris ;
- (12) Birayang Pasar dengan kepala pasukannya Mahyudin ;
- (13) Birayang Simpang Empat dengan kepala pasukannya H. Bustani ;
- (14) Wawai Birayang dengan kepala pasukannya Ideris ;
- (15) Jati Simpang Empat Birayang dengan kepala pasukannya Kamiruddin ;
- (16) Cukan Birayang dengan kepala pasukannya Harun Al Rasyid ;
- (17) Barabai dengan Kepala pasukannya Guru Jamhar ;
- (18) Walangku Barabai dengan Kepala pasukannya Hermansah;
- (19) Ta'al Haruyan dengan kepala pasukannya H.Ahmad;
- (20) Jambu Hilir Kandangan dengan kepala pasukannya H. Husin dan Wakilnya Japeri ;
- (21) Lokbatu Batumandi dengan kepala pasukannya H. Mansyur.

Program kerja GERPINDOM adalah mencegah NICA membentuk pemerintahan di Kalimantan, melancarkan perang psikologis dengan jalan melancarkan propaganda, menyebarkan pamflet-pamflet di tempat –tempat yang sudah diketahui oleh umum, melakukan sabotase, pembakaran gudang-gudang karet, memutuskan kawat-kawat telepon, penghadangan terhadap konvoi patroli NICA, mencari senjata dan selalu berusaha untuk mencari hubungan dengan pusat Republik di Jawa.

Program ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi. Tahap pertama program kegiatan ditujukan pada usaha mencari anggota sebanyak-banyaknya dan mengikutsertakan mereka dalam setiap kegiatan perjuangan. Untuk lebih meningkatkan daya mobilitas badan perjuangan GERPINDOM Birayang berubah sifatnya dari kelaskaran menjadi tentara yang akan menjadi bagian dari angkatan perang RI. Usaha kearah itu direalisasikan pada tanggal 1 Juni 1946 dengan merubah nama GERPINDOM menjadi “Tentara Republik Indonesia/Pasukan MN 1001” atau lebih dikenal dengan TRI MN 1001 dan merupakan bagian dari kesatuan TRI MN 1001 yang dipimpin oleh Mayor Tjilik Riwut.⁶⁸

Dalam usaha untuk memperoleh anggota, gerakan ini berusaha sangat giat sehingga anggotanya terdapat hampir disemua daerah di Kalimantan Selatan. Sehubungan dengan usaha-usaha tersebut H. Damanhuri diperintahkan ke Kalimantan Timur untuk mencari senjata dan mengembangkan perjuangan serta mencari hubungan agar kesatuan organisasi ini mempunyai kekuatan yang mampu menghadapi NICA.

H. Damanhuri telah melaksanakan tugasnya dengan berhasil membawa sepasukan pejuang yang bersenjata lengkap dengan kekuatan 25 orang menuju Birayang, yang terdiri dari : 1) John Masael, sebagai Pimpinan. 2) Made Kawes. 3) M. Thaher. 4) Asyikin. 5) Srigading. 6) Jambar Rosidi. 7) Pa'Musu. 8) H. Damanhuri. 9) Soleman. 10) Suntung. 11) H. Bahrul. 12) Anang Gunta. 13) Harun. 14) Saberi. 15) Masturi. 16) Isap. 17) Dukimin Duktur. 18) Guru Nuar. 19) R. Darsono. 20) Jailani. 21) Usup. 22) Abdullah Puput. 23) Sakarani. 24) Asri. 25) Jamhur.

Ketika pasukan ini dalam perjalanan dari Balikpapan (Kaltim) menuju Birayang Batang Alai (Kalsel) telah terjadi kontak senjata dengan patroli Militer Belanda sewaktu mereka berada di kampung Sempirang Muara Teweh dan telah berhasil merampas atau melucuti seluruh senjata musuh. Peristiwa ini terjadi ketika pasukan atau rombongan yang dipimpin oleh John Masael tersebut tiba di kampung Sempirang dan melihat musuh maka tanpa membuang waktu pasukan yang dipimpin oleh John Masael segera melakukan serangan terhadap pasukan patroli Militer Belanda tersebut. Tanpa mendapat perlawanan yang berarti dan dengan mudah pasukan patroli

⁶⁸ MBAD RI, *loc.cit.*

Militer Belanda dapat dilumpuhkan. Semua senjata militer Belanda yang sedang beroperasi tersebut dapat dirampas oleh pasukan John Masael, yakni terdiri atas 1 pucuk Brengun, 1 pucuk Tomson Gun dan beberapa pucuk Owen Jungle Gun, Karabijn US LE, dan pistol yang semuanya lengkap dengan pelurunya masing-masing beserta beberapa biji granat. Selanjutnya pasukan John Masael ini meneruskan perjalanannya menuju Birayang. Sebelum sampai di Birayang sempat beristirahat juga di Kampung Lokbatu yang disambut oleh H. Mansur dan kawan-kawan di tempatkan juga di pedalaman di hutan Jawa Lanting.

Sementara itu Anwaruddin Wakil Komandan Besar Umum GERPINDOM juga telah diperintahkan oleh Abdurrahman Karim (A.R. Haka) Komandan Komando Umum GERPINDOM untuk ke Banjarmasin dengan tugas membentuk Perwakilan GERPINDOM di kota tersebut sekaligus berusaha memperbanyak jumlah anggota, sambil berusaha mencari senjata dan mengadakan hubungan dengan pemerintah pusat di Yogyakarta dalam rangka usaha mendapatkan bantuan untuk meneruskan perjuangan melawan NICA di Kalimantan Selatan.

Misi Anwaruddin ke Banjarmasin tersebut dengan rekan-rekannya berhasil membentuk Markas Perwakilan GERPINDOM/TRI Pasukan MN 1001 yang berkedudukan di kampung Gadang Banjarmasin, dengan susunan kepengurusannya :

Kepala Markas Perwakilan : Anwaruddin

Sekretaris /Penulis : Ahmad Romansah

Pembantu-pembantu : M. Tarsyad (M.A. Tuha)

Darmawi Saruji

Mukeri R

Amberi Iba, dan beberapa orang Kepala Pasukan

Kesatuan/Kelaskaran GERPINDOM/TRI Pasukan MN 1001 Markas Perwakilan Banjarmasin ini akhirnya tergabung menjadi Markas daerah TRI/Pasukan MN 1001 kotapraja Banjarmasin dengan susunan Pimpinan/kepengurusan : M. Mohadi sebagai Kepala Markas, Anwaruddin sebagai Wakil Kepala Markas, Ahmad Romansah sebagai Penulis, serta beberapa orang pemerintah.

d. Laskar Hisbullah

Di daerah Martapura, Rantau dan Hulu Sungai beberapa tokoh pejuang membentuk organisasi perjuang kelaskaran yang diberi nama Laskar Hisbullah. Nama ini diambil dari Laskar Hisbullah yang berpusat di Yogyakarta yang dipimpin oleh A. M. Sangaji, yang datang di Banjarmasin dan menugaskan R. Soedirman untuk membentuk Laskar untuk daerah Martapura dan Pelaihari, serta Tamtomo sebagai penghubung Markas Besar Hisbullah Yogya untuk Kalimantan. Sehubungan dengan itu R. Soedirman dan Tamtomo keduanya diberi pangkat Kapten.

Dalam usahanya untuk membentuk kelaskaran dimaksud, R. Soedirman mengadakan hubungan dengan M. Hammy A.M. seorang pelarian polisi NICA, yang telah menyusun organisasi kelaskaran di Rantau yang bernama Banteng Borneo, sehingga M. Hammy A.M. dikenal sebagai "BB" yakni singkatan Banteng Borneo.⁶⁹

M. Hammy A.M. disamping sebagai pimpinan dari Banteng Borneo juga adalah anggota Panitia Pembantu Pemerintah Republik Indonesia Borneo (PPPRIB) dan menjabat sebagai Kepala Urusan Militer dan urusan persenjataan. Dalam suatu pertemuan antara Kapten Soedirman dan M. Hammy A.M. telah dicapai kesepakatan bahwa M. Hammy A.M. bersedia membentuk Laskar Hisbullah dengan Banteng Borneo sebagai inti pasukan. Syarat lain yang juga telah disepakati adalah bahwa nama Banteng Borneo tetap dipakai yang secara administratif berada di bawah

⁶⁹ Hassan Basry, *op.cit.*, hal. 80.

Hisbullah, sementara taktik dan operatif dipegang oleh M. Hammy A.M. sendiri. Dengan demikian lahirlah laskar Hisbullah di bawah pimpinan Kapten Soedirman dengan wilayah meliputi daerah Martapura, Karang Intan dan Pelaihari sebagai sektor 6-V.

Dalam perundingan selanjutnya agar pimpinan hanya dipegang oleh satu orang pimpinan, maka pada tanggal 11 September 1946 disepakati bahwa Sektor 6-V di bawah pimpinan Komandan Sektor Kapten M. Hammy A.M. dengan melebur Banteng Borneo ke dalam pasukan Hisbullah, Penetapan Kapten M. Hammy A.M. sebagai Komandan Sektor 6-V tertuang dalam surat Keputusan No. La 63/P-XX'H/46 tertanggal 6 November 1946. Kapten Soedirman pada mulanya diperbantukan pada Markas Pimpinan Pasukan Hisbullah Kalimantan, tetapi kemudian diangkat menjadi Komandan Sektor Hisbullah 14-C Sampit.⁷⁰

Dalam usaha untuk memperluas pengaruh Hisbullah, Kapten M. Hammy A.M. mengadakan kunjungan ke daerah Hulu Sungai. Di Rantau dia bertemu dengan M. Jusi seorang tokoh dari BPPKI (Barisan Pelopor Pemberontakan Kalimantan Indonesia). Mereka akhirnya sepakat untuk mengadakan kegiatan sabotase berupa pemotongan kawat telepon dan kemudian pembakaran pasar Rantau yang merupakan sumber perekonomian NICA.

Pembakaran pasar Rantau dengan sasaran gudang karet (getah asap) oleh Budi, H. Amir Hamzah dan Idris tahun 1946 tersebut mengakibatkan Belanda melakukan tindakan penangkapan terhadap tokoh-tokoh pemuda yang dicurigai. Tindakan Belanda ini dihadapi oleh Laskar Hisbullah dengan memperbesar kekuatan yang semula hanya dua kompi kemudian ditingkatkan menjadi Batalyon / Pimpinan Umum adalah : M. Hammy A. M. dibantu oleh wakil komandan Halidin serta komandan kompi bantuan dan pertahanan dijabat oleh Abdurrahman Roba yang dikenal dengan A. Roba, perlengkapan dijabat oleh Undat, Komandan Kompi Staf oleh Gimson yang dikenal sebagai Daeng Suganda.⁷¹

Batalyon Hisbullah dibagi dalam empat kompi ditambah kompi bantuan dengan penempatan sebagai berikut :

Kompi I A berkedudukan di Mandiangin- Riam Kanan

Kompi II A berkedudukan di Banua Padang – Tapin Utara

Kompi III A berkedudukan di Pematang Karang Hulu – Tapin Tengah

Kompi IV A berkedudukan di Muhara Muning – Margasari

Kompi Bantuan berkedudukan di staf Batalyon.

Kompi I A merupakan kompi yang paling lengkap persenjataannya yaitu 150 pucuk senjata dum-dum, kompi bantuan memiliki beberapa senjata paten, sedangkan kompi lainnya persenjataannya hanya berupa senjata tajam.

Di antara beberapa kegiatan yang dilakukan Laskar Hisbullah ialah penghadangan mobil Residen G.J. Alby di jalan raya di daerah Karang Putih dan penghadangan mobil Kiai Besar Merah Nadalsyah di Pampulu Tapin Selatan.

e. GERMERI (Gerakan Rakyat Mempertahankan Republik Indonesia)

Di Kalimantan Selatan gerakan-gerakan rahasia sebenarnya sudah ada sejak sebelum Proklamasi Kemerdekaan, yakni dalam usaha menghadapi kekejaman Jepang. Kemudian gerakan-gerakan rahasia ini berubah sifatnya dan bentuknya menjadi gerakan perlawanan untuk menghadapi NICA. Sebagai kelanjutan dari gerakan seperti ini di daerah Kandangan terbentuk sebuah organisasi baru bernama GERMERI (Gerakan Rakyat Mempertahankan Republik Indonesia). Gerakan ini lahir pada tanggal 23 Agustus 1945 setelah mendengar berita tentang

⁷⁰ MBAD RI, *op.cit.*, hal 52; lihat juga Kodam X / Lam, *op.cit.*, hal. 128.

⁷¹ Kodam X /Lam. *Ibid.*, hal. 132.

Kemerdekaan Republik Indonesia dari radio pribadi yang disembunyikan. Kepemimpinan dari gerakan ini terdiri dari Pemimpin Umum Hasnan Basuki, Wakil Pimpinan Badrun Al Bayan, kemudian dilengkapi dengan Kepala Laskar yang dipegang oleh H.A Djingga dengan Wakilnya Masdar, Bagian Penyelidik Banan dan Saman dan sebagai Pelatih Kelaskaran Iskandar. GERMERi juga dilengkapi dengan Pimpinan Daerah Amandit Selatan Badrun, Amandit tengah H.M. Noor, Daerah Binuang, H. Maseri Zain, Daerah Martapura Anwar dan Daerah Gambut Buhajar.⁷²

Pada mulanya gerakan ini dianjurkan oleh dua orang populer dari Jawa Timur Sudibyo dan Iskandar yang datang ke daerah ini setelah Proklamasi Kemerdekaan. Anjuran mereka mendapat tanggapan positif tokoh-tokoh pemuda Kampung Ulin Kandangan khususnya pemuda Buseri yang kemudian terkenal sebagai Hasnan Basuki. Buseri atau Hasnan Basuki berhasil mengumpulkan pemuda lain antara lain : H.Abd. Djingga dan Badrun. Disamping itu juga berhasil mengumpulkan pemuda bekas Boei Teisin Tai, Konan Hokoku Dan, hingga GERMERi berhasil menyusun organisasi yang dilengkapi dengan satuan-satuan tempur tingkat regu pelatih kemiliteran dengan taktik gerilya. Tempat latihan adalah hutan Kamal Ulin, Parigi, Kampung Ulin, Sungai Paring, Kampung Awang Kanan, Karang Anyar, Kampung Amparaya, Malutu, Kampung Sungai Raya.

Setelah menyelesaikan latihan pada setiap anggota diwajibkan mencari anggota baru sebanyak 10 orang dan kemudian ke sepuluh orang yang dilatih itu berkewajiban pula mencari anggota masing-masing 10 orang dengan cara inilah akhirnya GERMERi berhasil memasuki daerah-daerah Rantau, Binuang, Martapura, Gambut disamping daerah Kandangan sendiri dengan kekuatan mencapai 2000 orang.

Sesuai dengan perkembangan gerakan yang sangat luas, maka diperlukan penempatan kedudukan pimpinan agar kegiatan organisasi lebih efektif. Untuk kepentingan ini maka kedudukan pimpinan agar kegiatan organisasi lebih efektif. Untuk keperluan ini maka kedudukan pimpinan dibagi dua tempat, yakni di Ulin Kandangan, dan di Dalam Pagar Martapura.

Tahun 1946 terjadi perkembangan baru bagi GERMERi setelah datang utusan dari Jawa yang bernama Amir berpangkat Kapten dengan membawa instruksi agar GERMERi dilebar menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia) dengan Surat Keputusan yang ditanda tangani S.Dakono, Nomor. 003/K-II/B7). Di samping itu utusan tersebut juga membawa granat tangan No.381 dengan alat pembakar. Program organisasi yang baru adalah memperkecil gerakan mata-mata NICA dan kaki tangannya dengan jalan memberi pengertian dan keinsafan ke arah merebut kemerdekaan.

Di Banjarmasin GERMERi bersama-sama dengan badan perjuangan lainnya telah berhasil menghubungi komandan regu serdadu NICA dari Kompi X, Kamso, dan telah memberikan 50 butir peluru, 1 karabijn Jepang 9,5 m lengkap dengan pelurunya, 1 karabyin model bomen, disamping berhasil membuat senjata dum-dum.

Disamping gerakan rahasia yang ada terbentuk di Kandangan GERPINDO (Gerakan Pemuda Republik Indonesia) pada tanggal 12 September 1945 dengan pimpinan Arthum Artha, Zainal alias Hadi Noor, A. Gafar, Bariah Ariati, dan lain-lain.⁷³

f. BKR (Badan Keamanan Rakyat)

Semangat berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan sangat besar sekali, terbukti ketika terjadi musyawarah di Jalan Jawa No. 16 Banjarmasin yang berkesimpulan untuk membentuk organisasi kekuatan senjata, menarik perhatian pemuda. Organisasi ini ialah Badan Keamanan Rakyat (BKR).

⁷² Hassan Basry, *op.cit.*, tt, hal. 32.

⁷³ Hassan Basry, *loc.cit.*

Kepengurusan BKR ini tersusun dengan formasi: Pimpinan Markas Besar terdiri dari: Hadhariyah M, Dokter Suranto, A. Ruslan dan H.A. Husin Razak, dilengkapi dengan bagian keuangan, penyelidikan dan propaganda, pengangkutan, perlengkapan dan ketentaraan bagian Heiho. Ketentaraan bagian Heiho ini dipegang oleh Abdul Kadir Uwan, M.Amin Effendi dan Andin Burhan, ini merupakan kekuatan dari BKR. Organisasi ini tidak banyak berperan karena kemudian melebar menjadi TKR/TRI (Tentara Keamanan Rakyat/Tentara Republik Indonesia), di samping itu juga anggotanya merangkap menjadi organisasi kelaskaran lainnya.⁷⁴

g. Pasukan Berani Mati (PBM)

Organisasi Pasukan Berani Mati (PBM) merupakan organisasi yang lebih keras dan merupakan bagian khusus dari organisasi BPRI (Badan Pemberontakan Rakyat Indonesia) sebagai hasil dari kunjungan tim penggerak perjuang BPRI ke daerah-daerah. Pertemuan pertama terjadi di Kandangan antara tokoh-tokoh : H. Rusli, H. Sias, Zafry Zamzam, Achmad Basuni dan dihadiri pula oleh tokoh-tokoh dari Alabio, H.Amran Abdullah dan Bastani Jantera. Pertemuan lainnya yang dihadiri oleh para alim ulama berjumlah 26 orang telah mengambil sikap tentang perjuangan menghadapi NICA, musyawarah alim ulama ini berhasil mengambil keputusan yaitu :

2. Mensahkan atau membenarkan perjuangan kemerdekaan sebagai suatu kewajiban menjalankan syariat agama.
3. Menghukumkan kafir terhadap mereka yang memusuhi gerakan untuk memperoleh kemerdekaan bangsa, terlebih-lebih terhadap mereka yang menindas gerakan tersebut.⁷⁵

Keputusan yang sama pernah diambil oleh Alim Ulama di Rantau di bawah pimpinan Qadi Rantau Tuan Guru Haji Gazali, ketika terjadi peristiwa 9 November 1945 di Rantau yang menyebabkan jatuhnya korban Tazan dan A. Panyi. Para alim ulama saat itu menetapkan mati syahid bagi kedua korban keganasan NICA tersebut, sehingga mayatnya diperlakukan seperti orang mati syahid membela agama. Keputusan dimaksud sangat besar pengaruhnya bagi seluruh rakyat dan para pejuang dalam merebut kemerdekaan, mengingat daerah ini mayoritas beragama Islam.⁷⁶

Keputusan para Alim Ulama tersebut kemudian disampaikan kepada kaum muslimin dan Alim Ulama di Banjarmasin, Martapura, Rantau, Kandangan, Barabai dan Amuntai.

Keputusan para Alim Ulama ini pula yang melahirkan gerakan yang dinamakan Pasukan Berani Mati (PBM) yang dipimpin oleh H. Hasbullah Yasin dari Alabio yang didirikan pada tanggal 23 September 1945, hanya 6 hari setelah militer NICA mendarat di Alabio, gerakan ini selalu mengadakan kontak dengan PRI dan BPRIK pimpinan Hadhariyah M. Tujuan dari gerakan PBM ini adalah untuk merebut kemerdekaan dengan memperoleh dukungan dari para Alim Ulama. Untuk menyebar luaskan tujuan tersebut H. Hasbullah Yasin sebagai ketua dari gerakan dalam setiap kesempatan selalu mengajak masyarakat untuk ikut bersama gerakan ini, yakni pada setiap khotbah Jum'at atau pada ceramah-ceramah agama lainnya beliau selalu menegaskan bahwa sebagai seorang Islam memperjuangkan kemerdekaan tanah air adalah wajib atau mutlak harus dilaksanakan, karena Al Qur'an membenarkan dan mewajibkan hukumnya.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini dilaksanakan pengibaran Merah Putih di Alabio dan penyebaran pamflet-pamflet yang isinya mengajak kaum muslimin untuk ikut perjuangan merebut kemerdekaan.

Karena aktivitas inilah maka H. Hasbullah Yasin selalu dicurigai NICA. H. Hasbullah adalah seorang ulama yang disegani dan bekas Ketua Urusan Yatim Aniyah Islamiyah yang berkedudukan di Kandangan pada penjajahan Jepang. Beliau akhirnya mati ditembak oleh seorang Pamong Praja,

⁷⁴ Kodam X / Lam, *op. cit.*, hal. 102.

⁷⁵ Kodam X / Lam, *ibid.*, hal. 118.

ketika selesai berwudhu akan mengerjakan sholat pada tanggal 26 Oktober 1945 dimuka rumahnya di Alabio.⁷⁷

h. Laskar Syaifullah

Hassan Basry seorang pemuda Kalimantan yang pada awal Proklamasi Kemerdekaan berjuang bersama-sama temannya di Surabaya, kemudian berangkat ke Banjarmasin untuk melanjutkan perjuangannya di Kalimantan. Sebagai seorang santri dari sebuah pesantren terkenal di Gontor, beliau mempunyai semangat yang kuat untuk berjuang memperoleh kemerdekaan dan mengusir NICA. Pada tanggal 13 Oktober 1945 Hassan Basry berangkat dari pelabuhan Kalimas dengan menumpang perahu layar "Bintang Tulen" menuju Kalimantan Selatan, perjalanan antara Jawa ke Kalimantan di tempuh dalam waktu 17 hari pada tanggal 30 Oktober 1945 mendarat di pelabuhan Banjarmasin. Hassan Basry aktif melancarkan propaganda anti penjajahan dan mengajak pemuda-pemuda untuk menentang setiap tindakan kekerasan yang dilakukan NICA di Banjarmasin. Di kota ini secara rahasia Hassan Basry menghubungi ulama H. Abdurrahman Siddik di rumahnya di Jalan Pekapuran, bertemu dengan Abdul Hamidhan dari Amuntai. Dokumen tersebut segera diselundupkan ke Amuntai dengan perantara Abdul Kudus untuk bahan perjuangan GERPINDOM. Sepucuk surat lagi dititipkan kepada Abdul Hamidhan untuk disampaikan kepada ayahnya di Kandangan.

Kegiatan Hassan Basry tersebut akhirnya diketahui oleh NICA, dan karena itu ia bersama pemuda lainnya terpaksa menyingkir ke pedalaman, ke desa Haruyan (Hulu Sungai Tengah) 156 Km dari Banjarmasin. Di daerah itulah kemudian ia dihubungi oleh pimpinan pemuda pejuang setempat dengan maksud untuk membentuk suatu organisasi perjuangan.

Dalam suatu musyawarah yang diadakan selama dua hari yaitu tanggal 5 dan 6 Mei 1946 berhasil dibentuk suatu organisasi yang diberi nama Laskar Syaifullah, dan sebagai pimpinannya adalah Hassan Basry, wakil pimpinan dipegang oleh Gumberi yang terkenal dengan nama Astmawaty, serta dilengkapi dengan anggota staf, staf pelatih, staf urusan pemerintahan, staf urusan keuangan dan staf perlengkapan.

Sebetulnya Laskar Syaifullah telah berdiri sejak tanggal 24 September 1945 di Haruyan yang terdiri dari unsur-unsur gerakan pemuda Ansor dan Muhammadiyah, tetapi baru diresmikan pada tanggal 2 November 1945. Sebagai Kepala Kelaskaran saat ini adalah Atsmawaty nama samaran dari Gumberi.⁷⁸

Program pertama dari Laskar Syaifullah adalah pembinaan personil, berupa penanaman disiplin dan pemberian latihan kemiliteran. Setiap anggota wajib menjadi anggota laskar harus disumpah bahwa mereka tidak mengkhianati organisasi perjuangan dan bagi siapa yang melanggar dikenakan sanksi hukum mati. Anggota laskar tersebut sebagian besar adalah bekas Kaigun Heiho, Pandu-pandu Anshor, Hizbul Wathan, beberapa juga terdapat bekas pemuda barisan Kei Bodan, Seinendan dan juga bekas Boei Teisin Tai.⁷⁹

Sementara belum memperoleh senjata, anggota laskar hanya menggunakan senjata tradisional, seperti parang, tombak, keris, sedangkan senjata api hanya dua pucuk pistol FN saja,

⁷⁶ Yusliani Noor, *op.cit.*, hal. 97 – 104.

⁷⁷ Depdikbud, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1949) Daerah Kalimantan Selatan*, Depdikbud, Jakarta, 1980, hal. 102 atau Usman A. Gazali, dan Ramli Nawawi (ed), *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1949) Daerah Kalimantan Selatan*, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Banjarmasin, 1991.

⁷⁸ MBAD RI, *op.cit.*, hal. 53; lihat pula Hassan Basry, *op.cit.*, hal. 58.

⁷⁹ Hassan Basry, *op.cit.*, hal. 59.

namun demikian semangat para laskar tetap tinggi. Akhirnya NICA mencium kegiatan Laskar Syaifullah ini, dan inilah yang menyebabkan Hassan Basry terpaksa memindahkan markas besarnya ke daerah pegunungan yaitu Gunung Ambilik, 20 km dari Haruyan.⁸⁰

i. Pasukan MN 1001/MTKI

Gubernur Ir. Pangeran Muhammad Noor yang berkedudukan di Yogyakarta pada akhir tahun 1945 memanggil para pemuda Kalimantan yang berada di Jawa untuk membentuk badan perjuangan guna merebut Kalimantan dari tangan NICA. Pemuda-pemuda tersebut bersepakat untuk membentuk pasukan yang diberi nama "Pasukan MN 1001". Arti dari itu adalah Pasukan Muhammad Noor dengan seribu satu akal atau jalan untuk mencapai kemerdekaan bagi pulau Kalimantan.

Dalam usahanya kembali ke Kalimantan, Pasukan MN 1001 dibagi dalam dua rombongan ekspedisi. Yang pertama dipimpin oleh Tjilik Riwut dan rombongan kedua oleh Husin Hamzah. Rombongan Tjilik Riwut menuju ke daerah pedalaman Kalimantan Tengah dan rombongan Husin Hamzah menuju Kalimantan Selatan. Begitulah kesepakatan mereka sebelum menjalankan tugas ekspedisi laut ke Kalimantan.⁸¹

Atas perintah Harian dari Markas Besar Tentara yang ditandatangani oleh Letjen R. Oerip Soemohardjo tanggal 5 Juli 1947, No. 119/SO/47/1 pasukan MN 1001 dimasukkan secara taktis dan administrasi ke dalam S.O. II Markas Besar Tentara. Sehubungan dengan perubahan ini maka Markas Tertinggi Angkatan Udara RI memberikan pada pasukan MN 1001 Mobile Brigade MBT dengan 48 Karabijn, 48 sepatu laras dari kulit, dan 48 uniform hijau lengan panjang, kemudian dilengkapi dengan pesawat pemancar/penerima radio kepada Tjilik Riwut.⁸²

Susunan staf markas TRI MN 1001 di Banjarmasin, sebagai pimpinan umum dipegang oleh Tjilik Riwut dengan wakil A. Mukran, dilengkapi dengan bagian keuangan, bagian ketentaraan, penghubung dan pelatih.

Anggota yang dapat diterima menjadi pasukan TRI MN 1001, yaitu setelah lulus dari penelitian tentang kesetiaannya kepada Republik Indonesia, kemudian disumpah dengan Al Qur'an harus menandatangani keanggotaannya dengan darah cap jempol.⁸³

Melihat perkembangan TRI MN 1001 yang membahayakan bagi kekuasaan NICA, maka NICA mengatur siasat adu domba dan menimbulkan rasa curiga antara sesama mereka, dengan cara membuat tanda anggota TRI MN 1001 yang dipalsukan. TRI MN 1001 palsu ini tidak lain adalah kaki tangan NICA yang menyusup ke dalam tubuh TRI MN 1001 untuk menghancurkan dan mencari dimana kedudukan markas besarnya. Inilah yang menyebabkan kemudian Markas MN 1001 diserbu Belanda.

Kecurigaan ini bukan saja dengan anggota MN 1001 karena sulit yang mana yang palsu dan asli, tetapi berakibat panjang yaitu terjadinya bentrokan antara TRI MN 1001 dengan ALRI Divisi IV. Bentrokan ini mulai dari menculik, menyiksa dan akhirnya terjadi kontak senjata yang tentunya semua ini melemahkan perjuangan.

Untuk mengatur siasat agar organisasi MN 1001 jangan di susupi oleh kaki tangan NICA, maka musyawarah antara Markas Besar TRI MN menetapkan untuk mengubah nama TRI MN 1001 menjadi "Mandau Talabang Kalimantan Indonesia" MTKI, sehingga nama selengkapnya menjadi TRI pasukan MN 1001/MKTI. Pada mulanya pimpinan MKTI dipegang oleh A. Mukran dan Aliansyah, tetapi setelah A. Mukran pergi ke Jawa, maka pimpinan umum Markas Besar MN 1001/MTKI itu

⁸⁰ M. Hammy A.M, *op.cit.*, hal. 286.

⁸¹ M. Hammy A.M, *ibid.*, hal. 283.

⁸² Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun*, PT. Jayakarta Agung Offset, Jakarta, 1979, hal 114 – 117.

⁸³ M. Hammy A.M, *op.cit.*, hal. 286.

dijabat oleh Tjilik Riwut dan sebagai wakil pimpinan A. Mukran selanjutnya dilengkapi dengan bagian ketentaraan, penghubung, pelatih, propaganda dan bagian penculikan.

Dalam pembinaan wilayah MN 1001/MTKI meluaskan daerahnya dengan membentuk markas-markas seksi MTKI di seluruh Hulu Sungai, antara lain di Aluan, Sungai Gatal, Benua Kepayang, Paya Pangambau, Barikin, Aluan Besar, Kahakan, Bihara, Dayak, Palajau, Banua Binjai, Pitap, Sirap, Baruh Bahinu, Limpasu, Gunung Batu, Barabai, Tanjung, Rantau, Marabahan, dan lain-lain.

Terkenal tokoh Hadhariyah Heiho dan Andin Darlian menyusun kekuatan MTKI di daerah Banjarmasin, dan kemudian berhasil dengan kedudukan Markas MTKI di Gambut untuk seluruh Banjarmasin. Tetapi kemudian setelah Hadhariyah Heiho tertangkap, maka MTKI Hulu Sungai memisahkan diri dari MTKI Gambut. MTKI daerah Hulu Sungai lebih dahulu melebar menjadi ALRI Divisi IV, sedangkan MTKI daerah Gambut tetap ada sampai pengakuan kedaulatan, bahkan diresmikan sendiri.⁸⁴

Pembentukan markas pasukan MN 1001 Daerah Banjar, sebenarnya sangat berkaitan dengan kedatangan A. Mukran yang datang sekitar jam 19.00. Pada jam 02.00 malam diantar oleh pamannya Tuganal menuju Handil Jawa (Gambut) ke rumah Yahmin yang berada di tengah sawah. Dari sini pada siang harinya A. Mukran dipindahkan ke Handil Babirik (Kurau) rumah Sihir atau tempat orang tua Tuganal.

Beberapa hari di Handil Babirik, A. Mukran merasa tempat ini sangat baik dan cocok untuk dijadikan markas pasukan MN 1001, yakni Tjilik Riwut untuk dibawa ke Kurau. Seseorang yang dimaksud itu adalah Aliansyah Yusuf, sedangkan tempat penjemputannya di daerah Aluh-Aluh Besar, seperti apa yang diceritakan Aliansyah Yusuf sebagai berikut :

“ Mukran yang berasal dari Tatah Pemangkih datang bersama rombongan Tjilik Riwut, tetapi masuk ke daerah Banjar Selatan (Kurau) mula-mula Mukran sendiri dan terus menemui saya di Handil Babirik bersama Tuganal, pamannya. Dan beberapa hari sesudah itu saya disuruh oleh Mukran mengambil Tjilik Riwut dengan sebuah perahu nelayan. Dan Tjilik Riwut terus saya bawa ke Handil Gayam dengan penjagaan ketat”.

Kedatangan Tjilik Riwut di Kurau, diperkirakan pada akhir bulan Mei atau awal bulan Juni 1946. Hal ini berdasar keterangan A.R. Haka yang menyebutkan, bahwa Gerpindom Birayang dipimpin telah menjadi Gerpindom/TNI MN 1001 pada tanggal 1 Juni 1946. Keterangan A.R. Haka ini menunjukkan sebelum tanggal 1 Juni 1946 pasukan MN 1001 sudah ada di daerah Kurau merupakan pangkal penyebaran pasukan MN 1001 ke Hulu Sungai.

Keberadaan pasukan MN 1001 di daerah Kurau sekitar akhir bulan Mei dan awal Juni, juga diterangkan oleh Djur Djinal sebagai berikut :

“Dikala pertengahan tahun 1946, saya beserta anggota-anggota yang telah tersusun (TRI) menggabungkan pula pada Kesatuan MN 1001 yang dipelopori oleh Bapak Tjilik Riwut dan saudara Mukran sebagai wakilnya. Yang pada waktu saya ditunjuk sebagai Sekretaris Markas Pangkalan Jakarta, bertempat di Handil Lawahan”.

Dengan kedatangan Tjilik Riwut di Kurau, maka mulailah dibentuk kelompok –kelompok perjuangan MN 1001 di handil-handil, di kampung-kampung dan di daerah sekitarnya. Atas bantuan A. Mukran, Norman Atak dan juga masyarakat setempat seperti Tuganal, Aliansyah Yusuf sebagai Sekretaris, Norman Atak sebagai Bendahara dan beberapa lainnya seperti Tuganal, Basuni Antari, Masdar dan Arifin sebagai penghubung.

⁸⁴ M. Hammy A.M, *ibid.*, hal. 289.

Kemudian di Banjarmasin berhasil dibentuk markas 9 pasukan MN 1001 di bawah pimpinan Alimun Hakim dengan wakilnya Abdurrasul/Bung Tunggal dan Akhmad Gani sebagai Kepala Staf . Di daerah lain, yaitu di daerah Anjir Serapat dibentuk markas 12 pasukan MN 1001 di bawah pimpinan Zainuddin dan di Marabahan dengan Markas 12 Pasukan MN 1001 di bawah R.Hidayat Alif Kurdi.

Seiring dengan pembentukan markas-markas besar, dilakukan pula penyebaran pasukan memperbanyak anggota. Pada mulanya dalam memperbanyak anggota pasukan dilakukan dengan hati-hati, karena takut diketahui oleh mata-mata atau kaki tangan NICA, sehingga hanya beberapa orang saja yang menjadi anggota adalah orang yang dipercaya. Dan untuk membuktikan kepercayaan itu setiap anggota harus berani menandatangani kartu anggotanya dengan cap jempol darahnya yang sengaja dikeluarkan.

Hal yang serupa juga diterangkan oleh H.Hammy A.M, bahwa anggota yang dapat diterima menjadi anggota TRI MN 1001, yaitu setelah lulus dari penelitian tentang kesetiiaannya kepada Republik Indonesia, kemudian disumpah dengan Al Qur'an dan harus menandatangani keanggotaanya dengan darah cap jempolnya.

Selain itu orang yang menjadi anggota pasukan biasanya adalah orang yang pernah ikut dalam organisasi, baik organisasi politik maupun organisasi ketentaraan seperti SKI Dewan Banjar, Dewan Dayak Besar, BPRI, TRI dan lain-lain yang secara diam-diam menjadi anggota pasukan MN 1001 atau ikut membantu perjuangan.

Dalam perkembangan, pasukan MN 1001 sebagian besar anggotanya berasal dari masyarakat Kurau, Gambut dan daerah sekitarnya (daerah pesisir laut), sehingga di daerah Kurau Gambut dan daerah sekitarnya berdiri markas-markas pangkalan. Markas-markas pangkalan tersebut adalah markas Pangkalan Handil Lawahan pimpinan Satar Djinal, Handil Gunung Kuliling pimpinan Mukri Asang, Pasar Ambungan Guntung Pimpinan Matsin, Handil Cangring Tengah pimpinan Idjas, Handil Awang Parupuk pimpinan M. Rasidi, Handil Gayam Tengah pimpinan H. Juhri, Handil Babirik pimpinan Anang Handjah, Handil Lahat Tengah pimpinan M. Ramli, Handil Ilung pimpinan Abdul Gani (Faruk), Handil Bincit Pimpinan Djuman, Handil Mangguruh pimpinan Musa Saleh, Jambu Burung Punai pimpinan H. Abdul Hamid, Handil Dua Alur pimpinan Arpani, Handil Kabuau pimpinan H. Sarudji, Handil Bapipih pimpinan Halil, Handil Pamangkih pimpinan Pakkar, Pasar Kurau Tambak pimpinan Leo Bungai, Handil Negara Kurau pimpinan Arta, Bahalayung pimpinan H. Anggam, Tambak Sarinah pimpinan Muhammad, Muara Malintang pimpinan M. Arsjad (tukang jahit) dan Kaderi. Pasar Selasa Lama pimpinan Datu Ladjim, Irigasi Gambut pimpinan H. Ahmad, Km 13 pimpinan H. Djambari, Tambak Pitu pimpinan H. Naseri, Handil Banyu Irang pimpinan H. Kusin, Handil Satu Gambut pimpinan H. Aman, Sungai Tabuk pimpinan Djerman, Sungai Pinang pimpinan Sakarani dan Sungai Pinggiran pimpinan Atjil.

Pada mulanya markas perjuangan MN 1001 berkedudukan di Handil Gayam (Kurau), karena merupakan tempat persembunyian pimpinan umum yaitu Tjilik Riwut. Kedatangannya di sana mendapat perlindungan dari H. Juhri juga tokoh-tokoh SKI di Handil Babirik (Cabang Kurau), seperti Suriansyah, Tarmidji, Hamdi Budhigawis dan Leo Bungai. Namun karena kantor SKI di Handil Babirik sering didatangi/dikunjungi oleh polisi NICA, maka demi keamanan Pimpinan Umum dan tokoh-tokoh lainnya serta mempermudah gerakan perjuangan, pusat perjuangan MN 1001 dipindah ke Handil II Gambut.

Di bagian tempat lain yaitu Handil Lawahan Gambut juga dibuat tempat persembunyian berupa sumur perlindungan. Sumur perlindungan yang besarnya sekitar 4 m x 4 meter, ditutup dengan bambu-bambu dan rumput-rumput kering merupakan tempat persembunyian sementara. Tempat ini biasanya digunakan sebagai tempat pertemuan sementara tokoh-tokoh MN 1001 pada siang hari.

Dengan berkumpulnya tokoh-tokoh MN 1001 di daerah Gambut, daerah ini menjadi pusat perjuangan Pasukan MN 1001. Ada dua faktor yang cukup mendukung daerah Gambut sebagai pusat perjuangan. Pertama daerah Gambut cukup aman, karena keadaan alamnya adalah sebagai daerah hutan disamping daerah persawahan. Dengan demikian alam yang demikian akan mendukung terhadap gerakan perjuangan, baik sebagai tempat persembunyian maupun penyediaan bahan makanan bagi perjuangan. Kedua, perjuangan MN 1001 mendapat dukungan dari masyarakat setempat, sehingga segala gerakan perjuangan dirahasiakan dan masyarakat senang hati menyumbangkan harta bendanya, terutama menyumbangkan beras untuk kepentingan perjuangan.

j. GERPINDOM Berubah Menjadi GERPINDOM/TRI Pasukan MN 101

Beberapa bulan setelah terbentuknya GERPINDOM di Birayang, datang seorang dari Jawa R. Hadikusuma yang membawa berita bahwa terjadi perubahan nama TKR menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Dengan adanya ini maka GERPINDOM mengganti nama menjadi TRI Pasukan MN 1001/GERPINDOM. Nama "Pasukan MN 1001" diambil dari nama Gubernur Kalimantan Ir Pangeran Muhammad Noor. Perubahan ini tidak mengubah struktur pimpinan yang ada, hanya diperlukan terbinanya hubungan dengan pusatnya di Jawa, karena itulah ditunjuk R.A Radjimansyah sebagai anggota penghubung antara TRI Pasukan MN 1001/GERPINDOM dengan Pusat Pasukan MN 1001 di Jawa.

Pada kurang lebih jam 09.00 pagi bulan Maret 1957, Abdurrahman Karim Komandan Komando Umum GERPINDOM di Birayang bersama-sama dengan H.Aberanie Sulaiman di Birayang setelah menerima laporan dari anggotanya yang bernama Ardani bahwa H. Damanhuri yang ditugaskan mencari senjata ke Balikpapan (Kalimantan Timur) telah datang bersama-sama rombongan pasukan bersenjata lengkap di hutan Jawa Lanting Lokbatu, maka tanpa menunda waktu lagi keduanya dengan berkendara sepeda berangkat dari Birayang menuju Lokbatu. Sesampai di hutan Jawa Lanting di kampung Lokbatu terjadi perundingan yang sangat serius antara Abdurrahman Karim dan H. Aberanie Sulaiman dengan John Masael sebagai pimpinan rombongan serta anak buahnya yang berjumlah 26 orang yang semuanya lengkap bersenjata modern. Dalam perundingan ini disepakati bahwa perundingan akan dilanjutkan setelah rombongan pasukan John Masael ini tiba di Birayang, dengan maksud akan melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap spion-spion Belanda serta melakukan penyergapan terhadap pos-pos dan patroli-patroli polisi/militer Belanda yang berkekuatan kecil sekaligus merampas senjatanya.

Pada sore harinya rombongan pasukan John Masael yang sedang dalam keadaan istirahat di hutan Jawa Lanting Lokbatu itu mendadak diserang oleh polisi dan militer Belanda dari segenap jurusan dengan kekuatan yang besar sekali; pasukan John Masael terpaksa menghindar untuk menyelamatkan diri sambil mengadakan perlawanan, yang selanjutnya pada malam hari itu juga meneruskan perjalanan menuju Birayang.

Dalam kejadian tersebut pasukan John Masael tidak seorangpun yang menjadi korban maupun cedera. Dalam perjalanan itu tanpa berhenti di Birayang, akhirnya mereka sampai di kampung Kumpang Maligung-Aluan disambut oleh Tarman, Asnawi dan kawan-kawan setelah di tengah perjalanan mereka melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap spion Belanda, antara lain bernama Pa'ilas di kampung Rangas dan Husin kepala kampung Libaru. Di kampung Kumpang Maligung inilah rombongan pasukan John Masael hancur dan beberapa orang akhirnya tertangkap, sedangkan Sarigading yang menyamar ditembak mati oleh polisi Belanda sewaktu dia menumpang mobil taksi di Banua Binjai (Barabai Kota) hendak ke Banjarmasin.

Pada saat yang kritis inilah GERPINDOM Birayang memindahkan markasnya dari simpang tiga Birayang ke Gua Kudahaya yang terletak di belakang kampung Mandam-Cukan Lipai, Birayang

dengan selalu berusaha menyelamatkan sisa-sisa rombongan pasukan John Masael, H. Damanhuri, Made Kawis, Jambar Rosidi, Pa'Musu, serta senjatanya. Usaha ini berhasil dengan terhimpunnya beberapa anggota di Markas GERPINDOM Birayang di Gua Kudahaya. Mereka yang berada di sini adalah : Abdurrahman Karim, H. Aberanie Sulaiman, Arjan, Japeri, Samar, Taberan, Duhamid, Amir, Abur, Utuh Kandangan, Rusli Panangah, Ancau (Daeng Ladjida), Utuh Dungkuk, Jahri, dan beberapa orang lainnya, dengan kekuatan persenjataan yang dapat dihimpun dari sisa persenjataan rombongan John Masael yang mendapat serangan waktu berada di Kampung Kupang Maligung, yakni beberapa pucuk senjata modern lengkap dengan pelurunya yaitu 1 pucuk Thomson Gun, 3 pucuk Owen Gun, 2 pucuk Karabijn US/LE, beberapa biji Granat UU dan pistol.

Dari gua Kudahaya inilah dengan modal senjata dari sisa pasukan John Masael tersebut GERPINDOM menyusun kembali kekuatannya untuk meneruskan perjuangan bergerilya melawan Belanda. Usaha tersebut kemudian terwujud dalam suatu pertempuran di Hambawang Pulasan.

Pada hari itu Rabu pukul 19.00 pagi, 17 hari puasa Ramadhan pada tahun 1947 Abdurrahman Karim dengan Jamhar yang berasal dari rombongan John Masael dari Kalimantan Timur sedang berada di rumah Jailan dipasar Birayang dengan tiba-tiba dikepung dan disergap oleh pasukan polisi Belanda, namun keduanya lebih dahulu sudah berhasil meloloskan diri dari sergapan tersebut. Sehingga gagallah niat spion dan polisi-polisi Belanda untuk menangkapnya, akan tetapi pemilik rumah yang bernama Jailani tersebut ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi Belanda di Birayang. Beliau sempat ditahan beberapa hari, selanjutnya dibebaskan.

Kejadian ini sampai beritanya ke GERPINDOM di Gua Kudahaya, karena itu menjelang Magrib semua anggota yang berada di Gua Kudahaya sudah berada di Birayang dengan maksud menyerang kantor Pemerintahan/Polisi Belanda Birayang. Untuk itu maka pada malam harinya dengan mengambil tempat di rumah Utuh Hingkung di Kampung Rantau Birayang, oleh pimpinan GERPINDOM Birayang diadakanlah rapat yang dihadiri Abdurrahman Karim, H. Aberanie Sulaiman, Made Kawis, Jamhar Rosidi, H. Damanhuri, Hamdi Idar, Suni dan beberapa orang anggota-anggota GERPINDOM Birayang lainnya.

Dalam rapat ini, akhirnya dihasilkan kata sepakat untuk melakukan penghadangan terhadap setiap kendaraan yang berisi polisi atau militer Belanda yang lewat di Hambawang Pulasan. Sehubungan dengan itu setelah selesai makan sahur kurang lebih jam 12.00 malam diberangkatkan beberapa orang anggota menuju Hambawang Pulasan, mereka itu adalah : H. Aberani Salaiman, dengan bersenjatakan Owen gun lengkap dengan pelurunya, Made Kawis orang berasal dari Tabanan Bali dengan bersenjatakan owen gun lengkap dengan pelurunya, H. Damanhuri dengan bersenjata Thomson gun lengkap dengan pelurunya, Jamhar orang berasal dari Muara Kaman Kalimantan Timur dengan bersenjata Owen gun dengan pelurunya, Ancau (Daeng Ladjida) dengan bersenjatakan karabijn US/LE lengkap dengan pelurunya, Hamdi Idar berasal dari Jati Kiring Birayang dengan bersenjatakan karabijn US/LAE lengkap dengan pelurunya, Suni bersenjata pistol, Ibur hanya bersenjata tajam, Utuh Kandangan hanya bersenjata tajam, Tuhani (Utuh Dungkuk) hanya bersenjata tajam, Karim bersenjata tajam, Jahri bersenjata tajam.

Pada pagi harinya pasukan yang lengkap dengan persenjataan modern terdiri dari H. Aberanie Sulaiman, Made Kawis, H. Damanhuri, Jamhar, Ancau, Hamdi, Idar, Suni semuanya hanya berjumlah 7 orang, sudah siap di tepi jalan raya di Hambawang Pulasan antara Ilung dengan Batu Mandi, sedangkan 5 orang lainnya yang tidak bersenjata di tempatkan kurang lebih 100 meter di belakang.

Pada kurang lebih jam 09.00 pagi hari ke -18 bulan puasa bulan Mei 1947 lewat salah satu truk yang penuh berisi Militer Belanda, melihat ini pasukan tersebut tanpa membuang waktu lagi dan didorong oleh jiwa dan semangat meluap dan berapi-api, berlompatanlah dari persembunyiannya sambil memuntahkan peluru senjatanya masing-masing. Musuh sedang lengah

dan tidak menduga akan adanya serangan yang mendadak tersebut, sehingga semua Militer Belanda dalam truk tersebut tewas tanpa sempat mengadakan perlawanan, sedangkan truknya terjungkir ke samping jalan. Namun sebelum para pejuang berhasil merampas senjata mereka satu buah truk penuh berisi Militer Belanda datang lagi. Karenanya terjadilah pertempuran yang sangat sengit dan seru sekali, yang jarak pertempuran itu hanya beberapa meter saja. Namun tanpa diduga pula rupanya masih ada sebuah truk lagi yang penuh berisi militer Belanda yang turun di belakang sebelum tiba di tempat pertempuran dan melakukan serangan dari beberapa jurusan, sehingga terjadilah pertempuran yang lebih hebat dan dahsyat lagi dengan bunyi dentuman dan letusan senjata otomatis serta bau asap mesiu yang menambah bergejolaknya jiwa dan semangat kepahlawana para pejuang yang hanya berkekuatan 7 orang saja. Sedangkan yang 5 lainnya terpaksa menghidar karena tidak bersenjata, peristiwa tersebut di atas dikenal sebagai "Pertempuran Hambawang Pulasan".

Dalam suasana pertempuran yang demikian seru tersebut Made Kawis menderita luka parah ditembus peluru musuh dan banyak mengeluarkan darah, sehingga para pejuang terpaksa mengundurkan diri, sementara di pihak Belanda diperkirakan banyak korban, baik yang meninggal maupun yang menderita luka berat atau ringan. Yang lebih menguntungkan dari peristiwa ini dalam perjuangan melawan Belanda adalah hilang dan lumpuhnya jiwa dan semangat di antara banyak militer dan polisi Belanda dalam melaksanakan tugasnya. Sebaliknya bagi para pejuang dan rakyat berakibat bangkit dan tergugahnya jiwa dan semangat perlawanan.

Selanjutnya besok harinya semua anggota pasukan sudah berada kembali di Markas GERPINDOM Birayang di Gua Kudahaya, terkecuali Made Kawis dan Utuh Kandangan tertangkap dan tertembak oleh Militer Belanda di Kias Tapuh Birayang. Made Kawis gugur sebagai kesuma bangsa sedangkan Utuh Kandangan tidak cedera sedikitpun dan datang dengan selamat di Gua Kudahaya dengan selamat.

Beberapa hari setelah peristiwa ini dari Markas GERPINDOM Birayang di Gua Kudahaya diberangkatkan pasukan yang bersenjata lengkap dipimpin oleh H. Aberanie Sulaiman menuju Kalimantan Tenggara-Kotabaru lewat pegunungan dengan tugas mencari senjata tambahan dan mengembangkan organisasi perjuangan serta mencari penghubung yang bisa langsung berhubungan, karena R.A Rajimansyah penghubung GERPINDOM/TRI Pasukan MN 1001 dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta tidak ada kabarnya lagi, sedangkan Anwaruddin yang ditugaskan ke Banjarmasin telah membentuk perwakilan GERPINDOM/TRI Pasukan MN 1001 di Banjarmasin.

Dalam melaksanakan tugas berat inilah dalam perjalanan antara Batang Alai dengan Kotabaru dan sebaliknya Kotabaru dengan Batang Alai pulang pergi, H. Aberanie Sulaiman bertemu dengan Hassan Basry yang berniat hendak menyeberang ke Jawa. Beberapa lama kemudian GERPINDOM/TRI Pasukan MN 1001 digabung ke dalam ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, dengan Hassan Basry sebagai Pimpinan Umum dan H. Aberanie Sulaiman sebagai Wakil Pimpinan Umum, sedangkan Abdurrahman Karim Komandan Komando Umum setelah terbentuknya Markas Besar pasukan ALRI Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan menjabat sebagai Kepala Keamanan Markas Besar dengan A.R. Haka.

Gerakan-gerakan rahasia lainnya yang juga tumbuh meskipun tidak tersebar luas di seluruh Kalimantan Selatan hampir terdapat dimana-mana seperti antara lain : PPRIB (Pembantu Pemerintah Republik Indonesia Borneo) yang dipimpin oleh Dokter Soeprapto, Kiai M. Hasan Tjorong, Soeradi dan lain-lain, telah didirikan pada tanggal 21 September 1945, tetapi baru diketahui pada tahun 1946 hampir tidak tersebar luas di daerah ini. Gerakan rahasia P.21 lahir di bawah pimpinan Andin Burhan, Anang Basar dan lainnya, yang menurut GERPINDOM Amuntai gerakan ini adalah anak dari GERPINDOM. Di Amuntai terbentuk pula TKI (Tentara Keamanan

Indonesia) sebagai cabang dari TKI Kalimantan Timur yang berpusat di Long Ikis di bawah pimpinan Letnan Kolonel Dokter R.M. Noto Sunardi yang dikirim dari Jawa bersama Kapten Mulyono. Di Negara berdiri pula organisasi yang bernama PETER (Pembantu Tentara Republik) di bawah pimpinan A. Hamid Rizal. PETER ini berasal dari PPRIM (Panitia Persiapan Republik Indonesia Merdeka) yang terbentuk pada tanggal 25 September 1945 di Tambak Bitin di bawah pimpinan Umar Rasyid, Barak, Juhri dan A. Rizal yang kemudian berubah menjadi PERI (Pembantu Republik Indonesia) dan pada bulan November 1945 menjadi PETER, ketika rombongan IX BPRI datang ke Negara, maka PETER melebur menjadi BPRI.⁸⁵

2. Pertempuran 9 November 1945 di Banjarmasin, Awal Revolusi Fisik di Kalimantan Selatan

Kedatangan NICA ini sangat mengejutkan para tokoh politik yang sebelumnya telah menyusun pemerintah Republik Indonesia di Kalimantan Selatan oleh Komite Nasional Indonesia (KNI) daerah Kalimantan. Lebih mengejutkan lagi adalah larangan pawai Merah Putih 10 Oktober 1945 yang akan diadakan di seluruh Kalimantan Selatan dalam rangka memeriahkan terbentuknya Pemerintahan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan.

Siasat NICA untuk melemahkan perjuangan ialah dengan cara menarik tokoh-tokoh politik yang bersedia bekerja dengan NICA, dan siasat ini berhasil dengan menarik Pangeran Musa Ardikesuma bekerjasama dengan NICA sebagai Kiai Kepala dan melepaskan Jabatan Residen Republik Indonesia.

Sadar terhadap kelemahan politik tersebut, para pemuda berjuang dengan cara sendiri untuk memperoleh kemerdekaan dan mengusir pemerintahan NICA di daerah Kalimantan Selatan. Bentuk perjuangan tersebut adalah sebuah gerakan rahasia yang dibentuk pada tanggal 16 Oktober 1945 dengan nama Barisan Pemberontakan Republik Indonesia Kalimantan (BPRIK) yang dipimpin oleh M. Amin Effendi, Abdul Kadir Uwan dan lain-lain. BPRIK anggotanya terdiri dari para pemuda khususnya para bekas Heiho Organisasi ini cepat berkembang di daerah Hulu Sungai. Di Rantau dipimpin oleh tokoh-tokoh politik terdiri dari H. Makki dan H. Mahyudin, dengan nama BPPKI (Barisan Pelopor Pemberontak Kalimantan Indonesia).

Sebuah insiden di Pasar Baru Banjarmasin terjadi. Dua orang tentara Belanda telah tewas dikeroyok pemuda pada tanggal 1 November 1945. Hal ini merupakan bukti pergulatan kekerasan spirit merdeka telah terjadi.

Selain peristiwa pembunuhan tersebut, telah direncanakan oleh pimpinan BPRIK bahwa pada tanggal 1 ke 2 November 1945 malam, akan digerakkan suatu aksi pemuda untuk merampas senjata di kantor polisi yang akan dipimpin oleh Amin Effendi.

Untuk melaksanakan rencana tersebut dibentuklah kelompok-kelompok pemuda dalam beberapa sektor. Sektor Selatan di bawah pimpinan Badran berkedudukan di sekitar Rumah Sakit Ulin, Sektor Utara di bawah pimpinan Abdul Kadir Uwan, sedangkan M. Amin Effendi sebagai Pimpinan Umum memegang Sektor Tengah.⁸⁶

Serangan itu dikoordinasikan oleh Barisan Pemberontak Republik Indonesia Kalimantan (BPRIK). Sasaran yang menjadi rencana penyerbuan adalah tangsi polisi NICA di Jalan Jawa, Rumah Sakit Ulin.⁸⁷ Di rumah sakit tersebut telah dirawat tentara NICA bekas tawanan Jepang yang baru dibebaskan dari kamp konsentrasi Puruk Cuhu. Mereka masih dalam keadaan lemah dan sakit, serta memerlukan perawatan, tetapi oleh NICA telah dipersenjatai. Sasaran lain adalah Tangsi

⁸⁵ Hassan Basry, *op.cit.*, hal. 86.

⁸⁶ M. Hammy A.M, *op.cit.*, hal. 294.

⁸⁷ Di Km. 1 Jalan A. Yani sekarang.

Tentara NICA di Benteng Tatas⁸⁸ dan pelabuhan Banjarmasin dimana sedang berlabuh dua buah kapal Cruiser kepunyaan sekutu (Australia).

Kelompok Bagian Pasar Baru berkekuatan 90 orang dengan persenjataan sepucuk Bren Gun dan sepucuk pistol selebihnya menggunakan senjata tajam, keris, pisau, mandau dan tombak. Kelompok M. Amin Effendi terdiri dari para pemuda sekitar pasar lama bergabung dengan kelompok pemuda Jalan Belitung berkekuatan 60 orang, dengan persenjataan 4 pucuk Karabijn Jepang, granat tangan buatan Amerika 1 peti, beberapa buah Brand Bom (Bom Api) yang biasanya digunakan dari atas pesawat terbang.⁸⁹

Persiapan yang belum matang dan belum ada pengalaman perang mengakibatkan NICA dengan mudah mencium rencana kegiatan tersebut mata-mata NICA berhasil menyusup ke dalam kelompok para pemuda yang merencanakan penyerangan tersebut. Akibatnya Belanda memperkuat pertahanan pada sektor-sektor yang menjadi tujuan penyerbuan tersebut. Semua ini diketahui oleh M. Amin Effendi sebagai Pimpinan Umum, karena itulah penyerbuan dibatalkan kecuali sektor yang dipimpin oleh M. Amin Effendi yang dibantu oleh eks Heiho antara lain Sungkono, Suryadi dan Paat, serangan tetap diteruskan. Pertempuran terjadi pukul 20.15 dan berakhir pukul 23.00 dan berhasil merampas sepucuk Karabijn, sedangkan korban tidak ada.

Oleh karena NICA telah mengetahui tempat kedudukan BPRIK yang menjadikan Pasar Lama sebagai Markas Besar BPRIK dipindahkan Ke Pengambangan/Banua Anyar. Meskipun serangan pada tanggal 1 November 1945 itu secara umum gagal sesuai dengan rencana, tetapi dari segi membangkitkan semangat perjuangan dan kesatuan untuk mengusir penjajah menunjukkan hasil yang sukses, sebab peristiwa 1 November 1945 suatu bukti terbentuknya semangat anti penjajah dan ingin memperoleh kemerdekaan seperti uang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Kegagalan penyerbuan tanggal 1 ke 2 November 1945⁹⁰ itu disebabkan tidak adanya koordinasi komando dan juga dikaitkan dengan kedatangan kapal bantuan dari Jawa yang diberitakan ternyata tidak muncul. Situasi juga menentukan karena malam itu turun hujan dengan lebatnya dan hal ini menyebabkan komunikasi dengan sektor pasukan lainnya terganggu. Kegagalan penyerangan ini menyebabkan para pemuda menjadi lebih terangsang untuk melakukan serangan selanjutnya yang lebih besar, lebih terkoordinasi dan terencana.⁹¹

Belanda mengeluarkan suatu pernyataan bahwa apabila suatu penyerangan para pemuda sampai terjadi, mereka akan membunuh para Perwira Australia yang dengan sengaja atau telah membiarkan para prajuritnya membantu perjuangan rakyat.

Para perwira itu dianggap oleh Belanda telah memihak kepada gerakan Republik. Aksi penyerangan rakyat yang tergabung dalam BPRIK tersebut oleh pihak Belanda dijadikan alasan untuk melakukan penangkapan-penangkapan dan pembersihan terhadap semua rakyat yang dicurigai.

Pada tanggal 2 November 1945 orang-orang yang memakai pakaian hitam putih langsung ditangkap oleh Belanda tanpa diproses verbal, karena dianggap sebagai pimpinan dari gerakan pemberontakan rakyat. Hal ini beralasan karena pimpinan pemberontakan yang menyerbu tanggal 1 November itu berpakaian hitam putih, di antara yang tertangkap adalah Mahlan SB beserta kawan-kawannya.

⁸⁸ Sekarang kompleks Masjid Raya Sabilal Muhtadin.

⁸⁹ MBAD RI, *op.cit.*, hal. 68.

⁹⁰ Tentang serangan tanggal 1 ke 2 November 1945, telah dipaparkan sebelumnya dalam "Andil Pemuda Pelajar Kalimantan Dalam Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan".

⁹¹ Muhasin Fauzi, "Pemberontakan 9 November 1945", Skripsi Sarjana Pendidikan Sejarah FKIP Unlam, Banjarmasin, 1981, hal. 49.

Pada tanggal 4 November Belanda menyerang asrama eks Heiho di kota Banjarmasin. Serangan Belanda ini mendapat perlawanan meskipun hanya dengan beberapa pucuk senjata ringan saja. Akibatnya serangan tersebut Eks Heiho terpaksa meninggalkan kota bergabung ke Pengambangan tempat Markas Besar BPRIK yang baru.

Di Pengambangan telah terkumpul para pemuda pejuang yang tergabung dalam badan perjuangan Sabilillah beranggotakan 99 orang di bawah pimpinan Panglima Malil Tafair dan Wakilnya Utuh Buaya. Persenjataan mereka terdiri dari senjata tradisional seperti keris, parang, tombak dan sebagainya.

Kegagalan penyerbuan pada tanggal 1 November menimbulkan semangat yang tinggi untuk kembali mengadakan penyerangan terhadap NICA dengan lebih terkoordinasi dan terencana. Persiapan-persiapan penyerangan pada tanggal 9 November 1945 yang telah diprogramkan adalah sebagai berikut :

- a) Mengadakan hubungan dan pembicaraan dengan polisi NICA yang berkebangsaan Indonesia yang dianggap menaruh simpati terhadap perjuangan kemerdekaan. Pembicaraan itu dilakukan pada tanggal 6 November 1945 hari Selasa malam. Mereka menyatakan bersedia membantu dan memihak pada perjuangan bangsa Indonesia.
- b) Mengajak rakyat lainnya untuk mengadakan aksi yang kedua setelah kegagalan tanggal 1 November 1945. Ajakan itu di antaranya kepada orang-orang Cintapuri, karena orang-orang Cintapuri masih mempunyai hubungan keluarga dengan A. Ruslan tokoh BPRIK dan calon Residen pengganti Pangeran Musa Ardikesuma yang memihak kepada Belanda. Disamping itu memang dalam sejarah perang Banjar, orang-orang Cintapuri termasuk pejuang yang membenci bangsa penjajah Belanda.
- c) Memberi ilmu kekebalan terhadap peserta penyerangan, khususnya para pemuda Cintapuri. Setelah latihan *lampahan* kekebalan dianggap cukup, mereka diuji satu persatu dengan bacokan parang bungkul dan terbukti kebal.
- d) Pembicaraan menetapkan waktu penyerangan, yang dalam hal terdapat dua pendapat yang berbeda. Kelompok Hadhariyah M. menghendaki agar penyerangan dilakukan pada malam hari dengan alasan bahwa musuh mempunyai persenjataan yang lebih unggul dari pejuang, disamping mudah bersembunyi apalagi tentara Australia telah menyatakan bersedia memberikan senjata pada malam hari dengan tempat yang sudah ditentukan yaitu di suatu tempat (belakang bekas lokasi bangunan UNLAM, Jalan Lambung Mangkurat sekarang). Sedangkan kelompok Pak Halid menghendaki penyerangan dilakukan pada siang hari agar dapat membedakan antara orang-orang NICA dan tentara Australia, karena para penyerang ini yakin betul terhadap kekebalan mereka, sehingga mereka tidak gentar menghadapi musuh pada siang hari. Karena kelompok Pak Halid bersikeras pada pendiriannya, maka ditentukanlah penyerangan pada siang hari Jum'at tanggal 9 November 1945.

Titik serangan adalah tangsi polisi terus ke Markas Kompi Betet dan terakhir kompi X. Sifat serangan adalah frontal dengan siasat penyerangan yang diatur sebagai berikut :

Sayap kiri dipimpin oleh Mas Untung Sabri dengan kekuatan 110 orang. Sayap kanan dipimpin oleh Panglima Halid Tafsiar dengan kekuatan 90 orang, khusus anak buahnya sendiri dari Cintapuri yang kebal peluru. Pasukan tengah sebagai Pasukan inti dipimpin oleh Amin Effendi berkekuatan 300 orang. Demikianlah kesepakatan hasil rapat bertempat di Markas Besar BPRIK Pengambangan. Alasan lain mengapa serangan dilakukan pada siang hari adalah untuk menunjukkan pada pihak Belanda dan dunia luar bahwa para pejuang bukanlah perampok-perampok seperti yang telah diisukan oleh pihak Belanda tetapi memang para pejuang yang mempertahankan kemerdekaan bangsanya.

Tepat pada hari dan waktu yang telah ditentukan serangan dilakukan. Sayap tengah maju ke sasaran tanpa mendapat rintangan, tetapi pada pukul 16.00 tembakan pertama dari kantor polisi dikepung oleh pasukan inti. Namun Belanda kemudian mengerahkan panser-pansernya sambil memuntahkan peluru yang dahsyat. Oleh karena pertahanan polisi ini sangat kuat, maka sayap tengah berusaha merembes ke markas Belanda Kompi Betet dan terus menyerang Markas Kompi X yang berada di Kelayan yang dipertahankan oleh 150 orang.

Sayap kiri yang dipimpin oleh Mas Untung mula-mula ke pertahanan Belanda yang dipertahankan oleh 250 orang dan selanjutnya menuju Markas kompi X.

Sayap kanan yang dipimpin oleh Panglima Halid Tafsiar dengan mengambil jalan lain terus menuju Markas kompi X juga, sehingga ketiga pasukan ini bertemu di markas Kompi X. Pertempuran berlangsung sampai pukul 18.30 dan sebagian pasukan sudah mengundurkan diri. Setelah pertempuran reda ternyata terdapat korban-korban, antara lain M. Amin Effendi sendiri mendapat luka tembakan, pimpinan sayap kanan Halid Tafsiar tertangkap, disamping ada 9 orang yang gugur sebagai kesuma Bangsa. Mereka yang telah gugur peristiwa adalah Badran, Badrun, Utuh, Umur, Ta'in, Juma'in, Sepa, Dulah dan Pak Ma'rupi. Untuk memperingati keheroikan mereka ini kemudian dibangun tugu kecil dimana tercatum nama-nama mereka. Tugu peringatan tersebut terletak di jalan Jawa (sekarang Jalan D.I. Panjaitan) yaitu di dekat tangsi polisi di mana peristiwa ini terjadi. Sedangkan tanda peringatan lainnya terdapat di desa Pengambangan berupa Tugu 9 November.

Serangan balasan terhadap Markas BPRIK di Pengambangan kemudian dilakukan Belanda pada tanggal 12-13 November dengan kapal "Kelua", tetapi para pejuang sempat menyembunyikan diri. Selanjutnya Belanda melakukan penangkapan terhadap penduduk Pengambangan yang dicurigai ikut terlibat dalam peristiwa tersebut. Karena itu banyak pimpinan BPRIK yang melarikan diri ke daerah Hulu Sungai dan daerah lainnya. Sebagian lagi tertangkap, antara lain M. Amin Effendi sendiri.

Setelah peristiwa 9 November 1945 di Banjarmasin hampir tidak ditemukan lagi aksi penyerangan, baru kemudian pada tahun 1949 ketika Alam Roh melakukan aksinya di kota Banjarmasin.

3. Ekspedisi Pasukan dari Jawa ke Kalimantan

Akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh NICA Belanda ini, hasil perjuangan yang telah dicapai seperti pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia daerah Kalimantan dan Komite Nasional Indonesia (KNI) dibubarkan dengan kekuatan senjata sedangkan Bendera Merah Putih yang sedang berkibar di beberapa daerah diturunkan. Para pemimpin yang mencoba untuk meneruskan ditangkap dan kemudian dipenjarakan. Sedangkan bagi mereka yang berhasil lolos berusaha menyelamatkan diri pergi keluar kota, atau di antaranya yang lari ke Jawa dengan harapan untuk dapat melanjutkan perjuangan. Rakyat yang tinggal menjadi gelisah dan tertekan karena mereka telah kehilangan pemimpin-pemimpin yang diharapkan. Suasana masyarakat diliputi rasa kecewa dan tidak berdaya untuk berbuat sesuatu. Satu-satunya bantuan yang dilakukan adalah dari Jawa, karena disana terdapat putera-putera Kalimantan yang telah diorganisir oleh Gubernur Kalimantan Ir. Pangeran Mohammad Noor.

Ir. Pangeran Mohammad Noor adalah putera Kalimantan yang cukup dikenal oleh kaum pergerakan baik di Jawa maupun di Kalimantan. Ia adalah seorang sarjana tamatan "*Technische Hogeschool Bandung*" (sekarang Institut Teknologi Bandung). Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Ir. Pangeran Mohammad Noor diangkat sebagai sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dan Pekerja Umum sampai tahun 1945.

Dalam rangka persiapan kemerdekaan, Beliau diangkat sebagai anggota “*Dokuritsu Zunbi Cosakai*” (Badan Persiapan Kemerdekaan) dan ikut menyusun rencana Undang-undang Dasar dengan Mukadimahnya. Dalam kedudukan sebagai Badan Persiapan itu bersama Bung Hatta dan Panglima Tertinggi Angkatan Laut Jepang untuk daerah Asia Tenggara Admiral Shibata pergi ke Banjarmasin dalam rangka persiapan kemerdekaan Republik Indonesia di daerah ini. Kedatangan rombongan ini di Banjarmasin mendapat sukses yang terbukti bahwa pemimpin dan rakyat di daerah ini akan berdiri sepenuhnya di belakang Negara Republik Indonesia yang akan dibentuk.⁹²

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Ir Pangeran Mohammad Noor diangkat sebagai Wakil Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum, Anggota Dewan Pertimbangan Agung mewakili Kalimantan dan sebagai Gubernur Kalimantan pertama yang berkedudukan di Bandung.

Pada akhir tahun 1945, dia bebaskan dari jabatan sebagai Wakil Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum karena kementerian itu dihapuskan. Sejak itu ia mulai memusatkan perhatian kepada tugas sebagai Gubernur Kalimantan. Mengingat situasi keamanan yang belum mengizinkan, Ir. Pangeran Mohammad Noor belum dapat kembali menempati posnya di Kalimantan.

Dengan telah diketahuinya pengangkatan Gubernur Kalimantan yang berdomisili di daerah ini, maka sudah pada tempatnya apabila Rakyat Kalimantan mengharapkan bantuan gubernur dalam rangka perjuangan membebaskan daerah Kalimantan dari penjajah Belanda dan mendirikan Pemerintah Republik Indonesia di daerah ini. Apa yang diharapkan oleh rakyat dimaksud juga merupakan keinginan Gubernur Ir. Pangeran Mohammad Noor dan rakyat Kalimantan yang ada di Jawa.

Untuk dapat membantu tugas-tugasnya, pada bulan September 1945 dibentuk suatu badan yang diberi nama *Badan Pembantu Oesaha Gubernur* (BPOG) yang berkedudukan di Surabaya, dengan tujuan dapat mengkoordinasikan pejuang-pejuang Kalimantan yang berpusat di kota Surabaya. Salah satu cara untuk membantu perjuangan di Kalimantan Selatan adalah dengan cara mengirimkan Ekspedisi lintas Laut ke Kalimantan dengan tugas pokok ialah membantu perjuangan rakyat Kalimantan.

a. Usaha-Usaha Gubernur dan Pejuang-Pejuang Kalimantan Di Jawa

Sejak masa awal Proklamasi Kemerdekaan, putera-putera Kalimantan yang bertempat tinggal di Jawa terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa aktif dalam gerakan-gerakan yang bersifat mendukung Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia seperti gerakan perebutan kekuasaan dari tangan tentara Jepang, bertempur menghadapi tentara Jepang, bertempur menghadapi tentara sekutu dan NICA serta kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan menunjang perjuangan rakyat di Kalimantan. Putera-putera Kalimantan itu tergabung dalam organisasi Kelaskaran antara lain Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) di Surabaya dan Magelang, Ikatan Pemuda Kalimantan (IPK) di Solo. Mereka mendapat pengarahan serta bimbingan dari Gubernur Kalimantan Ir. Pangeran Mohammad Noor.⁹³

Sejak diangkat menjadi Gubernur, ternyata belum dapat menempati posnya di Kalimantan, karena situasi dan keamanan di Kalimantan belum mengizinkan. Gubernur terpaksa tinggal di Jawa, dalam hal ini menempati markas di Jalan Paku Alam II di depan rumah Panglima Perang Jenderal Sudirman di Yogyakarta.

Untuk memperlancar tugas-tugasnya, Gubernur membentuk kantor-kantor perwakilan di tiga tempat masing-masing di Tegal, Pekalongan dan Probolinggo. Dari Markas inilah Gubernur

⁹² Zamzulis Ismail, *Ekspedisi – Ekspedisi Lintas Laut ALRI ke Kalimantan*, Dinas Sejarah TNI AL, Jakarta, 1980, hal. 15 – 17.

⁹³ MBAD RI, *op.cit.*, hal. 25.

menggariskan kebijaksanaannya memimpin rakyat Kalimantan. Pada tanggal 2 September 1945 dibentuk Badan Pembantu Oesaha Gubernur (BPOG) berkantor di Jalan Enbong Tanjung 17 Surabaya dengan G. Obos sebagai ketua dengan dilengkapi Wakil Ketua, Sekretaris, Tata Usaha dan Pembantu. Tugas dari BPOG adalah mempersatukan seluruh putera Kalimantan yang berada di Jawa untuk membantu perjuangan rakyat di Kalimantan, membentuk cabang BPOG di daerah-daerah dan membantu Gubernur Kalimantan Ir. Pangeran Mohammad Noor.

Salah satu dari kegiatan adalah diadakannya rapat oleh para pemuda pejuang Kalimantan di Kantor BPOG di Surabaya pada tanggal 10 Oktober 1945. Rapat dihadiri oleh tokoh-tokoh pejuang Kalimantan dari BPOG Jakarta yang dipimpin oleh Gusti Johan, Firmansyah, BPOG Bandung di bawah pimpinan M. Rasyid, guru Barmawi dan dan lainnya.

BPOG Surabaya bermaksud mengadakan penilaian situasi terakhir di daratan Kalimantan agar dapat dijadikan sebagai bahan penganalisaan bagi penentuan strategi perjuangan Kalimantan dan bagi pengiriman pasukan lintas laut ke Kalimantan. Rapat tersebut diwarnai dengan emosi yang meluap-luap tanpa perhitungan dengan dasar informasi yang datang dari Kalimantan. Kesimpulan yang diambil adalah bahwa sesegera dilakukan ekspedisi lintas laut ke Kalimantan untuk membantu perjuangan rakyat Kalimantan.

Keputusan ini tidak memuaskan Hassan Basry dan dia tidak bersedia bergabung dengan pasukan A. Murad dan bersedia akan berangkat sendiri secara sukarela untuk mengadakan penyelidikan dan peninjauan ke Kalimantan. Keputusan ini disampaikan Hassan Basry kepada BPOG dan BKR Surabaya. Ternyata BPOG Surabaya yang dipimpin G. Obos mempunyai pendapat yang sama dengan Hassan Basry. Sikap Hassan Basry didukung oleh Gusti Mayur dan Abdul Gani Zazir dan mereka memberi bantuan seperlunya, begitu pula BKR Surabaya. Dengan tugas dari BPOG dan BKR Surabaya, Hassan Basry meninggalkan Tanjung Perak Surabaya dengan menumpang kapal layar "Bintang Tolen" pada tanggal 12 Oktober 1945 dan tiba di Banjarmasin pada tanggal 30 Oktober 1945, mendahului ekspedisi laut pimpinan A. Murad dan Firmansyah.⁹⁴

Dalam usaha membantu perjuangan rakyat di daratan Kalimantan, salah satu kebijaksanaan yang diambil Gubernur Kalimantan adalah mengirim pejuang-pejuang Kalimantan yang ada di Jawa ke daratan Kalimantan. Kebijaksanaan tersebut ternyata mendapat perhatian yang positif dari kalangan pemimpin Pemerintah Pusat, tokoh pejuang-pejuang dan putera-putera daerah Kalimantan yang bertempat tinggal di Jawa.

Dari pemimpin-pemimpin Pemerintah Republik Indonesia dan tokoh-tokoh pejuang, Gubernur mendapat bantuan sejumlah uang, senjata dan fasilitas lainnya. Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden sangat mendukung rencana dari Gubernur tersebut, begitu pula Wakil Menteri Pertahanan RI Sugiyono. Tan Malaka membantu senjata, Gubernur Jawa Timur memberikan fasilitas perkantoran, pengusaha dan para pedagang yang ada di Jawa memberikan bantuan keuangan.

Bantuan yang sangat besar diperoleh dari Bung Hatta, berupa rekomendasi kepada Bank Negara Indonesia, untuk memberikan kredit kepada Gubernur Kalimantan sebesar Satu Juta Rupiah. Uang tersebut dijadikan modal besar untuk membentuk Fonds Perjuangan. Hampir seluruh perjuangan yang diprakarsai oleh Gubernur Kalimantan dapat dibiayai dengan dana tersebut, antara lain pengiriman rombongan ekspedisi di daerah Kalimantan, membentuk Pasukan MN 1001 di Kalimantan, pembentukan ALRI Divisi IV baik di Jawa maupun di Kalimantan.

Bantuan ataupun dukungan yang diperoleh Gubernur untuk dapat merealisasikan maksud pengiriman pejuang-pejuang ke Kalimantan ternyata bukan hanya terbatas pada materi dan pada

⁹⁴ Hassan Basry, *op.cit.*, hal. 52.

fasilitas saja bahkan lebih dari itu. Beberapa pihak antara lain Penyidik Kementerian Pertahanan c.q. Militer Khusus (OPMC), TKR Laut dan ALRI Divisi IV Kalimantan dan Badan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI) ikut pula ambil bagian mengirimkan anggotanya-anggotanya untuk membantu perjuangan rakyat Kalimantan.

Dengan adanya keinginan dan keinsafan dari pejuang-pejuang Kalimantan dan dari dukungan Ir. Pangeran Mohammad Noor sendiri selaku Gubernur Kalimantan sarat dukungan dari berbagai pihak, maka lahirlah ekspedisi-ekspedisi ke Kalimantan. Ekspedisi-ekspedisi itu antara lain dilakukan kementerian Pertahanan c.q. Militer Khusus, unsur-unsur Angkatan Laut (TKR Laut Tegal dan ALRI Divisi IV Kalimantan), Organisasi perjuangan BPRI Pemerintah Propinsi Kalimantan c.q. Ir. Pangeran Mohammad Noor dan organisasi-organisasi perjuangan rakyat Kalimantan di Jawa (PRI Kalimantan, BPOG dan IPK).

Ekspedisi-ekspedisi itu terdiri dari :

4. Ekspedisi yang dikoordinasikan oleh Gubernur

5. Ekspedisi yang dikoordinasikan oleh Markas Besar ALRI Divisi IV Kalimantan.⁹⁵

Para Pemuda Kalimantan yang berada di Jawa telah banyak berperan bersama-sama pejuang lainnya bertempur menghadapi Belanda. Pengalaman-pengalaman seperti inilah yang menimbulkan semangat juang untuk bertugas menjalankan misi sebagai anggota ekspedisi laut Kalimantan.

Dalam insiden yang terjadi di Surabaya, para pemuda yang bergabung dalam PRI Kalimantan ikut aktif di dalam melucuti senjata Jepang dan pertempuran-pertempuran melawan sekutu/Belanda. Tiga orang anggotanya telah gugur di Surabaya. Setelah pertempuran beberapa hari di Surabaya maka atas perintah Komando Bung Tomo, berdasarkan siasat, telah memerintahkan semua kesatuan pejuang dan BKR meninggalkan kota Surabaya pindah ke Darmo Kali. Tempat inipun terpaksa ditinggalkan dan pindah ke Waru lewat Wonocolo. Tempat inipun terpaksa ditinggalkan terus ke Peterongan (Jombang) dan pengalaman perang seperti ini besar mafaatnya untuk melaksanakan cita-cita mereka.

Pada Kongres Pemuda Seluruh Indonesia yang berlangsung di Yogyakarta bulan November 1945 yang melahirkan organisasi Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), PRI Kalimantan menjelma menjadi Pesindo Kalimantan dengan Abdul Murad yang ditunjuk sebagai komisarisnya. Pesindo Kalimantan ini beranggotakan 120 orang dengan kepala Stafnya dipercayakan pada Husin Hamzah. Dalam salah satu pertemuan diputuskan untuk mengadakan perundingan dengan Gubernur untuk mengirim ekspedisi-ekspedisi ke Kalimantan. Husin Hamzah berangkat ke Yogyakarta untuk menyampaikan keputusan sekaligus berunding dengan Gubernur Kalimantan dan Gubernur menyetujui rencana tersebut, disamping itu Jenderal Oerip Sumohardjo bersedia mempersiapkan ekspedisi.⁹⁶

Pemakaian istilah ALRI mulai dipergunakan pada bulan Januari 1946 dan pada konferensi kerja TRI Laut di Lawang tanggal 17 Juli 1946, maka nama ALRI tersebut diresmikan pemakaiannya, sejak itu TRI Laut menggunakan nama ALRI. Dalam rangka mengembangkan ALRI selain membentuk sistem pangkalan dan Divisi-divisi ALRI, beberapa orang tokoh pejuang Kalimantan baik yang ada maupun di Kalimantan di bawah pimpinan Gubernur Kalimantan datang menghadap staf inti pimpinan markas besar ALRI di Yogyakarta untuk membicarakan kemungkinan dapat dibentuknya suatu kesatuan ALRI untuk daerah Kalimantan.

Lahirnya gagasan dari tokoh-tokoh pejuang Kalimantan tersebut adalah sebagai akibat dari kegagalan-kegagalan yang dialami oleh pejuang-pejuang yang dikirim di Kalimantan dalam

⁹⁵ Zamzulis Ismail, *op.cit.*, hal. 21

menjalankan tugasnya. Kegagalan itu bukan hanya disebabkan tidak berimbangnya kekuatan dengan kekuatan Belanda, tetapi sebab yang utama sekali adalah tidak adanya kesatuan komando, baik di antara pejuang-pejuang yang melaksanakan ekspedisi maupun di kalangan organisasi pejuang bersenjata yang ada Kalimantan. Untuk mengatasi kondisi perjuangan yang tidak menguntungkan itu timbullah inisiatif untuk menyatukan badan perjuangan itu ke dalam suatu wadah organisasi perjuangan sehingga perjuangan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan di Kalimantan dapat dilaksanakan dengan baik.⁹⁷

Dalam suatu perundingan yang diadakan antara staf Pimpinan Markas Besar ALRI Yogyakarta dengan tokoh-tokoh pejuang Kalimantan diperoleh suatu keputusan bahwa perlu dibentuk suatu Divisi ALRI untuk daerah Kalimantan. Untuk keperluan pembentukan ini Gubernur Ir. Pangeran Mohammad Noor mempersiapkan pembentukan Divisi ALRI tersebut dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari berbagai organisasi yang ada di Jawa, tim itu terdiri dari :

Ketua	: H. Gusti Muis (Pimpinan Ikatan Pejuang Kalimantan)
Wakil	: Mustafa Ideham (Ketua Laskar Kalimantan)
Anggota	: - A. Rizekin (Pesindo Kalimantan)
	- M. Hasyim Amin (Dewan Pertahanan Kalimantan)
	- Abdul Hamid Husaini (Kesatuan Laskar)
	- Hunani Arief (Tentara Pelajar Kalimantan)
	- Ariansyah (Wakil Pejuang Republik Indonesia Kalimantan).

Tim bertugas dalam waktu sesegera untuk membentuk sebuah formatur yang akan menyusun staf pimpinan ALRI Divisi IV Kalimantan.⁹⁸

Tim berhasil membentuk formatur yang terdiri dari Gubernur Kalimantan Ir. Pangeran Mohammad Noor sebagai ketua, dilengkapi dengan anggota lainnya yaitu Letkol Djakarta Madun, Mayor Firmansyah, Hasyim Amin, Abdul Murad dan A. Rizekin. Dari hasil formatur tersebut dibentuk formasi Staf Kerja ALRI Divisi IV Mojokerto di Jawa Timur tahun 1945-1947 yang terdiri dari :

Panglima ALRI Divisi IV	: Letkol (L) Zakaria Madun
Wakil/Kepala Staf Divisi IV	: Mayor (L) Firmansyah
Kepala Staf / Wakil Panglima Divisi IV	: Letda (L) Ahmad Zaidi
Kepala Ketentaraan / siasat	: Kapten (L) Anang Peter Pasha
Wakil Kepala ketentaraan / komda.	
Pertemp. BOD. I Divisi	: Kapten (L) Danussaputera
Staf Intel Ketentaraan	: Plt.(L) M. Saleh Abdis
	: Serma (L) Riduansyah
Kepala Sekretaris Divisi	: Letda (L) Sahrul
Kepala Tata Usaha / administrasi Divisi	: Mayor (L) G. Obus
Wakil Kepala TU	: Kapten (L) A. A. Ariansyah
Staf TU	: Letda (L) M. Sirad
Kepala Keuangan Divisi	: Letnan I (L) A. Syarwani
Wakil Kepala Keuangan	: Letnan I (L) Gusti Abdullah
Kepala urusan usaha /	
Perlengkapan Divisi	: Letnan I (L) M. Djuhri
Wakil UU	: Letnan I (L) A. Rizekin

⁹⁶ MBAD RI, *op.cit.*, hal. 27.

⁹⁷ Zamzulis Ismail, *op.cit.*, hal. 28 – 29.

⁹⁸ Zamzulis Ismail, *ibid.*, hal. 29 – 30.

Kepala Organisasi	:
Kapten (L) Hutapea	
Kepala P.H.B.	: Kapten (L) A. Abdurrahman Umri
Staf Operator	: Letnan I (L) Burhan Danil
Staf Pembantu	: Letnan I (L) Adnan Ermas
Kepala Ur. Intal Umum Divisi	: Letda (L) Nazaruddin
Komandan Markas Divisi	: Letnan I (L) Ahmad Zaidi
Wakil Kepala Operasional	: Letnan I (L) Anwar
Komandan Armada Divisi	: Kapten (L) M. Zamzam
Komandan .Det. Armada	: Letnan I (L) M. Nawawi Nazar
Ljiasan Off divisi	: Kapten (L) M. Bachtiar
	: Kapten (L) Anwar Bayk
Komd. Resimen II Pekalongan	: Kapten (L) Adriani H.
Komd. Resimen I Mojokerto	: Mayor (L) M. Djuhari
Kepala Perw/Pers. Resimen Riau Tembilahan	: Letnan I (L) M. Arsyad A.
Komd. Batalyon Probolinggo	: Kapten (L) Areros
Komd. Batalyon Tegal	: Kapten (L) R. Soebandi
Komd. Batalyon Cirebon	: Kapten (L) M. Siddik
Komd. Batalyon Surakarta	: Kapten (L) M. Barmawi Taib
Komd. Batalyon Pekalongan	: Kapten (L) H. Busra Ahmadin
Komd. Combat di Kalimantan Selatan	: Plt. II (L) Asli Zuchri
Staf	: Plt. (L) A. Muti
	: Sersan (L) M. Hilmy Zuhri
Komd. Combat di Kalimantan Timur	: Letnan I (L) A. Wahel
Anggota Staf Penerangan	: Letnan I (L) M. Soelaiman Atjat.
Hub. Mas. Kalimantan di Surabaya	: Kapten (L) A. Murad
	: Letnan I (L) Mustafa Ideham
	: Serma (L) M. Sanusi ⁹⁹

Sebagian dari Pasukan ALRI Divisi IV Kalimantan adalah anggota-anggota mantan Ekspedisi rombongan Husin Hamzah dan Firmansyah yang telah kembali ke Jawa ditambah dengan anggota dari berbagai organisasi perjuangan/kelaskaran Kalimantan yang ada di Jawa di antaranya Pesindo Divisi I, Serikat Pelayaran Indonesia (SPI) dan anggota-anggota BPRIK (PRI Kalimantan). Setelah organisasi dan personilnya tersusun, maka pada tanggal 4 April 1946 bertempat di Palace Hotel Malang, Laksamana Muda M. Nazir meresmikan berdirinya organisasi ALRI Divisi IV Kalimantan dan sekaligus melantik anggota staf pimpinannya. Markas Besar ALRI Divisi IV berkedudukan di Mojokerto.

Rencana dari markas ALRI Divisi IV di Mojokerto membagi daerah Kalimantan menjadi atas tiga daerah yaitu ALRI Divisi IV "A" untuk pertahanan Kalimantan Selatan. ALRI Divisi "B" untuk Kalimantan Barat dan ALRI Divisi "C" untuk Kalimantan Timur. Untuk merealisasikan rencana tersebut, disusunlah ekspedisi ke Kalimantan.

b. Ekspedisi-Ekspedisi yang dikoordinasikan oleh Gubernur Kalimantan

⁹⁹ Pemda Tk. I Kalsel, *op.cit.*, hal. 136. Lihat pula Danussaputera, "Kalimantan Terbakar Oleh Semburan Bara Api Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan (Ekspedisi Terakhir)," Banjarbaru, 1985, hal. 27.

Dalam kedudukannya sebagai Gubernur Ir.Pangeran Muhammad Noor Berusaha sekuat tenaga untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Kalimantan. Untuk menempati posnya di Kalimantan saat itu belum memungkinkan sebab situasi belum mengijinkan. Salah satu usaha yang tepat adalah pengiriman ekspedisi lintas laut untuk membantu perjuangan di daerah Kalimantan. Usaha ini ternyata mendapat sambutan yang hangat dari pejuang-pejuang Kalimantan yang berada di Jawa. Selain mendapat bantuan dari segala pihak termasuk restu dari Presiden dan Wakil Presiden. Agar dapat merealisasikan rencana tersebut, Gubernur melakukan tahap demi tahap agar rencana yang diprogramkan itu berhasil dengan baik. Tahap-tahap itu adalah :

Tahap I : mengirimkan pejuang-pejuang yang akan bertugas sebagai pasukan pelopor.

Tahap II : Melaksanakan infiltrasi Militer.

Tahap III : Melaksanakan infiltrasi politik ¹⁰⁰

Sebagai pelaksanaan dari program tersebut Gubernur telah berhasil mengirim beberapa kali ekspedisi di antaranya ialah :

1) Ekspedisi rombongan TKR Laut Tegal

Ekspedisi ini terdiri dari pejuang Kalimantan Barat sebagai bagian dari Perencanaan Tahap I yang akan bertugas sebagai pelopor agar pasukan-pasukan berikutnya dapat melaksanakan perembesan dengan baik . Ekspedisi ini merupakan gabungan anggota-anggota TKR Laut dan Pemuda Pejuang Kalimantan Barat yang merupakan ekspedisi resmi yang dikirim oleh Gubernur Ir. Pangeran Muhammad Noor. Gubernur dan Pimpinan BKR Laut Pusat M. Pardi mengirim instruksi melalui telegram kepada TKR Laut Tegal untuk menyiapkan anggotanya, antara lain adalah : Sapingi, Tamat, Warsana, Jatidjan, Mulyono dan Abdul Latif dengan dua buah kapal layar satu di antaranya diberi nama Srikaton. Dari pihak Gubernur di persiapkan satu rombongan yang terdiri dari 43 orang di bawah pimpinan Rahardi Usman seorang Mahasiswa kedokteran. Jumlah seluruh ekspedisi ini adalah 53 orang terdiri dari 6 orang anggota TKR Laut Tegal dan 43 orang pejuang pemuda Kalimantan Barat ditambah dengan 4 orang anak buah kapal.

Tugas ekspedisi adalah sebagai berikut :

a. Sebagai pasukan yang akan memelopori perjuangan rakyat di Kalimantan Barat khususnya dan di Kalimantan umumnya.

b. Mengenal situasi tentang keadaan perjuangan rakyat di daerah-daerah Kalimantan.

c. Menentukan daerah-daerah mana yang baik untuk mendaratkan pasukan ekspedisi berikutnya.¹⁰¹

Pada tanggal 23 November 1945 rombongan ekspedisi meninggalkan pelabuhan Tegal menuju Kalimantan Barat. Kapal Srikaton yang menggunakan motor berlayar didepan dan diikuti kapal layar. Kapal Srikaton membawa 27 orang dan kapal layar 26 orang. Pada hari ketiga cuaca sangat buruk dengan gelombang laut yang sangat besar sehingga satu di antaranya kapal itu terbakar, Mulyono seorang TKR dinyatakan hilang akibat peristiwa tersebut.

Tanggal 30 November 1945 rombongan itu tiba di Cebek, Selat Karimata. Rombongan dibagi dua karena menurut informasi bahwa NICA telah menyusun kekuatan di Kalimantan Barat. Rombongan pertama menuju Pontianak kalau tidak memungkinkan harus menuju Sintang dan Putusibau, rombongan kedua menuju Kandawangan, Ketapang dipimpin oleh Rahardi Usman.

¹⁰⁰ Zamzulis Ismail, *op.cit.*, hal. 23.

¹⁰¹ Zamzulis Ismail, *op.cit.* hal. 22 – 25; MBAD RI, *op.cit.*, hal. 30.

Rombongan pertama tidak berhasil menuju Pontianak karena cuaca buruk, sedangkan rombongan kedua berhasil menuju Kandawangan. Kedatangan rombongan sudah ditunggu oleh NICA, sehingga terjadilah pertempuran. Karena kekuatan tidak seimbang, maka rombongan itu pecah menjadi 2, satu di antaranya menuju dan terdampar di pulau Karimata, sedangkan yang lainnya menuju pedalaman. Dalam pertempuran di Kandawangan ini Rahadi Usman pimpinan dan Tamat anggota TKR Tegal gugur. Rombongan yang terdampar di pulau Karimata ini pun nantinya berjumpa lagi dengan patroli laut Belanda, sehingga rombongan ini tercerai berai.

Ekspedisi juga diikuti oleh dua orang pemuda Serawak yang pada umumnya ingin pulang ke Serawak melewati Kalimantan Barat. Kedua orang pemuda Serawak ini ialah Ahmad Zaidi (sekarang menjabat sebagai Tuan yang Terutama Yang Dipertuan Negeri Serawak) dan Gazali Yusuf, mereka terlibat dalam pertempuran yang dipimpin oleh Rahadi Usman dan akhirnya bertekad bersama-sama pemuda Indonesia melawan Belanda.

Sebagian dari sisa rombongan ini menuju Kotawaringin di Kalimantan Tengah. Atas bantuan Sultan Kotawaringin, Pangeran Mohammad Kusuma Amin Alamsyah XII, kegiatan ekspedisi ini berjalan dengan lancar. Kepala suku Dayak Panglima Puput juga memberi bantuan yang besar artinya bagi rombongan ekspedisi.

Pada tanggal 17 Januari 1946, Kotawaringin diduduki tentara NICA setelah terjadi pertempuran dengan para pejuang yang mempertahankan kota itu. Akibatnya pertempuran itu rombongan tersebar untuk menyelamatkan diri, sebagian di antaranya berhasil pulang ke Jawa dengan perahu sebagian lagi menuju pedalaman Kalimantan..

Selama tiga bulan ekspedisi gabungan TKR laut ini menempuh perjalanan di sungai dan daratan Kalimantan dengan perbekalan yang sangat minim, namun mereka menjalankan tugas yang mulia, mengobarkan semangat perjuangan untuk mengusir penjajahan Belanda.¹⁰²

2) Ekpedisi Rombongan Husin Hamzah dan Firmansyah

Ekspedisi ini sebetulnya telah dipersiapkan pada bulan Oktober 1945 yang dikoordinasikan oleh Gubernur melalui BPOG dan PRI Kalimantan, terdiri dari 120 orang pemuda bersenjata di bawah pimpinan A.Murad, Firmansyah serta Bachtiar. Rombongan akan berangkat dengan kapal "Merdeka" disertai rombongan Palang Merah dipimpin Abdurrahman tetapi kemudian karena terlibat dalam pertempuran Surabaya, kapal "Merdeka" kena tembakan dan tidak mungkin lagi dipergunakan untuk berlayar.¹⁰³

Awal Januari 1946, anggota-anggota ekspedisi dihimpun kembali dan pada tanggal 10 Januari 1946 diberangkatkan ke Pekalongan. Seluruh ekspedisi berjumlah 55 orang di bawah pimpinan Husin Hamzah dan wakilnya Firmansyah. Persenjataan yang mereka bawa terdiri dari satu pucuk senjata berat, 2 senapan mesin, 2 senapan mesin ringan, 42 senapan, 1 mortir, 15 pistol colt vikers, 4 peti granat Jepang @ 100 buah, 4 peti bom asap jepang @ 50 buah, 4 peti peluru karabijn, peluru pistol colt vikers dan peluru mortir. Peralatan dan perbekalan yang disediakan Gubernur Kalimantan terdiri dari 5 buah perahu layar yang masing-masing berukuran lebih dari 10 ton lengkap dengan juru mudi dan pembantu-pembantunya, 4 ton gula pasir, 2 ton tembakau, 4 peti rokok Kooa dan Muzuho @ 100 pak besar, beberapa ribu rupiah uang Jepang, 55 stel pakaian militer bekas Jepang dan beberapa mandat untuk pengangkatan kepala daerah di Kalimantan.¹⁰⁴

Pada tanggal 4 Februari 1946 rombongan ekspedisi menuju Tegal sebagai tempat pemberangkatan, dan sekitar pukul 19.00 rombongan meninggalkan pelabuhan Tegal menuju pulau Kalimantan, menurut rencana pendaratan dilakukan di daerah pesisir Sampit, tetapi rencana

¹⁰² MBAD RI, *op.cit.*, hal. 32.

¹⁰³ Hassan Basry, 1961, *op.cit.*, hal. 48.

tersebut gagal karena dalam perjalanan mendapat serangan angin dan gelombang besar sehingga sebuah perahu layar tenggelam. Semua rombongan dari perahu yang tenggelam tersebut dapat diselamatkan, begitu pula segala perlengkapan yang dibawa. Pelayaran memakan waktu selama dua hari dua malam, dan terpaksa mendarat di Kuala Jelai, perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan saat itu (sekarang Kalimantan Tengah), sebuah mendarat ke arah barat lagi yaitu di dekat Kuala Sapu.

Ekspedisi ini berasal dari pasukan Pesindo, pasukan kebanggaan Gubernur Kalimantan di bawah pimpinan Abdul Murad yang menempati pelabuhan Tegal, Pekalongan dan Cirebon. Husin Hamzah yang memimpin ekspedisi ini adalah pejuang kelahiran Pekapuran Raya Banjarmasin, seorang pejuang berdarah campuran Arab. Letnan Muda Kadet Militer Akademi Gusti Abdurrahman yang nanti terkenal dengan nama Gusti Aman ikut dalam rombongan ini.¹⁰⁴

Satu pasukan tanpa sepengetahuan pimpinan menyerang Kotawaringin karena menurut informasi kekuatan NICA sangat lemah, tetapi NICA dapat mempertahankan kota. Setelah pertempuran selama dua jam, pasukan terpaksa mundur ke Selatan dengan korban rombongan ekspedisi Mustafa tertawan dan Herman gugur.

Persiapan selanjutnya adalah penyerangan ke Pangkalan Bun. Tetapi pasukan terlebih dahulu bergerak ke Teluk Bogam, suatu tempat yang strategis. Setelah menyiapkan markas di Teluk Bogam, muncullah sebuah motorboat NICA dengan mendaratkan pasukannya. Pertempuran terjadi dan motorboat pecah, 8 tentara NICA di bawah pimpinan Luitennant De Vries, semuanya mati. Dalam pertempuran singkat ini para pejuang berhasil mengambil alih 4 tomygun, 3 senapan, 1 buah pistol dan 20 granat Inggris.

Dua hari kemudian datang lagi motorboat NICA, pertempuran terjadi selama 20 menit, akan tetapi motorboat NICA berhasil dipukul mundur dan akhirnya tenggelam akibat banyak terkena tembakan.

Mengingat Markas Teluk Bogam telah diketahui oleh NICA, maka diputuskan untuk pindah ke sebelah barat ke Sungai Rangsang. Akan tetapi tempat yang baru itu kemudian juga diketahui dan diserang NICA dengan kekuatan dua regu dari Pangkalan Bun.

Anggota ekspedisi rombongan Firmansyah menangkap seorang pemuda yang dicurigai yang kemudian diketahui adalah pemuda Serawak bernama Ahmad Zaidi di sebuah kampung di Sungai Jelai. Setelah dibebaskan Ahmad Zaidi menjadi anggota pasukan Firmansyah dengan tugas bidang intelijen. Ahmad Zaidi terlibat dalam pertempuran di Sungai Rangsang.

Pertempuran Sungai Rangsang berlangsung selama 6 jam. Dalam pertempuran tersebut pimpinan ekspedisi yaitu Husin Hamzah gugur dan dimakamkan di Sungai Rangsang. Sungai Rangsang kemudian ditinggalkan lagi dan berpindah ke Sungai Tabuk kemudian ke Sukamara.

Mengingat persediaan perlengkapan banyak berkurang maka mereka memutuskan kembali ke Jawa. Pada bulan April 1946 dengan 3 buah perahu layar, rombongan ekspedisi kembali ke Jawa, setelah menjalankan tugas dan mengalami banyak pertempuran selama 80 hari.¹⁰⁵

Ketika ekspedisi rombongan Firmansyah beroperasi di Kalimantan dari Kelaskaran Hisbullah/Sabilillah dari IPK yang dipimpin oleh Letnan I (L) Kadet Militer Mustafa Ideham dari Probolinggo, dan rombongan Haji Abdul Hamid dari Pekalongan. Ekspedisi rombongan Mustafa Ideham diberangkatkan dari pelabuhan Tuban dengan menggunakan perahu layar. Tujuan ekspedisi ke daerah Kalimantan Selatan dengan tugas pokok adalah menggerakkan perjuangan rakyat menghadapi NICA dan membentuk organisasi perjuang bersenjata. Tujuan pokok

¹⁰⁴ MBAD RI, *op.cit.*, hal. 32.

¹⁰⁵ G. M. Yaman, "Route Gerilya ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan", Banjarmasin, 1979, hal 31 – 33.

¹⁰⁶ MBAD RI, *op.cit.*, hal. 34; G.M. Yaman, *op.cit.*, hal. 35.

pendaratan adalah Batakan. Jumlah kekuatan adalah sebanyak 36 orang.¹⁰⁷ Ekspedisi ini dipelopori oleh Ikatan Pejuang Kalimantan (IPK) yang kemudian dikenal dengan Sabilillah Kalimantan dipimpin oleh Gusti H. Abdul Muis.¹⁰⁸

Pasukan dibagi atas tiga, pasukan tempur dipimpin oleh Abdullah, pasukan cadangan dipimpin oleh Abdul Kadir Jailani, dan satu Pasukan pemimpin ekspedisi yang dipimpin oleh seorang Letnan I Kadet Akademi Militer.

Mustafa Ideham sesungguhnya bertugas sebagai penyelidik dan penghubung. Rute yang ditempuhnya adalah Kalianget untuk membawa garam. Di Kalianget mereka membawa sejumlah garam untuk dijual kepada nelayan di Kalimantan, di samping itu membawa 25 ton beras. Senjata disimpan di bawah kapal dan disembunyikan agar tidak mudah terlihat, terdiri dari granat 20 peti, senjata LE Jepang 17 pucuk.

Pada akhir Februari mereka meninggalkan Kalianget menuju Kalimantan. Ketika berada di laut lepas, datanglah hujan lebat diiringi gelombang besar. Semua layar diturunkan dan meskipun mereka berusaha dengan sekuat tenaga sesuai dengan pengalaman mereka sebagai pelaut, ternyata kemudian tidak dapat berfungsi sebagaimana biasa. Mereka kehilangan arah dan suasana seperti ini mereka pasrah kepada Tuhan. Terpisah dengan yang lain, perahu ketiga dapat disatukan kembali di Pulau Kangean di sebelah timur pulau Madura, sedangkan perahu pertama hilang tidak diketahui lagi. Kerusakan yang ada diperbaiki sambil menunggu angin baik untuk meneruskan perjalanan. Selama di pulau Kangean mereka mendapat sambutan yang baik dari warga setempat dan memberikan bantuan untuk meneruskan perjalanan. Hampir 3 bulan mereka berada di pulau Kangean dan selama itu pula mendapat bantuan rakyat setempat, karena mereka mengerti arti perjuangan yang dilakukan ekspedisi.¹⁰⁹

Pada tanggal 4 April 1946 ekspedisi ini meneruskan pelayaran menuju Kalimantan. Selama dua hari berlayar, akhirnya tiba di pantai Batakan yaitu pada tanggal 6 April 1946 jam 20.00 malam. Batakan merupakan desa nelayan sekitar 120 Km di arah Tenggara Banjarmasin.

Dengan siasat membawa dagangan dari Jawa berupa 20 ton gula pasir, 20 ton beras, dan sejumlah besar garam, mereka menemui penduduk dan pembakal Kepala Desa Batakan. Pertemuan ini sangat menggembirakan karena rakyat menyambut dengan semangat berjuang kedatangan ekspedisi.

Jiwa beragama yang kuat merupakan sifat penduduk nelayan Batakan. Karena itu perjuangan yang bertujuan mengusir penjajah Belanda ditanggapi mereka sebagai perjuangan "Fisabilillah", dan setiap orang yang beragama Islam tergerak hatinya mendengar kata Fisabilillah itu, berjuang di jalan Allah. Itulah sebabnya rombongan ekspedisi ini mendapat sambutan yang hangat dari penduduk Batakan.

Dalam suatu pertemuan dengan penduduk didapat kesepakatan pentingnya perjuangan untuk menegakkan pemerintah Republik Indonesia, membela Proklamasi 17 Agustus 1945. Kesepakatan inilah yang menghasilkan terbentuknya Pemerintah Republik Indonesia di Batakan dengan formasi dan personalia sebagai berikut:

- Kepala Pemerintah : Abdullah
- Kiai : Juhri
- Kepala Kejaksaan : H. Husaini
- Kepala Kepolisian : Darjat

¹⁰⁷ G.M. Yaman, *op.cit*, hal. 44.

¹⁰⁸ Hassan Basry, *op.cit*, hal. 44.

¹⁰⁹ A. Gazali Usman *et al.*, "Pertempuran Batakan Dalam Rangkaian Ekspedisi Laut ke Kalimantan", FKIP-Unlam, Banjarmasin, 1983, hal. 20.

- Bagian Suplai Makanan : H. Suhaili
: H. Ali
- Bagian Persenjataan : Abdul Kadir
- Pembekal : H. Erman
- Komandan Tempur :
 - a. Di Gunung Birahi : Salman
 - b. Di Tanjung : Taberi
 - c. Pasukan Laut : Talib ¹¹⁰

Tugas pemerintahan ialah mengatur masyarakat, mengumpulkan dana dan kekuatan untuk menghadapi Belanda. Kepala Pemerintah yang dijabat oleh Abdullah sebelumnya adalah Kepala Desa di Batakan, sehingga baginya mengatur masyarakat adalah mudah. Selanjutnya rombongan ekspedisi melatih masyarakat Batakan menggunakan senjata, menembak, melempar granat dan cara-cara praktis dalam menghadapi musuh apabila terjadi pertempuran. Meskipun latihan kemiliteran hanya dilakukan selama 3 hari, tetapi semangat berjuang untuk mengusir NICA sangat tinggi. Sejak pemerintahan Republik Indonesia terbentuk, sejak itu pula berkibar bendera Merah Putih di Batakan.

NICA rupanya telah mengetahui tentang pendaratan ekspedisi dari Jawa, karena itu NICA telah memusatkan pertahanannya di Pelaihari, jalanan antara Batakan dan Pelaihari, begitu pula laut di sekitar Batakan telah dikuasai NICA tetapi rakyat Batakan telah siap tempur untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Orang-orang tua, anak-anak serta wanita telah diungsikan ketempat yang aman.

Senjata yang dimiliki adalah terdiri dari 17 pucuk karabijn, 1 pucuk bren gun, 2 pucuk sten gun, sepucuk pistol serta 300 biji granat tangan dan selebihnya senjata tradisional berupa keris, tombak dan parang. Komandan-komandan tempur telah menempati posnya masing-masing. Sekitar kampung dibuat pertahanan berupa parit-parit pengintai, pada tempat-tempat yang strategis untuk mengintai musuh.

Pos di Gunung Birahi letaknya di sebelah barat dari desa Kandangan Lama merupakan pos terdepan untuk menghadapi musuh yang datang dari Pelaihari, sedangkan pos di Tanjung Dewa adalah pos yang menghadap ke laut untuk menghadapi kemungkinan serangan dari laut. Pos di Gunung Birahi ini merupakan pos inti karena selain menghadapi serangan yang datang dari arah Pelaihari, juga kemungkinan menghadapi musuh yang datang dari Batu Tungku dan Penyipatan yang memang telah disiapkan oleh NICA.

Pertempuran Batakan atau lebih tepat kalau dikatakan "Palagan Batakan" pun terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 April 1946. Tentara NICA menyerbu dari arah Pelaihari ketika rakyat sedang memutuskan hubungan dengan cara merusak jembatan di daerah Kandangan Lama. Pertempuran berkobar dengan sengitnya. Pertempuran ini dipimpin oleh Mastur penduduk kampung Batakan sendiri. Tentara NICA yang hanya berkekuatan 15 orang tidak mampu menghadapinya dan terpaksa mengundurkan diri.

Pertempuran terjadi lagi di sekitar Gunung Timah kira-kira 10 km dari Batakan, selama 1 jam dengan tidak menimbulkan korban. Pasukan NICA berhasil dihalau dan ini menimbulkan semangat juang yang tinggi bagi rakyat Batakan.

¹¹⁰ A. Gazali Usman, *ibid.*, hal. 23.

Tiga hari kemudian yakni tanggal 14 April 1946 NICA kembali menyerang Batakan dengan menggunakan pesawat terbang yang dilengkapi dengan bom api. Rakyat Batakan melakukan perlawanan dengan gagah berani.

Pertempuran terjadi di semua sektor, sektor laut menghadapi 2 buah kapal NICA di Muara Batakan, pesawat terbang berputar-putar menembaki dari udara sehingga rumah penduduk berlubang-lubang karenanya, disamping itu bom api dijatuhkan dari udara. Dalam hal ini sektor utara berhasil menghancurkan kekuatan NICA, sehingga sebuah truk yang penuh dengan tentara NICA terbalik dan puluhan tentara NICA menjadi korban.

Pertempuran yang kedua yang terjadi tanggal 15-16 April 1946 berlangsung sampai malam hari, dan setelah pukul 21.00 tembakan tidak terdengar lagi. Korban berjatuhan, 8 orang menjadi pahlawan bangsa, 4 orang dari pasukan ekspedisi yang kemudian dimakamkan di makam pahlawan Banjarbaru, sedangkan 4 orang lagi penduduk Batakan, dimakamkan di depan pintu masuk desa Batakan. Mereka itu adalah Anang B, Dukadir, Sahran dan Syukur.¹¹¹

Tanggal 16 April 1946, setelah diadakan perembukan dengan seluruh penduduk, dengan memperhatikan kekuatan pejuang yang tidak seimbang dengan kekuatan NICA, maka dengan perasaan berat rombongan ekspedisi terpaksa kembali ke Jawa, setelah bertempur selama 3 hari dengan gigih menghadapi NICA. Rombongan ekspedisi kembali dengan selamat di pelabuhan Kalianget Madura.¹¹²

Begitu gigihnya Gubernur memberangkatkan ekspedisi ke Kalimantan, sehingga diberangkatkan pula ekspedisi Sabilillah pimpinan H. Abdul Hamid lewat pelabuhan Pekalongan tanggal 12 Juli 1946, sebelum rombongan Letnan L Mustafa Ideham Kembali ke Jawa. Rombongan tiba di Air Kecil Kalimantan Selatan pada tanggal 17 April 1946.

Pertempuran segera terjadi ketika NICA datang dengan motorboat pada tanggal 6 Juni, pukul 11.00 pagi. Pertempuran berlangsung sampai pukul 07.00 malam dan tentara NICA mengundurkan diri. Setelah pertempuran berhenti rombongan terbagi dua, masing-masing dipimpin oleh H. Abdul Hamid dan Moh. Ideris kembali ke Jawa dengan 25 anggota, sedangkan H. Abdul Hamid tertangkap dalam keadaan sakit.¹¹³

3) Ekspedisi Rombongan PMC (Penyelidik Militer Khusus)

Ekspedisi ini diberangkatkan oleh Gubernur dengan tugas khusus. PMC dipimpin oleh Letkol Zulkipli Lubis. PMC adalah suatu organ dari Kementerian Pertahanan yang bergerak dibidang intelijen. Sejak tahun 1946, PMC ditugaskan melakukan ekspedisi ke luar Jawa, Sumatera, Maluku dan Kalimantan bahkan ke Australia dan Singapura.

Rombongan PMC pada umumnya berintikan putera daerah yang dipimpin oleh perwira TKR. Tugas pokoknya adalah mengobarkan semangat perjuangan melawan Belanda dan mewujudkan pemerintahan Republik Indonesia.

Ekspedisi PMC ke Kalimantan dipimpin oleh Kapten Mulyono dan berangkat bulan Februari 1946 dari pelabuhan Pekalongan. Ekspedisi ini mendarat di Kuala Pembuang dan terus ke Tumbang Manjul, dimana terlibat pertempuran hebat melawan NICA, dan akhirnya Mulyono tertangkap dan dipenjarakan di Banjarmasin. Menurut salah satu sumber, Kapten Mulyono dari Jawa tidak langsung menuju ke Kalimantan, tetapi menuju Singapura. Dari Singapura berhasil mendarat di Kalimantan Barat untuk selanjutnya ke Kalimantan Selatan.

¹¹¹ A. Gazali Usman, *ibid.*, hal. 29.

¹¹² G.M. Yaman, *op.cit.*, hal. 45.

¹¹³ G.M. Yaman, *op.cit.*; MBAD RI, *op.cit.*, hal. 36.

Pada bulan Agustus 1949 ketika ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan menyerang kedudukan NICA di Banjarmasin, Kapten Mulyono berhasil dibebaskan. Kapten Mulyono kemudian berhasil membentuk dan memperkuat beberapa Pos pasukan MN 1001 di bawah pimpinan A.Mukran. Dalam satu gerakan dan penggerebekan Kapten Mulyono kembali ditangkap NICA dan dimasukkan dalam penjara Banjarmasin. Akan tetapi Kapten Mulyono berhasil meloloskan diri. Tentang lolosnya Kapten Mulyono dari Penjara Banjarmasin diceritakan sebagai berikut :

Hari itu adalah tanggal 27 Desember 1949. Penjaga Penjara yang bertugas dinas malam adalah P. Trimurty (Thio Po Lien). Dia telah berusaha beberapa kali untuk meloloskan Kapten Mulyono dari penjara namun selalu gagal. Menjelang tengah malam P.Trimurty berangkat dari rumahnya membawa satu stel pakaian dinas dengan maksud menyamarkan Kapten Mulyono sebagai pegawai penjara.

Pada jam 01.30 malam P.Trimurty telah membuka kamar sel Kapten Mulyono dan langsung membawa Kapten Mulyono keluar disembuyikan di bawah kolong kamar sel. Baju dinas penjara diberikan dan disuruh memakainya. Sambil menunggu kesempatan yang baik untuk keluar dari penjara. Pukul 04.00 hampir menjelang subuh J.Timbung teman sekerja P.Trimurty memutuskan semua kabel telepon di penjara dengan tujuan agar hubungan dengan luar semuanya terputus untuk mencegah bantuan dari luar. P.Trimurty mengambil persenjataan di lemari kamar tahanan berupa 1 buah pistol dan 1 buah karabijn.

Tepat jam 04.30 dikala semua penjara dan tahanan nyenyak tidur, mereka bertiga keluar dari penjara. Senapan karabijn diserahkan kepada Kapten Mulyono. Kebetulan dipinggir tembok halaman rumah penjara tersebut ada sebuah sepeda kepunyaan Opziener Pareira yang tidak dikunci. Sepeda tersebut langsung dibawa. Pada pintu paling depan untuk keluar jalanan, mereka mendapat rintangan dari petugas pintu. Petugas tersebut tidak mau membukakan pintu. Penjaga tersebut diancam untuk ditembak bilamana tidak mau membukakannya. Akhirnya pintu terpaksa dibuka. Tetapi mereka masih dalam keadaan bahaya, karena masih berada dalam kepungan pos penjaga menara. Pada akhirnya mereka dapat keluar dari halaman penjara menuju ke jalanan.

Dengan menyandang senjata karabijn dibahu Kapten Mulyono dibonceng oleh saudara P.Trimurty yang duduk di depan. Baru sekitar 200 meter berjalan mereka telah dikejutkan tembakan-tembakan beruntun baik dari pos-pos menara maupun dari depan halaman penjara.

Mereka langsung lari ke jalan Kroesenlaan¹¹⁴ menuju ke rumah Aminuddin di Pasar Rambai. Mereka berhenti sebentar, lalu dibawa menyeberang sungai kecil di sebelah kanan jalan. Sepeda yang mereka tumpangi dibuang ke dalam sungai tersebut. Mereka langsung lari ke darat. Sekitar 600 meter dari jalanan besar di situ terdapat rawa-rawa. Di tempat itu mereka bersembunyi sehari penuh berendam di dalam air, hingga keadaan aman dan malam tiba.

Sekitar pukul 20.00 dengan dikawal 4 orang lagi, mereka meneruskan perjalanan menuju sungai Banyir. Di situ pengawal ditambah lagi 3 orang dan dengan memakai perahu mereka menuju sungai Skip, selanjutnya menyusuri sungai Bagau, masuk terusan sampai sungai Kelayan Hulu. Dari sini mereka berjalan lewat sawah-sawah dan di tembus Km. 7 Jalan Ulin. Perjalanan diteruskan, hingga pada akhirnya sampai menuju kampung dan dilanjutkan lagi naik perahu menuju pedalaman Alam Roh (Sei Lulut). Di sini bergabung dengan Markas ALRI Divisi IV di Alam Roh.

4) Ekspedisi pimpinan Mayor Tjilik Riwut.

¹¹⁴ Sekarang Jalan Nagasari.

Ekspedisi ini dikoordinasikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Ir. Pangeran Mohammad Noor dengan surat Gubernur tertanggal Yogyakarta 16 Januari 1946 dan surat instruksi No. 73/L/46 tanggal 4 Februari 1946 dan penjelasan No. 142 tanggal 24 Januari 1946.

Surat Gubernur tertanggal 16 Januari 1946 itu merupakan surat kuasa yang diberikan kepada Mayor Tjilik Riwut sebagai utusan Pemerintah Republik Indonesia ke Kalimantan khususnya untuk daerah yang berpenduduk Suku Dayak OT Danum untuk mengambil tindakan pembelaan dan pembangunan negara.

Sebelum berangkat Tjilik Riwut telah diperkenankan menghadap Presiden dan Wakil Presiden di Istana Yogyakarta. Tujuan ekspedisi adalah memberikan penerangan tentang arti dan tujuan kemerdekaan dan membentuk barisan untuk membela tanah air. Pimpinan Ekspedisi ini diberi nama MN 1001 singkatan dari Mohammad Noor sedangkan 1001 berarti nama 1001 akal harus mampu menghadapi segala rintangan dan hambatan dalam melaksanakan ekspedisi. Rombongan ini berangkat bulan Februari 1946 dari pelabuhan Pekalongan menuju daerah Kalimantan Tengah dan berhasil mendarat di kampung Sungai Tabuk, dekat Pangkalan Bun dan kemudian terus ke pedalaman Kalimantan di bawah pimpinan Tjilik Riwut diikuti oleh A. Mukran, Reinould Silvanus dan Willem Batu, sedangkan yang lainnya seperti Nazaruddin, M. Saleh Abdis, Darham Hidayat dan Hamdi Gaffar menggabungkan diri dengan ekspedisi Husin Hamzah yang sedang menjalankan operasi di daerah sungai Rangas.

Rombongan Tjilik Riwut berhasil tiba di Kotawaringin menyusun Pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut serta menggerakkan para pemuda untuk mempertahankan daerah itu. Pemerintah tersebut hanya berumur satu bulan karena setelah itu Kotawaringin diserbu oleh Belanda. Akibat serangan ini anggota rombongan terpecah untuk menyelamatkan diri.

Sylvanus menggabungkan diri dengan Husin Hamzah, Willem Batu tertangkap. Tjilik Riwut bersama A. Mukran menuju daerah udik kampung Sungkup. Setelah melalui hutan lebat, gunung sungai dan rawa serta rintangan lainnya mereka tiba di Tumbang Sinapang. Atas bantuan Norman Atak mereka meneruskan perjalanan ke Sepanbiha (Kasongan) tempat kelahiran Tjilik Riwut. Dari sini mereka menuju Mandomai untuk mencari jalan agar dapat kembali ke Jawa, tetapi gagal.

A. Mukran dan Norman Atak ketikan di Banjarmasin terus bergerak menuju Tambak Kurau. Tambak Kurau dijadikan basis untuk menggerakkan semangat perjuangan melawan Belanda.

Hasil positif yang dapat dibawa oleh misi ekspedisi ini ialah dibentuknya satu pasukan perjuangan yang diberi nama "Pasukan MN 1001", yang merupakan pasukan bagian dari pasukan MN 1001 yang berpusat di Jawa. Setelah kurang lebih setahun bertugas mengobarkan semangat perjuangan di Kalimantan Selatan, Mayor Tjilik Riwut kembali ke Jawa.¹¹⁵

5) Ekspedisi Rombongan "9 Pelopor"

Ekspedisi ini merupakan gelombang pertama yang diberangkatkan ke Kalimantan yang dipelopori oleh BPRI (Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia) pimpinan Bung Tomo. Rombongan ini terdiri dari 9 orang yang semuanya berasal dari Kalimantan, yaitu : Haji Achmad Hasan sebagai pemimpin, Mohammad Asnawi wakil, Mohammad Maran sebagai penyelidik, Abdul Manan sebagai perlengkapan, selanjutnya adalah Djaderi, Utut, Burhan Saktor, Anang Basri dan Haji Muradi sebagai penghubung.

Pada tanggal 7 November 1945 dengan perlengkapan sederhana dan terbatas, rombongan meninggalkan Surabaya menuju Panarukan yang dijadikan sebagai pelabuhan pemberangkatan. Pemberangkatan ke Kalimantan dilakukan pada tanggal 18 November 1945 dari Panarukan dengan menggunakan perahu layar.

¹¹⁵ MBAD RI, *ibid.*, hal. 36 - 38.

Setelah sepuluh hari berlayar tanggal 28 November 1945 rombongan ekspedisi berhasil mendarat di daerah Samuda Sampit. Di daerah ini rombongan berhasil mengobarkan semangat perjuangan mengibarkan bendera Merah Putih dan membentuk cabang BPRI.

Sesuai dengan tugasnya yaitu mengobarkan semangat perlawanan terhadap Belanda, rombongan melanjutkan ekspedisi ke daerah Marabahan dan Negara. Dengan menyamar sebagai rakyat biasanya berhasil ketempat tujuan. Di Marabahan mereka berhasil membentuk pemerintahan Republik Indonesia dan berhasil mengadakan koordinasi dengan tokoh-tokoh Persatuan Pemuda Republik Indonesia (PPRI) daerah Marabahan antara lain M. Ruslan, M. Bahaudin Musa, Muhammad Arpan dan lain-lain.¹¹⁶

Di Marabahan sebelumnya telah terbentuk PRRI yaitu dibentuk pada tanggal 1 September 1945 dengan tujuan untuk mengisi Jiwa rakyat sesuai dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pertemuan antara pimpinan PPRI Marabahan dengan rombongan ekspedisi “9 Pelopor” yang dilakukan pada tanggal 3 Desember 1945 menghasilkan suatu keputusan yang sangat positif yaitu: melebur PRRI Marabahan menjadi “Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia”(BPRI), mengambil alih kekuasaan NICA di Marabahan dan mengadakan hubungan dengan Kesatuan Kelaskaran terutama BPRI yang bermarkas di Pengambangan (Banjarmasin). Dalam pertemuan itu pula rombongan ekspedisi “9 Pelopor” menyerahkan persenjataan kepada BPRI Marabahan berupa: 6 pucuk senapan panjang tipe 91, 1 peti granat berisi 100 biji dan 1 peti bom bakar. Di samping itu Ali Syateri menyerahkan pula pada BPRI satu pedang Samurai Jepang dan satu pistol dengan pelurunya.

Hari Rabu tanggal 5 Desember 1945 terjadi pengambilalihan kekuasaan NICA ke tangan pemerintahan Republik Indonesia dengan merampas satu karabijn type 95 dan satu senapan kembar dengan pelurunya. Pengambilalihan pemerintahan tersebut disertai dengan rapat raksasa dan pengibaran bendera Merah Putih yang dihadiri ribuan rakyat Marabahan. Pada rapat raksasa itu berbicara tokoh-tokoh BPRI Marabahan seperti: M. Sahrudin, M. Yakob, M. Bahaudin Musa, disamping pembicara dari ekspedisi “9 Pelopor” yang disampaikan oleh Djaderi. Kegiatan selanjutnya adalah mengobarkan semangat perjuangan menentang pemerintahan Belanda. Pengawasan dilakukan oleh bekas Kaigun Heiho seperti : Ajian, Bahran, Bahrian, Halul, Huldi, Badarussalam dan lainnya.

Kegiatan selanjutnya adalah mengobarkan semangat perjuangan di daerah sekitarnya dan membentuk sektor-sektor BPRI seperti di Ulu Benteng, Kampung Lepas, Kampung Penghulu, Kampung Bagus, Bantuil, dan Belawang.

Hari Kamis 6 Desember 1945, muncul 3 buah perahu dengan 30 orang serdadu NICA dan tepat di persimpangan sungai kota Marabahan terjadilah pertempuran yang sengit antara tentara NICA dengan rakyat yang mempertahankan kota Pemerintahan Republik Indonesia di Marabahan. Pertempuran terjadi sekitar jam 15:00. Dalam pertempuran yang berlangsung seru dan berlangsung dalam jarak dekat, menyebabkan tiang bendera patah dan bendera Merah Putih terjatuh, meskipun telah dipertahankan dengan semangat yang membara oleh tiga serangkai bekas Kaigun Heiho, Ajian Icam, Bahran Icam dan Bahrian Icam.

Karena pertahanan yang kuat NICA mengundurkan diri, tetapi sore harinya sekitar pukul 18.00 datang lagi dari Banjarmasin sebuah kapal besar “Hap Gwan” penuh dengan serdadu NICA berlabuh di tengah sungai sekitar Ulu Benteng.

Hari Jum'at 7 Desember 1945 NICA melakukan pendaratan di kampung Ulu Benteng, dan segera pertempuran terjadi, begitu pula tentara NICA mendarat di Kampung Bagus juga mendarat

¹¹⁶ MBAD RI, *ibid.*, hal. 29.

perlawanan yang gigih. Karena kekuatan yang tidak berimbang, maka pejuang BPRI mengambil siasat mundur dan berakibat kota Marabahan diduduki oleh tentara NICA dalam pertempuran ini telah terjadi korban, yaitu : Wahidin dan Atak yang gugur dalam pertempuran. Adapun selanjutnya H. Muhammad Taher (55 tahun) dan Bachdar Johan (17 tahun) juga meninggal karena siksaan setelah ditangkap oleh Belanda, 41 orang di antaranya dibawa ke Banjarmasin, sedangkan yang lainnya seperti Ajian Icam dikirim ke Nusakambangan.

Setelah terjadinya peristiwa pemberontakan 5 Desember 1945 melawan NICA di Marabahan dan sekitarnya, maka sebagian pejuang sebagian telah ditangkap NICA dan sebagian lagi lari untuk meneruskan perjuangan secara gerilya di daerah lain. Pada tahun 1946 datang misi dari Hulu Sungai Kandangan, lalu mampir di Marabahan. Kebetulan sekali misi itu meneruskan perjalanan ke kampung Bantuil/Badandan untuk mencari rakyat yang bersedia untuk ikut melanjutkan perjuangan demi mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Rombongan misi tersebut diterima dengan gembira oleh masyarakat Bantuil/Badandan yang diwakili oleh M. Yunus dan Atak Imberansyah serta pemuka masyarakat, alim ulama serta masyarakat lainnya. Kemudian misi tersebut dibawa ke Sungai Gampa di Rantau Badauh, terhubung kampung Bantuil atau Badandan terlalu dekat dengan Marabahan pusat pemerintahan Belanda (NICA) pada masa itu.

Di Sungai Gampa rombongan yang dibawa oleh Abdurrahman Lubis menginap di rumah Sabandi Hallul. Setelah beberapa hari menginap di Sungai Gampa, misi tersebut meneruskan perjalanan ke Banjarmasin. Tidak berselang lama Abdurrahman Lubis datang kembali ke kampung Bantuil untuk menyusun kekuatan dan mempersatukan perjuangan gerilya bersama M.Yunus, Atak Imberansyah, M.Ruslan,Junaidi, Ahli Razak,Jeber ,Anang Abrar, Marlie Hasan dan para pejuang lainnya yang bermarkas di daerah pulau Sahubu dan sekitar Saka Rumbia.

Pada tanggal 8 Desember 1945 pasukan BPRI Marabahan yang jadi buronan NICA telah menyusun kekuatan di pedalaman Batilap dengan pasukan polisi yang dipimpin oleh Wedana Ahmad dan Anang Kaderi polisi dari Marabahan. Pada tanggal 8 Desember 1946 terjadi pula pertempuran di Anjir Serapat km.10 antara pasukan NICA dengan pasukan BPRI yang dipimpin oleh Dachlan Karim. Pada bulan Januari 1947 pasukan BPRI mengadakan konsolidasi kekuatan sambil menunggu instruksi baru dari atasan.

Selama masa perjuangan semangat juang rakyat Kalimantan untuk mendukung Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tetap berkobar-kobar, walaupun harus menerima kenyataan adanya kekuatan pasukan NICA di daerah ini.

Namun semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan semboyan Sekali Merdeka Tetap Merdeka serta berpendirian Merdeka atau Mati, telah menggugah kembali semangat kepeloporan perjuangan rakyat Kalimantan untuk mengadakan perlawanan bersenjata dan dengan rangsangan-rangsangan kekuatan dalam bentuk ekspedisi Militer lalu dilakukan perang gerilya terhadap pemerintah pendudukan (NICA).

Badan-badan perjuangan yang semula kelihatan bergerak secara lokal maupun terpecah-pecah, berangsur-angsur dapat disatukan dan dikoordinir.

Taktik atau perang gerilya yang dilakukan oleh kaum pejuang ternyata mendapat dukungan dan bantuan dari rakyat terutama di desa-desa seperti Bantuil, Sungai Gampa, Sungai Pantai, Pindahan Baru, Marabahan, Anjir Serapat, Kuripan dan sampai ke Barito Hulu (Barito Utara).

c. Ekspedisi-ekspedisi ALRI Divisi IV Kalimantan.

Selain ekspedisi yang dilakukan oleh anggota TKR Laut Tegal yang dikoordinasi oleh Gubernur Kalimantan, pada bulan Oktober unsur Angkatan Laut melaksanakan pula pengiriman pejuang-pejuang ke Kalimantan yang dikoordinasi oleh ALRI Divisi IV Kalimantan/Markas

Pertahanan Angkatan Laut IV (MPA IV) Kalimantan. Ekspedisi-ekspedisi itu dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu.

1) Ekspedisi I Pimpinan Letnan II Asli Zuchri

Ekspedisi ini dikirim oleh ALRI Divisi IV daerah Kalimantan pimpinan Letnan II Asli Zuchri dan wakilnya Letnan Muda Mursyid, Tujuan ekspedisi adalah Kalimantan Selatan dengan tugas membentuk organisasi ALRI Divisi IV di Kalimantan Selatan dan menyatukan organisasi pejuang yang ada di daerah Kalimantan Selatan ke dalam organisasi ALRI Divisi IV.

Untuk dapat menjalankan tugas ini Letnan II Asli Zuchri harus terlebih dahulu menghubungi Hassan Basry yang pada waktu sekitar Proklamasi telah berangkat ke Kalimantan dengan inisiatif sendiri dan mendapat bantuan dari BPOG dan pihak-pihak lainnya ikut merestui keberangkatan.

Persiapan ekspedisi dilakukan di Mojokerto, sedangkan pemberangkatan dari pelabuhan Tuban, dengan menggunakan kapal atau perahu layar yang berukuran berat 10 ton yang diperoleh dari Crip Armada IV (CA IV) Juana yang pada waktu berkedudukan di Wonosobo. Perahu layar itu dibantu oleh 4 orang anak buah perahu dengan nakhoda Abdul Muhid kesemuanya adalah putera Kalimantan. Perahu itu diberi nama A.A. Bodja merupakan singkatan dari Aman Antar Borneo Djawa.

Agar jangan dicurigai ekspedisi itu membawa 20 karung gula yang akan dijual di Banjarmasin yang hasilnya akan dipergunakan untuk kepentingan pejuang-pejuang. Karena tugas ekspedisi-ekspedisi itu membentuk organisasi bersenjata, maka Komandan ALRI Divisi IV membekali beberapa pucuk senjata kepada Letnan II Asli Zuchri dengan cara memasukkannya ke dalam karung-karung gula. Waktu pemberangkatan adalah tanggal 10 Oktober 1946 dari pelabuhan Tuban dan pada tanggal 21 Oktober 1946 ekspedisi berhasil mendarat di desa Tabanio Kalimantan Selatan, dan perahu A.A. Bodja diperintahkan meneruskan pelayaran ke Banjarmasin.

Kepala Kampung Tabanio memberi bantuan yang diperlukan oleh pejuang ekspedisi dan mengantarkannya ke Banjarmasin untuk mencari informasi tentang kedudukan Hassan Basry pimpinan Syaifullah, dan menjual gula di Banjarmasin.

Dengan menggunakan perahu nelayan Asli Zuchri meninggalkan Tabanio menuju Banjarmasin dan tiba dengan selamat. Setelah memperoleh informasi dimana kedudukan Hassan Basry, Letnan II Asli Zuchri tetap di Banjarmasin dan mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh politik seperti Dokter St.T. Diapari dan A.A. Sinaga dan mengurus penjualan gula. Setelah melalui berbagai kesulitan dan rintangan, Letnan II Asli Zuchri berhasil bertemu dengan Hassan Basry pimpinan Syaifullah pada 11 November 1946 di Tabihi dan selanjutnya dicapai kesepakatan untuk membentuk suatu Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV "A" Pertahanan Kalimantan.¹¹⁷ Setelah tugasnya selesai Letnan II Asli Zuchri dan wakilnya kembali ke Jawa pada akhir bulan November 1946 dengan menumpang perahu dagang dengan tujuan Jakarta. Dari Jakarta kembali menuju Yogyakarta dan bulan Desember 1946 tiba di Markas Besar ALRI Divisi IV di Tuban. Selanjutnya Letnan II Asli Zuchri ditugaskan sebagai penghubung dengan jabatan Perwira Penghubung yang akan mempersiapkan segala sesuatu untuk membantu perjuangan Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV "A" Pertahanan Kalimantan.

2) Ekspedisi II Pimpinan Letnan I Asli Zuchri

Setelah menjalankan tugas dan berhasil pada ekspedisi pertama, Letnan I Asli Zuchri ditugaskan kembali untuk menjalankan tugas ekspedisi kedua dari pelabuhan Probolinggo pada

¹¹⁷ Zamzulis Ismail, *op.cit.*, hal. 26-50; Hassan Basry, *op.cit.*, hal. 97.

tanggal 25 Juli 1947 dengan menggunakan perahu layar A.A. Bodja , seperti pada pemberangkatan pertama menuju Kalimantan. Rombongan ekspedisi diikuti oleh Letnan Muda M.S. Abdis, Letnan Muda Hilmi, Sersan Mayor M. Husin dan M.Lukman alias Abdurrahman Lubis alias P.Arya.

Ekspedisi kedua ini berhasil mendarat di kampung Bawah Layang dekat Tabanio. Tugas yang dibebankan pada ekspedisi ini ialah menyampaikan beberapa instruksi kepada Komandan Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV "A" Hassan Basry sehubungan dengan dilancarkan Agresi I Belanda terhadap Republik di Yogyakarta.

Setelah tiba di Banjarmasin anggota ekspedisi menginap di rumah keluarga mereka masing-masing sambil mencari informasi tentang Hassan Basry. Dengan menggunakan jasa inspektur Polisi M.Hanafi, kakak ipar Asli Zuchri, diperoleh surat keterangan sebagai alat penyamaran yang isinya bahwa rombongan Asli Zuchri adalah informan Polisi NICA, sehingga ketika tetapi lima hari kemudian mereka ditangkap tentara Belanda dan diserahkan kepada kepolisian. Oleh kepolisian mereka kemudian dibebaskan.

Karena kesulitan yang dihadapi untuk memasuki daerah Hulu Sungai, mereka memutuskan untuk kembali ke Jawa. Setibanya di Surabaya, mereka ditangkap kembali oleh tentara Belanda dan dikembalikan ke Banjarmasin untuk di proses oleh Polisi Militer NICA.

Pengadilan memutuskan menjatuhkan hukuman dalam suatu pengadilan militer. Letnan I Asli Zuchri dihukum selama 7 tahun setengah, dan satu setengah tahun untuk Letnan Muda M.S. Abdis dan Lukman. Setelah tercapainya gencatan senjata Letnan I Asli Zuchri dibebaskan dari tahanan.¹¹⁸

3) Ekspedisi III Pimpinan Mustafa Ideham

Ekspedisi ketiga ini dikoordinasikan oleh ALRI Divisi IV dipimpin oleh Mustafa Ideham dan A.Rizekin dilakukan pada bulan Oktober 1947. Ekspedisi ini terdiri dari dua buah perahu, yaitu yang dipimpin oleh Mustafa Ideham dengan dua anak perahu menuju Kapuas, sedangkan perahu yang satu lagi dipimpin oleh A. Rizkekin dibantu tiga orang anak buah perahu menuju Banjarmasin. Tugas ekspedisi adalah menyelidiki kekuatan organisasi Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV "A" dan mempersiapkan pangkalan untuk dijadikan pendaratan anggota ALRI Divisi IV dari Jawa. Kedua perahu ini berangkat meninggalkan Tuban menuju daerah Kalimantan Selatan.

Sesuai dengan rencana semula, Mustafa Ideham mendarat di Bapayung, dan A. Rizekin mendarat di Banjarmasin. Keduanya setelah berkumpul kembali merencanakan untuk menuju daerah Hulu Sungai tempat Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV "A" berkedudukan, tetapi tidak berhasil karena ketatnya penjagaan. Karena gagal menuju Hulu Sungai sesuai dengan tugasnya ialah membentuk pangkalan-pangkalan, selanjutnya menuju Teluk Sebangau di tepi Sungai Mendawai, kemudian ke Kuala Pembuang dan ke Tanjung Puting. Di sinilah mereka berhasil mengobarkan semangat perjuangan dan membentuk pangkalan-pangkalan. Ketika mereka kembali ke Jawa, Markas Besar ALRI Divisi IV sudah pindah ke Madiun, karena situasi yang gawat.

4) Ekspedisi IV Pimpinan Kapten Danussaputera

Ekspedisi pimpinan Kapten Danussaputera merupakan ekspedisi terakhir yang dikoordinasikan oleh Markas Besar ALRI Divisi IV dan dari seluruh ekspedisi yang pernah dikirim ke Kalimantan. Sejak tahun 1945 Kapten Danussaputera merupakan Komandan Batalyon TRI (L)

¹¹⁸ Zamzulis Ismail, *op.cit.*, hal. 33 – 57; G.M. Yaman, *op.cit.*, hal. 49.

yang berkedudukan di Semarang. Kapten Danussaputera adalah aktif dalam beberapa pertempuran di Jawa Tengah dan Jawa Timur.¹¹⁹

Ekspedisi ini berangkat dari pelabuhan sebelah timur Tuban pada tanggal 20 Juni 1949. Ekspedisi memutar ke arah pulau Salembu. Daeng Baco memberi bantuan-bantuan dengan perbekalan dalam perjalanan selanjutnya.

Selanjutnya setelah melewati Tanjung Silat, perahu ditimpa hujan dan gelombang besar yang mengakibatkan kemudi putus dan perahu bocor. Semua rombongan panik dan berdoa semoga mendapat pertolongan dari Yang maha Kuasa. Tidak disangka mereka dibawa hanyut sampai terdampar kandas di Pantai Takisung dan kemudian diselamatkan oleh Kopral Benu Taufik anggota ALRI Divisi IV Tuban yang memang khusus membantu pendaratan pejuang dari Jawa. Mereka tiba di Takisung pada tanggal 25 Juni 1949. Untuk menyelamatkan diri, Danussaputera beristirahat di Muara Tambangan dekat Takisung, kemudian mereka menerima utusan dari Gubernur Tentara ALRI Divisi IV, yaitu Muhammad Ali Baderun dan Mohammad Rasyid.

Akhirnya diputuskan untuk membagi ekspedisi menjadi dua, satu rombongan menuju Balikpapan dan Samarinda, sedangkan Kapten Danussaputera menuju pedalaman Kalimantan Selatan ke arah Hulu Sungai. Pada tanggal 6 Juli 1949 rombongan Danussaputera berangkat menuju Sungai Rasau dari Takisung dan meneruskan berjalan kaki selama 4 hari 4 malam melewati daerah-daerah Banjarmasin, Marabahan, Margasari dan akhirnya Kapten Danussaputera berhasil menemui Letnan Kolonel H. Hassan Basry di kubu pertahanan induk pasukan ALRI Divisi IV di pegunungan Batu Bini di atas Padang Batung.

Selanjutnya Kapten Danussaputera diperbantukan pada Markas ALRI Divisi IV. Kemudian diberi tugas sebagai wakil dalam perundingan antar ALRI Divisi IV, NICA dan Misi Militer Republik Indonesia sebagai realisasi dari perintah Presiden tanggal 3 Agustus 1949.¹²⁰

Disamping ekspedisi-ekspedisi yang dikoordinasikan Gubernur Kalimantan dan ALRI Divisi IV, terdapat beberapa ekspedisi yang berangkat secara perorangan atau oleh Organisasi kelaskaran lainnya seperti ekspedisi "9 Pelopor" yang diberangkatkan oleh BPRI pimpinan Bung Tomo. Ekspedisi-ekspedisi itu ialah seperti: Pasukan Payung dari MN 1001 / AURI pada tanggal 17 Oktober 1947 di bawah pimpinan Letnan Muda Iskandar, Letnan Muda M. Dachlan dan Letnan J. Bitak, Pasukan Kapten Dumai Agan dari Pasukan MN 1001, Pasukan Andun Syukur Rahim dengan perahu ke Kalimantan Tenggara dari pasukan MN 1001, Pasukan Dhomber Pasukan MN 1001 yang bergerak dari Yogyakarta dengan Dakota RI 002 ke Manila terus ke pulau Tawi-tawi dan ke Kalimantan (Tarakan) dan pasukan lainnya.¹²¹

4. Usaha Perlawanan Terhadap NICA Secara Terpisah

Selama tahun 1945 sampai akhir tahun 1946 terdapat banyak perlawanan terhadap NICA di seluruh Kalimantan Selatan yang dilakukan secara terpisah yang dikoordinir oleh organisasi kelaskaran setempat. Sejak perlawanan 9 November 1945 di Banjarmasin, kota Banjarmasin tetap tenang dan mendekati tahun 1949 setelah Markas Besar Alam Roh meningkatkan aktivitas perlawanannya baru Banjarmasin hangat kembali. Meskipun di Banjarmasin tenang, tetapi perlawanan tetap bergelora di beberapa daerah Hulu Sungai dan daerah Kotabaru serta Pagatan.

Kejadian pengrusakan terhadap mobil NICA di Rantau dan kemudian penghadangan terhadap rombongan Tentara NICA di Rantau 09 November 1945 yang dipimpin oleh H.A. Makki, yang secara spontan diikuti oleh para pemuda.

¹¹⁹ G.M. Yaman, *op.cit.*, hal. 47.

¹²⁰ Zamzulis Ismail, *op.cit.*, hal. 50 – 67.

¹²¹ Tjilik Riwut, *op.cit.*, hal. 110.

Di Rantau lahir gerakan BPPKI (Barisan Pelopor Pemberontak Kalimantan Indonesia). Di bawah pimpinan H.Abdul Makki, juga mempengaruhi GERMER yang dibentuk di Rantau 23 Agustus 1945 oleh H. Asra dan H. Sulah (H. Muhammad Noor).

GERMER tumbuh pula di Margasari. GERMER Margasari memelopori penghadangan terhadap kapal-kapal “Ban Liong Hat” yang dikawal oleh Polisi NICA. Suryani alias Pembalah Batung bersama Anwar Usup dari pasukan GERPINDOM Amuntai memimpin 7 orang anggota menyerang kapal itu, di antara Muara Jenamas dengan Muara Pulau Marabahan. Pertempuran sungai menewaskan 1 orang anggota GERMER bernama Ibas, 2 orang Polisi NICA dapat ditawan, 8 orang luka berat dan 4 orang luka ringan. Setelah itu pasukan Suryani atau Pembalah Batung menyerang pula tangsi Polisi Amuntai sehingga jatuh beberapa korban. Serangan berikutnya terhadap pertahanan Militer NICA di pusat kota Amuntai yang dipimpin oleh H.Asyari Yurni, Bihman Villa, Jarmani Usin, dan kawan-kawan sehingga pihak Belanda membakar pertokoan/perumahan di Paliwara yang menelan korban 162 buah toko /rumah musnah.

5. Pembentukan Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV “A” di Kalimantan Selatan

Ekspedisi yang pertama yang diberangkatkan oleh Markas Besar ALRI Divisi IV Mojokerto adalah ekspedisi yang dipimpin oleh Letnan II Asli Zuchri berangkat dari Tuban tanggal 10 Oktober 1946 dengan tugas pokok adalah membentuk organisasi ALRI Divisi IV di Kalimantan Selatan dan menyatukan organisasi pejuang yang ada di daerah ini ke dalam ALRI Divisi IV. Untuk dapat melaksanakan tugas ini Letnan II Asli Zuchri menemui Hassan Basry di pedalaman Kalimantan yang saat itu pimpinan laskar Syaifullah (Banteng Indonesia).

Setelah menemui berbagai rintangan dan intaian dari mata-mata NICA mereka tiba di Kandangan tempat kelahiran Letnan Muda Mursyid, dan dengan bantuan Hasnan Basuki mereka menemui Hassan Basry sebagai pimpinan Banteng Indonesia pada tanggal 11 November 1946, di kampung Tabihi.¹²²

Pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 5 November 1946 antara Letnan II Asli Zuchri sebagai Wakil Markas Besar ALRI Divisi IV Mojokerto dengan tokoh Banteng Indonesia antara lain Hasnan Basuki, H.Rusli, Abdul Muti dan Hassan Basry. Di dalam pertemuan itu terdapat kesepakatan untuk membentuk Batalyon ALRI Divisi IV Kalimantan.¹²³

Pada Pertemuan selanjutnya yang diadakan pada tanggal 18 November 1946 di desa Tabat – Haruyan, terdapat persetujuan berdirinya Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV “A” Kalimantan Selatan, yang diresmikan oleh Letnan II Asli Zuchri atas nama Komandan ALRI Divisi IV di Jawa, dengan sebuah persetujuan yang berisi :

1. Membentuk Batalyon Rahasia Divisi IV “A” untuk Kalimantan Selatan guna menyambut kedatangan pasukan ALRI dari Jawa.
2. Banteng Indonesia dilebur ke dalam Batalyon tersebut dan Hassan Basry diangkat sebagai komandannya.
3. Hassan Basry bersedia menyatukan laskar-laskar perjuangan di Kalimantan Selatan.

Kedudukan resmi Batalyon ini adalah di Kandangan. Sebelum berpisah, perutusan ALRI Divisi IV itu menyerahkan sebuah pistol kepada Hassan Basry sebagai tanda tali persaudaraan. Dalam bulan Desember 1946 Letnan II Asli Zuchri dan Wakilnya Letnan Muda Mursyid kembali ke Jawa melewati Jakarta dan dari sini mereka kembali ke Yogyakarta.

¹²² Hassan Basry, *op.cit.*, hal. 93.

¹²³ Zamzulis Ismail, *op.cit.*, hal. 50

Sejak itu Banteng Indonesia mendapat semangat baru. Tugas itu cukup berat dan mulia, karena dalam menghadapi berbagai kendala melawan NICA harus dengan jiwa yang tabah, sabar dan penuh tawakal kepada Allah yang Maha Kuasa. Tugas itu tugas mulia sebab perjuangan menjunjung bangsa, menjadikan sebagai bangsa yang merdeka yang terlepas dari penjajahan Belanda.

Untuk merealisasikan tugas yang dibebankan pada Hassan Basry, maka tindakan pertama adalah mengadakan permusyawaratan untuk mempersatukan komando perjuangan di Tabihi pada malam tanggal 17 dan 18 Desember 1946. Dalam pertemuan itu hadir beberapa organisasi pemberontak. Rapat itu tidak menghasilkan suatu keputusan, karena besarnya hasrat untuk mempertahankan otonomi masing-masing, tetapi rapat yang lebih luas juga diselenggarakan dengan samaran kongres pemuda di Kandangan, tanggal 17 Maret 1947.¹²⁴

Konferensi pemuda dari PPI seluruh Kalimantan Selatan yang diadakan di Kandangan dihadiri oleh utusan-utusan antara lain : Gusti Rusli Wakil dari MN 1001, Jantra wakil dari Tanjung, Norman H. Ideris wakil dari Amuntai, Bustani Jantera wakil Alabio, H.Rusli, H.Busra, Zafry Zamzam wakil dari Kandangan, Sibli Imansyah wakil Barabai, M.Hammy A.M. wakil Rantau, A.H. Rizal wakil Negara. Rapat tersebut diketuai H.M.Rusli yang juga merupakan anggota pimpinan Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV "A" Kalimantan Selatan. Rapat Rahasia yang terselubung dengan konferensi pemuda se Kalimantan Selatan merencanakan untuk mengambil keputusan persatuan komando perjuangan seluruh Kalimantan Selatan dan telah memutuskan untuk mengangkat Hassan Basry sebagai Pimpinan Umum Perjuangan Kalimantan Selatan. Selanjutnya rapat menugaskan kepada Hassan Basry untuk mengkoordinasikan seluruh badan perjuangan dan disertai tugas untuk mengatur langkah-langkah perjuangan ke arah itu.

Keputusan itu sudah sangat positif, tetapi rapat menetapkan persyaratan lagi, yaitu keputusan berlaku kalau Gubernur Kalimantan menyatakan persetujuannya. Inilah keputusan yang aneh saat itu, sebab untuk mengadakan hubungan dengan Gubernur Kalimantan yang berkedudukan di Yogyakarta bukanlah hal yang mudah karena Blokade NICA sudah dirasakan dimana-mana.

Disamping keputusan yang aneh itu tersebar lagi isu yang mengganggu.. Isu itu adalah gerakan rahasia semuanya harus dilarang yang boleh hanya yang berasal dari instruksi Gubernur Kalimantan Selatan. Isu lain yang juga santer ialah bahwa semua badan perjuangan harus dipimpin oleh kaum bangsawan, yaitu para Gusti saja.

Agar tugas yang dibebankan pada Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV "A" dapat dilaksanakan, maka dua hari setelah diresmikan pembentukan Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV "A" Kalimantan Selatan, berlangsung musyawarah untuk mengisi jabatan yang dianggap perlu sebagai langkah pertama sebagai berikut :

1. Komandan Batalyon Rahasia	: Hassan Basry
2. Kepala Staf Yon Rahasia	: Hasnan Basuki
3. Kepala Tata Usaha	: H.M.Rusli
4. 3 orang pelatih	: 1. Ma'rufi
	2. Setia Budi
	3. Mawardi ¹²⁵

¹²⁴ Zamzulis Ismail, *loc.cit.*

¹²⁵ G.M. Yaman, *op.cit.*, hal. 50.

Rapat-rapat selanjutnya ialah pembentukan kompi-kompi pasukan, dan keputusan-keputusan rapat tersebut berhasil dijadikan garis dan arah operasional Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV "A" Kalimantan Selatan, di antaranya adalah :

- a. Menarik sebanyak mungkin simpati dan keikutsertaan para pemuda dan rakyat untuk melanjutkan perjuangan membela dan mempertahankan proklamasi Republik Indonesia 17 Agustus 1945.
- b. Membentuk pasukan-pasukan dan mengadakan latihan dasar ketentaraan yang disalurkan pada kompi-kompi yang akan dibentuk dikaitkan dengan kawasan-kawasan sebagai basis pertahanan di Wilayah Hulu Sungai.
- c. Pasukan yang telah siap fisik dan mental ditugaskan untuk melakukan pencegahan-pencegatan kendaraan milik KNIL dan Polisi NICA yang melewati jalan-jalan raya untuk memperoleh senjata, juga menyerang pos-pos polisi NICA di kota kecamatan yang terpencil.
- d. Membentuk 7 buah kompi pasukan yang penempatannya disesuaikan oleh rencana pembangunan basis kekuatan pertahanan yaitu :
 - 1) Kompi Daerah Amuntai : Komd. Kudus
 - 2) Kompi Daerah Haruyan : Komd. Arifin Hamzah
 - 3) Kompi Daerah Negara Selatan : Komd. Akhmad Rizal
 - 4) Kompi Daerah Negara Utara : Komd. Hamberan Ahmadi
 - 5) Kompi Daerah Padang Batung : Komd. Lasmuni
 - 6) Kompi Daerah Kandangan Hulu : Komd. Muktar
 - 7) Kompi Daerah Tabihi : Komd. Ma'rufi¹²⁶

Keadaan menjelang akhir tahun 1946, penuh dengan ketegangan, semangat perlawanan terhadap NICA yang menggelora di setiap pemuda pejuang, meskipun belum terkoordinasi dengan baik.

Isu tentang datangnya pasukan dari Jawa merupakan harapan yang selalu ditunggu-tunggu untuk mendapatkan bantuan persenjataan. Isu ini disambut dengan aksi sabotase pemutusan kawat-kawat telepon oleh pemuda-pemuda dan anggota BPPKI.

Spontanitas rakyat yang timbul menjelang akhir 1945 menghendaki pengendalian yang baik agar terkoordinasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. NICA melihat kelemahan-kelemahan ini dan memanfaatkan situasi untuk menghancurkan BPPKI. Pada tanggal 3 Januari 1947 NICA melakukan tindakan untuk menghancurkan perjuangan dengan cara penangkapan, penyiksaan dan penembakan terhadap pejuang-pejuang. NICA juga merampas segala benda yang berharga seperti emas dan perhiasan penduduk, bahkan juga merobek-robek kitab suci Al-Qur'an yang ditemukan.

Tekanan demi tekanan harus dihadapi rakyat Kalimantan Selatan, namun perlawanan tidak pernah surut. Rakyat telah satu tekadnya, apa pun yang terjadi, kemerdekaan harus diraih. Inilah gejala revolusi yang disemangati wacana "hijrah". Hijrah dari penindasan kolonialisme NICA kepada nasionalisme Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

D. PARTISIPASI RAKYAT KALIMANTAN SELATAN DALAM PERJUANGAN SOSIAL POLITIK

1. Terbentuknya Organisasi Massa dan Partai-Partai Politik

Tumbangnya kekuasaan Jepang di Kalimantan Selatan diiringi dengan munculnya aktivitas politik. Politik dijadikan trend bagi pembentukan legal formalnya kekuasaan. Tersirat suatu hasrat dari penguasa Jepang, untuk turut "andil" dalam proses alih kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia di Kalimantan Selatan. Di sinilah sebuah harga kekuasaan diharapkan Jepang dapat

¹²⁶ G.M. Yaman, *ibid.*, hal. 51.

menjadi “kutub” pengamanan bagi kedudukan mereka yang telah rapuh. Dengan demikian mereka dapat lengser dan mundur teratur secara aman, dan kemudian “pulang” ke negerinya.

a. Persatuan Rakyat Indonesia (PRI)

Berita penyerahan Jepang kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 semula tidak dirahasiakan oleh pihak Jepang. Pada hari yang menentukan itu Tuan Hayakawa, Borneo Minseibu Cokan, pemegang pemerintahan Jepang untuk daerah Kalimantan yang berkedudukan di Banjarmasin, memanggil tokoh-tokoh rakyat di daerah ini. Mereka yang diundang adalah Hadhariyah M, Mr. Rusbandi dan Pangeran Musa Ardikesuma. Dalam pertemuan itulah secara resmi Minseibu Cokan memberitahukan kepada tokoh-tokoh masyarakat tersebut bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Dan tentara Sekutu segera akan tiba di Banjarmasin untuk pengambil alihan kekuasaan di daerah ini.

Untuk menghadapi situasi yang akan terjadi, Minseibu Cokan juga menyarankan agar masyarakat di daerah ini mendirikan sebuah partai politik. Saran penguasa Jepang yang simpatik tersebut kemudian terwujud dengan terbentuknya organisasi Persatuan Rakyat Indonesia; oleh Mr. Rusbandi kepengurusannya disusun sebagai berikut :

Ketua	: Pangeran Musa Ardikesuma
Wakil Ketua	: A.Ruslan
Sekretaris I	: Hadhariyah M.
Sekretaris II	: Abu bakar
Bendahara	: Abdul Latief
Pembantu	: Amir Hasan Bondan

Susunan kepengurusan PRI diresmikan dalam suatu rapat yang dihadiri beratus-ratus orang pada tanggal 16 Agustus 1956 bertempat di gedung Osaka Gekijo di Banjarmasin. Pertemuan para tokoh masyarakat yang tergabung dalam Partai Persatuan Rakyat Indonesia tersebut dipimpin oleh Aidan Sinaga.

Untuk pengembangan organisasi ini hingga mencapai ke daerah-daerah, maka oleh Pengurus Besar PRI dibentuk cabang-cabangnya masing-masing di daerah Martapura, Rantau, Kandangan, dan Amuntai. Jabatan ketua masing-masing cabang tersebut dipegang oleh Gonco/ Kiai setempat. Untuk cabang PRI Banjarmasin jabatan ketua dipegang oleh Dokter Soeranto dan Sekretaris oleh E.S. Handoeran.

Perkembangan PRI selanjutnya adalah dibentuknya organisasi-organisasi pemuda PRI dan wanita PRI, yang keduanya berfungsi sebagai penunjang organisasi induknya.

PRI sebagai suatu organisasi yang mencita-citakan berdirinya Indonesia merdeka sempat melakukan rapat umum dan dengan marah menyesalkan adanya ralat mengenai berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang telah dimuat dalam surat kabar Borneo Simboen pada tanggal 26 Agustus 1945. Organisasi pers yang lahir sewaktu Jepang masih berkuasa ini terus hidup hingga tentara Sekutu yang diwakili oleh tentara Australia datang ke daerah Kalimantan Selatan.

Satuan tentara Australia yang tiba di Banjarmasin pada tanggal 17 September 1945 ternyata diikuti oleh 160 orang NICA di bawah pimpinan Van Assenderp. Keikutsertaan mereka ini bermaksud hendak menyusun kembali kekuatan Belanda di daerah Kalimantan Selatan ini.

Sementara NICA mengatur siasat untuk masuk ke kantor-kantor pemerintah yang berada di Banjarmasin, beberapa orang anggota PRI sempat melakukan penyebaran pamflet-pamflet yang berasal dari 2 orang tentara Australia masing-masing bernama Charles Foster dan Victor Little dari Kompi X yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia saat itu. Para penyebar pamflet itu ditangkap NICA. Pengurus Besar PRI menyampaikan protes atas penangkapan itu sehingga yang bersangkutan kembali dibebaskan.

Peranan PRI yang terakhir adalah ketika mereka atas desakan para pemuda bertindak membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) daerah Kalimantan. Dengan cara mengumpulkan para Kiai selaku ketua PRI cabang di daerah-daerah dilaksanakan rapat di Banjarmasin pada tanggal 5 Oktober 1945, di sebuah rumah di Andalas Banjarmasin untuk membentuk KNI daerah dimaksud. Hasilnya adalah untuk ketua PRI ditetapkan Pangeran Musa Ardikesuma, sedangkan dalam kepengurusan KNI daerah jabatan ketua dipegang oleh A. Ruslan, Penulis I dan II masing-masing Hadhariyah M. dan F. Mohani

Kepengurusan ini selanjutnya akan diresmikan di dalam suatu upacara di halaman Kantor Gubernur pada tanggal 10 Oktober 1945, tetapi ternyata usaha ini gagal. Demikian pula rencana yang sama yang akan dilakukan di daerah-daerah tidak berlangsung sebagaimana mestinya. Hal ini karena dihalang-halangi oleh tentara Australia yang didalangi NICA.

Sehubungan dengan itu Pengurus Besar PRI menghadap Kolonel Rabson komandan Tentara Australia di tempat tersebut ternyata sudah hadir Van Assenderp pimpinan NICA yang mengatur semua peristiwa tersebut. Setelah peristiwa ini tokoh-tokoh PRI berkesimpulan bahwa pertentangan dengan NICA tidak bisa dihindarkan lagi. Untuk tindakan selanjutnya perjuangan harus dilakukan melalui organisasi kelaskaran.

Kegagalan tokoh-tokoh PRI untuk meresmikan berdirinya KNI-Daerah sebagai tanda berdirinya Republik Indonesia di Kalimantan Selatan ini dengan mengadakan rapat umum di halaman Gubernuran,¹²⁷ memicu unjuk kekerasan oleh rakyat.

Pada Kamis malam tanggal 1 ke 2 November 1945 terjadi penyerangan ke titik-titik vital Belanda walaupun kurang berhasil; kemudian Jumat siang pecah Pemberontakan 9 November 1945 (Amin Effendi dan kawan-kawan) yang meminta banyak korban jiwa.¹²⁸ Peristiwa ini memaksa sejumlah tokoh PRI mengungsi ke Jawa dan sebagian lagi bergabung dalam organisasi-organisasi kelasykaran di pedalaman.

b. Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI) dan SERMI

Setelah menghilangnya tokoh-tokoh pimpinan organisasi politik yang bergabung dengan PRI, NICA mulai berhasil menanamkan kekuasaannya kembali di daerah Kalimantan Selatan; sejak itu terjadilah kekosongan perjuangan di jalur politik. Sebaiknya dapat dirasakan pula api perjuangan fisik mulai bertambah panas.

Menjelang awal tahun 1946 pemuka-pemuka masyarakat yang tampil pada waktu itu merasakan makin gencarnya perjuangan yang ditandai dengan lahirnya organisasi politik. Adanya kekosongan perjuangan melalui bidang politik yang bersifat legal ini dipandang sementara tokoh perjuangan sebagai suatu kepincangan yang tidak menguntungkan. Tokoh-tokoh yang dikenal sebagai golongan Republik ini berpendapat bahwa ketidak ikut sertaan orang bumi putra dalam merencanakan dan menentukan segala program mereka yang berkuasa, sama saja dengan membiarkan mereka bertindak sewenang-wenang. Karena itu dimana ada wadah hak untuk memberikan suara dan pendapat harus dimanfaatkan.

Maka oleh beberapa tokoh masyarakat antara lain, Dokter St. T. Diapari, A.A. Rivai, A. Sinaga, dibentuklah Partai Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI) pada tanggal 19 Januari 1946 di Banjarmasin. Partai ini dinyatakan sebagai suatu lanjutan dari PRI yang lalu. Tujuan Partai ini

¹²⁷ Yang dimaksud dengan "Gubernuran" ialah kediaman resmi Dr. B.J. Haga, Gubernur Gwest Borneo sebelum balatentara Jepang masuk dan menduduki daerah ini. B.J. Haga adalah gubernur pertama dan terakhir untuk Borneo.

¹²⁸ Pertempuran 9 November 1945 di Banjarmasin ini diabadikan dalam perangko seri 30 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1975.

jelas mencantumkan hendak mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945 melalui perjuangan Parleментар.¹²⁹

Dari tujuan tersebut jelas SKI merupakan wadah perjuangan orang-orang Republik di Kalimantan Selatan, yang pada masa-masa perjuangan selanjutnya berusaha menggagalkan pembentukan Negara Kalimantan sebagai realisasi dari ide federalisme Van Mook dalam rangka politik *divide et impera*-nya.

SKI dalam perjuangannya mendapat dukungan dari Serikat Muslimin Indonesia (SERMI), sebuah organisasi sepaham yang bercirikan keagamaan. SERMI didirikan oleh tokoh-tokoh Republikan yang berasal dari golongan agama. Gagasan pembentukan organisasi politik tersebut lahir dari SKI, karena SERMI dalam perjuangannya mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945 berjalan bahu-membahu dengan SKI. Untuk kepentingan itu dibentuklah suatu Badan Koordinasi SKI –SERMI, yang berperan mencetuskan kesepakatan dalam menjalankan taktik perjuangan menentang ide federalisme Van Mook.

Salah satu siasat yang dicetus Badan Koordinasi kedua organisasi politik ini bersedia ikut dalam Dewan Banjar yang dibentuk NICA untuk secara Parleментар berusaha menggagalkan rencana pembentukan Negara Kalimantan, salah satu Negara bagian dalam Negara Indonesia Serikat.

NICA juga berusaha dengan berbagi siasat dan tipu daya untuk memecah belah para pejuang, dengan menggunakan berbagai cara yang sesuai dengan kondisi dan situasi Kalimantan Selatan pada saat itu.

Salah satu usaha NICA untuk memecah umat Islam di Kalimantan Selatan yang di kenal dengan berbagai umat yang taat beragama adalah dengan mendatangkan seorang orientalis yang fasih berbahasa Arab dan menguasai Tafsir Al-qur'an, yaitu Van der Plas ke Kalimantan Selatan.

Di antara beberapa ulama yang dijumpai Van der Plas adalah Tuan Guru H. Muhammad Jafar bin Abdussamad di kampung Pakan Dalam Negara. Ulama ini dibujuk agar bersedia membantu Belanda dengan menawarkan jabatan Qadi Besar, serta fasilitas-fasilitas lainnya seperti mendapatkan mobil dan kemudahan lainnya. Namun bujukan dimaksud ditolak oleh ulama tersebut. Tokoh ulama lain yang di bujuk seperti itu adalah Tuan Guru H. Muhammad Arsyad, tokoh pimpinan SERMI di Kandangan. Bujukan tersebut ia tolak.

Adanya dua partai politik yang berjuang secara legal menuntut tegaknya kemerdekaan bangsa Indonesia ini dirasakan juga kendala bagi NICA dalam usaha mereka menanamkan kekuasaannya kembali di daerah ini. Melihat kenyataan ini maka NICA berusaha menghasut salah seorang tokoh SERMI yakni H. Abdurrahman Siddik. Upaya NICA berhasil, ketika H. Abdurrahman Siddik keluar dari SERMI, dan dengan fasilitas yang diberikan NICA akhirnya berhasil mendirikan partai Islam pro NICA sebagai saingan SERMI, yakni bernama SRI (Serikat Rakyat Islam) pada tanggal 2 Juli 1947 di Banjarmasin.¹³⁰

Organisasi-organisasi politik tersebut di atas, terutama SKI selanjutnya menentukan arah jalannya politik daerah ini, kemudian diikuti pula oleh lahirnya organisasi-organisasi maupun politik lainnya seperti Pertiwi, PNI, Parindra, Partindo, dan perkumpulan-perkumpulan yang bercirikan kesukuan lainnya. Ketika Dewan Banjar dibentuk oleh NICA, masing-masing organisasi dan perkumpulan dimaksud umumnya mempunyai wakil-wakil di dalam Dewan tersebut.

2. Pembentukan Daerah Otonomi

¹²⁹ Kementerian Penerangan RI, *Kepartaian di Indonesia*, Pepora 8, hal. 230.

¹³⁰ Kementerian Penerangan RI, *Kalimantan dan Pergolakan*, Jakarta, 1950, hal 10.

Menjelang masa akhir tahun 1945 tentara Sekutu yang bertugas melucuti tentara Jepang secara berangsur-angsur menyerahkan kekuasaannya atas Indonesia tersebut kepada NICA. Dengan kembalinya kekuasaan NICA di Indonesia, maka mereka segera melakukan penyusunan ketatanegaraan bagi negeri ini. Dengan dalih hendak menyelenggarakan suatu pemerintahan yang bersifat demokratis, yakni pemerintahan bersama-sama rakyat, maka perlu dibentuk dewan-dewan pada tiap-tiap daerah.¹³¹

Sehubungan dengan hal ini pemerintah NICA menerbitkan ketetapan-ketetapan baru dalam pengaturan di bidang pemerintahan. Ketetapan-ketetapan itu meliputi :

- a. Ordonnantie tanggal 13 Februari 1946 Staatsblad 1946 No. 17
- b. Ordonnantie tanggal 14 Februari 1946 Staatsblad 1946 No. 18
- c. Ordonnantie tanggal 9 April Staatsblad 1946 No. 27

Khusus untuk daerah Kalimantan, maka berdasarkan Staatsblad 1946 No. 17 kemudian dibentuk daerah-daerah :

- 1) Daerah Otonomi (*Zelfbestuur*) Meliau : Nangah Pinoh dan Kapuas Hulu untuk Kalimantan Barat.
- 2) Daerah Otonomi (*Zelfbestuur*) Dayak Besar : Pulau Laut, Pagatan dan Cantung Sampanahan, ketiga daerah yang terakhir ini kemudian tergabung dalam daerah Kalimantan Tenggara.
- 3) Daerah Otonomi (*Zelfbestuur*) Pasir di Kalimantan Timur.¹³²

Upaya untuk merealisasikan susunan ketatanegaraan, dimulai dengan menyelenggarakan konferensi pertama di kota Malino dekat Makassar pada tanggal 15 Juli 1946 sampai tanggal 25 Juli 1946. Dalam konferensi ini NICA berusaha mematangkan jiwa federal orang-orang yang menghadirinya.

Ditegaskan bahwa suatu negara federal akan menjamin hidupnya masing-masing golongan serta perkembangan setiap anggotanya secara bebas. Ke dalam akan menjamin kebebasan bertindak serta kemerdekaan masing-masing negara bagian. Ke luar menjamin persatuan yang kuat dan teguh.

Dalam Konferensi Malino, Kalimantan Selatan diwakili 4 orang utusan yang ditunjuk oleh Residen, yaitu seorang dari Dayak Besar, seorang dari Martapura, seorang dari Kandangan dan seorang lagi dari Kotabaru.¹³³

Keputusan yang dihasilkan dalam konferensi ini adalah :

- a. Pembentukan daerah-daerah otonomi dalam tingkatan yang sama dengan *Zelfbestuur* Landschappen.
- b. Pembentukan negara-negara.

Usaha mewujudkan federalisme dan pembentukan daerah-daerah otonomi dilanjutkan dengan mengadakan konferensi Golongan Minoritas pada tanggal 1 Oktober 1946 di Pangkal Pinang. Penegasan Van Mook bahwa Belanda akan menjamin kepentingan dan hak-hak golongan minoritas, menghasilkan keputusan bahwa mereka mendukung keputusan Malino dan menerima azas federal.

Selanjutnya Van mook berhasil melakukan perundingan dengan pihak Republik sebelum melangkah pada ketetapan pembentukan negara-negara seperti yang di putuskan dalam konferensi Malino dan Pangkal Pinang. Perundingan-perundingan itu dikenal sebagai perundingan yang merugikan persatuan bangsa Indonesia.

¹³¹ Ramli Nawawi, "Dewan Banjar", Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, Banjarmasin, 1972, hal. 14.

¹³² Jawatan Penerangan, *Keresiden Borneo Selatan*, Susunan Tata Negara, hal. 18.

¹³³ Ramli Nawawi, *op.cit.*, hal. 18.

Perundingan selanjutnya di Linggajati yang diselenggarakan tanggal 15 November 1946 menetapkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah Serikat (federasi). Negara Republik Indonesia adalah bagian dari Negara Serikat.

Berdasarkan persetujuan yang ditandatangani tersebut NICA berusaha merealisasikan berdirinya negara-negara bagian yang dikuasai NICA. Sehubungan dengan itu tokoh-tokoh federal Indonesia Timur dan Nusa Tenggara mendekritkan berdirinya Negara Indonesia Timur pada tanggal 24 Desember 1946.

Persetujuan Linggajati kemudian dilanggar oleh Belanda dengan melakukan Agresi Militer I pada tanggal 21 Juli 1947. Akibatnya banyak daerah-daerah Republik yang diduduki oleh NICA. Bahkan dalam kesempatan itu Van Mook meresmikan berdirinya Negara Sumatera Timur pada tanggal 25 Desember 1947.

Atas dasar jasa-jasa baik Komisi Tiga Negara diadakanlah perundingan Indonesia-Belanda pada tanggal 17 Januari 1948. Perundingan yang dilakukan di atas kapal Renville itu kemudian disebut Persetujuan Renville. Persetujuan yang ditandatangani oleh Van Mook dan perdana Menteri Indonesia Mr. Amir Syarifuddin memutuskan akan diadakan plebisit di daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Belanda. Tetapi ternyata Belanda tidak melaksanakan plebisit di daerah-daerah yang disepakati tersebut. Bahkan Van Mook terus melaksanakan pembentukan negara-negara bagian yang menjadi boneka Belanda, seperti : Negara Madura pada tanggal 20 Februari 1948, Negara Pasundan pada tanggal 24 April 1948, Negara Sumatera Selatan pada tanggal 30 Agustus 1948, sehingga sejak Persetujuan Renville tersebut Indonesia terbagi atas dua bagian :

- a. Daerah Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta
- b. Daerah federal dengan Badan Permusyawaratan Federalnya atau BFO (*Bijeenkomst voor Federaal Overleg*).

BFO mempunyai susunan keanggotaan sebanyak 15 orang berasal dari 15 daerah federal bentukan Belanda, masing-masing terdiri dari :

DAERAH	WAKIL DI BFO	JABATAN DALAM BFO
Kalimantan Barat	Sultan Hamid II	Ketua
Indonesia Timur	Ida Anak Agung Gde Agung	Wakil Ketua I
Madura	Dokter Suparmo	Wakil Ketua II
Banjar	A.A. Rivai	Anggota
Bangka	Saleh Ahmad	Anggota
Belitung	K.A. Moh. Jusuf	Anggota
Dayak Besar	Mochran bin Haji Moh. Ali	Anggota
Jawa Tengah	Dokter R. Sudjito	Anggota
Jawa Timur	R. Tg. Djuwito	Anggota
Kalimantan Tenggara	M. Jamani	Anggota
Kalimantan Timur	Adji Pangeran Sosronegoro	Anggota
Pasundan	Mr. R. Tg. Djumhna Wiriatmaja	Anggota
Riau	Radja Muhammad	Anggota
Sumatera Selatan	Abdul Malik	Anggota
Sumatera Timur	Radja Kaliamsjah Sinaga	Anggota

Di Kalimantan penduduknya hidup dalam kelompok-kelompok yang terpisah. Keadaan alamnya yang terdiri dari hutan, rawa atau pegunungan yang sukar dijalani oleh manusia menyebabkan penduduk di negeri ini mempunyai banyak perbedaan-perbedaan. Van Mook dalam mewujudkan politik Divide et Impera-nya memerlukan suatu desentralisasi.

Di samping itu, Van Mook sejak awal telah melihat kenyataan adanya tantangan dari rakyat di daerah ini terhadap ide federalisme yang akan ditanamkan tersebut. Tantangan ini berupa adanya mosi rakyat di beberapa daerah yang menyatakan bahwa mereka masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mosi-mosi tersebut antara lain :

- 1) Mosi rakyat Pagatan/Pulau Laut dan Tanah Bumbu, tanggal 6 Desember 1945
- 2) Mosi rakyat Pangkalanbun (Daerah Istimewa Kotawaringin), tanggal 17 Desember 1945
- 3) Mosi seluruh Pegawai Pemerintah daerah Kotawaringin, tanggal 27 Desember 1945
- 4) Keputusan dari Komite Nasional Indonesia Daerah Kalimantan Selatan

Atas pertimbangan-pertimbangan itu Van Mook lebih menghendaki agar Negara Kalimantan tersebut terbentuknya seolah-olah atas kehendak rakyat Kalimantan sendiri.

Perwujudan dari rencana yang disusun dengan segala macam siasat ini adalah terbentuknya daerah-daerah otonomi di Kalimantan berdasarkan Staatsblad No. 17. Dan sebagai kelanjutan dari peraturan itu kemudian dibentuk :

- 1) Pada tanggal 12 April 1947 daerah-daerah otonom di Kalimantan Timur digabungkan menjadi daerah Kalimantan Timur dengan Dewan Kalimantan Timurnya
- 2) Pada tanggal 12 Mei 1947 daerah-daerah otonom di Kalimantan Barat digabungkan menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Barat, dengan Dewan Kalimantan Baratnya. Keistimewaan daerah ini telah mempunyai derajat yang sama dengan Negara Bagian.
- 3) Di Kalimantan Selatan masing-masing terbentuk :
 - a. *Zelbesturend Landschap* (Daerah Kerajaan) Kotawaringin.
 - b. Pada tanggal 7 Desember dibentuk daerah Dayak besar dengan Dewan Dayak Besarnya (Staatsblad 1946 No. 134).
 - c. Tiga daerah otonom Pulau Laut, Pagatan dan Cantung Sampanahan yang dibentuk pada tanggal 18 Januari 1947, telah digabungkan menjadi daerah Kalimantan Tenggara dengan Dewan Kalimantan Tenggaranya pada tanggal 27 Maret 1947 (Staatsblad 1947 No. 3). Khususnya untuk daerah ini hasil plebisitnya yang menghendaki Kalimantan Tenggara tetap sebagai daerah Republik Indonesia, oleh Van Mook ditetapkan di atas dirubah dengan ketetapan Staatsblad 1947 No. 112 Jo. Staatsblad 1948 No. 189 dibentuk *Nieuw Swapraja* (*Neo Landschap*) Pulau Laut, *Nieuw Swapraja* (*Neo Landschap*) Pasir, *Nieuw Swapraja* (*Neo Landschap*) Pagatan, dan dengan Staatsblad 1947 No. 37 Jo Staatsblad 1948 No. 59 dibentuk *Nieuw Swaparaja* (*Neo Landschap*) Cantung Sampanahan. Dengan demikian maka Kalimantan Tenggara berstatus kenegaraan yang tegak sendiri dengan nama Negara Kalimantan Tenggara yang termasuk daerah bagian Republik Indonesia Serikat.¹³⁴

Dengan terbentuknya daerah-daerah otonomi dan Dewan-dewan tersebut di atas maka usaha Van Mook dalam mewujudkan ide federalisme di Kalimantan boleh dikatakan berhasil. Hanya tinggal menghadapi rakyat di daerah Banjarmasin dan Hulu Sungai yang sejak dahulu bersikap menolak pembentukan daerah otonom (*Zelfbestuur*) seperti yang telah di putuskan berdasarkan Staatsblad 1946 no. 17.

¹³⁴ Pemerintah Kab Dati II Kotabaru, *Seperangkat Abad Dati II Kotabaru*, Kotabaru, 1975, hal 29.

3. Aktivitas Partai-Partai Politik Mempertahankan Pemerintah Republik Indonesia

NICA menyadari adanya sikap pembakangan dari rakyat daerah Banjarmasin dan Hulu Sungai di Kalimantan Selatan. Tidak terlaksananya *ordonnantie* tanggal 13 Februari 1946 *Staatsblad* 1946 No. 17 untuk pembentukan daerah otonom Banjar, menyebabkan Van Mook perlu menjalankan siasat khusus di daerah ini. Tindakan Belanda dalam hal ini antara lain :

- 1) Menugaskan Dr. Eisenberger untuk mengadakan kampanye kepada tokoh-tokoh rakyat di daerah ini agar mereka memberikan dukungan terhadap rencana pembentukan Negara Kalimantan.
- 2) Mendatangkan Sultan Hamid II, tokoh federalis dari Kalimantan Barat dengan tujuan mempengaruhi pemimpin-pemimpin dan rakyat di daerah ini, agar dapat menyetujui ide federalisme guna mewujudkan Negara Kalimantan.
- 3) Mendirikan organisasi politik SRI (Serikat Rakyat Islam) yang menjadi tandingan SKI-SERMI.

SKI yang menolak federalisme seperti disebutkan di atas, dan kemudian didukung oleh SERMI selaku partner di dalam Badan Koordinasi Kemerdekaan, telah mulai mengadakan rapat-rapat pembahasan tentang perkembangan politik akibat beleid yang ditempuh SRI/Belanda dengan adanya sikap memihak dari SKI dan adanya dukungan yang sejak lama diperlihatkan oleh golongan Pamong Praja, mulai mengadakan persiapan-persiapan ke arah pembentukan daerah otonom Banjar dengan membentuk Dewan Banjarnya. Menanggapi hal ini SERMI segera mengadakan konferensi kilat pada tanggal 15 Juli 1947 di Banjarmasin, dengan keputusan-keputusan sebagai berikut :

SERMI dapat menyetujui pembentukan daerah otonom Banjar dan Hulu Sungai dengan syarat-syarat :

- 1) Daerah Otonom Banjarmasin dan Hulu Sungai, Dewannya harus dibentuk dengan sedemokratis-demokratisnya.
- 2) Ketua Dewan harus orang Indonesia
- 3) Anggota Dewan ditetapkan melalui pemilihan
- 4) Banjarmasin dan Hulu Sungai tetap satu daerah otonom
- 5) Dewan harus mempunyai kekuasaan yang seluas-luasnya¹³⁵

SKI dalam suatu konferensinya untuk menanggapi usaha-usaha rencana pembentukan Dewan Banjar oleh Belanda ini, mengeluarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Menyadari bahwa Dewan Banjar ini dibentuk juga oleh Belanda
- b. Sementara itu melihat bahwa Dewan-dewan daerah lain hanya dibentuk oleh Belanda dengan cara penunjukan saja. Maka SKI memutuskan bersedia turut dalam Dewan Banjar dengan syarat Dewan itu dibentuk secara demokratis, yaitu dengan mengadakan pemilihan.¹³⁶

Selanjutnya untuk memperkuat tuntutan atas sikap yang diambil oleh SKI maupun SERMI itu, maka Badan Koordinasi SKI-SERMI beserta dengan wakil-wakil dari organisasi bawahannya mengadakan pertemuan pada tanggal 16 September 1947 di pasar Lama Banjarmasin. Pertemuan ini menghasilkan keputusan suatu resolusi yang disampaikan kepada Residen Belanda di Kalimantan Selatan. Resolusi tersebut antara lain memuat :

I. Bentuk Dewan Otonom (Dewan Banjar) :

- 1) Ketua harus bangsa Indonesia
- 2) Hak Dewan diberi seluas-luasnya
- 3) Daerah Otonom meliputi Banjarmasin dan Hulu Sungai

¹³⁵ Keputusan Konperensi Kilat SERMI, tanggal 15 Juli 1947.

¹³⁶ Kepartaian di Indonesia, *op.cit.*, hal 232.

II. Cara pembentukan Dewan harus diselenggarakan atas dasar demokrasi yang seluas-seluasnya :

- 1) Wakil-wakil bangsa Indonesia ditetapkan dengan pemilihan (bukan diangkat) dan keanggotaan golongan asing terserah kepada Pemerintah.
- 2) Wakil-wakil yang diangkat seboleh-bolehnya ditiadakan.
- 3) Hak dipilih (*passief kiesrecht*) diluaskan, hingga orang-orang Indonesia yang berada di luar daerah.¹³⁷

Resolusi Badan Koordinasi SKI-SERMI diterima oleh Belanda, terlepas dari kemungkinan hanya sebagai siasat. Dari notulen pelaksanaan pemilihan yang dilakukan digambarkan bahwa sesudah pemilihan 60% dari kursi Dewan Banjar direbut oleh blok Republiken, tetapi itu telah menjadi 45 % ketika diadakan tambahan dari angkatan pihak yang berkuasa.¹³⁸

Dukungan dan kesediaan ikut serta dalam pembentukan Dewan ini bagi tokoh-tokoh SKI dan SERMI adalah atas dasar keyakinan bahwa melalui Dewan itu akan dapat menggagalkan atau setidaknya membelokkan apa yang menjadi tujuan NICA. Persetujuan ini diberikan setelah cukup pertimbangan dan perhitungan dari A. Sinaga, A.A. Rivai, dan E.S. Handoeran sebagai orang-orang Republiken, setelah mengadakan konsultasi dengan Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta.

Siasat dan syarat yang akan diperjuangkan oleh golongan Republiken dengan ikut serta menyusun peraturan pemilihan, akan menyebabkan Dewan tersebut lebih akan menguntungkan perjuangan Republiken di daerah ini khususnya dan perjuangan bangsa Indonesia pada umumnya. Atas dasar keyakinan bahwa siasat dan syarat ini akan berhasil diperjuangkan maka Wakil Presiden Drs. M. Hatta menganjurkan "Bentuklah Dewan itu dan sedapat mungkin peraturan pemilihan harus diperjuangkan, agar partai turut menyusunya".¹³⁹

Dengan adanya persetujuan dari golongan Republiken tersebut maka Pemerintah NICA mengeluarkan Besluit Pembentukan Daerah Banjar dan juga Dewan Daerah Banjarnya, yakni :

- 1) Besluit Pembentukan Daerah Banjar, tanggal 14 Januari 1948 Staatsblad 1948 No. 14
- 2) Besluit tambahan pembentukan Daerah Banjar, tanggal 24 juni 1948 No. 2 Staatsblad 1948 No. 124.

Setelah segala persiapan selesai, pemilihan untuk menentukan anggota-anggota Dewan segera dilaksanakan, di samping ada anggota-anggota yang langsung diangkat oleh Residen. Anggota-anggota yang telah dipilih dan diangkat tersebut, pada tanggal 3 Juli 1948 bertempat di *Societeit de Kapel* Banjarmasin dilakukan pelantikan oleh Residen.

Dewan Banjar yang dibentuk tahun 1948 tersebut mempunyai struktur sebagai berikut :

- 1) Ketua dan Sekretaris Dewan.
- 2) Anggota-anggota Dewan
- 3) Majelis Pengurus Harian (MPH)

Ketua Dewan Banjar yang pertama yaitu Mohammad Hanafiah, Kiai Kepala Kelas I Martapura, adalah angkatan Residen yang bersifat sementara. Selanjutnya sesuai dengan syarat-syarat pembentukan yang diajukan Badan Koordinasi SKI-SERMI, maka Ketua Dewan akan ditentukan melalui pemilihan yang dilakukan oleh anggota-anggota Dewan.

Di dalam pemilihan yang dilakukan ternyata bahwa jabatan Ketua Dewan tetap dipegang oleh Mohammad Hanafiah, walaupun sebelumnya ada usaha-usaha pihak NICA untuk mendudukkan orang-orang yang mempunyai ide federalisme. Adanya usaha-usaha dari Pemerintah NICA dengan secara tidak langsung mencalonkan orang-orang federalis, ini menyebabkan golongan Republiken mengambil langkah untuk mendudukkan kembali ketua sementara Mohammad Hanafiah sebagai

¹³⁷ Hasil Pertemuan Badan Koordinasi SKI – SERMI, tanggal 15 September 1947.

¹³⁸ Kementerian Penerangan RI, Kepartaian di Indonesia, *op.cit.*, hal 34.

Ketua Dewan. Pada pemilihan yang dilangsungkan beliau telah mendapat dukungan 21 suara dari golongan Republikan.¹⁴⁰

Jumlah anggota Dewan Banjar yang dibesluitka ketika dilakukan pelantikan berdirinya Dewan tersebut adalah 41 orang yaitu 10 orang diangkat langsung oleh Residen dan 31 orang dibesluitka setelah dinyatakan terpilih dalam suatu pemilihan. Kemudian jumlah ini bertambah dengan 7 orang dari anggota yang terpilih. Sehingga jumlah seluruhnya menjadi 48 orang anggota.¹⁴¹

Para anggota yang diangkat tersebut adalah pimpinan partai atau organisasi, pimpinan golongan atau perusahaan atau orang-orang yang dianggap terkemuka di masyarakat. Para anggota yang dipilih oleh rakyat adalah mereka yang orang Republikan dan akan memperjuangkan Indonesia Merdeka.

Pemilihan anggota-anggota Dewan Banjar mempergunakan sistem pemilihan bertingkat (*getrapte verkiezing*). Satu daerah lingkungan (*kieskring*) dibagi atas beberapa daerah kecil berdasarkan jumlah kurang lebih 100 orang penduduk yang memenuhi syarat-syarat sebagai pemilih.

Tiap-tiap daerah kecil ini memilih kepala pemilih (*kiezer*). Kepala pemilih inilah yang kemudian dalam suatu rapat memilih seseorang calon yang akan mewakili daerah lingkungan (*kieskring*) tersebut dalam Dewan.

Untuk memenangkan pemilihan baik pihak golongan Republikan (SKI-SERMI) maupun orang-orang NICA menjalankan siasatnya masing-masing. Pemimpin-pemimpin SKI di Banjarmasin mengadakan kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah untuk mendapatkan dukungan bagi calon-calon dari anggota Republikan. Sebaliknya Belanda berjuang untuk menggagalkannya.

Pada pemilihan di daerah lingkungan Amandit Selatan¹⁴² ketika hasil pemilihan dimenangkan oleh calon dari SKI maka pemerintah Belanda berusaha membatalkan keputusan itu dengan memeralat (memaksa) seorang pemilih untuk mengaku telah disogok oleh orang SKI. Tetapi dalam pemilihan ulang yang diadakan kemudian kemenangan tetap di pihak calon dari SKI.¹⁴³

Dipandang dari sifat koordinasi partai-partai/organisasi yang ada pada waktu itu yang bersedia ikut membantu Dewan tetapi dengan mengemukakan syarat-syarat tertentu, merupakan siasat perjuangan yang nampaknya mengambil sikap pro politik Pemerintah Belanda pada waktu itu. Sikap dari partai-partai dan organisasi-organisasi ini merupakan garis perjuangan yang harus ditempuh oleh para anggota Dewan yang mewakili partai atau organisasi tersebut.

Ketika persoalan dewan sampai kepada rencana pembentukan Negara Kalimantan, anggota-anggota dari golongan Republikan sudah dalam keadaan terdesak. Hal ini dikarenakan adanya tindakan-tindakan pemerintah Belanda seperti :

- a. Mengadakan penambahan anggota yang diangkat, sehingga memperkecil persentase anggota golongan Republikan dari 60% menjadi 45%.
- b. Pembentukan Negara Kalimantan sengaja dituangkan oleh pemerintah Belanda dari atas, Dewan-dewan yang ada di Kalimantan diundang oleh pemerintah kolonial untuk membicarakan hal itu.

¹³⁹ Kementerian Penerangan RI, *ibid.*, hal. 37.

¹⁴⁰ Kementerian Penerangan RI, *ibid.*, hal. 47.

¹⁴¹ Kementerian Penerangan RI, *ibid.*, hal. 42.

¹⁴² Kecamatan Simpur di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekarang.

¹⁴³ Kementerian Penerangan RI, *ibid.*, hal. 43.

Rakyat di daerah ini yang selalu berjuang menolak federalisme, telah melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan tertundanya perwujudan Negara Kalimantan yang dianjurkan Belanda itu.

Sikap yang diambil partai-partai nonkoperasi di daerah ini ketika Belanda telah mendapat dukungan dari golongan-golongan dan partai yang bersikap koperasi maka pertimbangan yang dianggap menguntungkan adalah merubah sikap perjuangan tersebut. Ketika ide pembentukan Negara Kalimantan memasuki acara-acara persidangan dalam Dewan Banjar, tidak ada suara-suara dalam Dewan yang menentanginya. Hal ini karena beberapa hal, antara lain :

- a. Para anggota Dewan dari golongan Republikan, terancam jiwanya atau takut ditangkap oleh Polisi Belanda, karena yang dibicarakan tersebut adalah suatu yang dituangkan dari atas.
- b. Para anggota golongan Republikan menyadari bahwa tantangan yang akan mereka lakukan hanya akan menghasilkan suatu yang sifatnya sia-sia, karena jumlah persentase mereka lebih kecil, dan tambah merosot lagi dengan adanya anggota-anggota dari golongan Republikan yang tidak hadir atau dikirim sebagai anggota delegasi yang menghadiri konferensi Wali-wali Negara di Bandung.
- c. Anggota-anggota dari golongan Republikan menganggap bahwa berjuang secara diam-diam adalah lebih menguntungkan.

Karena tidak adanya ketegasan dari anggota-anggota golongan Republikan tersebut, maka pada sidang tanggal 25 November 1948 Dewan Banjar berhasil membentuk Panitia Mempelajari Rancangan Susunan Tata Negara Kalimantan. Panitia ini telah mempelajari dan membahas segala sesuatu tentang rencana Konstitusi Negara Federasi Kalimantan tersebut, kemudian mengadakan sidang pada tanggal 25 ke 26 November 1948 dan telah berhasil menyusun dan mensahkan rencana Garis Besar Negara Kesatuan Kalimantan.¹⁴⁴

Demikianlah Dewan Banjar telah memutuskan, menyetujui pembentukan suatu Negara Kalimantan. Keputusan ini berisi Garis-garis Besar untuk delegasi Dewan Daerah Banjar ke Mukhtar daerah-daerah yang diadakan kemudian.

Sampai di sini Dewan Banjar telah ditanggapi benar-benar berfungsi sebagai mana yang dikehendaki oleh Kolonial Belanda. Karena itu logis apabila ada tuntutan-tuntutan dari pihak pemuda agar Dewan ini dibubarkan. Usul pembubaran itu berupa surat yang dikirim kepada sejumlah anggota Dewan Banjar yang diperhitungkan akan memihak perjuangan, yang isinya supaya mereka meninggalkan Dewan tersebut untuk membentuk Komite Nasional Indonesia Kalimantan Selatan. Surat-surat itu ditandatangani dengan stempel tanda tangan dari Gubernur Tentara yang diserahkan dan dipercayakan bagi keperluan perjuangan kepada Gusti Aman.¹⁴⁵

Surat usulan pembubaran itu disampaikan oleh P. Arya dan Gusti Aman melalui seorang anggota Dewan dari golongan Republikan bernama A. Hudari. Sehubungan dengan itu anggota-anggota Dewan dari partai SKI mengadakan rapat yang dihadiri juga oleh kedua tokoh ALRI Divisi IV tersebut. Anggota Dewan Banjar Zafry Zamzam menyatakan tidak setuju dengan usul pembubaran Dewan tersebut, dengan alasan tanpa Dewan Banjar di daerah ini tidak akan ada pengakuan pemerintah sendiri yang sah dari Belanda. Apabila Dewan Banjar dibubarkan maka Belanda dapat bertindak dengan bebas di daerah ini. Karena itu menurut Zafry Zamzam dari pada dibubarkan lebih baik Dewan Banjar memastikan diri sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Pemerintahan ALRI Divisi IV Kalimantan, dan ALRI Divisi IV supaya merebut kantor-kantor pemerintahan Belanda.¹⁴⁶

¹⁴⁴ Kementerian Penerangan RI, *ibid.*, hal 47.

¹⁴⁵ M. Idwar Saleh, *Nasionalisme dan Perjuangan Kemerdekaan di Kalsel*, dalam Majalah Vidya Karya, No. 2 th 70, hal 29.

¹⁴⁶ Ramli Nawawi, *op.cit.*, hal 55.

Rapat antara anggota-anggota Dewan dari partai SKI dengan tokoh-tokoh ALRI Divisi IV yang membicarakan soal pembubaran Dewan Banjar ini berakhir dengan tidak menemukan titik kesepakatan. Para pemimpin ALRI Divisi IV tetap menganggap bahwa Dewan Banjar adalah alat kolonial yang merugikan perjuangan rakyat di daerah ini, karena itu perlu dibubarkan. Sedangkan tokoh-tokoh Republikan yang duduk di Dewan ini tetap mempunyai arti yang tidak kecil, karena Dewan Banjar mempunyai sifat-sifat berbeda dari Dewan-dewan lainnya yang dibentuk Belanda di Kalimantan ini.

Dalam keadaan ketidaksepakatan ini di antara tokoh-tokoh Republikan masih ada yang menunjukkan arah perjuangan kepada sasaran yang semestinya. Tindakan-tindakan itu seperti :

- a. Seorang anggota Dewan bernama Hasan Basri menulis surat berupa mosi kepada Residen A.G. Deelman agar Gubernur Tentara Hassan Basry diberikan pengampunan agar bisa kembali ke tengah masyarakat. Mosi amnesti ini dijawab oleh Residen bahwa untuk hal itu harus disampaikan kepada Sri Ratu melalui Komisaris Tinggi Belanda di Batavia.
- b. Kiai A. Ruslan anggota harian Dewan Banjar diterima menjadi anggota markas Besar, tetapi diperintahkan untuk tetap di kantor Belanda dan untuk mengatur infiltrasi, menghubungkan masyarakat pejuang dengan masyarakat kota dan golongan terpelajar.¹⁴⁷

Di samping itu markas Besar ALRI Divisi IV mensinyalir bahwa lancarnya roda pemerintahan Belanda di daerah ini terletak pada tokoh-tokoh Kiai yang menjadi kuncinya. Karena itu Kiai Besar Raden diintimidasi dan dipaksa masuk ke pedalaman. Kiai Besar ini beserta pembantunya kemudian ditawan dengan paksa. Selanjutnya mereka dipaksa membuat surat untuk Wali Daerah M. Hanafiah. Surat itu meminta agar Wali Daerah datang ke pedalaman untuk membicarakan urusan di Kalimantan setelah Wali Daerah datang ke pedalaman, Kiai Besar Raden dan Kiai Kepala Basuni dan Wali Daerah tersebut membicarakan tentang pembentukan KNI Daerah.

Selanjutnya dari ALRI Divisi IV diterangkan sangat perlu dibubarkan Dewan Banjar. Sebagai gantinya segera dibentuk "Dewan Perwakilan Sendiri" yang dinamakan Komite Nasional Indonesia. Untuk mewujudkan itu maka Wakil Kepala Departemen Umum ALRI Divisi IV atas nama Gubernur Tentara membuat keputusan tentang pembubaran Dewan Banjar tersebut.¹⁴⁸

Selanjutnya dengan mempergunakan tiga tokoh kiai yang disimpan di Markas Selatan yang berpusat di Alam Roh ini dimana mereka dinyatakan telah resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Gubernur Tentara, telah banyak memberikan keuntungan bagi perjuangan.

Hal-hal yang menguntungkan itu antara lain :

1. Dengan surat perintah Wali Daerah, Komandan Pos Polisi Gambut dengan seluruh anak buah serta senjata yang dimiliki menggabungkan diri dengan Markas Selatan.
2. Dengan surat panggilan Wali Daerah, beberapa orang kiai dan pegawai sipil lainnya yang berkebangsaan Indonesia melarikan diri ke pedalaman.

Tindakan Markas Besar Selatan dengan mempergunakan tiga tokoh ini menyebabkan vakumnya Pangreh Praja NICA dari tokoh-tokoh politik penyalur kehendak NICA itu, maka Dewan Banjar yang didirikan NICA itu tidak lagi bisa berfungsi menurut garis politik dan strategi seperti yang mereka kehendaki.¹⁴⁹

Kegagalan pemerintah kolonial NICA mewujudkan Negara Kalimantan melalui Dewan-dewan bentukannya tersebut digambarkan oleh Ibrahim Sedar dalam naskahnya Nota Tentang Susunan Pemerintahan Kalimantan (1950) sebagai berikut : "Rencana Konstitusi selesai dikerjakan dalam awal tahun 1949, tetapi harus dirundingkan dan diputuskan lebih dahulu oleh Dewan-dewan daerah Kalimantan Barat, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur, tetapi

¹⁴⁷ M. Idwar Saleh, *op.cit.*, hal 35.

¹⁴⁸ M. Idwar Saleh *Ibid*, hal.17.

karena “kekacauan” yang terjadi di Kalimantan Selatan, demikian pula BFO dan BFC kerap kali mengadakan sidang, maka pembicaraan dan keputusan tentang rencana konstitusi itu tidak sempat diselenggarakan oleh Dewan-dewan Daerah, sampai penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949.¹⁵⁰

E. PERJUANGAN PERS REPUBLIKEN

1. Cikal Bakal Pers Perjuangan

Di Banjarmasin, sarana percetakan bekas surat kabar Borneo Simboen ternyata lebih dahulu dimanfaatkan oleh NICA untuk melahirkan Suara Kalimantan yang pro kepada penjajah. Berbeda halnya dengan sarana percetakan bekas surat kabar Jepang Borneo Simboen yang ada di Kandangan, oleh para tokoh pers setempat dapat dimanfaatkan untuk melahirkan koran tengah mingguan yang diberi nama “*Sinar Hoeloe Soengai*”

Perjalanan *Sinar Hoeloe Soengai* sebagai embrio pers perjuangan di daerah ini tidaklah berlangsung dengan mulus. Percetakan milik Jepang yang setelah berlangsung penyerahan Jepang kepada tentara Sekutu sebenarnya juga jatuh dan di bawah kekuasaan NICA. Sebab NICA berupaya mengambil alih percetakan untuk membuat pers pendukung kekuasaannya di Hulu Sungai.

Sehubungan dengan hal itulah NICA mencari tenaga-tenaga yang sebelumnya telah bekerja sebagai pengelola koran Borneo Simboen yang terbit di Kandangan, atau yang sebelumnya telah menangani sarana percetakan dimaksud. Mereka yang kemudian diminta untuk keperluan itu masing-masing adalah Merah Danil Bangsawan dan Haspan Hadna. Keduanya mendapat tugas untuk menerbitkan surat kabar edisi setempat.

Penyerahan sarana percetakan untuk penerbitan media massa NICA, pada mulanya menimbulkan keengganan mereka. Hanya dikarenakan nasihat dan jaminan tokoh-tokoh pejuang setempat seperti Zafry Zamzam dan H.M Rusli, maka penyerahan itu diterima saja untuk kemudian diatur siasat dalam melaksanakannya untuk kepentingan perjuangan. Kedua bekas wartawan Borneo Simboen (Merah Danil Bangsawan dan Haspan Hadna) akhirnya mau menerima penyerahan sarana percetakan tersebut dari Asisten Residen Hoogenberg dan Kiai Besar Merah Nadalsyah.

Selanjutnya untuk penerbitan koran *Sinar Hoeloe Soengai*, Merah Danil Bangsawan disertai tugas sebagai pemimpin umum dan Haspan Hadna sebagai pemimpin redaksi. Pada waktu itu mantan tokoh-tokoh wartawan Borneo Simboen Kandangan yang lain sudah tidak berada di tempat. H. Akhmad Basuni dan Asikin Zuhri telah berangkat ke Jawa, bergabung dalam organisasi “Ikatan Pejuang Kalimantan” di Yogyakarta.

Sebaliknya hubungan baik antara Merah Danil Bangsawan dengan Zafry Zamzam memungkinkan lahirnya media massa perjuangan lain di Kota Kandangan. Dengan bantuan berupa kertas dan tinta cetak sebagai modal pertama, Zafry Zamzam kemudian mempelajari lahirnya majalah Republik.

Sementara itu setelah ikut menangani kelancaran terbitnya *Sinar Hoeloe Soengai* kurang 8 bulan, Haspan Hadna atas persetujuan Merah Danil Bangsawan mengundurkan diri dari jabatan sebagai pemimpin redaksi. Kedudukan ini kemudian digantikan oleh Adonis Samat, keluarga Haspan Hadna. Masuknya Adonis Samat di *Sinar Hoeloe Soengai* ini berkaitan dengan usaha Haspan Hadna untuk mendirikan media massa lain, sebuah harian bernama *Kalimantan Berjuang*.

Semula kegiatan yang dilakukan dengan segala macam siasat ini tidak begitu saja dapat mengelabui pihak NICA. Hubungan kedua pengasuh *Sinar Hoeloe Soengai* yang akrab dengan

¹⁴⁹ M. Idwar Saleh, *ibid.*, hal. 18.

¹⁵⁰ Ibrahim Sedar, *op.cit.*, hal 21.

tokoh-tokoh pejuang tersebut menimbulkan kecurigaan bagi penguasa NICA setempat. Karena pengawasan selanjutnya dilakukan dengan ketat terhadap mereka, bahkan terhadap penerbitan *Sinar Hoeloe Soengai* dilakukan sensor yang keras oleh Asisten Residen maupun juga oleh Kiai Besar Merah Nadalsyah sendiri.

Kegiatan Merah Danil Bangsawan selaku pemimpin umum *Sinar Hoeloe Soengai* yang melakukan siasat membantu gerakan perjuangan, dan secara diam-diam ikut membantu lahirnya media massa perjuangan lain di daerah Hulu Sungai ini, akhirnya harus menanggung risiko. Dalam bulan Desember 1948, Danil Bangsawan ditangkap oleh penguasa NICA dengan tuduhan telah membantu gerakan perjuangan. Dan sejak peristiwa penahanan itu, pemimpin percetakan *Sinar Hoeloe Soengai* selanjutnya dipegang oleh Abdul Hamid.

Beberapa waktu setelah penahanan Merah Danil Bangsawan, kemudian terjadi peristiwa tragis yang menimpa percetakan surat kabar *Sinar Hoeloe Soengai*, tindakan pimpinan baru yang menolak permintaan pencetakan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan perjuangan dengan alasan takut ketahuan Belanda, menyebabkan kekecewaan para pejuang di daerah tersebut. Masalah inilah yang menjadi sebab terbakarnya percetakan koran *Sinar Hoeloe Soengai* beberapa waktu kemudian. Bersamaan dengan hancurnya sarana percetakan tersebut, maka berakhir pula riwayat surat kabar *Sinar Hoeloe Soengai* yang terbit di daerah ini.

2. Misi Perjuangan Majalah *Republik*

Seperti disebutkan di atas bahwa kesediaan Merah Danil Bangsawan duduk sebagai pemimpin redaksi surat kabar *Sinar Hoeloe Soengai* adalah atas saran dan jaminan Zafry Zamzam. Sebaiknya hubungan yang baik dan erat antara Merah Danil Bangsawan dan Zafry Zamzam memberikan jalan lahirnya sebuah media massa lain, yakni sebuah majalah bernama *Republik*. Bertindak sebagai pemimpin umum maupun sebagai pemimpin redaksi majalah baru ini adalah Zafry Zamzam sendiri.

Sebagai media massa yang lahir untuk kepentingan perjuangan membela Proklamasi 17 Agustus 1945, majalah ini secara sengaja melakukan penerbitan pertamanya bertepatan dengan hari ulang tahun yang pertama RI 17 Agustus 1946. Nomor perdana seolah-olah mengingatkan masyarakat akan Proklamasi Kemerdekaan yang telah berkumandang setahun yang lalu. Karena itu nomor itu memuat kembali secara lengkap teks Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 beserta dengan susunan kabinet RI yang pertama.

Tindakan pimpinan redaksi yang menempatkan tanggal penerbitan nomor perdana beserta ini majalah yang dimuat pada waktu itu, ditambah dengan nama majalah yang dipakai yakni *Republik*, secara jelas memberikan identitas misi perjuangan yang diemban media massa yang baru ini. Bahkan majalah ini selanjutnya secara berani memuat tulisan-tulisan berupa artikel yang menyerang tokoh-tokoh yang memihak Belanda. Majalah ini sering memuat naskah yang ditulis oleh Isah (sebenarnya nama samaran dari Zafry Zamzam sendiri). Penulis itu tanpa ragu-ragu menyerang tokoh partai Serikat Rakyat Islam (SRI) yang sebelumnya adalah seorang Republikan yakni sebagai pimpinan Partai Serikat Muslim Indonesia (SERMI), akan tetapi kemudian memihak penjajah. Sementara Pemimpin Redaksi Majalah *Republik* ini dikenal sebagai tokoh Partai Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI), sebuah partai Republikan yang menentang ide federalisme.

Sebagai tokoh politik dan tokoh perjuangan Zafry Zamzam kemudian mengizinkan A. Djabar berhenti dari Majalah *Republik* untuk membangun media massa lain. Bersama-sama dengan Haspan Hadna mereka kemudian membangun Harian *Kalimantan Berjuang*.

Dalam perjuangan hidupnya, Majalah *Republik* pernah mengalami kebangkrutan sebagai olah dari pembantu pimpinan redaksi yang tidak bertanggung jawab yang dilakukannya pada saat Zafry Zamzam pergi ke Jawa dalam rangka menghadiri sidang KNIP. Tetapi dengan kebesaran jiwa dan penuh kesabaran, secara berangsur-angsur majalah ini dapat dibangun kembali, sehingga dapat terbit kembali dengan normal mengunjungi langganan dan para pembacanya setiap sepuluh hari sekali.

Sikap yang ekstrim dari Majalah *Republik* yang menentang federalisme dan pembentukan Negara Kalimantan, rupanya tidak membuat Asisten Residen maupun Kiai Besar Merah Nadalsyah melakukan penahanan terhadap tokoh-tokoh majalah ini. Demikian berjalan selama lebih dari dua tahun, sampai pada suatu hari dalam bulan Desember 1948 Zafry Zamzam dijemput oleh tentara Belanda. Penangkapan terhadap tokoh pejuang sekaligus tokoh pers tersebut merupakan bagian dari Agresi Militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948, dalam rangka melumpuhkan perjuangan bangsa Indonesia yang pada saat itu sudah menghangat di seluruh tanah air.

Nampaknya sesudah penangkapan terhadap Zafry Zamzam tersebut, tidak ada tenaga penggerak lainnya dalam tubuh Majalah *Republik* yang berani menanggung risiko. Begitulah peristiwa sejarah lama, yakni apabila hilang seorang tokoh maka matilah suatu perjuangan. Dan dengan demikian berakhir pulalah riwayat kehidupan sebuah media massa perjuangan Majalah *Republik*.

3. Harian Kalimantan Berjuang Menentang Federalisme

Harian *Kalimantan Berjuang* adalah media hasil produk dari *Sinar Hoeloe Soengai* dan Majalah *Republik*. Seperti dikemukakan di atas bahwa tokoh-tokoh pelopor berdirinya Harian *Kalimantan Berjuang* adalah orang-orang dalam *Sinar Hoeloe Soengai* dan Majalah *Republik*. Bertidak sebagai pimpinan umum adalah A. Djabar bekas pembantu majalah *Republik*. Pemimpin redaksi dipegang oleh Haspan Hadna, bekas pemimpin redaksi *Sinar Hoeloe Soengai*. Tanggal penerbitan pertama Harian *Kalimantan Berjuang* adalah 1 Oktober 1946.¹⁵¹ Ada beberapa alasan yang menjadikan pertimbangan tokoh pers dalam membangun Harian *Kalimantan Berjuang* ini. Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain :

- a. Sampai dengan lahirnya Harian *Kalimantan Berjuang* tersebut, belum ada pers perjuangan yang terbit sebagai harian untuk membuat tandingan terhadap Suara Kalimantan, harian milik penjajah.
- b. Rakyat Kalimantan Selatan, khususnya di daerah Hulu Sungai pada waktu itu mempunyai semangat perjuangan yang menggelora, sehingga para tokoh pers di daerah tersebut mempunyai keyakinan akan mendapat dukungan dan simpati apabila lahir media massa baru yang berani menentang penjajah.¹⁵²

Harian yang dicetak stensilan ini dalam penerbitannya menempatkan Pancasila sebagai falsafah Negara, dan sebagai harian perjuangannya yang secara terang-terangan dapat dilihat dari namanya sendiri yakni "Kalimantan Berjuang", maka sejak hari penerbitannya langsung diawasi dengan ketat oleh penguasa tersebut, tetapi juga sampai terhadap tempat penerbitannya diawasi dengan ketat siang malam oleh mata-mata NICA. Bahkan setelah beberapa hari harian terbit, A.Djabar selaku pimpinan umum dipanggil dan mendapat peringatan keras dari Merah Nadalsyah Kiai Besar Daerah Hulu Sungai.

¹⁵¹ Mustafa, "Pengantar Kesejarahan Perjuangan Pers di Kalsel 1945-1949," Banjarmasin, hal 28.

¹⁵² Mustafa, *ibid.*, hal 29.

Sesuai dengan maksud penerbitan Kalimantan Berjuang antara lain menyaingi dan mengimbangi berita-berita yang disuarakan pers NICA “Suara Kalimantan”, maka setelah kurang lebih berjalan 3 bulan, media massa ini dipindahkan dari Kandangan ke Banjarmasin.

Apabila sewaktu di Kandangan harian ini berkantor di Jalan Musyawarah, maka di Banjarmasin harian ini berkantor di simpang empat Kertak Baru (sekarang Jalan Haryono MT).

Setelah pindah ke Banjarmasin, harian ini semakin kuat berkat besarnya dukungan dan sambutan masyarakat. Sikap Harian *Kalimantan Berjuang* yang mendukung Negara Kesatuan dan menentang federalisme, menimbulkan simpati rakyat di daerah ini. Karena sikap yang tegas inilah harian ini selalu diawasi oleh mata-mata Belanda.

Ketika masih terbit di Kandangan, *oplaah* atau tiras harian ini sudah mencapai 500 hingga 750 lembar perhari, maka sesudah pindah ke Banjarmasin tirasnya meningkat menjadi 3.500 lembar perhari.¹⁵³

Dalam tahun 1947 pendukung harian ini bertambah kuat dengan masuknya Adonis Samat (yang berhenti sebagai Pimpinan Redaksi *Sinar Hoeloe Soengai* dengan seizin Merah Danil Bangsawan). Kemudian pada sekitar bulan Mei 1947 Adonis Samat diangkat menjadi pimpinan redaksi *Kalimantan Berjuang*. Haspan Hadna yang sebelumnya memegang jabatan pemimpin redaksi kemudian bertindak sebagai pemimpin perusahaan. Sedangkan wartawannya adalah Mustafa, Zainal dan Arthum Artha.¹⁵⁴

Dalam tahun 1948 ketika situasi perjuangan tambah memanas, dan tindakan pemerintah NICA bertambah keras dengan melakukan penangkapan-penangkapan terhadap tokoh-tokoh pejuang dan tokoh-tokoh pers, Haspan Hadna dan Adonis Samat termasuk diantara yang terpaksa masuk tahanan juga. Namun *Kalimantan Berjuang* waktu itu masih dapat lulus dari ujian-ujian tersebut dan masih terbit mengunjungi para pembaca.

Memasuki tahun 1949 Harian *Kalimantan Berjuang* diperkuat dengan masuknya tokoh pers perjuangan lainnya, yakni Yusni Antemas dan Zafry Zamzam bahkan Zafry Zamzam kemudian disertai jabatan sebagai Pemimpin Redaksi yang ditinggalkan Adonis Samat, karena yang bersangkutan bergabung dalam barisan perjuangan bersenjata.

Demikian perjalanan Harian *Kalimantan Berjuang* yang lahir dalam tahun 1946, yang sengaja disiapkan untuk tampil bersaing dengan pers NICA dan dengan terang-terangan melakukan misi sebagai pers perjuangan pembela Proklamasi 17 Agustus 1945, telah membuktikan kemampuannya untuk tetap tegar melalui tahun-tahun penuh tantangan dan rintangan, sehingga Harian *Kalimantan Berjuang* tidak lenyap bersama lenyapnya NICA di bumi Nusantara ini, ia harus hidup di alam kemerdekaan yang sebenarnya dan bahkan masih hidup sampai sekarang walaupun sudah dalam bentuk yang lain.

4. Harian *Terompet Rakyat* Mempertahankan Negara Kesatuan Indonesia

Apabila dua buah media massa yang diuraikan terdahulu yakni majalah *Republik* dan Harian *Kalimantan Berjuang* lahirnya di kota Kandangan maka media massa ini lahir di kota Amuntai. Pelopor pembangunan media massa baru ini adalah Hamran Ambrie dan Yusni Antemas, mereka tidak hanya tokoh pers yang memihak perjuangan seperti tokoh-tokoh pengasuh majalah *Republik* dan Harian *Kalimantan Berjuang*, tetapi lebih dari pada itu keduanya adalah anggota organisasi perlawanan bersenjata GERPINDOM (Gerakan Pembela Pengejar Indonesia Merdeka). Yusni Antemas menjabat sebagai sekretaris GERPINDOM, sedangkan Hamran Ambrie salah

¹⁵³ Arthum Artha, *Wartawan-Wartawan Masuk Penjara di Kamp.Belanda*, Banjarmasin Post, 19 Maret 1981.

¹⁵⁴ Mustafa, *op.cit.*, hal. 30.

sesorang pembantu dalam kepengurusan gerakan tersebut. Karena itu dapat diduga apabila risiko yang mengancam kedua tokoh media massa yang baru tersebut lebih berbahaya.

Terompet Rakyat adalah sebuah harian yang membawakan misi perjuangan mempertahankan Negara Republik Indonesia yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Koran yang dicetak dalam bentuk stensilan ini, nomor pertamanya lahir pada tanggal 2 Desember 1946. Surat kabar ini mula-mula tidak dijual eceran, dicetak hanya untuk langganan, tetapi karena banyaknya permintaan kemudian diterbitkan juga untuk dijual secara eceran, pasarannya tidak hanya di kota Amuntai saja, tetapi sampai ke kota-kota lainnya di Kalimantan Selatan. Bahkan sebagai koran terbitan daerah juga dapat merebut pasaran di Banjarmasin. Agen penjual eceran harian *Terompet Rakyat* di Banjarmasin waktu itu adalah Muhammad Ys, yang pernah mendapat peringatan keras dari penguasa Belanda.¹⁵⁵

Penerbitan surat kabar *Terompet Rakyat* yang penuh semangat perjuangan ini, diselenggarakan secara kekeluargaan. Tempat kegiatan penerbitan surat kabar ini di rumah Hamran Ambrie, yang dikenal sebagai “Abang Betel”, yakni penjaga “Pojo” yang sering melontarkan protes, sindiran, kritik dan lain-lainnya. Susunan redaksinya terdiri atas : Hamran Ambrie sebagai pimpinan redaksi, Yusni Antemas sebagai wakil pimpinan redaksi, dan pembantu-pembantunya adalah Baderun Arsyad, Akhmad Samidie, Akhmad Yusran, Syamsul Anek, Akhmadan H.A, dan Halim Bertindak sebagai ilustrator tetap Bihman Villa dan pemimpin usaha H.Mohammad Idris.

Keberanian surat kabar ini dalam mengkritik kebobrokan politik penjajahan melalui editorialnya menyebabkan media massa ini beserta penyelenggaranya senantiasa mendapat sorotan dari penguasa setempat. Tindakan pihak penguasa untuk membendung tulisan-tulisan tajam dari Harian *Terompet Rakyat* ini, mula-mula dengan memanggil Hamran Ambrie dan Yusni Antemas masing-masing selaku pimpinan redaksi dan wakilnya untuk menghadap Kiai Besar Afdeling Hulu Sungai Merah Nadalsyah yang datang dari Kandangan. Kedua tokoh pers ini diminta untuk menghentikan kegiatannya sebagai wartawan Republikan. Kepada mereka ditawarkan bantuan berupa dana dan sarana apabila bersedia menghentikan penerbitan harian *Terompet Rakyat* tersebut, atau setidaknya-tidaknya mau merubah sikap mereka terhadap pemerintah dan bekerja sama dengan surat kabar Belanda yang waktu itu ada di Kalimantan Selatan.

Upaya yang dilakukan pihak penguasa belum dapat meyurutkan jiwa perjuangan para pengasuh *Terompet Rakyat* waktu itu. Sehingga semua ajakan Kiai Besar Merah Nadalsyah yang diajukan kepada tokoh-tokoh pers di Amuntai, dengan tegas tidak mereka terima.

Dampak lanjut dari gagalnya bujukan yang dilakukan pihak penguasa NICA kepada tokoh-tokoh *Terompet Rakyat* di Amuntai tersebut adalah terjadinya peristiwa pemukulan tidak berpriskemanusiaan yang dilakukan oleh militer NICA terhadap Yusni Antemas pada tanggal 6 Mei 1947 ketika yang bersangkutan sedang berpergian ke kota Tanjung. Peristiwa itu bahkan sempat dimuat dalam harian Masyarakat Baru pimpinan Oemar Dachlan yang terbit di Samarinda Kalimantan Timur. Koran itu memberitakan tentang protes yang disampaikan oleh Hamran Ambrie kepada Residen dan Auditeur Militer di Banjarmasin atas pemukulan dan ancaman terhadap Yusni Antemas tanpa beralasan karena kedudukannya sebagai Redaktur Harian *Terompet Rakyat*.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Anggraini Antemas, *Terompet Rakyat Suara Kabar Perjuangan*, Banjarmasin Post, tanggal 2 Januari 1981.

¹⁵⁶ Anggraini Antemas, *Terompet Rakyat Suara Perjuangan*, Banjarmasin Post, tanggal 2 Februari 1981.

Janji pihak yang berwajib untuk mengusut peristiwa Yusni Antemas ini tidak pernah berlanjut, bahkan tekanan-tekanan penguasa NICA terhadap *Terompet Rakyat* semakin kuat. Situasi yang semakin memburuk bagi kehidupan *Terompet Rakyat* waktu itu, menyebabkan media massa ini di dalam tahun 1947 memutuskan pindah ke kota Alabio. Hamran Ambrie selaku pemimpin redaksinya juga berpindah domisili ke Alabio, dengan tambahan seorang staf redaksi bernama Nawawi Z. Koran ini masih dapat terbit secara darurat. Namun kehidupannya semakin sulit karena modal yang semakin berkurang dan sarana semakin terbatas. Sampai akhirnya tidak terbit lagi, sehubungan dengan dikeluarkannya "*Persbreidel*" (larangan terbit) oleh pemerintah NICA.

Usaha menerbitkan kembali media massa ini dengan nama yang lain tidak sempat terlaksana hingga berlangsungnya aksi militer Belanda II yang ditujukan kepada pemerintah Republik Indonesia, tanggal 19 Desember 1948. Sehubungan dengan peristiwa clash kedua tersebut, Hamran Amrie dan Yusni Antemas ditangkap oleh penguasa NICA, dan diasingkan di tempat tawanan Militer di dekat lapangan terbang Ulin (sekarang pelabuhan udara Syamsudin Noor). Dengan demikian tamatlah riwayat *Terompet Rakyat*, sebuah media massa yang berani dan tegas dalam perjuangan membela Proklamasi 17 Agustus 1945 di Kalimantan Selatan.

5. Beberapa Pers Perjuangan Lainnya yang Pernah Terbit di Kalimantan Selatan

a. Pers yang lahir di Banjarmasin

Surat Kabar Suara Kalimantan yang lahir pada masa revolusi, yang dipimpin oleh Ardansyah dan Gusti A. Soegian Noor dan bersikap menyuarakan kepentingan NICA, sempat digugat oleh A.A. Hamidhan. Nama Suara Kalimantan pernah pula dipakai sebagai nama surat kabar yang terbit pada tahun 1930-1942. Koran yang dipimpin oleh A.A. Hamidhan dahulu tersebut merupakan koran pergerakan yang tidak bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda.

Adanya protes dari A.A. Hamidhan yang pada waktu itu sedang berada di pulau Jawa (Yogyakarta) terhadap pemakaian nama koran yang pernah dipimpinnya sebelum zaman Jepang tersebut, menyebabkan Merah Ardansyah dan Gusti A. Soegian Noor merubah nama surat kabarnya dengan nama "Indonesia Merdeka". Selanjutnya sesuai dengan nama Indonesia Merdeka, maka akhirnya media massa ini merubah sikap dari menyuarakan kepentingan NICA menjadi bersikap nasionalis. Bahkan kemudian lebih dikenal sebagai surat kabar Partai Nasional Indonesia. Surat kabar tersebut tetap terbit hingga zaman liberal.

Beberapa media massa lainnya yang pernah diterbitkan pada masa perang kemerdekaan di Banjarmasin adalah mingguan Kedaulatan di bawah pimpinan Fachrudin Mohani dan Masdari. Media massa yang lahir pada tahun 1946 ini terbit tiga kali seminggu. Semangat perjuangan yang disuarakannya, menyebabkan mingguan Kedaulatan ini hanya dapat berjalan beberapa bulan saja.

Nasib yang sama dialami pula oleh majalah Islam Berjuang yang terbit tahun 1946 di bawah pimpinan Darmawi Sarudji. Karena dianggap berbahaya oleh pemerintah NICA, maka penerbitan media massa ini hanya berlangsung dalam waktu yang singkat. Sedangkan masing-masing pemimpin redaksinya ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda. Dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah penguasa, maka dengan sendirinya kegiatan penerbitan media massa tersebut berhenti.

Memasuki tahun 1947 di Banjarmasin lahir pula mingguan Berita Merdeka di bawah pimpinan H. M. Thalhah dan A.M. Karim. Kemudian menyusul terbit majalah bulanan Fajar Timur di bawah pimpinan Haspan Hadna dan M. Sjaidillah. Kemudian pada akhir 1947 terbit suara SKI di bawah pimpinan Dokter St.T. Diapari, E.S. Handoeran dan A.A. Rivai.

Dalam tahun 1948 di Banjarmasin lahir majalah bulanan Remadja di bawah pimpinan Zainal dan Arthum Artha. Menyusul kemudian terbitlah mingguan politik Nyata yang dipimpin oleh H. A.

Djohansyah dan Haspan Hadna. Masih dalam tahun 1948 tercatat pula majalah politik Tekad yang dipimpin oleh Adonis Samat.

Koran dan majalah yang lahir di Banjarmasin tahun 1948 tersebut umumnya hanya dapat terbit selama beberapa bulan saja. Selanjutnya koran dan majalah-majalah tersebut satu persatu dibreidel oleh penguasa kolonial Belanda. Sehingga atas dasar larangan terbit tersebut akhirnya semua penerbitan yang tidak bersedia bekerja sama dengan penerbitan NICA tidak dapat lagi melanjutkan kegiatannya..

b. Pers yang Lahir di Kandangan

Disamping koran-koran perjuangan yang di masa hidupnya cukup lama seperti majalah *Republik* dan *Harian Kalimantan Berdjuang*, maka ada beberapa koran lainnya yang lahir di Kandangan, sehingga menimbulkan semacam kesan tentang besarnya peranan kota Kandangan dalam melahirkan pers yang menyuarakan pembelaan dan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kesan-kesan dimaksud antara lain lahir dari keberanian tokoh-tokoh pers di daerah tersebut.

Diantaranya tindakan berani yang telah dilakukan pimpinan harian *Sinar Hoeloe Soengai*, yang berani memutarbalikkan haluan media massa tersebut dari yang seharusnya ditugaskan penguasa setempat untuk menyuarakan kepentingan Belanda, menjadi pers yang menyuarakan dan membela bahkan memberikan fasilitas-fasilitas bagi kepentingan para pejuang kemerdekaan, dan juga beberapa kesan lain yang tegas dan berani ditampilkan oleh dua media massa harian *Kalimantan Berdjuang* dan majalah *Republik* seperti yang diuraikan di atas.

Beberapa media massa lainnya yang tercatat lahir di kota Kandangan ini adalah :

- (1) Mingguan Samarata, terbit pada tahun 1946 di bawah pimpinan Saberi Tobing dan Saberi Oetis. Mingguan ini hanya dapat bertahan terbit beberapa bulan saja.
- (2) Menyusul kemudian terbit majalah bulanan Piala pada tahun 1947 di bawah pimpinan Maseri, S.M. Darsel, dan Masdan Rozani. Majalah ini sempat terbit dengan tiras sebanyak 500 eksemplar. Tetapi nasibnya hanya dapat bertahan terbit beberapa bulan saja.
- (3) Sebuah majalah wanita bernama *Pedoman Poeteri* yang terbit pada tahun 1947 di bawah pimpinan H. Roehajah B. Majalah yang terbit sebulan sekali ini dicetak dalam bentuk stensilan oleh percetakan *Republik*. Redaksi dan administrasi majalah ini beralamat di Jalan Parinda Kandangan. Terbitan pertama majalah ini bertanggal 3 Februari 1947 bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1366 H. Majalah keputerian yang dijual eceran f 1,50 per eksemplar ini diselenggarakan penerbitannya dengan susunan kepengurusan : Sidang Pengarang terdiri dari : H. Roehajah B dan Maserah, sedangkan Tata Usaha adalah Siti Roespinah dan Siti Maslara. Majalah ini dapat bertahan terbit cukup lama, dan baru berhenti pada tahun 1949 sehubungan dengan kepindahan keluarga H. Roehajah B, mengikuti suami yang sejak tahun 1949 berdomisili di Amuntai.
- (4) Di samping mengasuh majalah keputerian tersebut di atas H. Roehajah B, juga memimpin penerbitan majalah anak-anak bernama *Soeloeh*. Majalah ini terbit sekali sebulan. Penerbitnya adalah "Taman Pengetahuan", beralamat redaksi dan administrasi di Jalan Masjid 143 B Kandangan. Penerbitan yang pertama bertanggal 1 Januari 1948. Majalah ini berisi tulisan-tulisan ilmu pengetahuan serta memuat hasil-hasil karya anak-anak dalam bentuk prosa dan puisi. Percetakan yang menerbitkannya adalah Typ S.H.S. Kandangan. Harga langganan tiap bulan/pernomor tercantum sebesar f 0, 60. Berakhirnya penerbitan majalah Soeloeh ini bersamaan dengan berakhirnya *Pedoman Poeteri*, yakni ketika H. Roehajah B, selaku pimpinan media massa ini pindah berdomisili ke Amuntai pada tahun 1949.

- (5) Sebuah majalah bulanan Majelis Ulama Islam Kandangan bernama *Madjlis* telah terbit dalam tahun 1948. Penerbitan majalah yang memuat masalah-masalah ke Islaman ini berlangsung setiap tanggal satu bulan Arab/Hijriah. Majalah ini sudah tampil dalam bentuk cetakan. Percetakannya dilakukan oleh Drukkerij "*Sinar Hoeloe Soengai*". Pimpinan penerbitan adalah Mohammad Arsjad, sedangkan alamat penerbit adalah kantor Majelis Ulama Islam Hulu Sungai di Kandangan. Majalah ini di memasang harga langganan sebulan/satu eksemplar adalah f.1,-

c. Pers Menara Indonesia, Pedoman Perjuangan dan Pawana.

Menara Indonesia adalah sebuah majalah yang hidup berdampingan dengan harian *Terompet Rakyat*, yang lahir dan berkembang sejak tahun 1947 hingga tahun 1948 di Amuntai. Seperti halnya *Terompet Rakyat*, majalah ini juga masih dicetak stensilan. Terbit dua kali sebulan, setiap tanggal 10 dan 25.

Majalah *Menara Indonesia* terbit pertama kali pada Juli 1947. Jadi sekitar 6 bulan sesudah lahirnya Harian *Terompet Rakyat*. Ketika Harian *Terompet Rakyat* pindah dari kota Amuntai ke Alabio, maka majalah *Menara Indonesia* juga ikut berpindah ke Alabio. Alamat redaksi dan Administrasinya adalah Kampung Baru, Alabio. Seperti dikemukakan di atas bahwa majalah *Menara Indonesia* adalah kembarnya Harian *Terompet Rakyat* juga. Hanya untuk tampil keluar dalam majalah ini dicantumkan bertindak sebagai redaksi Hadi Amily dan Administrasi oleh Nawiz.

Majalah *Menara Indonesia* yang berukuran kwarto dan tebal berkisar 30 halaman itu, umumnya memuat tulisan-tulisan yang bertemakan perjuangan. Ada yang dalam bentuk naskah ilmiah populer, surat terbuka terjemahan tulisan dari majalah luar negeri, pengetahuan keagamaan, filsafat, puisi/sajak dan berita-berita ringan lainnya.

Terakhir majalah ini kekurangan biaya seperti halnya yang dialami oleh Harian *Terompet Rakyat*. Kemudian disusul dengan adanya *persbreidel* dan penangkapan terhadap pimpinan-pimpinan pers ini, sehingga berhentinya penerbitan majalah tersebut.

Satu-satunya media massa yang terbit di Barabai pada masa Revolusi Kemerdekaan adalah Majalah *Pedoman Perjuangan*. Majalah ini terbit dua kali seminggu, yaitu setiap hari Rabu dan Sabtu. Nomor pertamanya terbit pada hari Rabu tanggal 1 Januari 1947. Majalah yang berukuran buku tulis ini jumlah halamannya berkisar antara 8 sampai 16 halaman. Diketik stensilan timbal balik. Percetakan yang mengerjakannya adalah Drukkerij Keradjinan Barabai. Pimpinan Redaksinya adalah Tamar Eka dan Wakil Pemimpin Redaksi adalah Noo'ain AS. Alamat redaksi administrasi tercantum *Pedoman Perjuangan* Barabai. Majalah ini memasang harga langganan 1 bulan f 4,50 atau dengan eceran f 0,50.

Pedoman Perjuangan yang terbit di kota Barabai ini memuat tulisan-tulisan yang membangun semangat perjuangan menuju kemerdekaan. Tulisan yang ditampilkan ada yang berupa naskah ilmiah populer, tinjauan sejarah, cermin kehidupan, ruangan agama, dunia wanita, ruangan politik, dilengkapi juga dengan berita-berita luar negeri, berita tanah air, dan berita-berita kota.

Para penulis yang sering tampil mengisi majalah ini adalah Abdoel Hamid A. Haidar, dan Abdoel Hak. Majalah ini sering pula memuat tulisan-tulisan dari penulis-penulis dari Jawa, seperti S. Wirjoseparto, J. Alieman S, dan Moh. Alie dari Surabaya.

Majalah yang banyak memberikan pengetahuan dan dapat membangkitkan semangat nasionalisme ini kemudian sampai juga pada masa-masa mengalami kesulitan modal dan sarana penerbit. Akhirnya ketika pemerintah NICA mengenakan *persbreidel* bagi media massa yang terbit di daerah ini, *Pedoman Perjuangan* yang terbit di Barabai ini tidak ada kedengaran lagi beritanya .

Sebuah media massa lain yang dapat dikemukakan pada masa perjuangan ini adalah Majalah bulanan *Pawana* yang terbit di kota Rantau. Majalah ini terbit dalam tahun 1948, ketika NICA sudah mulai melakukan penekanan-penekanan terhadap pers yang tidak meyuarkan suara pemerintah.

Majalah yang diterbitkan di kota Rantau ini, percetakannya dilakukan di kota Kandangan. Yang bertindak sebagai pimpinan redaksi majalah ini adalah Masdan Rasjifany.

Karena dalam tahun 1948 ini juga NICA melakukan tindakan *persbreidel* sehubungan Clash Kedua dalam rangka mematahkan perlawanan Bangsa Indonesia, maka majalah ini tidak sempat berumur lama.

Dengan penekanan larangan terbitnya (*persbreidel*) terhadap media massa yang terbit di daerah ini, baik yang terbit harian, mingguan, atau bulanan yang dilakukan oleh penguasa NICA secara berbarengan atau satu demi satu, maka hampir semua media pers menghentikan kegiatannya. Beberapa media yang lolos dari breidel NICA, karena kesulitan-kesulitan lain seperti terbatasnya sarana untuk penerbitan, menyebabkan media pers pada akhir kekuasaan NICA ini mengalami masa-masa vakum. Kegiatan pers di daerah ini baru mulai tumbuh subur lagi sesudah berlangsungnya pengakuan kedaulatan Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1949.

F. PERJUANGAN GERILYA DAN TERBENTUKNYA PEMERINTAHAN GUBERNUR TENTARA ALRI

1. Pembinaan Wilayah Perjuangan Gerilya

Politik NICA bertujuan untuk menjajah Indonesia selama-lamanya. Untuk mencapai tujuan itu Pemerintah Belanda menggunakan siasat “*divide et impera*” atau “*verdeel en heers*” yang berarti memecah belah untuk tetap berkuasa dan sikap tidak mempercayai bumi putera memegang senjata.

Untuk melaksanakan tujuan itu, NICA melakukan beberapa kali konferensi yang dihadiri oleh utusan daerah-daerah dengan tujuan untuk melahirkan negara-negara bagian.

Konferensi itu adalah Konferensi Malino 12-16 Juni 1946, Konferensi Denpasar 18-24 Desember 1946, Konferensi Golongan Peranakan Cina, Arab dan Belanda di Pangkal Pinang 1-12 Oktober 1946, dan konferensi yang besar pengaruhnya bagi Kalimantan adalah Konferensi Linggajati yang ditandatangani kedua delegasi Republik Indonesia dan Belanda tanggal 15 November 1946. Komite Nasional Indonesia Pusat kemudian mengesahkannya pada tanggal 25 Januari 1947, maka hal ini menunjukkan bahwa Kalimantan tidak termasuk *de facto* dari Republik Indonesia.

Dari Konferensi Linggajati itu didapat persetujuan kedua belah pihak bahwa kekuasaan Republik Indonesia *de facto* hanya meliputi Jawa –Madura dan Sumatera saja, sedangkan di luar daerah ini secara sah di bawah kekuasaan Belanda. Secara resmi pula, pemerintah Republik Indonesia menyerahkan kekuasaan kepada Belanda atas daerah-daerah di luar Jawa-Madura dan Sumatera yang berarti Kalimantan dengan para pejuang bersenjatanya yang sudah bertekad ingin mempertahankan hasil Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah berada di luar Republik Indonesia.¹⁵⁷

Persetujuan Linggajati ini membawa akibat yang lebih jauh bagi perjuangan di Kalimantan. Hasil persetujuan Linggajati mengakibatkan bahwa status Gubernur Kalimantan tidak relevan lagi sehingga status Gubernur dihapus. Markas Besar ALRI di Tuban dipindahkan ke Madiun disertai dengan perubahan status pula, yakni menjadi Mobiele Brigade ALRI dengan Komandan Mayor Firmansyah.

Letkol Zakaria Madun dipindahkan ke Markas Besar ALRI pusat sebagai Perwira Intel. Markas ini berada di bawah Komandan Mayjen Dokter Mustopo yang menjabat Komandan Teritorial Jawa Timur.¹⁵⁸

¹⁵⁷ A.Gazali Usman, “Pengaruh Persetujuan Linggajati Terhadap Perjuangan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan”, dalam *Analisis Kebudayaan* No. 1 th IV, Depdikbud, Jakarta, 1984.

¹⁵⁸ M.Idwar Saleh, *op.cit.*, hal.18.

Laporan permintaan bantuan yang seharusnya diberikan kepada Komandan Brigade ALRI Mayor Firmansyah yang meneruskan permohonan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan itu kepada Gubernur Kalimantan melalui pengiriman Tim Kurir ke-5 ke Kalimantan Selatan gagal oleh penangkapan NICA di Surabaya. Oleh karena itu untuk menjelaskan perubahan-perubahan di pusat kepada ALRI Divisi IV di Kalimantan tak pernah sampai, sedangkan reorganisasi dan reformasi TNI yang diadakan mengakibatkan Mobiele Brigade ALRI itu diubah statusnya menjadi kesatuan tempur dengan nama Batalyon X C4 /Komando Group Kalimantan dan sebagai unit Brigade XVI Komando Seberang dengan pimpinan Mayor Firmansyah. Sejak itu putuslah hubungan ALRI Divisi IV Kalimantan dengan induk pasukannya di Jawa sampai dengan datangnya Jenderal Mayor R. Suhardjo tanggal 2 september 1949 dalam pertemuan di Munggu Raya Kandangan.¹⁵⁹

Apabila ALRI Divisi IV Tuban telah dibubarkan, dan cabang-cabangnya di Kalimantan Barat, Timur dan Riau, maka ALRI Divisi IV di Kalimantan Selatan tetap hidup karena mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Semangat yang mendorong tetap hidupnya ALRI ini ialah semangat nasionalisme agama yang kuat yang hidup secara terorganisasi sejak berdirinya Sarekat Islam tahun 1912 di Kalimantan Selatan.¹⁶⁰

Meskipun terjadi perubahan struktur dan reorganisasi Markas Besar ALRI di Jawa, pejuang-pejuang ALRI Divisi IV Kalimantan Selatan tetap mempunyai semangat perjuangan yang tinggi.

Pada saat Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV "A" dibentuk tanggal 18 November 1946, Belanda mulai melancarkan operasi kolonialnya ke pedalaman Hulu Banyu, dan menjelang agresi militer Belanda atas Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, di Kalimantan Selatan Belanda mengadakan aksi pembersihan terhadap orang yang dicurigai.

Pada tanggal 3 Januari 1947 pusat latihan ALRI di Haruyan diserang NICA.¹⁶¹ Serangan tiba-tiba itu banyak menimbulkan korban, ratusan penduduk yang tidak bersalah ikut menderita. Rumah-rumah dibakar dan harta benda dirampas Belanda, bahkan kitab suci AL-Qur'an dirobek dan diinjak-injak oleh tentara Belanda. Tokoh-tokoh ALRI yang ada berhasil meloloskan diri ke arah pegunungan Meratus, sedangkan yang tertangkap mendapat siksaan yang kejam.

Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV sangat menderita akibat serbuan Belanda tersebut. Pada saat itu keadaan dan kedudukan para pejuang gerilya sangat terjepit dan terdesak oleh tindakan kaki tangan Belanda. Sejumlah organisasi pejuang masih mampu untuk berjuang. Dalam situasi inilah Hassan Basry selaku Komandan Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV "A" mengambil keputusan untuk menarik diri ke pegunungan bersama-sama anggotanya yang teguh pendiriannya.

Hassan Basry dan Amat Bunyamin dengan beberapa kawan seperjuangannya berangsur-angsur melintasi pegunungan Meratus menuju Kalimantan Tenggara untuk menghindari musuh. Tanggal 21 Agustus 1947 di Hunjuran Gunung Panginangan Ratu arah ke Timur di antara Kampung Mandam dan Cantung yakni Kampung Limbungan bemarkas di Gua Tanggai mereka berjumpa H. Aberanie Sulaiman, pimpinan GERPINDOM/TRI Pasukan MN 1001 Birayang dengan senjata lengkap, Daeng Ladjida dengan tujuh orang kawan seperjuangannya yang bermaksud mencari hubungan ke Jawa lewat Kotabaru. Mereka sebelumnya menghindar setelah mencegat sebuah konvoi Belanda di Hambawang Pulasan (Batumandi). Pertemuan yang tidak diduga itu dalam suasana senasib penuh menghadapi kesulitan telah menimbulkan semangat baru dalam menghadapi Belanda. Dalam pertemuan mereka mengakui bahwa Hassan Basry dan H. Aberanie Sulaiman sebagai pimpinan dan wakilnya. Dengan demikian Kampung Mandam adalah merupakan tempat kedudukan Markas Besar pertama setelah melarikan diri dari Haruyan.

¹⁵⁹ A.Gazali Usman, *op.cit.*, hal. 111.

¹⁶⁰ A.Gazali Usman, *loc cit.*

¹⁶¹ Hassan Basry, "Kisah Gerilya Kalimantan", Jilid II, Banjarmasin, tt.th.; Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hal. 60.

Pertemuan Hassan Basry selaku Pimpinan Umum (PU) dengan H. Aberanie Sulaiman, Wakil Komando Umum GERPINDOM/TRI Pasukan MN 1001 yang bertempat di sekitar Mandam, tepatnya di Antuin, 10 Km dari Mandam merupakan pertemuan dalam usaha mengadakan konsolidasi perjuangan dan menghasilkan kesepakatan untuk perlunya kesatuan Komando ke dalam Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV "A" dengan Hassan Basry sebagai Pimpinan Umum (PU).

Suasana perjuangan saat itu agak sepi mendorong Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV "A" untuk mengambil inisiatif lain dengan berbagai cara di segala bidang. Saat itu SKI dan SERMI sudah tidak berdaya lagi, hanya satu yang mungkin dapat digerakan ialah Pasukan Pemuda Indonesia atau PPI.

PPI didorong untuk mengadakan kongresnya di Kandangan. H.M.Rusli dan Hasnan Basuki dua orang tokoh PPI Kandangan yang juga adalah anggota Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV "A", kepadanya dibebankan tugas untuk mengadakan kongres tersebut.

Kongres diadakan tiga hari lagi, 17 sampai dengan 19 Maret 1947. Di antara waktu-waktu yang terluang diadakan pertemuan rahasia terbatas antara pemuda-pemuda tertentu dengan Hassan Basry selaku PU yang datang meyusup ke kota Kandangan. Kongres dibangkitkan semangatnya dengan pidato yang berapi-api yang berisi api perjuangan, terutama oleh Ideham Chalid, peran Kamar dan H. M. Rusli. Kongres akhirnya berhasil membentuk Gabungan Pemuda Pemudi Kalimantan (GAPPIKA) dengan H. M. Rusli dan Hasnan Basuki sebagai pimpinan umum dengan kedudukan kota Kandangan sebagai tempat kedudukan Pengurus besarnya. Di sinilah Kemenangan Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV "A" karena kedua tokoh tersebut adalah anggota Batalyon Rahasia. Disamping terbentuknya GAPPIKA juga terbentuk Kepanduan Rakyat Indonesia (KRI) dipusatkan di Banjarmasin, namun di Kandangan KRI dipegang oleh kader-kader Batalyon Rahasia.¹⁶²

Kemenangan lain adalah bahwa GAPPIKA dipercaya membentuk pangkalan Batalyon Rahasia dengan kedok pembentukan cabang atau ranting GAPPIKA. Sementara itu Markas Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV "A" telah dipindahkan ke suatu tempat yang agak jauh terlindung dengan hutan pegunungan yang lebat di daerah pegunungan Meratus yaitu di desa Niih di lingkungan Gunung Tanuhi di udik Sungai Amandit, 50 Km sebelah timur dari kota Kandangan.¹⁶³

2. Keadaan Sekitar Aksi Militer I di Kalimantan Selatan

Penetapan Kalimantan di luar wilayah de facto Republik Indonesia berdasarkan Persetujuan Linggajati pengaruhnya besar sekali. Karena status Gubernur Kalimantan dihapus, maka Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV "A" harus berjuang sendiri, mengatur organisasi, bahkan membuat tanda pangkat sendiri. Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV "A" Pertahanan Kalimantan adalah satu-satunya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ada di Kalimantan Selatan.¹⁶⁴

Sebagai pengaruh dari Persetujuan Linggajati dan yang kemudian dikhianati Belanda dengan Aksi Militer I pada tanggal 21 Juli 1947 dengan penyerangan terhadap Yogyakarta, sangat mempengaruhi perjuangan bersenjata di Kalimantan Selatan. NICA sejak saat itu melakukan aksi besar-besaran dalam usaha menghancurkan leburkan perjuangan bersenjata di daerah ini.

NICA mengadakan pembersihan di daerah Hulu Sungai dengan melakukan penangkapan terhadap orang yang dicurigai, dan hal ini mengakibatkan ruang gerak perjuangan menjadi lebih sempit.

¹⁶² Hassan Basry, *op.cit.*, Jilid II, tt.th.

¹⁶³ Hassan Basry, *loc cit.*

¹⁶⁴ Rika Umar, *Hidup dan Pengabdian H.Hassan Basry*, Depdikbud, Jakarta, 1983, hal. 29. Lihat Syamsiar Seman, *Hassan Basry Bapak Gerilya Kalimantan: Mendapat Anugerah Gelar dari Presiden Republik Indonesia sebagai Pahlawan Nasional*, Lembaga Studi Sejarah Perjuangan dan Kepahlawanan, Banjarmasin, 2002.

Tahun 1947 bagi perjuangan di Kalimantan Selatan merupakan tahun yang paling sulit, terdesak dan pasukan menjadi kocar-kacir serta ruang gerak menjadi lebih sempit karena keberhasilan NICA dalam strategi penghancuran gerakan bersenjata. Meskipun demikian pasukan Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV "A" masih mampu memusingkan NICA dengan taktik gerilya dan penghadangan (pencegatan) serta sabotase-sabotase.¹⁶⁵

Fase pertama dalam konsolidasi ini adalah *show* kekuatan dengan cara mengadakan pembersihan kakitangan atau spion Belanda, dari seluruh daerah sampai ke kota-kota.¹⁶⁶ Upaya itu dilakukan karena sebab utama memburuknya kondisi perjuangan adalah karena rapatnya jaringan mata-mata musuh yang terdiri dari bangsa sendiri. Orang-orang inilah yang memisahkan para pejuang dengan rakyat. Sebenarnya kesadaran rakyat dan semangat kemerdekaannya cukup merata, berkat penerangan partai-partai dan organisasi pemuda. Pembersihan mata-mata musuh ini tentu akan merintis jalan bagi kerjasama pejuang dengan rakyat, sehingga dapat menyakinkan rakyat bahwa dengan perjuangan bersenjatalah Belanda dapat diusir.¹⁶⁷

Tanggal 17 Oktober 1947 keluarlah instruksi pembersihan terhadap mata-mata musuh.¹⁶⁸ Pembersihan dilakukan dilingkungan pangkalan yang sudah tumbuh secara rahasia, bertujuan untuk meruntuhkan pengaruh NICA yang sangat mencekam rakyat dan mematahkan rantai mata-mata musuh. Untuk merahasiakan kedudukan pangkalan dan markas daerah ini, maka tiap markas diberi kode rahasia ataupun nama rahasia. Dan dengan cara ini banyak daerah yang sudah dapat diambil alih dari tangan kekuasaan NICA menjadi wilayah dari Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV "A".

Penyusunan dan penyempurnaan kekuasaan teritorial terus dilaksanakan sambil membersihkan dari unsur-unsur mata-mata NICA. Pada tiap lingkungan dibentuk "seksi" yang bertugas mengurus lingkungannya. Kepala seksi adalah juga komandan pasukan, karena tiap seksi mempunyai pasukan yang disebut "Riwas". Dengan demikian kekuasaannya meliputi bidang sipil dan militer. Beberapa seksi digabungkan menjadi sebuah "pangkalan". Markas pangkalan ini pun mempunyai pasukan yang namanya pasukan penggempur yang berwenang dalam wilayah teritorialnya. Markas pangkalan kemudian dijadikan menjadi sebuah markas yang membawahi beberapa markas pangkalan, sehingga menjadi markas daerah. Markas Daerah juga memiliki pasukan yang lebih besar yang membawahi semua daerah markas pangkalan. Kode rahasia tiap markas daerah tetap dirahasiakan sekali. Kode itu seperti Markas Daerah Z-61 untuk Pagat atau Barabai, BN X Cerbon untuk Bantuil-Marabahan.¹⁶⁹

Segala kebijaksanaan dalam taktik strategi perjuangan direncanakan dan dilaksanakan oleh Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV "A" sendiri tanpa petunjuk ataupun instruksi dari Markas Besar Pertahanan Kalimantan (MPK) ALRI Divisi IV Tuban, sebagai akibat dari Persetujuan Linggajati tersebut. Sulitnya hubungan karena blokade laut oleh Belanda menyebabkan instruksi dari MPK ALRI Divisi IV Tuban tak pernah sampai, ataupun kalau sampai sudah tidak mungkin dapat dijalankan lagi.

Guna menjelaskan perubahan yang terjadi di pusat sebagai akibat dari Persetujuan Linggajati, maka Mayor (L) Firmansyah merencanakan mengirimkan sebuah tim ke Kalimantan yang terdiri dari Lettu Asli Zuchry, Letda Mohammad Saleh Abdis, Hilmi Zuchry dan Husein.¹⁷⁰ Tim ekspedisi ini berangkat tanggal 5 Juli 1947 dan diberangkatkan dari pelabuhan Probolinggo dan pada tanggal 29 Juli 1947 berhasil mendarat di kampung Bawah Layang sekitar Tabanio. Rombongan ekspedisi

¹⁶⁵ M. Hammy A.M, *op.cit.*, hal. 328.

¹⁶⁶ Hassan Basri, *op.cit.*, Jilid II, tt.th.

¹⁶⁷ Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hal. 61.

¹⁶⁸ Hassan Basry, *loc cit.*

¹⁶⁹ Depdikbud, *op.cit.*, hal. 28 – 130.

¹⁷⁰ Hassan Basry, *op.cit.*, Jilid II, tt.th.

gagal dalam menjalankan tugasnya, karena sebelum berhasil menemui Pimpinan Umum (PU) Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV "A", telah tertangkap oleh tentara Belanda. Lettu Asli Zuchry kemudian ditawan dipenjara Banjarmasin.¹⁷¹ Dengan demikian berita pertama tentang perubahan Markas Besar Pertahanan Kalimantan (MPK) ALRI Divisi IV di Tuban menjadi Mobiele Brigade ALRI belum sampai ke tangan Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV "A" Kalimantan Selatan menyusul pula perubahan status lagi dengan nama Batalyon X-04/ Komando Group Kalimantan.

Perubahan-perubahan ini tidak dapat diikuti oleh Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV "A" Kalimantan Selatan, apalagi sejak saat itu hubungan dengan induk pasukan di Jawa terputus sama sekali.¹⁷² Problem inilah yang menghasilkan suatu keputusan untuk memindahkan Markas Besar Pertahanan Kalimantan /MPK ke Kalimantan. Rapat diadakan untuk membicarakan situasi yang sangat penting bagi perjuangan di Kalimantan. Rapat itu menghasilkan keputusan bahwa sejak saat itu (1947) Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV "A" Kalimantan Selatan dibubarkan dan sudah tidak ada lagi dan selanjutnya diganti menjadi Markas Besar Pertahanan Kalimantan (MPK) ALRI Divisi IV.

Sementara itu untuk mengumpulkan gerakan-gerakan rahasia yang tidak aktif lagi maka untuk sementara MPK dihilangkan dan diganti dengan : Sentral Organisasi Perjuangan / Pemberontakan Indonesia Kalimantan (SOPIK) ALRI Divisi IV lengkap dengan kode RX-8.¹⁷³

Susunan personalia Markas Besar RX-8 SOPIK ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan terdiri dari :

1. Hassan Basry : Kepala Pasukan ALRI Divisi IV
2. H. Aberanie Sulaiman : Wakil Kepala Pasukan merangkap
Kepala Staf, Kepala Tata Usaha,
Kepala Direksi Perjuangan dan
Kepala Penggempur.
3. M. Hammy A.M : Penulis umum merangkap Kepala
Kesehatan Markas Besar.
4. A.R. Haka
(Abdurrahman Karim) : Kepala Keamanan Markas Besar.
5. Djaperi : Keuangan.
6. Sukawati (Djohani) : Pembantu Keuangan.
7. H. Walad (H. Ramli) : Kepala Urusan Agama.

Organisasi "Sentral Organisasi Pemberontakan Kalimantan" (SOPIK) ini adalah organisasi siluman, yang sengaja dibentuk oleh pimpinan ALRI, tetapi secara organisatoris tidak ada kaitannya dengan administrasi ALRI. SOPIK dibentuk diarahkan pada dua jalan.

1. Guna mengatasi gabungan ALRI dengan Hisbullah Kalimantan. Tahun 1947 ALRI mengajak bergabung kepada Batalyon Hisbullah Kalimantan, prinsip Hisbullah mau bergabung, tetapi kalau digabungkan ke dalam Batalyon Rahasia ALRI Divisi IV "A" Kalimantan, Komandan Batalyon Hisbullah tidak mau. Masa Hisbullah sudah berbentuk Batalyon dimasukan lagi ke dalam Batalyon Rahasia ALRI ? Demikian pendapat saat itu. ALRI harus memperbesar dirinya seperti Divisi. Wajar kalau Batalyon Hisbullah dimasukan ke dalam Batalyon ALRI. Pada prinsipnya Hassan Basry mengerti kehendak Hisbullah itu, tetapi sayang pihak ALRI tidak dapat izin memperbesar organisasi ALRI dari Tuban. Bagi Hassan Basry penggabungan harus dilakukan, tetapi harus dicari jalannya.

¹⁷¹ MBAD RI, *op.cit.*, hal. 40.

¹⁷² Hassan Basry, *loc cit.*

¹⁷³ Hassan Basry, *ibid.*, Jilid II, tt.th.

2. Dengan munculnya SOPIK, ALRI sementara diam (seakan-akan dibekukan), semuanya baik ALRI maupun Hisbulah dan yang lain – lain harus bergabung dalam SOPIK, walaupun tidak secara terang-terangan, selama dalam SOPIK, tidak boleh memakai nama asli, harus dengan nama samaran, itulah sebabnya SOPIK keluar pekerjaannya sebagai organisasi siluman, walaupun di dalamnya semuanya pimpinan ALRI.

Dengan meningkatnya gangguan yang bersifat fitnah adu domba dari musuh NICA saat itu, SOPIK dapat digunakan dalam berbagai kegiatan yang aneh-aneh, secara hukum ALRI tidak bertanggung jawab kepada dunia internasional. Malah Belanda sendiri kebobolan taktik politik dengan timbulnya SOPIK, karena mengira SOPIK itu organisasi baru yang datang dari Jawa, sebagai tandingan bagi ALRI. Ada anggapan ALRI sekarang tidak berani muncul lagi.

Akhirnya berita tentang ALRI di Jawa sampai juga melalui kedatangan Firmansyah dan Anang Peter yang menyatakan bahwa mereka tidak aktif lagi dalam ALRI Divisi IV Kalimantan, sebab pada tahun 1948 itu Letnan Kolonel Zakaria Madun tidak sanggup lagi menertibkan ALRI, pada saat penyerangan terhadap PKI di Madiun, ada satu Batalyon ALRI yang menyeleweng, tidak sampai ke Madiun/tidak datang melakukan operasi militer di Madiun, ialah Batalyon I di bawah pimpinan Kapten (L) Achmad Bermawi.

Saat itulah Hassan Basry bertindak segera dan menyatakan bahwa ALRI Divisi IV Kalimantan keluar dari ikatan ALRI Divisi IV yang bermarkas di Tuban (Jawa Timur) dan menyatakan berdiri sendiri di Kalimantan. Sejak pernyataan itulah nama ALRI muncul lagi. Munculnya ALRI otomatis SOPIK menghilang namanya, nama-nama samaran pun tidak dipakai lagi, keluar kembali dengan nama aslinya. Ada juga yang masih memakai nama-nama samaran itu hingga sekarang, seperti :Hasyim menjadi Martinus, Sapar menjadi Daeng Ladjida, Abdurrachman Karim menjadi A.R. Haka dan lain sebagainya.

Setelah beberapa bulan berjalan dirasa terdapat kejanggalan tentang bentuk RX-8 SOPIK ini, karena itu maka dipulihkan kembali ke nama aslinya : Markas Pertahanan Kalimantan ALRI Divisi IV (MPK ALRI D.IV) dan Hassan Basry ditetapkan sebagai Pimpinan Umum. Keputusan sebagai Pimpinan Umum mengandung pengertian lebih luas daya geraknya dalam usaha persatuan perjuangan yang diputuskan di Tabihi.

Dalam bulan Februari 1948, dicetuskan pengembangan wilayah dengan pembentukan sebuah Markas Daerah dengan nama Markas Daerah Ps 6 ALRI Banjarmasin. Pimpinan dari Markas yang baru ini adalah Saidillah dengan nama lain Bung Sabar, tetapi kemudian karena Bung Sabar ditarik ke Markas Besar, maka jabatan Pimpinan Markas tersebut diserahkan kepada Darmansyah S.¹⁷⁴

Markas Daerah Ps 6 ALRI Banjarmasin diperluas pula dengan pembentukan pangkalan-pangkalan yaitu Markas Pangkalan Pasar Lama, Markas Pangkalan Teluk Dalam, Markas Pangkalan Sungai Mesa, Markas Pangkalan Kampung Gedang, Markas Pangkalan Kertak Baru, Markas Pangkalan Kertak Hanyar, Markas Pangkalan Pemurus Hilir, Markas Pangkalan Tanjung Pagar Kelayan, Markas Pangkalan Tatah Amuntai, Markas Pangkalan Handil I km 11, Markas Pangkalan Handil I Angkinang, Markas Pangkalan Handil Barabai, dan lain-lainnya.

Dengan terbentuknya Markas-markas pangkalan ini makin terasa ruang gerak dan daerah teritorial ALRI Divisi IV semakin meluas. Sehingga dirasakan pula perlunya membagi wilayah teritorial itu menjadi dua markas Daerah, yaitu yang pada mulanya Markas daerah Ps 6 ALRI Divisi IV Banjarmasin, sekarang menjadi dua buah Markas Daerah ialah Markas Daerah Ps 6 Jakarta dan Markas Daerah Ps St Batam. Kemudian ditambah lagi dengan sebuah Markas Daerah Baru yaitu Markas Daerah Ps 14 Kota Gelap nama sandi untuk daerah Martapura.

¹⁷⁴ Hassan Basry, *ibid.*, Jilid II, tt.th.

Pembentukan Markas Daerah dan Pangkalan masih diperluas dengan dibentuknya Markas Daerah BN 10 Cerbon nama sandi untuk daerah Marabahan pada tanggal 1 Januari 1948 dan Markas Pangkalan Besar Ps 9 yang merupakan pecahan dari Ps 14 untuk wilayah Pelaihari.¹⁷⁵ Markas Daerah BN 10 ALRI Divisi Pertahanan Kalimantan di Cerbon yang berkedudukan di Bantuil, dengan personalia sebagai berikut :

1. Komandan Markas Daerah : M. Yunus
2. Wadan Markas Daerah : Ahli Razak
3. Kepala Staf Mada : M. Ruslan
4. Sekretaris : Marlie Hassan
5. Bendahara : Junaidi
6. Pembantu- pembantu :
 1. Darmo
 2. Effendi
 3. Mugeni
 4. Mugeni
 5. Imer Jampung
7. Kepala Bagian :
 1. Bagian Kehakiman : Abdul Razak
 2. Bagian Keuangan : Junaidi
 3. Bagian Keamanan : Jabar
 4. Bagian Kepolisian : Darmawan
 5. Bagian Perlengkapan : Mugeni
 6. Bagian Diklat : Samidi

Dengan terbentuknya Markas Daerah untuk wilayah Marabahan dan Pelaihari, maka pada permulaan tahun 1948 wilayah teritorial Markas Pertahanan Kalimantan (MPK) ALRI Divisi meliputi wilayah Kalimantan Selatan.

Setelah berhasil mengadakan konsolidasi pembinaan wilayah Kalimantan Selatan, MPK ALRI Divisi IV berusaha secara intensif membantu perjuangan agar wilayah Kalimantan Selatan tetap berdiri menjadi bagian dari Republik Indonesia, dan berusaha sekuat tenaga untuk menggagalkan rencana Belanda untuk mendirikan Negara Borneo. MPK ALRI Divisi IV berusaha membantu SKI dan SERMI dalam usaha memperoleh sebanyak mungkin kursi dalam Dewan Banjar dan berusaha agar SKI tidak dapat dikalahkan.

Secara rahasia MPK ALRI Divisi IV memasukkan calon-calonnya antara lain Ideham Chalid yang berhasil duduk dalam Dewan Banjar, dan dia adalah salah seorang penasihat MPK ALRI Divisi IV. Kepada SKI dan SERMI dibebankan tugas untuk menggagalkan pembentukan Negara Borneo atau setidaknya mengulur-ulur waktu terbentuknya Negara Borneo tersebut.¹⁷⁶

3. Situasi Menjelang Aksi Militer II

Aksi Militer I berakhir dengan kesepakatan mengadakan perundingan kembali. Perundingan tersebut menghasilkan Perjanjian Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Persetujuan Renville tersebut mendapat reaksi dari kalangan Bangsa Indonesia sendiri termasuk reaksi dari partai politik SKI dan SERMI dan juga dari MPK ALRI Divisi IV sendiri.

Persetujuan itu mengakibatkan Republik Indonesia mengakui wilayah-wilayah yang telah direbut Belanda ketika terjadi Aksi Militer I, sehingga berakibat Wilayah Republik Indonesia semakin

¹⁷⁵ Hassan Basry, *loc.cit.*

sempit, kurang lebih seluas wilayah Yogyakarta saja. Selain itu Daerah Republik Indonesia yang berada dalam daerah pendudukan Belanda harus dikosongkan pula. Keadaan ini menggoncangkan situasi politik Nasional, karena Partai Oposisi menentang Persetujuan Renville yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin.

Dalam keadaan situasi nasional yang gawat itu, Presiden Soekarno pada tanggal 20 Januari 1948 mengumumkan pembentukan Pemerintahan Presidentil Kabinet di bawah pimpinan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Untuk merealisasi program Kabinet dalam rangka melaksanakan Persetujuan Renville pada tanggal 1 Februari 1948 dibentuklah Gerakan Plebisit Republik Indonesia yang diketuai oleh Mr. Budiarjo. Selanjutnya pada tanggal 6 Februari 1948 dibentuk pula Panitia Hijrah yang diketuai oleh Aruji Kartawinata dengan tugas memindahkan anggota-anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dari daerah kantong yang dikosongkan ke dalam wilayah Republik. Tugas Panitia Hijrah ini telah selesai pada tanggal 22 Februari 1948 dan berhasil memindahkan 35.000 anggota Angkatan Perang dari daerah-daerah kantong di Jawa Barat.¹⁷⁷

Daerah Kalimantan Selatan tidak termasuk daerah kantong dalam Persetujuan Renville, tetapi daerah yang disiapkan oleh NICA dalam rangka pembentukan Negara Borneo tersebut Belanda telah membentuk dewan-dewan, dan pembentukan Daerah Otonom, yaitu Kalimantan Barat 28 Oktober 1947.¹⁷⁸ Menyusul pembentukan daerah Kalimantan Tenggara yang terdiri dari Dewan Landschap Pulau Laut, Dewan Landschap Pagatan dan Dewan Landschap Cantung Sampanahan, dalam hal ini hanya tinggal daerah Banjarmasin dan Hulu Sungai yang belum terbentuk pada tanggal 14 Januari 1948 berdasarkan besluit Gubernur Jendral Hindia Belanda No.1 Staatsblad 1948 No. 14.¹⁷⁹

Sehubungan dengan persetujuan Renville tersebut MPK ALRI Divisi IV mengeluarkan pengumuman yang merupakan sebuah keputusan pendiriannya pada tanggal 16 Mei 1948 yang berisi :

1. Pemberitahuan kepada NICA tentang adanya MPK ALRI Divisi IV di Kalimantan sebagai kesatuan dari Angkatan Perang Republik Indonesia.
2. Bahwa perhubungan jauh yang sangat sukar dan komunikasi yang sangat sulit, menyebabkan MPK ALRI Divisi IV tidak dapat hijrah dari Kalimantan ke daerah yang dikuasai Republik Indonesia di Jawa sesuai dengan persetujuan Renville dan menyatakan diri tetap berada di Kalimantan sampai ada ketentuan Pemerintah Republik Indonesia.
3. Bahwa berjanji tidak akan mengadakan gerakan tembak-menembak sesuai persetujuan Renville, kecuali dalam keadaan terpaksa untuk mempertahankan diri.
4. Bahwa guna kelancaran hubungan antara pihak MPK ALRI Divisi IV dengan pihak NICA dalam memecahkan segala macam persoalan yang timbul dan guna membicarakan masalah-masalah lainnya dalam hubungan kepentingan kedua belah pihak, maka MPK ALRI Divisi IV menyarankan kepada pihak NICA agar mengosongkan kota Barabai, sehingga kota tersebut dapat dijadikan konsolidasi pertama oleh MPK ALRI Divisi IV.¹⁸⁰

Sikap MPK ALRI Divisi IV menimbulkan sikap tantangan dari NICA dan pengumuman MPK ALRI Divisi IV dijawab oleh NICA dengan sebuah proklamasi. Dalam proklamasi itu NICA menyebut MPK ALRI Divisi IV sebagai "Komplotan Pemberontak" dan harus menyerah dan membawa

¹⁷⁶ Hassan Basry, *ibid.*, Jilid II, tt.th.

¹⁷⁷ M. Hammy A.M, *op.cit.*, hal. 332 – 333.

¹⁷⁸ Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hal. 63.

¹⁷⁹ Ahmad Gafuri, *ibid.*, hal. 66.

¹⁸⁰ Hassan Basry, *op.cit.*, Jilid II, tt.th.

persenjataannya kepada pos-pos terdekat.¹⁸¹ Secara lengkap jawaban NICA itu adalah sebagai berikut :

“PROKLAMASI”

Officier djoestisi landsgerechten di Borneo Selatan ini jang merangkap djoega djabatan Auditeur Militair pada temporaire Krijgsraad di Bandjarmasin mengoemoemkan kepada tiap-tiap anggoeta yang bergaboeng dan toeroet ikoet dengan komplotan pemberontakan di Borneo Selatan, lebih-lebih kepada anggota-anggota jang bergaboeng dan ikoet komplot di bawah pimpinan Hasan Basry, bahwa kalau mereka membawa pakaian dan sendjata mereka sebeloem atau selambat-lambatnja pada malam 10 Joeni 1948 sebeloem poekoel 12 malam, melaporkan diri kepada kiai-kiai kepala atau Detaschement² komandan dari Alg. Polisi di Hoeloe Soengai. Penyerahan ini dianggap bahwa mereka dengan soeka hati sendiri kembali mena’ati pemerintah jang sjah, penjerahan mana akan dianggap sebagai alasan oentoek meringankan pertimbangan terhadap kedjahatan pemberontakan jang mereka lakoekan, penjerahan kepada satoean² polisi atau militer jang sedang melakoekan patroli asal penjerahan itoe dilakukan dengan langsoeng meletakkan pakaian dan sendjata dan sesoedah itoe mengangkat tangan keatas selama waktoe jang ditentoekan di atas tadi, djoega akan dianggap bahwa mereka dengan rela hati berlindoeng kembali pada pemerintah jang sjah.

Bandjarmasin, 20 Mei 1948

Officer djoestisi tersebut¹⁸²

Walaupun pengumuman MPK ALRI Divisi IV yang ditujukan kepada NICA hanya merupakan move saja mengingat bahwa Belanda tidak dapat melihat mereka itu lain dari pada “Pengacau” atau “Ekstremis”, segi yang positif yang hendak dicapai adalah menonjolkan kepada masyarakat bahwa :

1. ALRI Divisi IV adalah bagian dari Angkatan Perang Republik Indonesia.
2. Menggambarkan adanya kekuasaan de facto ALRI Divisi IV.
3. Bahwa mereka terorganisir dengan baik dan cinta damai.¹⁸³

Memang pada waktu itu pusat gerakan atau Markas Pertahanan Kalimantan (MPK) ALRI Divisi IV berpusat di sekitar Barabai. Pada pertengahan kedua tahun 1947 terjadi perpindahan dari Markas Niih ke arah Barabai, karena daerah daerah Kandangan dan sekitarnya selalu mendapat serangan Belanda dan bahkan sudah pernah mencapai Niih, maka dipandang perlu untuk segera memindahkan kedudukan Markas Besarnya. Dalam pemindahan itu ditempuh dua jurusan, rombongan pertama dipimpin oleh Hassan Basry sendiri sebagai pimpinan umum turun ke Pagat terus ke Cukan Lipai sebagai tempat sementara. Rombongan lainnya dipimpin oleh Hamzah Arifin melewati jalan bawah melalui Ambutun, terus ke Telaga Langsung dan ke arah sementara Mu’ui Haruyan. Setelah mempertimbangkan dengan cermat melihat kondisi tempat maka ditetapkan Ilung sebagai tempat Markas Besar dari ALRI Divisi IV yang baru. Karena itu Ilung yang pada mulanya merupakan Markas Pangkalan sekarang menjadi kedudukan Markas Besar ALRI Divisi IV.

¹⁸¹ M. Hammy A.M, *op.cit.*, hal. 339.

¹⁸² Hassan Basry, *loc.it.*

4. Gerakan Plebisit

Rakyat Kalimantan Selatan mempunyai penafsiran tersendiri dalam plebisit yang disepakati dalam Persetujuan Renville. Plebisit (pemungutan suara) yang demikian akan cukup dilakukan di dalam Dewan Banjar yang secara demokratis dan sah menurut Pemerintah Belanda.

Pemerintah Republik Indonesia memang berusaha ke arah plebisit ini, terutama ditujukan ke daerah Republik yang telah diduduki Belanda. Untuk itu terbentuklah gerakan Plebisit di Jakarta 1 Februari 1948 yang diketuai oleh Mr. Ali Budiarto, tetapi mendapat rintangan banyak dari pihak Belanda.

Sehubungan dengan itu Van Mook menulis :

*" ... Gerakan ini sendiri bukanlah suatu yang harus disingkirkan, sekiranya ia tidak dibarengi dengan tindakan teror gelap yang makin lama makin meningkat, yang juga berasal dari Yogja "*¹⁸⁴

Nyatanya di Kalimantan tidak mengarah ke plebisit itu sesuai dengan penafsirannya bahwa plebisit seperti itu tidak mungkin dijalankan terutama tidak ada *"rust en orde"*, bahkan Belanda menuduh pihak Republik sebagai sumber kekacauan.

Berbeda dengan apa yang terjadi di Banjarmasin dan Hulu Sungai yang oleh Belanda akan dijadikan sebuah daerah otonom "Daerah Banjar", maka di daerah Kalimantan Tenggara plebisit itu dijalankannya. Plebisit diadakan di sebuah barak besar di lapangan terbuka Kebon Raya, sekarang Gedung BNI 1946.

Sebelumnya diadakan pidato oleh tokoh-tokoh pemerintahan NICA di harapkan masyarakat yang diundang hadir tentang pentingnya dibentuk Negara Borneo di bawah naungan kerajaan Belanda.

Tata cara pemungutan suara dilakukan dengan menyediakan 3 buah kotak suara pilihan yang masing-masing kotak bertuliskan :

1. Bertuliskan "Republik Indonesia"
2. Bertuliskan "Negara Borneo", dan
3. Bertuliskan "Timor Besar".

Kepada hadirin disediakan biji kopi, dan diminta untuk memasukkannya kepada salah satu di antara ketiga kotak suara tersebut. Ternyata hasilnya sangat mengecewakan Belanda sebab 95% biji-biji kopi terkumpul di dalam kotak yang bertuliskan "Republik Indonesia", yang berarti rakyat Kalimantan Tenggara tetap memilih Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945.

Meskipun hasilnya jelas, pemerintah Belanda tetap memaksakan politiknya dan memaksakan dengan pembentukan daerah otonom di daerah Kalimantan Tenggara. Dengan dasar surat keputusan Letnan Gubernur Jenderal tanggal 18 Januari 1947 No. 2 Staatsblad yang kemudian dirubah dengan Staatsblad 1947 No. 112 jo Staatsblad 1948 No. 189 dibentuklah Neo Swapraja (*Nieuw Landschap*) Pulau Laut, *Nieuw Landschap* Pagatan dan dengan Staatsblad 1947 No. 37 Staatsblad 1948 No. 59 *Nieuw Swapraja* Cantung Sampanahan. Negara Kalimantan Tenggara ketika itu mempunyai Dewan yang disebut Dewan Kalimantan Tenggara, sebagai Ketua Dewan Pertama adalah diangkat A. Gaffar Noor dan wakilnya M. Yamani.¹⁸⁵

5. MPK ALRI Divisi IV Menghadapi Kontra Republik

¹⁸³ Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hal. 84.

¹⁸⁴ Ahmad Gafuri, *loc.cit.*

¹⁸⁵ LVRI Cabang Kotabaru, *op.cit.*, hal. 105.

Kemampuan Markas Pertahanan Kalimantan (MPK) ALRI Divisi IV dalam menjalankan taktik penguasaan wilayah menunjukkan kemampuan yang cukup tinggi. Kemampuan ini juga terbukti dari kenyataan bahwa segala taktik dan tipu muslihat Belanda untuk menghancurkan MPK ALRI Divisi IV selalu gagal. Ketika MPK ALRI Divisi IV mengadakan pembersihan terhadap mata-mata NICA, maka NICA merestui pembentukan sebuah gerakan rahasia sebagai gerakan kontra Republik yang bernama "Partai Anti Indonesia Merdeka" (PAIM) dengan pasukannya yang bernama "Barisan Parang Bungkul". PAIM ini diketuai oleh Kiai Besar Nadalsyah dan ditujukan langsung untuk menghadapi gerakan ALRI Divisi IV. Anggota PAIM bertugas sebagai petunjuk jalan dari pasukan NICA yang melakukan operasi pembersihan terhadap ALRI Divisi IV yang dianggap mereka sebagai pengacau "Ekstremis" atau "Komplotan Pemberontak".

Anggota PAIM dengan Pasukan Parang Bungkul ini bergerak sampai menyusup ke daerah pegunungan Meratus dan selalu memata-matai setiap gerak gerik rakyat. Dalam sejumlah operasinya hanya dua kali yang berhasil, yang pertama dalam pertempuran di Janggar di kaki gunung Menteng pada tanggal 23 Desember 1947 dan yang kedua di kaki gunung Ambilik.¹⁸⁶

Peristiwa di Janggar Gunung Menteng (sekitar 25 km dari Haruyan) terjadi ketika sekitar 15 orang pejuang yakni H. Aberanie Sulaiman, Pak Moso, Said Charly, Saberi Abas, Margana, Aliansyah, M. Tuhani D, Tulamak, Ibat bin Ahul, Utuh Kandangan, Ibur Jandila, Rafi'ie, Daud Waki dan Hamdi yang sedang beristirahat di sebuah rumah penduduk suku Dayak dikepung dan diserang oleh militer Belanda pada pukul 03.00 (dinihari) tanggal 23 Desember 1947. Pertempuran sengit terjadi hingga pukul 09.00 pagi. Dalam pertempuran di Janggar, dari pihak pejuang 1 orang gugur yakni Ibad bin Ahul (Ujal), 2 orang tertangkap karena luka tembak yakni Tulamak dan Rafi'ie, dan bahan makanan habis dibakar Belanda. Dari pihak militer Belanda 1 orang tewas dan beberapa orang lainnya luka tembak.¹⁸⁷

Pertempuran di Ambilik (di kaki gunung Ambulung Haruyan) terjadi pada subuh dinihari tanggal 3 Agustus 1948.¹⁸⁸ Para pejuang dipimpin Hassan Basry dengan pasukannya yakni Alimin, Hamzah Arifin, Ibat, Tulamak, Mustafa, Aliansyah, Saberi Abas, Japau Majid, Aseri, Maseri dan Indera. Para pejuang yang semula berencana menyerang militer Belanda, ternyata mereka lebih dahulu diserang dan dikepung Belanda. Para pejuang yang gugur dalam pertempuran Ambilik adalah Aseri dan Maseri, sedangkan yang luka tembak antara lain Ibat, Mustafa, Tulamak dan Japau.

Disamping "Barisan Parang Bungkul" terdapat lagi beberapa pasukan kontra yang memang dibentuk Belanda untuk menghadapi siasat gerilya dari ALRI Divisi IV dengan siasat gerilya pula. Pasukan ini adalah "Pasukan Kucing Hitam" yang dipimpin oleh seorang jago kampung Jatoh, yaitu Pembekal H. Hasyim. Beberapa kali pertempuran antara pejuang dengan Pasukan Kucing Hitam terjadi antara lain dengan menyerang rumah pembekal H. Hasyim, penyanggulan Pasukan Kucing Hitam di Banua Supanggal, dan pertempuran antara Pasukan Kucing Hitam dengan Pasukan Gaib dan Zikir.

Pasukan lain yang juga merupakan pasukan kontra yang bergerak di daerah utara, yaitu di daerah Tabalong, Tamiang Layang adalah pasukan yang bernama "Pasukan Laung" yang terdiri dari pasukan suku Dayak dari Dusun Timur Tamiang Layang dan dipimpin oleh Camat Coonraad.¹⁸⁹ Di daerah ini memang dikenal sejak Perang Banjar (1859-1865) akan kesetiiaannya pada Belanda

¹⁸⁶ Depdikbud, *op.cit.*, hal. 138.

¹⁸⁷ Muderis Zaini *et al.*, *Sejarah Perjuangan Rakyat Dalam Merebut dan Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia di Hulu Sungai Tengah*, Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan 45 DHC Angkatan 45 Tingkat II HST, Barabai, 1988, hal. 130-132.

¹⁸⁸ Versi lain Pertempuran di Ambilik terjadi pada tanggal 27 Mei 1948.

¹⁸⁹ Depdikbud, *ibid.*, hal. 140.

terutama keluarga Tumenggung Suta Ono yang berkubur di Tambak Mas di Kampung Telang 20 Km dari Tamiang Layang.

Berdirinya pasukan-pasukan ini karena siasat dan hasutan NICA yang mengatakan bahwa gerombolan ekstremis ini akan bergerak merampok harta benda dan jiwa terutama orang Dayak dan orang Kristen. Karena itulah mereka bersedia dipersenjatai untuk mempertahankan diri.

Dalam hal ini Belanda berusaha dengan segala macam cara dan siasat licik mempertentangkan antara rakyat untuk memecah belah kesatuan dan agar rakyat membenci ALRI Divisi IV yang bergerilya untuk mempertahankan kemerdekaan.

Ternyata kemudian siasat anti ALRI atau kontra gerilya yang dibentuk Belanda menghadapi kegagalan, karena tindakan kejam yang dilakukan oleh pasukan kontra ini, lebih kejam dari tentara Belanda sendiri. Pasukan NICA dengan dibantu oleh anggota PAIM yang menyusup ke pedalaman ke desa-desa yang terpencil untuk mencari informasi dimana pusat kegiatan ALRI seringkali melakukan tindakan kekerasan. Rakyat yang ditemukan di daerah pegunungan yang tidak dapat menjelaskan dimana pasukan ALRI, ditangkap, disiksa dan rumahnya dibakar, yang semuanya dilakukan oleh pasukan PAIM dari “Barisan Parang Bungkulnya”.

Siasat lain yang dilakukan oleh Belanda adalah melakukan taktik dengan mendirikan semacam “benteng stelsel”, dari benteng-benteng ini mereka melakukan operasinya. Siasat ini dua kali yang berhasil, yaitu dalam pertempuran di Janggar terjadi pada jam 03.00 subuh tanggal 23 Desember 1947 dengan korban 1 orang gugur dan 2 orang luka-luka.¹⁹⁰

Kejadian kedua dengan siasat benteng stelsel dan pengerahan pasukan kontra dari PAIM adalah dalam pertempuran di kaki Gunung Ambilik dengan dua orang korban dan enam orang luka-luka. Siasat benteng stelsel ini kurang menguntungkan bagi Belanda karena terlalu banyak mengerahkan pasukan. Apalagi ALRI Divisi IV berhasil membentuk pangkalan-pangkalan di pinggiran kota dan mendirikan markas-markas daerah di kota-kota, sehingga sistem benteng stelsel ini ditarik kembali oleh Belanda.

Pasukan Kucing Hitam berhasil dihancurkan oleh pasukan Martinus bersama Mursyid Ks dari “Pasukan Gaib” di bawah pimpinan H. Damanhuri. Begitu pula dengan pasukan Laung dari Coonraad berhasil dihalau dari daerah Tanjung oleh pasukan Martinus sehingga secara praktis, pasukan kontra yang dibentuk oleh Belanda tidak berdaya sama sekali. Kekuatan pasukan ALRI Divisi IV makin bertambah besar dan makin luas jangkauan wilayahnya setelah munculnya H. Damanhuri bekas algojo pasukan M. Thaher – Johan Masael yang sebelumnya berada di Talusi daerah Kotabaru.

Dengan membesarnya pasukan dan meluasnya wilayah operasional ALRI maka dirasa sangat kekurangan persenjataan. Oleh karena itulah Pimpinan Umum (PU) Hassan Basry mengeluarkan instruksi untuk membuat senjata lebih banyak lagi. Dengan instruksi ini muncullah pembuatan senjata hampir di tiap Markas Daerah, yang pembuatannya dilakukan oleh pandai besi dari kampung Negara yang memang terbesar di seluruh Kalimantan Selatan.

Senjata yang dibuat mulai dari senapan yang dikenal sebagai “dumdum” karena apabila sekali ditembakkan harus mengeluarkan petrum (selongsong) lebih dahulu dan kemudian mengisinya kembali.

Jenis lain dari senjata yang dibuat adalah pistol dan granat tangan yang dikenal sebagai granat burung dan yang terakhir adalah meriam. Meskipun senjata-senjata ini bukanlah alat

¹⁹⁰ Hassan Basry, *op.cit.*, Jilid II, tt.th.

pembunuh yang efektif, tetapi yang penting adalah bunyinya yang menakutkan, dan dapat menciutkan moral musuh.¹⁹¹

6. Konsolidasi MPK ALRI Divisi IV

Pasukan ALRI Divisi IV makin bertambah besar setelah pasukan Hisbullah pada bulan Juni 1948 menggabungkan diri. Pasukan Hisbullah pimpinan M. Hammy A.M, yang terkenal dengan julukan “Pasukan Banteng Buas” atau dikenal pula dengan nama “Banteng Borneo” menggabungkan diri dengan 300 anggota pasukannya, sehingga terkumpullah tokoh-tokoh pejuang yang terkenal berani.¹⁹²

Meskipun pembuatan senjata bekerja keras untuk membuatnya, namun tidak mungkin memiliki persenjataan dari semua pasukan yang bertambah besar tersebut. Salah satu daerah pembuat senjata terbesar adalah di kampung Habirau Negara. Di bawah pimpinan Abdul Basri dan Utuh Majeri para ahli pembuat senjata mempekerjakan lebih dari 30 orang dan menghasilkan sekitar 40 pistol jenis colt sehari disamping granat. Hal itulah yang menyebabkan Pimpinan Umum (PU) MPK ALRI Divisi IV mengeluarkan beberapa instruksi lagi yaitu :

- a. Tentang pembentukan “Pasukan Jibaku” yaitu pasukan berani mati untuk melancarkan perebutan senjata musuh setiap kesempatan.
- b. Tentang pembentukan pasukan inti yang kuat dengan kemampuan gerak yang besar.
- c. Tentang penyusutan pasukan-pasukan dalam pembentukan pasukan inti, dan anggota yang tidak terpilih dikembalikan ke pasukan asalnya untuk memperkuat pasukan teritorial yang dikenal sebagai pasukan Riwas.
- d. Tentang kewajiban setiap anggota pejuang yang belum memiliki senjata untuk membikin senjatanya sendiri sebelum “Pasukan Jibaku” berhasil memberikan senjata.¹⁹³

Untuk kepentingan pasukan Jibaku dilakukan latihan secara kilat. Setiap tim Pasukan Jibaku terdiri dari 2 atau 3 orang dan yang beroperasi di kota terdiri dari 3 orang sampai 5 orang. Pasukan Jibaku ini ternyata sangat efektif dalam waktu yang relatif singkat menghasilkan senjata yang cukup lumayan. Serdadu NICA yang tidak mengira bahwa dirinya diintai, berjalan dengan santai dengan senjata mereka. Secepat kilat senjata belati menghujam diperut mereka dan senjatanya dirampas, serta menghilang dengan cepat. Hal ini menyebabkan kepanikan di kalangan serdadu NICA. Suasana kepanikan inilah digunakan kesempatan untuk menyusun kekuatan agar secara operasional berjalan lebih efektif. Segera disusun pasukan-pasukan Inti dengan wilayah teritorialnya sendiri.

- a. Daerah Utara meliputi Daerah Hulu Sungai Utara dan Tabalong, di bawah pimpinan Martinus dan Pembalah Batung, yang bertindak sebagai Komandan dan wakilnya.
- b. Daerah Batang Alai, Barabai dan Labuhan Amas di bawah pimpinan H. Damanhuri sebagai Komandan dan Bachtiar sebagai wakilnya.
- c. Daerah Pagat – Barabai, di bawah pimpinan Daeng Ladjida dan Bachtiar, sebagai Komandan dan wakilnya.
- d. Daerah Hulu Sungai Selatan di bawah pimpinan Ma’rufi sebagai Komandan dan Ibnu Hadjar sebagai wakilnya. Kemudian Ma’rufi dipindahkan ke bagian urusan teritorial maka Ibnu Hadjar sebagai Komandan dan Samideri Dumam sebagai wakilnya, dan dibantu oleh Andi Tajang sebagai Pembantu Khusus.

¹⁹¹ Hassan Basry, *ibid.*, Jilid II, tt.th.

¹⁹² M. Hammy A.M, *op.cit.*, hal. 300.

¹⁹³ Hassan Basry, *op.cit.*, Jilid II, tt.th.

- e. Pasukan Inti di bawah pimpinan Daeng Kucinta Gidul Tololio diberi tugas sebagai pasukan perintis untuk daerah Banjarmasin guna memimpin penyusupan ke daerah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Timur.
- f. Pasukan Inti di bawah pimpinan Rustam diberi tugas untuk mempersatukan pejuang-pejuang di luar ALRI ke dalam tubuh ALRI khusus di daerah Martapura – Banjarmasin.
- g. Pasukan Inti yang bertugas sebagai kepolisian dan penyelidikan dipimpin oleh Setia Budi.
- h. Sebuah Badan Intel Pusat yang diberi nama “BELUT” sementara di bawah pimpinan langsung oleh Panglima.¹⁹⁴

Setelah selesai mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan instruksi, PU Hassan Basry mengadakan perjalanan ke daerah Kalimantan Tenggara. Daerah yang dituju adalah Talusi, PU Hassan Basry singgah di Bungkukan dan beristirahat di markas Pangkalan Belimbing/Gunung Keleker Bungkukan.¹⁹⁵

Daerah ini dianggap oleh Belanda paling aman bagi mereka sebab belum ada tanda-tanda yang mencurigakan bagi Belanda. Itulah tujuan utama dari perjalanan PU Hassan Basry agar daerah ini dikejutkan dengan penyerpapan mendadak agar Belanda menjadi panik dengan situasi yang dianggap mereka aman baginya. Tujuan lain adalah daerah Talusi adalah daerah lumbung beras dimana H. Damanhuri pernah di daerah ini. Hassan Basry tiba di daerah Bungkukan pada tanggal 8 Agustus 1948.

Dalam usaha penyerpapan terhadap Belanda di Bungkukan ini dipersiapkan satu pasukan Inti yang dipimpin langsung oleh Hassan Basry. Pasukan beranggotakan 16 orang di antaranya H. Damanhuri dan Daeng Ladjida, namun hanya memiliki satu pucuk owen gun, satu pucuk karabijn Hamburg 95 dan satu pucuk karabijn yang dapat ditembakkan hanya satu kali dan kemudian tidak berguna lagi.

Penyerpapan terhadap pasukan NICA di Pasar Bungkukan adalah merupakan pertempuran yang paling berhasil mengalahkan musuh, hanya dengan senjata yang sedikit memperoleh hasil yang besar. Pertempuran Bungkukan terjadi pada tanggal 13 November 1948 saat berlangsung hari pasar dan terjadi pada pukul 13.00 Dalam pertempuran ini berhasil dibunuh satu orang komandan polisi, dua orang reserse, dan dua orang agen polisi, sedangkan senjata yang diperoleh 5 pucuk karabijn 95, 3 pucuk karabijn, 8 buah pistol dengan pelurunya, 2 buah granat dan sejumlah dokumen.¹⁹⁶

Di daerah Barito Kuala pada tahun 1948 ini telah terjadi beberapa pertempuran. Pada bulan Maret 1948 terjadi pertempuran antara pasukan BN 10 dengan tentara Belanda di Anjir Pasar KM. 18, pasukan ALRI Divisi IV BN 10 dipimpin oleh Abdurrahman Lubis berangkat menuju Anjir Pasar sebab mendapat laporan, bahwa polisi kilat Belanda datang dari Banjarmasin. Sewaktu berada di Anjir Pasar dicegat oleh pasukan gerilya, maka terjadilah pertempuran, dalam peretempuran ini Abdurrahman Lubis dan Tarlan gugur sebagai kesuma bangsa. Sedangkan di pihak Belanda tewas 4 orang dan sisanya melarikan diri. Sebagai pimpinan pasukan diambil alih oleh Atak Imberansyah, lalu dan selanjutnya mengatur strategi (siasat) untuk perjuangan berikutnya.

Pada bulan April 1948 terjadi pula pertempuran antara pasukan gerilya (BN. 10 ALRI Divisi IV) di bawah pimpinan Atak Imberansyah dengan polisi kilat Belanda di Km. 10 Anjir Serapat. Dalam pertempuran kali ini pasukan gerilya BN 10 mendapat perlawanan cukup sengit. Tidak ada korban pada pasukan gerilya dan di pihak musuh juga tidak diketahui apa ada korban atau tidak. Namun pihak gerilya dapat merampas satu buah motorboat dari tangan musuh (Belanda).

¹⁹⁴ Hassan Basry, *ibid.*, Jilid II, tt.th.

¹⁹⁵ LVRI Cabang Kotabaru, *op.cit.*, hal. 122.

¹⁹⁶ Hassan Basry, *op.cit.*, Jilid II, tt.th.; LVRI Cabang Kotabaru, *op.cit.*, hal. 124 – 125.

Kemudian pasukan gerilya BN 10 bergerak pulang menuju Markas Daerah ALRI Divisi IV Cerbon (Beruang Merah).

Selanjutnya pertempuran berlokasi di kampung Bintang Kurung (Barito Selatan), pasukan gerilya dipimpin oleh Jarman (Dan Ton I) dan M. Gandi (Dan Ton II) diperintahkan oleh Markas Daerah ALRI Divisi IV BN 10 untuk menghancurkan polisi NICA yang sering berpatroli melewati kampung Bintang Kurung. Waktu patroli polisi NICA dari Buntok sedang berada di kampung Kurung dicegat oleh pasukan gerilya BN 10, maka terjadilah pertempuran. Selesai pertempuran terdapat korban di pihak gerilya menderita luka ringan yakni Sahran penduduk asal kampung Jambu. Sedangkan di pihak polisi NICA tidak diketahui adanya korban. Dalam pertempuran ini pasukan gerilya berhasil merampas senjata polisi NICA 6 pucuk karabijn Jepang dan satu pucuk pistol FN.

Karena kerap kali sudah mengalami pertempuran-pertempuran maka Markas Daerah ALRI Divisi IV BN 10 lalu berkonsolidasi atau mempersatukan Komando dan persatuan dengan rakyat sampai keluar daerah Barito Kuala, kemudian Markas Daerah ALRI Divisi IV membentuk Markas Pangkalan-pangkalan di semua desa/kampung dimana dianggap perlu untuk kelancaran perjuangan gerilya.

Pada tanggal 30 April 1948 Markas Daerah BN 10 ini membuat lagi sebuah pedalaman di Anja Gutung yang diberi nama Beruang Merah. Pada tanggal 2 Juni 1948 terjadi lagi pertempuran di sungai Pantai Rantau Badauh antara pasukan BN 10 yang dipimpin oleh H. Suleman Kurdi dengan polisi Belanda, dan dalam pertempuran ini satu anggota pasukan ALRI tewas.

Aktivitas MPK ALRI Divisi IV terlihat dengan jelas selama tahun 1948. Hal ini tertuang dengan jelas seperti apa yang dilaporkan Residen Borneo Selatan A.G.Deelman. Laporan politik yang merupakan laporan "rahasia" dari Residen A.G.Deelman tertanggal 21 Januari 1948, dibandingkan dengan laporan politiknya tertanggal 20 Desember 1948. A.G.Deelman hampir tidak melaporkan tentang keadaan keamanan karena dianggap cukup aman, meskipun gangguan keamanan dari apa yang disebut "pengacau" masih dapat ditanggulangi. Laporan ini berbeda sekali setelah bulan Desember 1948, bahwa Belanda hampir putus asa bagaimana mengatasinya, seperti dikatakannya :

"Baik tuan maupun anggota-anggota dari Dewan Banjar tentu telah mengetahui, bahwa di Hulu Sungai dalam beberapa bulan ini terjadi kerusuhan dengan cara besar-besaran yang sedari permulaan bulan November yang lewat telah bertambah begitu hebat....sebagian besar dari pengacau-pengacau ini ternyata dengan terang bahwa hal ini dilakukan oleh gerombolan yang bersenjata modern dan berpakaian uniform yang bertindak atas nama Republik Yogya, sisanya dilakukan oleh penduduk yang ikut turutan"

Akhirnya surat yang ditujukan kepada Ketua Dewan Banjar di Banjarmasin itu ditutup :

"... Pengacau seterusnya tentu akan memerlukan penangkapan- penangkapan lebih lanjut dan mungkin diambil tindakan-tindakan yang lebih keras ...".

Lampiran pertama surat tersebut berupa daftar kronologis dari sejumlah peristiwa di Hulu Sungai selama 45 hari dari tanggal 1 November 1948 sampai tanggal 15 Desember 1948 berisi 73 pokok kejadian, dan kalau digolongkan berdasarkan laporan Residen A.G. Deelman tersebut berupa : ancaman 14 kasus dan sabotase 1 kasus, pembunuhan/penculikan 15 kasus serta penghasutan 13 kasus, sehingga berjumlah 66 kasus.

Peristiwa-peristiwa tersebut terjadi baik malam hari maupun siang hari tersebar di seluruh Hulu Sungai, bahkan juga di Kalimantan Tenggara, seperti pada tanggal 13 November 1948, ketika pasukan ALRI di bawah pimpinan Hassan Basry menyerang patroli polisi NICA di Pasar Bungkukan (Sampanahan) dan menewaskan 5 orang polisi NICA dan merampas sejumlah senjata. Dari rangkaian laporan Kiai Besar Hulu Sungai, Pangeran Merah Nadalsyah yang disimpulkan dalam

lampiran surat Residen itu, dapatlah diketahui dampak kegiatan gerilya tersebut bagi rakyat dan bagi pemerintah NICA di daerah ini.

Yang mengenai tanggal 28 November 1948 bahwa Kiai Kepala- Kiai Kepala dari Tanjung, Amuntai, Barabai dan Kandangan melaporkan tentang peningkatan dan kekacauan dan surat ancaman, sehingga penduduk tidak berani melaporkan apa-apa lagi. Seterusnya laporan tanggal 7 Desember 1948 menyebutkan bahwa beberapa bagian dari resort tidak dapat lagi dijalankan pemerintahan dengan normal. Kepala-kepala Kampung oleh karena takut lalu meninggalkan tempat-tempat mereka sedangkan mereka yang masih ada di tempatnya lantaran takut tidak berani lagi menjalankan pemerintahan. Laporan tanggal 12 Desember 1948 khusus mengenai pemerasan oleh kaum “ekstremis” di seluruh kampung.

Bagian penutup lampiran surat Residen itu mencatat sebagai berikut :

“...15 Desember Kiai Besar Hulu Sungai telah mengadakan suatu permusyawaratan dengan pemimpin-pemimpin dan orang tua bocah perkumpulan politik untuk menyatakan kepada mereka bahwa adalah kewajiban mereka untuk menghindarkan kaum pemuda dari tindakan-tindakan yang tidak sah dan pengacauan orang-orang tua itu dengan terus terang mengatakan, bahwa mereka tidak ada kekuasaan lagi terhadap kaum pemuda-pemuda, karena mereka ini sangat dipengaruhi sekali oleh propaganda, baik dari Republik maupun dari gerombolan-gerombolan Republik yang bertindak di Hulu Sungai. Mereka menerangkan tidak dapat lagi menjamin sesuatu apapun.”

Lampiran kedua dari surat Residen itu adalah daftar mereka yang telah diinternir sebanyak 26 orang yang dituduh mempunyai hubungan dengan ekstremis-ekstremis. Kalau dianalisa apa sebetulnya yang terkandung dalam surat Residen kepala Dewan Banjar yang sangat terperinci itu, bahkan dijelaskan pula dalam sidang Dewan Banjar seminggu kemudian tanggal 27 Desember 1948.

Memang ada beberapa kemungkinan pertama adalah untuk mengajak Dewan Banjar dengan wibawanya pada rakyat untuk menanggulangi keadaan keamanan yang tidak stabil, setelah usaha Kiai Besar Pangeran Merah Nadalsyah. Tetapi di balik itu Residen berusaha untuk memperkuat alasannya bahwa tindakannya melakukan agresi kolonialnya yang kedua tanggal 19 Desember adalah suatu tindakan yang benar.

Sebagaimana Van Mook juga Residen A.G. Deelman berpendapat bahwa sumber kekacauan adalah Republik Indonesia. Republik yang dianggap tidak mentaati Persetujuan Renville dengan mengorganisir pengacauan-pengacauan dimana-mana, terutama di luar de factonya sendiri. Agar Dewan dapat dibawa ke arah pendapat Residen, beberapa anggota Dewan dari fraksi Republik atau yang berjiwa “Republiken” yakni Zafry Zamzam, Hadisaputra, H. Sibli Imansyah dan Ideham Chalid turut diinternir, yang menurut dalam istilah notulen Dewan adalah “Tamu Istimewa”. Tetapi ternyata kemudian bahwa Dewan dalam keputusannya mengeluarkan suatu resolusi yang tidak membenarkan perang kolonial kedua itu.¹⁹⁷

Seperti yang dinyatakan dari move ALRI tanggal 16 Maret 1948 tentang kontak Pos di Barabai, rupanya Belanda tetap berpegang pada Persetujuan Renville tentang pembentukan Negara Indonesia Serikat yang selambat-lambatnya 1 Januari 1949. Seretnya perundingan antara Republik Indonesia dengan Belanda ke arah itu, menyebabkan ALRI Divisi IV merencanakan melakukan serangan umum.

Dalam lampiran surat Residen di atas dinyatakan bahwa tanggal 3 November 1948 di Pantai Hambawang ditemukan pamflet-pamflet dimana rakyat diserukan supaya berontak pada tanggal 1 Januari 1949 dan ancaman bagi mereka yang tetap mau bekerjasama dengan Belanda.

¹⁹⁷ Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hal. 91.

Pada awal Desember rakyat Hulu Sungai meyakini bahwa pemberontakan atau serangan umum tanggal 1 Januari 1949 tersebut akan terjadi. Sehubungan dengan hal itu di Barabai banyak rakyat menyimpan bahan makanan dan garam.

Di beberapa daerah di Hulu Sungai sejumlah tukang pandai besi dikerahkan untuk membuat senjata darurat, terutama para ahli dari Negara. Buktinya antara lain, bengkel senjata di hutan Kayakah di bawah pengawasan Markas BN.5.S. Kuripan Jaya dan BN.5.S. Danau Terate, Amuntai pimpinan Gusti Mansyah dan H. Hasyim menghasilkan ratusan pucuk senjata dumdum dan granat tangan.

Pada tanggal 21 Desember 1948 kedudukan ALRI di daerah Birayang, di Ambitu, Hawang, Rangas dan Labuhan, jam 08.0 pagi diserang oleh pasukan Belanda, terkenal dengan pertempuran Hawang. Siasat yang dilakukan pasukan ALRI terutama pasukan H. Damanhuri mengatur strategi yang menguntungkan sehingga tidak ada korban di antara anggota pasukan. Pertempuran di hutan Hawang itu sangat seru sehingga pasukan Belanda tidak menyadari bahwa terjadi pertempuran antara sesama mereka sendiri, dan mengakibatkan banyak korban di antara pasukan Belanda sendiri.

Setelah matahari condong ke arah Barat barulah diketahui bahwa yang bertempur adalah di antara sesama mereka, tanpa mengetahui bahwa pasukan ALRI telah menghilang. Itulah pengalaman pahit Belanda yang kedua setelah perang di Bungukuran (Sampanahan).¹⁹⁸

Dalam perang Hawang tersebut meskipun H. Damanhuri telah mengatur siasat yang menguntungkan tetapi perang itu memang sangat seru antara pasukan Belanda dengan ALRI. Perang berlangsung sejak pukul 08.00 pagi sampai sore hari sepanjang 5 Km antara Kampung Ambitu, Hawang, Rangas dan Labuhan. Demikian serunya pertempuran itu, sempat terjadi perang tanding satu lawan satu, dan mengakibatkan korban 6 orang anggota ALRI gugur, 11 orang pihak rakyat, 5 rumah terbakar, sedangkan korban pihak Belanda 99 orang serdadu mati, 6 orang luka-luka.¹⁹⁹

Setelah perang Hawang tersebut, Belanda melakukan tindakan penangkapan, penyiksaan dan bertindak bertambah kejam. Seorang tokoh GERPINDOM di Amuntai, Abdul Azis alias A.R. Tamjid, Kepala Markas Daerah BN.5. Utara telah ditangkap dan disiksa Belanda, kemudian ditembak mati di Padang Basar. Beberapa waktu kemudian Markas Daerah tersebut dimasuki Belanda dan berhasil merampas dokumen, senjata dan Bendera Merah Putih, dan Bendera Kebangsaan ini diinjak-injak oleh seorang perwira polisi Amuntai, bernama Bakran.

Setelah melihat keadaan dan tindakan Belanda maka pada tanggal 25 Desember 1948, karena Belanda telah benar-benar mengkhianati persetujuan Renville, maka perintah serangan umum dikeluarkan berupa sebuah "Maklumat Massa Aksi" oleh Markas Besar ALRI Divisi IV, yang isinya sebagai berikut:

1. Ternyata Belanda tidak memenuhi persetujuan Renville, oleh sebab itu kita berontaklah untuk menyatakan benar-benar ingin merdeka.
2. Kekejaman-kekejaman Belanda telah melewati batas prikemanusiaan. Kita harus rebut kembali hak-hak kita.

Maklumat massa aksi itu setelah ditandatangani pada tanggal 25 Desember 1948, disebarkan seluas-luasnya pada tanggal 1 Januari 1949. Pada tanggal 1 Januari 1949 itu juga dikeluarkan Siaran Kilat oleh Markas Besar ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan sebagai berikut :

Siaran Kilat

- I. Tanggal 1 Januari 1949, adalah hari yang lebih menentukan perjuangan kita.

¹⁹⁸ Hassan Basry, *op.cit.*, Jilid II, tt.th.

¹⁹⁹ Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hal.92; Majalah Mandau bulan Maret 1948.

- II. Kepada kaum Militer dan polisi Belanda yang berkebangsaan Indonesia, supaya menetapkan/menegaskan pendiriannya ikut Belanda atau memihak Republik.
- III. Kepada Pegawai Sipil supaya tegas-tegas memihak Republik dan mengayomi rakyat.
- IV. Kepada segenap lapisan di Kalimantan Selatan, supaya bersiap-siap dengan disiplin yang tinggi melaksanakan/menyambut kemerdekaan, sesuai Proklamasi 17-8-45.

Selamat Berjuang

Tetap Merdeka,

Kepala Pasukan

ttd

Hassan Basry

Markas Besar ALRI Divisi IV

Pertahanan Kalimantan

Wakil I

Kepala Staf

ttd

H.Aberanie Sulaiman

Sebelum tanggal 1 Januari 1949, pasukan Martinus menjelajahi daerah-daerah Hulu Sungai Utara, mula-mula Hayup seterusnya Paringin, Haruai, Tanjung, Tamiang Layang, Sungai Durian dan Kandris (Lapangan Terbang BPM). Tanggal 28 Desember 1948 kota Amuntai diserang di bawah pimpinan Hamdi Budhigawis dan Daeng Kucinta Gidul Tololio.²⁰⁰

Tepat tanggal 1 Januari 1949 tersebarlah maklumat tersebut dengan luas. Keadaan saat itu seperti terlepas kekangan, karena semangat rakyat yang sudah bergelora tak dibendung lagi. Suasana ketika itu menggambarkan kemiripan spontanitas rakyat permulaan revolusi yaitu keadaan gelora rakyat di Jawa setelah Proklamasi 17 Agustus 1945.²⁰¹ Pertempuran hampir terjadi di mana-mana, di kota-kota seperti yang dilaporkan Residen A.G.Deelman pada Dewan Banjar.

Demikianlah kota-kota kecamatan di seluruh Hulu Sungai menjadi sasaran, terutama pos polisinya. Di antaranya serangan terhadap pos polisi Paringin oleh Mansyah, Husin dan kawan-kawan, serangan di Baturandi, Lok Kalait, Muara Jumba dan lain-lain. Dari semua serangan-serangan tersebut berhasil merampas senjata dan melumpuhkan mental musuh. Hasilnya adalah unit-unit pemerintah Belanda tingkat Kecamatan telah dilumpuhkan. Pasukan ALRI dapat bergerak leluasa dan rakyat membantu sepenuhnya.

Sebagai contoh ketika pasukan Martinus pada tanggal 1 Januari 1949 yang terdiri dari 9 orang dengan hanya bersenjata 5 pucuk, hasil rampasan di perkebunan karet Hayup yang selanjutnya diikuti oleh rakyat sebanyak 200 orang, menyerbu pos militer Belanda. Peristiwa itu menyebabkan Martinus mengumumkan bahwa mulai Haruai, Bongkang, Muara Uya dan Mahe telah merdeka.²⁰² Begitu pula pengalaman Martinus tanggal 3 Januari 1949, ketika pasukannya menyerbu Murung Pudak mulai Perusahaan BPM dan daerah Tanjung Tengah, daerah-daerah itu telah dikosongkan Belanda saat pasukan ALRI tiba.²⁰³

Pertempuran 2 Januari 1949 di Negara dilaksanakan atas dasar Surat Instruksi Pimpinan Umum ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan Hassan Basry tanggal 25 Desember 1948, disampaikan oleh Penghubung Utama ALRI Divisi IV Daerah Negara A. Rizal dan Ishak Hasjim.

Formasi gerakan pertempuran bermula dari kampung Hamayung sebagai tempat Markas Komando Pasukan Pertempuran dan Pertahanan, tempat memusyawarahkan rencana

²⁰⁰ Ahmad Gafuri, *loc.cit.*

²⁰¹ Hassan Basry, *op.cit.*, Jilid II, tt.th.

²⁰² Catatan Martinus tentang Perjuangannya

²⁰³ Martinus, *loc.cit.*

pertempuran dan pembagian tugas serta mulai pasukan diberangkatkan. Rute penyerangan itu dari kampung Hamayung terus ke kampung Pasungkan sebagian menyerang ke kampung Pakan Dalam dan sebagian terus ke kampung Baruh Kembang dan Sungai Mandala, dengan sasaran menyerang kekuatan musuh yang berada pada kompleks kantor Kiai dan polisi kampung Tambak Bitin. Sebagian menghadang terhadap bantuan Militer musuh dari jurusan Amuntai dan Kandangan. Penyerangan itu dilakukan oleh Anggota ALRI Divisi IV dan massa yang jumlahnya diperkirakan lebih ribuan orang. Dan persenjataan yang digunakan hanya terdiri dari parang, tombak, serapang dan sepucuk senapan angin. Pertempuran dimulai dari pukul 15.00 sore dan berakhir sampai tengah malam (dua kali penyerangan).

Daerah pertahanan lainnya adalah Kampung Tambak Bitin (Sektor A), Kampung Tumbukan Banyu (Sektor B), Kampung Habirau (Sektor C), Kampung Tambangan (Sektor D), dan Kampung Bayanan (Sektor E).

Nama anggota ALRI Divisi IV yang bertugas dalam Formasi Pasukan Pertempuran tanggal 2 Januari 1949 adalah :

1. Arpan Kaci: Komandan Pertempuran.
2. Abdul Makie : Wakil Komandan Pertempuran.
3. Alidin Arpan : Utusan kepada Kepala Pemerintah NICA di Negara tentang penyerahan senjata yang telah dijanjikan oleh Kiai Negara.
3. Utuh Naseri alias Andi Tanjung : Utusan kepada Pimpinan Umum ALRI Divisi IV untuk menyampaikan adanya pertempuran tersebut, sebagai memenuhi Instruksi, serta juga menyiapkan pasukan.
5. Basuni D. : Utusan ke daerah Pedalaman Danau Tarati Amuntai untuk minta bantuan dan juga turut menyiapkan pasukan.
6. Jamhari, Abdulsani : Menyiapkan pasukan.
Rahimin, Ilas dan Ibus
7. H.Masrani, M. Maki : Menghubungi anggota pasukan dari pedalaman Hambuku.
dan Iskandar
8. Atuti : Komandan Sektor Kelompok A
9. Haris Kaderi: Komandan Sektor Kelompok B
10. Achmad Sanusi : Komandan Sektor Kelompok C
11. Naseri Nasir : Komandan Sektor Kelompok D
12. Jambari: Komandan Sektor Kelompok E
13. M. Arsyad : Komandan Sektor Kelompok F
14. Abdul Hakim : Komandan Sektor Kelompok G
15. Basuni Mochtar : Komandan Sektor Kelompok H

Nama Anggota ALRI Divisi IV yang bertugas dalam daerah Pertahanan tanggal 2 Januari 1949 adalah :

1. Ishak Hasyim : Komandan Pertahanan
2. Abu Hanifah : Komandan Sektor Kelompok A (Tb.Bitin)
3. M. Ideham Jahri : Komandan Sektor Kelompok B (Tum.Banyu)
4. M. Yunan : Komandan Sektor Kelompok C (Habirau)
5. H. Syuaib : Komandan Sektor Kelompok D (Tambangan)
6. H. Jumberi : Komandan Sektor Kelompok E (Bayanan)
7. Hasan Darjad : Pemutus Telepon
8. H. Tarsan : Penyelidik dan siasat
9. Umar Rasjid : Pengatur Perhubungan Daerah-daerah Pertahanan.

Anggota ALRI Divisi IV yang gugur dalam pertempuran tanggal 2 Januari 1949 sebagai berikut :

1. H. Hasyim (Ulama) Umur 50 tahun (Kp. Sungai Mandala)
2. Muit Umur 18 tahun (Kp. Sungai Mandala)
3. Saalluddin Umur 60 tahun (Kp. Tambangan)
4. Aseri Umur 25 tahun (Kp. Habirau)
5. Kamberan Umur 25 tahun (Kp. Baruh Kembang)
6. H. Jakpar Umur 60 tahun (Kp. Baruh Kembang)
7. Pr. Timah Umur 25 tahun (Kp. Baruh Kembang)
8. Rahimin (ditembak waktu ditangkap) Kp. Tambak.Bitin.

Kalau ditinjau akibat pertempuran dimaksud dalam segi materi ALRI mengalami kerugian yakni sejak saat itu banyak korban baik gugur dalam pertempuran maupun ditangkap dan cacat akibat pukulan atau siksaan. Selainnya juga harta benda yang disita ataupun dihancurkannya. Tapi kalau ditinjau dalam segi moril ALRI menang sebab :

1. Berita juga walaupun kecil, turut dapat memberikan arti terhadap perjuangan kemerdekaan dan menunjukkan pada musuh bahwa kita ingin merdeka dan benar-benar anti penjajah.
2. Pejuang-pejuang daerah Negara yang masih tertinggal / tidak tertangkap tetap meneruskan perjuangan, menyusun kekuatan walaupun keadaan terpencar-pencar.
3. Gerakan perjuangan merebut kemerdekaan di daerah-daerah dalam wilayah Kalimantan terus meningkat, baik bergerilya mengadakan sabotase, penculikan terhadap spion-spion musuh dan lain sebagainya yang bertujuan membuat jiwa dan semangat musuh kecut dan tidak aman.

Akhirnya pada bulan Oktober 1949 oleh rombongan Militer Delegasi RI membawa Misi untuk mengadakan gencatan senjata dan perdamaian antara pihak NICA dengan Pemerintah Gubernur Tentara ALRI Divisi IV.

Dan selanjutnya untuk daerah Negara pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan Upacara Penurunan bendera Belanda dan Penaikan Bendera Merah Putih. Upacara tersebut dihadiri oleh alat-alat pemerintah NICA dan pihak ALRI, diadakan di kampung Tambak Bitin Negara.

Pada tanggal 25 Januari 1949 terjadi pula pertempuran di Muara Sungai Rasau antara Polisi NICA dari Banjarmasin dengan pasukan BN 10 yang dipimpin oleh Marlio Hassan, Hasan Basirun dan Ampuri. Dalam pertempuran ini tidak ada korban yang gugur di pihak ALRI, dan juga di pihak musuh tidak diketahui. Selanjutnya pengkhianat bernama Darmansyah yang menyebabkan tertangkapnya Marlio Hassan dan kawan-kawan pada tanggal 11 Januari 1949, dapat ditangkap di Kampung Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh, selanjutnya diadili oleh bagian Kehakiman Pedalaman BN 10 ALRI Divisi IV Marabahan dan Cerbon.

Kemudian tanggal 10 Juni 1949 Markas Daerah merasa perlu membuat pedalaman baru di belakang Kampung Mantuil. Pada tanggal 16 Juni 1949 pertempuran terjadi lagi dengan pasukan polisi NICA di Km 14 Anjir Serapat, pasukan Gerilya ALRI BN10 dipimpin oleh Hasan Bairun, Jerman Andeng dan Bagu Dahlan.

Kekosongan pemerintahan di kampung-kampung dan kecamatan-kecamatan mewajibkan kepada MPK ALRI Divisi IV untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan untuk mencegah kekosongan pemerintahan. Pengosongan tiba-tiba dan tidak terduga. Markas Daerah segera disusun untuk membawahi beberapa Markas Pangkalan, dan sebuah Markas Seksi ditunjuk untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan Kewedanaan, Kecamatan dan Kampung yang telah ditinggalkan kosong oleh pemerintah NICA. Instruksi lain adalah penyempurnaan pasukan

teritorial yang sudah ada di bawah Pimpinan Markas Pangkalan dengan nama tetap “Pasukan Riwas”.²⁰⁴

Situasi daerah dalam bulan Januari 1949 itulah yang menyebabkan diselenggarakannya rapat lengkap pimpinan ALRI pada tanggal 15 Januari 1949 di Ilung. Dalam rapat itu dibicarakan soal-soal organisasi, susunan pimpinan dan rencana atau taktik perjuangan selanjutnya.

Keputusan yang diambil dalam rapat tersebut adalah :

1. Masalah Teritorial

Meningkatkan pembentukan Markas-markas pangkalan dan menyatukannya ke dalam Markas Daerah. Memperluas tugasnya untuk melindungi dan memberikan pelayanan kepada rakyat, berhubung daerah itu telah dikosongkan oleh NICA. Selanjutnya adalah pembentukan seksi yang berada di bawah Markas Pangkalan.

2. Masalah Aktivitas Pasukan

Meningkatkan pembentukan pasukan dan penyempurnaan kesatuannya, agar tiap-tiap daerah memiliki pasukan tempur yang dapat bergerak mobil. Mengadakan rintangan terhadap gerakan operasi militer Belanda, di samping itu meningkatkan serangan terhadap pos atau tangsi dan penghadangan terhadap patroli militer Belanda.

3. Masalah Dana dan Logistik

Meningkatkan pemasukan dana dengan cara mengedarkan kuitansi-kuitansi ke kota-kota, melalui Markas Daerah dan Markas Pangkalan dan menentukan petugas untuk itu. Di samping dana berupa keuangan, ditingkatkan pula pengumpulan bahan berupa natura, seperti beras dan bahan pangan lainnya. Begitu pula pakaian, mesin tik dan perlengkapan alat tulis lainnya. Pembuatan senjata ditingkatkan dan pabrik senjata darurat diperbanyak yang menghasilkan senapan dum-dum, pistol, meriam sundut dan granat burung, juga mengusahakan bahan mesinnya dari bahan kereta api dan petasan.

4. Masalah Penyatuan serta Gerakan Perjuangan

Semua gerakan perjuangan harus disatukan di bawah satu komando, di bawah ALRI Divisi IV, dengan tujuan menyatukan perjuangan dan menyatukan penguasaan wilayah. Untuk pelaksanaannya perlu segera mengadakan perundingan dan kalau perlu menindaknya bagi yang mengingkarinya.

5. Masalah Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, struktur organisasi yang disusun pada pucuk pimpinan di Markas Besar perlu disesuaikan dan ditingkatkan, sejalan dengan peningkatan Markas Daerah dan Pangkalan dan luasnya jangkauan teritorial yang dikuasai.

Personalia Markas Besar Gerakan Divisi IV “A” ALRI Pertahanan Kalimantan berdasarkan rapat di Ilung tersebut adalah :

1. Pimpinan Umum	: Hassan Basry
2. Wakil PU/Kepala Staf	
Kepala Direksi Perjuangan	: H. Aberanie Sulaiman
3. Wakil Kepala Staf	: Hasnan Basuki
4. Penulis Umum/Kepala Kesehatan	: H. Hammy A.M
5. Kepala Sekretariat	: A. Adil alias HAK
6. Kepala Keamanan Markas Besar	: A.R. Haka (Abdurrahman Karim)
7. Wakil Keamanan Markas Besar	: Daeng Ladjida

²⁰⁴ Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hal. 74.

8. Kepala Komisariat Gerakan (urusan teritorial)	: Budhigawis
9. Komisaris Gerakan	: H. Iskandar
10. Komisaris Gerakan	: H. Ahmad Yahya
11. Komisaris Gerakan	: M. Dahlan Saberle
12. Kepala Urusan Agama	: H. Ramli
13. Kepala Keuangan	: Djaperi ²⁰⁵

Setelah terbentuk dan tersusunnya Personalia Pimpinan Markas Besar Gerakan Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan, maka sejak itulah pula kegiatan dan serangan lebih ditingkatkan lagi sehingga lebih sering terjadi pertempuran-pertempuran di mana-mana dalam wilayah Kalimantan Selatan pada saat itu. Kekuatan-kekuatan yang besar pendukung perjuangan Markas Besar Gerakan Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan ini terdiri dari Pasukan-pasukan Penggempur dan Markas-markas Daerah yang membawahi Markas-markas Pangkalan yang berkedudukan di tiap-tiap Desa dalam wilayah kedudukan Markas Daerahnya masing-masing yang terdiri dari :

1. Markas daerah R-27 yang berkedudukan di Birayang yang dipimpin oleh Kepala Markas Daerahnya
 1. Rusli Panangah
 2. Mahyuddin
 3. Z. Mutawakkil
2. Kepala Markas Daerah Z-61 Pagat Mukeri
3. Kepala Markas Daerah R-2 Ilung
 1. Kari
 2. H. Amir Hasan
 3. H. Kumum
4. Kepala Markas Daerah R-27 B Lampihong
 - H. Gurdan (Kiai)
5. Kepala Markas Daerah O-12 Haruyan
 1. Alimin
 2. H. Abdulwahab
 3. Atsmawaty
6. Kepala Markas Daerah X-18 Kandangan
 - Ma'rufi Utir
7. Kepala Markas Daerah O-17 Rantau
 1. Ali
 2. A. Sujadi
8. Kepala Markas Daerah BN-5.U Amuntai
 1. R. Tamdjid (Abdul Aziz)
 2. H. Antemas
9. Kepala Markas Daerah BN-5.S Tanjung/Kelua
 - Abdurrazak
10. Kepala Markas Daerah Baruh Bahinu/Paringin
 1. Kurnia Dina
 2. H. Husin

²⁰⁵ LVRI Cabang Kotabaru, *op.cit.*, hal. 149 ; Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hal. 93.

11. Kepala Markas Daerah RS-10 Gajah Mada Alabio
H. Busthani Djantera
12. Kepala Daerah Kotabaru
Basrindu
13. Kepala Daerah Anjir/Kapuas
1. H.M. Bakeri
2. H. Abas
14. Markas Daerah BN-10 Cerbon Belawang/Marabahan
H. Yunus
15. Markas Daerah PS-14 Kota Gelap Martapura
1. Ali Basah
2. M. Bachtiar
16. Markas Daerah PS-14 Modjokerto Astambul
1. H. Taberi
2. M. Kasmibar
17. Markas Daerah PS-6 ST Bantam Banjarmasin
M.S. Rusman

Kecuali kekuatan besar tersebut di atas, masih ada lagi kekuatan yang besar dan tangguh dengan persenjataan yang lengkap sebagai tulang punggung Markas Besar Gerakan Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan, yang pada setiap saat selalu dipanggil ke Markas Besar dan selalu diandalkan dalam menghadapi setiap serangan dari musuh serta senantiasa dikirim untuk menggempur dan menyerang di mana-mana tempat yang dianggap perlu, ia adalah pasukan Penggempur berbentuk Resimen sebanyak 3 Resimen yang terdiri dari :

1. Resimen Daerah Utara dengan
 Komandannya - Martinus
 Wakilnya - Pambalah Batung
 Ajudannya - Kasuma Jaya
2. Resimen Daerah Tengah dengan
 Komandannya - H. Damanhuri
 Wakilnya - Impat
 Ajudannya - Musa
3. Resimen Daerah Selatan dengan
 Komandannya - Mu'alim
 Wakilnya - Ibnu Hadjar
 Ajudannya - ...

Sebelum bulan Mei 1949, kedudukan Markas Besar ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan senantiasa berpindah-pindah namun tetap berada di sekitar Batang Alai, di antaranya : Kampung Mandam Birayang, Kampung Ipil Birayang, Kampung Limbar Birayang, Kampung Ayah Dangu Birayang, Kampung Ilung Birayang, Kampung Gayaba Birayang, Pematang, Bihara, Aawayan, Badalungga, Tundakan, Baruh Bahinu, Gunung Batu, Pitap, Dawiri/Tanalang, Campan, Pihandam, Rangas Birayang, Batu Kijang, Natih, Batu Tangga Birayang, Cukan Lipai terus berpindah ke Haruyan. Setelah Markas Besar berada di Haruyan selanjutnya berpindah ke Kandangan.

Untuk melaksanakan program penyatuan organisasi perjuangan ke dalam ALRI Divisi IV, bulan Maret 1949 Pemimpin Umum mengutus Budhigawis, Hasnan Basuki dan Ma'rufi ke daerah Selatan. Di Kalinduku mereka disambut oleh Setia Budi, R. Sukadani, Ibnu Hadjar dan Lawer beserta

anak buahnya. Markas yang dituju adalah Malutu, 10 Km sebelah tenggara Kandangan. Di sinilah diselenggarakan pertemuan Kepala-kepala Markas Daerah dan Pangkalan seluruh daerah Selatan yang dihadiri kira-kira 300 orang. Hadir dalam pertemuan itu Daeng Ladjida dan Sunandio, keduanya dari bagian keamanan Markas Besar ALRI Divisi IV. Selain penjelasan tentang struktur organisasi dan program perjuangan, kepada Kepala-kepala Markas tersebut diberikan pula surat pengangkatan mereka masing-masing.

Martinus dan pasukannya bergerak ke arah Banjarmasin dengan tugas rangkap : bertempur dan membentuk pangkalan-pangkalan. Pasukan ini sampai pula di Pelaihari. Dari Resimen Selatan berangkat pula sepasukan dipimpin oleh Lukman alias Abdurrachman Lubis yang dikenal sebagai P. Arya. Dalam suatu pertempuran di Anjir Serapat ia gugur bersama sebagian anggota pasukannya.

Rombongan lain yang dipimpin oleh Daeng Kucinta Gidul Tololio dengan membawa mandat penuh dari pimpinan umum berjalan menyusur pantai Kalimantan Tenggara. Maka berdirilah di sini Markas Daerah dan Pangkalan-pangkalan yang dipimpin oleh Basrindu, M. Aziddin dan HS.Dharma.²⁰⁶

Terhadap masalah MTKI diambil jalan kebijaksanaan, yaitu Pimpinan Umum ALRI Divisi IV mengundang untuk mengadakan musyawarah bertempat di kampung Rangas dekat Birayang yang pada tanggal 13-14 Maret 1949 dengan hasil yang memuaskan bahwa tujuan perjuangan mereka adalah sama. Tetapi kemudian ternyata bahwa MTKI telah melakukan beberapa pelanggaran, di antaranya adalah dalam sebuah kampung yang sudah aman dibersihkan oleh MPK ALRI Divisi IV, terjadi penerobosan serdadu NICA sehingga terjadi korban yang sia-sia dari rakyat dan beberapa anggota MTKI sendiri. Hal inilah yang mendorong untuk mengadakan pertemuan kembali untuk musyawarah yang diadakan pada tanggal 18-19 April 1949 di Bihara, 17 Km di sebelah utara Birayang. Delegasi MTKI menjelaskan bahwa berhubungan dengan keadaan organisasinya waktu itu dan mengingat pula satu komando perjuangan seluruh gerakan di Kalimantan, mengambil keputusan untuk melebur MTKI sejak 19 April 1949 yaitu MTKI Hulu Sungai ke dalam Gerakan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan.²⁰⁷

Wakil-wakil delegasi yang ikut terlihat dalam perundingan itu adalah :

Delegasi ALRI Divisi IV terdiri dari :

1. H. Aberanie Sulaiman	: Wakil Delegasi
2. M. Hammy A.M.	: Wakil Ketua
3. A.Adil (H.A.Kusasi)	: Penulis Delegasi
4. M.13 (M.Dahlan Saberi)	: Anggota Delegasi
5. Abdurrahman Karim (A.R. Haka)	: Anggota Delegasi
6. Hassan Basry	: Anggota Delegasi

Wakil dari MTKI yang menyerahkan dan melebur MTKI ke dalam Gerakan ALRI Divisi IV adalah sebagai berikut :

1. M.AS.Djadi: Ketua Delegasi	
2. A.Satra	: Wakil Ketua Delegasi
3. As.Abdar	: Penulis Delegasi
4. Sukamto	: Anggota Delegasi
5. Bey.Arifin: Anggota Delegasi	
6. Setia	: Anggota Delegasi
7. Amberansah M.S.	: Anggota Delegasi

²⁰⁶ Hassan Basry, *op.cit.*, Jilid II, tt.th.; Ahmad Gafuri, *ibid.*, hal. 94.

²⁰⁷ Ahmad Gafuri, *ibid.*, hal. 94.

Setelah persetujuan ditandatangani antara kedua belah pihak mantan pasukan MN 1001/MTKI diberikan pula jabatan serta tugas-tugas yang sesuai dengan kebutuhan perjuangan.

Sebagai penjelasan kepada pengurus MTKI di Hulu Sungai, maka Markas Besar Gerakan ALRI Divisi IV dalam suratnya tertanggal Jogja (nama samaran untuk tempat Markas Besar ALRI) 19 April IV Rep.no.317/M.B/R.X menegaskan bahwa instruksi Pemerintah Republik Indonesia bulan Juli tahun 1948 memerintahkan kepada seluruh partai-partai yang berada di Kalimantan supaya secepat-cepatnya dilebur menjadi gerakan ALRI Divisi IV. Lagi pula gerakan ALRI Divisi IV bertanggung jawab penuh atas peleburan dan penggabungan, maupun penyerahan segala harta benda MTKI tersebut, seperti tercantum dalam surat jaminan yang ditandatangani oleh Dewan Eksekutif Markas Gerakan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan.

7. Terbentuknya Pemerintah Gubernur Tentara ALRI

Setelah rapat lengkap di Ilung bulan Februari 1949, sangat terasa wilayah kekuasaan bertambah luas. Meskipun telah dibentuk Markas-markas Daerah yang baru dan Markas Pangkalan untuk mengisi kekosongan pemerintahan yang telah ditinggalkan oleh Belanda, namun menimbulkan pemikiran di kalangan anggota pimpinan Markas Besar ALRI untuk mengaturnya menurut tata pemerintahan sipil.

Karena mereka mengaku sebagai alat pemerintah Republik Indonesia, maka daerah ini haruslah berada di bawah pemerintahan Republik Indonesia. Menurut Romansi bahwa dalam surat menyurat antara Hassan Basry, H.Aberanie Sulaiman dan Gusti Aman sesudah reorganisasi ALRI bulan Februari 1949 itu amat banyak membicarakan tentang wilayah kekuasaan dan cara mengatur rakyat.

Sejak konsolidasi Markas Daerah dan Pangkalan-pangkalannya di daerah Selatan oleh Budhigawis maka Markas Daerah berkisar dari tengah ke daerah selatan (Kandangan). Alasan terpenting dari perkisaran ini adalah untuk mendekati pusat pemerintahan dan kekuasaan militer Belanda di Hulu Sungai serta mempermudah hubungan dengan Pangkalan di daerah Martapura, Banjarmasin yang sudah teratur.

Pimpinan Umum berkedudukan di Niih, di sebelah Timur sejauh satu hari berjalan kaki dari Kandangan, sebagian anggota Markas besarnya di Malutu dan Padang Batung. Di Markas daerah Malutu inilah pada tanggal 3 Mei 1949 Gusti Aman dalam pembicaraannya dengan P.Arya (Munir) dan Budhigawis mengemukakan pertanyaan, bahwa rakyat di luar kota distrik (kota kewedanan) sebenarnya mengakui kekuasaan de facto ALRI, Kepala Markas Daerah dan Kepala Markas Pangkalan yang telah diangkat pada umumnya ditaati rakyat. Sedang P.Arya dalam pembicaraan itu perlunya menyempurnakan ekonomi rakyat melalui organisasi koperasi.²⁰⁹

Kenyataan ini merupakan hasil dari penyempurnaan organisasi ke dalam seperti yang tercantum dalam arah dan garis perjuangan hasil rapat di Ilung yang lalu.

Ketika menjelang bulan April 1949 Markas Daerah Riam Kiwa selesai mengadakan konsolidasi dan direncanakan pertemuan dengan PU ALRI Divisi IV di Hulu Sungai. Maksud tujuan pertemuan ini adalah untuk membicarakan rencana-rencana perluasan perjuangan bersenjata ke bidang politik sosial dan ekonomi, agar wilayah Kalimantan Selatan dapat dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia. Dalam bulan Mei 1949 rombongan PS 14 Riam Kiwa yang terdiri dari Gusti Aman, P.Arya (alias R.Bondel Munir) tiba di kota Seribu Daya yang meliputi wilayah perkampungan Pagar Haur, Jelatang, Durian Rabung dan Padang Batung. Di sinilah berpusat

²⁰⁸ Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hal. 96.

²⁰⁹ Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hal. 96.

Markas Besar ALRI Divisi IV. Antara Pagar Haur dan Durian Rabung terdapat Markas Daerah, Markas perbekalan, Markas Direktorat Perjuangan dan Markas Komisariat Perjuangan.²¹⁰

Dalam rangka rencana pembentukan rencana Pemerintahan Militer untuk mengatur wilayah yang luas ini, Kepala Staf H. Aberanie Sulaiman, telah menerima perintah dari Pimpinan Umum Markas Besar ALRI Divisi IV, yang tembusannya juga diterima oleh Gusti Aman. Panitia yang dibentuk oleh H. Aberanie Sulaiman itu dilengkapi dengan Gusti Aman sebagai wakil, Hasnan Basuki sebagai Sekretaris dan Munir (P.Arya) sebagai anggota merangkap bendahara sementara. Rapat pertama berlangsung di Durian Rabung dipimpin oleh wakil ketua, untuk mempersiapkan rapat lengkap dengan diusahakan kehadiran Komandan Sektor, termasuk pimpinan senior. Pembicaraan sehubungan dengan ini berlangsung lagi yang kemudian dipimpin oleh H.Aberanie Sulaiman dan dihadiri oleh Hasnan Basuki, Budhigawis, Daeng Ladjida, H. Damanhuri, Gusti Aman dan Maxim Le Miaty (P.Arya-Munir). Dalam pertemuan ini H.Aberanie Sulaiman menerangkan kepada rombongan Ps 14 Riam Kiwa tentang struktur organisasi ALRI Divisi IV Jawa dan cabang-cabangnya di Kalimantan.

Dalam rapat itu juga dibicarakan tentang memperluas perjuangan bersenjata ke dalam bidang-bidang politik dan ekonomi, meskipun rumusan tentang cara perluasan yang dimaksud belum dapat cepat dicapai.²¹¹

Selanjutnya pada tanggal 2 Mei 1949 diadakan rapat staf Markas Besar yang diikuti oleh Hassan Basry dan H.Aberanie Sulaiman, Gusti Aman, Budhigawis, P.Arya, Hasnan Basuki, H.Damanhuri, Setia Budi, R. Sukadani, Daeng Ladjida dan beberapa orang lagi bertempat di rumah H.Abdul Kadir di desa Durian Rabung, Padang Batung. Ketika rapat sedang membicarakan rancangan susunan Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, datanglah serangan militer Belanda dari jurusan Karang Jawa dan Jambu. Sementara pasukan pengawal berusaha menahan musuh, peserta rapat mengundurkan diri ke arah timur.

Keesokan harinya pada tanggal 3 Mei 1949 sampai di Pagat Batu, rombongan Markas Besar dibagi tiga bagian sebagai siasat untuk menghindari serangan ulang dari Belanda. Sebelum rombongan berpisah Pimpinan Umum mengamanatkan agar segala sesuatu yang telah direncanakan di Padang Batung itu diteruskan pembicaraannya di mana saja berada.²¹²

Kelompok pertama terdiri dari Pimpinan Umum Hassan Basry menuju Niih, kelompok kedua terdiri dari Kepala Staf H.Aberanie Sulaiman beserta Budhigawis menuju Kalinduku dengan tujuan seterusnya ke Telaga Langsat dan Haruyan, sedangkan kelompok ketiga terdiri dari Gusti Aman yang dikenal dengan tugasnya sebagai "Korektor Susunan" bersama P.Arya, dan Hasnan Basuki menuju Mandapai dengan tujuan selanjutnya Telaga Langsat dan Haruyan.

Daeng Ladjida, Setia Budi dan R.Sukadani bertugas mengkonsolidasikan yang terpecah sesudah terjadinya pertempuran dengan Belanda, dan menyiapkan serangan langsung ke kota Kandangan.

Di Kalinduku H.Aberanie Sulaiman bersama Budhigawis mengeluarkan sebuah pengumuman yang isinya melarang kepada orang yang akan pergi haji ke Mekkah. Tujuan dari larangan ini adalah : Untuk membuktikan kepada dunia luar, bahwa di Kalimantan ada gerilya bersenjata ALRI Divisi IV yang lebih berkuasa lagi dari Pemerintah Belanda, dan yang kedua adalah agar uang rakyat jangan mengalir ke Pemerintah Belanda.

²¹⁰ M. Idwar Saleh, 1988, *op.cit.*, hal. 24.

²¹¹ M. Idwar Saleh, *ibid.*, hal. 25.

²¹² Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hal. 98.

Pengecualian dari pengumuman ini adalah diberikan kepada H.Abdul Hadi yang pergi ke Mekkah untuk membawa laporan tentang perjuangan ALRI Divisi IV yang dialamatkan kepada Wakil RI di Saudi Arabia Dokter H.Rasyidi dan diteruskan kepada Wakil RI di PBB.²¹³

Dalam musyawarah selanjutnya diadakan di Ambutun dengan jumlah anggota musyawarah berkurang karena H.Damanhuri, Budhigawis dan Hasnan Basuki tidak hadir. Dalam musyawarah Ambutun ini disetujui kemungkinan untuk membentuk pemerintahan sendiri dipimpin oleh seorang Gubernur Tentara. Rapat diadakan di sebuah rumah antara kampung Ambutun dan Telaga Langsat.

Pada rapat itu Maxim Le Miaty (P.Arya) ditugaskan membuat surat kepada delegasi pemerintah RI di Jakarta dan laporan kepada MPK Divisi IV di Jawa, tanpa mengetahui bahwa jabatan Gubernur Kalimantan dan MPK ALRI Divisi IV telah dibubarkan. Laporan itu berisi tentang pembentukan pemerintahan darurat dan kepada pemerintah Republik diminta untuk mengakui ALRI Divisi IV sebagai pejuang RI dan gerilyanya sebagai gerilya RI, dan juga diusulkan supaya RI mengusahakan supaya tentara KNIL dan KL (*Koninklijke Leger*) ditarik dari Kalimantan Selatan.²¹⁴

Rombongan Pimpinan Umum menuju Niih, dan kedua rombongan lainnya setelah berpisah bertemu di telaga Langsat (nama samarananya Ambarawa). Atas petunjuk Kepala Markas Pangkalan Rasyidi mereka menempati rumah Dumam yang terletak kira-kira 100 meter dari jalan di anak kampung Limau Gampang.

Di sinilah permusyawaratan selanjutnya yang diikuti oleh H.Aberanie Sulaiman, Budhigawis, P.Arya, Gusti Aman, Hasnan Basuki dan Romansi. Perundingan di kota Ambarawa ini dikawal ketat oleh pasukan Setia Budi dan Ibnu Hadjar. Dalam setiap peristiwa penting dalam kancah perang gerilya Ibnu Hadjar selalu setia mengawal Hassan Basry. Rapat ini pada tanggal 15 Mei 1949 berhasil merumuskan struktur pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan.²¹⁵

Gusti Aman mengusulkan agar pembentukan pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV ini dalam bentuk satu Proklamasi 17 Mei. Penyusunan Teks awalnya ditugaskan kepada Maxim Le Miaty (P.Arya-Munir) kemudian disempurnakan lagi bersama. Agar lebih keras lagi isinya sebagai kalimat penutup, H.Aberanie Sulaiman menambahkan kata-kata: *"Dan jika perlu diperjuangkan sampai tetesan darah yang penghabisan"*.

Konsep asli ditulis dengan huruf-huruf balok dengan menggunakan tinta merah. Konsep asli ini disimpan oleh Gusti Aman dan hilang ketika Gusti Aman (dibelakang harinya) ditahan oleh gerombolan Ibnu Hadjar. Perbanyakkan konsep ini ditanda tangani kemudian oleh Pimpinan Umum Hassan Basry, dianggap sebagai lembaran yang asli.²¹⁶

Rapat di kota Ambarawa (Telaga Langsat) itu memutuskan :

1. Memproklamasikan Pemerintah Gubernur Tentara guna mengatasi masalah politik, tata pemerintahan dan masyarakat.
2. Mengatur ekonomi dengan mendirikan koperasi-koperasi dan koperasi terpusat dengan tujuan merubah struktur ekonomi kolonial ke perekonomian revolusioner.
3. Menembus tirai besi NICA agar perjuangan di Kalimantan dapat didengar dan di ketahui oleh Republik Indonesia dan dunia.

Hulu Sungai sudah tidak menjadi persoalan lagi, karena seluruhnya dapat dikatakan sudah dapat dikuasai sepenuhnya. Hulu Sungai dijadikan modal perjuangan selanjutnya bagi daerah-daerah lain. Kota-kota yang diduduki Belanda diblokade sehingga bahan makanan dan bahan-

²¹³ Depdikbud, *op.cit.*, hal. 151-152.

²¹⁴ M. Idwar Saleh, *op.cit.*, hal. 26.

²¹⁵ Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hal. 98.

²¹⁶ M. Idwar Saleh, *op.cit.*, hal. 27.

bahan yang dihasilkan rakyat tidak masuk kota. Yang masih mengalir ke kota-kota hanyalah barang-barang impor yang dilakukan Belanda. Pasar-pasar menjadi sepi dan sebagian besar toko-toko menutup pintu. Sebagian besar penduduk kota mengungsi ke luar kota, menetap di daerah yang dikuasai ALRI. Di kampung-kampung dan di hutan-hutan dibuka pasar-pasar baru guna menampung hasil rakyat. Bahan makanan dan lain-lain mengalir ke pasar-pasar baru ini dan jual beli dilakukan dengan mata uang sementara yang dikeluarkan oleh ALRI : "Uang ALRI ".

Modal kekuatan dan kekuasaan inilah yang menambah keyakinan dan dorongan untuk menyempurnakan langkah-langkah perjuangan dengan modal ini pula dicetuskan sebuah proklamasi menurut program hasil musyawarah Markas Besar ALRI Divisi IV.²¹⁷

Pada malam hari tanggal 15 ke 16 Mei 1949 selesailah teks proklamasi itu dan ditik oleh Romansi. Pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 1949, kira-kira pukul 10.00 pagi dibuatlah proses verbal mengenai musyawarah dan laporan rumusannya, ditanda tangani oleh H.Aberanie Sulaiman, Budhigawis, Maxim Le Miaty dan Romansi. Pada hari itu pula Gusti Aman, Maxim dan Hasnan Basuki ditugaskan untuk membawa dokumen itu kepada Pimpinan Umum Hassan Basry di Niih. Tempat dimana Hassan Basry berada hanya diketahui oleh Hasnan Basuki.

Tanggal 16 Mei 1949 kira-kira jam lima sore, rumah persembunyian Hasnan Basuki dapat ditemukan di Jambu Hulu, di rumah Guru Idar. Rombongan bermalam satu malam di sini, baru keesokan harinya mereka berangkat pada tanggal 17 Mei 1949 ke Hulu Banyu, melewati Lumpangi, Batantangan dan baru tiba pada sore harinya menjelang magrib di Niih.

Selanjutnya rombongan bertemu dengan Pimpinan Umum Hassan Basry dan ajudannya Tobelo di Niih. Rombongan menyerahkan dokumen kepada Pimpinan Umum. Setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Umum, barulah proklamasi 17 Mei ditanda tangani oleh Hassan Basry sebagai Gubernur Tentara.

Proklamasi 17 Mei tersebut kemudian dibacakan oleh Pimpinan Umum dalam suatu upacara di Mandapai yang di hadiri oleh pasukan penggempur, anggota Markas Pangkalan terdekat dan masyarakat setempat. Berita proklamasi ini disebarakan dalam bentuk pamflet ke seluruh daerah.

218

Proklamasi 17 Mei 1949 itu berbunyi :

" PROKLAMASI "

Merdeka :

Dengan ini kami rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan, mempermaklumkan berdirinya pemerintahan Gubernur Tentara dari "ALRI" melingkungi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia, untuk memenuhi isi Proklamasi 17 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Hal-hal yang bersangkutan dengan pemindahan kekuasaan akan dipertahankan dan kalau perlu diperjuangkan sampai tetes darah yang penghabisan.

Tetap Merdeka !

Kandangan,17 Mei IV REP.

*Atas nama rakyat Indonesia
di Kalimantan Selatan*

²¹⁷ Hassan Basry, *op.cit.*, Jilid II, tt.th.

²¹⁸ Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hal. 98.

Dengan mengingat proses pembentukannya, maupun isi dari teks proklamasi 17 Mei 1949 itu, maka nyatalah bahwa dasar dan tujuan proklamasi itu adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan kebulatan hati rakyat untuk merealisasikan kekuasaan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan berlandaskan Proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Tanggal 19 Desember 1948 Dr. Beel sebagai wakil tinggi Mahkota sudah menyatakan tidak terikat lagi dengan Persetujuan Renville, sehingga mengambil tindakan semauanya terhadap Republik Indonesia. Jadi secara objektif timbullah kebebasan kedua belah pihak untuk memperebutkan de facto di seluruh Indonesia. Gerilya rakyat di Kalimantan Selatan yang dipelopori oleh ALRI Divisi IV itu ternyata mampu menghidupkan desa-desa Republik dan kecamatan Republik dengan mengusir atau membekukan alat kekuasaan Belanda di tempat tersebut.
3. Bentuk pemerintahan yang sesuai dengan situasi perjuangan adalah pemerintahan militer dengan pimpinan Gubernur Tentara.
4. Supaya rakyat benar-benar menyadari bahwa pemerintahan Belanda adalah pemerintahan pendudukan asing yang harus dibasmi, karena rakyat sudah mempunyai pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dan kemerdekaan.
5. Adanya pimpinan perjuangan berbentuk pemerintahan yang dipimpin oleh Gubernur Tentara ALRI Divisi IV, lebih meyakinkan rakyat akan berlakunya tertib hukum, tertib ekonomi, kejujuran dan keadilan, sebagaimana lazimnya dalam suatu pemerintahan. Dengan demikian isu-isu tentang selalu dipergunakan kekerasan oleh kaum gerilya dapat dihindarkan.²²⁰

1. Gubernur Tentara/Panglima Divisi	: Hassan Basry
2. Wakil Gubernur/Kepala Staf	: H.Aberanie Sulaiman
3. Kepala Depart.Tata Pemerintahan	: H.Aberanie Sulaiman
4. Wkl.Kep.Depart.Tata Pemerintahan	: Gusti Aman
5. Kepala Departemen Urusan Umum	: Budhigawis
6. Kepala Depart.Urusan Pertahanan	: M.Hammy A.M
7. Wkl.Kep.Depart.Urusan Pertahanan	: AR.Haka (Abdurrahman Karim)
8. Kepala Departemen Penerangan	: Hamdi Budhigawis
9. Wkl.Kep.Departemen Penerangan	: Amin (Isah)
10. Kepala Depart. Urusan Kemakmuran	: P.Arya
11. Wkl.Kep.Depart. Urusan Kemakmuran	: Hasnan Basuki
12. Kepala Departemen Persenjataan	: H.Damanhuri
13. Wkl.Kep.Departemen Persenjataan	: H.Bustani
14. Kepala Departemen Urusan Agama	: Hakim Nasir
15. Wkl.Kep.Departemen Urusan Agama	: H.Hasan Mugni Marwan
16. Kepala Urusan Infiltrasi,Potensi	: P.Arya ²²¹

²¹⁹ Teks dari Arsip Nasional RI. Lihat pula Hassan Basry, *op.cit.*, Jilid II, tt.th.; Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hal. 124 (lampiran No. III).

²²⁰ Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hal. 99.

²²¹ Hassan Basry, *op.cit.*, Jilid II, tt.th.

SUSUNAN PERSONALIA STAF DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN PEMERINTAH
GUBERNUR TENTARA ALRI DIVISI IV PERTAHANAN KALIMANTAN

1. Kepala Departemen Pertahanan dan Keamanan : M. Hammy A.M
2. Wakil Kepala Departemen Pertahanan dan Keamanan : Abdurrahman Karim
3. Penulis : Aberamsah MS
4. Keuangan : Sakawaty (Djohani)
5. Pembantu : Sabery

BADAN KEAMANAN

1. Kepala Keamanan Daerah Utara : Gusti Nasruddin
2. Wkl. Kepala Keamanan Daerah Utara : Tamlicha Adjam
3. Kepala Keamanan Daerah Tengah : Atsmawaty
4. Wkl. Kepala Keamanan Daerah Tengah : Hamidhan
5. Kepala Keamanan Daerah Selatan : Daeng Ladjida
6. Wkl. Kepala Keamanan Daerah Selatan : Satya Budi

BADAN PERSENJATAAN :

1. Kepala Persenjataan : Hasnan Basuki
2. Wakil Kepala Persenjataan : Syamsuddin NN
3. Komisaris Daerah Utara : H. Damanhuri
4. Komisaris Daerah Tengah : Alimin
5. Komisaris Daerah Selatan : Daeng Ladjida

BADAN PALANG MERAH TENTARA :

1. Kepala Palang Merah Tentara : M. Hammy A.M
2. Wakil Kepala Palang Merah Daerah Utara : Aberamsah MS
3. Wakil Kepala Palang Merah Daerah Utara : Ahmad Effendi
4. Wakil Kepala Palang Merah Daerah Tengah : A. Ahmad Salimi
5. Pembantu Kepala Palang Merah Daerah Tengah : Abdulmanan Sayuti
6. Wakil Kepala Palang Merah Daerah Selatan : Mansur
7. Pembantu Kepala Palang Merah Selatan : Diris

RESIMEN DAN PASUKAN

1. Resimen I Utara : Martinus (Hasyim)
2. Resimen II Tengah : Ibnu Hadjar (Haderi)
3. Resimen III Selatan : M.S. Rusman

Resimen I meliputi wilayah Tanjung dan Amuntai, Resimen II meliputi wilayah Barabai dan Kandangan, dan Resimen III meliputi wilayah Martapura-Banjarmasin dan Kapuas.

1. Pasukan Pengawal : Ibnu Hadjar
-

2. Pasukan Bantuan Umum : Daeng Ladjida (Syafar)
3. Pasukan Perintis : Daeng Kucinta Gidul Tololio ²²²

Rencana perjuangan dalam garis besarnya adalah sebagai berikut :

1. Membentuk dan menjalankan pemerintahan Gubernur Tentara.
2. Membagi Kalimantan Selatan dalam dua bagian :
 - a. Daerah Utara meliputi daerah Barabai dan Amuntai serta daerah di utaranya dipimpin oleh H. Aberanie Sulaiman.
 - b. Daerah Selatan meliputi Kandangan, Rantau dan daerah-daerah sebelah selatannya dipimpin oleh P. Arya.
3. Membentuk Resimen I, Resimen II dan Resimen III untuk bagian utara, tengah dan selatan.
4. Memperbanyak persenjataan.
5. Memperhebat propaganda
6. Mendirikan partai Republik Indonesia Kalimantan Selatan untuk menjadi wadah perjuangan rakyat seluruhnya.
7. Membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah Kalimantan.
8. Memajukan kehidupan beragama.
9. Mengatur keuangan dan perekonomian rakyat dengan jalan :
 - a. Menghancurkan perekonomian Belanda
 - b. Mengusahakan biaya perjuangan
 - c. Memperkuat perekonomian rakyat dengan memperkembangkan koperasi.
 - d. Melepas petani-petani dari pengisapan lintah darat.
 - e. Menghidupkan perusahaan karet asap untuk kepentingan biaya perjuangan.
 - f. Mengedarkan uang Republik Indonesia. ²²³
10. Seluruh anggota ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan akan ditetapkan pangkatnya dan jabatannya, untuk pangkat tertinggi ialah pangkat Gubernur Tentara/Panglima Divisi berpangkat Letnan Kolonel.

Pemakaian pangkat militer baru terjadi pada bulan Juli tanggal 3-1949. Sebelumnya Hassan Basry hanya memakai sebutan Pimpinan Umum atau disingkat sebagai PU, pangkat serta jabatan pimpinan lainnya antara lain sebagai berikut :

- a. H. Aberanie Sulaiman, Kepala Staf merangkap Komando Daerah Utara berpangkat Mayor (L).
- b. P. Arya (dengan gelar yang banyak seperti Boncel, Maxim Le Miaty, Hakim Nasir dan lainnya merupakan nama samaran), berpangkat Mayor (L) Komandan Daerah Selatan.
- c. Martinus (nama samaran dan nama asli Hasyim) Komandan Resimen I menguasai daerah Utara berkedudukan di Pasar arba Tanjung, berpangkat Letnan I (L).
- d. H. Damanhuri, Komandan Resimen III bagian Tengah menguasai Hulu Sungai tengah dan Hulu Sungai Selatan dengan kedudukan di Padang Batung Kandangan, berpangkat Letnan Satu (L).
- e. Rustam, Komandan Resimen III daerah Selatan menguasai daerah Kotapraja Banjarmasin (sekarang Kotamadya), Kabupaten Banjar, Kapuas, Sampit dengan kedudukan di Sungai Lulut-Banjarmasin, berpangkat Letnan Satu (L).²²⁴

Pendidikan dan pengadilan diserahkan kepada Kepala Departemen Agama yang pada waktu itu dijabat oleh Hakim Nasir dan Departemen yang kedua ditambah dari personalia di atas ialah

²²² Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hal. 80.

²²³ M. Idwar Saleh, *op.cit.* : 30 - 31.

²²⁴ Depdikbud, *op.cit.*, hal. 158 - 159.

Departemen Infiltrasi dan Tenaga Potensi yang dijabat oleh M. Nurdin. Hakim Nasir dan M, Nurdin adalah Munir.

Dengan ditandatanganinya teks proklamasi dan dokumen lainnya di Niih, lahirlah Gubernur Tentara dan pemerinthan daruratnya. Upacara itu sangat sederhana, tanpa penyempahan, hanya sekedar selamatan penduduk Kampung Niih dengan jamuan ketan dan nasi lamak. Tugas ini cukup berat. Yang menjadi problema adalah bagaimana mempertumbuhkan atau mengembangkn pemerintahan Gubernur Tentara menjadi suatu kenyataan di tengah adanya pemerintahan resmi Belanda di bawah Residen A.G. Deelman, Dewan Banjar, Dewan Dayak Besar dan Dewan Kalimantan Tenggara. Itulah sebabnya pada tanggal 16 Mei 1949 ketika membicarakan tentang Pemerintahan Gubernur Tentara ini, pimpinan rapat H. Aberanie Sulaiman sebagai Kepala Staf markas besar ALRI saat itu sangat antusias menyediakan daerah Kalimantan dengan Gubernur Tentaranya melanjutkan Pemerintahan darurat yang dipimpin Syafruddin Prawiranegara, kalau pemerintahan darurat itu gagal.²²⁵

Pada tanggal 21 Mei 1949 Gubernur Tentara dan rombongan menghilir dengan mempergunakan dua rakit menuju Mandapai. Di Bantantangan Gusti Aman, Maxim (P. Arya) dan Hasnan Basuki mendarat dan menuju Sungai Paring untuk beristirahat dan tiba menjelang magrib. Baru pada tanggal 22 Mei 1949 pagi seorang pejuang yang bergelar si Tarzan ditugaskan menempel teks proklamasi tersebut di Pasar Kandangan yang mengakibatkan dalam waktu singkat proklamasi itu tersebar, bahkan hari itu juga beritanya sampai di Banjarmasin.

Dari Sungai Paring rombongan terus ke Tanjak, disitulah diperbanyak teks proklamasi, program perjuangan susunan Pimpinan Gubernur Tentara, dan Instruksi yang akan dikirim pada tiap Kepala Markas Daerah dan Pangkalan seluruh Kalimantan Selatan. Kepada 40 orang anggota Dewan Banjar dikirim surat untuk meninggalkan Dewan dan membentuk K.N.I Daerah.

Semua surat-surat itu ditandatangani dengan stempel tanda tangan dari Gubernur Tentara yang diserahkan dan dipercayakan bagi keperluan perjuangan kepada Gusti Aman.²²⁶

Selanjutnya Gubernur Tentara mengadakan rapat-rapat Pimpinan Departemen, di antaranya Rapat Pimpinan tanggal 3 Juli dan tanggal 7 Juli 1949.

Rapat pimpinan tanggal 3 Juli 1949 memutuskan hal-hal yang sangat penting sebagai kelanjutan dari program kerja yang telah disusun. Keputusan ini adalah :

- a. Menghapuskan markas-markas daerah dan pangkalan serta markas seksi dan menetapkan kembali sebutan Kepala Daerah dan Kepala Kampung. Pemilihan Kepala kampung diadakan secara demokratis.
- b. Mengijinkan kembali pembukaan rumah-rumah asap, pabrik dan remilling dengan ketentuan perdagangan dilakukan melalui koperasi dan menggiatkan koperasi.
- c. Melarang penduduk Kalimantan Selatan untuk pergi naik haji, yaitu musim haji tahun 1949.
- d. Menetapkan pangkat-pangkat tentara.
- e. Merealisasikan pembentukan polisi tentara dan polisi negara.
- f. Melaksanakan hukum S.O.B. (*Staat van Oorlog en Beleg*) dalam daerah hukum Gubernur Tentara.

Selanjutnya rapat pimpinan tanggal 7 Juli 1949 menghasilkan keputusan yang menyangkut dengan pembentukan komisi umum dan menetapkan pejabatnya.

Keputusan pada rapat itu adalah :

1. Penetapan pungutan pajak dan bea cukai.

²²⁵ Depdikbud, *op.cit.*, hal. 159.

²²⁶ M. Idwar Saleh, *op.cit.*, hal. 33.

2. Pembentukan komisi umum :

- a. Komisi umum dan menjadi koordinator keamanan dalam daerah lingkungannya.
- b. Komisi umum menjadi koordinator keamanan dalam daerah lingkungannya.
- c. Daerah komisi umum adalah daerah propinsi tentara.

Di masing-masing distrik Kalimantan Selatan diangkat Gubernur (Komisi Umum). Para Gubernur ini menjadi Panglima Militer Daerah, dan karena pemerintahan Hassan Basry adalah pemerintahan militer, sekaligus menanggulangi urusan sipil. Bagian Barat Kalimantan Selatan, Banjar, daerah dengan pengaruh ALRI Divisi IV paling kuat dibagi dalam 6 distrik, masing-masing dengan panglimanya sendiri. P. Arya menjadi panglima Banjarmasin dan Pelaihari, Hasnan Basuki dan penggantinya Daeng Ladjida, Panglima Martapura, Gusti Aman menjadi Panglima Kandangan dan Rantau, Budhigawis menjadi Panglima Negara, H. Aberanie Sulaiman menjadi Panglima Barabai dan M. Hammy A.M Panglima Tanjung.²²⁷

Kepala Komisi Umum Daerah Banjar Martapura P. Arya, tetapi P. Arya merasa kebanyakan jabatan rangkapnya, dia meminta kepada panglima agar diganti saja dengan Hasnan Basuki, ia akan memantapkan tugas di kota Banjarmasin dengan bantuan Kapten Mulyono, oleh Panglima diangkatlah Hasnan Basuki menjadi Kepala Komisi Umum Daerah Banjar/Martapura.

Untuk Kepala Komisi Umum Daerah Kotabaru dan Pagatan sulit panglima menentukannya, lalu diperintahkan kepada Peran Kamar, Sahran Gani, Basrindu, AS. Dharma dan M. Azidin Nor, supaya mereka berunding saja berlima, siapa menurut mereka yang menjadi Kepala Komisi Umum, beritahu segera Markas Besar.

Ketika membicarakan hal ini datang surat dari Kotabaru, mereka menyatakan : yang kami pilih ialah Saudara Peran Kamar, maka Peran Kamarlah yang diangkat menjadi Kepala Komisi Umum daerah Kotabaru dan Pagatan.

Untuk wilayah Kecamatan Negara dijadikan daerah istimewa dimana Budhigawis ditunjuk sebagai Kepala Komisi Umum di daerah tersebut.

Proklamasi 17 Mei juga merupakan protes sekaligus pembangkangan terhadap pembentukan daerah otonom Kalimantan Tenggara dan Banjar yang terbentuk sebelumnya. Pemerintahan Gubernur Tentara ini kemudian ternyata berhasil menjadi daerah otonom Banjar dan Kalimantan Tenggara hanya berkuasa di atas kertas.²²⁸

Pemerintahan Gubernur Tentara ternyata membuktikan kemampuannya untuk menguasai wilayah termasuk penguasaan di bidang sosial politik. Usaha pertama dalam hal penguasaan wilayah teritorial dibentuklah jabatan baru dengan sebutan Komisi Umum yang bertindak sebagai Panglima di daerah kekuasaannya. Pembentukan Komisi Umum bertujuan untuk menghadapi segala kemungkinan serangan baru dari Belanda, sedangkan strategi politik ditujukan kepada daerah otonom bentukan Belanda.

Ketika Dewan Banjar terbentuk, ALRI Divisi IV berhasil menjalankan politik mencampuri pemilihan anggota sehingga hasil pemilihan menunjukkan bahwa anggota yang berjiwa "Republiken" ternyata lebih besar dan mampu menunda-nunda terbentuknya "Negara Borneo" daerah otonom yang dicita-citakan Belanda. Sekarang setelah terbentuknya Pemerintahan Gubernur Tentara, kepada semua anggota dikirim surat agar mereka mengundurkan diri dari Dewan dan membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah Kalimantan. Untuk kepentingan ini P. Arya wakil Departemen Urusan Umum ditugaskan ke Banjarmasin mewakili Gubernur Tentara

²²⁷ C. Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, Grafiti Pers, Jakarta, 1983, 211. Lihat juga Hassan Basry, *op.cit.*, Jilid II, tt.th. dan SK *Kalimantan Berjuang*, 29 Agustus 1949 dan 7 Oktober 1949.

²²⁸ C. Van Dijk, *ibid.*, hal. 210.

dalam perjuangan mensukseskan program ini.²²⁹ Hal ini merupakan realisasi dari pelaksanaan program yang pertama.

Usaha kedua adalah melebur MTKI daerah Banjar ke dalam ALRI. Pada mulanya MTKI pimpinan A. Rustam (Guru Alwi) menolak penggabungan ini kecuali keduanya dibubarkan terlebih dahulu dan diganti dengan nama lain. Dalam usaha penyatuan ke dalam Pemerintah Gubernur Tentara, Gubernur mengeluarkan bahwa negara dalam S.O.B.

Dengan dasar ini pada awal Agustus 1949 Gubernur Tentara memerintahkan kepada semua kelompok bersenjata dan perorangan yang bergerak sendiri-sendiri terlepas dari ALRI Divisi IV melaporkan padanya dan menyerahkan senjata mereka kepada satuan-satuan ALRI Divisi IV setempat. Mereka yang membangkang diadili berdasarkan Undang-undang dalam keadaan perang. Karena itulah A. Rustam (Guru Alwi) dan Adenan keduanya dari MTKI ditahan. Di antaranya kelompok yang mematuhi ini adalah terdapat tentara Kucing Hitam, suatu kelompok yang terdiri dari 50 orang anti gerilyawan yang dikepalai H. Hasyim yang beroperasi sekitar Barabai. Pemimpin-pemimpinnya berjanji akan menghentikan semua tindakan teror dan serangan terhadap posisi-posisi ALRI Divisi IV. Dalam menyatakan maksudnya masuk ALRI Divisi IV kepada Pemerintah Gubernur Tentara, ia menyampaikan harapan agar asrama-asrama mereka tidak diserang lagi sehingga sebaliknya mereka terlindung dari serangan ALRI. Kelompok gerilya-gerilya yang lain pun ikut bergabung pada ALRI Divisi IV, di antaranya Gerakan Revolusi Rakyat Indonesia, Mandau Telabang Kalimantan Indonesia (MTKI). Tetapi mereka mau berbuat demikian setelah menghadapi kenyataan, tanpa kerjasama dengan ALRI Divisi IV tidak mungkinlah mereka selamat dari daerah ini.²³⁰

Usaha ketiga ialah menyusun perekonomian dengan sistem koperasi dari keperluan dan produksi desa. Koperasi-koperasi ini berkembang dengan pesat dan tumbuh subur di desa dan di kota, dan berpusat di Banjarmasin sementara dipimpin M. Pongoh Direktur IV Kinibalu. Demikian besar jangkauan koperasi ini dan anggotanya, sehingga bagi mereka yang tidak mempunyai koperasi disejajarkan dengan tidak menyukai perjuangan.²³¹

Usaha keempat ialah pelarangan berangkat menunaikan ibadah haji untuk tahun itu (1949). Dan instruksi itu betul-betul ditaati seluruh rakyat.

Usaha kelima adalah aksi boikot dan pemogokan umum bagi seluruh pegawai NICA, mulai dari babu, sopir, buruh dan pegawai yang bekerja di kantor Pemerintah. Aksi inipun ternyata ditaati oleh seluruh rakyat.

Menjelang datangnya utusan pemerintah Republik Indonesia bulan September 1949, keadaan dan susunan di daerah Kalimantan Selatan berada dalam suasana perang antara NICA dengan Pasukan Pemerintah Gubernur Tentara ALRI. Suasana perang ini terjadi di seluruh kota kewedanaan bahkan ibukota pemerintahan Belanda di Banjarmasin. Dalam hal ini Pemerintah Gubernur Tentara ALRI betul-betul dapat menguasai teritorial yang sangat luas, sedangkan Pemerintah Belanda hanya dapat menguasai di sekitar kota pemerintahannya saja. Selain itu pemerintahan Gubernur Tentara dapat mengatur masyarakat dan wilayah yang telah ditinggalkan Pemerintah Belanda. Ternyata rakyat lebih tunduk kepada perintah Gubernur Tentara daripada Pemerintah Belanda, hal ini terbukti dengan larangan naik haji yang dikeluarkan oleh Pemerintah Gubernur Tentara ALRI dapat diketahui dari laporan Residen Borneo Selatan A.G. Deelman kepada Wakil Tinggi Mahkota di Batavia dan laporan perjalanan tuan G.A.F. de Vries tentang Borneo Selatan, masing-masing tertanggal 12 Juli 1949 dan 29 Juli 1949.

²²⁹ Hassan basry, *op.cit.*, Jilid II, tt.th.

²³⁰ C. Van Dijk, *ibid.*, hal. 212.

²³¹ Hassan Basry, *op.cit.*, Jilid II, tt.th.

Dalam surat laporan Residen Borneo Selatan yang ditujukan kepada Wakil Tinggi Mahkota di Batavia Nomor. 1947/Rahasia Setangan, dia menjelaskan tentang keadaan di Kalimantan Selatan, antara lain disebutkan :

“...pengacau sekarang dalam kota Banjarmasin, sabotase pada NIRUB setengah juta kerugian langsung dan kerugian tidak langsung lebih besar lagi, mengenai gerombolan yang bersarang di kota, 26 orang terbunuh. Menurut berita yang terpercaya sekarang ada pimpinan gerombolan yang dikenal namanya dari Hulu Sungai, karena itu keadaan darurat sehingga kami dengan militer dan polisi bersama-sama tidak dapat mengendalikan keadaan dan jika tidak dapat menjaga semua objek vital ...”

Laporan ini sangat besar artinya bagi Pemerintahan Gubernur Tentara, sebab dari laporan itu dapat diketahui bahwa pemerintah Belanda sudah tidak mampu lagi menghadapi pemerintahan Gubernur Tentara ALRI, bahkan kota Banjarmasin sudah tidak aman lagi bagi Belanda. Militer dan polisi Belanda sudah tidak mampu menghadapinya.

Laporan A.G.Deelman tersebut diperkuat lagi dengan laporan perjalanan Tuan G.A.F. de Vries dari Afdeling kontak federal – RVD tentang Borneo Selatan, tertanggal 29 Juli 1949. Dalam laporan tersebut disebutkan antara lain :

“...keadaan keamanan sejak Desember 1948 sangat cepat merosot. Sekarang keadaan sangat memprihatinkan, kekacauan meluas dari Hulu Sungai ke seluruh Banjar dan telah mulai tampak di kota Banjarmasin. Pada hari kedatangan saya 23 Juli tangsi ditembak pada siang hari bolong. Kampung-kampung di sekitar kota tidak aman lagi orang Eropah bahkan bis KLM yang ke lapangan terbang harus dikawal bersenjata. Di luar kota orang hanya dapat berkendara dalam konvoi. Seorang guru wanita Eropah,²³² yang akhir-akhir ini bepergian dengan kapal sungai yang tidak bersenjata diculik. Tetapi beberapa hari kemudian dibebaskan oleh Belanda. Ada beberapa orang Eropah pejabat perkebunan terbunuh, dan keluarganya diungsikan ke kota. Guru-guru bangsa Eropah di pedalaman diganti dengan orang-orang Indonesia. Menurut Residen, daerah ini “hampir tidak dapat diperintah” lagi. Pasukan tentara hanya cukup untuk mengamankan tempat-tempat tertentu, seperti “pulau-pulau di laut chaos/neraka dan teror “. Baru-baru ini datang kekuatan tambahan sehingga diharapkan ada perubahan situasi....”

Suatu hal yang menarik dari laporan dengan Vries ialah menyebutkan bahwa pasukan Belanda tidak mampu mengamankan tempat-tempat tertentu, bahkan lebih tegas lagi dengan suatu keadaan seperti di pulau neraka dan teror.

Konvoi Belanda sejak saat itu selalu dikawal oleh panserwagen, dan patroli infantrinya didahului oleh bren carrier. Tetapi senjata berat dan modern ini tidak mampu menghadapi gerilyawan yang dengan mudah menyusup ke dalam hutan dan yang mempunyai pangkalan-pangkalan-balik (*terugval basis*) sampai kaki gunung Meratus. Lagipula serangan gerilya terhadap pos-pos Belanda banyak dilakukan pada malam hari. Menurut keterangan penduduk Pagat Batu dan Telaga Langsat patroli Belanda itu paling jauh berani mengejar kurang lebih 5 Km dari jalan raya.

Tinjauan keadaan oleh Kiai Besar Hulu Sungai M.Said, yang menggantikan almarhum Pangeran Merah Nadalsyah sejak 13 Mei 1949, sehubungan wawancara dengan surat kabar “*Kalimantan Berdjung*” akhir Mei 1949 di Kandangan menerangkan bahwa :

²³² Guru wanita yang bernama Koudijs ini mengajar pada sekolah *Opleidingschool voor Hulp Vakonderwijzeressen* (OSHVO) yang mendidik guru-guru kejuruan kewanitaan.

“...meningkatnya bahaya gerilya ini pada garis besarnya ialah, karena tujuan suci dari rakyat dalam mencapai kemerdekaan Indonesia, sehingga yang tadi politik di Kalimantan banyak mengandung kerjasama antara rakyat dan pemerintah kini boleh dikatakan kandas”.²³³

8. Struktur Organisasi Gerilya

Pengorganisasian perlawanan bersenjata di daerah ini sejak munculnya organisasi-organisasi pemberontakan 1945 sampai dengan pemerintahan militer oleh Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan tahun 1949 dapat dibagi dalam tahap-tahap sebagai berikut :

1. Agustus 1945 – November 1946 : Masa gerakan lokal
2. Desember 1946 – Februari 1949 : Masa penggabungan gerakan lokal
3. Maret 1949 – 17 Mei 1949 : Masa peralihan ke pemerintahan tentara.
4. 17 Mei 1949 dan seterusnya : Masa pemerintahan tentara.²³⁴

a. Masa Gerakan Lokal

Dalam masa gerakan lokal terlihat dengan jelas bahwa organisasi-organisasi tersebut terdiri sendiri, karena itu pengorganisasiannya pun juga secara sendiri-sendiri. Tetapi semuanya mempunyai ciri yang khusus yaitu pada bidang kemiliteran, dengan nama yang berbeda-beda. Sebagai contoh daripada “Syaifullah” ada staf pelatih, pada GERPINDOM Amuntai ada Kepala Pertahanan dan Kepala Propaganda, pada GERPINDOM Birayang ada bagian yang namanya Komando Umum, pada BPPKI (Barisan Pelopor Pemberontak Kalimantan) terlihat dengan jelas bagian Komando Batalyon, Komandan Kompi dan pada GERMER ada bagian penyidik, pelatih bahkan ada bagian Palang Merah.

Disamping ciri-ciri kemiliteran tersebut juga yang menjadi ciri umum adalah bahwa semua organisasi itu lebih mendekati bentuk perkumpulan sosial biasa, sebagai contoh dapat dilihat pada dua buah organisasi di bawah ini sebagai perbandingan :

TKR (Banjarmasin, 20-9-1945) : Syaifullah (Haruyan, 5-5-1946)

1. Pimpinan Markas Besar	: 1. Pemimpin Umum
2. Penyelidik/Propaganda	: 2. Wakil Pemimpin
3. Ketentaraan	: 3. Anggota Staf
4. Pengangkutan	: 4. Anggota Staf Pelatih
5. Keuangan	: 5. Staf keuangan
6. Perlengkapan	: 6. Staf urusan pemerintahan ²³⁵

TKR didirikan dalam suasana panas dimana diperlukan mobilitas yang tinggi, tergambar dengan jelas susunan organisasinya dimana lebih menitik beratkan pada bidang kemiliteran. TKR didirikan bulan september 1945, sedangkan Syaifullah didirikan bulan Mei 1946 terlihat bahwa pengorganisasiannya lebih bersifat sosial. Disamping itu juga ditekankan pada latihan dan bahkan satu hal yang khusus lain adalah Staf Urusan Pemerintahan.

Dalam hal ini Syaifullah menyadari, bahwa suatu gerakan yang ingin hidup dalam masyarakat harus mempunyai alat hubungan dengan masyarakat untuk menggerakkan organisasi. Dukungan masyarakat sangat diperlukan agar organisasi itu menjadi milik mereka.

Perluasan masing-masing organisasi pemberontak keluar daerah atau keluar daerah pusat pimpinannya lebih bersifat penyebaran ideologi perjuangan dari pada pembentukan cabang

²³³ Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hal. 100.

²³⁴ Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hal. 69.

²³⁵ Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hal. 70.

organisasi itu. Pengikut-pengikut di daerah baru itu mengkonsolidasikan gerakannya secara otonom pula. Dengan cara demikianlah BPRK Banjarmasin menyebar ke daerah Hulu Sungai, dan BPPKI Hulu Sungai menyebar ke Banjarmasin.

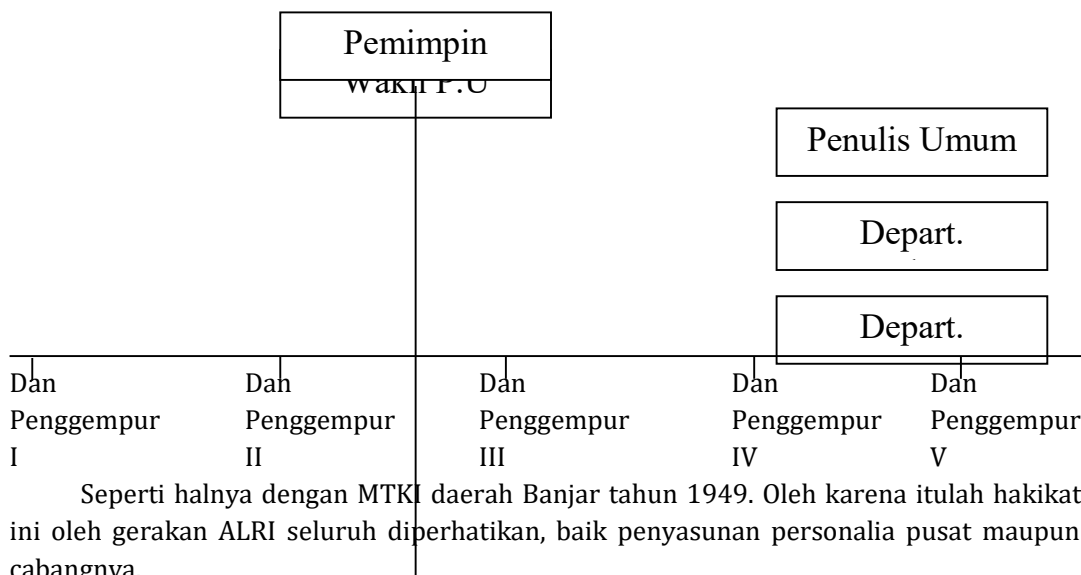
Demikian pula cara yang dilakukan GERMERI, Banteng Indonesia dan lainnya. Gerakan silang bersilang ini dimungkinkan oleh perhubungan yang cukup mudah, perpautan ekonomi daerah produsen dengan daerah perdagangan, dan juga disebabkan oleh karena hubungan keluarga. Dalam hal ini berbeda cara penyebaran organisasi perjuangan di daerah Kotabaru dan sekitarnya.

Di daerah ini lebih mudah mengadakan hubungan dengan Surabaya, Ujung Pandang dan Balikpapan dari pada dengan kota Banjarmasin. Karena itu pengaruh dari daerah-daerah tersebut lebih menentukan dalam bentuk struktur organisasi, tetap meskipun demikian tetap mempunyai ciri yang sama yaitu bidang kemiliteran.

b. Masa Penggabungan Organisasi Lokal

Ketika Batalyon Rahasia ALRI "A " terbentuk November 1946, di dalam organisasi ini terkandung sebuah cita-cita baru, yaitu penggabungan semua organisasi perjuangan. Faktor yang mempermudah proses-proses penggabungan ini ialah persamaan tujuan. Meskipun demikian faktor otonom yang hendak dipertahankan oleh suatu organisasi dapat pula merupakan halangan untuk hal itu.

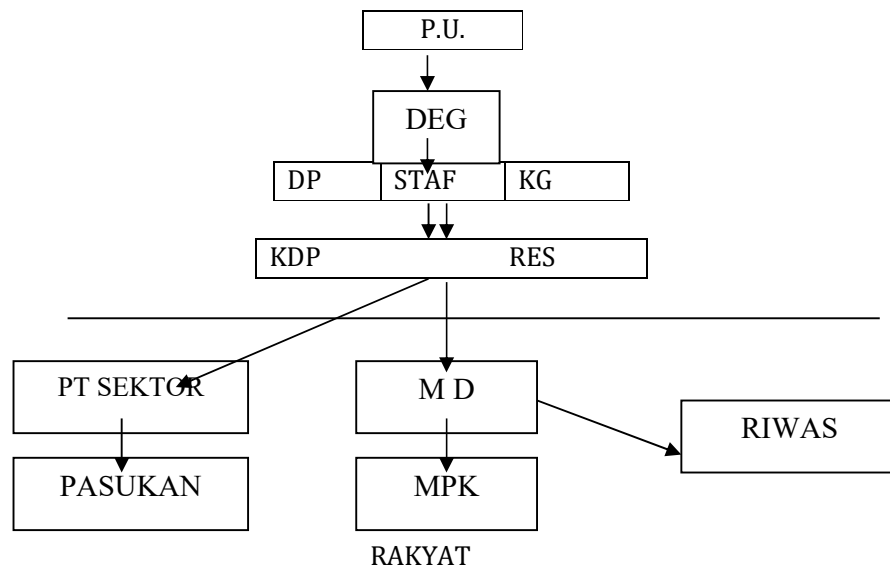
BAGAN ORGANISASI BATALYON RAHASIA ALRI DIVISI IV "A"
PERTAHANAN KALIMANTAN ²³⁶



kemerosotan moral dari Asisten Kiai - Asisten Kiai di daerah pedalaman yang terpencil. Menjelang akhir tahun 1948 sudah banyak orderdistrik yang mereka tinggalkan bahkan ada yang bersama-sama pembekalnya. Daerah ini menjadi daerah yang tidak mempunyai daerah pemerintahan.

Situasi seperti inilah yang menyebabkan diselenggarakan rapat pimpinan lengkap Gerakan ALRI dalam bulan Februari 1949 di Ilung. Perubahan fundamental dari struktur organisasi Gerakan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan yang dihasilkan oleh musyawarah itu adalah pembinaan teritorial. Karena itu Markas Besar ALRI Divisi IV diperlengkapi dengan komisariat Gerakan yang menangani urusan teritorial yang oleh Van Dijk dalam disertainya di sebut Markas Daerah yang membawahi Markas Pangkalan. Bagan organisasi Gerakan ALRI tersebut seperti tercantum di bawah ini.

BAGAN GERAKAN DIVISI IV ALRI
PERTAHANAN KALIMANTAN
Berdasarkan Rapat di Ilung Februari 1949 ²³⁷



Keterangan :

1. P.U. - Pimpinan Umum

²³⁷ Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hal. 106.

- 2. DEG - Dewan Eksekutif Gerakan, terdiri dari Pimpinan Umum, Kepala Staf, Penulisan Umum
- 3. DP - Direksi Perjuangan
- 4. KG - Komisariat Gerakan (Urusan teritorial)
- 5. KDP/RES - Komando Daerah Perlawanan/Resimen
- 6. PT - Polisi Tentara
- 7. MD - Markas Daerah
- 8. MPK - Markas Pangkalan

Seluruh daerah perjuangan dibagi menjadi 3 Komando Perlawanan (KDP) yang pada waktu itu disebut Resimen, yaitu Resimen Daerah Utara, Resimen Daerah Tengah dan Resimen Daerah Selatan. Masing-masing Resimen membawahi beberapa sektor dimana berkedudukan pasukan-pasukan Strategi Komando Daerah Perlawanan dipegang oleh Komando Resimen, sedangkan pasukan taktis di bawah ini Komando Sektor. Komandan sektor diusahakan tidak merangkap Kepala Markas Daerah, karena hal itu akan mengurangi mobilitasnya pemimpin pasukan-pasukan terutama fungsi gerilya. Kepada Komando Sektor diperbantukan regu-regu Palang Merah yang dapat bergerak mengikuti pasukan dan regu polisi tentara. Sejak September 1949 PT disebut CPMK (Corp Polisi Militer Kalimantan).

Di tempat kedudukan Sektor dibentuk Markas Daerah yang mempunyai tugas teritorial seperti keamanan dan ketertiban, ekonomi, kesejahteraan pasukan dan pengintaian. Untuk melaksanakan tugas kepolisian, Markas Daerah membentuk Pasukan Riwas yang dapat pula melakukan sabotase atas alat-alat perhubungan dan perbekalan musuh. Tugas Markas Daerah ini dibantu sepenuhnya oleh Markas Pangkalan. Pengamanan Markas Daerah ini sendiri dibebankan kepada Komandan Sektor dengan pasukan-pasukannya yang biasa disebut Pasukan Penggempur.

c. Masa Pemerintahan Tentara

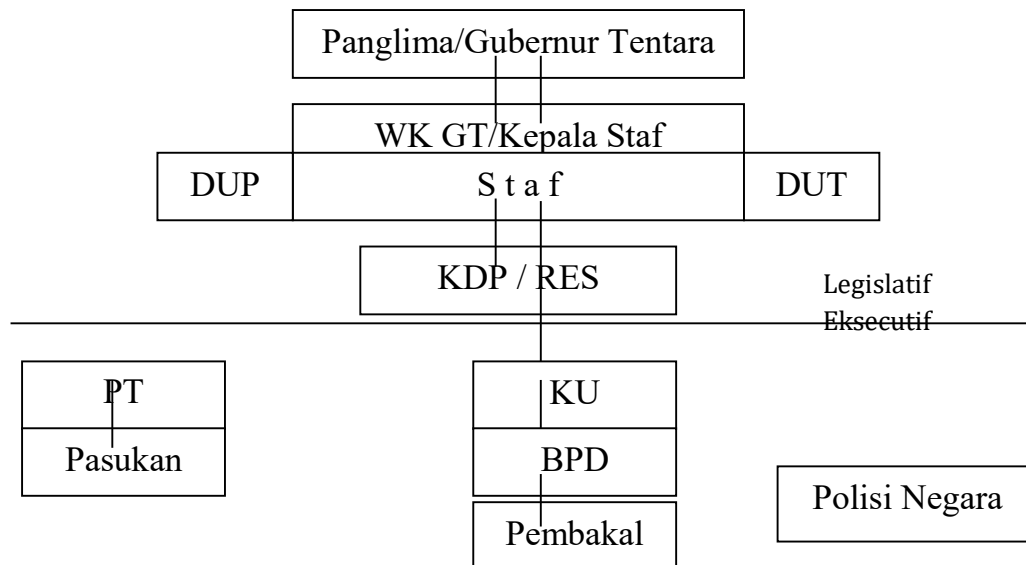
Sejak masa Pemerintahan militer yaitu Proklamasi 17 Mei 1949, terdapat banyak perubahan dalam struktur organisasinya, terutama terhadap KDP (Komandan Daerah Perlawanan) diadakan pengelompokan baru. Resimen Daerah tetap, Resimen Daerah Tengah yang pada mulanya meliputi Barabai diperluas dengan Daerah Kandangan-Rantau, sedangkan Komando Resimen Daerah Selatan yang dahulu berpusat di Kandangan dipindahkan ke Banjarmasin.

Dalam musyawarah lengkap pimpinan ALRI pada awal Juli 1949 ditetapkanlah pangkat militer yang masing-masing anggota ALRI. Hal ini lebih dirasakan keperluannya, karena erat sekali hubungannya dengan hirarki di dalam suatu pemerintahan militer. Dalam hal ini dipergunakan istilah Gubernur Tentara, bukan Gubernur Militer. Di Kalimantan istilah militer selalu dihubungkan dengan pengertian Belanda (KNIL, KL, MP-Militaire Politie) semuanya itu adalah militer Belanda. Sebaiknya istilah tentara selalu dihubungkan dengan gerilya atau ALRI seperti TKR – Tentara Keamanan Rakyat, TRI-Tentara Republik Indonesia, TNI-Tentara Nasional Indonesia.

Dalam musyawarah 3 Juli 1949, ditetapkan pangkat Gubernur Tentara dengan pangkat Letnan Kolonel. Latar belakang penetapan pangkat Letnan Kolonel tersebut harus dicari pada proses pertumbuhan ALRI Divisi IV itu sendiri secara keseluruhan. Letnan Kolonel Zakaria Madun yang tidak setuju atas penggabungan pasukan ALRI Divisi IV ke dalam Mobiele-Brigade ALRI kesatuan XIII yang berpusat di Madiun, karena hal ini berarti penghapusan usaha perjuangan di Kalimantan sesudah persetujuan Renville. Hassan Basry yang mendengar pembubaran Divisi tersebut dan mengetahui pula bahwa Batalyon ALRI Divisi IV (B) Kalimantan Timur dan Batalyon ALRI Divisi IV (C) di Kalimantan Barat telah hancur, merasa berkewajiban memikul tanggung jawab ALRI Divisi IV ini walaupun tidak mendapat surat penyerahan dari Letnan Kolonel Zakaria Madun sebagai Komandan Divisi.

Pangkat Komandan Divisi yang lama itulah yang menjadi patokan yaitu Letnan Kolonel. Dilihat dari segi teritorial yang dikuasai ALRI Divisi IV di Kalimantan memang pangkat itu adalah wajar. Pangkat Letnan Kolonel juga sebanding dengan pangkat *Territoriaal Commandant Voor Zuider en OosterAfdeling van Borneo* di Banjarmasin, yakni Letnan Kolonel Veenendal. Pangkat selanjutnya adalah mayor, hanya untuk kepala Staf Wakil Gubernur Tentara H. Aberanie Sulaiman. Tetapi ternyata kemudian P. Arya yang memegang Markas Daerah Selatan Alam Roh juga memakai pangkat Mayor. Begitu pula pangkat-pangkat selanjutnya sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing. Disamping pangkat juga dibuat tanda pangkat sendiri sesuai dengan pangkat masing-masing.

BAGAN PEMERINTAH GUBERNUR TENTARA
ALRI DIVISI IV PERTAHANAN KALIMANTAN
(Proklamasi 17 Mei 1949) ²³⁸



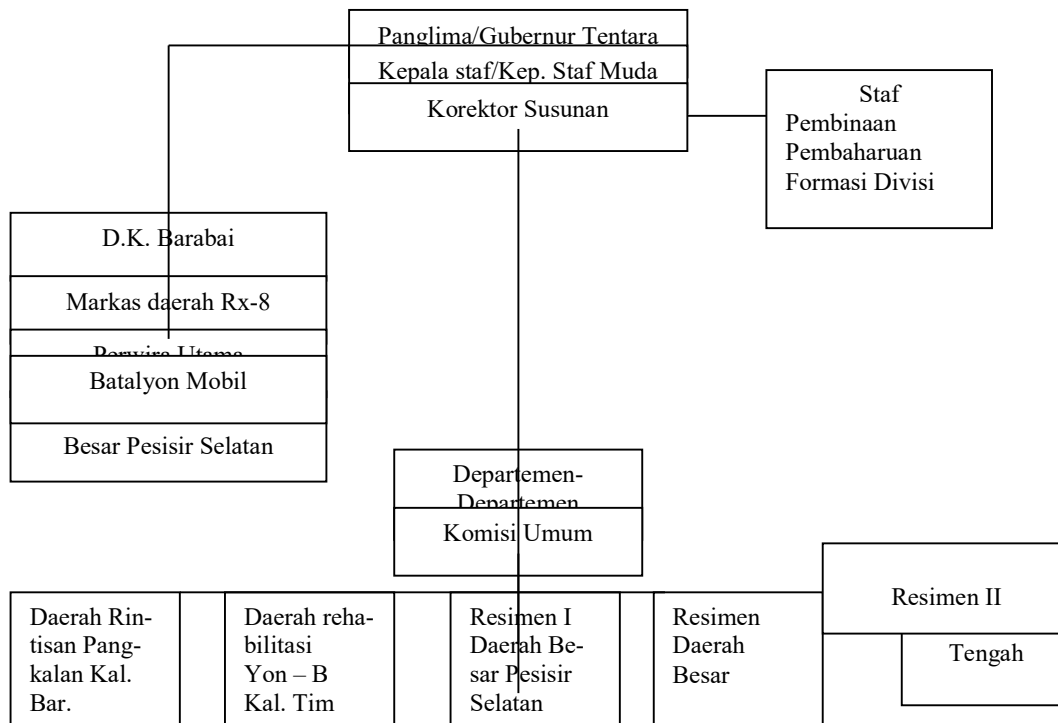
Keterangan :

1. Wk GT	= Wakil Gubernur Tentara
2. DUP	= Departemen Urusan Pertahanan
3. DUT	= Departemen Urusan Tata Pemerintahan
4. KDP/KES	= Komando Daerah Perlawanan/Resimen
5. KU	= Komisi Umum (sejak Agustus 1949)
6. BPD	= Badan Pemerintah Daerah

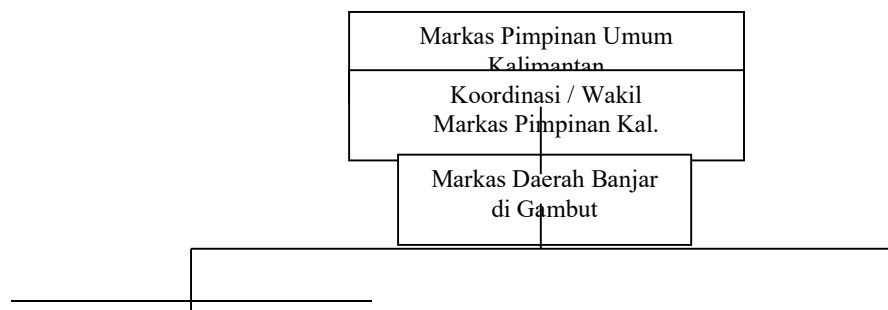
²³⁸ Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hal. 111.

Sebagai perbandingan diberikan pula contoh struktur organisasi saat diresmikan tanggal 2 September 1949 yang perubahannya diserahkan pada Gusti Aman sebagai Korektor Susunan. Disamping itu diberikan contoh struktur organisasi MTKI daerah Banjarmasin yang berkedudukan di Gambut, sebagai organisasi perjuangan yang tetap mempertahankan otonominya dan tidak bersedia menggabungkan ke dalam ALRI Divisi IV.

STRUKTUR DIVISI/GUBERNUR TENTARA
ALRI D.IV PERTAHANAN KALIMANTAN
(Saat diresmikan 2 September 1949) ²³⁹

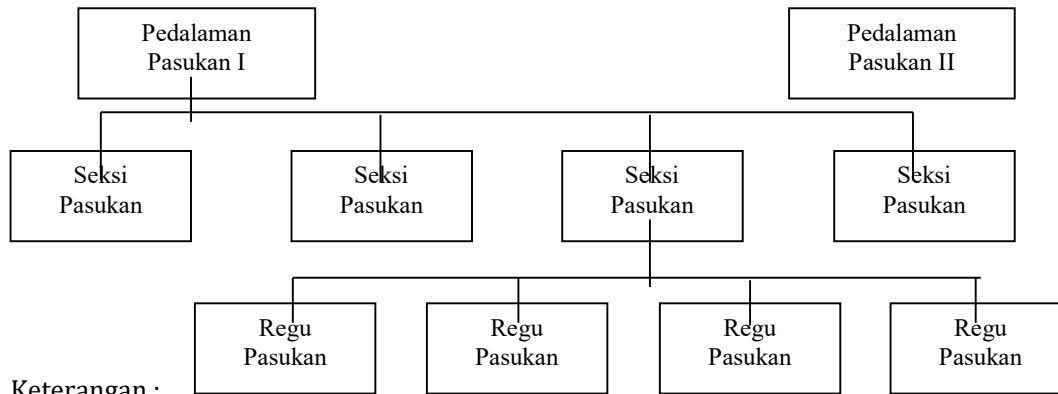


MARKAS PASUKAN MN-1001/MTKI TNI DARAT
Berkedudukan di Gambut ²⁴⁰



²³⁹ G.M. Yaman, *op.cit.* : lampiran.

²⁴⁰ Kodam X / Lam, *op.cit.*, hal. 132.



Keterangan :

Merupakan staf organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Pimpinan Pasukan
2. Wakil Kepala Pimpinan Pasukan
3. Sekretaris I
4. Sekretaris II
5. Staf Keuangan
6. Pembantu Staf Keuangan
7. Staf Kepala Urusan Perlengkapan
8. Wakil Staf Kepala Urusan Perlengkapan
9. Anggota Urusan Perlengkapan
10. Staf Kepala Urusan Pengangkutan
11. Pembantu Urusan Pengangkutan
12. Kepala Urusan Palang Merah
13. Pembantu Kepala Urusan Palang Merah
14. Anggota Palang Merah

9. Peranan Pelajar Pejuang dan Akademi Militer Kilat

Proklamasi 17 Mei 1949 di desa Mandapai Hulu Sungai Selatan telah mendorong meningkatnya semangat perjuangan pada jiwa masyarakat, demikian pula pelajar dari madrasah-madrasah, sekolah-sekolah swasta dan sekolah-sekolah negeri dari segala jurusan. Khusus keaktifan mereka sesuai dengan kondisi lapangan disertai kesigapan yang terampil, diantaranya : antar kirim surat-surat, melacak kesigapan pertahanan tentara NICA, melaksanakan administrasi di pangkalan-pangkalan, palang merah, bahkan tidak sedikit yang langsung mengangkat senjata, berlatih bersama-sama pejuang lainnya.

Beberapa pejuang pelajar langsung meninggalkan bangku belajar, langsung bergabung dengan pejuang lainnya di pedalaman dan tercatat beberapa pejuang pelajar tewas sebagai syuhada, antaranya Abdullatief di Tatah Pamangkih, Syahrani di Barabai. Perlawanan terhadap NICA memanas terus, beberapa sekolah terpaksa diistirahatkan, karena pelajar-pelajarnya masuk hutan bergabung dengan pejuang lainnya atau mengikuti latihan yang intensif.

Kumandang Proklamasi 17 Mei 1949 menggema ke segenap kota di atas bumi Kalimantan. Refleksi daripada gemanya itu, berpengaruh besar sekali bagi anak-anak Pelajar Sekolah Normal (*Normaalschool*) di Barabai. Memasuki dalam bulan Juni 1949 secara serentak mereka meninggalkan sekolahnya, entah dengan cara bagaimana mereka lakukan ketika itu. Tujuan mereka masuk ke pedalaman menggabungkan diri untuk ikut aktif bergerilya menumpas penjajah Belanda.

Kelompok pelajar Sekolah Normal itu kurang lebih terdiri dari 5 wanita dan 60 pria, dan dalam perjalanan mereka ikut menggabungkan diri beberapa orang pemuda militan, sehingga

berjumlah kira-kira menjadi 100 orang pelajar dan pemuda sukarelawan. Di pedalaman mereka di tampung oleh Pasukan X.4 Mu'ui (Haruyan) dan di tempatkan di Kompleks markas cadangan di Padang Besar. Ada 2 bangunan barak, 1 barak ukuran sedang dan 1 barak tempat pertemuan dan lain-lain.

Jelas bahwa tidak mudah bagi mereka untuk langsung diterjunkan ke kancah, mereka harus bersabar menunggu kepastian dari Pimpinan Umum. Sangat menjemukan dan melelahkan memang, hampir satu bulan mereka makan dan tidur saja, apa yang harus diperbuat dan dikerjakan. Beberapa hari setelah tibanya Kapten (L) Danussaputera dari Jawa, setelah persoalan-persoalan diselesaikan maka atas pesan Letkol (L) Hassan Basry masalah anak-anak pelajar normal itu diambil alih oleh Kapten (L) Danussaputera.

Tanggal 13 Juli 1949, Kapten (L) Danussaputera dengan staf dan pengawalnya tiba di markas barunya di Padang Besar. Letak Padang Besar di tengah antara Haruyan, Batu Tangga, Panyiuran, Kandangan dan Telaga Langsat. Di tempat inilah benar-benar disibukkan dengan segala jenis persoalan intern maupun ekstern. Langkah pertama anak-anak Sekolah Normal itulah menjadi "objeknya". Segala materi dipersiapkan dengan teliti. Dua kali mereka dikumpulkan diberi briefing, apa maksud dan tujuan mereka, dengan suka rela lagi tanpa setahu dan seizin orang-orang tua. Sebab langkah dan sikap tegas mereka adalah akan membawa risiko dan tanggung jawab yang teramat besar. Teknis pembinaannya dibantu oleh Letda (L) Urai Nawawi, Serma (L) Noor Ali dan Sersan (L) M. Tosin dan Sersan (L) H. Husin.

Wadah penggemblengan itu diberi nama, Akademi Militer Kilat ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan untuk selama 3 bulan. Resminya dimulai pada tanggal 17 Juli 1949. Sejak hari itu berlakulah semua peraturan hukum disiplin militer. Demikian pula semua peraturan rumah tangga militer, dalam asrama, tidak terkecualikan. Benar-benar satu kejutan bagi para pelajar, itulah kehidupan dalam dunia tentara.

Jadwal mata kuliah berlaku rutin tiap minggu :

- a. Dasar Kemiliteran dan Disiplin
- b. Ilmu lapangan taktik dan strategi
- c. Combat dan psywar dan praktik perang medan.
- d. Ilmu kemasyarakatan
- e. Pengetahuan umum dan apa itu Proklamasi 17 Agustus 1945.
- f. Bahasa Inggris.

Acara cukup padat dan nampak sekali animo semua siswa sangat serius dan penuh kesanggupan. Tidak pernah terjadi hal-hal yang luar biasa dan macam-macam. Para pelajar yang mengikuti pendidikan Akademi Militer Kilat, antara lain adalah ;

1. Paenah (W)	14. Taufik
2. Ratna (W)	15. Orhan
3. Gusti Masrah (W)	16. Usman
4. Gusti Zaenab (W)	17. Hasbullah
5. Mufadal	18. A. Galib
6. Tabri	19. H. Acil
7. Jafar Sidik	20. Rustam
8. Amir Hasan	21. Sulaiman Kuderu
9. M. Yusran	22. Umar Ali
10. Uhing	23. Basuni
11. Asmuni	24. Sukri
12. Adrianson	25. Suryadigul
13. Pahan	

Pada tanggal 12 Oktober 1949 mereka semua menerima Surat Tanda Lulus, dengan Pangkat Sersan (L). Dari sinilah langkah awal, sehingga nantinya formasi ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, Divisi Lambung Mangkurat (Angkatan Darat) atau penyusunan staf divisi, staf resimen sampai dengan staf eselon yang paling bawah diisi oleh kader-kader itu.

Yang tidak ingin meneruskan karirnya di militer meneruskan sekolah ke jenjang lebih tinggi. Dari mereka itu tidak sedikit yang telah menjadi sarjana menurut bidang ilmunya masing-masing dan yang karirnya terus di militer, banyak yang telah menjadi perwira.

Aktivitas pelajar di Banjarmasin di bawah Resimen III Selatan, yang berkembang menjadi enam Batalyon. Batalyon VI Pelajar dipimpin oleh Fachrurrazi, dengan tokoh-tokohnya adalah Gusti Syamsir Alam, Maskur Rivai, Dislansyah dan Riduan Iman.

Sekitar bulan Februari 1948 diketahui ada 3 kesatuan pelajar, yaitu :

1. Batalyon Melati, di bawah pimpinan Gusti Tarmiji.
2. Tentara Pelajar Kalimantan yang bermarkas di Paku Alam II/Alam Roh desa Lok Baintan-Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar di bawah pimpinan Letnan Satu Bambang Sujito dan Letnan Dua Subarjo, sebelumnya dijabat oleh Rawansyah Baderun sebagai Komandan dan wakilnya Nurman Ibas.
3. AKSI (Angkatan Kesatuan Siswa Indonesia) dipimpin oleh Busra Nafarin.

Tentara Pelajar Kalimantan yang dikenal sebagai Kesatuan Tentara Pelajar ALRI Divisi IV bertugas antara lain ikut membantu melatih calon prajurit dari berbagai pangkalan yang dipusatkan di Paku Alam II/Alam Roh. Anggota-anggota tentara pelajar Kalimantan ini antara lain : Rawansyah Baderun, Nurman Ibas, Gusti Syamsir Alam, Riduan Iman, Yaffandi Seman dan lain-lain.

Pelajar-pelajar yang tergabung dalam tentara pelajar Kalimantan ini berasal dari beberapa sekolah seperti : MULO (*Meer Uitgebroid Lager Onderwijs*), Sekolah Menengah Tinggi (SMT), *Kweekschool*, OVVO (*Opleidingschool voor Volksonderwijzers*) dan VHO (*Voorbereidend Hoger Onderwijs*), SMIP, dan beberapa madrasah dari Banjarmasin, Martapura, Rantau, Kandangan, Barabai, Tanjung dan Amuntai

AKSI (Angkatan Kesatuan Siswa Indonesia) pada mulanya diprakarsai oleh Bahri Arpan seorang pelajar Sekolah Menengah Islam (SMIP) Banjarmasin bersama dengan kurang lebih 10 orang pemuda pelajar. Kepada Busri Nafarin diberi tugas untuk mengadakan hubungan dengan kaum gerilya yang secara kebetulan bertemu dengan Abdurrahman Lubis (nama sebelumnya Lukman) seorang pejuang yang membawa misi dari Hulu Sungai.

Pertemuan selanjutnya diadakan di toko jalan Sudimampir yaitu di tempat kursus mengetik "Semangat" di samping Masjid Noor Banjarmasin. Terkumpul sekitar 20 orang pelajar, di antaranya dari SMIP, Ambachtschool dan MULO Banjarmasin, dan sepakat untuk membentuk AKSI (Angkatan Kesatuan Siswa Indonesia), yang sejak bulan September 1948 menjadi bagian dari ALRI Divisi I BN-10 Cerbon dengan M. Yunus sebagai pemimpin dan Busri Nafarin sebagai wakilnya.

Pada 28 November 1949 diresmikan berdirinya Brigade Pelajar Kalimantan oleh Letnan Kolonel Sukanda Bratamanggala yang langsung sebagai Pj. Komandan dan Soetomo sebagai Kepala Stafnya. Brigade Pelajar Kalimantan itu berasal dari eks AKSI BN-10 Cerbon Marabahan pimpinan Busri Nafarin, eks Tentara Pelajar Banjarmasin pimpinan Rawansyah Baderun, eks Batalyon Melati. Sejak tahun 1950 dengan keputusan KSAD, apa yang disebut tentara pelajar telah dibubarkan.

G. PERJUANGAN PASUKAN MN 1001/MTKI

MN 1001/MTKI adalah kelompok gerilya terbesar kedua setelah ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan. Jumlah pasukannya cukup banyak dan mempunyai wilayah kekuasaan teritorial yang cukup luas. Berbeda halnya dengan MN 1001/MTKI Hulu Sungai yang telah menggabung diri ke dalam ALRI Divisi IV, MN 1001/MTKI Daerah Banjar tetap bertahan pada pendiriannya untuk tidak

menggabungkan pasukannya. Secara bijaksana kedua pimpinan memang mengusahakan agar terdapat saling pengertian, akan tetapi kadang-kadang terjadi bentrokan antara pasukan ALRI dengan MTKI.

Di Marabahan MN 1001/MTKI mempunyai anggota yang cukup besar, sebab sebelumnya merupakan gerakan rahasia BPRI (Barisan Pemberontak Republik Indonesia) yang telah berdiri pada tahun 1945 tanggal 3 Desember. Pada tahun 1948 pejuang MN 1001/MTKI yang berada di Marabahan memilih serentak bergabung dengan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, dan selanjutnya menetapkan Markas Daerah dengan sandi BN-10 Cerbon, dengan tokoh-tokoh Pimpinan antara lain M. Yunus, Imperby, Atak Imberansyah dan lain-lain.²⁴¹

Di Pelaihari MN 1001/MTKI tumbuh atas kegiatan Mukran yang sebelumnya bersama-sama Tjilik Riwut yang berasal dari rombongan ekspedisi dari Jawa ke Kalimantan.

Pada bulan Maret 1947 pertama kali MN 1001/MTKI bertempur melawan Belanda di Jambu Burung yang menimbulkan banyak korban. Sejak itu MN 1001/MTKI lebih memusatkan pada konsolidasi organisasi dengan menetapkan Markas Komando Pedalaman di Handil Ilung dengan nama sandi Pedalaman Surabaya.

Tokoh Pimpinan MTKI dipegang oleh A.Abdul Gani dengan nama samarannya Parok, Daeng Umariah, Mahyu Arif, Artha Arif dan lain-lain. Selain Markas Komando di Handil Ilung, MN 1001/MTKI mempunyai markas perjuangan lainnya seperti di Kurau dengan nama sandi Tanjung Perak, Handil Suruk dengan nama sandi Jakarta dan Handil Purai dengan nama sandi Ponorogo.

Dengan keberangkatan A. Mukran yang cukup lama dan tidak ada kabar beritanya, membuat kekosongan jabatan Pimpinan Umum. Atas desakan para tokoh MN 1001 disembunyikan dengan nama Pasukan P.5 (Penggempur-Penculik-Pembakaran-Penghalang Aksi Musuh-Penyelidik), dan kemudian diubah/diganti menjadi nama "MTK". Penggantian ini sebagai akibat adanya Persetujuan Linggajati yang dilakukan antara Pemerintah Republik Indonesia, dengan pihak NICA pada tahun 1947. Dalam perjanjian itu daerah Kalimantan tidak sebagai wilayah Republik Indonesia, tetapi sebagai de facto NICA, sehingga pasukan MN 1001 yang merupakan kesatuan tentara dari pemerintah RI tidak diperkenankan berada di Kalimantan.

Untuk menyelamatkan perjuangan, maka nama Pasukan MN 1001 diubah menjadi MTK (Mandau Telabang Kalimantan). Hal ini dimaksudkan agar NICA menganggap perjuangan MTK adalah gerakan lokal yang tidak ada hubungannya dengan Jawa.

Dengan berubahnya nama Pasukan MN 1001 menjadi MTK, maka semua markas perjuangan yang dulunya di bawah komando pasukan MN 1001 Kalimantan seperti Markas 6 Pasukan MN 1001 daerah Banjar berubah menjadi Markas MTK daerah Banjar. Dan untuk keseragaman nama MTK, Markas MTK daerah Banjar yang merupakan pusat perjuangan Pasukan MN 1001 dulunya, mengirim Arifin ke Barabai untuk mengubah nama perjuangan menjadi MTK.

Dalam rangka menjalankan tugasnya, Arifin tertangkap, dan berkas perjuangan yang dibawanya jatuh ketangan NICA. Arifin dipaksa untuk memberitahukan markas perjuangan MTK dan tokoh-tokohnya. Maka pada hari Jum'at, bulan April 1947 dilakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh MTK daerah Banjar (Km 13 Gambut). Mereka yang berhasil ditangkap adalah Mahdjuri (pimpinan markas MTK daerah Gambut), Usman, Basuni, Sakhrul, Djaderi, Khairul Saleh, Kawi, Sa'I, Ikau dan Umbah. Mereka dibawa ke Banjarmasin untuk ditahan dan kemudian dibawa ke Barabai untuk dihadapkan kepada Arifin. Namun dalam proses pengadilan di sana, ternyata mereka tidak

²⁴¹ M. Idwar Saleh, "ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan: Lukisan tentang Pertumbuhan, Perkembangan dan Kemundurannya", FKIP Unlam, Banjarmasin, 1988, hal. 24.

terbukti bersalah melakukan pemberontakan terhadap pemerintah NICA, sehingga mereka dibebaskan. Pembebasan dilakukan pada tanggal 24 September 1947.

Pada penangkapan terhadap tokoh-tokoh MTK tersebut di atas, Basuni Antari terlepas dari sergapan militer NICA, karena sempat menyembunyikan diri, dan akhirnya NICA tertangkap Basuni yang lain, yaitu Basuni yang bertempat tinggal di Kertak Hanyar. Basuni Antari yang terlepas dari sergapan, dipanggil oleh Aliansyah Yusuf untuk masuk dari ke Pedalaman Handil II Gambut. Ternyata di sana sedang diadakan gerakan terbuka (gerakan radikal) dipimpin oleh Satar, Irup dan Zailani yang telah menawan 2 orang polisi NICA. Peristiwa penawanan ini berlanjut kepada pertempuran Jambu Burung dan pertempuran Handil II.

Pada dasarnya pertempuran Jambu Burung dan Handil II tidaklah terlepas dari adanya Pasukan P.5 (Penggempur-Penculik-Pembakaran-Penghalang Aksi musuh-Penyelidik) yang merupakan inti dari MTK. Pasukan ini melakukan aksi-aksinya dalam menghadapi NICA dan antek-anteknya. Aksi penculikan mulai dilakukan dengan menculik 2 orang polisi NICA dan seorang spion di Handil Babirik. Aksi penculikan ini didalangi atau digerakkan oleh Sakrani, seorang buronan pemerintah NICA di Amuntai, yang berhasil melarikan diri sampai ke Handil Babirik. Dialah yang membakar semangat perjuangan kepada para pemuda yang pada saat itu sudah menjadi MTK.

Dengan bantuan para pemuda seperti Rasyidi, Ijun, Sabrur, Asit, Durasul, Tuhilul, Kucing Hitam (nama samaran), Djailani, Djinal, Irup Djinal, Mas'abi, Iberamsah, Satar dan beberapa yang lainnya, Sakrani pada tanggal 3 Mei 1947 telah mengepung 2 orang polisi NICA dan seorang spion yang berada di rumah Pangeran H. Anang. Salah seorang di antara mereka, yakni spionnya mencoba mengadakan perlawanan terhadap para pejuang, tetapi nyaris terbunuh, sedangkan 2 orang lainnya menyerah, dibawa ke Handil Gambut, dan dua pucuk senapan merk 95 serta dua kelewang berhasil disita.

Setelah melakukan aksi penculikan di Handil Babirik, Pasukan MTK Daerah Banjar merencanakan penyerangan ke Jambu Burung, Pos Polisi NICA yang dijaga oleh 6 orang polisi pimpinan H. Jabar dan anaknya Jantera. Dalam penyerangan ini, Pasukan MTK daerah Banjar telah melakukan kontak/hubungan dengan pasukannya, baik pasukan yang berada di Handil Babirik, Jambu Burung, Sungai Kupang maupun yang berada di Handil Babirik II. Maka pada malam Senin, tanggal 5 Mei 1947 bergeraklah semua pasukan tersebut menuju sasaran, yakni pos polisi Jambu Burung. Dari Handil Babirik di bawah pimpinan M. Arifin bersama beberapa orang temannya seperti Pahrul, Sabri, Muchtar Ibak, Sulaiman, Idrus dan lain-lain. Dari pasukan MTK yang berada di Jambu Burung dipimpin oleh Sutera Ali, dan dari Sungai Kupang dipimpin Guru Basrah. Ditambah pasukan yang datang dari Handil II.

Penyerangan yang dilakukan pada malam hari ini, sebenarnya telah diketahui oleh pihak musuh/polisi NICA Jambu Burung, sehingga tatkala pasukan mendekati pos polisi, mereka sudah mendapat tembakan yang beruntun. Beberapa orang anggota terkena tembakan. Dari pasukan kiriman Handil Babirik 2 orang yang terkena tembak, yaitu Sulaiman dan Muchtar Ibak tertembak di paha dan kaki sebelah kiri. Tetapi mereka berdua berhasil diselamatkan oleh Idrus menjauhi pertempuran. Sedangkan dari pasukan Sungai Kupang, ada beberapa orang yang terkena tembak dan satu di antaranya tewas. Mereka yang tertembak itu adalah Utuh Gudai, Basrih Gudai, Guru Basrah Amas dan Muhammad Ahmad, sedangkan yang tewas adalah Gani Gudai.

Melihat banyaknya anggota pasukan MTK yang tertembak dan keadaan yang kurang menguntungkan, maka pasukan segera mengundurkan diri dari arena pertempuran, dan pasukan mengurungkan niatnya untuk meneruskan penyerangannya, sehingga kekalahan ada di pihak pasukan MTK.

Sebagai akibat dari pertempuran Jambu Burung telah menimbulkan dua masalah besar. Pertama, bagi pihak NICA pertempuran itu merupakan pembangkangan/perlawanan rakyat

terhadap kekuasaannya, dan itu sangat membahayakan keberadaannya di Kalimantan Selatan. Karenanya agar tidak terulang lagi peristiwa itu, NICA melakukan pengawasan yang ketat, dengan melakukan penangkapan terhadap pemuda dan laki-laki tua yang mereka curigai. Penangkapan tersebut tidak hanya dilakukan terhadap pemuda dan laki-laki tua yang berada di Jambu Burung, tetapi juga dilakukan sampai ke Babirik dan Handil Gayam. Di Handil Babirik, NICA telah menangkap beberapa orang pemuda, dan para tokoh SKI yang mendukung dan melindungi para pejuang. Mereka tersebut antara lain Suriansah yang lebih dahulu tertangkap, Tarmidji, Leo Bungai, dan beberapa orang lainnya sempat melarikan diri, seperti H.Kaderi yang melarikan diri ke Hulu Sungai. Di Handil Gayam juga NICA telah menangkapi para pemuda di sana. Mereka yang tertangkap itu digiring ke penjara Pelaihari.

Adapun akibat yang kedua adalah di pihak rakyat Kalimantan Selatan. Bagi rakyat Kalimantan Selatan, khususnya para pejuang MTK, peristiwa itu telah membangkitkan semangat perjuangan. Karenanya kekalahan di Jambu Burung, kemudian dibalas dengan mengadakan penyerangan ke pos polisi NICA yang berada di Km 14 Gambut.

Untuk menyerang Pos Polisi tersebut terlebih dahulu pasukan MTK melakukan gerakan terbuka (radikal) dengan latihan-latihan militer, yaitu bagaimana menghadapi musuh, bagaimana cara melakukan penyerangan, dan baris berbaris. Selain itu juga diberikan penerangan-penerangan untuk membangkitkan semangat perjuangan. Gerakan terbuka ini mulai dilaksanakan sejak kedatangan Irup, Satar dan Zailani serta dua orang tawanan ke Handil II.

Pada malam Senin, tanggal 5 Mei 1947 diadakan latihan-latihan militer, yang dilatih oleh Hadariah (bekas Heiho), dan Norma Atak (Tambon), sedangkan sebagai juru penerangnya adalah Aliansyah Yusuf. Oleh Aliansyah Yusuf, pada malam Senin dilakukan pengiriman pasukan ke Jambu Burung dalam rangka membantu penyerangan di Jambu Burung.

Dengan kekalahan di Jambu Burung, telah menambah ditingkatkannya latihan militer, baik siang maupun malam. Latihan tersebut dilakukan di depan Masjid Handil II (sekarang bernama Masjid Asy-Syuhada). Didepan teras masjid inilah sejak malam Senin dikibarkan Bendera Merah Putih. Pada malam itu juga dibuat dapur umum, untuk memberi makan para pejuang yang sedang latihan. Seiring dilakukannya gerakan terbuka, dilakukan penempelan gambar/cap segitiga, yang bertuliskan huruf Arab, dengan bacaan *"Allahuwahdahulaa Syarikalah Muhammadan 'abduhu warasuuluh"* dimuka-muka rumah penduduk. Maksud penempel tersebut adalah agar para pejuang mengetahui bahwa setiap rumah yang dicap itu merupakan orang-orang yang mendukung perjuangan/para pejuang. Cap yang dibuat dari kertas itu, ditulis oleh Lambri Bustani, seorang anggota MTK Kota Praja Banjarmasin, yang melarikan diri ke Handil II.

Di Handil II pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 1947, datang 2 (dua) orang utusan bernama Masdar Mahdi (menantu kepala desa Jantera) dan M. Laziun. Mereka berdua disuruh oleh kepala desa Gambut, yaitu Jantera untuk menyampaikan berita mengenai penyerangan yang akan dilakukan NICA ke Handil II dan menyerukan agar para pejuang meninggalkan pedalaman Handil II. Mendengar berita tersebut, sebagian pejuang ada yang meninggalkan Handil II, di antaranya adalah Basuni Antari bersama Masdar Mahdi dan M. Laziun melewati Tambak Sirang/Laut tetapi sebagian besar lainnya tetap berada di Handil II, malah mereka dengan semangat juang yang berkobar-kobar, berinisiatif melakukan penyanggulan dan penyerangan terhadap NICA yang sedang melakukan penyerangan.

Dari Handil II, sebagian para pejuang MTK yang dipimpin oleh Aliansyah Yusuf, Hadariah H, Norman Atak, Irup, Satar, Djailani dan Masdjuri bergerak keluar menuju Malintang, dan sebagian lagi memotong jalan melewati sawah, seperti Arpani, Rafi'i dan beberapa orang lainnya.

Dalam perjalanan menuju Malintang, banyak pejuang MTK yang berada di Guntung Papuyu, Pasukan MTK bertemu dengan militer NICA. Dengan memegang senjata keris, pedang/mandau,

tombak, bambu runcing dan hanya beberapa orang saja yang memegang senjata api, dengan semangat fisabilillah para pejuang terus maju menghadapi militer NICA. Kemudian militer NICA melepaskan tembakan ke arah para pejuang. Seketika itu juga beberapa para pejuang MTK tewas kena tembakan, sebagian lagi ada yang menghindarkan diri dari tembakan dengan terjun ke sungai dan bersembunyi di rumput-rumput padi mengikuti para pejuang yang lebih dahulu bersembunyi di situ. Disamping itu juga ada yang mengundurkan diri sambil meloloskan diri. Bagi mereka yang menghindarkan diri dengan terjun ke sungai dan bersembunyi di rumput-rumput padi menjadi sasaran tembakan militer NICA berikutnya, karena mereka tidak sempat meloloskan diri. Akhirnya satu persatu di antara mereka kena tembak. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 7 Mei 1947.

Setelah pertempuran itu usai dan kemenangan berada di pihak militer NICA, maka militer NICA meneruskan penyerangannya ke Handil II. Penyerangan tersebut dilakukan, karena mereka mendapat laporan dari salah seorang polisi NICA yang berhasil meloloskan diri dari kurungan Handil II bahwa pusat perjuangan MTK berada di Handil II. Di Handil II ini, militer NICA tinggal selama 3 malam 2 hari. Pada malam pertama, militer NICA membuat kemah dan meronda di Pasar Sabtu, kemudian siang harinya militer NICA berpindah ke rumah H. Yahya, karena mengetahui bahwa di rumah tersebut merupakan tempat markas MTK dan di sana dulunya tempat persembunyian Tjilik Riwut dan tokoh-tokoh lainnya. Selain itu juga H. Yahya lah yang memberikan makanan sejak dilakukan latihan militer di Handil II.

Selama berada di Handil II, militer NICA melakukan penangkapan terhadap setiap laki-laki, baik itu pemuda maupun orang tua, termasuk di antaranya adalah H. Yahya. Penangkapan ini tidak hanya dilakukan di Handil II, tetapi juga dilakukan di Guntung Papuyu, yaitu Ugan Pangerak, M.Rasi, Mohammad, Sanang, Bardan, Duhamid, Hamsan Abdullah dan Nurani. Mereka semua dibawa ke Banjarmasin.

Sebelum dilakukan penangkapan terhadap para pemuda dan laki-laki tua di Guntung Papuyu, pada malam Kamis, yaitu sesudah malam pertempuran, dilakukan pengumpulan mayat-mayat yang tertembak. Dari keseluruhan mayat yang dikumpulkan tidak kurang jumlahnya dari 30 orang. Oleh sebagian asbahnya, mayat tersebut dibawa ke rumah masing-masing untuk dimakamkan. Hanya 17 orang yang tidak ada asbahnya dan yang dekat dengan tempat peristiwa dimakamkan di tempat itu juga. Dari 17 orang, termasuk di dalamnya 1 orang wanita kena tembak sewaktu keluar rumah, hanya 13 orang yang dapat disebutkan namanya, yaitu Umar, Amin, Mat Janji, Abdullah, Ahmad, Ibnu, Acil, Jarkasi, Baderi, Husni, Baha, Sagui, dan Saripah Amberi.

Dengan banyaknya korban dan yang tertangkap, telah menjadi peringatan yang sangat memilukan bagi para pejuang MTK. Dan untuk tidak terulang lagi, mereka harus lebih berhati-hati. Hal itu bias dilakukan dengan mengubah taktik dan teknis perjuangan dalam menghadapi NICA dan antek-anteknya.

Setelah mengalami pertempuran dengan Belanda di Jambu Burung, berturut-turut terjadi pula pertempuran pada tanggal 3 Mei di Handil Babirik, tanggal 5 Mei 1947 pertempuran di Handil II Kurau sebagai pembalasan terhadap kekalahan di Handil Babirik. Di Handil Babirik tersebut, berhasil 2 orang anggota polisi dengan merampas 3 pucuk senjata L.E. pada pertempuran di Handil II ini telah gugur 9 orang pejuang MN 1001/MTKI.

Peristiwa ini yang menyebabkan tokoh-tokoh MN 1001/MTKI mengadakan musyawarah yang terdiri dari : Daeng Umariah, M.Arsyad, H. Alan, Baderi, Aliansyah dan H. Abdul Gani. Hasil musyawarah memutuskan bahwa kekalahan di Handil II tersebut harus dibalas dengan cara penghadangan, penyerangan dan penghancuran jembatan yang terpenting, penghancuran terhadap konvoi Belanda melakukan aksi sabotase. Penyebab kekalahan itu adalah karena berkeliarannya spion-spion Belanda. Penculikan pertama terhadap spion Belanda adalah terhadap Gani dan Artum yang terkenal sangat berbahaya bagi keselamatan pejuang.

Gerakan penghadangan pertama terjadi di Sarang Dandang, ketika sebuah jeep Belanda dengan trailer mengangkut 15 polisi Belanda yang mengadakan patroli terhadap jembatan di Sarang Dandang, Pulau Sari dan Bati-bati yang telah diputus oleh para pejuang. Seorang polisi terbunuh dan yang lainnya melarikan diri, tetapi dua orang pejuang gugur sebagai kesuma bangsa yaitu Kurdi dan Usup. Pertempuran itu terjadi pada malam hari tanggal 21 ke 22 Juli 1948.

Siang harinya tanggal 22 Juli 1948, datang bantuan dari pasukan Belanda, sehingga terjadi lagi pertempuran sengit sepanjang jalan Bati-Bati. Gugur lagi dua orang pejuang, yaitu Tukacil dan Darlan dan dua orang penduduk juga menjadi korban. Pertempuran mulai mereda sekitar pukul 15.00.

Kekejaman Belanda diperlihatkannya untuk menakuti rakyat, ketika Belanda menembak mati seorang tokoh wanita SKI Pr.Norsehat, guru sekolah rakyat dan selanjutnya menembak mati Pr. Mastora yang sedang hamil. Kekejaman Belanda ini dijawab oleh para pejuang dengan melakukan aksi penyerangan di mana-mana seperti dilakukan di Takisung, aksi pisau belati di Kurau, aksi di Jorong yang mengakibatkan Belanda tidak mampu lagi untuk menguasai wilayah kekuasaannya.

Pada minggu kedua bulan Mei 1949, A. Syairani mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh MTKI di daerah Pelaihari, yang menghasilkan keputusan untuk menggabungkan diri ke dalam ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan dengan komposisi kepengurusan sebagai berikut :

1. Departemen Dalam Negeri	: Mr.Achsin (Ach. Syairani)
2. Departemen Keamanan/Pertahanan	: Oleh Koordinator
3. Departemen Kepolisian	: H.A. Imberan
4. Departemen Kehakiman	: K.H. A. Nawawi
5. Departemen Keuangan	: H. Dislan
6. Departemen Kemakmuran	: J. Mamihat
7. Departemen Agama	: Kiai E. Mansyur
8. Departemen Penerangan	: Fransah
9. Sekretaris Umum	: M.N. Manuar
10. Sekretaris I	: M. Hualimi
11. Sekretaris II	: Darmawi

Selanjutnya dilengkapi dengan pasukan penggempur pasukan kepolisian Markas Pangkalan. Meskipun MN 1001/MTKI di Marabahan, Pelaihari dan bahkan di Hulu Sungai telah menggabungkan ke dalam ALRI Divisi Pertahanan Kalimantan tetapi MTKI daerah Gambut tetap bertahan menunjukkan eksistensinya sampai nanti diresmikan tersendiri menjadi TNI.

Markas MTKI daerah Gambut terdiri dari Pedalaman I Guntung Papuyu dan Pedalaman II di Kurau. Pedalaman I dipimpin oleh Mursalin dan Pedalaman II dipimpin oleh Umariah (guru Umar). Markas daerah Gambut di bawah pimpinan Ms Musa (H.Dulah Huban), dibantu oleh Adenan dan guru Alwi (Moh. Arsyad), H.Abdul Gani yang dikenal sebagai imam, yang mengobarkan semangat perjuangan melalui khotbah-khotbah di masjid.

Setelah pertempuran Jambu Burung dan Handil II berlalu, keadaan di daerah Banjar (Gambut, Kurau dan Jambu Burung) sepi dari gerakan perjuangan. Hal ini disebabkan banyaknya para pejuang yang tertangkap, juga karena adanya perasaan takut atas peristiwa terdahulu, ditambah lagi dengan adanya mata-mata NICA yang masih berkeliaran di sana, mengingat daerah itu dicurigai sebagai tempat persembunyian para pejuang. Sehingga untuk sementara perjuangan tidak berani di gerakkan secara terang-terangan, bahkan Markas Besar MTK sempat dibubarkan, karena sebagian tokoh-tokohnya menjadi pelarian/buronan pemerintah NICA.

Namun keadaan tersebut tidak berlangsung lama, karena sebagian para pejuang yang tertangkap dipulangkan kembali, akibatnya gerakan perjuangan bangkit lagi. Gerakan ini lebih bergema dan menampakkan kekuatannya, setelah datang dan berkumpulnya tokoh-tokoh MTK

yang dulunya melarikan diri. Selain itu datang pula tokoh-tokoh dari berbagai daerah yang ada di Kalimantan Selatan. Mereka itu adalah Guru Alwi, Guru Adam, M. Arsyad dan Ajirani.

Guru Alwi sebelumnya adalah Kepala Pemerintahan Umum dan Pimpinan Umum Badan Keamanan Rakyat (BKR) Kotabaru. Guru Alwi datang ke Banjarmasin tahun 1947, dan kemudian menjadi anggota SKI dengan mendirikan Rumah Yatim. Selain itu juga, diam-diam guru Alwi atau lebih dikenal dengan panggilan A. Rustam aktif dalam organisasi perjuangan MTK.

Begitu pula dengan guru Adnan (AS. Matarip) yang datang dari Kandangan. Kedatangannya ke Banjarmasin selain sebagai anggota Dewan Dayak Besar, guru Adnan juga ikut memperkuat organisasi perjuangan MTK menjadi Wakil Pimpinan Umum, mendampingi guru Alwi nantinya.

Setelah itu datang pula M. Arsyad dari Amuntai. M. Arsyad yang sering dipanggil MA. Arsyad atau MA. Sosowardi sebelumnya adalah anggota Boei Teisin Tai Balikpapan (masa Jepang) yang melarikan diri ke Jawa. Di Jawa MA. Arsyad masuk anggota BPRI pimpinan Bung Tomo yang bergabung dalam "Brigade S". MA. Arsyad yang diberi pangkat Mayor, diperintahkan oleh Kolonel Soengkono pergi ke Kalimantan Selatan untuk membantu perjuangan di sana. Sesampainya di Amuntai mereka sempat mengembangkan BPRI sampai ke Barabai, Tanjung, dan Banjarmasin. Setelah pasukan MN 1001 berkembang di Hulu Sungai, ia menggabungkan diri, dan menjadi pimpinan dengan membawahi beberapa daerah, yakni Amuntai, Alabio, Lampihong dan Panyuoran. Sekitar akhir tahun 1947, ia datang ke Gambut mempersatukan Pasukan MN 1001 (MTK) yang porak poranda akibat pertempuran Jambu Burung dan Handil II.

Tokoh yang lain adalah Aj'rai atau lebih dikenal dengan panggilan Alif Kurdi yang datang ke Gambut untuk memperkuat perjuangan MTK di sini. Sebelumnya ia adalah pimpinan Markas 13 Pasukan MN 1001 yang sudah diubah menjadi MTK. Namun karena dikejar-kejar oleh pihak NICA di Marabahan akibat aksinya membakar rumah-rumah asap/gudang karet, maka ia melarikan diri dan bergabung dengan pasukan MTK daerah Gambut/Banjar. Kemudian berangsur-angsur datang tokoh yang lain ke daerah Banjar.

Dengan berkumpulnya tokoh-tokoh di atas, ditambah dengan tokoh-tokoh terdahulu, seperti Aliansyah Yusuf, Hadariah, Andin Darlian, Tuganal, Djuri (Masdjuri), Daeng Umariah dan Abdul Gani dari Kurau, serta yang lainnya, maka perjuangan MTK bertambah kuat dan lebih terorganisir di bawah pimpinan Aliansyah Yusuf. Pada akhir tahun 1947, Aliansyah Yusuf tertangkap. Peristiwa tertangkapnya Aliansyah Yusuf, bermula dari kunjungannya ke berbagai daerah. Dimana sewaktu ia bersama dengan 3 orang pelatih suku Jawa, yaitu Sutikno, Duladi dan Kamat melakukan latihan militer kepada para pemuda daerah Tamban yang pada saat itu sudah menjadi anggota MTK. Namun setelah melakukan latihan, pada malam harinya sekitar pukul 3 subuh, penginapan Aliansyah Yusuf diblokir oleh beberapa orang polisi kilat (PID), sehingga Aliansyah Yusuf bersama tiga orang temannya tertangkap.

Setelah Aliansyah Yusuf tertangkap, Pimpinan Umum MTK diserahkan kepada Hadariah melalui suatu rapat yang dilaksanakan oleh tokoh-tokoh MTK, di rumah Hadariah Handil Awang Papuruk. Penyerahan/ pemilihan Pimpinan Umum tertuju kepada Hadariah berdasarkan pada pertimbangan bahwa Hadariah adalah orang lama dalam keanggotaan MTK dan menduduki jabatan tinggi, menjadi sekretaris tentara. Hadariah juga sangat berjasa dalam mengembangkan pasukan MTK di Kalimantan Selatan. Selain itu, ia berpengalaman dalam bidang kemiliteran, mengingat pada masa Jepang ia menjadi tentara Heiho atau Haha.

Tidak berapa lama Hadariah menjadi Pimpinan Umum MTK, iapun tertangkap. Tertangkapnya Hadariah disebabkan masuknya mata-mata NICA yang bernama Sugianto dalam kesatuan MTK. Sugianto yang mengaku dari Brigade Bangkok berjanji kepada Hadariah untuk membantu/memberikan senjata buat perjuangan. Dengan tipuan, Sugianto mengajak Hadariah ke rumahnya yang berada di Pasar Lama untuk melihat senjata yang akan diberikan. Namun

sesampainya di rumah Sugianto, Hadariah yang datang bersama Umar Siman dikepung oleh militer NICA secara tiba-tiba, sehingga Hadariah dan Umar Siman tertangkap.

Setelah Hadariah tertangkap, maka Pimpinan Umum dipegang oleh Guru Alwi. Sejak itu nama MTK ditambah dibelakangnya dengan kata "Indonesia", sehingga menjadi MTKI (Mandau Telabang Kalimantan Indonesia). Penambahan nama ini dimaksudkan untuk melakukan konsolidasi ke dalam pasukan. Dengan demikian, meeka yang tidak mengetahui MTK I dapat dicurigai sebagai mata-mata.

Seiring dengan perubahan/penambahan nama Pasukan MN 1001 ,menjadi MTK, dan kemudian menjadi MTK I, di Jogyaakarta yang merupakan pusat komando perjuangan, juga melakukan perubahan/penambahan nama. Perubahan nama itu disesuaikan dengan keberadaan Pasukan MN 1001 di dalam kesatuan TRI. Namun perubahannya sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan di Kalimantan Selatan, karena perubahannya tidak menghilangkan nama asal dari Pasukan MN 1001, hanya menambah istilah dibelakangnya. Perubahan nama tersebut adalah dari Pasukan MN 1001 Borneo, kemudian menjadi Pasukan MN 1001 Mobiele Brigade MT TNI Kalimantan, dan terus menjadi Pasukan MN 1001 yang berada di Jogyaakarta.

Kembali kepada masalah MTKI di Kalimantan Selatan, sebagai Pimpinan Umum MTKI, Guru Alwi dituntut mengorganisir pasukannya. Untuk melaksanakan hal ini dibentuklah beberapa Markas Daerah, di antaranya adalah Markas MTKI daerah Gambut/Banjar. Pimpinan markas ini ditunjuklah Dullah Huban (Ms.Musa) yang bermarkas di dalam Handil Km 13 Gambut.

Markas MTKI daerah Banjar tersebut membawahi beberapa markas pangkalan. Markas pangkalan itu juga membawahi/memiliki seksi-seksi pangkalan yang bertugas mengumpulkan bahan makanan, berupa beras dan lauk pauk untuk diserahkan atau dilaporkan kepada para pejuang yang berada di Pedalaman. Adapun bahan makanan itu didapat dari sumbangan masyarakat setempat, yakni sumbangan dari para dermawan yang kaya, juga dari zakat fitrah maupun zakat harta.

Selain bertugas mengumpulkan bahan makanan dari markas pangkalannya, markas daerah juga bertugas mencari atau mengumpulkan senjata untuk diserahkan ke Pedalaman, menyelidiki situasi yang ditugaskan kepada Riwas, dan melaporkannya ke Pedalaman, dan mengatur administrasi Pasukan MTKI.

Adapun susunan Staf Administrasi Pasukan MN 1001/MTKI daerah Banjar tahun 1948/1949, yaitu sebagai berikut :

1. Pimpinan Umum MTKI Kalimantan	: Guru Alwi (A.Rustam)
2. Wakil Pimpinan Umum MTKI Kalimantan	: Adnan (AD. Matarip)
3. Penulis Umum MTKI Kalimantan	: Adul (tertangkap 1948)
4. Kepala Staf Koordinator PU MTKI Kalimantan	: H.M.Idrus (merangkap Kepala MD Aluh-aluh)
5. Wakil epala Staf Koordinator PU MTKI Kalimantan	: Alif Kurdi (merangkap Wk.Kep.MD Banjar)
6. Kepala Markas Daerah Banjar	: Dulah Huban (Ms.Musa)
7. Wakil Kepala Markas Daerah Banjar	: Alif Kurdi
8. Sekretaris I	: Muchran (Gusti Helina)
9. Sekretaris II	: Anang Basri
10. Kepala Staf Tata Usaha MD	: Mursalin merangkap Pembantu Staf Koord. PU
11. Pembantu Staf TU MD	: Dardi, Samad dan Sani

12. Kepala Staf Keuangan :
13. Pembantu Staf Keuangan :
14. Kep.Staf Urusan Perlengkapan :
15. Wk.Kep.Staf Urusan Perlengkapan :
16. Anggota Urusan Perlengkapan :
17. Kep.Staf Urusan Pengangkutan :
18. Pembantu Keo.Staf Urusan Pengangkutan :
19. Kep.Urusan Palang Merah :
20. Pembantu Kep.Urusan Palang Merah :

Selain membentuk Markas Daerah, Guru Alwi pada per-1948 membentuk kembali “Pedalaman”. Untuk Pedalaman MTKI daerah Banjar, kali ini dipusatkan di dalam Hutan Guntung Papuyu dan Tambak Belakang. Pedalaman Guntung Papuyu Ujung (sekarang masuk desa Guntung Ujung) ini diberi nama “Pedalaman Jakarta Dalam”, dan untuk Pedalaman di tambak Belakang diberi nama “Pedalaman Tanjung Perak” dengan Pimpinan Daeng Umariah dan Daud Amrullah, sedangkan tokoh juru penerangnya adalah Abdul Gani (Paruk). Adapun tokoh-tokoh/pimpinan Pedalaman Jakarta Dalam adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan Ketentaraan : Sutera Ali I
2. Wk.Kep. Badan Ketentaraan : Abisadat (Bain)
3. Sekretaris : Abdul Hamid
4. Kepala badan Sabotase : Merah Djohansyah
5. Sekretaris Kep.Badan Sabotase : Sutera Ali II
Merangkap Sekretaris Komandan Detasemen
6. Komandan Detasemen : Djuri Djinal (Masdjuri)
7. Sekretaris Komandan Detasemen : Sutera Ali II
8. Kehakiman : Sidik Djanggut
9. Kep.Badan Perlengkapan Senjata Dan Perbengkelan : Mansyur Negara, dibantu 3 orang anggota
10. Kep.Badan Penglatih,Merangkap Kepala Badan Penggempur (Pasukan Teristimewa) : MA. Arsyad (MA. Sosowardi)
11. Badan Penglatih atau Komandan : Abdul Malik dan Selamat
12. Pasukan Umum/Penggempur : Utut Rustam
13. Kepala Badan Perlengkapan : Djapar Ungkap, Serta 1 Regu Anggotanya
14. Kepala Badan Kesehatan : M.Hasan dan beberapa anggotanya

Pedalaman Jakarta Dalam di atas berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para pejuang, tempat persembunyian dan latihan militer, karena tempat ini memiliki lapangan untuk latihan militer. Anggota pasukan yang dilatih menurut grup nomor sekitar 1200 orang, termasuk anggota yang keluar masuk, atau kalau diperhitungkan jumlah anggota pasukan itu telah memakan biaya tidak kurang dari 30 blek beras sehari semalam.

Dalam perkembangan, Pedalaman Jakarta Dalam membuat Cabang Pedalaman yang dibentuk oleh Utut Rustam, yaitu Pedalaman Yaman di Handil Murung yang dipakai oleh Radum, dan Pedalaman Cipinang di dekat Tambak Pitu yang dikepalai oleh Asmodo (Asnawi).

Adapun fungsi Pedalaman Yaman adalah sebagai tempat membuat alat-alat persenjataan, seperti senjata api dum-dum. Sedangkan fungsi Pedalaman Cipinang adalah sebagai pangkalan Pedalaman, dimana setiap orang yang ditangkap/diculik oleh pasukan MTKI, diinterogasi di

Pedalaman Cipinang. Kalau orang itu tidak terbukti sebagai spion/antek NICA maka akan dibebaskan, tetapi ternyata sebagai spion/antek NICA yang membahayakan perjuangan, maka orang itu akan digiring ke Pedalaman Jakarta Dalam untuk dijadikan tawanan atau dibunuh, sehingga sejak berdirinya Pedalaman Jakarta Dalam (selama kurang lebih 10 bulan) telah dibunuh sekitar 150 orang spion atau antek NICA.

Pertempuran-pertempuran yang hebat yang dialami MTKI adalah pertempuran di Bati-bati, Handil II, Teluk Kubur, Kelayan dan Malintang. Berbeda dengan ALRI, MTKI tidak pernah menetapkan tanda pangkat kemiliteran. Ketika Jenderal Mayor Suhardjo meresmikan ALRI Divisi IV dan diakui sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) tanggal 2 September 1949, serta dijadikan Divisi Lambung Mangkurat, maka MTKI diresmikan oleh Letnan Kolonel Sukanda Bratamanggala pada tanggal 12 Oktober 1949 di Gambut tempat Markas daerah MTKI, menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan kekuatan satu batalyon ini tinggal hanya satu kompi, karena sebagian penduduk kembali ke masyarakat dengan kemauan sendiri.

Peresmian Batalyon MN 1001/MTKI sangat berkaitan dengan kedatangan delegasi tersebut dalam rangka menyelesaikan dua masalah, yaitu masalah pertentangan antara pasukan MN 1001/MTKI dengan ALRI Divisi IV yang kian memuncak dan masalah *cease fire* (gencatan senjata) yang tidak terwujud seperti apa yang diperintahkan oleh Jenderal Mayor Suhardjo kepada Hassan Basry dalam Pengumuman Bersama. Untuk itu Pemerintah RI mengirimkan kembali delegasi APRI di bawah pimpinan Jenderal Mayor Suhardjo bersama stafnya, antara lain Letnan Kolonel Sukanda Bratamanggala, Kapten Subari dan Letnan Satu Kadar Mawarni yang tiba di Banjarmasin tanggal 19 September 1949.

Untuk mengatasi masalah tersebut, khususnya masalah pertentangan antara Pasukan MN 1001/MTKI dengan ALRI Divisi IV, delegasi APRI memanggil pemimpinnya masing-masing. Panggilan itu dimaksudkan, agar kedua pasukan yang berselisih dapat melakukan perundingan di Banjarmasin, di bawah pengawasan delegasi APRI.

Dalam perundingannya, Pasukan MN 1001/MTKI diwakili oleh Guru Alwi (A. Rustam), MA. Arsyad dan Sutarman, sedangkan dari ALRI Divisi IV adalah Hassan Basry dan Aberanie Sulaiman. Perundingan ini telah membahas tentang penyatuan kedua pasukan. Pimpinan Pasukan MTKI pada intinya tidak keberatan bahwa pasukan disatukan dengan ALRI Divisi IV asalkan kedua pasukan dibubarkan dengan mengganti nama baru dalam kesatuan Angkatan Darat, dan berada di bawah pimpinan Hassan Basry dan sebagai wakilnya adalah dari MTKI. Namun usul dari pimpinan MTKI itu tidak diterima oleh pimpinan ALRI Divisi IV.

Karena perundingan tersebut mengalami jalan buntu, maka delegasi APRI, yaitu Letnan Kolonel Sukanda Bratamenggala atas nama KSAD meresmikan Pasukan MN 1001/MTKI menjadi sebuah Batalyon Angkatan Darat, dengan nama "Batalyon MN 1001/MTKI TNI AD Kalimantan", yang bermarkas di Gambut. Sebelum Pasukan MN 1001/MTKI menjadi sebuah Batalyon, Pimpinan Pasukan MN 1001/MTKI mengadakan pengumpulan dan pencatatan kembali jumlah anggota pasukannya. Dari sekian banyak jumlah anggota pasukan, sebagian besar anggotanya tidak mau lagi meneruskan menjadi tentara. Mereka kembali ke masyarakat, termasuk pimpinan dan wakilnya (Guru Alwi dan Adnan), sehingga 1322 orang yang tersisa. Dan sisa pasukan inilah yang diresmikan menjadi satu batalyon pada tanggal 12 Oktober 1949.

Dengan dilaksanakannya peresmian Batalyon MN 1001/MTKI, hampir semua anggota pasukannya dari berbagai daerah, baik dari Banjarmasin sendiri, Marabahan, Barabai maupun Amuntai datang ke Gambut untuk mengikuti jalannya upacara tersebut. Dari delegasi APRI dihadiri oleh Letnan Kolonel Sukanda Bratamenggala, Kapten Subari dan Letnan Satu Kadar Marwani, juga hadir Guru Alwi, Adnan, dan Kapten Mulyono.

Di saat upacara berlangsung, secara tiba-tiba datang pesawat tempur NICA melintasi Gambut. Dikira pasukan MN 1001/MTKI, pesawat itu datang untuk menggempur atau membom pasukannya, sehingga sebagian pasukan yang berbaris di halaman Pasar Gambut ada yang membubarkan diri, menghindari kalau ada serangan. Tetapi pesawat itu hanya sekedar lewat sehingga upacara dapat diteruskan kembali.

Dalam upacara peresmian pasukan MN 1001/MTKI menjadi sebuah Batalyon, diangkat MA.Arsyad sebagai Komandan Batalyon MN 1001/MTKI dengan pangkat Mayor. Batalyon ini memiliki kekuatan 1322 orang, terdiri dari 47 orang anggota staf dan 5 buah kompi dengan 235/kompi. Mereka menjadi anggota Batalyon MN 1001/MTKI di antaranya adalah :

1. Mayor M.A.Arsyad	: Komandan Batalyon
2. Letnan Satu H.Muchran	: Kepala Sekretaris Batalyon
3. Letnan Satu Asnawi/Asmodo	: Kep.Perengkapan/Peralatan
4. Letnan Satu Abdul Gani	: Kep.Penerangan
5. Letnan Satu Masdjuri (Djuri)	: Komandan Detasemen
6. Letnan Dua Ardianus Tendur	: Kep.Intelligence/Security
7. Letnan Dua Sulaiman Asmail	: Wk.Kep.Perengkapan /Perawatan
8. Letnan Dua M.Yusuf	: Wk.Kep.Kuangan
9. Letnan Dua G.Ali Nafiah	: Wk.Kep.Kesehatan
10. Letnan Dua Amberansah	: Wk.Komandan PHB
11. Letnan Dua TP.Berahim As	: Wk.Komandan Detasemen
12. Letnan Dua Saberansah	: Komandan Kompi II
13. Letnan Dua Darmawan	: Komandan Kompi IV
14. Letnan Dua Tuganal	: Komandan Kompi V

Batalyon tersebut hanya berusia sekitar tiga bulan, dan kemudian bubar dengan sendirinya.

H. KEDAULATAN DAN PERJUANGAN ALRI DIVISI IV PERTAHANAN KALIMANTAN DIAKUI OLEH PEMERINTAH RI

1. Pemerintah Republik Indonesia Kembali Berpusat di Yogyakarta dan Dampaknya Bagi Perjuangan Rakyat Kalimantan Selatan

Setelah clash II Indonesia-Belanda, situasi perjuangan di seluruh tanah air terus bergelora. Tidak saja di Pulau Jawa, tetapi juga daerah-daerah lainnya, terutama daerah yang penduduknya pro Republik.

Pemerintah kedua belah pihak, yakni Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda, berupaya melakukan perundingan-perundingan untuk menyelesaikan ketegangan. Munculnya usaha untuk berunding ini, berawal dari ketidakberdayaan Belanda, dalam menghadapi reaksi internasional yang telah mengutuk tindakan agresinya terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Reaksi internasional yang cukup hebat, adalah keluarnya resolusi dan desakan Dewan Keamanan PBB, agar Belanda segera menghentikan permusuhan.²⁴²

Demikianlah, pada tanggal 4 April 1949, dilaksanakan perundingan Republik Indonesia dengan Belanda di bawah pimpinan Merle Cochran, anggota Komisi Tiga Negara dari Amerika Serikat. Delegasi Republik Indonesia di bawah pimpinan Mr. Moh. Roem sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J. H. Van Royen.

Walaupun terjadi berbagai perbedaan pendapat, akhirnya tanggal 7 Mei 1949 tercapai persetujuan, bahwa masing-masing pihak menyampaikan kesanggupan mereka, sesuai dengan

²⁴² Marwati Djoned Poesponegoro *et al.*, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 Januari 1949, serta petunjuk-petunjuknya tanggal 23 Maret 1949. Isi pokoknya, dari perundingan itu adalah persetujuan gencatan senjata antara Pemerintah RI dengan Belanda.²⁴³

Bagi ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, perundingan Roem Royen tersebut, tidak membawa pengaruh apa-apa. Gencatan senjata yang dihasilkan dalam perundingan itu, hanyalah untuk wilayah Republik Indonesia dan Belanda, yakni wilayah-wilayah yang tertera dalam Persetujuan Linggajati dan Renville, otomatis Kalimantan Selatan tidak termasuk, karena menjadi kekuasaan Belanda. Memang, dalam perundingan Roem-Royen itupun, masalah-masalah yang berhubungan dengan Kalimantan tidak pernah dipersoalkan, sesuai dengan upaya Belanda untuk menutup-nutupi, seolah-olah Kalimantan selalu aman.²⁴⁴

Pemerintah Belanda tetap menganggap ALRI Divisi IV sebagai gerombolan yang tidak bertanggung jawab yang mengacaukan keadaan pemerintah yang sah, seperti yang disebutkan dalam surat Residen Kalimantan Selatan, kepada Ketua Dewan Banjar tanggal 20 Desember 1948. Guna menanggulangi masalah keamanan ini, Belanda mengangkat Letnan Kolonel H.J. Veenendal sebagai pimpinan serdadu NICA. Veenendal inilah yang pernah membawahi dan mempergunakan Kapten Westerling, dalam pembunuhan lebih dari “40.000” jiwa di Sulawesi Selatan. Maksud penunjukan Veenendal, sebagai pimpina NICA di wilayah Kalimantan Selatan ini, tidak lain, agar segera menindak dan melumpuhkan kegiatan gerilya ALRI Divisi IV.

Namun justru sebaliknya, ALRI Divisi IV semakin memperkuat posisinya dihati rakyat, terutama menunjukkan kemampuannya dengan mempergencar serangan, melakukan penghadangan-penghadangan terhadap konvoi-konvoi, patroli-patroli NICA.

Keadaan-keadaan bergolak. Pemerintah Belanda memperlambat realisasi *Policy* Belanda, dalam mendirikan Negara Kalimantan, sedangkan saat itu Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda akan segera dimulai. Pemerintah Gubernur Tentara ALRI Divisi IV hanya tunduk kepada Pemerintah Republik Indonesia, yang berpusat di Yogya.

Pada tanggal 22 Juni 1949, diadakan perundingan formal antara Republik Indonesia, BFO, dan Belanda, dibawah pengawasan Komisi PBB oleh Chritchley dari Australia. Salah satu isi pokok perundingan itu adalah adanya kesepakatan pengembalian Pemerintah Republik Indonesia Yogyakarta, dilaksanakan 24 Juni 1949.²⁴⁵

Pasukan Belanda selesai ditarik dari daerah Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949, dan pada tanggal 6 Juli 1949 berikutnya. Presiden Republik Indonesia dan Wakilnya, beserta Menteri-menteri anggota pemerintahan yang tertawan oleh Belanda, sejak tanggal 19 Desember 1948, tiba kembali di Yogyakarta, dengan mendapat sambutan meriah dari rakyat.²⁴⁶ Pulihnya Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, disambut dengan gembira diseluruh tanah air terutama mereka yang berjiwa nasionalisme.

Rasa syukur dan simpati rakyat Kalimantan Selatan, atas pemulihan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta, tercermin pada suatu resepsi yang dipelopori dan diselenggarakan, oleh Badan Koordinasi di Banjarmasin, tanggal 7 Juli 1949. Resepsi diselenggarakan mulai pukul 09.30 pagi, mengambil tempat di muka Gedung Permufakatan Indonesia (GPI) di jalan Pelabuhan, yakni sebuah gedung yang pembangunannya dipelopori oleh PKDI, dengan sumbangan seluruh rakyat Kalimantan Selatan, sejak tanggal 17 Agustus 1948. Resepsi dihadiri sekitar 3.000 penduduk dan para undangan, antara lain : wakil-wakil dari 35 organisasi, yang tergabung dalam badan tersebut, Walikota Banjarmasin Mansur, Wali Daerah

²⁴³ Marwati Djoned Poesponegoro *et al., ibid.*, hal. 167

²⁴⁴ Hassan Basry, *op.cit.*, Jilid II, tt.th.

²⁴⁵ Marwati Djoned Poesponegoro *et al., op.cit.*, hal. 169.

²⁴⁶ Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hal. 102.

Banjar M. Hanafiah, Kiai Besar Afdeling Banjarmasin H. Raden, Amir Hasan Bondan. Juga dihadiri wali-wali dari Serikat Dagang Banjar, antara lain : NV. ODI, NV. Kinibalu dan lain-lain. Hadir pula para pemuka Islam, Kristen dan Belanda.²⁴⁷

Pada saat itu suasana alam Republik terasa sekali, lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dinyanyikan dengan penuh khikmat. Di dinding terpampang gambar Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Pada kesempatan terakhir, H.M. Hanafie Gobet Qadhi Besar Banjarmasin, mengucapkan do’a sebagai kata penutup. Seuntai do’a beliau berbunyi : *“Wahai Tuhanku, jadikanlah Republik Indonesia suatu Pemerintahan dan Negara yang berhak hidup selama-lamanya”*.

Dari do’a tersebut, secara tersurat maupun tersirat, mengandung makna, bahwa rakyat Kalimantan Selatan, mendukung secara lahir dan bathin, tetap tegaknya Republik Indonesia untuk selama-lamanya. Tercermin pula hasrat dan harap, Republik Indonesia, sepenuhnya bebas dari penindasan kolonialisme Belanda, yang dimotori oleh NICA.

Sambutan rakyat Kalimantan Selatan, terhadap kembalinya Yogya tersebut, seperti yang digambarkan di atas, seolah-olah keadaan di Kalimantan Selatan aman-aman saja. Sebetulnya perayaan itu, kebanyakan dihadiri oleh golongan politik daerah ini, yang tinggal di kota-kota Kabupaten.

Keadaan politik di Kalimantan Selatan, berusaha disetir oleh Belanda, yang dengan segala daya upaya merealisasi pembentukan Dewan Banjar. Walaupun Dewan Banjar ini terbentuk, namun sebagian tokoh-tokoh yang duduk dalam dewan itu adalah mereka yang berjiwa Republikan Unitarisme.

Sementara itu di luar Kalimantan Selatan, diketuai oleh Pangeran Karta Negara, Sekretaris urusan *Zelfbestuur* telah mengadakan pertemuan dengan pembesar Kalimantan Barat, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, Pasir serta Kalimantan Timur yang mewakili Swapraja Kutai, Bulungan dan Berau. Calon Presiden Negara Kalimantan sudah diumumkan dalam surat-surat kabar, yaitu Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat Sultan Parikesit dari Kutai, Ir. Pangeran Mohammad Noor dan Mr. Tadjuddin Noor.

Kegiatan golongan federalis, telah kian meningkat, dengan dilaksanakannya Konferensi Inter Indonesia, yang diadakan dua kali, yang pertama di Yogya tanggal 19-22 Juli 1949, dan kemudian dilanjutkan di Jakarta tanggal 31 Juli – 2 Agustus 1949. Keputusan yang diambil ialah : Negara yang akan dibentuk bernama Republik Indonesia Serikat. Bendera, Merah Putih. Bahasa Nasional, Bahasa Indonesia. Lagu Kebangsaan, Indonesia Raya, dan tanggal 17 Agustus adalah hari Nasional.

Untuk menghadapi Konferensi Meja Bundar (KMB), Dewan Banjar mengirim utusan 2 orang, yaitu A.A. Rivai²⁴⁸ dan A. Sinaga, ialah tokoh SKI yang berjiwa Republikan Unitarisme. KMB dihadiri oleh : Sultan Hamid II dari BFO, Drs. Mohammad Hatta, delegasi Republik Indonesia dan Mr. Van Maarseveen dari delegasi Belanda.

Dengan demikian, jelas terlihat, bahwa di Kalimantan Selatan, terbukti menyiapkan dua tokoh yang pro Republik. Memang di Kalimantan Selatan terdapat dua kelompok pejuang. Kelompok pertama, adalah berjuang dengan senjata dan bergerilya, sifatnya non kooperatif, yakni ALRI Divisi IV. Kelompok kedua, adalah kelompok yang berjuang dengan taktis politis, sifatnya kooperatif, yakni tokoh-tokoh politik, dari beberapa perkumpulan politik, seperti SKI, SERMI dan lain-lain. Antara kedua kelompok itu saling bekerja sama, sehingga Belanda tidak bisa leluasa mempergunakan Dewan Banjar untuk kepentingan-kepentingan Belanda.

²⁴⁷ Ahmad Gafuri, *ibid.*, hal. 102-103.

²⁴⁸ Versi lain adalah E.S Handoeran bersama A. Sinaga.

Dalam perjuangannya menghadapi golongan federalis yang disponsori oleh Belanda, golongan Republikan Unitarisme selalu mendapat tekanan, ancaman penangkapan serta tahanan. Itulah risiko perjuangan, dalam menegakkan kemerdekaan, walaupun perjuangan dalam bentuk apapun, ia tidak sepi dari pada upaya musuh untuk menghancurkan.

Yogya telah kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Kaum politisi Kalimantan Selatan bergelut dengan caranya sendiri untuk kemerdekaan Republik Indonesia sepenuhnya.

Seperti dijelaskan pada bagian terdahulu, sejak diumumkannya Proklamasi 17 Mei 1949, dan terbentuknya Pemerintah Gubernur Tentara ALRI Divisi IV, rakyat Kalimantan Selatan menyatakan bergabung dengan Pemerintah Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta.

ALRI Divisi IV semakin kokoh. Kekuatan Belanda lambat laun menjadi rapuh. Selamatnya Presiden Republik Indonesia dan Wakilnya serta kembalinya Yogya, membuat semangat perjuangan gerilya ALRI Divisi IV semakin tumbuh. Kepercayaan diri dan nilai-nilai kejujuran dipegang teguh, karena hampir seluruh rakyat Kalimantan Selatan menjadi percaya penuh, membantu perjuangan tanpa pernah mengeluh.

Demikianlah, berita kemenangan Yogya dan TNI di Pulau Jawa, terdengar pula di kalangan prajurit ALRI Divisi IV, walaupun berita itu berusaha ditutup-tutupi oleh aparat NICA.

Sebenarnya, kembali ataupun tidak kembali kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia di Yogya, ALRI Divisi IV sudah siap sedia menghadapi peperangan sampai kapanpun jua. Hal ini terbukti dengan tetap bergelora semangat gerilya, disamping telah terbentuknya Pemerintahan Gubernur Tentara. Di setiap front, selalu saja terjadi kontak-kontak bersenjata antara pejuang gerilya dengan pihak Belanda.

Lebih-lebih lagi dengan kemenangan gerilya TNI di Pulau Jawa, sudah tentu menggugah gerilyawan ALRI Divisi IV di Kalimantan Selatan untuk melakukan serangan secara gencar.

Ketika Kalimantan Selatan terputus hubungannya dengan Pulau Jawa, ALRI Divisi IV juga terputus hubungan dengan Markas Induknya di Tuban. Para pejuang gerilya Kalimantan Selatan berinisiatif sendiri tanpa Komando Pusat. Karena itu, dampak kembalinya Yogya bagi Kalimantan Selatan utamanya bagi perjuangan gerilya cukup besar kaitannya, dalam rangka memacu semangat untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia, dan menolak menjadi boneka di bawah kekuasaan Belanda. Ketika itu pula, Dewan Banjar, tidak bisa semuanya diperalat Belanda. Karena tokoh-tokoh yang ada dalam Dewan itu, sebagian besar berhaluan Nasional, yang mencintai Negara Republik Indonesia. Gema perjuangan ALRI Divisi IV dengan gerilyanya semakin bergelora. Pemerintah Gubernur Tentara mulai mengatur strateginya.

Setiap Markas Daerah, Markas Pangkalan dan Markas Seksi selalu disiagakan. Mata-mata musuh sudah lama tidak berkutik. Kekuatan Pemerintah Gubernur Tentara mulai tampak. NICA hanya menguasai daerah kota sekitarnya, itupun hanya terbatas pada fisiknya. Sedangkan secara moral dan batiniah penduduk hampir seluruhnya, mendukung ALRI Divisi IV dan daerah pedalaman merupakan milik gerilyawan ALRI Divisi IV. Keadaan seperti ini tidak menguntungkan bagi golongan federalis, golongan pegawai sipil Belanda, dan serdadu NICA yang berkulit sawo matang. Oleh sebab itu sedapat mungkin mereka berusaha agar kekuatan Pemerintah Gubernur Tentara terpukul dan lumpuh. Namun keadaan tidak memungkinkan lagi, ALRI Divisi IV terlampaui kuat dan ulet, sebagian di antara mereka mau tidak mau agar selamat maka mereka membelot dari Pemerintah NICA dan memihak atau bergabung dengan Pemerintah Gubernur Tentara.

Memang, dalam dimensi perjuangan menegakkan kemerdekaan, banyak corak-corak warna, yang terkadang menggelikan, dan menjadi suatu kekhasan dari tabiat manusia.

2. Pemerintah Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Mengepung Kedudukan Belanda

ALRI Divisi IV semakin meningkat untuk memenangkan perjuangan. Karena itu, para unsur pimpinan Gubernur Tentara melakukan pembicaraan khusus, guna menentukan langkah selanjutnya. Di desa Ulin, Kandangan, Mayor P. Arya dan Gusti Aman berembuk, yang menghasilkan komitmen antara Resimen II dan III. Komitmen itu berbunyi : “Berdasar telah adanya pernyataan Roem Van Royen, sudah pasti akan disusul dengan *cease fire order*”.

Berdasarkan pengalaman yang didapat dalam perjanjian Renville, dilakukanlah usaha-usaha sebagai berikut :

1. Batalyon I Cadangan berkedudukan di Kandangan, Komandan A. Kusasi.
 2. Batalyon II Cadangan berkedudukan di Rantau, Komandan Hassan Basry.²⁴⁹
 3. Batalyon III Cadangan berkedudukan di Negara, Komandan A. Rizal.
- Ketiga komandan di atas, diberi pangkat Letnan II, dan bertugas membentuk kompi pasukan pada batalyon masing-masing.
4. Kompi Polisi Tentara, Komando Letnan II Setia Budi.
 5. Palang Merah, Komandan Kasful Anwar.²⁵⁰

Dengan terbentuknya komponen-komponen, yang memperkuat kedudukan Komando Markas Daerah (KMD) Tengah, maka gerakan perjuangan dalam segala bentuk taktik maupun strategi, sangat mudah diatur, apalagi jika pasukan-pasukan yang dibentuk, memperhatikan garis Komando. Dan yang lebih menguntungkan KMD Tengah memiliki perbekalan senjata di Kecamatan Negara dipimpin oleh Letnan II H. Masri.

Titik tolak yang cukup menentukan dari kebijaksanaan KMD Tengah adalah upaya memberi kepastian adanya kekuasaan *de facto* yang tumpang tindih, dengan menetapkan garis demarkasi 2 kilometer di luar kota Kandangan, Rantau dan Negara adalah kekuasaan Gerilya ALRI Divisi IV, berlaku sejak 27 Juli 1949. Untuk itu KMD Tengah menempatkan sebuah kompi tempur dipimpin oleh Samidri Dumam. Tugasnya yang utama, menjaga perbatasan dari infiltrasi Belanda. Karena itu jika pasukan Belanda memasuki Wilayah ALRI Divisi IV akan ditembak.

Adanya garis demarkasi, membuat Kiai Besar NICA M. Said mengunjungi KMD Tengah di Karang Jawa. Kedatangannya diterima dengan baik. Namun, pembicaraan tidak menghasilkan apa-apa, hanya sekedar pembicaraan humor. Dan Samidri Dumam, sebagai penerima tamu, kemudian mengantarkan sebaik-baiknya ke perbatasan setelah pembicaraan dianggap selesai. Besok pagi, setelah kedatangan Kiai Besar itu, ada lagi pesan, bahwa ia akan datang. Setelah ditunggu-tunggu ternyata tidak datang, yang datang adalah seregu KNIL dipimpin seorang Letnan, pada tanggal 2 Agustus 1949.

Pasukan KMD Tengah, masih dipengaruhi suasana damai, seperti sikap yang ditunjukkan Kiai Besar NICA M. Said. Pasukan perbatasan bersikap santai, berada di pinggir jalan, menjaga perbatasan, ternyata opsir Belanda yang datang seregu itu, menyuruh pasukan KMD Tengah menyerah, angkat tangan dan langsung menyerang. Pertempuran sengitpun terjadi, pasukan KMD Tengah kemudian mundur, sebaliknya pasukan KNIL tidak berani mengejar lagi.

Sore hari itu pula, datanglah pasukan KNIL yang cukup besar. Mereka berjalan kaki. Sekitar pukul 16.00, pertempuran berlangsung kembali, dan berakhir menjelang senja. Besok paginya tanggal 3 Agustus 1949 pasukan perbatasan melihat kedatangan polisi kilat. Agar tidak terjebak, maka mereka menyerang dahulu pasukan kilat itu. Dan kemudian datang bantuan pasukan KNIL, sehingga pertempuran semakin seru. Pasukan perbatasan tahu musuh tidak berani mengejar lagi.

Setelah sehari tidak ada pertempuran, maka pada tanggal 5 Agustus KNIL kembali melakukan serangan dengan kekuatan yang cukup besar, dan tanpa sengaja bertemu dengan pasukan KMD

²⁴⁹ Bukan Hassan Basry Pimpinan Umum ALRI Divisi IV/Gubernur Tentara.

²⁵⁰ G.M. Yaman, *op.cit.*, hal. 81 – 82.

Tengah. Terjadilah pertempuran jarak dekat, yang berjalan tidak melebihi seperempat jam. Gusti Aman terlibat langsung dalam pertempuran ini. Pihak KNIL, banyak menghambur-hamburkan peluru, tanpa terkena tubuh Gerilyawan ALRI Divisi IV. Keadaan ini membuat mereka mundur, dan bagi pasukan KMD Tengah tidak jadi ke Karang Jawa, kembali ke Padang Batung. Dalam perjalanan ke Padang Batung bertemu mayat seorang penduduk yang berkemungkinan besar kena tembak.²⁵¹

Gusti Aman, kemudian memerintahkan sebuah pasukan kecil, untuk melakukan penyelidikan tentang keadaan Markas KMD Tengah di Karang Jawa. Di tengah jalan pasukan kecil ini bertemu dengan 4 buah truk KNIL menuju Padang Batung. Pasukan KMD menghindar dan bersembunyi, sampai keempat truk itu berlalu. Kemudian meneruskan perjalanan menuju markas, dan berhenti, bersiaga pada sebuah kelokan jalan menanti kembali truk KNIL tersebut. Sementara itu, gemuruh rentetan tembakan terdengar di arah Padang Batung, ternyata salah faham antara pihak KNIL sendiri. Menjelang senja, truk KNIL lewat kembali tanpa menghentikan kendaraan. Karena mereka juga takut, bertempur ditengah hutan pada malam hari, mereka tidak menguasai medan. Hampir seminggu, sejak penempatan garis demarkasi itu, telah berlangsung pertempuran-pertempuran antara KMD Tengah dan pasukan Belanda, baik KNIL maupun Polisi Kilat.

Garis demarkasi yang ditetapkan KMD Tengah tersebut, merupakan penempatan sepihak, yang dilakukan guna mempertegas kekuasaan gerilyawan. Justru penempatan garis demarkasi ini, kian penting artinya, dalam upaya blokade kota yang dikuasai oleh Belanda. Hal ini, nantinya terlihat menjelang *cease fire*, para gerilyawan ALRI Divisi IV, berusaha mengungsikan penduduk ke pedalaman, ke daerah yang dikuasainya, dan di daerah itulah pertahanan dan kekuatan gerilyawan benar-benar mantap, sehingga Belanda sendiri, tidak berani memasuki wilayah tersebut. Dalam upaya memantapkan blokade kota ini, akan dimulai perjuangan daerah pesisir selatan atau daerah selatan, yang dipimpin oleh Mayor (L) P. Arya.

Mayor P. Arya, dengan dukungan Markas Daerah PS-14 dan Batalyon Resimen III yang akan dibentuk, berhasil membuat dan menjadikan desa Sungai Lulut, yang terletak di pinggiran kota Banjarmasin menjadi pedalaman, dan kedudukan Markas Daerah besar pesisir Selatan, memakai nama samaran Alam Roh.²⁵²

Markas daerah Alam Roh didirikan pada tanggal 06 Juni 1949 Pukul 16.00. Pembentukannya hanya berlangsung beberapa menit. Anggota pertama adalah H. Arif bin Montot, H. Asra bin H. Arif, H. Buseri yang kemudian menjadi Komandan Detasemen. Menyusul MS. Rusman, Burhan Saniman, Letnan Rusdi dan Suroto dan Kepolisian. Markas besar ini hanya berumur kurang lebih 100 hari sejak berdirinya tanggal 6 Juni 1949 sampai dengan *cease fire* di Mungu Raya 2 September 1949. Walaupun demikian sumbangannya terhadap perjuangan mempertahankan Republik Indonesia, dalam upaya berintegrasi dengan Yogya, mempunyai arti yang besar.

Berdirinya markas besar Alam Roh di daerah Selatan, merupakan strategi Pemerintah Gubernur Tentara ALRI Divisi IV menghadapi markas *Territoriaal Commandant Voor Zuider en Oosterafdeling van Borneo*.

Dalam suatu perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, namun berbekal semangat yang tinggi, P. Arya bersama Gusti Aman berangkat menuju daerah selatan. Hal ini terjadi setelah penandatanganan teks proklamasi. Mereka bertukar pendapat, antara merebut Kandangan sebagai pusat Markas Besar Selatan dan merebut Banjarmasin. P. Arya berpendapat bahwa apabila berhasil merebut Banjarmasin akan mempunyai arti yang sangat besar dari pada merebut Kandangan. Hasil pertukaran pendapat antara dua orang tersebut disetujui untuk memusatkan perhatian pada

²⁵¹ G.M. Yaman, *ibid.*, hal. 83 - 84.

²⁵² G.M. Yaman, *ibid.*, hal. 85.

ibukota pusat kekuasaan Belanda di Banjarmasin. Karena itu pada tanggal 31 Mei 1949 berangkatlah mereka menuju selatan, dengan melintasi : melalui Simpur, Pematang Karangan, Kelumpang, Gadung, Paul, Parigi, Kepayang, Pandulangan, Danau Kelambu dekat Binuang. Daerah yang dilaluinya ini adalah daerah Rantau yang memiliki sektor, dengan kode markas 0 ½ 17 daerah Rantau pada saat itu dikepalai oleh Guru Baderun alias Bayan S.

Pada kesempatan daerah yang dilaluinya Mayor P. Arya selalu berpropaganda dengan penuh semangat, bahwa Pemerintah Gubernur Tentara ALRI Divisi IV di bawah pimpinan Hassan Basry telah tersusun dengan teratur, dan perjuangan pasti menang, sebaliknya Belanda pasti bertekuk lutut. Hal ini diucapkan manakala ia singgah di sebuah surau di Pematang Karangan.²⁵³

Ketika berada di Markas Daerah Tapin Utara, mereka diterima oleh Kepala Markas Daerah H. Mardjuki Amin, dan beberapa staf pimpinan sektor 0 ½ 17. Adanya pertemuan ini banyak sekali memberikan spirit kepada para pejuang, yang sempat bertemu dengannya.²⁵⁴

Melalui daerah Rantau, mereka meneruskan lewat Paku, Cinta Puri, Kampung Baru, Galam Rabah, Antasan Suton, Tabing Rimbah, Lok Baintan dan perjalanan sampai di Banjarmasin 125 jam non stop.

Perginya P. Arya ke Banjarmasin tanpa berunding dengan pimpinan karena mengingat situasi yang masih sulit. Sedangkan ketegasan dan ketetapan, kegesitan mengatur strategi di Banjarmasin perlu sedini mungkin. Akhirnya tindakan ini disetujui juga, terbukti dengan adanya kiriman pasukan dari Kandungan, antara lain : Bung Hammy, Tobelo dan Daeng Ladjida. Daeng Ladjida menamai daerah ini "Alam Roh". Pimpinan Umum Markas Besar ini sering berada di rumah H. Buseri muara Sungai Lulut, dan di rumah Arifin Montot di Pamurus.

Daerah Alam Roh adalah daerah yang tidak pernah diganggu oleh Belanda, yaitu dari Sungai Jingah dan sepanjang Sungai Martapura, serta jalan Martapura Lama dan jembatan besi-Sungai Bilu sampai ke Martapura.

Dari daerah ini dilancarkan strategi gerilya memblokade kota Banjarmasin, dengan mengerahkan seluruh potensi perjuangan yang ada di sekitar Banjarmasin. Lembaga-lembaga yang dipakai untuk menggerakkan rakyat tersebut adalah:

1. Departemen Urusan Umum : P. Arya, Kepala Departemen.
2. Departemen Kemakmuran/Kuangan : Maxim Le Miaty, Kepala Departemen.
3. Departemen tata Pemerintahan : P. Arya, Kepala Departemen.
4. Departemen Infiltrasi dan Tenaga : M. Nurdin, Kepala Departemen Potensi.
5. Markas Besar Selatan yang : Maxim Le Miaty, Kepala Markas.
meliputi wilayah Kalbar, Kalteng dan Kaltim sekarang.
6. Resimen III/Resimen Selatan : Wilhelmus Benhard, Komandan Resimen.

Resimen II Selatan ini, berkembang menjadi enam batalyon, dengan teritorialnya masing-masing pula,

- a. Batalyon I Martapura dipimpin oleh Rustam.
- b. Batalyon II Alam Roh dipimpin oleh M.S. Rusman.
- c. Batalyon III Kalimantan Tenggara dipimpin oleh Azidinoor.
- d. Batalyon IV Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat dipimpin oleh Abdul Rivai.
- e. Batalyon V Kalimantan Timur dipimpin oleh Mr. Semeru, Wakilnya Daeng Kucinta Gidol Tololio.

²⁵³ A. Gazali Usman, *op.cit.*, hal. 102.

²⁵⁴ H. Atjil Siddiq, wawancara tanggal 10 April 1989. Lihat juga Yusliani Noor, *op.cit.*, hal. 146.

- f. Batalyon VI Pelajar dipimpin oleh Fakhurrrazi. Tokoh-tokoh pelajar ini antara lain : Syamsir Alam, Dislansyah dan Riduan Iman.²⁵⁵

Koordinasi seluruh wilayah Markas Besar Selatan yang meliputi : Dayak Besar, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat tersebut, dimulai dengan sebuah Proklamasi.

Pada sekitar seminggu sebelum tanggal 17 Agustus 1949, dikeluarkanlah sebuah proklamasi susulan, yang maksudnya untuk daerah perjuangan keluar dari wilayah Kalimantan Selatan, Proklamasi itu berbunyi :

Merdeka !

Kami Gubernur Tentara Kalimantan Selatan dengan ini membuka pintu Kalimantan Selatan bagi rakyat Indonesia di Kalimantan Timur dan Barat, untuk bersama-sama memperjuangkan masuknya Kalimantan ke dalam Republik Indonesia.

Tetap Merdeka.

Kandangan, 17 Agustus Rep.²⁵⁶

Teks Proklamasi ini disusun di Sungai Madang, pada tanggal 26 Juli 1949, untuk menghadapi pembunuhan massal yang direncanakan oleh Letnan Kolonel Veenendal. Tetapi karena birokrasinya di Kandangan, rencana itu terlambat dikeluarkan dari tanggal 26 Juli 1949 menjadi 17 Agustus 1949.

Sebelum dikirimnya Proklamasi tersebut, telah dikirim utusan bersenjata ke Kalimantan Timur dan Barat. Utusan dengan kekuatan bersenjata yang dimaksud adalah :

1. Daeng Kucinta Kidul Totolio, dikirim ke Kalimantan Timur, dengan pesan harus berada di daerah itu sebelum tanggal 17 Agustus 1949.
2. Daeng Mastilo alias Abdullah Rivai, lewat jalur Sungai Kahayan. Sedangkan anak buahnya berpecah ke daerah Kotawaringin, Kapuas Tengah dan Kapuas Hulu.
3. Azidinnor melakukan ekspedisi ke Kalimantan Tenggara.

Ketiga orang utusan tersebut diangkat sebagai Komandan Batalyon dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tenggara.

Pada awal berdirinya "Alam Roh" bermodalkan senjata yang sangat minim sekali, yakni parang bungkul (parang besar), sedangkan senjata api, direncanakan diambil dari pekerja-pekerja perkebunan Belanda. Selanjutnya, secara perlahan akhirnya terkumpul sekitar 30 buah senjata, karena Alam Roh meminta bantuan kepada Hulu Sungai untuk segera mengirimkan pejuang pilihan, guna menggempur kota Banjarmasin, utamanya objek-objek militer, antara lain : Rumah Residen A.G. Deelman, Asrama KL 9, Asrama Tatas (sekarang Masjid Raya Sabilal Muhtadin), pos polisi di Ujung Murung, Troepen Commando (sekarang Kodamar), Kompleks MP (*Militaire Politie*) di Teluk Tiram, Kompi X di Kelayan, Kompleks MP di Sungai Acan (Pekapuran) dan Asrama di Pacinan (Kompleks bekas P dan K).

Sebelum penyerangan dilakukan, maka terlebih dahulu rumah-rumah sakit yang dekat lokasi penyerbuan dikosongkan. Para WTS disebar untuk mencari informasi tentang keadaan tentara Belanda.

²⁵⁵ Depdikbud, *op.cit.*, hal. 166.

²⁵⁶ Depdikbud, *ibid.*, hal. 168.

Penyerangan dipimpin oleh Komandan III Wilhelmus Benhard bersama Rusman, sedangkan pembagian serangan adalah : Komandan Batalyon Alam Roh menyerang Kampung Gedang ke hulu. Komandan Resimen I Martinus menyerang dari Jembatan Kuin ke hilir. Perintah serangan ditetapkan pukul 10.00 secara serentak terhadap sasaran yang akan diserang.

Di rumah Residen Deelman sedang berlangsung rapat dan agaknya panik dengan situasi yang gawat. Rapat bubar pukul 10.00, sedang di seberang sungai telah tersusun senapan untuk menembak. Tetapi karena pasukan itu taat pada komando, mereka tidak menembak meskipun banyak yang telah siap.

Serangan itu berlangsung sekitar bulan Agustus 1949, setelah *cease fire* di Sumatera. Serangan ini ditentang oleh A. Ruslan (Ketua KNI tahun 1945), yang mengatakan *cease fire* itu berlaku juga untuk Kalimantan. Namun P. Arya berpendapat bahwa *cease fire* itu hanya untuk daerah de facto Republik Indonesia.

Penyerangan terhadap kota seperti ini diulangi lagi sampai 3 kali, tetapi tidak lagi dipimpin oleh Wilhelmus Benhard hanya M.S. Rusman.

Taktik perjuangan ini sebenarnya untuk menunjukkan kepada berbagai pihak, bahwa ALRI Divisi IV dengan Pemerintah Gubernur Tentara telah memiliki kekuasaan. Sehingga orang-orang yang pro Belanda (anti Republik) menjadi ketakutan. Dan menjelang bulan September, lebih dari 99 % orang yang menjadi Pro Republik. Artinya ALRI Divisi IV semakin diyakini kekuatannya.

Alam Roh dalam perjuangannya tidak hanya berfokus kepada masalah penyerangan yang sifatnya militer, juga upaya menyusun kekuatan politik, sosial dan ekonomi.

Dalam bidang politik Alam Roh berupaya melumpuhkan organisasi Belanda ke dalam, dan menjalankan persoalan Kalimantan Selatan menjadi masalah nasional dan internasional. Untuk hal tersebut, maka telah disusun struktur Pemerintahan Alam Roh, seperti di atas, dengan wilayah dikurangi Kandangan, yang termasuk daerah besar utara. Struktur wali daerah Banjar M. Hanafiah dimasukkan ke dalam perjuangan dan menetap di markas Alam Roh, maka sejak itu dijalankan Pemerintahan Sipil.

Setelah beberapa tokoh penting direkrut ke dalam Pemerintahan Sipil, ALRI Divisi IV, maka pemanggilan terhadap sisa-sisa pegawai tinggi teras Pemerintahan NICA di Kalimantan Selatan yang berkebangsaan Indonesia menjadi mudah dan lancar, antara lain :

- a. Bajuri Kepala Kantor Pemerintahan Banjarmasin, datang menyerahkan diri dengan seorang komis.
- b. Pengganti Kiai Besar oleh Belanda ditunjuk Kiai Yusran sesudah diangkat oleh Belanda Kiai Besar Yusran hilang lagi ke pedalaman. Demikian pula Kiai Hidayat pengganti Kiai Yusran.
- c. Untuk mengisi kekosongan pangreh praja ini Belanda mendatangkan Kiai Besar Ramlan dan Kiai dari Pelaihari. Akan tetapi setiba di Banjarmasin, sebelum sampai di rumah masing-masing, keduanya telah diciduk dan di bawa ke asrama Alam Roh.
- d. Oleh Belanda Recombe Kiai Ibrahim Sedar dan seorang kiai lain yang masih ketinggalan dimasukkan ke dalam tahanan, agar tidak diciduk dan di bawa ke Alam Roh.
- e. Setelah selesai dengan tokoh Pangreh Praja barulah tokoh kepolisian mendapat giliran. Yang pertama-tama diangkut ke pedalaman adalah Komis Kepala Aliansyah dan Syahransyah dari Kepolisian Belanda.
- f. Usaha pencidukan Komis Redaktur Siregar gagal. Keluarga ini disuruh melarikan diri ke Jakarta.²⁵⁷

²⁵⁷ M. Idwar Saleh, *op.cit.*, hal. 45.

Garis politik Belanda tidak dapat lagi berjalan. Strateginya menjadi buntu, lantaran tokoh-tokoh yang menyokong Pemerintahannya telah bergabung dengan Alam Roh.

Sementara itu dalam bidang sosial, Alam Roh berusaha pula menggerakkan potensi sosial untuk menyokong perjuangannya. Dalam hal ini P. Arya telah membentuk Departemen Urusan Agama. Yang pada dasarnya lebih banyak berorientasi menggerakkan masyarakat untuk berjuang melawan Pemerintah Belanda.

Cara yang ditempuh adalah :

- a. Mempergiat khotbah-khotbah di masjid-masjid Sungai Lulut pada setiap sembahyang Jum'at untuk mengupas perjuangan sebagai perang sabil.
- b. Di tiap-tiap langgar kota Banjarmasin, guru-guru agama membaca riwayat-riwayat peperangan di masa Nabi Besar Muhammad SAW.
- c. Di Hulu Sungai dan di daerah Banjarmasin, khotbah-khotbah tentang dosa mengkhianati tanah air dihukum lebih berat daripada orang murtad karena itu dibiarkan busuk seperti bangkai anjing.
- d. Langgar-langgar yang kurang ramai dikunjungi oleh orang sembahyang, didatangi oleh pasukan dengan memelopori orang agar rajin sembahyang.
- e. Perzinahan dihukumkan sebagai pelanggaran berat yang diberikan hukuman berat. Hal ini mengakibatkan Kompleks pelacuran Banjarmasin menjadi bersih. Yang mengakibatkan kurang lebih 500 WTS pindah ke Jawa.
- f. Melalui guru-guru agama, pelaksanaan naik haji diketatkan dengan alasan negeri tidak aman, dan sedang prihatin memperjuangkan kemerdekaan terhadap penjajah. Kewibawaan Pemerintah Gubernur Tentara ini terbukti dari ditaatinya larangan tersebut oleh sejumlah 1200 orang calon haji, walaupun mereka sudah membayar uang muka, dengan risiko uangnya tidak dikembalikan. Mereka yang tetap melakukan pelanggaran, baik di luar maupun di dalam kota dibakar rumahnya, tindakan pihak Gubernur Tentara ini bertujuan pula agar f. 3.000.000,- kekayaan rakyat, jangan diangkut Belanda keluar Kalimantan Selatan.²⁵⁸

Strategi Alam Roh di bidang ekonomi. Pasukan-pasukan ALRI Divisi IV, Markas Daerah, Pangkalan dan Seksi, semua itu amat memberatkan masyarakat desa dengan pembiayaan perjuangan. Mengingat hal tersebut ekonomi desa harus dibangun dan dikembangkan, agar dapat membiayai perjuangan ALRI Divisi IV. Untuk memperkuat ekonomi desa itu maka dipergunakanlah dasar sistem koperasi. Setiap desa yang dikuasai diwajibkan membangun koperasi yang meliputi berbagai jenis koperasi, antara lain: koperasi produksi, pembelian dan koperasi penjualan. Semua koperasi itu dikoordinir oleh Sentral Daerah Besar Selatan.

Koperasi berusaha pula bekerjasama dengan NV dan Firma yang mengatur ekspor dan impor. Departemen Kemakmuran/Keuangan Markas Alam Roh telah membuat rencana pengembangan koperasi, sebagai berikut :

- a. Peningkatan produksi pertanian diarahkan pada produksi bahan pangan. Setiap desa diwajibkan memproduksi bahan pangan yang melebihi makanannya sendiri.
- b. Lintah darat yang menjadi pinjaman dengan tinggi dan dikendalikan dan dibatasi.
- c. Tanah-tanah pertanian daerah Kelayan dan sungai-sungai Madang, tanah-tanahnya diserahkan untuk digarap.
- d. Penyaluran hasil pertanian diusahakan sedemikian rupa, sehingga bidang perdagangan tidak lagi menjadi alat penghalang bagi petani di desa.

²⁵⁸ M. Idwar Saleh, 1988, *op.cit.*, hal. 46 - 47.

- e. Pemindahan kekayaan dari desa ke kota dibatasi dengan penetapan harga penjualan di masa panen, yang disamakan tingginya dengan harga masa paceklik.
- f. Bahan tekstil dan lain-lainnya yang dipergunakan masyarakat desa, dijual dari tangan pertama dengan semurah mungkin.
- g. Lembaga ekonomi yang melakukan pengumpulan dan penyebaran barang ialah koperasi-koperasi. Ekspor dilakukan oleh badan-badan yang ada di kota.
- h. Dalam bidang penyaluran tingkat ekspor-import terdapat kerjasama dari koperasi dengan badan-badan yang ditentukan.
- i. Tentara dan masyarakat diikutsertakan membantu kelancaran dan pengawasan.
- j. Di Kalimantan Selatan akan diedarkan Uang Republik Indonesia.²⁵⁹

Melihat strategi ekonomi di atas, sebenarnya dapat dikatakan, kerja Alam Roh tidak tanggung lagi. Upaya pembangunan ekonomi perjuangan, guna melumpuhkan musuh benar-benar diatur sedemikian rupa, seolah-olah garis kebijaksanaan ini menyatakan kesiapan untuk melakukan perjuangan sampai kapanpun juga. Nampak pula optimisme perjuangan, bahwa Pemerintah Gubernur Tentara ALRI Divisi IV menunjukkan kemampuannya mengelola ekonomi yang didukung sepenuhnya oleh rakyat.

Alam Roh juga berpropaganda agar jual beli dilakukan dengan pedagang-pedagang bangsa sendiri. Kepada rakyat desa ditekankan agar memboikot perusahaan asing dan orang kadir.

NV. Kinibalu dijadikan agen pembelian dan penjualan karet koperasi desa dalam kota Banjarmasin Koperasi ini beranggotakan lebih dari 10.000 orang, karena melalui koperasi ini beras dibeli dengan murah. Dampak positif dari gerakan ini adalah stabilnya harga beras, baik di musim panen maupun pada musim paceklik, dengan harga f. 0,75 per liter. Atas bantuan NV ini pula penjualan karet rakyat dinaikkan, dari f. 0,45 menjadi f.1, perkilogram.

Mr. Boerhanuddin dan N.W. Pongoh diminta mendirikan sebuah bank, guna kelancaran serta untuk membantu keuangan Pemerintah Gubernur Tentara. Untuk itu dibentuklah Bank Dagang Indonesia.²⁶⁰

Jelaslah, bahwa seluruh sektor kehidupan telah diupayakan oleh Alam Roh, sehingga Belanda tidak bisa terlalu banyak bergerak lagi. Artinya, dengan dikuasanya militer, politik, sosial dan ekonomi, maka sama saja telah lumpuhnya kekuatan Belanda, hanya saja Belanda menutup-nutupi kealahannya itu.

Merosotnya kekuatan NICA, semakin terasa di permulaan bulan Agustus 1949. Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa klimaks penyerangan terhadap kota Banjarmasin, terjadi pada bulan Agustus ini. Mayor P. Arya didampingi Letnan I M.S Rusman Danyon I Banjar, dan Letnan I A.H. Tobelo Asisten Komisi Umum Pimpinan serangan militer terbuka, pada tanggal 15 Agustus 1949 dimulai pukul 20.00 terhadap kota Banjarmasin. Demikian pula, sebuah pasukan yang kompak dikirim oleh Markas Besar ALRI Divisi IV, yang langsung dipimpin oleh Komandan Resimen I Martinus, yang juga terkenal kegagah beraniannya, disertai langsung melaksanakan serangan pada objek-objek militer Belanda. Pertempuran berlangsung semalam suntuk dan pihak Belanda hanya bisa membalas tembakan dari tempatnya masing-masing. Hal ini disebabkan serangan ALRI begitu serentak, di sepanjang sungai Martapura. Sementara itu pemogokan berjalan terus. Roda Pemerintahan Belanda mulai mati, Banjarmasin telah benar-benar terkepung, Belanda kian terhimpit dan terjepit kedudukannya. Serangan-serangan seperti ini berlangsung selama tiga kali.²⁶¹

²⁵⁹ M. Idwar Saleh, *ibid.*, hal. 48 - 49.

²⁶⁰ M. Idwar Saleh, *ibid.*, hal. 50.

²⁶¹ G.M. Yaman, *op.cit.*, hal. 89.

Tanggal 17 Agustus 1949, pihak gerilyawan Alam Roh melakukan lagi suatu langkah penting terutama dari segi psikologis, yaitu pada hari itu Markas Daerah di pesisir selatan melaksanakan upacara peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, bertempat di seberang pasar Sungai Tabuk, pada sebuah lapangan terbuka, dengan mengikutsertakan pendukung-pendukung baru Wali Daerah M. Hanafiah, Kiai Besar Raden dan Kiai Kepala Basuni. Upacara berlangsung penuh hikmat. P. Arya yang kala itu bertindak selaku inspektur upacara, menggunakan kesempatan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, atas keikhlasan bergabungnya pejabat pemerintah federal, Dewan Banjar dan NICA pada gerilyawan. Upacara diakhiri dengan perintah pada Resimen III, untuk berangkat ke Kandangan dengan seluruh pasukan dan persenjataannya, guna membantu KMD Tengah melancarkan serangan umum terhadap Kota Kandangan, sebagai langkah pertama mendefektokan daerah basis pertahanan Hulu Sungai.²⁶²

Bagaimanakah perjuangan kawasan Hulu Sungai dalam upaya melumpuhkan NICA? Di bagian terdahulu dari tulisan ini, telah banyak memaparkan betapa menggelornya semangat perjuangan di kawasan Hulu Sungai, karena Pimpinan dan tokoh-tokoh penting ALRI Divisi IV berada di daerah ini.

Tanggal 22 Agustus 1949 Letnan I Rustam dengan sebuah kompi pasukan Resimen III yang dipimpinnya, datang melapor ke markas KMD Tengah di Karang Jawa. Kemudian Daeng Ladjida yang bertugas dari Markas Besar membantu daerah pesisir selatan dan telah ditetapkan sebagai wakil Komandan KMD Tengah, atas saran Panglima Divisi untuk pulang kembali ke Kandangan. Sebab Panglima (Hassan Basry) berfikir bahwa P. Arya dengan kekuatan yang cukup mantap telah dapat menguasai keadaan, sehingga fokus selanjutnya dalam upaya melumpuhkan Belanda adalah dikonsentrasikan di Kawasan Hulu Sungai dengan cara serangan yang lebih besar, serentak dan terpadu.

Komandan KMD Tengah pada saat melaporkan kedatangan bantuan pasukan bersenjata dari Resimen III tersebut sekaligus menyampaikan untuk melakukan serangan umum, pada kota Kandangan pada siang hari secara terbuka. Pembicaraan berlangsung agak lama dengan Panglima. Akhirnya Panglima menyetujui rencana serangan terbuka pada kota Kandangan pada siang hari ditetapkan tanggal 24 Agustus 1949 dimulai pukul 04.00, dengan pimpinan umum langsung dipimpin oleh Hassan Basry.

Kekuatan utama pasukan Yon Mobil dan pasukan bantuan Resimen III. Rencana dibuat sematang mungkin. Pasukan-pasukan bantuan terdapat pada Yon I Kandangan, polisi tentara, pasukan-pasukan teritorial Markas Daerah Amandit Timur, Selatan, dan Utara, serta regu Palang Merah.

Pada tanggal 23 Agustus 1949, ketika hari masih pagi, Panglima Divisi beserta KMD Tengah membahas rencana serangan, sedangkan seluruh pasukan telah siap tempat, baik fisik maupun mental. Unsur penguat mental adalah wejangan para ulama, restu para ulama, serta hal-hal yang bersifat supranatural, seperti: rantai babi, jimat, babatsal, baju barajah, wafak, pitonang, sulur babi, keris bertuah, buntat, dan lain-lain. Pasukan tersebut berlindung di rumah-rumah penduduk.

Pukul 02.30 Komandan KMD Tengah, datang ke tempat penginapan Panglima Divisi, ternyata Panglima tidak ada. Menurut yang punya rumah, Panglima sejak habis magrib ke Haruyan tanpa meninggalkan pesan. Di kemudian hari diketahui, bahwa Panglima dijemput oleh orang Markas Besar, yang berpendapat sebaiknya pimpinan serangan umum itu diserahkan saja kepada Komandan KMD Tengah, Kapten (L) Gusti Aman, yang telah didampingi Letnan I (L) Daeang Ladjida. Apa mau dikata, karena persiapan sudah matang, maka untuk sementara serangan diundur

²⁶² G.M. Yaman, *ibid.*, hal. 92.

selama 2 jam. Barulah pada pukul 06.00 serangan dilancarkan, tanpa terpengaruh oleh ketidakhadiran Panglima. Tembakan pancingan yang dilakukan oleh pasukan gerilyawan yang bertugas memancing musuh ternyata tidak berhasil membuat pasukan Belanda KNIL keluar dari tangsinya. Bersamaan dengan itu, pasukan yang diperintahkan menyerang tangsi polisi NICA yang disambut dengan tembakan balasan di tempat. Sambutan bertahan dari pihak KNIL dan polisi NICA memberi kesempatan pada pasukan gerilyawan untuk merayap memasuki kota yang banyak di antaranya sudah kenal dengan rumah penduduk di kota Kandangan, sehingga mereka langsung memasuki rumah dan berlindung di situ, sebab rumah tersebut banyak telah kosong penduduknya menghindari dari himbauan gerilyawan.

Demikianlah, akhirnya pertempuran berlangsung pada dua tempat, yaitu tangsi KNIL dan tangsi polisi NICA. Beberapa jam pertempuran jarak jauh telah berlangsung, kemudian front meluas ke daerah selatan Rantau dan ke arah utara Barabai, menghadapi bantuan dari pasukan KNIL yang berada di Barabai dan yang datang dari Banjarmasin. Gusti Aman mengirim kurir pada polisi pasukan untuk bergerak mundur namun telah meninggalkan kota. Selama berlangsungnya pergeseran pasukan itu, diusahakan pemusatan pasukan pada tangsi KNIL sekaligus sambil menghadapi serangan dari pasukan bantuan yang datang dari Banjarmasin. Siang hari pertempuran menyepi dan berlangsung kembali pada saat pihak gerilyawan mulai melanjutkan serangan terhadap tangsi KNIL. Pasukan yang berada di rumah-rumah penduduk di dalam kota, diberi granat tangan dan melemparkannya tanpa diarahkan langsung pada sasaran. Hal ini sebagai taktik sekedar memperlihatkan keadaan gerilyawan dalam kota Kandangan dan sesudah itu diperintahkan ke luar kota bergabung dengan pasukan.²⁶³

Agaknya yang menjadi pertanyaan kita adalah mengapa pasukan Belanda menerapkan taktik bertahan? Kiranya dapat dianalisa bahwa disamping pasukan gerilya yang dimotori oleh sektor 0 ½ 17, juga secara gencar melakukan serangan secara offensif, karena rakyat Rantau khususnya yang bertempat tinggal di sekitar Kota Rantau telah mulai hijrah ke pedalaman Gadung. Hal ini pula memberi keleluasaan bagi para gerilyawan untuk bergerak.

Aksi-aksi serangan ini di antara lain, terjadi pada waktu siang hari yang dilakukan secara serentak dari 4 jurusan, yaitu :

- a. Jurusan dari arah Masjid dipimpin oleh Guperan.
- b. Jurusan dari arah Mandarahan dipimpin oleh Bachtiar.
- c. Jurusan dari arah Lumbu (sekarang Jalan Perintis) dipimpin oleh Badaruddin.
- d. Jurusan dari arah Malingkung dipimpin oleh Undat yang sekaligus memimpin seluruh aksi penyeranan ini.

Serangan umum dimaksudkan untuk semata-mata mengacaukan musuh dan menunjukkan keberadaan gerilyawan. Setelah tembak menembak hampir satu jam, para gerilyawan mundur dengan satu korban seorang janda yang mempunyai seorang anak bernama Nursiah penduduk Kupang Masjid Rantau, sedangkan dari pihak musuh tidak diketahui.²⁶⁴

Lima hari sesudah peristiwa di atas, dengan sasaran menyerang pos militer Belanda dan asrama Polisi NICA di kota Rantau, dengan kekuatan lebih dari 100 orang ditambah dengan beberapa orang penduduk. Kekuatan dibagi 6 jurusan, 3 jurusan menyerang pos militer Belanda dan 3 jurusan menyerang asrama polisi. Masing-masing kelompok dipimpin oleh : Undat, Baderi Hasan, M. Salman, Bachtiar, Guperan dan Sehat Nahat. Pimpinan penyerangan langsung dipimpin/dikoordinasikan oleh Alidin, Komandan sector 0 ½ 17, dan A. Aroba, Wakil Komandan

²⁶³ G.M. Yaman, *ibid.*, hal. 89.

²⁶⁴ Yusliani Noor, *op.cit.*, hal. 150 – 151.

dan sekaligus Komandan pasukan sector 0 ½ 17. Dalam penyerangan dengan taktik kejut, muncul dan hilang ini, pihak gerilya tidak ada yang korban, sedang di pihak musuh tidak diketahui.

ALRI Divisi IV juga menganjurkan kepada semua pegawai negeri, dan orang-orang lainnya yang bekerja dalam dinas Belanda untuk mogok. Ini terjadi akhir Agustus 1949. Para pegawai ini diharuskan tinggal di rumah saja di tempat, sampai ada perundingan tentang gencatan senjata. Anjuran ini tertuang dalam surat edaran yang ditanda tangani oleh P. Arya.

Surat edaran yang tertanggal 28 Agustus 1949 itu, berbunyi :

No. 48 – PK – V

Pokok : PINDAH KERJA

Dengan ini dianjurkan kepada seluruh Bangsa Indonesia yang bekerja pada Belanda di lapangan, pemerintahan dan perekonomian, supaya mulai hari Selasa, tanggal 30 Agustus tinggal di rumah masing-masing, dan mencari perhubungan dengan Pemerintah Gubernur Tentara ALRI atau tinggal diam sampai perundingan gencatan senjata dengan Jenderal Mayor Suhardjo dan UNCI berhasil memuaskan. Kepada seluruh rakyat, yang menaati seluruh anjuran ini diucapkan terima kasih terlebih dahulu, karena itu berarti pengorbanan penting kemerdekaan yang sejati dan berisi. Hanya dengan inilah pengorbanan dilanjutkan dapat dibatasi.

Banjarmasin, 28 Agustus V Rep

Komisaris Umum banjarmasin

Ttd :

P. Arya / Mayor ALRI ²⁶⁵

Pemerintah Kolonial berusaha menggagalkan rencana ALRI Divisi IV dengan mempertimbangkan para pegawainya, gaji tidak akan dibayar bagi mereka yang meletakkan pekerjaannya, karena menghadapi apa yang disebut sebagai “ancaman”. Peringatan itu sia-sia. Pada tanggal 30 Agustus benar-benar dilakukan pemogokan umum. Hanya beberapa buah kantor pos yang tetap buka, demikian juga rumah-rumah sakit dan sekolah-sekolah. Semua kantor Pemerintah lainnya tutup, sementara di bank-bank dan perusahaan dagang, hanya pegawai Eropa dan Cina yang muncul untuk bekerja. Lembaga-lembaga pendidikan dapat tetap buka, karena mengingat pentingnya pendidikan, ALRI Divisi IV melakukan pengecualian bagi guru.

Pemogokan pun segera menyebar ke bagian-bagian lain Kalimantan Selatan, seperti yang diuraikan segelintir pada halaman terdahulu. Pada tanggal 16 September, lebih dari 150 pekerja kantor dan buruh di Hulu Sungai, yang bekerja untuk Pemerintah Kolonial di Kandangan, Rantau dan Negara mengeluarkan pernyataan yang isinya kira-kira mereka baru akan meninggalkan setiap kantor dan perusahaan yang menghalangi perjuangan kemerdekaan. Mereka akan kembali bekerja setelah Konferensi Meja Bundar selesai dengan berhasil. Pemogokan berlanjut sampai awal Oktober 1949, ketika sudah berlaku perundingan antara ALRI Divisi IV dan Belanda. ALRI Divisi IV mengadakan himbauan kepada para pemogok untuk memulai pekerjaan. Pertengahan bulan itu juga pemogokan itu benar-benar berakhir.²⁶⁶

Dengan ditaatinya ALRI Divisi IV dengan himbauan pemogokannya dan ditaati sampai kepada turunnya kembali bekerja, menunjukkan kharisma dan kepopuleran yang melebihi dari pemerintahan NICA. Dengan cara ini, teknik psywar yang dijalankan ALRI Divisi IV benar-benar berhasil. Artinya ALRI Divisi IV telah mampu dan dapat mengendalikan massa, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan perjuangan. Pengendalian massa itu tidak hanya rakyat, petani, buruh,

²⁶⁵ Surat Kabar *Kalimantan Berjuang*, 29 Agustus 1949.

²⁶⁶ C. Van Dijk, *op.cit.*, hal. 217.

nelayan, pekerja kasar lainnya, tetapi tidak terkecuali pula pegawai-pegawai atau orang-orang yang bekerja dalam dinas NICA. Sebaliknya, indoktrinasi dan iming-iming duit yang diberikan Belanda kepada para pegawainya tidak digubris sama sekali.

Demikianlah, Pemerintah Gubernur Tentara ALRI Divisi IV telah mengepung Belanda, dengan fokus daerah besar Selatan dan Tengah yakni Banjarmasin, Rantau dan Kandangan. Keadaan seperti inilah, yang memaksa Belanda berupaya untuk melakukan perundingan dengan pihak ALRI Divisi IV dengan meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat Republik Indonesia dan juga ditengahi oleh KTN (Komisi Tiga Negara). Padahal ALRI Divisi IV pada saat itu benar-benar bergerak sendiri-sendiri tanpa bantuan pusat.

Sebelum kedatangan misi militer Republik Indonesia ke Kalimantan Selatan Badan Koordinasi perkumpulan politik, ekonomi, sosial pemuda pemudi dan disokong oleh golongan Arab dan India telah mengeluarkan mosi sebagai berikut :

Mosi Badan Koordinasi

Badan Koordinasi di Banjarmasin yang terdiri dari perkumpulan-perkumpulan politik, ekonomi, sosial dan pemuda pemudi yakni yang disebut dalam daftar A dan disokong oleh :

Perkumpulan golongan Tionghoa yakni yang disebut dalam daftar B

Perkumpulan golongan Arab yakni yang disebut dalam daftar C

Perkumpulan golongan India yakni yang disebut dalam daftar D

Memperhatikan

Bahwa gerakan kaum gerilya yang sejak tahun 1948 melakukan gerakan perjuangan kemerdekaan yang dimulai dari Hulu Sungai seterusnya menjalar ke berbagai tempat di seluruh Kalimantan Selatan dan sekarang telah sampai di Banjarmasin, ibukota Kalimantan Selatan yang pada hari Senin malam tanggal 15 - 16/08/49 telah mulai mengadakan tembakan-tembakan di berbagai tempat di dalam kota.

Surat selebaran dari pusat pimpinan gerakan tersebut Kandangan 05/08/49 menyatakan dengan tegas bahwa mereka taat pada persetujuan penghentian tembak menembak asal dengan perantaraan Wakil Republik Indonesia.

Menimbang

Sungguh penting dan sangat perlu lekas-lekas diusahakan terlaksananya penghentian tembak menembak.

Memutuskan

Minta dengan hormat kepada UNCI dengan perantaraan Dewan Daerah Banjar, Dewan Daerah Dayak Besar dan Dewan daerah Kalimantan Tenggara, agar menyampaikan kepada yang berkewajiban untuk segera mengatur dan melaksanakan penghentian tembak menembak di seluruh Kalimantan Selatan.

Banjarmasin, 15 Agustus 1949

A/n Kumpulan tersebut seluruhnya :

Ketua Badan Koordinasi

Di Banjarmasin

Ttd

R. Sa'ban

3. Kedatangan Misi Militer Republik Indonesia dan Komisi Tiga Negara di Kalimantan Selatan

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, situasi dalam bulan Agustus 1949 merupakan puncak kegiatan perjuangan ALRI. Perasaan tak senang terhadap Belanda sudah berani dilahirkan, hal ini disebabkan keyakinan mereka terhadap ALRI Divisi IV. Pemerintahan Belanda lumpuh, pemerintahannya macet, pembantu pejabat dan pegawai pemerintahan orang Indonesia menghilang, perekonomian mandeg, polisi melarikan diri. Dalam hal ini yang bekerja hanya kantor pos dan telegraf serta telepon, rumah sakit, PID (*Politieke Inlichtingen Dienst*) dan sekolah-sekolah.

Selain itu pula, Alam Roh telah berupaya membentuk KNI yang diketuai Mr. Burhanuddin, sebelumnya telah dibubarkan Dewan-dewan Banjar, Kalimantan Tenggara. Dayak Besar dan Kalimantan Timur oleh Gubernur Tentara ALRI Divisi IV, sehingga terbentuk KNI Kalimantan. Di dalamnya duduk unsur politik, organisasi dan tokoh-tokoh masyarakat.

Situasi yang tidak menguntungkan Belanda selalu berusaha mereka tutupi, utamanya pemberitaan tentang kegiatan gerilya Kalimantan. Sehingga timbul kesan, seolah-olah wilayah yang tidak termasuk de facto Republik Indonesia ini selalu aman dan tenteram.

Surat Kabar "*Kalimantan Berdjung*", yang pada mulanya terbit di Kandangan, kemudian pindah ke Banjarmasin. Surat kabar ini selalu memberitakan kegiatan para gerilya, utamanya tentang kemenangan-kemenangan yang selalu dicapai ALRI Divisi IV. Juga diberitakan tentang tindakan-tindakan buruk yang dilakukan Belanda, dan situasi gawat yang dihadapinya. Waktu itu surat kabar "*Kalimantan Berdjung*", dipimpin oleh Zafry Zamzam, tokoh SKI yang berjiwa Republikan.

Suasana menjadi keruh dan tegang, akibat adanya dualisme pemerintahan. Satu milik Pemerintah Belanda, dan satu lagi milik pemerintah Gubernur Tentara ALRI Divisi IV, yang di dalamnya tergabung gerilyawan, rakyat dan tokoh-tokoh politik yang berjiwa Republikan. Belanda hanya menguasai kota, sedangkan pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV menguasai rakyat secara mental psikologis, dan pedalaman beserta potensinya yang ada. Kenyataan ini menunjukkan adanya kemenangan ALRI Divisi IV, karenanya tidak ada jalan lagi bagi Pemerintah Belanda, kecuali mengajak *cease fire*.

Pada tanggal 28 Agustus 1949 pukul 12.20 dengan menumpang pesawat KLM, telah tiba di lapangan Ulin, rombongan militer Republik Indonesia, yang dipimpin oleh Jenderal Mayor R. Suhardjo Hardjowardojo, dibantu oleh kapten Zainal Abidin (AD) dan Kapten Budiardjo (AURI), disertai seorang peninjau UNCI Kolonel Neals (Australia), bersama seorang juru bahasa. Tampak menyambut disana Panitia Penyambutan yang dipimpin oleh A. Ruslan, anggota-anggota Dewan Banjar, Residen A.G. Deelman, Letnan Kolonel Veenendal dan lain-lain pembesar.²⁶⁷

Jenderal Mayor Suhardjo berusaha menghubungi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV, dengan jalan mengadakan selebaran, yang dijatuhkan pesawat terbang Belanda. Selebaran itu menginstruksikan agar pada tanggal 2 September 1949 Hassan Basry dan kawan-kawan datang ke Munggu Raya untuk menemui Jenderal Mayor Suhardjo. P. Arya pimpinan Markas Alam Roh beranggapan bahwa Gubernur Tentara tidak akan datang, kalau tidak diambil oleh pimpinan Markas Besar Selatan. Pimpinan Markas Besar Selatan minta bantuan Belanda, untuk mengizinkannya pergi ke Hulu Sungai untuk menemui Gubernur Tentara, agar pertemuan di Munggu Raya dapat dilaksanakan.

P. Arya dari Markas Besar Alam Roh Sungai Lulut, berangkat dengan sebuah jeep lewat Gambut. Pimpinan Markas Besar Selatan ini memakai tanda pangkat Mayor (L) disertai ajudan

²⁶⁷ Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hal. 107.

Tobelo berpangkat Letnan (L) dan sopir Sersan (L) Sayuti. Tanda pangkat ini belum resmi bagi sudut pandang RI, tapi bagi ALRI dianggap resmi secara intern. Di tengah jalan berjumpa dengan Belanda, tapi bertemu dengan dialog seperlunya, tentara Belanda membiarkan lewat.

P. Arya mampir di Sekolah Guru kilometer 5, dari sana menelpon ke Tropen Commando, langsung diterima oleh Letnan Kolonel Veenendal. Dari percakapan tersebut, Letkol Veenendal mengirim kurir yaitu Kapten Van Der Meulen untuk menjemput Mayor P. Arya. Pertemuan berjalan dengan lancar, dan dengan pengertian untuk membantu memperlancar *cease fire*, Letnan Kolonel Veenendal memberi surat perintah jalan terhadap rombongan Mayor (L) P. Arya. Utusan ini berangkat dengan memasang bendera putih, dan malam tanggal 31 Agustus ke 1 September 1949 tiba di Padang Batung.

Kepada masyarakat, terutama kepada para alim ulama diserukan untuk mendoakan terutama demi keselamatan Delegasi ALRI dan Delegasi Republik Indonesia di Yogya. Secara khusus Kapten (L) M. Hammy A.M, kepada para alim ulama dari Barabai dan Rantau, memintakan kehadirannya dalam perundingan itu. Oleh karena sulitnya angkutan, yang datang hanya sebagian.

a. Diplomasi di Munggu Raya

Pada tanggal 1 September 1949, datang Badan Penghubung dari Banjarmasin yang memberitahukan bahwa perundingan akan dimulai pada pukul 10.30 bertempat di Munggu Raya, kepada semua pihak sudah diatur menurut protokoler dan begitu pula penempatan pasukan pengawal masing-masing, menurut lingkupnya masing-masing pula. Hari itu mulai nampak kesibukan-kesibukan di setiap penjuru, diwarung-warung, bahkan di rumah-rumah penduduk dimana saja, yang menjadi bahan pembicaraan adalah perundingan Munggu Raya tanggal 2 September 1949 yang akan datang. Ada desas desus betapa kesiap-siagaan rakyat, kalau dalam perundingan terjadi sebaliknya dari yang diharapkan, maka rakyat akan melakukan “perang riwas” habis-habisan. Kibaran bendera sang saka Merah Putih di rumah-rumah penduduk sejak dari kota Banjarmasin sampai dengan Hulu Sungai Utara, Belanda tak mampu berbuat apa-apa. Spontanitas itu sangat menakjubkan, tanpa komando dan tidak ada yang menyuruh.

Pada tanggal 2 September 1949 pukul 06.00 pagi, pasukan pengawal Delegasi ALRI di bawah pimpinan Letda (L) Ibnu Hadjar bergerak lebih dahulu, mulai dari Padang Batung sampai menuju Karang Jawa, Kandangan. Rombongan delegasi ALRI pukul 08.30 berada di rumah Masdar di Karang Jawa untuk hadir dalam acara selamat, dimana para alim ulama telah berkumpul. Kemudian tepat pukul 09.30 delegasi ALRI berangkat menuju Munggu Raya, tempat yang dijanjikan. Sudah diperhitungkan agar terlebih dahulu berada di tempat, sebelum pihak Belanda dan pihak delegasi RI dan UNCI tiba.

Desa kecil Munggu Padang dengan Munggu Rayanya itu, mendadak sontak berpenduduk padat. Manusia berlimpah ruah, berjejal-jejal, ingin melihat dari dekat, para pahlawannya serta tamu-tamu dari rombongan delegasi Republik Indonesia itu.

Bukit yang tadinya sunyi sepi, hanya suara kicau burung, kini ramai oleh banyaknya kendaraan roda empat dan manusia, entah berapa ribu jumlahnya. Suatu kenyataan lagi bagi penjajah, bahwa mereka sia-sia ingin memaksakan kehendaknya.

Lima belas menit sebelum jadwal waktu yang ditentukan, kedua kelompok pasukan pengawal dari kedua delegasi yang berlawanan sudah berada pada posisinya masing-masing. Senjatanya dalam keadaan siaga dan siap tempur. Kelihatannya masih saling curiga, saling menduga dan menjajagi, saling menunjukkan sikap waspada. Pada hakikatnya kedua kelompok itu lahiriahnya berbeda, fungsi pengabdianya juga tidak sama. Tentara KNIL untuk isi perut, sedangkan para

pejuang ALRI pengabdian tanpa pamrih demi tegaknya kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi pada saat itu tugasnya yang sama. Sama memikul tanggung jawab untuk menjaga keselamatan delegasinya masing-masing. Saling berpijak pada prinsip dan disiplin, tak boleh lengah dan santai, tertib aman lingkungan berada di tangannya.

Perbedaan yang sangat menyolok antara kedua pasukan itu terletak pada keseragaman *battle dress*, perlengkapan militer dan gaya mereka (KNIL) lebih profesional. Jika mereka adalah serdadu bayaran, maka ALRI adalah prajurit pejuang. Jelas bagaimana siang dan malam. Selama sekian tahun dalam perjuangan, tidak pernah menerima gaji, makan didapat dengan sukarela dari rakyat, demikian pula baju dan lain-lain. Tidak terbayang dalam benak mereka mau berontak dan berbuat macam-macam.

Di Minggu Raya, aparat keamanan yang sibuk luar biasa, terutama mengatur dan menertibkan masa rakyat yang berjubel adalah pihak kepolisian Belanda District, dari kepolisian Belanda District Amandit di Kandangan.

Tepat pukul 10.30 semua delegasi berdatangan, saling bertemu dan saling berkenalan. Terutama dari delegasi Republik Indonesia yang diwakili oleh Jenderal Mayor R. Suhardjo Hardjowardojo dari Angkatan Perang Republik Indonesia sangat erat menyalami Letkol (L) Hassan Basry. Pertemuan antara seorang ayah dengan anaknya. Beliau sempat meneliti sejenak pengawasan pasukan dari kedua belah pihak.

Delegasi Republik Indonesia :

1. Jenderal Mayor R. Suhardjo Hardjowardojo
2. Kapten Udara Ali Budiardjo
3. Kapten Udara Zainal Abidin.

Delegasi UNCI :

1. Colonel Neals, Australian Army

Delegasi Belanda :

1. Residen A.G. Deelman
2. Van Houtman, Mayor KL.
3. Letnan Kolonel H.J. Veenendal, *Troepen Commandant voor Zuider en Oosterafdeling van Borneo.*
4. Kapten Verdijck, *Actieleider en Commandant van Zuider Hulu Sungai.*

Delegasi ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan :

1. Letkol (L) Hassan Basry, Komandan Divisi/Gubernur Tentara Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan.
2. Mayor (L) H. Aberanie Sulaiman, Wakil
3. Mayor (L) P. Arya, juru bicara delegasi
4. Kapten (L) M. Hammy A.M.
5. Kapten (L) Gusti Aman
6. Lettu (L) Djaperi
7. Lettu (L) Daeng Ladjida
8. Lettu (L) A.M. Tobelo

Dari Badan Koordinasi :

1. R. Sya'ban.

2. Mr. Burhanuddin

Wakil Sipil Belanda :

Kiai Kepala Mohammad Said, Districthoofd Amandit.

Wartawan

1. M. Arsyad Manan/Antara
2. Zafry Zamzam
3. Adonis Samat
4. Zainal, dari Harian *Kalimantan Berdjung* Banjarmasin.

Sebagaimana yang telah diisyaratkan semua, lazim berlaku dalam tata tertib tentara. Protokol sudah membuka pertemuan, dalam awal acara, dengan disaksikan oleh semua yang hadir, Letkol (L) Hassan Basry tampil dengan sikap sempurna, menghadap Jenderal Mayor Suhardjo Hardjowardjojo, selaku wakil Angkatan Perang Republik Indonesia, melapor :

"Bahwa jajaran ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan semula berpusat di Mojokerto dan kemudian pindah ke Tuban, sejak tahun 1947 wilayah daerah hukum dan operasinya dialihkan ke Kalimantan. Sesuai dengan aliansi Panglima Besar Sudirman. Jumlah kekuatan personil seluruhnya 30.000 orang tersebar di seluruh Kalimantan Selatan, Tengah, Timur dan Barat. Sebagian besar badan-badan perjuangan dan kelaskaran telah menggabungkan diri ke dalam ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan. Demikian pula kami atas nama rakyat Indonesia di Kalimantan hanya mengakui Republik Indonesia, yang berpusat Jogjakarta...."

Dengan sikap sangat terharu, Jenderal Mayor R. Suhardjo Hardjowardjojo menerima laporan itu. Sesaat beliau tak kuasa untuk membuka suara. Sebab begitu jelas, tandas dan tegas, meskipun suaranya lirih.

Kemudian dimulai upacara pelantikan :

"Mulai hari ini 2 September 1949 di Munggu Raya, ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, saya atas nama Pemerintah Republik Indonesia, mengakui sebagai Tentara Nasional Indonesia dalam Tubuh Angkatan Perang Republik Indonesia. Dan semua pangkat-pangkatnya disahkan dan akan dirobah bentuknya sesuai dengan bentuk kepangkatan yang berlaku sekarang di daerah Republik Indonesia. maka dengan dasar inilah, saya bisa memerintahkan kepada pihak ALRI untuk mematuhi semua hasil perundingan antara ALRI dengan Belanda di Banjarmasin nanti".

Pelantikan itu berlangsung khidmat dan sangat tertib penuh pengaruh dan wibawa, maka hilanglah istilah-istilah yang dilontarkan Belanda kepada ALRI tentang ekstremis, pengacau, pemberontak dan lain sebagainya.

Kemudian Jenderal Mayor Suhardjo mengatakan dengan kehadirannya bersama Colonel Neals dari UNCI itu atas undangan resmi dari pihak Belanda untuk menjadi "Penengah" (*arbitrage*). Dan pertemuan inipun masih bersifat sebagai tingkat *First Meeting*, yang kemudian akan dilanjutkan pada perundingan-perundingan formal dengan materi pembicaraan :

1. Mengesahkan dan memberlakukan perintah Penghentian Tembak Menembak (*Cease fire Order*) serta penghentian permusuhan dan menentukan jadwal waktunya.
2. Menetapkan *Demarkasi Line* (garis demarkasi) dan pelaksanaan bersama.
3. Menetapkan kota-kota untuk ditempatkan pos-pos perwakilan ALRI.
4. Mempersiapkan Memori Timbang Terima Kekuasaan beserta inventarisnya.
5. Dan lain-lain yang nantinya dirasa perlu juga untuk dibicarakan.

Sebagai pembicaraan selanjutnya ialah, Residen A.G. Deelman atas nama pemerintah Belanda di antaranya menyatakan menerima baik Agenda Acara untuk dibawa dalam pertemuan formal yang akan datang pada hari-hari selanjutnya. Semua pihak sepakat dan setuju di dalam waktu yang secepatnya harus sudah terlaksana.

Dan Colonel Neals menyarankan, sejak mulai hari ini agar kedua belah pihak yang saling bermusuhan, berjanji untuk saling menahan diri. Meskipun belum resmi dan belum ada order (perintah) pertemuan hari itu untuk dijadikan pertanda habisnya permusuhan.

Perundingan berakhir, ditutup oleh Jenderal Mayor R. Suhardjo Hardjowardojo, dan semua delegasi saling bersalaman sebagai tanda persahabatan. Tidak luput di luar pesanggrahan terjadi peristiwa unik lagi, antara pasukan pengawal kedua belah pihak saling bersalaman dan berpelukan. Bertemunya saudara sebangsa dan setanah air yang dipisahkan oleh karena keadaan kehidupan dan kurangnya pengertian. Perundingan berjalan sangat singkat, hanya satu jam.

Massa rakyat tidak terbencong lagi, mereka menyerbu untuk saling menyalami para pahlawan-pahlawannya dan para anggota delegasi Republik Indonesia. Peristiwa dan kejadian serupa itu tak akan terjadi ulang, bahkan untuk dimasa yang akan datang.

Hasil perundingan antara pihak-pihak yang berkepentingan pada saat itu, menghasilkan Pengumuman Bersama, sebagai suatu komitmen diplomasi di Munggu Raya.

Secara lengkapnya Pengumuman Bersama hasil Perundingan Munggu Raya tersebut adalah:

"PENGUMUMAN BERSAMA"

Pada hari Jumat tanggal 2 September 1949 pukul 10.00 pagi, Paduka Tuan Jenderal Mayor Suhardjo di Munggu Raya (Kandangan) telah mengadakan pertemuan dengan Tuan Hassan Basry dan 9 (sembilan) orang staf beliau.

Jenderal Mayor Suhardjo diiringi oleh dua orang ajudannya, seorang militer observer, juru bahasa, wakil Paduka Tuan Residen, wakil Territoriaal Commandant, dan 5 orang anggota dari Panitia Penghubung. Juga disertai wakil ketua dari Dewan Banjar, Tuan M. Said.

Selanjutnya Jenderal Mayor Suhardjo memberikan perintah dengan lisan sebagai berikut :

- a. Atas nama Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia, dengan ini saya mengakui dengan resmi tuan Hassan Basry sebagai Letnan Kolonel sebagai Komandan ALRI Divisi IV.*
- b. Atas nama Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia, Letkol Hassan Basry supaya menghentikan permusuhan, sesuai dengan Pidato P.Y.M. Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia yang diucapkan pada tanggal 3 Agustus 1949.*

Kepada Letkol Hassan Basry dipertanggungjawabkan pula penghentian permusuhan tersebut atas organisasi-organisasi atau golongan yang bersenjata yang berada di Kalimantan Selatan.

Kepada Letkol Hassan Basry diperintahkan buat menunjuk wakilnya untuk mengadakan perhubungan, dan selanjutnya perundingan local autoriteiten buat pelaksanaan penghentian permusuhan.

Penghabisan Jenderal Suhardjo memberi perintah kepada Letnan Kolonel Hassan Basry supaya menghentikan permusuhan ini selambat-lambatnya harus dilakukan dalam tempo 14 hari terhitung mulai hari ini (2 September 1949).

Sesudah itu Kolonel Hassan Basry menyatakan, bahwa beliau telah menerima perintah penghentian permusuhan dan sanggup melaksanakannya.

Sebagai perwakilan beliau ditunjuk Mayor P. Arya selaku Ketua dan nama anggota lainnya akan menyusul.

Sebagai penjelasan Jenderal Mayor Suhardjo menegaskan supaya penghentian permusuhan ini dijalankan selekas-lekasnya.

Banjarmasin, 2 September 1949

1. Jenderal Mayor R. Suhardjo Hardjowardojo
2. A.G. Deelman, Residen Borneo Selatan
Territoriaal Commandant Borneo Selatan dan Timur.²⁶⁸

Demikianlah, akhirnya Jenderal Mayor Suhardjo dan seluruh rombongan kembali ke Jakarta, meninggalkan ALRI Divisi IV yang harus berunding tanpa adanya orang tengah, maka ALRI Divisi IV mencoba-coba menuntut adanya *Local Joint Committee* Kalimantan sebelum berunding.²⁶⁹ Memang, kedudukan yang dihadapi ALRI Divisi IV benar-benar menyulitkan. Diplomasi Munggu Raya tidak lain sebagai upaya untuk memberi kesempatan kepada Belanda menyusun kekuatan-kekuatannya kembali. Pada perundingan-perundingan selanjutnya terlihat jelas, ALRI Divisi IV disudutkan, sehingga diharapkan Belanda mau menuruti keinginan politiknya. Namun orang-orang ALRI Divisi IV bukanlah bodoh, segala taktik Belanda dan golongan federalis, dapat mereka pahami sehingga tidak perlu keraguan.

Sebelum adanya pertemuan Munggu Raya, serdadu-serdadu NICA tidak ada yang berani keluar kota, kalau tidak menggunakan kekuatan-kekuatan yang besar, tetapi sesudah perundingan itu, serdadu-serdadu KNIL dan KL mulai keluar masuk kampung sesukanya, sambil mengancam penduduk karena Belanda menganggap gerilyawan ALRI Divisi IV tidak mempunyai daerah lagi. Beberapa gerilyawan di Hulu Sungai yang ditemuinya dipinggir kota yang menyambut mereka dengan sangat baik, karena belum berpengalaman telah dilucuti senjatanya. Dalam hal ini nyatalah keinginan Belanda mengadakan *cease fire* untuk dalih, agar Belanda dapat berkuasa lagi, dan Belanda berkeinginan pula agar ALRI Divisi IV datang kepadanya untuk menerima perintah dari mereka, dan tidak tergambar mau berunding, sebab keamanan mereka sudah terjamin dengan adanya *cease fire*.

Bahkan komandan tentaranya untuk Kandangan, yaitu Kapten Verdijsck telah berani mengirim surat kepada MPK ALRI Divisi IV, yang berisi seolah-olah perintah, Agar ALRI Divisi mengumpulkan seluruh tentaranya di suatu tempat di Hulu Sungai yang ditentukannya.²⁷⁰

Sesudah *cease fire* Belanda memasuki dengan mudah seluruh daerah yang sebelumnya tidak dapat dimasukinya, melanggar garis demarkasi, melucuti beberapa anggota Tentara Republik Indonesia, mendatangkan polisi istimewa dari Jawa untuk melakukan keganasan-keganasan kepada rakyat, mendatangkan bantuan militer dengan kapal terbang dan kapal laut. Belanda juga mendatangkan kapal Manokwari yang penuh dengan senjata. Semua itu dengan maksud untuk mengurung semua anggota ALRI ke dalam suatu daerah untuk memusnahkannya di tempat itu. Terbukti seperti yang dilakukan oleh Kapten Verdijsck di Hulu Sungai yang mengusulkan agar pasukan ALRI dikumpulkan pada suatu tempat.

Segala tindakan Belanda itu tidak mendapat perlawanan yang berarti dari ALRI karena ALRI sudah terikat dengan perintah *cease fire* Pemerintah Republik Indonesia. Kejujuran dan ketaatan ALRI ini dipandang sebagai tanda kelemahan dan menimbulkan rasa ketidaksabaran bagi sebagian anggota ALRI yang diliputi semangat perjuangan.

²⁶⁸ Depdikbud, *op.cit.*, hal. 193 – 194; lihat pula Tjilik Riwut; *op.cit.*, hal. 119; Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hal.129-130.

²⁶⁹ Hassan Basry, *op.cit.*, Jilid II, tt.th.

Hal-hal inilah yang menyebabkan banyak anggota tentara yang memisahkan diri kesatuannya dan mendirikan laskar-laskar baru yang tidak terikat oleh perintah *cease fire*, tidak terikat dengan perhentian permusuhan. Dalam kalangan Islam muncul "Barisan Sabil"²⁷¹.

Pasukan Tengkorak Putih²⁷² adalah salah satu kelompok gerilya yang menanggapi hasil pertemuan di Munggu Raya dengan penuh ketidakpercayaan terhadap niat baik NICA dan menjadikan dirinya tidak terikat kepada hasil pertemuan itu.

Kelompok gerilya ini dibentuk atas gagasan Letnan Muda (L) Abdul Muti dan Letnan (L) Said Abdul Kadir Zailani pada bulan Agustus 1949. Gagasan itu pada mulanya ditolak Letkol (L) Hassan Basry karena tidak sejalan dengan kebijaksanaan ALRI Divisi IV untuk menggabungkan semua kelaskaran yang ada ke tubuh ALRI. Akan tetapi dengan dukungan Kapten (L) Danussaputera, akhirnya pembentukan Pasukan Tengkorak Putih dapat dipahami oleh Letkol (L) Hassan Basry sebagai sebuah tindakan antisipasi kemungkinan adanya politik licik Belanda jika terjadi penerapan *cease fire* order di Kalimantan Selatan.²⁷³

Pasukan Tengkorak Putih berada di luar formasi dan organisasi ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan. Dalam hal ini Kapten (L) Danussaputera berperan menyempurnakan organisasi Pasukan Tengkorak Putih dengan memberi petunjuk dan mengarahkan taktik dan strategi untuk mengembangkan tugas khusus yaitu melakukan teror, sabotase dan *psywar* yang kesemuanya bertujuan untuk melumpuhkan mental Belanda maupun alat-alatnya.²⁷⁴

Sejak bermarkas di desa Sungai Kudung, Pasukan Tengkorak Putih mulai menyusun formasinya yang terdiri dari dua kelompok komando, yakni Komando Sektor Utara bermarkas di Sungai Kudung dipimpin oleh Letnan I Said Abdul Kadir Zaelani dan Letnan Abdul Muti, dan Komando Sub Sektor Selatan bermarkas di Kuin Muara Banjarmasin dipimpin oleh Letnan I Syukur Gani dan Letnan I Ali Akbar.²⁷⁵

Apa yang dikuatirkan akhirnya terjadi di Kalimantan Selatan, karena ternyata NICA telah memanfaatkan *cease fire* order sebagai sarana untuk memperkuat diri. Setelah 2 September 1949, KNIL, KL dan Polisi NICA telah berani keluar masuk kampung sesukanya, sambil mengancam penduduk. Mereka bahkan melanggar dan melucuti senjata pihak ALRI yang bertugas menjaga garis demarkasi. Bahkan di dekat garis demarkasi di Karang Jawa, serdadu NICA telah menembak mati beberapa orang penduduk, yakni Angah, Alidan dan Tarmin yang ketika itu sedang mengangkut padi yang baru dipanen.²⁷⁶

Menghadapi kenyataan ini Letkol (L) Hassan Basry berkesimpulan bahwa disaat ALRI terikat kepada perintah *cease fire*, maka perjuangan bersenjata untuk mengusir NICA harus diteruskan dengan jalan memperlengkapi Pasukan Tengkorak Putih dengan persenjataan yang lebih modern, serta memperbantukan sebagian anggota ALRI menjadi bagian dari Pasukan Tengkorak Putih.

Sejak itulah, Kapten (L) Gusti Aman selaku Komandan KMD Tengah, menginstruksikan kepada Said Abdul Kadir Zailani dan Abdul Muti agar membentuk Pasukan Tengkorak Putih yang anggotanya diambil dari ALRI Divisi IV yang disertai tugas untuk memegang senjata dan menjaga

²⁷⁰ Hassan Basry, *ibid.*, Jilid II, tt.th.

²⁷¹ Hassan Basry, *op.cit.*, Jilid II, tt.th.

²⁷² Dari beberapa sumber lisan dan Surat Kabar *Kalimantan Berjuang*, kelompok gerilya ini yang disebut Belanda *De Witte Dodenskoppen* mempunyai beberapa sebutan sebagai salah satu taktik *psywar* seperti : Gerakan Tengkorak Putih, Golongan Tengkorak Putih, Gabungan Tengkorak Putih (Go Teng Po atau Go Teng Poe), Divisi Tengkorak Putih atau Laskar Rakyat Murba. Lihat Wajidi, "Gerakan Tengkorak Putih: Sebuah Kelompok Gerilya di Kalimantan Selatan 1949-1950", Skripsi Sarjana Pendidikan Sejarah FKIP Unlam, Banjarmasin, 1992, hal. 34-38.

²⁷³ Lihat Danussaputera, "Kalimantan Terbakar oleh Semburan Bara Api Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan (Ekspedisi Terakhir)", Banjarbaru, 1985, hal. 95.

²⁷⁴ Danussaputera, *loc.cit.*

²⁷⁵ Kodam X/Lam, "Sedjarah Singkat Kodam X/Lam wadja Sampai Kaputing", Banjarmasin, 1970, hal. 22; Wajidi, *op.cit.*, hal. 39-40; Pemda Tk. I Kalsel, *op.cit.*, hal. 266.

penyimpanannya, serta bersiap-siap berhadapan kembali dengan KNIL, KL dan Polisi NICA jika tidak dapat dielakkan, sebelum pasukan resmi ALRI dapat digerakkan.

Sejak itulah aksi-aksi balasan terhadap NICA mulai bermunculan dengan seringnya ditemukan pamflet yang berisi kata-kata ancaman, penangkapan terhadap mata-mata musuh, dan serangan terhadap pos-pos polisi NICA di sekitar Rantau dan ditinggalkannya tanda pengenal bergambar tengkorak, maka telah menimbulkan keresahan di pihak Belanda.²⁷⁷ Mereka melampiaskan kesalahan kepada ALRI Divisi IV yang dipandang tidak mampu menguasai kelompok gerilya yang ada.

Pada tanggal 12 September 1949 pemerintah Belanda menyebarkan pamflet “Pemberian Tahu” dari udara dengan menggunakan pesawat Dakota di atas kota-kota di sekitar Banjarmasin, Martapura, Rantau dan Kandangan.

Pemberian -Tahu

Oleh kita dinyatakan Sebagai berikut :

- 1. Bahwa sampai pada hari ini tanggal 12 September 1949, baikpun Tuan Hassan Basry yang diakui oleh Republik sebagai Letnan Kolonel, Komandan dari ALRI Divisi IV, baikpun opsir-opsir ALRI yang dikuasakan oleh Beliau tidak mengadakan perhubungan dengan dengan kita atau P. T. Residen guna membicarakan pelaksanaan pemberhentian permusuhan².*
- 2. Bahwa Mayor P. Arya yang ditunjukkan oleh Tuan Hassan Basry sebagai kuasa pertama, tidak pernah datang menemui P.T. Residen atau kita sebagai kuasa tersebut.*
- 3. Bahwa dengan demikian Komandan ALRI Divisi IV tersebut belum lagi memenuhi perintah dari Jenderal Sudirman yang diberikan kepada beliau dengan perantaraan Jenderal Mayor Suhardjo.*
- 4. Bahwa jika beliau tidak mengadakan perhubungan tersebut ---menurut yang telah diperintahkan kepada beliau--- ialah untuk melaksanakan pemberhentian permusuhan² dengan jalan bermufakat bersama-sama, akibatnya beliau dengan ini mengeluarkan dirinya dari hukum yang sah (zich buiten de wet stellen). Sekali lagi kita mengunjukkan pengangkatan beliau dengan kuasa² tersebut di atas sampai pada tanggal 16 September 1949, untuk membicarakan hal pemberhentian permusuhan² dan kita menanggung sepenuhnya tentang keselamatan dirinya beliau atau kuasa itu, sewaktu pengangkutan bolak-balik, dan selama pembicaraan tersebut diadakan.*

*Banjarmasin, 12 September 1949
TERRITORIAL DAN TROEPEN
KOMANDAN DARI BORNEO
SELATAN DAN TIMUR²⁷⁸*

Munculnya pamflet “Pemberian Tahu’ bertanggal 12 September, merupakan salah satu bentuk manifestasi kegelisahan NICA. Sebab selain adanya pemogokan umum, pada rentang waktu 3 sampai 12 September 1949 telah terjadi aksi-aksi Pasukan Tengkorak Putih terhadap NICA. Sebab itulah mereka mencari tahu dan mendesak agar perundingan

²⁷⁶ Wajidi, *op.cit.*, hal. 51.

²⁷⁷ Danussaputera, *op.cit.*, hal. 108.

selekasnya dilaksanakan. Namun desakan Belanda disampaikan dengan cara yang licik yakni dengan menyatakan bahwa apabila Letkol (L) Hassan Basry menolak, berarti ia telah melanggar perintah 2 September dan dengan demikian menjadikan dirinya pelanggar hukum.²⁷⁹

b. Pertemuan 16-17 Oktober di Banjarmasin

Adanya tenggang waktu antara 2 sampai 12 September 1949, seharusnya Mayor (L) P. Arya yang ditunjuk sebagai wakil ALRI melakukan kontak dengan perwira NICA, namun tidak terlaksana. Baru setelah 9 September 1949, Kapten (L) Gusti Aman dengan restu Letkol (L) Hassan Basry mengadakan kontak dengan pihak NICA di Banjarmasin. Usaha itupun gagal, sehingga melepaskan ALRI dari tanggung jawabnya melaksanakan perundingan dalam waktu empat belas hari setelah diresmikan.

Dua hari kemudian setelah 12 September 1949 datang kurir Badan Koordinasi Banjarmasin melalui Kiai Mohammad Said, Kepala District Amandit di Kandangan, mengharap untuk bisa Letkol (L) Hassan Basry. Kurir itu bertemu dengan Kapten (L) Danussaputera dan kepada kurir Badan Koordinasi dianjurkan untuk kembali pulang ke Banjarmasin, mengingat komando belum berada di tempat. Akan diberi kabar kemudian setelah ada kepastian. Juga dipesankan agar pihak Belanda diberitahu.

Pada tanggal 20 September 1949 di Jambu Hilir diadakan rapat Komando, dipimpin oleh Pimpinan Divisi dan didampingi Wakil/Kepala Staf Divisi Mayor (L) H. Aberanie Sulaiman. Membahas dan merumuskan laporan yang masuk, terutama bersangkutan adanya pamflet dari pihak Belanda. Dimaklumi bahwa pada dasarnya pamflet Belanda itu ada kebenarannya.

Pada tanggal 27 September 1949 secara khusus Komando mengadakan rapatnya lagi di Karang Jawa. Nampaknya kali ini sangat intensif lebih terinci. Pokok pembicaraan mengenai siapa yang akan ditunjuk untuk hadir dalam perundingan di Banjarmasin itu, penyiagaan pasukan pada posisi masing-masing, dan pemantapan rencana, serta peningkatan kewaspadaan.

Dengan resmi oleh ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan disampaikan surat kepada pihak Belanda di Banjarmasin melalui Mohammad Said, bahwa dari pihak ALRI telah siap untuk memenuhi undangan pelaksanaan perundingan. Surat tertanggal 9 Oktober 1949.

Pada tanggal 11 Oktober 1949 datang utusan dari Mohammad Said yang mengabarkan bahwa ada berita dari Banjarmasin yang positif bahwa misi Pemerintah/Militer RI dan UNCI akan tiba di Banjarmasin pada tanggal 15 Oktober 1949, dan perundingan dijadwalkan dimulai pada tanggal 16 Oktober 1949. Utusan dari ALRI akan dijemput pada tanggal tersebut, pukul 06.00 tepat.

Pada tanggal 13 Oktober 1949 (L) Hasnan Basuki datang menghubungi Kapten (L) Danussaputera memberitahukan bahwa dia ditunjuk untuk berangkat ke Banjarmasin mewakili Divisi dalam perundingan. Sore harinya sekitar pukul 17.30 Kapten (L) Danussaputera di panggil ke Padang Batung untuk menerima perintah dari Letkol (L) Hassan Basry, dan dengan resmi menerima tugas untuk mewakili Divisi dengan Surat Perintah No. 10/PH/IV/49 tanggal 13 Oktober 1949. Sebagai pendamping ditunjuk Kapten (L) Gusti Aman.

Kepada Kapten (L) Gusti Aman diberitahukan mengenai jadwal tersebut, sebab kebetulan dia sedang berada di Martapura jadi agar langsung ke jalan Ringweg²⁸⁰ untuk bergabung disana.

Untuk lebih mantap dan resminya persiapan akan menghadapi meja perundingan pada tanggal 15 Oktober 1949 pada 20.000 di Jambu Hilir, Letkol (L) Hassan Basry dan Mayor (L) H.

²⁷⁸ Danussaputera, *ibid.*, hal. 106.

²⁷⁹ C. van Dijk, *op.cit.*, hal. 221.

²⁸⁰ Sekarang Jalan R. Soeprapto.

Aberanie Sulaiman memberikan petunjuk dan tambahan informasi, selain itu oleh Letkol (L) Hassan Basry diserahkan uang saku sebesar f.25.00 (dua puluh lima gulden) yang diterima oleh Kapten (L) Danussaputera dengan senang hati. Malam itu dilakukan sholat dan sekedar makan bersama.

Pada tanggal 16 Oktober 1949 tepat pukul 06.00 kendaraan jeep memasuki rumah Masdar di Karang Jawa. Kapten (L) Danussaputera sudah siap menunggu. Supir jeep seorang militer Belanda yakni Sersan Mayor KL Van Den Brink. Memasuki kota Kandangan dan jeep langsung menuju ke benteng. Disini disambut oleh Kapten KL Verdijck; *Commandant Actieleider Van Midden en Zuider Afdeling Van Hulu Sungai*. Mereka bertiga berangkat ke Banjarmasin.

Di Banjarmasin Kapten (L) Danussaputera langsung diantar ke Jalan Ringweg memasuki rumah Kiai Hanafiah. Kapten (L) Danussaputera disambut oleh Letda R.M. Hatmo ajudan Jenderal Mayor R. Suhardjo Hardjowardojo dan dibawa masuk ke ruangan tengah. Telah hadir beberapa perwira. Begitu menghadap Jenderal Mayor Suhardjo langsung melaporkan :

- a. Kapten (L) Danussaputera sebagai Komandan ekspedisi dengan kekuatan pasukan 87 anggota.
- b. Perlengkapan 4 ton bahan peledak, bryzant (brisan), trotle dan granat.
- c. - Surat Perintah Jalan No. CHQ/CTK/16/0017/49
- Instruksi rahasia No. CTK/16/0030/49.
- Instruksi Pasukan Gerilya Desa No. 13/MDKD/49 dan lain-lain.
- d. Sebagai fd (*fungerend*) Kepala Staf ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan. Mandat No. 10/PH/IV/49 tanggal 15 Oktober 1949 untuk menghadiri perundingan dan didampingi Kapten (L) Gusti Aman wakil merangkap anggota.

Dalam kesempatan itu diperkenalkan kepada Staf Misi Militer Republik Indonesia Kapten Kadar Marwani, Kapten Subari dan Kapten Muntoyo. Tak lama kemudian disusul Kapten (L) Gusti Aman. Pada pukul 09.15 dengan memakai dua buah kendaraan mobil sedan rombongan menuju tempat kediaman resmi Resident Belanda. Para supir mobil sedan itu kedua-duanya berkebangsaan Belanda, masing-masing berpangkat Kopral KL.

Para peserta perundingan diwajibkan mengisi buku tamu. Komandan piket Belanda meminta agar supaya senjata yang ada pada Kapten (L) Danussaputera dititipkan pada piket, kemudian ditolak Kapten (L) Danussaputera. Maka terjadilah sedikit perselisihan pendapat. Seorang Belanda lain datang mendekat (ternyata dia adalah seorang ajudan Resident) menjelaskan bahwa hal seperti itu telah menjadi peraturan. Dia meminta dengan hormat untuk sama-sama dipatuhi. Kapten (L) Danussaputera tetap pada sikapnya dan meminta diantar kembali ke mess, dan tidak bersedia hadir dalam perundingan. Melihat suasana agak ricuh itu, Jenderal Mayor R. Suhardjo mengambil kebijaksanaan peluru-pelurunya dikeluarkan. Selesailah problem pertama. Sebelum persidangan dimulai masing-masing anggota delegasi saling berkenalan dan pembicaraan lebih akrab.

Waktu telah menunjukkan pukul 10.15, maka kepada semua peserta dipersilakan mengambil tempat duduknya masing-masing. Sidang pertemuan dipimpin oleh Jenderal Mayor R. Suhardjo Hardjowardojo selaku Ketua, sebagai orang netral dan penengah. Dan sebagai saksi ialah Mayor William D. Edmund dari Australian Army yang diperbantukan pada *Local Joint Committee* di Jakarta.

Ketua memperkenalkan para peserta yang hadir, nama, jabatan dan fungsinya dalam perundingan. Selanjutnya para delegasi diminta semua berdiri untuk memberi hormat pada negaranya masing-masing dengan menundukkan kepala sejenak.

Kepada para Ketua Delegasi diminta pendapatnya, untuk bahasa resmi dalam perundingan sebagai bahasa pengantar, apakah akan menggunakan bahasanya masing-masing dengan menggunakan sistem juru bahasa, atau bagaimana sebaiknya.

Delegasi ALRI mempersilakan kepada Delegasi Belanda, dan Dr. Eisenberger atas nama Delegasi Belanda meminta kepada Ketua agar disetujui Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, dengan alasan bahwa dari pihak delegasi ALRI juga menguasainya.

Sidang dilanjutkan tepat pukul 15.30. Ketua sidang langsung memulai dengan acara pertama, yaitu pelaksanaan *Cease Fire Order*. Ditekankan dan diingatkan oleh Ketua bahwa mengenai Penghentian Tembak Menembak di Jawa dan Sumatera telah berlaku. Berkenaan dengan laporan delegasi Belanda, bahwa di sana- sini di Hulu Sungai masih terjadi adanya gangguan penembak-penembak gelap. Kalau itu benar, memang pada logikanya belum bisa di diartikan satu pelanggaran, sebab belum adanya satu ikatan hukum yang formal. Akan tetapi demi etika yang sudah sama-sama disepakati secara lisan pada 2 September 1949 yang lalu itu, boleh saja hal itu terjadi.

Delegasi ALRI menjelaskan dan memberi jaminan bahwa sejak 2 September 1949 tidak seorangpun anggota ALRI yang melakukan perbuatan indiscipliner itu. Besar kemungkinan datangnya dari kelompok ketiga, tapi bukan dari kesatuan ALRI. Diakuinya bahwa belum 100% pasukan-pasukan gerilya itu menggabungkan diri ke dalam ALRI.

Tempat perundingan resmi berlangsung di ruangan tamu kediaman Resident, dimulai dari pukul 09.00 s.d. 11.30 dan dari pukul 13.00 s.d 15.30.

Yang hadir adalah :

1. Jenderal Mayor (AD) R. Suhardjo Hardjowardojo, Ketua Delegasi RI
2. Dr.Eisenberger, Ketua Delegasi Belanda²⁸¹
3. Letnan Kolonel Veenendal, Anggota Delegasi Belanda
4. Mayor Williams D.Edmund, Wakil KTN, dari Australian Army
5. Bloedemaker, Assistent Resident Belanda, Anggota Delegasi Belanda
6. Kapten (AD) Muntoyo, Staf Delegasi Misi Militer RI
7. Kapten (AD) R. Kadarmarwani, Staf Delegasi Misi militer RI
8. Kapten (AD) R. Subari, Ajudan Jenderal Mayor R. Suhardjo Hardjowardojo staf Delegasi Militer RI.
9. Kapten (L) Danussaputera, Ketua Delegasi Divisi IV ALRI
10. Kapten (L) Gusti Aman, Anggota Delegasi Divisi IV ALRI
11. Kapten Verdijck, Anggota Delegasi Belanda
12. Van Harding, Anggota Delegasi Belanda
13. Letnan II (AD) R.M. Hatmo, Ajudan Jenderal Mayor AD.R.Suhardjo Hardjowardojo
14. Letnan J. Koster, Anggota Delegasi Belanda
15. Ajudant Letnan Kolonel Veenendal, pihak Delegasi Belanda
16. Seorang Belanda, Penerjemah
17. Seorang Belanda Notulist ²⁸²

Ketua dengan resmi membuka perundingan, dan langsung memberikan ulasan maksud tujuan adanya perundingan itu. Meskipun semula soal Kalimantan itu tidak termuat dalam Agenda

²⁸¹ Dr. Eisenberger bukan Gubernur (Gouverneur); pejabat tertinggi Belanda di Kalsel ketika itu ialah Resident A.G. Deelman. Eisenberger adalah penasihat yang diutus sebagai ketua delegasi Belanda dalam perundingan.

²⁸² Danussaputera, *op.cit.*, hal. 111-112. Lihat pula perundingan yang sama dalam G.M. Yaman, *op.cit.*, hal. 96, akan tetapi dalam G.M. Yaman disebutkan berlangsung tanggal 6 Oktober 1949, seharusnya 16 Oktober 1949 karena Danussaputera ditugaskan menghadiri perundingan tersebut dengan Surat Tugas dari Hassan Basry bertanggal 13 Oktober 1949.

Local Joint Committee, akan tetapi oleh karena sesuatu hal dengan tertariknya perkembangan situasi maka Kalimantan akhirnya ikut termasuk dalam agenda yang akan dibicarakan.

Oleh karenanya dibentuk Sub Local Joint Committee yang berkedudukan di Banjarmasin, dan sendirinya pula merupakan bagian dari Central Joint Board yang berkedudukan di Den Haag.

Kemudian Ketua memberi kesempatan kepada masing-masing Ketua Delegasi untuk menyampaikan kata sambutan dengan catatan hanya diberi waktu untuk selama 5 menit.

Ketua sidang menyatakan akan mengajukan konsep agenda sidang, dengan tujuan agar tidak terbuang-buang waktu hanya untuk itu saja. Alasan Ketua sangat mendasar, sebab baru tercapainya pelaksanaan perundingan itu telah memakan waktu lama, terhitung sejak 2 September 1949 yang lalu.

Konsep agenda/acara,

1. Penetapan tanggal dimulainya pelaksanaan gencatan senjata dan Penghentian Tembak Menembak (*Cease Fire Order*) antara pihak ALRI dan Belanda.
2. Menentukan Garis Demarkasi dan Patroli Bersama.
3. Penempatan Staf-staf Perwakilan di kota-kota di Hulu Sungai.
4. Pembuatan naskah Gencatan senjata, Statement dan Memori Perundingan.²⁸³

Sewaktu konsep itu ditawarkan kepada para peserta dan diminta koreksinya, ternyata dengan aklamasi konsep diterima tanpa ada perubahan. Sebenarnya konsep itu memang telah mencakup segala persoalan, materinya cukup padat dalam perumusannya.

Berkenaan waktu sudah menunjukkan tengah hari lewat beberapa menit, maka oleh Ketua Persidangan ditutup dan dibuka kembali pada pukul 15.30.

Rombongan Delegasi ALRI dan Misi Militer Republik Indonesia dengan angkutan yang sama kembali ke mess.

Di waktu senggang sesudah selesai makan siang, kedua perwira ALRI itu mendapat pengarah dan petunjuk untuk dasar pegangan dalam perundingan. Sebab Jenderal Mayor Suhardjo dan staf tidak boleh mencampuri. Pukul 15.10 lebih awal beberapa puluh menit, staf Misi Militer Republik Indonesia dan Delegasi ALRI telah tiba lebih dahulu dari pada yang lain. Jenderal Mayor Suhardjo menemui Dr. Eisenberger, tampaknya ada beberapa hal yang akan dibicarakan.

Pihak Delegasi Belanda mendesak dan meminta kepada Ketua Sidang, bahwa dalam pengertian apabila Statement Gencatan Senjata telah disahkan bersama, maka ALRI harus bertanggung jawab untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Permintaan Delegasi Belanda itu ditentang dan dibahas oleh Delegasi ALRI. Itu artinya sepihak, kalau kesalahan itu ditimpakan kepada pihak ALRI, padahal dalam hal itu sama sekali di luar kompeten ALRI.

Menurut hemat delegasi ALRI soal itu tak perlu begitu dirisaukan. Kepada sidang dipersilakan membaca redaksi acara kedua itu, yang berbunyi, menentukan Garis Demarkasi dan Patroli bersama. Itu adalah bagian tugas dari pasukan patroli bersama nanti, mengamankan dan menertibkan situasi, setiap move atau apapun bentuknya. Semua problem menjadi tanggung jawab bersama, dari kedua belah pihak. Akhirnya pihak delegasi Belanda menerima saran itu

Tentang Penghentian Permusuhan disepakati oleh sidang, akan diumumkan bersama pukul 24.00 dan secara resmi berlaku mulai pukul 00.00 tengah malam tanggal 16 ke 17 Oktober.²⁸⁴ Oleh ketua sidang kedua belah delegasi dipersilakan untuk saling bersalaman dan berakhirnya permusuhan dengan resmi.

²⁸³ Danussaputera, *ibid.*, hal. 113.

²⁸⁴ Danussaputera, *ibid.*, hal. 114.

Dalam acara kedua itu suasana menjadi agak panas, pihak Delegasi Belanda menyatakan dalam sidang bahwa tidak ada demarkasi. Menurutnya, kalau Patroli Bersama itu bisa diterima dan bisa diatur, akan tetapi menolak adanya garis demarkasi, sebab tidak ada demarkasi kata mereka.

Sebaliknya dari pihak delegasi ALRI menandakan adanya garis demarkasi. Maka perlu ditetapkan dan ditentukan patokan garis itu. Untuk menghilangkan keragu-raguan, pihak ALRI menawarkan untuk dilakukan *checking of the spot*. Delegasi Belanda menyetujuinya dan menginstruksikan anggotanya untuk ketika itu juga ke Amuntai, Barabai dan Kandangan.

Mengingat baru esok hari berita dari daerah-daerah itu diterima, maka perundingan diteruskan dengan membicarakan soal patroli bersama. Ketua sidang menyarankan dibentuk Panitia Ad-hoc, yang keanggotaannya terdiri dari 2 orang delegasi Belanda, 2 orang diperbantukan dari Misi Militer Republik Indonesia dan seorang dari ALRI. Untuk itu diwakili oleh Kapten (L) Gusti Aman.

Hasil Panitia Ad-hoc menetapkan :

1. Tiap kendaraan (*carrier*) yang akan digunakan untuk pelaksanaan patroli bersama akan disiapkan oleh militer Belanda. Tiap-tiap *ploeg* atau regu terdiri dari masing-masing 3 orang, bersenjata karabijn. Posisi duduk saling berhadapan.
2. Memakai ban putih bertuliskan SLJC di lengan atas sebelah kiri.
3. Lokasi dan route patroli menurut jalur perbatasan antara daerah kekuasaan militer Belanda dan ALRI.
4. Teknis pelaksanaannya akan diatur dan dibuat bersama antara komandan pasukan setempat.

Pada point 1 terjadi selisih pendapat, pihak delegasi Belanda menghendaki dalam posisi duduk berhadapan itu, karabijn satuan ALRI tidak bersangkur, sedangkan karabijn dari satuan militer Belanda memakai sangkur.

Cara yang tidak wajar itu ditentang keras oleh delegasi ALRI. Terpaksa diajukan protes melalui ketua Sidang dan dimintakan pendapat kepada Wakil LJC. Apakah menurut pendapat delegasi Belanda dengan telah berlakunya *Cease Fire Order* itu masih diberlakukan SOB (*Staat Van Oorlog en Beleg*). Tampak delegasi ALRI hampir tidak bisa menguasai emosinya. Namun ketua sidang cukup bijaksana. Untuk yang kesekian kalinya delegasi Belanda menyerah, artinya kedua belah pihak pasukan dalam segi apapun tidak berbeda.

Untuk tahap pertama perundingan tanggal 16 Oktober 1949 cukup padat, meskipun jalannya tidak mulus, sebab tersendat-sendat, akibat sikap pihak delegasi Belanda yang berprasangka.

Perundingan dilanjutkan esok hari tanggal 17 Oktober 1949 pada pukul 10.00 tepat, ditempat yang sama. Pada 17 Oktober 1949, dua puluh menit sebelum sidang lanjutan dibuka, semua delegasi sudah hadir dan memanfaatkan waktu yang bebas itu untuk saling membicarakan hal-hal ringan.

Di sudut lain kedua anggota delegasi ALRI kelihatan sedang terlihat pembicaraan yang serius. Memang benar, sesuai informasi dari Jenderal Mayor Suhardjo bahwa dalam sidang lanjutan itu nanti akan dibentuk 2 Panitia Ad-hoc yang akan bertugas untuk menyusun dan membuat konsep-konsep, mengenai statement-statement dan memori hasil sidang I maupun yang II nanti. Dan yang terpenting konsep mengenai timbang terima wilayah, dari tangan kekuasaan Pemerintahan Belanda kepada ALRI, yang akan bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

Tepat pukul 10.30 Ketua sidang menyatakan perundingan dibuka kembali. Kemudian delegasi Belanda menyerahkan amplop yang berisikan surat kepada Ketua Sidang yang selanjutnya dibacakan isinya dimuka persidangan. Bunyi surat pernyataan pengakuan dari Komandan militer Belanda di Amuntai, Barabai dan Kandangan, bahwa benar di batas-batas kota ada pos-pos pertahanan ALRI. Kelompok delegasi Belanda benar-benar terpojok dan terpukul, sebab kenyataan

itu di luar pengertiannya, terutama sekali Letnan Kolonel Veenendal tampak gelisah dan duduknya tidak tenang. Yuridis posisi mereka telah kalah dan dari segi strategis sama halnya kebobolan, satu fakta ALRI lebih cepat bertindak dan lebih lihai. Sementara itu di pihak kedua orang delegasi ALRI itu tenang-tenang saja dan sambil tersenyum-senyum, sebab jerih lelah mereka terbukti membawa hasil sebagaimana direncanakan.

Kemudian Ketua Sidang dinyatakan bahwa masalah demarkasi harus merupakan topik persoalan yang akan dirumuskan dalam Panitia Ad-hoc, disamping bagaimana penerapannya.

Panitia Ad-hoc A terdiri :

1. Kapten Muntoyo
2. Kapten Verdijsck
3. Van Harding
4. Kapten (L) Gusti Aman

Panitia Ad-hoc B terdiri :

1. Letnan Kolonel Veenendal
2. Assistent Resident Bloedemaker
3. Kapten Subari
4. Kapten Kadarmarwani
5. Kapten (L) Danussaputera

Untuk Komisi A materi yang dibicarakan dan disusun draftnya ialah pembuatan statement, naskah cara kerja, penentuan perbatasan dan garis-garis pokok pelaksanaan patroli bersama.

Sedangkan dalam Komisi B materi yang dirumuskan dan disiapkan draftnya ialah mengenai persiapan timbangan terima penyerahan kekuasaan wilayah dari kekuasaan Belanda kepada ALRI yang akan bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia, mengingat di Kalimantan tidak adanya kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia.

Dengan demikian maka kedua Panitia Ad-hoc itu harus memulai tugasnya dalam ruangan terpisah, sementara perundingan dinyatakan di skors sampai dengan pukul 15.30 perundingan dibuka kembali. Tiga buah naskah dalam bentuk draf hasil dari kedua panitia ad-hoc itu, masing-masing dibacakan oleh Kapten Kadarmarwani dan Kapten Subari. Secara aklamasi ketiga-tiga draf itu diterima dan disahkan. Untuk menanda tangani draft-draft itu oleh Kapten (L) Danussaputera diserahkan kepada Kapten (L) Gusti Aman atas nama ALRI Divisi IV Kalimantan.

Acara selanjutnya disinggung oleh Ketua Sidang akan menyangkut masalah teknis, dan untuk itu akan diadakan sidang-sidang yang bertempat di Amuntai, Barabai dan Kandangan. Untuk memudahkan di daerah, maka disepakati bersama ditentukan jadwal tanggalnya.

- a. Di Kandangan pada tanggal 20 Oktober 1949
- b. Di Barabai pada tanggal 23 Oktober 1949
- c. Di Amuntai pada tanggal 25 Oktober 1949

Masing-masing ditetapkan mulai pukul 11.00

Sebagai pimpinan dalam delegasi ALRI di daerah-daerah itu, oleh Ketua sidang dianjurkan agar tetap Kapten (L) Danussaputera, dan kemudian sebelum sidang ditutup, ketua sidang memberitahukan, bahwa beliau dan wakil LJC pada tanggal 18 Oktober 1949 akan kembali ke Jakarta dan berada di Banjarmasin 5 hari kemudian. Pada hari itu semua naskah sudah selesai dan siap untuk dibubuhi tanda tangan oleh kedua belah pihak.

Kapten (L) Danussaputera masih memerlukan mampir di mess untuk menyampaikan laporan dan minta diri kepada Jenderal Mayor Suhardjo, maka Kapten Verdijsck akan menjemputnya pada pukul 18.00.

Di mess Ringweg rupanya kedatangan rombongan baru dari Jakarta pada siang hari itu ramai dan sibuk sekali. Letda Hatmo memberikan kabar bahwa yang datang ialah Letkol Sukanda Bratamenggala, bersama alumni AMN (Akademi Militer Nasional) Jogja. Rombongan yang datang terdiri dari :

1. Letkol Sukanda Bratamenggala
2. Mayor Wiloyo Puspoyudo
3. Kapten J. Peyoh
4. Letda A. Thema
5. Letda Ali
6. Letda R. Soebardjo
7. Letda Ghousul Sumadipraja
8. Letda Soeseno
9. Letda Mayono
10. Letda M. Hanafi

Abdul Wahab Syahrani disertai jabatan selaku perwira urusan teritorial dengan pangkat Kapten (L), yang pengangkatannya dilakukan sendiri oleh Komandan Divisi.

Di beberapa kota di Hulu Sungai, tidak banyak yang bisa dicatat, mengenai jalannya perundingan-perundingan itu sebab inti persoalannya telah diselesaikan di Banjarmasin. Tentang tempat bagi kantor dan mess perwakilan, yang tugasnya lebih banyak sebagai *laison officer* saja.

Di Kandangan pada tanggal 20 oktober 1949

Dari pihak ALRI :

1. Kapten (L) Danussaputera
2. Letda Soeseno
3. Lettu (L) Daeng Ladjida
4. Letda Romansi

Dari pihak Belanda :

1. Assistent Resident Bloedemaker
2. Adjunct Commisaris van Politie Van Herricks
3. Kapten Verdijck
4. Van Harding
5. Kiai Mohammad Said

Perwira yang disertai tugas sebagai Kepala Perwakilan ialah Letda Soeseno, dan berkedudukan di Kandangan kota.

Di Barabai pada tanggal 23 oktober 1949

Dari pihak ALRI :

1. Kapten (L) Danussaputera
2. Letda Ali
3. Lettu (L) H. Damanhuri
4. Letmd (L) Subandi
5. Letmd (L) Ali Pandi

Dari pihak Belanda :

Letnan I KL Verhuyzen, dengan 3 orang staf dan kiai setempat.

Perwira yang disertai tugas sebagai Kepala Perwakilan ialah Letda Ali, dan berkedudukan di Barabai kota.

Di Amuntai pada tanggal 25 Oktober 1949

Dari pihak ALRI :

1. Kapten (L) Danussaputera
2. Letda R. Soebardjo
3. Letda (L) Bihman Villa
4. Letda (L) Antemas
5. Letda (L) Pembalah Batung
6. Letda (L) Abdul Murad

Dari pihak Belanda :

Kapten Reigers, dengan 3 orang staf termasuk kiai setempat.

Perwira yang disertai tugas sebagai Kepala Perwakilan ialah Letda R. Soebardjo, dan berkedudukan di Amuntai kota.²⁸⁵

Setiap adanya kesempatan untuk memenuhi masyarakat dan anggota ALRI di kota-kota itu, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kedatangan delegasi yang akan berunding tersebut, oleh masyarakat sudah diketahui secara mulus. Suasana disekitar tempat pertemuan sangat ramai sehingga memaksa polisi Belanda harus mengatur pengamanannya.

Mengejutkan, karena secara serentak bendera Merah Putih, tiba-tiba bermunculan yang selama ini tak pernah ada. Bendera itu tampak meriah. Mungkin Belanda itupun heran juga. Itu bagian kecil yang membuktikan betapa besarnya jiwa kebangsaan di Kalimantan telah tumbuh dengan semangat tinggi.

Pada tanggal 27 Oktober 1949 Jenderal Mayor R. Suhardjo Hardjowardojo dengan didampingi Letkol Sukanda Bratamenggala dan Letkol (L) Hassan Basry melakukan inspeksi kesemua jajaran ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan. Pertama kali memeriksa ke markas Divisi Karang Jawa, Kandangan, tempat-tempat pasukan dan diteruskan ke Barabai dan Amuntai.

Demikian pula pos-pos perwakilan dan kubu-kubu pos pertahanan ALRI di garis demarkasi. Disiplin pasukan patroli bersama cukup tinggi. Di luar dugaan, pada umumnya mereka memiliki sikap disiplin dan waspada. Peninjauan yang dilakukan itu resmi, itulah a.l. sebabnya Komandan-Komandan Militer Belanda selalu turut mendampingi rombongan.

Rapat Gabungan antara masing-masing Pimpinan dan Staf dari Misi Militer Republik Indonesia dengan ALRI Divisi IV pada tanggal 30 Oktober 1949 di ruangan tengah mess Misi Militer RI di Ringweg, yang hadir :

1. Jenderal Mayor R. Suharjo Hardjowardojo
2. Letkol Sukanda Bratamenggala
3. Letkol (L) Hassan Basry
4. Mayor Waluyo Puspoyudo
5. Kapten (L) Danussaputera
6. Kapten J. Peyoh
7. Kapten Subari
8. Kapten Muntoyo
9. Kapten (U) Tjilik Riwut

Materi sebagai pokok yang dibicarakan sekaligus pengambilan keputusan untuk kemudian disahkan.

Penempatan tenaga para perwira pada pos-pos :

²⁸⁵ Danussaputera, *ibid.*, hal. 116-118.

- a. Mayor Wiloyo Puspoyudo
Letda Ghousul Sumandipraja
Lettu (L) M.S. Rusman
Menempati pos di Balikpapan dan Samarinda, guna menginventarisir pasukan-pasukan ALRI setempat.
- b. Letda (L) Urai Nawawi
Letda (L) Nazarudin
Machrus Effendi
Menempati pos di Pontianak, Kalimantan Barat dengan tugas yang sama.
- c. Letda Dangos Patianum.
Letda Ambu Suling
Letda W. Narang
Menempati pos Kuala Kapuas dan Sampit dengan tugas yang sama.
- d. Kapten (L) Gusti Aman
Diperbantukan pada Staf Misi Militer RI dengan tugas khusus, pertama-tama ditugaskan untuk melakukan inventarisasi di Kotabaru, Pulau Laut, Perwira setempat yang perlu dihubungi Letda (L) Basrindu, Letda (L) Azidin Noor, Letda (L) Dharma dan Letda (L) Peran Kamar.
- e. Lettu (L) A.H. Budhigawis
Diperbantukan pada staf Misi Militer RI sebagai perwira Penerangan dan Hubungan Masyarakat, dan berkedudukan di Banjarmasin.
- f. Kapten (L) M. Hammy A.M.
Letda (L) Suroto
Serma (L) A. Santang
Dengan didampingi Kapten J. Peyoh dan Letda Thema, untuk membentuk dan mengorganisir pasukan Polisi Tentara.
- g. Lettu (L) Martinus
Letda (L) Padmo Suharjo
Letda (L) Syahrums Noor
Letda (L) Subandi
Dengan didampingi Kapten Kadarmawarni, untuk membentuk dan mengorganisir Batalyon Bantuan Riil, untuk dijadikan tulang punggung kekuatan divisi. Ada 2 kelompok Tentara Pelajar dengan berkekuatan 3 kompi, sepenuhnya akan ditangani dan diorganisir langsung oleh Letkol Sukanda Bratamenggala.

4. ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan Diresmikan Menjadi Divisi Lambung Mangkurat

Banjarmasin di minggu terakhir bulan September dalam keadaan buruk. Pro dan kontra Republik terjadi. Pihak Belanda yang memiliki senjata dengan tentara yang memadai, tampak *overacting*. Hasil laporan perundingan Belanda ke Jakarta, dan adanya serangkaian berita-berita buruk tentang ALRI Divisi IV adalah datangnya delegasi Militer Republik Indonesia yang kedua kalinya, terdiri dari : Jenderal Mayor R. Suhardjo Hardjowardojo, Letkol Sukanda Bratamenggala, Letkol Djajadiningrat (dari ALRI) dan 13 perwira, yang diterima di rumah Wali Daerah M. Hanafiah.²⁸⁶

²⁸⁶ Hassan Basry, *op.cit.*, hal. lihat pula M. Idwar Saleh, *op.cit.*, hal. 54.

Dengan sengaja usaha Belanda menghalangi pimpinan Markas Besar Selatan untuk menghubungi Delegasi Militer itu, dengan cara mengadakan penembak-penembak gelap. Sampai saat itu Belanda belum mengetahui pusat dari Markas Besar Selatan.

Jenderal Mayor Suhardjo kembali ke Yogya, guna melaporkan adanya ALRI Divisi IV kepada Panglima Besar dengan Kepala Staf Angkatan Laut, ketika sampai di Yogya, suasana sedang penuh dengan persiapan-persiapan hari Angkatan Perang R.I. Dari Letkol Pirngadi, P. Arya menerima pangkat Mayor. Pada hari Angkatan Perang ini P. Arya dan yang lainnya, dibagikan bintang gerilya, yang diserahkan langsung oleh Panglima Tertinggi.²⁸⁷

Letkol Sukanda Bratamanggala, berupaya mengorganisir ALRI Divisi IV, yang sudah dijadikan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada tanggal 4 Oktober 1949, lahirlah Maklumat ALRI Divisi IV No. 1 dan Maklumat Delegasi Militer Republik Indonesia No. 1 berbunyi sebagai berikut :

- a. Mulai sekarang stempel-stempel yang bertanda ALRI Divisi IV berbentuk bundar, baik dari pusat maupun dari daerah tidak berlaku lagi.
- b. Tanda-tanda (stempel-stempel) yang baru akan diumumkan kemudian.
Dikeluarkan di Banjarmasin, tanggal 14 Oktober 1949, pengumuman ini ditandatangani Hassan Basry.²⁸⁸

Sedangkan maklumat dari Delegasi Militer Republik Indonesia sesudah ada pemufakatan dengan Komandan ALRI Divisi IV berbunyi :

- a. Semua surat-surat kuasa dan atau surat edaran waktu yang lampau, dijalankan atas nama ALRI Divisi IV terhadap masyarakat tidak berlaku lagi.
- b. Sesudah dikeluarkan maklumat ini, maka surat-surat tersebut harus diketahui dahulu oleh Delegasi Militer Republik Indonesia.
- c. Aturan ini berlaku mulai dikeluarkan maklumat ini.

Dikeluarkan di Banjarmasin, tanggal 4 Oktober 1949 dan ditandatangani oleh Delegasi Militer RI Letkol Sukanda Bratamanggala.²⁸⁹

Pemerintah Belanda pun akhirnya harus tahu diri pula sehingga berangsur-angsur membebaskan tawanan politik. Yang terakhir dibebaskan sebanyak 75 orang, di antaranya : Masran, M. Nawawi Arief, Sabri Tobing, Zulkipli, Kandar, Durauf, Sakerani, Sanderi, Saberani, H. Rasyidi, H. Baseran, Bakar, Usman, Antung Narang, Effendi, Kurdi, Basuni Taufik, Amberah, Amberan, H. Hasan, Amir Hamzah, H. Sulaiman, Ibas, HM. Ramli, Marah Danil, H. Busra Hajar, Djuri, H. Basuni, H.A. Azis, Idar, H.A. Utuh, Abdul Markis, Abu Hanifah, Nafiah, Dulhalim, Tarsad, Umar, Tahallah, Erman, Asnawi, H. Idris, H. Sukeri, Amberan, Saberani, Sulai, Salim, Abdul Hamid, Atjil, Satar, Baderun, H. Taberi, Majun, Anang Julai, Andul Rajak, H. Jalil, Ibak, Idar, Rasyidi, Muhammad, HA. Basuni, Baseri, Aini, Mahlan dan Ahmad Katoeng.²⁹⁰

Berjuang memang memerlukan pengorbanan, sehingga wajar ada yang tertangkap, kemudian dipenjarakan oleh Belanda. Sebagian ada yang menghembuskan nafas akhir di dalam penjara, baik karena faktor kesehatan, ataupun karena siksaan akibat interogasi. Ada pula yang dapat bebas, karena umur masih panjang.

Setelah semua stempel dan aturan-aturan ALRI Divisi IV dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Sukanda Bratamanggala, maka langkah berikutnya pada tanggal 11 Oktober 1949, dibentuk di Kalimantan Selatan, dengan tujuan mengumpulkan sumbangan dari rakyat, untuk membiayai kesatuan-kesatuan gerilya. Hal ini menambah dana yang sudah dijanjikan Tentara Belanda, pada saat persetujuannya, dengan ALRI Divisi IV.

²⁸⁷ M. Idwar Saleh, *ibid.*, hal. 57.

²⁸⁸ Depdikbud, *op.cit.*, hal. 197.

²⁸⁹ Depdikbud, *loc.cit.*

²⁹⁰ Depdikbud, *loc.cit.*

Sukanda Bratamenggala mengumumkan pembentukan panitia baru, menegaskan, uang yang dikumpulkan PPTNI bersama sumbangan yang dijanjikan Belanda, merupakan satu-satunya sumber pendapatan tentara sejak itu. ALRI Divisi IV dilarang mengumpulkan uang sumbangan langsung dari rakyat. Ini berarti berakhirnya masa pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV. Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 1949, para pejabat Republik dari Jawa mulai mengadakan pemeriksaan kesehatan untuk dilihat siapa yang fisiknya cukup kuat untuk tetap dalam Tentara Republik, dan siapa yang harus dimobilisasikan, dan “dikembalikan ke masyarakat”. Para gerilyawan yang tergolong dalam kategori kedua, demikian dijanjikan, akan diberhentikan dengan hormat.²⁹¹

Pasukan yang dilatih oleh Letnan I Bambang Sugito di Alam Roh diperiksa kesehatannya oleh Dokter Suharsono dan Kapten Ambu Suling pada tanggal 2 November 1949 dan hasilnya 90% lulus.

Maka sebagian para gerilyawan itu diterima dan sebagian lagi terpaksa harus kembali ke masyarakat. Mereka yang diterima, diberikan kursus pendidikan, namun para prajurit TNI sendiri memandang rendah rekan-rekannya dari Kalimantan, dengan segala cemoohnya.

ALRI Divisi IV terbentuk pada masa revolusi, ketika ukuran-ukuran dan peraturan, yang menentukan pembentukan dan fungsinya dibuat seringan-ringannya. Yang penting berani, kini setelah pertempuran berakhir. Kiranya tibalah waktunya bagi ALRI Divisi IV untuk diubah secepat mungkin, menjadi kesatuan tentara yang efisien dan teratur baik, demikian alasan yang dikemukakan.

Dalam suasana konsolidasi, timbul desas desus bahwa ALRI, harus ke laut dan di Kalimantan akan dibentuk Angkatan Darat dan Udara. Timbul pula golongan yang menanggung di air keruh, dan berebut mencari kedudukan di bawah perlindungan misi Militer RI.

Untuk menghapuskan ketidakwajaran, maka ALRI Divisi IV meminta untuk menjadi Angkatan Darat saja, dengan nama Divisi Lambung Mangkurat. Dimaksudkan untuk menghindari perpecahan lebih jauh.²⁹²

Pada tanggal 1 November 1949, ALRI Divisi IV, diganti menjadi Divisi Lambung Mangkurat. Selama masa konsolidasi 2 September 1949 – 10 November 1949, masih dihadapi berbagai kesulitan, antara lain :

- a. Pemanggilan para pejuang gerilya dari gunung dan hutan yang belum mengetahui adanya perhentian permusuhan dari pihak Belanda, sehingga belum bersedia turun ke kota.
- b. Sebagian para pejuang yang telah mengabdikan kepada kemerdekaan mendengar bahwa mereka akan bertemu dengan bekas musuhnya, sehingga enggan meneruskan atau mengikuti pelantikan menjadi tentara.
- c. Merasa bahwa perjuangan menegakkan kemerdekaan telah selesai, sudah menang, sehingga ingin kembali ke masyarakat biasa dengan tidak mengingatkan diri sebagai tentara.
- d. Walaupun Divisi Lambung Mangkurat telah disahkan, namun masih ada kesatuan yang belum mengetahui adanya perdamaian gencatan senjata, dan belum sempat dihubungi (Kotabaru dan Pulau Laut) untuk itu diadakan satu tim penjemputan pejuang dari hutan atau gunung.
- e. Merasa kurang mampu karena fisik sakit keperluan pribadi (orang tua, anak isteri, penghidupan dan lain-lain) serta merasa kurang berpendidikan.²⁹³

²⁹¹ C. Van Dijk, *op.cit.*, hal. 223 – 224.

²⁹² Hassan Basry, *op.cit.*, Jilid II, tt.th.

²⁹³ Kodam X Lam, *op.cit.*, hal. 215.

Persoalan yang timbul pula adalah penyelesaian administrasi yang kurang lengkap, masalah penyaluran pejuang yang kembali ke masyarakat maupun yang menjadi TNI. Jumlah keadaan pejuang tersebut tidak tercatat, sehingga diadakan pencatatan ulang.

Selanjutnya setelah pasukan-pasukan inti dapat tersusun diadakan latihan-latihan persiapan upacara, serta pemantauan penyelesaian administrasi, maka pada tanggal 10 November 1949, bertempat di lapangan Tugu Kandangan dilangsungkan upacara pelantikan Divisi Lambung Mangkurat. Pengesahan organisasi Lambung Mangkurat dikukuhkan dengan penetapan Menteri Pertahanan RI Nomor : 518/1949 tanggal 2 November 1949, terhitung mulai tanggal 1 November 1949, Inspektur Upacara Letkol Sukanda Bratamenggala Deputy KSAP RI mewakili dan bertindak atas nama KSAP, membacakan amanat Menteri Pertahanan Jenderal Hamengkubuwono.²⁹⁴

Kesatuan ALRI Divisi IV, yang disahkan menjadi Divisi Lambung Mangkurat tersebut terdiri dari :

Markas Divisi dengan Panglima Divisi Letkol Hassan Basry. Kedudukan Komando Divisi berada di Kota Kandangan, terdiri atas :

- a. Batalyon Martinus berkedudukan di Kandangan.
- b. Batalyon Inf. Mulyono berkedudukan di Pelaihari.
- c. Pasukan Detasemen Polisi Militer, dengan Komandan Pasukan M. Hammy A.M, dengan wakilnya Lettu Theme berkedudukan di Kandangan.
- d. Komando Distrik Militer setingkat Kodim, yaitu :
 1. KDM. Hulu Sungai Utara dengan Komandannya Letnan I Pembalah Batung.
 2. KDM. Hulu Sungai Selatan dengan Komandannya Kapten Gusti Aman, berkedudukan di Kandangan.

Dengan demikian Divisi Lambung Mangkurat telah tersusun sedemikian rupa, sehingga para pejuang eks ALRI Divisi IV mau tidak mau harus berintegrasi dengan divisi ini.

Selain itu pula, Markas Daerah pejuang yang dulunya terletak atau berkedudukan di Kabupaten, namanya diganti dengan KDM (Komando Distrik Militer), Markas Daerah yang sifatnya berkedudukan di Kecamatan dijadikan KODIM (Komando Distrik Militer). Markas Pangkalan yang terdapat di tiap desa menjadi KPKR (Komando Pembantu Keamanan Rakyat).

Setelah rampung penyusunan Divisi Lambung Mangkurat, maka yang menjadi persoalan penting adalah mereka yang dikembalikan ke masyarakat. Hassan Basry dalam kisahnya tentang akhir perjuangan gerilya di Kalimantan menceritakan bahwa anggota-anggota ALRI Divisi IV lainnya dikembalikan ke masyarakat, diberikan uang pesangon Rp. 50,00,- dan kain sepanjang 3 meter dan Surat Piagam.

Yang perlu disadari adalah, ALRI Divisi IV adalah sosok organisasi perjuangan yang mandiri, di Kalimantan Selatan. Perjuangan tetap tegar, walau terpisah dari induknya. Anggota-anggota gerilyawan, sebagian besar pemuda-pemuda sukarelawan, dari berbagai suku apa saja asalkan tetap satu tujuan berjuang menentang NICA, sebagai upaya Kalimantan Selatan berintegrasi dengan Indonesia.

Para gerilyawan, ada yang berasal dari pemuda pedalaman, buruh, perantau, petani, nelayan dan sebagainya, yang sebagian besar tidak berpendidikan sama sekali, paling tinggi lulusan sekolah dasar. Karena itu wajar terdapat di antaranya mereka tidak bisa membaca dan menulis. Tetapi mereka memiliki semangat patriotik, nasionalisme dan berani maju ke medan laga menjadi sasaran peluru. Keberanian itulah yang menentukan dalam perjuangan gerilya, pada masa revolusi fisik 1945 – 1949. Tanpa memiliki pemuda yang berani, atau orang-orang yang berani mempertaruhkan

²⁹⁴ Kodam, *ibid.*, hal. 217.

jiwa raganya, walaupun buta huruf, maka sungguh sukar mengalahkan Belanda yang cukup kuat persenjataannya.

Adanya demobilisasi seperti dikemukakan sebelumnya, tidaklah terlalu mengecewakan, jika tidak dibarengi dengan *overacting* Tentara Republik yang dahulunya bekas KNIL. Ketika mereka mendapat kursus tentara, padahal mereka buta huruf, mereka diejek dan diperlakukan kurang wajar oleh Tentara Republik mantan KNIL yang kebetulan ditunjuk sebagai Komandan.

Namun demikian, apapun persoalan yang terjadi, rakyat Indonesia telah berhasil mengusir kolonialisme. Kesadaran menjadi “bangsa” ternyata sangat mahal nilainya. Oleh sebab itu, kesadaran sejarah perlu dipelihara, agar kita dapat mengisi kemerdekaan dengan penuh kejujuran dan rasa kebersamaan.

BAB VIII

PERIODE DARI PENGAKUAN KEDAULATAN SAMPAI DENGAN DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

A. PENGATURAN PEMERINTAHAN

1. Masa Republik Indonesia Serikat sampai berakhirnya tahun 1950

Dengan disetujuinya hasil-hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 2 November 1949 di Den Haag, maka terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS ini terdiri dari 16 negara bagian dengan masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Diantara negara-negara bagian yang terpenting selain Republik Indonesia yang mempunyai daerah yang terluas dan penduduk yang terbanyak adalah Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Pasundan dan Negara Indonesia Timur.¹

Ternyata kemudian bahwa bentuk negara federal ini tidak dikehendaki oleh bagian terbesar rakyat Indonesia. Orang menyadari bahwa pembentukan negara federal ini tidak berlandaskan konsep yang kuat, latar belakang pendiriannya adalah untuk menghancurkan Republik Indonesia hasil Proklamasi 17 Agustus 1945. Oleh karena itu berkembanglah gerakan-gerakan rakyat (*people power*) untuk kembali kepada bentuk negara kesatuan. Rakyat di negara-negara bagian pada umumnya menuntut kembali ke wilayah Republik Indonesia.²

Demikian pula halnya dengan satuan-satuan kenegaraan yang dibentuk oleh Belanda di pulau Kalimantan dan kemudian setelah KMB dikokohkan melalui Konstitusi RIS 1949. Berdasarkan Pasal 2 Konstitusi RIS maka pulau Kalimantan dibagi atas 5 (lima) "Satuan Kenegaraan yang Tegak Sendiri" yaitu : Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar dan Dayak Besar. Satuan-satuan daerah ini dengan susunan Pemerintahannya jelas dimaksudkan untuk menandingi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³

Ternyata dengan berdirinya Republik Indonesia Serikat, di Kalimantan juga menimbulkan reaksi dalam wujud gerakan-gerakan rakyat yang intinya adalah untuk menuntut kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945. Adapun gerakan-gerakan rakyat tersebut baik secara spontan maupun melalui badan-badan perwakilannya dapat dilihat sebagai berikut :

Dewan Banjar pada tanggal 25 Januari 1950 telah mengeluarkan sebuah mosi yang mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia agar menyelenggarakan segala sesuatu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dan juga daerah Banjar serta daerah-daerah lainnya dan Gemeente Banjarmasin di Kalimantan secepatnya dapat dimasukkan menjadi bagian dari negara Republik Indonesia.⁴

Pada tanggal 5 Februari 1950 bertempat di gedung Permufakatan Indonesia, PNI Daerah Kalimantan Selatan mengadakan rapat dengan memperkuat resolusi tanggal 25 Januari 1950 dari gabungan partai-partai dan organisasi-organisasi yang ada di Kalimantan Selatan. Selanjutnya mendesak kepada yang berwajib agar melaksanakan resolusi itu sesegera mungkin.⁵

Bertempat di gedung Musyawaratutthalibin Amuntai pada tanggal 5 Februari 1950 partai-partai dan organisasi mengadakan rapat gabungan menghasilkan sebuah mosi yang isinya antara lain: menyetujui Resolusi Rapat Gabungan Partai-partai di Banjarmasin tanggal 25 Januari 1950,

¹ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Balai Pustaka, Jakarta, 1975, hal 72.

² Alex A. Koroh, "Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Kalimantan Selatan (1901 – 1956) : Tinjauan Aspek Struktural Serta Semangat Yang Dibawakannya", Laporan Penelitian FKIP Unlam, Banjarmasin, 1988, hal. 44.

³ Alex A. Koroh, *ibid*, hal. 45.

⁴ Alex A. Koroh, *loc.cit*.

⁵ Ramli Nawawi, "Dewan Banjar", Skripsi Sarjana Muda Jurusan Sejarah FKg Unlam, Banjarmasin, 1972, hal. 67.

dan mendesak agar pembaharuan Dewan Daerah Banjar sudah tersusun selambat-lambatnya tanggal 1 Juli 1950.⁶

Dengan dipelopori oleh beberapa partai politik cabang Kuala Kapuas, pada tanggal 5 Februari 1950 telah diadakan Rapat Umum Gabungan yang menghasilkan sebuah “Resolusi Rakyat”. Dengan menekankan timbulnya perpecahan sebagai akibat politik kolonial Belanda yang ditanamkan melalui Konferensi Malino, Denpasar dan lain-lainnya maka ditetapkan antara lain :

- a. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mendesak agar secepat-cepatnya merombak Negara Bagian serta langsung mempersatukan diri menjadi Republik Indonesia;
- c. Membubarkan secepat-cepatnya segala dewan-dewan bentukan kolonial serta membangunkan yang baru sesuai dengan kemauan rakyat.⁷

Landschap Kotawaringin kelihatannya tidak segigih daerah lainnya, tetapi menurut keterangan *Bestuurcommissie* (suatu badan pemerintahan yang diangkat oleh Residen Kalimantan Selatan sebagai pengganti dari *Zelfbestuurder* yang telah dipecat oleh pemerintah federal dulu), bahwa rakyat ingin bergabung dengan Republik Indonesia.⁸

Tanggal 9 Maret 1950 di Banjarmasin diadakan demonstrasi rakyat yang dihadiri kira-kira enam ribu orang dengan keputusan: menuntut pembubaran dewan sekarang, karena tidak dapat diterima oleh rakyat dan mengajukan hasrat rakyat diminta diakui sebagai pernyataan tetap untuk bergabung dengan Republik Indonesia.⁹

Tanggal 13 Maret 1950, oleh Pemerintah diadakan rapat dengan partai-partai politik dan organisasi massa dibawah pimpinan Residen Kalimantan M. Hanafiah. Rapat tersebut menghasilkan keputusan :

1. Penggabungan daerah Kalimantan Selatan harus dilaksanakan selekas-lekasnya dengan cara yang semudah-mudahnya;
2. Karena itu Pemerintah Dewan-Dewan Daerah akan mendesak kepada Pemerintah RIS supaya menggabungkan daerah Kalimantan Selatan ke dalam RI berdasarkan Pasal 7 Ayat 3, Pasal 22 Ayat 1 Undang-undang Darurat yakni : kemauan penyatuan oleh Dewan-Dewan Daerah dianggap oleh Pemerintah RIS telah diambil sebagai suatu keputusan yang tetap.¹⁰

Di Amuntai pada tanggal 13 Maret 1950 diadakan demonstrasi dihadiri kurang lebih 6000 orang dimana diambil 2 mosi :

1. Mosi pertama, mendesak agar secepatnya Kalimantan menjadi Propinsi Republik Indonesia, dan mendesak agar secepatnya seluruh Indonesia menjadi Negara Kesatuan;
2. Mosi kedua, mendesak agar supaya Dewan-Dewan di Kalimantan Selatan dibubarkan, dan agar dibentuk dewan baru setelah bergabung dengan RI.¹¹

Di Kandangan juga diadakan demonstrasi rakyat pada tanggal 26 Maret 1950 dengan tujuan yang sama seperti di Banjarmasin, yaitu ingin sesegeranya mengintegrasikan daerah ini dengan Republik Indonesia.¹²

Hasil pertemuan pejabat Residen Kalimantan Selatan dengan pemuka masyarakat di Hulu Sungai, pejabat Residen menarik kesimpulan bahwa :

⁶ Ramli Nawawi, *ibid*, hal 67.

⁷ Ramli Nawawi, *loc.cit*.

⁸ Alex A. Koroh, *op.cit*, hal. 46.

⁹ Alex A. Koroh, *loc.cit*.

¹⁰ A. Gazali Usman dan Ramli Nawawi (ed), *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1949) Daerah Kalimantan Selatan*, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Banjarmasin, 1991, hal. 212.

¹¹ A. Gazali Usman dan Ramli Nawawi (ed), *loc.cit*.

1. Rakyat seluruh Kalimantan Selatan yang terdiri atas Daerah Banjar, Dayak Besar, Kalimantan Tenggara, Kotawaringin, dan Gemeente Banjarmasin mempunyai hasrat sangat besar untuk menggabungkan seluruh Kalimantan Selatan dengan Republik Indonesia;
2. Hasrat yang begitu besar dan meluap-luap tidak dapat ditunda lagi karena kalau terlambat pelaksanaannya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.¹³

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut maka Residen Kalimantan Selatan dalam suratnya tertanggal 30 Maret 1950 yang ditujukan kepada Menteri Urusan Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat di Jakarta Nomor PB-17-32 yang berpokok: "Penggabungan Daerah-daerah Kalimantan Selatan dengan Republik Indonesia" isinya menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi di Kalimantan Selatan.¹⁴

Pergolakan politik tidak hanya terjadi di kalangan rakyat yang berbentuk rapat raksasa dan menghasilkan mosi kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat, tetapi juga terjadi dalam dewan-dewan yang ada di Kalimantan Selatan. Pergolakan dalam dewan-dewan ini menghasilkan beberapa keputusan yang sejalan dengan apa yang telah dihasilkan oleh rapat-rapat tersebut.¹⁵

Menanggapi tuntutan rakyat di daerah Kalimantan Selatan agar daerahnya secepatnya digabungkan dengan Republik Indonesia, maka Presiden Republik Indonesia Serikat kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 137 tanggal 4 Maret 1950 yang menetapkan bahwa daerah Banjar dihapuskan sebagai daerah bagian dari Republik Indonesia Serikat dan dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia, Yogyakarta.¹⁶

Untuk daerah-daerah lainnya di Kalimantan Selatan, Presiden Republik Indonesia Serikat telah menetapkan penggabungan dengan Republik Indonesia, berdasarkan surat keputusan masing-masing yaitu :

1. Daerah Kalimantan Timur, dengan Surat Keputusan Nomor 127 tanggal 24 Maret 1950 dan serah terima antara pemerintah tersebut dilaksanakan tanggal 10 April 1950;
2. Daerah Dayak Besar, dengan Surat Keputusan Nomor 138 tanggal 2 April 1950 dan serah terima antara pemerintah tersebut dilaksanakan tanggal 14 April 1950;
3. Daerah Kalimantan Tenggara, dengan Surat Keputusan Nomor 139 tanggal 4 April 1950 dan serah terima antara pemerintah tersebut dilaksanakan tanggal 14 April 1950;
4. Daerah Swapraja Kotawaringin dengan Surat Keputusan Nomor 140 tanggal 4 April 1950 dan serah terima antara pemerintah tersebut dilaksanakan tanggal 18 April 1950.
5. Daerah Banjar serah terima dilaksanakan pada tanggal 14 April 1950.¹⁷

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Yogyakarta Nomor C.17/15/3 wilayah daerah-daerah yang melebur diri itu dibagi dalam enam kabupaten administratif dan tiga swapraja dibawah pimpinan seorang gubernur yang berkedudukan di Banjarmasin dengan dibantu dua orang residen yang berkedudukan masing-masing di Banjarmasin dan Samarinda. Keadaan ini berlangsung terus hingga Indonesia Serikat dibubarkan dan kembali kepada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Formalnya, negara kesatuan yang baru itu merupakan kelanjutan dari RIS, karena mengalami perubahan Undang-Undang Dasar. Tetapi sebagian besar rakyat Indonesia menganggap bahwa negara kesatuan yang baru itu merupakan kelanjutan dari Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945.¹⁸

¹² Alex A. Koroh, *op.cit.*, hal. 46.

¹³ Alex A. Koroh, *loc.cit.*

¹⁴ Alex A. Koroh, *ibid.*, hal 48.

¹⁵ Alex A. Koroh, *loc.cit.*

¹⁶ Alex A. Koroh, *loc.cit.*

¹⁷ Alex A. Koroh, *ibid.*, hal 49.

¹⁸ Alex A. Koroh, *loc.cit.*

Dengan penggabungan daerah Banjar/Kalimantan Selatan pada Republik Indonesia dalam bulan April 1950, maka kembalilah sepenuhnya daerah ini serta rakyatnya dan pemerintahan sebagai bagian dari Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945. Pembagian daerah-daerah baru yang melebur diri dengan Republik Indonesia (Yogyakarta) tersebut yakni :

1. Kabupaten Banjar
2. Kabupaten Hulu Sungai
3. Kabupaten Kotabaru
4. Kabupaten Kapuas
5. Kabupaten Barito
6. Kabupaten Kotawaringin
7. Swapraja Kutai
8. Swapraja Berau
9. Swapraja Bulongan.

Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Yogyakarta Nomor C.17/15/3 tanggal 29 Juni 1950. Dengan demikian maka pemerintahan di daerah tersebut telah mendapatkan status hukum yang kuat dalam kerangka negara Republik Indonesia.¹⁹

2. Masa Republik Indonesia sampai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

a. Situasi Setelah kembalinya ke Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menjelang kembalinya Republik Indonesia ke bentuk Negara Kesatuan, sebagai langkah pertama ke arah pembentukan daerah-daerah otonom, maka oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950, Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 59, membagi Indonesia dalam 10 buah pemerintahan daerah propinsi yang bersifat administratif, yaitu :

1. Jawa Barat
2. Jawa Tengah
3. Jawa Timur
4. Sumatera Utara
5. Sumatera Tengah
6. Sumatera Selatan
7. Kalimantan
8. Sulawesi
9. Maluku
10. Sunda Kecil.²⁰

Selain itu juga sebelumnya oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 telah dibentuk propinsi-propinsi otonom yaitu :

1. Jawa Timur, dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950;

¹⁹ Alex A. Koroh, *ibid*, hal 50.

²⁰ Alex A. Koroh, *loc.cit*.

2. Daerah Istimewa Yogyakarta setingkat dengan propinsi, dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950;
3. Jawa Tengah, dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950;
4. Jawa Barat, dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1950;
5. Sumatera Selatan, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950;
6. Sumatera Tengah, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950;
7. Sumatera Timur, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 1950.²¹

Dengan kembalinya RI ke bentuk Negara Kesatuan, maka berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara, Indonesia pada waktu itu mempunyai 7 daerah otonom yang telah dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948 ditambah dengan daerah otonom kota Jakarta Raya yang dibentuk dengan Undang-undang Darurat (Negara Kesatuan Republik Indonesia) Nomor 2 Tahun 1953 Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 8 dibentuk pula propinsi otonom Kalimantan.²²

Menjelang terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tanggal 14 Agustus 1950 Gubernur Kalimantan (dr. M. Moerdjani) dengan Keputusan Nomor 186/OPB/92/14 untuk sementara waktu sambil menunggu tindakan selanjutnya dari Pemerintah Pusat telah dibentuk beberapa daerah kabupaten, daerah istimewa dan kotapraja (setingkat dengan kabupaten) yang dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di bagian wilayah-wilayah tertentu di propinsi Kalimantan. Kecuali di daerah (Istimewa) Kutai, di daerah-daerah tersebut oleh Gubernur Kalimantan juga telah dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD) dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 1950 sepanjang peraturan itu masih berlaku.²³

b. Timbulnya Pemberontakan

Dalam konteks nasional, setelah Pengakuan Kedaulatan dan serah terima pemerintahan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dengan Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS), maka dilakukan pula serah terima di bidang kemiliteran yang meliputi bidang personil, material dan aparat pendidikan.²⁴ Pelaksanaan serah terima itu dilaksanakan dari eselon atas sampai eselon yang lebih rendah, mulai dari pusat sampai daerah-daerah.

Sesuai keputusan KMB, tanggung jawab keamanan seluruhnya harus diserahkan kepada APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) yang berintikan TNI dan meliputi orang Indonesia anggota KNIL serta kesatuan-kesatuan NICA lainnya yang berkeinginan masuk. Sehubungan dengan itu, dalam rangka peleburan anggota KNIL ke dalam APRIS, pemerintah RIS mengeluarkan beberapa peraturan dengan tujuan agar peleburan itu dapat berjalan tertib mungkin. Diantaranya adalah berupa Undang-undang Darurat Nomor 4/1950 (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1950), yang mengatur peleburan itu.

Usaha peleburan tersebut didasarkan kepada kebijaksanaan Perdana Menteri Drs. Mohammad Hatta yang berkeinginan menstranformasikan TNI yang lahir sebagai tentara nasional, tentara rakyat, tentara revolusi, menjadi suatu tentara profesional menurut model Barat. Untuk itu

²¹ Alex A. Koroh, *ibid*, hal.52.

²² Alex A. Koroh, *loc.cit*.

²³ Alex A. Koroh, *ibid*, hal 53.

²⁴ Saleh As'ad Djamhari, *Ichtiisar Sedjarah Perjuangan ABRI (1945-Sekarang)*, Pusat Sedjarah ABRI Dephankam, Djakarta, 1971, hal. 58.

dipekerjakan suatu *Nederlands Militaire Missie* (NMM) atau Misi Militer Belanda sebagai pelatih prajurit-prajurit TNI.²⁵

Kebijakan itu sudah barang tentu tidak populer di kalangan TNI dan menimbulkan masalah psikologis. Ditinjau dari segi politik militer peleburan itu merupakan suatu kemenangan, tetapi akibat psikologis bagi TNI adalah berat. TNI dipaksa menerima sebagai kawan dan bahkan sebagai komandan orang-orang yang selama perang kemerdekaan menjadi lawan mereka. Sementara itu di kalangan TNI sendiri banyak anggota-anggotanya yang harus dikembalikan ke masyarakat, sebab dianggap tidak memenuhi syarat untuk tetap dalam angkatan perang.

Seperti halnya di daerah lain, di Kalimantan Selatan, benturan-benturan juga terjadi ketika diadakannya usaha-usaha pembentukan TNI dan peleburan bekas KNIL ke dalam APRIS. Banyak tokoh-tokoh perjuangan yang tidak dapat menerimanya, disebabkan mereka masih beranggapan bahwa bekerjasama dengan KNIL sama dengan bekerjasama dengan musuh yang dahulu membunuh rakyat.

Selain itu pula, penolakan tersebut juga disebabkan oleh persoalan-persoalan lainnya seperti ketidakpuasan terhadap mantan KNIL yang ketika menjadi TNI telah dinaikkan pangkatnya, dan persoalan pribadi dari beberapa tokoh yang kecewa karena perbedaan kedudukan, fasilitas, prioritas dan sebagainya.

Selain di lingkungan TNI, muncul pula benturan-benturan dan kemarahan tokoh-tokoh sipil ketika Gubernur Kalimantan dr. Moerdjani memindahkan kedudukan pejabat-pejabat yang ada dan menggantikannya dengan orang yang didatangkan dari Jawa, atau orang lain yang dianggap pemerintah bisa dipercaya, seolah-olah dilakukan demi perbaikan mutu aparat pemerintah.

Penggantian pejabat-pejabat pada masa pemerintahan dr. Murdjani bukan hanya pada pemerintahan sipil tetapi juga termasuk tentara dan kepolisian. Komando Tentara dan Panglima Territorium Kalimantan dipegang oleh Letnan Kolonel Sukanda Bratamenggala, yang sebelum menjadi TNI adalah bekas anggota KNIL. Pada masa jabatannya ia telah melaksanakan demobilisasi bekas pejuang gerilya di Kalimantan Selatan. Proses demobilisasi itu sendiri berlangsung cepat, mereka yang tidak memenuhi syarat dikembalikan ke masyarakat dengan pesangon selebar kain sepanjang 1,5 meter dan uang Rp 50.²⁶

Sementara itu, dengan alasan untuk memperkuat daya tahan tempur yang lebih sempurna, maka oleh Panglima Territorium Kalimantan telah pula didatangkan mantan kesatuan-kesatuan NICA dari Jawa. Salah satunya adalah Batalyon II RI-IX Divisi Siliwangi dari Jawa Barat yang tiba di Banjarmasin pada 22 Maret 1950 dibawah pimpinan Kapten Bidjuri. Mantan kesatuan NICA itulah yang sebagai konsekuensi dari Penetapan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 83/KSAD/PNTP/1950 tanggal 20 Juli 1950 berubah namanya menjadi Batalyon 605.²⁷

Sebagai akibat ketidakpuasan bekas pejuang gerilya di Kalimantan Selatan terhadap proses demobilisasi, Ibnu Hadjar yang merasa tertekan lahir batin, mepelopori beberapa perwira meninggalkan asrama mereka dan kembali masuk hutan dan mendirikan organisasi gerilya bernama *Kesatuan Rakyat yang Tertindas (KRYT)*²⁸ atau kadang-kadang organisasi ini disebut sebagai *Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas (KRIYT)*²⁹, yang kemudian melakukan perlawanan terhadap pemerintah.

²⁵ Nugroho Notosusanto *ed*, *Pejuang dan Prajurit*, Sinar Harapan, Jakarta, 1985, hal. 61.

²⁶ Hassan Basry, *Kisah Gerilya Kalimantan, Jilid II*, Banjarmasin, tt.th.

²⁷ Tentang proses terbentuknya Batalyon 605, detail peristiwanya dapat dilihat dalam Kodam X/Lam, "Sedjarah Singkat Kodam X/Lam Wadja Sampai Kaputing", Semdam X/Lam, Banjarmasin, 1970, hal. 32-33. Lihat pula Dhany Justian, "Sedjarah Singkat Lahirnya Komado Daerah Militer X Lambung Mangkurat", Skripsi Sarjana Muda Pendidikan jurusan Sejarah Fkg Unlam, Banjarmasin, 1972, hal. 28-30.

²⁸ Hassan Basry, *loc.cit.* Ibnu Hadjar alias Haderi bin Umar alias Angli pada saat itu mempunyai pangkat Letnan Dua.

²⁹ C. Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, Grafiti Pers, Jakarta, 1983, hal. 229.

Sebagian besar bekas gerilyawan yang termasuk tentara Republik atas kehendak sendiri keluar secara besar-besaran karena terlalu kecilnya tunjangan yang hanya Rp. 3,- sehari, sedang penyadap karet pada waktu itu bisa memperoleh lebih banyak dari tunjangan tersebut. Mereka akhirnya bergabung mengikuti pasukan Ibnu Hadjar ke hutan dan melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu ketenteraman. Di Martapura, Banjarmasin, Rantau dan Kandangan dan sejumlah desersi dari tentara dan polisi menyeberang ke pihak gerilyawan beserta senjata, berarti menambah potensi militer pemberontak.³⁰

Tugas untuk menyelesaikan masalah ini diserahkan kepada orang yang paling memenuhi syarat ini ialah Hassan Basry bekas komandan gerilya. Pada tanggal 20 September 1950 dia disertai tugas sebagai pimpinan Komando Penyelesaian Hulu Sungai dan diberi bantuan militer berupa satuan Tentara Republik untuk membantu memulihkan keamanan. Hassan Basry mencari penyelesaian damai dan kemudian ia mengeluarkan perintah kepada gerilyawan untuk menyerah sebelum 10 Oktober 1950, sambil berusaha berhubungan dengan pimpinan gerilya untuk berusaha mengetahui kehendak mereka.³¹

Pimpinan gerilyawan menuntut supaya dipindahkannya pejabat-pejabat tertentu dalam pemerintahan sipil, tentara dan angkatan kepolisian. Pihak gerilyawan merasa, terlalu banyak jabatan yang penting diduduki oleh orang-orang dari luar Kalimantan, khususnya dari Jawa, dan orang-orang yang telah bekerjasama dengan Belanda. Tuntutan tersebut tidak dipenuhi oleh Pemerintah dan Tentara, sehingga berakhir dengan jalan buntu. Walaupun Hassan Basry menaruh simpati akan tuntutan mereka, namun diputuskan untuk melakukan tindakan militer terhadap mereka. Ibnu Hadjar membalas pembersihan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan meningkatkan kegiatannya yakni dengan menyerang kota Kandangan. Namun bantuan militer untuk Hulu Sungai yang baru saja berlangsung sebulan akhirnya ditarik pada bulan November 1950. Demikianlah pada 11 November 1950 Komando tersebut dibubarkan.³²

Tanggung jawab untuk ketenteraman dan ketertiban kemudian dipercayakan kepada Komando Petak Pertahanan Utara yang terdiri dari Hulu Sungai dan Barito. Hassan Basry akhirnya menyerahkan pimpinan pasukan Republik di Kalimantan Selatan yang disebut Brigade F yang dipegang oleh Mayor H.T. Sitompul.³³

Kemudian para gerilyawan diberi tawaran oleh Pemerintah Pusat untuk diberikan amnesti. Gerilyawan yang menyerahkan diri pertama-tama diperiksa daftar kejahatannya. Bila daftar itu bersih mereka diberi pilihan masuk angkatan bersenjata atau menjadi pegawai negeri atau kembali ke kehidupan sipil, diberi jangka waktu 5 Desember sampai 25 Januari 1951.³⁴

Zafry Zamzam yang ketika itu menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hulu Sungai diutus untuk berunding dengan Ibnu Hadjar dan dijelaskan syarat-syarat Pemerintah yang ditawarkan kepadanya. Akan tetapi Ibnu Hadjar mengulangi tuntutannya bahwa dia bersedia menghentikan perlawanan dan menyerah apabila pejabat-pejabat sipil dan militer tertentu diganti. Dan dia meminta waktu untuk menghimpun pengikut-pengikutnya dan membicarakan tawaran Pemerintah dengan mereka.³⁵

Pemerintah menolak tuntutan Ibnu Hadjar dan setelah batas penyerahan berakhir 25 Januari 1951 dimulai lagi operasi militer. Kandangan dinyatakan sebagai daerah militer dan pos-pos tentara didirikan di seluruh daerah. Pada 26 Februari 1951 terjadi pertempuran pertama

³⁰ C. Van Dijk, *ibid*, hal. 230.

³¹ C. Van Dijk, *loc.cit*.

³² C. Van Dijk, *ibid*, hal. 231.

³³ C. Van Dijk, *loc.cit*.

³⁴ C. Van Dijk, *ibid*, hal. 232.

³⁵ C. Van Dijk, *loc.cit*.

secara besar-besaran dengan suatu kelompok yang kira-kira berjumlah seratus gerilyawan yang berlangsung kira-kira tiga jam.³⁶

Dalam suasana tegang di Kalimantan Selatan kehadiran Hassan Basry, yang masih tinggi pengaruhnya dalam pandangan kaum gerilyawan dianggap terlalu berbahaya. Karena itu Kementerian Pertahanan memberikan beasiswa untuk belajar ke luar negeri. Pada Februari 1951 Hassan Basry meninggalkan Kalimantan, pertama-tama menuju Jakarta dan kemudian menuju Mesir. Keberangkatannya didorong oleh pihak penguasa, karena mereka khawatir akan pengaruhnya di kalangan prajurit yang kecewa dan pejuang gerilya yang didemobilisasikan dan menganggap sebagai bahaya keamanan. Walaupun Hassan Basry harus tinggal lebih dari empat tahun, perjalanannya tidak berhasil baik. Dia tidak diterima sebagai mahasiswa di Mesir dan harus melanjutkan pelajarannya pada tingkat yang lebih rendah, mengikuti kursus agama dan ilmu kemiliteran.³⁷

Keberangkatan Hassan Basry ke Mesir sampai Desember 1955 memperkuat kecurigaan, dimana kalangan penguasa militer berusaha menggerogoti bekas ALRI Divisi IV dengan menceraiberaikan anggotanya, selanjutnya hal ini mengukuhkan Ibnu Hadjar dan pengikutnya untuk terus melakukan perlawanan. Sejak awal tahun 1951 operasi militer dilaksanakan, keamanan umum sudah mulai terlihat, seperti berkurangnya jumlah perampokan dan pembunuhan atas orang-orang sipil. Akan tetapi di pihak lain operasi militer tersebut menimbulkan perasaan tidak senang. Tentara Republik tidak luwes sikapnya dalam memperlakukan orang-orang sipil dan tidak segan-segan membunuh dengan alasan mengejar musuh.³⁸

Akibat gerakan pengamanan tentara Republik di Kalimantan, kalangan daerah menyatakan, gerakan ini memberikan kesempatan bagi bekas serdadu KNIL dan kaum Federalis untuk membalas dendam terhadap ALRI Divisi IV. Pada akhir 1951 gerombolan-gerombolan KRYT terisolasi di Hulu Sungai, sementara Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat dianggap aman dan bebas dari gerilyawan atau penjahat. Namun KRYT selamat dari operasi pengamanan dan sesudah *Staat van Oorlog en Beleg* (S.O.B) atau Negara Dalam Keadaan Bahaya dicabut Juli 1952 berangsur-angsur mereka pulih dari pukulan-pukulan pertama.³⁹

Tanggung jawab mempertahankan ketertiban dan hukum diserahkan kepada Polisi dan Pemerintah Sipil. Gubernur Kalimantan dr. Moerdjani segera memulai serangkaian pembicaraan dengan anggota-anggota yang terpenting dari kalangan pamong praja dan angkatan kepolisian, alim ulama, wakil-wakil partai politik dan pemimpin masyarakat lainnya di Kalimantan Selatan. Gubernur mengajak kepada para alim ulama agar mengeluarkan fatwa kepada pengikut KRYT agar mau dan bersedia untuk berdamai dan mengemukakan "pintu untuk menyerah masih terbuka". Tetapi ketika berakhir sebulan, dr. Moerdjani yakin metode bujuk telah gagal dan satu-satunya cara yang ditempuh adalah melakukan aksi militer.⁴⁰

Pada awal 1953 pemberontak KRYT meningkatkan kegiatannya. Ibnu Hadjar sendiri beroperasi antara Kandangan dan Barabai. Markas besarnya di Gunung Hantu daerah sekitar desa Datar Laga dekat Barabai dan tidak jauh dari Kandangan. Tempat ini cukup ideal karena hanya dapat dimasuki dari satu jurusan dan dikelilingi padang rumput jadi musuh dengan mudah dapat dilihat. Dari jurusan manapun tempat ini dapat didekati melalui daerah pegunungan yang di

³⁶ C. Van Dijk, *loc.cit.*

³⁷ C. Van Dijk, *ibid.*, hal. 233.

³⁸ C. Van Dijk, *ibid.*, hal. 236.

³⁹ C. Van Dijk, *ibid.*, hal. 238.

⁴⁰ C. Van Dijk, *loc.cit.* Disamping upaya Gubernur dr. Mas Moerdjani mengatasi gangguan keamanan, peranan dr. Moerdjani yang patut diingat dalam pembangunan di Kalimantan Selatan antara lain idenya untuk menjadikan Banjarbaru sebagai ibukota Propinsi Kalimantan melalui program yang dikenal *Moerdjani Plan*, lihat Arthum Artha, *Album Pembangunan Kalimantan*, Yayasan Pendidikan Seni Budiman, Banjarmasin, 1975, hal. 22.

dalamnya terdapat banyak kubu KRYT. Dari markas besar ini Ibnu Hadjar dapat menjelajahi seluruh Hulu Sungai untuk bermusyawarah dengan para komandannya atau memimpin sendiri dan dia sering menyerbu ke daerah Kabupaten Kotabaru.⁴¹

Pada akhir Januari 1953 Presiden Soekarno berkunjung ke Kalimantan dalam rangka pemeriksaan daerah-daerah pusat kekacauan di Indonesia. Di Kalimantan, tempat-tempat yang dikunjungi antara lain Banjarmasin, Martapura, Kandangan, Negara, Barabai dan Amuntai. Yang merupakan masalah pokok selama kunjungan ke Kalimantan Selatan adalah kedudukan Islam dalam masyarakat dan masalah hangat apakah Indonesia akan menjadi negara Islam atau tidak, beserta masalah keamanan yang merupakan tema utama pidato-pidato Soekarno.⁴²

Presiden Soekarno dapat melihat dengan matanya sendiri akibat-akibat pemberontakan KRYT saat melakukan perjalanan dari Martapura ke Kandangan. Di daerah Kandangan beberapa pemberontak menghentikan sebuah truk tentara dan membakarnya tak lama sebelum kedatangan Soekarno dan kerangka yang hangus itu belum dapat dipindahkan ketika Soekarno lewat. Berulang-ulang Soekarno menekankan perlunya pemulihan keamanan dan persatuan. Di Kandangan dikemukakannya, “membunuh dan membakari rumah maupun mengacau ketertiban jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam”, dan ditambahkan, “kecuali kita dihancurkan oleh rakyat kita sendiri, Indonesia akan hidup terus”.⁴³

Banyak keributan ditimbulkan oleh ucapan-ucapan Soekarno mengenai masalah agama dan dasar ideologi negara. Bahwa sebagian golongan Muslim di Kalimantan Selatan menentang sikap Soekarno tentang peranan Islam dan penyebaran “marhaenisme” jelas terbukti ketika ia tiba di Hulu Sungai. Dalam pidato tanpa persiapan ketika dia melihat slogan-slogan yang diperlihatkan massa yang berbunyi : “*Harap jelaskan : Negara Nasional atau Negara Islam?*” Dan “*Bung Karno, apakah arti Marhaenisme?*.”⁴⁴

Bagian pidatonya yang terkenal itu, dan sangat menggusarkan kaum Muslim Indonesia adalah mengenai pendapat Soekarno tentang negara Islam, masalah yang sejak 1945 menarik perhatian politisi muslim maupun sekuler. Soekarno mengemukakan alasan, bila negara Islam dibentuk, banyak daerah yang penduduknya bukan Islam akan memisahkan diri dari Republik. Sebagai contoh daerah Maluku, Bali, Flores, Timur, Kepulauan Kai dan bagian-bagian Sulawesi dengan menambahkan Irian Barat mungkin tidak mau masuk Indoensia.⁴⁵

Pada mulanya pidato Soekarno yang disampaikan di sebuah pojok terpencil di Indonesia, tidak banyak menarik perhatian. Kemudian sesudah isinya diketahui lebih luas, timbul gelombang protes. Soekarno diserang bukan saja karena membela alasan konstitusional mendukung negara sekuler, tetapi juga karena tidak membedakan antara mereka yang ingin negara Islam dengan cara damai dan mereka yang berusaha mencapai dengan cara-cara kekerasan. Lagi pula, ada yang menuduhnya menyatakan dirinya menentang cita-cita Islam.⁴⁶

Masyumi Kalimantan Selatan adalah salah satu partai yang menyambutnya dengan gusar kata-kata Soekarno ini. Pidato itu mereka menyatakan sebagai propaganda berat sebelah, karena tidak dikemukakan pilihan alternatif suatu partai politik dengan ideologi Islam atau cita-cita mendirikan negara Islam. Juga terjadi reaksi-reaksi jengkel di Aceh, ketika Soekarno harus memberikan penjelasan isi pidatonya di Amuntai dalam kunjungannya di Sumatera Utara beberapa minggu kemudian dan di Jakarta ketika ada demonstrasi massa di Lapangan Banteng. Di Jakarta mendapat protes dari Masyumi oleh M. Isa Anshary yang mencap pidato itu “tidak demokratis,

⁴¹ C. Van Dijk, *ibid*, hal. 239.

⁴² C. Van Dijk, *ibid*, hal. 241.

⁴³ C. Van Dijk, *loc.cit*.

⁴⁴ C. Van Dijk, *ibid*, hal. 242.

⁴⁵ C. Van Dijk, *loc.cit*.

⁴⁶ C. Van Dijk, *loc.cit*.

tidak konstitusional dan bertentangan dengan ideologi Islam,” dan oleh organisasi-organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan GPII. Disamping itu Dachlan Ranuwihardjo ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengirim surat kepada Soekarno minta penjelasan.⁴⁷

Soekarno memberikan jawaban dalam suatu ceramah di Universitas Indonesia. Dijelaskannya, “ketika aku berdiri di Amuntai menghadapi pertanyaan: Bung Karno, kami inginkan penjelasan apakah kita harus mendirikan Negara Nasional atau Negara Islam,” ketika aku berdiri di sana ketika itu sebagai Presiden Republik Indonesia, sesaatpun tak ada terkandung maksud untuk melarang kaum Muslim memajukan atau mempropagandakan cita-cita Islam. Sebagai Presiden, dilanjutkannya dan karena itu harus mempertahankan konstitusi, dia harus menjawab. Indonesia adalah “Negara Nasional,” tetapi dengan demikian, tidaklah meremehkan hal warga negara untuk menyebarkan pandangan dan cita-citanya sendiri.⁴⁸

Kata-kata Soekarno, baik di Amuntai maupun di Jakarta, ketika dia selanjutnya menekankan bahwa Pancasila merupakan kompromi yang harus disetujui bila orang ingin menghindari perpecahan, mirip sekali dengan alasan-alasan yang dikemukakan tahun 1945, tetapi di dalamnya juga terkandung suatu unsur baru yang ketika itu luput dari perhatian, merupakan petunjuk akan adanya perasaan dan keresahan yang laten dari kaum politisi sekuler masa itu.⁴⁹

Tindakan-tindakan KRYT di Kalimantan semakin ganas. Aksi besar pertama dilancarkan selama kunjungan Soekarno, ketika satuan-satuan KRYT membakari kira-kira lima puluh rumah dalam suatu desa yang seluruh penduduknya ternyata melihat Soekarno ketika melewati daerah tersebut. Malam harinya rumah yang tersisa di desa yang sama dibakar, kali ini oleh tentara Republik sebagai pembalasan untuk dukungan yang diberikan orang desa ini kepada KRYT. Bulan berikutnya gerilyawan membakar lebih dari enam puluh buah rumah dan sebuah masjid di sebuah desa dekat Telaga Langsat. Pada bulan Maret 1953 dilaporkan adanya pemusatan kira-kira tiga ratus gerilyawan, suatu ukuran kekuatan yang tidak pernah pemberontak mampu menghimpunnya selama bertahun-tahun yang hanya beberapa kilometer dari Martapura.⁵⁰

September 1953 Karang Intan, Rantau dan Pengaron diserang, kemudian November 1953 Negara dan Kotabaru. Pada tanggal 12 Desember 1953, Kandangan diserang dari empat jurusan dan serangan tersebut langsung dipimpin oleh Ibnu Hadjar. Banjarmasin terancam dari serangan gerilyawan KRYT, dan Gubernur Moerdjani memulai serangkaian pembicaraan dengan wakil-wakil partai politik untuk membicarakan penyusupan. Partai-partai politik menggunakan kesempatan ini untuk mengeluarkan pernyataan, supaya pemerintah melakukan tindakan keras terhadap pemberontak.

Pemerintah terus melakukan operasi militer dan pada tahun 1954 berhasil ditangkap komandan gerilyawan di Amandit Selatan bernama Djohansyah, nama sebenarnya adalah Djahri Bin Bako. Para pemberontak juga mengganggu jalur transportasi angkutan, menghentikan mobil, bus dan bahkan ambulans yang mengacaukan lalu lintas di Kalimantan Selatan. Pada tahun 1955 aksi-aksi tersebut sering terjadi sehingga persatuan pengusaha bus Kalimantan mengancam untuk menanggungkan pelayanan bila pemerintah tidak mengambil langkah-langkah keamanan.⁵¹

c. Pemilihan Umum Pertama tahun 1955, hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Sampai tahun 1955 masyarakat Indonesia diliputi oleh suasana frustrasi dan kegelisahan sosial politik. Kepincangan di bidang politik sangat dirasakan, karena diliputi oleh suasana

⁴⁷ C. Van Dijk, *loc.cit.*

⁴⁸ C. Van Dijk, *ibid*, hal. 243.

⁴⁹ C. Van Dijk, *loc.cit.*

⁵⁰ C. Van Dijk, *ibid*, hal. 244.

⁵¹ C. Van Dijk, *ibid*, hal. 251.

demokrasi-parlementer model Belanda. Partai-partai politik tidak bekerja sebagai penyalur aspirasi rakyat, melainkan semata-mata memperjuangkan kepentingan golongan sendiri. Wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR (Parlemen) pada hakikatnya adalah wakil-wakil kelompok partai-partai yang saling bertentangan, hal ini disebabkan oleh partai-partai politik tidak mencerminkan dukungan yang nyata dari elektorat (para pemilih bersama-sama). Oleh karena itu masyarakat mulai menuntut segera diadakannya pemilihan umum, dan pemilihan umum diharapkan akan dapat mengakhiri suasana kegoyahan politik dan terbentuknya pemerintahan yang stabil dan kuat. Pembangunan yang menjadi program tiap-tiap kabinet dapat dilaksanakan dengan mantap.⁵²

Persiapan menuju pemilihan umum diadakan oleh Kabinet Ali Sastroamidjoyo I (PNI). Untuk pelaksanaannya dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada tanggal 29 September 1955 dan untuk konstituante pada tanggal 5 Desember 1955. Dengan adanya pengumuman itu partai-partai berkampanye. Sekalipun Kabinet Ali Sastroamidjoyo jatuh pada bulan Juli 1955, dan diganti oleh Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi), tanggal pelaksanaan pemilihan umum tidak berubah.⁵³

Akhirnya saat yang dinanti-nanti tiba. Pada tanggal 29 September 1955, 39 juta rakyat Indonesia menuju kotak suara untuk memberikan suara secara tertib dan berdisiplin. Jumlah rakyat yang memberikan suaranya dinilai sangat tinggi. Peninjau-peninjau luar negeri menilai bahwa bangsa Indonesia telah memperlihatkan taraf kematangan yang tinggi dalam melaksanakan pemilihan umum sebagai salah satu ungkapan demokrasi. Pemilihan umum yang telah berhasil dilaksanakan oleh bangsa Indonesia ternyata membawa beberapa hal yang baru. Empat partai muncul sebagai pemenang yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi), Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Untuk DPR, PNI mendapat 57 kursi, Masyumi 57 kursi, NU 45 kursi, PKI 39 kursi. Munculnya NU dan PKI sebagai partai besar merupakan suatu hal yang sebelumnya tidak terduga.⁵⁴

Untuk daerah Kalimantan Selatan hasil pemilihan umum dua partai yang mendapat suara terbanyak NU 380.874 suara dan Masyumi 255.766 suara sedangkan PNI 46.440 suara dan Partai Komunis Indonesia (PKI) mendapatkan 17.210.⁵⁵

Pada tanggal 1 Juli 1956 DPRDS dan DPDS Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dibubarkan, dan sementara belum terbentuknya DPRD dan DPD baru, maka pemerintahan daerah harus dijalankan oleh Kepala Daerah (Bupati). Kepala Daerah ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 10 tahun 1956.⁵⁶

Pembentukan DPRD dan DPD Peralihan :

- a. Dasar : Undang-undang Nomor 14 Tahun 1956
- b. Panitia Persiapan dibentuk di Propinsi dan Kabupaten / Kota Besar dengan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1956 yang tugasnya adalah : Mencatat jumlah suara yang didapat oleh masing-masing partai/organisasi pada waktu pemilihan umum anggota-anggota DPD (Parlemen) dan kemudian membagikan kursi-kursi DPRD kepada masing-masing partai/organisasi sesuai dengan banyaknya suara yang didapatnya.
- c. Jumlah kursi DPRD Propinsi dan Kabupaten / Kota Besar telah ditentukan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1956.⁵⁷

⁵² Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hal. 126.

⁵³ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *ibid*, hal. 127.

⁵⁴ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *loc.cit.*

⁵⁵ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *ibid*, hal.125.

⁵⁶ Kodam X/LM, Kodam X/LM Membangun, Banjarmasin, 1962, hal.570.

⁵⁷ Kodam X/LM, *ibid*, hal. 573.

Meskipun Propinsi Kalimantan Selatan sudah dibentuk menjadi daerah otonom tingkat propinsi dengan Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953 yang mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 1953, tapi karena terbentur sulitnya cara-cara pemilihan/pengangkatan anggota DPRD Propinsi, hingga selalu gagal, maka sampai saatnya Kalimantan dipecah menjadi tiga propinsi otonom.⁵⁸

Setelah satu tahun terbentuknya Propinsi Kalimantan dan setelah meninjau berbagai segi, rupanya pemerintah pusat berpendapat bahwa kini tibalah saatnya untuk meninjau kembali pembagian Kalimantan lebih lanjut dalam beberapa daerah otonom propinsi. Dan kabinet dalam rapatnya ke 33 tanggal 4 Oktober 1956 pada prinsipnya telah memutuskan untuk memekarkan Propinsi Kalimantan yang sekarang ini menjadi tiga propinsi otonom, sedangkan untuk memudahkan dibentuknya Propinsi Kalimantan Tengah kelak di kemudian hari, maka secara administratif Kalimantan Selatan segera sesudah berlakunya undang-undang tersebut akan dibagi menjadi dua keresidenan. Propinsi Kalimantan Tengah yang akan meliputi Kabupaten Barito, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Kotawaringin pembentukannya ditangguhkan selambat-lambatnya tiga tahun. Penangguhan ini mengingat akan keadaan uang negara, besarnya penghasilan dapat dipungut oleh propinsi sendiri di daerahnya masing-masing serta keadaan peralatan pemerintah pada umumnya dan khususnya kekurangan akan tenaga-tenaga teknis yang kapabel.⁵⁹

Sesudah melalui sidang-sidang antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah maka akhirnya disahkanlah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Kalimantan Selatan dan Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956) yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956. Tetapi di dalam Pasal 93 disebutkan bahwa Undang-undang ini mulai berlaku pada hari yang akan ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 52/10/50 tanggal 12 Desember 1956 ditetapkan bahwa Undang-undang tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1957. Pada tanggal 9 Januari 1957 dengan disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah dilakukan serah terima kekuasaan pemerintahan antara Gubernur Kalimantan (Milono) dengan Acting Gubernur Kalimantan Selatan Syarkawi, Acting Gubernur Kalimantan Barat A.R Afloes, Acting Gubernur Kalimantan Timur Bambang Pranoto di Banjarmasin. Pada kesempatan ini telah diresmikan pula oleh Menteri Dalam Negeri Kantor Gubernur Pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah di Banjarmasin.⁶⁰

Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tersebut di atas menyebutkan : "Daerah Otonom Propinsi Kalimantan sebagai dimaksud dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953 (Lembaran Negara 1953 Nomor 8) dibubarkan dan wilayahnya dibagi untuk sementara menjadi Daerah Tingkat I, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan nama dan batas-batas sebagai berikut :

1. Propinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Pontianak, yang wilayahnya meliputi Daerah-daerah Otonom Kabupaten Sambas, Pontianak, Ketapang, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu dan Kota Besar Pontianak, tersebut dalam Pasal 1 ad. 1 Nomor 9 sampai dengan 15 Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953 (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953);
2. Propinsi Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Banjarmasin, yang wilayahnya meliputi Daerah-daerah Otonom Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai

⁵⁸ Kodam X/LM, *loc.cit.*

⁵⁹ Alex A. Koroh, *op.cit.*, hal. 58.

⁶⁰ Alex A. Koroh, *ibid.*, hal. 59.

Utara, Barito, Kapuas, Kotawaringin, Kotabaru dan Kota Besar Banjarmasin, tersebut dalam Pasal 1 ad. 1 Nomor 1 sampai dengan 8 (delapan) Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953);

3. Propinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Samarinda yang wilayahnya meliputi Daerah-daerah Otonom Istimewa Kutai, Bulongan dan Berau, tersebut dalam Pasal 1 ad. II Nomor 1 sampai 3 Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953 (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953).⁶¹

Di dalam Pasal 3 Undang-undang tersebut ditetapkan jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah (DPD) masing-masing Propinsi sekurang-kurangnya lima orang, dengan ketentuan jumlah tersebut diluar Gubernur Kepala Daerah Propinsi yang menjabat Ketua Dewan Pemerinah Daerah Propinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Propinsi ini masing-masing terdiri dari tiga puluh orang. Kemudian dengan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, maka terjadi pengurangan wilayah pemerintahan atas Propinsi Kalimantan Selatan. Propinsi Kalimantan Selatan yang semula terdiri dari delapan daerah kabupaten berkurang menjadi empat kabupaten dan satu kota besar, karena Kapuas, Barito dan Kotawaringin dimasukkan ke dalam wilayah Propinsi Kalimantan Tengah.⁶²

Pada tanggal 10 Januari 1957 dilantiklah DPRD Perwakilan Kalimantan Selatan (termasuk Kalimantan Tengah) sebanyak tiga puluh orang terdiri dari :

Anggota DPRD :

1. NU : 14 anggota
2. Masyumi : 10 anggota
3. PNI : 2 anggota
4. PKI : 1 anggota
5. IPKI : 1 anggota
6. PPTI : 1 anggota
7. Persatuan Daya : 1 anggota

Anggota DPDP :

1. NU : 3 anggota
2. Masyumi : 2 anggota.⁶³

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1956, tentang Pembentukan DPRD dan DPD Peralihan, ditentukan antara lain bahwa DPRD Peralihan akan bubar, sesudah DPRD atas dasar pemilihan umum dilantik, tetapi selambat-lambatnya satu tahun. Pada tanggal 24 September 1956 dinyatakan mulai berlaku tentang undang-undang pemilihan anggota DPRD (dengan dasar pemilihan umum) berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1956).⁶⁴

Tetapi meskipun satu tahun berlaku ternyata DPRD atas dasar Undang-undang tersebut belum dapat dibentuk , maka oleh Pemerintah Pusat dengan Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1957 yang ditetapkan kemudian dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1958, ditentukanlah perpanjangan masa kerja DPRD Peralihan dengan ketentuan baru dapat bubar setelah DPRD atas dasar pemilihan umum dilantik sampai dengan 17 Juli 1957. Sementara DPRD Peralihan terus berjalan, keluarlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok

⁶¹ Alex A. Koroh, *ibid*, hal. 60.

⁶² Alex A. Koroh, *loc.cit*.

⁶³ Kodam X/LM, *op.cit*, hal. 572.

⁶⁴ Kodam X/LM, *ibid*, hal. 574.

Peraturan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 yang menjadi dasar pemerintahan daerah ke DPRD semula, karena undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 1957, sedangkan DPRD Peralihan di wilayah Kalimantan Selatan belum bubar maka dengan sendirinya DPRD Peralihan menjalankan wewenang berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957. Dan dengan dasar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 inilah nama-nama daerah berubah yakni :

1. Propinsi menjadi Daerah Swatantra Tingkat I
2. Kabupaten menjadi Daerah Swatantra Tingkat II
3. Kota Besar menjadi Kotapraja.⁶⁵

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1956 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1956 serta Petunjuk-petunjuk Menteri Dalam Negeri juga Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 25 Februari 1957 Nomor 13 Tahun 1957 (yang diubah beberapa kali), terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 20 Desember 1957 Nomor 23 Tahun 1957 diadakan serentak Pemilihan Umum DPRD Swatantra Tingkat I dan Tingkat II/ Kotapraja di seluruh Wilayah Kalimantan Selatan (tidak termasuk lagi Kalimantan Tengah), masing-masing daerah telah tersusun dan dilantik pada pertengahan 1958. Kemudian menyusullah penyempurnaan Pemerintahan Daerah yang karena belum dapat dipilih oleh rakyat, dipilih oleh masing-masing DPRD. Adapun dasar dari pemilihan Kepala Daerah tersebut di atas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1957 tentang Penerapan Umum Mengenai Syarat-syarat Kecakapan Pengetahuan dan Cara serta Pengesahan Kepala Daerah.⁶⁶

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Tahun 1953 menjadi Undang-undang maka Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan akhirnya mempunyai wilayah sebanyak tujuh Daerah Tingkat II / Kotapraja yang terdiri dari :

1. Daerah Kotapraja Banjarmasin dengan ibukotanya Banjarmasin
2. Daerah Tingkat II Banjar dengan ibukotanya Martapura
3. Daerah Tingkat II Barito Kuala dengan ibukotanya Marabahan
4. Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ibukotanya Kandangan
5. Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah ibukotanya Barabai
6. Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara ibukotanya Amuntai
7. Daerah Tingkat II Kotabaru dengan ibukotanya Kotabaru.⁶⁷

Sesuai dengan ketentuan ayat 2 pasal 52 Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959, maka Daerah Tingkat II (lama) yang dipecah menjadi dua Daerah Tingkat II baru seperti Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (lama), Daerah Tingkat II Banjar (lama) dan Daerah Tingkat II Kotabaru (lama) telah dibubarkan berturut-turut pada tanggal 10, 12 dan 28 Desember 1959, dan selama belum terbentuk pemerintahan baru bagi Daerah-daerah Tingkat II baru tersebut, haruslah diangkat / ditunjuk penguasa yang diberi wewenang menjalankan segala tugas hak dan kewajiban Pemerintah Daerah. Dengan demikian berdasarkan instruksi kawat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor PD 2/3/16 tanggal 25 November 1959, oleh Gubernur Kalimantan Selatan diangkatlah penguasa-penguasa dimaksud.⁶⁸

Antara lain kepala daerah tidak lagi hanya memegang kekuasaan urusan otonomi daerah saja tetapi juga urusan pemerintahan umum pusat, sedangkan sistem DPD (*kolegial*) diganti dengan Badan Pemerintah Harian sebagai Pembantu Kepala Daerah, juga DPRD (hasil pemilihan umum) para anggota-anggotanya harus dilantik/disumpah kembali dengan status baru. Untuk daerah

⁶⁵ Kodam X/LM, *loc.cit.*

⁶⁶ Kodam X/LM, *loc.cit.*

⁶⁷ Kodam X/LM, *ibid*, hal. 576.

⁶⁸ Kodam X/LM, *loc.cit.*

Kalimantan Selatan mulailah dilakukan Pemerintah Daerah dengan wajah baru sesuai dengan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 dengan terlebih dahulu dilantik / disumpah kembali :

1. DPRD Kotapraja Banjarmasin pada tanggal 29 Oktober 1959
2. DPRD Tingkat II Hulu Sungai Utara pada tanggal 29 Oktober 1959
3. DPRD Tingkat I Kalimantan Selatan pada tanggal 2 November 1959, sedangkan DPRD Tingkat II Hulu Sungai Selatan (lama), Banjar (lama) dan Tingkat II Kotabaru (lama) telah dibubarkan berturut-turut pada tanggal 10, 12 dan 28 Desember 1959 bersamaan dengan saat pelantikan Penguasa-penguasa Daerah Tingkat II yang telah diangkat. Kemudian dimulailah pencalonan/usul pengangkatan Kepala-kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk II Lampiran Instruksi MDNOD No. 1/PD tanggal 29 September 1959 jo Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1959 serta oleh Presiden dan MDNOD diangkatlah Kepala-kepala Daerah baru baik pada Tingkat I maupun pada Tingkat II di Kalimantan Selatan.⁶⁹

Gagalnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 secara konstitusional yaitu dengan melalui Konstituante dan rentetan peristiwa-peristiwa politik yang mencapai klimaksnya dalam bulan Juni 1959, akhirnya mendorong Presiden Soekarno untuk sampai kepada kesimpulan bahwa telah timbul : “keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan kesatuan Negara, Nusa dan Bangsa serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.” Demikianlah demi keselamatan negara pada hari Minggu 5 Juli 1959 jam 17.00 dalam suatu upacara resmi di Istana Merdeka diumumkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 dalam kerangka Demokrasi Terpimpin.⁷⁰

DPR hasil pemilihan umum (1955) yang telah bekerja selama 8 bulan dan menyatakan dirinya mau bekerja terus dalam rangka UUD 1945, pada tanggal 5 Maret 1960 dibubarkan oleh Presiden, karena persoalan Anggaran Belanja Negara, dan kemudian Presiden mengangkat anggota-anggota DPR baru yang disebut DPR Gotong Royong (DPR-GR).⁷¹

Pada pertengahan tahun 1960 telah disusun lembaga tertinggi negara baik yang disebutkan dalam UUD maupun tidak misalnya Dewan Pertimbangan Agung (DPA), DPR-GR, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Depernas, Front Nasional dan lain-lain. Semua keanggotaan lembaga tersebut disusun dengan komposisi gotong royong yang menurut Bung Karno adalah merupakan pengejawantahan dari Demokrasi Terpimpin.⁷²

Kalau dengan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan) dimulai retooling Pemerintahan Daerah di bidang eksekutif maka dengan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 (disempurnakan) disusul pula retooling Pemerintah Daerah dalam bidang legislatif sehingga DPRD-DPRD yang walaupun sudah dilantik/disumpah sesuai dengan ketentuan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan) haruslah dibubarkan dan dibentuk DPRD baru dengan nama DPRD-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong). Maka dimulailah penyusunan anggota-anggota DPRD-GR di Kalimantan Selatan sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Instruksi MDNOD Nomor I/DESD tanggal 10 Oktober 1960, yang selanjutnya dilengkapi dengan masing-masing seorang wakil ketua.⁷³

d. Lahirnya Kodam X Lambung Mangkurat

⁶⁹ Kodam X/LM, *ibid*, hal. 578.

⁷⁰ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *op.cit*, hal.103.

⁷¹ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *ibid*, hal.105.

⁷² Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *loc.cit*.

⁷³ Kodam X/LM, *op.cit*, hal. 578.

Dalam masa pemerintahan Kabinet Djuanda terjadilah pergolakan-pergolakan daerah. Hal ini merupakan kejadian-kejadian yang sangat penting dalam masa Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum. Motif dari pergolakan daerah ini adalah timbulnya perasaan tidak puas terhadap kebijaksanaan pemerintah pusat pada waktu itu, disamping itu daerah-daerah yang beranggapan bahwa pemerintah pusat dipengaruhi oleh golongan komunis.⁷⁴

Dengan dalih pemerintah pusat tidak memperhatikan pembangunan daerah, pada tanggal 10 Februari 1958, ketua Dewan Banteng Achmad Husien mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri dalam jangka waktu 5 x 24 jam. Pemerintah menjawab ultimatum tersebut dengan memecat Achmad Husien, Simbolon, Zulkifli Lubis dan Dahlan Djambek, yaitu para perwira yang duduk dalam pimpinan gerakan separatis. Menjawab keputusan Pemerintah Pusat tersebut, maka pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Husien memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan Mr. Sjafruddin Prawiranegara (Masyumi) sebagai Perdana Menteri.⁷⁵

PRRI ini kemudian mendapat dukungan dari Komando Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah di bawah pimpinan Letnan Kolonel Somba, yang memutuskan hubungan dengan Pemerintah Pusat tanggal 17 Februari 1958. Situasi di Sulawesi itu sebenarnya didahului dengan dikeluarkannya Piagam Perjuangan Semesta pada tanggal 2 Maret 1957 di Makassar. Untuk memadamkan pemberontakan ini maka Pemerintah menggunakan segala potensi Angkatan Perang dalam bentuk Operasi Gabungan, yang diberi nama Operasi 17 Agustus dan sebagai komandannya ditunjuk Kolonel Achmad Yani.⁷⁶

Di Kalimantan Selatan pun keadaannya tidak banyak berbeda, ada beberapa tokoh di daerah-daerah berusaha membangkitkan semacam Dewan Banjar atau Dewan Lambung Mangkurat, namun unsur separatisme daerah ini tidak sempat muncul, karena adanya penyaluran dan pengaruh tokoh-tokoh pejuang Kalimantan seperti Hassan Basry, Tjilik Riwut, dan Muljono. Pada tanggal 23 Desember 1957 mereka mengeluarkan ikrar bersama bahwa demi menjaga nama baik Corps Lambung Mangkurat tetap mempunyai tekad, sikap dan pendirian perjuangan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Proklamasi 17 Agustus 1945.⁷⁷

Di lain pihak, perasaan kedaerahan dan keagamaan yang tebal menimbulkan sikap anti komunis. Kemudian ditambah pula adanya pertentangan antara dua golongan keagamaan, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang mempengaruhi banyak sektor kehidupan dan sudah tentu hal ini ikut mempengaruhi situasi yang ada. Untuk membina kekompakan dan menempa kebulatan tekad kesetiaan rakyat kepada Pemerintah Pusat, maka oleh tokoh-tokoh daerah yang pernah tergabung dalam ALRI Divisi IV dan bekas Divisi Lambung Mangkurat, diadakan reuni di kota Kandangan tahun 1957 dan dicetuskan Kebulatan Tekad dalam bentuk Program yang antara lain isinya : Rencana pembentukan Corps Lambung Mangkurat, Pendirian Universitas Lambung Mangkurat, pendirian Bank, mengirim delegasi ke Jakarta untuk memelihara dan memulihkan kembali keutuhan Dwitunggal Kepemimpinan Negara Soekarno – Hatta, yang keadaannya sudah retak sejak tahun 1956. Dan segera setelah keputusan reuni tersebut, pendirian Corps Lambung Mangkurat dan Universitas Lambung Mangkurat mulai direalisasikan pada tahun 1958.⁷⁸

Sementara itu, keadaan pemerintahan di Kalimantan mengalami perubahan yakni dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara RI Nomor

⁷⁴ Sekretariat DPR-GR, *Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia*, Jakarta, 1970, hal. 202.

⁷⁵ Nugroho Notokusanto *ed*, *op.cit*, hal. 85.

⁷⁶ Dhany Justian, *op.cit*, hal. 42.

⁷⁷ Dhany Justian, *loc.cit*.

⁷⁸ Dhany Justian, *ibid*, hal. 43.

65 Tahun 1956) yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang tersebut maka berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 52/10/50 tanggal 12 Desember 1956, maka pada tanggal 9 Januari 1957 dilakukanlah serah terima kekuasaan pemerintahan antara Gubernur Kalimantan dengan *acting* Gubernur Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur⁷⁹

Dengan demikian maka daerah Kalimantan Selatan terhindar dari separatisme kedaerahan yang sedang hangat bergolak pada waktu itu. Pada tanggal 16 Januari 1957 diadakan pelantikan DPRD Peralihan Propinsi Kalimantan Selatan dimana tercermin semua perwakilan golongan politik yang terdiri atas : Nahdlatul Ulama, Masyumi, PNI, PKI, IPKI, PPTI, dan Persatuan Daya. Demikian juga dengan keadaan kabupaten-kabupaten, keadaan administratif sudah sempurna dan memudahkan pembentukan- pembentukan KODAM beserta aparat-aparatnya. Kemudian turunklah Penetapan KSAD Nomor PNTP. 01/1957, yang memutuskan bahwa untuk melaksanakan doktrin Perang Wilayah, maka organisasi yang dipandang baik untuk melaksanakannya adalah dalam bentuk organisasi KODAM-KODAM. Penetapan KSAD Nomor PNTP.01/1957 tanggal 26 November 1957 ini beserta perubahannya merupakan dasar dari pada pembentukan KODAM-KODAM yang disusulkan dengan Surat Keputusan KSAD Nomor KPTP. 185/111/1958 tanggal 29 Maret 1958 tentang Pembentukan KODAM-KODAM dan Pelaksanaannya di Daerah-daerah sesuai dengan Kepentingan Strategi Angkatan Perang.⁸⁰

Di Kalimantan Selatan baru direalisasikan pembentukannya, yang kemudian diberi nama Komando Daerah Militer X Lambung Mangkurat. Untuk keperluan itu Mayor Jenderal Gatot Soebroto pada tanggal 17 Juli 1958 atas nama KSAD telah melantik dan meresmikan KODAM X Lambung Mangkurat dan sekaligus melantik Hassan Basry sebagai Panglima.⁸¹

Untuk mengatasi kekurangan personel karena makin besarnya organisasi, dan luasnya bidang pekerjaan, dan untuk menyesuaikan organisasi dengan isi PNTP 0-5 tanggal 5 Agustus 1958, dan TAP 10-55 tanggal 14 April 1960 dari Kepala Staf Angkatan Darat, maka Panglima Daerah X/LAM mengeluarkan keputusan Nomor KPTS. 117/11 tanggal 7 September 1960, yang mengubah organ-organ teritorial yang ada menjadi Komando Distrik Militer (KODIM) sebagai teritorial tingkat kabupaten masing-masing :

1. Kodim 1001 dengan daerah hukum Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Kodim 1002 dengan daerah hukum Kabupaten Hulu Sungai Tengah
3. Kodim 1003 dengan daerah hukum Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4. Kodim 1004 dengan daerah hukum Kabupaten Kotabaru
5. Kodim 1005 dengan daerah hukum Kabupaten Barito Kuala
6. Kodim 1006 dengan daerah hukum Kabupaten Banjar
7. Kodim 1007 dengan daerah hukum Kotamadya Banjarmasin
8. Kodim 1008 dengan daerah hukum Kabupaten Pasir yang kemudian karena perubahan administratif dimasukkan ke dalam Propinsi Kalimantan Timur, maka Kodim 1008 dihapuskan.⁸²

Untuk mengkoordinir Distrik-Distrik Militer maka dibentuklah Komando-Komando Resort Militer (KOREM), yakni Korem 101 Banua Lima dengan kedudukan di Kandangan dan mengkoordinir Kodim 1001, Kodim 1002, Kodim 1003, dan Korem Banjar yang mengkoordinir Kodim 1004, Kodim 1005, Kodim 1006 dan Kodim 1007.⁸³

⁷⁹ Dhany Justian, *loc.cit.*

⁸⁰ Dhany Justian, *op.cit.*, hal. 44

⁸¹ Dhany Justian, *loc.cit.*

⁸² Dhany Justian, *ibid*, hal. 45.

⁸³ Dhany Justian, *loc.cit.*

B. KEHIDUPAN MASYARAKAT

1. Kehidupan Politik

Sebagaimana diketahui bahwa politik Indonesia mendapat kemajuan, setelah adanya pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia pada tanggal 29 Desember 1949.

Pengakuan kedaulatan tersebut sangat melegakan hati rakyat Indonesia, termasuk rakyat di Kalimantan Selatan, yang diterima oleh rakyat dengan sangat gembira sebagai tahap perjuangan yang meningkat lebih maju.

Pada tanggal 16 Januari 1950 terbentuklah Kabinet Halim dengan Perdana Menteri Dr. Abdul Halim yang dilantik pada tanggal 21 Januari 1950. Partai-partai yang turut serta sebagai pendukung Kabinet Halim tersebut adalah Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Indonesia Raya (PIR), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Buruh dan Barisan Tani Indonesia (BTI).

Program Kabinet Halim yang meneruskan perjuangan untuk mencapai negara kesatuan yang meliputi kepulauan Indonesia sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, mendapat dukungan sepenuhnya dari rakyat Kalimantan Selatan.

Partai-partai politik berusaha untuk mendemokratisasi kehidupan politik, antara lain mengusahakan sesegera mungkin berlakunya hak-hak bebas demokrasi, hak berserikat, hak bersidang dan menyatakan pendapat.

Telah dipikirkan adanya pemilihan untuk lembaga-lembaga DPR dan DPRD, yang hal itu berarti sebagai pencerminan perkembangan kehidupan politik.

Perkembangan politik telah mengubah ketatanegaraan dengan bubarnya Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 15 Agustus 1950 dan lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setelah RIS demisioner, maka UUD RIS diganti dengan UUD Sementara 1950 yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. Tentu saja perubahan ketatanegaraan dari RIS ke NKRI ini sangat berpengaruh bagi kehidupan politik di Indonesia termasuk bagi daerah Kalimantan Selatan.

Pada waktu itu juga terjadi penggantian Kabinet, dari Kabinet Halim ke Kabinet Natsir, yaitu pada tanggal 6 September 1950 sebagai kabinet yang parlementer. Dalam kabinet tersebut duduk para menteri dari partai politik masyumi, PIR, Demokrat, PSI, Parkindo, Katolik, Parindra dan PSII. Dari program Kabinet Natsir ini telah direncanakan penyelenggaraan pemilihan umum untuk lembaga konstituante dengan konsolidasi penyusunan pemerintah dan peralatan negara yang bulat.

Pada tanggal 27 September 1950, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerima negara Indonesia sebagai anggota PBB yang ke-60 dan pada tanggal 16 Oktober 1950, Drs. Mohammad Hatta ditetapkan sebagai Wakil Presiden, mendampingi Ir. Soekarno sebagai Presiden RI.

Kabinet Natsir yang hanya berusia 6 bulan itu terpaksa berganti dengan Kabinet Sukirman-Suwiryo pada tanggal 27 April 1951. Kabinet Sukirman-Suwiryo ini didukung oleh partai-partai politik yang menteri-menterinya terdiri dari partai politik Masyumi, PNI, PIR, PKRI, Partai Buruh, Parkindo, Demokrat dan Parindra.

Jatuhnya Kabinet Sukirman-Suwiryo, diganti dengan Kabinet Wilopo-Prawoto pada tanggal 3 April 1952. Selanjutnya Kabinet Wilopo-Prawoto ini berganti lagi dengan Kabinet Ali-Wongso Arifin pada tanggal 30 Juli 1952. Selanjutnya Kabinet Ali-Wongso Arifin pada tanggal 12 Agustus

1955 berganti lagi dengan Kabinet Ali-Arifin dengan partai-partai yang mendukung terdiri dari PNI, NU, Progressif, PRN, SKI, Partai Buruh, Parindra, dan Perti.⁸⁴

Itulah gambaran kabinet dengan pemerintahan yang parlementer, suatu kabinet yang mudah bubar dan saling berganti. Kondisi yang seperti ini sedikit banyaknya memberikan pengaruh terhadap kondisi politik di daerah, khususnya kehidupan dan perkembangan politik di Kalimantan Selatan.

Sistem parlementer ini menjurus ke arah kuatnya kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dan melemahkan kedudukan Presiden. Kondisi kehidupan politik yang multipartai, koalisi yang berganti-ganti dan liberalisme, seakan-akan menimbulkan segala kesulitan pada dasawarsa pertama dalam alam merdeka dan tanpa perang (1949-1959).

2. Kehidupan Sosial Ekonomi

Perang kemerdekaan selama lima tahun telah mengakibatkan perekonomian Indonesia dalam keadaan terpuruk, maka salah satu program Kabinet Hatta dalam masa RIS adalah usaha memperbaiki keadaan ekonomi rakyat. Dalam rangka ini, untuk menyehatkan keuangan negara dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat Nomor PU I tanggal 19 Maret 1950, dilakukan pengguntingan uang atau *sanering*. Berdasarkan peraturan tersebut uang kertas Rp. 5,- ke atas dinyatakan hanya bernilai separuh. Sebagai tindak lanjut pengguntingan uang tersebut dikeluarkan uang kertas baru berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pengeluaran Uang Kertas Baru.

Yang harus menjadi catatan tentang uang yang beredar di Kalimantan Selatan waktu itu yang diakui adalah uang NICA atau uang resmi yang dikeluarkan Pemerintahan Pendudukan Belanda. Berbeda dengan beberapa daerah di Jawa dan Sumatera yang dikuasai Pemerintah Republik Indonesia, di sana masih berlaku uang ORI (Oeang Republik Indonesia). Kurs kedua uang ini berbeda antara uang NICA dan ORI yaitu berbanding sepuluh. Dalam keputusan Menteri Keuangan RIS kedua uang itu disamakan, dengan demikian daerah yang memegang uang NICA seperti daerah Kalimantan Selatan dengan tidak langsung telah dirugikan sepuluh kali. Maka berlakulah hukum ekonomi yang terbalik, uang sedikit sedangkan barang tetap mahal. Akibatnya menimbulkan kemiskinan dan kemelaratan bagi sebagian besar rakyat di Kalimantan Selatan.

Sewaktu Perang Kemerdekaan atau semasa ALRI Divisi IV di di desa-desa pedalaman Kalimantan Selatan oleh para pejuang didirikanlah koperasi-koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat. Menyusun perekonomian dengan sistem koperasi oleh ALRI Divisi IV adalah merupakan organisasi pembelian dan organisasi penjualan dari keperluan dan produksi desa. Koperasi ini berpusat di Banjarmasin dan dipimpin oleh M. Pongoh, Direktur NV. Kinibalu. Koperasi-koperasi di luar kota bertambah maju karena mempunyai sumber pembelian yang baik dan saluran penjualan yang baik pula. Di kota Banjarmasin sendiri menjadi anggota koperasi berarti jaminan distribusi beras yang datang dari luar kota.

Akhirnya, tidak mempunyai anggota koperasi disejajarkan dengan yang tidak menyukai perjuangan. Hingga timbullah koperasi di tiap-tiap kampung di kota. Sebagai puncak gerakan koperasi ini diadakanlah larangan memasukkan dan mengeluarkan barang-barang dari kota kalau bukan oleh koperasi, dan dianjurkan pula untuk menerima barang-barang distribusi Belanda. Untuk kepentingan selanjutnya maka dengan dipelopori oleh Mr. Burhanuddin dan M. Pongoh didirikan sebuah Bank dengan nama Bank Dagang Indonesia NV. Sedang penyelenggaraan ekspor

⁸⁴ Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, hal. 165-167.

terutama karet ditugaskan kepada M. Pongoh dan Djantera. Sayangnya koperasi perjuangan ini oleh Pemerintahan RIS telah dibubarkan semuanya.

Pada tahun 1950 saja terdapat lebih 800 buah koperasi rumah asap (karet) di daerah Hulu Sungai dan 150 buah koperasi rumah asap (karet) di Kabupaten Banjar. Sayangnya sesudah tahun 1951 ketika keamanan tidak mengizinkan banyak rumah asap yang ditutup.

Sebagian besar rakyat di Kalimantan Selatan tergantung hidupnya pada penghasilan karet. Karet telah mulai ditanami di Kalimantan Selatan pada tahun 1911, kemudian pada tahun 1915 – 1920 penanaman karet secara besar-besaran. Perkembangan harga mencapai f 300,- tiap kati atau f 500,- tiap 100 kg. Harga makin meloncat pada tahun 1925 – 1926 yang merupakan zaman keemasan bagi Kalimantan Selatan.

Menjelang tahun 1951 pohon-pohon karet tersebut sudah dianggap rusak, sehingga produk karet sangat menurun. Ekspor karet dari pelabuhan Banjarmasin pada tahun 1950 adalah 75,047 ton, termasuk diantaranya 46,424 ton getah rakyat, sehingga persentase produksi karet rakyat mencapai 62 % dari seluruh karet yang diekspor.

Pertanian di Kalimantan Selatan juga di Kalimantan Tengah yang potensial dan sangat luas adalah disebut persawahan pasang surut. Terletak di pinggir aliran sungai di sekitar Banjarmasin, sepanjang aliran sungai Barito, sungai Martapura sampai sungai Bahan (sungai Negara). Daerah ini tanah “gambut” mula-mula tidak begitu baik dipergunakan untuk persawahan padi karena tanahnya mengandung asam. Tetapi setelah dibuatkan kanal atau anjir, dari tepian sungai Barito ke sungai Kapuas Kalimantan Tengah maka mulailah bisa dipergunakan untuk persawahan padi. Karena dengan adanya kanal atau anjir itu air bisa mengalir ke sungai dan membawa zat asam keluar. Kanal atau anjir atau terusan yang sekarang terkenal adalah Anjir Tamban dan Anjir Serapat, yang dibuat sebelum Perang Dunia II. Di daerah anjir tersebut dikenal penghasil padi di Kalimantan Selatan. Penghasil padi lainnya adalah daerah Gambut yaitu daerah antara kota Banjarmasin dan Martapura.

Dikenal pula persawahan tadah hujan di daerah dataran tinggi, sawah tegalan di daerah pegunungan dan lain-lain. Persawahan “pasang surut” merupakan persawahan padi yang berumur panjang yaitu 10 sampai 11 bulan dan panen di waktu musim kemarau. Daerah persawahan pasang surut baik pula ditanami kelapa, ubi kayu, rambutan, dan pohon buah-buahan lainnya seperti ketapi, kedondong dan nenas.

Di tahun 1950/1951 hasil padi sangat merosot sekali, sehingga Kalimantan Selatan masih kekurangan beras berjumlah 89.000 ton. Dan kekurangan ini tiap tahun bertambah akibat gangguan keamanan. Kekurangan ini tiap tahunnya sampai tahun 1959 bertambah rata-rata 10%.

Persawahan berpindah-pindah yang dilakukan masyarakat di daerah pegunungan dengan cara membakar hutan. Pada musim kemarau kayu-kayu ditebang dan kemudian dibakar. Di areal bekas kebakaran itulah kemudian dibuat sawah tegalan. Sebenarnya cara bersawah seperti ini sudah sejak lama dilakukan, dan jika tak terkendali dapat mengakibatkan hutan gundul dan bahaya banjir.

Industri kayu yang agak besar di tahun 1949/1950 terdapat di Sampit yaitu *Bruynzeel Dayak Houtbedrijven* merupakan usaha patungan antara Indonesia-Belanda. Di Kalimantan Selatan perusahaan penggergajian kayu diusahakan oleh *Java Hout* yang semula modal Belanda namun pada tahun 1949/1950 seluruhnya dinasionalisasi ke tangan Indonesia dan waktu itu *Java Hout* menghasilkan rata-rata 100.000 meter kubik.

Perusahaan kayu yang dikerjakan oleh rakyat secara manual, kecil-kecilan dan bersifat turun-temurun disebut “wantilan”. Di kampung-kampung yang terdapat di tepi sungai Barito seperti di kampung Sungai Saluang banyak berdiri “wantilan-wantilan” rakyat yang menghasilkan kayu gergajian. Bahan mentah kayu dibeli dari pedalaman Barito, sedangkan hasil kayu gergajian

dibeli pedagang-pedagang Banjar yang punya “galangan” di Surabaya dan seterusnya dipasarkan di seluruh Jawa.

Selain kayu hutan Kalimantan juga menghasilkan rotan yang merupakan bahan kerajinan rumah tangga (*home industry*) seperti tikar (*lampit*), keranjang, dan sebagainya. Di Margasari terkenal dengan kerajinan tangan dari rotan, tikar purun dan kopiah dari akar jangang. Di tahun 1950 di Margasari oleh Husin Nafarin berdiri Persatuan Pengrajin Anyaman Margasari (PP. AMAR) yang bertujuan untuk peningkatan kualitas dan perluasan pemasaran karena mengingat waktu itu Indonesia sudah merdeka. Dan dengan demikian diharapkan anyaman Margasari akan dapat menjadi salah satu sumber mata pencaharian rakyat.

Perluasan pemasaran kerajinan Margasari ini di kemudian hari terus dilakukan dengan mengikuti pameran-pameran yang diadakan di Banjarmasin, Jakarta dan malahan dengan dipimpin oleh M. Suriansyah Ideham pernah diikutsertakan pada suatu pameran di Berlin (Jerman) yang cukup mendapatkan perhatian.

Industri intan Martapura sangat terkenal sejak dahulu dan daerah Martapura Kabupaten Banjar merupakan satu-satunya daerah penghasil intan di Kalimantan bahkan di Indonesia. Tahun 1950 tegasnya sesudah pengakuan kedaulatan, di Martapura terdapat pabrik penggosokan intan yang hampir semuanya milik orang Banjar Martapura. Intan yang telah digosok menghasilkan berlian, dan berlian merupakan sumber penghidupan rakyat yang paling menjanjikan baik sebagai pendulang, penggosok intan dan pedagang intan atau berlian. Intan berlian sebagai perhiasan sangat digandrungi terutama oleh kaum hawa. Zaman pendudukan Jepang ada gerakan pengumpulan intan berlian katanya untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya.

Cara pendulangan intan biasa dikerjakan dengan cara tradisional, dengan syarat-syarat tertentu dan beberapa pantangan sangat ditaati oleh pendulang intan. Untuk mengetahui lokasi intan atau lokasi pendulangan, orang selalu minta petunjuk seorang “alim” yang mengetahui dimana intan berada. Lubang yang digali untuk mencari intan dan dalamnya penggalian tergantung pada jenis batu yang ditemukan sebagai petunjuk bagi adanya tempat intan. Apabila jenis batu tersebut tidak ditemukan lagi orang menghentikan pekerjaannya.

Lubang yang hanya sekitar 1 ½ meter disebut *luang surut*, sedangkan yang lebih dari 10 meter disebut *luang dalam*. Alat yang dipergunakan ialah linggis, keranjang pengangkat batu dan *linggangan*. Linggangan ini berbentuk seperti topi besar yang terbuat dari kayu bundar yang garis tengahnya 1 sampai 1½ meter dengan dasar agak dalam. Intan Martapura yang paling baik, yang disebut nomor satu, ialah yang bercahaya air merah jambu, nomor dua air laut, nomor tiga putih jernih, nomor empat cahaya air hujan, nomor lima cahaya kuning dan nomor enam cahaya air minyak. Perbandingan harga intan tercatat pada tahun 1950-an, intan cahaya air merah jambu sebesar satu karat harganya Rp 5.000 sampai Rp 6.000, warna cahaya air laut sebesar satu karat harganya Rp 1.000 sebesar satu karat. Harga intan setiap tahun semakin naik sesuai dengan inflasi uang. Pada tahun 1959 harga intan nomor satu yang berwarna cahaya merah jambu sudah mencapai Rp. 15.000 per karat artinya naik tiga kali dibanding tahun 1950-an.

Aspek sosial ekonomi memiliki idealisme yang menginginkan adanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Hak itu disinggung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”.

Pelaksanaan pembangunan, di samping meningkatkan pendapatan nasional, sekaligus harus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat, sesuai dengan rasa keadilan, dalam rangka diwujudkannya asas keadilan sosial, sehingga di satu pihak pembangunan itu tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi, melainkan sekaligus mencegah

melebarnya jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin dengan menumbuhkan asas hidup sederhana, bukan saja untuk mencapai masyarakat yang makmur, melainkan juga untuk mewujudkan masyarakat yang adil.

Salah satu program pemerintah dalam usaha yang bermuara pada tujuan kemakmuran adalah aspek transmigrasi yang pelaksanaannya terkait dengan pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, karena pulau Kalimantan memberikan kemungkinan untuk ditransmigrasikannya penduduk di Jawa dan Bali.

Sebagaimana dimaklumi bahwa transmigrasi ditujukan untuk meningkatkan penyebaran penduduk dan tenaga kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi baru, terutama daerah pertanian, dalam rangka pembangunan daerah, khususnya di luar Jawa dan Bali, yang dapat menjamin peningkatan taraf hidup para transmigran dan masyarakat di sekitarnya. Pelaksanaan transmigrasi sekaligus merupakan usaha penataan kembali penggunaan, pengusahaan dan pemilihan tanah, baik di daerah asal maupun di daerah tujuan.

Kebijaksanaan transmigrasi mempunyai maksud berbeda-beda antara lain : a) Mengurangi tekanan penduduk di Jawa dengan sekaligus meningkatkan jumlah penduduk di daerah luar Jawa yang agak kosong; b) Untuk meningkatkan pembangunan daerah tempat para transmigran dipindahkan; c) Untuk membantu kaum miskin dan korban bencana alam; d) Untuk melakukan ekstensifikasi pertanian di luar Jawa untuk mencapai swasembada pangan; dan e) Untuk meningkatkan ketahanan nasional di daerah-daerah rawan.⁸⁵

Dalam kaitannya dengan kondisi dan situasi para transmigran, dengan lahir dan tumbangny kabinet yang saling berganti secara cepat, jelas sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, karena pada saat program pemerintah belum berjalan secara mantap ternyata sudah harus berubah lagi.

Gejolak sosial ekonomi yang kurang stabil, berpengaruh terhadap kehidupan rakyat, khususnya di Kalimantan Selatan sebagaimana tergambar pada roda perekonomian yang tidak mantap, antara lain persediaan beras untuk kebutuhan rakyat selalu terdengar kurang. Transportasi darat masih banyak yang mempergunakan gerobak sapi untuk membawa barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari, karena jumlah mobil masih terlalu sedikit dan kegiatan rakyat dalam pulang pergi mempergunakan sepeda roda dua saja.. Sementara di sungai-sungai mempergunakan perahu (jukung) dari dan ke Banjarmasin dari Hulu Sungai.

Pada waktu itu dikenalnya adanya jam tangan merk Omega made in Japan yang secara terbatas beredar di pasar-pasar Kalimantan Selatan. Merk jam tangan impor dari negeri Sakura itu dijadikan isu oleh para pegawai negeri sipil, termasuk guru-guru untuk membolos atau sebagian waktu untuk keluar kantornya dengan istilah Omega dari singkatan "Oesaha Menambah gaji", mencari objek entah kemana berusaha menambah penghasilan luar, karena jumlah gaji tidak mencukupi.

Hal itu sebagai gambaran karena latar belakang ekonomi rakyat yang kurang stabil. Keadaan itu dipacu lagi dengan melonjaknya harga barang-barang kebutuhan sehari-hari yang merangkak semakin naik. Sementara itu aspek kriminalitas bukan cenderung menurun, sebagai akibat dari sulitnya tingkat kehidupan rakyat terutama rakyat kecil.

3. Pendidikan dan Seni Budaya

Pada tahun 1950-an di Banjarmasin hanya ada beberapa sekolah lanjutan menengah,⁶⁷ seperti :

⁸⁵ Heufen Sy *et.al*, *Ensiklopedi Populer Politik Perkembangan Pancasila*, Yayasan Citraloka Caraka, Jakarta, 1988, hal. 274.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan M. Suriansyah Ideham

1. Sebuah SMP di jalan Loji, sekarang ditempati kediaman dinas Gubernur
2. Sebuah Sekolah Guru B (SGB) Putera di jalan Pacinan.⁶⁸ SGB ini setara dengan Normaalschool.
3. Sebuah sekolah SGB Puteri di jalan Kalimantan.⁶⁹
4. Sebuah sekolah Sekolah Teknik Pertama Negeri (STPN) di Kroesenlaan.⁷⁰ STPN ini setara Ambachtschool.
5. Sekolah swasta Sekolah Menengah Islam Pertama (SMIP) di jalan Kalimantan.⁷¹
6. Sebuah Sekolah Menengah Tinggi (SMT) persiapan pendidikan di perguruan tinggi, dikelola oleh Yayasan Balai Pendidikan yang dibentuk kaum Republikein di jalan Kalimantan.⁷²
7. Sebuah Kweekschool Nieuwe Stijl pemerintah pendudukan Belanda (waktu NICA), kemudian dilanjutkan menjadi SGA di Jalan Kalimantan.⁷³

Di daerah Hulu Sungai di Kandangan ada satu SMP dan satu SGB (pindahan dari Barabai), satu SMP di Barabai dan satu SMP di Amuntai dan ada beberapa buah sekolah swasta.

Organisasi IPI (Ikatan Pelajar Indonesia) didirikan sebagai alat perjuangan sejak tahun 1949 oleh pelajar-pelajar Kweekschool Banjarmasin dengan pelopor-pelopornya Abdurrachman Abbas, Hasani dan M. Suriansyah Ideham. Organisasi IPI ini sering ikut berpolitik praktis sehingga tidak jarang mereka terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian Belanda.

Pada tahun 1949 sewaktu hangat-hangat perjuangan bersenjata banyak pelajar yang meninggalkan sekolah lari ke pedalaman ikut bergerilya melawan Belanda. Normaalschool Barabai ada 60 orang sekaligus meninggalkan sekolah diantaranya ada 5 orang perempuan yang masuk pedalaman. Oleh pimpinan ALRI Divisi IV Hassan Basry untuk menampung mereka didirikan Akademi Militer di Haruyan Barabai.

Setelah pembentukan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) tanggal 27 Januari 1950 yang kemudian diatur dengan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950. Pasal Undang-undang tersebut memuat, "bahwa yang diterima sebagai anggota APRIS terdiri dari bekas anggota TNI dan bekas anggota KNIL serta perseorangan warga negara RIS".

Kota Banjarmasin yang tadinya hanya terdapat tentara Belanda dan anggota KNIL sekarang dimasuki oleh bekas anggota ALRI Divisi IV yang diterima di APRIS yang jumlahnya ribuan orang. Dan kemudian berangsur-angsur didatangkan pula anggota-anggota APRIS yang berasal dari TNI dari Jawa. Maka kota Banjarmasin menjadi penuh sesak dengan anggota tentara. Asrama-asrama tentara sudah penuh tidak dapat menampung, maka disewalah penginapan-penginapan, losmen-losmen dan hotel-hotel. Itupun tidak mencukupi, akhirnya dipakailah gedung-gedung sekolah di kota Banjarmasin. Diantaranya yang menjadi korban adalah beberapa buah gedung SR (Sekolah Rakyat = SD), STPN (Sekolah Teknik Pertama Negeri) dan Normaalschool Putera (SGB). Yang paling parah dan paling memprihatinkan adalah Normaalschool Putera di jalan Pacinan Banjarmasin. Normaalschool Putera di jalan Pacinan mempunyai 3 gedung, satu gedung bekas HCS (*Hollands Chinese School*), satu bangunan darurat berupa barak terbuat dari tiang/tongkat kayu galam, dinding papan tipis dan atap dari daun rumbia, dan satu gedung terdiri tiga kelas. Yang diambil TNI dari Jawa adalah gedung permanen bekas HCS yang terdiri 9 kelas dan 1 kantor. Kamar mandi dan kakus terbuat dari batang bundar terapung di kali Martapura. Disanalah sama-sama antara pelajar dan anggota TNI dan isteri-isteri mereka mandi, buang air dan mencuci pakaian

⁶⁸ Sekarang Jalan Pierre Tendean

⁶⁹ Sekarang Jalan S. Parman; Kompleks Perkantoran Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan selatan

⁷⁰ Sekarang Jalan Nagasari

⁷¹ Sekarang jalan S. Parman; kompleks Perguruan Muhammadiyah

⁷² Sekarang jalan S. Parman; kompleks Perguruan Kristen

⁷³ Sekarang jalan S. Parman; kompleks Perkantoran Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan

sehingga sangat padat, dan timbullah hal-hal yang kurang baik, berebut jamban yang hanya ada empat buah, karena cemburu dan sebagainya sehingga timbul perkelahian.

Pada bulan Mei 1951 asrama pelajar Normaal School dikepung oleh TNI lengkap dengan senjata, untung saja tidak terjadi perkelahian memakan korban. Karena pelajar kelas 4 adalah sebagian juga bekas pejuang ALRI Divisi IV, maka mereka memberi kabar kepada kawan-kawannya yang masih jadi tentara di luar, maka hampirlah terjadi perang saudara. Untung oleh pihak berwajib dapat didamaikan. Namun pihak pelajar sendiri tidak tinggal diam, mereka mengalang solidaritas seluruh pelajar di kota Banjarmasin. Mereka turun ke jalan mengadakan demo menuntut dikembalikannya gedung-gedung sekolah yang diambil oleh tentara. Demonstrasi ini berminggu-minggu, mereka mogok sekolah. Maka harus dicatat inilah “demo pelajar” yang pertama kali dalam sejarah Tanah Banjar. Gubernur dr. Murdjani, Panglima Letkol Sukanda Bratamenggala, Kepala Jawatan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PD dan K) R.A Djarkasi, Direktur Normaal School, dan pemimpin pelajar Hamlan Marga dari SGB, Rahmatiah Sedar dari SMP, Bahri Aspan dari SMIP, diadakan perundingan yang menghasilkan sebuah keputusan bersama sebagai berikut :

1. Panglima tentara berjanji akan memindahkan semua anggota tentara yang terlibat perkelahian/pengepungan asrama pelajar Normaal School ke tempat atau ke kota lain. Kalau ada anggota tentara yang mengganggu pelajar supaya dilaporkan dan akan ditindak oleh Panglima;
2. Gubernur meminta kepada Pimpinan Pelajar untuk segera menghentikan pemogokan dan demo serta kembali belajar seperti biasa. Gubernur berjanji akan membangun sekolah-sekolah karena memang pendidikan penting dalam mengisi kemerdekaan.

Setelah Gubernur dr. Murdjani berhenti dan diganti oleh Milono, cita-cita pembangunan gedung-gedung sekolah tetap menjadi prioritas pertama pembangunan di Kalimantan Selatan. Tahun 1953/1954 dimulai secara bertahap pembangunan gedung sekolah yang sekarang kita kenal dengan Kampung Pelajar “Mulawarman”. Nama “Mulawarman” diberikan oleh Menteri P dan K, Mr. Muhammad Yamin diambil dari nama Raja Kutai Lama yaitu Raja Mulawarman seorang raja kerajaan tertua di Indonesia (Nusantara) ini. Pertama berdiri Kampung Pelajar Mulawarman menjadi kebanggaan orang Banjar dan mendapat perhatian sampai ke luar negeri. Di sana ada “walikota” dan “DPR” sendiri, ada RT-RT-nya yang terdiri dari para pelajar. Gubernur Milono diberi gelar oleh masyarakat Banjar sebagai “Bapak Pendidikan Kalimantan Selatan”.

Eksistensi pendidikan di Kalimantan Selatan yang ada sekitar tahun 1950 dan tahun-tahun berikutnya masih sangat terbatas, paling tinggi sekolah lanjutan tingkat atas milik negeri atau pemerintah.

KEADAAN SEKOLAH DI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 1955 – 1959

Jenis Sekolah	1955	1956	1957	1958	1959
SMP	8	9	10	17	18
SGB	10	10	10	10	10
SMEP	3	4	4	5	5
SKP	3	4	4	4	4
SGA	1	1	1	2	2
SGTK	-	1	1	1	1

Sumber : Kodam X/ LM Membangun, 1962.

Khususnya perkembangan Sekolah Guru (SGB) pada tahun 1955 terdapat sebanyak 10 buah sampai pada tahun 1961 dengan jumlah murid sebanyak 2.733 dan guru sebanyak 155 orang

(1955), murid sebanyak 2.9861 dan guru sebanyak 121 orang (1956), murid sebanyak 2.861 dan guru sebanyak 142 (1957), murid sebanyak 2.593 dan guru 137 (1958), murid sebanyak 2.090 dan guru 132 (1959), murid sebanyak 2.349 dan guru 128 (1960), murid sebanyak 2.105 dan guru 118 (1961) dan pada tahun 1962 seluruh pendidikan SGB di Kalimantan Selatan ditutup yang kemudian diintegrasikan menjadi SMP (Sekolah Menengah Pertama).

KEADAAN SEKOLAH DASAR TAHUN 1950 – 1959

Tahun	Sekolah	Murid	Guru
1950	605	086.973	2.427
1951	625	087.391	2.500
1952	647	088.525	2.548
1953	655	089.327	2.564
1954	661	095.436	2.586
1955	667	097.425	2.599
1956	683	099.505	2.768
1957	687	106.631	3.301
1958	723	107.624	3.570
1959	796	122.702	3.653

Sumber : Kodam X/ LM Membangun, 1962.

Berdasarkan catatan yang ada pada Kantor Pembinaan Kebudayaan Kalimantan Selatan di daerah ini terdapat beratus-ratus organisasi yang bergerak di bidang seni budaya seperti seni sastra, seni drama, seni tari, seni lukis, seni musik dan pertunjukan rakyat berupa hiburan.

Organisasi seni sastra tercatat Ikatan Pencipta Seni Sastra Banjarmasin, Untaian Mutiara RRI Banjarmasin, Ikatan Penggemar Deklamasi. Organisasi seni lukis terdapat Taman Lukisan Permai Banjarmasin, Angkatan Pelukis Muda Banjarmasin, Taman Pelukis Muda Banjarmasin. Sementara organisasi seni tari tercatat banyak di Kalimantan Selatan seperti berikut :

**KEADAAN ORGANISASI TARI DAERAH
KALIMANTAN SELATAN**

Daerah	Organisasi	Penari	Penabuh
Banjarmasin	025	040	027
Barito Kuala	005	008	007
Kota Baru	005	010	-
Tanah Laut	018	030	040
Tapin	028	038	024
Hulu Sungai Selatan	007	033	026
Hulu Sungai Tengah	010	031	027
Hulu Sungai Utara	007	028	032
Tabalong	015	033	030
Banjar	003	025	006
Jumlah	128	276	229

Jenis tari-tarian yang hidup dan berkembang di Kalimantan Selatan dalam kurun waktu antara tahun 1950 sampai dengan 1959, tercatat antara lain sebagai berikut :

- 1) Baksa Kelana
- 2) Baksa Panah
- 3) Baksa Kambang

- 4) Baksa Topeng Panji
- 5) Baksa Rajawali
- 6) Baksa Panimba Sagara
- 7) Tari Radap Rahayu
- 8) Tari Burung Mantuk
- 9) Tari Damarwulan
- 10) Tari Wayang Gong
- 11) Tari Ahoi
- 12) Tari Tirik
- 13) Tari Tirik Lalan
- 14) Tari Japin
- 15) Tari Tarbang
- 16) Tari Rantauan
- 17) Tari Mandung
- 18) Tari Sinoman Hadrah
- 19) Tari Mamanda
- 20) Tari Japin Anak Tiga
- 21) Tari Kurung-Kurung
- 22) Tari Gintur
- 23) Tari Balian Bawo
- 24) Tari Balian Dadas
- 25) Tari Balian Sawa
- 26) Tari Babangsai
- 27) Tari Maya Sari
- 28) Tari Sukmaraga Padmaraga
- 29) Tari Kunang-Kunang
- 30) Tari Baradap
- 31) Tari Dayang Maratus
- 32) Tari Tameng Kalewang
- 33) Tari Selendang
- 34) Tari Kuda Gepang
- 35) Tari Kambang Goyang.⁸⁶

Kesenian rakyat yang merupakan pertunjukan tradisional hidup di tengah-tengah masyarakat Banjar di pedesaan kurang dapat berkembang maju, namun juga tidak dapat dikatakan mati, tetapi hidup dalam kondisi eksistensi yang sederhana, seperti kesenian mamanda, madihin dan wayang kulit. Sifatnya yang tradisional tetap digemari oleh rakyat di pedesaan sebagai tontonan hiburan yang murah dan sederhana.

4. Kehidupan Beragama

Kehidupan beragama dianggap sebagai suatu ciri khas bangsa Indonesia, maka peranan beragama, yang dapat bersifat mendukung atau menghambat, kritis atau acuh tak acuh, inspiratif atau negatif itu, harus diperhatikan dalam pembangunan.

Maksudnya, bukan hanya diperhitungkan untung ruginya, melainkan harus diperhatikan sebagai faktor pembangunan yang tidak boleh tidak ada untuk mencapai tujuan pembangunan

⁸⁶ M. Idwar Saleh, *et al*, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1977/1979, hal. 143.

manusia seutuhnya. Sebab manusia bukan hanya makhluk yang memerlukan sandang, pangan dan hiburan.

Manusia juga mengejar nilai-nilai rohani. Persepsi manusia berlandaskan pandangan agama mengenai kedudukan dan martabat manusia. Dan pandangan ini bukan statis, tetapi berkembang terus atau lebih cepat, apa yang sudah diwahyukan berabad-abad yang lalu, dimengerti semakin mendalam dan semakin tepat.

Fungsi agama dalam pembangunan harus dipandang dari segi apa yang khas bagi agama. Agama bukan lembaga untuk memajukan bisnis, teknik atau pengadilan, maka sumbangan khas agama sebagai agama bukan dalam pembangunan bisnis, tentara atau hukum. Agama jelas bergerak dalam bidang rohani dan menekankan segi atau dimensi transeden manusia dan kegiatannya. Agama melindungi nilai-nilai manusia seperti diwahyukan dan bergerak dalam suasana kerelaan, maka bukan dalam hukum dan apa yang dipaksakan. Namun hal ini tidak berarti peranan rohani tidak mempunyai konsekuensi dapat menjadi konkrit sekali, misalnya membantu orang yang kurang mampu, menentang undang-undang yang tidak adil, menyumbang prinsip-prinsip politis yang sehat.⁸⁷

Agama Islam berkembang di tanah Banjar Kalimantan Selatan sejak lahirnya kerajaan Banjarmasin yang dipimpin oleh Sultan Suriansyah sejak tahun 1526, berpusat di Muara Kuwin. Seiring dengan dijadikannya Islam sebagai agama resmi kerajaan, maka agama Islam berkembang ke arah hulu sungai Barito dan di dataran rendah pegunungan Meratus.

Pada tahun 1950-an di Kalimantan Selatan terdapat beberapa agama yang dianut oleh penduduk, yaitu agama Islam sebagai agama yang dominan dengan persentase 95% dari jumlah penduduk. Seluruh penduduk muslim tersebut adalah warga suku Banjar yang tinggal di daerah perkotaan, daerah pantai-pantai sampai daerah-daerah pahuluan di Hulu Sungai.

Penduduk Kalimantan Selatan yang menganut agama Kristen Protestan umumnya tinggal di kota Banjarmasin, begitu pula yang menganut agama Katolik. Penduduk Kalimantan Selatan yang beragama Hindu Bali, adalah mereka yang berasal dari pulau Bali, sementara yang beragama Budha umumnya terdiri dari penduduk Tionghoa yang tinggal di kota Banjarmasin sebagai pedagang sejak lama. Selanjutnya penduduk yang beragama Kaharingan adalah mereka yang terdiri dari suku Dayak yang tinggal di pegunungan Meratus.

Adanya perbedaan keyakinan dalam hal beragama ini tergambar adanya toleransi beragama, terutama kaum muslimin penganut agama Islam tetap bersikap toleransi yang baik terhadap umat penganut agama lainnya.

Masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan memiliki rujukan ilmu agama Islam, yaitu Kitab Sabilal Muhtadin yang dikarang oleh seorang ulama besar dan terkenal Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Kitab ini tidak saja merupakan kitab yang populer di Kalimantan, tetapi juga menjadi rujukan bagi umat muslim sampai ke Asia Tenggara.

Keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari banyak yang menjadi pemuka-pemuka agama Islam di Kalimantan Selatan yang mendirikan pondok-pondok pesantren dan majelis taklim.

Adanya pondok-pondok pesantren dan organisasi majelis taklim ini sekaligus mencetak kader-kader pemuka agama Islam yang menjadi guru-guru agama, khatib dan para imam di masjid-masjid dan langgar atau mushala.

Beberapa ratus buah masjid dan beberapa ribu buah langgar tersebar berdiri di Kalimantan Selatan. Adanya masjid-masjid tersebut rata-rata berdiri sebuah pada setiap kecamatan dan adanya langgar pada setiap lingkungan RT (Rukun Tetangga). Berdirinya masjid dan langgar tersebut

⁸⁷ M. Idwar Saleh, dkk, *loc.cit.*

merupakan prakarsa dari pada penduduk secara spontanitas dengan bimbingan para alim ulama sebagai partisipasi aktif umat Islam. Masjid-masjid dan langgar tersebut secara fisik pada umumnya lebih bagus dan lebih indah apabila dibandingkan dengan bangunan rumah-rumah penduduk itu sendiri. Gambaran ini menunjukkan betapa besarnya dukungan moral dan dukungan dana dari umat muslim terhadap pembinaan rumah ibadah mereka.

Sektor pendidikan formal bidang agama juga tidak kurang pentingnya dalam meningkatkan intelektual muslim di Kalimantan Selatan. Terdapat beberapa puluh buah lembaga pendidikan seperti Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri di Kalimantan Selatan. Kalau lembaga pendidikan agama yang berstatus negeri itu hanya terdapat beberapa puluh buah, justru lembaga pendidikan agama yang berstatus swasta berjumlah ratusan buah, di samping Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Swasta.

Begitu pula dengan adanya PGA (Pendidikan Guru Agama) yang mencetak calon-calon guru agama Islam, PGA yang berstatus swasta justru lebih banyak jumlahnya apabila dibandingkan dengan negeri.

Orang Banjar Kalimantan Selatan dikenal sebagai umat Islam yang taat dalam menjalankan ibadah agamanya. Sesuai dengan rukun Islam yang lima, kaum muslim taat dalam melaksanakan ibadah shalat (sembahyang), berpuasa dan mengeluarkan zakat. Orang Banjar merasa belum lengkap dalam kehidupan beragamanya jika belum melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekkah. Oleh karena itu orang Banjar cenderung selalu menyimpan dana, baik berupa uang atau emas guna pada saatnya nanti dipergunakan untuk ibadah haji tersebut.

Orang Banjar, terutama yang berada di pedesaan yang umumnya terdiri dari para petani tidak begitu tertarik dengan bank. Oleh karena itu kelebihan rezeki mereka dalam bentuk uang jarang sekali untuk disimpan di bank. Mereka lebih menyukai uang itu dijadikan emas untuk disimpan. Kemudian mana kala jumlah emas tersebut telah mencukupi untuk dana melaksanakan ibadah haji, maka logam mulia itu dijual guna ongkos melakukan rukun Islam yang kelima tersebut.

5. Perburuhan dan Sumber Daya Manusia

Keadaan buruh di zaman pendudukan Jepang dan saat pendudukan NICA di Kalimantan Selatan sangatlah menyedihkan. Yang perlu dicatat setelah Perang Dunia II selesai, Belanda kembali berkuasa di Kalimantan, Belanda menguasai kembali perusahaan minyak atau BPM yang telah carut marut karena sebahagian besar rusak kena bom Sekutu. Untuk memerlukan perbaikan, Belanda memerlukan buruh tenaga kerja Indonesia yang banyak sekali.

Pada tahun 1950 dan seterusnya karena kesadaran nasional sebagai suatu bangsa yang telah merdeka, berkembanglah semangat untuk berorganisasi terutama untuk menuntut perbaikan gaji. Persatuan buruh yang ada di Kalimantan Selatan pada tahun 1950-an adalah :

- a) Persatuan Buruh Kehutanan.
- b) Persatuan Buruh Bioskop.
- c) Persatuan Perawat Indonesia.
- d) Serikat Buruh Percetakan Indonesia (Sarbuprin).
- e) Serikat Sekerja Penggergajian Indonesia.
- f) Serikat Buruh Beca Indonesia.
- g) Serikat Pos.
- h) Serikat Buruh Rendahan Indonesia.
- i) Persatuan Buruh Tionghoa.
- j) Persatuan Buruh Perusahaan Partikular (Perbupi).

Persatuan buruh di atas berpusat di Banjarmasin, di samping itu terdapat pula persatuan buruh di daerah Hulu Sungai, seperti :

- a) Serikat Sekerja Tukang Blik Seng (Sertubesi)
- b) Persatuan Pengrajin Anyaman Margasari (PP. AMAR)
- c) Serikat Buruh Gergaji (di Negara)
- d) Persatuan Buruh Indonesia (PBI) di Murung Pundak.

Waktu zaman NICA ada kantor *Sociaal Zaken* yang mengurus perburuhan, dan dilanjutkan di zaman RIS dan RI dengan nama Kantor Penempatan Tenaga Kerja yang bertindak mempertahankan hak-hak buruh bangsa Indonesia.

Keadaan SDM (Sumber Daya Manusia) Kalimantan Selatan tahun 1950 boleh dikatakan sangat rendah. Yang bisa baca tulis hanya sekitar 60% tapi yang punya ijazah SR hanya separuhnya saja. Maka dalam penerimaan anggota tentara (APRIS) anggota ALRI Divisi IV banyak yang tidak lulus, dan yang lulus pangkatnya banyak diturunkan satu sampai dua tingkat.

Tenaga yang berpendidikan tinggi boleh dihitung dengan jari tangan, dan mereka sewaktu akhir pendudukan militer Jepang dan masa perjuangan kemerdekaan banyak yang hijrah ke pulau Jawa menyelamatkan diri. Yang masih bertahan tentu saja menjadi langganan penjara NICA. Yang agak aman adalah tenaga-tenaga terpelajar tamatan OSVI (Sekolah Pamong Praja Belanda) di Makassar. Merekalah kebanyakan menjadi alat Belanda. Mereka ini oleh masyarakat biasa disebut dengan sebutan "Kiai". Mereka ini kebanyakan mati-matian membela kekuasaan Belanda, tetapi tidak sedikit pula yang berjiwa Republikan. Meskipun mereka tetap bekerja pada pemerintahan NICA, namun bantuannya pada pejuang/gerakan bawah tanah tidak sedikit pula.

6. Perhubungan dan Media Pers

Sewaktu Perang Banjar, penguasa perang Belanda G.M. Verspyck tahun 1859 membuat jalan darat. Jalan raya ini lebarnya 3 meter dan panjangnya kira-kira 300 kilometer, dimulai dari Tabanio menuju Pelaihari. Dari Pelaihari terus ke Martapura pusat Kesultanan Banjar langsung menuju Rantau. Dari Rantau jalan menuju Amawang, Pantai Hambawang sampai Barabai. Dari Barabai melewati Batumandi dan Lampihong sampai ke Amuntai.

Sama halnya seperti Gubernur Jenderal Daendels membuat jalan raya dari Anyer ke Panarukan di pulau Jawa, demikianlah Verspyck membuat jalan raya di Kalimantan Selatan, dengan melintasi gunung, bukit, lembah dan tanah rawa. Untuk itu dikerahkan tenaga rakyat pribumi ribuan banyaknya. Mereka dipaksa bekerja siang dan malam, ditimpa hujan dan panas, tanpa diupah seperser pun. Mereka itu adalah tenaga kerja paksa atau tawanan perang atau orang hukuman. Yang berani membangkang disiksa dan dihukum diluar perikemanusiaan. Ada yang mati karena kelaparan atau karena terserang penyakit. Banyak pula yang mati karena tewas didera atau disiksa. Kemudian pada tahun 1936 pemerintah Belanda menyempurnakan jalan yang dibuat Verspyck ini, yaitu jarak antara Banjarmasin – Hulu Sungai 290 kilometer, Banjarmasin – Pelaihari sepanjang 130 kilometer. Mulai tahun 1937 telah dimulai pekerjaan pembuatan jalan antara Banjarmasin – Balikpapan – Samarinda.

Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1950, Kalimantan Selatan dalam hal perhubungan darat boleh dikatakan paling baik dibandingkan daerah lainnya di Kalimantan, karena sudah ada hubungan darat dari tiap kabupaten ke ibukota Banjarmasin. Selain hubungan darat maka Kalimantan Selatan diuntungkan pula dengan banyaknya sungai, sehingga perhubungan dapat juga dilakukan dengan angkutan sungai dengan kapal atau perahu. Malah angkutan sungai ini lebih memegang peranan bagi perkembangan ekonomi dan kehidupan orang Banjar.

Di kota Banjarmasin dikenal "Perahu Tambangan" yang biasa dipakai oleh para wisatawan untuk menikmati pemandangan perairan kota Banjarmasin. Dalam tahun 1950 perahu tambangan sudah langka, tahun 1959 praktis sudah tidak ada lagi beroperasi di perairan Banjarmasin. Dan kemudian digantikan dengan beca air, yaitu perahu-perahu kecil yang mengangkut penumpang

dari pasar atau tempat-tempat lainnya. Sejak tahun 1954 ada angkutan sungai yaitu perahu yang tidak dikayuh orang lagi, tapi memakai mesin kecil dinamai “klotok”. Angkutan klotok setiap tahun bertambah jumlahnya. Klotok yang berbadan besar dapat menghubungkan Banjarmasin dengan kota-kota pedalaman seperti Tamban, Anjir dan lain-lain.

Sebelum perang Dunia II kapal-kapal sungai dimiliki oleh orang-orang Tionghoa, dijalankan memakai batu bara. Biasanya kapal-kapal itu menggandeng perahu besi yang ditempatkan kiri kanan kapal, kadang-kadang seperti toko berjalan. Tahun 1950 – 1959 kapal sungai memakai batu bara sudah mulai langka dan akhirnya menghilang dari peredaran, digantikan dengan kapal-kapal kayu dengan mesin yang memakai minyak solar.

Di muara sungai Kuin ada “Pasar Terapung”, yaitu penjual barang seperti sayur mayur, buah-buahan dan sebagainya memakai perahu, demikian pula sebagian dari para pembelinya. Perahu yang menjual makanan seperti kue-kue, soto Banjar, es kelapa muda dan lain sebagainya dinamai “Rombong”. Pasar terapung di kota Banjarmasin sampai sekarang tetap terpelihara dengan baik dan termasuk objek pariwisata.

Di masa perjuangan periode 1945 – 1949 terbitlah beberapa surat kabar perjuangan atau pers Republiken. Di Amuntai lahir harian *Terompet Rakyat* dan di Kandangan terbit majalah *Republik* dan harian *Kalimantan Berdjung*. *Kalimantan Berdjung* kemudian pindah ke Banjarmasin. Ketiga media ini membawa suara para pejuang yang membela Republik Indonesia. Sedangkan di Banjarmasin terbit sebuah surat kabar yang menjadi corong NICA/ Belanda, yaitu harian *Suara Kalimantan*. Sesudah pengakuan kedaulatan menjelang tahun 1950, kecuali *Kalimantan Berdjung* ketiga surat kabar itu telah mati tanpa kubur. Pada tahun 1950 telah terbit koran baru yang bernama harian *Indonesia Merdeka*, yaitu penjelmaan dari koran *Suara Kalimantan* yang berhenti terbit.

Dua koran perjuangan yaitu majalah *Republik* di Kandangan dan harian *Terompet Rakyat* di Amuntai mengetakan bahwa karena Indonesia sudah merdeka maka habislah perjuangan kita melawan penjajah. Mereka lahir dari dan untuk menyelamatkan Proklamasi 17 Agustus 1945 artinya “lahir berjuang untuk lahir”.

Soekarno :

...Seringkali telah saja djelaskan tentang tingkatan-tingkatan Revolusi kita.

1945-1950. Tingkatan physical Revolution. Dalam tingkatan ini kita merebut dan mempertahankan apa jang kita rebut itu, jaitu kekuasaan, dari tangannja fihak imperialis, kedalam tangan kita sendiri. Kita merebut dan mempertahankan kekuasaan itu dengan segenap tenaga rochaniah dan jasmaniah jang ada pada kita, dengan apinja kita punya djiwa dan dengan apinja kita punya bedil dan meriam. Angkatan Indonesia pada waktu itu adalah laksana angkatan kobong, bumi Indonesia laksana bumi tersiram api. Oleh karena itu maka periode 1945-1950 adalah periode Revolusi Phisik. Periode ini periode merebut dan mempertahankan kekuatan adalah Revolusi Politik.

1950-1956. Tingkatan ini saja namakan tingkatan "survival". Survival artinja tetap hidup, tidak mati. Lima tahun physical revolution tidak membuat kita rebah, lima tahun bertempur, menderita, berkorban-badaniah, lapar kedjar-kedjaran dengan maut, tidak membuat kita binasa. Badan penuh dengan luka-luka, tetapi kita tetap berdiri. Dan antara 1950-1955 kita sembuhkan luka-luka itu, kita sulami mana jang bolong, kita tutup mana jang djebol. Dan pada tahun 1955 kita dapat berkata, tertebuslah segala penderitaan jang kita alami dalam periodenya Revolusi Phisik.

1956. Mulai dengan tahun ini kita ingin memasuki satu periode baru. Kita ingin memasuki periodenja Revolusi Sosial- Ekonomis, untuk mentjapai tudjuan terachir daripada revolusi kita, jaitu satu masjarakat adil dan makmur, "tata-tentrem-kerta rahardja"....¹

BAB IX

PERIODE "ORDE LAMA" (DEMOKRASI TERPIMPIN)

1959 – 1966

A. SITUASI DAN KONDISI MENJELANG DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

1. Pemerintahan

Dengan Undang-undang No. 25 Tahun 1956, Propinsi Kalimantan terpecah menjadi 3 (tiga) propinsi yaitu Propinsi Kalimantan Selatan, Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Barat. Propinsi Kalimantan meliputi pula wilayah Propinsi Kalimantan Tengah sekarang.

Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1957, sebagian besar wilayah sebelah Barat dan sebelah Utara berdiri sendiri sebagai Propinsi Kalimantan Tengah dan selanjutnya Propinsi Kalimantan Selatan tambah menyempit karena dengan Undang-undang No. 27 Tahun 1959, bagian Utara dari Kabupaten Kotabaru, yaitu daerah Tanah Grogot dimasukkan ke dalam Propinsi Kalimantan Timur.

Sejak tahun itu propinsi Kalimantan Selatan tidak mengalami perubahan wilayah lagi dan membawahi 7 (tujuh) Daerah Tk. II yaitu :

1. Kotapraja Banjarmasin dengan ibukota Banjarmasin
2. Kabupaten Banjar dengan ibukota Martapura
3. Kabupaten Barito Kuala dengan ibukota Marabahan
4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan ibukota Kandangan
5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan ibukota Barabai
6. Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibukota Amuntai

¹ Dikutip dari Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Penerbit 'Dibawah Bendera Revolusi', Jakarta, 1965, hal. 351-352., yakni Amanat Presiden Soekarno pada HUT Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1959 di Jakarta, yang mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

7. Kabupaten Kotabaru dengan ibukota Kotabaru

Dalam menjalankan Pemerintah Daerah sejak masih merupakan Propinsi Kalimantan sampai dengan tahun 1959 para Gubernur yang pernah bertugas di daerah ini adalah :

1. Ir. Pangeran Moch Noor (1945 -) Gubernur Kalimantan
2. dr.M. Murjani (1950 - 1953) Gubernur Kalimantan
3. RTA. Milono (1953 - 1957) Gubernur Kalsel
4. H. Syarkawie (1957 - 1959) Gubernur Kalsel
5. H. Abu Yazid Busthomi (-) Pejabat Gubernur Kalsel
5. H. Aberanie Sulaiman (1963 - 1968) Gubernur Kalsel

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemecahan daerah hingga Propinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 7 (tujuh) Daerah Tk. II. Sesuai dengan Undang-undang No. 27 Tahun 1959 ayat (2) Pasal 52 maka Daerah Tk. II yang dipecah menjadi 2 (dua) Daerah Tk. II baru seperti Daerah Tk. II Hulu Sungai Selatan (lama), Daerah Tk. II Banjar (lama) dan Daerah Tk. II Kotabaru (lama) telah dibubarkan berturut-turut pada tanggal 10, 12 dan 28 Desember 1957, dan selama belum terbentuk pemerintahan baru bagi Daerah Tk. II baru tersebut, haruslah ditunjuk/diangkat penguasa-penguasa yang diberi wewenang menjalankan segala tugas, hak dan kewajiban Pemerintah Daerah. Dengan demikian berdasarkan instruksi Kawat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 25 November 1959 No. PD 2/3/16 oleh Gubernur Kalimantan Selatan diangkatlah penguasa-penguasa baru.

Kalau semula pengendali Pemerintahan di Propinsi Kalimantan Selatan merupakan Wakil Pemerintah Pusat (pemegang kendali Pemerintahan Umum) adalah Gubernur (M. Syarkawie) dan Kepala Daerah (pemegang Kendali Otonomi - H. Maksid), merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk sementara pemilihan Kepala Daerah tidak dapat langsung dipilih oleh rakyat, maka pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan oleh DPRD (hasil pemilu 1955) dengan berpedoman pada PP No. 44 Tahun 1957.

Perkembangan selanjutnya dengan Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah, dengan nama dan bentuk serta susunan kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasar Undang-undang No. 1 Tahun 1957 mengalami perubahan yang prinsipil, yakni :

1. Kepala Daerah tidak hanya memegang kekuasaan Otonomi Daerah, tetapi juga memegang urusan Pemerintahan Umum Pusat.
2. Sistem Dewan Pemerintah Daerah (DPD) yang kolegal diganti dengan Badan Pemerintah Harian (BPH) sebagai Pembantu Kepala Daerah.
3. Para anggota DPRD (Hasil Pemilu) harus dilantik/disumpah kembali dengan status baru.

Untuk Propinsi Kalimantan Selatan mulailah dilakukan Pemerintahan Daerah dengan wajah baru sesuai dengan Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 dimaksud, dengan terlebih dahulu disumpah/dilantik kembali, yaitu :

1. DPRD Kotapraja Banjarmasin tanggal 29 Oktober 1959
2. DPRD Tk. II Hulu Sungai Utara tanggal 29 Oktober 1959
3. DPRD Tk. II Hulu Sungai Tengah tanggal 2 November 1959

Sedangkan Daerah Tk. II Hulu Sungai Selatan (lama), Daerah Tk. II Banjar (lama) dan Daerah Tk. II Kotabaru (lama), telah dibubarkan berturut-turut pada tanggal 10, 12 dan 28 Desember 1959 bersamaan dengan saat pelantikan penguasa-penguasa Daerah Tk. II kemudian dimulailah usul/pencalonan untuk Pengangkatan Kepala-Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. I/PD tanggal 29 September 1959 (Petunjuk II Lampiran) jo. Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 (disempurnakan) dan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 1959, serta oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,

maka diangkatlah Kepala-Kepala Daerah baru, pada Daerah Tk. I maupun Daerah Tingkat II se Kalimantan Selatan.

Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 (disempurnakan), disusul oleh retooling Pemerintah Daerah di bidang legislatif, sehingga DPRD-DPRD yang sudah dilantik/disumpah sesuai dengan Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 (disempurnakan), harus dibubarkan dan dibentuk DPRD-DPRD baru dengan nama "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong" (DPRD-GR).

Selanjutnya dimulailah penyusunan anggota-anggota DPRD-GR di Kalimantan Selatan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. I/DESO tanggal 10 Oktober 1960 yang dilengkapi seorang Wakil Ketua.

Demikian sekedar gambaran kronologis betapa sulitnya dan kompleksnya mewujudkan Pemerintah Daerah yang sangat memenuhi harapan semua daerah, baik ditinjau dari segi kepentingan Pemerintah maupun kepentingan Politik.

Pada permulaan Negara Indonesia Serikat (RIS), di seluruh wilayah Indonesia mengelora kembali keinginan Bangsa Indonesia untuk mengembalikan Negara Indonesia dari bentuk Negara Federasi ke bentuk Negara Kesatuan, sehingga mulai 9 Maret sampai 4 April 1950 semua wilayah masuk kembali ke dalam Republik Indonesia, kecuali Negara Sumatera Timur.

Pada tanggal 17 Agustus 1950, terbentuklah kembali secara utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali wilayah Irian Barat sesuai dengan perjanjian Konferensi Meja Bundar.

Berdasar Undang-undang No. 22 Tahun 1948, yang mengatur desentralisasi territorial, maka Kepala Daerah tidaklah merupakan organ Pemerintahan Daerah. Ia hanya menjabat sebagai ketua dan anggota Dewan Pemerintah Daerah (DPD).

Pada waktu dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1957 dibuat maka UUD 1945 telah tidak berlaku karena diganti diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS-RI) Tahun 1950.

Seperti halnya Undang-undang No. 22 Tahun 1948, maka dalam Undang-undang No.1 Tahun 1957, bahwa Pemerintah Daerah terdiri dari :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD), sedang Kepala Daerah bukan merupakan organ dari Pemerintah Daerah , Kepala Daerah hanya sebagai Ketua merangkap Anggota DPD karena jabatannya.

Kepada Pemerintah dapat ditugaskan tugas-tugas Pembantuan dalam hak menjalankan Peraturan tersebut (medebewind, sertatantra). DPRD mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya kecuali untuk urusan-urusan yang oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1957 diserahkan pada penguasa lain (otonomi atau swatantra).

Swatantra dengan Peraturan Daerah dapat juga ditugaskan oleh suatu daerah kepada Pemerintah Daerah bawahannya dalam hal menjalankan Peraturan Daerah tersebut.

Kalau dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1948, Kepala Daerah masih diberi wewenang untuk menahan dijalkannya Keputusan DPRD atau DPD, maka dalam Undang-undang No.1 Tahun 1957 wewenang tersebut sudah tidak ada lagi. Tugas Pengawasan tidak lagi diberikan kepada Kepala Daerah.

Sesudah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, maka kedudukan Kepala Daerah dapat dikatakan agak pulih kembali. Partai-partai politik yang duduk dalam Dewan Pemerintah Daerah (DPD) di Daerah Tk. I maupun Daerah Tk. II di Kalimantan Selatan umumnya: Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), Partai Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Nasional Indonesia (PNI).

2. Politik dan Pergolakan di Daerah

Adanya pergolakan di daerah-daerah makin menunjukkan ketidakstabilan Pemerintahan Pusat. Partai-partai Masyumi dan PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) satu-persatu menarik dirinya dari kabinet sehingga akhirnya Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamijoyo (Kabinet Ali II) menyerahkan mandatnya kepada Presiden dan pada hari itu juga tanggal 14 Maret 1957, Presiden/Panglima Tertinggi ABRI menyatakan Negara Dalam Keadaan Bahaya (SOB – *Staat van Oorlog en Beleg*).

Kejatuhan kabinet ini bukan karena oposisi partai-partai, tetapi disebabkan oleh:

1. Timbulnya pemberontakan di daerah-daerah karena umumnya rasa ketidakpuasan pada kebijaksanaan Pemerintah terutama di bidang Pembangunan.
2. Adanya konsepsi Presiden tanggal 21 Februari 1957 tentang Demokrasi Terpimpin.
3. Adanya keretakan dalam tubuh Kabinet dengan mundurnya beberapa Menteri dalam Kabinet (Masyumi, PSII dan Perti).

Selanjutnya Presiden menunjuk Suwiryo sebagai formatur Kabinet, dan setelah dua kali Suwiryo gagal membentuk Kabinet, maka Presiden menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur Kabinet, suatu hal yang belum pernah terjadi dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia.

Presiden Soekarno berhasil membentuk Kabinet Ekstra Parlementer dengan Perdana Menteriya ialah Ir. Juanda seorang non-partai dan tidak ikut dalam Pemilu 1955. Mungkin penunjukan Ir. Juanda sebagai Perdana Menteri adalah untuk mewujudkan Konsepsi Presiden untuk menggantikan Demokrasi Parlementer ke Demokrasi Terpimpin, yang berusaha mengintegrasikan kekuasaan dalam satu tangan yaitu Presiden sendiri. Kabinet ini berdasarkan Keppres No. 103 Tahun 1957 dan dilantik pada tanggal 9 April 1957.

Dalam Kabinet Juanda ini orang yang duduk di dalamnya tidak mewakili partai. Walaupun dia orang partai dan banyak berasal dari Kabinet sebelumnya seperti Ir. Juanda sendiri K.H. Ideham Chalid, Mr. Sunaryo, Ir. Pangeran Moch. Noor, K.H. Ilyas dan Sudibyo.

Program Kabinet ini yaitu :

1. Membentuk Dewan Nasional.
2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia.
3. Melanjutkan pembatalan hasil-hasil KMB.
4. Perjuangan Irian Barat.
5. Mempergiat Pembangunan.

Tanggal 18 November 1957 diadakan Rapat Umum Pembebasan Irian Barat di Jakarta yang diikuti dengan tindakan:

1. Pemogokan total pada perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia tanggal 2 Desember 1957.
2. Pemerintah melarang semua terbitan dan film yang menggunakan bahasa Belanda untuk beredar di seluruh Indonesia.
3. Maskapai penerbangan KLM (*Koninklijke Luchthvaart Maatschappij*) dilarang terbang dan mendarat di Indonesia.
4. Tanggal 5 Desember 1957 semua kegiatan konsuler dari Kerajaan Belanda dihentikan.
5. Pengambil-alihan modal perusahaan-perusahaan Belanda oleh pekerja yang kemudian diatur oleh Pemerintah dengan Keppres No. 23 Tahun 1958.
6. Pada tanggal 10 Februari 1958 dibentuklah Front Nasional Pembebasan Irian Barat.

Di Kalimantan Selatan gerakan pengambil-alihan perusahaan minyak BPM (*Bataafsche Petroleum Maatschappij*) oleh Perbum (Persatuan Buruh Minyak) sebuah organisasi mantel Partai Komunis Indonesia.

a. Tantangan dari Dalam Negeri terhadap Kabinet Juanda

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kabinet Juanda mendapat tantangan dari dalam negeri antara lain:

1) Peristiwa Cikini

Yaitu upaya percobaan pembunuhan atas Presiden Soekarno dengan pelemparan granat sewaktu Presiden menghadiri pesta sekolah SD Cikini pada tanggal 30 November 1957. Para terdakwa adalah : Yusuf Ismail, Saadon bin Muhammad, Tasrif bin Husin, dan Tasin bin Abu Bakar dijatuhi hukuman mati.

2) Pemberontakan PRRI dan Permesta

PRRI (Pemerintah Republik Revolusioner Indonesia) dan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta). mempunyai motif yang sama yaitu ingin memisahkan diri dari Pemerintah Republik Indonesia. Pembentukan Dewan-dewan Militer di Sumatera yang diawali dengan pembentukan Dewan Banteng (Sumatera Tengah) dibawah Letkol Ahmad Husein tanggal 20 Desember 1956 yang diikuti oleh daerah-daerah lainnya di Sumatera dan Sulawesi yang berkelanjutan dengan pemberontakan PRRI dan Permesta.

Tanggal 9 Februari 1958 diselenggarakan pertemuan di Sungai Dareh (Sumatera Barat) yang dihadiri oleh : Letkol Ahmad Husein, Letkol Ventje Sumual, Kolonel Zulkifli Lubis. Sedang dari pihak sipil menggabungkan diri Muhammad Natsir, Mr. Burhanuddin Harahap, Syarif Usman dan Mr. Syafruddin Prawiranegara.

Pada tanggal 10 Februari 1958 diadakan Rapat Raksasa di Padang, dan dalam pidatonya Letkol Ahmad Husein memberikan ultimatum kepada Pemerintah Pusat sebagai berikut :

- a) Dalam waktu 5 x 24 Kabinet Juanda harus menyerahkan mandat kepada Presiden atau Presiden mencabut mandat Kabinet Juanda.
- b) Presiden menugaskan Drs. Moh. Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX untuk membentuk suatu Zaken Kabinet.
- c) Meminta kepada Presiden supaya kembali kepada kedudukannya sebagai Presiden Konstitusional.

Kabinet Juanda dalam rapatnya tanggal 11 Februari 1958 menolak ultimatum tersebut dan memberhentikan Letkol Ahmad Husein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dahlan Jambek dan Kolonel Simbolon. Komando Daerah Militer Sumatera Tengah dibekukan dan diletakkan dibawah komando langsung Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Kejadian tambah memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Kolonel Ahmad Husein memaklumkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan Perdana Menteri Mr. Syafruddin Prawiranegara.

Dua hari kemudian yaitu tanggal 17 Februari 1958 disusul dengan berdirinya Gerakan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta di bawah pimpinan Letkol. D.J. Somba, Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara – Tengah.

3) Dewan Lambung Mangkurat

Di daerah Kalimantan juga timbul gerakan seperti terbentuknya Dewan Lambung Mangkurat, tetapi tujuannya bukan untuk memisahkan diri dari Pemerintah Pusat, melainkan kepada tujuan yang positif di bidang pembangunan dan kemajuan pendidikan misalnya dengan membentuk Panitia Persiapan berdirinya Universitas Lambung Mangkurat, atas prakarsa dari Penguasa Perang Daerah Kalimantan Selatan dan telah berhasil dibentuk Yayasan Pendidikan Lambung Mangkurat yang diketuai oleh Penguasa Perang sendiri.

4) Keterlibatan Amerika Serikat

Ketegangan di dalam negeri semakin memuncak dengan terdengar berita-berita bahwa Armada ke VII Amerika Serikat (Armada Pasifik) – atau dikenal sebagai VIIth Fleet US Navy bergerak menuju Laut Cina Selatan dan akan memasuki perairan Natuna. Tujuan dari Armada ke VII AS ini adalah untuk melindungi kepentingan modal dan keamanan warga negaranya di Indonesia antara lain milik STANVAC/SHELL di daerah Riau (Pekanbaru).

Keterlibatan Amerika Serikat secara tidak langsung juga nampak dalam beberapa peristiwa misalnya :

- a) Serangan pembom B-26 yang berpangkalan di Clark Field (Philipina) atas Teluk Balikpapan yang berakibat tenggelamnya Korvet Hang Tuah.
- b) Dengan dipiloti oleh Allen Lawrence Pope, seorang warga negara Amerika Serikat, pembom B-26 menyerang dan membom Sulawesi bagian Utara, Sangir Talaud, Morotai, Maluku, dan lain-lain. Pada 18 Mei 1958 pesawat ini ditembak jatuh dan Pope tertangkap.²
- c) Bantuan-bantuan senjata dari luar negeri mengalir ke pihak pemberontak, sehingga dari segi persenjataan pihak pemberontak lebih unggul dengan senjata-senjata modern (bazooka, recoilless gun, senapan garrand dan lain-lain) dibanding TNI.

5) Keadaan Darurat Perang

Berhubung dengan keadaan yang demikian, maka Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang terpaksa menyatakan Keadaan Darurat Perang atas seluruh Wilayah Indonesia termasuk seluruh perairan teritorialnya dengan Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1957 tanggal 14 Maret 1957. Pernyataan Darurat Perang didasarkan pada *Regeling of de Staat van Oorlog en Beleg* (SOB) (Stbl. 1939 No. 582).

6) Operasi Militer

Kemudian sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah Pusat mengambil tindakan tegas yaitu dengan menggelar berbagai operasi militer yaitu :

- a) Operasi 17 Agustus dipimpin Kolonel Ahmad Yani untuk menumpas gerakan PRRI.
- b) Operasi Merdeka dipimpin Letkol Rukminto Hendradiningrat untuk menumpas Gerakan Permesta.

Secara rinci Operasi 17 Agustus digelar sebagai berikut :

- a) Operasi Tegas dipimpin Letkol Kaharuddin Nasution berhasil menduduki Pekanbaru tanggal 12 Maret 1958.
- b) Operasi 17 Agustus sebagai Operasi Induk dipimpin langsung Kolonel Ahmad Yani menduduki Padang tanggal 11 April dan Bukittinggi tanggal 4 Mei 1958.

² Allen Lawrence Pope, warga negara Amerika Serikat, seorang pilot yang sangat terlatih. Ia seorang avonturir, bergabung dengan Angkatan Udara Perancis di Dien Bien sebelum Perancis melepaskan Vietnam. Minggu pagi tanggal 18 Mei 1958 dengan pesawat pembom B-26 ia membom dan menenggelamkan Korvet Hang Tuah. Pesawatnya ditembak jatuh dan Pope tertangkap dan dibawa ke Jakarta pada 27 Mei 1958. Kepada pers ia mengaku pernah menjadi penerbang pada suatu perusahaan penerbangan di Taiwan. Ia pun mengaku menerima perintah langsung dari pimpinan pemberontak untuk menyerang dan membom kapal-kapal dan lokasi-lokasi di Indonesia Timur. Untuk tugas ini Pope menerima gaji-bulanan US \$ 10.000. Atas usaha Jaksa Agung (AS) Robert Kennedy, dalam Februari 1962, Pope diberikan keampunan oleh Presiden Soekarno. Dalam kerahasiaan yang ketat, pilot ini dari penjara langsung memasuki mobil yang disiapkan oleh Kedutaan Besar AS dibawa langsung ke bandara, diterbangkan ke AS. Lihat Howard Palfrey Jones, *Indonesia: The Possible Dream*, Published Under the Auspices of the Hoover Institution, Printed by Mas Aju Singapore PTE.Ltd, Singapore, 1973, hal. 129 dan 142.

- c) Operasi Sapta Marga dipimpin Kolonel Jatikusumo menduduki Sumatera Utara.
- d) Operasi Sadar dipimpin Letkol Ibnu Sutowo menduduki Sumatera Selatan.
- e) Akhirnya tanggal 29 Mei 1961 baru keadaan seluruhnya taratasi, Kolonel Ahmad Husein cs menyerahkan diri. Tokoh-tokoh yang setia kepada Pemerintah Pusat dan berada di daerah PRRI diantaranya : Komisaris Polisi Kaharuddin Dt. Rangkayo Basya, Mayor Nur Matias (Sumatera Barat), Letkol Jamin Ginting, Letkol Wahab Makmur (Sumatera Utara) dan Letkol Harun Sohar (Sumatera Selatan).

Sedang Operasi Merdeka digelar sebagai berikut :

- a) Operasi Sapta Marga I dipimpin Letkol Sumarsono dengan sasaran Sulawesi Utara Bagian Tengah (Gorontalo).
- b) Operasi Sapta Marga II dipimpin Letkol Agus Pramono dengan sasaran Sulawesi Bagian Selatan (Palu).
- c) Operasi Sapta Marga III dipimpin Letkol Magenda sasaran daerah Kepulauan Sangir-Talaud.
- d) Operasi Sapta Marga IV dipimpin Letkol Rukminto Hendradiningrat sasaran daerah Minahasa.
- e) Operasi Mena I dipimpin Letkol Pieters dengan sasaran Jailolo.
- f) Operasi Mena II dipimpin Letkol Marinir Hunholz dengan sasaran merebut Lapangan Udara Morotai dan Halmahera

7) Perbedaan pendapat dalam Konstituante

Ada 3 (tiga) kelompok yang saling bertentangan dan sukar atau tidak mungkin berkompromi : Golongan Islam menghendaki Dasar Negara Islam, Golongan Nasionalis menghendaki Dasar Negara Pancasila, Golongan Komunis menghendaki Dasar Negara Komunis.

Akibat tidak dapat dicapainya kompromi diantara ketiga kelompok tadi, Sidang Konstituante untuk menetapkan UUD mengalami jalan buntu. Dan dalam keadaan demikian orang mulai teringat UUD 1945.

Presiden Republik Indonesia dalam amanatnya tanggal 22 April 1959 di depan Sidang Konstituante menghimbau agar kembali ke UUD 1945. Tapi tidak dicapai kata sepakat, sehingga diadakan voting sampai 3 kali yaitu :

Voting I : setuju 269, tidak setuju 199 (30 Mei 1959)

Voting II : setuju 263, tidak setuju 203 (1 Juni 1959)

Voting III : setuju 264, tidak setuju 204 (2 Juni 1959)

Melihat hasil tiga kali Voting itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa gagasan kembali ke UUD 1945 mendapat dukungan mayoritas tetapi tidak mencapai dua pertiga seluruh jumlah suara berdasarkan UUDS 1950.

Masalah krusial ialah perumusan Sila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa dengan atau tanpa 7 (tujuh) kata Piagam Jakarta. Pada waktu bersamaan terjadi pemberontakan-pemberontakan di daerah. Maka Penguasa Perang Pusat mengeluarkan larangan berpolitik.

8) Dekrit Presiden

Konstituante mengadakan reses; sejumlah fraksi pendukung 'Kembali ke UUD 1945 (a.l. PNI, NU, PKI, Gerakan Pembela Pancasila) menyatakan tidak akan menghadiri lagi sidang-sidang Konstituante. Maka dalam keadaan kekosongan hukum ini, Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 men "Dekrit"kan kembali ke UUD 1945, yang didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, KSAD, dan berbagai golongan masyarakat.

Isi Dekrit 5 Juli 1959 itu menetapkan :

- a) Pembubaran Konstituante
- b) Tidak berlakunya UUDS 1950.
- c) Berlakunya kembali ke UUD 1945.
- d) Pembentukan MPR-S dan DPA-S dalam waktu yang singkat.³

Sedangkan lembaga DPR adalah berdasar Hasil Pemilu dan yang belum ada berdasar UUD 1945, adalah MPR dan DPA.

9) Kesatuan Rakyat Yang Tertindas

Gerakan-gerakan bersenjata di Kalimantan Selatan yang dikenal dengan nama “Kesatuan Rakyat yang Tertindas” (KRYT) dibawah pimpinan eks Letda Ibnu Hadjar alias Haderi bin Umar alias Angli sejak bulan Oktober 1950 terus berlanjut. Pengacauan yang dilakukan kelompok ini berlangsung cukup lama. Beberapa kali menyerahkan diri, tetapi sesering itu pula kembali lari ke hutan setelah mendapat persenjataan/perbekalan. Lama-kelamaan gerakan ini makin melemah karena banyak pengikutnya menyerahkan diri. Gerakan ini berakhir pada tahun 1962.

Khusus mengenai kegiatan gerakan bersenjata di daerah ini yang dinamakan gerakan Kesatuan Rakyat Yang Tertindas (KRYT), bermula timbul dari rasa ketidak puasan para pejoang gerilya terhadap kebijaksanaan Pemerintah Pusat, khususnya dalam rasionalisasi Angkatan Perang Republik Indonesia.

Pada mulanya gerakan bersenjata ini mengakui bahwa gerakannya sebagai bagian dari gerakan DI/TII Karto Suwiryo yang dimulai pada bulan Oktober 1950.

Dibanding dengan gerakan DI/TII yang lebih bertujuan politis, maka KRYT lebih mengarah kepada kegiatan pengacauan, perampasan dan pembakaran. Walaupun kekuatan mereka relatif kecil, tetapi karena mereka eks gerilyawan yang sudah sangat mengenal daerah ini terikat hubungan keluarga. Sebenarnya gerakan ini (KRYT) terbagi atas beberapa kesatuan misalnya satuan yang langsung dipimpin oleh Ibnu Hadjar sendiri tidak terlalu kuat dalam persenjataan, dibanding dengan satuan yang dipimpin oleh Kastanjaya.

Dengan Operasi Segitiga yang dilakukan/dilancarkan maka gerakan mereka semakin dipersempit, sehingga mereka menyerahkan diri. Tetapi setelah mereka memperoleh perbekalan dan lain-lain, mereka kembali ke hutan-hutan, dan kejadian ini dilakukan berkali-kali.

Amnesti yang diberikan oleh Presiden/Panglima Tertinggi dengan batas tanggal 5 Oktober 1961, digunakan oleh satuan-satuan lain untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, tetapi Ibnu Hadjar dan sebagian dari satuannya tetap bertahan walaupun kedudukan mereka semakin terjepit di daerah Kotabaru.

Pada bulan Mei 1963, keadaan kembali kepada Tertib Sipil dan penanganan dilakukan oleh pihak Kepolisian yang pada waktu itu dipimpin Kepala Polisi Komisariat (Kapekom) Kalimantan Selatan Komisaris Besar Tengku Abdul Aziz. Kapekom Kalimantan Selatan mengadakan pendekatan dengan Ibnu Hadjar dan pasukannya agar menyerahkan diri dengan janji akan mendapat amnesti dari Pemerintah, dan Ibnu Hadjar menyetujui hal ini. Penyerahan Ibnu Hadjar dilaporkan kepada Pemerintah Pusat, dan dengan dukungan sepenuhnya dari Panca Tunggal agar diberikan amnesti. Tetapi Pemerintah Pusat memerintahkan agar Ibnu Hadjar dibawa ke Jakarta, amnestinya ditolak, sehingga Kapekom Kombes Tengku Abdul Aziz merasa terpukul dan mengajukan permintaan berhenti.

Pihak Kejaksaan Agung melimpahkan pengusutan ke Pengadilan Militer dan mengirim Tim penyidik ke Kalimantan Selatan antara lain Letkol CKH Durmawel Achmad. Akhirnya, Ibnu Hadjar

³ Lihat Lampiran 8.

alias Haderi bin Umar alias Angli, --- seorang Letnan Dua TNI, salah seorang Komandan Tempur Kesatuan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan,--- karena dianggap telah berulang kali melakukan desersi kemudian dijatuhi hukuman dengan pidana mati. Eksekusi dilakukan di Kepulauan Seribu.

Para pengikutnya dibebaskan dan kembali ke masyarakat tanpa dilakukan penuntutan hukum, termasuk para tokoh KRYT lainnya seperti Cinabe (Jaksa Agung KRYT), Kastanjaya dan lain-lain.

Selain gerakan KRYT Ibnu Hadjar maka pada tahun 1958 berdiri sebuah organisasi yang bermaksud membantu dan meniru gerakan pemberontakan seperti di Sumatera dan Sulawesi dengan nama “Komando Divisi VI Kompak PRRI CVP Kalimantan” yang merencanakan merebut kekuasaan pada tanggal 25 Juni 1958 jam 02.00. tanggal 17 Agustus 1961, dengan dipimpin oleh pimpinan pejoang yang kecewa di daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdiri “Komando Daerah Aksi Derita Rakyat” dipimpin oleh mantan pejoang bernama Al Hamdi, yang diperalat oleh seorang aktor intelektual bernama Jarkasi Attahairi. Seorang pegawai Jawatan Penerangan dan seorang tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI). Akhirnya mantan pejoang yang tertipu sadar dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Al Hamdi merupakan saudara bungsu dari 3 bersaudara (Nawawi – Nurman – Al Hamdi) dan mereka bertiga lebih dikenal sebagai kelompok TRIKESUMA. Pada peristiwa berdarah pada Rabu malam tanggal 19 Maret 1946, para pemuda dengan dipimpin oleh Trikesuma menyerang alat keamanan pemerintah kolonial hingga 2 (dua) orang resersi terbunuh sedang dipihak pemuda gugur M. Ramli Atthiri. Pada pertempuran di Bukit Hinas telah gugur pemuda Nurman, sedang pada bulan Juli 1947, Al Hamdi dari M. Nawawi tertangkap dan oleh Pengadilan NICA dijatuhi hukuman :M. Nawawi 18 tahun, Al Hamdi 15 tahun.

Keduanya semula ditahan di penjara Cipinang dan kemudian dipindahkan ke Nusakambangan sampai penyerahan kedaulatan 27 Desember 1949. Terakhir Al Hamdi bekerja sebagai pegawai Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Kalimantan Selatan di Jakarta sampai meninggal pada tanggal 17 Mei 1969.

Seperti telah kita ketahui dengan Keputusan Presiden tanggal 14 Maret 1957 Keppres No. 40 Tahun 1957 bahwa Keadaan Darurat Perang berlaku di seluruh Indonesia (atas dasar Reg. SOB), kesatuan militer yang ada di Kalimantan Selatan hanyalah resimen Infanteri 21/Lambung Mangkurat (disingkat RI 21/LM), dan kedudukannya hanya sebagai Pelaksana Kuasa Militer (PEKUMIL) sedang Penguasa Militer adalah Panglima Tentara dan Territorium

Setelah diganti dengan Undang-undang No. 74 Tahun 1957, kedudukan RI 21/LM tidak berubah, hanya namanya menjadi Pemegang Kuasa Perang (PEKUPER).

Dengan terbentuknya KODAM-KODAM, maka RI 21/LM menjadi KODAM X/LM dan Pangdam X/LM menjadi Penguasa Perang Daerah Kalimantan Selatan.

B. DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

1. Melangkah ke Demokrasi Terpimpin

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan otomatis dengan demisionernya Kabinet Juanda (Kabinet Karya), maka berakhir pulalah riwayat Demokrasi Parlementer (Demokrasi Liberal) di Indonesia yang lebih 10 tahun menguasai arena politik di Republik tercinta ini. Jatuhnya Kabinet Juanda bukan karena adanya keretakan dalam tubuh Kabinet, keretakan antar Menteri ataupun keretakan antar partai koalisi pendukung Kabinet, bahkan juga bukan karena adanya oposisi dari partai luar Kabinet yang dihasilkan suatu mosi tidak percaya dari DPR terhadap Kabinet. Tetapi Kabinet demisioner semata-mata karena adanya perubahan struktur politik yang terjadi di negara ini yang sangat penting dan sangat mendasar yaitu dengan adanya Dekrit Presiden tersebut diatas, dengan perubahan UUD 1950 ke UUD 1945 yang menggunakan stelsel Kabinet Presidential, yang

Para Menteri yang duduk dalam kabinet kerja adalah orang-orang yang non partai atau orang-orang yang lepas dan partai. Dengan demikian kabinet ini tidak mencerminkan sama sekali hasil Pemilihan Umum 1955, dan Presiden benar-benar mematikan peranan partai secara formal dalam kabinet, dengan perkataan lain Presiden mulai melangkah untuk melaksanakan kabinet kaki 4 dan Konsepsi Demokrasi Terpimpin yang terkenal dengan “Nasakom”-nya.

Dalam sidangnya tanggal 23 – 25 September 1959 DPA-Sementara mengusulkan agar Manipol dijadikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang akhirnya dengan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1960, Manipol dikukuhkan dengan ketetapan MPR-S No. I/MPRS/1960 tanggal 10 November 1960 di Bandung.

- 1) UUD 1945 U
- 2) Sosialisme Indonesia S
- 3) Demokrasi Terpimpin D
- 4) Ekonomi Terpimpin E
- 5) Kepribadian Indonesia K

Kabinet Kerja I ini merupakan Kabinet Presidensial yang bertanggung jawab, diangkat dan diberhentikan berdasarkan pasal 17 UUD 1945, sehingga Presiden dapat dengan mudah mengganti dan mereshuffle Kabinet, apalagi bila terdapat Menteri yang tidak cocok dengan Presiden, sudah tentu tidak akan bertahan lama sebagai Menteri. Sehubungan dengan itu maka Kabinet Kerja I berumur tidak panjang, hanya 8 (delapan) bulan kerja saja.

⁴ Soekarno selalu memberi judul yang ‘flamboyant’ untuk tiap Pidato Kenegaraan memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus, misalnya : Tetap Terbanglah Rajawali ! (1955); Tahun Tantangan – Year of Challenge (1958); “Laksana Malaikat Menyerbu Langit” djalannya Revolusi Kita (1960); Tahun Kemenangan – Year of Triumph (1962); Tahun “Vivere Pericoloso” (1964), lihat Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Jilid II, Panitia Penerbit ‘Dibawah Bendera Revolusi’, Jakarta, 1966.

2. Negara dalam Keadaan Perang

Berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, khususnya untuk daerah Kalimantan Selatan, berarti UUDS 1950 tidak berlaku lagi dan kembali ke UUD 1945, maka konsekuensi logisnya adalah bahwa Undang-undang Keadaan Bahaya No. 74 Tahun 1957 tidak berlaku lagi dan dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 23 Tahun 1959 (LN No. 52 Tahun 1959). Selanjutnya dengan Undang-undang No. 52 Prp Tahun 1960, Perpu No. 23 Tahun 1959 itu dijadikan Undang-undang, dan ini berarti seluruh Wilayah Republik Indonesia dalam keadaan perang.

Untuk melaksanakan apa yang dimaksudkan dalam pasal 6 dari Undang-undang No. 23 Prp Tahun 1959, dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 114 Tahun 1960 ditetapkanlah Panglima Daerah Militer X/Lambung Mangkurat sebagai Penguasa Perang Daerah (PEPERDA) Kalimantan Selatan. Daerah Hukum Peperda Kalimantan Selatan ialah seluruh Daerah Swatantra Tk. I Kalimantan Selatan, kecuali bagian-bagian yang termasuk dalam Daerah Hukum Peperda Laut Daerah Maritim Makassar dan yang termasuk dalam Daerah Hukum Peperda Udara Daerah AURI II. Badan Pembantu PEPERDA Kalimantan Selatan terdiri : Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan, Kepala Polisi Komisariat Kalimantan Selatan, dan Kepala Kejaksaan Daerah Kalimantan Selatan.

Dengan demikian Peperda ditambah tiga anggota Badan Pembantu dikenal dengan istilah Catur Tunggal. Berdasar Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1960, tentang Organisasi Pembantu Penguasa Dalam Keadaan Bahaya di Daerah, -maka Peperda Kalimantan Selatan dengan SK No. 24/U/Tahun 1960 tanggal 4 Februari 1960 menetapkan Tata Kerja Staf Penguasa Perang Daerah Kalimantan Selatan.

Susunan Organisasi Peperda Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Staf Peperda.
- 2) Wakil Kepala Staf Peperda.
- 3) Seksi Keamanan.
- 4) Seksi Finek.
- 5) Seksi Kesejahteraan Sosial.
- 6) Seksi Sekretariat.

Dalam menjalankan kebijaksanaan, Peperda Kalimantan Selatan telah menetapkan Garis-garis Kebijaksanaan yang pada pokoknya dirumuskan seperti berikut :

- 1) Mempergunakan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang Keadaan Bahaya (Undang-undang No. 74/1957) untuk mengembalikan dan memelihara keamanan, ketertiban dan ketertiban umum.
- 2) Memanfaatkan Undang-undang Keadaan Bahaya untuk :
 - a) Mempergiat pembangunan dan mencegah kemacetan-kemacetan yang diakibatkan oleh birokrasi yang tidak wajar.
 - b) Mendorong dan bilamana perlu mengkoordinasikan jawatan-jawatan, agar lebih giat bekerja dan mencapai hasil yang sebesar-besarnya.

Usaha-usaha Peperda Kalimantan Selatan yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Bidang Politik dan Pemerintahan.
 - a) Pengawasan dan pengamanan pembentukan DPRD Tk. I Kalimantan Selatan serta DPD Tk. II dan pemilihan Kepala Daerahnya.
 - b) Peningkatan disiplin PNS, efisiensi lembur dan penggunaan peralatan.

- c) Penertiban kendaraan bermotor.
- d) Peraturan-peraturan yang dikeluarkan harus mendapat persetujuan Peperda.
- e) Sosialisasi Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
- f) Larangan berpartai bagi Pegawai-pegawai Golongan F berdasar PP No. 2 Tahun 1959.
- g) Penertiban pemberitaan oleh partai-partai dan masyarakat.
- h) Upacara Bendera di kantor-kantor dan sekolah-sekolah.
- i) Pekan Pemuda di Barabai dan Martapura.
- j) Keppres No. 128 dan 440/1961 menetapkan 10 (sepuluh) partai terlarang (termasuk PKI) sebagai Pelaksanaan Peraturan Presiden No 12 Tahun 1960 (pasal 4).
- k) Sebagian besar anggota DPRD Tk. I dan semua Daerah Tk. II, menyatakan akan mengundurkan diri, jika unsur komunis akan ada dalam lembaga legislatif untuk mewujudkan "Nasakom".

2) Bidang Pertahanan dan Keamanan

- a) Sebagian besar anggota gerombolan KRYT memenuhi amnesti tanggal 5 Oktober 1961.
- b) Mereka ditampung melalui Panitia Penyaluran Korban Kekacauan Daerah (PPKKD) dan diberikan bimbingan di bidang pertanian, bengkel mobil, perkebunan, bertukang dan selanjutnya dipulangkan ke daerah asal dengan bekal keuangan.
- c) Meningkatkan operasi militer yang disebut dengan sandi Operasi Segitiga.
- d) Pembentukan Badan Kerja Sama (BKS-BKS) sesuai dengan instruksi KSAD/Penguasa Militer Pusat No. Instr/PM/05/1957 dan tanggal 6 Juli 1957 Nomor sama.
- e) Latihan Kemiliteran Pegawai Sipil (LKPS).
- f) Organisasi Pertahanan Sipil dibentuk di tiap instansi Pemerintah.
- g) Wajib Militer Darurat sebagai pelaksanaan SK Peperda Kalimantan Selatan tanggal 25 Agustus 1959 No. Kpts. 789/III.

Selain daripada itu juga dilaksanakan kegiatan penertiban, pembangunan dan pengembangan di bidang Finek, Sosial dan Pendidikan dan bidang-bidang lainnya.

Dengan peluang yang diberikan oleh Presiden Soekarno dengan Konsepsi Demokrasi Terpimpin-nya, membuka peluang kepada Partai Komunis Indonesia untuk berperan lebih terbuka, terutama dengan implementasi Nasakomisasi di bidang ketatanegaraan. Cikal bakal komunisme oleh Sneevliet⁵ dengan ISDV (1914), memasuki SI Merah pimpinan Semaun, ISDV merubah namanya menjadi Perserikatan Komunis di Hindia dan akhirnya menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Dengan keberhasilan Revolusi Bolsyewik di Rusia tanggal 1 Oktober 1917 telah memberi angin segar kepada penganut Marxisme di seluruh dunia yang menyerukan agar keberhasilan revolusi di Rusia diikuti dengan "revolusi dunia" yang tergabung dalam Comintern atau Komunisme Internasional, dan pada tahun 1920 dalam Kongres Komintern III. Sneevliet menyarankan agar Perserikatan Komunis Hindia Belanda diterima dalam Komintern. Darsono sebagai pengganti Sneevliet mengadakan konsolidasi partai mulai tahun 1923. Pada bulan Juni 1924 Perserikatan Komunis di Hindia Belanda mengadakan Kongres di Jakarta dengan menggunakan nama Partai

⁵ Sneevliet, Hendricus J.F.M (1883 – 1942). Setelah keluar dari NSDAP (*Nederlands Sosial Democratische Arbeiders Partij*) datang di Indonesia tahun 1913 sebagai pegawai dari suatu perusahaan di Semarang. Ia mendirikan Indische Sosial Democratische Partij 1914. Tahun 1918 di-internir; kemudian bekerja untuk Komintern (Komunis Internasional) antara lain di Shanghai tahun 1920. dari tahun 1933 hingga 1937 menjadi anggota Twede Kamer (Parlemen) Belanda. Awal 1942 dieksekusi oleh tentara Jerman, lihat T.S.G Mulia *et al*, *Ensiklopedia Indonesia*, W.van Hoeve, Bandung- s' Gravenhage, 195...

Komunis Indonesia (PKI) untuk pertama kalinya ajaran-ajaran Marxis-Lenimis yang menitik-beratkan kepada teori “perjuangan kelas” (antara kaya dengan miskin, antara majikan dengan buruh, antara bangsawan dengan rakyat biasa dan sebagainya) dengan cepat membangkitkan rasa sensitif emosional di kalangan rakyat yang dijajah pada waktu itu. Bahkan dalam era Demokrasi Terpimpin, rasa sensitif emosional ini terus digalakkan misalnya dalam acara Peringatan Hari Buruh Sedunia yang dirayakan tiap tanggal 1 Mei, dikumandangkan lagu Internasionale yang liriknya sebagai berikut :

*Bangunlah kaum yang terhina
Bangunlah kaum yang lapar
Kehendak yang mulia dalam dunia
Senantiasa sadar-sadar
Dunia sudah berganti rupa
Untuk kemenangan kita.
Perjuangan penghabisan, kumpullah melawan
Dan Internasionale mestilah sedunia
Perjuangan penghabisan, kumpullah melawan
Dan Internasionale mestilah sedunia.*

Sesuai dengan situasi dan kondisi setempat PKI merasa perlu bekerjasama dengan golongan Islam dan Nasional. Pertentangan antara Tan Malaka dengan Alimin – Muso (Komunis Radikal) menyebabkan Tan Malaka membentuk Partai Murba. Pertentangan ini tetap berlangsung sampai era Demokrasi Terpimpin, dan dengan meminjam tangan Presiden Soekarno, PKI mematikan Partai Murba. Muso, tokoh komunis yang pulang dari Rusia menyiapkan kelompok-kelompok yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) dan mencetuskan Pemberontakan Madiun (18 September 1948). Pemberontakan terhadap Negara Republik Indonesia itu dapat dilumpuhkan, tetapi suatu kesalahan fatal telah dilakukan Pemerintah Republik Indonesia yaitu Partai Komunis tidak dibubarkan, yang berarti peranan komunis tidak dilarang.

Aidit – Lukman – Sudisman – Nyoto segera membangun kembali partai (1950 – 1952), dan PKI dengan cepat berkembang menjadi Partai Massa dengan kader yang disiplin tinggi. Dalam hanya 3 (tiga) tahun, dengan bantuan ajaran MANIPOL – USDEK, PKI mempunyai anggota lebih dari 3 (tiga) juta orang.

Dengan memperlalat Bung Karno, PKI berusaha melumpuhkan TNI – Angkatan Darat dengan G 30/S-nya (pada 30 Septemhernya 1965), tetapi gagal dan malah PKI sendiri yang dihancurkan.

3. Pelarangan Kegiatan PKI dan Ormasnya di Kalimantan Selatan

Kepres RI No. 128 dan 440/1961 menetapkan 10 (sepuluh) partai terlarang (yaitu yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1960) termasuk Partai Komunis Indonesia, tetapi anehnya kegiatan PKI tetap berjalan dengan legal.

Tetapi jiwa masyarakat Kalimantan Selatan yang agamis – Islam maupun Kristen, tidak dapat menerima faham komunisme pada umumnya dan partai komunis pada khususnya. Kemudian terjadi ketegangan (antara lain terjadi pelemparan granat ke rumah kediaman Bupati HSU – Bihman Villa), dan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum selagi menghadapi pemulihan keamanan, maka Penguasa Perang Daerah Kalimantan Selatan mengeluarkan keputusan untuk sementara melarang kegiatan Partai Komunis Indonesia dalam Daerah Kalimantan Selatan

dengan Surat Keputusan No. 140/S/K.P./tahun 1960⁶ yang berlaku sejak tanggal 22 Agustus 1956.

7

Sikap Penguasa Perang Daerah Kalimantan Selatan ini diikuti oleh Daerah Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan, walaupun dua daerah ini tidak secara konkrit menuangkannya dalam Surat Keputusan. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Peristiwa Tiga Selatan. Tapi ternyata hanya Penguasa Perang Daerah Kalimantan Selatan saja yang secara konsekwen bersikap tegas melarang kegiatan PKI diantaranya menolak membentuk Front Nasional yang akan memasukkan PKI sebagai anggota Front Nasional Daerah.⁸

Dapat dibayangkan betapa terkejutnya Penguasa Perang Tertinggi (Peperda) atas sikap Peperda Kalimantan Selatan ini, sehingga Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia menganggap perlu memperingatkan dalam Pidato Kenegaraan tanggal 17 Agustus 1962 yang berjudul "Tahun Kemenangan", antara lain :

Malahan masih ada satu daerah, yang disitu itu belum dapat dibentuk Front Nasional Daerah, karena adanya orang-orang yang Komunis Phobi.

Kepada mereka itu saya berkata : Suatu hari akan datang yang saya melihat segala usahamu gagal. Dan mungkin satu hari akan datang, yang engkau harus menebus kejahatanmu itu di dalam penjara, atau tiang penggantungan.

Sikap pelarangan kegiatan PKI ini adalah suatu sikap yang penuh risiko dengan segala akibat yang sukar dibayangkan, kepada mereka yang mempunyai keberanian memikul konsekuensinya dengan risiko yang sangat tinggi.

Kolonel Hassan Basry, Letnan Kolonel M. Yusi dan Gubernur H. Maksid merupakan tokoh-tokoh putra daerah Kalimantan Selatan yang tampil menentang Komunisme. H. Maksid sebagai Gubernur Kalsel dibantu sepenuhnya oleh Staf Senior Pemerintah Daerah yaitu : Johan Ariffin, H. Hasbullah dan A. Gaffar Hanafiah.

Kemudian Penguasa Perang Tertinggi dan Penguasa Keadaan Bahaya memanggil Ketua Peperda se Indonesia untuk mendengarkan penjelasan dari Peperda Kalimantan Selatan. Sebelum rapat dimulai, seorang ajudan Presiden menemui Kolonel Hassan Basry ditempat penginapan beliau di Hotel Duta Indonesia (sekarang Duta Merlin), dengan pesan agar laporan secara singkat saja, namun Kolonel Hassan Basry tetap menyampaikan laporan secara lengkap seperti yang disiapkan dan disusun di Banjarmasin.⁹

Jiwa tak dapat menerima komunisme itu, tetap bersemi dalam masyarakat terbanyak, sehingga sebagian kesan dari anggota DPR-GR Daerah Tk. I dan Daerah-daerah Tk. II di Kalimantan Selatan menyatakan akan mengundurkan diri, jika unsur komunis akan disertakan dalam Badan Legislatif untuk memenuhi NASAKOM.

⁶ Keputusan Peperda Kalsel No. 140/S/K.P./tahun 1960 yang menghentikan kegiatan PKI dimungkinkan oleh Pasal 44 dari UNDANG-UNDANG Keadaan Bahaya (Lembaran Negara 1959/139) yang memberi hak kepada Penguasa Perang dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan perUndang-undangan pusat, mengadakan peraturan atau mengambil tindakan yang bagaimanapun juga sifatnya, apabila dianggap perlu karena keadaan yang membahayakan keselamatan Negara yang sangat mendesak pada saat itu. Lihat pula LAMPIRAN VI.

⁷ Lihat Lampiran 9.

⁸ "Tiga Selatan" ialah tiga Komando Daerah Selatan, yakni Kodam Sumatera Selatan (Harun Sohar), Kodam Sulawesi Selatan (M. Yusuf), dan Kodam Kalimantan Selatan (Hassan Basry) yang menolak Nasakom. Harun Sohar dan M. Yusuf tidak bertahan lama dan menerima nasakomisasi daerahnya. Hassan Basry dapat bertahan lebih lama karena pimpinan daerah yang solid (Hassan Basry – H. Maksid – M. Yusi) dan didukung oleh masyarakat yang religius.

⁹ Untuk lebih jelasnya, lihat isi laporan tersebut pada Lampiran 10.

Berbagai reaksi dari peserta rapat, ada yang senang dan mendukung, tapi ada pula yang sangat marah karena penilaian seperti itu adalah wewenang Presiden/Panglima Tertinggi. Dalam rapat diputuskan bahwa tindakan yang diambil oleh PEPERDA TIGA SELATAN akan diambil alih oleh PEPERTI untuk penyelesaiannya.

Satu minggu kemudian keluar pengumuman Peperti bahwa PKI dapat melakukan kegiatannya kembali di tiga daerah tersebut. Namun walaupun telah ada pengumuman Peperti, tetapi Kolonel Hassan Basry selaku Peperda Kalimantan Selatan tetap bertekad menghentikan kegiatan PKI dan ormas-ormasnya di Kalimantan Selatan. Akibatnya tokoh-tokoh PKI yang mencoba mengadakan kegiatan, mereka tetap ditahan oleh Peperda Kalimantan Selatan sehingga PKI tetap dalam keadaan beku. Terlebih-lebih dari laporan Rapat Peperti/PKB tersebut tidak secara tegas menyalahkan Peperda Kalimantan Selatan.¹⁰

Pada awal September 1960, Kolonel Hassan Basry dipanggil menghadap Presiden dan meminta agar PKI diperbolehkan bergerak kembali, tetapi Kolonel Hassan Basry tetap pada pendiriannya menolak kegiatan PKI. Presiden Soekarno sampai dua kali mengajukan permintaan ini, tetapi Kolonel Hassan Basry tetap pada pendiriannya sehingga Presiden Soekarno sangat marah. Dan setahun kemudian barulah PKI dapat aktif kembali.

Sebenarnya sikap Peperda Kalimantan Selatan ini secara diam-diam telah mendapat restu dari Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, dan malah juga dengan Menko Pertahanan Keamanan Jenderal TNI Abdul Haris Nasution. Tetapi rupanya kedua pejabat tadi masih ragu-ragu untuk bertindak tegas dan cepat untuk mendukung sikap Peperda Kalimantan Selatan, mungkin melihat sikap beberapa KODAM yang ragu-ragu.

Dalam suatu pertemuan pada malam hari sekitar bulan Maret atau April 1960 di Kediaman Pangdam X/Lambung Mangkurat, Kolonel Ahmad Yani (waktu itu sebagai Deputy II KASAD) dengan dihadiri oleh Pangdam X/LM (Letkol Hassan Basry sebagai Penguasa Perang Daerah, Kepala Staf Penguasa Perang Daerah Mayor H. Aberanie Sulaiman, Kepala Staf KODAM X/LM Letkol M. Yusi, -Kolonel Ahmad Yani menggambarkan situasi politik Nasional secara panjang lebar, bahwa PKI sedang berusaha merongrong Angkatan Darat dalam rangka untuk mendominasi politik di Tanah Air. Juga disampaikan bahwa Presiden Soekarno telah mulai terpengaruh oleh fitnahan PKI karena disekeliling Presiden telah berkeliaran orang-orang PKI. Presiden juga akan membubarkan Masyumi dan PSI, sedangkan PKI tidak akan dibubarkan walaupun terkena Pempres No. 7 Tahun 1959.

Kolonel Ahmad Yani menjelaskan bahwa Angkatan Darat di Pusat tidak leluasa bergerak, dan oleh karena itu diharapkan daerah-daerahlah yang harus bergerak untuk membekukan PKI, karena PKI adalah partai politik yang paling berbahaya bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Selanjutnya Kolonel Ahmad Yani menjelaskan pula apabila Kalimantan Selatan telah membekukan PKI, maka akan menyusul Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur dan KODAM-KODAM lainnya diharapkan menyusul pula. Pada kesempatan itu Mayor A.E. Manihuruk atas izin Peperda mengajukan pertanyaan kepada Kolonel Ahmad Yani sebagai berikut :

- 1) Apakah gerakan Angkatan Darat ini bertujuan untuk membubarkan PKI atau hanya sekedar untuk memberikan peringatan kepada Presiden agar tidak main mata dengan PKI.
- 2) Apakah gerakan ini sifatnya jangka panjang atau jangka pendek.

¹⁰ Lihat Lampiran 11.

Kolonel Ahmad Yani tidak memberikan jawaban secara langsung, tetapi meminta agar Mayor A.E. Manuhuruk datang ke Jakarta untuk menerima penjelasan lebih lanjut.

Dari penjelasan Kolonel Ahmad Yani di Jakarta, ternyata Angkatan Darat tidak kompak, kecuali Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan.

Sinyalemen ketidakkompakan di kalangan TNI AD seperti tersebut di atas, juga pernah dinyatakan oleh D.N. Aidit (Ketua CC-PKI) dalam Rapat Politbiro CC-PKI di kantor CC-PKI Jalan Kramat Raya Jakarta dalam bulan Agustus 1965 yang dihadiri oleh : D.N. Aidit, H.M. Lukman, Nyoto, Sudisman, Ir. Sakirman, Amir Anwar Sanusi dan Nyono, bahwa terdapat beberapa perbedaan pendapat antara Jenderal TNI A.H. Nasution dengan Letjen A. Yani.

Sekembalinya Mayor A.E. Manihuruk dari Jakarta dan memberikan laporan kepada Kolonel Hassan Basry. Kolonel Hassan Basry secara tegas menyatakan bahwa apapun yang terjadi, PKI di Kalimantan Selatan harus dibekukan dan beliau bersedia menanggung konsekuensinya.

Dengan tegas pula Kolonel Hassan Basry mengatakan bahwa : “Tidak ada jalan mundur, karena sudah saya janjikan pada Pak Nasution”. Rupanya telah ada kontak sebelumnya dengan Jenderal Nasution. Pada tanggal 16 Agustus 1960, Kolonel Hassan Basry selaku Peperda Daerah Kalimantan Selatan mengadakan pertemuan dengan Brigjen Kusno Utomo selaku Deyah Komando Kalimantan, dan Brigjen Kusno Utomo memberikan dukungan sepenuhnya.

Di daerah-daerah PKI dan onderbouw-nya mulai mencoba mengadakan test-case dengan aksi sepihak misalnya : peristiwa Jengkol (Kediri), peristiwa Bandar Betsy (Tanjung Morawa – Sumatera Utara), pembakaran gedung USIS di Surabaya, peristiwa Kanigoro di Blitar dan lain-lain seakan-akan tidak terbendung lagi. Gerakan Partai Komunis Indonesia dengan seluruh mantel organisasinya, misalnya :

- 1) ACOMA (Angkatan Komunis Muda)
- 2) BTI (Barisan Tani Indonesia)
- 3) HSI (Himpunan Sarjana Indonesia)
- 4) SEBDA (Serikat Buruh Daerah Otonom)
- 5) LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat)
- 6) GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia)
- 7) PERBUM (Persatuan Buruh Minyak)
- 8) CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia)
- 9) IPPI (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia)
- 10) PEMUDA RAKYAT
- 11) SOBSI (Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia)
- 12) PERHIMI (Perhimpunan Mahasiswa Indonesia)
- 13) BAPERKI (Badan Permusyawarah Kewarganegaraan Indonesia)
- 14) PGRI Non Vakcentral
- 15) ICHWANUL MUSLIMIN

Jaringan kekuatan Partai Komunis Indonesia di Kalimantan Selatan bertambah meluas kesegnap pelosok Daerah Tk. II, dimana pergerakannya di Propinsi adalah CDB (Comite Daerah Besar) dan di Daerah Tk. II adalah Comite Daerah (CD). Pimpinan CDB Kalimantan Selatan adalah Amar Hanafiah, yang pada mulanya adalah seorang santri, kemudian berubah menekuni ajaran radikal. Dengan dicabutnya larangan kegiatan PKI dan mantel organisasinya oleh Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) menyebabkan PKI secara lebih berani dan terbuka memasuki kehidupan masyarakat. Kedudukan mereka yang secara resmi diakui dalam Front Nasional membuat mereka lebih aktif dalam menggerakkan rapat-rapat dengan pengerahan massa yang tidak kenal lelah.

C. KONSTELASI KEKUATAN PARTAI POLITIK DI KALIMANTAN SELATAN

Presiden Soekarno semakin berusaha merealisasikan tegaknya Demokrasi Terpimpin, dan dengan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960 maka Dewan Perwakilan rakyat Hasil Pemilu 1955 dibubarkan dan kemudian dibentuklah DPR-GR (Dewan Perwakilan rakyat – Gotong Royong) pada tanggal 24 Juni 1960 dengan komposisi sebagai berikut :

a. Partai Politik 130 orang.

PNI	= 44	NU	= 36	PKI	= 30
Perti	= 2	PSII	= 5	Murba	= 10
Parkindo	= 1	Kristen	= 6	Katholik	= 5

b. ABRI 35 orang.

AD	= 15	AU	= 7
OKD/OPR	= 1	AL	=

c. Golongan Karya 95 orang.

Tani	= 25	Buruh	= 25
Alim Ulama Islam	= 8	Ulama Protestan	= 3
Ulama Katholik	= 2	Ulama Hindu Bali	= 2
Pemuda	= 5	Koperasi	= 3
Pengusaha nasional	= 2	Angkatan 45	= 2
Veteran	= 2	Seniman	= 2
Wartawan	= 2		

d. Wakil Irian Barat 1 orang.

Jumlah keseluruhan 261 orang dan dengan demikian terwujudlah cita-cita Presiden Soekarno untuk menggagalkan kekuatan NASAKOM dalam Dewan Perwakilan Rakyat.

Mau tidak mau harus kita akui bahwa PKI adalah sebuah partai yang anggotanya mempunyai disiplin yang tinggi dan mempunyai jalur yang sentralistik. Struktur organisasinya pun sangat lengkap dan terperinci sebagai berikut :

- Untuk seluruh Indonesia ada Kongres Partai dan Komite Central (CC).
- Untuk tiap Daerah Swatantra Tk. I ada Konferensi Partai Daerah Besar dan Komite Daerah Besar (CDB).
- Untuk ibukota RI (Jakarta Raya) ada Konferensi Partai Jakarta Raya dan Komite Jakarta Raya (CDR) yang kedudukannya sama dengan CDB.
- Untuk pulau atau pulau-pulau yang ditentukan oleh CC ada Konferensi Partai Pulau atau Pulau-pulau dan Komite Pulau atau Pulau-pulau (CP) yang dipimpin langsung oleh CC atau CDB.
- Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan kota-kota yang ditentukan oleh CC ada Konferensi Partai daerah Yogyakarta (CDJ) dan Komite Kota (CK) yang dipimpin langsung oleh CDB.
- Untuk Daerah Swatantra Tk. II dan Daerah dibawah Swatantra Tk. II yang ditentukan oleh CC ada Konferensi Seksi Partai dan Komite Seksi (CS).
- Untuk daerah Swatantra Tk. III atau Kecamatan atau Daerah dibawah Kecamatan yang ditentukan oleh CDB atau CP ada Konferensi Sub-Seksi partai dan Komite Sub-Seksi (CSS).
- Untuk pabrik, tambang, desa, perusahaan, sekolah, perguruan tinggi, kantor dan tempat kerja lainnya ada Rapat Resort dan Komite Resort (CR) atau Konferensi Resort Besar dan Komite Resort Besar (CRB).

Disamping itu ada Pengurus Harian CC (Polit Biro) dan Organisasi tidak terstruktur (Biro Khusus).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah – Gotong Royong (DPRD-GR) berdasar Peraturan Peralihan dari Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959, Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Oktober 1959 No. 1/DESO.

Komposisi keanggotaan DPRD-GR Propinsi Kalimantan Selatan berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Desember 1964 No. Des/2/27/15-23 dan tanggal 12 Mei 1966 No. Des/2/10/28-74 adalah sebanyak 40 (empat puluh) orang terdiri dari 20 (dua puluh) orang mewakili partai Politik dan 20 (dua puluh) orang mewakili Golongan Karya. Dengan komposisi sebagai berikut :

a. Partai Politik terdiri dari :

NU	= 13	PNI	= 1	PSII	= 1
IPKI	= 2	Parkindo	= 1	Katholik	= 1
Perti	= 1				

b. Golongan Karya terdiri dari :

Alim Ulama Islam	= 2	Hansip	= 1
Cendekiawan	= 2	Pemuda	= 2
Tani	= 2	Wartawan	= 1
Angkatan Darat	= 1	Angkatan Kepolisian	= 1
Buruh	= 1	Wanita	= 1
Veteran	= 1	SKDN	= 1
Pengusaha Nasional	= 1	Pendidik	= 1
Angkatan 45	= 1		

Komposisi keanggotaan DPR-GR ini tetap berlangsung sampai akhirnya diberlakukannya Undang-undang No. 18 Tahun 1965.

Sesuai Penres No. 5 Tahun 1960 Kepala Daerah merangkap sebagai Ketua DPRD bukan anggota.

Komposisi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah – Gotong Royong Propinsi Kalimantan Selatan terdiri dari : H. Abdul Ganie Majedi (unsur NU) sebagai Ketua, Gt. Achmad Sugian Noor (unsur PNI) sebagai Wakil Ketua, Saderi (unsur SKDN) sebagai Wakil Ketua.

Sebelum terjadinya G 30S/PKI serta pembekuan Partai Murba (1965), maka Partai-partai Politik Kalimantan Selatan sebagai berikut :

- a. Partai Nahdlatul Ulama (NU)
- b. Partai Nasional Indonesia (PNI)
- c. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
- d. Partai Komunis Indonesia (PKI)
- e. Partai Islam PERTI
- f. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI)
- g. Partai Kristen Indonesia (PARKINDO)
- h. Partai Katholik
- i. Partai Indonesia (PARTINDO)
- j. Partai Murba

Atas desakan PKI maka dengan Keppres No. 291/1965, sebelum peristiwa G 30S/PKI, Partai Murba dibubarkan. Setelah meletusnya peristiwa G 30S/PKI maka dengan Keppres No. 1/3/1966

tanggal 12 Maret 1966, PKI/ormas-ormasnya dibubarkan, sebaliknya Partai Murba direhabilitasi dengan Keppres No. 223/196 tanggal 17 Oktober 1966.

Kemudian diresmikan partai baru yaitu Partai Muslim Indonesia dengan Keppres No, 70/1968 tanggal 20 Februari 1968 yang untuk daerah Kalimantan Selatan dengan pengumuman Gubernur Kdh. Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 22 April 1968 No. PENG-IX-1-2-217 sehingga keseluruhan partai politik yang ada sebanyak 11 (sebelas).

Disamping Partai Politik juga berdiri Organisasi massa/golongan karya/kesatuan-kesatuan aksi sebagai berikut :

- a. Ormas Non – affiliated
 - 1) Serikat Karyawan Dalam Negeri (SKDN)
 - 2) Pertiwi
 - 3) Gerakan Karyawan Maritim Indonesia (KAMA-IND)
 - 4) Angkatan 45
 - 5) Wanita Angkatan 45
 - 6) Warga Tani Angkatan 45
 - 7) Sentral Organisasi Karyawan Sosialisasi Indonesia (SOKSI)
 - 8) Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia (KBKI)
 - 9) Persatuan Rakyat Tani (PERTA)
 - 10) Persatuan Guru Republik Indoensia (PGRI)
 - 11) Persatuan Wanita Indonesia (PWI)
 - 12) Majelis Ulama
 - 13) Persatuan Wartawan Indonesia
 - 14) PIT – Kartika Chandra Kirana
 - 15) Bhayangkara
 - 16) Adhiyaksa Dharma Kartini
 - 17) Wanita Veteran
 - 18) Jalasenastri
 - 19) Sabarati
 - 20) Persatuan Istri AURI
 - 21) Pelopor Pemuda Progresif Indonesia (P3I)
 - 22) Gerakan Wanita Sosialis Indonesia (GERWASI)
 - 23) Lembaga Kebudayaan Rakyat Indonesia (LEKRI)
 - 24) Himpunan Pemuda Pemudi Indonesia (HIPPIINDO)
- b. Majelis Synode Gereja Kristen Evangelis (GKE)
- c. Wanita Islam
- d. Badan Koordinasi Kesatuan-kesatuan Aksi
 - 1) Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI)
 - 2) Kestuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI)
 - 3) Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI)
 - 4) Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI)
 - 5) Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI)
 - 6) Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI)
 - 7) Kesatuan Aksi Pengusaha Nasional Indonesia (KAPNI)
- e. Himpunan Pelajar Kitab Suci Al-Qur'an
- f. Pelopor Mahasiswa Sosialis Indonesia (PELMA SI)
- g. Organisasi Pelajar Progresif Indonesia

- h. Ikatan Siswa Antar Indonesia
- i. Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI)
- j. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
- k. Pelajar Islam Indonesia (PII)
- l. Persatuan Sarjana Muslimin Indonesia (PERSAMI)
- m. Komando Aksi Pemuda Anti Kontra Revolusioner Indonesia (KAPAK)
- n. Karyawan Revolusioner Indonesia
- o. Al-Jamiatul Washhiyah

D. PEMEBASAN IRIAN BARAT (TRIKORA)

Pergolakan politik di dalam negeri diiringi pula dengan pergolakan politik luar negeri Indonesia dalam rangka pembebasan wilayah Irian Barat berupa :

- a. Keputusan dan hubungan diplomatik dengan Pemerintah Belanda disampaikan oleh Presiden Soekarno pada HUT Proklamasi RI ke 15 tanggal 17 Agustus 1960. Sikap ini sebagai reaksi atas tindakan Pemerintah Belanda yang memperkuat Pertahanan Irian Barat dengan pengiriman pesawat tempur Hunter Hawk dan kapal induk Karel Doorman.
- b. Dalam rapat raksasa di Yogyakarta tanggal 19 Desember 1961 (peringatan serangan Belanda atas Maguwo), Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, mengeluarkan komandonya yang terkenal dengan TRIKORA (Tri Komando Rakyat) yang selengkapnya sebagai berikut :

TRI KOMANDO RAKYAT

Kami Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi dengan pihak Belanda untuk membebaskan Irian Barat telah memberikan Instruksi kepada Angkatan Bersenjata untuk pada setiap waktu yang kami akan tetapkan menjalankan tugas kewajiban membebaskan Irian Barat tanah air Indonesia dari belenggu kolonialisme Belanda.

Dan kami, oleh karena Belanda masih tetap mau melanjutkan kolonialisme di tanah air kita Irian Barat, dengan memecah-belah bangsa dan tanah air Indonesia, maka kami memerintahkan kepada rakyat Indonesia, juga yang berada di Irian Barat, untuk melaksanakan Tri Komando Rakyat sebagai berikut :

- 1. Gagalakan pembentukan negara Boneka Papua buatan Belanda kolonial.*
- 2. Kibarkan sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia*
- 3. Bersiap-siaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.*

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati perjuangan kemerdekaan Indonesia.

*Yogyakarta, 19 Desember 1961
Presiden/Pangti ABRI PBRI
Panglima Besar Komando Tertinggi
Pembebasan Irian Barat*

SOEKARNO

Dengan Trikora tersebut jelaslah ada komando dari presiden untuk membebaskan Irian Barat dari cengkraman penjajah Belanda. Rakyat Indonesia diharuskan ikut serta ambil bagian dalam usaha mobilisasi umum atau penambahan jumlah tentara dengan jalan masuk sebagai anggota sukarelawan/sukarelawati untuk membebaskan Irian Barat.

Sebagai pelaksanaan dari Trikora untuk membebaskan Irian Barat, maka tanggal 12 Januari 1962 dibentuklah suatu Komando Operasi yang diberi nama Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Tugasnya :

- a. Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi-operasi militer dengan tujuan mengembalikan wilayah Propinsi Irian Barat ke dalam kekuasaan Negara Republik Indonesia.
- b. Mengembangkan situasi militer di Irian Barat :
 - 1) Sesuai dengan taraf-taraf perjuangan diplomasi.
 - 2) Supaya dalam waktu sesingkat-singkatnya Irian Barat dapat secara de Facto diciptakan daerah-daerah bekas atau kedudukan unsur-unsur kekuasaan/pemerintah daerah Republik Indonesia.

Sebagai Pimpinan Komando Mandala :

- Panglima : Brigadir Jenderal Soeharto
- Wakil Panglima I : Kolonel (Laut) Subono
- Wakil Panglima II : Kolonel (Udara) Leo Wattimena
- Kepala Staf Gabungan : Kolonel Ahmad Tahir

Sebagai salah satu isi komando tadi adanya mobilisasi umum seluruh rakyat Indonesia, dan kesempatan ini digunakan oleh PKI untuk menggerakkan aksi massanya yang aktif mendaftarkan diri sebagai sukarelawan dan sukarelawati.

Sedang di Kalimantan Selatan penerimaan sukarelawan dan sukarelawati terbatas dan terseleksi dengan ketat, sehingga menutup kemungkinan oknum PKI menyusup sebagai sukarelawan dapat dicegah, karena pendaftaran sukarelawan/sukarelawati tidak melalui organisasi massa tetapi oleh Peperda Kalimantan Selatan.

Sebaliknya kegiatan melatih rakyat dalam perang semesta ditingkatkan melalui organisasi Pertahanan Sipil sampai ke kampung/pedesaan.

Potensi masyarakat dikerahkan melalui dan dibawah koordinasi Front Nasional Pembebasan Irian Barat dengan pembentukan Badan Kerja Sama (BKS) yang meliputi antara lain : BKS Ulama – Militer, BKS Cendekiawan – Militer, BKS Seniman – Militer, BKS Wanita – Militer dan lain-lain semakin ditingkatkan.

Sebagai tindak lanjut dari komando TRIKORA maka pada tanggal 2 Januari 1962 dibentuklah suatu Komando Operasi yang diberi nama KOMANDO MANDALA. Komando Mandala ini bertugas menyiapkan operasi militer besar-besaran yang langsung menusuk ke jantung pertahanan lawan.

Sebelumnya telah diadakan gerakan-gerakan penyusupan (*infiltrasi*) secara terpecar jauh dibelakang garis pertahanan musuh dengan maksud memecah perhatian lawan, dan penyusupan ini dilakukan oleh satuan-satuan RPKAD – Angkatan Darat, PGT – Angkatan Udara dan Pelopor – Brimob dengan dukungan satuan-satuan gerilyawan setempat antara lain dipimpin oleh Mandacan Cs.

Operasi besar-besaran ini diberi sandi “Operasi Jaya Wijaya”. Dan Republik Indonesia mengerahkan kekuatan militer penuh yang meliputi :

- a. Matra Darat

Meliputi Lintas Udara dan pasukan pendarat sebanyak 2 (dua) divisi dan 3 (tiga) batalyon.

b. Matra Udara

Meliputi pesawat-pesawat :

Albatros (anti Kapal selam)	: 6 buah
P51 – Mustang	: 6 buah
Mig – 17	: 18 buah
Tu 16 (pembom)	: 6 buah
TU 16/KS (pembom jarak jauh)	: 12 buah
Kercules (angkut pasukan)	: 12 buah
Helicopter	: 2 buah
Ilyushin 28	: 6 buah
Otter	: 2 buah
B 26 Mitchell	: 4 buah
Dakota	: 18 buah
Pasukan Gerak Cepat	: 1 brigade
GIA	

c. Matra Laut

Meliputi kapal perang :

Amphibi	: 60 buah
Kapal Selam	: 4 buah + 2 tender
Kapal cepat torpedo	: 12 buah
Pasukan KKO (Korps Komando)	: 6.700

Operasi Jaya Wijaya direncanakan tanggal 15 Agustus 1963 bertepatan dengan persiapan Peringatan hari Proklamasi. Sehingga Belanda mengira kita masih asyik bergembira merayakan Hari Kemerdekaan tersebut. Tapi pesawat mata-mata Amerika (U-2) telah merekam persiapan militer Indonesia tidaklah main-main. Amerika Serikat segera meminta Belanda untuk berpindah ke meja perundingan. Sebab kalau tidak akan terjadi banjir darah di Irian Barat. Target Operasi Jaya Wijaya bahwa seluruh Irian Barat dapat diduduki pada tanggal 17 Agustus 1963.

Setelah PBB ikut campur dan pada tanggal 15 Agustus 1962 di Markas Besar PBB di New York ditandatangani persetujuan antara Indonesia dengan Belanda antara lain :

- a. Untuk sementara waktu Irian Barat dibawah Pemerintah sementara PBB (*U.N. Temporary Executive Authority* – UNTEA).
- b. Pemerintah PBB memakai orang Indonesia, dan putra – putri Irian Barat dan Belanda yang diperlukan.
- c. Pasukan Indonesia tetap di Irian Barat di bawah kekuasaan PBB.
- d. Antara wilayah Irian Barat dengan wilayah Indonesia lainnya belaku lalu lintas bebas.
- e. Pada tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai berkibar disamping bendera PBB.
- f. Paling lambat 1 Mei 1963 Aparat Sipil dan Militer Belanda harus meninggalkan Irian Barat dan Irian Barat resmi masuk Republik Indonesia dengan catatan paling lambat 10 Agustus 1968 akan diadakan pelaksanaan penentuan pendapat rakyat (Pepera – *Ascertainment of the Wishes of the People*)

E. KEMBALI KE KEADAAN TERTIB SIPIL

1. Penyerahan Kewenangan Bidang Pemerintahan Umum kepada Daerah Otonom

Sampai pada tanggal 1 Mei 1963 daerah Kalimantan berlaku dalam keadaan darurat perang sehingga pemerintahan dipimpin dan dalam tanggung jawab aparat militer. Kemudian sejak 1 Mei 1963 berlaku kembali keadaan tertib sipil sehingga pemerintahan sipil terletak di tangan Gubernur Kepala Daerah untuk wilayah Propinsi, dan Bupati/Walikota Kepala Daerah pada wilayah Kabupaten/Kotamadya.¹¹

Pada masa ini masih berlaku Penpres No. 6/1959 (disempurnakan) dimana kedudukan Gubernur, dan Bupati/Walikota Kepala Daerah adalah sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan juga sebagai alat Pemerintah Pusat dengan tugas :

- 1) Memimpin dan mengkoordinir Dinas-dinas Pemerintah yang ada di daerah baik vertikal maupun horizontal.
- 2) Melaksanakan pengawasan atas jalannya Pemerintah Daerah baik represif maupun preventif.
- 3) Mengurus ketertiban dan keamanan umum di dalam daerah.

Penyerahan tugas-tugas Pemerintah Pusat dalam bidang Pemerintahan Umum kepada Pemerintah Daerah baru di realisir tanggal 15 Mei 1964.

Sebagai alat Pemerintah Daerah, melaksanakan otonomi daerah dari tugas-tugas pembantuan (*medebewind*) yang bertanggungjawab kepada DPRD, tapi DPRD tidak dapat menjatuhkan Kepala Daerah. Pemerintah Daerah terdiri dari : Kepala Daerah, Badan Pemerintah Harian (BPH), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

2. Pengangkatan Letkol H. Aberanie Sulaiman sebagai Gubernur Kepala Daerah

Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 5 September 1963, Letkol H. Aberanie Sulaiman diangkat menjadi Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan dan kemudian dilantik pada tanggal 27 September 1963. Peristiwa pengangkatan Gubernur Kepala Daerah ini akan diulas tersendiri pada bagian lain.

Sejak tanggal tersebut dilaksanakan serah terima Pimpinan Pemerintahan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan dari Pejabat Gubernur Kepala Daerah yang lama yaitu Brigjen H. Abu Yazid Busthomi kepada Gubernur Kepala Daerah yang baru yaitu Letkol H. Aberanie Sulaiman. Sebelum Brigjen H. Abu Yazid Busthomi sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Kalsel ditunjuk A.A. Rivai untuk beberapa bulan.

Untuk lebih efektifnya Pemerintahan Sipil yang baru berjalan 4 (empat) bulan, maka sebagai tindakan pertama ditetapkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tanggal 15 Agustus 1963 No. Set/35/III/63 dan mengangkat 3 (tiga) orang Pembantu Gubernur yang masing-masing memimpin :

- a. Bidang Pelaksanaan
Meliputi bagian-bagian keprajaan, ekonomi, desentralisasi, politik, keamanan dan desa.
- b. Bidang Administrasi.
Meliputi bagian-bagian umum/perlengkapan, kepegawaian, keuangan, tata usaha, perUndang-undangan.
- c. Bidang Pengawasan/pembinaan
Meliputi pengawasan, pendidikan dan latihan kepegawaian, research dan planning, sensus, penelitian-penelitian/komando yang dipimpin oleh Gubernur.

¹¹ Sebelum Keadaan Tertib Sipil, untuk beberapa waktu berlaku Keadaan Darurat Militer; wewenang PEDARMILDA tidak sebesar wewenang PEPERDA. Lihat pula LAMPIRAN VI.

3. Konspirasi Untuk Menyisihkan Tokoh-tokoh Daerah yang Anti Komunis

Pemerintahan di Kalimantan Selatan mulai berubah kesuasana Tertib sipil terutama setelah wilayah Irian Barat kembali kepangkuan Republik Indonesia. Kolonel M. Yusi, Pangdam X/LM yang terkenal paling anti dengan PKI ditarik ke Mabes Angkatan Darat, dan sebagai penggantinya ditetapkan Kolonel Amir Mahmud terhitung tanggal 5 September 1962 tetapi secara efektif jabatan Pangdam X/LM baru bisa dipegang sepenuhnya pada pertengahan November 1962. Walaupun Kolonel M. Yusi sudah di mutasi ke Mabes Angkatan Darat, tetapi beliau masih di Banjarmasin dan untuk sementara sebelum kedatangan Pangdam X/LM yang baru, maka tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Kasdam X/LM yaitu Letkol Piet Ngantung.

Stabilitas politik dipermukaan kelihatan tenang-tenang saja dan suasana politik dikendalikan dengan dukungan partai-partai besar : NU – PNI – PKI, sedangkan partai-partai MURBA, IPKI, PSII, Parkindo, Partai katolik dan Partindo dapat dikatakan tidak begitu besar pengaruhnya. Sebagai catatan bahwa pada waktu itu partai NU dikuasai oleh generasi muda dengan militansi yang tinggi dan organisasi pemuda yaitu GP Anshor merupakan organisasi pemuda terbesar di Kalimantan Selatan.

Sedang setelah pelarangan terhadap MASYUMI dan PSI, tokoh-tokohnya bersikap pasif saja, dan bahkan banyak bergerak di bidang perdagangan.

Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan waktu itu adalah H. Maksid seorang pendukung pelarangan kegiatan PKI di Kalimantan Selatan. Sekitar Januari 1963, banyak surat-surat kaleng dan surat terbuka ditujukan kepada Kolonel Amir Mahmud yang melaporkan bahwa H. Maksid telah menyelewengkan uang Pemerintah Daerah dalam perusahaan Pelayaran Tanjung Selatan. Perusahaan Pelayaran Tanjung Selatan merupakan usaha patungan antara Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dengan Kho Sek Beng, seorang WNI keturunan Cina.

Walaupun laporan tersebut belum jelas kebenarannya tapi Jaksa Tinggi M.D. Harahap, SH mengatakan sudah ada bukti yang mengarah ke tindak pidana penyelewengan itu.

Jaksa Tinggi M.D. Harahap, SH menyarankan agar sebelum diadakan penangkapan terhadap H. Maksid maka Presiden Direktur Perusahaan Pelayaran Tanjung Selatan harus ditangkap lebih dahulu. Kemudian Jaksa Tinggi M.D. Harahap, SH minta agar tindakannya di-*back up* oleh Pangdam X/LM

Akhirnya Kho Sek Beng ditangkap bersama beberapa saksi lainnya. Pemeriksaan secara intensif terus dilakukan, tapi belum ada bukti jelas yang mengarah terlibatnya Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan H. Maksid. Mungkin agar lebih cepat menemukan bukti-bukti maka kadang-kadang interogasi dilakukan dengan keras dan tidak wajar, dan kabar ini sampai kepada Deputy Wilayah Kalimantan Brigjen Hassan Basry dan beliau sangat marah. Pada akhir April 1963, beliau mengerahkan 2 (dua) Kompi Baret Hijau (Raiders Kalimantan) dipimpin oleh Kapten M. Yunan untuk mengepung rumah tahanan dan membebaskan Kho Sek Beng. Rumah Jaksa Tinggi M.D. Harahap, SH di kepung, dan beruntung yang bersangkutan tidak ada di rumah. Keadaan semakin tegang, karena Pangdam X/LM juga mengerahkan seluruh jajaran pasukan termasuk pasukan yang ada di daerah-daerah (KODIM), Kepolisian, Angkatan Laut, Angkatan Udara karena jabatan Pangdam X/LM juga menjabat sebagai Penguasa Darurat Militer Daerah Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin dapat dikuasai kembali termasuk menguasai lapangan udara (sekarang Syamsuddin Noor).

Pasukan Raiders kembali ke markasnya, karena mereka mengetahui kekuatan yang tidak berimbang.

Selanjutnya hubungan telpon ke rumah Brigjen Hassan Basry dan Kolonel M. Yusi diputus dan kedua pejabat tersebut di perintahkan dengan status tahanan rumah (huis-arrest). Jaksa Tinggi M.D. Harahap, SH diperintahkan juga meninggalkan Banjarmasin dan tidak kembali lagi ke pos-nya

sebagai Jaksa Tinggi Kalimantan Selatan dan menurut berita yang bersangkutan dipindahkan ke Jawa Timur.

Kho Sek Beng Affair akhirnya ditangani oleh Jaksa Agung di Jakarta dan Kho Sek Beng dipindahkan ke Jakarta, demikian pula H. Maksid dipanggil oleh Kejaksaan Agung ke Jakarta dan tidak kembali lagi ke Banjarmasin. Kembali terdengar bocoran dalam interogasi dimana kedua tersangka diperlakukan dengan tidak wajar dan ditahan di ruang tahanan yang tidak pantas.

Kemudian Brigjen Hassan Basry dipindahkan ke Jakarta, dan sementara menunggu penggantinya maka Kepala Staf Kolonel Wahman memegang tugas sehari-hari.

Pada tanggal 26 Agustus 1963, Menteri Panglima Angkatan Darat melantik Deputy Wilayah yang baru, Brigjen M. Panggabean dilantik menjadi Mayjen dan kemudian dilantik sebagai Deputy Wilayah Kalimantan. Kemudian Deputy Wilayah Kalimantan melantik Kolonel Munadi sebagai Kepala Staf Komandan Antar Daerah Kalimantan (KOANDA) menggantikan Kolonel Wahman. Pada tahun 1964 perkara Kho Sek Beng dan H. Maksid ini diadili di Jakarta dan dibebaskan dari tuntutan karena tidak bersalah. H. Maksid sendiri kedudukannya direhabilitasi kembali sebagai Pegawai Negeri dan diangkat sebagai Staf Ahli Mendagri bidang Pembangunan Masyarakat Desa.

Sejumlah ex anggota Staf Peperda (semasa Pangdam M. Yusi) antara lain Yusuf Djaya, M. Suriansyah Ideham, maupun dari PT. PENASTA antara lain Alwar Djarkasi, Abul Hassan Gaffar, mengalami pemeriksaan yang menyakitkan perasaan oleh Tim dari pusat yang terdiri dari dua orang Jaksa dan seorang perwira CPM. Yusuf Djaya dan Anwar Djarkasi bahkan dipenjarakan.

4. Kasus Pengangkatan Gubernur Kepala Daerah

Setelah Departemen Dalam Negeri memanggil H. Maksid ke Jakarta dan sejak itu ditunjuk Kolonel H. Abu Yazid Busthomi sebagai Pejabat Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang bersangkutan tiba di Banjarmasin pada akhir Mei 1963.

Dalam Rapat Catur Tunggal Kalimantan Selatan pada akhir Agustus 1963, Catur Tunggal membicarakan perlunya ditetapkan seorang Gubernur yang definitif. Hasil pembicaraan dalam rapat ini bahwa diusulkan : Kolonel H. Abu Yazid Busthomi sebagai Gubernur Kepala Daerah, dan Letkol H. Aberanie Sulaiman sebagai Wakil Gubernur.

Pada tanggal 19 September 1963, pejabat Gubernur Kolonel H. Abu Yazid Busthomi meminta dengan sangat agar diadakan Rapat Catur Tunggal malam itu juga, karena Pejabat Gubernur Kolonel H. Abu Yazid Busthomi sudah menerima Surat Keputusan dari Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Letkol H. Aberanie Sulaiman menjadi Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Selatan, dan berita ini sangat bertentangan dengan berita yang berkembang sebelumnya (yang sumbernya juga dari Kolonel H. Abu Yazid Busthomi) bahwa sudah hampir bisa dipastikan bahwa Kolonel H. Abu Yazid Busthomi yang menjadi Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan. Berita selanjutnya bahwa dengan SK Presiden Republik Indonesia No. 185 Tahun 1963 tanggal 5 September 1963, pelantikan dilakukan oleh Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Ipiq Gendamana pada tanggal 27 September 1963. Dari pembicaraan yang berlangsung dalam Rapat Panca Tunggal, terlihat jelas kekesalan dan kekecewaan Kolonel H. Abu Yazid Busthomi.

5. Penyempurnaan Lembaga Catur Tunggal menjadi Panca Tunggal

Lembaga Catur Tunggal dalam rapat Presidium Kabinet dengan para Catur Tunggal Tk. I oleh Presiden Soekarno agar ditingkatkan menjadi Panca Tunggal dengan menambahkan Ketua-Ketua Periodik Front Nasional Tk. I dan Tk. II ke dalamnya.

Atas dasar Keputusan Presiden No. 71 tahun 1964 tanggal 2 April 1964 tentang pembentukan Panca Tunggal, pada pertengahan April 1964, Catur Tunggal Kalimantan Selatan, mengadakan

rapat. Dalam rapat kali ini semua Ketua Periodik Front Nasional Kalimantan Selatan diundang yaitu : Drs. Aspan Marhasan (PNI), H. Abdulgani Majedi (NU), dan Amar Hanafiah (PKI).

6. Pembentukan Front Nasional Daerah

Ketinggalan jauh dari daerah-daerah lain karena adanya penghentian kegiatan PKI oleh PEPERDA KALSEL (SK No. 140/S/K.P/tahun 1960) NASAKOM dan pembentukan FRONT NASIONAL di Kalimantan Selatan, dipacu oleh tokoh-tokoh partai politik, seperti Amar Hanafiah dan A. Darlian Gani (PKI), Aspan Marhasan (PNI), H. A. Abdulgani Majedi (NU), Ideham (PSII).

Sebelumnya juga Front Nasional Kalimantan Selatan telah terbentuk yang diketuai oleh Letkol Piet Ngantung (Kasdam X/LM), tetapi tidak disahkan oleh Pengurus Besar Front Nasional Pusat karena unsur PKI tidak dimasukkan ke dalamnya, padahal syarat utama Front Nasional di semua tingkat harus berporoskan NASAKOM.

Front Nasional Kalimantan Selatan yang ketuanya semula dijabat oleh Letkol Piet Ngantung dan sekretarisnya adalah Mayor A.E. Manihuruk.

Letkol Piet Ngantung menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua merangkap anggota Front Nasional Kalimantan Selatan, kemudian setelah diadakan konsultasi maka Rapat memutuskan Kolonel Amir Mahmud sebagai ketua merangkap anggota.

Pada komposisi awal Pengurus Front Nasional Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Perorangan : 5 orang
 - b. Unsur Karya : 12 orang
 - c. Unsur Politik : 6 orang
- Sehingga berjumlah : 23 orang

Tapi setelah diteliti kembali maka komposisinya disempurnakan sebagai berikut :

- a. NU : 8 orang
- b. PNI : 4 orang
- c. PKI : 1 orang
- d. MURBA : 1 orang
- e. IPKI : 2 orang
- f. PSII : 1 orang
- g. Perorangan : 3 orang
- h. Golongan Fungsional : 3 orang

Tugas pokok dari Front Nasional adalah untuk menggalang massa untuk meningkatkan perjuangan dan pembangunan bangsa disegala bidang, tapi dalam kenyataannya ada partai-partai politik dan pendukungnya hanya memperjuangkan kepentingan partainya, sehingga tidak jarang terjadi perdebatan-perdebatan yang hangat.

F. KONFRONTASI DENGAN MALAYSIA (DWIKORA)

Setiap kesempatan digunakan oleh PKI dan ormasnya untuk menggalang kekuatan sendiri bahkan juga kalau mungkin meng-infiltrasi ke partai politik/organisasi lain.

Melalui Komando DWIKORA pada tanggal 3 Mei 1964 dimana Presiden/Panglima Tertinggi menyerukan konfrontasi dengan Malaysia. Dalam Front Nasional dibentuk Aksi Pengganyangan Malaysia, PKI sangat berperan.

Dalam Apel Besar tanggal 3 Mei 1964 tersebut dikeluarkan DWI KOMANDO RAKYAT (Dwikora) yang isinya :

- a. Bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaysia, Singapore, Sabah, Serawak dan Brunei, -untuk menggagalkan pembentukan Negara Boneka Malaysia.
- b. Memperkuat pertahanan Revolusi Indonesia.

Secara konkrit dibentuk KOMANDO MANDALA SIAGA (KOLAGA), yaitu terdiri atas Komando Mandala I dan Komando Mandala II dan Daerah Kalimantan Selatan termasuk Komando Mandala II (Kolada) dengan Panglimanya Deputy Wilayah Kalimantan Mayjen Maraden Panggabean.

Pasukan-pasukan sukarelawan dibentuk untuk menyusup ke Wilayah Malaysia Timur, antara lain Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PARAKU) di bawah pimpinan Bang Kifli (Zulkifli) dan Pasukan Gerilya Rakyat Serawak (PGRS) yang merupakan gerilyawan Komunis.

Di seluruh Indonesia sampai ke kampung-kampung disiagakan pasukan perlawanan rakyat. Orasi-orasi dan latihan militer Pertahanan Sipil ditingkatkan dengan efektif.

Di daerah Kalimantan Selatan suasana perang benar-benar disimulasikan. Suatu kegiatan gabungan antara kekuatan militer dan rakyat diwujudkan dalam Manuver Mandau Telabang Kalimantan selama 2 (dua) minggu. Khususnya untuk Kota Banjarmasin sampai ke Kota Martapura selama 24 (dua puluh empat) jam penuh dijaga oleh Pasukan Pertahanan Sipil dan Perlawanan Rakyat. Jam malam diadakan dan bagi yang bepergian pada malam hari harus tahu sandi tanya dan sandi jawab yang tiap harinya dengan sandi yang berganti-ganti. Yang tidak dapat menjawab sandi akan ditahan dan di-interogasi. Sandi dilakukan dengan suara dan atau isyarat lampu pada malam hari.

Pada hari akhir Manuver Mandau Telabang Kalimantan, disimulasikan penuh dengan :

- a. Serangan pesawat tempur dan pembom musuh ke landasan terbang Ulin dan musuh berhasil menduduki Lapangan Terbang Ulin.
- b. Serangan balasan dari pasukan Angkatan Bersenjata dengan serangan buru sergap Pesawat Mig-19 dan Mig-21 serta Pembom Ilyushin terhadap kekuatan musuh di lapangan terbang disertai serangan pasukan payung untuk menduduki lapangan terbang serta secara bersamaan serbuan kekuatan rakyat (Pertahanan Sipil dan Perlawanan Rakyat).

Keadaan seperti ini membuka peluang bagi PKI untuk mewujudkan kekuatan bersenjata yang meliputi pasukan buruh, tani, nelayan dan lain-lain yang disebut Angkatan Kelima.

Perdana Menteri Chou En Lai dari Republik Rakyat Cina menawarkan bantuan senjata ringan sebanyak 100.000 pucuk terdiri atas Tjung, AK 47 dan RPD.

Tapi tokoh-tokoh Angkatan Darat (Letjen Ahmad Yani dan Jenderal A.H. Nasution) dengan tegas menolak karena hanya Angkatan Bersenjata sajalah yang boleh memegang dan menggunakan senjata.

Walaupun demikian secara diam-diam PKI dan ormasnya mendapat dropping senjata beserta instrukturnya seperti yang kemudian ditemui di tempat latihan di Lubang Buaya (sekitar Lapangan Udara Halim Perdanakesuma).

G. KEWENANGAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH DALAM SATU TANGAN

Sesuai dengan kesanggupan pihak Pamong-Praja oleh DPRD-GR Tk. I dalam resolusinya tanggal 14 Desember 1963 No. 29/DPRD-GR/Res/1963 dan No. 30/DPRD-GR/Res/1963 telah diambil keputusan sebagai berikut :

- a. Bersedia dan sanggup menerima penyerahan tugas-tugas dalam bidang Pemerintahan Umum bersama pegawai dan keuangannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dengan Undang-undang No. 6/1959 dan pelaksanaannya dengan PP No. 50/1963.
- b. Mendesak kepada Pemerintah Pusat c.q. Menteri Dalam Negeri agar penyerahan dimaksud untuk Daerah Swatantra Tk. I Kalimantan Selatan dilaksanakan selekas mungkin dan selambatnya bulan Juli 1964.

Setelah diterimanya Resolusi DPR-GR Tk. I Kalimantan Selatan tersebut, maka oleh Menteri Dalam Menteri dengan Surat Keputusannya tanggal 9 Mei 1964 No. Des. 47/2/44-73 ditetapkan :

- a. Mulai berlakunya tugas dan kewenangan Pemerintah Umum dinyatakan beralih kepada Pemerintah Daerah Tk. I Kalimantan Selatan dan kepada Pemerintah Daerah Tk. II dalam wilayahnya berdasar Undang-undang No. 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Pemerintahan Umum.
- b. Semua kewedanaan dalam wilayah Daerah Swatantra Tk. I Kalimantan Selatan dinyatakan hapus sejak dimulai berlakunya Surat Keputusan ini.
- c. Semua Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 50/1963 dinyatakan telah diperbantukan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa perbantuan secara riil kepada Pemerintah Daerah akan ditetapkan dengan Surat Keputusan/Instruksi yang berwenang.
- d. Semua harta benda, baik yang berupa barang yang tidak bergerak maupun yang bergerak, demikian juga hutang piutang pada saat berlakunya Surat Keputusan ini beralih kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pada tanggal 15 Mei 1964 oleh Menteri Dalam Negeri selaku Wakil Pemerintah Pusat menyerahkan tugas dan wewenang di bidang Pemerintahan Umum kepada Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan.

Dengan adanya penyerahan tugas dan wewenang tadi maka tugas wewenang pusat dan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah berada dalam satu tangan yaitu Gubernur Kepala Daerah, yang berarti bahwa dualisme dapat dihilangkan.

Pelaksanaan penghapusan kewedanaan dan penyerahan tugas-tugas dan kewenangan kewedanaan kepada Kecamatan yang semula dipegang Wedana berjalan dengan baik dan lancar.

Pada tanggal 14 dan 15 Mei 1964 diselenggarakan Musyawarah Panca Tunggal Daerah Propinsi Kalimantan Selatan dan mengambil keputusan-keputusan penting tentang Pangan, Distribusi, *Export Drive*, Infrastruktur dan Pengerahan Tenaga.

Untuk persiapan ke arah penerimaan tugas Pemerintah Umum Pusat kepada Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan maka pada tanggal 6 dan 7 Juni 1964 telah diadakan Konferensi Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan berhasil mengambil Keputusan tentang : Pemerintahan - Organisasi Kantor Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, Kepegawaian, Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Daerah. Oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 12 Oktober 1964 telah diadakan briefing dengan semua Bupati/Walikota Kepala Daerah Tk. II se Kalimantan Selatan tentang Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 9/1964 mengenai penyegaran keanggotaan DPRD-GR dan BPH Tk. I dan Tk. II.

Instruksi Menteri Dalam Negeri yang diharapkan paling lambat tanggal 15 November 1964 bagi calon keanggotaan DPRD-GR Tk. II dan tanggal 30 November 1964 untuk susunan dan keanggotaan BPH, karena beberapa hal tertunda hingga akhir Desember 1967 antara lain karena Peristiwa G30S/PKI.

Gubernur Kepala Daerah selaku Kepala Markas Daerah Pertahanan Sipil XIV Kalimantan Selatan, mengeluarkan perintah harian tanggal 17 September 1964 pada Apel Besar Pertahanan

Sipil ditujukan kepada semua anggota Pertahanan Sipil dalam slagorde Markas Daerah Pertahanan Sipil XIV Kalimantan Selatan, - supaya semua anggota dengan penuh kesungguhan dan kesegaran penuh, bersatu lahir bathin melaksanakan Perintah Umum Komando Operasi Tertinggi (KOTI) tanggal 11 September 1964 tentang keharusan mengadakan Kesiapsiagaan Tingkat Pertama (Tertinggi).

Agar terdapat efisiensi dan koordinasi yang baik dalam kerja Pemerintah Daerah, maka pada tanggal 6 dan 7 Desember 1965 diadakan Musyawarah Kerja Pemerintah Daerah Tk. I dengan Pemerintah Daerah Tk. II se Kalimantan Selatan yang bidang politik dan keamanan menghasilkan beberapa putusan antara lain :

- a. Mengadakan pembersihan ke dalam dan ke luar dari ideologi yang menyelewengkan Revolusi Indonesia.
- b. Turut aktif dalam pembersihan oknum G30S/PKI.
- c. Membina menjadi Kesatuan Hansip semua kegiatan ormas seperti Pemuda Muhammadiyah, Banser – NU, Pemuda Banteng, Basmi dan lain sebagainya dalam aksi menumpas Nekolim dan 30S/PKI.
- d. Tenaga yang didatangkan ke Kalimantan Selatan supaya bersih dari oknum G30S/PKI, umpamanya tenaga-tenaga Transmigrasi dan lain sebagainya.

H. PEMBERONTAKAN KAUM KOMUNIS

1. Partai Komunis Mulai Menyusun Kekuatan Secara Terbuka

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa rakyat Kalimantan Selatan sudah mencurigai tindak tanduk PKI yang kemudian dibendung dengan dikeluarkannya Keputusan Penguasa Perang Daerah No. 140/S/K/1960.

Partai-partai politik yang ada yaitu sesudah dikeluarkannya Masyumi dan Partai Sosial Indonesia dan Partai-partai Kecil yang tidak memenuhi syarat juga bubar, maka tinggal 9 (sembilan) partai politik : PNI, Partindo, Murba, IPKI, NU, PSII, Parkindo, Katholik, PKI.

Pada tahun 1963 PKI sudah merasa cukup kuat untuk mengadakan ofensif politik yang mereka namakan ofensif revolusioner berupa uji coba terhadap kekuatan PKI, misalnya Peristiwa Bandar Betsy (Sumatera Utara) pada tanggal 14 Mei 1964, dengan berdalih melaksanakan Undang-undang Landreform maka PKI/BTI membunuh Pembantu Letnan Soejono dengan cara beramai-ramai memacul/mencangkul kepala yang bersangkutan. Angkatan Darat semakin sadar akan kekuatan PKI.

Sekelompok wartawan membentuk Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS) yang berpendapat bahwa ajaran Soekarno tidak sama dengan komunisme. Hal ini menyebabkan PKI berang dan menyerang koran pendukung BPS seperti Berita Indonesia, Merdeka dan lain-lain yang kemudian dihentikan penerbitannya. Pemberitaan didominasi oleh koran PKI seperti : Bintang Timur, Harian Rakyat dan lain-lain dan terlebih lagi sesudah Kantor Berita ANTARA jatuh ke tangan orang-orang PKI yang dipimpin oleh A. Karim DP. Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di bawah Djawoto, didominasi oleh kelompok wartawan komunis seperti : Nyoto, Asmara Hadi, Waluyo, Suroto, Naibaho dan Oloan Hutapea.

Pada akhir tahun 1964, oleh Assisten I Kodam X/LM Letkol Manihuruk ditemukan suatu dokumen yang disebut dokumen PETA (Program Empat Tahun PKI) yang memuat strategi PKI selama 4 tahun (1964-1967) yaitu :

- a. Pimpinan Borjuis harus digulingkan dan orang-orang yang berkepala batu harus disingkirkan.
- b. Menolak pernyataan Presiden Soekarno, bahwa tidak ada kelas di Indonesia, karena hal itu bertentangan dengan komunis.

- c. NASAKOM adalah hanya sekedar taktik, karena NASAKOM adalah impian seorang idealis, tetapi buat sementara pura-pura diterima dan harus digunakan sebagai alat untuk merebut dan menduduki posisi-posisi kekuasaan.
- d. Pengindoktrinasi Angkatan Bersenjata harus ditingkatkan dan sel-sel dalam tentara harus diperbanyak.

Kabarnya dokumen tersebut jatuh di tangan Chaerul Saleh (Waperdam III) yang disampaikan kepada Presiden Soekarno dan ketua umum PNI Ali Sastroamijoyo. PKI membantah dan mengatakan dokumen itu palsu. Berikutnya ada deklarasi Bogor yang isinya kesepakatan untuk memelihara persatuan nasional, MANIPOL/USDEK dan NASAKOM.

Pada bulan Januari 1965 atas perintah Presiden Soekarno pada tanggal 6 Januari 1965 agar Partai Murba menghentikan kegiatannya dan pada September 1965 dilarang oleh Presiden Soekarno.

Usul PKI untuk mempersenjatai buruh dan tani dan gagasan membentuk Angkatan ke V, tidak dapat diterima oleh ABRI terutama oleh Angkatan Darat. Kemudian D.N. Aidit menyarankan agar Nasakomisasi dalam Angkatan Bersenjata, dan usul gila ini juga ditolak.

Sejak awal tahun 1964 Partai Komunis berpendapat bahwa sudah tiba saatnya untuk melakukan kegiatan secara lebih terbuka karena merasa sudah cukup kuat. Mereka menyebut tahapan ini sebagai "Peningkatan Situasi Ofensif Revolusioner" yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Sabotase, Aksi Sepihak dan Aksi Teror

Upaya PKI untuk menciptakan suasana revolusioner, selain dilakukan melalui kegiatan-kegiatan politik yang menghebat, juga melalui kegiatan-kegiatan Sabotase, Aksi Sepihak, dan Aksi Teror. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain adalah :

a) Tindakan Sabotase terhadap Transportasi Umum Kereta Api oleh Serikat Buruh Kereta Api.

11 Januari 1964 di stasiun Purwokerto (Jawa Tengah)

6 Februari 1964 di Kroya (Jawa Tengah)

14 Mei 1964 di Cirebon dan Semarang

6 Juli 1964 di Cipapar (Jawa Barat)

18 Agustus 1964 di stasiun Tanah Abang

31 Agustus 1964 di Bandung

11 Oktober 1964 di Tasikmalaya

18 Oktober 1964 terjadi lagi di Tasikmalaya

Kemudian terbukti bahwa pihaknya adalah anggota Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) yang merupakan bagian dari Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI).

b) Aksi Sepihak Barisan Tani Indonesia (BTI)

Pada HUT ke 44 PKI yang diadakan di Semarang pada tanggal 23 Mei 1964 Ketua CC-PKI D.N. Aidit mengkomandokan gerakan "turun ke bawah" (turba) untuk membuktikan petani di daerah Jawa adalah sangat miskin dan sangat potensial digerakkan untuk melawan tuan-tuan tanah di desa-desa. Penelitian ini didukung oleh kelompok Himpunan Sarjana Indonesia (HIS) yang menuntut pelaksanaan Undang-undang Pokok Bagi Hasil (UUPHB) dan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). PKI mengkampanyekan pula anti "Tujuh Setan Desa" yaitu : tuan tanah, lintah darat, tengkulak, tukang ijon, kapitalis birokrat (kabir), bandit desa dan pemungut/pengumpul zakat.

Dalam kampanye melawan Tujuh Setan Desa, PKI melakukan aksi massa sepihak secara sistematis dan terencana sebagai berikut :

- (a) Aksi Massa BTI di Jawa Tengah
- (b) 26 Maret 1964 konflik fisik antara petani di desa Kingkang, kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.
- (c) Awal Juli 1964 anggota BTI membabat padi rakyat di kecamatan Truyuk dan Prambanan (Klaten).
- (d) Aksi Massa BTI di Jawa Barat
- (e) 15 dan 16 Oktober 1964 pembabatan hutan milik negara dan melukai polisi kehutanan di hutan Karticala dan Tugu (Indramayu) oleh anggota BTI dan Pemuda Rakyat. Pada tanggal yang sama terhadap hutan Telaga Dua dan Pajengkolan.
- (f) Aksi Massa BTI di Jawa Timur
- (g) 15 Januari 1965, penganiayaan terhadap petani yang mengerjakan sawahnya sendiri di desa Gayam Kabupaten Kediri.
- (h) Aksi Massa BTI di Sumatera Utara
- (i) 14 Mei 1965 peristiwa Bandar Betsy, Kabupaten Simalungun dengan korban Pembantu Letnan Soedjono.

c) Aksi-aksi Teror

- (a) 13 Januari 1965, Pemuda Rakyat Kediri menyerang aktivis Pelajar Islam Indoensia (PII), memukul para kyai, merusak rumah ibadah, dan menginjak-injak Kitab Suci Al-Qur'an.
- (b) 27 September 1965, massa Gerwani, CGMI dan Pemuda Rakyat menyerbu Kantor Gubernur Jawa Timur. Mereka berniat menculik Gubernur Jawa Timur yaitu Brigjen Wijoyo, tetapi gagal.
- (c) Awal Mei 1965, penemuan Dokumen "GILCHRIST".
- (d) Awal Desember 1964, massa PKI merusak Kantor Penerangan Amerika Serikat (United States Information Service) di Jakarta dan Surabaya.
- (e) 10 Desember 1964, penutupan perpustakaan Ford Foundation di Yogyakarta.
- (f) 11 Desember 1964, seluruh anggota Peace Corps Amerika Serikat diusir dari Indonesia.
- (g) Pada waktu yang sama pula Wakil Ketua Umum Panitia Aksi Pemboikotan Film-Film amerika (**Ny. Oetami Suryadarma**) menuntut agar American Motion Pictures Association of Importeurs (AMPAI) dibubarkan.
- (h) 28 Februari 1965, massa PKI berdemonstrasi di depan kediaman Dubes Amerika Serikat Howard P. Jones agar Bill Palmer (Direktur AMPAI) diusir dari Indonesia).
- (i) 1 April 1965, massa PLI menyerang Villa milik Bill Palmer (direktur AMPAI) di Tugu, Puncak.
- (j) 17 Agustus 1963, sebanyak 22 (dua puluh dua) sastrawan dan cendekiawan non Komunis mencetuskan manipes kebudayaan yang oleh PKI disebut Manikebu. Tujuan Manikebu ingin memurnikan kegiatan-kegiatan budaya dari pengaruh politik. Kelompok Manikebu ini dianggap oleh PKI sebagai batu penghalang. Reaksi yang tidak menyetujui Manikebu diperlihatkan oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) yang dipimpin oleh Pramoedaya Ananta Toer dan Sitor Sitomorang. Mereka menuntut agar tokoh kelompok Manikebu Drs. H.B. Yassin yang menjabat sebagai Rektor Universitas Indonesia segera disingkirkan.

- (k) 8 Mei 1964, Presiden melarang seluruh kegiatan kelompok manikebu yang tidak sejalan dengan manipol.
- (l) 1 Juli 1964, Konfrensi Karyawan Pengarang Indonesia (KKPI) yang sebagian besar anggotanya adalah keompok manikebu, diwaktu menyelenggarakan pertemuan di Jakarta telah dicoba digagalkan oleh LEKRA dan LKN, tapi tidak berhasil.

2) Agitasi dan Propaganda

Dengan menggunakan unsur-unsur pers yang sudah didominasi oleh PKI antara lain Kantor Berita Antara dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), maka tokoh-tokoh PKI membangkitkan semangat progresif revolusioner dengan melakukan pidato-pidato di segala forum kegiatan selalu menampilkan tema-tema sentral disertai dengan jargon-jargon politik untuk melaksanakan situasi "ofensif revolusioner sampai ke puncaknya". Berbagai agitasi dan propaganda yang bertujuan membangkitkan situasi tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

a) Pernyataan Ketua CC-PKI D.N. Aidit.

- (a) Dalam sambutan tertulis pada sidang Pleno Pengurus Besar Pemuda Rakyat di Surabaya mengkomandokan agar setiap insan revolusioner untuk mengembangkan : *"revolusioner sampai ke puncaknya dengan cara membersihkan kaum kapitalis birokrat dan kaum koruptor di semua pimpinan dan operator negara"*.
- (b) Di depan apel kesiagaan Dwikora tanggal 2 April 1965, antara lain mengatakan bahwa "manipol harus dibela dengan senjata. Manipol tidak bisa dibela hanya dengan tangan kosong. Oleh karena itu, latihan militer penting bagi orang-orang revolusioner manipolis dengan tujuan membela manipol dengan senjata".
- (c) Pada peringatan HUT PKI ke - 45 di Stadion Utama Senayan tanggal 23 Mei 1965 ia kembali mengkomandokan kepada masa PKI untuk meningkatkan ofensif revolusioner sampai ke puncaknya.
- (d) Pada peringatan HUT ke - 20 Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1965, politnik PKI mengeluarkan seruan /pernyataan antara lain : *"Dan jalan yang harus kita tempuh dalam hal ini tidak ada lain kecuali harus melancarkan lagi ofensif revolusioner di segala bidang"*.
- (e) Di depan para sukarelawan Departemen Penerangan RI di Jakarta pada tanggal 9 September 1965 ketua CC-PKI mengatakan : *"...kita berjuang untuk sesuatu yang pasti akan lahir. Kita kaum revolusioner adalah bagaikan bidan daripada bayi masyarakat baru itu. Sang bayi lahir dan kita kaum revolusioner menjaga supaya lahirnya baik dan sang bayi cepat besar"*.
- (f) Di depan sidang Dewan Nasional SOBSI tanggal 14 September 1965, ketua CC-PKI mengatakan : *"...yang paling penting sekarang ini, bagaimana kita memotong penyakit kanker dalam masyarakat kita, yaitu setan kota. Kalau revolusioner mau tumbuh dengan subur, kita harus menyingkirkan kaum dinasti ekonomi atau Kapbir dan setan kota dari seganap operator politik dan ekonomi negara"*.
- (g) Pada tanggal 22 September 1965 dihadapan karyawan BNI antar lain mengatakan : "Kabinet sekarang belum Nasakom, hanya mambu (bau) Nasakom. Oleh karena itu kabinet berporos Nasakom harus segera dibentuk.
- (h) Pada tanggal 27 September 1965 kepada Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), antara lain berseru : *'Hati kita lebih daripada lapar, kita tidak akan serahkan nasib kita kepada setan kota, kita akan ganyang dan kalahkan setan kota'*.

- (i) Pada tanggal 29 September 1965 dihadapan para peserta Kongres III CGMI antara lain berseru : *“mahasiswa komunis harus berani berfikir dan berbuat. Berbuat, berbuat, berbuat. Bertindak dan berbuat dengan berani, berani. Sekali lagi, berani”*.
- b) Pernyataan Moh. Munir, Ketua Umum DPP SOBSI di depan masa SARBUPSI tanggal 26 September 1965, berkata : *.....jadikanlah perkebunan-perkebunan untuk markas pertahanan”*.
- c) Pada tanggal 29 September 1965, Amir Anwar Sanusi dihadapan para sukarelawan BNI, anggota Politbiro CC-PKI itu mengatakan sebagai berikut : *“Kita sedang dalam situasi dimana Ibu Pertiwi dalam keadaan hamil tua. Sang bidan dapat dengan akal yang diperlukan untuk menyelamatkan sang bayi sudah lama dinanti-nantikan. Sang bayi adalah alat kekuasaan politik yang sudah ditentukan dalam manipol. Sang bidan adalah masa rakyat manipolis. Sukarelawan adalah salah satu alat penting di tangan sang bidan. Ada segelintir setan yang mengancam keselamatan Ibu Pertiwi dan bayi yang akan dilahirkan”*.

Dan memang benar besok malamnya, tanggal 30 September 1965 Ibu Pertiwi melahirkan sang bayi dan dengan berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha esa, sang bayi mati sebelum dilahirkan dan Ibu pertiwi dalam keadaan sehat wal’afiat.

d) Isu Dewan Jenderal.

- (a) Penyebaran isu ini yang menyatakan tentang adanya Dewan Jenderal dalam tubuh TNI-AD yang mempunyai tugas khusus memikirkan usaha-usaha dalam rangka menghadapi kegiatan yang bersifat “kiri” – dan demikian PKI ingin memberikan kesan bahwa TNI-AD merupakan kekuatan “kanan” (pendukung Nekolim dan anti PKI)
- (b) PKI ingin memberikan kesan bahwa Dewan Jenderal adalah sebuah badan dalam TNI-AD antara lain untuk menilai kebijaksanaan Presiden Soekarno selaku Pemimpin Besar Revolusi, yang berarti pula bahwa TNI-AD tidak dapat dijamin loyalitasnya kepada Pemimpin Besar Revolusi. Kesimpulannya PKI mengadudombakan antar TNI-AD dengan Presiden/Panglima Tertinggi.
- (c) Melontarkan pula isu bahwa Dewan Jenderal bekerja sama dengan imperialis, yang berarti bahwa TNI-AD telah mengkhianati rakyat Indonesia dalam perjuangannya. Isu ini semakin berkembang dengan tersiarnya “dokumen Gilchrist” pada bulan Mei 1965.
- (d) Juga diisukan tentang susunan kabinet Dewan Jenderal yakni : Perdana Menteri : Jenderal A.H. Nasution, Wakil Perdana Menteri/Menteri Pertahanan : Letjen A. Yani, Menteri Dalam Negeri : Hadisuseno, Menteri Luar Negeri : Roeslan Abdulgani, Menteri Hubungan Dagang Luar Negeri : Brigjen Sukendro, Menteri Jaksa Agung : Mayjen S. Parman.
Bentuk pengembangan Dewan Jenderal menjadi rencana yang matang tentang adanya gerakan dari perwira-perwira yang berfikiran maju yang akan mendahului Gerakan Dewan Jenderal disampaikan kepada Menteri/Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Udara Omar Dhani.

e) Isu Dokumen Gilchrist

Gilchrist adalah nama Duta Besar Inggris di Indonesia yang bertugas pada tahun 1963-1966, yang nama lengkapnya "Sir Andrew Gilchrist".¹²

Pada tanggal 15 Mei 1965, Dr. Subandrio (Waperdam I) menerima suatu surat yang dikirim via pos, dan si pengirim menjelaskan bahwa file ini sangat penting untuk revolusi Indonesia.

Surat ini diketik pada formulir surat yang biasa digunakan oleh kedutaan Inggris di Jakarta.

Surat tersebut memuat satu laporan seolah-olah laporan Duta Besar Inggris Gilchrist telah mengadakan koordinasi dengan Duta Besar Amerika di Jakarta dalam menangani situasi di Indonesia. Dalam surat tersebut tertulis kata-kata "*our local army friend*", yang memberikan kesan seolah-olah ada kerjasama antara unsur-unsur TNI-AD dengan Inggris (yang waktu itu dikategorikan sebagai salah satu kekuatan Nekolim).

Surat itu dibawa kepada Presiden Soekarno dan dibicarakan dalam rapat dengan para Panglima Angkatan, dan Letjen A.Yani sebagai pihak TNI-AD menolak kebenaran surat tersebut. Dr. Subandrio bermaksud dengan menyampaikan surat tersebut langsung kepada Presiden Soekarno akan menguntungkan kepada PKI dalam garis politik dan strateginya.

Pada minggu pertama September 1965 tiba di daerah ini rombongan Menteri Panglima Angkatan Darat yang terdiri dari : Letjen Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat, Mayjen S. Parman, Assisten I, Mayjen D.I. Panjaitan, Assisten IV, Brigjen Sutoyo Sastromiharjo, Direktur Kehakiman A.D, Brigjen Sudirjo, Direktur Polisi Militer dan Brigjen Surono, Gubernur Akademi Militer Nasional.

Malam harinya Menteri Panglima Angkatan Darat memberikan briefing tertutup kepada para perwira Angkatan Darat di KODAM X/LM yaitu :

- a. PKI sedang giat melancarkan ofensif politik.
- b. PKI berlindung di belakang Presiden Soekarno.
- c. Penolakan usul PKI untuk mempersenjatai buruh dan tani.
- d. Dalam jajaran Angkatan Darat terdapat dilema menghadapi PKI mereka kompak, tetapi kalau ada kaitannya dengan Presiden Soekarno, mereka tidak kompak.
- e. Menolak Nasakomisasi Angkatan Bersenjata.
- f. Angkatan Udara diragukan.
- g. Di Markas Besar Angkatan Darat sulit bergerak, jadi diharapkan pembinaan kekompakan adalah di daerah-daerah.

Menjelang September 1963, PKI melakukan kegiatan lebih agresif, aktivitas-aktivitasnya dengan pembentukan ranting-ranting ormasnya terutama BTI (BTI yang mereka jelaskan sebagai singkatan dari Barisan Tani Islam) untuk menarik perhatian masyarakat setempat sampai ke kampung-kampung, terutama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tanggal 19 Januari 1964 di Banjarmasin diadakan Sidang Pleno Komite Seksi PKI di Kalimantan Selatan yang membahas secara mendalam laporan Politik CC-PKI di Jakarta yang telah dilangsungkan pada akhir Desember 1963.

¹² Dalam penggerebekan kediaman William Palmer bulan Mei 1965 oleh orang-orang PKI ditemukan surat dari Duta Besar Kerajaan Inggris Sir Andrew Gilchrist untuk Kementerian Luar Negeri Kerajaan Inggris yang menyampaikan rencana AS – Inggris untuk menumbangkan Pemerintah Indonesia, dengan berkolusi dengan "our local friends". Oleh Subandrio Menlu/waperdam/Ka BPI yang yakin akan keotentikannya, surat ini diserahkan kepada Presiden Soekarno pada 26 Mei 1965. Subandrio pula yang membeberkan surat ini di Cairo dalam bulan Juli 1965 dalam perjalanan pulang dari Konferensi Asia – Afrika. Kemudian ternyata bahwa surat ini hasil pemsalsuan yang sangat rapi. William Palmer mewakili AMPA (American Motion Picture Association) yang memasukkan film-film Amerika ke Indonesia. AMPA I kemudian dilarang beroperasi di Indoensia. Lihat Lihat Howard Palfrey Jones, *Indonesia: The Possible Dream*, Published Under the Auspices of the Hoover Institution, Printed by Mas Aju Singapore PTE.Ltd, Singapore, 1973, catatan no. 377.

Resolusi Pemuda Rakyat Banjarbaru No. R/65/2 yang dikeluarkan tahun 1965 (sebelum peristiwa G30S/PKI) tanggal 25 Juli 1965 antara lain berbunyi :

- a. Menuntut pembubaran Partai Murba.
- b. NASAKOMISASI untuk Aparatur Negara.
- c. Retooling Aparatur Negara dari atau sampai ke tingkat bawah.
- d. Melaksanakan Pemilihan Umum.
- e. Mendukung Musyawarah Besar Tani, untuk meluncurkan pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-undang Pokok Bagi Hasil (UUPHB).
- f. Men-NASAKOM-kan Wakil Gubernur, Wakil Ketua DPRD-GR Tk. I dan TK. II dan anggota-anggota BPH Tk. II se Kalimantan Selatan.

2. Pemberontakan Bersenjata G 30 S/PKI

Pada tanggal 1 Oktober 1965, setelah penyiaran jam 08.00 warta berita oleh RRI Pusat disusul oleh pengumuman bahwa pada Hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Jakarta telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat yang dibantu oleh Angkatan lain. Gerakan 30 September ini dipimpin oleh Letkol Untung, Komando Batalyon Kawal Kehormatan Cakrabirawa ditujukan kepada sejumlah Jenderal yang tergabung dalam gerakan Dewan Jenderal dan sejumlah Jenderal telah ditangkap. Ditambahkan bahwa gerakan ini merupakan gerakan intern dalam Angkatan Darat.

Tindak lanjut gerakan ini dengan membentuk Dewan Revolusi di Pusat sampai ke daerah-daerah dan pedesaan sebagai berikut :

Susunan lengkap Dewan Revolusi Indonesia yang diumumkan itu adalah sebagai berikut :

- I. Ketua : Letnan Kolonel Untung
- II. Wakil-wakil Ketua :
 1. Brigadir Jenderal Soepardjo.
 2. Letkol Udara Heru
 3. Kolonel Laut Sunardi
 4. AKB Polisi Anwas
- III. Anggota-anggota :
 1. Laksanama Madya Udara Omar Dhani
 2. Inspektur Jenderal Pol. Sucipto Judodiharjo
 3. Laksamana Madya Laut E. Martadinata
 4. Dr. Soebandrio
 5. Dr. J. Leimena
 6. Ir. Surachman (nasionalis)
 7. Fattah Yassin (agama)
 8. K.H. Sirajuddin Abbas (agama)
 9. Tjugito (komunis)
 10. Aruji Kartawinata.
 11. Siauw Giok Chan.
 12. Sumarno, SH.
 13. Mayor Jenderal KKO Hartono
 14. Brigadir Jenderal Polisi Sutarto.
 15. Drs. Zaini Mansyur (Front Pemuda Pusat)
 16. Sukatno (Front Pemuda Pusat)
 17. Jahya, SH. (Front Pemuda Pusat)
 18. Kusno Hadi (PPMI)
 19. Rachman (Wakil Sekjen FN).
 20. Hardoyo (Mahasiswa)

21. Mayor Jenderal Basuki Rachmat.
22. Brigadir Jenderal Amirmachmud.
23. Brigadir Jenderal Riachudu.
24. Brigadir Jenderal Solichin.
25. Brigadir Jenderal Andi Rivai.
26. Mayor Udara Suyono.
27. Komodor Udara Leo Wattimena.
28. Dr. Utami Suryadarma.
29. Kolonel A. Latif.
30. Mayor Jendral Umar Wirahadikusumah.
31. Ny. Supeni.
32. Ny. Machmudah Mawardi.
33. Ny. Suharti Suwanto.
34. Kolonel fatah.
35. Kolonel Suhirman.
36. Kolonel Laut Syamsu Sucipto.
37. Suhardi (Wartawan).
38. Komisaris Polisi Drs. Sumartono.
39. Junta Suardi.
40. A. Karim DP.

Dewan Revolusi secara konsekwen melaksanakan Panca Azimat Revolusi dan tidak merubah politik luar negeri yang bebas aktif dan anti nekolim.

Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan segera berkonsultasi dengan Pangdam X/LM untuk mengambil langkah-langkah yang perlu demi keselamatan Bangsa dan Negara, khususnya daerah Kalimantan Selatan. Diambil kesimpulan bahwa, Gerakan 30 September adalah perebutan kekuasaan (*coup*), karena sepanjang sejarah setiap *coup* selalu mengemukakan program politik.

Kedatangan Amar Hanafiah (Sekretaris I CDB Kalimantan Selatan) yang juga salah satu unsur Ketua Periodik Front Nasional Daerah Kalimantan Selatan menemui Pangdam X/LM dan mengatakan bahwa Gerakan 30 September itu mendapat dukungan luas dari tokoh-tokoh Nasional di Pusat, dan ini berarti minimal PKI telah mendapat informasi atau mengetahui gerakan ini. Pada hari itu juga datang dari Jakarta jam 12.00 Deputy Wilayah Kalimantan, Mayjen Maraden Panggabean dan ternyata beliau tidak mengetahui gerakan tersebut karena berangkat dari Mess Koanda di Jalan Tanjung Karang jam 06.00 pagi. Setelah mendengar dari Pangdam X/LM tentang adanya gerakan militer tersebut serta pengumuman Dewan Revolusi, maka Mayjen M. Panggabean kembali ke Jakarta dengan pesawat yang sama.

Dari Staf Umum Angkatan Darat (SUAD) diterima kawat yang isinya :

- a. Ada gerakan penculikan beberapa Jenderal di Jakarta.
- b. Panglima Angkatan Darat dan beberapa Jenderal diculik.
- c. Pimpinan sementara Angkatan Darat dipegang oleh Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad.
- d. Tetap waspada dan hanya menerima perintah dari SUAD.

Pada jam 14.30 wita kembali RRI Jakarta mengumumkan Dekrit Pertama Gerakan 30 September sebagai berikut :

1. Di Jakarta, telah dilangsungkan gerakan pembersihan terhadap anggota-anggota apa yang menamakan dirinya Dewan Jenderal yang merencanakan *coup* menjelang hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965. Sejumlah Jenderal telah ditangkap, alat-alat komunikasi dan

obyek-obyek vital lainnya di ibukota telah jatuh sepenuhnya ke dalam kekuasaan Gerakan 30 September. Gerakan 30 September adalah gerakan semata-mata ditujukan terhadap Jenderal-Jenderal anggota Dewan Jenderal dan perwira-perwira lainnya yang menjadi kaki tangan dan simpatisan anggota Dewan Jenderal. Gerakan ini dibantu oleh pasukan-pasukan di luar Angkatan Darat.

2. Untuk melancarkan tindak-lanjut daripada Gerakan 30 September, maka oleh pimpinan Gerakan 30 September akan dibentuk Dewan Revolusi Indonesia yang anggotanya terdiri dari orang-orang sipil yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve. Untuk sementara waktu, menjelang pemilihan umum untuk memilih Anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai UUD 1945, Dewan Revolusi Indonesia menjadi sumber daripada segala kekuasaan dalam Negara Republik Indonesia. Dewan Revolusi Indonesia dalam kegiatannya sehari-hari akan diwakili oleh Presidium Dewan Revolusi Indonesia yang terdiri dari Komandan dan Wakil-wakil Komandan Gerakan 30 September.
3. Dengan jatuhnya segenap Kekuasaan Negara ke tangan Dewan Revolusi Indonesia, maka Kabinet DWIKORA dengan sendirinya berstatus demisioner. Sampai pembentukan Dewan Menteri baru oleh Dewan Revolusi Indonesia, para bekas Menteri diwajibkan melakukan pekerjaan rutin, menjaga ketertiban dalam Departemen masing-masing, dilarang melakukan pengangkatan pegawai baru dan dilarang mengambil tindakan-tindakan yang bisa berakibat luas.
4. Sebagai alat daripada Dewan Revolusi Indonesia, di daerah dibentuk Dewan Revolusi Propinsi, paling banyak 35 orang; Dewan Revolusi Kabupaten, paling banyak 15 orang; Dewan Revolusi Kecamatan, paling banyak 10 orang; Dewan Revolusi Desa, paling banyak 7 orang; terdiri dari orang-orang sipil dan militer yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve.

Dekrit ini disusul pengumuman Keputusan Dewan Revolusi No. 2/1965 yang isinya :

1. Pangkat tertinggi dalam ABRI adalah Letnan Kolonel.
2. Mereka yang berpangkat di atas Letnan Kolonel, diharuskan menyatakan kesetiaan kepada Dewan Revolusi secara tertulis dan setelah pernyataan tersebut baru ia berhak memakai tanda pangkat Letnan Kolonel.
3. Semua anggota ABRI yang berpangkat Bintara dan Tamtama yang menjalankan Gerakan 30 September dinaikkan pangkatnya satu tingkat.
4. Bintara dan Tamtama yang mengikuti Gerakan Pembersihan Dewan Jenderal, dinaikkan pangkatnya dua tingkat.

Selanjutnya datang menemui Pangdam X/Lambung Mangkurat, Ketua CDB PKI Kalimantan Selatan Amar Hanafiah dan A.D. Gani (orang kedua dalam hierarki PKI di Kalimantan Selatan), mengucapkan selamat atas pengangkatan Brigjen Amir Machmud sebagai anggota Dewan Revolusi dan menganjurkan mengumumkan penerimaan pangangkatan tersebut melalui RRI Banjarmasin.

Disarankan juga agar Pangdam X/ Lambung Mangkurat segera membentuk Dewan Revolusi Propinsi Kalimantan Selatan, dengan anggota berporos Nasakom terdiri dari orang-orang sipil dan militer.

Pangdam X/Lambung Mangkurat secara tegas menolak pengangkatan dalam Dewan Revolusi dan sama sekali tidak tahu menahu dengan apa yang menamakan dirinya sebagai Dewan Revolusi. Atas penolakan Pangdam X/ Lambung Mangkurat ini, kabarnya Amar Hanafiah dan A.D. Gani menjadi pucat, karena tidak mengira diberikan jawaban yang demikian.

Pangdam X/ Lambung Mangkurat segera mengeluarkan pengumuman, dan masih dalam konsep tanpa diketik, karena waktu yang sangat mendesak untuk diumumkan di RRI Banjarmasin. Konsep tulisan tangan dan sudah ditandatangani tersebut dibawa oleh Kapten M.S. Abdis ke RRI Banjarmasin untuk disiarkan siang hari itu juga, yang isinya :

- b. Brigjen Amir Machmud beserta seluruh slagorde KODAM X/Lambung Mangkurat tetap taat dan mematuhi Perintah yang Mulia Menteri Panglima Angkatan Darat dan Paduka yang Mulia Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.
- b. Mengutuk apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September.
- b. Kepada seluruh slagorde KODAM X/Lambung Mangkurat agar tetap tenang dan waspada serta tetap di posnya masing-masing.
- b. Menyerukan kepada segenap lapisan masyarakat Kalimantan Selatan agar tetap tenang dan jangan mengambil tindakan sendiri-sendiri.

Sementara itu pada malam harinya RRI Jakarta menyiarkan pengumuman Panglima Kostrad (Mayjen Soeharto) bahwa Jakarta telah dikuasai kembali oleh alat-alat Negara yang syah, dan RRI telah direbut kembali dari tangan pemberontak.

Penegasan dikeluarkan berupa pidato Pimpinan Sementara Angkatan Darat (Mayjen Soeharto) sebagai berikut :

1. Sebagaimana telah diumumkan, bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965, telah terjadi di Jakarta suatu peristiwa, yang dilakukan oleh suatu gerakan kontra revolusioner.
2. Mereka telah menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat, ialah :
 - a. Letnan Jenderal A. Yani
 - b. Mayor Jenderal Soeprapto.
 - c. Mayor Jenderal S. Parman.
 - d. Mayor Jenderal Haryono MT.
 - e. Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan.
 - f. Brigadir Jenderal Soetoyo Siswomiharjo.
3. Mereka telah dapat memaksa dan menggunakan studio RRI Jakarta dan Kantor Besar Telekomunikasi Jakarta untuk keperluan penteroran.
4. Dalam pada itu perlu kami umumkan kepada seluruh Rakyat Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, bahwa PYM Presiden /Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dan Y.M. Menko HANKAM/KASAB dalam keadaan aman dan sehat wal'afiat.
5. Situasi telah kita kuasai, baik dipusat maupun di daerah-daerah dan seluruh slogarde Angkatan Darat ada dalam keadaan kompak dan bersatu.
6. Untuk sementara Pimpinan Angkatan Darat kami pegang. Antara AD, ALRI, dan AKRI telah terdapat saling pengertian, bekerjasama dan kebulatan tekad penuh, untuk menumpas perbuatan kontra revolusioner yang dilakukan oleh apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September.
7. Apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September telah membentuk apa yang mereka sebut Dewan Revolusi Indonesia. Mereka telah mengambil alih kekuasaan negara atau lazimnya disebut coup dari PYM Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia /Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dan melemparkan Kabinet DWIKORA ke kedudukan demisioner disamping mereka telah menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat.
8. Dengan demikian jelaslah, bahwa tindakan-tindakan mereka itu kontra revolusioner yang harus diberantas keakar-akarnya.

Pada tanggal 2 Oktober 1965 jam 08.00 pagi diadakan Rapat Panca Tunggal dengan dihadiri oleh Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan (Letkol H. Aberanie Sulaiman), Kepala Polisi Brigjen Pol Oetarman, Jaksa Tinggi Suherman dan Ketua Periodik Front Nasional H. Abdul Gani Majedi.

Keputusan rapat mengeluarkan pernyataan mengutuk Gerakan 30 September.

Malam harinya diadakan rapat antara Panca Tunggal dengan semua pimpinan Partai Politik/Ormas, sekber Golkar, semua Kepala Dinas / Jawatan, semua Panca Tunggal Tk. II, anggota DPRD Tk. I, pimpinan Perusahaan Negara, para ulama bertempat di Wisma Catur Sakti (Wisma Polisi) di Banjarmasin.

Setelah rapat Panca Tunggal tersebut oleh Brigjen Munadi bahwa Amar Hanafiah dan A.D Gani datang meminta perlindungan dan mengatakan bahwa PKI tidak terlibat dalam Gerakan 30 September, dan Brigjen Munadi memberikan jawaban bahwa mereka tidak usah khawatir kalau memang PKI tidak terlibat.

Pada tanggal 2 Oktober 1965 jam 20.00 wita Rapat Panca Tunggal dengan pimpinan Partai Politik / Ormas, Sekber Golkar, ulama dan lain-lain semua berhadir. CDB PKI hanya diwakili oleh A.D Gani, karena katanya Amar Hanafiah sedang sakit.

Rapat memutuskan mengutuk Gerakan 30 September, dan semua menandatangani pernyataan tersebut kecuali PKI (A.D Gani) dengan alasan bahwa belum ada petunjuk dari CC PKI di Jakarta.

Dengan tidak ikut menandatangani pernyataan mengutuk Gerakan 30 September tersebut bertambah jelaslah keterlibatan PKI dalam gerakan makar tersebut.

Pada pagi hari tanggal 3 Oktober 1965 diterima laporan dari Komandan Kodim Banjarmasin Letkol Rahmatullah dan Komandan Kodim Banjar Letkol A.R Manji bahwa papan nama PKI dan ormas-ormas yang bernaung dibawahnya telah dicopot oleh kader-kader mereka sendiri. Bahkan Kantor CDB PKI yang terletak di jalan Kamboja (Jalan A. Adenansi) telah dibakar oleh pemuda dan masyarakat.

Atas dasar bukti-bukti tersebut maka atas wewenang Peperda diperintahkan untuk menahan dan menangkap : 1) Semua Pengurus CDB PKI; 2) Semua Pengurus Ormas PKI di tingkat Propinsi; 3) Semua Pengurus CD PKI; 4) Semua Pengurus Ormas PKI di tingkat Kabupaten; dan 5) Tokoh-tokoh PKI lainnya yang dianggap penting.

Selama ini dari berita-berita di media massa kita sangat sedikit mengetahui. Bagian-bagian dari Organisasi Partai Komunis Indonesia dari Tingkat Pusat sampai ke Daerah yang terdiri dari 6 (enam) tingkat, dan organisasi yang se-asas/ berlandung/bernaung dibawah Partai Komunis Indonesia yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) Organisasi Induk yang membawahi 91 (sembilan puluh satu) organisasi yang se-afiliasi seperti tersebut dalam Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi No.1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 beserta Pengumuman KOGAM No. 85/KOGAN/1966 tanggal 31 Mei 1966.¹³

Pada tanggal 3 Oktober 1965, Komandan Kodim Banjarmasin Letkol Rahmatullah melaporkan ± 100 orang tokoh PKI termasuk Amar Hanafiah dan A.D Gani , dan pada tanggal 4 oktober 1965 Komandan Kodim Banjar Letkol A.R Manji melaporkan bahwa orang-orang PKI yang ditahan ± 1.000 orang, tetapi setelah diteliti maka yang bukan pengurus segera dibebaskan. Yang mengherankan karena dalam aksi pembersihan juga tertangkap Pendeta Gultom (Wakil Partai Kristen Indonesia di dalam Front Nasional), karena dari bukti-bukti yang ada ternyata Pendeta Gultom adalah tokoh PKI yang ditugaskan bekerja di kalangan pendeta.

¹³ Lihat Lampiran 12.

PKI dan ormasnya seperti kita ketahui merupakan partai dengan disiplin tinggi, hubungan tertentu dalam struktur partai tidak saja melalui struktur formal, - tetapi juga melalui “sistem sel” atau dengan perkataan lain hubungan antara fungsionaris partai yang satu tidak diketahui oleh fungsionaris partai lainnya. Strategi partai ini dimaksudkan jika salah seorang fungsionaris partai tertangkap, maka rahasia partai tidak bocor secara keseluruhan. Disamping kedisiplinan mereka, orang-orang komunis adalah provokator yang berani. Di tahun 1960 mereka berani melempar granat ke rumah Bupati Hulu Sungai Utara, suatu daerah yang kuat rasa anti komunisnya, dan bahkan pada Pekan Pemuda ke IV di Amuntai, pada Resepsi Penutupan Pekan Pemuda tersebut yang dihadiri oleh Pejabat-Pejabat Sipil dan Militer Tingkat Propinsi (antaranya hadir Wakil Gubernur H. Imansyah), waktu disajikan minuman, ternyata dari kejelian pengamatan protokol bahwa air teh yang disajikan kepada para undangan kelihatan agak keruh, maka minuman segera dibatalkan untuk disajikan. Penelitian selanjutnya ternyata minuman dicampur “potas”. Akhirnya ditemukan biang keladinya adalah seorang Kader PKI dari Surabaya yang berhasil menyusup dalam kontingen Kotamadya Banjarmasin.

Dalam waktu yang bersamaan di areal Masjid Agung Kota Amuntai sekarang (waktu itu merupakan tumpukan pasir dan tumbuhan semak-semak) telah ditemui 7 buah lobang yang rencananya di gunakan untuk mengubur tokoh-tokoh partai\masyarakat yang anti Komunis : K. H. Dachlan, Abd. Gani Majedi, Masconi (Bupati HSU), H. Muslim, H. Dachlan, Syafriansyah, dan Gr. Badera.

Provokasi mereka secara terbuka juga pernah dilaksanakan sewaktu Rapat Front Nasional Se Kalimantan Selatan bertempat di Gedung Pemuda Banjarmasin (sekarang Gedung KNPI) Sekretaris I CDB PKI Kalsel yaitu Amar Hanifah mengatakan bahwa : dalam peristiwa Madiun (Madiun Affair), tangan Mohammad Hatta (Wapres RI) penuh berlumur darah dengan membunuh kaum Proletar, mendengar hal tersebut segera Letkol Achmad (Dandim HSU) maju kedepan dengan pistol di tangan menantang Amar Hanafiah sambil menunjuk kebagian paha yang tampak bekas-bekas kena peluru, sambil berkata “ inilah bukti tangan-tangan berdarah dari orang-orang Komunis”. Letkol Achmad adalah anggota Siliwangi yang melakukan Long-March yang terkenal itu.

Perlu dicatat disini bahwa Partai Politik pertama yang mengutuk G30S/PKI adalah Partai Nasional Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1965, kemudian menyusul pernyataan Partai NU pada tanggal 2 Oktober 1965 disusul partai-paartai lainnya.

Pada tanggal 5 Oktober 1965 terbentuklah Komando Aksi Pemuda Anti Kontra Revolusi (KAPAK) yang menuntut pembubaran PKI.

Keputusan Peperda Kalimantan Selatan No. Kep 028/PEPELRAD/X/1965 tanggal 15 Oktober 1965 menyatakan pembekuan kegiatan PKI/ormas-ormasnya.

Pada tanggal 12 Oktober 1965, umat beragama di Kalimantan Selatan mengadakan rapat samudera di lapangan Merdeka Banjarmasin (sekarang di areal halaman Masjid Sabilal Muhtadin depan PLN) menuntut pembubaran PKI/ormas-ormasnya.

Dalam rangka kunjungan Menteri Dalam Negeri ke Kalimantan Selatan tanggal 20 November sampai dengan 3 Desember 1965 untuk meresmikan Daerah Tk. II Tabalong, Tapin, dan Tanah Laut serta Akademi Pemerintah Dalam Negeri, disetiap tempat disambut oleh rakyat yang menuntut pembubaran PKI/ormas-ormasnya, dan pada tanggal 2 Desember 1965 ketika Menteri Dalam Negeri tiba di Gubernuran Banjarmasin, 16 Pimpinan Parpol/Ormas, Sekber Golkar menyampaikan pula resolusi yang menuntut pembubaran PKI kepada Pemerintah Pusat dan Menteri Dalam Negeri berjanji untuk meneruskan resolusi tersebut kepada Presiden Soekarno.

I. TUNTUTAN PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA

1. Reaksi Partai Politik dan Organisasi Massa

Kenyataan menunjukkan bahwa setelah tersiar adanya Gerakan 30 September melalui RRI Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965, baik parpol maupun ormas belum menentukan sikap yang jelas karena sama sekali tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan latar belakangnya. Situasi maupun kondisi politik saat itu memaksa mereka untuk bertindak secermat mungkin, agar sikap yang mereka ambil jangan sampai menimbulkan kerugian politik bagi partai dan golongannya. Baru setelah mendengar pidato Pangkostrad Mayjen Soeharto ditempat ditemukannya para korban penculikan pada tanggal 4 Oktober 1965 dan siaran upacara pemakaman para Pahlawan Revolusi pada tanggal 5 Oktober 1965 keluarlah pernyataan parpol dan ormas yang pada umumnya bernada sebagai berikut :

- a. Mengucapkan syukur atas terhindarnya Presiden Soekarno dari bahaya.
- b. Tetap berdiri dibelakang Presiden/Panglima Tertinggi ABRI Bung Karno.
- c. Mengutuk pemberontak dan pengkhianatan Gerakan 30 September.

2. Tindakan Spontan Massa Terhadap PKI

Setelah diperoleh kejelasan tentang pengkhianatan PKI, mulailah terjadi aksi-aksi spontan kelompok massa pemuda, mahasiswa dan pelajar. Aksi-aksi massa tersebut terjadi mulai tanggal 8 Oktober 1965 diberbagai daerah dan di tempat-tempat dimana terdapat basis-basis kekuatan PKI, - bahkan pembantaian-pembantaianpun tidak terelakkan.

Tanggal 8 Oktober 1965 di Taman Senopati, Jakarta terjadi Apel Kebulatan Tekad dari parpol, ormas dan pemuda yang mendesak agar Presiden Soekarno membubarkan PKI. Dan pada tanggal 23 Oktober 1965, kekuatan-kekuatan tadi bergabung membentuk Front Pancasila.

Dikalangan mahasiswa timbul aspirasi yang sama, mereka menuntut pembubaran PKI dan menyerbu gedung-gedung milik PKI.

Pada tanggal 25 Oktober 1965, Menteri PTIP Prof. Dr. Syarif Tayeb menyarankan agar mahasiswa tidak bergerak sendiri-sendiri, tetapi membentuk gerakan mahasiswa yang diberi nama KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Munculnya KAMI, kemudian diikuti oleh terbentuknya : KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia), KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia), KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia) dan lain-lain. Kemudian kesatuan aksi tergabung dalam Badan Koordinasi Kesatuan Aksi dan Front Pancasila menandatangani Naskah Deklarasi Mendukung Pancasila yang menggalang persatuan antara Rakyat dan ABRI sebagai dwitunggal dalam mengamalkan ideologi Pancasila secara murni dan konsekwen serta menolak usaha pembelaan terhadap Gerakan 30 September dalam bentuk apapun.

3. Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA)

Karena sudah pasti bahwa PKI adalah dalang dan sekaligus sebagai pelaku Gerakan 30 September, maka sejak Januari 1966 tuntutan rakyat agar PKI dibubarkan terus meningkat.

Pada tanggal 10 Januari 1966, KAMI mencetuskan 3 (tiga) tuntutan yang dikenal sebagai Tri Tuntutan Rakyat kepada Pemerintah yang intinya adalah :

- a. Bubarkan PKI.
- b. Bersihkan Kabinet dari unsur-unsur G30S/PKI, dan
- c. Turunkan harga.

Dalam melaksanakan tuntutanannya KAMI didukung oleh Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), mereka melakukan demonstrasi di Jakarta. Situasi semakin panas ketika pada tanggal 17 Januari 1966, Dr. Subandrio dengan menggunakan pengaruh dan wewenang resminya sebagai Waperdam I (Wakil Perdana Menteri Pertama) menganjurkan agar : "teror dibalas dengan teror".

Pada tanggal 25 Februari 1966 Presiden Soekarno membubarkan KAMI, namun pembubaran ini tidak mempengaruhi aksi-aksi pemuda/mahasiswa/pelajar. Pada tanggal 8 Maret 1966

demonstrasi besar-besaran yang ditujukan kepada Waperdam I/Menteri Luar Negeri/Kepala Badan Intelijen (BPI) Dr. Subandrio yang sikapnya menguntungkan PKI. Pada waktu yang sama aksi demonstrasi juga dilancarkan ke gedung Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan yang menuntut diberhentikannya Menteri PDK Soemardjo, karena dinilai sebagai simpatisan PKI.

Pada tanggal 9 Maret 1966 Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina (RRC) di Glodok dan Kantor Berita Cina (Hsin Hua) menjadi sasaran demonstran karena masyarakat yakin keterlibatan RRC dalam Gerakan 30 September/PKI di Indonesia. Hal ini didasari dengan pernyataan-pernyataan Pemerintah RRC melalui radio Peking (Beijing) yang terus menerus menyerang Pemerintah Indonesia serta bernada membela PKI. Pemerintah RRC juga membantu dan melindungi kegiatan tokoh-tokoh PKI yang bersembunyi di RRC dan melakukan kegiatan-kegiatan politik yang menentang Pemerintah Republik Indonesia diantaranya : Djawoto. Hal ini menyebabkan hubungan RI-RRC menjadi putus.

4. Gerakan Massa dan Kesatuan Aksi di Kalimantan Selatan

Pada tanggal 10 Februari 1966 dalam demonstrasi besar-besaran oleh para mahasiswa ke Konsulat Republik Rakyat Cina (RRC) di Jalan Pecinaan (sekarang AES Nasution), staf Konsulat tidak mau menerima pernyataan mahasiswa dan menghadapi perwakilan mahasiswa dengan sikap tidak sopan dan sikap ini memicu kemarahan mahasiswa. Para demonstran terus berjalan sambil meneriakkan yel-yel mengutuk Komunis dan keterlibatan RRC, dan sewaktu rombongan berada di jembatan Sudimampir (Antasari) dipertigaan Toko Minseng terjadilah Tragedi Berdarah, seorang mahasiswa yaitu Hasanuddin HM tewas tertembak dan beberapa orang mendapat luka-luka. Peristiwa ini tidak pernah dan tidak ada yang mengungkapkannya, dan menurut berita burung yang berkembang diluaran, penembaknya kemudian mendapat perlindungan dari pejabat setempat.

Hasanuddin HM adalah korban pertama dikalangan mahasiswa Indonesia dalam memperjuangkan Tritura, dan kepadanya dianugerahkan gelar Pahlawan Ampera serta sebagai tanda penghargaan jenazahnya disemayamkan di Pemakaman Pahlawan Perang Banjar.

Sepanjang informasi tambahan yang diperoleh bahwa pengamanan disekitar lokasi peristiwa tersebut dilakukan oleh Kesatuan dari Jawa Tengah (Diponegoro) yang dikenal sebagai Batalyon K (K disini bukan berarti Komunis) yaitu salah satu dari 3 (tiga) Batalyon (K, L dan M) yang disusupi dan dibina oleh Komunis dan oleh sebab itu mereka dipencar penempatannya di seluruh Indonesia.

Semula Yon K dipimpin Mayor Inf. Kaderi, dan Yon K/Brigif-6 Solo, membawa pasukan ke Semarang atas permintaan Kepala Biro Khusus Jawa Tengah (Sudarmo), untuk memberi tekanan pada Pangdam VII/Diponegoro (Brigjen Suryosumpeno). Tapi gerakan ini tidak berhasil karena dihalangi oleh Kie. Panser Intai di Magelang. Pada sore harinya terjadi gerakan spontan berupa pengrusakan terhadap beberapa rumah dan toko milik orang Cina.

Pada tanggal 12 Februari 1966 demonstrasi dilanjutkan lagi secara lebih meluas dengan dukungan pemuda dan mahasiswa dari Banjarbaru yaitu aksi cotar-coret terhadap rumah dan toko milik orang Cina dengan tulisan-tulisan : Usir warga RRC; Ganyang PKI dan sebagainya.

Pemilik toko cat membuka tokonya dan mempersilahkan kepada demonstran untuk mengambil cat guna keperluan aksi tersebut.

Seperti diketahui pada tanggal 26 Februari 1966, Presiden Soekarno membubarkan KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia).

Dengan Keputusan Presiden tentang pembubaran KAMI tersebut maka secara de jure KAMI tidak bisa bergerak seperti biasa, maka sebagai tindakan strategic kemudian aktivis-aktivis KAMI

berintegrasi ke dalam KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia), sehingga aktivis KAPPI yang semula terdiri dari :

A. Sy. Abdis	Usman Rifani
Masripani	Imansyah Aziz
Mar Hamdan	Rafii Hamdi
Sofyan Saberi	Mahliah
Kastalani	Hamidhan
Soegian Noor	Alni Solih
Kamarulzaman	Gt. Hidayat A.R
Mochlis Mondia	

diperkuat oleh aktivis-aktivis KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yaitu antara lain :

Anang Adenansi	Djok Mentaya
Johar Hamid	Mahrani
Mas Abi Karsa	Zainuddin Rais
Amaril	Abd. Latif
S. Alwi	Taufik Effendi
Taberani Jauhar	Fuad Saidi
Muchtasirul Tajeri	

Aktivis KAMI lainnya untuk :

Banjarbaru :	Mulyadi Yusuf	(PMII)
	Ismet Inonu	(GMNI)
	Addi Maswardi	(APDN)
	Rachmadi	
Amuntai :	Achmad Makki	
	Syaferiansyah	

Dengan demikian aktivis-aktivis bebas bergerak dalam jaringan KAPPI.

Pepelrada Kalimantan Selatan akhirnya mencoba pula membubarkan KAPPI dengan alasan bahwa KAPPI hanya untuk mereka yang benar-benar berstatus pelajar. Tapi seruan ini tidak dihiraukan oleh mahasiswa dan pemuda. Dan mereka juga menolak gagasan Pemerintah untuk bergabung dalam KOJARSENA (Komando Pelajar Serba Guna).

Selanjutnya gerakan pemuda membentuk pula beberapa Kesatuan Aksi seperti : KAPAK (Kesatuan Aksi Pemuda Anti Kontra Revolusioner), KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia), KABI (Kesatuan Aksi Buruh Indonesia), KAWI (Kesatuan Aksi Wanita Indonesia), KAGI (Kesatuan Aksi Guru Indonesia), KAPNI (Kesatuan Aksi Pengusaha Nasional Indonesia).

Dengan adanya kekompakan antara mahasiswa, pelajar, pemuda, masyarakat dan ABRI maka dalam waktu singkat kekuatan PKI/Ormasnya di Kalimantan Selatan dapat dilumpuhkan.

Namun masih ada sentra-sentra yang dicurigai disusupi oleh oknum PKI, terutama di daerah Banjarbaru sebagai tempat konsolidasi mereka. Hal ini dimungkinkan karena di Banjarbaru terpusat proyek-proyek besar bantuan Rusia yaitu : Proyek Besi Baja Kalimantan, Proyek Jalan Kalimantan dan Landasan Udara Ulin.

Para karyawan dikedua proyek tadi sangat aktif dan mengikuti latihan kemiliteran dalam Kesatuan Pertahanan Sipil dengan pakaian dan perlengkapan yang lebih baik dari anggota Pertahanan Sipil lainnya.

Di Banjarbaru gerakan pemuda yang sangat aktif ialah Gerakan Pemuda ANSHOR (G. P. ANSHOR) Wilayah Kalimantan Selatan dengan Ketuanya Said Hasyim, BA. Koordinasi pengamanan daerah Banjarbaru - Martapura telah dibina dengan efektif antara G. P. Anshor Wilayah Kalimantan Selatan dengan Resimen Brigade Mobil (Brimob) yang dipimpin oleh Letkol Aruman Wirananggapati, dan malah satuan Brimob meminjamkan beberapa pucuk senapan kepada G. P. Anshor Wilayah Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

Sampai akhir November 1965, di Banjarbaru (Kampung Mentaos belakang asrama APDN) dan Kampung Sumberdadi (sekarang sungai belakang Pasar Banjarbaru) masih terdengar yel-yel dari orang-orang PKI seperti : Hidup Pancasila!, Hidup Pancasila! Diiringi pula oleh lagu Genjer-Genjer dan lagu Darah Rakyat antara lain berbunyi :

.....
*Darah rakyat masih berjalan
Menderita sakit dan miskin
Akan tiba masa pembalasan
Rakyat yang menjadi hakim*

Oleh karena lokasi ini sangat dekat dengan Asrama Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, yang menurut mereka (orang-orang PKI itu) dicetak kader-kader birokrat borjuis yang dikenal mereka dengan istilah setan - kota, maka para mahasiswa APDN yang tinggal di asrama menggabungkan diri pada Posko Piket G. P. Anshor di rumah Said Hasyim, BA. Begitu juga dengan mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat dipimpin Mulyadi Yusuf (PMII) dan Ismet Ahmad (GMNI) bersama-sama dengan mahasiswa APDN tergabung dalam KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia).

Presidium KAMI Komisaris Kalimantan Selatan dibentuk pada tanggal 18 Januari 1966, dalam aksi demonstrasi tanggal 10 Februari 1966 yang sudah mendapat izin dari Pepelrada Kalimantan Selatan, mengajukan tuntutan sebagai berikut :

- a. Pernyataan/tuntutan kepada Panca Tunggal Kalimantan Selatan.

Keputusan-keputusan dan tuntutan-tuntutan yang dibatjakan dalam Appel Siaga di lapangan Merdeka Bandjarmasin antara lain :

- a. 1. *Memohon kepada panta tunggal Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan untuk segera turun tangan melaksanakan tindakan penurunan harga barang-barang yang sekarang melampaui batas daya beli rakyat.*
 2. *Mengusulkan agar Pemerintah Daerah bertindak tegas terhadap setiap usaha kaum spekulan dan tengkulak yang sifatnya akan mengatjau ekonomi Daerah.*
 3. *Mengusulkan agar Pemerintah Daerah mentjabut izin perdagangan para pedagang yang tjukup indikasi membantu dan bersimpati terhadap G.30.S./PKI.*
 4. *Menjambut hangat kebijaksanaan Pemerintah Daerah untuk mendatangkan barang se-banyak-banyaknya ke Daerah Kalimantan Selatan dan menjarankan agar kontrol terhadap penjaluran barang-barang tersebut diefektifkan, sehingga terhindar dari permainan kaum spekulan dan tengkulak-tengkulak.*
- b. 1. *Memohon kepada Presiden / Panglima ABRI / pemimpin besar Revolusi Bung Karno agar membubarkan PKI dan Ormas-ormasnya dan menjatakan sebagai Partai terlarang dalam waktu yang segera.*

2. *Memohon agar pemerintah tidak memberi kesempatan lagi terhadap ideology Komunis untuk hidup di bumi Indonesia dalam bentuk dan gaya apapun juga.*
 3. *Memohon agar Presiden / Pangti ABRI / pemimpin besar revolusi segera memerintahkan penangkapan atas menteri-menteri, Pedjabat-pedjabat Tinggi lainnya yang terlibat dalam peristiwa GESTOK.*
 4. *Memohon agar MAHMILUB untuk mengadili tokoh-tokoh dan dalang-dalang dari GESTOK menjatuhkan hukuman-hukuman yang paling berat atau Hukuman mati.*
 5. *Memohon agar Presiden/ Pangti ABRI/ Pimpinan Besar Revolusi segera menginstruksikan untuk menumpas habis pelaku-pelaku GESTOK dan segala aspirasinya yang masih terdapat di masyarakat.*
- b. Pernyataan yang ditujukan kepada Republik Rakyat Cina melalui Konsulat RRC Banjarmasin.
- Pernyataan yang ditujukan kepada R. R. T berbunyi :*
- Kami, mahasiswa Indonesia Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (K.A.M.I.), dengan ini menyatakan :*
- i. *Memprotes keras terhadap siaran yang dilansir melalui radio Peking oleh Pemerintah R.R.T. yang menjampuri urusan Dalam Negeri Indonesia.*
 - ii. *Mendesak agar wartawan Kantor Berita Resmi R.R.T. Hsin Hua di Djakarta segera meninggalkan Indonesia.*
 - iii. *Menolak masuknya majalah-majalah, buku-buku, film-film yang mengandung doktrin-doktrin/adjaran-adjaran atheisme, karena bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berfalsafahkan Pantja Sila.*

Pada tanggal 21 dan 22 Mei 1966 terjadi lagi demonstrasi KAPPI yang menuntut dibubarkannya kawan-kawan mereka dari tahanan Pangdahan/Pepelradahan berhubung pembentukan KAPPI secara diam-diam pada tanggal 17 Mei 1966. Sebagian dari mereka dibebaskan dan Pepelradahan tidak keberatan pembentukan KAPPI asal terdiri dari para pelajar semua.

J. KESATUAN AKSI DAN KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada phase pertama tuntutan Kesatuan Aksi seperti mereka sampaikan diatas, dan kemudian tiba pada phase kedua sasaran perjuangan ditujukan kepada masalah-masalah daerah terutama menata Peng-Orde Baru-an dalam segala bidang yang merupakan manifestasi daripada pelaksanaan Tritura serta Penegakan Kebenaran dan Keadilan. Manifestasi dari semuanya dapat kita lihat dengan adanya tuntutan social kontrol, yang ditujukan kepada Badan-badan/Instansi-instansi, Lembaga-lembaga Negara di Daerah (Pemda/DPRD, Gubernur/BPH) maupun oknum-oknum pejabat yang dianggap oleh mereka bermental Orde Lama. Tuntutan-tuntutan tersebut disampaikan oleh Kesatuan Aksi dalam bentuk demonstrasi-demonstrasi, siaran melalui RRI, surat-surat kabar, brosur-brosur yang kadang-kadang dilaksanakan tanpa izin dari yang berwenang.

Khususnya mengenai persoalan-persoalan yang dikemukakan pada phase kedua ini sering menimbulkan ketegangan-ketegangan politik di daerah, karena aksi-aksi yang dilakukan oleh Kesatuan Aksi sering dikemukakan secara a priori tanpa melihat atau berkonsultasi atas kebenaran dan kebijakan pihak lainnya terutama dari pihak penguasa, yang di dalam menanggapi persoalan Kesatuan Aksi mencoba usaha agar persatuan dan kesatuan daari seluruh Komponen Orde Baru dapat terjalin erat.

Sebagai sarana alat perjuangan dan informasi mereka maka Komponen Kesatuan Aksi menerbitkan media Mimbar Mahasiswa dengan pengelolanya Jok Mentaya, dan kawan-kawan.

Disamping masalah pembubaran Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dikemukakan oleh Kesatuan Aksi secara a priori juga masalah penyegaran pimpinan DPRD serta Pemerintah Daerah dengan berpangkal pada titik tolak persoalan beras di daerah ini. Khusus mengenai persoalan beras di daerah ini oleh Pemerintah Daerah telah berkali-kali menjelaskan kebijaksanaannya pada pertemuan konsultasi dengan pihak Kesatuan Aksi. Tetapi sebegitu jauh setiap itikad baik Pemerintah Daerah ini senantiasa ditanggapi secara negatif, sedang kebijaksanaan yang dilakukan Pemerintah Daerah mendapat dukungan kuat dari petani yang menghendaki akan perbaikan tingkat hidupnya, dan dengan manifestasinya berupa dukungan terhadap kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

Aksi-aksi demonstran oleh Kesatuan Aksi yang menentang kebijaksanaan Pemerintah Daerah untuk menjual surplus beras guna menolong propinsi-propinsi tetangga yang kekurangan disamping untuk mendongkrak harga beras dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, akhirnya petani Di beberapa tempat juga menunjukkan reaksinya dalam meng-counter keinginan mahasiswa. Dukungan terhadap kebijaksanaan Pemerintah Daerah datang dari :

- a. Pernyataan delegasi besar dari Petani Tinggiran, Tamban tanggal 26 Desember 1967.
- b. Pernyataan delegasi besar dari Petani Kecamatan Gambut tanggal 28 Desember 1967.
- c. Pernyataan delegasi besar dari Petani Kecamatan Anjir Muara tanggal 26 Desember 1967.
- d. Pernyataan delegasi besar dari Petani Kecamatan Kertak Hanyar tanggal 29 Desember 1967.
- e. Pernyataan D.O.T PERTA Hulu Sungai Selatan tanggal 28 Desember 1967.
- f. Pernyataan delegasi besar dari Petani Kabupaten Tapin tanggal 30 Desember 1967.
- g. Pernyataan D.O.T PERTA Kalimantan Selatan tanggal 4 Januari 1968.
- h. Pernyataan delegasi besar Petani Batang Alai tanggal 6 Januari 1968.
- i. Pernyataan delegasi besar Petani Veteran Kotamadya Banjarmasin dan sekitar tanggal 8 Januari 1968.

Kebijaksanaan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah ini, yakni Gubernur Kalimantan Selatan dalam masalah beras (pengiriman keluar daerah) adalah sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Kabinet Ampera yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan suatu Kesatuan Ekonomi yang bulat sehingga setiap larangan atau hambatan terhadap perdagangan antar pulau terutama untuk bahan pangan, -tidak dibenarkan.

Pihak penguasa Pemerintah Daerah berupaya agar Kesatuan Aksi jangan sampai diperalat oleh suatu golongan atau partai tertentu.

Sedang mengenai tuntutan pembubaran PNI, Pemerintah Daerah berpendapat bahwa PNI Kalimantan Selatan berbeda dengan PNI di daerah lainnya, karena PNI Kalimantan Selatan adalah Partai Politik di Kalimantan Selatan yang pertama yang mengeluarkan pernyataan mengutuk Gerakan 30 September yaitu pada tanggal 1 Oktober 1965, keikut sertaan PNI menandatangani pernyataan mengutuk G30S/PKI tanggal 2 Oktober 1965, bersama partai-partai politik lainnya, keikut sertaan PNI aktif dalam KAPAK (Komando Aksi Pemuda Anti Kontra Revolusioner),

dukungan terhadap kebulatan tekad para Panglima se-Jawa pada tanggal 7 Juli 1967, dan adanya musyawarah Kerja PNI Daerah Kalimantan Selatan tanggal 5 November 1967, yang memperbaharui semua Pengurus DPD terdiri dari tokoh-tokoh muda yang telah mendapat persetujuan dari laksus KOPKAMTIBDA Kalimantan Selatan. Hal ini lebih diperjelas lagi dengan adanya Instruksi Presiden No. 16 Tahun 1967 tanggal 22 Desember 1967 yang memberikan kesempatan untuk kristalisasi dan konsolidasi bagi PNI. Dalam Lembaga-lembaga Negara dan Daerah (DPRD-GR, BPH, DPR-GR, MPRS) partai PNI tetap terwakili.

K. PENGAMANAN DAN PENYELESAIAN OKNUM PKI/ORMASNYA DI DAERAH KALIMANTAN SELATAN

Pengaman dan penyelesaian oknum G30S/PKI di daerah ini sesuai dengan instruksi Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pangsar KOGAM No. INST.13/KOGAM/F/1966 tanggal 27 Juli 1966 terhadap orang-orang yang ditahan karena terlibat atau didengar terlibat dalam gerakan kontra revolusi G30S/PKI diadakan penyelidikan penyaringan diklasifikasikan dalam golongan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Golongan A (Tapol A)
Orang-orang yang nyata-nyata terlibat secara langsung dalam G30S/PKI ialah mereka yang berdasarkan bukti dan saksi yang ada, -nyata-nyata mempunyai peranan sebagai pemikir, perencana, pengendali, pelaksana atau melakukan kegiatan yang membantu pelaksanaan gerakan kontra revolusi itu, baik kegiatan-kegiatan yang mendahului atau pada waktu terjadi G30S maupun sesudahnya.
- b. Golongan B (Tapol B)
Orang-orang yang nyata-nyata terlibat secara langsung dalam G30S/PKI ialah mereka yang terdapat indikasi yang kuat mempunyai peranan seperti tersebut pada Golongan A, tetapi tidak terdapat cukup bukti untuk diadakan penuntutan lebih lanjut, dan masih berbahaya dalam anggapan keamanan apabila dikembalikan ke dalam masyarakat.
- c. Golongan C (Tapol C)
Orang-orang yang nyata-nyata tidak terlibat, tidak termasuk dalam klasifikasi A dan B dan tidak berbahaya bagi keamanan, apabila dikembalikan ke dalam masyarakat.

Terhadap Tapol A dipercepat pemeriksaannya dan selanjutnya diajukan guna diadili kepada :

- a Mahkamah Militer Luar Biasa (MAHMILUB) bagi tokoh-tokoh G30S, baik anggota ABRI maupun Sipil.
- b Pengadilan Militer, bagi anggota ABRI/bukan tokoh.
- c Pengadilan Negeri, bagi orang-orang sipil/bukan tokoh.

Keseluruhan tahanan politik sejak terjadinya G30S/PKI yang ditangkap di Kalimantan Selatan berjumlah ± 1.70 orang. Setelah diadakan penyaringan oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Pelpelradahan Kalimantan Selatan dan setelah dikurangi dengan yang meninggal dunia dan yang dibebaskan menjadi tahanan rumah, tahanan kota dan lain-lain, maka sisa tahanan tersebut bersisa 401 orang terdiri dari : Tapol A 174 orang, Tapol B 159 orang, Tapol C 128 orang.

Dalam pelaksanaan Mahmilub tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus 1967 terhadap 2 (dua) gembong/tokoh PKI Kalimantan Selatan yaitu : Amar Hanafiah dan Achmad Darlian Gani yang dijatuhi hukuman mati, tapi sampai saat ini eksekusi belum dilakukan.

L. PEMULIHAN DAN PENYEMPURNAAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH

Seperti tersebut dalam Pempres No. 6/1959, ditegaskan bahwa anggota Badan Pemerintah Daerah (BPH) adalah Pembantu Kepala Daerah dalam urusan di bidang Rumah Tangga Daerah dan tugas pembantuan (*medebewind*) dalam pemerintahan dengan tugas pokok :

- a. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah baik diminta maupun tidak diminta.
- b. Menjalankan pekerjaan yang ditugaskan oleh Kepala Daerah.

Hubungan kerja antara Kepala Daerah dengan BPH diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. VI/P.D. tanggal 21 Mei 1960 antara lain :

- a. BPH bukan Badan Kolektif.
- b. Diadakan musyawarah antara BPH dengan Kepala Daerah mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan dan diputuskan oleh DPRD dan mengenai peraturan-peraturan Keputusan Pemerintah Daerah.
- c. Dalam melaksanakan tugas koordinasi dan pengawasan, BPH tidak bertindak sebagai pelaksana teknis.
- d. Tugas anggota BPH dalam sektor Pemerintahan dititik beratkan pada kebijaksanaan politik.

Selanjutnya Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Agustus 1964 No. 5/1964 tentang Perombakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8/1959 diatur tentang jumlah anggota BPH di daerah Swatantra Tk. I maupun Tk. II sebanyak 5 (lima) orang dengan ketentuan bahwa penambahan jumlah anggota BPH hanya diizinkan bila penyegaran DPRD telah terlaksana.

Selanjutnya 2 (dua) orang anggota BPH Daswati I Kalimantan Selatan berhenti atas permintaan sendiri adalah : Muchyar Usman, SK. Mendagri tanggal 16 Desember 1964 No. Des. 2/26/41-208, dan H. Hadriyah, M, SK. Mendagri tanggal 19 Mei 1965 No. Des. 2/17/33-88.

Dengan demikian jumlah anggota BPH yang ada sebanyak 4 (empat) orang : H. Abd. Rasyid Nasar, Zafury Zumry, H. Syahrul, Abd. Hamidhan.

Memenuhi penyegaran BPH maka pada tanggal 12 Oktober 1966, DPRD Propinsi Kalimantan Selatan mencalonkan sebagai anggota BPH Propinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut : H. Imansyah / H. Birhasani, H. Abd. Rasyid Nasar / Ir. H.M. Said, Zafury Zumry / Said Hasyim, Ba, Drs. M. Fadlan / M. Yusuf Mansyur, Sh, H. Burhan Saniman / Drs. Ek. Kustan, Kapten Masykur Rivai / Masdar Halid.

Dan akhirnya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Desember 1966 No. Des.2/34/2-244 diangkat sebagai anggota BPH Propinsi Kalimantan Selatan : H. Imansyah Bidang Kesra, H. Abd, Rasyid Nasar Bidang Pemerintahan, Said Hasyim, BA Bidang Pendidikan, Ir. H.M. Said Bidang Pembangunan, M. Yusuf Mansyur, SH Bidang Perekonomian, Masykur Rivai Bidang Keamanan.

Sehingga jumlah keseluruhan menjadi 7 (tujuh) orang dengan – Abdul Hamidhan Bidang Keuangan. Kemudian Masykur Rivai dengan SK. Mendagri dibebaskan sebagai anggota BPH menyusul M. Yusuf Mansyur, SH yang mengajukan permintaan berhenti sebagai anggota BPH, karena Partai Perti terpecah dua.

Berdasar urutan Peralihan dari Penetapan Presiden No. 6/1959 pasal 18 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada berdasar Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Oktober 1966 No. Des.O disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR).

Jumlah anggota DPRD yang diangkat terakhir dengan Surat-surat Menteri Dalam Negeri masing-masing tanggal 29 Desember 1964 No. Des/2/27/15-23 dan tanggal 12 Mei 1966 No. 2/10/28-74 sebanyak 40 (empat puluh) orang yaitu 20 (dua puluh) orang mewakili partai politik dan 20 (dua puluh) orang mewakili Golongan Karya.

Berhubung dengan keangkatan 2 (dua) orang anggota DPRD menjadi anggota BPH Propinsi yaitu : Kapten Masykur Rivai dan H.M. Imansyah maka ada 2 (dua) kursi di DPRD yang kosong.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintah daerah maka dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 September 1967 No. Pemda 4/7/7/205 telah disetujui ditetapkan penambahan kursi anggota DPRD Propinsi Kalimantan Selatan menjadi 45 (empat puluh lima) kursi yang akan diisi untuk Golkar, ALRI, AURI, Seniman, Partai Murba (yang telah direhabilitasi) dan Kesatuan Aksi.

Sedang Pimpinan DPRD dipilih dari dan oleh anggota DPRD melalui Sidang Pleno dengan hasil sebagai berikut :

- a. Ketua : H. Abd. Gani Majedi (NU)
- b. Wakil Ketua I : Gt. Achmad Sugian Noor (PNI)
- c. Wakil Ketua II : Saderi (Golkar SKDN)

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Oktober 1966 No. Des.2/28/2-202 dan dilantik oleh Gubernur Kepala Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 5 November 1966.

Menurut Pasal 19 ayat 1 Penpres No. 5/1959 bahwa Sekretaris Daerah dipilih dan diangkat oleh DPRD antara calon-calon yang diajukan oleh Gubernur kepala Daerah.

Tugas Sekretaris Daerah adalah : sebagai Sekretaris Kepala Daerah dan sebagai Sekretaris serta secara *ex officio* juga menjadi Sekretaris MUSPIDA.

Pada tanggal 9 April 1963 DPRD telah memilih H. Hasbullah sebagai Sekretaris Daerah. Kemudian yang bersangkutan mengundurkan diri, maka untuk mengatasi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah, kepada Gubernur Kepala Daerah diserahkan untuk mengangkat Pjs. Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan. Semula diangkat Drs. Baderun Aran dan kemudian diganti lagi oleh Drs. Asful Anwar.

Kemudian pimpinan DPRD Propinsi mencalonkan Drs. Chalid Maksum sebagai Sekretaris Daerah, dan telah diangkat dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Kalimantan Selatan tanggal 8 Januari 1965 No. IV-1-9-245-5 yang diperkuat dengan Penetapan Menteri Dalam Negeri.

Sesuai dengan Undang-undang No. 1/1957 tentang Pemerintah Daerah, bahwa daerah-daerah di Indonesia dibagi atas Daerah Swatantra Tk. I dan Tk. II, tetapi setelah berlakunya Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah (yang baru) maka nama Daswati I berubah menjadi Propinsi dan Dswati II menjadi Kabupaten/Kotamadya dan perubahan ini secara serentak diumumkan tanggal 17 Desember 1965 di Kalimantan Selatan.

Sampai tanggal 17 Desember 1965 Kabupaten/Kotamadya Kalimantan Selatan berjumlah 7 (tujuh) buah Kabupaten/Kotamadya. Untuk memenuhi tuntutan rakyat dalam daerah Tabalong, Tapin dan Tanah Laut maka oleh Gubernur Kepala Daerah sebelumnya yaitu pada tanggal 17 Juli 1965 dengan SK. No. 83/I-1-101-305 dibentuk Kantor Persiapan Kabupaten dengan menunjuk Kepala kantor masing-masing untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan petunjuk Bupati Kepala daerah Kabupaten Induk.

Disamping itu masyarakat dalam Kewedanaan Berangas dan Kecamatan Banjarbaru dalam tahun 1964 juga menuntut daerahnya menjadi Daswati II Bantam raya (Berangas, Anjir, Tamban) dan Kotapraja Banjarbaru.

Akhirnya pada tanggal 18 September 1965 oleh Gubernur Kepala Daerah dilantik Pj. Bupati/Penguasa Kepala Daerah untuk Persiapan Kabupaten Tabalong, Tapin dan Tanah Laut dan selanjutnya pada tanggal 28 November sampai dengan 2 November 1965 ketiga daerah tersebut diresmikan sebagai Daerah Tk. II oleh Menteri Dalam Negeri : Kabupaten Tabalong dengan ibukota Tanjung, Kabupaten Tapin dengan ibukota Rantau, Kabupaten Tanah Laut dengan ibukota Pelaihari.

Dengan demikian, Propinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 9 (sembilan) Kabupaten dan 1 (satu) Kotapraja. Upaya-upaya pemekaran Daerah Tk. II terus bergema, dan dengan SK Gubernur Kepala Daerah tanggal 5 Juni 1968 No. 38/I-1-202-359 menunjuk Abdul Murad S ahli Tatapraaja sebagai Kepala Kantor Persiapan Kabupaten Tanah Bumbu Selatan di Pagatan yang diresmikan sendiri oleh Gubernur Kepala Daerah tanggal 6 Juni 1968. Menyusul pula pembentukan Kantor Persiapan Kabupaten Bantam Raya dengan ibukotanya Berangas dengan SK. Gubernur Kepala Daerah tanggal 22 Juni 1968 No. 43/I-1-205-399 dan peresmiannya pada tanggal 27 Juli 1968.

1. Pengangkatan Kepala Daerah Tk. II yang Baru

Di sejumlah Daerah Tingkat II dilaksanakan pengangkatan Kepala Daerah, yakni :

a. Kabupaten Kotabaru

Pada tanggal 7 Desember 1963 dilantik Mayor Basrindu menggantikan H. Achmad Hudari.

b. Kotamadya Banjarmasin

Dengan Sk. Gubernur Kepala Daerah tanggal 28 April 1965 No. 1-2-19-247 dan tanggal 2 Oktober 1965 No. Sekr. B3-3-26-474 ditunjuk Kapten Quderah H. Adenan (anggota BPH) sebagai Pj. Walikota menggantikan H. Horman. Kemudian dengan SK. Menteri Dalam Negeri tanggal 13 September 1965 No. UP/15/5/18-1358, diangkat M. Hanafiah (calon yang diajukan oleh DPRD Kotapraja Banjarmasin) sebagai Walikota Banjarmasin.

c. Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pada tanggal 12 Agustus 1964 oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan telah dilantik Bupati Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mayor Dhislansyah, S.N menggantikan Bupati Kepala Daerah yang lama H. Kasyful Anwar.

d. Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pada tanggal 13 Agustus 1964, Masconi Abdurrachman dilantik sebagai Bupati Kepala Daerah Hulu Sungai Utara menggantikan Kapten Bihman Villa.

e. Kabupaten Tabalong

Pada tanggal 22 Juni 1966 telah dilakukan pencalonan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tabalong dengan hasilnya dari 3 (tiga) calon ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Desember 1966 No. UP-14/8/1442 telah diangkat Usman Dundrung sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tabalong dan pelantikannya juga dilakukan pada tanggal 12 Desember 1966.

f. Kabupaten Banjar

Atas permohonan sendiri, telah diberhentikan dengan hormat sebagai Bupati Kepala Daerah Banjar, H. Basri, BA dan seiring dengan itu ditunjuk sebagai Pejabat Bupati Kepala Daerah Letkol H. Ali Hamdy Budhigawis yang dalam pemilihan calon Bupati Kepala Daerah terpilih secara aklamasi dan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Januari 1967 No. UP/8/1/4/32 diangkat sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banjar dan dilantik pada tanggal 14 Februari 1967.

g. Kabupaten Tanah Laut

Dengan terpilihnya Kapten Abdullah Syahrir oleh DPRD Kabupaten Tanah Laut sebagai calon Bupati Kepala Daerah maka dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Desember 1966 No. UP/14/11/2039, diangkat sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut menggantikan Pejabat Bupati yang lama Gusti Taberi.

h. Kabupaten Tapin

Secara aklamasi DPRD Kabupaten Tapin mencalonkan Mayor H. Mohammad Noor dan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Januari 1967 No.

8/1/682 diangkat dan dilantik sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten pada tanggal 16 Februari 1967.

- i. Untuk Bupati Kepala Daerah Hulu Sungai Tengah dan Barito penggantian/pemilihannya akan dilaksanakan pada tahun 1968. Penggantian Bupati Kepala Daerah dikedua Kabupaten tersebut berdasar pertimbangan dengan alasan peremajaan.

2. Pengangkatan Wakil Gubernur

Dengan ditetapkannya Letkol H. Aberanie Sulaiman pada tanggal 27 September 1963 sebagai Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan maka untuk lebih efektifnya tugas-tugas Gubernur Kepala Daerah diperlukan seorang Wakil Gubernur.

Panglima Kodam X/Lambung Mangkurat selaku Ketua panca Tunggal (Pepelrada Kalimantan Selatan) memanggil Rapat Panca Tunggal untuk membicarakan hal tersebut pada awal Juni 1965. Atas beberapa pertimbangan maka diusulkan Imansyah seorang pegawai tinggi, bekas Kepala Perburuahan Kalimantan Selatan dan pula seorang tokoh Senior PNI di daerah ini. Semula Letkol H. Aberanie Sulaiman agak keberatan dengan alasan Imansyah lebih tua. Tapi akhirnya atas desakan Panca Tunggal, diusulkan tetap Imansyah sebagai Wakil Gubernur dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari maka Anggota/Pengurus Panca Tunggal menanda-tangani usulan tadi. Setelah itu Sekretaris Panca Tunggal Mayor A.E. Manihuruk berangkat ke Jakarta menemui Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan usulan dan 10 (sepuluh) hari kemudian tiba kembali ke Banjarmasin membawa Surat Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Imansyah menjadi Wakil Gubernur. Menteri Dalam Negeri Dr. Sumarno melantik yang bersangkutan di Banjarbaru.

3. Kasus Pengangkatan Walikotamadya Banjarmasin

Tidaklah lazim bahwa surat pengusulan seorang pimpinan daerah harus ditandatangani oleh semua anggota Panca Tunggal. Ini dilakukan berdasarkan pengalaman kemungkinan ada eksese di kemudian hari seperti dalam kasus pengusulan (Busthomi - Aberanie Sulaiman) untuk jabatan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan.

Menjelang pertengahan Juni 1963, masa jabatan Haji Horman selaku Walikota Banjarmasin akan berakhir, maka dalam rangka membina stabilitas Daerah maka Pepelrada Kalimantan Selatan melihat bahwa tokoh muda NU Kalimantan Selatan dari G.P. Anshor yaitu Sdr. H. Imansyah dapat diberikan kesempatan untuk jabatan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Banjarmasin. Semua Ketua-ketua Periodik Front Nasional Kalimantan Selatan menyetujuinya.

Dalam Rapat Panca Tunggal Kalimantan Selatan sekitar awal Agustus 1965 dijeaskan bahwa hal ini adalah untuk mengantisipasi kader-kader muda dan militan dari PKI dan ormas-ormasnya, diperlukan seorang yang dapat mengimbangi aktivitas tersebut yaitu Haji Imansyah dari NU/G.P. Anshor.

Sebaliknya Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Propinsi Selatan Letkol H. Aberanie Sulaiman menghendaki Mohammad Hanafiah, seorang tokoh Angkatan 45 menjadi Walikotamadya Banjarmasin. Setelah terjadi diskusi yang mendalam dan cukup lama, akhirnya Letkol H. Aberanie Sulaiman dapat menyetujui diusulkannya H. Imansyah untuk menjadi Walikotamadya Banjarmasin dan meminta agar Panca Tunggal ikut menanda tangani usul tersebut dan pengiriman Surat pengusulan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan.

Satu bulan kemudian datang Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengangkat Mohammad Hanafiah sebagai Walikotamadya Banjarmasin. Kemudian Pepelrada/ Ketua Panca

Tunggal minta konfirmasi Gubernur Kepala Daerah tentang hal ini, dan Gubernur Kepala Daerah menyatakan juga sangat terkejut karena Gubernur Kepala Daerah tidak pernah mengusulkan Mohammad Hanafiah untuk Walikota Banjarmasin.

Pepelrada Kalimantan Selatan merasa terpuak dan merasa ada suatu kekuatan yang bermain dibelakang keluarnya Surat keputusan Menteri Dalam Negeri ini. Oleh karena itu Pepelrada/ Ketua Panca Tunggal Kalimantan Selatan meminta agar Gubernur Kepala Daerah menunda pelantikan Mohammad Hanafiah karena akan menanyakan persoalan ini ke Jakarta.

Pepelrada Kalimantan Selatan / Ketua Panca Tunggal menanyakan hal ini kepada Panglima Mandala II (Pangkolada) Mayjen Maraden Panggabean dan meminta agar juga turut membicarakan dengan Menteri Panglima Angkatan Darat, Letjen A. Yani. Pepelrada Kalimantan Selatan / Ketua Panca Tunggal/Pangdam X/LM merasa kehilangan muka dan bersedia untuk mundur dari jabatannya jika atasan tidak lagi mempercayakannya untuk membina daerah Kalimantan Selatan, dan Mayjen Maraden Panggabean bersedia berangkat ke Jakarta menemui Menteri Panglima Angkatan Darat untuk membicarakan masalah ini.

Pada tanggal 1 Oktober 1965, Mayjen Maraden Panggabean tiba dari Jakarta sekitar jam 12.00 dan membawa surat dari Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen A. Yani. Rupanya Mayjen M. Panggabean berangkat dari rumah sekitar jam 06.00 sehingga tidak mengetahui terjadinya peristiwa G30S/PKI. Surat dari Menteri Panglima Angkatan Darat tersebut tertanggal 30 September 1965, yang berarti dibuat pada siang hari sebelum dibunuh oleh gerakan pengkhianatan G30S/PKI.

Intisari surat yang ditulis-tangan sendiri oleh Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen A. Yani ini meminta Pangdam/ Ketua Panca Tunggal Kalimantan Selatan Brigjend Amir Mahmud agar memaklumi bahwa dalam kehidupan politik banyak sekali terjadi soal-soal yang zakalijk-positif dikorbankan untuk soal-soal yang sifatnya psikologis dan onzakelijk, dan bahwa Pemerintah Pusatlah yang menentukan.

M. SURAT PERINTAH SEBELAS MARET (SUPERSEMAR)

Makin gencarnya tuntutan Angkatan 66 agar Kabinet Dwikora dibubarkan, memaksa Presiden Soekarno me-reshuffle (merubah) kabinet. Pada tanggal 24 Februari 1966 terbentuk Kabinet Dwikora yang disempurnakan atau lebih dikenal sebagai Kabinet 100 Menteri. Jadi jatuhnya Kabinet ini bukan karena oposisi, juga bukan karena keretakan dalam Kabinet atau ada pertentangan antara para Menteri, tetapi Kabinet menjadi demisioner karena adanya demonstrasi dan tuntutan dari Angkatan 66.

Pada tanggal 24 Februari 1966, yaitu pada waktu pelantikan Kabinet terjadilah demonstrasi besar-besaran di kota Jakarta, sampai ke Istana Merdeka. Jalan-jalan macet karena dipenuhi demonstran. Dalam peristiwa itu gugur tertembak seorang mahasiswa Arif Rahman Hakim dari Universitas Indonesia. Demonstrasi meluas kemana-mana, dan korban dikalangan mahasiswa semakin bertambah : Zainal Zahze, Arif Margono, Aris Munandar, Ihwan Ridwan Rais dan Yulius Usman. Di daerah ini kita mengenal Hasanuddin HM, dan mereka yang gugur ini diberikan predikat kehormatan sebagai "Pahlawan Ampera". Karena demonstrasi mahasiswa/ Angkatan 66 pada tanggal 24 Februari 1966 sebelum pelantikan "Kabinet 100 Menteri", maka Presiden Soekarno membubarkan KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) pada tanggal 26 Februari 1966 dan pada 3 Maret 1966 dilanjutkan dengan perintah menghentikan kuliah di Universitas Indonesia. Hal ini menyebabkan mahasiswa tambah marah dan menuntut TRITURA lebih gencar lagi.

Klimaks segala kejadian dan ketegangan ialah dikeluarkannya Surat Perintah oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 11 maret 1966, yang secara lengkap tertera dibawah ini :

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA
SURAT PERINTAH¹⁴

I. Mengingat :

- 1.1. Tingkatan Revolusi sekarang ini, serta keadaan politik baik nasional maupun Internasional.
- 1.2. Perintah Harian Panglima tertinggi angkatan Bersenjata/Presiden/ Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966.

II. Menimbang :

- 1.1. Perlu adanya ketenangan dan kestabilan Pemerintah dan jalannya Revolusi.
- 1.2. Perlu adanya jaminan keutuhan Pimpinan Besar Revolusi ABRI dan rakyat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta segala ajaran-ajarannya.

III. Memutuskan/Memerintahkan :

Kepada Letjen Soeharto Menteri Panglima Angkatan Darat untuk : Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi :

1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk, terjaminnya Pemerintahan dan ketenangan serta kestabilan jalannya Pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Mandataris MPRS demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin Besar Revolusi.

¹⁴ Surat Perintah 11 Maret atau SUPERSEMAR dalam perjalannya mengundang banyak pertanyaan. Sampai tahun 1998 konon ada tiga versi.

1) Versi resmi yang selama ini dikenal masyarakat.

Pada 11 Maret 1966 pagi, Bung Karno terbang ke Istana Bogor dengan helikopter setelah diberitakan adanya sepasukan tentara di depan istana. Ketika itu Bung Karno sedang memimpin sidang Kabinet Dwikora yang disempurnakan. Siangnya tiga orang Jenderal menyusul; Mendagri Basuki Rachmat, Men.Industri M. Jusuf dan Amir Machmud Pangdam V/jaya, setelah memperoleh ijin dari Menpangad Soeharto yang sedang sakit di rumahnya. Di Bogor ketiga Jenderal ini berembuk dengan Soekarno. Malam harinya jadilah Supersemar.

2) Versi Hasyim Ning.

Pada 9 maret 1966 sekitar pukul 21.00 H. Asyim Ning ditelepon oleh Alamsyah Ratu Perwiranegara ASS VII SUAD, agar hadir dalam pertemuan di rumah Dasaad.. Hasyim Ning dijemput sendiri oleh Ajudan Alamsyah. Dalam pertemuan itu Alamsyah meminta kepada Hasyim Ning dan dasaad menemui Bung Karno untuk meyakinkan beliau menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto. Hasyim Ning dibekali oleh suatu surat-keterangan pengangkatan sebagai penghubung antara Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dengan Menteri Angkatan Darat. Esoknya berangkat dengan Dasaad ke Istana Bogor; mereka menyarankan agar Presiden melimpahkan kekuasaan sementara kepada Jenderal Soeharto. Kira-kira pukul 22.00 Bung Karno menyarankan menerima saran itu. Hasil pertemuan ini dilaporkan kepada Alamsyah. Pada tanggal 11 Maret Jenderal Soeharto memerintahkan kepada tiga Jenderal (Basuki Rahmat, M. Jusuf, Amir Mahmud) menemui dan meminta Bung Karno menanda-tangani Surat Perintah 11 Maret itu.

3) Versi Letda (purn) Soekardjo Wilardjito.

Pensiunan Letda ini mengaku menyaksikan sendiri, bahwa Bung Karno menanda-tangani Surat Perintah itu dibawah todongan pistol oleh dua diantara tiga Jenderal itu. Dari TEMPO, 20 Maret 1982 dan SURYA, 25 Agustus 1998.

2. Mengadakan koordinasi Pelaksana perintah dengan Panglima-panglima Angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknya.
3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan paut dalam tugas dan tanggung jawab seperti tersebut diatas.

IV. Selesai

Jakarta , 11 Maret 1966
 Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar
 Revolusi Mandataris MPRS

Ttd.

SOEKARNO

Perkembangan di Jakarta berlangsung sedemikian cepat, dan karena Presiden Soekarno tidak segera mengambil tindakan yang tegas kepada PKI yang jelas-jelas memberontak dan melakukan coup d'etat untuk merubuhkan Negara Pancasila dan menggantinya dengan Negara Komunis. Para pemuda, mahasiswa dan organisasi-organisasi massa semakin marah. Mereka menyebut diri sendiri sebagai Angkatan 66 dan mengadakan demonstrasi secara besar-besaran pada tanggal 12 Januari 1966 dengan mengajukan tuntutan yang terkenal dengan TRITURA.

Ternyata Presiden Soekarno sama sekali tidak menanggapi tuntutan dari Angkatan 66 dan malahan menuduh mereka ditunggangi oleh CIA. Pada tanggal 15 Januari 1966 dalam sidang Kabinet di Bogor, Presiden menawarkan masalah G30S/PKI agar diselesaikan secara politis dan bahkan menawarkan jabatan Menteri bagi mereka yang sanggup menurunkan harga. Dalam sidang Kabinet tersebut Wakil Perdana Menteri I Subandrio mengusulkan dibentuknya "Barisan Soekarno" untuk menghadapi usaha mereka yang berniat mendongkel Presiden Soekarno. Gagasan pembentukan barisan Soekarno tersebut digagalkan oleh keempat Panglima Angkatan yaitu Letjen Soeharto (Men/Pangad), Laksamana Laut R. E. Martadinata (Men/Pangal), Laksamana Muda Sri Mulyono Herlambang (Men/Pangau) dan Komisaris Jenderal Polisi Sucipto Yudodiharjo (Men/Pangak).

Angkatan 66 terus menerus mengadakan demonstrasi dan tuntutan mereka tidak digubris oleh Presiden Soekarno. Sementara itu mulai tanggal 14 Februari 1966 diadakan Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa (MAHMILUB) yang mengajukan tokoh-tokoh PKI dan mereka yang terlibat dalam Gerakan 30 September diantaranya : Nyono, Letkol Untung, Laksda Omar Dhani, Brigjen Suparjo serta tokoh-tokoh lainnya.

Supersemar tersebut merupakan salah satu sumber hukum Indonesia, disamping sumber hukum lain seperti Proklamasi Kemerdekaan, UUD 1945, dan Dekrit Presiden. Dengan adanya surat perintah tersebut, Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto, -mengambil tindakan-tindakan yang positif untuk menyelamatkan Bangsa dan Negara dari kekacauan dan kehancuran. Tindakan tersebut adalah :

1. Pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966. PKI telah nyata-nyata memberontak 2 (dua) kali terhadap Pemerintah Republik Indonesia yang syah, yaitu di Madiun (18 September 1948) dan di Jakarta — Lobang Buaya (30 September 1965). Keputusan pembubaran PKI dan organisasi mantelnya diperkuat dengan Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pernyataan Pembubaran PKI sebagai Partai Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Pada tanggal 18 Maret 1966 dilakukan penahanan/pengamanan terhadap 15 (lima belas) orang Menteri Kabinet Dwikora (yang disempurnakan) dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30 September. Kelima belas orang Menteri tersebut adalah : Dr.

Subandrio (Waperdam I), Dr. Khairul Saleh (Waperdam II), Ir. Setiadi Reksoprojo (Urusan Listrik dan Ketenagakerjaan), Sumarjo (Pendidikan Dasar dan Kebudayaan), Oei Ciu Tat, SH (Menteri Negara), Ir. Surahman (Pengairan Rakyat dan PMD), Yusuf muda Dalam (Urusan Bank Sentral dan Gubernur Bank Indonesia), Armunanto (Pertambangan), Sutomo Martopradoto (Perburuhan), A. Astrawinata, SH (Kehakiman), Mayjen Ahmadi] (Penerangan), Drs. Muh. Akhadi (Transmigrasi dan Koperasi), Drs. Muh. Syafei (Pengamanan), J. Tumakala (Sekjen Front Nasional), Mayjen Dr. Sumarno Sastroatmojo (Mendagri/ Gubernur DKI). Dengan demikian Kabinet 100 Menteri tidak berumur lama yaitu hanya satu bulan dan empat hari saja, karena banyak menterinya yang ditangkap.

3. Pada tanggal 2 Mei 1966 ribuan mahasiswa mendatangi gedung DPR-GR dan menyampaikan Nota Politik Kesatuan Aksi Mahasiswa kepada DPR-GR yang mulai mengadakan Sidang Pleno Terbuka dan Persidangan Keempat Tahun 1965-1966. Nota politik tersebut disampaikan oleh Cosmas Batubara kepada K.H. Ahmad Syaihu yang berisi penyelewengan Orde Lama terhadap Pancasila dan UUD 1945, dan menuntut pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Nota Politik itu diperkuat oleh pidato anggota DPR-GR Dawan Ranumiharjo, SH. Sehubungan dengan itu DPR-GR mengambil Keputusan :
 - a) Pimpinan DPR-GR menjadi demisioner.
 - b) Mengangkat Care-taker Pimpinan DPR-GR yakni K.H. Ahmad Syaihu, Laksamana Muda (L) Mursalin Daeng Mamanggung, Brigjen Dr. Syarif Thayeb.

Selanjutnya pada tanggal 17 Mei 1966, DPR-GR memilih Pimpinan terdiri dari : a) Ketua : K.H. Ahmad Syaihu (NU-Golongan Islam), b) Wakil Ketua : Moh. Ihsan (PNI_Golongan Nasionalis), Drs. Ben Mang Reng Say (Golongan Kristen Katholik), Laksamana Muda (L) Mursalin Daeng Mamanggung (Golongan Karya), dan Brigjen Dr. Syarif Thayeb (ABRI)

- 4) Pada awal Orde Baru, MPRS mengadakan Sidang Umum MPRS V pada tanggal 20 Juni 1966 sampai dengan 5 Juli 1966 dengan susunan Pimpinan MPRS sebagai berikut :
 - a) Ketua : Jenderal Dr. H. Abdul Haris Nasution (ABRI)
 - b) Wakil Ketua : H.M.Subhan Z.E (NU)
 - c) Wakil Ketua : Osa Maliki (PNI)
 - d) Wakil Ketua : Melanton Siregar (Kristen Katholik)
 - e) Wakil Ketua : Brigjen Mashudi (Golongan Karya/ABRI)

- 5) Pada tanggal 22 Juni 1966 Presiden Soekarno berpidato dengan judul NAWAKSARA (9 Pasal), tapi amanat tersebut dianggap tidak memenuhi harapan rakyat karena tidak memuat secara jelas kebijaksanaan Presiden/Mandataris mengenai Peristiwa G30S/PKI. Kemudian DPR-GR meminta kepada MPRS untuk mengadakan Sidang Istimewa, dalam resolusinya tanggal 9 Februari 1967 dengan sebuah Memorandum agar MPRS memanggil persidangan MPRS untuk memberhentikan Soekarno dari jabatan Presiden Republik Indonesia.

Akhirnya pada bulan Maret 1967 MPRS mengadakan Sidang Istimewa dan mengeluarkan TAP MPRS No. XXXIII Tahun 1967 tanggal 12 Maret 1967 yang isinya penarikan kembali mandat MPRS dari tangan Presiden Soekarno dan kemudian mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia.

Dengan demikian berakhirilah babakan Orde Demokrasi Terpimpin dan mulai melangkah Kebabakan Orde Baru.

N. AKTIVITAS SOSIAL KEMASYARAKATAN

Dalam periode Politik sebagai Panglima, maka praktis hampir segala kegiatan kemasyarakatan diarahkan sesuai dengan keinginan Penguasa, yang semuanya bermuara kepada kegiatan yang dikategorikan progresif-revolusioner sesuai dengan tuntutan Revolusi yang belum selesai.

Hak menyampaikan suara dan pendapat dibatasi, dan kalau disetujui, maka harus sesuai dengan MANIPOL-USDEK. Media cetak yang sejenis harus melalui sensor yang ketat. Hanya media cetak pendukung idea NASAKOM yang dapat bersuara. Koran-koran PKI seperti Bintang Timur dan Harian Rakyat harus menjadi bacaan aparatur.

Kesenian dan Kebudayaan harus dapat menyesuaikan dirinya dengan kebijaksanaan Pemerintah. Seni untuk seni (I' art pour I' art) sudah tidak berlaku lagi, - pokoknya seni adalah untuk Revolusi. Seniman tidak bebas berkarya, penyanyi tidak bebas membawakan lagu. Lagu-lagu yang bernuansakan cinta seperti lagu-lagunya Koes Plus, Rachmat Kartolo, -dicap sebagai lagu-lagu "cengeng", irama yang mengentak-hentak seperti irama rock disebut sebagai musik " ngak-ngik-ngok " dan piringan hitamnya harus dimusnahkan.

Sekelompok seniman/budayawan mencoba mengadakan reaksi dengan mencetuskan " Manifesto Kebudayaan " (Manikebu), yang melontarkan bahwa "Seni adalah universal ", ditangkap atau paling tidak dilarang untuk menampilkan karyanya.

Dengan Manifesto Kebudayaan ingin memurnikan kegiatan budaya dari pengaruh politik dan kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang berdasarkan Pancasila.

Manikebu ditanda-tangani oleh 20 (dua puluh) orang sastrawan dan cendekiawan non-komunis pada tanggal 17 Agustus 1963. Manikebu dibubarkan oleh Presiden Soekarno tanggal 8 Mei 1964.

Seluruh parpol/ormas dirangsang untuk menyiapkan kader-kader yang militan dengan pakaian seragam yang menyerupai militer, sehingga sulit dibedakan mana yang sebenarnya militer dan yang bukan.

Seluruh remaja/pemuda bahkan sampai ketingkat SD dianjurkan untuk bergabung dalam kelompok-kelompok drum-band. Setiap hari dari pagi sampai malam dari kota sampai ke pelosok kampung, -terdengar bunyi pukulan genderang dan tiupan sangkakala dari kelompok-kelompok drum-band, -sehingga negeri ini seperti dalam keadaan perang.

Tapi aspek positifnya juga terlihat. Karena semua budaya yang berbau NEKOLIM adalah barang yang haram, maka masyarakat mencari alternatif lain dengan meningkatkan kreativitas pada budaya daerah, baik dalam tari, olah vokal, alat musik dan lain-lain. Hal ini jelas dapat dilihat dalam penyelenggaraan Pekan Pemuda III (di Martapura) dan Pekan Pemuda IV (di Amuntai).

Pemantapan tentang kajian ideology negara dituangkan dalam bentuk indoktrinasi. Rakyat tidak perlu menjabarkan secara rinci atau menggunakan " Pendalaman Materi ", -tetapi cukup dengan penyampaian materi indoktrinasi melalui slogan-slogan yang bombastis. Dimana-mana terpajang tulisan Manipol-USdek, bahkan Di beberapa daerah kepada masyarakat diwajibkan menuliskan slogan Manipol-usdek dengan huruf-huruf yang besar diatas atap rumah mereka. Kalau ada orang yang enggan menuruti perintah tersebut maka akan di-cap antek-antek Nekolim, cecunguk imperialisme dan lain-lain. Dalam setiap upacara/rapat , maka para Pimpinan Daerah secara bergiliran memimpin massa untuk menyanyikan lagu-lagu perjuangan termasuk lagu NASAKOM BERSATU, yang diantara liriknya berbunyi :

NASAKOM BERSATU

Nasakom Bersatu

Singkirkan Kepala Batu

*Nasakom satu cita
Indonesia pasti jaya*

Istilah Kepala Batu disini dimaksudkan adalah orang-orang yang Anti Nasakom, tidak mau menerima Nasakom atau Nasakom Phobi.

Keseluruhan bahan Indoktrinasi yang wajib untuk dipelajari dan diamalkan terutama untuk aparat, pimpinan dan kader partai, pengurus dan anggota Front Nasional, pemuda/pelajar dan mahasiswa sebanyak 7 (tujuh) macam, dan oleh karena itu disebut dengan istilah TUBAPI (Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi) yaitu :

Pertama	Lahirnya Pancasila – Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945.
Kedua	UUD 1945 beserta penjelasannya.
Ketiga	Manifestasi Politik beserta perinciannya dari Dewan Pertimbangan Agung
Keempat	Pidato Presiden RI tanggal 17 Agustus 1960 yang dikenal dengan : Jalannya Revolusi Kita (Jarek).
Kelima	Pidato Presiden RI didepan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 30 September 1960 yaitu : To Build the World a New, beserta perinciannya dari Dewan Pertimbangan Agung
Keenam	Penjelasan Manipol-Usdek, rangkaian pidato radio, Ketua Panitia Pembina Jiwa Revolusi Dr. H. Ruslan Abdulgani.
Ketujuh	Amanat Pembangunan Presiden pada Sidang Dewan Perancang Nasional (Depernes) pada tanggal 28 Agustus 1959, beserta Buku Ringkasan Pembangunan Semesta.

Dan bagi mereka yang tidak berpartisipasi akan di-cap sebagai golongan kontra revolusi dan kemungkinan dapat ditangkap tanpa proses pengadilan hukum.

Segala kegiatan dalam kemasyarakatan harus bebas dan tidak terkendala oleh status sosial, tidak dalam kondisi feodalisme, atau lebih dikenal dengan l'exploitation de l'homme par l'homme (penindasan oleh manusia terhadap manusia).

Juga semua kegiatan harus dengan prinsip gotong royong, semua dengan semboyan *ho lopis kuntul baris* (merupakan jargon komando gotong-royong).

O. KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN UPAYA MEREHABILITASI-NYA

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Kalsel pada masa sesudah pengesahan kedaulatan tanggal 29 Desember 1949, tidaklah begitu banyak berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Kemakmuran dan penyebaran penduduk tidak merata dan keadaan ini masih terasa sebagai bagian penderitaan masyarakat akibat Perang Dunia II. Terlambatnya perkembangan sosial ekonomi di daerah ini bukanlah oleh karena tidak suburnya tanah atau kemiskinan alam, akan tetapi disebabkan antara lain oleh karena kesulitan perhubungan/prasarana dan kurangnya tenaga manusia (man-power) guna menggali kekayaan alam di daerah ini.

Satu-satunya sarana perhubungan yang masih dapat digunakan ialah sarana perhubungan Tradisional ialah perhubungan melalui air (sungai, danau dan terus-terusan/anjir). Sarana Perhubungan Darat sangat sedikit, disamping kondisinya yang parah, apalagi akibat Perang Pasifik dan pada periode Perang Kemerdekaan (1945-1950) banyak jalan dan jembatan yang sengaja dirusak untuk kepentingan pertahanan dan strategi militer.

Jalan antara Banjarmasin ke Hulu Sungai yang jaraknya sekitar 130 km, sebagai satu-satunya jalan antar kabupaten yang dapat dilalui kendaraan bermotor/mobil. Sebagai contoh buruknya kondisi jalan misalnya :

- a. Jarak Banjarmasin ke Landasan Ulin (Syamsudin Noor) yang jaraknya hanya 26 km, ditempuh dengan mobil lebih dari 1 jam.
- b. Jarak Banjarmasin ke Tanjung yang jaraknya sekitar 250 km, tetapi untuk mencapainya diperlukan waktu antara 12 – 15 jam dengan kendaraan bermotor/mobil

Kondisi sosial – ekonomi masyarakat menjelang tahun 1960 dalam keadaan yang cukup parah. Hal ini antara lain disebabkan gangguan keamanan di daerah-daerah sehingga masyarakat tidak berani melakukan kegiatan-kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan, dan bahkan banyak rakyat yang mengungsi ke kota-kota. Sarana dan prasarana pembangunan dalam keadaan rusak, misalnya jalan-jalan raya, lebih-lebih lagi jalan ke pedesaan praktis tidak dapat dilalui kendaraan bermotor.

Keadaan ini lebih diperberat lagi dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1959 yang lebih dikenal dengan kebijaksanaan “ sanering “. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Penguasa Perang Daerah Kalimantan Selatan mengeluarkan Keputusan No. Kpts.121/Peperda/Kalsel, tanggal 10 November 1959, yang melarang instansi/jawatan pemerintah menyimpan uangnya di bank-bank swasta.

Disamping itu dilakukan beberapa tingkat antara lain :

- a. Pembentukan Panitia Perencanaan Transportasi untuk Kalimantan Selatan.
- b. Pembentukan Panitia Peningkatan Pendapatan Negara.
- c. Pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Daerah.
- d. Peraturan Logam/Besi Tua, untuk pemanfaatan pembangunan Daerah.
- e. Pembentukan Yayasan Pembangunan Semesta (PENASTA) Kalimantan Selatan (sebagai pendamping Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana). Manajemen ditugaskan kepada Yusuf Jaya dan M. Suriansyah Ideham dari Staf Penguasa Perang Daerah (PEPERDA), diperkuat oleh Drs. H. A. Malik, Drs. Bob Gunadi, dan Drs. Lie Han Po, Sarjana-sarjana Ekonomi/ Dosen Universitas Lambung Mangkurat. Walaupun baru berusia pendek yayasan ini telah menunjukkan keberhasilannya dengan menghimpun dana di bidang perkaretan dan tata niaga karetnya, utamanya untuk pembiayaan pembangunan di bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan.
- f. Pembentukan Tim melancarkan angkutan barang-barang sandang pangan dari Jawa ke Banjarmasin, dan dalam waktu segera berhasil mengatasi kelambatan distribusi beras dan gula terutama untuk tentara, pegawai negeri dan buruh.

Atas prakarsa Peperda telah berhasil dibentuk suatu yayasan yang bergerak dilapangan pendidikan yang diberi nama : “Yayasan Pendidikan Lambung Mangkurat“ yang diketuai oleh Penguasa Perang Daerah sendiri.

Pada tahap pertama telah berhasil dibentuk sebuah Perguruan Tinggi UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT yang pada waktu pembukaannya terdiri dari : Fakultas Hukum, Sosial Politik, Ekonomi, dan Agama (Syariah). Bantuan keuangan diberikan untuk pembangunan gedung, biaya dosen khususnya dosen terbang dari Universitas Gajah Mada.

Disamping itu juga diberikan bantuan untuk :

- a. Bantuan sosial dari keuangan bagi pelajar/mahasiswa diluar daerah.
- b. Bantuan penyempurnaan pengembangan SMP-SMP.
- c. Penambahan Guru-guru SLTA.
- d. Bantuan pembangunan Taman Kanak-Kanak.
- e. Bantuan perlengkapan/pembangunan masjid-masjid.
- f. Mengupayakan Kalimantan Selatan sebagai daerah bebas buta huruf pada tahun 1962.
- g. Mengaktifkan Badan dan pembantu penanggulangan bencana alam.

- h. Menertibkan pertikaian agama soal tariqat.
- i. Membantu pembiayaan lembaga sosial desa di tiap daerah.
- j. Membantu pembiayaan dan kelancaran pemberangkatan Jamaah Haji Banjarmasin – Surabaya PP.
- k. Membantu penertiban soal-soal perumahan.

Dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan di daerah ini, dalam usaha melaksanakan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dengan Keputusan subsider No. 665 tahun 1961 disetiap Daerah Tk. I dibentuk Badan Koordinasi Pembangunan Daerah, yang dalam keadaan darurat yang menjadi ketua BKPD adalah Panglima, dan dalam keadaan Tertip sipil adalah Gubernur.

Tugas pokok BKPD : mengkoordinasikan usaha-usaha di bidang rehabilitasi dan pembangunan daerah; menyusun dan mengendalikan pelaksanaan di bidang program pembangunan yang merupakan Komplemtasi dari Rencana Pembangunan Nasional Semesta; Menertibkan dan mengkoordinasikan penggunaan Anggaran Daerah.

Karena keadaan Tertib Sipil diberlakukan sejak 1 Mei 1963 maka berdasarkan Keppres No. 665 tahun 1961, seyogyanya yang menjadi Ketua BKPD adalah Gubernur.

Pada waktu itu Kol. H. Abu Yazid Busthami menjadi Pejabat Gubernur Kalimantan Selatan yang sebelumnya dijabat oleh H. Maksid yang ditarik ke Pusat karena disangka terlibat dalam suatu perkara dan ternyata kemudian tuduhan itu tidak terbukti dan beliau dibebaskan dari segala tuduhan. Oleh karena itu Panglima Kodam X/LM bermaksud menyerahkan jabatan Ketua BKPD kepada Kol. H. Abu Yazid Busthami dan ternyata yang bersangkutan tidak mau menerima jabatan tersebut dengan alasan bahwa beliau hanya Pejabat yang sifatnya hanya sementara. Kemudian dalam Rapat Catur Tunggal tanggal 7 Oktober 1963 diusulkan agar Ketua BKPD dipegang oleh Letkol H. Aberanie Sulaiman selaku Gubernur Definitif, tetapi kembali Gubernur Letkol H. Aberanie Sulaiman menolak dengan alasan beliau sebagai orang baru, memerlukan konsentrasi di bidang pemerintahan.

Seorang Perencana dari Team Perencana dari ITB yaitu Ir. Sugianto menyusun beberapa Master-Plan yang meliputi : Master-Plan Pembangunan Kalimantan Selatan, Master-Plan Pembangunan Kota Banjarmasin, Master-Plan Pembangunan Kota Banjarbaru, Rencana Pembuatan Masjid, stadion dan hotel.

Proses penyusunan master plan tersebut memerlukan waktu 3,5 tahun. Prioritas pertama adalah pembangunan Masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan masyarakat yang 98 % beragama Islam. Kesepakatan kalau sebelumnya lokasi Masjid direncanakan dikawasan hotel Banjar, maka lokasi yang lebih cocok disepakati ialah kawasan Fort Tatas.

Organisasi Pembangunan Daerah harus dibentuk sebaik-baiknya ; dan dapat dihimpun dengan intensif, dan penggunaannya berdaya-guna dan berhasil-guna. Dengan Surat Keputusan Panca Tunggal Daerah Tingkat I tanggal 22 Juni 1965 No. KPTS- 041/PT/VI/65 dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk melaksanakan administrasi pungutan dan prasarana yang diberi nama Badan Dana Prasarana (BADANA).

Badan ini dipimpin oleh A. Gaffar Hanafiah, seorang staf Senior dari Pemda Propinsi Kalimantan Selatan. Dengan mempergunakan pola pikir PT PENASTA (lihat penjelasan sebelumnya) yang menjadikan hanya komoditi karet sebagai sasaran, BADANA memperluas pungutan juga pada komoditi lainnya seperti rotan, kayu, dan sebagainya. Dengan pungutan-pungutan itu dalam satu bulan dapat dihasilkan Rp. 300,- juta.

Untuk menjalani kegiatan operasionalnya di bidang prasarana, di bidang jalan dan jembatan, pengairan dan persawahan / pertanian maka pada tiap Daerah Tk. II dibentuk Badan Pelaksana yaitu :

- a. KOBIMA (Komando Bina Marga) berdasarkan Surat Keputusan Panca Tunggal No.KPTS.003/PT/I/66 tanggal 14 Januari 1966.
- b. KOAIR (Komando Pengairan) berdasarkan Surat Keputusan Panca Tunggal Daerah Tk.I No.KPTS.061/PT/VI/1966 tanggal 7 Juni 1966.
- c. BAPRANA (Badan Pemeriksa Dana Prasarana) untuk mengawasi pelaksanaan pungutan dana dan prasarana dan pengawasan terhadap penggunaan/pelaksanaan berdasarkan Surat Keputusan Panca Tunggal Daerah Tk.I No.KPTS.070/PT/VII/1966 tanggal 13 Juli 1966.

BAKOPDA (Gaya Lama). Badan Koordinasi Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 19 tahun 1964, dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan tanggal 12 oktober 1964 No.KPTS-771/I/BAKOPDA/1966, bertugas:

- a. Menyusun usul rencana pembangunan komplementer dari pada Rencana Pembangunan Nasional Semesta untuk ditetapkan oleh Bappenas.
- b. Membantu pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
- c. Menyusun rencana Pembangunan Daerah jangka pendek dan jangka panjang untuk disahkan Bappenas.

BAKOPDA (Gaya Baru). Untuk efisiensi kerja di bidang pembangunan maka dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan No.Kep-536/II/BAKOPDA/IX/1966, diadakan oleh Organisasi BAKOPDA dan BADANA yang diberi nama BAKOPDA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN (Gaya baru).

Susunan Personalia BAKOPDA (Gaya Baru) pertama: Cukup banyak, tetapi lebih banyak bersifat politis daripada bersikap teknis terdiri dari : 2 orang unsur Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), 6 orang unsur Sekretariat, 13 orang unsur Anggota.

Untuk itu disusun kembali personalia BAKOPDA (Gaya Baru) Kedua sebagai berikut :

Unsur Pimpinan :

- a. Ketua : H. Aberanie Sulaiman (Gubernur)
- b. Wakil Ketua : H. Imansyah (Wakil Gubernur)
- c. Ketua Harian : Ir. H.M. Said

Anggota Paripurna : Syamir Syukur, Hamidhan, Drs. H.A.A Malik, H. Muslaini Gobet, Hamli Tjarang, Drs. Syahmardan Barito, Drs. Horman Bachtiar, Harlianto, SH, Kom. Pol H. Ibrahim, Letkol. H. Nunci.

Sekretariat : Ir. Rosma Nazif (Sekretaris Umum), Ir. A. Tamjid (Sekretaris Ur. P3), Abd. Wahab Hasan (Kepala Staf Administor).

Kondisi Prasarana di daerah Kalsel sangat memprihatinkan bahkan dapat dikatakan sangat buruk misalnya : Jalan Negara yang baik hanya 30 %, Jalan Propinsi yang baik hanya 7 %, Jalan Kabupaten yang baik hanya 6 %, Jembatan yang baik rata-rata 50 %, Prasarana Pengairan rata-rata secara fisik dalam keadaan baik, tetapi pemanfaatannya sangat tergantung dengan musim hujan, dan belum adanya cetak sawah.

Disamping pembangunan dan rehabilitasi di bidang prasarana (jalan/jembatan dan pengairan) juga beberapa proyek fisik berupa pembangunan gedung/bangunan antara lain :

- a. Pencanaan kerangka besi dan bangunan perumahan proyek Plywood Kotabaru.
- b. Proyek Perkantoran BAKOPDA.
- c. Proyek Perikanan Kotabaru (Modal kerja).
- d. Proyek Masjid Raya.
 - 1) Pembangunan 4 unit asrama pengganti.
 - 2) Ruangan untuk administrasi-panitya Masjid.
- e. Gedung Unlam Unit Banjarbaru.
- f. Gedung APDN, gedung KIAA, Asrama Uma Kandung, RS Umum Barabai, Guest House Bakopda, BKIA jalan Belitung.
- g. Bantuan bidang mental pendidikan berupa sumbangan kepada Perguruan Tinggi di Kalimantan Selatan dan Badan Pendidikan lainnya.
- h. Biaya administrasi, Operasional dan logistik Bakopda.

Dapat disimpulkan bahwa Sejak kedaulatan dikembalikan kepada Republik Indonesia, maka dapat dikatakan tidak pernah dilaksanakan usaha perbaikan jalan/jembatan secara menyeluruh dan tuntas. Jalan/jembatan yang dibuat sebelum perang (zaman Belanda) tidak dapat menampung frekwensi dan berat lalu lintas yang kian meningkat. Perbaikan pengairan walaupun tidak ada (sedikit), tetapi tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga hasil persawahan tidak dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk. Disamping itu dengan situasi keamanan yang memburuk akibat gangguan pengacau bersenjata, rakyat banyak meninggalkan kampung mereka dan pindah ke kota, berarti banyak sawah-sawah yang terlantar, banyak perkebunan yang tidak dipetik hasilnya (walaupun hasilnya ada, seperti buah-buahan), nelayan tidak berani mencari ikan ke daerah-daerah terpencil dan lain-lain.

Menumpuknya tenaga dari pedesaan yang bermukim ke kota (urbanisasi) menyebabkan bertambah sulitnya mencari lapangan kerja. Sedang tingkat kenaikan harga naik hampir tidak terkendali. Yang paling terpuruk adalah anggota tentara dan pegawai negeri sipil, dengan penghasilan yang hanya cukup untuk paling lama antara 7-15 hari menyebabkan banyak diantara mereka yang menambah penghasilan sebagai penarik beca, pedagang asongan dan lain-lain dan bahkan ada yang langsung berhenti dan menjadi pekerja pada Proyek-proyek Nasional seperti Proyek Jalan Kalimantan, Proyek Besi Baja Kalimantan, Proyek Listrik Tenaga Air Riam Kanan dan Proyek Kertas Martapura. Pada waktu itu daerah Kalimantan Selatan mengalami “musim kemarau panjang” sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan air minum. Di beberapa daerah pertanian seperti : Guntung Papuyu, Kabuau (Gambut). Harga air senilai dengan harga padi yaitu 1 (satu) kaleng air ditukar dengan 1 (satu) kaleng padi. Begitu juga dengan Pegawai Negeri yang gajinya sangat terbatas, kesulitan untuk membeli air. Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan berupaya untuk meringankan nasib Pegawai Negeri khususnya Pegawai Pemda dengan merencanakan memberi bantuan dari hasil ADDO, tapi yang menjadi hambatan uang tunai terbatas, oleh karena itu bantuan diberikan dalam bentuk sepeda yang sekaligus membantu transportasi Pegawai Negeri. Bantuan ini kemudian lebih populer dengan istilah “Sepeda Banyu”. Istilah lain digunakan “Sepeda Jengki” (Yankee, walaupun tidak ada hubungannya dengan Amerika Serikat), mungkin karena bentuk sepedanya yang ramping. Merk sepeda itupun bermacam-macam misalnya : Benny, Simplex, Batavus, Eagle dan lain-lain.

Dengan bertambah pulihnya keamanan di daerah-daerah, maka petani mulai berkesempatan mengerjakan sawahnya dan stabilitas di bidang pangan setahap demi setahap mulai terkendali

bahkan dapat mensupply beras kepada daerah-daerah propinsi tetangga (Propinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur).

Kalau secara Nasional dipatok kebutuhan perkapita sebesar 90 kg beras/perkapita, maka daerah Kalimantan Selatan memasok 145 kg/perkapita yang berarti jauh lebih tinggi dari Kebutuhan Nasional.

Bahkan seandainya daerah Kalimantan Selatan mematok 145 kg/perkapita yang berarti di bawah patokan daerah Kalimantan Selatan, tetapi tetap berada diatas dasar Patokan Nasional 90 kg/perkapita. Artinya daerah Kalimantan Selatan tetap merupakan daerah yang surplus.

Begitu pula halnya dengan produksi holtikultura (jagung, ketela pohon, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau) dari tahun ketahun terus meningkat dan yang jadi permasalahan dari tahun ketahun adalah belum tertatanya jalur pemasaran yang dapat menjamin kestabilan harga.

Pungutan Dana Prasarana ditetapkan dengan Keputusan Panca Tunggal tanggal 14 Mei 1965, sebagai berikut :

- 1) Barang-barang yang keluar dari Pelabuhan-pelabuhan di Kalimantan Selatan dikenakan dana prasarana antara 5 – 10 % dari harga pelabuhan.
- 2) Barang-barang mewah yang masuk ke Kalimantan Selatan dikenakan pungutan dana prasarana antara 10 – 20 % dari harga di pelabuhan.
- 3) Dana prasarana yang dipungut langsung disetor ke Bank Indonesia Cabang Banjarmasin setiap hari.
- 4) Dana prasarana hanya boleh digunakan untuk perbaikan jalan dan jembatan yang telah diputuskan Panca Tunggal.

Kegiatan rehabilitasi jalan khususnya sangat efektif dan efisien, sehingga jarak antara Banjarmasin dan Amuntai disepanjang 200 km dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan.

Selain daripada itu pihak PEPELRADA (Penguasa Pelaksana Komando Dwikora Daerah) Kalimantan Selatan membentuk/menuangkan kegiatan pembangunan ke dalam 2 (dua) jenis Operasi :

- 1) Operasi GAWISABUMI I adalah untuk meningkatkan produksi padi dan ikan laut serta memperlancar pengirimannya. Di bagian ini tidak ada masalah yang berarti karena Kalimantan Selatan merupakan daerah surplus dengan sanggup menetapkan target konsumsi perkapita 1,5 x target Nasional. Hanya yang sangat diawasi oleh Pepelrada adalah kegiatan tengkulak yang menggunakan kesempatan karena harga beras di Kalimantan Selatan lebih rendah dari harga di daerah lainnya.
- 2) Operasi GAWISABUMI II adalah dengan sasaran peremajaan dan peningkatan produksi karet. Pada umumnya karet produksi rakyat adalah karet bakuan (slabs), tetapi jenis karet yang laku di pasaran dunia adalah karet asap (*Ribbed Smoked Sheet* atau RSS). Untuk mengolah getah susu (latex) menjadi RSS diperlukan proses yang cukup panjang dan teliti, jika menginginkan karet RSS yang bermutu dan tinggi harganya. Untuk itu diperlukan peralatan/pengadaan: Cuka karet, Bak takungan aluminium, Pisau penyadap, Ember tempat karet susu (latex), Alat penggiling lembaran karet, Pembangunan rumah-rumah asap.

Beberapa jenis barang lain yang diperlukan oleh daerah Kalimantan Selatan seperti gula, garam, sandang rata-rata harganya tinggi, bahkan sampai 2x dari harga di Jawa. Dari informasi yang dikumpulkan oleh Pepelrada bahkan tingginya harga barang disebabkan oleh :

- a) Prosedur izin pemasukan barang yang berbelit-belit, memerlukan waktu yang lama serta memerlukan uang pelicin.
- b) Untuk mendapatkan ruangan kapal di Surabaya memerlukan tambahan biaya.

- c) Untuk melancarkan pembakaran barang di Banjarmasin juga memerlukan biaya tambahan di pelabuhan.
- d) Ada persaingan yang tidak sehat diantara pedagang. Para pedagang yang bersaing itu tidak segan-segan menyogok para petugas agar memperlambat pemeriksaan barang-barang pengusaha saingannya.

Memperhatikan masalah yang sedemikian maka Panca Tunggal menggariskan kebijaksanaan sebagai berikut :

- a) Pengusaha tidak perlu meminta izin untuk mendatangkan barang ke Kalimantan Selatan.
- b) Barang-barang yang tiba di pelabuhan Banjarmasin dengan segera dikeluarkan tanpa pemeriksaan.
- c) Kapal-kapal dan perahu-perahu layar yang dimiliki perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Kalimantan Selatan harus mengutamakan barang-barang yang masuk ke Kalimantan Selatan.
- d) Pengeluaran beras dari Kalimantan Selatan akhirnya dibatasi (dengan izin Gubernur) untuk mencegah agar jangan ada beras yang dibawa ke luar daerah secara berlebihan.

Kalau dimasa awal tahun 1960-an dan seterusnya yang paling menderita adalah Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan yang sangat terbatas, maka menjelang akhir rezim Orde lama, penghasilan mereka menunjukkan kecenderungan mulai meningkat walaupun belum dapat dikatakan mencukupi untuk pengeluaran sehari-hari. Pada awal tahun 1960-an gaji seorang Pegawai Negeri Sipil hanya cukup untuk membiayai belanja rumah tangga selama seminggu, sehingga mereka terpaksa mencari penghasilan tambahan walaupun sedang dalam jam kerja dan aktivitas mereka ini dikenal dengan istilah OMEGA (Oesaha menambah Gaji) atau TITUS (Tidak Ingin Terlantar Usaha sendiri) misalnya sebagai tukang beca, calo karcis dan lain-lain. Bahkan banyak Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, dan masuk menjadi karyawan Proyek Kertas Martapura, Proyek Besi Baja Kalimantan, Proyek Jalan Kalimantan.

Kemudian kondisi perekonomian mulai bergerak membaik. Salah satu upaya yang mendesak adalah meningkatkan ekspor, terutama karet yang makin lama makin menurun disebabkan : pohon-pohon karet yang ada sudah tua (lebih dari 40 tahun), kurangnya pemeliharaan (gangguan keamanan), sangat sedikit peremajaan (*re-planting*), hampir tidak ada penanaman baru (*new-planting*)

Disamping itu juga mutu karet yang rendah, karena tidak sempurnanya alat-alat processing. Untuk itu Pemerintah Daerah berupaya menyediakan alat-alat up-grading karet yang baru dengan jalan mendatangkan dari luar negeri dengan menggunakan sebagian dari dana Alokasi Devisa Otomatis (ADO).

Dengan demikian Realisasi Ekspor menjelang tahun 1967 sebesar US \$ 13.200.321,23 yaitu sedikit dibawah target ekspor yang besarnya US \$ 13.700.000.

Pada umumnya para importir di daerah Kalimantan Selatan sedikit sekali meng-impor barang-barang yang langsung didatangkan ke daerah Kalimantan Selatan, dan hal ini disebabkan :

- a. Pasaran barang-barang impor sangat terbatas.
- b. Mereka lebih suka mendatangkan barang-barang dari Jawa.
- c. Fasilitas pelabuhan sangat kurang karena dangkalnya Ambang Sungai Barito.
- d. Kesulitan Birokrasi waktu inclaring di pelabuhan Surabaya/ Jakarta.

Dari jumlah devisa US \$ 13.200.321,23 sebesar 80% berasal dari ekspor karet, dan diserahkan kepada Daerah berupa ADO sebesar 10%.

Sejak dikeluarkannya Peraturan 3 Oktober 1966 hingga Desember 1967, jumlah Alokasi Daerah Devisa Otomatis (ADDO) yang diterima Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan sebesar US \$ 1.631,241 dan sebagian diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah.

Dari penerimaan ADDO tersebut digunakan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan sebagai suatu kebijaksanaan untuk :

- a. Dijual untuk dijadikan Rupiah guna pembiayaan rutin (antara lain gaji) sebesar US \$ 303.600,26.
- b. Mengimpor kebutuhan ekspor drive, aspal, alat perikanan, alat kedokteran, alat telekomunikasi, Jeep Toyota dan lain-lain sebesar US \$ 735.115,07.
- c. Kredit untuk eksportir/importir US \$ 523.663,46.
- d. Diserahkan kepada Gubernur KDH Kalimantan Tengah sebesar US \$ 63.862.21 (karena ekspor Kalimantan Tengah melalui pelabuhan Banjarmasin).

Penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok bertambah lancar (terutama beras dan garam), penambahan tangki-tangki persediaan bahan bakar, bahan sandang dan lain-lain.

Mulai saat inilah merupakan titik balik kebangkitan perekonomian di daerah Kalimantan Selatan.

P. MENGGALANG PERSATUAN DAN KESATUAN UMMAT ISLAM MELAWAN UMAT TIDAK BERTUHAN

Sebagai suatu wilayah yang penduduknya dominan beragama Islam, bahkan di beberapa daerah sudah mendekati Ummat Islam yang fanatik. Khususnya di daerah pedesaan mereka sangat memperhatikan dan mentaati fatwa ulama, bahkan tidak jarang penjelasan dari ulama lebih Diperhatikan dari penjelasan Pejabat Pemerintahan. Oleh karena itu kalau ingin garis kebijaksanaan Pemerintah dapat dijalankan lebih efektif, maka harus meng-ikut sertakan peran ulama. Dengan demikian bagaimana caranya agar kekuatan rakyat dan ulama yang potensial dapat diijelmakan menjadi kekuatan yang efektif.

Fakta sejarah telah membuktikan bahwa Ummat Islam memainkan peranan yang sangat penting dalam perjuangan rakyat Asia – Afrika, dan kemudian timbul gagasan oleh tokoh-tokoh Islam di Jakarta antara lain K.H. Ideham Chalid untuk mengadakan Konferensi Islam Asia Afrika dan gagasan ini mendapat dukungan dari Presiden Soekarno. Negara-negara sponsor KIAA adalah : Indonesia, Saudi Arabia, Irak, Pakistan, Philipina, Thailand dan Nigeria mengadakan Konferensi pendahuluan di Jakarta tanggal 6 – 14 Juni 1964.

Rakyat Indonesia, termasuk rakyat Kalimantan Selatan menyambut dengan gembira Konferensi KIAA, dan sebagai perwujudannya tokoh-tokoh Islam Kalimantan Selatan di bawah pimpinan H. Abdulganie Majedi (Ketua Wilayah NU Kalimantan Selatan) bersama-sama dengan Panca Tunggal bermaksud membentuk Panitia Daerah KIAA Kalimantan Selatan. Panitia ini kemudian diketuai oleh H. Abdulganie Majedi dan sebagai pelindungnya adalah Panca Tunggal.

Pembentukan Panitia Daerah Tk. I ini kemudian diikuti oleh pembentukan Panitia Tk. II. Tugas Panitia Tk. I maupun Tk. II adalah untuk memberi penjelasan kepada ummat Islam di daerah ini tentang tujuan KIAA dan berusaha mengumpulkan dana untuk mensukseskan KIAA serta untuk membiayai utusan Kalimantan Selatan untuk menghadiri KIAA yang akan dilangsungkan di Bandung. Dalam hanya satu malam pada Acara Malam Dana di Gubernuran Banjarmasin telah terkumpul dana sebesar Rp. 25 juta, dan disetorkan kepada Panitia Nasional KIAA sebesar Rp. 5 juta sebagai setoran wajib tiap daerah. Pada tanggal 6 – 14 Maret 1965 berlangsung KIAA di Bandung yang dihadiri 32 (tiga puluh dua) negara peserta dan 3 (tiga) negara peninjau. KIAA berhasil mengeluarkan Deklarasi KIAA yang isinya menggambarkan situasi internasional pada

waktu itu serta memuat pedoman-pedoman pokok tentang peranan Islam dan Kaum Muslimin di seluruh dunia dan kerjasama Ummat Islam di Asia Afrika di bidang politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan lain-lain.

Pada akhir 1963 berkembang suatu ide/gagasan untuk membentuk Majelis Ulama Islam Kalimantan Selatan. Di beberapa daerah lainnya misalnya Jawa Barat telah lebih dahulu terbentuk MUI, tapi masih bersifat lokal dan belum ada MUI Pusat.

Pada mulanya gagasan ini agak sulit berkembang karena adanya pandangan yang berbeda, juga ada keengganan ulama dibawah oleh ulama yang lain atau dengan perkataan lain tidak begitu mudah mencari seorang Ketua Umum yang dapat diterima oleh semua pihak. Sebagai jalan keluar dibentuk pimpinan berupa Presidium (beberapa orang ketua) dan seorang sekretaris yaitu H. Abdullah Jazidi. Terbukti MUI ini merupakan wadah yang ampuh untuk melawan PKI atau setidaknya menahan laju perkembangan PKI di Kalimantan Selatan, sebab sejak tahun enam puluhan dan terutama sejak 1963 perkembangan PKI di Kalsel sangat cepat, terutama di Banjarmasin, di daerah perkebunan dan daerah transmigrasi. Lebih-lebih lagi kader-kader PKI banyak yang didatangkan dari luar daerah. Meski jumlah mereka tidak begitu besar, tetapi mereka sangat militan, mempunyai disiplin tinggi, ulet, kesadaran ideologi yang tinggi dan bekerja penuh untuk partai. Cepat berkembangnya PKI di Kalsel antara lain disebabkan oleh kebijaksanaan Presiden Soekarno dengan Politik NASAKOM-nya.

Pada umumnya rakyat Kalsel sangat benci terhadap PKI sebagai wadah dari orang-orang yang anti Tuhan (atheis). Tetapi karena PKI mendapat perlindungan dari Pemerintah, maka kelompok Islam tidak dapat berbuat apa-apa, dan selain daripada itu malah tokoh-tokoh Islam tidak kompak dan malah ada yang saling bertentangan. Pertentangan antara ulama bahkan diikuti pertentangan yang lebih tajam di kalangan pengikut mereka. Hal ini sangat merugikan perjuangan Ummat Islam.

Angkatan Darat menyadari bahwa PKI adalah ancaman yang potensial dan aktual terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, karena PKI berkeinginan mendirikan negara dan masyarakat komunis di Indonesia.

Doktrin PKI "tujuan menghalalkan cara", artinya PKI tidak segan-segan menggunakan cara apa saja untuk mencapai tujuannya untuk mengkomunikasikan Indonesia. Penyiksaan dan pembunuhan adalah hal yang biasa bagi mereka.

Walaupun PKI merupakan lawan yang potensial dan aktual bagi Angkatan Darat, tetapi Angkatan Darat tidak dapat berbuat apa-apa terhadap PKI, karena PKI di bawah perlindungan Presiden Soekarno dan bahkan memberi angin kepada PKI untuk berkembang pesat.

Ini suatu dilema bagi Angkatan Darat. Kalau melawan PKI, Angkatan Darat kompak, tetapi kalau dihadapkan masalah Bung Karno, Angkatan Darat tidak kompak.

Oleh karena itu bahwa untuk menghentikan atau setidaknya menahan perkembangan PKI, harus dilakukan usaha-usaha yang terarah dan terkoordinasi dengan mengarahkan segala kekuatan yang ada, antara lain dengan memutuskan kekuatan dan barisan Ummat Islam.

Sebagai tindak lanjut dari Deklarasi KIAA, perlu disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menggalang potensi Ummat Islam di daerah ini. Pada tanggal 26 Maret 1965 dalam Rapat Panca Tunggal juga diundang beberapa tokoh ulama antara lain : H. Syaifuddin Birhasani, H. Abdullah Jazidi, H. Jamaluddin, K.H. Salman Jalil dan lain-lain.

Dalam rapat diajukan gagasan untuk mengadakan Musyawarah Ulama Islam Kalimantan Selatan dan gagasan disetujui dengan perubahan nama yaitu "Musyawarah Alim Ulama Islam Kalimantan Selatan".

Semula sebagai ketua penyelenggara ditunjuk Letkol A.E. Manihuruk (Sekretaris Panca Tunggal), tapi Letkol A.E. Manihuruk menolak karena dia seorang Kristen dan mungkin tidak

terima oleh para Alim Ulama Islam. Sesudah melalui diskusi dan pertimbangan para tokoh Islam maka tidak menggunakan Ketua Penyelenggara, tetapi Koordinator Penyelenggara.

Tampak jelas disini bahwa toleransi Ummat beragama sangat baik, karena menghadapi musuh bersama yaitu PKI (kaum komunis).

Kesulitan yang dihadapi adalah menghadapi cara memilih peserta yang diperkirakan sebanyak hanya 300 (tiga ratus) orang dari beberapa ribu Alim Ulama Islam di Kalsel, dan ada 2 (dua) kriteria yang digunakan dalam menetapkan peserta yang diundang yaitu :

- a. Peserta harus mencerminkan segenap aliran, jangan sampai didominasi oleh satu atau dua golongan saja.
- b. Ulama yang menjadi peserta haruslah ulama yang berbobot dan mempunyai pengaruh dalam masyarakat dan berasal dari semua Daerah Tk. II

Kemudian sebuah Panitia Kecil dibentuk yang beranggotakan dari partai politik (NU, PSII), Muhammadiyah, akhirnya terjaring sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) orang alim ulama. Sambutan masyarakat Kota Banjarmasin sangat menggembirakan. Semula panitia menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi peserta, tapi ternyata penduduk Banjarmasin yang berasal dari daerah Tk. II (di luar Banjarmasin) meminta kepada Panitia agar para alim ulama seasal dengan mereka menginap di rumah mereka.

Pembukaan Musyawarah diadakan di Gedung Nasional DWIKORA (sekarang areal gedung DPRD Kalsel), dengan jumlah peserta dan undangan yang melimpah ruah sekitar 1.500 (seribu lima ratus) orang.

Dijelaskan oleh Penyelenggara bahwa tujuan musyawarah ini adalah untuk mendalami isi Deklarasi KIAA, baik di bidang politik, sosial, ekonomi maupun bidang agama, mental dan kebudayaan, untuk kemudian dioperasionalkan. Jadi musyawarah bukan untuk resolusi-resolusi atau untuk meminta-minta, bukan pula untuk cerca-mencerca, tuduh-menuduh, -tetapi benar-benar merupakan musyawarah kerja, serta musyawarah untuk menyatakan dengan kata dan perbuatan, sampai dimana amal kesanggupan amal kerja Kaum Muslimin Kalimantan Selatan. Upacara Pembukaan dilakukan tanggal 26 April 1965 dan musyawarahnya sendiri berlangsung dari tanggal 27 sampai dengan 28 April 1965.

Musyawarah terdiri atas :

- a. Komisi I Yang membahas bidang politik dan keamanan yang diketuai oleh H. Mahlan Sahari.
- b. Komisi II Yang membahas bidang agama, mental, kebudayaan, pendidikan dan da'wah diketuai oleh H. Daud Jahya.
- c. Komisi III Yang membahas bidang ekonomi dan sosial diketuai oleh H. Juhri Sulaiman.
- d. Komisi IV Yang membahas bidang kewanitaan dan diketuai oleh Ibu Zuraida Asnawi.

Musyawarah ditutup tanggal 29 April 1965, dan selesai upacara penutupan maka atas prakarsa G.P. Anshor diadakan Rapat Raksasa di lapangan Merdeka (sekarang halaman Masjid Raya Sabilal Mukhtadien depan PLN).

Ternyata setelah selesai musyawarah, masih bersisa jumlah dana. Diambil keputusan untuk membangun sebuah gedung untuk tempat pertemuan para ulama yang diberi nama Gelora Islam yang dibangun di atas tanah Aduma Niaga di Jalan Tarakan (sekarang kompleks perkantoran Pemda Propinsi Kalsel), dan mencetak buku dokumen musyawarah sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) buku. Seluruh buku habis dibagikan, walaupun kemudian masih ada permintaan dari ulama yang tidak kebagian buku. Buku tersebut diberi judul Nur Islam.

Hasil yang paling jelas kelihatan dari musyawarah tersebut dimana para alim ulama bersama seluruh masyarakat, aktif menumpas pemberontakan bersenjata oleh Gerakan 30 September/PKI yang terjadi sekitar 5 (lima) bulan sesudah selesai Musyawarah Alim Ulama Islam Kalimantan Selatan.

Julukan ORDE LAMA bagi pemerintahan atau rezim Soekarno diberikan oleh pemerintahan Soeharto yang menamakan dirinya ORDE BARU. Menurut Orde Baru, Orde Lama itu penuh dengan penyimpangan dan kesalahan, maka Orde Lama itu :

- 1. Identik dengan Demokrasi Terpimpin yang berlaku Juli 1959.*
- 2. Puncak kemelut ialah G 30 S yang bertujuan “mempercepat revolusi” menuju negara yang semakin dikuasai oleh PKI*
- 3. Kesalahan-kesalahan besar yang sering disebut-sebut ialah:*
 - a. Menyimpang dari UUD 1945 dengan menjadikan “Hukum Revolusi” hukum tertinggi, Manipol sebagai GBHN, serta menyamakan Nasakom dengan Pancasila;*
 - b. Mengebiri Lembaga-lembaga Tinggi menjadi alat “Pempin Besar Revolusi”;*
 - c. Kehidupan demokrasi, ekonomi, sosial serta kebudayaan serba terpimpin sehingga mandek;*
 - d. Prestasi nasional di dunia luar lebih diutamakan daripada perbaikan ekonomi rakyat, karena Politik adalah Panglima;*
 - e. Penyelewengan-penyelewengan orang-orang yang berkuasa dihalalkan demi “kepentingan negara/revolusi”.*

BAB X

PERIODE “ORDE BARU”

1966 – 1998

A. KEADAAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Pertanda akan lahirnya Orde Baru telah nampak pada waktu ABRI bersama-sama rakyat menumpas gerakan G 30 S/PKI. Gerakan yang diusung berbagai golongan dalam masyarakat serempak menyatakan tuntutan supaya PKI dibubarkan. Pada awalnya tuntutan itu masih terbatas sifatnya, yaitu hanya ditujukan kepada PKI sebagai partai yang mendalangi pemberontakan. Namun sebenarnya dalam tuntutan tersebut telah terkandung sesuatu yang sangat fundamental, yakni keinginan rakyat untuk melenyapkan kekuatan rakyat yang bertentangan apalagi nyata-nyata telah mengkhianati Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sehingga dalam gerakan yang dilakukan berbagai elemen masyarakat yang menghendaki dibubarkannya PKI itu tersirat pula keinginan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen.

Dalam perjuangan yang dilakukan rakyat melalui tuntutan yang dikemukakan telah terkonsepsi suatu kehendak untuk menegakkan kembali kemurnian Pancasila dan UUD 45. Secara nyata keinginan ini dibuktikan dengan komitmen bersama beberapa partai politik dan organisasi massa yang menandatangani piagam pembentukan Front Pancasila yang akan dijadikan wadah persatuan dan kesatuan rakyat pendukung Pancasila dan UUD 45. Front Pancasila yang terbentuk tanggal 4 Mei 1966 tersebut didukung oleh partai dan organisasi massa seperti NU, PSII, Perkindo, Partai Katholik, IPKI, PERTI, Muhammadiyah, Soksi dan Gasbindo. Kemudian Front Pancasila ini bersama-sama dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) menjadi pendukung Orde Baru dan memelopori tuntutan yang lebih luas dan menyangkut penataan kembali kehidupan kenegaraan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Tuntutan-tuntutan yang digelar oleh berbagai golongan masyarakat pada awalnya masih tergolong lunak. Dari pihak ABRI sendiri melalui Menko Hankam/Kasad pada bulan Oktober 1965 sebulan sesudah pemberontakan G 30 S/PKI hanya menuntut *retooling* pimpinan angkatan yang terlibat. Namun tuntutan-tuntutan ini semakin lama semakin keras nadanya. Kenyataan ini terlihat ketika pada bulan Januari 1966 KAMI menghendaki supaya Kabinet dibersihkan dari unsur-unsur G 30 S/PKI dan ini berarti sudah menyinggung pemerintahan. Selanjutnya dengan adanya tuntutan KAMI agar harga-harga diturunkan, menunjukkan pula bahwa tuntutan yang semula terbatas pada bidang politik dan pemerintahan sudah meluas ke bidang lain, yaitu sektor ekonomi yang menyangkut hidup orang banyak.

Dari berbagai tuntutan yang beragam tersebut jelaslah bahwa yang melatarbelakangi semua itu ialah ketidakpuasan masyarakat pada kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Orde Lama. Berbagai persoalan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama tersebut disebabkan tidak dilaksanakannya Pancasila secara murni dan konsekuen, sehingga merusak kehidupan bangsa dan negara. Adanya penyimpangan yang telah dilakukan tidak saja dapat dilihat oleh kelompok masyarakat yang melakukan penilaian terhadap akibat negatif yang disebabkan oleh penyelenggaraan pemerintahan Orde Lama yang tidak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tetapi dampaknya telah pula dirasakan langsung oleh rakyat. Kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan penilaian tersebut berani menyatakannya dengan terbuka segala keburukan yang terjadi dan dilakukan pemerintah ketika itu.

1. Keadaan Politik di Kalimantan Selatan

Sebagaimana yang telah terjadi pada tingkat nasional, masyarakat di Kalimantan Selatan juga bergejolak atas meletusnya G 30 S/PKI yang memiliki dampak kuat ke seluruh penjuru

daerah. Situasi yang terjadi dalam bidang politik telah menyadarkan masyarakat untuk melakukan reaksi agar keadaan tidak bertambah buruk.

Tidak bisa dipungkiri bahwa PKI telah tersebar sampai ke pelosok-pelosok wilayah Kalimantan Selatan sebagai akibat berlakunya politik Nasakom di Indonesia. Perkembangan PKI di Kalimantan Selatan setelah peristiwa G 30 S/PKI dapat cepat dihambat oleh penguasa militer di daerah ini membekukan kegiatan PKI sejalan dengan yang dilakukan pucuk pimpinan TNI AD di Jakarta.

Gerakan PKI yang cepat dapat ditumpas baik di pusat maupun di daerah dan secara serentak pula melahirkan angkatan 66 yang gigih memperjuangkan tuntutan rakyat. Karena itu pada awal tahun 1966 rakyat semakin tidak sabar menunggu penyelesaian masalah penurunan harga dan pembubaran PKI. Jika di Jakarta muncul gerakan mahasiswa yang dipelopori *Pasukan jaket kuning* dari Universitas Indonesia yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang diikuti Kasatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPPI) dan KAPI maka di Kalimantan Selatan juga lahir organisasi dan perjuangan yang sama.

Tuntutan KAMI yang terkenal dengan Tritura, yaitu bubarkan PKI, bubarkan 100 menteri dan turunkan harga barang merupakan daya picu yang sangat ampuh untuk menggerakkan masyarakat dalam melakukan aksi unjuk rasa. Di Banjarmasin tuntutan-tuntutan yang bergaung di Tingkat Nasional telah pula diikuti oleh para mahasiswa dan pelajar dengan turun ke jalan berdemonstrasi. Salah satu sasaran para pengunjuk rasa dengan mendatangi gedung konsulat Republik Rakyat Cina di Jalan Pacinan (Jalan Pierre Tendean sekarang) untuk menyampaikan protes terhadap sikap Peking yang mencampuri urusan dalam negeri Republik Indonesia. Kegiatan unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 10 Februari 1966 mengakibatkan jatuhnya korban seorang mahasiswa yang bernama Hasanuddin H.M. Kalau demonstrasi di Jakarta korban pertamanya adalah Arif Rahman Hakim mahasiswa kedokteran Universitas Indonesia diberi gelar Pahlawan Ampora begitu juga dengan Hasanuddin HM yang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Unlam.

Di Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin aktivitas KAMI/KAPPI selain melakukan unjuk rasa turun ke jalan, juga mengeluarkan pernyataan dan pendapat melalui siaran RRI Banjarmasin. Siaran pada RRI Banjarmasin ini mereka memanfaatkan rubrik Varia Universitas yang dilakukan oleh Biro Penerangan KAMI yang secara organisatoris masuk dalam Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI). Siaran-siaran yang mereka utarakan adalah menyampaikan aspirasi mahasiswa dan masyarakat umumnya yang mengkritik pemerintahan Orde Lama serta yang tidak kalah pentingnya mengemban misi agar TRITURA benar-benar dapat diwujudkan.

Acara Varia Universitas sebagai corong mahasiswa yang banyak disuarakan pada masing-masing daerah di Indonesia telah membuat khawatir dan dianggap membahayakan kehidupan berbangsa, sehingga keluar surat keputusan Panglima Tertinggi /Soekarno No. 041/Kogam yang isinya menghentikan acara tetap Varia Universitas di berbagai RRI daerah di Indonesia, termasuk RRI di Banjarmasin. Disebabkan mengemukakan pendapat melalui RRI Banjarmasin tidak memungkinkan lagi dan adanya larangan berdemonstrasi oleh penguasa maka melahirkan gagasan untuk mengeluarkan aspirasi mahasiswa melalui penerbitan bulletin. Dengan semangat idealisme yang tinggi para aktifis mahasiswa terutama pada Biro Penerangan KAMI yang di dalamnya ada organisasi IPMI berhasil mewujudkan penerbitan bulletin dalam bentuk cetak stensilan.

Bulletin mahasiswa ini kemudian menjadi "Mimbar Mahasiswa" yang dicetak dua kali seminggu dan pertama kali terbit pada tanggal 8 Agustus 1968. Penerbitan Mimbar Mahasiswa ini dipelopori oleh H.J. Djok Mentaya, H. Anang Adenansi, Yustan Azidin, Muhammad Hadariyah Rokh, Gusti Rusdi Effendi, Rustam Effendi Karel, dan Amaril HS. Surat kabar Mimbar Mahasiswa ini dicetak pada Almamater Pers dengan penerbitnya adalah Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia.

Misi perjuangan yang diemban adalah sebagai alat sosial kontrol dan setiap terbit oplahnya sebanyak 3.500 eksemplar.

Situasi daerah pasca penghianatan G 30 S/PKI belumlah benar-benar dapat dinyatakan segala penghambatnya telah selesai secara tuntas. Karena para pelaku dan pengikut PKI masih belum tertangani seluruhnya. Sehingga ketika Mimbar Mahasiswa menurunkan berita yang berkaitan dengan operasi pembersihan terhadap PKI dianggap oleh Laksusda Kalimantan Selatan telah membuyarkan strategi Laksus dalam operasi yang akan dilaksanakan. Untuk itu tokoh-tokohnya seperti HJ. Djok Mentaya, Anang Adenansi, Mas Abi Karsa, A Syarie Musaffa dan Zainuddin Rais ditahan oleh Laksusda selama 21 hari. Tetapi penerbitan Mimbar Mahasiswa tetap dapat dilakukan yang ketika itu diserahkan kepada Yustan Azidin untuk menanganinya agar terus bisa terbit.

2. Pancasila Sebagai Asas Tunggal

Perjuangan Orde Baru yang diangkat ke permukaan menyertai tuntutan yang diajukan adalah dapat dilaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Ini berarti landasan yang menjadi perjuangan Orde Baru, yaitu landasan ideologi, landasan ketatanegaraan dan sikap mental. Sebagai landasan ideologi adalah Pancasila itu sendiri dan landasan ketatanegaraan adalah UUD 1945, sedangkan sikap mental yang menjadi landasan perjuangan Orde Baru ialah kemurnian pengabdian kepada kepentingan rakyat banyak.

Jatuhnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru antara lain disebabkan terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi negara. Oleh karena itu untuk memantapkan kehidupan politik yang stabil dan dinamis, pemerintah Orde Baru berhasil melaksanakan landasan yang kuat dan kokoh yakni semua Partai Politik dan Golongan Karya harus mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas sebagaimana dimuat dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1985.

Pemilu yang diadakan 5 tahun sekali dapat menjadi sarana untuk menjamin kehidupan dan kelestarian Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup Pancasila ini, karena semua kekuatan sosial politik yang ada di Indonesia, terutama kontestan pemilu tidak lagi mempermasalahkan Pancasila baik sebagai ideologi, sebagai pandangan hidup maupun sebagai dasar negara sejalan dengan asas tunggal yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh MPR melalui ketetapan No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Pemerintah Orde Baru sejak tahun 1978 gencar melaksanakan penataran-penataran kepada aparatur pemerintah sebagai pilar utamanya. Apalagi dalam ketetapan MPR tersebut telah digariskan adanya pendidikan Pancasila dalam rangka pendidikan politik nasional, antara lain melalui Pendidikan Moral Pancasila serta unsur-unsurnya yang penting untuk diketahui dan diajarkan kepada generasi muda. Sejak saat itu pula, Pendidikan Moral Pancasila telah tercantum dalam kurikulum sekolah, mulai dari tingkat pra sekolah, tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan menengah, hingga tingkat perguruan tinggi negeri dan swasta.

Pemasyarakatan P4 merupakan ciri khas dari pemerintahan Orde Baru, sehingga penataran-penataran mengenai falsafah Pancasila secara berjenjang terus dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Begitu pula pada setiap pembuatan GBHN senantiasa memberikan arahan yang jelas bahwa Pancasila sebagai ideologi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Atas dasar itu pula penyelenggaraan program pembangunan senantiasa diuji dan dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila.

3. Dwi Fungsi ABRI

Dalam hal penyelenggaraan pertahanan keamanan nasional, karena menyangkut kepentingan berbagai pihak dan rakyat banyak, harus benar-benar direncanakan dan perlu diwujudkan. karena pengalaman sejarah yang pernah terjadi mengharuskan ABRI untuk mengambil peranan dalam pembangunan yang dilaksanakan.

Pelaksanaan konsep Dwi Fungsi ABRI tersebut telah memberi warna tersendiri pada masa pemerintahan Orde Baru, karena pemimpin daerah seperti Gubernur/Walikota/Bupati di Indonesia banyak yang berasal dari ABRI. Tidak hanya itu pada departemen dan instansi-instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah-daerah juga ada yang berasal dari anggota ABRI yang dikaryakan.

Program kegiatan seperti operasi Bhakti ABRI merupakan peluang untuk menyumbangkan sesuatu yang berguna dalam menunjang kepentingan nasional. Bermula dari operasi Bhakti ini lahir program ABRI Masuk Desa ini diupayakan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi masalah keamanan, kehidupan sosial sehari-hari dan upaya mencari jalan keluarnya.

4. Keadaan Pemerintahan di Kalimantan Selatan

Dalam usaha menciptakan iklim politik yang sehat dan stabil, terutama agar roda pemerintahan tetap dapat terlaksana dengan baik setelah tumbanganya Orde Lama, Gubernur bersama para Bupati/Kepala daerah se Kalimantan Selatan menetapkan Program Kerja Tahun 1966 yang dirumuskan pada rapat kerja yang diselenggarakan tanggal 31 Januari sampai 2 Februari 1966. Program Kerja yang ditetapkan tersebut, khususnya bidang pemerintahan telah diputuskan untuk melakukan :

- a. Mengusahakan intensifikasi usaha pemerintahan di daerah-daerah.
- b. Mengacu dan mempedomani surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan No. I-1-111-61 tanggal 25-1-1966 dan No. I-1-11-67 tanggal 27-1-1966 sebagai rencana tindak lebih lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang No. 18/1965 terutama mengenai penyusunan dan komposisi DPR-GR, Wakil Kepala Daerah, BPH (Badan Pemerintahan Harian) dan Sekretariat Daerah.
- c. Mengusahakan agar segera diadakan Kantor Dinas/Jawatan vertikal maupun horizontal yang belum ada terutama bagi Daerah Kabupaten yang baru dibentuk.
- d. Menyempurnakan alat-alat perlengkapan yang berhubungan dengan Aparat Pelaksana Polisi, Beleid Pemerintahan Daerah baik bidang personil maupun peralatannya.
- e. Memelihara dan mempertinggi kewibawaan pemerintah daerah.¹

Untuk menindaklanjuti kegiatan yang telah diprogramkan, pada tanggal 8 s.d 10 Juni 1967 diselenggarakan konferensi antar DPRD-GR se-Kalimantan Selatan dengan tujuan agar lebih memantapkan Lembaga Legislatif di daerah ini.

Kemudian pada tanggal 1 September 1967 Lembaga Panca Tunggal sebagai Penguasa Tunggal Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah (berdasarkan Kepres No. 108/67 tanggal 26 Juli 1967). Sehingga untuk dapat lebih mencapai efisiensi oleh Gubernur Kepala Daerah diadakan perubahan struktur organisasi Kantor Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan disertai penataan kembali Kepala Biro/Bagian-Bagian.

Pada tanggal 25 Oktober 1967 Panglima Angkatan dan Muspida se-Kalimantan mengadakan Raker di Banjarmasin diprakarsai oleh koordinator Muspida Kalimantan dengan tujuan untuk mencapai koordinasi dan integrasi dalam menyelesaikan tahap-tahap dari Dwidarma dan Catur Karya Kabinet Ampera.

¹ *Kalimantan Selatan 1963-1968*, Tim Penyusunan Buku Pemda Tk. I Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1968, hal. 6-7.

Untuk mengetahui keadaan pemerintahan di Kalimantan Selatan yang melingkupi semua daerah tingkat II, maka dikemukakan keadaan sebelumnya berdasarkan undang-undang yang melatarbelakanginya.

a. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotamadya

Sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1957 daerah Indonesia di bagi atas Daerah Swatantra tingkat I dan tingkat II tetapi setelah berlakunya Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan yang baru maka Daswati II menjadi Kabupaten/Kotamadya dan perubahan nama ini dalam Daerah Kalimantan Selatan dilakukan serentak pada tanggal 17 Desember 1961.

Sampai pada bulan Desember 1965 jumlah kabupaten/kotamadya dalam propinsi Kalimantan Selatan adalah :

- a. Kotamadya Banjarmasin
- b. Kabupaten Barito Kuala dengan Ibu Kotanya Marabahan
- c. Kabupaten Banjar dengan Ibu Kotanya Martapura
- d. Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Ibu Kotanya Kandangan
- e. Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Ibu Kotanya Barabai
- f. Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Ibu Kotanya Amuntai
- g. Kabupaten Kotabaru Utara dengan Ibu Kotanya Kotabaru ²

Memenuhi tuntutan masyarakat daerah Tabalong, Tapin dan Tanah Laut oleh Gubernur Kepala Daerah melalui surat tanggal 17 Juli 1964 No. 83/I-I-101-305 dibentuk kantor-kantor persiapan dengan tugas menyiapkan sesuatunya sampai terbentuknya kabupaten dengan petunjuk Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan. Di samping itu masyarakat Kewedanaan Berangas dan Kecamatan Banjarbaru dalam tahun 1964 menuntut agar daerahnya menjadi Daswati II dan Kotapraja tingkat II Banjarbaru.

Setelah melalui tahapan tersebut pada tanggal 18 September 1965 oleh Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan dilantik Pd. Bupati/Penguasa Kepala Daerah dari Tabalong, Tapin dan Tanah Laut kemudian pada tanggal 28 Nopember 1965 s.d. tanggal 2 Desember 1965 ketiga daerah ini diresmikan pembentukannya oleh Menteri Dalam Negeri menjadi daerah tingkat II.

Berdasarkan penetapan dari Menteri Dalam Negeri itu, maka daerah tingkat II menjadi 10 buah, dengan tambahan kabupaten baru :

- a. Kabupaten Tabalong dengan Ibu Kotanya Tanjung
- b. Kabupaten Tapin dengan Ibu Kotanya Rantau
- c. Kabupaten Tanah Laut dengan Ibu Kotanya Pelaihari.

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 5 Juni 1968 No. 38/I-I-202-359 telah ditunjuk Abdul Murad S, ahli Tata Praja pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru sebagai Kepala Kantor Persiapan Kabupaten Tanah Bumbu Selatan di Pagatan pada tanggal 6 Juni 1968 dengan bertempat di Pagatan.³

Pada perkembangan lain atas desakan dan tuntutan dari masyarakat yang dituangkan dalam bentuk resolusi/pernyataan-pernyataan, sementara menunggu pengesahan dari Pemerintah Pusat c.q. Menteri Dalam Negeri, maka dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 22 Juni 1968 No. 43/I-I-205-399 telah dibentuk Kantor Persiapan Kabupaten Bantam Raya dengan ibukotanya Berangas, yang pelantikan pejabat Bupatiya dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1968.

b. Pengangkatan Kepala Daerah

² *Ibid*, hal. 23-24.

³ *Ibid*, hal. 24.

- 1) Kotabaru
Pada tanggal 7 Desember 1963 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Kotabaru Mayor Basrindu menggantikan Kepala Daerah yang lama H. A. Hudari.
- 2) Kotamadya Banjarmasin
Walikota Kepala Daerah Kotamadya Banjarmasin H. Horman mengundurkan diri dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan tanggal 28 April 1965 No. 12-19-247 dan dengan surat Keputusan Gubernur tanggal 2 Oktober 1965 No. Sekr-BB-3-26-474 ditunjuk Kapten Quderah H. Adnan (anggota BPH) sebagai Pd. Walikota. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13-19-195 No. UP/15/18-1358 M. Hanafiah diangkat sebagai Walikota Kotapraja Banjarmasin.
- 3) Hulu Sungai Selatan
Pada tanggal 12 Agustus 1964 oleh Gubernur Kepala daerah Propinsi Kalimantan Selatan telah dilantik Bupati Kepala daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mayor Dhislan S.N menggantikan Bupati Kepala Daerah yang lama H. Kasyful Anwar.
- 4) Hulu Sungai Utara
Pada tanggal 13 Agustus 1964 Masconi Abdurrachman dilantik sebagai Bupati Kepala Daerah menggantikan Kapten Bihman Villa.
- 5) Tabalong
Pada tanggal 23 Juli 1966 telah dilakukan pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Tabalong dengan mengajukan 3 orang calon. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12-12-1966 No. UP 14/8/1442/1630 penetapan pengangkatan Usman Dundrung sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tabalong yang pelantikannya dilakukan pada tanggal 12-12-1966.
- 6) Banjar
Adanya pengunduran diri dari H. Basri, B.A sebagai Bupati Kepala Daerah memberi peluang kepada Letkol. H. Ali Hamdi Budhigawis. Kemudian dalam pemilihan calon Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banjar secara aklamasi telah terpilih sebagai calon tunggal Letkol. H. Ali Hamdi Budhigawis untuk menduduki jabatan Bupati secara definitif. Hasil pemilihan itu dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Januari 1967 No. UP/8/1/4/32 yang menetapkan H. Ali Hamdi Budhigawis sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banjar yang pelantikannya dilakukan pada tanggal 14 Pebruari 1967.
- 7) Tanah Laut
Dengan terpilihnya Mayor Abdullah Syahrir oleh DPRD Kabupaten Tanah Laut sebagai calon Bupati Kepala Daerah, maka Menteri Dalam Negeri melalui Surat Keputusan tanggal 12 Desember 1966 No. UP/14/11/14/2039 menetapkan sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut dan dilantik pada tanggal 13 Pebruari 1967. Kedudukan Abdullah Syahrir sebagai Bupati Tanah Laut ini menggantikan Pd. Bupati Kepala Daerah yang lama Gusti Taberi.
- 8) Tapin

DPRD Kabupaten Tapin secara aklamasi menyetujui dan mencalonkan Mayor H.M. Noor yang kemudian dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Januari 1967 No. 8/1/682 tentang pengangkatan Mayor H.M. Noor sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapin dan dilantik pada tanggal 16 Pebruari 1967.

9) Hulu Sungai Tengah

Dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah Hulu Sungai Tengah maka Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan (a.n. Menteri Dalam Negeri) mengeluarkan surat keputusan tanggal 28 Mei 1968 No. 36/I-1-202-342 membebaskan Kapten Inf. H. Abdulgani dari kedudukannya sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhitung tanggal 1 Juni 1968.

Sebagai pejabat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 28 Mei 1968 No. 36/I-1-202-342 ditunjuk A. Ramlan, Pegawai Tinggi Ketataprajaan Tk. I pada Kantor Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan untuk menjalankan tugas Bupati Kepala Daerah Hulu Sungai Tengah sampai diangkatnya seorang Bupati Kepala Daerah yang hasilnya adalah sebagai berikut :

- a) Abdurrahman Karim mendapat 7 suara
- b) Dachlan Arifin (Mayor Inf) mendapat 10 suara
- c) Noor Ifansjah mendapat 6 suara
- d) Busri hanya didukung 2 suara tidak sah.

Berdasarkan hasil pemilihan tersebut Mayor Inf. Dahlan Arifin ditetapkan sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

10) Barito Kuala

Dengan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 18 Juli 1968 No. 41/I-1-202-388 (a.n. Menteri Dalam Negeri) membebaskan Asdhy Suryadi (Kapten Inf.) sejak tanggal 27 Juni 1968 dari kedudukannya sebagai Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala karena telah berakhirnya masa jabatan. Dalam Surat Keputusan yang sama agar tidak sampai terjadi kekosongan dalam pemerintahan di daerah tersebut, terhitung tanggal peletakan jabatan tersebut ditunjuk kembali Asdhy Suryadi (Kapten Inf.) untuk menjalankan tugas Bupati Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala sampai diangkatnya seorang Kepala Daerah baru berdasarkan hasil pemilihan dalam batas waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah peletakan jabatan tersebut.⁴

Pada tingkat propinsi, setelah masa jabatan Gubernur H. Aberani Sulaiman berakhir, maka tanggal 22 Oktober 1970 DPRD tingkat I Kalimantan Selatan mengadakan sidang pleno untuk memilih Gubernur dan saat ini yang berhasil meraih suara terbanyak adalah Kolonel Subardjo Surosardjo. Hasil keputusan DPRD tersebut dikukuhkan dengan Surat Keputusan Presiden No. 139/M/1970 tanggal 24 Oktober 1970 yang menetapkan Subardjo Surosardjo sebagai Gubernur Kdh. Tk. I Kalimantan Selatan dan pelantikannya dilakukan pada tanggal 16 Oktober 1970.

Permulaan masa jabatan Gubernur Subardjo merupakan pelaksanaan pada masa pemerintahan di daerah Kalimantan Selatan dalam keadaan masa peralihan, karena Undang-

⁴ *Ibid*, hal. 25-27.

undang No. 18 tahun 1965 dan Undang-undang No. 6 tahun 1969 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pelaksanaan pemerintahan daerah didasarkan atas pedoman dan petunjuk yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pada tahun 1974 pemerintah bersama dengan DPR berhasil menetapkan Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pelaksanaan Undang-undang No. 5 tahun 1974 di Kalimantan dinyatakan berlaku sejak 11 Nopember 1974 dan undang-undang inilah yang dijadikan dasar untuk pemilihan Bupati/Walikota dan yang berkaitan dengan pelaksanaannya yaitu :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 1974 tentang tata Cara Pencalonan Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Daerah yang ketika itu telah diterapkan pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Kotamadya Banjarmasin dan Pemilihan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan yang terpilihnya kembali Gubernur Subardjo Surosarodjo pada tanggal 5 September 1995 untuk kedua kalinya.
- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1974 tanggal 1 Oktober 1974 mengenai pemisahan Jabatan Sekretaris DPRD, sebutan tentang Sekretaris Daerah menjadi Sekretaris Wilayah/Daerah, sebutan Kantor Pemerintah Daerah, Kecamatan dan istilah lainnya dilaksanakan sejak akhir tahun. Pengangkatan Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan dan Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan menyesuaikan dengan Peraturan Mendagri No 11 Tahun 1974. Sedangkan penetapan Sekretaris DPRD Tingkat I dan II disesuaikan dengan peraturan Mendagri Nomor 12 Tahun 1974.
- c. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 untuk daerah Kalimantan Selatan ditandai dengan telah berhasilnya dibentuk Kota Administratif Banjarbaru sebagai Kota yang mendapat penghargaan untuk ditingkatkan statusnya secara formal dari kecamatan menjadi Kota Administratif, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1975. Dengan ketetapan ini maka Banjarbaru yang sebelumnya dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 57/I-1205/622 tanggal 12 Agustus 1968 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- d. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 diberikan pula kemungkinan jika dianggap perlu adanya *Daerah Antara* dengan adanya Jabatan Pembantu Gubernur dan Pembantu Bupati sesuai pasal 73 Undang-undang Nomor Tahun 1974 yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Dengan ketentuan seperti yang tertuang dalam undang-undang tersebut, maka penetapan daerah antara dan jabatan Pembantu Gubernur dan Pembantu Bupati sangat tergantung kepada kebijakan dan pandangan Gubernur atau Bupati.
- e. Prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974 adalah :
 - a) Prinsip otonomi yang diatur oleh Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab jadi tidak lagi otonomi riil yang seluas-luasnya.
 - b) Tujuan pemberian Otonomi Daerah adalah sesuai dengan GBHN, yaitu harus serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, terjalinnya hubungan yang baik dan harmonis antara Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan keutuhan Negara Kesatuan. Disamping itu harus dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah.
 - c) Pelaksanaan asas Dekonsentrasi adalah bersama-sama dengan asas Desentralisasi, jadi tidak lagi Dekonsentrasi sebagai komplemen dari asas Desentralisasi. Dengan

demikian prinsip ini lebih menjamin bahwa daerah adalah daerahnya pusat dan Pusat adalah Pusatnya Daerah.

- d) Penegasan status Kepala Wilayah/Daerah sebagai penguasa tunggal di Daerah dalam arti Adminisrator Pemerintahan, Administrator Pembangunan dan Administrator Kemasyarakatan.

c. Perkembangan Pemerintahan

Perkembangan dari segi kelembagaan mengalami peningkatan bila dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dengan pemekaran jumlah desa/kelurahan. Perwakilan Kecamatan maupun Kecamatan sesuai kebutuhan, sehingga jumlahnya bertambah banyak. Pada tingkat yang lebih tinggi juga mengalami hal yang serupa antara lain lembaga Wakil Gubernur, Pembantu Gubernur dan Pembantu Bupati.

Jadi hal tersebut dapat dilihat secara nyata yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 821.25-445, tanggal 15 Juni 1981, telah ditetapkan adanya Pembantu Gubernur wilayah Hulu Sungai yang berkedudukan di Amuntai. Kemudian dengan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 821.25-612, tanggal 16 Agustus 1984, maka sebutan wilayah untuk kedudukannya diganti menjadi Pembantu Gubernur Wilayah I yang berkedudukan di Kandangan, serta ditambah dengan Pembantu Gubernur Wilayah II yang berkedudukan di Banjarbaru.

Sesuai dengan Surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 821.26-501, tanggal 22 September 1980, telah ditetapkan tiga Wilayah Pembantu Bupati, yaitu :

1. Pembantu Bupati Wilayah Tanah Bumbu bagian dari Kabupaten Kotabaru berkedudukan di Pagatan,
2. Pembantu Bupati Wilayah Kotabaru bagian dari Kabupaten Kotabaru berkedudukan di Kotabaru,
3. Pembantu Bupati Wilayah Sampanahan bagian dari Kabupaten Kotabaru berkedudukan di Tanjung Ratu.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 821.26-803, tanggal 11 Oktober 1981, telah ditetapkan pula dua Wilayah Pembantu Bupati, masing-masing yaitu :

1. Pembantu Bupati Wilayah Berangas bagian Kabupaten Barito Kuala berkedudukan di Alalak.
2. Pembantu Bupati Wilayah Balangan bagian Kabupaten Hulu Sungai Utara berkedudukan di Paringin.

Penanganan/pengelolaan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tetang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan pada pelaksanaan asas desentralisasi. Sesuai dengan asas desentralisasi, oleh Pemerintah Pusat diberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan berbagai urusan Pemerintah sebagai urusan rumah tangga sendiri. Penyerahan urusan-urusan pemerintahan tersebut dilakukan secara bertahap, sesuai kondisi dan kemampuan daerah masing-masing.

Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah pada tahun 1989 oleh Pemerintah Pusat telah diserahkan sebanyak 19 urusan pemerintahan kepada Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan. Namun yang sudah dikelola secara nyata sebanyak 14 urusan pemerintahan, dengan rincian 13 macam ditangani oleh 12 Dinas Daerah Propinsi Tingkat I Kalimantan Selatan.

Adapun 13 macam urusan yang ditangani oleh Dinas Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pertanian Rakyat oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan

- b. Perikanan Darat oleh Dinas Perikanan
- c. Perikanan Laut oleh Dinas Perikanan
- d. Pendidikan dan Kebudayaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- e. Kesehatan oleh Dinas Kesehatan
- f. Pekerjaan Umum oleh Dinas Pekerjaan Umum
- g. Perindustrian oleh Dinas Perindustrian
- h. Kehewanan oleh Dinas Peternakan
- i. Kehutanan oleh Dinas Kehutanan
- j. Karet Rakyat oleh Dinas Perkebunan
- k. Bimbingan Perbaikan Sosial oleh Dinas Sosial
- l. Pendapatan Daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah

Sedangkan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan melalui Sidang Paripurna DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, tanggal 29 Nopember 1988.

Penyerahan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1986, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Energi No. 1544K/201/M PE/1988, tanggal 26 Nopember 1988 tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, urusan tersebut ditangani oleh Biro Bina Produksi Daerah Sekretariat Wilayah/daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

Urusan pemerintahan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR), Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan telah menyetujui menerima penyerahan Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR), melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan. Tanggal 13 Desember 1988 No. 11 tahun 1988. Dalam proses selanjutnya dilaksanakan penyerahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.⁵

d. Koordinasi dan Hubungan Kerja dengan Instansi Vertikal

Dalam melaksanakan roda pemerintahan di daerah pada masa Orde Baru dilakukan kegiatan koordinasi. Kegiatan koordinasi ini dimaksudkan untuk menyelaraskan hubungan kerja dengan instansi vertikal sesuai dengan keputusan Presiden No. 44 dan 45 tahun 1974 yang mendasari dibentuknya Kantor-kantor Wilayah sebagai aparat yang menyelenggarakan tugas-tugas Departemen di Wilayah/Daerah.

Berdasarkan pasal 81 Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tugas Kepala Wilayah antara lain adalah menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan instansi vertikal dengan Dinas-dinas Daerah, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Atas landasan Undang-undang inilah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai alat Pemerintah Pusat dan sebagai wakil pemerintah memegang fungsi koordinasi terhadap instansi-instansi vertikal tersebut.

Koordinasi dan hubungan kerja ini dapat terbiasa dengan baik karena dilandasi oleh citra kebersamaan dalam pelaksanaan tugas. Kepala-kepala instansi vertikal senantiasa melaporkan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan. Sebaliknya pihak Gubernur selalu mengadakan rapat koordinasi dengan

⁵ *Monografi Kalimantan Selatan*, Bappeda Propinsi Dati I Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1989, hal. 8-10.

para Kepala Kantor Wilayah agar setiap perencanaan yang akan dilaksanakan selalu terkoordinasikan kegiatannya.

Terbinanya koordinasi yang baik tersebut, tidak hanya dilakukan dengan para Kepala Kantor Wilayah agar setiap perencanaan yang akan dilaksanakan selalu terkoordinasikan kegiatannya.

Terbinanya koordinasi tersebut, tidak hanya dilakukan dengan pihak-pihak instansi vertikal yang berada di bawah Departemen Pemerintah Pusat, tetapi juga dengan Lembaga Pimpinan di Daerah. Pada masa pemerintahan Orde Baru dikenal adanya Lembaga MUSPIDA (Musyawarah Pimpinan Daerah) yang kegiatannya juga melakukan koordinasi untuk menyiasati dan mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat mengganggu pemerintahan.

Muspida dibentuk sebagai forum musyawarah antar pejabat-pejabat pimpinan di daerah berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1967 dalam usaha mengamankan dan melaksanakan kebijaksanaan nasional menurut tugas masing-masing. Dengan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplefikasi (KISS) yang mantap diharapkan dapat terbina kelangsungan stabilitas politik, ekonomi, sosial, keamanan, ketertiban dan ketentraman daerah serta masyarakat.

Sepanjang sejarah Orde Baru khususnya Muspida di Kalimantan Selatan, baik tingkat I maupun tingkat II telah berjalan efektif dan dapat mengatasi problema-problema Daerah dengan sebaik-baiknya.

Sebagaimana diketahui Muspida Propinsi Kalimantan Selatan terdiri atas Panglima Daerah Militer X/Lambung Mangkurat (struktur lama) sebagai Ketua, Gubernur Kdh Tk I Prop. Kalsel, Kepala Daerah Kepolisian (Kapolda Kalsel), Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel sebagai Penasihat Hukum.

Secara sama jabatan kemuspidaan di daerah tingkat II dijabat oleh aparat (bawahan) dari pejabat-pejabat tersebut di atas sehingga unsur Muspida Kabupaten /Kotamadya adalah : Komandan Distrik Militer (KODIM) sebagai Ketua, Bupati/Walikota, Komandan Resort Kepolisian, Kepala Kejaksaan Negeri, masing-masing sebagai anggota dan Ketua Pengadilan Negeri sebagai Penasihat Hukum. Untuk jabatan Sekretaris Muspida baik di tingkat I maupun di tingkat II menurut jabatannya (*ex officio*) dipegang oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.

5. Pemilihan Umum

Ukuran yang dapat dipakai pada zaman demokrasi modern dilakukan dengan menyelenggarakan pemilihan secara Luber (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) untuk satu orang satu suara.

Kedaulatan seperti yang tercantum dalam UUD 1945 berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Segala kebijaksanaan yang akan dilakukan oleh pemerintah sebagaimana yang tertuang pada Garis-garis Besar Haluan Negara merupakan produk Majelis Permusyawaratan Rakyat yang didalamnya duduk wakil-wakil rakyat termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Lembaga Legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum yang pada zaman Orde Lama hanya dilakukan satu kali, yaitu pada tahun 1955.

Pelaksanaan Pemilihan Umum erat kaitannya dengan penentuan partai-partai apa saja yang berhak ikut, karena wakil-wakil dari partai itulah nantinya yang akan duduk di MPR, DPR dan DPRD. Mereka yang duduk di lembaga legislatif inilah yang melahirkan ketetapan-ketetapan dan ketentuan-ketentuan yang mesti dipedomi dan ditaati oleh pemerintah.

Sebelum pemilihan umum dapat terlaksana pemerintah bersama DPR membentuk Undang-undang No. 15 dan Undang-undang No. 16 tahun 1969, yang mengatur tentang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Pembentukan Undang-

undang ini dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang terbentuk berdasarkan pemilihan umum.

Pada masa Orde Baru ini telah berhasil dilaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali, yakni tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Setiap pemilihan umum telah dilandasi dengan Undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan MPR dan DPR, sehingga terdapat beberapa kali penyempurnaan dan perubahan dari Undang-undang pemilu sebelumnya.

Dengan selalu dilaksanakannya pemilihan umum, Orde Baru berhasil melaksanakan keseimbangan pembangunan yang aspirasinya diambil dari kebutuhan masyarakat yang berkembang. Dalam membentuk dan menumbuhkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara sejalan dengan mekanisme Demokrasi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang mendasarkan diri kepada sila-sila yang terkandung dalam Pancasila secara murni dan konsekuen.

Dalam rangka membentuk pemeritahan yang mencerminkan dan mampu melaksanakan aspirasi rakyat, maka pemilihan umum adalah jawaban dari sarana demokrasi yang diharapkan dapat dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Landasan hukum yang digunakan untuk melaksanakan pemilihan umum adalah Undang-Undang Dasar 1945, terutama yang berkaitan dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pada masa Orde Lama landasan hukum yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953, yaitu untuk memilih anggota DPR dari anggota Konstituante. Konstituante adalah sebuah Badan yang oleh pasal 134 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. tetapi dalam pelaksanaannya Badan Konstituante ini tidak berhasil membentuk Undang-Undang Dasar, bahkan sempat membahayakan stabilitas pemerintahan.

Setelah jatuhnya Orde Lama, maka dilakukan perubahan dan koreksi dalam susunan dan keanggotaan Lembaga Legiskatif. Koreksi konstitusional yang dilakukan oleh MPRS telah berusaha mendudukan lembaga-lembaga negara sesuai dengan UUD 1945 seperti tertuang dalam ketetapan MPRS No. X/MPRS/1996. Sebagai tindak lanjutnya adalah pemerintah bersama DPR membentuk Undang-undang No.15 dan Undang-undang No. 16 tahun 1969, yang mengatur tentang Susunan dan Kedudukan anggota MPR, DPR, DPRD Tk.I dan DPRD Tk.II.

Tentu saja dengan adanya Undang-undang tersebut diusahakan melaksanakan kedaulatan rakyat yang baik dan dapat menjalankan fungsinya. Dalam usaha melaksanakan tugas dan fungsinya itu harus ada Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang dibentuk melalui Pemilihan Umum yang penyusunan anggotanya ditetapkan dengan cara pemilihan dan pengangkatan sesuai dengan keadaan dan situasi ketika itu. Berdasarkan Undang-undang No. 16 ini, jumlah anggota MPR adalah 2 kali jumlah anggota DPR.

Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan Ketetapan MPR No. XL/MPR/1968 diberi tugas untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan menetapkan Pembangunan Lima Tahun sehingga pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Orde Baru merupakan pelaksanaan tugas Presiden selaku Mandataris MPR.

Pemilu pertama dalam masa pemerintahan Orde Baru dilaksanakan tahun 1971. Organisasi politik yang menjadi peserta Pemilu yang telah ditetapkan dengan ketentuan yang berlaku pada masa itu adalah 9 Partai Politik dan satu Golongan Karya, yaitu : Partai Katolik, Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Golongan Karya, Partai Kristen Indonesia, Partai Murba, Partai Nasional Indonesia, Partai Islam Perti, dan Partai IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia).

Hasil Pemilu tahun 1971 untuk daerah Kalimantan Selatan yang diikuti 9 Partai Politik dan Golongan Karya yang terbanyak memperoleh suara adalah Golongan Karya (21 kursi), Partai Nahdlatul Ulama (9 kursi), dan Partai Muslimin Indonesia (2 kursi), sedangkan partai-partai

lainnya tidak dapat menempatkan wakilnya di DPRD Tingkat I. Untuk daerah-daerah tingkat II sesuai dengan penetapan PPD II dari masing-masing daerah tercatat sebagai berikut :

a. Kotamadya Banjarmasin

- 1) Golongan Karya 9 kursi
- 2) Nahdlatul Ulama 10 kursi
- 3) Parmusi 3 kursi
- 4) Parpol lainnya kosong

b. Kabupaten Banjar

- 1) Golongan Karya 10 kursi
- 2) Nahdlatul Ulama 10 kursi
- 3) PSII 1 kursi
- 4) Parpol lainnya kosong

c. Kabupaten Tapin

- 1) Golongan Karya 13 kursi
- 2) Nahdlatul Ulama 2 kursi
- 3) Parmusi 1 kursi
- 4) Parpol lainnya kosong

d. Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- 1) Golongan Karya 12 kursi
- 2) Nahdlatul Ulama 2 kursi
- 3) Parmusi 2 kursi
- 4) Parpol lainnya kosong

e. Kabupaten Hulu Sungai Tengah

- 1) Golongan Karya 13 kursi
- 2) Nahdlatul Ulama 1 kursi
- 3) Parmusi 1 kursi
- 4) PSII 1 kursi
- 4) Parpol lainnya kosong

f. Kabupaten Hulu Sungai Utara

- 1) Golongan Karya 14 kursi
- 2) Nahdlatul Ulama 4 kursi
- 3) Parpol lainnya kosong

g. Kabupaten Tabalong

- 1) Golongan Karya 12 kursi
- 2) Nahdlatul Ulama 4 kursi
- 3) Parmusi 2 kursi
- 4) Parpol lainnya kosong

h. Kabupaten Tanah Laut

- 1) Golongan Karya 10 kursi
- 2) Nahdlatul Ulama 5 kursi
- 3) Parmusi 1 kursi

4) Parpol lainnya kosong

i. Kabupaten Barito Kuala

1) Golongan Karya 11 kursi

2) Nahdlatul Ulama 4 kursi

3) Parmusi 1 kursi

4) Parpol lainnya kosong

j. Kabupaten Kotabaru

1) Golongan Karya 13 kursi

2) Nahdlatul Ulama 3 kursi

3) Parpol lainnya kosong

Pada Pemilu tahun 1971 Golkar di Kalimantan Selatan meraih suara mayoritas dan untuk wakil di DPR/MPR Partai Golkar memperoleh 7 kursi, Partai NU 2 kursi dan Parmusi 1 kursi dari 10 kursi DPR/MPR yang dijatahkan untuk daerah Kalimantan Selatan. Untuk Pemilu tahun 1977 Golongan Karya Kalimantan Selatan mengalami penurunan suara, sehingga kedudukan anggota DPR/MPR hanya 5 kursi, sedangkan 5 kursi lainnya diwakili oleh PPP, dan PDI tidak terwakili. Sepanjang sejarah Orde Baru Pemilu tahun 1977 bagi Golkar merupakan yang terendah perolehan kursi di DPR. Pemilu 1982 Golkar mendapatkan 6 kursi dan PPP 4 kursi, PDI tidak terwakili, selanjutnya Pemilu 1987 Golkar kembali menang mutlak dengan mendapatkan 7 kursi, PPP 2 kursi dan PDI berhasil memperoleh 1 kursi. Pemilu 1992 Golkar masih bisa mempertahankan hasil perolehan kursi yaitu sama dengan hasil Pemilu 1987 sebanyak 7 kursi, PPP 2 kursi, dan PDI 1 kursi.

Pemilu tahun 1997 adalah Pemilu terakhir pada pemerintahan Orde Baru dan pada kenyataannya Golkar masih bisa memperoleh suara terbanyak. Namun hasil Pemilu 1997 yang menempatkan para wakil-wakil partai Politik PPP, PDI dan Golkar tidak sampai 5 tahun masa tugasnya karena jatuhnya Pemerintahan Orde Baru yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Sesuai dengan gerakan reformasi yang terjadi. Pemilu diadakan kembali pada tahun 1999 yang diikuti oleh banyak partai yang terdaftar di Kalimantan Selatan.

Partai Politik yang memperoleh kursi di DPR Propinsi dan DPRD Kabupaten/ kota hasil Pemilu 1999 tidak ada yang mendominasi atau kurang dari 50%. Namun untuk tingkat Kalimantan Selatan ada 5 partai besar yaitu Golkar, PDIP, PPP, PKB dan PAN.

6. Pembinaan Sosial Politik

Pada awal menuju pelaksanaan Orde Baru ini pernah dilakukan berbagai diskusi, seminar dan pembahasan mengenai cara-cara memperbaiki kehidupan kenegaraan. Diantara berbagai diskusi dan seminar tersebut yang cukup tajam dan mengenai permasalahan yang diangkat oleh Universitas Indonesia bekerjasama dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) dalam simposium yang bertajuk "Simposium Kebangkitan Semangat 66 Menjelajah Trace Baru". Permasalahan yang dibahas dalam simposium meliputi bidang politik dalam negeri, bidang politik luar negeri, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya.

Berkaitan dengan bidang politik luar negeri yang menyangkut tema Indonesia Negara Hukum disimpulkan bahwa pada masa pemerintahan Orde Lama banyak terjadi dilakukan penyimpangan terhadap asas-asas serta norma-norma yang berlaku dalam negara hukum. Peraturan hukum dan pelaksanaannya tidak mencerminkan jiwa Pancasila serta tidak sesuai

dengan UUD 1945. Misalnya menurut UUD 1945, Mahkamah Agung melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya terlepas dari kekuasaan dan pengaruh pemerintah, tetapi dalam masa Orde Lama, Ketua Mahkamah Agung diangkat sebagai Menteri Negara yang berarti bukan lagi Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diintegrasikan dalam lembaga eksekutif, tetapi bahkan Ketua Mahkamah Agung dalam kedudukannya sebagai menteri tunduk kepada Presiden.

Berdasarkan realitas politik yang terjadi, maka persoalan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen tidaklah menjadi perdebatan politik, dengan perkataan lain semua kekuatan politik Orde Baru menerimanya. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen itu adalah sampai sejauh mana kedaulatan rakyat dapat terwujud dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan di Republik Indonesia. Penjabaran atas cita-cita kedaulatan rakyat diukur dengan sejauh mana partisipasi rakyat terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Menyiasati situasi dan kondisi yang masih dalam tahap pemulihan berbagai sektor kehidupan masyarakat, perlu disiapkan langkah antisipatif. Apalagi ketika menjelang Pemilu tahun 1971 yang merupakan perjuangan menegakkan dan meneruskan cita-cita Orde Baru harus ditumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa, kesadaran nasional serta menghilangkan sifat fanatik yang dapat merugikan tujuan yang ingin dicapai.

Dari segi pembinaan politik dan keamanan untuk dapat menunjang pemerintahan Orde Baru dilakukan melalui penertiban di segala bidang kehidupan, memelihara stabilitas keamanan, politik dan stabilitas nasional. Mengusahakan untuk menggalang kehidupan Parpol dalam rangka utuhnya persatuan bangsa dan kesadaran nasional. Memelihara kerja sama dengan kekuatan-kekuatan pendukung Orde Baru dalam menyukseskan Pemilu 1971, meningkatkan kewaspadaan terhadap sisa-sisa G 30 S/PKI. Usaha-usaha lainnya tertuju pada bidang pembangunan, terutama peningkatan produksi, pangan agar lebih berhasil dan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi kepada pembangunan serta menyukseskan Pemilu 1971.

Begitu pula usaha pembinaan ideologi dan kesatuan bangsa dengan menanamkan jiwa Pancasila, menumbuhkan kesadaran berkonstitusi sesuai UUD 1945 melalui kegiatan penerangan, baik secara umum maupun khusus, dengan sarana media massa serta sarana komunikasi lainnya sesuai situasi, kondisi, kemampuan dan kesempatan yang ada dengan sasaran masyarakat luas. Cara lainnya adalah melalui ceramah, santai aji di lingkungan pegawai, keluarga pegawai, mahasiswa, pelajar, organisasi fungsional yang materinya antara lain bagaimana menumbuhkan kesadaran nasional atas dasar Pancasila dan UUD 1945 dan kesatuan bangsa, toleransi sesama umat beragama, menindas aliran-aliran kepercayaan yang menyesatkan pengikut-pengikutnya. Disamping itu dilakukan pula penggalangan kesadaran berbangsa bagi WNI keturunan Cina dalam program pembaruan seperti pergantian nama dan lain sebagainya.

Pada dasarnya kegiatan pembinaan sosial politik yang dilakukan pada awal Orde Baru dan Pemilu 1971 dapat terlaksana dengan baik. Kemudian berdasarkan hasil Pemilu 1971 ternyata tidak semua Partai peserta Pemilu memperoleh suara yang memadai sehingga tidak terwakli di lembaga legislatif. Kenyataan ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Selatan tetapi hampir merata pada semua Daerah di Indonesia. Kenyataan ini telah pula menyulitkan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pembinaan, sehingga langkah Pemerintah Pusat untuk memfusikan partai politik menjadi hanya 2 partai politik dan 1 Golongan Karya cukup meringankan beban pembinaan di daerah.

Usaha memfusikan partai-partai politik yang berlatar belakang Islam menjadi PPP dan partai bercorak nasional melebur dalam PDI pada tahun 1974 dapat dikatakan telah terlaksana. Peleburan dan penggabungan partai ini dikuatkan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1975

tentang kepartaian dan Golongan Karya. Meskipun demikian PDI mengalami perpecahan dan terjadi dualisme kepemimpinan Isnaeni dan Gusti Sugian Noor sebagai pimpinan PDI yang mengakui kepemimpinan Sanusi Hardjadinata.

Dalam pembinaan politik kepada 2 partai politik dan 1 Golongan Karya menekankan pada terlaksananya UU No. 3 Tahun 1975 bahwa azas Pancasila dan UUD 1945 harus menjadi pegangan, bukan lagi pada identitas partai yang lama, baik yang bercirikan Islam maupun yang berazaskan Demokrasi Indonesia.

Dengan adanya fusi dari beberapa partai yang memiliki kesamaan perjuangan, kehidupan politik dirasakan sangat berbobot bahkan suasana panas terasa sekali menjelang Pemilu 1997. Bersatunya Partai-partai yang bercirikan Islam ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sangat menunjang keberadaanya karena daerah Kalimantan Selatan merupakan mayoritas Islam. Sedangkan PDI karena adanya keretakan-keretakan yang tidak terselesaikan dengan baik, maka dalam perkembangan tidak begitu berpengaruh pada peta perpolitikan. Sedangkan Golkar dengan kemenangan mutlak pada tingkat propinsi pada Pemilu 1971 merasa sudah besar dan terlambat merangkul unsur-unsur Ulama dalam usaha memengkan Golkar pada Pemilu 1977. Pada beberapa daerah hasil Pemilu 1977 menunjukkan PPP unggul, sehingga untuk kursi DPR/MPR wakil Golkar dan PPP sama, yaitu masing-masing 5 kursi dan PDI tidak terwakili.

Sejak digulirkannya reformasi dan adanya perubahan dalam UU Partai Politik, maka di Kalimantan Selatan ada 35 partai politik yang terdaftar pada Kisbanglinmas Kalimantan Selatan. Partai-partai tersebut adalah :

1. Partai Golkar
2. PDI Perjuangan (PDIP)
3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
5. Partai Amanat Nasional (PAN)
6. Partai Nahdlatul Umat
7. Partai Bulan Bintang (PBB)
8. Partai Keadilan
9. Partai Kesatuan
10. Partai Keadilan dan Persatuan
11. Partai Demokrasi Indonesia
12. Partai Umat Islam (PUI)
13. Partai Kebangkitan Umat
14. Partai Indonesia Baru
15. Partai SUNI
16. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
17. Partai MKGR
18. Partai Nasional Indonesia (PNI)
19. PNI Massa Marhaen
20. Partai Masyuni Baru
21. Partai Republik
22. Partai Umat Muslimin Indonesia
23. Partai Nasional Demikrat
24. Partai Daulat Rakyat
25. Partai Bhenika Tunggal Ika
26. Partai Kristen Nasional
27. PSII 1905
28. Partai Cinta Damai

29. Partai PILAR
30. Partai Murba
31. Partai PUDI
32. Partai Islam Demokrat
33. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia (PSPSI)
34. Partai Solidaritas Pekerja
35. Partai Rakyat Demokrat (PRD)

Selain partai-partai politik juga kalangan pemuda dan mahasiswa meskipun memiliki KNPI sebagai Induk Organisasi namun tetap tumbuh organisasi kepemudaan yang memilih nama dan misinya sendiri sesuai tujuan pendiriannya. Organisasi Kemahasiswaan demikian pula halnya walaupun ada induk organisasinya seperti Badan Eksekutif Mahasiswa, tetapi tumbuh pula organisasi yang mandiri dari kalangan mereka. Situasi dan kondisi yang demikian ini mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan agak lebih hati-hati.

Pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah melekat pada tugas pemerintahan bidang sosial dan politik yang senantiasa berusaha mengajak partisipasi masyarakat dalam setiap program, pemerintah misalnya Keluarga Berencana (KB) dan melakukan penyuluhan serta pembinaan pada masyarakat mengambang (*Floating Mass*) secara instansional agar menjadi pendukung dan pelaksana pembangunan yang baik.

Pada dasarnya pembinaan sosial politik yang dilakukan pemerintah daerah Kalimantan Selatan selama pelaksanaan pembangunan yang merupakan ciri tersendiri dalam masa pemerintahan Orde Baru mantapnya stabilitas politik, tumbuhnya saling pengertian di antara sesama Parpol/Golkar dan Komponen-komponen lainnya, tumbuhnya pengertian Demokrasi Pancasila yang ditetapkan pada kebiasaan musyawarah mufakat dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat kemasyarakatan, terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, terlaksananya kegiatan penataran P4 dan lancarnya program pembangunan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kalimantan Selatan yang penting untuk dicatat adalah hubungan eksekutif dan legislatif dapat terjalin dengan baik dan harmonis. Salah satu faktor pendukungnya adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, bidang eksekutif adalah wewenang Kepala Daerah dan bidang Legislatif menjadi wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengurus/mengaturnya. Sebagai aparat Pemerintahan Daerah keduanya merupakan partner yang sederajat kedudukannya, dalam arti DPRD tidak bisa menjatuhkan Kepala Daerah dan sebaliknya Kepala Daerah tidak bisa membubarkan DPRD.

Begitu pula hubungan kerja antara daerah tingkat I dan II se Kalimantan Selatan dapat terbina dan berjalan lancar. Dalam hubungan formal diselenggarakan melalui rapat-rapat resmi, pengajuan Rancangan-rancangan Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah kepada DPRD, penyampaian pertanggungjawaban dan hal-hal lainnya sesuai mekanisme kerja kedua belah pihak serta mengacu pada batas fungsi dan wewenang masing-masing.

B. KEHIDUPAN MASYARAKAT

Pada masa Orde Baru kebijaksanaan pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan, kebudayaan, generasi muda dan peranan wanita serta ekonomi banyak mengacu kepada program nasional. Sesuai dengan tujuan nasional pada masing-masing bidang tersebut diusahakan agar dapat serasi, saling melengkapi dan saling menunjang serta erat kaitannya dengan program pembangunan yang dilaksanakan dari PELITA ke PELITA.

Pembinaan keagamaan dilakukan dengan berusaha menciptakan kerukunan hidup beragama baik kerukunan intern antara sesama pemeluk agama, kerukunan antar pemeluk yang

berlainan agama, maupun kerukunan antar penganut agama dengan pemerintah. Dari pembinaan yang dilakukan kerukunan hidup beragama di Kalimantan Selatan pada umumnya cukup mantap, berkat adanya saling pengertian dan sikap hormat menghormati antar sesama pemeluk agama.

1. Sarana Kehidupan Beragama

Kegiatan pembinaan berupa pembangunan tempat beribadah, rehabilitasi gedung pendidikan agama, pembangunan Balai Nikah pada semua daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan dan pembangunan Balai Sidang Peradilan Agama dan kerapatan Qadhi di beberapa daerah. Disamping itu pembinaan rumah ibadah yang pada umumnya dibangun atas swadaya masyarakat oleh pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan diarahkan untuk menunjang meningkatkan pembinaan. Sarana ibadah dengan memberikan bantuan sesuai keperluan dan penyediaan dana yang tersedia.

Pada masa Gubernur Subardjo, berhasil dilakukan pemancangan tiang pertama pembangunan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin tepatnya tanggal 10 Nopember 1974. pembangunan Masjid Raya Sabilal Muhtadin merupakan proyek yang memerlukan biaya besar, sehingga selain kucuran dana dari pemerintah yang melibatkan bantuan masyarakat. Masjid Raya ini mulai digunakan atau dimanfaatkan ummat Islam sejak Hari Raya Idul Adha 1399 H atau tahun 1979, walaupun sebenarnya kondisi Masjid masih dalam penyelesaian.

a. Majelis Ulama Kalimantan Selatan

Perhimpunan para Ulama dan Zu'ama sebagai upaya dalam membantu pemerintah daerah memperlancar komunikasi timbal balik antar ummat, maka dibentuk Majelis Ulama Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan. Organisasi ulama ini dibentuk dan dilantik untuk pertama kalinya oleh Gubernur Kdh Tk I Kalimantan Selatan pada tanggal 30 Januari 1975.

Peranan Majelis Ulama ini sangat besar manfaatnya bagi pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk pembangunan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain mengadakan Tur Dakwah ke daerah-daerah tingkat II dalam usaha membina Ukhuwah Islamiyah dan Kerukunan Antar Ummat Beragama juga diarahkan guna menunjang pembangunan. Selain itu turut menghimpun data yang menyangkut masalah dakwah, hubungan antara Ulama dan Umara, Keluarga Berencana (KB) dan memberikan fatwa untuk memelihara Ukhuwah Islamiyah serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang biasanya dikeluarkan menjelang Pemilu. Hal ini dilakukan karena Daerah Kalimantan Selatan mayoritas Islam dan mereka ada dalam beberapa partai politik peserta Pemilu.

Keanggotaan Majelis Ulama Tingkat I Kalimantan Selatan terdiri atas tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan birokrat yang terkait dengan pembinaan keagamaan seperti terlihat pada susunan pengurus periode 1980-1985 sebagai berikut :

- I. Pelindung : Gubernur Kdh Tk. I Kalimantan Selatan
- II. Dewan Pertimbangan
 - Ketua : H. Mastur Djuhri M.A
 - Wakil Ketua : H. Ramli AR
 - Anggota-anggota : 1. K.H. M. Hanafie Gobet
 - 2. K.H. Badaruddin
 - 3. KH. Hasan Mugeni Marwan
 - 4. K.H. Ahmad Amin
 - 5. K.H. M. Daud Yahya
 - 6. H. Usman Dundrung

b. Pembinaan Tilawatil Qur'an

MTQ Tingkat Nasional diadakan sejak tahun 1968, dan Kalimantan Selatan selalu berpartisipasi dengan mengikutsertakan Qori dan Qoriah. Untuk kegiatan tersebut dilaksanakan Musabaqah setiap tahun mulai tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Tingkat Nasional / Internasional.

Pelaksanaan MTQ merupakan sarana Dakwah, ibadah dan pendidikan bagi ummat Islam dalam menunjang pembangunan bangsa. Kalimantan Selatan pernah mendapat kehormatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan MTQ Nasional III pada tahun 1970 di Banjarmasin.

Seiring dengan pelaksanaan MTQ tersebut telah pula dibentuk dan diangkat Pengurus LPTQ Propinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Keputusan Gubernur tanggal 15 Mei 1978. Lembaga LPTQ ini juga dibentuk pada daerah Tk II di Kalimantan Selatan.

Dalam kegiatan MTQ yang pernah diikuti oleh para Qori dan Qoriah Kalimantan Selatan dapat dikatakan cukup berhasil. Sejak diadakan tahun 1968 sampai dengan tahun 1980, Qari dan Qariah Kalimantan Selatan yang berhasil pada tingkat Nasional adalah sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 1968 MTQ Nasional diselenggarakan di Makassar, Wahidah Arsyad berhasil meraih Juara III untuk kategori dewasa dan Muhammad Hakim juara II untuk tingkat anak-anak.
- 2) Pada tahun 1969 MTQ Nasional diselenggarakan di Bandung, H.M. Djahri Fadli berhasil meraih juara III untuk kategori dewasa dan Husin Abdullah juara II untuk tingkat remaja.
- 3) Pada tahun 1970 Banjarmasin, Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan MTQ Nasional, dan berhasil mengantarkan Mawardi Gani sebagai Juara I untuk kategori remaja. MTQ 1979 di Banjarmasin ini sangat berkesan bagi para kontingen, karena keramahtamahan masyarakat Banjarmasin dari keluarga-keluarga rumah yang menampung inapan (ketika itu hotel/penginapan belum memadai) hingga abang-abang becak yang gratis mengantar tamu-tamu.
- 4) Pada tahun 1971 MTQ Nasional diselenggarakan di Medan, H. Wahidah Arsyad berhasil menjadi juara I tingkat dewasa dan Rusminah H meraih juara III untuk tingkat remaja.
- 5) Pada tahun 1972 MTQ Nasional diselenggarakan di Jakarta, Rusdiana Abdan berhasil meraih juara II untuk kategori dewasa dan Rusminah H meraih juara II untuk tingkat remaja serta Hairun Nisa meraih juara untuk tingkat anak-anak.
- 6) Pada tahun 1973 MTQ Nasional diselenggarakan di Mataram, M. Yamani, B.A berhasil meraih juara II untuk tingkat dewasa dan berhak mewakili MTQ Internasional di Kuala Lumpur Malaysia, dan Nasrullah J berhasil meraih juara III untuk tingkat remaja.
- 7) Pada tahun 1974 MTQ Nasional diselenggarakan di Surabaya, Alfisah Arsyad berhasil meraih juara II untuk tingkat dewasa dan berhak mewakili MTQ Internasional di Kuala Lumpur Malaysia, kemudian pada MTQ di Surabaya tersebut telah pula berhasil M. Rahmadi sebagai juara II untuk tingkat remaja, Iti Iriani sebagai juara II untuk tingkat anak-anak serta Mahyudin sebagai juara II kategori tunanetra.
- 8) Pada tahun 1975 MTQ Nasional yang diselenggarakan di Palembang, Murjani Malik berhasil meraih juara II untuk tingkat remaja dan mahyudin berhasil meraih juara I untuk kategori tunanetra.
- 9) Pada tahun 1976 MTQ Nasional diselenggarakan di Samarinda, Iti Iriani berhasil meraih juara III untuk tingkat anak-anak.
- 10) Pada tahun 1977 MTQ Nasional diselenggarakan di Manado, Alfisah Arsyad berhasil meraih juara I dan berhak mewakili MTQ Internasional di Kuala Lumpur Malaysia, dari pada MTQ di Manado ini telah pula berhasil Artoni meraih juara II tingkat anak-anak.

- 11) Pada tahun 1978 diselenggarakan seleksi MTQ Nasional di Jakarta dan Kalimantan Selatan mendapatkan predikat juara.
- 12) Pada tahun 1979 MTQ Nasional diselenggarakan di Semarang, berhasil menempatkan M. Rusli sebagai juara IV tingkat dewasa, Artoni juara I untuk tingkat remaja dan Masriah juara III untuk kategori tunanetra.

Setelah 10 tahun lebih penyelenggaraan MTQ dilaksanakan setiap tahun, Departemen Agama mengambil kebijaksanaan untuk MTQ Nasional dilaksanakan 3 tahun sekali, MTQ Propinsi 2 tahun sekali dan MTQ tingkat Kecamatan 1 tahun sekali. Meskipun demikian LPTQ Propinsi dan Kabupaten di Kalimantan Selatan tetap melaksanakan pembinaan secara teratur.

2. Pendidikan

Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dalam bidang pendidikan antara lain diarahkan untuk :

- a. Perluasan dan pemerataan kesempatan belajar di Sekolah
- b. Meningkatkan mutu pendidikan pada Tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan dan Perguruan Tinggi.
- c. Mengembangkan pendidikan luar sekolah melalui kegiatan Kepramukaan, Olahraga, Kesenian, Karang Taruna dan kegiatan lainnya selaras dengan Pembinaan Generasi Muda pada umumnya.

Kebijaksanaan dalam pola pengembangan Pendidikan Dasar diarahkan untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak kelompok usia 7 – 12 tahun, sekaligus meningkatkan mutu pendidikan dan penambahan tenaga guru. Jumlah bangunan SD telah berkembang pesat dari 525 buah pada tahun 1950 menjadi 1025 buah pada tahun 1973 dan meningkat lagi menjadi 1915 buah dalam tahun 1980. Kemudian sampai dengan tahun 2000 meningkat lagi jumlahnya menjadi 3415 buah yang tersebar di Kalimantan Selatan.

Selain Sekolah Dasar dapat pula dilihat kemajuan pesat pada pendidikan Sekolah Menengah, yaitu berkembangnya jumlah sekolah, jumlah murid dan kelengkapan fasilitas yang terus diusahakan oleh pemerintah Orde Baru. Bangunan gedung SMTP hampir seluruh kecamatan di Kalimantan Selatan ada, sedangkan untuk bangunan gedung SMTA sebagian besar berada di ibukota Kabupaten. Perkembangan jumlah gedung SMTP dan SMTA dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Dalam bidang pendidikan tinggi kegiatannya dari dulu hingga sekarang masih terpusat di Banjarmasin. Perkembangan perguruan tinggi cukup berjalan dengan baik, ditandai dengan tumbuhnya lembaga pendidikan tinggi baru, terutama yang dikelola swasta. Perguruan tinggi yang ada sejak dulu yaitu UNLAM dan IAIN Antasari telah mengalami peningkatan dalam arti penambahan fasilitas gedung dan tenaga pengajarnya terus pula meningkatkan pendidikannya baik yang ditempuh di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian dapat meningkatkan mutu pendidikan yang akan ditransfer kepada mahasiswa.

Adanya mahasiswa yang menempuh pendidikan di Pulau Jawa, maka oleh Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan telah pula dibangun Asrama Mahasiswa untuk memudahkan mereka mengikuti pendidikan. Kebijakan ini ditempuh mengingat terbatasnya sarana Pendidikan Tinggi yang ada di daerah ini, terutama jurusan Kedokteran, Teknik dan Kejuruan lainnya saat itu.

Asrama mahasiswa Kalimantan Selatan yang ada di Jawa tersebar di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bogor, Surabaya dan Malang. Asrama ini ada yang telah menjadi milik Pemerintah Daerah dan ada pula yang sifatnya dikontrak dengan biaya APBD yang jumlahnya tercatat 15 buah.

Pembangunan Bidang pendidikan memerlukan pembangunan yang berkesinambungan, untuk tingkat Sekolah Dasar diusahakan dapat mencapai sasaran keseluruhan penduduk usia sekolah. Oleh karena itu pada masa pembangunan Orde Baru meskipun banyak tantangan, tetapi pada kenyataannya pembangunan fisik untuk pendidikan dasar telah mampu menyiapkan sampai ke pedalaman masyarakat yang terpencil. Di samping pembangunan SD Negeri yang dilakukan pemerintah telah pula dibangun SD Swasta dengan Swadaya masyarakat yang peduli terhadap pendidikan di daerah ini. Sarana berupa pengadaan alat-alat peraga dan sejumlah buku pelajaran telah diterbitkan pemerintah. Perkembangan jumlah SD Negeri dan Swasta dari tahun 1969 hingga tahun 1985 serta jumlah murid yang tertampung dapat dilihat pada tabel berikut :

Sekolah Dasar	1969	1973	1979	1983	1985
SD Negeri	918	996	1.856	2.620	3.768
SD Swasta	43	77	34	50	50
Murid yang tertampung	142.744	160.423	260.808	368.480	378.968

Selain SD dapat pula dilihat kemajuan pesat pada pendidikan sekolah menengah yaitu bertambahnya jumlah sekolah, jumlah murid dan kelengkapan fasilitas yang terus diusahakan oleh pemerintah. Gedung SMTP hampir seluruh kecamatan di Kalimantan Selatan telah dibangun oleh pemerintah. Sedangkan untuk sekolah tingkat SMTA (SMU) sebagian besar dibangun dan berada di ibukota kabupaten. Perkembangan jumlah SMTP dan SMTA dari tahun ke tahun mengalami peningkatan misalnya dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1985 dapat dilihat pada tabel berikut :

Kab/Kodya	Jenis Sekolah	1973	1979	1983	1985
Banjarmasin	SMTP	24	38	67	83
	SMTA	13	23	40	41
Banjar	SMTP	8	20	33	44
	SMTA	3	7	13	14
Tanah Laut	SMTP	2	6	10	15
	SMTA	1	1	4	3
Barito Kuala	SMTP	2	6	17	28
	SMTA	-	1	2	2
Tapin	SMTP	6	7	10	17
	SMTA	2	3	6	8
Hulu Sungai Selatan	SMTP	7	12	14	18
	SMTA	4	6	7	9
Hulu Sungai Tengah	SMTP	10	14	17	18
	SMTA	3	7	12	12
Hulu Sungai Utara	SMTP	8	16	19	24

Tabalong	SMTA	4	5	7	7
	SMTA	7	8	14	16
	SMTA	3	4	7	7
Kotabaru	SMTA	6	7	22	40
	SMTA	3	4	6	7

**JUMLAH SLTP DAN MTs NEGERI DAN SWASTA
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
Tahun 2000**

No	Kota/Kabupaten	Jenis Sekolah				Jumlah Seluruh
		SLTP		MTs		
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
1	Banjarmasin	32	35	3	22	92
2	Banjarbaru	11	4	-	4	19
3	Banjar	25	5	8	43	81
4	Tapin	17	2	6	5	30
5	Hulu Sungai Selatan	20	1	10	8	39
6	Hulu Sungai Tengah	18	-	9	6	33
7	Hulu Sungai Utara	25	2	10	25	62
8	Tabalong	23	1	10	9	43
9	Kotabaru	41	8	5	15	69
10	Barito Kuala	30	-	6	24	60
11	Tanah Laut	23	1	6	10	40
	Jumlah	265	59	73	171	568

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan

**JUMLAH SMU NEGERI DAN SWASTA
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
Tahun 2000**

No	Kota/Kabupaten	SMU		Jumlah Seluruh
		Negeri	Swasta	

1	Banjarmasin	13	17	30
2	Banjarbaru	4	3	7
3	Banjar	4	3	7
4	Tapin	3	1	4
5	Hulu Sungai Selatan	6	1	7
6	Hulu Sungai Tengah	4	1	5
7	Hulu Sungai Utara	5	-	5
8	Tabalong	4	5	6
9	Kotabaru	4	-	4
10	Barito Kuala	5	1	6
11	Tanah Laut	5	10	15
	Jumlah	57	496	96

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan

Dalam bidang pendidikan tinggi kegiatannya sejak dulu hingga sekarang masih terpusat di Banjarmasin. Perkembangan perguruan tinggi berjalan dengan baik, ditandai dengan tumbuhnya lembaga pendidikan baru, terutama swasta. Perguruan tinggi yang sudah ada sejak dulu yaitu Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari, mengalami peningkatan-peningkatan dalam arti penambahan fasilitas gedung dan tenaga pengajar yang terus meningkatkan pendidikannya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kota administratif Banjarbaru (sekarang Kota Banjarbaru) merupakan pusat pendidikan tinggi kedua setelah Banjarmasin. Lembaga pendidikan tinggi yang ada di Kalimantan Selatan hingga tahun 1998 yang ditangani pihak swasta seperti Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIEI), Banjarmasin, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bina Banua Banjarmasin, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Banjarmasin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sultan Adam Banjarmasin, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional (STIENAS) Banjarmasin, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Banjarmasin, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pancasetia Banjarmasin, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing (STIBA) Dinamik Banjarbaru, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, Akademi Teknik Pembangunan (ATPN) Banjarbaru, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Banjarmasin dan Akademi Maritim Nusantara (AMNUS) Banjarmasin.

Keberadaan Pendidikan Tinggi di Kalimantan Selatan tahun pendirian dan jumlah Fakultas/jurusan/bidang studi yang dikelola hingga tahun 1998 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Nama Lembaga Pendidikan	Status	Tahun Didirikan	Jumlah Fakultas
1	UNLAM	Negeri	1957	9 Fakultas
2	IAIN Antasari	Negeri	1960	4 Fakultas
3	APDN	Negeri	1965	1 Jurusan
4	STIEI	Swasta	1975	
5	UNISKA	Swasta	1982	5 Fakultas
6	Institut Ilmu Administrasi	Swasta	1982	
7	Akademi Sekretaris dan	Swasta	1983	2 Jurusan

	Manajemen			
8	UVAYA	Swasta	1983	4 Fakultas
9	STIA	Swasta	1982	2 Jurusan
10	STIH	Swasta	1983	1 Jurusan
11	STIENAS	Swasta	1987	2 Jurusan
12	STKIP PGRI	Swasta	1986	4 Jurusan
13	STIE Pancasetia	Swasta	1992	3 Jurusan
14	STIAAmuntai	Swasta	1984	2 Jurusan
15	ATPN Banjarbaru	Swasta	1986	3 Jurusan
16	AMK Barabai	Swasta	1982	1 Jurusan
17	Ak. Adm. Tabalong	Swasta	1984	1 Jurusan
18	AMIK Banjarmasin	Swasta	1991	1 Jurusan
19	AMNUS Banjarmasin	Swasta	1997	1 Jurusan

3. Kehidupan Ekonomi

Perkembangan ekonomi masyarakat setelah terjadinya peristiwa G 30 S/PKI hingga jaman Orde Baru terus menunjukkan peningkatan. Daerah Kalimantan Selatan yang memiliki luas wilayah 3.695.530 km² terdiri atas tanah persawahan 319.693 ha (0,86 %), tanah kering dan rawa 21.500.000 ha (58,13 %) hutan negara 1.481.636 ha (4,01 %), perkebunan 137.680 ha (0,37 %) dan lain-lain 13.546.291 ha (36,63 %).

Persawahan terdiri atas sawah Barat beririgasi dan tadah hujan, pasang surut, Surung dan Lebak / Timur. Usaha pertanian padi dilaksanakan petani di lahan sawah berupa padi sawah dan gogo rancah serta dilahan kering berupa padi gogo. Sedangkan tanaman palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan sebagian besar diusahakan petani pada lahan kering.

Secara nasional laju perkembangan produksi beras dalam periode 1969 – 1976 mencapai 3,8 % atau 0,51 juta ton pertahun, sedangkan pada PELITA I laju perkembangan produksi beras mencapai 4,6 %. Untuk daerah Kalimantan Selatan, rata-rata laju perkembangan produksi beras dalam tahun 1969 – 1979 mencapai 8,54 % atau 22,099,9 ton rata-rata pertahun. Sehingga dengan demikian angka rata-rata perkembangan produksi beras pada PELITA I daerah, jauh berada di atas kenaikan rata-rata Nasional.

Meningkatnya produksi beras dalam PELITA I tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya areal panen, yaitu rata-rata 8,51 % (17.748 ha) terutama terjadi pada sawah Barat yang disebabkan adanya tanam dua kali setahun dengan pemakaian bibit unggul, padi sawah surung pada tahun 1973 karena adanya kemarau panjang tahun 1972 dan pada sawah pasang surut terutama pada tahun 1973 karena adanya pembukaan areal baru dan transmigrasi.

Selain pertanian, usaha perikanan terus digali dan ditingkatkan pendapatannya. Sumber hayati perikanan di Kalimantan Selatan masih cukup potensial baik berupa sumber perairan laut maupun perairan umum / daerah.

Perikanan laut di Kalimantan Selatan diperkirakan mempunyai luas kurang lebih 120.000 km² dengan panjang pantai sekitar 414 km, memiliki produksi 90.000 ton / tahun yang terdiri atas produksi ikan demersal 60.000 ton / tahun, sedangkan produksi jenis ikan pelagis 30.000 ton / tahun.

Dalam komposisi hasil perikanan yang diekspor selama beberapa PELITA di Kalimantan Selatan , komoditi udang beku menduduki tempat teratas (80%) dan volume ekspor, tempat kedua adalah paha kodok sekitar 15 % dan kemudian menyusul bulus beku serta ikan betutu beku. Tujuan ekspor hasil perikanan ini adalah ke Jepang, Singapura dan Hongkong.

Sub sektor perkebunan di Kalimantan Selatan peranannya menempati urutan ketiga setelah tanaman bahan makanan dan perikanan dalam lingkup sektor pertanian. Produksi tanaman perkebunan terutama meliputi produksi karet, kelapa, kopi, lada, cengkeh dan kapuk.

a. Perdagangan

1) Ekspor

Ekspor di daerah Kalimantan Selatan tidak dapat dipisahkan dengan masalah produksi karet, karena sebagian besar dari jenis barang-barang yang diekspor adalah karet dan 90 % diusahakan rakyat dan selebihnya oleh perkebunan. Sebagian besar jenis barang yang diekspor dari Kalimantan Selatan adalah karet, sedangkan jenis barang-barang lainnya seperti rotan, kayu, tikar purun, tengkawang dan hasil hutan lainnya tidak terlalu berarti dipandang dari sudut ekonomi. Apabila ditinjau dari segi statistik volume ekspor karet rakyat di daerah Kalimantan Selatan dari tahun 1950 sampai tahun 1968 menunjukkan tendensi terus menurun, hal ini disebabkan :

- a. Pohon-pohon karet sudah tua
- b. Kurangnya pemeliharaan
- c. Sangat sedikitnya peremajaan atau dapat dikatakan tidak ada penanaman baru.⁶

Untuk meningkatkan produksi karet, usaha yang telah dijalankan oleh Pemerintah Daerah ialah dengan jalan memberikan penerangan cara-cara pemeliharaan, dan penyempurnaan cara-cara penyiapan. Disamping itu diberikan kesempatan untuk membuka lahan baru.

Selain produksi yang menurun juga mutu karetnya sangat rendah, disebabkan tidak sempurnanya atau kurangnya alat prosesing. Guna mengatasi hal ini Pemerintah Daerah telah berusaha melengkapi alat-alat yang memenuhi syarat bagi perbaikan mutu karet antara lain menertibkan rumah-rumah asap liar dan menyediakan alat-alat *up grading* karet dengan cara mendatangkannya dari luar negeri dengan mempergunakan sebagian dari Alokasi Devisa Otomatis (ADO).

Berdasarkan usaha-usaha yang dilakukan realisasi ekspor tahun 1967 sebesar U.S. \$. 13.200.321,23 mendekati target ekspor yang telah ditetapkan yaitu U.S.\$ 13.700.000,00

2) Impor

Pada umumnya para eksportir/importir di daerah Kalimantan Selatan sedikit sekali mengimpor barang-barang yang langsung didatangkan ke daerah Kalimantan Selatan, disebabkan :

- a. Pasaran barang-barang impor sangat terbatas
- b. Mereka lebih suka mendatangkan barang dari Jawa
- c. Fasilitas pelabuhan sangat kurang dan dangkalnya ambang muara sungai Barito
- d. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para importir di pelabuhan Jakarta dan Surabaya.⁷

Atas dasar itu maka untuk mendatangkan bahan-bahan pokok keperluan rakyat Kalimantan Selatan yang murah, Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan meminjamkan sebagian dari Alokasi Devisa Daerah Otomatis (ADDO) dengan syarat barang-barang yang diimpor bukan barang mewah dan yang dibutuhkan oleh rakyat serta harus dimasukkan ke daerah Kalimantan Selatan.

⁶ Kalimantan Selatan..., *op.cit*, hal. 1.

⁷ *Ibid*, hal.2.

Dalam tahun 1967 realisasi ekspor melalui pelabuhan Banjarmasin sejumlah 77.784.906 Kg dan menghasilkan devisa U.S. \$ 13.200.321.23 dari jumlah realisasi ekspor ini lebih kurang 80 % berasal dari karet.

Dari jumlah devisa tersebut yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah berupa Alokasi Devisa Otomatis (ADO) sebesar 10 %.

3) Alokasi Devisa Otomatis (ADO) ⁸

Sejak dikeluarkannya peraturan tanggal 3 Oktober 1966 hingga Desember 1966 jumlah ADO yang diterima Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan sebesar U.S.\$ 1.631.241.⁹

Sebagian dari jumlah ADO tersebut di atas diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah sebesar U.S. \$ 50.045.72 Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama antara Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan dengan Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 14 Nopember 1967 yang diperbaharui pada tanggal 8 Oktober 1967.

Penggunaan ADO yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan diambil kebijakan sebagai berikut :

- a. Dijual untuk dijadikan rupiah guna pembiayaan rutin (gaji) sebesar U.S.\$ 303.600.26
- b. Dipinjamkan/dikreditkan kepada importir/eksportir untuk mengimport keperluan rakyat U.S.\$ 528.663.46
- c. Mengeksport barang keperluan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan antara lain *up-grading* karet, alat perikanan, aspal, alat kedokteran, Toyota, alat telekomunikasi dan lain-lain U.S.\$ 735.115.07.
- d. Diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah sebesar U.S.\$ 63.862.21.

b. Industri

Bidang perindustrian merupakan sektor penunjang dan pendorong bagi pembangunan pertanian. Memang usaha perindustrian ini disiapkan dan diusahakan untuk lebih berkembang pada masa-masa mendatang. Sejak dilaksanakannya program pembinaan dan pengembangan industri dari PELITA ke PELITA terus mengalami kemajuan dan peningkatan. Peningkatan tersebut terlihat pada jumlah perusahaan industri, penyerapan tenaga kerja, jumlah investasi modal swasta, jumlah nilai produksi riil, ekspor hasil industri dan peningkatan kualitas. Dari berbagai sub sektor industri jenis industri yang paling menonjol perkembangannya adalah Saw Mill, Plywood dan Crumb Rubber.

Apabila dikaitkan dengan kemampuan masyarakat melaksanakan kegiatan di bidang perindustrian pada awal kebangkitan Orde Baru menunjukkan adanya kemajuan, hal ini dapat dilihat pada akhir bulan Mei 1968 terdapat industri-industri ringan dalam Kotamadya/Kabupaten sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kotamadya	Jumlah
1	Kotamadya Banjarmasin	155 buah
2	Kabupaten Banjar	15 buah
3	Kabupaten Tanah Laut	1 buah

⁸ Lihat penjelasan sebelumnya tentang *Alokasi Devisa Otomatis (ADO)* pada Periode “Orde Lama” 1959-1966.

⁹ *Ibid*, hal. 2.

4	Kabupaten Tapin	4 buah
5	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	17 buah
6	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	33 buah
7	Kabupaten Hulu Sungai Utara	24 buah
8	Kabupaten Tabalong	3 buah
9	Kabupaten Barito Kuala	1 buah
10	Kabupaten Pulau Laut	11 buah
	Jumlah Seluruhnya	263 buah

Sedangkan perusahaan-perusahaan yang tergolong dalam kategori industri tekstil adalah sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kotamadya	Jumlah
1	Kotamadya Banjarmasin	8 buah
2	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1 buah
3	Kabupaten Hulu Sungai Utara	47 buah
4	Kabupaten Pulau Laut/Kotabaru	11 buah
	Jumlah Seluruhnya	57 buah

Kemudian dapat pula dilihat Perusahaan Kerajinan Rakyat sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kotamadya	Jumlah
1	Kotamadya Banjarmasin	367 buah
2	Kabupaten Banjar	35 buah
3	Kabupaten Tanah Laut	7 buah
4	Kabupaten Tapin	21 buah
5	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	183 buah
6	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	75 buah
7	Kabupaten Hulu Sungai Utara	104 buah
8	Kabupaten Tabalong	14 buah
9	Kabupaten Pulau Laut/Kotabaru	607 buah
10	Kabupaten Barito Kuala	tidak terdaftar
	Jumlah Seluruh Perusahaan	1413 buah

Kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri pada PELITA III lebih diarahkan kepada segi pemerataan pertumbuhan dan perkembangannya. Usaha pembinaan juga dilakukan untuk peningkatan prakarsa dan usaha masyarakat sendiri dalam industri berukuran menengah dan kecil.

Sejak pelaksanaannya program pembinaan dan pengembangan industri tahun 1970 sampai tahun 1980 tercatat adanya perkembangan di bidang industri, yaitu :

- 1) Jumlah perusahaan industri berkembang menjadi 2.238, dibanding pada tahun 1970 terdapat kenaikan 752 buah (50,6 %).
- 2) Penyerapan tenaga kerja berjumlah 16.719 orang, dibanding dengan tahun 1970 terdapat kenaikan 8.481 orang (102,9%)

- 3) Ekspor hasil industri selama tahun 1970-1980 sebesar US\$ 272.343.514,65, bila dilihat hasil ekspor hasil industri pada tahun 1979 dibanding 1970 terdapat kenaikan 275 kali.
- 4) Peningkatan kualitas sesuai dengan standar mutu dan barang-barang hasil industri yang diproduksi di daerah Kalimantan Selatan terutama untuk industri makanan, minuman dan bahan bangunan.
- 5) Jenis industri yang paling menonjol perkembangannya selama tahun 1970-1980 adalah :

a) Saw Mill

Jumlah perusahaan meningkat dari 13 buah menjadi 86 buah dan kapasitas produksi dari 38.340 M³/tahun menjadi 954.080 M³/tahun serta ekspor karya gergajian dari tidak ada menjadi 112.551 M³ pada tahun 1971

b) Plywood

Semula tidak ada perusahaan menjadi dua buah perusahaan dengan kapasitas produksi 2.400.000 lembar pertahun. Pada tahun 1980 dibangun lagi 5 buah pabrik plywood dengan kapasitas 10.344.000 lembar pertahun.

c) Crumb Rubber

Dari tidak ada perusahaan menjadi 10 buah dengan kapasitas 40.800 ton/tahun. Pada mulanya ekspor berupa karet konvensional dan kemudian bergeser ke arah karet dengan spesifikasi teknis (SIR)

Sektor industri kecil dan kerajinan yang perlu mendapatkan perhatian keberadaannya adalah kerajinan rotan, anyaman purun, anyaman daun pandan, kerajinan sepatu, batu aji, batu-batu mulia dan sintetis, kerajinan tenun pagatan, anyaman bambu, Mandau dan kerajinan kuningan.

Lokasi dan jumlah perajin industri kecil dan kerajinan seperti kerajinan rotan di Amuntai 2000 pengrajin, Margasari 750 pengrajin, Banjarmasin 40 pengrajin dan Banjarbaru 1 perusahaan untuk anyaman purun di Martapura 50 pengrajin, Bati-bati 400 pengrajin, Tabanio 100 pengrajin, Tapin 750 pengrajin dan Amuntai 3.974 pengrajin. Anyaman daun pandan hanya

terdapat di Tanjung Pelayar dengan 370 pengrajin. Kerajinan Sepatu terdapat di Amuntai dengan 31 pengrajin dan Banjarmasin 2 pengrajin. Kerajinan Batu Aji di Martapura terdapat 21 pengrajin dan Banjarmasin 1 pengrajin, sedangkan Batu-batu Mulia dan Sentetis di Martapura 935 pengrajin dan Banjarmasin 10 pengrajin. Kerajinan Tenun Pagatan di Kotabaru terdapat 39 pengrajin dan di Pagatan sendiri 120 pengrajin. Anyaman bambu terdapat di Amuntai dengan 410 pengrajin, kerajinan kuningan dan Mandau terdapat di Negara dengan 10 pengrajin, Banjarmasin 1 pengrajin.

Industri kecil yang cukup berkembang dan menjadi identitas Kalimantan Selatan adalah Kain Sasirangan. Kain ini dengan berbagai corak dan ornamen khas Banjar telah dikembangkan menjadi bahan sandang untuk pembuatan pakaian pria maupun wanita yang dapat dipakai sehari-hari maupun waktu-waktu tertentu, Kain Sasirangan ini telah pula dikenal luas pada tingkat nasional dan bahkan internasional sebagai produksi dari daerah Kalimantan Selatan.

c. Pertambangan

Sektor pertambangan merupakan komoditi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Daerah Kalimantan Selatan memiliki cukup banyak sumber endapan bahan galian berupa; batu bara, besi, mangan, minyak bumi dan nikel yang dikategorikan sebagai bahan galian strategis. Sedangkan galian vital berupa logam mulia (emas, perak, platina) intan, kaolin, pasir kwarsa dan pospat. Kemudian yang dikategorikan sebagai bahan galian golongan C adalah berbagai jenis bahan galian untuk bahan bangunan (andesit, granit dan lain-lain), gamping, krikil, pasir dan tanah liat.

Kekayaan alam daerah Kalimantan Selatan tersebut telah dilakukan penyelidikannya sejak jaman Belanda. Hasil penyelidikan itu ditambah dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Proyek Besi Baja Kalimantan dan beberapa penyelidikan lainnya, maka oleh Direktorat Geologi, Departemen Pertambangan disusun suatu kompilasi peta geologi daerah Kalimantan Selatan.

Kegiatan pertambangan batu-bara pada jaman Belanda, terutama dilakukan di daerah Gunung Batu dan beberapa daerah lain, sebagian di teruskan pada masa penjajahan Jepang dan sekarang termasuk masih diunggulkan dalam penggaliannya. Tambang Batu Bara dst

terbanyak dilakukan adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kotabaru, Tapin dan Kabupaten Banjar.

Untuk minyak dan gas bumi diselidiki sejak tahun 1934, terutama di daerah Tanjung dan Warukin. Di Tanjung mulai berproduksi sejak tahun 1974 dan Warukin tahun 1965.

Penyelidikan yang lebih intensif dan sistematis untuk mencari endapan bahan galian pernah dilaksanakan oleh :

- 1) Proyek Besi Kalimantan (1956-1965), terutama menyelidiki endapan besi dan batu bara. Dari hasil penyelidikan itu ditemukan endapan bijih besi primer sebanyak kurang lebih 10 juta ton. Jumlah ini tidak cukup untuk bahan baku suatu pabrik peleburan biji besi baja, dengan kapasitas 250.000 ton/tahun. Selain itu diketahui pula cadangan besi laterit berkadar rendah yang jumlahnya lebih dari 500 juta ton. Untuk batu bara di Pulau Laut 21.300.000 ton dan Pulau Sebak 2.5000.000 ton.
- 2) Proyek Intan, PT Aneka Tambang (1968-1975) mengadakan eksplorasi intan placer/sekunder. PT Aneka Tambang berkesimpulan bahwa endapan tidak ekonomis untuk dikerjakan secara mekanis.

Penyelidikan nikel dilakukan di daerah pulau Sebak, Tanjung Batu, Pegunungan Babaris dan Pegunungan Meratus (1972-1975) telah ditemukan cadangan nikel laterit yang potensial. Sejak tahun 1975 hingga beberapa tahun telah dilakukan penyelidikan emas secara sistematis pada hampir semua wilayah Kalimantan Selatan, namun hingga sekarang belum ditemukan suatu cadangan emas yang ekonomis untuk diusahakan secara besar-besaran

Berkenaan dengan bahan galian industri yang terdapat di Kalimantan Selatan adalah pasir kuarsa, kaolin, calsit dan lain-lain yang merupakan bahan baku industri yang dapat dipakai langsung tanpa suatu prosesing. Jumlah cadangan yang diketahui adalah :

- 1) Kaolin 915 juta ton (baik untuk keramik halus, batu tahan api dan lain-lain)
- 2) Fosfat 41.512.300 ton (baik untuk pupuk alam)
- 3) Pasir Kuarsa 37.251.900 ton (baik untuk bahan baku industri gelas dan kaca)
- 4) Bahan baku semen, dimungkinkannya untuk mendirikan pabrik semen dengan perkiraan umur produksi sekitar 1500 tahun baik produksi pertama 500.000 ton.

Semakin meningkatnya keperluan batu-bara, terutama dalam usaha diversifikasi Sumber Energi yang mencapai 10.000.000 ton/tahun, maka untuk Kalimantan Selatan dibuka kesempatan bagi investor asing untuk mengembangkan batu bara berdasarkan kontrak bagi hasil.

d. Kelistrikan

Dalam bidang kelistrikan telah berhasil dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Riam Kanan yang jaringannya dibangun dan didistribusikan secara bertahap ke daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan.

Pembangunan bidang kelistrikan meliputi :

- 1) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Riam Kanan tahap I yang diselesaikan pada tahun 1973, terdiri atas :
 - a) Pembangunan DAM Riam Kanan
 - b) Pembangunan Turbin Generator dengan kapasitas 2 x 10 MW
 - c) Pembangunan Sistem transmisi tegangan 70 KV antara PLTA Ir. Pangeran Noor Banjarbaru (Cempaka) - Banjarbaru.
 - d) Pembangunan Gardu Induk Banjarbaru (Cempaka) dengan kapasitas daya sebesar 1 x 3 MVA
 - e) Pembangunan Gardu Induk Banjarmasin dengan kapasitas daya 2 x 6 MVA
 - f) Pembangunan Jaringan Tegangan Menengah 6 KV di antara Gardu Induk Banjarmasin sampai dengan PLTD Banjarmasin
 - g) Pembangunan/pemasangan gardu-gardu transformator distribusi beserta jaringan tegangan rendahnya

- 2) Perluasan Gardu Induk Banjarmasin dengan menambah unit transformator et Surabaya dengan kapasitas daya 1 x 6 MVA dan Perluasan Gardu Induk Cempaka dengan menambah 1 unit transformator et Jakarta dengan kapasistas 5 MVA.
- 3) Pembangunan PLTD Trisakti tahap I dengan kapasitas daya 2 x 2,1 MW dan perluasan jaringan tegangan menengah antara PLTD Trisakti dan PLTD Merdeka.
- 4) Pembangunan PLTD beserta jaringan yang tersebar di ibukota-ibukota Kabupaten :
 - a) Rantau dengan kapasitas daya 336 Kw
 - b) Kandangan dengan kapasitas daya 672 Kw
 - c) Barabai dengan kapasitas daya 992 Kw
 - d) Amuntai dengan kapasitas daya 947 Kw
 - e) Tanjung dengan kapasitas daya 724 Kw
 - f) Kotabaru dengan kapasitas daya 651 Kw
 - g) Pelaiharidengan kapasitas daya 200 Kw
- 5) Pembangunan Listrik desa yang meliputi daerah-daerah :
 - a) Awang Bangkal
 - b) Paringin dengan membangun PLTD 50 KVA
 - c) Binuang dengan membangun PLTD 100 KVA
 - d) Pantai Hambawang dengan perluasan jaringan distribusi dari Barabai.
 - e) Penyiuran dengan perluasan jaringan distribusi dari Amuntai.
 - f) Cempaka dengan perluasan jaringan distribusi dari Gardu Induk Cempaka
 - g) Gambut dengan perluasan jaringan distribusi dari Gardu Induk Banjarmasin
 - h) Pemurus dengan perluasan jaringan distribusi dari Gardu Induk Banjarmasin
 - i) Alalak dengan perluasan jaringan distribusi dari Gardu Induk Banjarmasin
 - j) Berangas dengan perluasan jaringan distribusi dari Gardu Induk Banjarmasin
 - k) Tambak Hanyar dengan perluasan jaringan distribusi dari Gardu Induk Banjarmasin.
 - l) Haruyan dengan perluasan jaringan distribusi Barabai-Pantai Hambawang.
- 6) Proyek Riam Kanan tahap II meliputi :
 - a) Penambahan dan pemasangan Turbin Generator III dengan kapasitas daya sebesar 10 MW sehingga total kapasitas daya menjadi 30 MW.
 - b) Penambahan line transmisi II dengan tegangan kerja 70 KV di antara Riam Kanan-Gardu Induk Cempaka, Gardu Induk Banjarmasin sepanjang 32 Km.
 - c) Pembangunan Line Transmisi baru antara Gardu Induk Banjarmasin ke Gardu Induk Trisakti sepanjang 10 Km.
 - d) Pembangunan Gardu Induk Trisakti dengan kapasitas daya 2 x 6 MVA
 - e) Penambahan kapasitas daya di Gardu Induk Cempaka dan perbaikan penambahan daya di Gedung Induk Banjarmasin.
 - f) Perbaikan system jaringan Tegangan Menengah dari 6 KV menjadi 20 KV disebagian daerah Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura.
 - g) Pembangunan dan perluasan PLTD Trisakti tahap II dengan kapasitas daya sebesar 2x4 MW.
- 7) Pembangunan PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) Haruyan.
- 8) Pembangunan PLTA Riam Kiwa untuk menunjang pasokan listrik dan mengurangi pemakaian pembangkit PLTD, karena biaya operasi PLTD relatif lebih mahal dibandingkan dengan PLTA.

4. Olahraga

Pembinaan Keolahragaan erat hubungannya dengan pembangunan mental dan fisik bangsa. Untuk itu pembinaan olahraga diusahakan untuk memasyarakatkan olahraga melalui proses permasalahan dan pembibitan serta pembinaan prestasi yang dapat dibedakan dalam bentuk kegiatan olahraga massal, olahraga rekreasi, olahraga prestasi dan olahraga khusus.

Di Kalimantan Selatan secara organisatoris pembinaan olahraga ditangani oleh KONI dan secara teknis dilaksanakan sepenuhnya oleh top organisasi cabang olahraga yang bersangkutan. Sejak tahun 1970 usaha pembinaan olahraga dengan penyediaan dana APBD dengan sasaran pembinaan generasi muda, pemasaran dan pembibitan olahragawan, peningkatan prestasi olahraga dan olahraga sebagai pembangunan bangsa.

Pembinaan olahraga diarahkan untuk memasyarakatkan olahraga melalui proses pemasaran dan pembibitan serta pembinaan prestasi yang dapat dibedakan dalam bentuk seperti : a. Olahraga massa, b. Olahraga rekreasi, c. Olahraga prestasi dan d. Olahraga khusus.

Dalam kegiatan pembinaan olahraga untuk generasi muda sejak tahun 1974 dilakukan Pekan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia dan untuk daerah disebut dengan POPDA serta Pekan Olahraga dan Seni. Nampaknya yang dapat bertahan sampai sekarang adalah POPDA, sedangkan Porseni kegiatannya tidak dapat terlaksana secara berkesinambungan sebagai event tetap.

Penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah untuk menunjang kegiatan pembinaan KONI Propinsi Kalimantan Selatan antara lain untuk kejuaraan daerah (Kejurda) mengikuti pertandingan kejuaraan Nasional (PON). Disamping itu diprogramkan pula untuk memberikan insentif bagi olahragawan yang berprestasi.

KONI sebagai Induk organisasi yang melakukan pembinaan olahraga pada dasarnya berfungsi sebagai fasilitas bagi para olahragawan yang tergabung pada top organisasi Olahraga. Oleh karena itu susunan Pengurus KONI Daerah Kalimantan Selatan periode 1979-1983 tidak begitu banyak personalianya.

Top organisasi yang langsung menangani kegiatan cabang olahraga sebagai anggota KONI Kalimantan Selatan adalah :

- 1) PGSI : Persatuan Gulat Seluruh Indonesia
- 2) PERCASI : Persatuan Catur Seluruh Indonesia
- 3) PERPANI : Persatuan Panahan Indonesia
- 4) PODSI : Persatuan Olahraga Dayung Indonesia
- 5) PRSI : Persatuan Renang Seluruh Indonesia
- 6) PASI : Persatuan Atletik Seluruh Indonesia
- 7) PBSI : Persatuan BuluTangkis Seluruh Indonesia
- 8) PSSI : Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia
- 9) PYSI : Persatuan Yudo Seluruh Indonesia
- 10) PBVSI : Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia
- 11) PTMSI : Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia
- 12) PELTI : Persatuan Lawn Tennis Indonesia
- 13) PORKEY : Persatuan Olahraga Hokey
- 14) PERBASI : Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia
- 15) PERTINA : Persatuan Tinju Amatir
- 16) PERBAKIN : Persatuan Menembak Indonesia
- 17) PROPI : Persatuan Olahraga Peairan Indonesia
- 18) IPSI : Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia
- 19) IKASI : Ikatan Anggar Seluruh Indonesia
- 20) ISSI : Ikatan Sport Sepeda Seluruh Indonesia
- 21) IMI : Ikatan Motor Indonesia
- 22) GABSI : Gabungan Bridge Seluruh Indonesia

- 23) POPSI : Persatuan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia
- 24) PERSANI : Persatuan Senam Indonesia
- 25) PGI : Persatuan Golf Indonesia
- 26) PGJI : Persatuan Gerak Jalan Indonesia
- 27) BAPOR : Badan Pembina Olahraga Daerah
- 28) PSASI : Persatuan Sky Air Seluruh Indonesia
- 29) PERKEMI : Persatuan Kempo Indonesia
- 30) PERWOSI : Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia
- 31) SWO : Serikat Wartawan Olahraga

5. Kehidupan Seni Budaya

Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dalam pembinaan seni dan budaya dilaksanakan berdasar pokok pikiran bahwa kebudayaan daerah merupakan salah satu bagian dari Kebudayaan Nasional. Seni dan budaya dikembangkan ke arah tujuan yang dapat memperkaya seni budaya bangsa Indonesia.

Pembinaan seni dan budaya di Kalimantan Selatan dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan Dinas/Kanwil yang memiliki jaringan kerja dalam menangannya. Sebelum Otonomi Daerah selain Dinas Pariwisata dan Kanwil Parsenibud, instansi yang banyak terlibat menangani kegiatan seni dan budaya adalah Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya di Kabupaten dan Kotamadya.

Kegiatan pembinaan seni dan budaya memang yang lebih nyata terlihat pada kesenian sebagaimana tercermin dari banyaknya pagelaran dan organisasi kesenian. Sedangkan pembinaan budaya atau kebudayaan yang dilakukan terarah pada penggalian atau pengungkapan nilai sejarah dan budaya, pemugaran peninggalan sejarah dan purbakala seperti masjid bersejarah, rumah adat dan situs kepurbakalaan, yang ditangani oleh Bidang Permuseuman dan Kepurbakalaan, dan Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional yang ada di Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Selatan.

Selama periode Orde Baru telah dilakukan upaya penggalian (*ekskavasi*) dan pemugaran (*restorasi*) terhadap peninggalan sejarah dan purbakala seperti yang dilakukan antara lain terhadap situs Candi Agung, Kompleks Makam Sultan Suriansyah, Masjid Suada di Wasah Hilir, Masjid Pusaka di Banua Lawas, Masjid Tua di Banua Halat, Rumah Banjar di Teluk Selong, Rumah Bulat di Marabahan serta inventarisasi terhadap berbagai peninggalan benda cagar budaya yang tersebar di berbagai tempat di Kalimantan Selatan. Berbagai peninggalan sejarah dari Zaman Prasejarah, Klasik, Islam (masa Kerajaan Banjar), kolonial, hingga peninggalan Zaman Perang Kemerdekaan serta peralatan upacara adat dan daur hidup dapat disaksikan di Museum Negeri "Lambung Mangkurat" di Banjarbaru dan Museum "Waja Sampai Kaputing" di Banjarmasin. Sebagian dari koleksi museum itu, selain berasal dari temuan juga diperoleh melalui hibah dan pembelian (ganti rugi).

Sebelum tahun 1970 kegiatan seniman lebih banyak dilakukan oleh para seniman secara perorangan atau grup-grup kesenian yang dibentuk menurut keperluan para seniman itu sendiri. Dari kenyataan yang ada, maka dalam usaha meningkatkan kegiatan seniman, memudahkan komunikasi antar seniman dan juga instansi pembina, kemudian para seniman budayawan membentuk sebuah wadah berhimpun yang diberi nama Dewan Kesenian Daerah (DKD) Kalimantan Selatan. Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Selatan yang pertama diketuai oleh Anang Adenansi yang kepengurusannya dilantik oleh Gubernur Tingkat I Kalimantan Selatan Subardjo pada tanggal 2 Mei 1971. Kemudian dengan terbentuknya DKD tingkat propinsi, maka diikuti pula oleh Kabupaten dan Kotamadya se-Kalimantan Selatan.

Pembentukan Dewan Kesenian Daerah Propinsi Kalimantan Selatan ini sangat direspon oleh Gubernur yang pada ketika itu dijabat oleh Subardjo. Pada masa Gubernur Subardjo ini pula kegiatan kesenian relatif maju dan hubungan antara seniman dan pemerintah daerah cukup harmonis. Beberapa kegiatan yang melibatkan daerah Kabupaten dan Kotamadya seperti Pekan Kesenian I di Amuntai, pergelaran kesenian, festival dan lomba kesenian dan misi kesenian ke luar negeri dapat dilakukan di bawah koordinasi Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Selatan.

Tetapi untuk tingkat nasional organisasi kesenian yang mendapat perhatian adalah Badan Koordinasi Kesenian Nasional Indonesia (BKKNI). Organisasi ini diperkuat dalam musyawarah kesenian se-Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 18 Februari 1977 di Surabaya. Pada musyawarah seniman ini diberikan mandat kepada Sampurno, SH, Drs. S.D Humardani dan Bagong Kusudiarjo untuk menyusun kepengurusan tingkat pusat.

Dalam musyawarah seniman se Indonesia tersebut Kalimantan Selatan diwakili oleh Anang Adenansi dan Yustan Aziddin. Sebagai konsekwensi kehadiran pada musyawarah seniman itu dan adanya kebijakan agar setiap propinsi dan kabupaten/Kotamadya dapat dibentuk BKKNI, maka Anang Adenansi dan Yustan Aziddin mengkomunikasikannya dengan para seniman dan onstansi yang membidangnya.

Untuk menghindari dualisme dalam organisasi kesenian, maka pada tahun 1979 para seniman Kalimantan Selatan menyadari harus dicarikan jalan terbaiknya. Pada satu sisi DKD adalah mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan kesenian di sisi lain BKKNI memiliki jaringan ke seluruh Indonesia dan secara hirarkis BKKNI Pusat adalah induknya apalagi ketika itu didukung pemerintah pusat. Dalam menyiasati kedua organsasi ini, para seniman Kalimantan Selatan akhirnya meleburkannya menjadi Dewan Kesenian (DK-BKKNI).

Setelah dua periode kepengurusan DK-BKKNI maka pada Musda III BKKNI yang dilaksanakan tanggal 22 dan 23 Oktober 1989 nama Dewan Kesenian sudah tidak ada lagi di depan BKKNI. Pada Musda III ini terpilih pengurus BKKNI Kalimantan Selatan.

Perjalanan organisasi kesenian baik di daerah maupun di tingkat pusat tidak terlalu jauh berbeda. Peran BKKNI semakin berkurang, karena BKKNI Pusat sifatnya hanya sebagai koordinator. Sedangkan di daerah mengalami stagnasi, karena pemerintah daerah tidak berkewajiban untuk mengalokasikan dana khusus untuk BKKNI disebabkan bukan di bawah pembinaan Pemda. Ketika peran dan keberadaan BKKNI kurang mendapat perhatian baik di tingkat pusat maupun di daerah, Dewan Kesenian bangkit dengan mengadakan Musyawarah Nasional III di Makassar yang dilaksanakan tanggal 31 Oktober sampai dengan 2 Nopember 1992 dan Kalimantan Selatan mengikutinya.

Utusan Kalimantan Selatan pada Musyawarah Nasional Dewan Kesenian tersebut diwakili pengurus BKKNI yaitu Drs. H. Aspul Fansuri, Drs. H. Yustan Aziddin, Drs. Syarifuddin R. Adjim Arijadi dan Drs. Bakhtiar Sanderta yang membawa rombongan kesenian. Selain itu Drs. Jarkasi hadir sebagai peninjau dalam musyawarah Nasional III Dewan Kesenian di Makassar tersebut.

Keberadaan BKKNI Kalimantan Selatan yang kurang menguntungkan, karena tidak berkaitan secara langsung dengan pemerintah daerah dan kecenderungan pemerintah pusat mengakui peran Dewan Kesenian, maka muncul keinginan dari para seniman untuk membentuk kembali Dewan Kesenian Daerah. Setelah melalui rapat-rapat dan pertemuan kemudian diputuskan untuk melaksanakan musyawarah seniman yang pelaksanaannya ditetapkan tanggal 24 dan 25 Januari 1994. Disebabkan Dewan Kesenian sudah pernah dibentuk sebelumnya, sehingga dalam penyelenggaraannya disebut Musyawarah Seniman II.

Pada Musyawarah Seniman II yang dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan Ir. H.M. Said berhasil dibentuk Pengurus Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Selatan periode 94-97 yang kepengurusannya disahkan dan dilantik oleh Gubernur Kalimantan Selatan.

Masa kepengurusan Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Selatan sesuai hasil Musyawarah Seniman II tahun 1994 sampai tahun 1997. Kemudian dengan berakhirnya masa kepengurusan periode 1994-1997, maka berdasarkan hasil Musyawarah Seniman III Kalimantan Selatan yang diselenggarakan tanggal 25 dan 26 April 1998 dipilih kembali Majelis Pertimbangan Seniman (MPS) dan Dewan Pengurus Dewan Kesenian Kalimantan Selatan.

Organisasi kebudayaan selain Dewan Kesenian yang keberadaan kepengurusannya di kukuhkan dan dilantik oleh gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Selatan adalah Lembaga Budaya Banjar (LBB). Pembentukan Lembaga Budaya Banjar ini sebenarnya telah lama menjadi harapan dan dambaan bersama para budayawan agar dalam kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah dapat dilaksanakan sesuai tatanan yang diharapkan.

Pendirian Lembaga Budaya ini sebenarnya telah lama dirintis dan diusahakan, namun baru mulai memperoleh dukungan nyata dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan no. 0272 tanggal 31 Juli 1986 tentang Pengukuhan Panitia Persiapan Berdirinya Lembaga Adat Banjar di Kalimantan Selatan atau disebut dengan istilah Panitia 7. Panitia 7 tersebut adalah M. Suriansyah Ideham, B.A (Ketua), Drs. Asdi Maswardi (Sekretaris), H. Ali Hamdi Budigawis, Drs. H. Yustan Aziddin, Hj. GT. Noorsehan Djohansyah, H. Hijaz Yamani, dan Adjim Arijadi masing-masing sebagai anggota.

Dengan dasar keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan panitia 7 melakukan kajian dan persiapan yang mendasari dapat terbantunya sebuah lembaga kebudayaan Banjar di Kalimantan Selatan. Namun pembentukan lembaga ini terkendala oleh hal-hal yang bersifat teknis, sehingga baru tahun 1997 dapat direalisasikan lembaganya. Pengukuhan dan pelantikan Pengurus Lembaga Budaya Banjar dilaksanakan bertepatan dengan HUT Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tanggal 14 Agustus 1997.

Kompisisi dan personalia anggota lembaga Budaya banjar Kalimantan Selatan no. 0230 tanggal 9 Agustus 1997 adalah sebagai berikut :

Ketua	: H. Asmoeni A Rahman,Bsc
Wakil Ketua	: H. Ali Hamdi Budigawis
Wakil Ketua	: M. Suriansyah Ideham,B.A
Wakil Ketua	: H. Ahmad Makkie,B.A
Wakil Ketua	: H. Hijaz Yamani
Sekretaris	: H. Adjim Arijadi
Wakil Sekretaris	: Drs. H. Syarifuddin R
Anggota	: Drs. Addi Maswardi
	H. Anang Ardiansyah
	Hj. Jurliani Djohansjah
	Prof. Dr. H.M. Nansi Mirhanuddin
	Prof. H. Andi Amrullah, S.H
	Dr. H. Djantera Kawi
	Drs. H. Syamsiar Seman
	Drs. H. Aspul Fansuri
	Drs. H. Bakhtiar Sanderta
	H. Artum Artha
	H. Husin Nafarin, M.A

Pada tahun 1999 dua orang anggota LBB meninggal dunia, yaitu Drs. H. Aspul Fansuri dan Prof. Drs. H.M Nansi. Untuk pengganti Drs. Aspul Fansuri telah ditetapkan Drs. H. Sjarifuddin dan kemudian H. Husin Nafarin M.A karena alasan kesibukan pekerjaan mengundurkan diri dari kedudukannya digantikan oleh Prof. Dr. H. Zurkani Yahya. Pada tahun 2001 telah pula meninggal

dunia H. Hijaz Yamani dan pada saat buku ini disusun (2002) H. Artum Artha juga meninggal dunia.

a. Hadiah Seni

Hubungan yang terjalin dengan baik antara Dewan Kesenian Daerah dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan memahami keberadaan seni budaya daerah yang erat kaitannya dengan para pelakunya, maka sejak tahun 1974 kepada seniman, budayawan, pendidik dan pembina seni diberikan penghargaan berupa hadiah seni. Hadiah seni ini diberikan kepada mereka yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi dan pengabdian di bidang seni dan budaya yang dapat diartikan sebagai tanda terima kasih atas jasa dan perhatian yang sungguh-sungguh pada kemajuan dan perkembangan seni budaya daerah.

Pemberian hadiah seni ditetapkan dengan Surat keputusan Gubernur KDH Tingkat I Kalimantan Selatan, atas rekomendasi Dewan Kesenian Daerah yang nama-nama penerimanya diajukan berdasarkan hasil seleksi dan rapat koordinasi dengan Dinas/instansi pembina yang membidangi kegiatan seni dan budaya. Bentuk hadiah seni berupa piagam penghargaan disertai bingkisan uang.

Pemberian hadiah seni telah diagendakan setiap tahun dan penyerahannya pada malam resepsi HUT Kemerdekaan RI. Namun dalam perkembangannya selain alasan teknis juga adanya keinginan agar dalam pemberiannya dihadiri banyak seniman dan budayawan maka pada beberapa tahun terakhir penyerahannya tersendiri. Pelaksanaan pemberian hadiah seni pada resepsi HUT Kemerdekaan RI memang dimaksudkan agar terkesan lebih dihargai, tetapi tidak dapat menyertakan seniman/budayawan yang banyak untuk menyaksikan.

Sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 1998 telah diberikan hadiah seni kepada 122 orang penerima. Jumlah penerima hadiah seni pada tiap tahunnya memang tidak ditetapkan secara pasti, tetapi tradisi pemberiannya disepakati terus berkesinambungan. Pada dasarnya pemberian hadiah seni diberikan kepada 3 sampai dengan 5 orang setiap tahunnya. Berdasarkan pertimbangan masih banyak seniman yang layak menerima hadiah seni, maka beberapa tahun pernah diberikan kepada 15 penerima. Tetapi kenyataan ini telah pula melahirkan kritik, karena dianggap merendahkan makna hadiah seni yang diberikan. Atas dasar berbagai pertimbangan tersebut oleh pemerintah daerah diambil kebijakan untuk memberikan hadiah seni kepada 5 orang seniman / budayawan atau pembina seni sebagai penerima hadiah seni yang bersifat tetap setahun sekali.

b. Organisasi Kesenian

Organisasi kesenian berupa sanggar/grup telah lama dikenal di Kalimantan Selatan dan tersebar luas tidak hanya di ibukota propinsi dan kabupaten, tetapi sampai di desa-desa. Ketika buku ini disusun tercatat ada 189 buah nama grup/sanggar kesenian yang bergerak pada bidang sastra, seni rupa, musik tari dan teater, serta ada pula satu grup yang melakukan aktifitasnya untuk beberapa cabang seni. Pendirian grup kesenian di Kalimantan Selatan ada keberadaanya sejak jaman Orde Lama dan berlangsung sampai sekarang.

Keberadaan grup atau sanggar kesenian pada tahun 1960 sampai 1970 an kebanyakan dilakukan berdasarkan keahlian pada cabang kesenian yang digeluti. Dalam bidang sastra ada Untaian Mutiara ini antar lain H. Hijaz Yamani dan H. Yustan Aziddin yang dalam siarannya melakukan pembinaan seni sastra setelah pembacaan puisi-puisi yang telah diagendakan diikuti komentar dan pemberian wawasan penciptaan puisi. Dari komunitas sastra ini kemudian

melahirkan organisasi profesi yaitu Himpunan Sastrawan Seluruh Indonesia Kalimantan Selatan (HIMSI).

Pada cabang seni rupa juga sebelum tumbuh dan berkembang seperti sekarang ada beberapa sanggar diantaranya Sanggar Balahindang di Kandangan, Sanggar Halang dan Sanggar Karamunting di Banjarbaru, Sanggar Palupuh di Amuntai, Sanggar Hindang Hindala di Pantai Hambawang Barabai dan Sanggar Cakrawala di Banjarmasin. Adanya profesi di bidang seni rupa yaitu Himpunan Seniman Seni Rupa Indonesia (HISSRI) Kalimantan Selatan.

Cabang seni tari termasuk yang telah lama ada organisasinya seperti PERPEKINDO (Perintis Peradaban Kebudayaan Indonesia) yang didirikan sejak tahun 1953 oleh Amir Hasan Bondan, dan sampai sekarang telah diteruskan generasi penerusnya. Dari komunitas para penari yang di Sanggar dan grup-grup kesenian ini kemudian melahirkan organisasi profesi tari, yaitu Persatuan Seniman Penari Seluruh Indonesia Kalimantan Selatan (PERSEPRI).

Untuk seni musik lahir kelompok-kelompok musik yang bergerak dalam musik tradisi dan modern. Di Kalimantan Selatan organisasi profesi bidang musik diwakili jenis musik keroncong yaitu Himpunan Artis Musik Keroncong Indonesia (HAMKRI) Kalimantan Selatan.

Bidang Teater cukup banyak grup yang tumbuh dan berkembang di Kalimantan Selatan. Dalam bidang teater ini Sanggar Budaya pimpinan Adjim Arijadi termasuk grup yang tertua dan sampai sekarang masih aktif melakukan kegiatannya. Beberapa grup teater / sandiwara lainnya yang tidak lagi aktif seperti Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI). Teater Sanggar Antasari dan Artis Drama Banjarmasin. Organisasi profesi pada bidang teater ini adalah Pusat Kegiatan Studi Teater (PKS Teater).

Pada umumnya Sanggar/Grup kesenian yang ada di Kalimantan Selatan kegiatan utamanya adalah melakukan latihan-latihan, diskusi, pertunjukan dan pameran bersama. Pembinaan pada sanggar-sanggar ini kebanyakan dan yang paling berperan adalah para ketuanya dengan unsur pimpinan atau pendiri lainnya.

C. PERANAN PERS DALAM DINAMIKA MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN

Dari masa ke masa telah diakui fungsi dan peranan pers dapat mempengaruhi perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah G 30 S/PKI dapat digagalkan, keberadaan presiden Soekarno yang masih memegang kekuasaan banyak mendapat sorotan pers yang tidak lagi memihak pada kekuatan Orde Lama. Di Jakarta telah terbit harian API, KAMI dan TRISAKTI yang dikelola oleh para wartawan muda penuh idealisme. Mereka para wartawan muda ini pada masa Orde Lama tidak pernah terlibat kerja sama dengan kepentingan penguasa, sehingga isi pemberitaan surat kabar yang mereka kelola dapat memuat segala yang terjadi dengan gamblang. Berbagai kebobrokan yang pernah dilakukan Orde Lama dengan bermacam aspek dan permasalahannya dikupas habis untuk menggiring opini masyarakat agar berpihak pada Orde Baru yang sedang digulirkan angkatan 1966.

Seiring tampilnya Orde Baru, penerbitan surat kabar yang kelahirannya dipaksakan untuk mendukung bermacam kepentingan, secara sadar kembali menemukan jati dirinya. Misalnya Kedaulatan Rakyat yang terbit di Yogyakarta pada jaman Orde Lama harus berganti nama dengan Dwikora, namun Koran yang berafiliasi kepada pasar tunggal, maka setelah Orde Baru kembali menggunakan nama asalnya. Begitu juga dengan harian Pikiran Rakyat Bandung dan Koran-koran lainnya yang sempat berganti nama, kemudian kembali menggunakan namanya semula.

1. Keberadaan Pers di Kalimantan Selatan

Apa yang menjadi sasaran pemberitaan pers pada tingkat Nasional, maka pers yang terbit di daerah Kalimantan Selatan terutama surat kabar yang lahir bersamaan dengan era Orde Baru

seperti Mimbar Mahasiswa melahirkan sosial kontrol melalui pemberitaan yang serupa dengan pemberitaan nasional namun disesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah. Keberadaan Mimbar Mahasiswa yang selalu memuat berita-berita yang berpihak pada kepentingan rakyat membuat surat kabar ini cepat mendapat simpati masyarakat. Adanya perhatian pada Mimbar Mahasiswa cepat pula mengalami kemajuan yang pesat.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya perjuangan mahasiswa dan eksponen muda lainnya yang disalurkan melalui pers dalam melakukan kritik dan koreksi bersifat terbuka. Kondisi seperti ini telah pula membuat pemerintah ekstra hati-hati dalam memberikan kebebasan pers. Sehingga pada tahun 1970 pemerintah melaksanakan kebijaksanaan yang membatasi gerakan mahasiswa dan meminta agar IPMI kembali ke kampus. Adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan IPMI kembali ke kampus maka muncul lagi pemikiran untuk melepaskan dari keterikatan dengan IPMI. Surat Kabar Mimbar Mahasiswa kemudian dikembangkan menjadi surat kabar yang bersifat umum dan lahir 3 media dengan para pelopor dan pengelolanya terdiri atas orang-orang Mimbar Mahasiswanya, yaitu :

1. Surat Kabar Media Masyarakat dipimpin dan dikelola oleh H. Anang Adenansi, Rustam Effendi Karel, Mas Abi Karsa dan Hadariah Rokh.
2. Surat Kabar Mimbar Masyarakat dipimpin oleh Alwi AS, dan berkedudukan di Samarinda.
3. Majalah "Intan Sari" dipimpin oleh Djok Mentaya, Yustan Azidin, Gusti Effendi AR, Djohar Hamid.

Pada tanggal 2 Agustus 1971 Majalah Intan Sari oleh para pengelolanya diubah namanya menjadi harian Banjarmasin Post. Meskipun berpredikat sebagai surat kabar harian, namun pada tahun pertamanya hanya terbit seminggu sekali. Diantaranya tiga terbitan surat kabar tersebut yang mampu terbit dan berkembang dengan baik hingga sekarang ini adalah Banjarmasin Post. Sosial kontrol yang dilakukan oleh penerbitan pers selain dapat digunakan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, juga sangat bermanfaat dalam menunjang dan mensosialisasikan hasil-hasil pembangunan. Media pers pada masa-masa Orde Baru banyak dimanfaatkan untuk mempublikasikan hasil pembangunan yang dilakukan. Dalam masa pergantian pemerintahan peranan pers selalu menonjol, sehingga pada awal perubahan banyak penerbitan pers bermunculan.

Penerbitan Surat Kabar di Kalimantan Selatan yang resmi beredar sejak tahun 1966 atau merupakan kelanjutan dari Koran sebelumnya sampai 1998 (Pers Orde Baru) dan hingga sekarang era Reformasi adalah sebagai berikut :

a) Banjarmasin Post

Pada tanggal 2 Agustus 1971 harian Banjarmasin menganggap sebagai hari lahirnya dan merupakan penerbitan perdananya. Harian ini pada penerbitan pertamanya tampil dengan ukuran dan oplah hanya 1000 eksemplar.

Semangat dan kerja yang ditunjukkan pengelolanya, Banjarmasin Post kemudian dapat terbit dengan ukuran pleno atau ukuran standard disamping ukuran surat kabar, penerbitannya ditingkatkan menjadi 3 kali seminggu dan akhirnya dapat terbit setiap hari.

Setelah melewati masa-masa kritis dalam penerbitannya, pada tahun 1978 Banjarmasin Post mampu mengadakan sebuah percetakan offset yang bisa mencetak surat kabar berkualitas seperti penerbitan yang ada di Jakarta. Kemudian seiring dengan meningkatnya oplah, maka Banjarmasin Post dapat pula menyediakan mesin web offset untuk penerbitan surat kabar mereka.

Perkembangan dunia pers yang cepat dan semakin maju telah pula dapat diantisipasi dengan baik oleh manajemen Banjarmasin Post, sehingga tahun 1979 berhasil membangun

gedung untuk percetakan dan kantor redaksi yang cukup representatif dalam mengemban tugas jurnalistik modern. Dengan manajemen baru yang dijalankan, Banjarmasin Post mengembangkan sayap penerbitan persnya yaitu berhasil mengelola Tabloid Serambi Ummah dan Bebas serta menambah sebuah harian Metro Banjar. Penerbitan tabloid dan harian baru ini menjadi identitas tersendiri dan merupakan Banjarmasin Post Grup. Peredaran surat kabar ini meliputi wilayah Kalimantan, Jakarta dan Surabaya.

b) Indonesia Merdeka

Surat kabar Indonesia Merdeka sebenarnya telah lama terbit, yaitu sejak tahun 1945 dan sampai sekarang. Surat kabar ini bersifat mingguan dan pada tahun 1980 hingga sekarang pemimpin umumnya adalah Gusti Samsu Hidayat sebagai penerus kepemilikannya.

Pada tahun 1965 mencapai puncaknya yang paling tinggi sebanyak 15.000 eksemplar sekali terbit. Sampai sekarang Indonesia Merdeka tetap terbit mingguan dan wilayah edarnya Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur.

Meskipun surat kabar ini tetap terbit, namun tidak dapat bersaing dan berkembang dengan penerbitan surat kabar yang baru. Dengan kegigihan dan keuletan mempertahankan penerbitannya tersebut, surat kabar ini tahun 1980 mendapat penghargaan dari menteri Penerangan karena mampu bertahan dan lamanya terbit berdasarkan modal sendiri.

c) Media Masyarakat

Surat kabar Media masyarakat yang dipimpinnya oleh Anang Adenansi ini senantiasa mengalami pasang surut dalam penerbitannya. Sejak tahun 1975 selama beberapa tahun terbit harian dan cukup dikenal luas untuk wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Tetapi karena kemerosotan modal harian ini hanya mampu terbit seminggu sekali hingga sekarang ini.

Media Masyarakat memang salah satu surat kabar yang tidak bernasib baik, karena beberapa kali memperbaharui teknis penerbitan dan menerapkan manajemen barunya, namun tidak dapat bertahan lama. Tidak dapat berkembangnya surat kabar ini antara lain karena kekurangan modal.

d) Generasi Muda

Surat kabar Generasi Muda adalah mingguan yang terbit tahun 1969, di Banjarmasin. Dipimpin oleh S.A. Abdis, dibantu Usman Rifani. Pada awalnya mingguan ini mengemban misi untuk menyuarakan aspirasi pemuda dan pelajar. Disebabkan antara pimpinan dan redaksi tidak dapat sepaham dalam mengemban misinya, yaitu antara S.A. Abdis selaku pendiri menghendaki lebih banyak politik yang diliput dalam pemberitaannya, sementara Usman Rifani sebagai redaktur menghendaki agar lebih banyak menyuarakan aspirasi pemuda dan pelajar. Karena perbedaan paham antara pimpinan dan modal penerbitan surat kabar yang kurang akhirnya tidak terbit lagi.

e) Publika

Surat kabar ini adalah mingguan pendiri dan pemimpin umumnya Goembran Sakti. Mingguan ini diterbitkan tahun 1970 dicetak oleh percetakan offset Surabaya dengan harapan mutu cetakan yang baik dapat menarik penambahan modal penerbitan dari luar. Namun karena hanya mengandalkan modal sendiri, mingguan ini hanya mampu bertahan 4 kali terbit dan setelah itu dihentikan penerbitannya.

f) Utama

Penerbitan surat kabar ini bersifat harian diterbitkan tahun 1972 dengan pimpinannya Kapsul Yamin. Harian ini sebenarnya cukup mendapat tempat pada masyarakat, pembacanya dan oplahnyapun mencapai 5000 eksemplar setiap kali terbit. Namun setelah mampu bertahan selama 8 tahun, tepatnya 1978 harian utama tidak dapat terbit lagi karena kekurangan modal.

g) Manikam

Surat kabar Manikam merupakan harian yang diterbitkan tahun 1970 dengan pimpinan umumnya Aliansyah Ludji. Seperti halnya Koran terbitan daerah lainnya harian Manikam ini hanya mampu bertahan 2 tahun. Setelah tidak mampu lagi mengembangkan modal penerbitannya, harian yang terbit 4 halaman ini pun terpaksa ditutup.

h) Palapa

Penerbitan surat kabar Palapa merupakan edisi Kalimantan Selatan dan bersifat harian pimpinan umumnya adalah A. S Musyafa. Surat kabar ini diterbitkan oleh CV Canang Press dan terbit tahun 1966. Namun setelah berjalan selama 7 tahun harian ini juga tidak dapat meneruskan penerbitannya karena kalah bersaing dan kekurangan modal untuk bisa melanjutkannya.

i) Pembaharu

Surat kabar Pembaharu adalah harian dengan penerbit New Adil Offset terbit tahun 1966. dengan segala pasang surutnya surat kabar yang dipimpin Yusril Eanany ini memiliki oplah 2500 eksemplar sekali terbit. Harian Pembaharu merupakan kelanjutan dari harian Mercu Suar yang terbit tahun 1965 karena perubahan politik diganti namanya dengan Pembaharu.

Surat kabar Pembaharu cukup lama bertahan sekitar 19 tahun, namun sejak tahun 1985 tidak terbit lagi dengan berbagai kendala yang dihadapi terutama permodalan.

j) Dinamika Berita

Dinamika berita adalah harian yang diterbitkan oleh PT. Karya Banjar Sejahtera Banjarmasin dan dicetak pada Mini Press Offset. Pemimpin Umum harian Dinamika Berita adalah Djohar Hamid yang penerbitan pertamanya 2 Mei 1986 terbit 8 halaman. Peredaran surat kabar ini meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah dengan oplah 5000 eksemplar sekali terbit.

Harian Dinamika Berita tetap dapat bertahan dan terus membenahi kekurangan yang memungkinkan untuk terus bertahan di tengah persaingan media informasi lainnya. Untuk terus dapat melangsungkan kehidupan surat kabar itu pulalah maka surat kabar ini memperbaharui manajemennya dan mengganti namanya dengan Kalimantan Post.

k) KalimantanPost

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, harian Kalimantan Post merupakan kelanjutan dari Dinamika Berita. Pemimpin umum Kalimantan Post sekarang ini adalah H. Taufik Effendi, S.E.,MBA dan penerbitnya PT Karya Banjar Sejahtera.

Kalimantan Post terbit 12 halaman beredar di Kalimantan Selatan dan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat serta mempunyai perwakilan Surabaya dan Jakarta dengan oplah 6000 eksemplar.

l) Gawi Manuntung

Harian Gawi Manuntung diterbitkan oleh PT. New Lambang dan sebagai pemimpinnya adalah M. Ali Sri Indrajaya. Surat kabar ini terbit sejak tahun 1972, karena tidak ditunjang modal yang besar, maka terbit 2 kali seminggu hari Selasa dan Jumat. Sejak dihentikannya Koran Masuk Desa Surat Kabar Gawi Manuntung tidak bisa tepat lagi penerbitannya.

m) Dinamika

Surat kabar Dinamika diterbitkan oleh Yayasan Sapta Karya dan sebagai pemimpin umumnya adalah A. Shafrawi Hakim. Dinamika terbit mingguan di mulai sejak 24 Juni 1970, namun setelah beberapa tahun bertahan akhirnya terhenti juga. Penyebab utamanya selain permodalan juga tidak didukung manajemen yang kuat.

n) Serambi Ummah

Surat kabar ini berbentuk tabloid terbit 16 halaman diterbitkan oleh PT Cahaya Media Aditama sejak tahun 1999. Tabloid ini bernaung di bawah bendera Banjarmasin Post Grup yang pada awalnya merupakan penerbitan suplemen dari Banjarmasin Post yang akhirnya mampu menjadi penerbitan tersendiri dengan pemimpin umumnya adalah Drs. H. M. Hoesni Thamrin.

o) Bebas

Surat kabar yang merupakan anak perusahaan dari Banjarmasin Post Grup ini berbentuk tabloid terbit 16 halaman. Tabloid ini pertama terbit tanggal 19 Mei 1999 dengan Pemimpin Umumnya H. Gt. Rusdi Effendi AR.

p) Metro Banjar

Penerbitan Metro Banjar oleh Banjarmasin Post Grup dengan PT. Media Cahya Media Aditama terbit sejak tahun 1999 dan terus berkembang hingga sekarang. Metro Banjar adalah harian yang berita-beritanya banyak mengungkap kriminalitas pada halaman pertamanya. Terbit 12 halaman sejak tahun 1999 hingga sekarang terus mengembangkan gaya berita dan penampilan banyak memuat foto-foto sebagai penunjang berita yang diturunkannya.

q) Barito Post

Surat kabar ini diterbitkan oleh PT Bahtera Grafika Pers dengan Pemimpin Umumnya H. Guntur Prawira, SE. Barito Post adalah surat kabar harian terbit 12 halaman sejak tahun 1988 dan hingga sekarang.

r) Radar Banjar

Radar Banjar adalah surat kabar harian yang sebelumnya merupakan bagian dari Jawa Pos sebuah surat kabar yang terbit di Surabaya. Sejak tahun 2001 terbit berdiri sendiri sebagai surat kabar harian yang beredar di Kalimantan Selatan dan dicetak pada PT. Duta Banjar. Sebagai Direktur utamanya adalah H. Zainal Muttaqien dan pemimpin Redaksi Erwin Dede serta Kepala Biro Banjarmasin H. Asmuni. Harian Radar Banjar ini setiap hari terbit 16 dan merupakan grup penerbitan surat kabar Jawa Pos.

2. Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru

Pada dasarnya dalam sebuah negara kemungkinan untuk mencapai kemajuan atau sebaliknya suatu ketika mengalami kemunduran dan bahkan kehancuran bisa saja terjadi. Begitu juga yang dialami pemerintahan negara Indonesia ketika masa Orde Lama beralih ke Orde Baru dan kemudian masuk jaman reformasi telah banyak pengalaman yang dialami dan

dirasakan. Muara dari mengapa terjadi peralihan tersebut hampir sama, yaitu munculnya ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah yang berkuasa.

Kehadiran Orde Baru pada awalnya mendapat perhatian yang positif dari masyarakat. Setelah Tritura secara relatif dapat dipenuhi dan pembangunan bisa dilaksanakan tahap demi tahap, rakyat merasakan ada ketenangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Namun bersamaan dengan pesatnya pembangunan telah menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Dalam bidang pemerintahan yang sebelumnya diyakini berjalan dengan baik lama kelamaan mulai terungkap adanya kebobrokan para pelaksananya yang lazim disebut KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang dituduhkan melekat hampir pada setiap komponen pemerintah. Hanya saja karena kuatnya pemerintahan Orde Baru dan untuk mengikis habis kasus KKN tidaklah mudah karena harus disertai bukti yang kuat. Penghancuran Orde Baru lebih banyak dilakukan dengan opini yang dilansir media massa.

Menandai jatuhnya pemerintahan Orde Baru diawali oleh adanya krisis moneter yang berakibat pada merosotnya nilai rupiah terhadap mata uang dolar. Keadaan ini diperburuk pula ketika menjelang Pemilu 1997 dimana-mana terjadi kekacauan. Di Jakarta banyak kerusuhan yang bernuansa politik hingga suasana di daerah-daerah terbawa arus yang mencekam. Kerusuhan terjadi Ciputat, Kebayoran Lama, Tangerang, Bekasi, Bangil dan Banjarmasin.¹⁰

Kerusuhan di Banjarmasin terjadi pada tanggal 23 Mei 1997 yang dikenal sebagai Tragedi Jumat Kelabu, karena menimbulkan ratusan jiwa manusia, harta benda serta bangunan gedung dan perumahan telah dibakar habis oleh amukan massa yang sedang kalap.

Kejadian yang sama sekali tidak pernah ada yang menduga tersebut bermula dengan kampanye putaran terakhir bagi partai Golkar yang jatuh pada hari Jum'at. Menurut rencana kegiatan kampanye Partai Golkar di Banjarmasin dilaksanakan besar-besaran dan dihadiri Menteri Sekretaris Kabinet Drs. H. Sya'dillah Mursyid, MPA dan K.H. Hassan Basri, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

Kerusuhan berawal ketika massa Golkar berpawai menuju tempat kampanye di Lapangan di Jalan Kamboja melewati jalan di depan Masjid Noor yang biasa ditutup karena digunakan oleh sebagian jemaah sholat yang berada di luar Masjid. Raungan suara sepeda motor yang melintasi jalan di saat jemaah belum selesai melaksanakan shalat Jumat memicu kemarahan warga. Warga yang merasa dilecehkan serta merta menyerbu dan mengejar yang berpawai, membubarkan mereka yang berkumpul di lapangan Kamboja dan membakar atribut Golkar. Peserta kampanye ---tidak peduli laki-laki atau perempuan---yang mengenakan baju atau kaos kuning, dipaksa melepaskan pakaiannya dibawah ancaman senjata tajam, seperti clurit, golok dan sebagainya.

Setelah memporak-porandakan peserta kampanye, massa yang brutal dan tak terkendalai mengalihkan sasarannya kepada bangunan kantor, rumah ibadah, toko, tempat hiburan, hotel dan sebagainya. Mereka melempari kaca-kaca, membakar mobil dan bangunan serta menjarah isi toko dan supermarket. Kejadian berlangsung dari pukul 13.00 sampai dengan pukul 20.00 wita, dan selama itu pihak keamanan seakan tak berdaya.

Kerusuhan Jumat Kelabu itu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Kerugian dari segi harta benda tercatat : mobil (21 terbakar, 12 rusak), sepeda motor (60 terbakar, 4 rusak), kantor, instansi pemerintah, bank 12 terbakar/rusak, pertokoan dan tempat hiburan 10 terbakar/rusak, tempat ibadah 5 terbakar/rusak, dan bebertapa sekolah, panti jombo serta

¹⁰ Kompas, 24 Mei 1997.

rumah penduduk terbakar, sehingga sekitar 400 kepala keluarga kehilangan tempat berteduh dan sekitar 4.000 karyawan kehilangan pekerjaan. Disamping itu, korban jiwa juga tidak sedikit. Tercatat yang meninggal (135 orang), hilang (164 orang), luka-luka (lebih 100 orang). Belum termasuk mereka yang ditahan sebanyak 304 orang untuk menunggu proses selanjutnya.¹¹ Banyaknya selisih antara jumlah korban yang meninggal atau korban yang dilaporkan hilang itu terjadi karena korban yang meninggal sebagian besar tidak dapat lagi dikenali karena hangus terbakar.¹²

Peristiwa 23 Mei 1997 ini sangat menggores perasaan masyarakat Kalimantan Selatan, karena sepanjang pemerintahan Orde Baru tidak pernah terjadi unjuk rasa yang anarkis apalagi sampai meminta korban jiwa manusia. Kejadian ini semakin melemahkan posisi pemerintahan Orde Baru, karena di beberapa daerah yang selama ini dinilai aman ternyata mengalami kejadian yang luar biasa. Musuh-musuh Orde Baru menjadikan peristiwa semacam kerusuhan 23 Mei ini sebagai reaksi ketidakadilan yang dirasakan masyarakat selama ini. Kasus ini sampai sekarang tidak terungkap dengan jelas siapa pelaku yang bertanggung jawab.

Gejolak-gejolak yang terjadi di Ibu kota Jakarta menjelang kejatuhan pemerintahan Orde Baru diikuti dengan seksama oleh daerah-daerah termasuk Kalimantan Selatan. Spanduk-spanduk yang terbentang di jalanan dan depan Kampus Unlam mendukung gerakan yang dilancarkan komponen mahasiswa Jakarta agar Presiden RI Jenderal Soeharto mengundurkan diri, karena dinilai sudah tidak layak lagi memimpin bangsa Indonesia yang sedang dilanda berbagai krisis.

Besarnya tekanan para demonstran, merebaknya kerusuhan, dan terbentuknya opini yang diciptakan pers yang sangat menyudutkan pemerintah Orde Baru, mengakibatkan Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998, dan sejak itu tumbanglah Pemerintahan Orde Baru.

Soeharto pun "lengser ke prabon, mandeg pandito", dan bermulalah era Reformasi.

Setelah Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 menyatakan secara resmi mengundurkan diri sebagai Presiden RI maka di daerah-daerah mulai bergolak melancarkan tuntutan reformasi. Tuduhan-tuduhan KKN mulai dilancarkan kepada para pejabat di daerah seperti juga yang dilakukan di tingkat Nasional. Sasaran utama yang digugat adalah dugaan-dugaan KKN yang dilakukan pejabat-pejabat antara lain Gubernur dan Sekretaris Daerah.

Tuntutan reformasi terus bergulir beberapa dugaan KKN diungkap dengan gamblang dan terbuka sebagai ciri dari perjuangan gerakan reformasi. Keinginan untuk menjatuhkan pejabat publik yang sedang menjabat senantiasa dilancarkan melalui unjuk rasa dan pengungkapan data yang diduga dilakukan dengan KKN.

Tuduhan KKN yang ditujukan kepada para pejabat publik tersebut tidak dapat dibuktikan, sehingga di Kalimantan Selatan saat reformasi digulirkan belum ada yang sampai ke pengadilan. Hanya saja dari berbagai desakan yang terjadi nampaknya harus ada korban sebagai obat penenang masyarakat pengunjuk rasa. Dalam suasana hiruk pikuk dengan unjuk rasa dan tuduhan-tuduhan tersebut Sekretaris Daerah yang dijabat Drs. H. Ardansyah Fama mutasi ke dalam Departemen Dalam Negeri Jakarta. Sekarang kasus KKN yang dituduhkan kepada Drs. H. Ardansyah Fama oleh Kejaksaan Tinggi Kalsel dinyatakan tidak terbukti dan selanjutnya kasusnya ditutup.

¹¹ Mutiara, No. 867, 3 –6 Juni 1997; Banjarmasin Post, 26 Mei 1997.

¹² Jawa Pos 28 Mei 1997; Kompas 31 Mei 1997.

Gerakan reformasi yang terjadi di Kalimantan Selatan tidak sampai mengalami pergantian kepemimpinan di daerah. Hanya saja untuk menjadi Gubernur atau Bupati kedua kalinya atau dua periode sangat sulit karena perubahan politik. Demikian pula halnya dengan anggota ABRI yang menempati Jabatan Bupati atau Walikota semakin berkurang dan sulit bisa diangkat kembali, berbeda dengan jaman Orde Baru berkuasa.

DAFTAR SUMBER

I. Buku, Disertasi, Tesis, Skripsi, Artikel, Manuskrip dan Sumber-sumber tertulis lainnya.

- Abbas, Hamzah et al., "Pemikiran-pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary di Bidang Syariah", Makalah pada Seminar Sehari Pemikiran-pemikiran Keagamaan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary, IAIN Antasari Banjarmasin, 17 November 1988.
- Abbas, Siradjuddin, *I'tiqad Ahlussunah Wal Jamaah*, Pustaka Tarbiyah, Jakarta, 1984.
- Abdullah, Hawash, *Perkembangan Ilmu Tasawuf dan Tokoh-tokohnya di Nusantara*, Al Ikhlas, Surabaya, 1980.
- Abdul Karim Al-Aql, Nashir, *Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlussunah Wal Jamaah*, Gema Insani Press, Jakarta, 1992.
- Abdullah, Muhammad Shagir, *Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary Matahari Islam*, Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islamiyah, Al Fatanah, Kuala Mempawah, 1983.
- Abdurrahman, "Hubungan antara Kerajaan Pagatan dengan Kerajaan Banjar : Sebuah Tinjauan dari Sejarah Hukum dan Hukum Adat", Majalah *Kalimantan Scientiae*, Universitas Lambung Mangkurat no.17 th. VII, 1988.
- Abdurrahman, "Undang-undang Sultan Adam dan Kedudukannya dalam Hukum Adat Banjar", dalam Majalah *Orientasi* No. 2 Tahun II, Fakultas Hukum Unlam, Banjarmasin, 1977.
- Abdurrahman, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam Dalam Masyarakat Banjar", dalam Majalah *Kalimantan Scientiae*, Universitas Lambung Mangkurat No. 18 Tahun VIII, Banjarmasin, 1989.
- Abdurrahman, "Studi Tentang Undang-Undang Sultan Adam 1835: Suatu Tinjauan Tentang Perkembangan Hukum Dalam Masyarakat dan Kerajaan Banjar pada Pertengahan Abad ke-19", Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Banjarmasin, 1989.
- Al-Aql, Nashir Abdul Karim, *Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlussunah wal Jamaah*, Gema Insani Press, Jakarta, 1992.
- Al Alabij, Adijani, "Interaksi Antara Hukum Islam dengan Hukum Adat di Kalimantan Selatan", Makalah pada Seminar Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Kalimantan Selatan, Fakultas Hukum Unlam, Banjarmasin, 1989.
- Ambary, Hasan Muarif, "Catatan Tentang Masuk dan Berkembangnya Islam di Kalimantan Selatan", Prasaran Seminar Sejarah Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1976.
- Amirmahmud, *Prajurit – Pejoang*, Panitia Penerbit Otobiografi H. Amirmahmud, PT. Roda Karya Offset, Jakarta, 1987.
- Anderson, B. *Revolusi Pemoeda*, (Penerjemah Iman Romboy), Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
- Anis M.Z. Arifin, "Banjarmasih Sebagai Bandar Perdagangan Pada Abad XVII", dalam *Jurnal Vidya Karya* Nomor 2, Oktober 2000, Banjarmasin.
- Anis, M.Z. Arifin, "Struktur Birokrasi dan Sirkulasi Elite di Kerajaan Banjar pada Abad XIX", Tesis Fakultas Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1994.

- Antemas, Anggraini, *Orang-orang Terkemuka Dalam Sejarah Kalimantan*, B.P. Anggraini Features-Percetakan Karya, Banjarmasin, 1971.
- Antemas, Anggraini, *Terompet Rakyat Suara Perjuangan*, Banjarmasin Post, tanggal 2 Februari 1981.
- Antemas, Anggraini, *Terompet Rakyat Surat Kabar Perjuangan*, Banjarmasin Post, tanggal 2 Januari 1981.
- Arsip Nasional, *Surat-Surat Perjanjian antara Kesultanan Bandjarmasin, dengan Pemerintahan VOC, Bataafse Republik, Inggeris dan Hindia Belanda 1835-1860*, Jakarta, 1965.
- Artha, Arthum, *Album Pembangunan Kalimantan*, Yayasan Pendidikan Seni Budiman, Banjarmasin, 1975.
- Artha, Arthum "Mencapai Usia Lanjut 75 Tahun", Otobiografi, Banjarmasin, 1995.
- Artha, Arthum, *Wartawan-Wartawan Masuk Penjara di Kamp.Belanda*, Banjarmasin Post, 19 Maret 1981.
- Asnawi, Amat et al., *Sejarah Perjuangan Rakyat Menegakkan Kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan (Periode 1945-1949)*, Pemda Tk. I Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1994.
- Atmosudirdjo, Prajudi, *Sejarah Ekonomi Indonesia Dari Segi Sosiologi Sampai Akhir Abad XIX*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Basry, Hassan, *Kisah Gerilya Kalimantan (Dalam Revolusi Indonesia 1945 – 1949)*, Jilid Pertama, Yayasan Lektur Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 1961.
- Basry, Hassan, "*Kisah Gerilya Kalimantan*", Jilid II, Banjarmasin, tt, th.
- Basuni, Ahmad, "Usaha Menggali Sejarah Masuknya Islam di Kalimantan Selatan", Prasaran Seminar Sejarah Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1976.
- Blasse, Cyril, *Ensiklopedi Islam Ringkas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Bondan, Amir Hasan Kiai, *Suluh Sedjarah Kalimantan*, Fadjar, Banjarmasin, 1953.
- Budhigawis, A. Hamdi, "Menelusuri Jejak-Jejak Revolusi di Kalimantan Selatan", Banjarmasin, 1989.
- Cahyono, Hari et al., *Ensiklopedi Politik*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982.
- Cense, Anton Abraham, *De Kroniek van Bandjarmasin*, Proefschrift C.A. Mees Antpoort, Amsterdam, 1928.
- Churchill, Winston S., *The Second World War*, Cassel & Co. Ltd. London.Toronto, Melbourne. Sydney. Wellington, 1949.
- Commisie Voor Het Adatrecht, *Adatrechtbundels Deel XIII*, Borneo's Gravenhage Martinus Nijhoff, 1917.
- Cribb, Robert Brison, *Gejolak Revolusi di Jakarta* (Penerjemah Hasan Basri), Grafiti Pers, Jakarta, 1990.

- Daeng, Hans. J., *Manusia Kebudayaan dan Lingkungan*, Pustaka Jaya, Yogyakarta, 2000.
- Danussaputera, "Kalimantan Terbakar oleh Semburan Bara Api Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan (Ekspedisi Terakhir)," Banjarbaru, 1985.
- Daud, Alfani, "Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar", Disertasi Doktor IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1990.
- Daudi, Abu, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al Banjari (Tuan Guru Besar)*, Sekretariat Madrasah Sullamul Ulum, Dalam Pagar Martapura, 1980.
- Darmansyah, "Bahasa Banjar dan Bahasa Maanyan", Makalah pada Diskusi Panel Bahasa Banjar, FKIP Unlam, Banjarmasin, 24 Oktober 1992.
- Data Organisasi Sosial dan Politik*, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 2002.
- De Vries, J.J., *Jaarboek Van Batavia*, G.Kolff & Co, Batavia, 1927.
- Depdikbud, "Hikayat Banjar", Seri Penerbitan Museum Negeri Lambung Mangkurat, Banjarbaru, 1981.
- Depdikbud, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Banjarmasin, 1977/1978.
- Dijk, C. Van, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, Grafiti Pers, Jakarta, 1983.
- Dijk, L.C.D Van, *Neerlands Vroegste Betrekkingen met Borneo en Solo Archipel, Cambodja, Siam en Cochinchina*, Amsterdam, 1862.
- Dirman, *Perundang-Undangan Agraria Di Seluruh Indonesia*, J.B. Wolter, Djakarta, 1958.
- Djamhari, Saleh As'ad, *Ichtiisar Sedjarah Perjuangan ABRI (1945-Sekarang)*, Pusat Sedjarah ABRI Dephankam, Djakarta, 1971.
- Durasit, Durdje, "Bahasa Banjar dan Bahasa Dayak Ngaju", Makalah pada Diskusi Panel Bahasa Banjar, FKIP Unlam, Banjarmasin, 24 Oktober 1992.
- Dwi Windu IAIN (*Institut Agama Islam Negeri*) *Antasari 1964 – 1980*, IAIN Antasari, Banjarmasin, 1980.
- Eisenberger, J., *Kroniek der Zuider en Oosterafdeeling van Borneo*, Lim Hwat Sing, Banjarmasin, 1936.
- Ensiklopedi Indonesia*, 4 Kom- Ozo, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1983.
- Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*, Yayasan Ciptaloka Caraka, Jakarta.
- Fauzi, Muhasin, "Pemberontakan 9 November 1945", Skripsi Sarjana Pendidikan Sejarah FKIP Unlam, Banjarmasin, 1981.
- W.H. Frederick, *Pandangan dan Gejolak : Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946)*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989.

- Gafuri, Ahmad, *Sejarah Perjuangan Gerilya Menegakkan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan (1945-1949)*, Departemen Penerangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kandangan, 1984.
- Geertz, Clifford, *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, Bharatara Karya Aksara, Jakarta, 1983.
- Gids, *De Bandjarmasinsche: Oorlog tot de Indische Kijgeschedenis*, 1866, hal. 278, terjemahan Tunjung, "Perang Banjarmasin".
- Halidi, Yusuf, *Ulama Besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsyal Al Banjari*, Al Ihsan Surabaya, 1984.
- Hamka, "Masuknya Islam ke Kalimantan Selatan", Makalah pada Seminar Sejarah Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1976.
- Hammy A.M., M., Catatan tanpa judul, Banjarmasin, 1974.
- Heufen Sy, dkk, *Ensiklopedi Populer Politik Perkembangan Pancasila*, Yayasan Kitroloka Caraka, Jakarta, 1988.
- Hooykaas, P.M., *Gedenkboek Ter Gelegenheid Van Het 15-Jarig Bestaan Van De Gemeente Bandjermasin 1919-1934*, Gemeente Bandjermasin, 1934.
- Hudson, A.B., "The Paju Epat Maanyan Dayak in Historical Perspective", dalam *Indonesia*, 4 Oktober 1967, Cornell University, Ithaca, 1967.
- Hudson, A.B., *Padju Epat, The Ethnography and Social Structure of a Maanyan Dayak Group in South Eastern Borneo*, 1967.
- IAIN Antasari, "Laporan Hasil Seminar Sehari Pemikiran-Pemikiran Keagamaan Syekh Muhammad Arsyad al Banjari", Banjarmasin, 1989.
- IBPK, "Sejarah Ringkas Perjuangan Ex Pelajar Pejuang Kemerdekaan RI di Kalimantan", Tanpa Tahun.
- Ideham, M. Suriansyah, "Beberapa Fragmen Keikutsertaan Pemuda dan Pelajar Kalimantan Selatan Dalam Perjuangan Merebut Kemerdekaan", Banjarmasin, tt, th.
- Ideham, M. Suriansyah, "Tata Pemerintahan Hindia Belanda", Banjarmasin, tt..
- Ideham, M. Suriansyah, "Politik Pertanahan Kolonial", Banjarmasin, tt.
- Ideham, M. Suriansyah, "Sistem Pendidikan di Zaman Hindia Belanda", Banjarmasin, tt.
- Iskandar, Mohammad et al., *Peranan Elit Agama Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional Depdiknas*, Jakarta, 2000.
- Ismail, Zamzulis, *Ekspedisi – Ekspedisi Lintas Laut ALRI ke Kalimantan*, Dinas Sejarah TNI AL, Jakarta, 1980.
- Jawatan Penerangan, *Keresiden Borneo Selatan*, Susunan Tata Negara.
- Jones, Howard Palfrey, *Indonesia The Possible Dream*, Published Under the Auspices of the Hoover Institution, Printed by : MAS AJU (Singapore) PTE.LTD, Singapore, 1973.

- Justian, Dhani, "Sejarah Singkat Lahirnya Komando Daerah Militer X Lambung Mangkurat", Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, Banjarmasin, 1972.
- Kahin, Audrey R., *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*, Grafiti Pers, Jakarta, 1990.
- Kahin, George Mc Turnan, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca, 1952.
- Kalimantan Selatan, 1963 – 1968*, Tim Penyusunan Buku Pemda Tk. I Kalsel. Banjarmasin, 1968.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Depdiknas, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Kartodirdjo, Sartono, "Historiografi Tradisional, Modern, Fungsi dan Strukturnya", dalam *Makalah Simposium Internasional Ilmu Humaniora I*, Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993.
- Kartodirdjo, Sartono et al., *Sejarah Nasional Indonesia II*, Balai Pustaka, Jakarta, 1975.
- Kartodirdjo, Sartono et al., *Sejarah Nasional Indonesia III*, Balai Pustaka, Jakarta, 1975.
- Kawi, Djantera, "Kata Kognat Banjar- Jawa Kuno", Makalah pada Diskusi Panel Bahasa Banjar, FKIP Unlam, Banjarmasin, 24 Oktober 1992.
- Kementerian Penerangan RI, *Kalimantan dan Pergolakan*, Jakarta, 1950.
- Kementerian Penerangan RI, *Kepartaian di Indonesia*, Pepora 8.
- Khalidi, Yusuf, *Ulama Besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad al Banjari*, Al Ihsan, Surabaya, 1972.
- Kielstra, E.B., *De Ondergang v/h Banjarmasinsche Rijk*, Indische Gids, 1892.
- Kodam X/LM, *Kodam X/LM Membangun*, Percetakan Negara, Jakarta, 1962.
- Kodam X / Lam, "Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Selatan Menegakkan Kemerdekaan RI 1945 – 1949", *Kodam X / Lam*, Banjarmasin, 1982.
- Kodam X/Lam, "Sedjarah Singkat Kodam X/Lam wadja Sampai Kaputing", Banjarmasin, 1970.
- Koroh, Alex A. et al., "Mengenal Pertumbuhan dan Perkembangan Nasionalisme di Kalimantan Selatan Selama Tiga Dasawarsa 1912 – 1942", Laporan Penelitian, FKIP Unlam, Banjarmasin, 1994.
- Koroh, Alex A., "Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Kalimantan Selatan (1901 – 1956) : Tinjauan Aspek Struktural Serta Semangat Yang Dibawakannya", Laporan Penelitian FKIP Unlam, Banjarmasin, 1988.
- Kusmartono, Vida Pervaya Rusianti, "Pemerintahan Early State Negara Dipa di Kalimantan bagian Tenggara", Makalah dalam *Pertemuan Ilmiah Arkeologi IX dan Kongres IAAI 2002 di Kediri, 23-27 Juli 2002*.
- Le Rutte, J.M.C.E., *De Expeditie naar Montalat*, A.W. Sythoff, Leiden, 1863.

- Lindblad, J. Thomas, *Between Dayak and Dutch: The Economic History of Southeast Kalimantan 1880-1942*, Foris Publications, KITLV Leiden, 1988.
- Lucas, Anton E., *Peristiwa Tiga Daerah Revolusi Dalam Revolusi* (Terjemahan Pustaka Utama Grafiti). Grafiti Pers, Jakarta, 1989.
- LVRI Cabang Kotabaru, "Rakyat Kabupaten Kotabaru Mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945", Kotabaru, 1982.
- LVRI Cabang Marabahan, "Sejarah Perjuangan Rakyat Marabahan dan Sekitar tanggal 5 Desember 1945", Marabahan.
- LVRI Cabang Pagatan, "Riwayat Ringkas Perjuangan Rakyat Pagatan dan Sekitarnya Dalam Mempertahankan Proklamasi RI (1945 – 1949)", Pagatan , 1987.
- LVRI Cabang Tapin "Catatan Revolusi Fisik di Tapin", Rantau, tt, th.
- MacKinnon et al., *The Ecology of Kalimantan Indonesia Borneo. The Ecology of Indonesia Series Volume II*. Periplus Edition, Singapore, 1996.
- Mahlan AN et al., "Pemikiran-pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary di Bidang Da'wah Islamiah", Makalah pada Seminar Sehari Pemikiran-pemikiran Keagamaan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary, IAIN Antasari Banjarmasin, 17 November 1988.
- Mallinckrodt, J., *Het Adatrecht van Borneo*, 2 vols, Dubbeldeman, Leiden, 1928.
- Manihuruk, A.E., *Mengenang Alm. Brigjend TNI (Purn) H. Hassan Basry, Bapak Gerilya Kalimantan*, DPD AMPI, 1984.
- Mansyur, M. Laily, *Kitab Ad-Durun Nafis: Tinjauan Atas Suatu Ajaran Tasawuf*, Hasanu, Banjarmasin, 1982.
- Mayur, Gusti, *Hikayat Lambung Mangkurat*, CV. Rapi, Banjarmasin, 1981.
- Mayur, H.G, *Perang Banjar*, CV Rapi, Banjarmasin, 1979.
- MBAD RI, *Perjuangan Rakyat Kalimantan Selatan Dalam Perang Kemerdekaan (1945 – 1949)*, Jakarta, 1982.
- Meijer, J.J., *Voor Veertib Jaren te Bandjermasin, Iets Over Panembahan Moeda, Sultan Kuning en Goesti Kassin, Figuren Uit Den Bandjermasinen Opstand 1859*, I.G. 21 JRG; I.E, 1899.
- Memori Pelaksanaan Tugas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan*, Pemda Tk. I Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1980.
- Monografi Kalimantan Selatan*, Bappeda Propinsi Dati I Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1989.
- Monumen Sejarah Proklamasi 17 Mei 1949 Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan*, Kanwil Depdikbud Kalsel, Banjarmasin, 1986.
- Muis, Gusti Abdul, "Masuk dan Tersebar Islam di Kalimantan Selatan", Makalah pada Pra Seminar Sejarah Kalimantan, Banjarmasin, 1973.
- Muis, Gusti Abdul, "Tasawuf Sunni", Makalah Seminar Pengajian Tasawuf di Kalimantan, Banjarmasin, 1985.

- Mustafa, "Pengantar Kesejarah Perjuangan Pers di Kalsel 1945-1949," Banjarmasin
- Nagazumi, Akira, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1989.
- Nasruddin, "Ekskavasi Situs Jambu Hilir Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan", Laporan Penelitian Arkeologi Banjarmasin, 1996/1997.
- Nastiti, Titi Surti, "Analisis Hasil Penelitian Arkeologi IV", dalam *Metallurgi dalam Arkeologi*, Depdikbud, Jakarta, 1991.
- Nawawi, Ramli, "Dewan Banjar", Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, Banjarmasin, 1972.
- Ramli Nawawi et al., *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Kalimantan Selatan*, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, Banjarmasin, 1991.
- Nawawi, Ramli, *Sejarah Perlawanan terhadap Kolonialisme di Kalimantan Selatan*, Depdikbud, Banjarmasin, 1981.
- Nawawi, Ramli ed., *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*, Bagian Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai Budaya Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1992.
- Nawawi, Ramli, "Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, Penyebar Ajaran Ahlussunah wal Jamaah Pada Abad ke- 18", Skripsi Sarjana Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, Banjarmasin, 1977.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, LP3ES, Jakarta.
- Notosusanto, Nugroho (ed), *Pejuang dan Prajurit*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Notosusanto, Nugroho (ed), *Tercapainya Konsensus Nasional 1960-1969*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985.
- Noor, Yusliani, "Peranan Sektor 0 ½ 17 MD Perjuangan ALRI Divisi IV (A) Pertahan Kalimantan Dalam Perjuangan Gerilya di Tapin Kalimantan Selatan, Skripsi Sarjana Pendidikan Sejarah FKIP Unlam, Banjarmasin, 1989.
- Noorlander, J.C., *Banjarmasin en de Compagnie in de Tweede Helft der 18 de Eeuw*, N. Dubbeldeman, Leiden, 1935.
- Onghokham, "Revolusi Indonesia : Mitos dan Realitas", dalam *Prisma* No. 8, 1985, hal. 5.
- Pemda Tk.I Kalsel, *Sejarah Perjuangan Rakyat Menegakkan Kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan (Periode 1945-1949)*, Banjarmasin, 1990.
- Pemerintah Kab Dati II Kotabaru, *Seperampat Abad Dati II Kotabaru*, Kotabaru, 1975.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Balai Pustaka, Jakarta 1993.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Balai Pustaka, Jakarta, 1975.

- Pong, Goh Yoon, *Trade and Politics in Bandjermasin 1700-1747*, Disertation University of London, 1969.
- Praptodihardjo, Singgih, *Sendi-Sendi Hukum Tanah di Indonesia*, Jajasan Pembangunan, Jakarta, 1953.
- Putera, Heddy Shri Ahimsa, *Struktualisme Levi- Strauss*, Galang Press, Yogyakarta, 2001.
- Ras, Johannes Jacobus, *Hikayat Banjar: a Study in Malay Historiography*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1968.
- Rees, W.A.Van, *De Bandjarmasinsche Krijg van 1859-1863*, Thieme, Arnhem, 1865.
- Riphagen, J., *Aturan Pemerintahan-Pemerintahan Hindia Belanda*, Balai Pustaka, Weltepreden, 1927.
- Riwut, Cilik, *Kalimantan Membangun*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1993.
- Riwut, Tjilik, *Kalimantan Membangun*, PT. Jayakarta Agung Offset, Jakarta, 1979.
- Rozy, Fachrur, "Kerusuhan 23 Mei di Banjarmasin: Mengapa Pecah?", Banjarmasin, 1997.
- Ruslan, Syarkawi, "Perkembangan Reformasi Islam di Kalimantan Selatan Serta Pengaruhnya Dalam Lapangan Agama, Sosial dan Pendidikan Dari Tahun 1914 Sampai 1942", Skripsi Sarjana Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, Banjarmasin, 1975.
- Ruslan, Syarkawi, "Sejarah Singkat PBI/Parindra dalam Pergerakan di Kalimantan Selatan", Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, Banjarmasin, 1970.
- Ruslan, Tamny, "Gerakan Muning: Gerakan Sosial di Dalam Perang Banjar", Tesis pada Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1981.
- Sjahrazad, *Renungan Indonesia*, Tjetakan kedua, Penerbit Kebangsaan Pustaka Rakjat N.V.Djakarta, 951.
- Saifuddin, Achmad Fedyani, *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham Dalam Agama Islam*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Saleh, M. Idwar, "Agrarian Radicalism and Movement of Insurrection in South Kalimantan", Archipel 9, 1970.
- Saleh, M. Idwar, "ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan: Lukisan tentang Pertumbuhan, Perkembangan dan Kemundurannya", FKIP Unlam, Banjarmasin, 1988.
- Saleh, M. Idwar, *Banjarmasih*, Museum Negeri Lambung Mangkurat Propinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, 1981/1982.
- Saleh, M. Idwar, *Banjarmasin*, Museum Negeri Lambung Mangkurat, Banjarbaru, 1982.
- Saleh, M. Idwar, *Banjarmasin, Selayang Pandang Mengenai Bangkitnya Kerajaan Banjarmasin, Posisi, Fungsi dan Artinya Dalam Sejarah Indonesia Dalam Abad ke- 17*, Balai Pendidikan Guru, Bandung, 1958.
- Saleh, M. Idwar, *Nasionalisme dan Perjuangan Kemerdekaan di Kalsel*, dalam Majalah Vidya Karya, No. 2 tahun 1970.

- Saleh, M. Idwar, "Pangeran Antasari dan Gerakan Muning", dalam *Kalimantan Scientiae*, No. 17 Th. VII, Januari 1988.
- Saleh, M. Idwar, "Perang Banjar 1859-1865", Makalah Museum Negeri Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 1991.
- Saleh, M. Idwar, "Pepper Trade and The Rulling Class of Banjarmasin in the Seventeenth Century", Makalah pada Seminar Dutch – Indonesian Historical Conference, Leiden, 1978
- Saleh, M. Idwar et al., *Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional (1900-1942) di Kalimantan Selatan*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depdikbud, Banjarmasin, 1978/1979.
- Saleh, M. Idwar, et al., *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, Proyek Penelitian Pencatatan Kebudayaan Daerah (P3KD) Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1978/1979.
- Saleh, M. Idwar, *Sekilas Mengenai Daerah Banjar dan Kebudayaan Sungainya Sampai Akhir Abad IX*, Proyek Pengembangan Permuseuman Kalimantan Selatan Depdikbud, Banjarmasin, 1983/1984.
- Saleh, M. Idwar, "Some Notes on the Banjerese Royal Apanase and its Abolition in 1863", Makalah pada Seminar Sejarah di Kuala Lumpur - Malaysia.
- Schwaner, C.A.L.M., *Borneo*, Deel I, Amsterdam, 1853.
- Schrieke, B.O., *Indonesian Sociological Studies* Part Two, N.V. Mijvarking van Hocke, Bandung, 1957.
- Schrieke, B.O., *Indonesian Archipelago*, Part One, The Hague, 1955.
- Sekretariat DPR-GR, *Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia*, Jakarta, 1970.
- Sekretariat Negara RI, *Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia – Latar Belakang. Aksi dan Peranannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Sekretariat Negara, *Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka*, PT. Dainippon Gita Karya Printing, Jakarta, 1981.
- Selayang Pandang Kalimantan Selatan*, Pemda Tk. I Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1985.
- Semah, A.M., *Pleistocene and Holocene Environmental Changes, Indonesia Heritage: Ancient History*, Buku Antar Bangsa for Grolier Internasional Inc, Jakarta, 1996.
- Seman, Syamsiar, *Hassan Basry Bapak Gerilya Kalimantan: Mendapat Anugerah Gelar dari Presiden Republik Indonesia sebagai Pahlawan Nasional*, Lembaga Studi Sejarah Perjuangan dan Kepahlawanan, Banjarmasin, 2002.
- Shiddiq, Abdurrahman, *Risalah Sajaratul Arsyadiah*, Singapura, 1937.
- Sjamsudin, "Bangkitnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia di Kalimantan Selatan," Banjarmasin, 1978.

- Sjarifuddin, "Sikap Pergerakan Rakyat Menghadapi Pendudukan Belanda di Kalimantan Selatan Periode 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950", Skripsi Sarjana Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, Banjarmasin, 1974.
- Sjarifuddin et al., *Pola Penguasaan, Pemilikan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Kalimantan Selatan*, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Depdikbud, Banjarmasin, 1989-1990.
- Sjoberg, Gideon, *The Preindustrial City Past and Present*, The Free Press, New York, 1965.
- Soedjono, R.P (ed), *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid I, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Soejito, Irawan, "Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia", Jilid I, Yayasan Karya Dharma Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta, 1979.
- Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Penerbit 'Dibawah Bendera Revolusi', Jakarta, 1965.
- Soenarto, et al., "Pemerintahan Hindia Belanda di Kalimantan Selatan", Laporan Penelitian FKIP Unlam, Banjarmasin, 1996.
- Soepardi, "Sejarah Singkat Pertumbuhan dan Perjuangan Dari: Partai Nasional Indonesia, Pendidikan Nasional Indonesia, Gerakan Rakyat Indonesia, di Kalimantan Selatan", Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, Banjarmasin, 1972.
- Soeratman, Darsiti, *Ki Hajar Dewantara*, Depdikbud, Jakarta, 1985.
- Soeroto, Soeri, *Pergerakan Sosial dalam Perang Banjar*, Jakarta, Yoerna, th II, Februari 1975.
- Soeroto, Soeri, *Baratib Baamal, Suatu Pergerakan Keagamaan di Dalam Perang Banjar*, Jakarta, Yaperna, no.11 th III, Februari 1976.
- Sonius, H.W.J., "De Achtergrond van de Agrarische Wet", dalam *Bestuursvraagstukken*, Ie Jaargang No.4, October 1949, Departement van Binnenlandse Zaken, Batavia.
- Steenbrink, Karel A., *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984.
- Stoddard, L., *Dunia Baru Islam*, Panitia Penerbitan Menteri Koordinator Kesejahteraan, Jakarta, 1966.
- Sudharmono, *Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka*, PT. Dainippon Gita Karya Printing, Jakarta, 1981.
- Sugiyanto, Bambang, "Temuan Moluska dari Situs Gua Babi, Lubang Payau, dan Gua Kimanis: Studi Perbandingan Pola Subsistensi Makanan, dalam Bulletin Arkeologi *Naditira Widya* No. 04, Balai Arkeologi Banjarmasin, 2000.
- Suprpto, Bibit, *Perkembangan Kabinet Republik Indonesia dan Pemerintahan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Suprayitno, *Pemilu Indonesia Dari Masa Ke Masa*, PT. Teguh Pertiwi Mandiri, Jakarta, 1993.
- Suroyo, A.M. Djuliaty, "Revolusi dan Mentalitas : Cepu Sekitar Masa Revolusi Kemerdekaan 1945-1949", Makalah Diskusi, Jakarta, 1995.

- Syahrar, H.M., "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Muhammadiyah di Kalimantan Selatan (1914-1942)", Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, Banjarmasin, 1972.
- Syamsudin, "Sejarah Pertumbuhan dan Perjuangan Sarekat Islam di Kalimantan Selatan Sampai Tahun 1942", Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, Banjarmasin, 1970
- Syukur, M. Asywadie, *Kitab Sabilal Muhtadin*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1985.
- Syukur, M. Asywadie, "Perkembangan Hukum Islam di Kalimantan Selatan", Makalah pada Seminar Perkembangan Hukum Islam di Kalimantan Selatan, Fakultas Hukum Unlam, Banjarmasin, 1988.
- Tim Penyusunan Buku Pemda Propinsi Kalsel, *Kalimantan Selatan 1963 – 1968*, Banjarmasin, 1968
- Ukur, Fridolin, *Tanya Jawab Tentang Suku Dayak*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1977.
- Umar, Rika, *Hidup dan Pengabdian H.Hassan Basry*, Depdikbud, Jakarta, 1983.
- Umbaran, Musni et al., *Sejarah Kebudayaan Kalimantan*, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Depdikbud, Jakarta, 1994.
- Usman A. Gazali, dan Ramli Nawawi (ed), *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1949) Daerah Kalimantan Selatan*, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Banjarmasin, 1991.
- Usman, A. Gazali et al., "Banjarmasin Dalam Seratus Hari", FKIP Unlam, Banjarmasin, 1986.
- Usman, A. Gazali, "Beberapa Catatan di Sekitar Perkembangan Hukum Islam di Kalimantan Selatan", Makalah pembahasan pada Seminar Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Kalimantan Selatan, Fakultas Hukum Unlam, Banjarmasin, 1989.
- Usman, A. Gazali, "Kesultanan Banjar", dalam *Kalimantan Scientiae*, no. 20. Th. IX Januari 1990.
- Usman, A. Gazali Usman, *Kerajaan Banjar : Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam*, Lambung Mangkurat University Press, Banjarmasin, 1995.
- Usman A. Gazali et al., "Menyelusuri Perjuangan Gerilya ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan (Tinjauan Berdasarkan Prasasti)", FKIP Unlam, Banjarmasin, 1986.
- Usman, A.Gazali, "Pangeran Hidayatullah", dalam *Kalimantan Scientie*, No. 17, Tahun VII, Banjarmasin, 1988.
- Usman, A. Gazali, "Pemahaman Terhadap Sejarah Banjar, Sebagai Usaha Pemahaman Terhadap Jati Diri", Makalah pada Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kalimantan Selatan, di Kandangan, 13-17 Juli 1993.
- Usman, A. Gazali, "Pengaruh Pengajaran Tasawuf dan Dzikir Terhadap Rakyat Banjar dalam Usaha Menghadapi Kolonialisme Belanda", Makalah pada Seminar Sejarah Nasional ke III di Yogyakarta, 1985.
- Usman, A.Gazali, "Pengaruh Persetujuan Linggajati Terhadap Perjuangan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan", dalam *Analisis Kebudayaan* No. 1 th IV, Depdikbud, Jakarta, 1984.

- Usman, A. Gazali et al., "Pertempuran Batakan Dalam Rangkaian Ekspedisi Laut ke Kalimantan", FKIP Unlam, Banjarmasin, 1983.
- Usman, A. Gazali, "Semangat Patriotisme Orang Banjar", Makalah pada Sarasehan Bidang Jarahnitra, Kanwil Depdikbud, Banjarmasin, 30 November 1992.
- Usman, A. Gazali, "Sistem Politik dan Sistem Pemerintahan Kerajaan Banjar", Makalah pada Seminar Pembangunan Daerah IAIN Antasari, Banjarmasin, 1985.
- Usman, A. Gazali, "The Influence of Sultan Adam's 1835 Act on the Traditional Land Tenure in Banjarese Region South Kalimantan", a Paper Presented at Borneo Research Biennial International Conference, Kinibalu Sabah Malaysia, 13-17 July 1992
- Usman A. Gazali, *Urang Banjar Dalam Sejarah*, Lambung Mangkurat University Press, Banjarmasin, 1989.
- Ven, A. Van Der, "Aanteekeningen Omtrent het Rijk Banjarmasin", dalam *T.B.G IX*, Lange & Co, Batavia, 1860.
- Veth, P.J et al., *Het Beratib Beamal in Bandjermasin*, TNI Tweede Deel (Zalt-Bommel Bijjoh Noman en Zoon), 1869.
- Vlekke, BHM., *Nusantara, A History of Indonesia*, Les Editins A Manteau SA, Bruxelles, 1961.
- Vovelle, Michel , *Ideologies and Mentalities*, Policy Press, London, 1990.
- Wajidi, "Gerakan Tengkorak Putih: Sebuah Kelompok Gerilya di Kalimantan Selatan 1949-1950", Skripsi Sarjana Pendidikan Sejarah FKIP Unlam, Banjarmasin, 1992.
- Warnasari No.102 Tahun 1983, *Dardanella, Sebuah Group Sandiwara Pertama di Indonesia*.
- Weber, Max, *The Theory of Social and Economic Organization*, Translated by A.M. Henderson and Talcott Parson, The Free Press, New York, 1966.
- Widianto, Harry dan Handini, *Ekskavasi Situs Gua Babi Tahap III – IV Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan*, Laporan Penelitian Arkeologi Banjarmasin, 1998/1999.
- Widianto, Harry dan Handini, "Ekskavasi Situs Gua Babi Tahap V Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan", Laporan Penelitian Arkeologi Banjarmasin, 1999/2000.
- Widianto, Harry et.al, *Ekskavasi Situs Gua Babi Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan*, Berita Penelitian Arkeologi No.1 1997, Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Willy, *The Early Relation of England with Borneo to 1805*, Bern, 1922.
- Yahya, Zurkani et al., "Pemikiran-pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari di Bidang Aqidah", Makalah pada Seminar Sehari Pemikiran Keagamaan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, IAIN Antasari banjarmasin, 17 November 1988.
- Yaman, G.M. "Route Gerilya ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan", Banjarmasin, 1979.
- Yassin, H.B., *Sjahrazad "Renungan Indonesia"*, Kebangsaan Pustaka Rakjat N.V., Djakarta, 1951.

Yusran, Mohammad, "Sejarah Singkat Bangkit dan Berkembangnya Musyawaratutthalibin di Kalimantan Selatan Sampai Tahun 1942", Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, Banjarmasin, 1972.

Zaini, Muderis et al., *Sejarah Perjuangan Rakyat Dalam Merebut dan Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia di Hulu Sungai Tengah*, Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan 45 DHC Angkatan 45 Tingkat II HST, Barabai, 1988.

Zamzam, Zafry, *Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*, Banjarmasin, 1979.

Zuhri, Saifuddin, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Al Maarif, Bandung, 1979.

II. Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain

Himpunan Lembaran Penguasa Perang Tertinggi Tahun 1960, Penguasa Perang Tertinggi, Jakarta, 1960.

"Keputusan Penguasa Perang Daerah" No. 140/S/K.P/Tahun 1960 Tentang Penghentian Kegiatan P.K.I

Keputusan Presiden / Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia /Mandataris MPRS / Pemimpin Besar Revolusi No. 1/3/1966.

Lembaran Penguasa Perang Tertinggi Tahun II, Triwulan Pertama disusun hingga 31 Maret 1961. Penguasa Perang Tertinggi, Jakarta 1961.

Lembaran Penguasa Perang Tertinggi Edisi Khusus Tahun Ke II mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 10 Partai Politik yang telah diakui oleh Pemerintah, Penguasa Perang Tertinggi, Jakarta, 1961.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Tentang Keadaan Bahaya (No. 23 tahun 1959 – LN 1959/139 – TLN 1908) dan Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan itu, Inspektorat Jenderal Territorial dan Perlawanan Rakyat, Jakarta, 1959.

II. Majalah dan Surat Kabar

Banjarmasin Post, 31 April 1987

Banjarmasin Post, 31 Mei 1997

Banjarmasin Post, 23 Mei 2003.

Borneo Simboen No. 324 tanggal 21 Desember 2603 (1943)

Borneo Simboen No. 491 tanggal 2 Juli 2604 (1944)

Borneo Simboen No. 851, 26 Oktober 2605 (1945)

Jawa Pos, 28 Mei 1997

Jawa Pos, 7 Juni 1997.

Kalimantan Berdjuang tanggal 8 Juli 1949

Kalimantan Berdjuang tanggal 29 Agustus 1949

Kalimantan Berdjuang tanggal 1 Oktober 1949

Kalimantan Raya No. 29 tanggal 9 April 1942

Kalimantan Raya No. 1 tanggal 5 Maret 1942

Kalimantan Raya No. 9 tanggal 14 Maret 1942

Kalimantan Raya No. 10 tanggal 16 Maret 1942

Kalimantan Raya No. 13 tanggal 20 Maret 1942

Kalimantan Raya No. 21 tanggal 31 Maret 1942

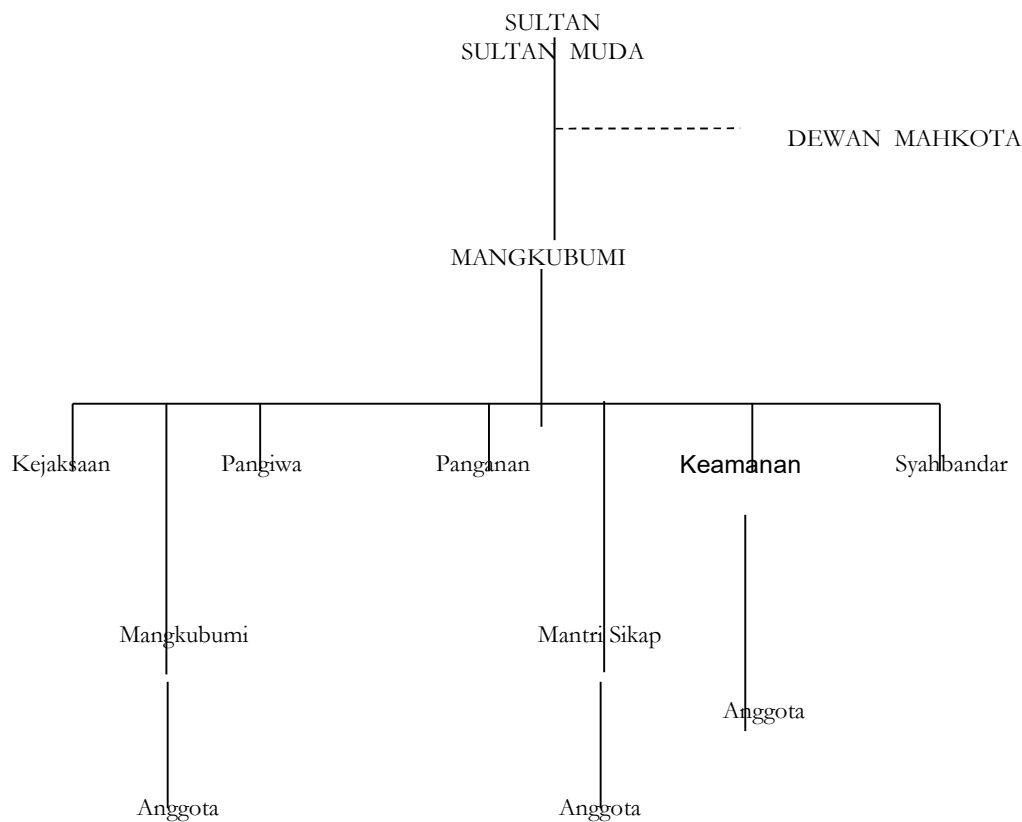
Kalimantan Raya No. 22 tanggal 1 April 1942
Kalimantan Raya No. 24 tanggal 3 April 1942
Kalimantan Raya No. 40 tanggal 22 April 1942
Kalimantan Raya No. 56 tanggal 12 Mei 1942
Kalimantan Raya No. 53 tanggal 8 Mei 1942
Kalimantan Raya No. 342 tanggal 11 Januari 1944
Kalimantan Raya No. 397 tanggal 15 Maret 1944
Kalimantan Raya No. 408 tanggal 28 Maret 1944
Kalimantan Raya No. 409 tanggal 29 Maret 1944
Kalimantan Raya No. 410 tanggal 30 Maret 1944
Kalimantan Raya No. 411 tanggal 31 Maret 1944
Kalimantan Raya No. 465 tanggal 2 Juni 1944
Kalimantan Raya No. 615 tanggal 25 November 1944
Kompas, 31 Mei 1997
Kompas, 1 Juni 1997
Kompas, 5 Juni 1997
Mandau, Maret 1948
Mutiaras, No. 867, 3 –6 Juni 1997

IV. NARA SUMBER

Abdullah Yakub, Banjarmasin
Abdullatif, Banjarmasin
Addi Maswardi, Banjarmasin
A. Hamdi Budhigawis, Banjarbaru
Arthum Artha, Banjarmasin
Hamlan Arpan, Banjarmasin
Ismet Inonu, Banjarmasin
Masripanie, Banjarmasin
Mawardi, Marabahan
M. Said, Banjarmasin
M. Suriansyah Ideham, Banjarmasin
M. Taufik Effendi, Banjarmasin
Sugian Noor, Banjarmasin
Sy. A. Abdis, Banjarmasin

Lampiran 1

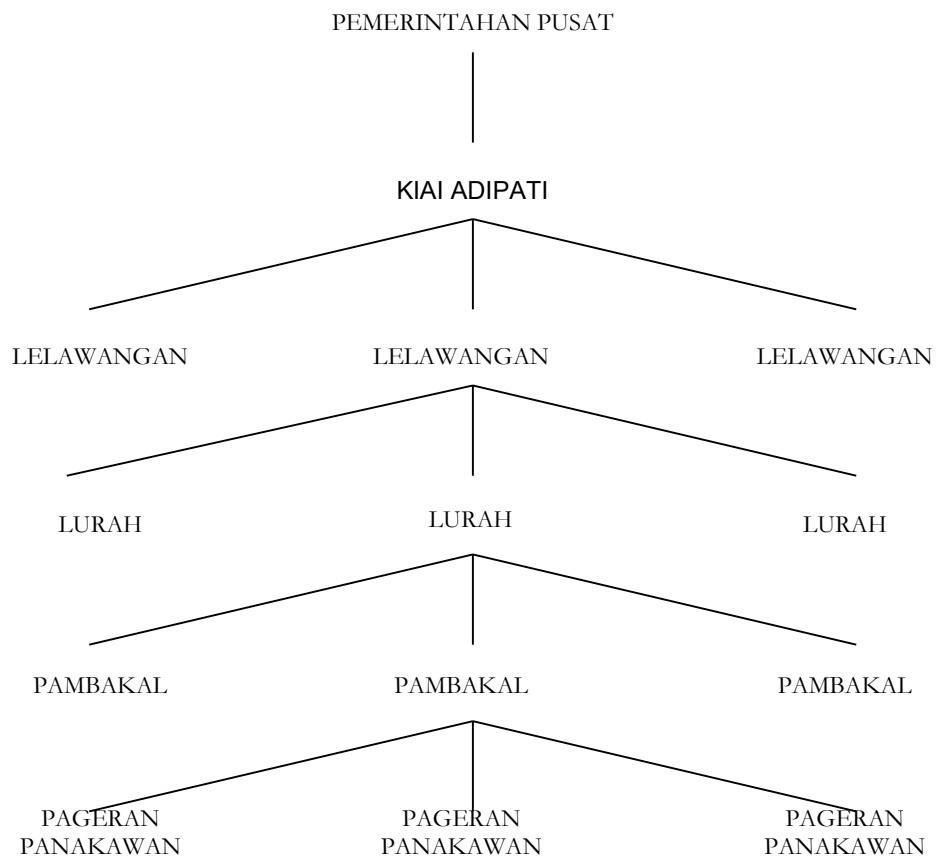
**STRUKTUR PEMERINTAHAN PUSAT
KERAJAAN BANJAR**



Catatan : Pada masa Pemerintahan Sultan Adam Al Wasik Billah 1825 - 1857

Lampiran 2

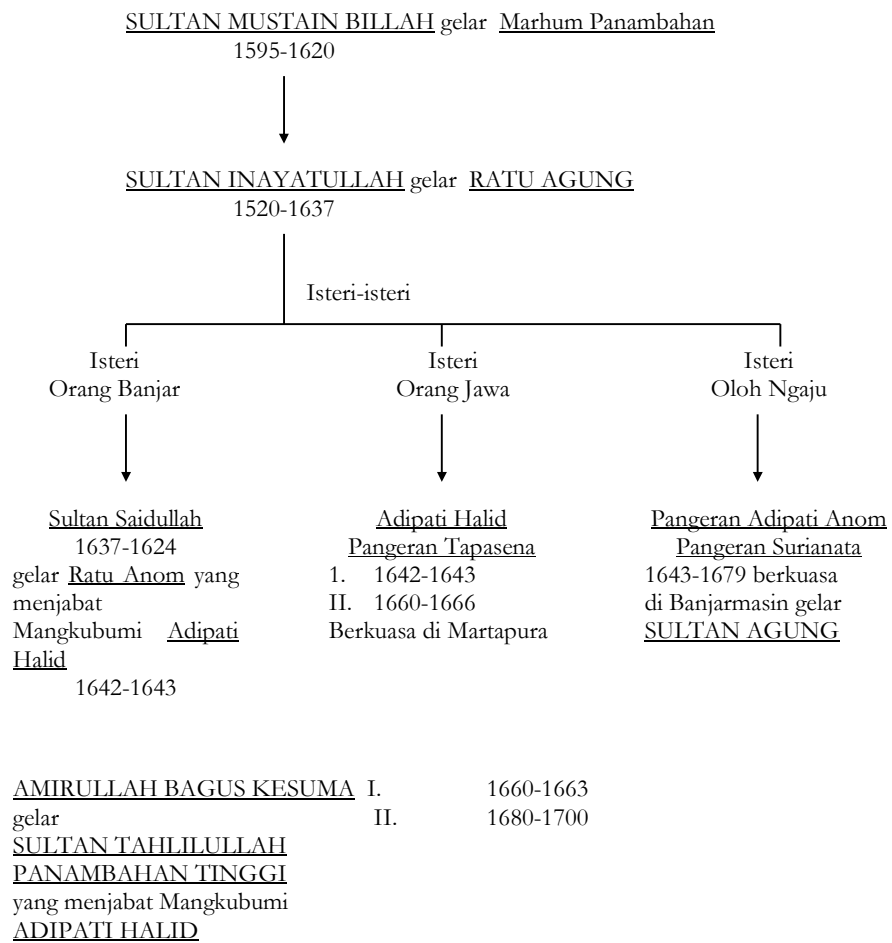
STRUKTUR PEMERINTAHAN KERAJAAN BANJAR



Catatan: Jabatan Kiai Adipati hanya terdapat di daerah Banua Lima berkedudukan di Amuntai

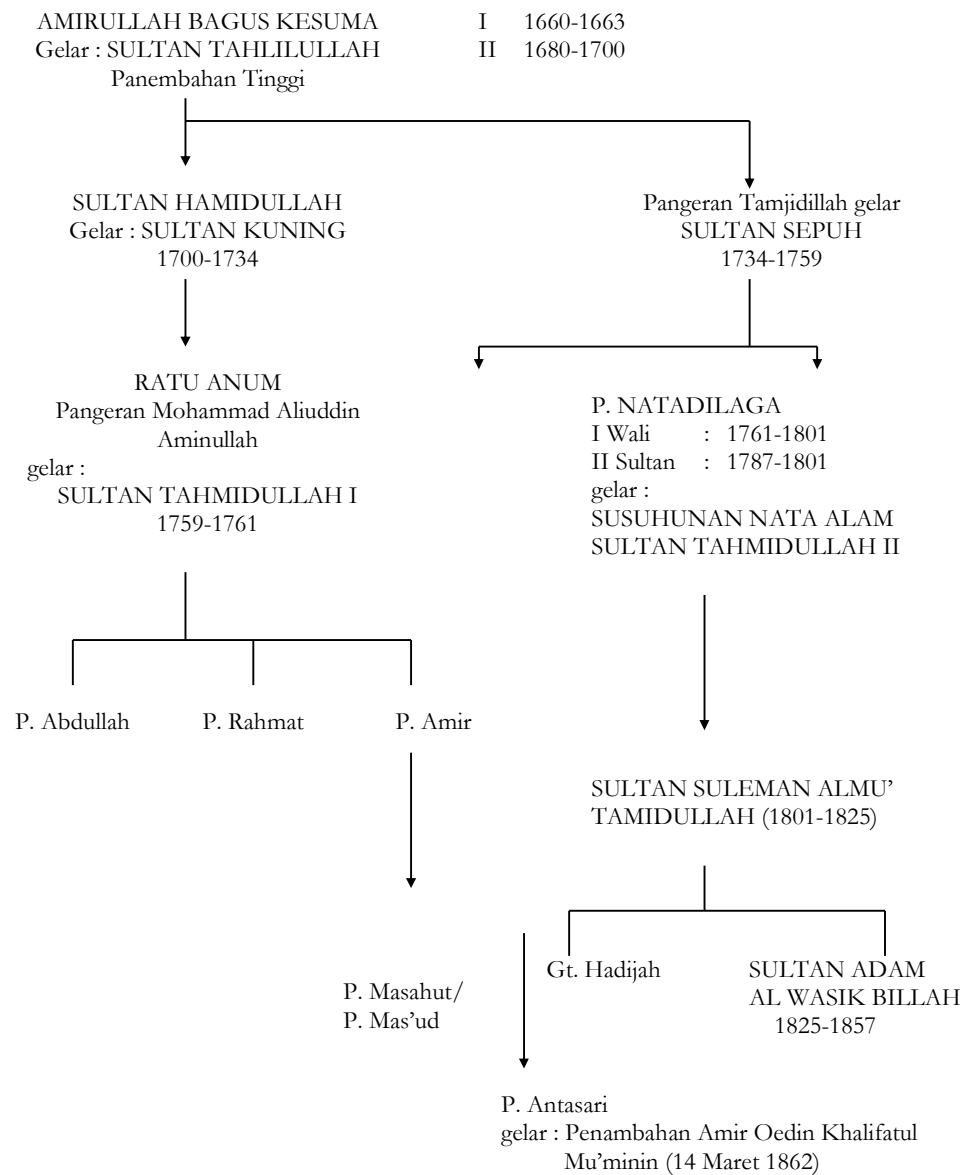
Lampiran 3

SKEMA SITUASI POLITIK KERAJAAN ABAD KE-17



Lampiran 4

SKEMA SITUASI POLITIK KERAJAAN ABAD KE- 18



Keterangan :

- = anak laki-laki
- = anak perempuan
- = kawin dengan
- = garis keturunan

Lampiran 5

DAFTAR GABUNGAN KEKUATAN PASUKAN BELANDA DI WAKTU PERANG BANJAR (1859-1905)

Kota-kota yang diberi benteng sementara atau benteng tetap :

a) AFDELING BANJARMASIN

- Benteng Tatas
- Schans Van Thuyll
- Marabahan
- Mangkatip
- Tamiyang Layang
- Ampah
- Montallat
- Kuala Kapuas
- Kahayan
- Sampit

b) AFDELING MARTAPURA DAN TANAH LAUT

- Martapura
- Pengaron
- Mataraman
- Munggu Tayoh
- Rantau
- Margasari
- Pelaihari
- Tabanio

c) AFDELING AMUNTAI

- Amuntai
- Muara Tabalong
- Muara Uya
- Parang
- Awayan
- Barabai
- Batu Tungan
- Rantauan
- Pantai Hambawang
- Kandangan
- Gambah
- Batang Tangan

Meriam yang dipakai 83 pucuk, termasuk :

- Howitzer = 9 pucuk,
- montir = 10 pucuk.

Batalyon Serdadu Belanda :

- Batalyon 7 menduduki Amuntai
- Batalyon 9 menduduki Martapura dan Tanah Laut
- Batalyon 13 menduduki Banjarmasin

Kekuatan tiap-tiap Batalyon :

- Batalyon 7 :

opsir	=	34 orang
serdadu Eropah	=	264 orang
Bumiputera	=	474 orang
Jumlah	=	772 orang

- Batalyon 9 :

opsir	=	35 orang
serdadu Eropah	=	256 orang
Bumiputera	=	458 orang
Jumlah	=	749 orang

- Batalyon 13 :

opsir	=	30 orang
serdadu Eropah	=	236 orang
Bumiputera	=	486 orang
Jumlah	=	752 orang

Kompeni Garnisun :

opsir	=	4 orang
serdadu Eropah	=	69 orang
Bumiputera	=	137 orang
Jumlah	=	210 orang

Pasukan Artileri :

opsir	=	7 orang
serdadu Eropah	=	112 orang
Bumiputera	=	84 orang
Jumlah	=	203 orang

Sappeurs :

opsir	=	1 orang
serdadu Eropah	=	74 orang
Bumiputera	=	72 orang
Jumlah	=	147 orang

Personel Ambulans :

Bintara	=	4 orang
Tenaga Eropah	=	65 orang
Ambon	=	12 orang
Bumiputera	=	14 orang

Jumlah kekuatan secara keseluruhan. (Tidak termasuk Personel Ambulans)

opsir	=	111 orang
serdadu Eropah	=	1011 orang
Bumiputera	=	1711 orang
Jumlah	=	2833 orang

Angkutan laut yang dipergunakan dalam pertempuran terdiri dari : kapal perang, kapal angkut, kapal tarik dan Kruisboot :

- 1.Kapal perang Makassar
- 2.Kapal perang De Vech
- 3.Kapal perang Celebes
- 4.Admiral van Kinsberger
- 5.Kapal perang Onrust
- 6.Kapal Angkut Bone

- 7.Kapal Angkut Cinrana
- 8.Kapal tarik Van Os
- 9.Kruisboot no. 7 Kutai
- 10. Kruisboot no. 21 Batu Licin
- 11. Kruisboot no. 28 Satui
- 12. Kruisboot no. 42 Margasari
- 13. Kruisboot no. 59 Mangkatip
- 14. Kruisboot no. 60 Kuala Kapuas
- 15. Kruisboot no. 66 Kahayan
- 16. Kruisboot no. 67 Sampit
- 17. Kruisboot no. 72 Marabahan

Disalin dari Koleksi Museum Negeri Lambung Mangkurat Banjarbaru

Lampiran 6

STAAT DER OPSTANDELINGEN OP WIEN PREMIEN OF HOOFDGELDEN ZIJN GESTELD

DAFTAR NAMA “PEMBERONTAK” YANG DIKENAI PREMI ATAU “HARGA KEPALA”

1. DEMANG LEHMAN	f. 2.000,-	dood	mati
2. HADJIE BOEJASIN	f. 1.000,-	dood	mati
3. MOHAMAD JOESOEP	f. 250,-	onderworpen	menyerah
4. PEMBOEKAL DOERAOP	f. 250,-	dood	mati
5. KIAYI LANLANG	f. 250,-	onderworpen	menyerah
6. PEMBOEKAL TIMANG	f. 250,-	onderworpen	menyerah
7. HADJIE MATAIP	f. 250,-	onderworpen	menyerah
8. PANGERAN MOEDA	f. 500,-	dood	mati
9. RAKSA PATTIE	f. 250,-	dood	mati
10. PEMBOEKAL NOTTO	f. 500,-	dood	mati
11. ANTASARI	f. 10.000,-	dood	mati
12. MAD SAID (GOESTI)	f. 300,-	dood	mati
13. PEMBOEKAL INTAL	f. 100,-	dood	mati
14. HIDJAEJAT	f. 10.000,-	onderworpen	menyerah
15. RAKSA YOEDA	f. 150,-	gesneuveld	tewas
16. TEMBOENOEROE	f. 150,-	dood	mati
17. OEBAH	f. 150,-	onderworpen	menyerah
18. ABDOEL KASJIM	f. 250,-	dood	mati
19. ABDOEL GANIE	f. 250,-	dood	mati
20. DOERACHMAN	f. 250,-	dood	mati
21. AMINOELLAH	f. 2.000,-	verbannen	dibuang
22. KERTA NEGARA	f. 500,-	dood	mati

Catatan : PEMBOEKAL versi Belanda untuk PEMBAKAL
HIDJAEJAT versi Belanda untuk HIDAYAT

Disalin dari Koleksi Museum Negeri Lambung Mangkurat Banjarbaru

Lampiran 7

SILSILAH RAJA-RAJA KERAJAAN BANJAR DENGAN GELAR PANGGILANNYA, SERTA TAHUN PEMAKAIAN GELAR tsb

1.	Pangeran Samudera Sultan Suriansyah Sultan Suria Angsa Panembahan Batu Habang	1526 - 1545 1545
2.	Rachmat Ollah Rachmat Allah Rachmat Ullah Panembahan Batu Putih	1545 - 1570 1570
3.	Hidayat Ollah Hidayat Allah Panembahan Batu Hirang	1570 - 1595 1595
4.	Mustakim Billah Panembahan Marhum Mustain Billah Marhum Panembahan Mustain Allah Mustain Zielah Marhum Musta Ainubillah Muaraa'am	1959 - 1620
5.	Inayat Allah Ratu Agung Ahzal Allah Inayatullah Ratu Lama	1620 - 1637
6.	Said Allah Ratu Anom Wahidullah Ratu Anomdullah	1637 - 1642
7.	Pangeran Tapesana Pangeran Mangkubumi Rakyat Allah Tahlil Allah Pangeran Ratu Tahalidullah Panembahan Sepuh	1642 - 1660 1642 - 1643 1660 - 1666
8.	Amir Bagus Kesuma	1660 - 1663
9.	Pangeran Surianata Pangeran Adipati Anom Sultan Agung	1663 - 1679
10.	Amir Allah Bagus Kesuma Tahmid Ollah Tahmid Allah Tahmidullah Panembahan Kuning	1680 - 1700

Panembahan Tingie

11. Hamidullah Sultan Kuning	1700 - 1734
12. Tamjidullah Sultan Sepuh	1734 - 1759
13. Mohammad Alieuddin Aminullah Sultan Tahmidullah I Mohammad Iyauddin Amirullatie	1959 - 1761
14. Pangeran Nata Dilaga Pangeran Wiranata Pangeran Nata Negara Panembahan Kaharuddin Halilullah Akamuddin Saidullah Amirulmu'minin Abdullah Amir Al Mukminin Abdullah Susuhunan Nata Alam Sulaiman Saidullah Panembahan Batu Sultan Tahmidullah II	1761 1762 1772 1787 1797
15. Sulaiman Saidullah	1801 - 1825
16. Sultan Adam Al Wasik Billah	1825 - 1857
17. Sultan Tamjidillah al Wasik Billah	1857 - 1859
18. Pangeran Antasari gelar Panembahan Amir Oeddin Khalifatul Mu'minin 14 Maret 1862	
19. Sultan Muhammad Seman	1862 - 1905

Lampiran 8

DEKRIT
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PANGGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN PERANG

Dengan ini menyatakan dengan hidmat :

Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang disampaikan kepada segenap Rakyat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara.

Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian besar anggota sidang pembuat Undang-undang Dasar untuk tidak lagi menghadiri sidang. Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya;

Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa dan bangsa serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat adil dan makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan negara proklamasi.

Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut maka atas dasar-dasar tersebut di atas,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TERTINGGI ANGKATAN PERANG

Menetapkan pembubaran konstituante.

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung pada hari tanggal penetapan dekrit ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juli 1959
Atas nama rakyat Indonesia
Presiden Republik Indonesia/
Panglima Tertinggi Angkatan Perang

Ttd.

SOEKARNO

Lampiran 9

“KEPUTUSAN PENGUASA PERANG DAERAH”

NO. 140/S/K.P/tahun 1960

T E N T A N G

PENGHENTIAN KEGIATAN P.K.I

PANGLIMA DAERAH MILITER

X LAMBUNG MANGKURAT

SELAKU

PENGUASA PERANG DAERAH

KALIMANTAN SELATAN

MENIMBANG

- : 1. bahwa dalam perundingan antara DEJAH KOANDA KALIMANTAN dengan PANGDAM X/KAS/LM selaku Penguasa Perang Daerah Kalimantan Selatan, tanggal 16 Agustus 1960 di Banjarmasin, telah ditinjau secara mendalam keadaan Tanah Air pada umumnya dan keadaan daerah Kalimantan Selatan pada khususnya;
2. bahwa salah satu sebab yang utama yang menyebabkan beratnya segala usaha untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sesuai dengan tujuan Proklamasi 17 Agustus 1945, adalah karena keadaan politik dalam negeri yang tidak pernah stabil;
3. bahwa dalam perundingan tersebut di atas telah diputuskan, akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, untuk memudahkan usaha Pemerintah menstabilkan politik dalam negeri;
4. bahwa jiwa dan tujuan PENPRES No. 7 Tahun 1959, Lembaran Negara tahun 1959 No. 149, pada pokoknya adalah, membubarkan setiap partai yang asas dan tujuannya, begitu juga programnya bertentangan dengan dan atau bermaksud merombak asas tujuan NEGARA REPUBLIK INDONESIA PROKLAMASI yang berdasarkan PANCASILA;
5. bahwa asas dan tujuan dari Partai Komunis Indonesia, begitu juga program jangka pendek apalagi program jangka panjangnya, sebagaimana dengan tegas dinyatakan dalam Konstitusi Partai Komunis Indonesia yang disahkan oleh Kongres ke VI P.K.I tahun 1959 adalah terang bertentangan dengan dan programnya adalah bermaksud merombak asas dan tujuan NEGARA REPUBLIK INDONESIA PROKLAMASI yang berdasarkan PANCASILA, oleh sebab itu sudah terang terkena oleh Pasal 9 ayat (1) angka 1 dan 2 PENPRES No. 7 Tahun 1959, Lembaran Negara Tahun 1959 No. 149;
6. bahwa menurut hasil penyelidikan, dalam mencapai tujuannya P.K.I tidak segan-segan melaksanakan taktik adu-dombanya secara

licin di antara alat-alat Negara yang bisa mengakibatkan perpecahan;

7. bahwa menurut keadaan-keadaan yang timbul dalam masyarakat, pendapat umum yang meluas dan merata di daerah kalimantan Selatan adalah; bahwa bukan hanya MASYUMI dan PSI saja terkena, tetapi P.K.I juga terkena oleh PENPRES No. 7 Tahun 1959, Lembaran Negara Tahun 1959 No. 149 dan PENPRES No. 13 Tahun 1959, terutama keadaan-keadaan yang timbul sejak diumumkannya Keputusan Presiden No. 200 Tahun 1960 dan No. 201 Tahun 1960, terdapat perasaan ketidak puasan yang meluas di kalangan masyarakat, karena P.K.I yang terang terkena oleh Pasal 9 ayat (1) angka 1 dan 2 PENPRES No. 7 tahun 1959, Lembaran Negara Tahun 1959 No. 149 belum menyatakan bubar. Berdasarkan keadaan-keadaan itu, apabila tidak diambil langkah-langkah dengan segera, dikuatirkan akan timbul keadaan-keadaan yang mengganggu keamanan dan ketentraman umum;
8. demi untuk menjaga keamanan dan ketentraman umum, dan memperlancar usaha Pemerintah untuk melaksanakan jiwa dan tujuan PENPRES No. 7 tahun 1959, Lembaran Negara tahun 1959 No. 149 itu dengan konsekuen, perlu diambil langkah-langkah yang tegas dan konkrit;

MENGINGAT

- : 1. Keputusan Presiden Republik No. 315 tahun 1959 tentang Pernyataan Keadaan Perang atas seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959, Lembaran Negara Tahun 1959 No. 139, tentang Keadaan Bahaya;
3. Keputusan-keputusan yang diambil dalam perundigan antara DEJAH KOANDA KALIMANTAN dengan PANGDAM X/K.S/LAMBUNG MANGKURAT selaku penguasa Perang Daerah Kalimantan Selatan tanggal 16 Agustus 1960 di Banjarmasin;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : I. Buat sementara, menghentikan segala kegiatan dalam bentuk dan corak apapun juga dari Partai Komunis Indonesia, beserta segala organisasi-organisasi yang mendukung dan atau bernaung di bawahnya, seperti SOBSI, Pemuda Rakyat, B.T.I, Gerwani, Lekra, dan lain-lain;
- II. Barang siapa yang melanggar atau membantu melakukan pelanggaran maksud keputusan ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya sembilan bulan;
- III. Tindak pidana tersebut ad II adalah pelanggaran;
- IV. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman keputusan ini, dengan penempatan dalam Lembaran Pengumuman Penguasa Perang Daerah Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 22 Agustus 1960

PANGLIMA DAERAH MILITER X LAMBUNG MANGKURAT
S E L A K U

PENGUASA PERANG DAERAH KALIMANTAN SELATAN

(CAP) ttd.

H. HASSAN BASRY
KOLONEL TNI NRP. 17594

Diumumkan :
Pada tanggal 22 Agustus 1960
Kepala Staf PEPERDA
(CAP) ttd.

H. ABERANIE SULAIMAN
MAYOR TNI NRP. 18476

Catatan *) disesuaikan dengan ejaan baru

Lampiran 10

LAPORAN/PENDAPAT YANG DIKEMUKAKAN OLEH
PEPERDA KALIMANTAN SELATAN (KOLONEL
H. HASSAN BASRY) PADA RAPAT PEPERTI – PEKABE -2
SELURUH INDONESIA PADA TANGGAL
12 SEPTEMBER 1960 DI ISTANA NEGARA
JAKARTA*

BAB I
PENDAHULUAN

1. Pada rapat PEPERTI dengan PEKABE yang terhormat ini, sudah sepantasnyalah, apabila kita masing-masing dengan hati terbuka yang tulus ikhlas mengeluarkan buah pikiran dan mengemukakan pendapat, sehingga dengan demikian kita dapat bertukar pikiran satu sama lain dalam rangka usaha memperlancar pelaksanaan tugas-tugas yang dipikulkan oleh Negara dan Bangsa ke pundak kita masing-masing.
Kiranya, semua kita sependapat, bahwa Negara dan Bangsa kita dewasa ini masih menghadapi tantangan-tantangan yang menimbulkan kesulitan-kesulitan yang beraneka ragam. Kita sebagai putra bangsa wajib menjawab tantangan-tantangan itu dengan segala daya yang ada pada kita. Kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi sekarang, tidak boleh kita biarkan berlama-lama.
Sebelum kita membicarakan cara-cara untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi sekarang, sebaiknya kita bertanya lebih dahulu, apakah sebabnya yang menimbulkan kesulitan-kesulitan itu, haruslah kita secara jujur dan terus terang mengemukakannya, sehingga dengan demikian kita dapat memadukan pikiran dan tenaga untuk mengatasinya.
Hal-hal yang ingin saya kemukakan, belumlah merupakan tinjauan panjang lebar, tetapi hanyalah beberapa pokok pikiran secara garis besar. Hal-hal yang akan saya kemukakan adalah merupakan pikiran-pikiran yang hidup di Kalimantan Selatan dalam hubungannya dengan keadaan di Tanah Air kita.
Mudah-mudahan hal ini dapat kita renungkan dan pertimbangkan dalam rapat yang terhormat ini.
2. Adalah suatu hal yang tidak dapat disangkal, bahwa salah satu sebab yang utama yang menimbulkan kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi sekarang ialah, karena sejak pemulihan kedaulatan, situasi politik dalam negeri selalu labil. Kelabilan politik itu untuk sebagian terbesar, adalah disebabkan banyaknya partai-partai politik di negeri kita, dan beberapa dari antara partai-partai politik itu mempunyai asas dan tujuan yang bertentangan dengan asas dan tujuan Negara Proklamasi 1945. Apakah sebabnya maka partai-partai politik begitu banyak di negara kita, kiranya tidak usah kita bicarakan lagi, karena hal itu sudah sering dan secara panjang lebar dikupas oleh P.J.M. Presiden.
Sebagai pengalaman kita telah membuktikan, bahwa situasi politik yang labil, selalu menimbulkan kesulitan-kesulitan yang beraneka ragam yang susul menyusul. Akibat dari kelabilan politik itu keamanan dalam negeri tidakbisa lekas terpulihkan, perekonomian kita tidak bisa lekas diperbaiki malahan makin suram, korupsi tidak bisa diberantas dan lain-lain.
3. Sesungguhnya, sejak Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959 yang lalu, telah terbuka jalan yang lapang bagi kita untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi sekarang. Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang lalu, maka berlakulah kembali UUD 1945 untuk seluruh Tumpah Darah Indonesia.
Dengan berlakunya kembali UUD 1945, hal ini berarti pula, bahwa kita haruslah berpegang teguh pada ideologi dan tujuan Negara sebagai yang disebut dengan tegas jelas dalam UUD 1945 itu, yang kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Manifesto Politik Republik Indonesia yang terkenal itu.
Manifesto politik yang telah diakui oleh DPA Sementara sebagai haluan Negara kita, telah menjelaskan persoalan-persoalan pokok dan program umum revolusi kita. Kepada kita

semua terpikulkan kewajiban untuk merenungkan dan melaksanakan persoalan-persoalan pokok dan program umum itu dengan segala daya dan tenaga yang ada pada kita.

4. Apabila kita simpulkan ideologi dan tujuan Negara yang kita proklamasikan 17 Agustus 1945 itu, dan perincian sebagai yang disebut dalam Manifesto Politik itu, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa ideologi Negara kita ialah Pancasila.
 - b. Bahwa Negara kita yang berideologi Pancasila itu, adalah suatu Negara Nasional yang demokratis yang berbentuk Republik Kesatuan yang berwilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke.
 - c. Bahwa tujuan Negara kita ialah menciptakan dan membina Masyarakat Adil dan Makmur (Sosialisme Indonesia) dan ikut melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia.
 - d. Bahwa alat yang dipergunakan untuk mencapai Masyarakat Adil dan Makmur itu ialah demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin.
 - e. Bahwa dalam usaha ikut melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia, kita menganut politik luar negeri yang bebas aktif.

5. Dalam usaha mengatasi kesulitan-kesulitan sekarang haruslah kita berpegang teguh pada ideologi dan tujuan Negara kita sebagai yang disebut tadi. Karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Negara dan Bangsa kita dewasa ini sudah beraneka ragam, maka haruslah kita berikan prioritas dalam penyelesaiannya. Dengan memberikan prioritas dalam mengatasi kesulitan-kesulitan itu, bukanlah maksudnya mengabaikan kesulitan yang lain karena kesulitan yang satu ada dan erat hubungannya dengan kesulitan yang lain, tetapi adalah sekedar untuk menitik beratkan usaha penyelesaiannya.

Saya kira, yang pertama yang harus kita usahakan ialah menciptakan stabilitas politik dalam negeri, karena kita yakin, usaha apapun yang akan kita laksanakan, akan sia-sia apabila politik dalam negeri tidak stabil. Tanpa politik dalam negeri yang stabil, sedang pemerintahan yang stabil adalah, sedang pemerintahan yang stabil, sedang pemerintahan yang stabil adalah landasan struktural untuk merealisasikan tujuan revolusi kita.

Yang kedua yang harus kita usahakan ialah memulihkan keamanan dalam waktu yang tidak terlampau lama. Tanpa keamanan pembangunan tidak akan berjalan lancar.

Yang ketiga barulah kita melancarkan pembangunan di segala bidang dalam usaha mencapai masyarakat adil dan makmur yaitu Sosialisme Indonesia.

Pada rapat ini adalah tidak pada tempatnya mengupas hal-hal yang saya kemukakan tadi secara panjang lebar, oleh sebab itu apa yang saya uraikan nanti, barulah hanya merupakan garis besarnya saja, yang sudah tentu menghendaki pengupasan lebih luas.

BAB II

USAHA MENSTABILKAN POLITIK DALAM NEGERI

6. Salah satu usaha yang tepat untuk menstabilkan politik dalam negeri ialah tidak mengikuti sertakan untuk menyelesaikan revolusi nasional kita ini setiap orang dan golongan yang tidak dapat menerima dan menyetujui Pancasila, atau yang hanya menerima Pancasila itu di bibir saja, atau yang hanya menerima Pancasila itu sebagian saja. Kalau mereka diikuti sertakan juga, maka pastilah mereka akan tetap berusaha, mempergunakan setiap kesempatan yang terbuka untuk merongrong dan akhirnya menghancurkan Pancasila itu.

7. Agar Pancasila yang telah kita akui dan junjung tinggi selaku ideologi Negara kita jangan mudah ditafsirkan dan dipergunakan orang untuk maksud-maksud tertentu atau untuk kepentingan golongannya saja, maka haruslah kita menyatakan bentuk dan susunan Pancasila itu dengan tegas. Hal ini adalah sangat penting, karena pada tahun-tahun belakangan ini sudah banyak terlihat bukti-bukti, bahwa banyak orang yang menafsirkan dan mempergunakan Pancasila itu dengan maksud yang berbeda-beda.

Memang, tidak dapat disangkal, bahwa sejak pemulihan kedaulatan sampai sekarang, banyak tafsiran yang berbeda-beda tentang Pancasila itu. Hal ini harus kita hindarkan, agar Pancasila itu jangan dinodai dan dipergunakan orang-orang atau golongan-golongan yang bermaksud jahat.

8. Saya kira, tidaklah jauh dari kebenaran, apabila dikemukakan disini, bahwa pendapat tentang Pancasila yang dikemukakan oleh maha guru Universitas Gajah Mada yang dipimpin oleh Prof. Dr. Sardjito, yang mengadakan pembahasan ilmiah pada kwartal pertama dan kedua tahun 1958 di Yogyakarta antara lain tentang Pancasila, adalah sesuai dengan pendapat sebagian terbesar dari rakyat Indonesia tentang Pancasila itu.

Pada pokoknya para maha guru itu berpendapat, bahwa Pancasila itu adalah merupakan satu kesatuan yang bulat.

Menurut mereka, urutan sila-sila dari Pancasila harus tetap dipertahankan sebagai terumus dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Peri Kemanusiaan.
- c. Bangsa.
- d. Kedaulatan Rakyat (Demokrasi).
- e. Keadilan Sosial.

Selanjutnya mereka mengemukakan, andai kata urutan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila itu tidak dipertahankan, maka sila-sila dari Pancasila itu dapat ditafsirkan dan dipergunakan orang dalam berbagai maksud, menurut kepentingan orang yang menafsirkan dan mempergunakannya. Kalau demikian halnya maka Pancasila itu menjadi pecah belah dan tidak mungkin dapat dipergunakan menjadi ideologi Negara.

9. Kalau kita dapat menerima pendapat para sarjana ini, maka Pancasila itu tidak boleh hanya sebagian saja diterima, Tetapi Pancasila itu harus diterima secara bulat, karena Pancasila adalah merupakan kesatuan yang tidak terpisah-pisah.

Apabila kita sudah berpendirian, bahwa Pancasila itu merupakan satu kesatuan maka dengan segera timbulah pertanyaan, golongan manakah yang tidak menerima atau yang hanya menerima beberapa sila dari Pancasila itu atau yang menerima Pancasila itu hanya sebagai taktik untuk memperoleh waktu menyusun kekuatan, yang kalau sudah merasa cukup kuat akan pasti menghancurkan Pancasila itu?

Secara positif dapat dikemukakan disini, bahwa pada pokoknya ada dua golongan yang tidak dapat menerima Pancasila itu, yaitu :

- a. Golongan Anti Komunis yang ekstrim.
- b. Golongan Komunis sendiri.

Tentang golongan anti Komunis yang ekstrim itu, kiranya tidak usah lagi kita bicarakan di sini, karena mereka sudah tersingkir dari gelanggang politik.

10. Menurut ideologinya dan berdasarkan prakteknya selama ini, maka PKI adalah salah satu golongan yang tidak mungkin dapat menerima Pancasila itu. Walaupun pada hari-hari belakangan ini mengeluarkan suara-suara yang santer kedengarannya, seakan-akan mereka menerima Pancasila itu, tetapi pastilah itu hanya merupakan taktik belaka. Barang siapa yang sedikit sajapun mengetahui tentang ideologi dan cara-cara Komunis dalam mencapai tujuannya, dengan tidak ragu-ragu pastilah ia berpendapat, bahwa PKI tidak mungkin dalam bathinnya menerima Pancasila. Lihat sajalah umpamanya beberapa tahun yang lalu usaha-usaha dan propaganda PKI untuk mengubah sila pertama dari Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi kebebasan beragama.

11. Apabila kita membicarakan sebentar beberapa segi saja dari Pancasila dan perincian yang terdapat dalam Manifesto Politik, maka akan jelaslah persoalannya. Ambillah saja umpamanya segi demokrasi.

Demokrasi yang kita anut ialah demokrasi terpimpin. Sebagaimana telah jelas dikemukakan oleh P.J.M. Presiden pada tanggal 22 April 1959 yang lalu di muka sidang Konstituante, bahwa demokrasi terpimpin ialah demokrasi, atau menurut istilah Undang-Undang 1945. "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Dengan jelas telah dikemukakan oleh Bung Karno, bahwa Demokrasi Terpimpin itu bukanlah diktator, bukan demokrasi liberal dan bukan pula demokrasi sentralis ala demokrasi Komunis.

Di dalam Pancasila, demokrasi adalah menduduki tempat yang keempat. Karena Pancasila itu adalah merupakan satu kesatuan, maka demokrasi terpimpin itu adalah demokrasi yang bersifat kebangsaan Indonesia atau menurut istilah P.J.M. Presiden demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup

bangsa Indonesia. Demokrasi yang bertentangan dengan dasar hidup bangsa Indonesia adalah bertentangan dengan Pancasila, pendeknya demokrasi terpimpin adalah demokrasi kebangsaan Indonesia, atau dengan perkataan lain, tidak ada tempat dalam Pancasila bagi demokrasi yang tidak berdasarkan kebangsaan apalagi yang anti kebangsaan Indonesia.

Kebangsaan Indonesia bukanlah kebangsaan yang sempit (*Chauvinisme*) tetapi adalah kebangsaan yang tidak boleh bertentangan dengan peri kemanusiaan, sedang perikemanusiaan yang kita anut ialah kemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perikemanusiaan Pancasila bukanlah internasionalisme Komunis sebagai yang dipropagandakan PKI di Indonesia ini.

Demokrasi terpimpin sebagai yang telah ditegaskan oleh Bung Karno hanyalah alat belaka, sedang tujuannya ialah membina masyarakat Adil dan Makmur atau Sosialisme Indonesia. Sebagaimana kita masing-masing telah mengetahui, bahwa Sosialisme Indonesia itu bukanlah hanya suatu *materieele conceptie* sebagai Sosialisme Komunis, tetapi adalah suatu cita-cita hidup dengan nilai-nilai spriritual.

Ditinjau dari sudut ini apakah PKI dapat menerima Pancasila? Jawabannya adalah tegas, yaitu tidak mungkin.

Perhatikanlah umpamanya konstitusi PKI yang terbaru yang disahkan oleh Kongres yang ke VI Tahun 1959. Disitu dengan tegas menyatakan, bahwa dalam tingkat sekarang tujuan PKI berjuang untuk menciptakan *sistem demokrasi rakyat di Indoensia*, sedangkan tujuannya yang lebih lanjut ialah mewujudkan masyarakat Komunis di Indoensia.

Apakah yang dimaksud dengan sistem demokrasi rakyat dan masyarakat Komunis di Indonesia, kiranya bagi kita sudah cukup jelas.

Walaupun nantinya karena terpaksa PKI mengubah konstitusinya yang sekarang dengan mencantumkan dalam konstitusinya menerima Pancasila dan lain-lain ketentuan dalam PENPRES Nomor : 7 Tahun 1959 itu, tetapi pastilah itu hanya merupakan taktik saja.

Sebagaimana kita masing-masing mengetahui bahwa komunis itu adalah internasional sifatnya, yang dalam perjuangannya, tidak jarang mengorbankan kepentingan nasional untuk kepentingan kubu komunis internasional.

Apabila PKI di Indonesia mendahulukan kepentingan nasional daripada kepentingan komunis Internasional, maka pastilah PKI akan menjadi revisionis Tito. Dalam ucapan-ucapan gembong-gembong PKI, revisionis Tito itu dianggap lebih berbahaya dan lebih jahat dari kapitalis sendiri, oleh sebab itu mereka selalu mengutuk Tito. Hal ini adalah membuktikan bahwa PKI tidak mungkin menjadi Liga Komunisnya Tito, atau dengan perkataan lain, PKI di Indonesia ini tidak mungkin mendahulukan kepentingan Nasional daripada kepentingan Komunis Internasional.

12. Tadi telah dikatakan, bahwa salah satu usaha yang penting yang harus kita laksanakan dengan segera ialah menstabilkan politik dalam negeri. Salah satu usaha yang pokok ialah menyingkirkan setiap orang atau golongan yang tidak menerima, atau yang menerima hanya sebahagian, atau yang hanya menerima Pancasila itu di bibir saja. Kita mempunyai keyakinan apabila mereka itu diikuti-sertakan juga, maka pastilah mereka selalu berusaha dan mempergunakan setiap kesempatan untuk menghancurkan Pancasila itu. Selama mereka itu tidak disingkirkan dari gelanggang politik pastilah politik dalam negeri kita tidak akan stabil, dan akibat-akibat ketidak-stabilan politik itu telah sama-sama kita alami. Apabila kita semua menerima Pancasila itu lahir bathin barulah akan tercipta politik yang stabil dalam negara kita yang akan mendekatkan kita pada tujuan kita yaitu Sosialisme Indonesia.
13. Bagi TNI, Pancasila itu sudah merupakan darah dagingnya, dan jiwa Pancasila itu telah dituangkan dalam pedoman hidup TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Tentara Nasional Indonesia adalah tumbuh dan berkembang oleh dan bersama-sama dengan revolusi Nasional yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu dalam mempertahankan dan membela Pancasila, TNI tidak akan mundur dan tidak mengenal kompromi terhadap dan dengan siapapun juga. Adalah sudah menjadi tekad bulat yang tidak dapat ditawar-tawar dari TNI, bahwa TNI tidak gentar menghadapi siapapun juga yang mau merusak, menghancurkan atau memperlak Pancasila itu untuk kepentingan diri atau golongannya.

KEAMANAN

14. Bersamaan dengan usaha menciptakan stabilitas politik dalam negeri, kita harus dengan segera dan sekuat tenaga untuk memulihkan keamanan dalam negeri.

Pemulihan keamanan ini adalah pula salah satu syarat mutlak yang perlu kita selesaikan dengan segera, karena kita yakin bahwa usaha apapun yang akan kita lancarkan untuk mencapai masyarakat Adil dan Makmur, akan sangat seret jalannya apabila keamanan dalam negeri tidak lekas terpulihkan.

15. Dalam usaha memulihkan keamanan dalam negeri, kita harus tetap berpedoman dan berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam Manifesto Politik Republik Indonesia.

Memang, ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam Manifesto Politik itu di bidang keamanan adalah sangat tepat. Dengan berpendirian kepada Manifesto Politik itu, usaha-usaha kita dalam tempo satu tahun ini telah menunjukkan hasil-hasil yang baik di bidang keamanan. Menurut hasil-hasil pengalaman selama satu tahun ini tidak ada alasan untuk mengubah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Manifesto Politik itu di bidang keamanan. Apabila kita pikir dalam-dalam maka dapatlah kita tarik kesimpulan, bahwa hanya orang-orang atau golongan-golongan yang tidak menginginkan lekas pulihnya keamanan inilah yang tidak menyetujui Manifesto Politik itu.

BAB IV SOSIALISME INDONESIA

16. Sebagai telah dicantumkan dalam UUD 1945 dan telah dipertegas dan terperinci dalam Manifesto Politik, bahwa tujuan Negara kita ialah menciptakan masyarakat Adil dan Makmur, atau *Sosialisme Indonesia*. Sosialisme Indonesia itu tidak lain dari pada masyarakat Adil dan Makmur yang dimaksud dalam UUD 1945, sebagai yang telah dipertegas dalam Manifesto Politik.

Sosialisme Indonesia itu bukanlah hanya semata-mata *materieelie consepctie* saja, tetapi adalah suatu cita-cita hidup dalam rangka ideologi Pancasila.

Sosialisme Indonesia itu bukanlah Komunisme. Untuk menjelaskan hal ini marilah kita sebentar mengkonfrontasikan Komunisme dengan Sosialisme Indonesia.

Tujuan langsung dari kaum Komunis ialah penyusunan proletariaat menjadi suatu kelas untuk menggulingkan kekuasaan kaum borjuis dengan perebutan kekuasaan, atau dengan perkataan lain, tujuan kaum Komunis ialah mendirikan diktatur proletariaat sebagai jembatan atau alat untuk mencapai masyarakat Komunis.

Dalam kamus revolusi Indonesia tidak dikenal istilah proletar, karena revolusi Indonesia bukanlah revolusi kaum proletar, tetapi adalah revolusi Nasional, revolusi dari seluruh rakyat Indonesia yang cinta Bangsa (Pada hakekatnya di Indonesia tidaklah ada kaum proletar).

Alat untuk mencapai Sosialisme ala Komunis adalah diktatur proletariaat, sedang alat untuk mencapai Sosialisme Indonesia ialah Demokrasi Terpimpin.

Kaum proletar tidak mempunyai tanah air. Kaum proletar dengan setindak demi setindak bergerak maju ke arah persatuan dunia yang dikuasai oleh kaum proletar Internasional. Bagi kaum Komunis istilah nasional hanyalah merupakan baju belaka (*to distinct themselves in appearance from others*).

Nasional bagi Sosialisme Indonesia adalah sendi, asas dan wadah, diatas dan didalam mana Sosialisme Indonesia itu hidup, jadi bukan sekedar baru saja.

Dalam Sosialisme Indonesia ada kebenaran abadi, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, keadilan dan sebagainya, tetapi dalam Komunis tidak ada kebenaran abadi karena mereka menghapuskan kebenaran abadi itu, ia menghapuskan segala agama dan segala moral.

Banyak lagi perbedaan dan pertentangan antara Sosialisme Indonesia dengan Komunis dan banyak contoh-contoh dan bukti-bukti yang dapat kita kemukakan tentang kebenaran uraian ini, tetapi bukanlah pada tempatnya dikemukakan di sini.

Siapakah lawan-lawan dari Sosialisme ini? Yang tidak dapat menerima Pancasila sudah terang tidak dapat pula menerima Sosialisme Indonesia. Dengan positif dapat kita kemukakan disini ada dua golongan yang menjadi lawan dari Sosialisme Indonesia ini, yaitu :

- a. Golongan anti Komunis yang ekstrim.

b. Golongan Komunis sendiri.

Selain dari golongan itu, maka orang-orang feodal dan kapitalis sudah tentu menjadi lawan dari Sosialisme Indonesia.

Golongan anti Komunis yang ekstrim, karena sudah tidak terhitung lagi dalam percaturan politik, begitu juga orang-orang feodal yang jumlahnya sangat sedikit sekali tidak usah lagi kita bicarakan disini.

Lawan yang potensial dari Sosialisme Indonesia ialah kaum Komunis. Sosialisme Indonesia mengandung unsur-unsur yang prinsipil membahayakan Komunisme, yaitu unsur-unsur Ketuhanan, prikemanusiaan, nilai-nilai individu dan asas-asas kebangsaan. Oleh sebab itu dapat dimengerti mengapa pihak pimpinan PKI belum lama berselang dalam penjelasannya kepada para top kadersnya menggolongkan Sosialisme Indonesia sebagai bentuk revisionisme dan reformisme. Penggolongan demikian adalah sangat penting artinya bagi sikap PKI terhadap Sosialisme Indonesia, karena menurut kaum Komunis, revisionisme dan reformisme adalah musuh yang lebih jahat dari kapitalisme.

17. Sesungguhnya Sosialisme Indonesia itu adalah sangat prinsipil tidak dapat diterima oleh Golongan Komunis. Lebih-lebih sesudah dalam amanat P.J.M. Presiden pada tanggal 17 Agustus 1960 yang baru lalu, dimana ditegaskan, di dalam Sosialisme Indonesia itu Pancasila berada di atas segala-galanya. Pancasila harus menjiwai Sosialisme Indonesia. Jadi bukan sekedar embel-embel saja pada Marxisme sebagai yang dipraktekkan PKI di Indonesia.

Oleh sebab itu dalam menghadapi Sosialisme Indonesia, sikap PKI tidak bisa lain dari memusuhi Sosialisme Indonesia itu, kecuali kalau mereka mau merosotkan dirinya sebagai Komunis Gadungan atau menjadi Revisionis.

Tetapi perlulah kita perhatikan, bahwa sikap memusuhi itu, tidaklah berarti bahwa dalam menghadapi Sosialisme pada masa sekarang PKI akan terang-terangan bersuara dan bertindak demikian. Sebab untuk demikian mereka belum berada dalam kondisi yang mengijinkan.

Golongan Komunis bukanlah golongan yang perjuangannya dikendalikan oleh perasaan, tetapi dikendalikan oleh ratio, oleh penilaian-penilaian yang kritis terhadap segala apa yang mereka hadapi. Mereka mempunyai organisasi yang teratur rapi dan mempunyai kaders yang bersemangat baja dan mempunyai taktik yang lihai.

Pada saat sekarang, pastilah mereka menerima Sosialisme Indonesia itu dalam mulutnya, tetapi pastilah itu hanya sebagai taktik belaka, untuk memperoleh waktu menyusun kekuatan dan kalau sudah merasa cukup kuat akan menghancurkan Sosialisme Indonesia itu dengan tidak kepalang tanggung.

18. Dari uraian singkat di atas jelaslah siapa-siapa atau golongan-golongan mana yang menjadi lawan-lawan dari Sosialisme Indonesia itu. Kalau kita ingin agar Sosialisme Indonesia itu terwujud dengan segera dalam masyarakat kita, maka adalah suatu kewajiban bagi kita semua untuk tidak memberikan kesempatan kepada lawan-lawan Sosialisme Indonesia itu dalam bentuk dan corak apapun juga.

Sosialisme Indonesia itu, tidaklah hanya dalam perumusan saja, tetapi harus diwujudkan dengan segera.

BAB V

KESIMPULAN DAN PENUTUP

19. Dari pokok pikiran yang telah saya uraikan tadi secara ringkas, maka dapatlah ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

a. Salah satu usaha pokok yang harus kita laksanakan dengan segera ialah menstabilkan politik dalam negeri, karena kita yakin, tanpa politik dalam negeri yang stabil, kita tidak mungkin mempunyai Pemerintah yang stabil, sedang Pemerintah yang stabil adalah landasan struktural untuk merealisasikan tujuan revolusi kita.

Dalam usaha menstabilkan politik dalam negeri, kita harus berpegang teguh pada ideologi Negara kita, yaitu Pancasila. Setiap orang atau golongan yang tidak setuju dengan Pancasila, atau yang hanya menerima Pancasila itu di bibir saja, harus disingkirkan dari gelanggang politik dalam negeri kita.

- b. Bersamaan dengan usaha menstabilkan politik dalam negeri, kita harus dengan sekuat tenaga pula memulihkan keamanan, kita harus tetap berpedoman kepada Manifesto Politik, karena persoalan-persoalan pokok di bidang keamanan, telah digariskan secara tepat dalam Manifesto Politik itu.
Kepada orang-orang atau golongan-golongan yang mengadakan usaha-usaha yang bagaimanapun bentuk dan coraknya agar pemulihan keamanan itu menyimpang dari garis-garis Manifesto Politik harus ditindak secara tegas.
 - c. Dalam rangka usaha-usaha untuk mencapai masyarakat Adil dan Makmur, yaitu Sosialisme Indonesia, jangan diberikan kesempatan kepada orang-orang atau golongan-golongan yang tidak menyetujui Sosialisme Indonesia itu, atau yang hanya menerima Sosialisme Indonesia itu di bibir saja, karena kita yakin, bahwa mereka akan mempergunakan setiap kesempatan untuk menggagalkan terwujudnya Sosialisme Indonesia itu atau mengaburkan Sosialisme Indonesia itu.
 - d. Berdasarkan ajaran, sifat dan taktik PKI, begitu juga berdasarkan bukti-bukti yang ada pada kita, maka PKI adalah salah satu golongan yang di dalam bathinnya tidak menerima Pancasila, tetapi di bibir mereka menerima Pancasila sebagai taktik, untuk memperoleh waktu menyusun kekuatan dan akhirnya akan menghancurkan Pancasila itu. Mereka adalah juga selalu berusaha agar pemulihan keamanan menyimpang dari Manifesto Politik.
Lawan yang potentiil dari Sosialisme Indonesia adalah juga PKI, oleh sebab itu mereka harus disingkirkan.
20. Demikianlah pokok-pokok pikiran ini, mudah-mudahan dapat kita pertimbangkan bersama.
Terima kasih.

PANGLIMA DAERAH MILITER X
LAMBUNG MANGKURAT
SELAKU
PENGUASA PERANG DAERAH KALIMANTAN SELATAN

Ttd.

H. HASSAN BASRY
KOLONEL TNI NRP. 17594

Catatan : * disesuaikan
Dengan ejaan baru

LEMBARAN
PENGUASA PERANG TERTINGGI

Tahun ke I

No. 70

P E N G U M U M A N

Pada hari Senen tanggal 12 September 1960 Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Perang Tertinggi telah mengadakan konperensi di Istana Negara Djakarta dengan semua Penguasa dalam Keadaan Bahaja di Daerah-daerah, jang dihadiri oleh semua Menteri Kabinet Kerdja, para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, para Pengawas Kedjaksaan dan para Kepala Kepolisian Komisariat diseluruh Indonesia.

Dalam konperensi tersebut Presiden mendjelaskan kebidjaksanaan politik Pemerintah secara luas dan mendalam untuk menjelamatkan djalannja Revolusi Nasional Indonesia, jang dapat dibagi dalam 5 persoalan, jaitu :

- a. tentang djangka waktu Revolusi.
- b. tentang kebulatan pimpinan Revolusi.
- c. tentang tudjuan Revolusi.
- d. tentang mempersatukan tenaga-tenaga Revolusioner dan
- e. tentang pengamanan djalannja Revolusi.

Djangka waktu revolusi

Benar revolusi physik jang meletus pada 17 Agustus 1945, telah diachiri dengan diakuinja kedaulatan Indonesia oleh sebagian besar Negara-negara didunia pada achir tahun 1949 dan tahun 1950, tetapi Revolusi masih berkobar terus sampai dewasa ini, dan kenyataan ini dibuktikan setjara historis dan ilmiah maupun fakta-fakta. Djadi Revolusi Indonesia benar-benar belum selesai. Dalam hubungan ini Presiden memperingatkan bahwa Revolusi-revolusi di Perancis, di Soviet dan Tiongkok pun berlangsung beberapa puluh tahun.

Begitu pula Revolusi Nasional kita akan meliputi djangka waktu pandjang, sedang dalam djalannja Revolusi itu terdapat beberapa fase, sebagaimana telah dijelaskan tiap-tiap tahun dalam Amanat Presiden pada upatjara-upatjara peringatan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, terlebih-lebih pada tahun-tahun 1957 sampai 1960.

Pimpinan revolusi

Dengan memperhitungkan hasil-hasil yang telah tertjapai semendjak bangsa Indonesia ber-negara sendiri, lambat laun timbul kejakinan, bahwa Revolusi Nasional dapat berjalan lantjar dan diselesaikan sebaik-baiknya, djika pimpinan Negara dan pimpinan Revolusi dipusatkan dan dibulatkan disatu tangan.

Tjita-tjita itu dapatlah terjapai setelah dengan Dekrit Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang pada tanggal 5 Djuli 1959 Undang-undang Dasar 1945 dinjatakan berlaku kembali, dengan meninggalkan UUDS 1950 jang bersifat liberal, guna dipakai selandjutnya dalam Negara Republik Indonesia untuk menjelesaikan Revolusi Nasional kita di bidang-bidang politis (Irian Barat, Penjempurnaan organisasi pemerintahan dsb.), keamanan sosial ekonomis (nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia, larangan bagi usaha perdagangan ketjil dan etjeran yang bersifat asing diluar ibukota Daerah Tingkat I dan II serta keresidenan dsb.) dan lain-lain.

Tudjuan revolusi

Tudjuan Revolusi Nasional kita ialah untuk memenuhi amanat penderitaan Rakjat.

Dimasa pendjadjahan j.l. amanat penderitaan rakjat itu dinamakan P-5, jaitu pangan, pakaian, perumahan, pengetahuan dan pergaulan.

Tjita-tjita tersebut jang diperdjoangkan oleh semua partai dan pemimpin rakjat, baik dimasa pendjadjahan dulu, maupun dimasa kemerdekaan sekarang, kini dinamakan masjarakat adil dan makmur atau masjarakat sosialis Indonesia.

Istilah itu diformulir dalam sila ke-5 dari Pantjasila sebagai "keadilan sosial", jang bersama-sama dengan 4 sila lainnya hendak menudju ke masjarakat adil dan makmur.

Pantjasila dapat dipadatkan mendjadi Trisila, jaitu Ketuhanan, Sosionasionalisme dan Sosio-demokrasi, jang dapat dipersingkat lagi mendjadi Ekasila, ialah Gotong Rojong.

Tudjuan Revolusi nasional kita telah didjelaskan dalam Manifesto Politik pada tanggal 17 Agustus 1959, jang dapat disingkat dengan Usdek, jang telah diakui sebagai garis besar

haluan Negara oleh Kabinet Kerdja, Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perantjang Nasional, dan jang akan disampaikan nanti oleh Presiden Soekarno kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dalam sidangnja di Bandung mulai pada hari Pahlawan tanggal 10 Nopember 1960, untuk ditetapkan pula sebagai garis besar haluan Negara.

Mempersatukan tenaga revolusioner

Semua aliran (Islam, Kristen, Hindu Bali, Katolik, Nasionalis, Sosial demokrat, komunis dsb.) dapat tempat dibawah Pantjasila.

Kita mengetahui bahwa PKI menjetudjui Pantjasila.

Menurut pandangan Presiden, berdasarkan uraian di atas PKI tidak anti agama, tetapi membebaskan orang hendak memeluk agama atau tidak.

Maka dari itu untuk mentjapai masjarakat adil dan makmur berlandaskan Manipol dan Usdek semua tenaga revolusioner harus dipersatukan dan dikerahkan setjara gotong royong, sesuai dengan jiwa asli Indonesia, dengan melenjapkan segala pengertian asing seperti liberalisme, oposisi dsb.

Pengamanan djalannja revolusi

Untuk mengamankan djalannja Revolusi Nasional kita maka perlu diambil pelbagai tindakan terutama mempersatukan tenaga revolusioner dan membasmi segala kekuatan kontra revolusioner.

Dalam hubungan itu telah dikeluarkan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 tentang Sjarat-sjarat penjerderhanaan kepartaian.

Berdasarkan Pasal 9 Penetapan Presiden tersebut kemudian diputuskan dengan Keputusan Presiden No. 200 dan 201 tahun 1960 membubarkan partai Masjumi dan PSI.

Dapat dimengerti bahwa Penguasa-penguasa di daerah untuk mengamankan pelaksanaan putusan-putusan Pemerintah seperti yang tersebut di atas mengambil tindakan-tindakan jang dianggap perlu untuk kepentingan daerahnya masing-masing, tetapi dalam hal demikian tanpa menimbulkan kesan seolah-olah terdapat perbedaan dalam kebidjaksanaan antara pusat dan daerah.

Mengingat faset-faset nasional maupun internasional dari tindakan-tindakan termaksud, maka Penguasa Daerah dianggap bidjaksana apabila dalam tindakannya mengemukakan persoalannya dulu kepada Penguasa Pusat, sebelum melakukan tindakan itu.

Dengan saling pengertian jang baik antara Penguasa Pusat dan Penguasa Daerah maka kelantjaran dalam djalannja Revolusi Nasional kita pasti akan terpelihara dengan baik.

Sesudah Presiden/Peperiti memberikan amanat jang pokok-pokoknja diuraikan diatas, maka Menteri Luar Negeri memberikan pemandangan tentang faktor-faktor diluar negeri jang dapat membantu atau membahayakan djalannja Revolusi Nasional kita.

Dalam pada itu Menteri Luar Negeri memperingatkan bahwa karena beberapa istilah sadsja kita sejak semula ditentang oleh beberapa Negara lain, diantaranya :

- karena perkataan "Revolusi", jang berisikan maksud merubah "vested interest" beberapa Negara tertentu;
- "politik bebas dan aktif", karena beberapa Negara sudah berfihak pada blok Timur atau blok Barat;
- "demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan masjarakat adil dan makmur" dianggap berbahaya oleh mereka yang menganut faham-faham liberal.

Diakui bahwa Republik Indonesia telah mendapat bantuan dari beberapa Negara lain, tetapi kita mengerti bahwa bantuan itu tidak diberikan atas pertimbangan-pertimbangan altruistis, humanistis dsb., tetapi berdasarkan kepentingan Negara itu sendiri, baik dilihat dari sudut nasional maupun internasional.

Kita senantiasa berusaha memelihara hubungan baik dengan negeri-negeri lain, dan dalam pada itu dikemukakan pendjelasan beberapa persoalan jang "serieus" dengan djalannja perundingan.

Sekalipun demikian kita harus tetap waspada menghadapi usaha-usaha asing jang merugikan kedudukan Republik Indonesia, a.l. dengan melantjarkan serangan terhadap :

- Pimpinan Revolusi kita,
- Usdek dan Manipol,
- Perekonomian Nasional kita dan
- Angkatan Perang Republik Indonesia.

Pimpinan revolusi

Sementara pihak berusaha melenjakkan Pimpinan Tunggal Revolusi dan Negara kita, yang didasarkan prinsip demokrasi terpimpin, dengan mengintrodusir lagi demokrasi liberal.

Dikalangan mereka pembubaran Masjumi dan PSI tidak menimbulkan reaksi yang berarti, akan tetapi sebaliknya larangan kegiatan PKI disementara daerah dibesar-besarkan dan digambarkan seolah-olah Pimpinan revolusi menjadi sasaran di luar negeri bukan karena memegang pimpinan saja, tetapi terutama karena pemimpin besar kita mengeluarkan ide-ide baru yang dapat mempengaruhi dunia.

Usdek & Manipol

Di luar negeri diumumkan pula bahwa Usdek dan Manipol membuktikan ketjenderungan Indonesia kepada salah satu blok, padahal dalam hal itu kita berdiri atas ideologi nasional kita.

Malahan dengan berpegang pada Usdek dan Manipol kita hendak berhitung pula mengatasi pertentangan-pertentangan diantara dua blok raksasa di dunia ini.

Perekonomian nasional

Untuk menghadapi tindakan-tindakan dari luar negeri yang merugikan kita melewati perekonomian nasional kita, maka telah diadakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia dan larangan bagi usaha perdagangan ketjil dan etjeran yang bersifat asing diluar ibukota daerah tingkat I dan II serta keresidenan.

Angkatan perang

Untuk melemahkan kekuatan kita selanjutnya diusahakan adanya kesan seolah-olah ada pertentangan antara Pimpinan Angkatan Perang kita dengan bawahannya dan antara perwira-perwirannya.

Menteri Luar Negeri akhirnya mengemukakan bahwa kesan sementara Negara asing pada permulaan Revolusi kita yaitu bahwa Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hidup (levensvatbaar), kini ternyata tidak benar.

Sekalipun dengan mengalami pelbagai kesulitan, Republik Indonesia terbukti mempunyai kekuatan hidup, malahan sekarang dapat mempengaruhi sementara Negara dan membantu Negara lain dengan konsepsi politis, sosial ekonomis.

Untuk melanjutkan kedudukan baik Republik Indonesia di dunia internasional, maka kita harus mengkonsolidir pimpinan, tujuan dan tenaga-tenaga Revolusi Nasional kita.

Kesempatan yang kemudian diberikan untuk mengadakan pertanjan dan pertimbangan-pertimbangan, dipergunakan oleh para Penguasa Keadaan Bahaya dan Daerah-daerah Djakarta Raya, Bali, Kalimantan Barat, Djawa Timur/Surabaya, Sumatera Selatan (yang diutjapkan oleh Gubernur), Sulawesi Selatan/Tenggara, Maluku, Irian Barat, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Utara serta Deputy wilayah Indonesia Timur, yang dijawab setjukupnja oleh Presiden/Peperti.

Menteri Pertama dan Menteri Keamanan Nasional sebagai Deputy-deputy Peperti selanjutnya diberikan waktu pula untuk menjampaikan sambutannya.

Menteri pertama sependapat dengan Presiden bahwa Revolusi Nasional kita belum selesai, dan memperingatkan akan kekurangan-kekurangan misalnja dibidang administrasi Negara, disiplin aparaturnegara, ekonomi/keuangan dll.

Konperensi ini telah menghasilkan clearing dan persesuaian pandangan diantara Peperti dan para Penguasa Keadaan Bahaya di Daerah, yang dapat dijadikan landasan yang kuat untuk tindakan-tindakan selanjutnya, terutama untuk kepentingan jalannya Revolusi Nasional kita, termasuk pengamanan pelaksanaan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959.

Pengertian baik antara Peperti dan para Penguasa Keadaan Bahaya di daerah harus dipelihara sebaik-baiknya sehari-hari j.a.d. untuk menjaga kewibawaan Pemerintah Republik Indonesia baik di daerah-daerah, maupun pada nasional dan internasional. Dengan perasaan lega Menteri Pertama menjambut berakhirnya pertemuan ini.

Menteri Keamanan Nasional merasa puas tentang hasil konperensi ini, yaitu disatu pihak adanya pendjelasan luas dan mendalam dari Presiden/Peperti mengenai kebidaksanaan politik Pemerintah dan dilalin pihak adanya kesediaan para Penguasa Keadaan Bahaya di daerah serta kesediannya untuk melaksanakan kebidaksanaan termaksud, sesuai dengan sikap dan tradisi anggota TNI yang berjiwa 17 Agustus 1945.

Selanjutnya MKN menutup sambutannya dengan pernyataan, bahwa bagaimanapun juga dengan keputusan dari Pemimpin Besar Revolusi kita ini, kita semua akan melaksanakannya setajara loyaal.

Presiden/Peperti dalam kata penutup menyatakan bahwa dalam Konperensi ini ternyata pada dasarnya tidak ada perselisihan antara Presiden dengan petugas-petugas di daerah, bahkan adanya persesuaian pendapat yang bulat antara Pemerintah dan segenap Penguasa Militer dan Sipil di daerah, serta kesetiaan yang tegas dari para penguasa tersebut terhadap Presiden/Panglima Tertinggi.

Pada tanggal 26 September 1960 Presiden akan berangkat ke luar negeri untuk menghadiri persidangan umum PBB sebagai utusan Rakjat Indonesia.

Berhasil atau tidaknya misi Presiden di PBB sebagian tergantung pada gengsi Presiden pribadi dalam membela kepentingan rakjat Indonesia, dan sebagian besar pada dukungan seluruh Bangsa kita serta ketaatan segenap aparaturnya Negara kita.

Clearing yang tertjapai dalam konperensi ini telah mengeratkan saling pengertian antara Presiden dengan Pemerintah, Angkatan Perang dan segenap Alat-alat Negara lainnya, dan merupakan demonstrasi yang dengan tegas melenjapkan harapan sementara pihak di luar negeri bahwa Presiden Soekarno akan menemui kegagalan dalam kebijaksanaan politiknya.

Presiden Soekarno yakin bahwa dengan bantuan Tuhan Yang Maha Esa, dengan persatuan yang bulat antara Presiden dan segenap alat Negara serta dukungan segenap rakjat yang telah didapat oleh Kepala Negara sebagai Duta Rakjat Indonesia, posisi Presiden dalam memperjuangkan cita-cita Bangsa Indonesia dalam forum internasional pasti akan diperkuat.

Dengan amat terharu Presiden mengutarakan terima kasih atas segala dukungan dari para peserta konperensi yang membawakan suara Rakjat seluruh Indonesia.

Djakarta, 12 sdeptember 1960.
Pgs. KEPALA STAF
PENGUASA PERANG TERTINGGI
a.p.b.
KEPALA SEKSI SEKERTARIAT

Mr. SUTJIPTO
Let. Kol. Ckh. Nrp. 13653

Lampiran 12

KEPUTUSAN PRESIDEN / PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA /
MANDATARIS MPRS / PEMIMPIN BESAR REVOLUSI

No. 1/3/1966

MENIMBANG :

1. Bahwa pada waktu achir-achir ini makin terasa kembali aksi-aksi gelap dilakukan oleh sisa-sisa kekuatan kontra-revolusi "Gerakan 30 September"/Partai Komunis Indonesia;
2. Bahwa aksi-aksi gelap itu berupa penjebaran fitnah hasutan desas-desus adu domba dan usaha penjusunan kekuatan bersendjata jang mengakibatkan terganggunja kembali keamanan Rakjat dan Ketertiban;
3. Bahwa aksi-aksi gelap tersebut njata-njata membahjakan djalannja Revolusi pada umumnya dan mengganggu penjelesaian tingkat Revolusi dewasa ini, khususnya penanggulangan kesulitan ekonomi dan pengganjangan projek Nekolim "Malaysia";
4. Bahwa demi tetap terkonsolidasinja persatuan dan kesatuan segenap kekuatan prograsip-revolusioner rakjat Indonesia dan demi pengamanan djalannja Revolusi Indonesia jang anti feodalisme, anti Kapitalisme, anti Nekolim dan menuju terwujudnja Masjarakat Adil-Makmur berdasarkan Pantjasila, Masjarakat Sosialis Indonesia, perlu mengambil tindakan tjepat, tepat dan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia;

MEMPERHATIKAN :

Hasil-hasi pemeriksaan serta putusan Mahkamah Militer Luar Biasa terhadap tokoh-tokoh "Gerakan 30 September"/Partai Komunis Indonesia;

MENGINGAT :

Surat Perintah Presiden/panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi tanggal 11 Maret 1966;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

Dengan berpegang teguh pada LIMA AZIMAT REVOLUSI INDONESIA :

- Pertama : Membubarkan Partai Komunis Indonesia termasuk bagian-bagian Organisasinja dari tingkat Pusat sampai ke daerah beserta semua Organisasi jang se-asas/berlindung/bernaung di bawahnja;
- Kedua : Menjatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi jang terlarang diseluruh wilayah Kekuasaan Negara Republik Indonesia;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 12 Maret 1966.

PRESIDEN / PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN BERSEDJATA REPUBLIK INDONESIA /
MANDATARIS MPRS / PEMIMPIN BESAR REVOLUSI

Atas nama beliau

SOEHARTO
LETNAN DJENDERAL TNI

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN / PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN BERSENDIATA REPUBLIK INDONESIA / PANGLIMA
BESAR KOMANDO GANJANG MALAYSIA

NO. 85/KOGAM/1966.-

A. BAGIAN ORGANISASI PKI DARI TINGKAT PUSAT SAMPAI KEDAERAH IALAH :

1. C.C.P.K.I. (Comite Central) Pusat.
2. C.D.B.P.K.I. (Comite Daerah Besar) Daswati I.
3. C.K.P.K.I. (Comite Kota) Kotapradja.
4. C.S.P.K.I. (Comite Seksi) Daswati II.
5. C.S.S.P.K.I. (Comite Sub Seksi) Ketjamatan Daswati III.
6. C.R.P.K.I. (Comite Resort) Desa.

B. ORGANISASI JANG SEAZAZ/BERLINDUNG/BERNAUNG DIBAWAH P.K.I.

1. B.T.I. (Barisan Tani Indonesia)
2. S.O.B.S.I. (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) :
 - 1) SARBUPRI (Serikat Buruh Perkebunan R.I.)
 - 2) SBKA (Serikat Buruh Kereta Api)
 - 3) SB POSTEL (Serikat Buruh Pos dan Telekomunikasi)
 - 4) SBLG (Serikat Buruh Listrik dan Gas)
 - 5) SARBUKSI (Serikat Buruh Kehutanan Seluruh Indonesia)
 - 6) SEBBESTI (Serikat Buruh Beras & Tapioka Seluruh Indonesia)
 - 7) SBKB (Serikat Buruh Kendaraan Bermotor)
 - 8) SEPDA (Serikat Buruh Pegawai Daerah)
 - 9) SBPU (Serikat Buruh Pekerjaan Umum)
 - 10) SBKP (Serikat Buruh Kementerian Pertahanan)
 - 11) SB KEPENDJARAN (Serikat Buruh Kependjarian)
 - 12) SB RRI/TV (Serikat Buruh RRI/TV)
 - 13) SEBPERBU (Serikat Buruh Departemen Perburuhan)
 - 14) SBHRT (Serikat Buruh Hotel dan Restoran)
 - 15) SBMM (Serikat Buruh Makanan dan Minuman)
 - 16) SBKK (Serikat Buruh Kulit dan Karet)
 - 17) SB Tekstil (Serikat buruh Tekstil)
 - 18) SERBAUD (Serikat Buruh angkatan Udara)
 - 19) SERBUM (Serikat Buruh Minyak)
 - 20) SBPP (Serikat Buruh Pelabuhan dan Parairan)
 - 21) SBG (Serikat Buruh Gula)
 - 22) SBK (Serikat Buruh Kesehatan)
 - 23) SBK (Serikat Buruh Kehewananan)
 - 24) SBP (Serikat Buruh Pegadain – SOBSI)
 - 25) SBI (Serikat Buruh Imigrasi)
 - 26) SBB (Serikat Buruh Bemo)
 - 27) SBTI (Serikat Buruh Tambang Indonesia)
 - 28) SBIM (Serikat Buruh Industri Metal)
 - 29) SBRI (Serikat Buruh Rokok Indonesia)
 - 30) SBPI (Serikat Buruh Perjetakan Indonesia)
 - 31) SBBT (Serikat Buruh Bea dan Tjukai)
 - 32) SBPK (Serikat buruh Pabrik Kina)
 - 33) SBLR (Serikat Buruh Lampu dan Radio)
 - 34) SBTH (Serikat Buruh Taman Hewan)
 - 35) SBIMM (Serikat Buruh Industri Makanan dan Minuman)
 - 36) SBSKK (Serikat Buruh Sepatu Kulit dan Karet)
 - 37) SBGSN (Serikat Buruh Perusahaan Garam dan Soda Negara)
 - 38) SBIRBA (Serikat Buruh Industri Ringan Bangunan dan Angkutan)
 - 39) SBPK PADALARANG (Serikat Buruh Pabrik Kertas Padalarang)
 - 40) SB BAMA (Serikat Buruh Jajasan Bahan Makanan)
 - 41) SB PERTANI (Serikat Buruh PN PERTANI)
 - 42) SB GOODYEAR (serikat Buruh Goodyear)

- 43) SB PERTANIAN (Serikat Buruh Pertanian)
- 44) SB PERKAPURAN (Serikat Buruh Perkapuran)
- 45) SB PERDAGANGAN (Serikat Buruh Perdagangan)
- 46) SB PERINDUSTRIAN (Serikat Buruh Perindustrian)
- 47) SB TEKSTIL PAKAIAN (Serikat Buruh Tekstil dan Pakaian)
- 48) SB TANI DAN NELAJAN (Serikat Buruh Tani dan Nelajan)
- 49) SARBUFIS (Serikat Buruh Film dan Senidrama)
- 50) SABUMIKSI (Serikat Buruh Minyak Kelapa Seluruh Indonesia)
- 51) PBB (Persatuan Pengendara Betja)
- 52) PPT (Persatuan Pekerdja Toko)
- 53) PGTI (Persatuan Guru Tehnik Indonesia)
- 54) PERBUM (Persatuan Buruh Minyak)
- 55) PERPEKI (Persatuan Pekerdja Kendaraan Indonesia)
- 56) SS PENDIDIKAN (Serikat Pekerdja Pendidikan)
- 57) RKS PEGAWAI NEGERI (Rapat Kerdjasama Serikat Buruh/ Serikat Sekerdja Pegawai Negeri)
- 58) SBLB (Serikat Buruh Lembaga Biologi)
- 59) SBBPSS (Serikat Buruh Biro Pusat Statistik dan Sensus)
- 60) SBPB (Serikat Buruh Pengusaha Bermotor)
- 61) KSOBM (Kerdja Sama Organisasi Buruh Minjak)
- 62) GSBI (Gabungan Serikat buruh Indonesia)
3. Pemuda Rakjat
4. CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia)
5. GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia)
6. LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakjat)
7. H.S.I. (Himpunan Sardjana Indonesia)
8. PGRI NON VAK CENTRAL (Persatuan Guru Republik Indonesia)
9. BAPERKI (Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia) termasuk didalamnya :
 - 1) PERHIMI (Perhimpunan Mahasiswa Indonesia)
 - 2) PPI (Permusjawaratan Pemuda Indonesia)
 - 3) Universitas Res Publica
10. IPPI (Ikatan Pemuda Peladjar Indonesia Pimpinan ROBBY SOMULANG)
11. KOMUNIS-MUDA
12. HARAPAN- MUDA
13. INDONESIA MUDA
14. PERTUGRI (Persatuan Tukang Gunting Rambut Indonesia)
15. API POSTEL (Angkatan Pemuda Indonesia Pos, Telegram dan Telepon)
16. BBM (Barisan Berani Mati)
17. AMPI (Angkatan Muda Pembangunan Indonesia)
18. TAMAN KANAK-KANAK "MELATI"
19. PANTI PENGETAHUAN RAKJAT
20. BALAI PENGETAHUAN RAKJAT
21. MIMBAR PENGETAHUAN RAKJAT
22. ICHWANUL MUSLIMIN
23. LPN (Lembaga Pendidikan Nasional)
24. AISA
 - 1) UNIVERSITAS "BACHTARUDIN"
 - 2) UNIVERSITAS PERTANIAN "EGOM"
 - 3) INST. PENDIDIKAN "HARJONO"
 - 4) IKIP "KUDJANG"
 - 5) UNIVERSITAS RAKJAT
 - 6) UNIVERSITAS KESENIAN RAKJAT
 - 7) AKADEMI JOURNALISTIK "DR. RIVAI"
 - 8) AKADEMI SENI "KORNEL SIMANDJUNTAK"
 - 9) IKIP "DR. TJIPTOMANGUNKUSUMO"
 - 10) UNIVERSITAS KOTAPRADJA SOLO
 - 11) LESRI (Lembaga Seni dan Budaja R.I.)
 - 12) AKADEMI TEKSTIL SOTEXI
 - 13) MAGUNA (Madjelis Gabungan Usaha Nasional)
 - 14) SEKOLAH LANJUTAN LEMBAGA PENDIDIKAN NASIONAL

- 15) SEKOLAH DASAR "MELATI"
- 16) UNIVERSITAS RAKJAT INDONESIA
- 17) AKADEMI TEHNIK "IR. ANWARI"
- 18) AKADEMI SASTRA "MULTATULI"
- 19) AKADEMI ILMU EKONOMI "DR. RATULANGI"
- 20) AKADEMI ILMU SEDJARAH "RONGGOWARSITO"
- 21) AKADEMI DJURNALISTIK "RW. SUPRATMAN"
- 22) AKADEMI DJURNALISTIK DAN PUBLISISTIK "TARUNA PATRIA" (MALANG)
- 23) G.E.R.P.I. (VETARAN)
- 24) A.P.P.I. (ANGKATAN PEMUDA PEMBANGUNAN INDONESIA)
- 25) P.P.D.I. (PERSATUAN PAMONG DESA INDONESIA)

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 31 Mei 1966
A.N. PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA
REPUBLIK INDONESIA/PAGLIMA BESAR
KOMANDO GANJANG MALAYSIA

KEPALA STAF
Ttd.

SOEHARTO
LETNAN DJENDRAL TNI